KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-1 Di Surabaya Pada Tanggal 13 Rabiuts Tsani 1345 H. / 21 Oktober 1926 M.

•	TT	1	-	•	-
	H11	riim	Bern	127h	a b
4.	A L U	nuu	Dein	lazı	av

- 2. Pendapat Tokoh (Imam) yang Boleh Difatwakan
 - 3. Memberi Keputusan dengan Pendapat Kedua
 - 4. Shalat Sunat Sebelum Shalat Jum'at
 - 5. Zakat untuk Pembangunan Mesjid
 - 6. Gono-gini (Hasil Usaha Suami-istri)
 - 7. Pengertian 'Rusydan"
 - 8. Orang Fasik Menjadi Wali Nikah
- 9. Pemandu Khotbah Membaca Shalawat dengan Suara Keras dan Panjang
 - 10. Menterjemahkan Khotbah Jum'at Selain Rukunnya
 - 11. Membaca Shalawat atau *Taradhdhi* dengan Suara Keras
- 12. Mengucapkan Insya Allah Ketika Khotib Mengucapkan Ittaqullah 13. Memperbaharui Nisan dalam Kuburan Umum
 - 14. Memagari Kuburan dengan Tembok dalam Tanah Milik Sendiri 15. Menghias Kuburan dengan Sutera
 - 16. Menggambar Binatang dengan Berbentuk Jisim yang Sempurna
 - 17. Pemberian Kepada Anak dengan Tidak Sepengetahuan Anak yang Lain
 - 18. Keluarga Mayit Menyediakan Makanan Kepada Penta'ziyah 19. Sedekah Kepada Mayit
- 20. Istri Menjadi Pelayan di Rumah Suaminya dengan Tidak Pakai Upah 21. Alat-alat Orkes untuk Hiburan
 - 22. Alat-alat yang Dibunyikan dengan Tangan
 - 23. Permainan untuk Melatih Otak Seperti Catur
 - 24. Gerak Badan Seperti Angkat Besi
 - 25. Pengertian "Lahwi" dan 'Laghwi"
 - 26. Tari-tarian dengan Lenggak-lenggok
 - 27. Mengkhitankan Anak Setelah Beberapa Hari dari Hari Kelahirannya

1. Hukum Bermazhab

- S. Wajibkah bagi umat Islam mengikuti salah satu dari empat mazhab?
- J. Pada masa sekarang, wajib bagi umat Islam mengikuti salah satu dari empat mazhab yang tersohor dan aliran mazhabnya telah dikodifikasikan (mudawwan). Empat mazhab itu ialah:
- a. Mazhab Hanafi Yaitu mazhab Imam Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit, (lahir di Kufah pada tahun 80 H. dan meninggal pada tahun 150 H.).
- b. Mazhab Maliki Yaitu mazhab Imam Malik bin Anas bin Malik, (lahir di Madinah pada tahun 90 H. dan meninggal pada tahun 179 H.).
- c. Mazhab Syafi'i Yaitu mazhab Imam Abu Abdillah bin Idris bin Syafi'i, (lahir di Gazza pada tahun 150 H. dan meninggal pada tahun 204 H.).
- d. Mazhab Hanbali Yaitu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, (lahir di Marwaz pada tahun 164 H. dan meninggal pada tahun 241 H.).

Keterangan, dari kitab:

1. al-Mizan al-Kubra 1

كَانَ سَيِّدِيْ عَلِيُّ الْحُوَّاصُ رَحِمَهُ اللهُ إِذَا سَأَلَهُ إِنْسَانُ عَنِ الْتَقَيَّدِ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنِ اْلآنَ هَلْ هُوَ وَاجِبُ أَوْ لاَ. يَقُولُ لَهُ يَجِبُ عَلَيْكَ التَّقَيُّدُ بِمَذْهَبٍ مَا دُمْتَ لَمْ تَصِلْ إِلَى شُهُوْدِ عَيْنِ الشَّرِيْعَةِ الْأُولَى خَوْفًا مِنَ الْوُقُوعِ فِي الضَّلاَلِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ الْيَوْمَ.

Jika tuanku yang mulia Ali al-Khawash r.h. ditanya oleh seseorang tentang mengikuti mazhab tertentu sekarang ini, apakah wajib atau tidak? Beliau berkata: "Anda harus mengikuti suatu mazhab selama Anda belum sampai mengetahui inti agama, karena khawatir terjatuh pada kesesatan". Dan begitulah yang harus diamalkan oleh orang zaman sekarang ini.

2. Al-Fatawa al-Kubra²

وَبِأَنَّ التَّقْلِيْدَ مُتَعَيَّنُ لِلأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ. وَقَالَ لِأَنَّ مَذَاهِبَهُمْ اِنْتَشَرَتْ حَتَّى ظَهَرَ تَقْيِيْدُ مُطْلَقِهَا وَتَخْصِيْصُ عَامِّهَا بِخِلاَفِ غَيْرِهِمْ.

Abdul Wahhab Al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, (Mesir: Maktabah Musthafa al-Halabi, t.th), Cet I, Juz 1, h. 34.

Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M), Jilid IV, h. 307.

Sesungguhnya bertaklid (mengikuti suatu mazhab) itu tertentu kepada imam yang empat (Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hanbali), karena mazhab-mazhab mereka telah tersebar luas sehingga nampak jelas pembatasan hukum yang bersifat mutlak dan pengkhususan hukum yang bersifat umum, berbeda dengan mazhab-mazhab yang lain.

3. Sullam al-Wushul3

قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ". وَلَمَّا انْدَرَسَتْ الْمَذَاهِبُ الْحُقَّةُ بِانْقِرَاضِ أَثِمَّتِهَا إِلاَّ الْمَذَاهِبَ الْأَرْبَعَةَ الَّتِي اِنْتَشَرَتْ أَثْبَاعُهَا كَانَ اِتِّبَاعُها اِتَّبَاعًا لِلسَّوَادِ الْأَعْظِمِ وَالْحُرُوجُ عَنْهَا خُرُوجًا عَنِ السَّوَادِ الْأَعْظِمِ.

Nabi Saw. bersabda: "Ikutilah mayoritas (umat Islam)". Dan ketika mazhabmazhab yang benar telah tiada, dengan wafatnya para imamnya, kecuali empat mazhab yang pengikutnya tersebar luas, maka mengikutinya berarti mengikuti mayoritas, dan keluar dari mazhab empat tersebut berarti keluar dari mayoritas.

2. Pendapat Tokoh (Imam) yang Boleh Difatwakan

- S. Pendapat siapakah yang dapat/boleh dipergunakan untuk berfatwa di antara pendapat-pendapat yang berbeda dari ulama Syafi tyyah?
- J. Yang boleh/dapat dipergunakan berfatwa ialah:
 - a.Pendapat yang terdapat kata sepakat antara Imam Nawawi dan Imam Rafii.
 - b. Pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi saja.
 - c. Pendapat yang dipilih oleh Imam Rafi'i saja.
 - d.Pendapat yang disokong oleh ulama terbanyak.
 - e. Pendapat ulama yang terpandai.
 - f. Pendapat ulama yang paling wira 1.

إِنَّ أُمَّتِي لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَّةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْإِخْتِلاَفَ فَعَلَيكُمْ بِالسَّوَادِ الأَعْظَمِ.

"Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan. Jika kamu melihat suatu perbedaan, maka wajib bagimu mengikuti al-sawad al-a'zham" (HR. Ibnu Majah dari Anas bin Malik). Ibarah ini terdapat pula pada kitab 'Iqd al-Jid fi Ahkam al-Ijtihad karya Syekh Ahmad Waliyullah al-Dahlawi, Cairo: al-Mathba'ah al-Salafiyah, 1965 M, h. 13. Dapat dirujuk pula kepada pendapat Fakhruddin Muhammad al-Razi, al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1408H/1988 M), Cet. Ke-1, Juz II, h. 535-540.

Muhammad Bahith al-Muthi'i, Sullam al-Wushul Syarah Nihayah al-Sul (Mesir, Bahrul Ulum, t.th.), jilid III, h. 921 dan jilid IV h. 580 dan 581. Hadits tersebut tercantum pada kitab ini di jilid III adalah sebagai dasar ijma'. Sedang yang tercantum di jilid IV merupakan kesimpulan tentang al-istifta'. Hadits di atas selengkapnya:

Keterangan, dari kitab:

1. I tinah al-Thalibin4

إِنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الْمَذْهَبِ لِلْحُصْمِ وَالْفَتْوَى مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فَمَا جَزَمَ عَلَيْهِ النَّوَيِّ فَالرَّافِيُّ فَمَا رَجَّحَهُ الأَكْثَرُ فَالأَعْلَمُ فَالأَوْرَعُ فَإِنْ قُلْتَ مَا الَّذِيْ يُفْتَى بِهِ النَّوَيِّ فَالرَّافِيُّ فَمَا رَجَّحَهُ الأَكْثَرُ وَالْمُعْرَةُ وَالْحُوَاشِيْ كَكُتُبِ ابْنِ حَجَرٍ وَالرَّمْلِيَيْنِ مِنَ الْكُتُبِ وَمَا الْمُقَدَّمُ مِنْهَا وَمِنْ الشُّرُوحِ وَالْحُواشِيْ كَكُتُبِ ابْنِ حَجَرٍ وَالرَّمْلِييْنِ وَسَيْخِ الْإِسْلاَمِ وَالْحُلْيْبِ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَالْمَحَلِيِّ وَالرِّيَادِيِّ وَالشَّبْرَمُلِيْسِيِّ وَابْنِ زِيَادِ وَشَيْخِ الْإِسْلاَمِ وَالْحُلْيْبِ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَالْمَحَلِيِّ وَالرِّيَادِيِّ وَالشَّبْرَمُلِيْسِيِّ وَابْنِ زِيَادِ النَّيْفِي وَعَيْرِهِمْ فَهَلْ كُتُبُهُمْ مُعْتَمَدَةُ أَوْ لاَ ؟ وَهَلْ يَجُوزُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ كُلِّ مِنْ الْمُنْ فِي وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْكِ وَهُلَّ مَعْوَلًا أَوْ لاَ ؟ إِلَى أَنْ قَالَ، الْجُوَابُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَجُوبِةِ الْعَلاَمَةِ الْمُعْدَى فَيْ وَالْمُنْ فَيْ وَالْمُلْكِ فَتَوْدُ وَالْمُلْقِي وَالْمُولِ اللَّيْخِيلِ الْمُعْدَةُ عَلَيْهِ كُلُّ هَذِهِ الْكُتُبِ مُعْتَمَدَةُ وَمُعُولُ اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ فَي وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِي الْمُلْلِ الْمُعْدِي وَالْمُلْلُ اللَّهُ وَلِي الْمُولِ الْمُعْلِي اللَّهُ وَلَا الْمُؤْتِي بِالرَّاحِجِ .

Sesungguhnya yang dijadikan landasan (pedoman) dalam mazhab (al-Syafi'i) ketika menentukan suatu hukum dan fatwa adalah (1) yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Rafi'i, (2) yang ditetapkan oleh Imam Nawawi, (3) yang ditetapkan oleh Imam Rafi'i, (4) yang diunggulkan oleh mayoritas ulama, (5) oleh orang yang paling alim, (6) oleh orang yang paling saleh (wira i).

Apabila anda bertanya: "Kitab-kitab apakah yang bisa dijadikan pedoman untuk berfatwa dari kitab-kitab, syarah, hawasy (catatan pinggir), seperti kitab karya Ibn Hajar, Imam Ramli dan Rafi'i, Syaikh al-Islam al-Khatib, Ibn Qasim, al-Mahalli, al-Ziyadi, Syibramullisi, Ibn Ziyad al-Yamani, al-Qulyubi dan yang lain? Apakah kitab-kitab mereka ini bisa dijadikan pedoman atau tidak? Dan apakah boleh atau tidak berpedoman pada individu masing-masing ulama yang telah disebutkan tersebut, apabila mereka berbeda pendapat?"

Jawabnya adalah sebagaimana yang diperoleh dari jawaban al-'Allamah Sa'id Ibn Muhammad Sunbuli al-Makki, seluruh kitab-kitab tersebut di atas bisa dijadikan pedoman dan rujukan, akan tetapi harus tetap memperhatikan

⁴ Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *l'anah al-Thalibin*, (Mesir. al-Tijariyah al-Kubra, t.th.) Jilid I, h. 19

untuk bisa mendahulukan sebagian dari yang lain. Sedangkan untuk pengamalan diri sendiri boleh secara keseluruhan. Dalam memberikan fatwa, jika terjadi perbedaan ia harus mendahulukan kitab al-Tuhfah dan al-Nihayah dibanding yang lain. Jika keduanya berbeda, ia boleh memilih antara keduanya; apabila ia memang tidak mampu mengunggulkan salah satunya, namun jika dia mampu, ia harus berfatwa dengan yang lebih unggul (rajih).

3. Membuat Keputusan Berdasarkan Pendapat Kedua

S. Bolehkah hakim memberi keputusan dengan mempergunakan pendapat kedua (al-qauluts tsani) dalam masalah Syiqaq (perselisihan antara suami istri)?

J. Boleh. Hakim diperbolehkan memberi keputusan dengan mempergunakan pendapat kedua (al-qaul al-tsani) apabila untuk kemaslahatan suami-istri dan tidak ada jalan lain kecuali dengan mempergunakan al-qaul al-tsani tersebut.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Mahalli 'ala al-Minhaj⁵

Kedua orang pengambil keputusan berhak memisahkan keduanya (suamiistri) jika mereka memandang perpisahan tersebut sebagai hal yang benar. Menurut (pendapat) yang kedua, dengan mengutus kedua orang pengambil keputusan tersebut berarti kerelaan suami istri tidak disyaratkan. Jika pengambil keputusan si suami memutuskan perceraian, maka ia bisa memutuskan sendiri (tanpa persetujuan suami), tapi tidak boleh lebih dari satu thalaq.

2. Al-Fawaid al-Makiyyah⁶

Ia memang berhak untuk memberikan fatwa dan keputusan dengan hukum yang tidak diunggulkan, karena hajat dan kepentingan umum.

3. Al-Tanbih7

Jalaluddin Muhammad al-Mahalli, Syarah Mahalli 'ala al-Minhaj pada Hasyiyah al-Qulyubi wa "Umairah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1324/2003) Jilid III, h. 308.

⁶ Al-Sayyid 'Alawi al-Saqqaf, al-Fawaid al-Makiyyah, dalam Majmu;ah Sab'ah Ktub Mufidah, (Mesir: Musthafa al_halabi), h. 53.

Abu Ishaq 'Alawi al-Syirazi, al-Tanbih dalam Syarah al-Tanbih al-Suyuthi, (Beirut: Dar al-Fikr, 1416/1996, Cet. Ke-1, Jilid II, h. 639.

Keduanya pengambil ketetapan hukum dari pihak hakim menurut pendapat lain. Maka hakim menyerahkan keputusan berdamai atau bercerai kepada mereka berdua tanpa kerelaan suami dan istri. Dan pendapat ini adalah yang paling benar.

4. Shalat Sunat Sebelum Shalat Jum'at

S. Apakah ada shalat sunnah qabliyah bagi shalat Jum tit?

J. Ada. Sebelum shalat Jum'at disunatkan shalat sunat *qabliyah* seperti shalat Zhuhur, karena sabda Rasulullah Saw. dalam hadis sahih.

"Dari Abdullah bin al-Zubair 毒 berkata, Rasulullah 瓣 bersabda: "Setiap ada shalat fardhu, maka sebelumnya ada shalat sunnat dua raka'at." (HR. Ibn Hibban dalam Shahih-nya, Daraquthni dan Thabrani)

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Bari8

Dalil paling kuat untuk dijadikan pedoman tentang kebolehan shalat dua rakaat sebelum Jum'at adalah hadis riwayat Ibnu Hibban dari Abdullah bin Zubair: "Tidak ada suatu shalat (fardhu) pun kecuali sebelumnya (sunnah) dilaksanakan ada shalat dua rakaat (shalat sunnah)".

2. Al-Hawasyi al-Madaniyah9

Nabi Saw. pernah melaksanakan shalat empat rakaat sebelum shalat Jum'at.

⁸ Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari, (Beirut: Dar al-Fikr, 1420/2000), Cet. Ke-1, Jilid III, h. 96

Muhammad Sulaiman al-Kurdi, al-Hawasyi al-Madaniyah 'ala Syarah Bafadhal, (Singapura: al-Haramain, t.th.), Juz I, h. 327.

3. Al-Hawasyi al-Madaniyah¹⁰

وَرَوِى أَبُوْ دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ عَنْ طَرِيْقِ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيْلُ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْجُمُعُةِ وَيُصَلِّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ (قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التَّرْمِذِيِّ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ النَّووِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التَّرْمِذِيِّ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ لاَجَرْمَ وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ)

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibn Hibban dari Ayyub dari Nafi': Ibn Umar memperpanjang shalat sebelum pelaksanaan shalat Jum'at, dan melaksanakan shalat dua rakaat sesudahnya di rumah. Dan ia menceritakan bahwa Rasuullah Saw. juga melakukan yang demikian itu.

(Tentang hadis ini) Imam Nawawi dalam *al-Khulasah*¹¹ menilainya sebagai hadis *shahih* sesuai dengan syarat Bukhari. Al-Iraqi dalam *Syarh al-Tirmidzi* berkata: *Isnad*nya *shahih*. Al-Hafizh Ibn al-Mulqin dalam *Risalah*nya berkata: *Isnad*nya *shahih* dan tidak ada cacat. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Ibn Hibban dalam kitab *Shahih*nya.

5. Zakat untuk Pembangunan Mesjid

- S. Bolehkah menggunakan hasil dari zakat untuk pendirian mesjid, madrasah-madrasah atau pondok-pondok (asrama-asrama), karena semua itu termasuk 'sabilillah "sebagaimana kutipan Imam al-Qaffal?
- J. Tidak boleh, karena yang dimaksud dengan 'sabilillah' "ialah, mereka yang berperang di jalan Allah (sabilillah). Adapun kutipan Imam al-Qaffal itu adalah dha f (lemah).

Keterangan, dalam kitab:

1. Rahmah al-Ummah¹²

Para ulama sepakat atas larangan menggunakan hasil zakat untuk membangun mesjid atau mengkafani mayit.

Muhammad Sulaiman al-Kurdi, al-Hawasyi al-Madaniyah 'ala Syarah Bafadhal, (Singapura: al-Haramain, t.th.), Juz I, h. 326

¹¹ Muhyiddin al-Nawawi, Khulashah al-Ahkam, (Beirut: Da al-Kutub al-Ilmiah, 1428 H/2000 M), Cet. Ke-1, Jilid II, h. 383

¹² Muhammad al-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah, Tahqiq Muhammad Muhyiddin Abd al-Hamid, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th.), h. 92

2. Al-Tafsir al-Munir (Marah Labid)13

وَنَقَلَ الْقَفَّالُ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَارُوا صَرْفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيْعِ وُجُوْهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكُولُ اللَّهِ عَامُ فِي الْكُلِّ تَكُولُ لَا اللَّهِ عَامُ فِي الْكُلِّ تَكُولُهُ تَعَالَى فِي سَبِيْلِ اللَّهِ عَامُ فِي الْكُلِّ تَكُولُهُ تَعَالَى فِي سَبِيْلِ اللَّهِ عَامُ فِي الْكُلِّ

Imam al-Qaffal mengutip dari sebagian ulama fiqh bahwasannya mereka memperbolehkan penggunaan hasil sedekah/zakat bagi semua jalur kebaikan, seperti pengkafanan mayit, pembangunan benteng dan pembangunan mesjid, karena firman Allah 'fi sabilillahi "bersifat umum mencakup keseluruhan.

6. Gono-gini (Hasil Usaha Suami-istri)

- S. Bolehkah memberi 'gono-gini'' (ialah hasil usaha kedua belah pihak suamiistri) baik masing-masing mempunyai andil kapital ataupun tidak mempunyai, tetapi tidak dapat dibeda-bedakan hasil masing-masing (tercampur menjadi satu).
- J. Muktamar memutuskan: Bahwa memberi "gono-gini" itu boleh menurut yang diterangkan dalam *Hamisy* kitab *Syarqawi*¹⁴:

Keterangan, dari kitab:

(فَرْعُ) إِذَا حَصَلَ اشْتِرَاكُ فِي لَتَّةٍ ... إِنْ كَانَ لِكُلِّ مَتَاعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا مَتَاعٌ وَاكْتَسَبَا فَإِنْ تَمَيَّزَ فَلِكُلِّ كَسْبُهُ وَإِلاَّ اصْطَلَحَا فَإِنْ كَانَ النَّمَاءُ مِنْ مِلْكِ أَحَدِهِمَا مِنْ هَذِهِ الْحَالَةِ فَالْكُلُّ لَهُ وَلِلْبَاقِيْنَ الْأُجْرَةُ، وَلَوْ بِالْغَبْنِ لِوُجُوْدِ الاشْتِرَاكِ

Jika pemah terjadi persekutuan dalam sejumlah harta, ... maka jika masingmasing punya harta atau salah satunya tidak punya harta dan keduanya melakukan usaha bersama, jika memang bisa dibedakan maka masingmasing memperoleh bagian sesuai dengan usahanya, dan jika tidak bisa dibedakan maka keduanya berdamai. Jika perkembangan terjadi dari harta milik salah satu dari keduanya, maka semua harta menjadi miliknya dan pihak lain berhak mendapatkan upah, meskipun terjadi kerugian, karena adanya persekutuan.

7. Pengertian "Rusydan"

S. Apakah yang dimaksud dengan kata "Rusyd" dalam firman Allah: Rusydan. Apakah yang dimaksud "Rusyd" itu pandai dalam segala hal?

¹³ Muhammad Nawawi al-Jawi, al-Tafsir al-Munir (Marah Labid), (Mesir: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H), Jilid I, h. 344.

¹⁴ Musthafa al-Dzahabi, Taqrir Musthafa al-Dzahabi, dalam Hasyiyah al-Syarqawi, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1226 H), Jilid II, h. 109.

J. Yang dimaksud dengan kata "Rusyd" dalam firman Allah Swt. tersebut di atas ialah "pandai" dalam mentasharufkan dan menggunakan harta kekayaan, walaupun masih hijau dan bodoh dalam soal agama.

Keterangan, dalam kitab:

1. Thabaqat al-Syafi tyyah¹⁵

Larangan mempergunakan harta itu dicabut dari orang yang sudah dewasa dan pandai, walaupun bodoh dalam beragama.

2. Tafsir al-Munir16

Tafsir al-Munir dalam menafsirkan firman Allah 'Jain anastum minhum rusydan" (jika menurut kalian mereka telah cerdas-QS. al-Nisa': 6), yakni telah pandai dalam mengelola harta tanpa mubadzir dan tidak lemah dari tipu daya orang lain.

8. Orang Fasik Menjadi Wali Nikah

- S. Bolehkah seorang yang tidak mengerjakan ibadah shalat menjadi wali nikah anak perempuannya? Apabila tidak boleh, maka siapakah yang berhak menjadi wali pernikahan itu? Hakim ataukah lainnya?
- J. Seorang fasik karena tidak mengerjakan shalat fardu atau karena lainnya, menurut mazhab, tidak sah menjadi wali menikahkan anak perempuannya. Tetapi menurut pendapat kedua (al-qaul al-tsani) sah menjadi wali nikah. Keterangan, dalam kitab:

1. Al-Qulyubi 'Alal Mahalli¹⁷

لاَ وِلاَيَةَ لِفَاسِقِ عَلَى الْمَذْهَبِ قَالَ الْمَحَلِي: وَالْقَوْلُ النَّانِي أَنَّهُ يَلِي لِأَنَّ الْفَسَقَةَ لَمْ يُمْنَعُوا مِنَ التَّزُونِيجِ فِيْ عَصْرِ الْأُوَّلِيْنَ

Menurut mazhab (Syafi'i, yang pertama) orang fasik tidak boleh menjadi wali. Sedang menurut al-Mahalli, pendapat kedua, bahwa orang fasik boleh

Abu Bakar Ibnu Umar, Thabaqat al-Syafi'iyyah al-Kubra, (Beirut: "Alam al-Kutub, t. th.), Jilid 8, h. 47

Muhammad Nawawi al-Jawi, Al-Tafsir al-Munir (Marah Labid), (Mesir: Maktabah Isa al-Halabi, 1314 H), Jilid I, h. 140.

¹⁷ Syihabuddin al-Qulyubi, Hasyiyah al-Qulyubi 'ala al-Mahalli, (Beirut: Dar al-Fikr, 1424/2003 M), Jilid III, h. 228.

menjadi wali, karena orang-orang fasik pada masa Islam pertama tidak dilarang untuk mengawinkan.

9. Pemandu Khotbah Membaca Shalawat dengan Suara Keras dan Panjang

- S. Bagaimana apabila seorang pemandu khotbah (protokol khotbah) dengan suara keras membaca shalawat antara dua khotbah? Dan apabila shalawatnya panjang, apakah berarti memutuska 1 muwalat antara kedua khotbah itu?
- J. Membaca shalawat antara dua hotbah dengan suara keras itu adalah 'bidth hasanah", dan dapat pula memutuskan muwalat apabila shalawat itu dianggap panjang menurut kebiasaan (urf) dikirakan waktunya cukup untuk dua rakaat.

Keterangan, dari kitab:

Al-Hawasyi al-Madaniyah¹⁸

Maka diketahui bahwa bacaan Bilal (pemandu khotbah) antara dua khotbah... adalah termasuk bid tah hasanah.

Al-Hawasyi al-Madaniyah¹⁹

Adapun yang dapat merusak (kesinambungan dua khotbah) di sini adalah perbuatan yang dilakukan antara dua khotbah melebihi masa waktu melaksanakan shalat dua rakaat dengan melakukan rukun-rukunnya saja dan sebawahnya maka dapat merusak kesinambungan. Jika kurang dari itu, tidak merusak kesinambungan khotbah.

3. Fath al-Mu'in20

Dan (harus) ada kesinambungan antara kedua khotbah Jum'at dan antara rukun-rukunnya serta antara kedua khotbah tersebut dengan shalatnya, dengan

¹⁸ Muhamad Sulaiman al-Kurdi, al-Hawasyi al-Madaniyah 'ala Syarah Bafadhal, (Singapura:-Jeddah: Mathba'ah al-Haramain t.th.), Juz II, h. 65.

¹⁹ Muhamad Sulaiman al-Kurdi, al-Hawasyi al-Madaniyah 'ala Syarah Bafadhal, (Singapura-Jeddah: Mathba'ah al-Haramain t.th.), Juz II, h. 64.

²⁰ Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in dan al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, l'anah al-Thalibin (Singapu a: Maktobah Sulaiman Mar'i, t.th). Jilid II, h. 70-71 dan 120.

tidak dipisah dalam waktu yang menurut 'urf (kebiasaan) sudah dianggap lama. Selanjutnya, yang merusak kesinambungan (al-muwalah) di antara dua perbuatan diperkirakan selama mengerjakan shalat dua rakaat, bahkan dengan melakukan rukun-rukunnya saja. Karena itu, mak dalam hal ini tidak salah bila dibatasi demikian. Dan pembatasan tersebut merupakan penjelasan tentang maksud 'urf tadi.

10. Menerjemahkan Khotbah Jum'at Selain Rukunnya

- S. Bolehkah menerjemahkan khotbah Jum'tt selain rukunnya atau beserta rukunnya? Apabila diperbolehkan apakah yang terbaik dengan bahasa Arab saja, atau beserta terjemahannya? Apabila yang terbaik beserta terjemahannya, apa faedahnya?
- J. Menerjemahkan khotbah Jum'at selain rukunnya itu boleh, sebagaimana tersebut dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Muktamar ini memutuskan: bahwa yang terbaik adalah khotbah dengan bahasa Arab kemudian diterangkan dengan bahasa yang dimengerti oleh hadirin. Adapun faedahnya ialah: Supaya hadirin mengerti petuah-petuah yang ada dalam khotbah.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Hawasyi al-Madaniyah²¹

Kedua khotbah dengan bahasa Arab, walaupun seluruh (jamaah) orangorang non Arab demi mengikuti ulama salaf dan khalaf. Ketentuan dengan bahasa Arab tersebut (hanya) pada rukun-rukun khotbah dan bukan yang lain. Hal ini berarti bahwa di luar rukun khotbah, yakni hal-hal yang masih terkait dengan khotbah yang disampaikan tidak dengan bahasa Arab, tidak menjadi penghalang adanya kesinambungan khotbah.

11. Membaca Shalawat atau *Taradhdhi* dengan Suara Keras

S. Apakah hukumnya menyerukan 'taradhdhi" (membaca radhiyallahu 'anhu) atau membaca 'shalawat" dengan suara keras sewaktu khotib menyebutkan nama-nama sahabat atau nama Rasulullah Saw.?

²¹ Muhamad Sulaiman al-Kurdi, Al-Hawasyi al-Madaniyah 'ala Syarah Bafadhal, (Singapura-Jeddah: Mathba'ah al-Haramain t.th.), Juz II, h. 64.

J. Membaca "shalawat" sewaktu khotib menyebutkan nama Rasulullah Saw. dengan suara keras itu hukumnya sunat asalkan tidak keterlaluan, demikian pula membaca "taradhdhi" "asalkan tidak keras. Apabila keterlaluan membaca "shalawat", hukumnya makruh (asalkan tidak menimbulkan tasywisy). Dan apabila sampai menimbulkan tasywisy, hukumnya haram.

Keterangan, dalam kitab:

1. I anatut-Thalibin²²

وَيُسَنُّ تَشْمِيْطُ الْعَاطِسِ وَالرَّدُّ عَلَيْهِ وَرَفْعُ الصَّوْتِ مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذِكْرِ الْحَظِيْبِ اسْمَهُ وَوَصْفَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (قَوْلُهُ وَرَفْعُ الصَّوْتِ) أي وَيُسَنُّ رَفْعُ الصَّوْتِ حَالَ الْحُظْبَةِ. (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ أَمَّا مَعَهَا فَيُكْرَهُ). وَلاَ يُبْعَدُ نَدْبُ التَّرَضِّي عَنِ الصَّحَابَةِ بِلاَ رَفْعِ صَوْتٍ أي تَرَضِّي السَّامِعِيْنَ عَنْهُمْ عِنْدَ ذِكْرِ الْحَطِيْبِ أَسْمَاءَهُمْ. أَمَّا مَعَ رَفْعِ الصَّوْتِ فَلاَ يُنْدَبُ لِأَنَ فِيْهِ تَشْوِيْشًا.

Disunatkan mendoakan dan menjawab orang yang bersin. Begitu pula pada saat khotib menyebut nama dan mensifati Rasulullah Saw. disunatkan membaca shalawat dan salam bagi beliau dengan suara keras asalkan tidak keterlaluan. Yang dimaksud "dengan suara keras" di sini adalah pada saat khotbah berlangsung. Sedang yang dimaksud "asalkan tidak keterlaluan" berarti apabila keterlaluan saat membacanya (shalawat dan salam), hukumnya menjadi makruh.

Demikian pula disunatkan membaca "taradhdhi" (radhiyallaahu lanhu) bagi para pendengar untuk para sahabat Nabi asalkan tidak keras pada saat nama mereka disebut oleh khotib. Namun jika dibaca dengan keras tidak lagi disunahkan, karena, itu mengganggu orang lain (tasywisy).

12. Mengucapkan Insya Allah Ketika Khotib Mengucapkan Ittaqullah

- S. Apakah hukumnya pernyataan pendengar khotbah dengan mengucapkan 'Insya Allah'', sewaktu khatib menyerukan 'Ittaqullah''?
- J. Hukumnya boleh. Asalkan tidak bermaksud menggantungkan takwa kepada kehendak Tuhan, karena ta'liq demikian itu berlaku terhadap apa

²² Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin (Singapura: Maktabah Sulaiman Mar'i, t. th). Jilid II, h. 87.

yang akan dikerjakan. Seyogyanya tidak usah menyatakan ta'liq (insya Allah), karena bertobat dan bertakwa itu seharusnya dilaksanakan seketika.

Keterangan, dari kitab:

1. Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil²³

Imam Baidhawi dalam menafsirkan firman Allah (surat al-Kahfi: 23) "Dan jangan sekali-kali kamu menyatakan saya akan melakukan hal tersebut besok, (tanpa menyatakan) kecuali jika Allah menghendaki", yakni bahwa ia harus melibatkan kehendak Allah dalam arti: "Jika memang Allah menghendaki Anda melakukan hal tersebut". Dan tidak diperbolehkan mengaitkan suatu tindakan kepada pelaku (saja). Sebab, mengecualikan (tidak memperhatikan) kebersamaan kehendak Allah dengan suatu tindakan (manusia) itu tidak benar, dan pengecualian (tidak memperhatikan) dengan menampakkan kehendak Allah tanpa (memperhatikan) tindakan manusia itu tidak sesuai dengan larangan (dalam ayat tersebut).

13. Memperbaharui Nisan dalam Kuburan Umum

S. Bagaimana hukumnya memperbaharui nisan dalam tanah kuburan umum?

J. Memperbarui nisan sebelum mayatnya rusak itu hukumnya boleh. Adapun masa rusaknya mayat hingga menjadi tanah, menurut para ahli; ada yang berpendapat 15 tahun, ada pula yang berpendapat 25 tahun, atau 70 tahun, perbedaan tersebut mengingat perbedaan iklim.

Dan boleh memperbarui sesudah masa rusaknya mayat apabila tidak menghalangi untuk dipergunakan penguburan mayat baru, tetapi apabila menghalangi maka hukumnya haram.

Keterangan, dalam kitab:

1. Nihayah al-Muhtaj²⁴

Nasiruddin al-Baidhawi, Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil, (Mesir: Mathba'ah Musthafa al-Halabi, 1358/1939), Cet. Ke-1, Jilid II, h. 7.

²⁴ Syamsuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, (Mesir: Mathba'ah Musthafa al-Halabi, 1357/1938), Juz III, h. 40.

النَّبْشُ بَلْ تَحْرُمُ إِمَارَتُهُ وَتَسْوِيَةُ تُرَابٍ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ فِيْ مَقْبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ لِامْتِنَاعِ النَّالِسِ مِنَ النَّاسِ مِنَ

Para jamaah (pengiring jenazah) disunatkan berdiri setelah jenazah dikubur. Adapun jenazah yang sudah hancur sesuai dengan perkiraan para ahli yang sudah berpengalaman tidak diharamkan untuk digali kembali, bahkan diharamkan membangun bangunan dan meratakan (mengecor) tanah di atasnya jika berada di pemakaman umum, karena itu bisa menghalangi orang lain untuk menguburkan (jenazah lain), karena mereka menyangka (jenazah yang pertama) belum hancur.

2. Fath al-Wahhab25

Tentang keharaman menggali kubur sebelum jenazah hancur. Sedangkan setelah hancur maka tidak haram digali kembali bahkan yang diharamkan adalah membangun bangunan, meratakan (mengecor) tanah di atasnya agar tidak mencegah orang lain menguburkan (jenazah lain) karena menyangka (jenazah yang semula) belum hancur.

14. Memagari Kuburan dengan Tembok dalam Tanah Milik Sendiri

- S. Bagaimana hukumnya membangun kuburan dan mengelilinginya (memagarinya) dengan tembok pada tanah kuburan milik sendiri?
- J. Membangun kuburan dan memagari dengan tembok di tanah kuburan milik sendiri dengan tidak ada suatu kepentingan, hukumnya makruh.

Keterangan, dalam kitab:

1. Fath al-Mu'in²⁶

(وَكُرِهَ بِنَاءٌ لَهُ)أَيْ لِلْقَبْرِ (أَوْ عَلَيْهِ) لِصِحَّةِ النَّهْيِ عَنْهُ بِلاَ حَاجَةٍ كَخَوْفِ نَبْشٍ أَوْ حَفْرِ سَبُعِ أَوْ هَدْمِ سَيْلٍ وَتَحَلُّ كَرَاهَةِ الْبِنَاءِ إِذَا كَانَ يَمْلِكُهُ فَإِنْ كَانَ بِنَاءُ نَفْسِ الْقَبْرِ بِغَيْرِ حَاجَةٍ مِمَّا مَرَّ أَوْ نَحْوِ قُبَاءِ عَلَيْهِ بِمُسَبَّلَةٍ إِلَى أَنْ قَالَ أَوْ مَوْقُوْفَةٍ حَرُمَ وَهُدَّمَ وُجُوْبًا

²⁵ Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Fath al-Wahhab, (Beirut: Maktabah Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M), Juz I, h. 118.

Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in dalam al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin (Singapura: Maktabah Sulaiman Mar'i, t.th). Jilid II, h. 120.

لِأَنَّهُ يَتَأَبَّدُ بَعْدَ انْمِحَاقِ الْمَيِّتِ. وَقَالَ الْبُجَيْرِيُّ وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ قُبُوْرَ الْأَنْبِيَآءِ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَغَيْرِهِمْ.

Makruh hukumnya membangun suatu bangunan di atas kuburan, karena adanya hadis sahih yang melarangnya, jika tanpa ada keperluan seperti kekhawatiran akan digali dan dibongkar oleh binatang buas, atau diterjang banjir. Kemakruhan tersebut jika kuburan itu berada di tanah miliknya sendiri. Sedangkan membangun kuburan tanpa satu keperluan sebagaimana yang telah dijelaskan, atau memberi kubah di atas kuburan yang terletak di pemakaman umum, atau di tanah wakaf, maka hukumnya haram dan harus dihancurkan, karena bangunan tersebut akan masih ada setelah jenazahnya hancur mengabadikan jenazah setelah kehancurannya. Menurut Imam al-Bujairimi: "sebagian ulama mengecualikan keberadaan bangunan kuburan pada kuburan para Nabi, para syuhada, orang-orang saleh dan lainnya."

15. Menghias Kuburan dengan Sutera

- S. Bagaimana hukumnya menghias kuburan dengan sutera atau lainnya?
- J. Menghias kuburan selain kuburan Rasulullah Saw. dengan sutera (harir) hukumnya haram dan dengan salain sutera hukumnya makruh. Keterangan, dalam kitab:
- 1. Tarsyih al-Mustafidin²⁷

Makruh hukumnya walau bagi seorang perempuan memperindah (suatu tempat) kecuali Ka'bah, seperti kuburan orang saleh dengan selain sutera, dan haram jika dengan sutera. (Yang dimaksud selain Ka'bah), bahwa jika itu Ka'bah, maka boleh menutupinya dengan sutera, demikian halnya kuburan Nabi Saw.

16. Menggambar Binatang dengan Berbentuk Jisim yang Sempurna

S. Bolehkah membuat gambar binatang dengan berbentuk jisim yang sempurna? Dan bagaimanakah hukumnya permainan anak-anak (boneka)?

²⁷ Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in dan Alawi al-Saqqaf, Tarsyih al-Mustafidin, (Beirut: Dar al-Fikir, t. th.), h. 124.

J. Membuat gambar binatang dengan berbentuk jisim yang sempurna, hukumnya tidak boleh (haram), karena menyerupai berhala. Adapun permainan anak-anak (boneka), hukumnya boleh.

Keterangan, dalam kitab:

1. Fath al-Mu'in²⁸

وَمِنْهُ صُوْرَةُ حَيَوَانٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى مَا يُمْكِنُ بَقَائُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا نَظِيْرٌ كَفَرَس بِأَجْنِحَةٍ وَطَيْرٍ بِوَجْهِ إِنْسَانٍ عَلَى سَقْفِ أَوْ جِدَارٍ أَوْ سَتْرٍ عُلِّقَ لِزِيْنَةٍ أَوْ ثِيَابٍ مَلْبُوْسَةٍ أَوْ وِسَادَةٍ مَنْصُوْبَةٍ لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْأَصْنَامَ ... نَعَمْ يَجُوْزُ تَصُوِيْرُ لَعْبِ الْبَنَاتِ لِأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِهَا عِنْدَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Di antara (yang tidak diperbolehkan) adalah, gambar-gambar binatang yang lengkap (dalam bentuk) yang memungkinkannya bisa hidup, walaupun tidak ada padanannya (dalam realita) seperti kuda bersayap, burung berwajah manusia di atas atap, dinding, tirai yang digantung untuk dekorasi, busana yang dikenakan, atau bantal yang dipajang, karena semuanya menyerupai berhala yang diharamkan... (Namun) boleh menggambar mainan anak-anak putri, karena Aisyah pernah bermain boneka di hadapan Rasulullah Saw.

2. Is'ad al-Rafiq²⁹

Para ulama sepakat atas keharusan mengubah sesuatu yang mempunyai bayangan (tiga dimensi), kecuali pada mainan anak-anak putri (boneka) karena terdapat *rukhshah*.

17. Pemberian Kepada Anak dengan Tidak Sepengetahuan Anak yang Lain

- S. Apabila seorang bapak memberikan sesuatu kepada salah seorang anak yang taat, apakah pemberian itu dapat dilangsungkan dengan tidak sepengetahuan anak yang lain?
- J. Pemberian tersebut dapat berlangsung dengan tiga syarat:
 - a. Tidak pada waktu sakit keras sampai ajalnya.
 - b. Sudah diterima oleh anak tersebut (anak yang taat) dan,
 - c. Tidak diminta kembali sebelum bapak meninggal dunia.

²⁸ Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in dalam al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, l'anah al-Thalibin (Singapura: Maktabah Sulaiman Mar'i, t.th). Jilid III, h. 361-362.

²⁹ Muhammad Babashil, *Is'ad al-Rafiq*, (Singapura: al-Haramain, t. th.) Juz II, h. 103.

Keterangan, apabila pemberian tersebut dilakukan di waktu sakit terus ajalnya tiba atau di waktu tidak/belum sakit, tetapi belum diterima anaknya (anak yang taat) atau sudah diterima tetapi diminta kembali sebelum hak miliknya atas barang itu, maka dalam keadaan seperti tersebut, pemberian itu tidak dapat dilangsungkan, kecuali dengan sepengetahuan dan seizin saudara-saudaranya yang lain.

Adapun pemberian dengan maksud menutup sebagian ahli waris dengan tidak untuk kepentingan syara' (agama), maka pemberian tersebut hukumnya makruh, sebagaimana dimaklumi dalam kitab-kitab fiqh.

18. Keluarga Mayit Menyediakan Makanan Kepada Penta'ziyah

- S. Bagaimana hukumnya keluarga mayit menyediakan makanan untuk hidangan kepada mereka yang datang berta ziyah pada hari wafatnya atau hari-hari berikutnya, dengan maksud bersedekah untuk mayat tersebut? Apakah ia (keluarga) memperoleh pahala sedekah tersebut?
- J. Menyediakan makanan pada hari wafat atau hari ketiga atau hari ketujuh itu hukumnya makruh, apabila harus dengan cara berkumpul bersama-sama dan pada hari-hari tertentu, sedang hukum makruh tersebut tidak menghilangkan pahala sedekah itu.

Keterangan, dalam kitab:

1. I anah al-Thalibin³⁰

Makruh hukumnya bagi keluarga mayit ikut duduk bersama orangorang yang sengaja dihimpun untuk berta'ziyah dan membuatkan makanan bagi mereka, sesuai dengan hadis riwayat Ahmad dari Jarir bin Abdullah al-Bajali yang berkata: "Kami menganggap berkumpul di (rumah keluarga) mayit dengan menyuguhi makanan pada mereka, setelah si mayit dikubur, itu sebagai bagian ratapan (yang dilarang)".

2. Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah³¹

³⁰ Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *l'anah al-Thalibin* (Singapura: Maktabah Sulaiman Mar'i , t.th). Jilid II, h. 145.

³¹ Ibn Hajar al-Haitami, Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M), Jili II, h. 7.

الْمَقْبَرَةِ وَيُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى الْحُقَّارِيْنَ فَقَطْ وَعَمَّا يُعْمَلُ يَوْمَ ثَالِثِ مَوْتِهِ مِنْ تَهْبِيَةِ أُكُلٍ أَوْ إِطْعَامِهِ لِلْفُقْرَآءِ وَعَيْرِهِمْ وَعَمَّا يُعْمَلُ يَوْمَ السَّابِعِ كَذَلِكَ وَعَمَّا يُعْمَلُ تَمَامَ الشَّهْرِ مِنَ الْكَعْلِى وَيُدَارُ بِهِ عَلَى بُيُوْتِ اللَّآتِي حَضَرْنَ الْجُتَازَةَ وَلَمْ يَقْصُدُوا بِذَلِكَ إِلاَّ مُقْتَضَى عَادَةً أَهْلِ الْبَلَدِ حَتَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَهْعُلُ ذَلِكَ صَارَ مَمْقُوثًا عِنْدَهُمْ حَسِيْسًا لاَ يَعْبَعُونَ بِهِ وَهَلْ إِذَا قَصَدُوا بِذَلِكَ الْعَادَةَ وَالتَّصَدُّقَ يَهْعُلُ ذَلِكَ صَارَ مَمْقُوثًا عِنْدَهُمْ حَسِيْسًا لاَ يَعْبَعُونَ بِهِ وَهَلْ إِذَا قَصَدُوا بِذَلِكَ الْعَادَةَ وَالتَّصَدُّقَ يَهْعُلُ ذَلِكَ صَارَ مَمْقُونًا عِنْدَهُمْ حَسِيْسًا لاَ يَعْبَعُونَ بِهِ وَهَلْ إِذَا قَصَدُوا بِذَلِكَ الْعَادَةَ وَالتَّصَدُّقَ فِي عَيْرٍ الْمُحْمِي مِنْ مَوْتِهِ لِلْاَ إِنَى أَهْلِ الْمَيْتِ إِلَى أَشُوبَاءِ الْوَرَثَةِ عِنْدَ قِسْمَةِ التِرْكَةِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَعَنِ الْمَبِيتِ إِلَى أَهْلِ الْمَيْتِ إِلَى أَشُولِ الْمَيْتِ إِلَى أَنْوِي مَنْ عُولِهِ جَمْيِعُ مَا يُفْعَلُ مِثَا أَنْ مِنْ الْمَنْ عَوْلِهِ جَمْهُمُ مَا اللَّوْلِ مِنْ وَهِلَ اللَّوْلِ مَوْنَ الْمَالِقُولُ مِنَ الْمَعْمُ مَا الْمُؤْمِةِ لَكُونُ الْمُومِ عَلَيْهُ مَلُولُولُ مِنْ عَرْضِهِ بِسَبَبِ التَّرْكِ يُرْجَى أَنْ وَلَا يَعْمُ لَعْمُ النَّالِ الْمُؤْلِ عَلَى اللَّوْلُ الْمُؤْلِ الْمُعْلَ الْمَيْ عَلَى اللَّوْلُ اللَّولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُولِ عَيْولِ اللَّهُ عَلَ الْمَيْلِكُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

Beliau (Ibn Hajar al-Haitami) -Semoga Allah mengembalikan barakahnya kepada kita- ditanya tentang hewan yang disembelih dan diberi garami kemudian dibawa di belakang mayit menuju kuburan untuk disedekahkan ke para penggali kubur saja, dan tentang yang dilakukan pada hari ketiga kematian dalam bentuk penyediaan makanan untuk para fakir dan yang lain, dan demikian halnya yang dilakukan pada hari ketujuh, serta yang dilakukan pada genap sebulan dengan pemberian roti yang diedarkan ke rumah-rumah wanita yang menghadiri prosesi ta ziyah jenazah. Mereka melakukan semua itu tujuannya hanya sekedar melaksanakan kebiasaan penduduk setempat, sehingga bagi yang tidak mau melakukannya akan dibenci oleh mereka dan ia akan merasa diacuhkan;

"Kalau mereka melaksanakan semuanya dengan tujuan mengikuti adat dan dengan tujuan sedekah pada selain tradisi yang disebut terakhir, maka bagaimana hukumnya? Boleh atau tidak? Apakah harta yang telah ditasarufkan, itu ikut dibagi pada bagian-bagian harta ahli waris dalam pembagian tirkah, walaupun sebagian ahli waris yang lain tidak menyetujuinya? Lalu dari kasus menginap bersama keluarga mayit (di rumah mereka) selama sebulan dari kematiannya. Sebab, tradisi tersebut, menurut anggapan masyarakat harus dilaksanakan seperti wajib; bagaimana hukumnya?"

Beliau menjawab: Semua yang dilakukan sebagaimana yang ditanyakan di atas termasuk bid'ah yang tercela tetapi tidak sampai haram (makruh); kecuali jika prosesi penghormatan pada mayit di rumah ahli warisnya itu bertujuan untuk meratapi atau memuji secara berlebihan (rastsa').

Seseorang yang salah satu melakukan tradisi di atas dengan tujuan menangkal gunjingan orang-orang awam dan agar mereka tidak menodai kehormatan dirinya, gara-gara ia tidak mau melakukan tradisi di atas, maka diharapkan ia mendapatkan pahala. Karena mengambil kesimpulan dari perintah Nabi Saw. terhadap seseorang yang batal shalatnya (karena hadast saat berjamaah untuk keluar dengan) menutup hidungnya dengan tangan. Para ulama mengambil kesimpulan 'illat hukum dari perintah Nabi Saw. tersebut, yaitu menjaga kehormatan diri dari gunjingan orang awam ketika ia tidak melakukan cara itu (yang sudah menjadi kebiasaan).

Dan tidak diperbolehkan menbiayai tradisi di atas dengan tirkah apabila terdapat ahli waris yang *mahjur 'alaih*, atau semua ahli waris sudah pandai-pandai (boleh membelanjakan harta sendiri dengan bebas) tetapi sebagian dari mereka tidak menyetujuinya.

19. Sedekah Kepada Mayit

S. Dapat pahalakah sedekah kepada mayit?

J. Dapat!

Keterangan, dalam kitab:

1. Al-Muhadzdzab32

Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa ada seseorang bertanya pada Kasulullah Saw.: "Sesungguhnya ibuku sudah meninggal, apakah bermanfaat baginya (kalau) aku bersedekah atas (nama)nya?". Rasulullah menjawab: "ya." Orang itu kemudian berkata: "sesungguhnya aku memiliki sekeranjang buah, maka aku ingin engkau menyaksikan bahwa sesungguhnya aku menyedekahkannya atas (nama)nya".

20. Istri Menjadi Pelayan di Rumah Suaminya dengan Tidak Pakai Upah

S. Seorang istri rasyidah (dewasa) yang menjadi pelayan di rumah suaminya dengan tidak ada perjanjian pemberian upah, apakah ia berhak menerima

³² Imarn Abu Ishaq al-Syirazi, al-Muhadzab, (Mesir: Maktabah Isa al-Halabi, t.th.), Jilid I, h. 464

upah sepantasnya bila terjadi perceraian? Atau berhak menerima gono-gini?

J. Istri tersebut tidak menerima upah dan tidak berhak menerima gonogini, apabila istri itu telah *msyidah* dan tidak ada perjanjian sebelumnya dan tidak turut membantu usaha suaminya. Lain halnya jika istri tersebut tidak *msyidah*, misalnya belum dewasa atau gila, maka ia berhak menerima upah sepantasnya dan upahnya menjadi utang yang dibebankan kepada suaminya, oleh karenanya maka harta peninggalannya tidak boleh diwaris sebelum ditunaikan utang tersebut, begitu pula sebaliknya, apabila suami tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai modal dalam mata pencaharian istrinya, maka suami tidak berhak menerima upah sepantasnya dan tidak menerima gono-gini, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam kitab-kitab fiqh.

21. Alat-alat Orkes untuk Hiburan

- S. Bagaimana hukum alat-alat orkes (mazammir al-lahwi) yang dipergunakan untuk bersenang-senang (hiburan)? Apabila haram, apakah termasuk juga trompet perang, trompet jamaah haji, seruling penggembala dan seruling permainan anak-anak (damenan, Jawa)?
- J. Muktamar memutuskan bahwa segala macam alat-alat orkes (*malahi*) seperti seruling dengan segala macam jenisnya dan alat-alat orkes lainnya, kesemuanya itu haram, kecuali trompet perang, trompet jamaah haji, seruling penggembala dan seruling permainan anak-anak dan lain-lain sebagainya yang tidak dimaksudkan untuk dipergunakan hiburan.

Keterangan, dalam kitab:

1. Ihya' Ulum al-Din33

Dengan pengertian ini maka haramlah seruling Irak dan seluruh peralatan musik yang menggunakan senar seperti, 'ud, al-dhabh, rabbab dan barith (nama-nama peralatan musik Arab). Sedangkan yang selain itu maka tidak termasuk dalam pengertian yang diharamkan seperti (membunyikan suara menyerupai) burung elang yang dipergunakan oleh para penggembala, jamaah haji, dan pemukul genderang.

³³ Hujjah al-Islam al-Ghazali, Ihya' Ulum al-Din dalam Murtadha al-Zabidi, Ithaf Sadah al-Muttaqin, (Beirut: Maktabah Dar al-Fikr, t.th.), Juz VI, h. 474.

22. Alat-alat yang Dibunyikan dengan Tangan

S. Bagaimana hukumnya alat-alat yang dibunyikan dengan tangan?

J. Muktamar memutuskan bahwa segala alat yang dipukul (dibunyikan) dengan tangan, seperti rebana, dan sebagainya itu hukumnya mubah (boleh) selama alat-alat tersebut tidak dipergunakan untuk menimbulkan kerusakan dan tidak menjadi tanda-tanda orang fasiq kecuali kubah, yang telah ditetapkan haramnya dalam hadis (nash).

Keterangan, dalam kitab:

1. Ithaf Sadah al-Muttaqin34

وَكَالطَّبْلِ وَالْقَضِيْبِ وَكُلُّ آلَةٍ يُسْتَخْرَجُ مِنْهَا صَوْتُ مُسْتَطَابٌ مَوْزُونٌ سِوى مَا يَعْتَادُهُ أَهْلُ الشَّرْبِ لِأَنَّ كُلَّ فَلِكَ لاَ يَتَعَلَّقُ بِالْخَيْرِ وَلاَ يُذَكِّرُ بِهَا وَلاَ يُشَوِّقُ إِلَيْهَا وَلاَ يُوْجَدُ التَّشَبُّهُ بِأَرْبَابِهَا فَلَمْ يَكُنْ فِي مَعْنَاهَا فَبَقِي عَلَى اللَّهُ وَعَنَاهَا فَبَقِي عَلَى اللَّهُ وَلَا يُدَكِّ عَلَى اللَّهُ وَمَعْنَاهَا فَبَقِي عَلَى اللَّهُ وَلَا يَدُكُنُ فِي مَعْنَاهَا فَبَقِي عَلَى اللَّهُ وَمَنَ الْعَنْدَلِيْبِ عَلَى أَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ مَعْنَاهَا فَهَا لَمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا وَالْمَوْلِ وَالْمَوْلِ وَالْمَوْلِ وَالْمَالِ وَالْمَوْلِ وَالْمَالِ وَالْمَوْلِ وَالْمَالِ وَالْمَوْلِ وَالْمَالِ وَالْمَالِقِي وَالْمَالِ وَالْمَوْلِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَوْلُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمَالَعُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلُولُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُولُولُولُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُولُولُولُولُولُولُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَ

Seperti kendang dan drum serta semua alat yang dipergunakan untuk mengeluarkan suara yang enak dan teratur berirama, kecuali yang biasa digunakan oleh peminum minuman keras, karena semua itu tidak berhubungan dengan minuman keras dan tidak mengingatkannya, tidak membuat kerinduan kepadanya, serta tidak ada keserupaan dengan empunya sehingga tidak termasuk dalam pengertiannya (yang diharamkan) dan hukumnya menjadi mubah sebagaimana hukum asli. Sesuai dengan yang diqiyaskan pada suara burung dan lainnya, maka seyogyanya diqiyaskanlah pada suara burung bul bul, semua suara-suara yang keluar dari anggota tubuh manusia sesuai dengan kehendaknya seperti yang keluar dari tenggorokannya atau dari kendang, drum, rebana dan lainnya. Dalam hal ini tidak dikecualikan semua alat-alat hiburan, aneka macam gitar dan seruling, karena telah ada larangan dari syara 'terhadapnya.

2. Ihya' Ulum al-Din35

وَبِهَذِهِ الْعِلَّةِ يَحْرُمُ ضَرْبُ الْكُوْبَةِ وَهُوَ طَبْلُ مُسْتَطِيْلُ رَقِيْقُ الْوَسْطِ وَاسِعُ الطَّرَفَيْنِ وَضَرَبَهَا عَادَةُ

³⁴ Murtadha al-Zabidi, Ithaf Sadah al-Muttaqin, (Beirut: Maktabah Dar al-Fikir, t. th.), Jilid VI, h. 474 dan 472

³⁵ Hujjah al-Islam al-Ghazali, Ihya' Ulum al-Din dalam Murtadha al-Zabidi, Ithaf Sadah al-Muttaqin, (Beirut: Maktabah Dar al-Fikr, t.th.), Juz VI, h. 473.

الْمُخَيِّثِيْنَ، وَلَوْلاً مَا فِيهِ مِنَ التَّشْبِيهُ لَكَانَ مِثْلَ طَبْلِ الْحُجِيْجِ وَالْغُزُوِّ

Beliau juga berpendapat; dengan illat ini haram hukumnya memukul al-kubah (kendang)? Yaitu suatu alat musik sejenis kendang yang berbentuk memanjang, di arah tengah agak tipis, sedang dua sisi ujungnya agak luas. Biasanya jenis alat musik ini ditabuh oleh waria. Andaikan dalam kendang tersebut tidak ada unsur tasyabuh, niscaya hukumnya sama dengan terompet yang digunakan jamaah haji atau dalam peperangan.

23. Permainan untuk Melatih Otak Seperti Catur

- S. Bagaimana hukumnya permainan guna melatih otak seperti main catur dan sebagainya?
- J. Segala macam permainan guna melatih otak seperti main catur dan lain-lain apabila tidak menimbulkan kerusakan dan tidak dipergunakan berjudi, itu hukumnya makruh. Adapun permainan yang bersifat menipu, seperti main dadu, main kodok-ula atau beng-jo (tombola) walaupun tidak terdapat untung rugi, maka hukumnya haram.

Keterangan, dalam kitab:

1. Hasyiyah al-Jamal ala Fath al-Wahab36

وَفَارَق النَّرُدُ الشَّطْرَنْجَ حَيْثُ يُحْرَهُ إِنْ خَلاَ عَنِ الْمَالِ بِأَنَّ مُعْتَمَدَهُ الْحِسَابُ الدَّقِيْقُ وَالْفِكْرُ الصَّحِيْحُ فَفِيْهِ تَصْحِيْحُ الْفِكْرِ وَنَوْعُ مِنَ التَّذْبِيْرِ وَمُعْتَمَدُ النَّرْدِ الْحُزْرُ وَالتَّخْمِيْنُ الْمُودِيِّحُ الْفِكْرِ وَنَوْعُ مِنَ التَّذْبِيْرِ وَمُعْتَمَدُ النَّرْدِ الْحُزْرُ وَالتَّخْمِيْنُ الْمُؤَدِّى إِلَى غَايَةٍ مِنَ السَّفَاهَةِ وَالْحُنْقِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ مَا حَاصِلُهُ وَيُقَاسُ بِهِمَا مَا فِيْ مَعْنَاهُمَا مِنْ أَنْوَاعِ اللَّهْوِ وَكُلِّ مَا اعْتَمَدَ الْفِكْرَ وَالْحِسَابَ كَالْمِنْقَلَةِ وَالسِّيْجَةِ وَهِيَ حُفَرُ أَوْ خُطُوطُ مِنْ الشَّعْرِيْنَ السَّعْفَادُ التَّخْمِيْنُ يَحْرُمُ إِلَى أَنْ قَالَ وَكُلُّ مَا مُعْتَمَدُهُ التَّخْمِيْنُ يَحْرُمُ.

Permainan dadu itu berbeda dengan permainan catur yang dimakruhkan jika tidak mempergunakan uang, yaitu dasar permainan catur itu adalah perhitungan yang cermat dan olah pikir yang benar. Dalam permainan catur terdapat unsur penggunaan pikiran dan pengaturan strategi yang benar. Sedangkan permainan dadu berdasarkan spekulasi dan perkiraan yang menyebabkan kebodohan dan kedunguan yang maksimal.

Menurut Imam Rafi'i, hukum semua bentuk permainan bisa dianalogkan pada dadu dan catur, dan segala hal yang berdasarkan pikiran dan hitung-

³⁶ Sulaiman al-Jamal, Hasyiyah al-Jamal 'ala Fath al-Wahab, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), Jilid V, h. 379-380.

hitungan, seperti al-Minqalat dan al-Sijah (jenis permainan di Arab) yakni permainan dengan membentuk garis dan lobang-lobang untuk mengisi bebatuan yang dilakukan dengan perhitungan tersendiri. Permainan semacam ini tidak haram. Sedangkan semua permainan yang berdasarkan spekulasi, hukumnya haram.

24. Gerak Badan Seperti Angkat Besi

- S. Bagaimana hukumnya gerak badan seperti renang, mengangkat besi dan jalan kaki?
- J. Segala macam gerak badan itu hukumnya boleh, asalkan tidak menimbulkan kerusakan dan tidak dipergunakan untuk berjudi serta bukan menjadi tanda-tanda orang fasiq dan pada umumnya berjalan dengan baik tidak membahayakan.

Keterangan, dalam kitab:

1.Hasyiyah al-Bajuri³⁷

وَكَذَا سَائِرُ أَنْوَاعِ اللَّهُوِ الْحَطِيْرِ فَتَحْرُمُ إِنْ لَمْ تَغْلُبْ السَّلاَمَةُ وَتَحِلُّ إِنْ غَلَبَتْ السَّلاَمَةُ. وَقَالَ أَيْضًا لاَ الْمُسَابَقَةُ عَلَى الْبَقَرِ لِأَنَّهَا تَحْرُمُ بِالْعِوَضِ وَتَحِلُّ بِلاَ عِوَضِ كَمَا عُلِمَتْ وَمِثْلُهَا فِيْ هَذَا التَّفْصِيْلِ الصُّرَاعُ وَالشَّارَةُ وَالْعَظْسُ بِالْمَاءِ وَالسِّبَاحَةُ وَالْمَشْيُ بِالْأَقْدَامِ وَالْوُقُوفُ عَلَى رِجْلٍ وَالْمُسَابَقَةُ بِالسُّفُنِ وَلَعْبُ نَحْوِ شَطْرَنْجِ وَكُرَّةُ مَحْجَنٍ.

Demikian halnya semua jenis permainan yang berbahaya hukumnya haram jika tidak ada jaminan keselamatan diri, dan halal jika keselamatan diri bisa terjamin. Hal serupa tidak serupa pertandingan di atas sapi (karapan sapi), hukumnya haram jika disertai dengan imbalan/uang dan halal jika tanpa imbalan. Demikian halnya dengan gulat, jalan kaki, menyelam, berenang, berdiri di atas sebelah kaki, lomba perahu, permainan catur serta sepak takraw.

25. Pengertian "Lahwi" dan "Laghwi"

- S. Apakah yang diartikan "Lahwu" dan "Laghwu", dan bagaimana hukumnya orang yang mengerjakan?
- J. "Lahwu" dan "Laghwu" ialah: Segala hal yang tidak memberi faedah pada orang yang mengerjakannya baik di dunia maupun di akhirat, dan tidak ada halangan apa-apa bila dikerjakan, asalkan hal tersebut

³⁷ Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. th.), Jilid II, h. 306-307

tidak dilarang oleh agama dan tidak menyebabkan lupa kepada Tuhan, apabila demikian maka hukumnya haram.

Keterangan, dalam kitab:

1. Hasyiyah al-Shawi ala al-Jalalain38

Sebelum surat Fath tentang tafsir firman Tuhan yang artinya: 'Bahwasanya kehidupan duniawi itu hanyalah la ibu dan lahwu."

Yang disebut dengan *al-la'bu* (permainan) adalah, apapun yang dapat menyibukkan seseorang tanpa ada manfaatnya sama sekali baik terhadap keadaan diri ataupun hartanya. Sedangkan yang disebut dengan *al-laghwu* (senda gurau) adalah apapun yang dapat menyibukkan seseorang sehingga melupakan kepentingan dirinya sendiri.

2. Ihya' Ulum al-Din³⁹

ٱلْغِنَاءُ لَهُوُ مَكْرُوهُ يُشْبِهُ الْبَاطِلَ وَقُولُهُ لَهُوُ صَحِيْحٌ وَلَكِنْ اللَّهُوُ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ لَهُوُ لَيْسَ بِحَرَامٍ فَلَعْبُ الْحُبَشَةِ وَرَقْصُهُمْ لَهُوُ وَقَدْ كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَلاَ يَكْرَهُهُ بَلِ اللَّهُوُ وَاللَّغُوُ لاَ يُؤَاخِذُ اللهُ بِهِ.

Nyanyian/tarik suara itu termasuk *lahwu* yang dimakruhkan, serupa dengan perbuatan batil namun tidak sampai haram. Permainan orang-orang Habsy dan tarian mereka termasuk *lahwu*, Rasulullah pernah menyaksikannya dan tidak membencinya. Hal ini berarti termasuk *lahwu* dan *laghwu* yang tidak dimurkai oleh Allah.

26. Tari-tarian dengan Lenggak-lenggok

- S. Bagaimana hukum tari-tarian dengan lenggak-lenggok dan gerak lemah gemulai?
- J. Muktamar memutuskan bahwa tari-tarian itu hukumnya boleh meskipun dengan lenggang-lenggok dan gerak lemah gemulai selama tidak terdapat gerak kewanita-wanitaan bagi kaum laki-laki, dan gerak kelaki-lakian bagi kaum wanita. Apabila terdapat gaya-gaya tersebut maka hukumnya haram.

Keterangan, dalam kitab:

³⁸ Ahmad al-Shawi al-Maliki, *Hasyiyah al-Shawi 'ala al-Jalalain*, (Mesir: Isa al-Halabi), Jilid IV, h. 79

وَلْمَذْكُرْ مَا لِلْمُلَمَآءِ فِيْهِ أَيْ فِي الرَّقْصِ مِنْ كَلاَمْ هَنَهُمْ طَآفِفَةً إِلَى كَرَاهَتِهِ مِنْهُمْ الْقَفَالُ حَكَاهُ عَنْهُ الرَّوْتِ الْمُعْدَةِ الرَّفْصِ عَلَى الْإِيْقَاعِ مَكْرُوهُ وَهَوُ مَكْرُوهُ وَدَهَبَتْ طَآفِفَةً إِلَى إِبَاحَتِهِ قَالَ الْفَوْرَانِي فِيْ كِتَابِهِ وَهَوُلاَءِ احْتَجُواْ بِأَنَّهُ لَعِبُ وَلَهُو وَهُو مَكْرُوهُ وَدَهَبَتْ طَآفِفَةً إِلَى إِبَاحَتِهِ قَالَ الْفَوْرَانِي فِيْ كِتَابِهِ الْمُمْدَةِ الْغَنَّةُ لَيَاحُ أَصْلُهُ وَكَذَلِكَ صَرْبُ الْقَصِيْبِ وَالرَّفْصُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. قَالَ إِمَامُ الْمُمْدَةِ الْغَنَّةُ الْمُنْ لِيمَاءُ وَلَكِنَ مَنْ اللَّهُ مَكَرَّهُ حَرَكاتٍ عَلَى السِّقَامَةِ أَوِ اغْوِجَاجٍ وَلَكِنْ كَثِيرُهُ الْمُمْدِقُ الْمُولِي وَلِيكَ قَالَ الْمَحَلِي فِي النَّعْلَةِ وَابْنُ الْعِمَادِ السَّهْرَورُدِي وَالرَّافِعِيُّ وَبِهِ جَرَمَ الْمُصَلِّفُ فِي الْوَسِيْطِ وَابْنُ أَبِي الدَّمْ وَهُؤُلاَءِ احْتَجُواْ بِأَمْرَيْنِ ؛ السَّنَةُ وَالْقِياسُ. أَمَّا السَّنَةُ فَمَا الْمُسَنِّفُ فِي الْوَسِيْطِ وَابْنُ أَبِي الدَّمْ وَهُؤُلاَءِ احْتَجُواْ بِأَمْرَيْنِ ؛ السَّنَةُ وَالْقِيمَاسُ. أَمَّا السَّنَةُ فَمَا السُّنَةُ فَمَا الْمُسَنِّفُ فِي الْوَسِيْطِ وَابْنُ أَبِي الدَّمْ وَوَلَاءِ احْتَجُواْ بِأَمْرَيْنِ ؛ السَّنَةُ وَالْقِيمَاسُ أَمَّا السَّنَةُ فَمَا السَّنَةُ فَمَا السَّنَةُ وَالْقِيمَاسُ وَكَذَا مَا نَقَلَهُ الْمُ الْمُؤْمِ وَرَدْهُ الْمُولِ فَقُلْتُ إِلْكَسَاءِ وَقَدْ لُعِنَ الْمُتَسِّةِ وَهُولُاهِ وَهُولُاهِ الْمَامُ الْحُرَمَيْنِ فَقُلْتُ إِللْمَاءُ وَقَدْ لُعِنَ الْمُتَسِّةُ بِهِنَ وَهُولَاهِ الْمَامُ الْحُرَمَيْنِ عَلَى الشَّيْحِ وَقَدْ لُعِنَ الْمُتَسَدِّهُ بِهِي وَالْمَالُولُولُوهُ وَالْمَالُولُومِ الْمُؤْمِ وَالْمَالُولُومِ الْمُؤْمِ وَالْمَ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمَالُولُومِ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمَالُولُومِ الْمُؤْمِ وَالْمَالُولُومِ الْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالُولُومُ وَالْمَا لَعْلُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَالُولُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوا

Para ulama berbeda pendapat tentang tarian, sebagian ada yang memakruhkan seperti Imam al-Qaffal dan al-Rauyani dalam kitab al-Bahr. Demikian halnya menurut Ustadz Abu Manshur, memaksakan tarian bisa serasi dengan irama itu hukumnya makruh. Mereka berargumen bahwa nyanyian itu termasuk la ibun wa lahwun (permainan dan senda gurau) yang dimakruhkan.

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa tarian itu hukumnya mubah menurut al-Faurani dalam kitab *al-Umdah*, nyanyian itu pada dasarnya adalah mubah demikian pula bermain drum, tarian dan yang semisalnya.

Menurut Imam al-Haramain, tarian itu tidak haram karena hanya sekedar gerakan olah gerak lurus dan goyang, akan tetapi jika terlalu banyak, dapat menyebabkan rusaknya kehormatan diri. Pendapat ini senada dengan al-Mahalli

⁴⁰ Murtadha al-Zabidi, Ithaf Sadah al-Muttaqin, (Beirut: Maktabah Dar al-Fikr, t.th.), Juz VI, h. 567.

dalam kitab al-Dakhair, Ibn al-Imad al-Sahrawardi, Imam al-Rafi'i, sang pengarang (al-Ghazali) dalam kitab al-Wasiith yang mantap dengan pendapat tersebut, dan Ibn Abi Dam.

Mereka berargumen dengan dua hal: hadist dan qiyas. Adapun hadistnya adalah sebagaimana yang telah lalu dari hadist Aisyah tentang tarian orangorang Habsy, demikian halnya dengan hadis Ali tentang gerak lompatannya serta yang dilakukan oleh Ja'far dan Zaid. Adapun qiyasnya adalah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam al-Haramain (tarian) erupakan babarapa olah gerak lurus dan goyang, sama dengan gerakan-gerakan lainnya.

Menurut sebagian ulama tarian tersebut harus dirinci, jika dalam tarian itu ada unsur ketidakopanan dan lemah gemulai, maka hukumnya makruh. Jika unsur tersebut tidak ada, maka tarian itu boleh (tidak apa-apa). Inilah yang dikutip oleh Ibn Abi Dam dari Syeikh Abu Ali bin Abu Hurairah.

A-Halimi juga mengutip seperti itu dalam kitab Manhajnya. Mereka berargumen bahwa dalam tarian itu ada kecenderungan untuk bergaya perempuan, padahal orang yang berpura-pura dan bergaya perempuan itu telah dilaknat. Kelompok ulama lain berpendapat bahwa tarian yang mengandung unsur ketidakopanan dan lemah gemulai, maka hukumnya haram. Jika unsur tersebut tidak ada, maka hukumnya tidak haram. Demikian yang disampaikan oleh Imam Rafi'i dalam kitab Syarah al-Shagir dan beliau meriwayatkan statemen di atas dalam Syarh al-Kabir dari Imam Halimi, dan al-Jili meriwayatkan statemen tersebut dalam kitab al-Muharrar.

2. Mauhibah Dzi al-Fadhl41

"Allah melaknat laki-laki yang bergaya menyerupai wanita, dan wanita yang bergaya menyerupai laki-laki. Al-Azizi menyatakan: "Laki-laki dilarang menyerupai wanita dalam berpakaian ataupun sikap. Begitu juga sebaliknya (perempuan dilarang menyerupai laki-laki), karena hal itu termasuk mengubah ciptaan Allah Swt.

27. Mengkhitankan Anak Setelah Beberapa Hari dari Hari Kelahirannya

S. Bagaimana hukum mengkhitankan anak sesudah beberapa hari dari hari kelahirannya? Boleh ataukah tidak? Sedangkan dalam kitab Khazinatul Asrar

⁴¹ Muhammad Mahfudz al-Tarmasi al-Jawi, Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: al-Amirah al-Syarafiyah, 1326 H), Jilid IV, h. 713.

diterangkan bahwa mengkhitankan anak sebelum berumur 10 tahun tidak boleh.

J. Mengkhitankan sesudah beberapa hari dari hari kelahirannya itu boleh. Adapun sunatnya adalah sesudah berumur 7 hari atau 40 hari atau umur 7 tahun.

Keterangan, dalam kitab:

1. Mauhibah Dzi al-Fdhl⁴²

فَفِي التُّحْفَةِ فَإِنْ أَخَّرَ عَنْهُ أَي الْحِتَانَ عَنِ السَّابِعِ فَفِي اْلأَرْبَعِيْنَ وَإِلاَّ فَفِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ لِأَنَّهَا وَقْتُ أَمْرِهِ بِالصَّلاَةِ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ فِيْ خَزِيْنَةِ الْأَسْرَارِ فَمَحْمُولُ فِيْمَا إِذَا كَانَ الصَّبِيُ ضَعِيْفًا لاَ يَقْدِرُ الإِخْتِتَانَ إِلاَّ بَعْدَ عَاشِرِ سَنَتِهِ عِنْدَ أَهْلِ الْخِبْرَةِ.

Dalam kitab al-Tuhfah disebutkan, jika mengakhirkan khitan melampaui hari ke tujuh maka dilaksanakan pada hari ke empat puluh (dari kelahirannya), kalau tidak maka pada tahun ke tujuh yang merupakan waktu diperintahkannya untuk melaksanakan shalat. Adapun yang disebutkan dalam kitab Khazinatul Asrar, maka dipahami jika si anak itu lemah tidak mampu berkhitan kecuali setelah berumur sepuluh tahun sesuai dengan pendapat para pakar.[]

⁴² Muhammad Mahfudz al-Tarmasi al-Jawi, Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: al-Amirah al-Syarafiyah, 1326 H), Jilid IV, h. 706.

 $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) \right) \right) \right) \right)}{1} \right) \right) \right)} \right) \right) \right) \right) \right) \right) \right)} \right) \right)} \right) \right)} \right) \right)}$

en de la companya de la co

 $(x_1, x_2, \dots, x_d) = (x_d, x_d, \dots, x_d) = \sum_{i=1}^d (x_i, x_i, \dots, x_d)$

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-2

Di Surabaya Pada Tanggal 12 Rabiuts Tsani 1346 H./9 Oktober 1927 M.

28. Menerima Gadai dengan Mengambil Manfaatnya 29. Jual Beli "Sende"

30. Membeli Barang yang Belum Diketahui Sebelum Akad

31. Membeli Barang Seharga Rp. 0. 50,-, dengan Menyerahkan **Uang Seratus Rupiah**

32. Jual Beli Mercon untuk Berhariraya

33. Memakai Dasi, Celana Panjang, Sepatu, Topi

34. Memakai Pen dari Emas

35. Memungut Derma Lalu Mengambil Sebagian untuk Dirinya Sendiri

36. Menghukum dengan Pekerjaan Berat atau dengan Denda Uang

28. Menerima Gadai dengan Mengambil Manfaatnya

S. Bagaimana hukum orang yang menerima gadai dengan mengambil manfaatnya, misalnya, sebidang tanah yang digadaikan, kemudian diambil hasilnya dengan tanpa syarat pada waktu akad diadakan demikian itu, baik sudah menjadi kebiasaan atau sebelum akad memakai syarat atau dengan perjanjian tertulis, tetapi tidak dibaca pada waktu akad, hal demikian itu apakah termasuk riba yang terlarang atau tidak? J. Dalam masalah ini terdapat tiga pendapat dari para ahli hukum (ulama):

a. Haram: Sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya (rente).

 Halal: Sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sebab menurut ahli hukum yang terkenal, bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk syarat.

 Syubhat: (Tidak tentu jelas halal haramnya) sebab para ahli hukum berselisih pendapat.

Adapun Muktamar memutuskan, bahwa yang lebih berhati-hati ialah pendapat yang pertama (haram).

Keterangan, dari kitab:

1. Asybah Wa al-Nazha'ir1

لَوْ عَمَّ فِي النَّاسِ اعْتِيَادُ إِبَاحَةِ مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ حَتَّى يَفْسُدَ الرَّهْنُ قَالَ الْجُمْهُورُ لاَ وَقَالَ الْقَفَّالُ نَعَمْ.

Seandainya sudah umum di masyarakat kebiasaan kebolehan memanfaatkan barang gadai bagi pemberi pinjaman/penerima gadai, apakah kebiasaan itu dianggap sama dengan menjadikannya sebagai syarat, sehingga akad gadainya rusak? Jumhur ulama berpendapat: "Tidak diposisikan sebagai syarat." Sedangkan al-Qaffal berpendapat: "Ya (diposisikan sebagai syarat).

2. Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin²

وَجَازَ لِمُقْرِضٍ نَفْعٌ يَصِلُ لَهُ مِنْ مُقْتَرِضٍ كَرَدِّ الزَّائِدِ قَدْرًا أَوْ صِفَةً وَالْأَجْوَدِ لِلرَّدِئِ (بِلاَ شَرْطٍ) فِي الْعَقْدِ بَلْ يُسَنُّ ذَلِكَ لِمُقْتَرِضِ إِلَى أَنْ قَالَ وَأَمَّا الْقَرْضُ بِشَرْطِ جَرِّ نَفْعٍ لِمُقْتَرِضِ فَفَاسِدٌ لِخَبَرِ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُو رِبًا. (قَوْلُهُ فَفَاسِدٌ) قَالَ ع ش، وَمَعْلُومٌ أَنَّ تَحَلَّ الْفَسَادِ حَيْثُ وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ. أَمَّا لَوْ تَوَافَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعْ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلاَ فَسَادَ.

Diperbolehkan bagi si pemberi pinjaman untuk memperoleh keuntungan

Jalaluddin al-Suyuthi, Asybah wa al-Nazha'ir, (Mesir: Maktabah Mustahafa Muhammad, t. th.), h. 86.

² Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in dalam al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. th.), Jilid III, h. 53

(sesuatu kelebihan) dari peminjam, seperti pengembalian yang lebih dalam ukuran atau sifatnya, dan yang lebih baik pada pinjaman yang jelek, asalkan tidak disebutkan dalam akad sebagai persyaratan, bahkan disunatkan bagi peminjam untuk melakukan yang demikian itu (mengembalikan yang lebih baik lagi dibandingkan barang yang dipinjamnya).

Adapun peminjaman dengan syarat adanya keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman, maka hukumnya fasid, sesuai dengan hadis "Semua peminjaman yang menarik sesuatu manfaat (keuntungan bagi pemberi pinjaman) maka termasuk riba."

Dengan ini diketahui, bahwa rusaknya akad tersebut jika memang disyaratkan dalam akad. Sedangkan jika keduanya si peminjam dan pemberi pinjaman secara kebetulan (melakukan praktik tersebut), dan tanpa disyaratkan dalam akad, maka akad itu tidak rusak (boleh).

29. Jual Beli "Sende"

- S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang jual beli 'sende" yaitu: Menjual barang dengan perjanjian sebelum akad, bahwa barang tersebut akan dibeli lagi dengan harga tertentu, sahkah atau tidak jual beli semacam ini? Dan wajibkah pembeli menepati janji?
- J. Jual beli tersebut hukumnya sah, asal perjanjian tersebut tidak dalam akad atau tidak di dalam majelis khiyar, dan bagi pembeli wajib menepati janji dan jual beli tersebut namanya "bai'ul 'uhdah" (jual beli dengan janji). Keterangan, dalam kitab:
- 1. Tarsyih al-Mustafidin³

(تَنْبِيْهُ) اعْلَمْ أَنَّ بَيْعَ الْعُهْدَةِ الشَّهِيْرَ بِحَضَرَ مَوْتَ الْمَعْرُوفَ فِيْ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ بِبَيْعِ النَّاسِ وَبَيْعِ عُنَّةٍ وَأَمَانَةٍ صَحِيْحُ إِنَا جَرى مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ فِيْ مَالِهِ وَلَمْ يُذْكُرْ الْوَعْدُ فِيْهِ فِيْ نَفْسِ الْعَقْدِ وَلاَ ذِكْرَ بَعْدَهُ فِيْ زَمَنِ الْخِيَارِ، وَصُوْرَتُهُ كَمَا فِيْ فَتَاوِى الْنِ حَجَرٍ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى بَيْعِ عَيْنٍ بِدُونِ قِيْمَتِهَا عَلَى ذِكْرَ بَعْدَهُ فِيْ وَمَن الْخِيَارِ، وَصُوْرَتُهُ كَمَا فِي فَتَاوِى الْنِ حَجَرٍ أَنْ يَتَّفِقَا عَلَى بَيْعِ عَيْنٍ بِدُونِ قِيْمَتِهَا عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ مَتَى جَاءَ بِالشَّمَنِ رَدَّ الْمُشْتَرِى عَلَى مَبِيْعِهِ وَأَخَذَ ثَمَنَهُ ثُمَّ يُعْقِدَانِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ الْبَائِعَ مَتَى جَاءَ بِالشَّمَنِ رَدَّ الْمُشْتَرِى عَلَى مَبِيْعِهِ وَأَخَذَ ثَمَنَهُ ثُمَّ يُعْقِدَانِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرٍ أَنْ الْبَائِعَ الْقَمْنِ وَقَعْ خَارِجَ الْعَقْدِ لَزِمَ الْمُشْتَرِى مَا الْتَرْمَهُ وَوَعَدَ بِهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ عِنْدَ دَفْعِ الْبَائِعِ الشَّمَنَ فِي الْوَقْتِ الْمَشْرُوطِ إِيْقَاعُ الْفَسْخِ وَقَبْضُ الشَّمَنِ.

Ketahuilah! bahwa jual beli bertempo yang terkenal di Hadhramaut dan populer di Mekkah dengan sebutan bai'al-nas, bai' 'uddah wa amanah adalah sah jika berlangsung dari muthlaq al-tasharruf (orang yang boleh membelanjakan hartanya secara mutlak) dan perjanjian tersebut tidak

³ Alawi al-Saqqaf, Tarsyih al-Mustafidin ala Fath al-Mu'in, (Beirut: Dar al-Fikir, t. th.), h. 226.

disebutkan dalam akad dan setelahnya, yakni dalam masa khiyar.

Bentuknya sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Fatawa Ibn Hajar, kedua belah pihak (penjual dan pembeli) sepakat untuk menjual sesuatu, dengan catatan jika si penjual kelak datang kembali dengan (membawa uang) senilai barang yang telah dijualnya, maka si pembeli harus mengembalikan barang tersebut dan mengambil kembali uang penjualan semua. Kemudian keduanya melakukan transaksi tanpa mensyaratkan (penjualan kembali barang yang sudah dijual tersebut kepada si penjual) pada waktu akad ... Jika kesepakatan itu terjadi di luar akad, maka si pembeli harus menepati kesanggupan dan janjinya, dan ketika si penjual memberikan kepada si pembeli nilai harga pada waktu yang disyaratkan, maka si pembeli harus membatalkan akad jual belinya dan menerima harga (uang dari si penjual).

30. Membeli Barang yang Belum Diketahui Sebelum Akad

- S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang membeli barang yang belum diketahui sebelum akad, seperti: Milk dalam kaleng, bawang merah dalam tanah, kelapa dalam sabutnya, sahkah jual beli semacam ini atau tidak?
- J. Jual beli tersebut hukumnya sah! Menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanafi, tetapi Imam Syafi'i dalam *Qaul Jadid* menganggap tidak sah! Keterangan, dalam kitab:
- 1. Mirqah Shu'ud al-Tashdiq4

(وَمَا لَمْ يَرَهُ) قَبْلَ الْعَقْدِ حَذَرًا مِنَ الْغَرَرِ أَيِ الْحَطِرِ لِمَا رَوى مُسْلِمٌ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ أَيِ الْمَشْتَعِلِ عَلَى الْغَرَرِ فِي الْمَبِيْعِ قَالَ الْحِصْنِي وَفِي صِحَّةِ بَيْعِ ذَلِكَ فَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ فِي الْمَبِيْعِ قَالَ الْحِصْنِي وَفِي صِحَّةِ بَيْعِ ذَلِكَ قَوْلاَنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَصِحُ وَبِهِ قَالَ الْأَيْمَةُ الثَّلاَثَةُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَيْمَّتِنَا مِنْهُمْ الْبَغَوي وَالرَّوْيَانِي وَالْجُدِيْدُ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ لاَ يَصِحُ لِأَنَّهُ غَرَرً

Tentang sesuatu yang tidak disukainya sebelum akad karena khawatir adanya tipu daya yang membahayakan, sesuai dengan hadis riwayat Muslim: "Bahwa Rasullullah Saw. melarang jual beli al-Gharar" yakni jual beli sesuatu barang yang mengandung unsur tipuan.

Menurut al-Hishni keabsahan jual beli tersebut ada dua pendapat. *Pertama*, sah. Pendapat ini dianut oleh tiga imam mazhab dan sebagian dari imam kita, yaitu al-Baghawi dan al-Rauyani. *Kedua*, menurut *qaul jadid* jelas tidak sah, karena mengandung upaya penipuan.

Muhammad Nawawi al-Jawi, Mirqah Shu'ud al-Tashdiq Syarh Sullam al-Taufiq, (Semarang: Usaha Keluarga, t. th.), h. 53

31. Membeli Barang Seharga Rp 0. 50,-, dengan Menyerahkan Uang Satu Rupiah

S. Bagaimana pendapat Muktamar terhadap orang yang membeli barang seharga Rp. 0.50,- (setengah rupiah) dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) kemudian ia menerima barang dengan pengembalian Rp. 0,50,-, sahkah jual beli tersebut atau tidak? Karena menyerupai jual beli 'Muddujwah'' (campuran). J. Jual beli tersebut hukumnya sah! Menurut Imam Syafi'i, dan sebagian ulama Maliki.

Keterangan, dalam kitab:

1. Syams al-Isyraq⁵

قَالَ الدَّسُوْقِي نَقْلاً عَنْ شَيْخِهِ الْعَدَوِي وَالْعَلاَّمَةِ الدَّرْدِيْرِي أَجَازَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ فِي الرِّيَالِ الْوَاحِدِ أَوْ نِصْفِهِ أَوْ رُبُعِهِ لِلطَّرُوْرَةِ كَمَا أُجِيْزَ صَرْفُ الرِّيَالِ الْوَاحِدِ بِالْفِطَّةِ الْعَدَدِيَّةِ وَكَذَا نِصْفُهُ وَرُبُعُهُ لِلطَّرُوْرَةِ وَإِنْ كَانَتْ الْقَوَاعِدُ تَقْتَضِى الْمَنْعَ.

Al-Dasuqi berkata dengan menukil dari gurunya al-'Adawi dan al-Dardiri, bahwa sebagian dari ulama memperbolehkan pertukaran tersebut dalam satu riyal atau setengahnya atau pula seperempatnya karena darurat, sebagaimana diperbolehkan menukar satu riyal dengan uang logam perak recehan, demikian pula separuhnya atau seperempatnya karena darurat, walaupun kaidah mengarah pada pelarangan.

2. Al-Umm6

Seandainya penjual menjual baju kepada seorang pembeli dengan harga setengah dinar, kemudian pembeli memberi uang satu dinar, dan si pemilik baju kemudian memberinya setengah dinar emas, maka yang demikian itu tidak mengapa, karena (penyerahan setengan dinar dari penjual) ini merupakan penjualan yang baru, bukan penjualan yang pertama.

32. Jual Beli Mercon untuk Berhariraya

S. Sahkah jual beli petasan (mercon-Jawa) untuk merayakan hari raya atau Pengantin dan lain-lain sebagainya?

Muhammad Ali al-Maliki, Syams al-Isyraq fi Hukmi al-Ta'ammuli bi al-Arwaq, (Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, 1921 M), h. 14.

⁶ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, al-Umm, (Mesir: Mathba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 1381 H/1961 M), Cet. Ke-1, Jilid III, h. 32.

J. Jual beli tersebut hukumnya sah! Karena ada maksud baik, ialah: adanya perasaan gembira menggembirakan hati dengan suara petasan itu. Keterangan, dalam kitab:

1. Fath al-Mu'in dan I anatut-Thalibin7

وَأَمَّا صَرْفُهُ فِي الصَّدَقَةِ وَوُجُوْهِ الْحَيْرِ وَالْمَطَاعِمِ وَالْمَلاَبِسِ وَالْهَدَايَا الَّتِيْ لاَ تَلِيْقُ بِهِ فَلَيْسَ بِتَبْذِيْرٍ (قَوْلُهُ لَيْسَ بِتَبْذِيْرٍ) أَي عَلَى الْأَصَحِّ لِأَنَّ لَهُ فِيْ ذَلِكَ غَرْضًا صَحِيْحًا وَهُوَ الثَّوَابُ وَالتَّلَذُذُ. وَمِنْ ثَمَّ قَالُوْا لاَ إِسْرَافَ فِي الْخَيْرِ وَلاَ خَيْرَ فِي الْإِسْرَافِ.

Adapun mempergunakan atau menyalurkannya pada sedekah dan berbagai jalur kebaikan, makanan, pakaian dan hadiah yang tidak layak baginya maka tidak termasuk mubadzir menurut pendapat yang lebih benar, karena dalam hal demikian itu, ia bertujuan baik, yakni ingin memperoleh pahala dan bersenang-senang. Oleh karenanya, mereka mengatakan: "Tiada berlebihan dalam kebaikan dan tiada kebaikan dalam berlebihan".

2. Fath al-Qarib8

(بَيْعُ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ) أَي حَاضِرَةٍ (فَجَائِزٌ) إِذَا وُجِدَتِ الشُّرُوْطُ مِنْ كَوْنِ الْمَبِيْعِ طَاهِرًا مُنْتَفَعًا بِهِ مَقْدُوْرًا عَلَى تَسْلِيْمِهِ لِلْعَاقِدِ عَلَيْهِ وِلاَيَةُ.

Jual beli sesuatu yang tampak riil itu boleh, jika memang memenuhi berbagai persyaratan, seperti barang yang dijual itu suci, bisa dimanfaatkan, bisa diserahkan dan bagi yang bertransaksi mempunyai kuasa (terhadap barang tersebut).

3. Hasyiyah al-Jamal9

وَالْحَقُّ فِي التَّعْلِيْلِ أَنَّهُ (أَي الدُّخَانَ) مُنْتَفَعٌ بِهِ فِي الْوَجْهِ الَّذِيْ يَشْتَرَى لَهُ وَهُوَ شُرْبُهُ إِذْ هُوَ مِنَ الْمُبَاحَاتِ لِعَدَمِ قِيَامِ دَلِيْلٍ عَلَى حُرْمَتِهِ فَتَعَاطِيْهِ اِنْتِفَاعٌ بِهِ فِيْ وَجْهٍ مُبَاحٍ. وَلَعَلَّ مَا فِيْ حَاشِيَةِ المُبَاحَاتِ لِعَدَمِ قِيَامِ دَلِيْلٍ عَلَى حُرْمَتِهِ فَيَغْرَقُ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيْرِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فَلْيُرَاجِعْ. الشَّيْخِ مَبْنِيُّ عَلَى حُرْمَتِهِ وَعَلَيْهِ فَيُغْرَقُ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيْرِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فَلْيُرَاجِعْ.

Dan yang benar dalam *Talil*, bahwa rokok itu bermanfaat sesuai dengan tujuan dibelinya yaitu menghisapnya, dan mengingat rokok itu termasuk barang mubah karena tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka

Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in dan al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin (Singapura: Maktabah Sulaiman Mar'i, t.th). Jilid III, h. 71.

⁸ Ibn Qasim al-Ghazzi, Fath al-Qarib dalam Hasyiyah al-Bajuri, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. th.), Jilid I, h. 340-341.

⁹ Sulaiman al-Jamal, Hasyiyah al-Jamal ala Fath al-Wahhab, (Beirut: Dar- al-Fikr, t. th.), Jilid III, h. 24.

mengkonsumsinya berarti memanfaatkannya dengan cara yang mubah.

Mungkin penjelasan yang terdapat dalam *Hasyiyah* al-Syeikh (al-Ramli), berangkat dari hukum haram. Atas dasar ini, harus dibedakan antara yang banyak dan yang sedikit, seperti telah diketahui dari penjelasan yang kami sebutkan. Karena itu, ia hendaknya mengkaji ulang.

4. Hasyiyah Ali al-Syibramalisi10

Dalam suatu pelajaran ada pertanyaan tentang rokok yang terkenal pada masa sekarang ini, apakah boleh diperjual belikan atau tidak? Jawabnya adalah sah/boleh, karena termasuk barang yang suci dan bermanfaat sama seperti memanaskan air dan berteduh dengannya (asap-Pen.).

33. Memakai Dasi, Celana Panjang, Sepatu, Topi

- S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang orang yang memakai celana panjang, dasi, sepatu, dan topi? Sedang orang itu orang Indonesia, haramkah demikian itu, karena dianggap meniru orang kafir?
- J. Apabila memakainya itu sengaja meniru orang kafir untuk turut menyemarakkan kekafirannya, maka hukum orang itu menjadi kafir (dengan pasti). Apabila sengaja (tujuan) orang tersebut turut menyemarakkan Hari Raya dengan tidak mengingat kekafirannya, maka hukumnya tidak kafir, tetapi berdosa. Apabila tidak sengaja meniru sama sekali, tetapi hanya sekedar berpakaian demikian, maka hukumnya tidak terlarang tetapi makruh.

Keterangan, dalam kitab:

1. Bughyah al-Mustarsyidin¹¹

(مَسْأَلَةُ ي) حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ فِي التَّزَيِّي بِزَيِّ الْكُفَّارِ أَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَتَزَيَّ بِزَيِّهِمْ مَيْلاً إِلَى دِيْنِهِمْ وَقَاصِدًا التَّشَبُّة بِهِمْ فِيْ شِعَارِ الْكُفَّارِ أَوْ يَمْشِيَ مَعَهُمْ إِلَى مُتَعَبَّدَاتِهِمْ فَيَكُفُرُ بِذَلِكَ فِيْهِمَا. وَإِمَّا أَنْ لاَ يَقْصُدَ كَذَلِكَ بَلْ يَقْصُدُ التَّشَبُّة بِهِمْ فِيْ شِعَارِ الْعِيْدِ أَوِ التَّوَصُّلِ إِلَى مُعَامِلَةٍ جَائِزَةٍ مَعَهُمْ فَيَأْثُمُ وَإِمَّا أَنْ يَتَّفِقَ لَهُ مِنْ غَيْرٍ قَصْدٍ فَيُكُرَهُ كَشَدِّ الرِّدَاءِ فِي الصَّلاَةِ.

Ali al-Syibramalisi, Hasyiyah Ali al-Syibramalisi dalam Syamsuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1357 H/1938 M), Jilid III, h. 381.

Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 H/1952 M), h. 248.

Hasil kesimpulan dari pendapat yang disebutkan oleh para ulama tentang berbusana dengan busana orang-orang kafir adalah: *Pertama*, jika dalam berbusana tersebut ada kecenderungan pada agama mereka (kafir) dan ingin serupa dengan mereka dalam syiar kekafiran, atau bisa berjalan bersama mereka ke tempat-tempat peribadatan mereka, maka ia menjadi kafir. *Kedua*, jika tidak bermaksud yang demikian itu, namun hanya bermaksud ingin mirip saja dengan mereka dalam syiar hari raya atau bisa bermuamalah dengan mereka dalam muamalah yang diperbolehkan maka ia berdosa. *Ketiga*, jika ia kebetulan saja tanpa tujuan apapun, maka hukumnya makruh, sama seperti mengikat selendang dalam shalat.

34. Memakai Pen dari Emas

S. Bagaimana hukumnya memakai pen emas? Haram ataukah tidak? J. Hukum memakai pen emas adalah haram! Karena termasuk larangan memakai bejana dari emas, seperti tempat celak (mirwad), demikian ini menurut mazhab Syafii, tetapi dalam mazhab Hanafi, terdapat pendapat yang memperbolehkannya, oleh karenanya, para pemakai supaya mengikuti pendapat tersebut (mazhab Hanafi) supaya terhindar dari hukum haram.

Keterangan, dalam kitab:

1. Fath al-Qarib dan Hasyiyahal-Bajuri¹²

(وَلاَ يَجُوْزُ) فِيْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ (اِسْتِعْمَالُ) شَيْءٍ مِنْ (أَوَانِي الدَّهَبِ وَالْفِضَةِ) وَعِنْدَ الْحَتْفِيَّةِ قَوْلٌ بِجَوَازِ ظُرُوفِ الْقَهْرَةِ. وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَهُمْ الْحُرْمَةَ. فَيَنْبَغِي لِمَنْ الْبُتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَمَا يَقَعُ كَثِيْرًا تَقْلِيْدُ مَا تَقَدَّمَ لِيَتَخَلَّصَ مِنَ الْحُرْمَةِ. (قَوْلُهُ فِيْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ) فِي فَيْنَ وَهُمْ الْحُرْمَةِ. (قَوْلُهُ فِيْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ) فَإِنْ كَمَا يَقَعُ كَثِيْرًا تَقْلِيْدُ مَا تَقَدَّمَ لِيَتَخَلَّصَ مِنَ الْحُرْمَةِ. (قَوْلُهُ فِيْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ) فَإِنْ كَمْرُورِ بِكَسْرِ الْمِيْمِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُحْتَحَلُ بِهِ لَكِنَ كَمِرُودٍ بِكَسْرِ الْمِيْمِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يُحْتَحَلُ بِهِ لِحَارَا اللهِ مَا لَهُ فَيْهُ لَا تَنْجَلِي جَازَ السِّيْعُمَالُهُ.

Dan tidak diperbolehkan di luar keadaan darurat bagi laki-laki dan perempuan memakai bejana dari emas dan perak. Di kalangan mazhab Hanafi terdapat pendapat yang memperbolehkan penggunaan tempat kopi (yang terbuat dari emas dan perak), walaupun pendapat yang lebih banyak dijadikan pedoman (*mu tamad*) di kalangan mereka adalah haram.

Maka bagi mereka yang diuji harus mempergunakan bejana dari emas dan perak tersebut sebagaimana yang banyak terjadi, maka sebaiknya

¹² Ibn Qasim al-Ghazzi, Fath al-Qarib dan Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. th.), Jilid I, h. 40.

ia harus mengikuti (pendapat mazhab Hanafi) agar terhindar dari haram.

(Maksud tanpa dharurat), jika menggunakan bejana emas dan perak seperti mirwad itu suatu keharusan (dharurat) sebagai alat bercelak, agar mata menjadi terang menurut keterangan dokter yang 'adl riwayah (adil dalam periwayatan), maka boleh menggunakannya.

35. Memungut Derma Lalu Mengambil Sebagian untuk Dirinya Sendiri

S. Bolehkah orang yang memungut derma untuk mendirikan mesjid, madrasah, atau untuk bantuan kepada fakir miskin dan yatim, mengambil sebagian untuk dirinya sendiri?

J. Boleh! Asal tidak melebihi dari upah sepantasnya atau sekedar mencukupi kebutuhannya, apabila orang itu fakir, lain halnya kalau si pemungut derma tadi seorang kaya, maka tidak boleh, sebagaimana firman Allah: Apabila si orang itu kaya hendaknya menjaga diri (jangan mengambil) dan apabila si orang itu fakir maka hendaknya mengambil sekedarnya secara baik.

Keterangan, dalam kitab:

1. Tuhfah al-Muhtaj¹³

وَقِيْسَ بِوَلِيِّ الْيَتِيْمِ فِيْمَا ذُكِرَ مَنْ جَمَعَ مَالاً لِفَكَ أَسْرٍ أَيْ مَثَلاً فَلَهُ إِنْ كَانَ فَقِيْرًا الْأَكُلُ مِنْهُ كَذَا قِيْلَ وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ فَلَهُ أَقَلُ الْأَمْرَيْنِ قَالَ الشَّرْوَانِي (قَوْلُهُ أَي مَثَلاً) يَدْخُلُ مَنْ جَمَعَ لِخَلاَصِ مَدِيْنِ مُعْسِرٍ أَوْ مَظْلُومٍ مُصَادَرٍ وَهُو حَسَنُ مُتَعَيَّنُ حَمًّا وَتَرْغِيْبًا فِيْ هَذِهِ الْمُكَرَّمَةِ أَه سَيِّد عُمَر. أَقُولُهُ وَكَذَا يَدْخُلُ مَنْ جَمَعَ لِنَحْوِ بِنَاءِ مَسْجِدٍ. (قَوْلُهُ وَكَذَا قِيْلَ) لَعَلَّ قَائِلُهُ بَنَاهُ عَلَى مَا مُصَحِّمِ الرَّفِعي. اهسيد عمر. (قَوْلُهُ فَلَهُ أَقَلُ الْأَمْرَيْنِ) النَّفَقَةُ وَأَخْرَةُ الْمِثْلِ.

Disamakan dengan wali anak yatim, seperti yang telah dikemukakan, orang yang mengumpulkan harta, misalnya untuk membebaskan tawanan. Jika ia orang yang miskin maka ia diperbolehkan untuk makan dari harta tersebut atau ia boleh mengambil satu di antara dua hal yang paling sedikit, yaitu biaya nafkah atau mengambil *ujrah al-mitsli* (upah standar).

Menurut al-Syirwani yang demikian itu termasuk pula orang yang mengumpulkan harta untuk membantu menyelamatkan orang miskin yang terbelit hutang atau orang yang terzalimi yang dirampas hartanya. Pendapat tersebut adalah pendapat yang baik dan (memang) harus

¹³ Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj dalam Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid V, h. 215.

seperti itu, sebagai pendorong dan penyemangat dalam perbuatan mulia ini. Demikian pendapat Sayyid Umar. Saya (al-Syirwani) berpendapat: "Begitu pula orang yang mengumpulkan harta untuk membangun mesjid."

(Maksud salah satu di antara dua hal), yaitu nafkah dan *ujrah al-mitsl* (upah standar).

36. Menghukum dengan Pekerjaan Berat atau dengan Denda Uang

- S. Bolehkah bagi suatu organisasi pondok mengadakan peraturan yang menghukum dengan pekerjaan berat atau dengan denda berupa uang kepada yang melanggarnya?
- J. Menghukum dengan pekerjaan berat itu boleh! Tetapi menghukum dengan denda, tidak boleh!

Keterangan, dalam kitab:

1. Tanwir al-Qulub14

التَّعْزِيْرُ هُوَ التَّأْدِيْبُ بِنَحْوِ حَبْسٍ وَضَرْبٍ غَيْرِ مُبَرِّجٍ إِلَى أَنْ قَالَ: لاَ يَجُوْزُ التَّعْزِيْرُ بِحَلْقِ اللِّحْيَةِ وَلاَ بِأَخْدِ الْمَالِ.

Ta zir (hukuman yang tidak ada aturannya dalam syara') adalah hukuman bersifat mendidik seperti memenjara, dan memukul yang tidak sampai melukai. tidak boleh melakukan ta zir dengan mencukur jenggot ataupun memungut uang (denda).

2. Pendapat Muktamar

Peserta muktamar menganjurkan kaum muslimin yang harus melaksanakan *ta zir* dengan memungut uang, agar mengikuti pendapat Imam Malik (yang memperbolehkannya).

2. Fatawa al-Kurdi¹⁵

وَأَمَّا أَخْدُ الْمَالِ فَلَمْ يُجِزْ أَحَدُ مِنْ أَثِمَّتِنَا الشَّافِعِيَّةِ فِيْمَا عَلِمْتُ وَحِيْنَئِذٍ فَهُوَ مِنْ أَكْلِ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. نَعَمْ رَأَيْتُ فِيْ بَعْضِ فَتَاوِي ابْنِ عَلاَّنَ فِسْبَةَ جَوَازِ أَخْذِ الْمَالِ تَعْزِيْرًا لِلإَمَامِ مَالِكَ رَحِمَهُ اللهُ عَلَى لَهُ اللهُ عَلَى لَهُ عَنْهُ لَمَّا احْتَجَبَ مِنْ رِعَايَاهُ وَتَحْرِيْقُهُ دُورَ بَاعَةِ الْخُمْدِ قَلْ وَيَدُلُ لَهُ تَغْرِيْتُ مُعَرَدًا رَسَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا احْتَجَبَ مِنْ رِعَايَاهُ وَتَحْرِيْقُهُ دُورَ بَاعَةِ الْخُمْدِ قَلْتُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتُ وَشَهِدَ لِجُوازِ الْعُقُوبَةِ بِالْمَالِ فِي الْجُمْلَةِ حَدِيْثُ النَّفَيْلِ وَهُو قَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

¹⁴ Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir al-Qulub, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 356.

¹⁵ Muhammad Sulaiman al-Kurdi, Fatawa al-Kurdi, (Bogor: Maktabah Arafah, t. th.), h. 97.

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يُصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِيْنَةِ فَخُذُوا سَلْبَهُ إِلَى آخِرِ مَا قَالَهُ الْمِيَارَةُ.

Memungut denda uang, maka sepanjang yang saya ketahui tidak satupun dari ulama pengikut Syafi'i yang memperbolehkannya. Dengan demikian maka memungut denda uang tersebut sama termasuk dengan mengambil harta orang lain secara batil. Memang (namun), saya pernah membaca denda pungutan dalam sebagian fatwa Ibn 'Allan bahwa pendapat yang memperbolehkan pemungutan uang tersebut sesuai dengan pendapat Imam Malik. Sebagai dasamya adalah pengerusakan Khalifah Umar terhadap rumah Sa'ad, ketika ia lari bersembunyi dari pengawasannya dan juga pembakaran olehnya terhadap rumah-rumah penjual minuman keras.

Dan sebagai dalil bagi kebolehan hukuman dengan memungut uang adalah hadis al-Nufail: Rasulullah bersabda: "Jika engkau menemukan orang yang berburu di dalam wilayah tanah suci Madinah, maka ambillah peralatannya. sampai akhir statemen Miyarah."[]

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-3 Di Surabaya Pada Tanggal 12 Rabiuts Tsani 1347 H. / 28 September 1928 M.

37. Ta'liq Talaq Setelah Akad Nikah 38. Khulu' yang Diperintahkan Oleh Hakim 39. Hakim Mengawinkan Anak Perempuan dengan Wali Hakim Tanpa Ada Bukti

40. Hakim Mengawinkannya dengan Dua Saksi

41. Perempuan Dikawinkan oleh Wali Hakim, Sedang Walinya Mengawinkannya dengan Lelaki Lain

42. Lelaki Merujuk Istrinya Sebelum Selesai Iddahnya Tanpa Memberitahu, Lalu Istri Sesudah Selesai Iddahnya Kawin dengan Lelaki Lain

> 43. Bayi Meninggal Sebelum Dipotong Ari-arinya 44. Air Mandi Tidak Sampai Ke Pantat Mayit

45. Harut dan Marut Termasuk Malaikat

46. Nabi Isa Akan Turun Kembali Ke Dunia Sebagai Nabi dan Rasul

47. Mengarak Puncak Kubah (Mustaka)

48. Membeli Dinar Emas dengan Harga Rupiah/Uang Kertas 49. Lelaki Beristri Mengaku Tidak Beristri, Supaya Lamarannya Diterima

50. Thariqah Tijaniyah Beserta Baiat Barzakhiyah

51. Pembelian Secara Rembus/Inden

52. Menjual Sebagian dari Zakat yang Sudah Disahkan

53. Shalat Jum'at Sebagai Pengganti Shalat Zhuhur bagi Wanita

54. Pemilik Bibit (Bukan Pemilik Tanah) yang Diwajibkan Mengeluarkan Zakat

55. Ayah Nabi Ibrahim a.s. Termasuk Ahli Neraka?

56. Membangun Bangunan di Atas Tanah Kuburan yang Diwakafkan Oleh Wali

57. Pinjam Sepotong Kain, Lalu Dikembalikan dengan Uang 58. Mempercayai Hari Naas

37. Ta'liq Talaq Setelah Akad Nikah

- S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang hukum ta'liq talaq sesudah akad nikah berlangsung atas perintah penghulu/naib, sebagaimana berlaku di Indonesia?
- J. Perintah penghulu/naib untuk mengucapkan ta'liq talaq itu hukumnya kurang baik karena ta liq talaq itu sendiri hukumnya makruh. Walaupun demikian, ta'liq talaq itu sah, artinya bila dilanggar dapat jatuh talaqnya.

Keterangan, dalam kitab:

1.I tanah al-Thalibin¹

(قَوْلُهُ لاَ يَنْعَقِدُ الْيَمِيْنُ إلخ) اِنْعِقَادُهَا بِهَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ مِنْ حَيْثُ الْحُتَثُ الْمُرَتَّبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. أَمَّا مِنْ حَيْثُ وُقُوعِ الْمَحْلُوْفِ عَلَيْهِ فَلاَ يَنْحَصِرُ فِيْهِمَا بَلْ يَحْصُلُ بِغَيْرِهِمَا أَيْضًا كَالْحَلْفِ بِالْعِتْقِ وَالطَّلاَقِ الْمُعَلَّقَيْنِ عَلَى شَيْءٍ كَقَوْلِهِ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ فَعَبْدِيْ حُرُّ.

(Perkataan bahwa sumpah itu tidak terjadi ...) yakni bahwa terlaksananya sumpah itu dengan dua macam (asma khusus dan shifat Allah Ta'ala) ini dari segi pelanggaran yang menyebabkan adanya kafarat (denda). Adapun dari segi terjadinya sesuatu yang disumpahkan maka tidak terbatas pada keduanya, namun bisa terjadi pada dengan selain keduanya. Juga seperti sumpah untuk memerdekakan dan mencerai yang dikaitkan dengan sesuatu hal, seperti ucapan: "Kalau Anda sampai masuk rumah, maka anda terceraikan, atau hambaku merdeka."

2. Fath al-Mu'in2

Sumpah itu hukumnya makruh kecuali dalam bai at (sumpah) jihad, menganjurkan pada kebaikan dan kejujuran dalam gugatan (pengadilan).

3. Syarh al-Mahalli³

وَهِيَ مَكْرُوْهَةٌ قَالَ تَعَالَى: وَلاَ تَجْعَلُوا لللهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ إِلاَّ فِي طَاعَةٍ كَفِعْلِ وَاجِبٍ أَوْ مَنْدُوْبِ وَتَرْكِ حَرَامٍ أَوْ مَكْرُوْهِ فَطَاعَةٌ.

Sumpah itu hukumnya makruh sebagaimana firman Allah: "Janganlah kamu

Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.th.) Jilid IV, h. 310.

² Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in* dalam al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *l'anah al-Thalibin* (Singapura: Maktabah Sulaiman Mar'i, t.th). Jilid IV, h. 315.

Jalaluddin Muhammad al-Mahalli, Syarah Mahalli dalam Hasyiyah al-Qulyubi wa 'Umairah, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid IV, h. 274.

jadikan (nama) Allah dalam sumpahnya sebagai penghalang ... (al-Baqarah: 224), kecuali dalam hal ketaatan, seperti melaksanakan yang wajib dan yang sunat, serta meninggalkan yang haram ataupun makruh. Maka dalam hal ini sumpah itu merupakan suatu ketaatan.

38. Khulu' yang Diperintahkan Oleh Hakim

- S. Bagaimana hukumnya "Khulu'" (penebusan talaq) yang diperintahkan oleh seorang hakim (bukan kehendak yang bersangkutan) kepada orang yang akan memutuskan perkawinan agar supaya tidak merujuk kembali?
- J. Hukum "Khulu' "tersebut adalah sah! Apabila perintah hakim itu hanya semata-mata anjuran untuk kebaikan.

Keterangan, dalam kitab:

1. Irsyad al-Sari4

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَهُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أُنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِيْ دِيْنٍ وَلاَ خَلْقٍ إِلاَّ أَنِّي أَخَافُ الْحُفْرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَتَّرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهَا فَفَارَقَهَا. وَلَمْ يَكُنْ أَمْرُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهَا إِيْجَابًا وَإِلْزَامًا بِالطَّلاقِ بَلْ أَمْرُ إِرْشَادٍ إِلَى مَا هُو الْأَصْوَابُ.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. ia berkata bahwasannya istri Tsabit bin Qais bin Syimas datang kepada Rasulullah Saw. seraya berkata: wahai Rasulullah, aku tidak benci terhadap Tsabit baik dalam segi agama ataupun fisik. Hanya saja aku takut kufur "maka Rasulullah Saw. bertanya: "apakah Anda ingin mengembalikan kebunnya padanya?" Istri Tsabit tersebut menjawab: "ya" kemudian ia mengembalikan kebunnya padanya. Maka Rasulullah Saw. memerintahkan Tsabit untuk menceraikannya".

Perintah Rasul Saw. untuk menceraikan istri tersebut bukan merupakan perintah yang mewajibkan dan mengharuskan, namun hanya merupakan perintah yang bersifat pengarahan ke arah yang lebih benar.

39. Hakim Mengawinkan Anak Perempuan dengan Wali Hakim Tanpa Ada Bukti

S. Bolehkah seorang hakim mengawinkan dengan wali hakim atas seorang

⁴ Syihabuddin Ahmad al-Qisthalani, *Irsyad al-Sari Qulyubi wa Umairah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid IV, h. 274.

perempuan yang mengaku bahwa suaminya telah meninggal dunia empat tahun yang lalu di Solo, dalam soal ini ia tidak mengemukakan bukti-bukti atau saksi-saksi?

J. Menurut qaul yang kuat (mu tamad) hakim tersebut tidak boleh mengawinkannya, sebelum ada saksi-saksi atas kebenaran pengaduannya atas kematian suaminya, sekalipun dalam persoalan ini terdapat beberapa ulama yang memperbolehkannya.

Keterangan, dalam kitab:

1. Bughyah al-Mustarsyidin⁵

وَاعْتَمَدَ فِي التُّحْفَةِ عَدَمَ جَوَازِ إِقْدَامِ الْحَاكِمِ عَلَى تَزْوِيْجِ مَنْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْمُعَيَّنُ أَوْ مَاتَ بَعْدَ ثُبُوْتِهِ لَدَيْهِ وَاعْتَمَدَ فِي الْفَتَاوَى وَابْنُ زِيَادٍ وَأَبُو قُضَامٍ جَوَازَ ذَلِكَ إِذَا صَدَقَ الْمُخْبِرُ إِذِ الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِقَوْلِ أَرْبَابِهَا وَ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْحَاكِمِ لَيْسَ حُكْمًا، وَهُوَ الْقِيَاسُ

Dan Ibn Hajar dalam kitab *Tuhfah* berpedoman, hakim tidak punya otoritas untuk mengawinkan wanita yang telah diceraikan oleh suami yang *mu'ayyan* (jelas orangnya) atau telah meninggal setelah terdapat ketetapan di depan hakim. Dan dalam kitab *Fatawa* beliau, (begitu pula) Ibn Ziyad dan Abu Qudham, berpedoman hakim boleh menikahkannya, bila pembawa berita jujur, karena yang menjadi tolok ukur dalam akad adalah ucapan pihak-pihak yang terkait, dan karena perlakuan hakim bukan merupakan suatu produk hukum. Begitulah qiyasnya.

2. Tuhfah al-Muhtaj6

وَتَحَلُّ ذَلِكَ أَي إِجَابَةُ طَلَبِهَا فِي التَّزْوِيْجِ مَا لَمْ يَعْرِفْ تَزَوَّجُهَا بِمُعَيَّنِ وَإِلاَّ أَشْتُرِطَ فِي تَزُوِيْجِ الْحَاكِمِ لَهَا دُوْنَ الْوَلِيِّ الْحَاصِ كَمَا أَفَادَهُ كَلاَمُ الْأَنْوَارِ اِثْبَاتُهَا لِفِرَاقِهِ سَوَاءً عَلَيْجِ الْحَاصِ كَمَا أَفَادَهُ كَلاَمُ الْأَنْوَارِ اِثْبَاتُهَا لِفِرَاقِهِ سَوَاءً عَابَ أَمْ حَضَرَ هَذَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلاَمُ الشَّيْخَيْنِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ مِنْ اصْطِرَابٍ طَوِيْلٍ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الْقِيَاسُ مَا قَالَهُ جَمْعُ مِنْ قَبُولِ قَوْلِهَا فِي الْمُعَيَّنِ أَيْضًا حَتَّى عِنْدَ الْقَاضِي لِقَوْلِ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِقَوْلِ أَرْبَابِهَا.

Masalah yang demikian itu, yakni pemenuhan tuntutan si wanita dalam perkawinan selama perkawinannya dengan suami tertentu tersebut tidak diketahui. Jika tidak, maka dalam perkawinannya oleh hakim tanpa wali khusus, sebagaimana pendapat dalam kitab al-Anwar, disyaratkan ada

Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 H/1952 M), h. 206.

⁶ Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj dalam Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid VII, h. 305.

penetapan hukum wanita itu telah bercerai dengan suaminya, baik suaminya tidak ada di daerah istri tersebut ataupun ada.

Hal ini sesuai dengan pendapat syaikhain dan merupakan pendapat yang bisa dijadikan pedoman hasil dari perdebatan yang panjang, walaupun menurut qiyas, sebagaimana yang dianut oleh segolongan ulama, adalah menerima ucapan wanita tersebut perihal suami yang mu'ayyan (jelas orangnya), sesuai pula dengan pendapat al-Qadhi, berdasarkan pendapat al-Ashhab, yaitu: "Tolok ukur suatu akad itu adalah ucapan pihak terkait."

40. Hakim Mengawinkannya dengan Dua Saksi

- S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seorang hakim yang mengawinkan seorang perempuan yang mengaku telah berusia 15 tahun dengan mengajukan dua orang saksi, padahal paman dan neneknya menerangkan, bahwa usia orang perempuan tersebut belum mencapai 15 tahun, dalam hal ini mereka berani angkat sumpah, apakah perkawinan itu batal berdasarkan tuntutan pihak paman dan nenek tersebut, atau tetap sah berdasarkan perkawinan semula?
- J. Perkawinan tersebut tetap sah! Dan tidak batal, sedang gugatan paman dan neneknya tidak dapat diterima karena tidak mencukupi syarat.

Keterangan, dalam kitab:

1. Fathul Muin7

(وَلِمَا يَظْهَرُ لِلرِّجَالِ غَالِبًا كَنِكَاجٍ وَطَلاَقٍ وَعِنْقٍ رَجُلاَنِ) لاَ رَجُلُ وَامْرَأَتَانِ لِمَا رَوَاهُ مَالِكُ عَنِ الزُّهْرِيِّ: مَضَتِ السُّنَةُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ لاَ يُجَوِّزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ في الحُدُوْدِ وَلاَ فِي التِّكَاجِ وَلاَ فِي الطَّلاَقِ.

(Dan untuk kasus yang umumnya diketahui laki-laki, seperti nikah, talak dan memerdekakan budak, maka saksinya harus dua orang lelaki), tidak cukup satu laki-laki dan dua perempuan, sesuai hadis riwayat Malik Dari al-Zuhri: "Telah ada sunnah (ajaran) dari Rasulullah Saw., yaitu sungguh beliau tidak memperbolehkan kesaksian oleh perempuan dalam kasus-kasus had, nikah dan perceraian."

41. Perempuan Dikawinkan oleh Wali Hakim, Sedang Walinya Mengawinkannya dengan Lelaki Lain

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seorang perempuan yang dikawinkan oleh wali hakim di Jawa, sedang walinya sendiri (wali mujbir)

⁷ Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in dalam al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin (Singapura: Maktabah Sulaiman Mar'i, t.th). Jilid IV, h. 275.

berada di Mekkah dan mengawinkannya dengan seorang laki-laki lain (di Mekkah), perkawinan manakah yang dianggap sah?

J. Apabila dapat diketahui waktunya, maka perkawinan yang lebih dahulu itulah yang sah! Dan apabila bersamaan waktunya, atau tidak diketahuinya mana yang lebih dahulu, maka yang dianggap sah adalah perkawinan yang dilakukan oleh walinya sendiri, demikianlah yang dipilih oleh Muktamar.

Keterangan: dalam kitab:

1. Tuhfah al-Muhtaj8

لَوْ قَدِمَ فَقَالَ كُنْتُ زَوَّجْتُهَا لَهُ لَمْ يُقْبَلْ بِدُوْنِ بَيِّنَةٍ لِأَنَّ الْحَاكِمَ هُنَا وَلِيَّ إِذِ الْأَصَتُّ أَنَّهُ يُزَوِّجُ بِنِيَابَةٍ اقْتَضَتْهَا الْوِلاَيَةُ. وَالْوَلِيُّ الْحَاضِرُ لَوْ زَوَّجَ فَقَدِمَ أَخَرُ غَائِبٌ وَقَالَ كُنْتُ زَوَّجْتُ لَهُ لَمْ يُقْبَلْ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ.

Seandainya ada wali yang datang kemudian berkata: "Aku telah mengawinkan wanita itu untuk seorang lelaki.", maka perkataannya itu tidak bisa diterima tanpa adanya saksi, karena hakim dalam kasus ini (menikahkan seorang wanita ketika walinya tidak ada di daerah terkait) adalah wali, sebab menurut qaul al-Ashshah hakim boleh menikahkan sebagai pengganti wali yang diperoleh sebab kekuasaannya. Dan wali yang ada di daerah terkait, seandainya mengawinkan, kemudian datang wali yang ghaib (tidak ada di daerah terkait) seraya berkata: "Aku telah mengawinkan si perempuan untuk si dia (laki-laki)." maka wali ghaib tersebut tidak bisa diterima kecuali dengan adanya saksi.

2. Hasyiyah al-Syirwani9

وَفِيْهِ دَلاَلَةٌ إِلَى تَصْوِيْرِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا إِذَا ادَّعَى الْوَلِيُّ أَنَّهُ زَوَّجَهَا فِي الْغَيْبَةِ قَبْلَ تَزْوِيْجِ الْحَاكِمِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوِ ادَّعَى تَزْوِيْجَهَا بَعْدَهُ فَلاَ أَثَرَ لَهُ. وَيَبْقَى مَا لَوِ ادَّعَى التَّزْوِيْجَ الْحَاكِمِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوِ ادَّعَى التَّزْوِيْجَ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ أَوْ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ أَوْ وَلَمْ يَتَبَيِّنْ أَوْ عَلِمَ وَقُوْعُهُمَا مَعًا أَوْ عُلِمَ سَبْقُ أَحَدِهِمَا أَوْ لَمْ يَتَعَيَّنْ أَوْ تَعَيَّنْ أَوْ يَتَبَيِّنْ أَوْ يَعْدِيْمُ تَزْوِيْجِ الْوَلِيِّ. تَعْيَنَ ثُمَّ نَسِيَ فَهَلْ حُكْمُهُ إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِنْ وَقَعَا مَعًا فَيَنْبَغِيْ تَقْدِيْمُ تَزْوِيْجِ الْوَلِيِّ.

Dan di situ (redaksi Syarh al-Raudh), terdapat petunjuk tashawwur

⁸ Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj dalam Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Cet. I, Jilid VII, h. 303-304.

Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani 'ala Tuhfah al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418H/1997 M), Cet. I, Jilid VII, h. 303-304.

al-masalah, yaitu ketika wali mengklaim bahwa saat bepergian dia telah menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya, sebelum pernikahan yang dilangsungkan dengan wali hakim. Dan konsekuensinya adalah bila wali tersebut mengklaim telah mengawinkannya sebelum akad nikah yang dilakukan hakim, maka klaim wali itu tidak berpengaruh apapun.

Dan ada kasus yang tersisa, yaitu jika wali mengaku telah mengawinkan namun tidak jelas apakah sebelum atau sesudah perkawinan oleh hakim atau diketahui waktunya ternyata bersamaan atau salah satu dari keduanya lebih dahulu namun tidak dapat dipastikan, atau dapat dipastikan namun terlupakan ..., maka jika kedua perkawinan terjadi dalam waktu yang bersamaan, seyogyanya mendahulukan perkawinan yang dilakukan oleh wali.

42. Lelaki Merujuk Istrinya Sebelum Selesai Iddahnya Tanpa Memberitahu, Lalu Istri Sesudah Selesai Iddahnya Kawin dengan Lelaki Lain

- S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seorang lelaki yang telah mencerai istrinya, kemudian memberitahukan kepada hakim bahwa ia merujuk istrinya itu, sebelum selesai iddahnya, tetapi ia tidak memberitahukan kepada istrinya bahwa ia telah dirujuk dan tidak menunaikan kewajibannya (sebagai suami) seperti memberi perumahan dan nafkah, oleh karena itu kemudian sesudah selesai iddah, istrinya kawin dengan orang laki-laki lain, dengan kejadian ini suaminya yang pertama mengadu kepada hakim. Sahkah perkawinan perempuan tadi (istrinya) dengan laki-laki lain, dengan alasan bahwa ia tidak mengerti kalau telah dirujuk?
- J. Apabila suami yang menjatuhkan talaq tadi mempunyai bukti (saksi), maka tuntutannya tersebut dapat diterima dan perkawinan istrinya dengan laki-laki lain tersebut tidak sah. Apabila tuntutannya tersebut tidak ada bukti bahwa ia telah merujuk di dalam iddah maka terdapat beberapa kemungkinan:
- a. Apabila tuntutan itu dihadapkan kepada istrinya, sedang si istri memungkiri bahwa ia telah dirujuk dalam iddah dan bersedia angkat sumpah, maka perkawinan si istri dengan laki-laki lain tadi sah!
- b.Apabila si istri membenarkan tuntutan suaminya, bahwa ia telah dirujuk di dalam iddah, maka perkawinan si istri dengan lakilaki lain tadi tidak batal, hanya apabila orang laki-laki tersebut meninggal dunia atau mencerai, maka istri tersebut lansung menjadi istri suami pertama dengan tidak usah menikah lagi dan wajib atas

- istrinya menyerahkan sejumlah maskawin yang pantas (mahar-mitsil) kepada suaminya sebelum orang laki-laki lain yang mengawininya tadi meninggal dunia atau mencerainya, karena ia (istri) menghalanghalangi hak suami pertama terhadap dirinya.
- c. Apabila tuntutan suami itu dihadapkan kepada orang laki-laki yang mengawini istrinya tadi maka bila ia (laki-laki itu) tidak membenarkan tuntutan tersebut (merujuk dalam iddah) dan ia bersedia angkat sumpah, maka perkawinannya itu hukumnya sah! Dan tuntutan suami pertama batal.
- d. Apabila ia (laki-laki lain itu) membenarkan tuntutan suami pertama atau tidak membenarkan, tetapi tidak berani angkat sumpah, maka perkawinan yang kedua itu menjadi batal, tetapi hanya si istri tersebut tidak langsung menjadi istri suami pertama kecuali dengan pengakuan istri sendiri, atau dengan sumpah suami pertama apabila si istri tidak mau angkat sumpah. Maka dalam hal ini suami kedua wajib membayar maskawin yang pantas (mahar mitsil) apabila sudah bersetubuh, tetapi apabila belum bersetubuh hanya wajib membayar separuh dari maskawin saja.

Keterangan, Dalam kitab:

1. Asna al-Mathalib10

(وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ) انْفِضَاءِ (الْعِدَّةِ) زَوْجًا آخَرَ (وَادَّعَى مُطَلِّقُهَا) تَقَدُّمَ الرَّجْعَةِ عَلَى الْقِضَاءِ الْعِدَّةِ (فَلَهُ الدَّعْوَى) بِهِ (عَلَيْهَا وَكَذَا عَلَى الزَّوْجِ) إِلَى أَنْ قَالَ: (فَإِنْ أَقَامَ) بَيْنَةً بِمُدَّعَاهُ (إِنْتَزَعَهَا) مِنَ الزَّوْجِ سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا أَمْ لاَ (وَإِلاَّ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيَّنَةٌ (فَإِنْ بَدَأَ بِهَا) فِي الدَّعْوَى (فَأَقَرَّتْ) لَهُ بِالرَّجْعَةِ (لَمْ يُقْبَلْ) إِقْرَارُهَا (عَلَى الثَّانِي مَا دَامَتْ فِي عِصْمَتِهِ) لِتَعَلَّقِ حَقِّهِ بِهَا (فَإِنْ زَالَ حَقُّهُ) بِمَوْتٍ أَوْ طَلاَقٍ أَوْ إِقْرَارٍ أَوْ حَلَّفَ الْأَوَّلُ يَعِيْنَ الرَّدِّ بَعْدَ لِتَعَلِّقِ حَقِّهِ بِهَا (فَإِنْ زَالَ حَقُّهُ) بِمَوْتٍ أَوْ طَلاَقٍ أَوْ إِقْرَارٍ أَوْ حَلَّفَ الْأَوَّلُ يَعِيْنَ الرَّدِّ بَعْدَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ أَوْ غَيْرَهَا (سُلِّمَتْ لِلاَّوِلِ) كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةٍ عَبْدِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ حُكِمَ بِحُرِّيَّةٍ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّقِ الْقَالِي رَقَالِ حَقِّ القَانِي (يَجِبُ عَلَيْهَا لِلأَوَّلِ مَهْرُ مِثْلِهَا لِلْحَيْلُولَةِ) أَيْ لِأَنَّهَا وَيَيْنَ حَقِّهِ بِالنِّكَاحِ القَانِي حَتَّى لَوْ زَالَتْ حَقُ القَانِي رُدِ اللَّا لِي عَلَى النَّانِي رُدِّ لَهَا الْمَهْرُ لا رَبِقَاعِ مَاللَهُ وَالتَّانِي رَدِّ لَهَا الْمَهْرُ لا رُبِقَاعِ التَّانِي رَدِّ لَهَا الْمَهْرُ لا رَبِقَاعِ التَّانِي رَدِّ لَهَا الْمَهُرُ لا رَبِقَاعِ الْخَيْلُولَةِ وَالتَّصْرِيعُ بِحَوْنِهِ لِلْحَيْلُولَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ إِلَى أَنْ قَالَ: (وَلَوْ أَنْحَرَتُ) رَجْعَتَهُ (فَلَهُ

¹⁰ Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1422 H/2001 M), Cet. Ke-1, Juz VII, h. 255-256.

تَحْلِيْفُهَا) عَلَى نَفْي عِلْمِهَا بِالرَّجْعَةِ (لِلْغَرَمِ) أَي لِيَغْرُمَ مَهْرُ الْمِثْلِ إِذَا أَقَرَّتْ أَوْ نَكَلَتْ وَحَلَفَ هُوَ فَإِنْ حَلَفَتْ سَقَطَتْ دَعْوَاهُ.

Jika seorang wanita yang dicerai kawin lagi dengan laki-laki lain sehabis masa 'iddahnya, dan suami pertama mengklaim lebih dahulu rujuknya dari pada waktu habisnya 'iddah, maka suami pertama berhak mendakwa demikian. Suami pertama boleh pula mendakwa suami kedua. ...

Iika ia mampu memberikan saksi atas dakwaanya, maka ia berhak mengambil kembali istrinya itu dari suaminya yang baru, baik sudah disetubuhi atau belum. Namun jika ia tidak mampu memberikan saksi, jika ia memulai dakwaannya kepada si wanita, kemudian si wanita itu mengakui adanya rujuk, maka pengakuan yang merugikan suami kedua itu tidak diterima selama wanita itu masih dalam ikatan pernikahannya, karena keterkaitan hak suami kedua itu dengannya. Lalu jika hak suami kedua hilang karena kematian, perceraian atau sumpah suami pertama dengan sumpah penolakan setelah dakwaan padanya atau sumpah selainnya, maka ia harus diserahkan pada suami pertama. Masalahnya sama seperti jika seseorang mengaku telah membebaskan budak, lalu ia membelinya kembali, maka budak tersebut dihukumi telah merdeka. Dan sebelum hak suami kedua hilang, maka wanita itu harus memberi mahr mitsl pada suami pertama karena adanya keterhalangan, yakni dengan perkawinan kedua tersebut, berarti wanita itu telah menghalangi hak suami pertama atas dirinya, sehingga jika hak suami kedua hilang, maka suami pertama harus mengembalikan mahr mitsl kepada si istri. ...

Jika wanita itu mengingkari rujuk suami pertama, maka suami pertama berhak menyumpahnya atas ketidaktahuan wanita itu atas rujuknya agar ia menanggung mahr mitsl jika -suatu saat- mengakuinya. Atau bila wanita itu enggan bersumpah dan suami pertama sudah bersumpah, -kemudian-jika wanita itu mau bersumpah, maka gugurlah dakwaan dari suami pertama tersebut.

2. Hasyiyah al-Syirwani¹¹

وَإِنْ بَدَأَ بِالزَّوْجِ فِي الدَّعْوَى فَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِيْنِهِ وَإِنْ أَقَرَّ أَوْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِيْنِ وَحَلَفَ الْأَوَّلُ الْيَمِيْنَ الْمَرْدُوْدَةَ بَطَلَ نِكَاحُ الثَّانِي وَلاَ يَسْتَحِقُهَا الْأَوَّلُ حِيْنَئِذِ إِلاَّ بِإِقْرَارِهَا لَهُ أَوْ حَلَفٍ بَعْدَ نُكُوْلِهَا وَلَهَا عَلَى الثَّانِي بِالْوَظْءِ مَهْرُ الْمِثْلِ إِنْ اسْتَحَقَّهَا

Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani 'ala Tuhfah al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418H/1997 M), Cet. I, Jilid I, h. 177.

الْأُوُّلُ وَإِلاَّ فَالْمُسَمَّى إِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَنِصْفُهُ إِنْ كَانَ قَبْلَهُ.

Jika suami pertama memulai dakwaan pada suami kedua, lalu ia mengingkarinya maka ia bisa dibenarkan dengan sumpahnya. Jika ia mengakuinya atau enggan bersumpah, dan suami pertama bersumpah, maka pernikahan kedua batal. Dan seketika itu suami pertama belum berhak atas wanita tersebut, kecuali dengan pengakuan si wanita atau sumpah suami pertama setelah si wanita menolak bersumpah. Dan sebab disetubuhi suami kedua, si wanita berhak mendapat mahr mitsl darinya bila (terbukti) suami pertama sudah berhak atasnya. Bila belum, maka ia (berhak atas) mahar yang disebut dalam akad bila dakwaan suami pertama terjadi setelah persetubuhan dengan suami kedua, dan separonya bila dakwaan tersebut terjadi sebelumnya.

43. Bayi Meninggal Sebelum Dipotong Ari-arinya

- S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seorang bayi yang dilahirkan terus meninggal dunia sebelum dipotong urinya (masyimah). Bagaimanakah caranya merawat mayat tersebut? Haruskah memotong urinya terlebih dahulu ataukah tidak?
- J. Urinya tidak usah dipotong bahkan harus dirawat bersama-sama, karena uri tersebut hukumnya suci.

Keterangan, dalam kitab:

1. Hasyiyah al-Syirwani¹²

Bagian yang terpisah seperti ari-ari yang terdapat pada bayi, jika berasal dari manusia hukumnya suci, sedangkan dari selain manusia hukumnya najis. Adapun bagian yang terpisah setelah kematiannya, maka hukumnya seperti jenazahnya tanpa ada perbedaan pendapat.

44. Air Mandi Tidak Sampai Ke Pantat Mayit

- S. Apakah mayat yang air mandi tidak dapat sampai ke pantatnya (masrabah) harus ditayamumkan atau tidak? Sebagai mayat yang belum dikhitani?
- J. Pendapat Ibn Hajar apabila pada pantat itu terdapat najis, maka harus ditayamumkan dan disembahyangkan. Pendapat itu berbeda dengan

Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani 'ala Tuhfah al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418H/1997 M), Cet. I, Jilid I, h. 318.

pendapat Imam Ramli. Tetapi apabila pada pantat tersebut tidak terdapat najis maka kedua Imam tersebut sependapat: Bahwa harus ditayamumkan dan disembahyangkan. Sedang Muktamar memilih pendapat Imam Ibn Hajar.

Keterangan, dalam kitab:

1. Itsmid al-'Ainain13

Mayit yang sulit dibersihkan bagian dalamnya (seperti kulup penis), maka cukup ditayamumkan dan dishalatkan. Pendapat ini menurut Ibnu Hajar. Sedangkan menurut Muhammad Ramli, mayit tersebut tidak perlu ditayammumi dan tidak pula dishalati, namun langsung dikubur.

45. Harut dan Marut Termasuk Malaikat

- S. Harut dan Marut itu termasuk jenis malaikat, jin, ataukah manusia?
- J. Para ulama dalam hal tersebut berbeda pendapat, tetapi Muktamar memilih pendapat yang menyatakan, bahwa Harut dan Marut itu dari jenis malaikat yang terjaga dari perbuatan dosa (ma'shum).

Keterangan, dalam kitab:

1. Tanwir al-Qulub14

وَأَمَّا مَا اشْتَهَرَ مِنْ قِصَّةِ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَجَعْلُهُمَا مَلَكَيْنِ يُعَلِّمَانِ السِّحْرَ مَعَ زِيَادَةِ كَذِبُ الْمُؤَرِّخِيْنَ أَنَّهُمَا عُوْقِبَ وَمُسِخَا فَنَلِكَ كُلُّهُ كَذِبُ وَزُوْرٌ وَبَاطِلٌ لاَ يَحِلُّ اعْتِقَادُهُ فِيْهِمَا أَنَّهُمَا إِنْ لَمْ يَكُوْنَا مَلَكَيْنِ فَتَعْلِيْمُهُمَا السِّحْرَ لَمْ يَكُنْ لِأَجْلِ الْعَمَلِ بِهِ بَلْ لِلتَّحَرُّزِ مِنْهُ بِتَعْرِيْفِ حَقِيْقَتِهِ وَبَيَانِ يَكُونَا مَلَكَيْنِ فَتَعْلِيْمُهُمَا السِّحْرَ لَمْ يَكُنْ لِأَجْلِ الْعَمَلِ بِهِ بَلْ لِلتَّحَرُّزِ مِنْهُ بِتَعْرِيْفِ حَقِيْقَتِهِ وَبَيَانِ شَرَّ وَعُقُونَتِهِ وَلِهَذَا أَخْبَرَ اللهُ إِنَّهُمَا مَا كَانَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا خَعْنُ فِتْنَةً فَلاَ تَكُفُرْ.

Adapun kisah yang terkenal tentang Harut dan Marut, yang kemudian keduanya dijadikan sebagai malaikat yang mengajarkan sihir disertai adanya tambahan kebohongan oleh para sejarahwan bahwa keduanya telah dihukum dan berubah bentuknya, semuanya itu adalah dusta, palsu dan batil, tidak layak untuk diyakini dan didengarkan.

bukan malaikat maka masalahnya menjadi jelas. Adapun yang wajib diyakini adalah bahwa jika keduanya Sedangkan jika memang malaikat,

¹³ Ali Bashabrin, Itsmid al-'Ainain dalam Abdurrahman Ba'alawi, Hamisy Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 H/1952 M), h. 42.

¹⁴ Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir al-Qulub, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 85

maka pengajaran mereka tentang sihir tidak dimaksudkan untuk diamalkan, namun sebagai kewaspadaan dengan memberitahukan hakekatnya dan menjelaskan keburukannya serta hukumannya. Oleh karenanya Allah mengabarkan (al-Baqarah: 102) bahwa mereka tidak pernah mengajarkan sihir kepada siapapun, sehingga mereka sampai berkata: "Kami ini hanya sebagai cobaan, karenanya janganlah kamu kafir".

46. Nabi Isa Akan Turun Kembali Ke Dunia Sebagai Nabi dan Rasul

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang Nabi Isa a.s. setelah turun kembali ke dunia. Apakah tetap sebagai Nabi dan Rasul? Padahal Nabi Muhammad Saw. adalah Nabi terakhir. Dan apakah mazhab empat itu akan tetap ada pada waktu itu?

J. Kita wajib berkeyakinan bahwa Nabi Isa a.s. itu akan diturunkan kembali pada akhir zaman nanti sebagai Nabi dan Rasul yang melaksanakan syariat Nabi Muhammad Saw. dan hal itu, tidak berarti menghalangi Nabi Muhammad Saw. sebagai Nabi yang terakhir, sebab Nabi Isa a.s. hanya akan melaksanakan syariat Nabi Muhammad Saw. Sedangkan mazhab empat pada waktu itu hapus (tidak berlaku).

Keterangan, dalam kitab:

1. Asna al-Mathalib15

قَالَ تَعَالَى: وَلَكِنْ رَسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ التَّبِيِّيْنَ. وَلاَ يُعَارِضُهُ مَا ثَبَتَ مِنْ نُزُوْلِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمِ أَخِرَ الزَّمَنِ لِأَنَّهُ لاَ يَأْتِي بِطَرِيْقَهِ نَاسِخَةٍ بَلْ مُقَرِّرَةً لِشَرِيْعَةِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِلاً بِهَا.

Allah berfirman (al-Ahzab: 40) "...akan tetapi Rasulullah dan penutup Nabi-Nabi" firman Allah tersebut tidak bertentangan dengan (hadis) yang menjelaskan tentang turunnya Isa a.s. di akhir zaman, karena Ia tidak akan datang dengan ajaran yang menghapuskan ajaran Nabi Muhammad Saw., namun justru akan menetapkannya dan mengamalkannya.

2. Al-Fatawa al-Haditsiyah16

52

Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1422 H/2001 M), Cet. Ke-1, Juz VI, h. 252.

¹⁶ Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Haditsiyah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1390 H/1970 M), Cet. Ke-2, h. 180.

بِذَلِكَ بِمَذْهَبِ أَحَدٍ مِنَ الْمُجْتَهِدِيْنَ أَمْ بِاجْتِهَادٍ؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ مُنَرَّهُ عَنْ أَنْ يُقَلِّدَ غَيْرَهُ مِنْ بَقِيَّةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ بَلْ هُوَ أَوْلَى بِالْاِجْتِهَادِ. إه

Beliau ditanya (mudah-mudahan Allah memberi manfaat terhadap ilmu beliau), dengan statemen: Para ulama sepakat bahwa Isa akan melaksanakan hukum berdasarkan syariat kita (Islam), maka bagaimanakah cara pelaksanaan hukumnya apakah berdasarkan salah satu mazhab dari mazhab-mazhab yang ada ataukah berdasarkan ijtihad? Jawabnya adalah, bahwa Isa a.s. itu tersucikan dari ikut menjadi *muqallid* terhadap imam-imam mujtahid, bahkan ia lebih utama untuk berijtihad sendiri.

3. Al-Mizan al-Kubra¹⁷

فَانْظُرْ يَا أَخِيْ إِلَى الْعَيْنِ فِي أَسْفَلِ الشَّجَرَةِ وَإِلَى الْفُرُوْعِ وَالْأَغْصَانِ وَالقِّمَارِ تَجِدْهَا كُلَّهَا مُتَفَرِّعَةً مِنْ عَيْنِ الشَّرِيْعَةِ إِلَى أَنْ قَالَ: إِلَى أَنْ يَخْرُجَ الْمَهْدِي عَلَيْهِ السَّلاَمِ فَيُبْطِلُ فِيْ عَصْرِهِ التَّقَيُّدَ مِنْ عَيْنِ الشَّرِيْعَةِ إِلَى أَنْ قَالَ: لِلَى أَنْ يَخْرُجَ الْمَهْدِي عَلَيْهِ السَّلاَمِ فَيُبْطِلُ فِيْ عَصْرِهِ التَّقَيُّد بِالْعَمَلِ بِقَوْلِ مَنْ قَبْلَهُ مِنَ الْمَذَاهِبِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ أَهْلُ الْكَشْفِ إِلَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ إِذَا نَزَلَ عِيْسَى عَلَيْهِ وَلِلْمَ الْخَصْمُ إِلَى أَمْرٍ آخَرَ وَهُوَ أَنْهُ يُوحَى إِلَى السَّيِّدِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ السَّيِّدِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ الْمُعَلِيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ السَّلاَمُ إِلَى السَّلاَمُ إِلَى السَّلاَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لِسَانِ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لِسَانِ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى السَّيِهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لِسَانِ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى السَّيْدِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لِسَانِ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ إِلَى السَّيْمِ فَي السَّلاَمُ الللْهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّالِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ السَّالِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ السَّالِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ السَّلِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الْمَالِ السَّكِمَ السَّلَامُ السَّلَامُ الْمُعْلِيْلِ عَلْمَ السَّلَةُ عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّلِيْمِ الْمَالِي السَّلِي السَّلَامُ السَّلَوْمُ الْمُنْ السَّيْمِ السَّلْسُلِهِ عَلْمَ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلِي السَّلَامُ السَّلِيْمُ السَّلَامُ السَّلِيْمُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَلَيْمُ السَّلَامُ السَلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَلْمِ السَلْمُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَّامُ السَلَيْمَ السَلَيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ السَلَيْمِ السَلَيْمِ السَلَيْمِ السَلَيْمُ السَلْمِ السَلَيْمِ السَلَّلَةُ السَلَيْمُ السَلَيْمِ السَلَيْمَ السَلَيْمِ السَلَيْمِ السَلَيْمُ السَلَيْمُ السَلْمِ السَلَيْمُ السَ

Maka lihatlah wahai saudaraku apa yang ada di bawah pohon dan cabangnya, rantingnya serta buahnya, maka Anda akan mendapatkan semuanya bercabang dari inti syariat,.... sampai keluarnya Imam Mahdi yang akan membatalkan amalan yang berdasarkan taklid pada mazhabmazhab yang ada pada masanya seperti telah dijelaskan oleh para ahli kasyaf,.... sampai kemudian Isa a.s. turun, maka bergantilah hukum ke yang lainnya dan bahwasannya ia mendapatkan wahyu untuk melaksanakan syariat Muhammad Saw. melalui lisan jibril a.s.

47. Mengarak Puncak Kubah (Mustaka)

- S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang perayaan dengan mengarak puncak kubah (mustaka) apakah hal itu dianggap baik menurut agama?
- J. Perayaan mengarak mustaka itu hukumnya boleh! Karena tidak terdapat larangan dalam agama. Adapun baik dan buruknya tergantung kepada mereka yang mengerjakan. Hal tersebut telah maklum bagi mereka yang berpengetahuan tentang ilmu fiqh.

¹⁷ Adul Wahhab Al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, (Mesir: Musthafa al-Halabi, tth), Cet I, Juz 1, h. 49.

48. Membeli Dinar Emas dengan Harga Rupiah/Uang Kertas

- S. Sahkah membeli Dinar emas dengan harga f. 15,- dengan pembayaran angsuran setiap hari f. 1,-.?
- J. Apabila dengan perjanjian pembayaran dengan yang perak, atau tidak dengan perjanjian apa-apa, maka hukumnya tidak sah! Karena termasuk riba nasai (tempo). Apabila dengan perjanjian pembayaran dengan uang kertas, maka hukumnya sah dan tidak termasuk riba.

Catatan: Demikian itu kata-kata rupiah diartikan rupiah perak, sebagaimana pada waktu Muktamar ke-3, tetapi pada masa sekarang rupiah itu berarti uang kertas, maka hukumnya tidak riba apabila tidak ada perjanjian lain (pen).

Keterangan: Dalam kitab:

1. Syams al-Isyraq18

فَوَرَقُ النَّوْطِ عِنْدَ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ كَالْفُلُوْسِ النُّحَاسِ فِيْ إِعْطَاءِ حُكْمِ الْعَرَضِ مِنْ عَدَمِ وُجُوْبِ زَكَاةٍ قِيْمَتِهِ إِلاَّ لِتِجَارَةٍ بِشُرُوطِهَا الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ جَوَازِ الرِّبَا فِيْهِ بِأَنْوَاعِهِ الْأَرْبَعَةِ وَهُوَ رِبَا الْفَضْلِ وَرِبَا الْيَدِّ وَرِبَا النَّسَاءِ وَرِبَا الْقَرْضِ. إه

Maka uang kertas menurut para tokoh mazhab Syafi'i adalah sama seperti uang tembaga dalam pemberian hukum sebagai komoditas yang nominalnya tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan dengan syarat-syarat sebagaimana yang telah disebutkan dengan kebolehan riba dalam empat macamnya, riba fadl, riba yad, riba nasai dan riba qardh.

49. Lelaki Beristri Mengaku Tidak Beristri, Supaya Lamarannya Diterima

- S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seorang lelaki yang mempunyai istri, melamar seorang wanita dan menyatakan bahwa ia tidak mempunyai istri dengan maksud supaya lamarannya diterima. Apakah pengakuannya itu berarti mencerai istrinya?
- J. Ucapan dan pengakuan tersebut dianggap sebagai pernyataan cerai yang tidak terang (kinayah talaq), sedang terlaksananya perceraian atau tidak tergantung kepada niatnya sendiri.

Keterangan, dalam kitab:

¹⁸ Muhammad Ali al-Maliki, *Syams al-Isyraq fi Hukmi al-Ta'amul bi al-Arwaq*, (Indonesia: Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah, t. th.), h. 96-97.

وَإِنْ قَالَ لَهُ رَجُلُ أَلَكَ زَوْجَةُ ؟ فَقَالَ "لاَ" فَإِنْ لَمْ يَنْوِ بِهِ الطَّلاَقَ لَمْ تُطَلَّقُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيْجٍ وَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّلاَقَ وَقَعَ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الطَّلاَقَ. إه

Seandainya seseorang yang ditanyai, apakah Anda beristri? dan ia menjawab "tidak", maka jika ia tidak berniat talaq, maka istrinya tidak tertalaq, karena ucapannya tidak jelas mengacu pada perceraian. Namun jika ia berniat talaq, maka talaq pun jatuh, karena ucapannya memang memungkinkan akan perceraian.

50. Tariqat Tijaniyah Beserta Baiat Barzakhiyah

- S. Apakah tariqat Tijaniyah, apakah tariqah ini mempunyai sanad muttasil kepada Rasulullah Saw.? Apakah baiat Barzakhiyah itu dapat dianggap (sah) sebagai tariqat yang sah dalam agama Islam, walaupun dilakukan sebagai cara sadar (yaqazhah) dan pembaiatnya seorang yang terkenal wali? Manakah yang lebih utama, tariqat Tijaniyah ataukah lainnya?
- J. Memang tariqat Tijaniyah itu mempunyai sanad muttasil kepada Rasulullah Saw. beserta baiat Barzakhiyah dan dapat dianggap sebagai tariqat yang sah dalam Islam. Semua tariqat yang bersendikan keutamaannya, baik tariqat Tijaniyah maupun lainnya itu sama.

Keterangan, dalam kitab:

1. Hidayah al-Adzkiya²⁰

Adapun tariqat semua syekh/guru *tariqah*, berdasarkan kepada kitab Tuhan (al-Qur'an) dan al-Hadis.

51. Pembelian Secara Remburs/Inden

- S. Bagaimana hukumnya pembelian secara remburs, yaitu pesanan atas barang tertentu yang dikirim melalui pos dengan harga tertentu dan harus dibayar sebelum menerima dan melihat barang tersebut?
- J. Menurut pendapat yang lebih terang dalilnya (azhhar), bahwa pembelian secara remburs itu tidak sah! Sedang pendapat kedua menyatakan sah. Dengan ketetapan hak pilih bagi pembeli (khiyar) atas barang tersebut sekalipun telah sesuai dengan permintaannya.

¹⁹ Imam Abu Ishaq al-Syirazi, al-Muhadzab, (Mesir: Maktabah Isa al-Halabi, t.th.), Jilid II, h. 82

²⁰ Zainuddin al-Malibari, Hidayah al-Adzkiya dalam Muhammad Nawawi al-Bantani, Kifayah al-Atqiya, (Semarang: Usaha Keluarga, t. th.), h. 27.

Keterangan, dalam kitab:

1. Mughni al-Muhtaj²¹

وَاْلاَّظْهَرُ اَنَّهُ لاَ يَصِحُّ بَيْعُ الْغَائِبِ وَالثَّانِي يَصِحُّ إِذَا وُصِفَ بِذِكْرِ جِنْسِهِ وَنَوْعِهِ إِغْتِمَادًا عَلَى الْوَصْفِ فَيَقُولُ بِعْتُكَ عَبْدِيْ التُّرْكِي أَوْ فَرْسِي أَو الْعَرَبِيّ أَوْ نَحْو ذَلِكَ إِلَى أَنْ قَالَ: (وَيَثْبُتُ الْوَصْفِ فَيَقُولُ بِعْتُكَ عَبْدِيْ التُّرْكِي أَوْ فَرْسِي أَو الْعَرَبِيّ أَوْ نَحْو ذَلِكَ إِلَى أَنْ قَالَ: (وَيَثْبُتُ الْوَصْف. إِهِ الْمُشْتَرِي (عِنْدَ الرُّوْيَةِ) وَإِنْ وَجَدَهُ كَمَا وُصِفَ. إِه

Menurut pendapat yang lebih kuat, bahwa penjualan secara inden itu tidak sah. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, penjualan inden itu sah, jika disebutkan kriterianya dan jenisnya secara jelas, seperti ucapan si penjual: aku menjual padamu budakku yang beretnis Turky atau Persia atau Arab dan lainnya. Si pembeli berhak untuk memilih untuk melanjutkan atau membatalkan ketika melihat barang yang dipesannya, walaupun ia mendapatkannya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkannya.

52. Menjual Sebagian dari Zakat yang Sudah Disahkan

- S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seseorang yang memberikan sebagian dari zakatnya berupa padi kepada yang berhak menerimanya dengan berkata, 'Terimalah pembagian dari zakatku ini, dan sisanya masih ada pada saya", si penerima zakat (mustahiq) menjawab, 'Kami menerima hak kami dari zakatmu dan kami serahkan (wakilkan) kepada saudara untuk menjualkannya." Kemudian ia sebagai wakil menjual seluruh zakatnya. Hal tersebut dapatkah dianggap sebagai zakat? Dan bagaimana hukumnya penjualan tersebut?
- J. Penjualan sebagian dari zakat yang sudah diserahkan itu hukumnya sah dan dapat dianggap sebagai zakat, sedang sisanya yang belum diserahkan, tidak boleh dijual dan belum sah sebagai zakat karena belum diserahkan. *Keterangan*, dalam kitab:
- 1. Fath al-Mu'in dan I anah al-Thalibin²²

وَلَوْ قَالَ لِآخَرَ اِقْبِضْ دَيْنِيْ مِنْ فُلاَنٍ وَهُوَ لَكَ زَكَاةً لَمْ يَكْفِ حَتَّى يَنْوِيَ هُوَ بَعْدَ قَبْضِهِ ثُمَّ يَأْذَنَ لَهُ فِيْ أَخْذِهَا (قَوْلُهُ لَمْ يَكْفِ) أَي لَمْ يُجْزِ عَنِ الزَّكَاةِ وَذَلِكَ لِامْتِنَاعِ اتِّحَادِ الْقَابِضِ وَالْمُقْبِضِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ. (وَقَوْلُهُ حَتَّى يَنْوِيَ إلخ) أي فَإِنَّهَا تَكْفِي لِعَدَمِ اتِّحَادِ ذَلِكَ. Seandainya ada yang berkata pada orang lain: "Ambillah utangku yang

²¹ Muhammad al-Khathib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj 'ala al-Minhaj, (Beirut: Dar Fikr, t. th.), Jilid II, h. 26.

²² Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in dalam al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, l'anah al-Thalibin (Singapura: Maktabah Sulaiman Mar'i, t.th). Jilid II, h. 182-183.

berada di fulan sebagai zakatku untukmu". Demikian itu tidak cukup sebagai pembayaran zakat sampai ia berniat setelah barang diserahkan kemudian mengizinkan kepada orang yang disuruh tersebut untuk mengambilnya. Hal ini karena tidak adanya kesatuan antara yang menyerahkan dengan yang diserahi berdasarkan pendapat yang bisa dijadikan pedoman. Yang dimaksud sampai ia berniat, ... cara demikian cukup (boleh) karena yang menyerahkan dengan yang diserahi tidak satu orang.

53. Shalat Jum'at Sebagai Pengganti Shalat Zhuhur bagi Wanita

- S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang kaum wanita yang mengikuti shalat Jum'at. Cukupkah sebagai ganti shalat Zhuhur mereka? Manakah yang lebih utama: Shalat Zhuhur berjamaah bersama wanita atau shalat Jum'at?
- J. Shalat Jum'at bagi kaum wanita itu cukup sebagai pengganti shalat Zhuhur, dan bagi kaum wanita tidak cantik, tidak banyak aksi dan tidak bersolek itu sebaiknya ikut menghadiri shalat Jum'at.

Keterangan, dalam kitab:

1. Bughyah al-Mustarsyidin²³

(مَسْأَلَةٌ) يَجُوْزُ لِمَنْ لاَ تَلْزَمُهُ الجُمُعَةُ كَعَبْدٍ وَمُسَافِرٍ وَامْرَأَةٍ أَنْ يُصَلِّيَ الجُمُعَةَ بَدَلاً عَنِ الظُّهْرِ وَتُجُوْزُهُ بَلْ هِيَ أَفْضَلُ لِأَنَّهَا فَرْضُ أَهْلِ الْكَمَالِ وَلاَ تَجُوْزُ إِعَادَتُهَا ظُهْرًا بَعْدُ حَيْثُ كَمُلَتْ شُهُ وْطُهَا.

Diperkenankan bagi mereka yang tidak berkewajiban Jum'at seperti budak, musafir, dan wanita untuk melaksanakan shalat Jum'at sebagai pengganti Zhuhur, bahkan shalat Jum'at lebih baik, karena merupakan kewajiban bagi mereka yang sudah sempurna memenuhi syarat dan tidak boleh diulangi dengan shalat Zhuhur sesudahnya, sebab semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi secara sempurna.

54. Pemilik Bibit (Bukan Pemilik Tanah) yang Diwajibkan Mengeluarkan Zakat

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seorang pemilik tanah yang mengolah tanah (sawah)nya (bagi hasil) kepada beberapa orang petani dengan aqad

²³ Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 H/1952 M), h. 78-79.

Muhkabarah (bibit dari pengolah), hasil yang diperoleh oleh tiap-tiap petani (pengolah) tidak sampai ke batas minimal zakat (nishab) akan tetapi jumlah hasil yang diperoleh pemilik tanah dari masing-masing petani seluruhnya mencapai nishab, bahkan lebih. Apakah ia (pemilik tanah) diwajibkan mengeluarkan zakat dari semua hasil yang dimiliki? Atau hanya wajib mengeluarkan zakat dari hasil yang menjadi bagiannya? Ataukah harus dijumlah bersama-sama, hasil yang diperolehnya dari hasil yang diperoleh dari para petani (pengolah) seluruhnya?

J. Pemilik tanah tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Walaupun ia memiliki lebih dari nishab, apabila tiap-tiap petani (*lmil*) tidak menghasilkan sampai nisab sebelum hasil itu dibagi, karena yang diwajibkan mengeluarkan zakat itu, ialah orang yang mempunyai bibit dan dalam hal tersebut adalah petani (*lmil*).

Keterangan: Sebagaimana telah dimaklumi dalam kitab-kitab fiqh.

55. Ayah Nabi Ibrahim a.s. Termasuk Ahli Neraka?

- S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang ayah Nabi Ibrahim a.s. Apakah termasuk ahli surga (mukmin) ataukah ahli neraka (kafir)?
- J. Muktamar memutuskan bahwa ayah Nabi Ibrahim a.s. itu termasuk ahli neraka (kafir).

Keterangan, dalam kitab:

1. Fatawi al-Ramli²⁴

وَقَدْ اتَّفَقَتْ أَثِمَّةُ التَّفْسِيْرِ وَأَهْلُ السَّنَّةِ وَغَيْرُهُمْ عَلَى أَنَّ أَبَا إِبْرَاهِيْمَ كَانَ كَافِرًا وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوْا فِي اِسْمِهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَالضَّحَّاكُ وَالْكُلْبِيّ وَسَعِيْدُ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اسْمُ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ آزَرُ وَهُوَ تَارَخُ مِثْلُ إِسْرَاثِيْلَ وَيَعْقُوْبَ. إه

Para tokoh tafsir hadis dan lainnya telah sepakat bahwa ayah Ibrahim itu orang kafir, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang namanya. Muhammad bin Ishaq, al-Dhahhak, al-Kalby dan Said bin Abdul Aziz menyatakan, bahwa nama ayah Ibrahim adalah Azar dan Tarakh, seperti Israil dan Ya'qub.

56. Membangun Bangunan di Atas Tanah Kuburan yang Diwakafkan Oleh Wali

S. Bagaimana hukumnya membangun sebuah bangunan di atas tanah

²⁴ Syamsuddin Muhammad al-Ramli, Fatawi al-Ramli pada Hamisy Ibn Hajar al-Haitami, al-Fawa al-Kubra al-Fiqhiyah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M), Jilid IV, h. 322.

kuburan yang diwakafkan oleh seorang wali pada zaman dahulu, dan luas tanah tersebut dapat diketahui dalam buku register pemerintah?

J. Tidak boleh! Kecuali bagi ahli waris wali tersebut.

Catatan: Jadi, tanah kuburan tersebut dalam soal di atas, harus dianggap milik wali tersebut dan oleh karenanya menjadi milik ahli warisnya (pen).

Keterangan, dalam kitab:

1. Fath al-Mu'in dan Itmah al-Thalibin²⁵

Seandainya ada seseorang membangun bangunan seperti bentuk mesjid dan ia mengizinkan pelaksanaan shalat di dalamnya, yang demikian itu tidak mengeluarkannya dari kepemilikannya, sama seperti seandainya menjadikan suatu tempat dalam bentuk kuburan dan ia mengizinkan untuk dijadikan kuburan. Itu identik dengan seseorang yang menjadikan suatu tempat berpola seperti kuburan, dan ia memberi izin untuk dijadikan tempat penguburan; itu tidak melepaskan hak kepemilikannya.

57. Pinjam Sepotong Kain, Lalu Dikembalikan dengan Uang

- S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seseorang yang meminjam sepotong kain, kemudian ia mengembalikan uang seharga kain tersebut. Bolehkah hal itu dianggap sebagai jual-beli?
- J. Boleh (sah) Karena demikian itu merupakan kinayah jual-beli.

Keterangan, dalam kitab:

1. Al-Qulyubi²⁶

Apa yang jelas pada babnya dan tidak ada peluang hal lain pada temanya, maka itu merupakan kinayah pada lainnya.

²⁵ Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in dan al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, l'anah al-Thalibin (Singapura: Maktabah Sulaiman Mar'i, t.th). Jilid III, h. 161.

²⁶ Syihabuddin al-Qulyubi, Hasyiyah al-Qulyubi, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t. th.), Jilid III, h. 326.

58. Mempercayai Hari Naas

- S. Bolehkah berkeyakinan terhadap hari naas, misalnya hari ketiga atau keempat pada tiap-tiap bulan, sebagaimana tercantum dalam kitab Lathaiful Akbar?
- J. Muktamar memilih pendapat yang tidak membolehkan.

Keterangan, dalam kitab:

1. Fatawa al-Haditsiyah²⁷

مَنْ يَسْأَلُ عَنِ النَّحْسِ وَمَا بَعْدَهُ لَا يُجَابُ إِلاَّ بِالْإِعْرَاضِ عَنْهُ وَتَسْفِيهِ مَا فَعَلَهُ وَيُبَيِّنُ قُبْحَهُ وَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّةِ الْيَهُوْدِ لاَ مِنْ هَدْيِ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُتَوَكِّلِيْنَ عَلَى خَالِقِهِمْ وَبَارِثِهِمْ الَّذِيْنَ لاَ يَحْسَبُوْنَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ. وَمَا يُنْقَلُ مِنَ اْلاَّيَّامِ الْمَنْقُوطَةِ وَخَوْهِا عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ بَاطِلٌ كَذِبٌ لاَ أَصْلَ لَهُ فَلْيَحْذَرْ مِنْ ذَلِكَ. إه

Barangsiapa yang bertanya tentang hari sial dan sesudahnya maka tidak perlu dijawab, melainkan dengan berpaling, menganggap bodoh tindakannya dan menjelaskan keburukannya. Semua itu merupakan kebiasaan orang Yahudi dan bukan petunjuk orang Islam yang bertawakal kepada penciptanya yang tidak pernah menggunakan hisab dan bertawakal terhadap Tuhannya serta. Dan hari-hari nestapa yang dinukil dari sahabat Ali –karamallahu wajhah- adalah batil, dusta dan tidak berdasar, maka berhati-hatilah dari semuanya.[]

²⁷ Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Haditsiyah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1390 H/1970 M), Cet. Ke-2, h. 28.

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-4

Di Semarang Pada Tanggal 14 Rabiuts Tsani 1348 H. / 19 September 1929 M.

- 59. Boleh Mengubur Mayit dalam Peti Dari Pada Menguburnya di dalam Kuburan yang Mengeluarkan Air
 - 60. Maksud "Lupa" di dalam Hapalan al-Qur'an
 - 61. Mengeluarkan Zakat Penghasilan Tanah dengan Uang
- 62. Uang Logam Lebih dari Nishab, Wajibkah Dikeluarkan Zakatnya
- 63. Mengeluarkan Zakat Perdagangan Beserta Penghasilan Tanahnya
 - 64. Padi Ketan Termasuk Hasil Bumi yang Wajib Dizakati
 - 65. Uang Kertas Dipergunakan untuk Zakatnya Uang Kertas
- 66. Menyerahkan Kurbannya Kepada Orang Lain, Lalu Oleh Orang Lain Itu Diwakilkan Kepada Orang Lain Lagi untuk Dipotong
- 67. Mewakilkan Kepada Orang Fasik untuk Menyembelih Kurban
- 68. Penukaran Uang Ringgit Perak dengan Sepuluh Uang Talenan (dari Perak)
- 69. Penerima Gadai Mengambil Manfaat Setelah Akad Gadai Selesai 70. Mendirikan Jum'at Kurang dari 40 Orang
 - 71. Berpuasa Menurut Mazhab Selain Mazhab Syafi'i
- 72. Uang Wakaf untuk Pembangunan Mesjid Digunakan untuk Membiayai Pekerjaan Bangunan
 - 73. Memungut Derma untuk Mendirikan Mesjid yang Akan Dibangun
 - 74. Memungut Uang dan Bayaran Sekolah
 - 75. Lelaki Memakai Suasa (Emas Campuran)
 - 76. Beramal dengan Maksud Riya Lalu Bertobat
 - 77. Disuruh Membeli Sesuatu, Lalu Dibelikan Barang Lain
- 78. Pakaian di Tangan Penjahit Sampai Lama Sebab Pemiliknya Pergi
 - 79. Barang Ditarik Kembali Sebab Cicilannya Belum Lunas
 - 80. Menambah Harga Barang dari Ketentuan
 - 81. Menggarap Sawah dengan Syarat Membersihkan Padi dan Menjemurnya
- 82. Menyewa Tanah yang di dalamnya Ada Pohon yang Bertumbuh 83. Menggarapkan Tanah Orang Islam Kepada Orang Kafir
- 84. Membeli Buah-buahan di atas Pohon dalam Waktu yang Ditentukan

59. Boleh Mengubur Mayit dalam Peti Daripada Menguburnya di dalam Kuburan yang Mengeluarkan Air

- S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang kuburan yang mengeluarkan air, dan selalu tergenang air sebelum selesai pemakaman mayat. Apakah pemakaman mayat dalam kuburan itu termasuk penghinaan kepada mayat? Kalau demikian halnya, apakah mayat itu wajib dikebumikan di dalam peti yang dapat mencegah masuknya air? Ataukah sama sekali tidak diperbolehkan memakamkan mayat di dalam kuburan itu?
- J. Memang benar, bahwa memakamkan mayat di dalam kuburan yang mengeluarkan air termasuk penghinaan kepada mayat dan memakamkan mayat di dalam peti itu hukumnya boleh (tidak makruh), menurut keterangan di dalam kitab *Tuhfah*, sedang di dalam kitab *Itmah* diterangkan apabila keadaan demikian, maka memakamkan mayat dalam peti hukumnya wajib. *Keterangan*, dalam kitab:

1. Tuhfah al-Muhtaj¹

(يُكْرَهُ دَفْنُهُ فِي التَّابُوْتِ) إِجْمَاعًا لِأَنَّهُ بِدْعَةُ (إِلاَّ لِعُدْرٍ) كَكُوْنِ الدَّفْنِ فِيْ أَرْضِ نَدِيَةٍ بِتَخْفِيْفِ التَّاجُوتِ أَوْ بِهَا سَبُعُ تَحْفُرُ أَرْضَهَا وَإِنْ أَحْكِمَتْ أَوْ تَهَرَّى جِمِّيْتُ لاَ يَضْبِطُهُ إِلاَّ التَّابُوْتُ أَوْ كَانَ اِمْرَأَةً لاَ تَحْرَمَ لَهَا فَلاَ يُكْرَهُ لِلْمَصْلَحَةِ بَلْ لاَ يَبْعُدُ وُجُوْبُهُ فِيْ مَسْأَلَةِ السِّبَاعِ إِنْ غَلَبَ وُجُوْدُهَا وَمَسْأَلَةِ التَّهَرِّيْ.

Sesuai kesepakatan ulama, dimakruhkan mengubur jenazah dalam peti, karena termasuk bid'ah, kecuali kalau ada uzur, seperti di tanah yang lembab atau gembur berair atau adanya binatang buas yang akan menggalinya walaupun sudah padat yang sekiranya tidak akan bisa terlindungi kecuali dengan dimasukkan dalam peti, atau jenazah wanita yang tidak punya mahram. Dalam hal ini maka tidak dimakruhkan menggunakan peti mati untuk kemaslahatan, bahkan bila diperkirakan adanya binatang buas, maka hukumnya menjadi wajib.

2. I anah al-Thalibin²

وَكُرِهَ صُنْدُوْقً إِلاَّ لِنَحْوِ نَدَاوَةٍ فَيَجِبُهُ

¹ Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj*, (Mesir: Musthafa Muhammad, t. th.), Jilid III, h. 194.

² Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, (Semarang: Thaha Putra, t.th.) Jilid II, h. 117.

Dimakruhkan mempergunakan peti mati kecuali semisal berada di tanah yang lembab berair, maka hukumnya wajib.

60. Maksud "Lupa" di dalam Hapalan al-Qur'an

- S. Para ulama menyatakan, bahwa melupakan hapalan al-Qurtin itu termasuk dosa besar. Apakah yang dimaksudkan lupa dalam hal ini, lupa tidak hapal lagi? Ataukah lupa hingga tidak dapat membaca?
- J. Yang dimaksud dalam lupa di sini ialah lupa tidak hafal lagi karena kelengahannya walaupun masih dapat membaca al-Qur'an.

Keteranga, dalam kitab:

1. Al-Fatawi al-Kubra³

وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْتُهُ أَنَّ الْمَدَارَ فِي النِّسْيَانِ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْإِزَالَةِ عَنِ الْقُوَّةِ الْحَافِظَةِ بِحَيْثُ لَا يَحْفَظُهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ كَالصَّفَةِ الَّتِي كَانَ يَحْفَظُهُ عَلَيْهَا قَبْلُ إِلَى أَنْ قَالَ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ نِسْيَانُ يُنْسَبُ فِيْهِ إِلَى التَّقْصِيْرِ.

Sebagaimana diketahui dari hukum yang telah aku putuskan bahwa lingkup dari pengertian lupa adalah hilangnya kekuatan hapalan sekira tidak mengingatnya lagi di luar kepala seperti kualitas hafalan sebelumnya ... Adapun yang dimaksud dengan lupa di sini adalah yang disebabkan oleh adanya keteledoran.

61. Mengeluarkan Zakat Penghasilan Tanah dengan Uang

- S. Bolehkah mengeluarkan zakat penghasilan tanah dengan uang seharga penghasilan itu?
- J. Tidak boleh, dan tidak cukup sebagai zakat, walaupun jumlahnya seharga hasil tersebut.

Keterangan, dalam kitab:

1. Fath al-Mu'in dan I anatut-Thalibin4

وَلاَ دَفْعُ الْقِيْمَةِ فِيْ غَيْرِ مَالِ التِّجَارَةِ وَلاَ دَفْعُ عَيْنِهِ فِيْهِ (قَوْلُهُ وَلاَ دَفْعُ الْقِيْمَةِ) مَعْطُوفٌ عَلَى نَقْلِ الزَّكَاةِ فَيَكُونُ الْفِعْلُ مُسَلَّطًا عَلَيْهِ لَكِنْ بِقَطْعِ النَّظْرِ عَنْ مُتَعَلِّقِهِ

³ Ibn Hajar al-Haitami, al-Fawa al-Kubra al-Fiqhiyah, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid I, h. 36.

⁴ Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in dan al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, l'anah al-Thalibin, (Semarang: Thaha Putra, t.th.). Jilid II, h. 193.

أَعْنِي لِلْمَالِكِ إِلَى أَنْ قَالَ وَالْمَعْنَى لاَ يَجُوْزُ لِلْمُخْرِجِ مُطْلَقًا دَفْعُ الْقِيْمَةِ عَنِ الزَّكَاةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَعْيَانِ وَهِيَ زَكَاةً غَيْرَ مَالِ التِّجَارَةِ وَلاَ يُجْزِئُ إِهِ

Tidak boleh membayar nilai (uang) pada selain harta dagangan dan tidak pula boleh membayar barangnya dalam zakat harta dagangan,... artinya tidak diperkenankan bagi orang yang membayar zakat secara mutlak membayar uang dari zakat yang terkait dengan barangnya, yakni zakat selain harta dagangan.

62. Uang Logam Lebih dari Nishab, Wajibkah Dikeluarkan Zakatnya

- S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang orang yang memiliki uang logam lebih dari batas minimal zakat (nishab), wajibkah ia mengeluarkan zakat?
- J. Tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali bila uang logam tersebut diperdagangkan, maka ia diwajibkan mengeluarkan zakatnya sebagai barang dagangan.

Keterangan, lihat kepetusan Muktamar ke-3 soal nomor 48:

1. Syams al-Isyraq⁵

فَوَرَقُ النَّوْطِ عِنْدَ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ كَالْفُلُوْسِ النُّحَاسِ فِيْ إِعْطَاءِ حُكْمِ الْعَرَضِ مِنْ عَدَمِ وُجُوْبِ زَكَاةِ قِيْمَتِهِ إِلاَّ لِتِجَارَةٍ بِشُرُوطِهَا الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ جَوَازِ الرِّبَا فِيْهِ بِأَنْوَاعِهِ الْأَرْبَعَةِ وَهُوَ رِبَا الْفَضْلِ وَرِبَا الْيَدِّ وَرِبَا النَّسَاءِ وَرِبَا الْقَرْضِ. اه

Maka uang kertas menurut para tokoh mazhab Syafi'i adalah sama seperti uang tembaga dalam pemberian hukum sebagai komoditas yang nominalnya tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan dengan syarat-syarat sebagaimana yang telah disebutkan dengan kebolehan riba dalam empat macamnya, riba fadl, riba yad, riba nasai dan riba qardh.

63. Mengeluarkan Zakat Perdagangan Beserta Penghasilan Tanahnya

S. Seorang menyewa tanah, kemudian tanah itu disewakan lagi dengan mendapat keuntungan, sebelum disewakan tanah itu ditanami dan hasilnya mencapai batas nishab dan telah cukup satu tahun. Apakah ia berkewajiban mengeluarkan zakat perdagangan beserta zakat hasil buminya atau salah satu?

Muhammad Ali al-Maliki, Syams al-Isyraq fi Hukmi al-Ta'amuli bi al-Arwaq, (Indonesia, Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah, t. th.), h. 96-97.

J. Orang tersebut berkewajiban mengeluarkan zakat perdagangan apabila telah sampai masanya satu tahun dan penghasilan tanah tersebut apabila telah mencapai nishab, karena ia mempunyai tujuan berdagang dan juga wajib mengeluarkan zakat dari hasil bumi karena telah mencapai nishabnya.

Keterangan, dalam kitab:

1. Asna al-Mathalib6

Apabila seseorang menanam tanaman di tanah yang diperjual-belikan, maka masing-masing mempunyai hukum tersendiri, maka wajib membayar zakat barang pada pertanian dan zakat perdagangan pada tanah garapan.

64. Padi Ketan Termasuk Hasil Bumi yang Wajib Dizakati

- S. Apakah padi ketan itu termasuk hasil bumi yang dizakati?
- J. Padi ketan termasuk hasil bumi yang wajib dizakati, karena dapat dipergunakan sebagai bahan makanan pokok untuk hidup walaupun jarang dimakan.

Keterangan, dalam kitab:

1. Kasifah al-Saja⁷

Tidak wajib zakat kecuali pada kurma, anggur dan segala jenis bijibijian yang bisa dipergunakan untuk bahan makanan pokok, seperti gandum dan beras... walaupun yang dipergunakan untuk bahan makanan pokok tersebut jarang dimakan.

65. Uang Kertas Dipergunakan untuk Zakat Uang Kertas

S. Bolehkah uang kertas dipergunakan untuk menjadi zakat uang kertas juga? J. Tidak boleh.

⁶ Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib Syarah Raudhah al-Thalib, (Indonesia: Menara Kudus, t. th.), Jilid I, h. 384-385.

Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi, Kasyifah al-Saja, (Surabaya: Dar al-Ilmi, t. th.), h. 108.

Catatan: Demikian itu apabila uang kertas tersebut dianggap sebagai bukti utang (mengingat standarnya adalah uang emas) dan apabila uang kertas tersebut dianggap sebagai benda biasa (tidak mengingat standarnya dari uang emas) maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, sebagaimana keputusan Muktamar ke-3 soal nomor 48, bahkan demikian itu yang dipilih oleh Muktamar sebagai keputusannya pada Muktamar ke-5 soal nomor 90 (pen).

Keterangan, dalam kitab:

1. Mauhibah Dzi al-Fadhl8

Dan beliau tidak menjelaskan apa yang dikeluarkan, apakah emas atau perak? Menurut pendapat yang kuat, ia harus mengeluarkannya dalam bentuk perak, katena yang terkenal adalah bahwa gambaran yang tertulis padanya adalah nilai dirham dari rupiah dan real, bukan dinar.

2. Syams al-Isyraq 9

إِذَا عَلِمْتَ هَذَا كُلَّهُ أَنَّ الْإِحْتِمَالَ الثَّانِي فِي وَرَقِ النَّوْطِ أَعْنِي احْتِمَالَ كَوْنِهِ كَالْفُلُوْسِ هُوَ الاحْتِمَالُ الرَّاحِمُ وَالْأَحْوَطُ فِي الاحْتِمَالَيْنِ الْمَذْكُوْرَيْنِ فِيْهِ لِقُوَّةِ دَلِيْلِهِ أَمَّا أَوَّلاً فَلاَّنَّهُ إِمَّا وَلاحْتِمَالَيْنِ الْمَذْكُوْرَيْنِ فِيْهِ لِقُوَّةِ دَلِيْلِهِ أَمَّا أَوَّلاً فَلاَنَّهُ إِمَّا قِيمَالًا عِجَامِعٍ أَوْ تَخْرِيْجُ عَلَى قَاعِدَةٍ تَشْمَلُهُ كَغَيْرِهِ وَتِلْكَ الْقَاعِدَةُ هِيَ كُلُّ عَرَضٍ جَرَى بَيْنَ النَّاسِ مَجْرَى الْعَيْنِ ' يَتَحَقَّقُ فِيْهِ وَجْهَانِ وَجْهُ كَوْنُهُ كَالْعُرْفِ وَوَجْهُ كُوْنُهُ كَالْعَيْنِ وَالتَّقْدِ.

Jika Anda mengetahui ini semua bahwa kemungkinan yang kedua perihal uang kertas, yakni kemungkinan keberadaannya sama dengan fulus (uang logam) merupakan kemungkinan yang lebih unggul dan lebih berhati-hati, karena kuatnya dalil atasnya. Adapun yang pertama maka karena berdasarkan qiyas dengan satu titik temu atau mentakhrij pada kaidah yang mencakupnya, sebagaimana selainnya. Maksud kaidah

⁸ Muhammad Mahfudz al-Tarmasi al-Jawi, Mauhibah Dzi al-Fdhl, (Mesir: al-Amirah al-Syarafiyah, 1326 H), Jilid IV, h. 30.

⁹ Muhammad Ali al-Maliki, Syams al-Isyraq fi Hukmi al-Ta'amuli bi al-Arwaq, (Indonesia, Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah, t. th.), h. 105.

¹⁰ Maksud kata التَّقْتُنِي dalam redaksi ini adalah التَّقْتُنِي (emas dan perak). Lihat, Muhammad Ali bin Husain al-Makki al-Maliki, Tahdzib al-Furuq wa al-Qawa'id al-Saniyah fi al-Asrar al-Fiqhiyah dalam Anwar al-buruq fi Anwa' al-Furuq, (...: 'Alam al-Kutub, t. th.), Juz III, h. 251. (Pen.)

tersebut adalah: "Semua benda yang berlaku dimasyarakat sebagaimana emas dan perak (sebagai alat tukar), maka di dalamnya ada dua dua sudut pandang. *Pertama*, keberadaannya seperti komoditas (barang). Dan *kedua*, keberadaannya seperti emas dan perak (alat tukar).

66. Menyerahkan Kurbannya Kepada Orang Lain, Lalu Oleh Orang Lain Itu Diwakilkan Kepada Orang Lain Lagi untuk Dipotong

- S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seorang yang menyerahkan seekor kambing untuk kurbannya kepada orang lain dengan berkata, "Ini kambing untuk kurban saya", dengan tidak memakai kata-kata pernyataan mewakilkan. Setelah waktunya kurban, orang yang menerima kurban tadi menyatakan mewakilkan kepada pembantu pemotong hewan, cukupkah hal yang sedemikian itu sebagai kurbannya?
- J. Cara yang demikian itu dianggap cukup sebagai kurbannya sebagaimana yang dikuatkan oleh Imam Haramain dan Imam Ghazali. *Keterangan*, dalam kitab:
- 1. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab11

وَلَوْ قَالَ جَعَلْتُ هَذِهِ الشَّاةَ أُصْحِيَّةً فَهَلْ يَصُفِيْهِ التَّعْيِيْنُ وَالْقَصْدُ عَنْ نِيَّةِ التَّضْحِيَّةِ وَالدَّبْجِ فِيْهِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهَا عِنْدَ الْأَكْثَرِيْنَ لاَ يَصُفِيْهِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَرَجَّحَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِي الْإِكْتِفَاءَ لِتَضَمُّنِهِ النَّيَّةَ. وَبِهَذَا قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُوْ حَامِدٍ. قَالَ لَوْ ذَبَحَهَا وَيَعْتَقِدُهَا شَاةَ لَخْمٍ أَوْ ذَبَحَهَا لِصُّ وَقَعَتْ الْمَوْقِعُ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ. إه

Seandainya (pemilik kambing) berkata: kambing ini aku jadikan sebagai binatang kurban, apakah cukup penentuan dan tujuan dari niat berkurban dan sekaligus penyembelihan. Dalam hal ini ada dua pendapat, yang paling kuat menurut kebanyakan ulama, bahwa yang demikian itu tidak cukup... Imam al-Haramain dan al-Ghazali lebih mengunggulkan pendapat yang menyatakan cukup, karena sudah terkandung dalam niat. Oleh karenanya, maka al-Ghazali berkata: seadainya disembelih dan berkeyakinan bahwa binatang itu merupakan kambing potong, atau disembelih oleh pencuri, maka niat berkurban tetap terpenuhi. Sedangakan pendapat yang lebih sesuai dengan mazhab adalah yang pertama (tidak cukup).

¹¹ Muhyiddin al-Nawawi, al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab, (Cairo: Al-Maktabah al-Ilmiah, 1971 M), Jilid VIII, h. 306.

67. Mewakilkan Kepada Orang Fasik untuk Menyembelih Kurban

- S. Apabila seorang ulama menerima wakil untuk menyembelih kurban bolehkah ia mewakilkan kepada orang fasik? Dan cukupkah hal itu dan sah sebagai kurban?
- J. Mewakilkan kepada orang fasik itu boleh! Dan sah sebagai kurban. *Keterangan,* dalam kitab:
- 1. Syarh al-Mahalli12

(وَشَرْطُ الْوَكِيْلِ صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ الصَّرْفَ لِنَفْسِهِ) لاَ صَبِيُّ وَجَبُنُونُ وَكَذَا الْمَرْأَةُ وَالْمُحْرِمُ فِي النِّكَاجِ (لَكِيْلِ صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ الصَّرْفَ لِنَفْسِهِ) لاَ صَبِيًّ فِي الْإِذْنِ فِي دُخُوْلِ دَارٍ وَإِيْصَالِ هَدِيَّةٍ) لإعْتِمَادِ الشَّكَاجِ (لَكِينَ الصَّحِيِّ الصَّيِّ الصَّيِ الْمَدَاءِ نَفْسِهَا وَيَجُوْزُ وَطُوهُا السَّلَفِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ صَبِيًّ) وَلَوْ رَقِيْقًا أُنْتَى أَخْبَرَتْ بِإِهْدَاءِ نَفْسِهَا وَيَجُوْزُ وَطُوهُا السَّلِفِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ صَبِيًّ) وَلَوْ رَقِيْقًا أَنْتَى أَخْبَرَتْ بِإِهْدَاءِ نَفْسِهَا وَيَجُوْزُ وَطُوهُا وَمِثْلُ الصَّبِيِّ الْفَاسِقُ وَالْكَافِرُ. وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ وَلَيْمَ وَذَبْحِ أُضْحِيَّةٍ وَتَفْرِقَةٍ زَكَاةٍ إِه

Dan syarat menjadi wakil adalah bahwa orang tersebut diperbolehkan (tidak sedang dicabut haknya untuk) mengelola dirinya sendiri, bukan anak kecil, orang gila, wanita dan yang masih muhrimnya dalam nikah. Akan tetapi pendapat yang benar adalah boleh berpedoman kepada pendapat anak kecil dalam perizinan masuk rumah dan menyampaikan hadiah, sesuai dengan pendapat ulama salaf.

Demikian halnya dengan budak wanita yang mengabarkan dengan pemberian hadiah, maka budak tersebut boleh disetubuhi. Orang fasik hukumnya sama seperti anak kecil.

Masing-masing dari mereka itu disyaratkan sudah pandai, terpercaya dan diduga kejujurannya. Pengertian menyampaikan hadiah mencakup undangan untuk pengantin, menyembelih binatang kurban dan membagikan zakat.

68. Penukaran Uang Ringgit Perak dengan Sepuluh Uang Talenan (dari Perak)

- S.Bagaimana uang ringgitan dari perak ditukar dengan sepuluh mata uang talenan (dari perak juga) dengan perbedaan berat dan kemurnian peraknya, bolehkah penukaran tersebut?
- J. Penukaran tersebut di atas termasuk jual-beli "muddu-tijwah" (campuran).

¹² Jalaluddin al-Mahalli, Syarh Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyah al-Qulyubi, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), Jilid III, h. 337.

Menurut pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali tidak boleh. Dan menurut Imam Abu Hanifah, boleh!

Keterangan, dalam kitab:

1. Al-Mizan al-Kubra¹³

Pendapat tiga ulama mazhab adalah tidak boleh menjual sebagian dinar yang tidak mumi dengan sebagian yang lainnya. Sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah diperkenankan untuk memberi barang dagangan dengan catatan campurannya sedikit, pendapat yang pertama cukup keras dan khusus bagi orang yang sangat saleh, karena melihat dari sisi kaidah menjual satu *mud* kurma *ajwah* dan dirham. Sedangkan yang kedua adalah pendapat yang ringan.

69. Penerima Gadai Mengambil Manfaat Setelah Akad Gadai Selesai

S.Bolehkan seorang yang menggadaikan tanah dengan memperbolehkan kepada orang yang menerima gadai untuk mengambil hasil tanaman sesudah akad gadai selesai, padahal tidak ada ketentuan apa-apa di waktu akad atau di waktu khiyar? Dan tidak bolehkah diminta kembali?

J. Hal itu boleh! Dan tidak boleh diminta kembali.

Keterangan, dalam kitab:

1. Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah¹⁴

Jika orang yang menggadaikan memperbolehkan kepada penerima gadai untuk mengambil buah-buahan (yang ada pada tanah yang digadaikan), maka ia sama sekali tidak boleh menarik kembali ucapannya itu.

70. Mendirikan Jum'at Kurang dari 40 Orang

S.Bagaimana pendapat Muktamar mengenai sebuah desa yang penduduknya berkewajiban melakukan shalat Jum'at tetapi kurang dari 40 orang atau lebih

¹³ Adul Wahhab Al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t.th.), Cet I, Juz II, h. 68.

¹⁴ Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403/1983), Jilid II, h. 280.

dari 40 orang tetapi yang dapat membaca al-Fatihah tidak lebih dari 10 orang, apakah mereka wajib juga mendirikan Jum tt? Dan apabila mendirikan Jum tt apakah boleh bertaqlid kepada Imam Abu Hanifah yang membolehkan mendirikan Jum tt kurang dari 40 orang?

J. Apabila tidak dapatnya membaca al-Fatihah itu tidak karena malas belajar (taqshir) maka mereka wajib mendirikan shalat Jum'at dan apabila jumlah mereka kurang dari 40 orang, maka mereka diperbolehkan bertaqlid kepada Imam Abu Hanifah dengan ketentuan harus menunaikan rukun dan syarat menurut ketentuan Abu Hanifah, tetapi yang lebih utama, supaya bertaqlid kepada Imam Muzani dari golongan Madzhab Syafi'i.

Keterangan, dalam kitab:

1. Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah¹⁵

Bahwa orang yang buta huruf (al-Qur'an), jika dikarenakan teledor dari belajar maka shalat Jum'at tidak sah, namun jika bukan karena faktor keteledoran, maka shalat Jum'at sah dan mereka harus melaksanakannya.

2. I'anah al-Thalibin16

Maka pendapatnya tidak bertentangan dengan dua *qaul qadim* dalam bilangan. Yang pertama, jumlahnya paling sedikit empat orang sedangkan ... yang kedua, dua belas orang. Bolehkah megikuti salah satu dari dua pendapat tersebut? Jawabnya boleh, karena merupakan pendapat imam yang telah dibela dan diunggulkan oleh para pengikutnya.

71. Berpuasa Menurut Mazhab Selain Mazhab Syafi'i

- S. Sahkah berpuasa menurut mazhab Hanafi atau Maliki dengan tidak mengetahui syarat, rukun dan batalnya puasa menurut kedua mazhab tersebut?
- J. Tidak sah, karena tidak mengetahui dasar-dasar orang yang diikuti. **Catatan**: Syarat ber*taqlid* itu ada enam, yaitu:
- Harus mengetahui dasar yang dianggap benar oleh imamnya, dalam persoalan yang akan diikuti, seperti syarat, rukun, dan kewajibankewajiban.

¹⁵ Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid I, h. 273.

Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, (Semarang: Thaha Putra, t.th). Jilid II, h. 58-59.

- 2. Harus dalam persoalan yang akan dilaksanakan (bukan yang telah dikerjakan).
- 3. Tidak mencari-cari keringanan untuk menghindarkan kewajiban.
- 4. Imam yang diikuti harus bertitel Mujtahid.
- 5. Tidak mencampur-adukkan antara ketentuan satu dengan lainnya dalam satu persoalan (talfiq).
- 6. Hukum yang diikuti tidak bertentangan dengan keputusan hakim karena menyalahi dalil nash atau ijma' atau lainnya. Syarat-syarat yang tersebut juga diutarakan dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin*.

Keterangan, dari kitab:

1. Tanwir al-Qulub¹⁷

وَلِلتَّقْلِيْدِ شُرُوطِ مِتَّةِ الْأَوَّلُ مَعْرِفَةُ الْمُقَلِّدِ مَا اعْتَمَدَهُ مُقَلَّدَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي يُرِيْدُ التَّقْلِيْدُ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي يُرِيْدُ التَّقْلِيْدُ بَعْدَ الْوُقُوعِ إلى اللَّالِثُ فِيْهَا مِنْ شُرُوطٍ وَوَاجِبَاتِ إلى اللَّهِ أَنْ لاَ يَكُونَ التَّقْلِيْدُ بَعْدَ الْوُقُوعِ إلى اللَّالِثُ أَنْ لاَ يَكُونَ التَّقْلِيْدُ بَعْدَ الْوُقُوعِ إلى التَّالِيْمُ أَنْ لاَ يَتَكُونَ التَّقْلِيْدُ بَعْدَ الْوُقُوعِ إلى مُقَلَّدَهُ مُجْتَهِدًا وَالتَّالِيمُ أَنْ يَكُونَ مُقَلَّدَهُ مُجْتَهِدًا وَالنَّامِينَ اللهِ اللهِ مَنْ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

Syarat-syarat bertaqlid (mengikuti pendapat orang lain) ada enam:

- Mengetahui dasar pijakan yang dianut oleh imam yang diikuti perihal permasalahan yang diikuti seperti syarat-syarat, kewajiban dan yang lainnya.
- 2. Taqlid tidak pada masalah yang telah dilaksanakan.
- 3. Bukan untuk mencari dispensasi sehingga terhindar dari beban kewajiban.
- 4. Imam yang diikuti tersebut harus berlevel mujtahid.
- 5. Tidak mencampuradukkan antara satu ketentuan dengan ketentuan yang lain (dari imam yang berbeda).
- 6. Hukum yang diikuti bukan suatu hukum yang batal bila oleh seorang hakim dijadikan sebagai ketetapan hukum, karena bertentangan dengan nash, ijma' dan semisalnya.

72. Uang Wakaf untuk Pembangunan Mesjid Digunakan untuk Membiayai Pekerjaan Bangunan

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang uang wakaf guna pembangunan

¹⁷ Muhammad Amin al-Kurdi, *Tanwir al-Qulub*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 355-358. Lihat pula Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 H/1952 M), h. 9.

mesjid digunakan untuk perongkosan upah pekerja pembangunan, bolehkah?

J. Boleh, karena penggunaan seperti itu telah menjadi kebiasaan yang berlaku.

Keterangan, dalam kitab:

1. Al-Fatawa al-Kubra¹⁸

(وَسُئِلَ) عَنْ مَالٍ مَوْقُوْفِ لَمْ يُدْرَ عَلَى أَيِّ جِهَّةٍ لَكِنِ اشْتَهَرَ وَاسْتُفِيْضَ أَنَّهُ مَوْقُوْفُ عَلَى كَذَا وَجَرَتْ نُظَارُهُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَدِيْمِ الزَّمَانِ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى النَّاظِرِ الْمُتَأَخِّرُ اللَّمَاعُهُمْ فِيْ ذَلِكَ (فَأَجَابَ) يَجِبُ صَرْفُهُ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ الْأَوَّلِيْنَ فِيْهِ وَيَجْرِي عَلَى النَّافِرِ الْمُتَأَخِّرُ الْتَافِلُ الْمُعْهُوْدِ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ فِيْهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ مِنْ عِمَارَةٍ وَغَيْرِهَا وَيُتْبَعُ فِيْ الْعُوفُ الْمُعْدُودُ الْعَامُ الْمَعْلُومُ فِيْمًا تَقَدَّمَ إِلَى الْآنَ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ فَإِنَّ الْعُرْفَ الْمُطْرِدُ الْعَامُ الْمَعْلُومُ فِيْمًا تَقَدَّمَ إِلَى الْآنَ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ فَإِنَّ الْعُرْفَ الْمُطْرِدُ الْعَامُ الْمَعْلُومُ فِيْمًا تَقَدَّمَ إِلَى الْآنَ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ فَإِنَّ الْعُرْفَ

Ibn Hajar al-Haitami ditanya tentang harta yang diwakafkan tanpa diketahui untuk keperluan apa harus dipergunakan, namun populer bahwa harta itu merupakan wakaf untuk ini, dan itu berlaku sejak dulu. Apakah nazhir (pengurus) yang belakangan harus mengikuti pola pengurus yang lama?

Beliau menjawab, harta wakaf tersebut harus dikelola sebagaimana kebiasaan orang/pengurus sebelumnya dan dengan catatan tidak ada yang mengingkari, seperti untuk keperluan membangun mesjid dan lainnya, dalam hal ini harus mengikuti kebiasaan yang maklum sejak dahulu sampai sekarang, tanpa ada yang mengingkari. Karena kebiasaan yang berlaku sama seperti yang disyaratkan sebagaimana dikatakan al-Izz Abdi al-Salam dan lainnya.

73. Memungut Derma untuk Mendirikan Mesjid yang Akan Dibangun

- S. Bolehkah memungut derma untuk mendirikan mesjid yang akan dibangun, karena menurut keterangan ulama bahwa wakaf untuk mesjid yang akan dibangun itu tidak sah?
- J. Boleh. Adapun tidak sahnya wakaf untuk mesjid yang akan dibangun itu disebabkan karena belum adanya obyek yang diwakafinya. Jadi permulaannya terputus (*munqathi'awwal*).

Keterangan, dalam kitab:

¹⁸ Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid III, h. 261.

1. Syarah al-Bahjah¹⁹

Masalahnya sama (boleh) dengan orang yang mengambil harta/uang dari warga utuk membangun sekolah, pondok, sumur dan mesjid.

74. Memungut Uang dan Bayaran Sekolah

- S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang madrasah yang memungut uang pangkal Rp. 5,- misalnya, bagi tiap anak yang masuk dan setiap bulan memungut bayaran sekolah sejumlah uang yang ditentukan termasuk juga bulan libur seperti bulan puasa dan lain-lain. Halalkah uang tersebut? Dan apakah para guru juga mendapatkan pahala dari Allah Swt.?
- J. Uang tersebut hukumnya halal, namanya hadiah (pemberian) adapun dinamakan uang pangkal itu boleh saja, karena kata-kata istilah itu tidak ada halangannya, dan uang bayaran sekolah tiap bulan itu juga halal, bila wali murid memakluminya, karena termasuk honor yang sah (jutlah) dan para guru mendapatkan pahala, asalkan mempunyai niat berbakti kepada Tuhan dan tidak bermaksud memamerkan diri (riya).

Keterangan, dalam kitab:

1. Bughyah al-Mustarsyidin²⁰

Boleh meminta honor/bayaran atas *ruqyah* (pengobatan) dengan hal yang diperbolehkan seperti al-Qur'an dan obat untuk menyembuhkan pasien dan mengobati hewan. Lalu bila bayaran tersebut telah ditentukan jumlahnya maka perkaranya sudah jelas (harus dibayar sesuai ketentuan). Dan jika jumlah bayaran tidak ditentukan, maka pihak yang mengobati berhak dibayar sesuai dengan tarif umum.

2. Tuhfah al-Habib²¹

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ إِنْ قَصَدَ الْعِبَادَةَ يُثَابُ عَلَيْهِ بِقَدْرِهِ وَإِنْ انْضَمَّ إِلَيْهِ غَيْرُهُ مِمَّا عَدَا الرِّيَاءَ

¹⁹ Abdurrahman al-Sya'rani, Hasyiyah 'ala Syarah al-Bahjah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t. th.), Jilid III. H. 367.

²⁰ Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Surabaya: al-Hidayah, t. th.), h. 169.

²¹ Sulaiman al-Bujairimi, Tuhfah al-Habib 'ala al-Khatib, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1424 H/2003 M), Jilid I, h. 199.

وَنَحْوِهِ مُسَاوِيًا أَوْ رَاجِحًا إِهِ ع ش فَعَلَى كَلاَمِ ابْنِ حَجَرٍ يَحْصُلُ ثَوَابٌ مُطْلَقًا فِيْ جَمِيْعِ الْأَحْوَالِ مَتَى وُجِدَ قَصْدُ الْعِبَادَةِ وَلَوْ مَغْلُوبًا. إِهِ

Ibn Hajar berpendapat, apabila seseorang (berwudhu untuk ibadah dan supaya mendapat kesegaran) berniat ibadah maka ia mendapatkan pahala sesuai dengan kadar niatnya, walaupun bercampur dengan tujuan lain, asalkan bukan riya dan semisalnya, yang menyamai dengan kadar niat ibadah ataupun lebih dominan. Demikian pendapat beliau yang dikutip Ali Syibramallisi. Maka berdasarkan pendapat Ibn Hajar tersebut, pahala bisa diperoleh secara mutlak di segala keadaan, selama terdapat tujuan ibadah, walaupun kadarnya lebih kecil dibanding tujuan lain.

75. Lelaki Memakai Suasa (Emas Campuran)

- S. Bagaimana hukumnya seorang pria memakai suasa (emas campuran)?
- J. Dalam hal ini para ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan: boleh dan ada yang mengatakan haram, sedang Muktamar memilih pendapat yang mengharamkan.

Keterangan, dalam kitab:

1. Hasyiyah al-Bujairimi ala Fath al-Wahhab²²

Dalam hal ini para ulama berpendapat seandainya bejana emas berkarat di mana sekiranya karat tersebut menutupi seluruh permukaan dan bagian dalamnya, maka boleh dipakai karena sudah hilangnya unsur kesombongan.

2. Fath al-Wahhab23

Dan halal sepuhan tembaga pada mata uang dengan emas atau perak, dan bukan sebaliknya. Tidak halal emas dan perak yang disepuh dengan tembaga.

²² Sulaiman al-Bujairimi, Hasyiyah al-Bujairimi 'ala Fath al-Wahhab, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1424 H/2003 M), Cet. Ke-1, Jilid I, h. 50.

²³ Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Fath al-Wahhab, (Surabaya: al-Hidayah, t. th.), Juz.II, h. 33.

76. Beramal dengan Maksud Riya Lalu Bertobat

- S. Apakah orang yang beramal dengan maksud pamer (riya) kemudian bertobat itu masih mendapat pahala?
- J. Apabila tobatnya sesudah selesai beramal, maka ia tidak mendapat pahala, tetapi bila tobatnya di tengah-tengah melaksanakan amal, maka ia masih mendapatkan pahala.

Keterangan, dalam kitab:

1. Is tid al-Rafiq24

Pahalanya terhapus di penghujungnya, ketika ia tetap melakukannya. Namun jika ia kembali (bertobat) di tengah melakukan riya maka dia mendapatkan pahala, jika memang bertobat dan menyesal.

77. Disuruh Membeli Sesuatu, Lalu Dibelikan Barang Lain

- S. Bagaimana hukum seorang yang disuruh membeli barang kemudian uangnya dibelikan barang lain?
- J. Apabila ada tanda-tanda yang menunjukkan, bahwa yang dimaksudkan itu barang tertentu dengan sungguh-sungguh atau ditentukan, maka pesuruh tidak boleh membeli barang lainnya. Tetapi apabila diketahui, bahwa maksudnya memberi kebebasan sebagaimana biasanya, maka pesuruh boleh membeli barang sesukanya.

Keterangan, dalam kitab:

1. Al-Syarwani ala Tuhfah25

قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيّ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ خُذْهُ وَاشْتَرِ بِهِ كَذَا فَإِنْ دَلَّتُ الْقَرِيْنَةُ عَلَى قَصْدِهِ ذَلِكَ حَقِيْقَةً أَوْ أَطْلَقَ وَجَبَ شِرَاءُهُ وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ صَرْفِهِ فِيْ ذَلِكَ انْتَقَلَ لِوَرَثَتِهِ مِلْكًا. وَإِنْ قَصَدَ التَّبَسُّطَ الْمُعْتَادَ صَرَفَهُ كَيْفَ شَاءَ. إه ع ش.

Menurut Syeikh al-Ziyady, seandainya ada orang berkata pada orang lain "ambillah ini dan pakailah untuk membeli sesuatu". Jika memang terdapat indikator yang menunjukkan maksud yang sebenarnya dari

²⁴ Muhammad Babashil, *Is'ad al-Rafiq*, (Surabaya: al-Hidayah, t. th.), Juz.II, h. 33

²⁵ Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani 'ala Tuhfah al-Muhtaj, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t. th.), Jilid VI, h. 301.

orang yang dimaksud, maka yang disuruh harus membeli barang yang diinginkannya. Seandainya yang menyuruh tersebut mati sebelum dipergunakan, maka beralih pada ahli waris sebagai hak milik. Namun, jika yang menyuruh bermaksud untuk memberikan kebebasan sebagaimana kebiasaan yang berlaku pada umumnya, maka yang disuruh tersebut boleh mempergunakannya sesuai dengan keinginannya. Demikian pendapat Ali Syibramallisi.

78. Pakaian di Tangan Penjahit Sampai Lama Sebab Pemiliknya Pergi

- S. Bagaimana hukumnya pakaian yang berada di tangan tukang penjahit atau tukang penatu sampai lama karena pemiliknya bepergian?
- J. Apabila tukang penjahit atau tukang penatu telah menerima ongkosnya, maka pakaian tersebut hukumnya sebagai barang titipan. Dan apabila belum dibayar ongkosnya, maka pakaian itu menjadi gadaian yang diperhitungkan atas ongkosnya tersebut.

Keterangan, dalam kitab:

1. Hasyiyah al-Bujairimi ala al-Manhaj26

فَلاَ ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْحُمَّامِ إِذَا وَضَعَ إِنْسَانُ ثِيَابَهُ فِي الْحُمَّامِ وَلَمْ يَحْفَظُهُ عَلَيْهَا كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ الْاَنَ حِل أَي وَإِنْ فَرَطَ فِيْ حِفْظِهَا بِخِلاَفِ مَا إِذَا اسْتَحْفَظَهُ وَقَبِلَ مِنْهُ وَأَعْطَاهُ أُجْرَةً لِوَاقِعُ الْاَنَ حَل أَي وَإِنْ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ. لِخِفْظِهَا فَيَضْمَنُهَا إِنْ فَرَطَ كَأَنْ نَامَ أَوْ غَابَ وَلَمْ يَسْتَحْفِظ مَنْ هُوَ مِثْلُهُ وَإِنْ فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ.

Pemilik pemandian tidak harus mengganti baju yang diletakkan seseorang tanpa memintanya untuk menjaganya sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Begitu pendapat al-Halabi. Yakni meskipun pemilik pemandian tersebut teledor dalam menjaganya. Berbeda jika pemilik baju memang memintanya untuk menjaganya dan pemilik pemandian menerimanya, maka ia harus menggantinya seperti barang yang hilang jika ia teledor, seperti ketiduran atau ditinggal bepergian tanpa meminta orang lain untuk menjaganya, meskipun akad sewa tersebut fasid.

2. Bujairimi 'ala al-Iqna'²⁷

76

²⁶ Sulaiman al-Bujairimi, Hasyiyah al-Bujairimi ala al-Manhaj, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t, th.), Jilid III, h. 292.

²⁷ Sulaiman al-Bujairimi, Hasyiyah al-Bujairimi ala al-Khatib, (Beirut Dar al-Fikrt, th.), Jilid III, h. 303.

يَعْرِفْ صَاحِبَهَا وَأَيِسَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بَعْدَ الْبَحْثِ التَّامِّ فَقَالَ يُصْرِفُهَا فِيْ أَهَمِّ مَصَالِح الْمُسْلِمِيْنَ وَيُقَدَّمُ أَهْلُ الضَّرُورَةِ.

Syeikh 'Izz al-Din pernah ditanya tentang seseorang yang mendapatkan titipan sesuatu barang dan berlangsung dalam waktu yang lama, sementara ia tidak mengetahui keberadaan pemiliknya dan putus asa setelah berupaya mencarinya secara maksiamal, maka beliau menjawab: "Orang tersebut harus mentasarufkan titipan tersebut bagi kemaslahatan umat Islam yang paling penting, dan harus mendahulukan orang yang dalam keadaan darurat.

I'anah al-Thalibin²⁸

Yakni, diperbolehkan bagi tukang setrika menahan baju orang lain yang ada padanya sebelum mendapat bayaran, karena baju tersebut tergadai dengan upahnya.

79. Barang Ditarik Kembali Sebab Cicilannya Belum Lunas

- S. Bagaimana hukum jual beli dengan cara mencicil, apabila dalam waktu yang ditentukan pembayarannya belum lunas, maka barangnya ditarik kembali, sedang uang angsurannya pada bulan-bulan yang lalu dianggap sebagai ongkos persewaan?
- J. Jual beli tersebut hukumnya sah! Asalkan penarikan kembali tidak ditentukan (menjadi syarat) di dalam waktu akad atau di dalam waktu khiyar, apabila demikian maka hukumnya tidak sah.

Keterangan, sebagaimana diketahui dalam kitab-kitab fiqh.

80. Menambah Harga Barang dari Ketentuan

- S. Apabila seorang wakil (verkoper) untuk menjualkan barang seharga Rp. 55,-misalnya, dengan ketentuan ia mendapat persen Rp. 2,-. Kemudian barang tersebut dijualnya dengan harga Rp. 60,- (laba Rp. 5,-). Siapakah yang berhak menerima keuntungan tersebut. Pemilik barang ataukah wakilnya?
- J. Keuntungan tersebut menjadi hak pemilik barang, bukan hak wakilnya. *Keterangan*, dalam kitab:
- 1. Syarh al-Mahalli tala al-Minhaj²⁹

²⁸ Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin*, (Semarang: Thaha Putra, t.th.) Jilid III, h. 118.

²⁹ Jalaluddin al-Mahalli, Syarah Mahalli 'ala Minhaj, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), Jilid II, h. 432.

(وَإِنْ قَالَ بِعْ بِمِائَةٍ لَمْ يَبِعْ بِأَقَلَ) مِنْهَا (إِلاَّ أَنْ يُصَرِّحَ بِالنَّهْيِ) عَنِ الزِّيَادَةِ فَلاَ يَزِيْدُ. إهـ

Seandainya pemilik barang berkata kepada (pesuruhnya): "Juallah barang tersebut seharga seratus", maka ia tidak boleh menjualnya kurang dari seratus, kecuali bila si pemilik barang tersebut dengan jelas melarang lebih dari seratus, maka ia tidak boleh menjualnya lebih dari padanya.

2. Futuhat al-Wahhab30

وَمِنْهُ يُؤْخَذُ اِمْتِنَاعُ مَا يَقَعُ كَثِيْرًا مِنْ اِخْتِيَارِ شَخْصٍ حَاذِقٍ لِشِرَاءِ مَتَاعِ فَيَشْتَرِيْهِ بِأَقَلَ مِنْ قِيْمَةِ مُعَلِّلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي وَفَّرَهُ لِحِذْقِهِ قِيْمَةِ مُعَلِّلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي وَفَّرَهُ لِحِذْقِهِ وَأَنَّهُ فَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ أَيْضًا زَمَنًا يُمْكِنُهُ فِيْهِ الْإِكْتِسَابُ فَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ مَا بَقِيَ لِمَالِكِهِ لِمَا ذُكِرَ مِنْ اِمْكَانِ مُرَاجَعَةٍ اللحِ فَتَنَبَّهُ لَهُ فَائَهُ يَقَعُ كَثِيْرًا. إه

Dengan demikian dapat dipahami terlarangnya kasus yang banyak terjadi tentang usaha seseorang yang cerdik untuk memberi suatu barang, kemudian dengan kecerdikan dan pengetahuannya ia bisa membeli barang tersebut dengan harga yang lebih murah (dari harga yang telah ditentukan oleh yang menyuruhnya), dan mengambil (kelebihan) dari harga sepenuhnya untuk dirinya sendiri dengan alasan, bahwa yang demikian itu berkat kecerdikannya dan bahwa ia telah menghabiskan waktu yang bisa digunakan untuk bekerja. Maka ia harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada si pemilik uang yang menyuruhnya. Karenanya, maka waspadalah karena hal semacam ini banyak terjadi.

81. Menggarap Sawah dengan Syarat Membersihkan Padi dan Menjemurnya

- S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang orang yang menggarapkan tanahnya dengan ketentuan setiap hektar membayar Rp. 10,- kepada petani penggarap dan petani penggarap harus membersihan padi dan menjemurnya. Bolehkan cara demikian itu?
- J. Tidak boleh, karena pekerjaan membersihkan padi dan menjemur itu tidak termasuk pekerjaan menggarap sawah.

Keterangan, dalam kitab:

1. Fath al-Qarib³¹

³⁰ Sulaiman al-Jamal, *Futuhat al-Wahhab*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, t. th), Jilid III, h. 348.

³¹ Ibn Qasim al-Ghazzi, Fath al-Qarib pada Hamisy Hasyiyah al-Bajuri, (Surabaya: al-Hidayah, t. th.), Jilid II, h. 26

وَلاَ يَجُوْزُ أَنْ يَشْرُطَ الْمَالِكُ عَلَى الْعَامِلِ شَيْتًا لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الْمُسَاقَاتِ.

Pemilik tidak boleh menetapkan syarat terhadap pesuruhnya tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan tugas-tugasnya yang sebenarnya.

82. Menyewa Tanah yang di dalamnya Ada Pohon yang Bertumbuh

- S. Bagaimana hukumnya membeli pohon yang masih bertumbuh kemudian menyewa tanahnya dengan persewaan yang ditentukan, maka bagaimana hukum menyewa itu?
- J. Tidak sah! Karena tanah tersebut adalah hak pembeli, bukan hak penjual. *Keterangan*, dalam kitab:
- 1. Fath al-Mu'in³²

Dan dalam jual beli pohon/tanaman kurma tanpa tanahnya secara mutlak, maka mengikutkan akar, meskipun kering. Jika memang penjual tidak mensyaratkan penebangan pohon, yakni mensyaratkan pohonnya dibiarkan tumbuh di tempatnya atau tidak memutlakkannya.

83. Menggarapkan Tanah Orang Islam Kepada Orang Kafir

- S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seorang muslim menggarapkan tanahnya kepada seorang kafir dengan bagi hasil dan benih dari pihak penggarap (mukhabarah). Apakah wajib zakat atas hasilnya bila mencapai nishab?
- J. Tidak wajib zakat! Karena zakat itu diwajibkan kepada pemilik benih, sedang ia adalah orang kafir dan kewajiban zakat itu disyaratkan harus Islam.

Keterangan, sebagaimana diketahui dalam kitab-kitab Fiqh.

84. Membeli Buah-buahan di atas Pohon dalam Waktu yang Ditentukan

S. Bagaimana hukumnya membeli buah-buahan di atas pohon (nebas) dalam waktu satu tahun, seperti buah jeruk dan sebagainya dengan ketentuan mengambilnya tiga kali?

³² Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in pada Hamisy al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, Yanah al-Thalibin, (Semarang: Thaha Putra, t.th). Jilid III, h. 42-43.

J. Pembelian tersebut hukumnya tidak sah karena terdapat sebagian buahnya yang belum masak.

Keterangan, dalam kitab:

1. Tuhfah al-Muhtaj³³

(وَقَبْلَ بُدُوِّ الصَّلاَج) فِي الْكُلِّ إِنْ بِيْعَ القَمَرُ الَّذِيْ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ. وَإِنْ بَدَا صَلاَحُ غَيْرِهِ الْمُتَّحِدِ مَعَهُ نَوْعًا وَمَحَلاً (مُنْفَرِدًا عَنِ الشَّجَرِ) وَهُوَ عَلَى شَجَرَةٍ ثَابِتَةٍ (لاَ يَجُوزُ) الْبَيْعُ لِأَنَّ الْمُتَّحِدِ مَعَهُ نَوْعًا وَمَحَلاً (مُنْفَرِدًا عَنِ الشَّجَرِ) وَهُوَ عَلَى شَجَرَةٍ ثَابِتَةٍ (لاَ يَجُوزُ) الْبَيْعُ لِأَنَّ الْعَاهَةَ تُسْرِعُ إِلَيْهِ حِيْنَئِذٍ لِضَعْفِهِ فَيَفُوتُ بِتَلَفِهِ الثَّمَنُ بِغَيْرِ مُقَابِلٍ (إِلاَّ بِشَرْطِ الْقَطْعِ) لِلْكُلِّ حَالاً لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ فَإِنَّهُ يَدُلُ بِمَنْطُوقِهِ عَلَى الْمَنْعِ مُطْلَقًا

(Dan menjual buah-buahan sebelum ada yang matang) dari keseluruhannya, jika buah yang belum matang tersebut dijual, walaupun buah yang lain yang sejenis dan setempat sudah matang (tanpa disertai pohonnya), dan buah-buahan tersebut masih di pohon yang hidup, (maka jual beli itu tidak boleh), karena saat belum matang hama -bisa saja- akan menyerangnya, karena lemahnya, maka dengan rusaknya buah, berarti uang pembayaran tersia-sia tanpa imbal balik, (kecuai dengan syarat memetik semuanya) seketika, berdasarkan hadits yang telah disebutkan. Sebab hadits tersebut dengan manthuq (redaksional)nya menunjukkan larangan jual beli seperti itu secara mutlak.

(وَلَوْ بِيْعَ ثَمَرُ) أَوْ زَرْعٌ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلاَجِ وَهُوَ مِمَّا يَنْدُرُ اخْتِلاَطُهُ أَوْ يَتَسَاوَى فِيْهِ الْأَمْرَانِ أَوْ يُجْهَلَ حَالَهُ صَحَّ بِشَرْطِ الْقَطْعِ وَالْإِبْقَاءِ وَالْإِطْلاَقِ أَوْ مِمَّا (يَغْلِبُ تَلاحُقُهُ وَالْإِبْقَاءِ وَالْإِطْلاَقِ أَوْ مِمَّا (يَغْلِبُ تَلاحُقُهُ وَالْأَمْرَانِ أَوْ يَعِيْنُ لاَ يُتَمَيَّزَانِ (كَتِيْنٍ وَقِقَاءٍ) وَبِطَيْخٍ (لَمْ يَصِحَّ إِلاَّ أَنْ وَاخْتِلاَطُ حَادِثَةٍ بِالْمَوْجُوْدِ) بِحَيْثُ لاَ يُتَمَيَّزَانِ (كَتِيْنٍ وَقِقَاءٍ) وَبِطَيْخٍ (لَمْ يَصِحَّ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطُ الْمُشْتَرِيْ) يَعْنِي أَحَدَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَيُوَافِقُهُ الْاَخَرُ (قَطْعَ ثَمَرِهِ) أَوْ زَرْعِهِ

(Seandainya dijual buah-buahan) atau tanaman yang sudah matang, dan termasuk buah-buahan atau tanaman yang jarang tercampur dengan yang lain, atau bisa tercampur dan tidak, atau tidak diketahui keadaannya, maka penjualannya sah dengan syarat dipetik, ditetapkan di pohon atau tanpa syarat apapun, sedangkan buah-buahan atau tanaman yang (biasanya matangnya beriringan, dan yang baru tercampur dengan yang sudah ada), sekira keduanya tidak dapat dibedakan), (seperti buah tir, ketimun), dan semangka, (maka penjualannya tidak sah, kecuali pembeli menyaratkan) maksudnya salah satu pihak yang bertransaksi dan pihak yang lain setuju, (pemetikan buah) atau tanamannya.[]

³³ Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj pada Hamisy Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani, (Mesir: Musthafa Muhammad, t. th.), Jilid IV, h. 461 dan 469.

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-5 Di Pekalongan Pada Tanggal 13 Rabiuts Tsani 1349 H. / 7 September 1930 M.

85. Uang Hasil Sewa Kursi untuk Pertunjukan yang Tidak Dilarang oleh Agama

86. Wali Mujbir Mengawinkan Anak Gadisnya yang Sudah Dewasa dengan Pemuda yang Sekufu

87. Maksud Hadis "Anak Zina Tidak Masuk Surga."

88. Sembelihan Orang yang Mengaku Muslim, Tetapi Tidak Mengerti Ajaran Islam

89. Macam-macam Kafir

90. Membeli Emas dengan Uang Kertas

91. Memakai Sandal yang Diketemukan di Mesjid

92. Minuman yang Disangka Memabukkan Seperti Bir Cap Kunci 93. Mengqadha Shalat Wajib

94. Membeli Rumah dengan Catatan Supaya Diselesaikan Sesuai dengan Gambar

95. Mengawinkan Janda yang Belum Dewasa Oleh Wali Hakim 96. Suami Pergi Sampai 4 Tahun.

97. Anak yang Lahir Sesudah Ibunya Ditalaq

98. Seorang Janda yang Hamil Sebelum Selesai Iddahnya, Sedang Ia Tidak Kawin Lagi, Maka Kandungannya Diikutkan Suaminya 99. Air yang Keluar Sebelum Melahirkan

100. Perayaan untuk Memperingati Jin Penjaga Desa/Sedekah Bumi 101. Dalil Bersedekah pada Hari Tertentu, yang Bersumber dari Kitab Mathali' al-Daqaiq

102. Melempar Kendi yang Penuh Air pada Upacara Ketujuh dari Umur Kandungan (Tingkeban)

103. Berdiri Ketika Memperingati Maulud Nabi

104. Mengubah Bacaan (Selain al-Qur'an dan Hadis) dari Ketentuannya

105. Mengarak Tulisan Muhammad Setiap 12 Rabiul Awwal

106. Asma Muazhzhamah yang Hurufnya Terpisah-pisah

107. Perselisihan Seorang Gadis dengan Wali Mujbirnya dalam Menunjuk Pemuda yang Mengawininya

85. Uang Hasil Sewa Kursi untuk Pertunjukan yang Tidak Dilarang oleh Agama

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang uang hasil penyewaan kursi atau rumah untuk pertunjukan tari-tarian, olah raga dan sebagainya. Halalkah atau tidak?

J. Halal, asal pertunjukannya tidak dilarang oleh agama, seperti perlombaan yang tidak dilarang.

Catatan: Demikian keputusan Muktamar, sedang pertunjukan yang dilarang oleh agama tidak diputuskan oleh Muktamar, karena para ulama berselisih pendapat dan tidak ada dalil *nash* yang tegas yang menghalalkan atau mengharamkan (pen).

86. Wali Mujbir Mengawinkan Anak Gadisnya yang Sudah Dewasa dengan Pemuda yang Sekufu

- S. Bolehkah seorang wali mujbir (mempunyai hak paksa) memaksa anak gadisnya yang sudah dewasa untuk dikawinkan dengan pemuda yang kufu (sepadan) tetapi ia menolak bahkan ia menyatakan lebih baik mati daripada dikawinkan dengan pemuda tersebut, sedang ia sendiri mempunyai pilihan pemuda lain yang kufu pula?
- J. Boleh, tetapi makruh, asal tidak ada kemungkinan akan timbul bahaya. *Keterangan*, dalam kitab:
- 1. Tuhfah al-Habib¹

أَمَّا مُجَرَّدُ كَرَاهَتِهَا مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فَلاَ يُؤَيِّرُ لَكِنْ يُكْرَهُ لِوَلِيَّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا بِهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ وَيُسَنُّ اسْتِغْذَانُ الْبِكْرِ إِذَا كَانَتْ مُكَلَّفَةً لِحَدِيْثِ مُسْلِمٍ. (وَالْبِكُرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوْهَا) وَهُوَ مَحْمُوْلُ عَلَى النَّدْبِ تَطْيِيْبًا لِخَاطِرِهَا. إهـ

Adapun sekedar ketidaksukaan wanita tanpa hal yang dharuri (terpaksa), maka tidak berpengaruh, (terhadap keabsahan perkawinan), akan tetapi dimakruhkan bagi walinya untuk mengawinkannya sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab al-Umm. Disunatkan meminta izin kepada perawan jika memang sudah dewasa berdasarkan hadis Muslim: 'seorang ayah harus meminta persetujuan dari anaknya yang masih perawan". Hadis ini dipahami sebagai "sunnah" demi menghargai perasaan.

Sulaiman al-Bujairimi, Tuhfah al-Habib/Hasyiyah al-Bujairimi, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1424 H/2003 M), Cet. Ke-3, Jilid IV, h. 160.

87. Maksud Hadis "Anak Zina Tidak Masuk Surga."

- S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang pendapat yang menyatakan bahwa anak dari zina itu, semua amalnya tidak akan diterima oleh Allah Swt. dan tidak akan masuk surga selama-lamanya. Apakah pendapat tersebut benar dan ada dasarnya dalam agama.
- J. Pendapat tersebut tidak benar! Bahkan para ulama sependapat (ijmak) bahwa setiap orang yang beriman dan beramal saleh, baik pria maupun wanita tentu masuk surga, walaupun anak dari zina. Adapun sabda Rasulullah Saw.: "Anak zina tidak akan masuk surga", itu diartikan tidak masuk bersama-sama golongan yang masuk surga pertama kali.

Keterangan, dalam kitab:

1. Al-Siraj al-Munir ala al-Jami'al-Shaghir²

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْخُ الرَّنَا لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ الْمُنَاوِيُّ أَيْ مَعَ السَّابِقِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ. إه وَهَذَا يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. وَقَدْ يُقَالُ مَنَعَهُ مِنَ الدُّخُوٰلِ مَعَ السَّابِقِيْنَ فِيْهِ زَجْرُ الْأُمِّ عَنِ الرِّنَا لِوُفُوْرِ شَفَقَتِهَا عَلَى وَلَدِهَا فَإِذَا عَلَى مَا الدَّبَا وَسَعَتْ فِيْ طَلَبِ الْحَلالِ فَالْمُرَادُ الزَّجْرُ عَنِ الرِّنَا وَسَعَتْ فِيْ طَلَبِ الْحِلالِ فَالْمُرَادُ الزَّجْرُ عَنِ الرِّنَا. إه

Rasulullah bersabda: "Anak zina tidak bisa masuk surga". Menurut al-Munawi, bahwa yang dimaksud adalah tidak masuk surga bersama rombongan pertama penghuni surga. Hal ini bertentangan dengan firman Allah dalam surat Fathir: 18. "Dan orang-orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain". Yakni tercegahnya anak tersebut masuk surga bersama rombongan pertama penghuni surga dimaksudkan sebagai penjera terhadap ibu dari perbuatan zina oleh adanya kasih sayang ibu kepada anaknya. Jika si ibu mengetahui tentang ketercegahan anaknya untuk masuk surga, maka ia akan menghindari zina dan kemudian berusaha untuk melakukan yang halal. Dengan demikian maka yang dimaksud dari hadis di atas mencegah perzinaan.

88. Sembelihan Orang yang Mengaku Muslim, Tetapi Tidak Mengerti Ajaran Islam

S. Halalkah sembelihan seorang bangsa kita yang mengaku dirinya muslim tetapi tidak mengerti ajaran-ajaran Islam dan kadang-kadang bershalat dan berpuasa tetapi tidak mengetahui syarat rukunnya, hal mana banyak terjadi?

Ali al-"Azizi, Al-Siraj al-Munir, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1377 H/1957 M), Cet. Ke-2, Jilid III, h. 20.

J. Halal, asal tidak terlihat tanda-tanda yang menunjukkan kekafirannya baik dari kata-kata, perbuatan maupun kepercayaannya.

Keterangan, dalam kitab:

Tabaqat al-Syafi iyah³

فَإِنَّ الدَّارَ إِذَا كَانَتْ دَارَ الْإِسْلاَمِ وَوَجَدْنَا شَخْصًا لَيْسَ مَعَهُ عِيَارُ الْكُفَّارِ فَإِنَّا نَأْكُلُ ذَبِيْحَتَهُ وَنُصَلِّي خَلْفَهُ وَلَوْ وَجَدْنَاهُ مَيِّتًا لَغَسَلْنَاهُ وَنُصَلِّي عَلَيْهِ وَنُدْفِنُهُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِيْنَ. إِهِ

Sesungguhnya suatu daerah jika memang termasuk daerah Islam, dan kemudian kita mendapatkan seseorang yang tidak terdapat pada dirinya tanda-tanda kekafiran, maka kita boleh memakan binatang sembelihannya, dan shalat di belakangnya. Kemudian seandainya kita mendapatkannya meninggal dunia, maka kita memandikannya, menshalatinya dan menguburkannya di pemakaman Islam.

89. Macam-macam Kafir

- 89. S. Berapa macamkah kafir itu? Dan bagaimanakah batas-batasnya?
- J. Kafir itu ada empat macam, ialah:
- Kafir Ingkar; ialah orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali dan tidak mengakui-Nya.
- 2. Kafir *Juhud*; ialah orang yang mengenal Tuhan dalam hatinya tetapi tidak mengikrarkan dengan lisannya, seperti kafirnya iblis dan orang Yahudi.
- 3. Kafir *Nifaq*; ialah orang yang mengikrarkan dengan lisan tetapi tidak mempercayai Tuhan dalam hatinya.
- 4.Kafir 'Inad; ialah orang yang mengenal Tuhan dalam hatinya dan mengikrarkan dengan lisannya, tetapi tidak taat kepada-Nya seperti kafirnya Abu Thalib.

Keterangan, dalam kitab:

1. Kasyifah al-Saja4

أَقْسَامُ الْكُفْرِ أَرْبَعَةً: الْأَوَّلُ كُفْرُ إِنْكَارٍ هُوَ أَنْ لاَ يَعْرِفَ اللهَ أَصْلاً وَلاَ يَعْتَرِفَ بِهِ. وَالنَّانِي كُفْرُ جُحُوْدٍ هُوَ أَنْ يَعْرِفَ اللهَ بِقَلْبِهِ وَلاَ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ كَكُفْرِ إِبْلِيْسَ

³ Tajuddin bin Ali al-Subki, Thbagat al-Syafi'iyah al-Kubra, 1413 H, Juz III, h. 419.

⁴ Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi, Kasyifah al-Saja, (Surabaya: Dar al-Ilmi, t. th.), h. 34-35.

وَالْيَهُودِ. وَالثَّالِثُ كُفْرُ نِفَاقٍ هُوَ أَنْ يُقِرَّ بِاللِّسَانِ وَلاَ يَعْتَقِدَ بِالْقَلْبِ. وَالرَّابِعُ كُفْرُ عِنَادٍ هُوَ أَنْ يَعْرِفَ الله بِقَلْبِهِ وَيَعْتَرِفَ بِلِسَانِهِ وَلاَ يُدَيِّنَ بِهِ كَكُفْرِ أَبِي طَالِبٍ.

Kafir itu ada empat macam:

- 1. Kafir *inkar*, yakni orang yang tidak mengenal Allah sama sekali dan tidak mau mengakui-Nya.
- Kafir juhud, yakni orang yang mengenal Allah dengan hatinya, namun tidak mau mengakui/mangikrarkannya dengan lidahnya, seperti kufurnya Iblis dan Yahudi.
- 3. Kafir *nifaq*, yakni orang yang mau berikrar dengan lisan namun tidak mempercayai-Nya dalam hatinya.
- 4. Kafir *'inad*, yakni orang yang mengenal Allah dalam hatinya, dan mengakuinya dengan lidahnya, namun tidak mau melaksanakan ajaran-Nya, seperti Abi Thalib.

90. Membeli Emas dengan Uang Kertas

- S. Bagaimana hukumnya membeli emas dengan uang kertas, dan pendapat manakah yang dipilih oleh Muktamar tentang hukumnya uang kertas itu?
- J. Muktamar memilih pendapat yang mengesahkan jual beli dengan uang kertas tersebut karena menganggap bahwa uang kertas itu termasuk benda, jadi tidak diharuskan persamaan, timbang-terima (*muqabadhah*). *Keterangan*, dalam kitab:
- 1. Syams al-Isyraq⁵

إِذَا عَلِمْتَ هَذَا كُلَّهُ أَنَّ الْإِحْتِمَالَ الثَّانِي فِي وَرَقِ النَّوْطِ أَعْنِي احْتِمَالَ كَوْنِهِ كَالْفُلُوسِ هُوَ الاحْتِمَالُ الرَّاحِحُ وَالأَحْوَطُ فِي الاحْتِمَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِيْهِ لِقُوَّةِ دَلِيْلِهِ أَمَّا أَوَّلاً فَلِأَنَّهُ إِمَّا قِيَاسُ الاحْتِمَالُ الرَّاحِحُ وَالأَحْوَطُ فِي الاحْتِمَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِيْهِ لِقُوَّةِ دَلِيْلِهِ أَمَّا أَوَّلاً فَلاَّنَهُ إِمَّا قِيَاسُ جَرَى بَيْنَ النَّاسِ جَمْرى بَعْنَ النَّاسِ جَمْرى الْعَيْنِ مَا عَرَضٍ جَرَى بَيْنَ النَّاسِ جَمْرى الْعَيْنِ يَتَحَقَّقُ فِيْهِ وَجْهَانِ وَجْهُ كُونُهُ كَالْعُرُوضِ وَوَجْهُ كُونُهُ كَالْعَيْنِ وَالنَّقْدِ بِخِلاَفِ احْتِمَالِ الْعَيْنِ يَتَحَقَّقُ فِيْهِ وَجْهَانِ وَجْهُ كُونُهُ كَالْعُرُوضِ وَوَجْهُ كُونُهُ كَالْعَيْنِ وَالنَّقْدِ بِخِلاَفِ احْتِمَالِ كَوْنِهُ كَوْنِهُ كَالْعُرْنِ جَامِعٍ أَوْ تَخْوِيْجُ عَلَى قَاعِدَةٍ لاَ تَشْمُلُهُ كَغَيْرِهِ

Jika Anda mengetahui ini semua bahwa kemungkinan yang kedua perihal uang kertas, yakni kemungkinan keberadaannya sama dengan fulus (uang logam) merupakan kemungkinan yang lebih unggul dan lebih berhati-hati, karena kuatnya dalil atasnya. Adapun yang pertama maka

Muhammad Ali al-Maliki, Syams al-Isyraq fi Hukmi al-Ta'ammuli bi al-Arwaq, (Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, 1921 M), h. 105.

karena berdasarkan qiyas dengan satu titik temu atau mentakhrij pada kaidah yang mencakupnya, sebagaimana selainnya. Maksud kaidah tersebut adalah: "Semua benda yang berlaku dimasyarakat sebagaimana emas dan perak (sebagai alat tukar), maka di dalamnya ada dua dua sudut pandang. Pertama, keberadaannya seperti komoditas (barang). Dan kedua, keberadaannya seperti emas dan perak (alat tukar). Berbeda dengan kemungkinan keberadaannya sebagai jaminan utang, karena mungkin hal itu merupakan qiyas tanpa titik temu atau mentakhrij pada kaidah yang tidak mencakupnya, sebagaimana selainnya.

91. Memakai Sandal yang Diketemukan di Mesjid

- S. Bolehkah memakai sandal yang diketemukan di mesjid, misalnya karena sandalnya hilang?
- J. Tidak boleh! Karena sandal tersebut adalah barang temuan (*luqathah*). *Keterangan*, dalam kitab:
- 1. Bughyah al-Mustarsyidin⁶

مِنَ اللَّقَطَةِ أَنْ تُبْدَلَ نَعْلُهُ بِغَيْرِهَا فَيَأْخُذُهَا فَلاَ يَحِلُّ لَهُ اسْتِعْمَالُهَا إِلاَّ بَعْدَ تَعْرِيْضِهَا بِشَرْطِهِ أَوْ تَحَقُّقِ إِعْرَاضِ الْمَالِكِ عَنْهَا فَإِنْ عُلِمَ أَنَّ صَاحِهَبَا تَعَمَّدَ أَخْذَ نَعْلِهُ جَازَلَهُ بَيْعُهَا ظَفْرًا بِشَرْطِهِ

Termasuk *luqathah* (barang temuan) adalah tertukarnya sandal seseorang dengan sandal orang lain kemudian ia mengambilnya, maka ia tidak halal memakainya kecuali setelah diumumkannya sesuai dengan persyaratannya, atau sudah yakin bahwa si pemiliknya memang telah meninggalkannya. Jika diketahui bahwa pemiliknya memang sengaja mengambil sandalnya, maka ia boleh menjual sandal orang tersebut dalam rangka *dufr* (mengambil hak) sesuai dengan persyaratannya.

92. Minuman yang Disangka Memabukkan Seperti Bir Cap Kunci

- S. Bagaimana hukumnya minuman yang disangka memabukkan seperti: bir cap kunci, bir cap ayam, kinalaraus dan sebagainya. Dan yang biasa digunakan sebagai obat beranak, begitu pula air gadung?
- J. Bir cap kunci, bir cap ayam, dan sebagainya. Itu hukumnya tidak haram karena belum terang hakekatnya (*mutasyabih*), sabda Rasulullah Saw. Yang halal dan yang haram itu sudah terang dan antara keduanya terdapat hal-hal yang belum terang.

⁶ Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Surabaya: al-Hidayah, t. th.), h. 178.

Adapun kinalaraus itu hukumnya haram karena telah terang memabukkan, sedang air gadung itu halal karena tidak memabukkan.

Catatan: Demikianlah keputusan Muktamar dan berdasarkan pedoman sabda Rasulullah Saw.: Semua yang memabukkan itu minuman keras (Khamr) oleh karenanya bagi orang yang mengetahui bahwa bir itu memabukkan maka hukumnya haram baginya (pen).

93. Mengqadha Shalat Wajib

- S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang pendapat sementara golongan, bahwa salat wajib itu bila ditunaikan pada waktunya, tidak wajib dikerjakan di lain waktu (qadha)? Apakah pendapat itu terdapat dalam salah satu mazhab empat?
- J. Para ulama sependapat (ijma') bahwa salat wajib itu harus di*qadha*' bila tidak ditunaikan pada waktunya. Tidak ada pendapat yang tidak mewajibkan qadla kecuali pendapat yang salah (batil), yaitu pendapat Ibn Hazm. *Keterangan*, dari kitab:
- 1. Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab⁷

(فرع) أَجْمَعَ الَّذِيْنَ يُعْتَدُّ بِهِمْ أَنَّ مَنْ تَرَكَ صَلاَةً عَمْدًا لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا وَخَالَفَهُمْ أَبُوْ مُحَمَّدٍ عَلِيُّ انْنُ حَزْمٍ قَالَ: لاَ يُقَدَّرُ عَلَى قَضَائِهَا أَبَدًا وَلاَ يَصِحُّ فِعْلُهَا أَبَدًا قَالَ بَلْ يُكْثِرُ مِنْ فِعْلِ الْحَيْرِ وَالتَّطَوُّعِ لِيَنْقُلَ مِيْزَانُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى وَيَتُوْبُ وَهَذَا الَّذِيْ قَالَهُ مَعَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ بَاطِلٌ مِنْ جِهَّةِ الدّلِيْلِ.

Para ulama mu tabar telah sepakat, bahwa barangsiapa meninggalkan shalat secara sengaja, maka ia harus meng-qadha (menggantinya). Pendapat mereka ini berbeda dengan pendapat Abu Muhammad Ali bin Hazm yang berkata: bahwa ia tidak perlu meng-qadha selamanya dan tidak sah melakukannya selamanya, namun ia sebaiknya memperbanyak melakukan kebaikan dan shalat sunah agar timbangan (amal baiknya) menjadi berat pada hari kiamat, serta istighfar kepada Allah dan bertobat. Pendapat ini bertentangan dengan ijmak dan bathil berdasarkan dalil yang ada.

94. Membeli Rumah dengan Catatan Supaya Diselesaikan Sesuai dengan Gambar

S. Bolehkah membeli rumah yang belum selesai dibangun dengan ketentuan supaya diselesaikan sesuai dengan gambar yang telah direncanakan?

Muhyiddin al-Nawawi, al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab, (Cairo: Al-Maktabah al-Ilmiah, 1971 M), Jilid III, h. 68.

J. Tidak boleh (tidak sah sesudahnya/sebelum tetapnya jual-beli, tetapi) jika ketentuan itu ditentukan di dalam aqad atau bila membeli yang sudah ada dan penjelasannya diperhitungkan dengan ongkos sepantasnya maka hukumnya boleh (sah).

Keterangan, sebagaimana maklum dalam kitab-kitab fiqh.

95. Mengawinkan Janda yang Belum Dewasa Oleh Wali Hakim

- S. Bolehkah mengawinkan janda yang belum dewasa oleh wali hakim atau wali lain (bukan wali mujbir)?
- J. Tidak boleh (tidak sah) sekalipun dengan wali mujbir karena persetujuannya (izinnya) tidak dianggap sah (berlaku).

Keterangan, dalam kitab:

1. Fath al-Mu'in8

Maka janda yang masih kecil dan sudah pandai serta merdeka tidak boleh dikawinkan sampai beranjak dewasa, karena izin darinya tidak dianggap sah.

96. Suami Pergi Sampai 4 Tahun

- S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seorang istri yang melahirkan anak kemudian suaminya bepergian sampai empat tahun atau kurang, kemudian istri tersebut melahirkan lagi seorang anak kedua dan ia menyatakan (ikrar) bahwa ia tidak bersetubuh dengan seseorang lelaki baik suaminya sendiri maupun orang lain. Apakah anak kedua itu menjadi anaknya suami yang bepergian tersebut?
- J. Bila anak yang kedua itu lahir sebelum lewat enam bulan dari kelahiran pertama, maka anak itu menjadi anak kembar, dan menjadi anak dari suami yang bepergian tersebut, dan apabila anak kedua itu lahir sesudah lewat enam bulan dan ada kemungkinan bersetubuh dengan suaminya sesudah kelahiran pertama dan si suami tidak memungkirinya dengan angkat sumpah (li in), maka anak itu menjadi anak dari suami tersebut, apabila tidak ada kemungkinan bersetubuh dengan suaminya sesudah kelahiran pertama dan/atau si suami memungkirinya dengan angkat sumpah (li in), maka kandungan kedua itu hukumnya kandungan zina

⁸ Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in pada Hamisy al-Bakri Muhammad Syatha al-Dirnyathi, I'anah al-Thalibin, (Semarang: Thaha Putra, t.th). Jilid III, h. 310.

dalam arti tidak ada iddah dan boleh dikumpuli, dan juga hukumnya kandungan syubhat dalam arti tidak ada had (pidana), tidak ada qadzaf (dakwaan zina) dan menghindari persangkaan buruk.

Keterangan, dalam kitab:

1.Hasyiyah Al-Bajuri9

وَضَابِطُ التَّوْأَمَيْنِ بِأَنْ لاَ يَتَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ بِأَنْ وُلِدَا مَعًا أَوْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا دُوْنَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ. فَإِنْ تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرُ هُمَا حَامِلاَنِ لاَ تَوْأَمَانِ.

Batasan pengertian anak kembar adalah bila di antara kedua anak kembar tersebut tidak berselang selama enam bulan, atau berselang kurang dari enam bulan. Jika di antara keduanya berselang enam bulan atau lebih, maka merupakan dua kehamilan dan bukan dua anak kembar.

2. Bughyah al-Mustarsyidin¹⁰

فَعُلِمَ أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ حَمَلَتْ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ أَمْكَنَ لِحُوْقُهُ بِزَوْجِهَا لَحِقَهُ وَلَمْ يَنْتَفِ عَنْهُ إِلاَّ بِاللَّعَانِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمَا عَادَةً كَانَ حُكْمُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمَا عَادَةً كَانَ حُكْمُ الْحُمْلِ كَالزِّنَا بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ وُجُوْبِ الْعِدَّةِ وَجَوَازِ نِكَاحِهَا وَوَطْئِهَا وَكَالشُّبْهَةِ بِالنِّسْبَةِ لِدَرْءِ الْحَدِّ وَالْقَذَفِ وَاجْتِنَابِ سُوْءِ الظَّلِّ.

Maka diketahui bahwa setiap wanita yang hamil dan melahirkan anak, yang mungkin nasabnya ditemukan dengan suaminya maka anak itu menjadi anaknya, dan suami tersebut tidak bisa mengingkarinya kecuali dengan

⁹ Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Surabaya: al-Hidayah, t. th.), Jilid II, h. 169. Redaksi ini tidak ditemukan dalam Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, namun subtansinya banyak dicantumkan dalam beberapa kitab fiqh madzhab Syafi'i, seperti al-Iqna' dalam pasal tentang Li'an dan I'anah al-Thaliban dalam pasal tentang 'Iddah berikut ini:

وَلَا يَصِعُ نَفِي أَحَدِ تُوْأَمَيْنِ بِأَنْ لَمْ يَتَخَلِّلْ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ بِأَنْ رُلِتَا مَمَا أَوْ تَخَلِّلَ بَيْنَ وَضْمَيْهِمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِأَنْ رُلِتَا مَمَا أَوْ تَخَلِّلُ بَيْنَ وَضْمَيْهِمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لِمَا Dan tidak sah menafikan salah satu dari dua anak kembar, yaitu di antara kelahiran keduanya tidak terpisahkan enam bulan (hijriyah), yakni lahir bersamaan atau kelahiran keduanya terpisah waktu yang kurang dari enam bulan. Muhammad al-Syirbini al-Khatib, al-Iqna pada Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz IV, h. 38.

وَيَتَوَقَّفُ أَيْضًا عَلَى وَضِعِ الْوَلَدِ الْأَخِيرِ مِنْ تَوْأَمَنِ بَيْنَهُمَا أَقَلُ مِنْ سِنَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةً أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَالنَّانِي حَمَّلَ آخَرُ Dan habisnya masa wanita hamil 'iddah juga tergantung pada kelahiran anak terakhir dari dua anak kembar yang terpisah waktu kurang dari enam bulan (hijriyah). Bila antara keduanya terpisah enam bulan atau lebih, maka anak yang kedua merupakan kehamilan lain (bukan kehamilan pertama/anak kembar). Abu Bakar al-Dimyathi, l'anah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz IV, h. 48.

¹⁰ Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Surabaya: al-Hidayah, t. th.), h. 249-250.

sumpah *litm*. Dan jika nasabnya tidak mungkin bertemu dengan suaminya, seperti berada di suatu tempat yang secara 'adatnya tidak mungkin terjadi pertemuan antara keduanya, maka hukum kehamilannya itu seperti kehamilan dari perzinaan dalam hal tidak adanya kewajiban ber'iddah, boleh menikahi dan menyetubuhinya, dan hukumnya seperti syubhat (kehamilan dengan selain suami tanpa kesengajaan berzina) dalam hal tidak diberlakukan had perzinaan, tuduhan berzina dan menghindari buruk sangka terhadapnya.

97. Anak yang Lahir Sesudah Ibunya Ditalaq

S. Apakah anak perempuan yang lahir sesudah ibunya ditalaq itu termasuk mahramnya suami yang menalaknya?

J. Ya. Benar termasuk mahramnya.

Keterangan, dalam kitab:

1.Hasyiyah al-Iwadh 'ala al-Iqna' 11

وَكَذَا بِنْتُ الزَّوْجَةِ إِنْ كَانَتْ مَوْجُوْدَةً قَبْلَ تَزَوُّجِهِ بِأُمِّهَا لَمْ يَصِحَّ التَّشْبِيْهُ بِهَا لِطُرُوِّ تَحْرِيْمِهَا عَلَيْهِ بِنِكَاحِ أُمِّهَا وَإِنْ حَدَثَتْ بَعْدُ بِأَنْ أَبَانَ زَوْجَةً فَتَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ وَأَتَتْ مِنْهُ بِبِنْتٍ فَهِيَ مَحْرَمَةً مِنْ حِيْنِ وُجُوْدِهَا فَيَصِحُّ التَّشْبِيْهُ بِهَا.

Demikian pula anak perempuan dari seorang istri (ibu), jika anak tersebut sudah ada sebelum diri si lelaki mengawini ibunya, maka tidak sah menyerupakan ibunya dengannya (sebagai *musyabbah bih* -orang yang diserupai- dalam kasus zhihar), karena status mahram anak perempuan tersebut baginya baru terjadi setelah ia mengawini ibunya. Jika kehamilan terjadi sesudah menikahinya, seperti istri telah diceraikan kemudian nikah dengan diri lelaki tersebut, dan kemudian mengandung anak perempuan darinya, maka anak tersebut menjadi mahram terhitung sejak keberadaannya, sehingga sah mennyerupakan istrinya dengan anak perempuan tersebut.

98. Seorang Janda yang Hamil Sebelum Selesai Iddahnya, Sedang Ia Tidak Kawin Lagi, Maka Kandungannya Diikutkan Suaminya

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seorang janda yang hamil sebelum selesai iddahnya, baik dengan perhitungan quru' atau bulan, dan belum

¹¹ Syekh 'Iwadh, Hasyiyah 'Iwadh 'ala al-Iqna' pada Hamisy Muhammad al-Khatib al-Syarbini, al-Iqna', (Semarang: Thaha Putra, t. th.), Juz II, h. 164. Demikian pula keterangan dalam kitab al-Qalaid karangan Syekh Abdullah Baqusyair dan keterangan Imam Kazaruri dalam Hamisy Tafsir Baidlawi.

sampai empat tahun dari waktu dicerai atau ditinggalkan mati suaminya, sedang ia tidak bersuami lagi, dan bahkan mengaku berbuat zina. Apakah kandungannya itu masih diilhaqkan (diikutkan) kepada suaminya dan iddahnya diperhitungkan sampai dengan melahirkan kandungannya?

J. Ya. Kandungan tersebut di*ilhaq*kan kepada suaminya (yang mencerai atau meninggal dunia) dan 'iddahnya diperhitungkan sampai dengan melahirkan anak, asal ia belum bersuami lagi/tidak ada kemungkinan bahwa kandungan tersebut dari suami kedua yang sah.

Keterangan, dari kitab:

1. Tuhfah al-Muhtaj¹²

(وَلَوْ أَبَانَهَا) أَيْ زَوْجَتَهُ بِخُلْعِ أَوْ ثَلاَثٍ وَلَمْ يُنْفِ الْحَمْلَ (فَوَلَدَتْ لِأَرْبَعِ سِنِيْنَ) فَأَقَلَّ وَلَمْ يُنْفِ الْحَمْلَ (فَوَلَدَتْ لِأَرْبَعِ سِنِيْنَ) فَأَقَلَّ وَلَمْ تَتَزَوَّجْ بِغَيْرِهِ أَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ كُونُ الْوَلَدِ مِنَ الثَّانِي (لَحَقَهُ) وَبَانَ وُجُوْبُ سُكْنَاهَا وَنِفَقَتِهَا وَإِنْ أَقَرَّتْ بِانْقِطَاعِ الْعِدَّةِ لِقِيّامِ الْإِمْكَانِ إِذْ أَكْثَرُ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِيْنَ الْمَرْأَةُ مُعْتَدَّةً إِلَى الْوَضْعِ حَتَّى يَثْبُتَ لِلرَّوْجِ رَجْعَتُهَا. وَلَوْ طَلَقَهَا رَجْعِيًّا) فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَرْبَعِ سِنِيْنَ لَحِقَهُ وَبَانَ وُجُوْبُ نَفَقَتِهَا وَانَ الْمَرْأَةَ مُعْتَدَّةً إِلَى الْوَضْعِ حَتَّى يَثْبُتَ لِلرَّوْجِ رَجْعَتُهَا.

Seandainya suami menceraikan istrinya secara khulu' atau tiga kali, dan ia tidak mengingkari kehamilannya, lalu si istri melahirkan dalam rentang waktu empat tahun atau kurang, dan belum kawin dengan orang lain, atau sudah kawin dengan orang lain, namun tidak memungkinkan adanya anak tersebut dari suami yang kedua, maka anak tersebut harus diikutkan pada suami yang pertama dan ia berkewajiban memberikan perumahan dan nafkah, meskipun istri tersebut berikrar bahwa 'iddahnya habis, sebab waktu kehamilan yang paling lama adalah empat tahun sesuai dengan penelitian ... Jika suami tersebut mentalaqnya dengan talaq raj'i dan lalu si istri melahirkan anak dalam rentang waktu empat tahun, maka anak tersebut harus diikutkan sebagai anaknya dan ia pun berkewajiban memberi papan dan pangan si istri. Dan sesungguhnya wanita tersebut ber'iddah sampai melahirkan sehingga ada ketetapan bagi suami untuk merujuknya lagi.

2. Asna al-Mathalib13

¹² Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj, dalam Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t. th.), Jilid VIII, h. 243. Demikian pula diterangkan dalam kitab al-Raudh bab "Lamanya Masa Kandungan", dan juga dalam kitab Hamisy Tarsyikh.

(فَإِنْ طَلَقَهَا) بَاثِنًا أَوْ رَجْعِيًّا أَوْ فَسَخَ نِكَاحَهَا وَلَوْ بِلِعَانِ (وَلَمْ يُنْفِ الْحَمْلَ فَوَلَدَتْ لِأَرْبَعِ سِنِيْنَ فَأَقَلَّ مِنْ) وَقْتِ (إِمْكَانِ الْعُلُوقِ قُبَيْلَ الطَّلاَقِ) أَوِ الْفَسْخِ (لَحِقَهُ) وَبَانَ أَنَّ الْعِدَّةَ لَمْ تَنْقَضِ إِنْ لَمْ تَنْكِحْ الْمَرْأَةُ آخَرَ أَوْ نَكَحَتْ وَلَمْ يُمْكِنْ كُونُ الْوَلَدِ مِنَ الثَّانِي لِقِيَامِ الْإِمْكَانِ سَوَاءٌ أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَبْلَ وِلاَدَتِهَا أَمْ لا لَلْ النَّسَبَ حَقُ الْوَلَدِ فَلاَ يَنْقَطِعُ بِإِقْرَارِهَا.

Apabila suami menceraikan istrinya, baik secara ba'in atau raj'i atau pernikahan batal meskipun karena li'an, dan si suami tidak mengingkari kehamilan, kemudian si istri melahirkan dalam rentang waktu empat tahun atau kurang yang terhitung dari kemungkinan bersetubuh beberapa saat sebelum terjadinya perceraian ataupun pembatalan nikah, maka anak tersebut nasabnya diikutkan suaminya itu, dan 'iddahnya menjadi jelas belum habis selama istri tersebut belum menikah dengan orang lain, atau sudah menikah lagi namun anak tersebut tidak mungkin berasal dari suami kedua, karena adanya kemungkinan anak tersebut dari suami pertama, baik si istri mengakui habisnya 'iddah sebelum lahirnya anak itu atau tidak mengakuinya. Sebab, nasab merupakan hak anak dan tidak bisa putus oleh pengakuan ibu.

99. Air yang Keluar Sebelum Melahirkan

S. Bagaimanakah hukumnya air yang keluar sebelum bersalin? Apakah seperti air sakit kencing (salisil baul) karena kadang-kadang keluarnya sampai empat hari?

J. Apabila air yang keluar itu jernih maka hukumnya seperti air sakit kencing dalam hal kenajisannya dan tetap wajib shalat dan lain-lain, baik bersambung dengan haid sebelumnya atau terpisah. Apabila yang keluar itu darah atau air kuning maka bila terpisah dari haid sebelumnya, maka hukumnya adalah haid dengan menetapi syarat-syaratnya.

Keterangan, dalam kitab:

1. Al-Minhaj al-Qawim14

فَلَوْ رَأَتْ حَامِلُ الدَّمَ ثُمَّ طَهُرَتْ يَوْمًا مَثَلاً ثُمَّ وَلَدَتْ فَالدَّمُ الْخَارِجُ بَعْدَ الْوِلاَدَةِ نِفَاسٌ وَقَبْلَهَا حَيْضٌ

Bila wanita hamil melihat darah, kemudian suci kembali misalnya selama sehari, kemudian ia melahirkan, maka darah yang keluar setelah persalinan merupakan darah nifas, sedangkan sebelum persalinan adalah darah haid.

2. Bughyah al-Mustarsyidin¹⁵

¹³ Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib Syarah Raudhah al-Thalib, (Indonesia: Menara Kudus, t. th.), Jilid III, h. 393.

¹⁴ Ibn Hajar al-Haitami, al-Minhaj al-Qawim, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 27.

¹⁵ Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 H/1952 M)), h. 32.

الدَّمُ الْخَارِجُ مِنَ الْخَامِلِ بِسَبَبِ الْوِلاَدَةِ قَبْلَ انْفِصَالِ جَمِيْعِ الْوَلَدِ وَإِنْ تَعَدَّدَ عَنِ الرَّحْمِ يُسَمَّى طَلْقًا وَحُكْمُهُ كَدَمِ الْاِسْتِحَاضَةِ فَيَلْزَمُهَا فِيْهِ التَّعْصِيْبُ وَالطَّهَارَةُ وَالصَّلاَةُ وَلاَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ حَتَّى الْوَطْءِ أَمَّا مَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ حَتَّى الْوَطْءِ أَمَّا مَا يَحْرُمُ لاَ بِسَبَبِ الْوِلاَدَةِ فَحَيْثُ بِشَرْطِهِ نَعَمْ لَوْ ابْتَدَأَ بِهَا الْحَيْضُ ثُمَّ ابْتَدَأَتْ الْوِلاَدَةُ انْسَحَبَ عَلَى الْطَلْقِ حُصْمُ الْخَيْضِ أَيْ سَوَاءً مَضَى لَهَا يَوْمُ وَلَيْلَةُ قَبْلَ الْطَلْقِ أَمْ لاَ عَلَى خِلاَفٍ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُعَلِقِ أَمْ لاَ عَلَى خِلاَفٍ فِي ذَلِكَ

Darah yang keluar dari wanita hamil disebabkan persalinan sebelum lahirnya anak secara keseluruhan, walaupun keluar berulang-ulang dari rahim, maka dinamakan darah thalq (persalian) dan hukumnya sama dengan darah istihadhah. Maka ia harus menyumbat darah tersebut, bersuci dan tetap shalat, serta baginya tidak diharamkan segala yang diharamkan bagi wanita yang haid, termasuk persetubuhan. Adapun darah yang keluar bukan sebab persalinan, maka hukumnya adalah darah haid sesuai dengan persyaratannya. Memang begitu, namun jika pertama ia haid, kemudian baru bersalin, maka hukum haid diberlakukan pada persalinan, maksudnya walaupun ia sudah melewati sehari semalam sebelum persalinan atau tidak, sesuai khilafiyah dalam masalah tersebut.

100. Perayaan untuk Memperingati Jin Penjaga Desa/Sedekah Bumi

S. Bagaimana hukumnya mengadakan pesta dan perayaan guna mmemperingati jin penjaga desa (mbahu rekso, Jawa) untuk mengharapkan kebahagiaan dan keselamatan, dan kadang terdapat hal-hal yang mungkar. Perayaan tersebut dinamakan "sedekah bumi" yang biasa dikerjakan penduduk desa (kampung), karena telah menjadi adat kebiasaan sejak dahulu kala?

J. Adat kebiasaan sedemikian itu hukumnya haram.

Keterangan, dalam kitab:

1. Futuhat al-Ilahiyah¹⁶

قَالَ مُقَاتِلُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ تَعَوَّذَ بِالْحِنِّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ بَنِي حَنِيْفَةَ ثُمَّ فَشَا ذَلِكَ فِي الْعَرَبِ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلاَمُ صَارَ التَّعَوُّذُ بِاللهِ تَعَالَى لاَ بِالْحِنِّ.

Orang yang pertama meminta perlindungan kepada jin adalah kaum dari Bani Hanifah di Yaman, kemudian hal tersebut menyebar di Arab. Setelah Islam datang, maka berlindung kepada Allah menggantikan berlindung kepada jin.

2. Ihya' Ulum al-Din¹⁷

16 Al-Jamal, Futuhat al-Ilahiyah 'ala al-Jalalain, surah al-Jin.

¹⁷ Hujjah al-Islam al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* dalam Murtadha al-Zabidi, *Ithaf Sadah al-Muttaqin*, (Beirut: Maktabah Dar al-Fikr, t.th.), Juz VI, h. 557.

Maka tidak boleh mencampurkan kebenaran murni dengan perkara yang dianggap sebagai suatu permainan oleh kalangan orang awam, sementara bentuk permainan tersebut merupakan bentuk permainan bagi kalangan orang khusus, walaupun mereka tidak menilainya sebagai suatu permainan.

101. Dalil Bersedekah pada Hari Tertentu, yang Bersumber dari Kitab *Mathaliud Daqaiq*

S. Dalam kitab Mathaliud Daqaiq diterangkan, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Roh orang mukmin pada tiap-tiap malam Jum'at, hari raya, hari 'Asyura atau malam nisfu Sya ban itu datang dan berdiri di muka pintu rumah keluarganya dengan berkata: Wahai anakku, belas kasihanilah aku, Allah akan memberi rahmat kepadamu. Aku tinggal di dalam kuburan yang sempit dan dalam keadaan susah yang lama sekali. "Para sahabat bertanya: "Apakah artinya minta belas kasihan?" Rasulullah Saw. menjawab: "Berdoa dan bersedekah itu merupakan hadiah kepada orang yang telah meninggal dunia. "Sayyidina Umar r.a. berkata: "Bersedekah sesudah mengubur mayat itu pahalanya berlaku sampai tiga hari dan bersedekah dalam tiga hari itu pahalanya berlaku sampai tujuh hari dan bersedekah pada hari ketujuh itu pahalanya berlaku sampai empat puluh hari dan bersedekah pada hari keempat puluh itu pahalanya berlaku sampai seratus hari dan dari seratus sampai setahun dan dari setahun sampai seribu hari."

Bolehkah hadis dan atsar tersebut digunakan untuk dalil yang menyunahkan (hukum sunat) bersedekah untuk arwah orang yang sudah mati?

Apakah hadis dan atsar tersebut sahih atau dhaif atau maudhu'?

J. Hadis dan atsar tersebut tidak boleh dipergunakan sebagai dalil, karena terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kedustaannya (maudlu) dan tidak terdapat di dalam kitab-kitab yang sahih, bahkan tidak ada kitab yang dinamakan kitab Mathaliud Daqaiq. Hanya salah satu ulama dari Kudus menemukan hadis dan atsar tersebut, tertulis dengan tangan pada hamisy sesuatu kitab dan akhirnya ditulis: Ih Mathaliud Daqaiq. Oleh karenanya, maka penanya menganggap bahwa tulisan itu tulisan dari kitab Mathaliud Daqaiq, padahal ia sendiri tidak mengetahui siapa penulisnya dan kitab apakah Mathaliud Daqaiq itu.

Catatan: Hukumnya bersedekah untuk orang yang meninggal dunia itu telah tercantum dalam keputusan Muktamar I, soal ke 19 (pen).

Keterangan, dari kitab:

1. Shahih al-Bukhari¹⁸

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah: "Sesungguhnya ibuku telah meninggal, apakah bermanfaat baginya jika aku bersedekah untuknya" maka Rasulullah menjawab "ya", kemudian orang tersebut berkata: "Aku punya tembikar, maka aku ingin kau menyaksikan bahwa aku menyedekahkannya untuknya".

102. Melempar Kendi yang Penuh Air pada Upacara Bulan Ketujuh dari Umur Kandungan (Tingkeban)

S. Bagaimana hukumnya melempar kendi yang penuh air hingga pecah pada waktu pulangnya orang-orang yang menghadiri upacara peringatan bulan ketujuh dari umur kandungan dengan membaca shalawat bersama-sama, dengan harapan supaya mudah lahirnya anak kelak. Apakah hal tersebut hukumnya haram karena termasuk membuang-buang uang (tabdzir)?

J. Ya. Perbuatan tersebut hukumnya haram karena termasuk *tabdzir*. *Keterangan*, dalam kitab:

1. Hasyiyah al-Bajuri¹⁹

Mubadzir dan boros itu sinonim, dalam arti mengelola harta di luar pengelolaan yang semestinya, sebagaimana yang dimaksudkan oleh perkataan Imam al-Ghazali dan lainnya, selama tidak menimbulkan sesuatu yang terpuji pada masa kini (dunia) dan tidak pula pahala pada masa yang akan datang (akhirat).

103. Berdiri Ketika Memperingati Maulud Nabi

S. Bagaimana hukumnya berdiri pada waktu membaca maulud Nabi Saw.? Apakah hal itu telah menjadi adat kebiasaan yang ditetapkan oleh agama ('uruf syar í),

¹⁸ Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut Dar Ihya; al-Turats al-Arabi, t.th.), Iilid IV, h. 13.

¹⁹ Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Surabaya: al-Hidayah, t. th.), Jilid I, h. 366.

hingga pelaksanaannya tidak berbeda-beda di segala tempat, atau merupakan adat kebiasaan setempat ('urf 'adi), hingga masing-masing tempat mempunyai cara sendiri-sendiri? Manakah yang lebih utama, berdiri atau duduk pada waktu membaca maulud Nabi Saw. bagi bangsa Indonesia yang mempunyai tradisi duduk sambil menyembah (kedua tangan diletakkan di muka hidung) pada waktu menghormati orang-orang yang terhormat?

J. Berdiri pada waktu memperingati maulud Nabi Saw. itu 'urf syar'i yang hukumnya sunat, oleh karenanya pelaksanaannya tidak berbeda-beda di segala tempat.

Keterangan, dalam kitab:

1. Al-Sharim al-Mubid²⁰

وَالْقِيَامُ وَإِنْ كَانَتْ بِدْعَةً لَمْ يَرِدْ بِهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يَفْعَلُونَهُ تَعْظِيمًا لَهُ ﷺ كَمَا فِي فَتَاوَى ابْنِ حَجَرٍ الحَدِيثِيَّةِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ جَرَى عَلَى اسْتِحْسَانِ ذَلِكَ الْقِيَامِ تَعْظِيمًا لَهُ ﷺ عَمَلُ مَنْ يُعْتَدُّ بِعَمَلِهِ فِي أَغْلَبِ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَهُوَ مَبْنِيًّ عَلَى مَا فِي النَّووِيِّ مِنْ جَعْلِ عَمَلُ مَنْ يُعْتَدُّ بِعَمَلِهِ فِي أَغْلَبِ الْبِلَادِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَهُوَ مَبْنِيًّ عَلَى مَا فِي النَّووِيِّ مِنْ جَعْلِ الْقِيَامِ لِأَهْلِ الْفَضْلِ مِنْ قُبَيْلِ الْمُسْتَحَبَّاتِ إِنْ كَانَ لِلاَحْتِرَامِ لَا لِلرِّيَاءِ

Berdiri (misalnya ketika membaca maulid Nabi Saw.) walaupun bid'ah hukumnya tidak mengapa, karena orang-orang melakukannya itu hanya sebagai penghormatan terhadap beliau Saw., sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Hajar al-Haitami dalam kitabnya al-Fatawa al-Haditsiyah, bahwa di mayoritas daerah Islam telah berlaku amal ulama yang tindakan mereka diperhitungkan, karena menilai baik tradisi berdiri menghormati Nabi Saw. tersebut. Hal itu berdasar atas pandangan al-Nawawi bahwa berdiri menyambut ahl al-fadhl (orang mulia) itu termasuk perbuatan sunnah, jika dilakukan karena menghormati, bukan karena riya.

2. Al-Fatawa Haditsiyyah²¹

أَنَّهُ قَدْ جَرَى عَلَى اسْتِحْسَانِ ذلِكَ الْقِيَامِ تَعْظِيْمًا لَهُ ﷺ عَمُلَ مَنْ يُعْتَدُّ بِعَمَلِهِ فِي أَعْلَبِ الْمُسْتَحَبَّاتِ اللهِ عُلِي عَقْدِ الْجُوْهِرِ مَا نَصَّهُ: وَهَذَا الْقِيَامُ إِنْ كَانَ لِلإِحْتِرَامِ لاَ لِلرِّيَاءِ. وَفِي الْكَوْكَبِ الْأَنْوَارِ عَلَى عَقْدِ الْجُوْهِرِ مَا نَصَّهُ: وَهَذَا الْقِيَامُ بِذَعَةُ لاَ أَصْلَ لَهَا لَكِنَّهَا بِدْعَةُ حَسَنَةً لِأَجْلِ التَّعْظِيْمِ وَلِذَا قِيْلَ بِنَدْبِهَا كَمَا تَقَدَّمَ.

96

²⁰ Muhammad Ali al-Maliki, al-Sharim al-Mubid, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, 1923 M), h. 37.

²¹ Ibn Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Haditsiyah*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1390 H/1970 M), h. 80.

Sesungguhnya di mayoritas daerah Islam telah berlaku amal ulama yang tindakan mereka diperhitungkan, karena menilai baik tradisi berdiri menghormati Nabi Saw. tersebut. Hal itu berdasar atas pandangan al-Nawawi bahwa berdiri menyambut ahl al-fadhl (orang mulia) itu termasuk perbuatan sunnah, jika dilakukan karena menghormati, bukan karena riya.

Dalam al-Kaukab al-Anwar disebutkan, bahwa sikap berdiri tersebut memang bid'ah dan tidak berdasar, namun termasuk bid'ah yang baik karena untuk mengagungkan (Nabi Saw.). Oleh karenanya, maka berdiri itu disunahkan, seperti keterangan yang telah lewat.

104. Mengubah Bacaan (Selain al-Qur'an dan Hadits) dari Ketentuannya

- S. Bagaimana hukumnya bacaan yang diubah dari ketentuannya, seperti: memperpendek yang panjang atau memperpanjang yang pendek dan sebagainya. Dalam membaca maulid atau marhaaban dzikir, misalnya markhaaaaaban yaa nuural 'aaaini pada saat dilagukan atau Laailaahaa illallaah dan sebagainya?
- J. Apabila yang diubah itu bukan al-Qur'an dan hadits atau nama-nama yang dimuliakan menurut agama, maka hukumnya tidak mengapa (tidak berdosa).

Keterangan, dalam kitab:

1. Ithaf al-Sadah al-Muttaqin²²

(وَإِنَّمَا اخْتِلاَفُ تِلْكَ الطُّرُقِ بِمَدِّ الْمَقْصُوْرِ وَقَصْرِ الْمَمْدُوْدِ وَالْوَقْفِ فِي أَثْنَاءِ الْكَلِمَاتِ وَالْقَطْعِ وَالْوَصْلِ فِيْ بَعْضِهَا وَهَذَا التَّصَرُّفُ جَائِزُ فِي الشَّعْرِ) بِالْإِتِّفَاقِ (وَلاَ يَجُوْرُ فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ التَّلاَوَةُ كَمَا أُنْزِلَ) وَتُلْقِفُهُ الْخُلْقُ عَنِ السَّلَفِ فَتَصَرُّفُهُ وَمَدُّهُ وَالْوَقْفُ وَالْوَصْلُ وَالْقَطْعُ فِيْهِ عَلَى خِلاَفِ مَا تَقْتَضِيْهِ التِّلاَوَةُ) وَالتَّجْوِيْدُ (حَرَامٌ أَوْ مَكُرُوهُ)

Sesungguhnya perbedaan metode (bacaan) dengan memanjangkan yang pendek dan memendekkan yang panjang, atau berhenti di tengah-tengah kalimat, memutus atau menyambung sebagian dari sebagiannya, maka cara membaca seperti ini disepakati diperbolehkan dalam syair. Dalam al-Qur'an maka tidak diperkenankan membacanya kecuali seperti yang diturunkannya, dan yang dipelajari oleh orang-orang sejak dari ulama salaf. Maka hukum membaca panjang al-Qur'an atau berhenti, menyambung

²² Murtadha al-Zabidi, Ithaf Sadah al-Muttaqin, (Beirut: Maktabah Dar al-Fikr, t.th.), Juz VI, h. 557. Demikian pula keterangan dalam kitab al-Khadiqah al-Nadbiyah.

dan memutuskannya yang tidak sesuai dengan tuntutan bacaan dan tajwid itu haram atau makruh.

105. Mengarak Tulisan Muhammad Setiap 12 Rabiul Awwal

- S. Bagaimana hukumnya mengarak tulisan "MUHAMMAD" pada tiap tanggal 12 bulan Maulud (Rabi ul Awwal)?
- J. Tidak mengapa (tidak berdosa) asal tidak dengan hal-hal yang mungkar walaupun sebaiknya tidak perlu diadakan pengarakan.

Keterangan, dalam kitab:

1. Tarsyih al-Mustafidin²³

(تَنْبِيهُ) مِنْ فَتَاوِى السَّيُوْطِيّ سُئِلَ عَمَّنْ عَمِلَ الْمَوْلِةِ النَّبُوِيَّ فِيْ شَهْرِ رَبِيْعِ الْأَوَّلِ مَا حُكْمُهُ وَهَلَ يُثَابُ فَاعِلُهُ؟ فَأَجَابَ بِأَنَّ أَصْلَ عَمَلِ الْمَوْلِةِ الَّذِي هُوَ إِجْتِمَا عُ النَّاسِ وَقِرَاءَهُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَرَوَايَةُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِيْ مَبْدَءِ أَهْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَمَا وَقَعَ فِيْ مَوْلِدِهِ مِنَ الْآيَاتِ ثُمَّ يَمُدُ لَهُمْ سِمَاطًا وَرَوَايَةُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي مَبْدَءِ أَهْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَمَا وَقَعَ فِيْ مَوْلِدِهِ مِنَ الْآيَاتِ ثُمَّ يَمُدُ لَهُمْ سِمَاطًا يَأْكُلُونَهُ وَيَنْصَرِفُونَ مِنْ عَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْبِدَعِ الْحُسَنَةِ الَّتِيْ يُثَابُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ قَدْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِلَى أَنْ قَالَ: وَمَا يُعْمَلُ فِيهِ فَيَنْبَعِيْ أَنْ يُقْتَصَرَ فِيهِ عَلَى مَا يُفْهِمُ الشَّكُرَ لِللهِ وَمَا تَقَدَّمَ ذِكُنُ مِنَ الشَّلَاوَةِ وَالْإِطْعَامِ وَالصَّدَقَةِ وَإِنْ شَاءَ فَتَيْءٍ مِنَ الْمَدَائِحِ النَّبُويَّةِ وَالْمُحَرِّكَةِ لِلْقُلُوبِ إِلَى فِعْلِ الْخَيْرِ وَالْعَمَلِ لِلآخِرَةِ. وَأَمَّا مَا يَثَبُمُ ذَلِكَ مِنَ السَّمَاعِ وَاللَّهُ وَالنَّهُ مِنَ اللَّهُ وَالْمُصَلِّ لِلاَحْرَةِ. وَأَمَّا مَا يَتُبُعُ فَلِكَ مِنَ السَّمَاعِ وَاللَّهُ وَلَيْ الْمَعْرُودِ إِلَى فَعْلِ الْخَيْرِ وَالْعَمَلِ لِلآخِرَةِ. وَأَمَّا مَا يَتُبَعُ فَلِكَ مَنَ السَّمَاعِ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى مَنَ اللَّهُ وَلَى مُنَاعُ وَلَا عَلَى مَا كَانَ حِلاَفَ الْأَوْلِ الْمَالَ وَمَا كَانَ حَرَامًا أَوْ مَكُرُوهًا فَيُمْنَعُ وَكَذَلِكَ مَا كَانَ خِلاَفَ الْأَوْلِ الْمَالَ وَلَا الْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ مَا كَانَ حَرَامًا أَوْمَكُرُوهًا فَيُمْنَعُ وَكَذَلِكَ مَا كَانَ خِلاَفَ الْأَوْلِ الْمَالَ وَلَا الْمَالِ الْمُؤْلِقِ الْمَالِقِ الْمَعْلَى اللّهِ الْمُؤْلِقُ مَا كَانَ خِلاَفَ اللّهُ وَمَا كَانَ حَرَامًا أَوْمَنَا مَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ خِلاَفَ الْأَوْلُولِ الْمُؤْلِلُ الْمَوْلِ الْمُؤْلِقُ اللْمُلِلُولُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَوْلِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِلُ الْمَوْلِ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَا مَا

(Penting) dari *Fatawa* al-Suyuthi. Ia ditanya tentang orang yang melaksanakan Maulid Nabi di bulan Rabi'ul Awal, bagaimanakah hukumnya dan apakah pelakunya mendapatkan pahala?

Imam Suyuthi menjawab: "Bahwa asal pelaksanaan Maulid Nabi di mana orang-orang berkumpul membaca ayat-ayat al-Qur'an dan riwayat hadits-hadits Nabi serta penyajian makanan yang tidak berlebih-lebihan, semuanya itu termasuk bid tih hasanah dan pelakunya mendapatkan pahala, karena dalam pelaksanaan tersebut mengandung penghormatan derajat Nabi Saw. ... Apapun yang dilakukan dalam pelaksanaan Maulid Nabi tersebut, hendaknya dibatasi pada sesuatu yang bisa menyadarkan untuk bersyukur kepada Allah seperti

²³ Alawi al-Saqqaf, Tarsyih al-Mustafidin, (Surabaya: al-Haramain, t. th.), h. 325-326.

bacaan-bacaan, pemberian makanan dan sedekah sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Jika mau, maka bisa dengan sesuatu yang mengandung pujian-pujian kepada Nabi, tentang kezuhudan dan yang dapat menggerakkan hati untuk berbuat kebaikan dan beramal untuk akhirat.

Adapun hal-hal lain yang mengikuti pelaksanaan Maulid Nabi tersebut seperti permainan, maka sekiranya terdiri dari hal-hal yang mubah yang bisa menimbulkan kegembiraan pada hari pelaksanaan tersebut maka hukumnya boleh. Sedangkan yang haram ataupun makruh atau yang bertentangan dengan keutamaan, maka hukumnya tidak boleh.

106. Asma Mu'azhzhamah yang Hurufnya Terpisah-pisah

- S. Bagaimana hukumnya Asma Mu'azhzhamah yang hurufnya telah terpisahpisah. Apakah sifat keagungannya masih tetap?
- J. Para ulama berselisih pendapat tentang masih tetapnya keagungan namanama yang (diagungkan) sesudah dipisah-pisahkan hurufnya. Ada yang berpendapat tetap, dan ada pula yang berpendapat hilang keagungannya.

Keterangan: Dalam kitab:

1. Al-Fatawa al-Kubra²⁴

قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْأَوْلَى غَسْلُهَا أَي الْوَرَقَةِ الْمُلْقَاةِ لِأَنَّ وَضْعَهَا فِي الْجِدَارِ تَعْرِيْضُ لِسُقُوطِهَا وَالْاِسْتِهَانَةِ. وَقِيْلَ تُجْعَلُ فِيْ حَائِطٍ. وَقِيْلَ يُفْرَقُ حُرُوفُهَا وَيَلْقِيْهَا ذَكْرَهُ الزَّرْكَشِيُ إِلَى أَنْ قَالَ: وَالْاِسْتِهَانَةِ. وَقِيْلَ تُجْعَلُ فِيْ حَائِطٍ. وَقِيْلَ يُفْرَقُ حُرُوفُهَا وَيَلْقِيْهَا ذَكْرَهُ الزَّرْكَشِيُ إِلَى أَنْ قَالَ: فَالْوَجْهُ الطَّالِثُ شَاذُ لاَ يَنْبَغِيْ أَنْ يُعَوَّلَ عَلَيْهِ فَإِنْ قُلْتَ وَجْهُ الضَّعِيفِ أَيْضًا أَنَّ هَذِهِ الْحُرُوفَ لَمَا فَالْوَجْهُ الطَّالِثُ هَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَتَفْرِيْقُهَا بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يُوجِبُ إِهْدَارَ مَا ثَبَتَ لَهَا التَّعْظِيْمُ فَتَفْرِيْقُهَا بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يُوجِبُ إِهْدَارَ مَا ثَبَتَ لَهَا التَّعْظِيْمُ فَتَفْرِيْقُهَا بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يُوجِبُ إِهْدَارَ مَا ثَبَتَ لَهَا التَّعْظِيْمُ فَتَفْرِيْقُهَا بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يُوجِبُ إِهْدَارَ مَا ثَبَتَ لَهَا التَّعْظِيْمُ فَتَفْرِيْقُهُا بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يُوجِبُ إِهْدَارَ مَا ثَبَتَ لَهَا اللَّعْظِيْمُ فَتَفْرِيْقُهُا بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يُوجِبُ إِهْدَارُ مَا ثَبَتَ لَهَا اللَّهُ عَلَيْهُ إِنْ قُلْتَهُ وَمُقْتَضَى كَلاَمِهِمْ خِلاَفُهُ.

Ibn Abdissalam berpendapat, yang terbaik adalah mencuci kertas yang bertuliskan asma Allah yang terjatuh di jalan, karena meletakkannya di dinding dapat menyebabkannya terjatuh dan terlecehkan ... Menurut suatu pendapat, kertas itu cukup diletakkan di dinding. Menurut pendapat lain yang disebut al-Zarkasyi, kertas tersebut huruf-huruf tulisannya dipisah-pisah dan dibuang, ... Maka pendapat yang ketiga itu adalah pendapat yang syadz (menyimpang) yang tidak boleh diikuti. Jika anda berkata: "Yang juga menjadi kelemahan juga adalah niscaya huruf-huruf

²⁴ Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Kubra al-Fighiyah, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid I, h. 35-36.

tersebut bila telah digunakan untuk menyusun nama agung (asma Allah Swt.), maka harus diagungkan. Oleh sebab itu, pemisahannya tidak bisa merusak keharusan mengagungkannya." Maka saya jawab: "Pendapat seperti itu hanya muncul berdasarkan pendapat yang disetujui al-Subki, yaitu niscaya huruf-huruf yang dipisah-pisah hukumnya seperti kata-kata mulia, sedangkan kesimpulan pendapat ulama bertentangan dengannya."

107. Perselisihan Seorang Gadis dengan Wali Mujbirnya dalam Menunjuk Pemuda yang Mengawininya

- S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seorang gadis yang berselisih dengan wali mujbirnya dalam soal perkawinannya. Ia menunjuk seorang pemuda yang kufu (sepadan), sedangkan walinya menunjuk pemuda lain yang kufu pula, kemudian gadis tersebut kawin dengan pemuda yang dipilihnya dengan wali hakim. Apakah perselisihan tersebut merupakan permusuhan yang nyata. Hingga wali mujbir tidak boleh mengawinkan tanpa izinnya dan penolakan wali dianggap sebagai 'udhl (enggan menikahkan) sehingga dapat kawin dengan wali hakim?
- J. Perselisihan tersebut tidak boleh dianggap sebagai permusuhan, baik lahir maupun batin dan tidak boleh dikawinkan dengan wali hakim. *Keterangan*, dari kitab:
- 1. Fath al-Mu'in dan I anah al-Thalibin25

لاَ يُزَوِّجُ الْقَاضِيْ إِنْ عَضَلَ مُحْبِرٌ مِنْ تَزْوِيْجِهَا بِكُفْءٍ عَيَّنَتُهُ وَقَدْ عَيَّنَ هُوَ كُفْأُ آخَرَ غَيْرَ مُعَيَّنِهَا. وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنُهُ دُوْنَ مُعَيَّنِهَا كَفَاءَةً

(قَوْلُهُ لَا يُزَوِّجُ إِلَخ) يَعْنِيْ لَوْ عَيَّنَتْ لِلْوَلِيَّ الْمُجْبِرِ كَفَاءً وَهُوَ عَيَّنَ لَهَا كَفَاءً آخَرَ غَيْرَ كُفْئِهَا لاَ يَكُوْنُ عَاضِلاً بِذَلِكَ فَلاَ يُزَوِّجُهَا الْقَاضِي بَلْ تَبْقَى الْوِلاَيَةُ لَهُ. وَذَلِكَ لِأَنَّ نَظَرَهُ أَعْلَى مِنْ نَظرَهَا. فَقَدْ يَكُوْنُ مُعَيَّنُهُ أَصْلَحَ مِنْ مُعَيَّنِهَا.

Seorang hakim tidak boleh mengawinkan jika wali *mujbir* (ayah) tidak setuju mengawinkan putrinya dengan laki-laki yang sepadan hasil pilihannya sendiri, sedangkan si ayah sudah memiliki lelaki lain yang juga *kufu* (sepadan). Walaupun laki-laki pilihan ayah kesepadanannya lebih rendah dibandingkan pilihan putrinya.

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Tidak boleh mengawinkan

²⁵ Zainuddin al-Malibari dan al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, Fath al-Mu'in dan l'anah al-Thalibin, (Semarang: Thaha Putra, t.th.). Jilid III, h. 317.

..."), yakni bila si putri menentukan laki-laki yang sepadan kepada ayahnya, sedangkan si ayah telah menentukan laki-laki lain untuk putrinya itu yang juga sepadan, maka si ayah tidak 'adhl (enggan menikahkan), sehingga hakim tidak boleh mengawinkannya, karena hak perwaliannya tetap berada di pihak ayah, yang demikian itu, karena penilaian ayah di atas penilaian putrinya, sehingga pilihannya lebih layak dari pada pilihan putrinya.

2. Fath al-Mu'in26

Kesaksian yang merugikan seorang musuh itu ditolak bila berasal dari musuhnya, dengan permusuhan yang bersifat duniawi, bukan kesaksian yang menguntungkannya. Musuh seseorang adalah orang yang susah atas kebahagiaannya dan sebaliknya, yaitu orang yang senang atas kesusahannya.

3. Pendapat Muktamar

Keengganan wali (ayah) menikahkan putrinya dengan lelaki pilihannya sendiri itu semata-mata hanya karena dalam pertimbangannya untuk menjaga kemaslahatan putrinya itu, bukan karena memusuhinya.[]

Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in pada l'anah al-Thalibin, (Semarang: Thaha Putra, t.th). Jilid IV, h. 289.

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-6 Di Pekalongan Pada Tanggal 12 Rabiuts Tsani 1350 H. / 27 Agustus 1931 M.

108. Shalat Hadiah Oleh Keluarga Mayit 109. Mencabut Gigi Mayit yang Memakai Emas 110. Cara Penyelenggaraan Mayit dari Salah Satu Anak Kembar yang Melekat

- 111. Menyuntik Mayit untuk Mengetahui Penyakit yang Menjalar 112. Sebab-sebab Mayit Dianggap Keturunan Nabi Ibrahim 113. Makan di Mesjid yang Lazimnya Membikin Kotoran
- 114. Berdoa untuk Memohon Sesuatu yang Tidak Mungkin Tercapai
- 115. Tidak Mengetahui Syarat Rukunnya Wudhu, Memasuki Thariqah 116. Menekuni Membaca al-Qur'an dan Lain-lain Termasuk
- 117. Thariqah yang Mempunyai Sanad Muttashil Kepada Nabi Saw. Itu Tidak Ada Perbedaannya Satu Sama Lain

Tharigah Mu'tabarah

118. Masyaqah yang Membolehkan Mengadakan Shalat Jum'at di Beberapa Tempat

108. Shalat Hadiah Oleh Keluarga Mayit

- S. Bagaimana hukumnya shalat hadiah yang diselenggarakan oleh keluarga mayat pada malam pertama dengan mengundang keluarga dan tetangganya, sesudah shalat kemudian dihidangkan makanan dan kemudian bubaran?
- J. Apabila shalat itu shalat sunat *muthlaqah* dan pahalanya dihadiahkan kepada mayat, maka hukumnya tidak mengapa (boleh) dan menurut suatu pendapat pahala tersebut dapat sampai dan manfaat kepada mayat. Apabila shalat tersebut diniatkan shalat hadiah kepada mayat, maka shalat tersebut tidak sah dan hukumnya haram, karena mengerjakan sesuatu ibadah yang tidak ada dasarnya (*fasidah*).

Keterangan, dari kitab:

1. Tuhfah al-Muhtaj¹

Dan tidak sah shalat dengan niat seperti yang dianggap baik oleh kaum sufi tanpa dasar sunah sama sekali. Jika memutlakkan shalat lalu berdoa sesudahnya dengan sesuatu yang mengandung semisal isti tidzah (mohon perlindungan) atau istikharah mutlak, maka shalat tersebut boleh saja.

Pendapat Muktamar

Adapun hadits tentang shalat hadiyah sebagaimana tersebut dalam kitab al-Maihi maka tidak diketahui kesahihan perawinya.²

109. Mencabut Gigi Mayit yang Memakai Emas

- S. Bagaimana hukumnya mayat yang memakai gigi emas. Apakah wajib dicabut atau boleh dikubur bersama gigi emasnya?
- J. Apabila mencabut gigi emas tersebut menodai kehormatan mayat, maka hukumnya haram dicabut. Dan apabila tidak, maka bila itu seorang laki-laki yang dewasa maka wajib dicabut, bila seorang wanita atau anak kecil maka terserah kerelaan ahli warisnya.

Keterangan, dari kitab:

¹ Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj*, dalam Abdul Hamid al-Syirwani, *Hasyiyah al-Syirwani*, (Mesir: Musthafa Muhammad, t. th.), Jilid II, h. 238.

² Ahmad al-Maihi al-Syaibani, Hasyiyah Syarh Sittin al-Ramli.

1. Al-Nihayah al-Muhtaj³

وَلِهَذَا لَوْ لَبِسَ الرَّجُلُ حَرِيْرًا لِحِكَّةٍ أَوِ قُمْلِ مَثَلاً وَاسْتَمَرَّ السَّبَبُ الْمُبِيْحُ لَهُ ذَلِكَ إِلَى مَوْتِهِ حَرُمَ تَصْفِيْنُهُ فِيْهِ عَمَلاً بِعُمُومِ النَّهْيِ وَلِانْقِضَاءِ السَّبَبِ الَّذِيْ أُبِيْحَ لَهُ مِنْ أَجْلِهِ.

Oleh karenanya, jika seseorang memakai kain sutera misalnya untuk menghindari gatal-gatal atau kutu, dan sebab yang memperbolehkan pemakaian sutera tersebut ada sampai menjelang ajalnya, maka haram mengkafani jenazahnya dalam kain sutera tersebut, berdasarkan larangan pemakai sutera secara umum, dan karena habisnya sebab yang memperbolehkan dirinya memakai sutera.

110. Cara Penyelenggaraan Mayit dari Salah Satu Anak Kembar yang Melekat

S. Bagaimana cara penyelenggaraan mayat dari salah satu anak kembar yang melekat?

J. Apabila mayat tersebut dapat dipisahkan dengan tidak membahayakan yang hidup, maka wajib dipotong dan dipisahkan.

Apabila tidak dapat dipisahkan, maka harus diselenggarakan sedapatnya, misalnya; memandikan, mengkafani dan menyalatkan, tetapi tidak boleh dikubur, sehingga hancur dan rontok, dan rontokannya harus dikubur.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Tajrid li Naf'i al-'Abid4

وَكَمَا لَوْ دُفِنَتِ امْرَأَةً حَامِلٌ جِمَنِيْنِ تُرْجَى حَيَاتُهُ بِأَنْ يَكُوْنَ لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَيُشَقَّ جَوْفُهَا وَيُخْرَجُ إِذْ شَقَّهُ لاَ زِمُ قَبْلَ دَفْنُهَا إِلَى مَوْتِهِ ثُمَّ تُدْخَرُجُ إِذْ شَقَّهُ لاَ زِمُ قَبْلُ دَفْنُهَا إِلَى مَوْتِهِ أَيْ وَلَوْ تَغَيَّرَتْ مَثَلاً وَلاَ يُدْفَنُ الْحُمْلُ حَيَّا. عش. ثَدْفَنُ. م ر. وَقَوْلُهُ لَكِنْ يُثْرُكُ دَفْنُهَا إِلَى مَوْتِهِ أَيْ وَلَوْ تَغَيَّرَتْ مَثَلاً وَلاَ يُدْفَنُ الْحَمْلُ حَيَّا. عش.

Demikian halnya kalau wanita hamil dikubur bersama janinnya yang masih diharapkan hidup, misalnya sudah mencapai enam bulan atau lebih, maka perut wanita tersebut harus dibelah dan janinnya dikeluarkan, sebab membelah perutnya itu wajib pula sebelum dikuburkan. Bila sudah tidak diharapkan hidup maka tidak perlu dibedah, namun pemakaman mayat wanita itu ditunda sampai si janin mati, lalu baru dimakamkan. Demikian pendapat al-Ramli. "Ungkapan beliau: "namun pemakaman mayat wanita itu ditunda sampai si janin mati." maksudnya meskipun

Syamsuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1357 H/1938 M), Jilid II, h. 447.

Sulaiman al-Bujairimi, Al-Tajrid li Nafi al-'Abid /Hasyiyah al-Bujairimi, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2005), Cet. Ke-1, Jilid I, h. 298.

janin itu telah berubah (membusuk) umpamanya, dan si janin tidak boleh dikubur hidup-hidup." Demikian pernyataan Ali Syibramallisi.

111. Menyuntik Mayit untuk Mengetahui Penyakit yang Menjalar

- S. Bagaimana hukumnya menyuntik mayat untuk mengetahui penyakit yang menjalar?
- J. Menyuntik mayat itu hukumnya haram! Karena menodai kehormatan mayat. Keterangan, dari kitab:
- 1. Mauhibah Dzil al-Fadhl⁵

(وَيُكُونُ أَخْدُ شَعْرِهِ وَظُفْرِهِ) وَإِنْ كَانَ مِمَّا لاَ يَزَالُ لِلْفِطْرَةِ وَاعْتَادَتْ إِزَالَتُهُ لِأَنَّ أَجْزَاءَ الْمَيِّتِ مُحَرَّمَةً فَلاَ تُنْهَكُ بِذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُخْتَنَّ إِلاَّ قُلْفُ (قَوْلُهُ لَمْ يُخْتَنَّ إِلاَّ قُلْفُ) أَي عَلَى الصَّحِيْجِ فِي الرَّوْضَةِ وَإِنْ كَانَ بَالِغًا لِأَنَّهُ جُزْءً فَلاَ يُقْطَعُ كَيْدِهِ الْمُسْتَحِقَّةُ فِيْ قَطْعِهِ بِسَرِقَةٍ وَقَوْدٍ وَجَزَمَ فِي الرَّوْضَةِ وَإِنْ كَانَ بَالِغًا لِأَنَّهُ جُزْءً فَلاَ يُقْطَعُ كَيْدِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ عُسْلُ مَا تَحْتَ الْقُلْفَةِ إِلاَّ بِقَطْعِهَا الْأَنْوَارِ وَالْعُبَابِ بِحُرْمَةِ ذَلِكَ أَي وَإِنْ عَصَى بِتَأْخِيْرِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ غُسْلُ مَا تَحْتَ الْقُلْفَةِ إِلاَّ بِقَطْعِهَا

Maka dimakruhkan mengambil/memotong rambut mayat dan kukunya walaupun kebiasaan setempat mengharuskan untuk menghilangkannya, karena bagian-bagian mayat itu terhormat sehingga tidak boleh dinodai dengan pengambilan. Oleh karenanya yang dikhitan itu hanyalah bagian kulup sesuai dengan pendapat yang sahih dalam kitab al-Raudhah walaupun baligh, karena merupakan bagian dari mayat sehingga tidak boleh dipotong sebagaimana tangannya yang memang berhak untuk dipotong karena mencuri bahan bakar. Dalam al-Anwar dan al-Ubab ditegaskan keharaman pemotongan tersebut walaupun harus berdosa dengan mengakhirkan (pemakamannya) dan tidak memungkinkan membersihkan bagian yang berada di bawah kulup kecuali dengan memotongnya.

112. Sebab-sebab Mayit Dianggap Keturunan Nabi Ibrahim

- S. Mengapa semua mayat itu dianggap keturi nan Nabi Ibrahim dalam talqin di mana dinyatakan Nabi Ibrahim itu ayahku bukan Nabi Adam atau Nabi Nuh? Padahal bukan semua mayat itu keturunan Nabi Ibrahim?
- J. Hal tersebut karena mengikuti firman Allah Swt. yang artinya: "Harap kamu mengikuti agama ayahmu Ibrahim."

Keterangan, dari kitab:

1. Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil⁶

Muhammad Mahfudz al-Tarmasi al-Jawi, Mauhibah Dzi al-Fdhl, (Mesir. al-Amirah al-Syarafiyah, 1326 H), Jilid III, h. 409-410.

وَفِي قَولِهِ (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ... وَإِنَّمَا جَعَلَهُ أَبَاهُمْ لِأَنَّهُ أَبُو رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُو كَالْأَبِّ لِأُمَّتِهِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ سَبَبُ لِجَيَاتِهِمِ الْأَبَدِيَّةِ وَوُجُودِهِمْ عَلَى الْوَجْهِ اللهُ عَلَيْ وَهُو كَالْأَبِ لِأُمَّتِهِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ سَبَبُ لِجَيَاتِهِمِ الْأَبَدِيَّةِ وَوُجُودِهِمْ عَلَى الْوَجْهِ اللهُ عَتَدَّ بِهِ فِي الآخِرَةِ أَوْ لِأَنَّ أَكْثَرَ الْعَرَبِ كَانُوا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ فَعُلِبُوا عَلَى غَيْرِهِمْ . (أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا) فِي التَّوْجِيدِ وَالدَّعْوةِ إِلَيْهِ بِالرِّفْقِ وَإِيرَادِ الدَّلَاثِلِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى وَالْمُجَادَلَةِ مَعَ كُلِّ أَحَدٍ عَلَى حَسْبِ فَهْمِهِ .

Dalam firman Allah Swt.: (Surah al-Hajj 78): "Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk Anda dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim", sesungguhnya Allah Menjadikan Ibrahim As. ayah mereka, karena ia merupakan ayah Rasulullah Saw., dan seperti ayah bagi umatnya, di mana ia menjadi sebab kehidupan abadi dan adanya merka dalam bentuk yang semestinya di akhirat, atau karena umumnya orang Arab adalah keturunan Ibrahim As. sehingga mereka mendominasi selainnya.

Dalam firman Allah Swt.: (Surah al-Nahl 123): "Hendaknya kamu mengikuti agama Nabi Ibrahim a.s. yang lurus", yaitu dalam tauhid dan dakwah dengan cara santun menyampaikan dalil-dalil menurut keperluannya dan melalukan dialog terhadap setiap orang sesuai tingkat kecerdasannya.

113. Makan di Mesjid yang Lazim Membikin Kotoran

S. Bagaimanakah hukumnya makan dalam mesjid yang lazimnya menimbulkan kotor? Jika haram apakah disebabkan karena menimbulkan kotor saja atau juga karena makan? Jika haramnya karena menimbulkan kotor, apakah wajib dihilangi seketika bila ada kotor atau tidak?

J. Apabila berkeyakinan atau mempunyai perkiraan akan mengotori mesjid dengan barang najis maka makan di dalam mesjid itu hukumnya haram. Apabila tidak yakin dan hanya membikin kotor dengan sesuatu yang tidak najis maka hukumnya kurang baik (khilaf al-aula). Hukum haram dan hukum khilaf al-aula disebabkan karena membuat kotor mesjid itu yang mengakibatkan kewajiban untuk menghilangkan seketika itu juga barang najis tersebut. Adapun soal makannya di dalam mesjid itu hukumnya boleh. Keterangan, dari kitab:

1. I ánah al-Thalibin⁷

⁶ Nasiruddin al-Baidhawi, Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1358 H/1939 M), Cet. Ke-1, Jilid II, h. 80 dan Jilid I, h. 472.

Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, (Semarang: Thaha Putra, t.th). Jilid II, h. 262.

وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْوُضُوءَ فِي الْمَسْجِدِ جَائِزٌ وَإِنْ تَقَاطَرَ فِيْهِ مَاؤُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ فَلاَ يَخْرُمُ وَلاَ يُصْرَّهُ وَلاَ يُصْرَّفُ بِطَرْحِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فِيْهِ فَإِنَّهُ قِيْلَ بِحُرْمَتِهِ وَقِيْلَ بِحَرَاهَتِهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ حَيْثُ لاَ تَقْذِيْرَ لِأَنَّ طَرْحَ ذَلِكَ مَقْصُودٌ بِخِلاَفِ الْمُتَقَاطِرِ مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ.

Dan dari situ (ketidakbolehan keluar hanya untuk keperluan berwudhu saat i'tikaf) dipahami, bahwa wudhu di dalam mesjid walaupun airnya bertetesan di dalamnya itu boleh, dan karena menetesnya itu bukan hal yang dimaksud, maka tidak haram dan tidak makruh. Berbeda dengan menumpahkan air musta'mal di dalamnya, maka menurut suatu pendapat hukumnya haram dan pendapat lain memakruhkannya, pendapat inilah yang mu'tamad (jadi pedoman) selama tidak mengotori mesjid, sebab menumpahkan air itu merupakan hal yang dimaksud, berbeda dengan air yang menetes dari anggota wudhu.

2. Fatawa Husain Ibrahim al-Maghribi8

وَالتَّضَيُّفُ فِي مَسْجِدِ الْبَادِيَةِ يَكُونُ بِإِطْعَامِ الطَّعَامِ النَّاشِفِ كَالشَّمْرِ لاَ إِنْ كَانَ مُقَدِّرًا كَالطَّبْحِ وَالْبِطَيْخِ وَإِلاَّ حَرُمَ إِلاَّ بِنَحْوِ سُفْرَةٍ تَجْعَلُ تَحْتَ الْإِنَاءِ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ عَدَمُ التَّقْذِيْرِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ النَّاشِفِ.

Penjamuan dalam mesjid pedesaan itu (yang boleh) dengan memberi makanan kering seperti kurma, dan bukan bila makanan itu akan mengotori mesjid, seperti masakan dan semangka, bila tidak seperti itu maka haram. Kecuali menggunakan alas yang diletakkan di bawah tempat makanannya yang sekiranya diduga kuat tidak akan mengotori, maka menurut pertimbangan yang kuat hal itu bisa disamakan dengan makanan kering.

114. Berdoa untuk Memohon Sesuatu yang Tidak Mungkin Tercapai

S. Bolehkah berdoa dengan ayat al-Qur'an untuk sesuatu yang biasanya tidak mungkin tercapai di dunia misalnya ayat "Ya Allah semoga Paduka turunkan hidangan dari langit kepada kami". Atau ayat "Wahai Tuhanku tunjukkanlah Dzat Paduka kepada hamba supaya hamba dapat melihat Paduka Tuhan", dengan maksud semata-mata berdoa. Jika boleh, apakah yang berdoa itu mendapat pahalanya membaca al-Qur'an? Jika haram manakah yang lebih utama berdoa dengan ayat semacam itu dengan maksud membaca al-Qur'an supaya mendapat

⁸ Husain Ibrahim al-Maghribi, al-Fatawa Husain Ibrahim al-Maghribi, (Bogor: Maktabah 'Arafah, t. th.), h. 51.

pahala fadhilahnya atau dengan doa karangan sendiri?

J. Berdoa untuk memohon sesuatu yang tidak mungkin tercapai, baik ditinjau dari segi akal pikiran, atau dari segi agama, maupun dari segi adat itu hukumnya tidak boleh, sekalipun dengan ayat al-Qur'an, karena yang dituju maksudnya tercapainya dan ia tidak mendapatkan pahala membaca al-Qur'an sebab tidak diniatkan, tetapi bila diniatkan membaca al-Qur'an maka hukumnya boleh dan mendapat pahala, bahkan berdoa dengan ayat al-Qur'an, itu lebih utama daripada doa karangan sendiri asal untuk maksud yang tidak mustahil tercapainya.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah al-Shawi9

قوله تعالى: "إِنَّقُوا الله." أَيْ تَأَدَّبُوا فِي السُّوَالِ وَلاَ تَخْتَرِعُوا أُمُوْرًا خَارِجَةً عَنِ الْعَادَةِ فَإِنَّ الْاَدَبُ فَا لَمُوالِ أَنْ تَسْأَلَ أَمْرًا مُعْتَادًا. وَمِنْ هُنَا حَرَّمَ الْعُلَمَاءُ الدُّعَاءَ بِمَا تُحِيْلُهُ الْعَادَةُ.

Pengertian firman Allah: "Bertakwalah kepada Allah." (QS. al-Maidah, 112), yakni bersantunlah dalam memohon kepada-Nya dan jangan mengada-ada dengan memohon sesuatu yang menurut kebiasaan tidak mungkin terwujud. Sesungguhnya aturan dalam memohon kepada-Nya adalah dengan memohon sesuatu yang memang mungkin adanya. Oleh karenanya maka para ulama mengharamkan doa-doa memohon sesuatu yang menurut kebiasaan yang normal mustahil adanya.

2. Ithaf al-Sadah al-Muttaqin 10

الْأَوَّلُ أَنْ لاَ يَكُوْنَ الْمَسْئُولُ مُمْتَنِعًا عَقْلاً وَلاَ عَادَةً كَإِخْيَاءِ الْمَوْتَى وَرُؤْيَةِ اللهِ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا وَإِنْزَالِ مَاثِدَةٍ مِنَ السَّمَاءِ. أَوْ مَلَكٍ يُخْبِرُ بِأَخْبَارِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْحُوَارِقِ الَّتِيْ كَانَتْ لِلاَّنْبِيَاءِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ السَّائِلُ نَبِيًّا.

(Tata cara berdoa) yang pertama adalah hendaknya yang diminta itu bukan merupakan sesuatu yang tidak mungkin terwujud, baik secara rasio maupun kebiasaan seperti menghidupkan orang mati, melihat Allah di dunia dan turunnya hidangan dari langit, atau malaikat yang memberitakan suatu berita dan lain sebagainya yang termasuk hal-hal yang tidak lazim dan hanya dimiliki oleh para nabi, kecuali jika yang berdoa itu memang seorang nabi.

⁹ Ahmad al-Shawi al-Maliki, Hasyiyah al-Shawi 'ala al-Jalalain, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1426 H/2005 M), Jilid I, h. 423.

Muhammad Murtadha al-Zabidi, Ithaf al-Sadah al-Muttaqin, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1422 H/2002 M), Jilid V, h. 260.

115. Tidak Mengetahui Syarat Rukunnya Wudhu, Memasuki Thariqah

S. Bolehkah orang awam yang tidak mengetahui syarat rukun wudhu, shalat dan sebagainya, memasuki thariqah mu'tabarah? Karena biasanya mereka tidak mau mempelajari pengetahuan agama sesudah masuk thariqah.

J. Boleh, apabila mempunyai keyakinan atau perkiraan bahwa sesudah masuk thariqah akan dapat mempelajari pengetahuan agama, akan tetapi bila tidak, seperti tersebut dalam soal, maka hukumnya tidak boleh, bahkan lebih dahulu wajib mempelajari dasar-dasar pokok agama (ushuluddin). Dan kemudian baru perinciannya (hukum ibadahnya).

Keterangan, dari kitab:

1. Kifayah al-Atqiya' wa Minhaj al-Ashfiya'11

وَكَذَا الطَّرِيْقَةُ وَالْحَقِيْقَةُ يَا أَخِيْ. مِنْ غَيْرِ فِعْلِ شَرِيْعَةٍ لَنْ تَحْصُلاً. فَالْمُؤْمِنُ وَإِنْ عَلَتْ دَرَجَتُهُ وَارْتَفَعَتْ مَنْزِلَتُهُ وَصَارَ مِنْ مُمْلَةِ الْأَوْلِيَاءِ لاَ تَسْقُطُ عَنْهُ الْعِبَادَاتُ الْمَفْرُوضَةُ فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ مَنْ صَارَ وَلِيًّا وَصَلَ إِلَى الْحَقِيْقَةِ سَقَطَتْ عَنْهُ الشَّرِيْعَةُ فَهُوَ ضَالً مُضِلًّ مُلْحِدً.

Demikian halnya thariqah dan haqiqah wahai saudaraku tanpa disertai pengamalan syariat, maka keduanya tidak akan berhasil. Seorang mukmin walaupun sudah sangat tinggi derajat dan kedudukannya, dan ia termasuk para wali, segala ibadah yang diwajibkan dalam al-Qur'an dan Sunnah, tetap tidak gugur dari dirinya. Maka barangsiapa menyangka seseorang yang telah menjadi wali yang mencapai haqiqah maka syariat tidak berlaku lagi baginya, maka ia termasuk orang yang sesat, menyesatkan dan anti tuhan (atheis).

116. Menekuni Membaca al-Quran dan Lain-lain Termasuk Thariqah Mu'tabarah

S. Apakah menetapi membaca al-Qur'an, membaca Dalail al-Khairat dan mempelajari kitab Fath al-Qarib atau kitab Kifayah al-'Awam itu termasuk thariqah Mu'tabarah?

J. Ya. Demikian itu termasuk thariqah mu fabarah.

Keterangan, dari kitab:

1. Salalim Fudhala' Syarh Hidayah al-Adzkiya'12

Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, Kifayah al-Atqiya' wa Minhaj al-Ashfiya', (Semarang: Usaha keluarga, t. th.), 12.

Muhammad Nawawi al-Jawi, Salalim Fudhala' Syarh Hidayah al-Adzkiya' pada Kifayah al-Atqiya' wa Minhaj al-Ashfiya', (Semarang: Usaha keluarga, t. th.), 13.

وَلِكُلِّ وَاحِدِهِمْ طَرِيْقُ مِنْ طُرُقٍ ﴿ يَخْتَارَهُ فَيَكُونُ مَنْ ذَا وَصَلَا كَاحُلُوسِهِ بَيْنَ الْأَنَامِ مُرَبِّيًا ﴿ وَكَكَثْرَةِ الْأَوْارَدِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلاَ وَكَخُدُمَةٍ لِلنَّاسِ وَالْحُمْلِ الْحَطَبِ ﴿ لِتَصَدَّقٍ بِمُحَصَّلٍ مُتَمَولاً

وَبَعْضُهُمْ يُكْثِرُ الْأَوْرَادَ أَي وَظَاثِفَ الْعِبَادَاتِ مِنَ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ النَّافِلَيْنِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالتَّسْبِيْجِ فَهَذَا مِنْ دَرَجَاتِ الْمُتَجَرِّدِيْنَ لِلْعِبَادَةِ وَمِنْ طُرُقِ الصَّالِحِيْنَ.

Masing-masing dari ulama itu punya thariqah dari thariqah-thariqah yang ia pilih, maka mereka bisa wushul Ilallah,

Seperti duduknya di tengah masyarakat sebagai guru, memperbanyak wiridwirid seperti puasa dan shalat,

Seperti melayani masyarakat dan membawa (hasil pencarian) kayu bakar untuk disedekahkan hasilnya setelah ditukar dengan uang.

Syaikh Nawawi bin Umar al-Bantani berkata: "Dan sebagian dari mereka memperbanyak wirid-wirid, yakni tugas-tugas ibadah seperti shalat dan puasa sunnah, membaca al-Qur'an dan tasbih, maka yang demikian ini termasuk derajat orang-orang yang memang mengkhususkan diri beribadah dan thariqah orang-orang saleh.

117. Thariqah yang Mempunyai Sanad Muttashil Kepada Nabi Saw. Itu Tidak Ada Perbedaannya Satu Sama Lain

- S. Apakah thariqah Tijaniyah itu termasuk thariqah yang benar dan mu'tabarah? Manakah yang lebih utama? Thariqat Naqsyabandiyah, Syattaniyah, Qadiriyah atau lainnya? Apakah perbedaannya thariqah dan syari'ah?
- J. Muktamar ke-3 (lihat soal nomor 50) telah memutuskan bahwa thariqat Tijaniyah itu mempunyai urutan langsung (sanad muttashil) sampai kepada Rasulullah Saw. dan merupakan thariqah yang sah dalam agama Islam dan semua thariqah mu'tabarah itu tidak ada perbedaannya satu sama lain. Dalam Muktamar ini diputuskan bahwa semua wiridan dari thariqah Tijaniyah itu sah (benar) seperti zikirnya, shalawatnya dan istighfarnya, begitu juga pernyataannya dan syarat-syaratnya yang sesuai dengan agama (syara'). Adapun yang tidak sesuai apabila dapat ditakwilkan, maka harus ditakwilkan pada arti yang sesuai dengan agama dan terserah kepada para yang ahli. Bila tidak bisa dan ternyata bertentangan dengan agama dan tidak dapat ditakwilkan, maka hal itu salah, dan tidak boleh diajarkan kepada golongan awam supaya tidak tersesat dan menyesatkan.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Fatawa al-Haditsiyah¹³

فَفِيْ تِلْكَ الْكُتُبِ مَوَاضِعُ عَبَّرَ عَنْهَا بِمَا لاَ يُطَابِقُهُ ظَوَاهِرُ عِبَارَتِهَا اِتِّكَالاً عَلَى اصطلاَجِ مُقَرَّدٍ عِنْدَ وَاضِعِهَا فَيَفْهُمُ مُطَالِعُهَا ظَوَاهِرَهَا الْغَيْرَ الْمُرَادَةِ فَيَضِلُ ضَلالاً مُبِينًا. وَأَيْضًا فِيْهَا أُمُوْرُ كَشْفِيَّةً وَقَعَتْ حَالَ غَيْبَةٍ وَاصْطِلاَمٍ وَهَذَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّأُويْلِ مُهُو يَتَوَقَّفُ عَلَى اِثْقَانِ الْعُلُومِ الظَّاهِرَةِ بَلْ وَالْبَاطِنَةِ فَمَنْ نَظَرَ فِيْهَا وَهُو لَيْسَ كَذَلِكَ وَهُو يَتُوفَّ الْمُرَادِ فَضَلَّ وَأَضَلَّ فَعُلِمَ أَنَّ مُجَانَبَةً مُطَالَعَتِهَا رَأْسًا أَوْلَى

Maka dalam kitab-kitab (Syaikh Muhyiddin bin 'Arabi) tersebut terdapat tema-tema yang beliau ungkapkan maknanya yang tidak sama dengan makna redaksi lahiriahnya, karena berpegangan pada istilah yang ditetapkannya. Lalu orang yang mempelajarinya (hanya) memahami makna lahiriahnya yang (sebenarnya) tidak dikehendaki (beliau), kemudian ia benar-benar tersesat. Di sana juga terdapat materi-materi yang bersifat kasyfiyah (diilhami langsung oleh Allah) yang terjadi saat dalam keadaan ghaibah dan diluar kesadaran dan butuh ditakwil, yang mana (bisa memahami dan tidaknya) tergantung pada kekuatan ilmu lahir dan batin (seseorang). Oleh sebab itu, seseorang yang mendalaminya sedangkan dia bukan orang yang ilmu lahir dan batinnya kuat, maka ia pasti akan memahami makna yang tidak dikehendaki beliau, lalu ia akan tersesat dan menyesatkan. Maka menghindar dengan sama sekali tidak mempelajari kitab-kitab tersebut itu lebih utama.

2. Maraqi al-'Ubudiyah Syarh Bidayah al-Hidayah14

وَالشَّرِيْعَةُ الْأَخْكَامُ الَّتِي كُلَّفَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهِ جَلَّ وَعَلاَ مِنَ الْوَاجِبَاتِ
وَالْمَنْدُوْبَاتِ وَالْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَكْرُوْهَاتِ وَالْجَائِزَاتِ. وَالطَّرِيْقَةُ هِيَ الْعَمَلُ بِالْوَاجِبَاتِ وَالْمَنْدُوْبَاتِ
وَالْمَنْدُوْبَاتِ وَالْمُنْوِيَّاتِ وَالْمَخْرُوْهَاتِ وَالْمُبَاحَاتِ وَالْأَخْذُ بِالْأَخْوَطِ كَالْوَرَعِ وَبِالرِّيَاضَةِ مِنْ
سَهْرٍ وَجُوْعٍ وَصُمْتٍ

Syaikh al-Shawi berkata: "Syariat adalah hukum-hukum yang Rasulullah Saw. bebankan kepada kita dari Allah Azza wa Jalla berupa hal-hal wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Sedangkan thariqah adalah pengamalan kewajiban-kewajiban dan kesunahan-kesunahan, meninggalkan larangan-

112

¹³ Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Haditsiyah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1390 H/1971 M), h. 311.

¹⁴ Muhammad Nawawi al-Jawi, Manaqi al-Ubudiyah Syarh Bidayah al-Hidayah, (Surabaya: al-Hidayah, t. th.), h. 4.

larangan, dan menghindar dari hal mubah yang tidak dibutuhkan, bersikap sangat hati-hati seperti dengan wira'i dan riyadhah antara lain ibadah tengah malam, berlapar-lapar dan membisu.

118. Masyaqqah yang Membolehkan Mengadakan Shalat Jum'at di Beberapa Tempat

- S. Apakah arti masyaqqah (kesukaran) yang dapat membolehkan mengadakan shalat Jum'at di beberapa tempat (ta'adud al-Jum'at) dalam satu kota dan berapakah jaraknya? Apakah yang diperhitungkan itu jarak antara kedua mesjid (tempat shalat Jum'at), ataukah antara tempat tinggal penduduk yang berkewajiban shalat Jum'at dan mesjid?
- J. Masyaqqah ialah kesukaran berkumpulnya penduduk yang berkewajiban shalat Jum'at dalam suatu tempat karena berjauhan tempat tinggal mereka dari mesjid dengan jarak 1 mil syar'i, yaitu jarak 24 menit dengan jalan kaki biasa atau jarak 1666,667 meter.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Hawasyi al-Madaniyah15

قَالَ حَتَّى لَوْ كَانُوا ثَمَانِينَ مَثَلًا وَعَسُرَ اجْتِمَاعُهُمْ فِي مَكَانٍ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ مِنْهُ فَقَطْ بِأَنْ سَهُلَ اجْتِمَاعُ الْجُمِيعِ أَنَّهُ يَجُورُ التَّعَدُّدُ فَضَابِطَ الْعُسْرِ كَمَا فِي الْجُنِمَاعُ الْجُمِيعِ أَنَّهُ يَجُورُ التَّعَدُّدُ فَضَابِطَ الْعُسْرِ كَمَا فِي التُحْفَةِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَشَقَّةٌ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً وَفِي الْعُبَابِ إِمَّا لِكَثْرَتِهِمْ أَوْ لِقِتَالٍ كَمَا فِي الْجَعْدِ ثَمَا فِي الْجَعْدِ كَمَا فِي الْجَلْدِ عَنْ الْبَلَدِ أَيْ بَيْنَهُمْ أَوْ لِبُعْدِ كَمَا فِي الْجَلْدِ عَنْ الْبَلَدِ أَيْ بَانُ يَهُمُ الصَّوْتُ بِشُرُوطِهِ الْآتِيَةِ.

Ibn Hajar berkata: "Sehingga meskipun andaikan jumlah mereka mencapai 80 orang misalnya, mereka sulit berkumpul dan menjadi satu di suatu tempat yang disebabkan salah seorang saja yang tidak bisa ikut shalat di situ. Yakni mereka mudah berkumpul kecuali hanya seorang saja yang tidak. Dan sulitnya berkumpul semua tersebut membolehkan adanya ta'addud (mendirikan jum'atan lebih dari satu). Maka, standar sulit berkumpul seperti keterangan dalam al-Tuhfah adalah dalam berkumpul itu akan menimbulkan masyaqqah (kesulitan) yang tidak mungkin dibiarkan. Dalam kitab al-'Ubab disebutkan: "Masyaqqah itu dapat terjadi karena banyaknya jumlah jamaah, pertikaian di antara mereka, atau jauhnya jarak

Muhammad Sulaiman al-Kurdi, al-Hawasy al-Madaniyah Hasyiyah Ibn Hajar al-Haitami, al-Minhaj al-Qawim, (Singapura: al-Haramain, t. th.), Juz II, h. 59.

antara masing-masing ujung daerah jum'tan tersebut. Dalam kitab al-l'ab Ibn Hajar berkata: "Standar jauh seperti orang yang berada di luar daerah jum'atan, artinya orang yang berada di ujung daerah tersebut tidak mendengar suara adzan dengan syarat-syarat yang akan disebutkan."

2. Tuhfah al-Habib16

ثُمَّ عُسْرُ الإَجْتِمَاعُ إِمَّا لِكَثْرَتِهِمْ قَالَ فِي الْأَنْوَارِ أَوْلِقِتَالٍ بَيْنَهُمْ أَوْ بُعْدِ أَطْرَافِ الْبَلَدِ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ الْحُاجَةِ مَنْ بِطَرَفِهَا لَا يَبْلُهُمْ الصَّوْتُ بِشُرُوطِهِ الْآتِيَةِ كَمَا ذَكْرَهُ فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ وَعِبَارَةُ أَج وَمِنْ الْحُاجَةِ مَا لَوْ كَانَ مَيْنَ أَهْلِ الْبَلَدِ قِتَالُ فَكُلُّ فِنَةٍ بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ يَلْزَمُهَا الْجُمُعَةُ وَلَوْ بَعُدَتْ أَطْرَافُ الْبَلَدِ وَكَانَ الْبَلَدِ وَكَانَ الْبَلَدِ وَكَانَ الْبَلَدِ وَكَانَ الْبَلَدِ بَاللَّهُ اللَّهُ عُلِي الْمَعْلِ الْمَعْوِلِ الْمَعْولِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْمَالِ لِمَنْ فِي الْبَلَدِ بَلْ يُشْتَرَطُ سَمَاعُ الْأَذَانِ لِمَنْ فِي الْبَلَدِ بَلْ يُشْتَرَطُ سَمَاعُ مَنْ بِخَارِجِهَا.

Lalu, sulit berkumpul dapat disebabkan karena jumlah yang banyak. Dalam kitab al-Anwar Syaikh Yusuf bin Ibrahim al-Ardabilli berkata: "Atau sebab adanya pertikaian antara mereka, atau karena jauhnya batas-batas daerah." Maksudnya orang yang tinggal di batas daerah tidak bisa mendengar adzan dengan syarat-syarat seperti yang disebutkan al-Nawawi dan Ibn Hajar dalam kitab al-'Ubab dan Syarhnya (al-I'ab). Dan ungkapan al-Ajuhuri: "Dan termasuk hajat, bila terjadi pertikaian di antara penduduk suatu daerah, sementara setiap kelompok dari mereka jumlahnya mencapai 40 orang, maka mereka wajib shalat Jum'at. Dan bila batas daerahnya berjauhan, sementara orang yang jauh tinggal di daerah yang dari situ mereka tidak bisa mendengar suara adzan, dan ketika mereka berangkat setelah terbit fajar maka sudah tidak bisa mengikutinya, sebab mereka tidak wajib pergi shalat Jum'at kecuali pergi setelah terbit fajar. Dalam kondisi tersebut, bila penduduk yang tinggal di tempat jauh mencapai jumlah 40 orang, maka mereka dapat mengadakan shalat Jum'at dan apabila tidak maka mereka wajib mengerjakan shalat Zhuhur. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa tidak disyaratkan mendengar suara adzan (Jum'at) bagi penduduk yang berada di dalam daerah, tetapi disyaratkan bagi penduduk yang tinggal di luar daerah.[]

114

¹⁶ Sulaiman al-Bujairimi, Tuhfah al-Habib/Hasyiyah al-Bujairimi, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Jilid II, h. 195.

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-7 Di Bandung Pada Tanggal 13 Rabiuts Tsani 1351 H./9 Agustus 1932 M.

119. Menjual Barang dengan Dua Harga: Kontan dan Kredit dengan Akad Sendiri-sendiri

120. Memakai Pakaian Santiu bagi Lelaki

121. Menjual Bayaran yang Belum Diterima

122. Adzan Jum'at Dilaksanakan dengan Orang Banyak 123. Menanam Ari-ari dengan Menyalakan Lilin

124. Binatang Biawak (Seliro) Itu Bukan Binatang Dhab

125. Muwakkil Memberikan Uang Rp. 10,- Kepada Wakil untuk Membeli Ikan. Sesudah Ikan Diterima, Wakil Disuruh Membeli ikan itu dengan harga 11,- dalam Waktu Satu Hari

126. Dalam Akad Nikah Tidak Ada Syarat Mendahulukan Pihak Laki-laki atau Perempuan

127. Menjual Kulit Binatang yang Tidak Halal Dimakan 128. Tidak Mengetahui Ilmu *Musthalah Hadits* mengajar Hadis 129. Lelaki Lain Melihat Wajah dan Telapak Tangan Wanita

119. Menjual Barang dengan Dua Harga: Kontan dan Kredit dengan Akad Sendiri-sendiri

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang barang sesuatu yang dijual dengan harga Rp. 5,- kontan dan Rp. 6,- kredit (nas'al), pembelinya memilih harga kredit (Rp. 6,-), artinya lebih tinggi Rp. 1,- dari harga kontan. Apakah kelebihan tersebut (Rp, 1,-) itu termasuk riba yang dimaksudkan oleh hadits "Setiap hutang piutang yang menghasilkan keuntungan itu adalah riba." kemudian dihukuminya menjadi haram, sedang jual-beli tersebut hukumnya tidak sah?

J. Jual beli tersebut di atas hukumnya sah dan tidak termasuk arti "riba" dalam hadits tersebut, asal masing-masing dengan akad sendiri-sendiri. *Keterangan*, sebagaimana dimaklumi dalam kitab-kitab fiqh.

120. Memakai Pakaian Santiu bagi Lelaki

- S. Apakah hukumnya memakai pakaian semacam las seperti kain santiu dan sebagainya. Haramkah bagi orang laki-laki karena termasuk pakaian sutera yang terlarang baginya?
- J. Pakaian tersebut tidak haram karena masih disangsikan kesuteraannya. *Keterangan,* dari kitab:
- 1. Tarsyih al-Mustafidin¹

وَالْأَصْلُ تَخْرِيْمُ الْحَرِيْرِ لِغَيْرِ الْمَرْأَةِ بَقِيَ مَا لَوْ شُكَّ فِيْهِ هَلْ هُوَ حَرِيْرُ أَوْ غَيْرُ حَرِيْرٍ لِاخْتِلاَفِ ذَوِي الْحَبْرَةِ كَاللاَّسِ الْمَعْرُوفِ الْآنَ الَّذِيْ كَثْرَ اسْتِعْمَالُهُ لِلرِّجَالِ عَلَى الْحَبْلاَفِ الْخَتِلاَفِ ذَوَا عَلَى الْمَخْلُوطِ أَنْوَاعِهِ فَهَلْ يَجْرِي فِيْهِ خِلاَفُ ابْنِ حُجْرُومِ عِنْدَ الشَّكِّ فِيْ أَكْثَرِيَّةِ الْحَرِيْرِ عَلَى الْمَخْلُوطِ بِهِ أَوْ يُقَالُ بِحُوْمَتِهِ مُطْلَقًا أَوْ حِلِّهِ مُطْلَقًا لَمْ أَرَ فِيْهِ شَيْئًا. وَالْأَوْفَقُ بِمَا اخْتَارَهُ مُمْهُورُ أَيْمَتِنَا بِهِ أَوْ يُقَالُ بِحُورَمَتِهِ مُطْلَقًا أَوْ حِلِّهِ مُطْلَقًا لَمْ أَرَ فِيْهِ شَيْئًا. وَالْأَوْفَقُ بِمَا اخْتَارَهُ مُمْهُورُ أَيْمَتِنَا بَلْ وَهُو اللهِ اللَّهُ الْمَعْرَادِ مِنْ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ فَلْيُرْجِعَ إِلَيْهِ عِنْدَ الشَّكَ فِي ذَلِكَ مَا لَمْ يَقُمْ فَضَ عَلَى خِلاَفِهِ وَهُو الَّذِيْ يَسَعُ النَّاسَ الْآنَ.

Pada dasarnya keharaman sutera bagi selain wanita itu tetap berlaku. (Namun keterangan tersebut masih) menyisakan kasus ketika suatu kain masih diragukan, apakah kain itu sutera atau bukan karena perbedaan pendapat para ahli. Seperti *las* (nama jenis kain) yang saat ini banyak dipakai kalangan laki-laki dengan aneka ragam jenisnya. Apakah pada kain *las* tersebut diberlakukan *khilafiyah* Ibn Hujrum ketika lebih banyaknya

¹ Alawi al-Saqqaf, Tarsyih al-Mustafidin, (Indonesia: al-Haramain, t.th.), h. 122.

kadar sutera dari pada kain yang dicampurinya tersebut masih diragukan. Atau dikatakan haram secara mutlak, atau halal secara mutlak? Saya tidak berpendapat sama sekali dalam hal tersebut. Namun yang paling tepat adalah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama kita (Syafi'iyah), bahkan mayoritas ulama Hanafiyah sebagaimana yang tertera dalam Rad al-Muhtar: "Bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu hukum asalnya mubah, maka ketika terdapat keragu-raguan kembalikanlah pada hukum asal tersebut selama tidak ada nash (ketentuan al-Qur'an dan hadis) yang menentangnya. Pendapat inilah yang dapat mengakomodir masyarakat luas dewasa ini."

121. Menjual Bayaran yang Belum Diterima

S. Bagaimana hukumnya menjualbelikan upah (gaji) yang akan diterima pada akhir bulan, dijual pada awal bulan dengan harga yang lebih rendah, misalnya gajinya Rp. 100,- dijual dengan harga Rp. 80,-. Sahkah jual beli tersebut?

J. Tidak sah karena belum dapat diterimakan barangnya.

Keterangan, dalam kitab:

1. Al-Asybah wa al-Nazhair2

(Termasuk hal yang merusak akad adalah) ... Dan tidak tahu barang yang dijual itu sedang disewa dan sulit menerima barang yang dijual tersebut karena dighasab dan semisalnya.

122. Azan Jum'at Dilaksanakan dengan Orang Banyak

- S. Bagaimana hukumnya adzan Jum'at yang dilaksanakan oleh orang banyak (lebih dari satu orang)?
- J. Adzan Jum'at yang dilaksanakan pada waktu khatib berada di atas mimbar yaitu adzan kedua itu sunahnya dikerjakan oleh seorang. Adapun lainnya boleh dikerjakan oleh seorang atau lebih menurut kebutuhan.

Keterangan, dari kitab:

1. Mauhibah Dzi al-Fadhl³

² Jalaluddin al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazhair, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), h. 287-288.

³ Muhammad Mahfudz al-Tarmasi al-Jawi, Mauhibah Dzi al-Fdhl, (Mesir: al-Amirah al-Syarafiyah, 1326 H), Jilid III, h. 239.

الْمُؤَذِّنِيْنَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ مُؤَذِّنُ.

Al-Syafi'i Ra. menegaskan: "Saya suka satu orang yang mengumandangkan adzan jika sudah berada di atas mimbar, dan bukan banyak *muadzin* karena Rasulullah hanya mempunyai seorang *muadzin*."

123. Menanam Ari-ari dengan Menyalakan Lilin

- S. Bagaimana hukumnya menanam ari-ari (masyimah) dengan menyalakan lilin dan menaburkan bunga-bunga di atasnya?
- J. Menanam ari-ari (*masyimah*) itu hukumnya sunah. Adapun menyalakan lilin dan menaburkan bunga-bunga di atasnya itu hukumnya haram karena membuang-buang harta (*tabdzir*) yang tak ada manfaatnya.

Keterangan, dari kitab:

1. Nihayah al-Muhtaj4

وَيُسَنُّ دَفْنُ مَا انْفَصَلَ مِنْ حَيِّ لَمْ يَمُتْ حَالاً أَوْ مِتَّنْ شُكَّ فِيْ مَوْتِهِ كَيَدِ سَارِقٍ وَظَفْرٍ وَشَعْرٍ وَدَمِ نَحْو فَصْدٍ إِكْرَامًا لِصَاحِبِهَا.

Dan disunahkan menguburkan sesuatu (anggota badan) yang terpisah dari orang yang masih hidup dan tidak mati segera, atau dari orang yang masih diragukan kematiannya, seperti tangan pencuri, kuku, rambut dan darah semisal dari bekam, demi menghormati pemiliknya.

2. Fath al-Qarib dan Hasyiyah al-Bajuri⁵

(الْمُبَدِّرُ لِمَالِهِ) أَيْ يُصْرِفُهُ فِيْ غَيْرِ مَصَارِفِهِ

(قَوْلُهُ فِيْ غَيْرِ مَصَارِفِهِ) وَهُوَكُلُّ مَا لَا يَعُوْدُ نَفْعُهُ إِلَيْهِ عَاجِلاً وَلاَ آجِلاً فَيَشْمُلُ الْوُجُوةَ الْمُحَرَّمَةَ كَأَنْ يَشْرَبَ بِهَ الْخَمْرَ أَوْ يَزْنِيَ بِهِ أَوْ يَرْمِيهِ فِي الْبَحْرِ أَوِ الطَّرِيقِ وَالْمَكْرُوْهَةَ كَأَنْ يَشْرَبَ بِهِ الدُّخَانَ الْمَعْرُوفُ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِيهِ الْكَرَاهَةُ فَصَرْفُ الْمَالِ فِيهِ مِنَ التَّبْذِيرِ حَيْثُ لَا نَفْعَ فِيهِ

(Yang menyia-nyiakan hartanya), maksudnya membelanjakannya pada pembelanjaan yang tidak semestinya.

(Ungkapan Ibn Qasim al-Ghazi: "pada pembelanjaan yang tidak semestinya.") yaitu setiap pembelanjaan yang tidak bermanfaat baginya

118

Syamsuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1357 H/1938 M), Jilid II, h. 494-495.

⁵ Ibn Qasim al-Ghazi dan Ibrahim al-Bajuri, Fath al-Qarib dan Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid I, h. 380.

seketika itu maupun pada waktu mendatang. Maka mencakup perkara yang diharamkan seperti di ia gunakan (sebagai biaya) meminum *khamr*, berzina dan membuangnya ke laut atau jalan, dan beberapa kemakruhan seperti ia gunakan (sebagai biaya) merokok yang terkenal (sekarang ini; pada zaman Syaikh Ibrahim al-Bajuri: Pen.). Sebab, hukum asal merokok adalah makruh, maka membelanjakan harta untuk membelinya termasuk penyia-nyiaan harta selama merokok tidak ada manfaatnya.

124. Binatang Biawak (Seliro) Itu Bukan Binatang Dhab

- S. Apakah yang dinamakan binatang biawak (seliro) itu? Apakah binatang tersebut ialah binatang dhab yang halal dimakan itu?
- J. Binatang biawak (seliro) itu bukan binatang *dhab*, oleh karenanya maka haram dimakan.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah al-Qulyubi 'ala Syarh al-Minhaj6

Binatang dhab adalah binatang yang menyerupai biawak yang hidup sekitar tujuh ratus tahun. Binatang ini tidak minum air dan kencing satu kali dalam empat puluh hari. Betinanya mempunyai dua alat kelamin betina, dan yang jantan pun mempunyai dua alat kelamin jantan.

125. Muwakkil Memberikan Uang Rp. 10,- Kepada Wakil untuk Membeli Ikan dan Sesudah Ikan Diterima, Wakil Disuruh Membeli Ikan Itu dengan Harga 11,- dalam Waktu Satu Hari

- S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang seorang yang memberikan uang Rp. 10,-kepada wakilnya untuk membeli ikan dengan berkata: "Belilah ikan sesukamu dan sesudah kuterima belilah ikan itu dengan harga Rp. 11,- dalam tempo satu hari. Bolehkah perwakilan dan jual beli tersebut?
- J. Perwakilan tersebut hukumnya sah tanpa perselisihan dan jual beli antara majikan (muwakil) dan wakilnya bila dengan prosedur (akad) tersendiri, maka hukumnya juga sah, karena telah memenuhi syarat-syarat jual beli.

⁶ Syihabuddin al-Qulyubi, *Hasyiyah al-Qulyubi 'ala al-Minhaj*, (Indonesia: al-Haramain), Jili IV, h. 259.

Keterangan, dari kitab:

1. Tuhfah al-Habib⁷

فَيَصِحُ التَّوْكِيْلُ فِي كُلِّ عَقْدٍ كَبَيْعِ وَهِبَّةٍ وَكُلُّ فَسْخِ كَاإِقَالَةٍ وَرَدٌّ بِعَيْبٍ وَقَبْضٍ وَإِقْبَاضٍ.

Boleh mewakilkan kepada orang lain pada semua jenis transaksi, seperti jual-beli, hibah, pembatalan transaksi, pengembalian (barang yang sudah dibeli) karena adanya cacat, penerimaan dan menerimakan.

126. Dalam Akad Nikah Tidak Ada Syarat Mendahulukan Pihak Laki-laki atau Perempuan

- S. Manakah yang benar dalam akad nikah? Apakah akad yang berbunyi: "Aku mengawinkan kamu dengan anak perempuanku.", dengan mendahulukan pihak laki-laki ataukah akad yang berbunyi: "Aku mengawinkan anak perempuanku kepadamu.", dengan mendahulukan pihak perempuan?
- J. Dalam akad nikah itu tidak disyaratkan harus mendahulukan salah satu pihak. Jadi mendahulukan pihak laki-laki atau pihak perempuan itu sama saja (sah).

Keterangan, sebagaimana dimaklumi dalam kitab-kitab fiqh dan andaikata salah satu akad tersebut tidak benar, maka dalam kitab Syarh al-Raudh diterangkan: "Kesalahan susunan kata-kata bila tidak merusakkan makna, itu seyogyanya disamakan dengan kesalahan i'nab (bacaan huruf terakhir), jadi tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah."

Keterangan, dari kitab:

1. Asna al-Mathalib8

لِأَنَّ الْحُطَاءَ فِي الصِّيْغَةِ إِذَا لَمْ يُخْلِ بِالْمَعْنَى يَنْبَغِيْ أَنْ يَكُوْنَ كَالْحُطَاءِ فِي الإِعْرَابِ. إِهْ أَي فَلاَ يَضُرُّ.

Karena sungguh kesalahan dalam sighat (redaksi akad) selama tidak merusak pengertian yang dimaksud, seyogyanya disamakan dengan kesalahan dalam tata bahasa, sehingga tidak berpengaruh pada keabsahannya.

127. Menjual Kulit Binatang yang Tidak Halal Dimakan

S. Bagaimana hukumnya jual beli kulit binatang yang tidak halal dimakan seperti ular, macan dan sebagainya? Apabila hukumnya haram, apakah ada

⁷ Sulaiman al-Bujairimi, *Tuhfah al-Habib/Hasyiyah al-Bujuri*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H/2003 M), Cet. Ke-2, Jilid III, h. 134.

⁸ Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib Syarah Raudhah al-Thalib, (Indonesia: Menara Kudus, t. th.), Jilid III, h. 118.

jalan yang dapat membolehkannya?

J. Menjualbelikan kulit binatang yang tidak halal dimakan sebelum disamak itu hukumnya tidak sah, karena kulit tersebut masih najis kecuali dengan cara pemindahan tangan dari ketentuan (tidak dimaksudkan secara khusus). *Keterangan*, dari kitab:

1. Hasyiyah al-Syirwani wa al-'Ubbadi المحاية الرَّمْ فِي صِحَّةُ بَيْعِ دَارٍ مَبْنِيَّةٍ بِسِرْجِيْنَ فَقَطْ. وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ بَيْعِ دَارٍ مَبْنِيَّةٍ بِسِرْجِيْنَ فَقَطْ. وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ بَيْعِ دَارٍ مَبْنِيَّةٍ بِسِرْجِيْنَ فَقَطْ. وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ بَيْعِ الْحُزَفِ الْمَخْلُوْطِ بِالرَّمَادِ النَّجْسِ كَالْأَزْيَارِ وَالْقُلَلِ وَالْمَوَاجِيْرِ. وَطَاهِرُ ذَلِكَ أَنَّ النَّجْسَ مَبِيْعُ تَبَعًا لِلطَّاهِرِ. وَالَّذِيْ حَقَقَهُ ابْنُ قَاسِمٍ أَنَّ الْمَبِيْعَ هُوَ الطَّاهِرُ فَقَطْ. وَالنَّجَسُ مَنْ النَّحَسُ مَنْ النَّمَ مِنْ النَّمَ فَلُ الْمَدِ عَنِ الْإِخْتِصَاصِ فَهُوَ غَيْرُ مَبِيْعِ وَإِنْ قَالِلَهُ جُزْءٌ مِنَ النَّمَنِ.

Dan dikutip dari al-'Allamah al-Ramli tentang kebolehan menjual rumah yang hanya dibangun dengan kotoran hewan saja. Dari pernyataan beliau tersebut bisa dipahami bahwa menjual gerabah atau tembikar yang bahannya dicampur dengan abu najis, seperti bejana-bejana tempat air (gentong; Jawa), tempayan-tempayan dan alat-alat penuang air. Kejelasan diperbolehkan penjualan barang-barang tersebut adalah bahwa niscaya bahan najisnya itu merupakan mabi' (barang yang dijual) karena mengikuti bahan yang suci. Dan berdasar pendalaman Ibn Qasim, niscaya mabi'nya hanyalah terbatas bahan sucinya saja. Sedangkan bahan najis diambil (pembeli) dengan hukum naqlal-yad 'an al-ikhtishash (memindah hak kuasa khusus atas penggunaan), maka bahan najisnya tidak berstatus sebagai mabi', meskipun sebanding dengan sebagian harganya.

128. Tidak Mengetahui Ilmu *Musthalah Hadits* Mengajar Hadis

- S. Bolehkah orang yang tidak mengetahui ilmu Musthalah Hadits memberi pelajaran kepada umum tentang hadits-hadits yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab petunjuk yang terkenal?
- J. Boleh memberi pelajaran dan menafsirkan hadits-hadits yang tidak palsu (maudhu') yang tersebut dalam kitab-kitab yang sudah terkenal asal penafsirannya sesuai dengan penafsiran ulama yang terkenal.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Fatawa al-Haditsiyah¹⁰

⁹ Al-Syirwani wa Ibn Qasim al-'Ubbadi, Hasyiyah al-Syirwani wa al-'Ubbadi, (Beirut: Dari Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.), Juz IV, h. 236.

وَسُثِلَ نَفَعْنَا اللهُ بِهِ عَنْ شَخْصِ يَعِظُ الْمُسْلِمِيْنَ بِتَفْسِيْرِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيْثِ وَهُو لاَ يَعْرِفُ عِلْمَ الصَّرْفِ وَلاَ وَجْهَ اللَّغَةِ وَلاَ عِلْمَ الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ عِلْمَ الصَّرْفِ وَلاَ وَجْهَ اللَّغَةِ وَلاَ عِلْمَ الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ فَهَلْ يَجُوْزُ لَهُ الْوَعْظُ بِهِمَا أَوْ لاَ؟ إِلَى أَنْ قَالَ: فَأَجَابَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ بِأَنَّهُ إِنْ كَانَ وَعُظُهُ بِآيَاتِ التَّرْغِيْبِ وَالتَّرْهِيْبِ وَخَوْهِمَا وَبِالْأَحَادِيْثِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِذَلِكَ وَفَسَّرَ ذَلِكَ بِمَا قَالَهُ الْأَثِيَّةُ بِاللّهَ عَنْهُ الْعُلَمَاءِ وَالنَّاقِلُ وَفَسَّرَ ذَلِكَ بِمَا كَاللّهُ الْأَثَوْلُ كَانِهُ النَّاقِلُ كَارَمُ الْعُلَمَاءِ وَالنَّاقِلُ كَلاَمِ النَّعْرِهِ لِأَنَّهُ نَاقِلُ كَلاَمِ الْعُلَمَاءِ وَالنَّاقِلُ كَلاَمُهُمْ إِلَى النَّاسِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إِلَّا الْعَدَالَةُ وَأَنْ لَا يَتَصَرَّفَ فِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِهِ وَفَهْمِهِ

Ibn Hajar al-Haitami (semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan beliau) ditanya tentang seseorang yang mengajar (memberi mauidhah) kaum muslimin dengan tafsir al-Qur'an dan Hadits, sedangkan ia tidak mengetahui ilmu nahwu, bahasa Arab, ilmu ma'ani dan bayan, apakah ia boleh memberi mauizhah dengan tafsir al-Qur'an dan hadits? ... Maka Ibn Hajar Ra. menjawab: "Jika mauizhahnya itu menggunakan ayat-ayat targhib (dorongan beribadah) dan ayat-ayat tarhib (peringatan menghindari maksiat) dan semisalnya, dan dengan hadits-hadits terkait tema tersebut, dan menafsir(jelas)kannya sesuai dengan pendapat para ulama maka hal itu diperbolehkan, meskipun ia tidak menguasai ilmu nahwu dan selainnya. Sebab ia adalah pengutip pendapat ulama. Sementara pengutip pendapat ulama itu hanya disyaratkan bersifat 'adalah (bukan pelaku kefasikan) dan tidak mengembangkan pendapat mereka sama sekali dengan dasar pendapat dan pemahamannya sendiri.

129. Lelaki Lain Melihat Wajah dan Telapak Tangan Wanita

- S. Bolehkah seorang pria melihat muka dan jari-jari wanita yang bukan mahramnya untuk mengajar agama, misalnya; seorang guru pria dalam madrasah banat?
- J. Seorang pria boleh melihat muka dan telapak tangan wanita yang bukan mahramnya untuk mengajarkan agama dengan memenuhi empat syarat yang telah disetujui oleh Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli, yaitu:
- a. Tidak menimbulkan fitnah.
- b. Pelajarannya harus mengenai kewajiban wanita.
- c. Tidak ada guru wanita atau mahram.
- d. Pelajaran memerlukan dilaksanakan dengan berhadapan muka.

Apabila tidak memenuhi keempat syarat tersebut maka hukumnya haram.

¹⁰ Ibn Hajar al-Haitarni, al-Fatawa al-Haditsiyah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1390 H/1971 M), h. 228.

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Wahhab dan Al-Tajrid li Naf'i al-'Abid11

(وَتَعْلِيْمٍ) لِمَا يَجِبُ أَوْ يُسَنُّ (وَيُسَنُّ وَ لِأَجْنَبِيَّةٍ فَقِدَ فِيْهَا الْجِنْسُ وَالْمَحْرَمُ الصَّالِحُ وَلَمْ يُمْكِنُ وَوَلَهُ وَتَعْلِيْمٍ أَي لِأَمْرَدَ مُطْلَقًا وَ لِأَجْنَبِيَّةٍ فَقِدَ فِيْهَا الْجِنْسُ وَالْمَحْرَمُ الصَّالِحُ وَلَمْ يُمْكِنُ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَلاَ خُلُوةَ مُحَرَّمَةٍ وَفِي كَلاَمٍ حج. وَظَاهِرُ أَنَّهَا أَي هَذِهِ الشُّرُوطِ لاَ تُعْتَبَرُ إِلاَّ فِي الْمَرْأَةِ فِي الْمَرْأَةِ كَمَا عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ الْفِعْلَى ح ل. وَيُتَّجَهُ اشْتِرَاطُ الْعَدَالَةِ فِي الْأَمْرَدِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْمَرْأَةِ

وَمُعَلِّمِهِمَا كَالْمَمْلُوْكِ بَلْ أَوْلَى . شرح م ر

Tidak diharamkan melihat *amrad* -anak laki-laki kecil yang ganteng; merilkarena ... (dan karena mengajar) perkara yang wajib atau sunnah.

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Dan karena mengajar."), maksudnya adalah mengajar amrad secara mutlak dan mengajar wanita yang bukan mahram yang baginya tidak ditemukan pengajar yang sejenis dan mahram yang saleh, tidak mungkin diajarkan dari balik tirai dan tanpa khakwat (berada di tempat sepi) yang diharamkan. Dalam pernyataan Ibn Hajar al-Haitami terdapat kalimat: "Dan sangat jelas bahwa niscaya syarat-syarat ini hanya berlaku bagi wanita sebagaimana ijma' fi'li (konsensus praktik)." demikian kutip al-Halabi. "Dan disyaratkan (pula) sifat 'adalah (bukan pelaku kefasikan) bagi amrad, wanita, dan pengajar keduanya, seperti halnya amrad yang dimiliki-menjadi budak-nya, bahkan lebih utama." demikian ungkapan dalam kitab Syarh al-Ramli.[]

¹¹ Zakaria al-Anshari Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, Al-Tajrid li Nafi al-'Abid, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t. th.), Juz III, h. 328.

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-8 Di Jakarta Pada Tanggal 12 Muharram 1352 H./ 7 Mei 1933 M.

130. Yang wajib Dipelajari Pertama Kali Oleh Seorang Mukallaf 131. Memberikan Zakat Kepada Salah Seorang Anggota Koperasi 132. Menyentuh Imam Oleh Orang yang Akan Bermakmum 133. Wanita Mendatangi Kegiatan Keagamaan 134. Mengubah Nama Seperti Kebiasaan Jamaah Haji 135. Keluarnya Wanita dengan Wajah Terbuka dan Kedua Tangannya dan Bahkan Kedua Kakinya

136. Menyewakan Rumahnya Kepada Orang Majusi, Lalu Si Majusi Menaruh dan Menyembah Berhala di Rumah Itu

137. Zakat Ikan dalam Tambak

138. Pengertian Aman dari Siksa Kubur

- 139. Musafir Sebelum Sampai Tempat yang Dituju, Menjalani Shalat Jama' Qashar
- 140. Kewajiban Zakat bagi Orang yang Memiliki Uang Simpanan Sampai Senishab
 - 141. Merawat Jenazah yang Tidak Pernah Shalat dan Puasa 142. Mendirikan Mesjid di Luar Batas Desanya 143. Mendirikan Jum'at di dalam Penjara 144. Membaca Allah dalam Shalawat Masyisyiyah

130. Yang Wajib Dipelajari Pertama Kali Oleh Seorang Mukallaf

- S. Apakah yang wajib dipelajari terlebih dahulu oleh orang mukallaf (aqil baligh)? Apakah belajar membaca al-Qu ran atau (barzanji). Apakah kitab yang berbahasa Arab? Ataukah yang berbahasa daerah yang menerangkan kewajiban orang mukallaf?
- J. Yang wajib dipelajari lebih dahulu, ialah belajar kedua kalimah syahadah dan mengerti artinya dengan bahasa apa saja.

Keterangan, dari kitab:

Ihya 'Ulum al-Din¹

فَإِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ الْعَاقِلُ بِالْإِحْتِلاَمِ أَوِ السِّنِّ ضَحْوَةً نَهَارٍ مَثَلاً فَأَوَّلُ وَاحِبٍ عَلَيْهِ تَعَلَّمُ كَلِمَتِي الشَّهَادَتَيْنِ وَفَهْمُ مَعْنَاهِمَا وَهُوَ قَوْلُ لاّ اِللهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ.

Apabila di siang hari seorang laki-laki yang berakal memasuki baligh dengan bermimpi (keluar sperma) atau mencapai usia (genap 15 tahun qamariyah) misalnya, maka kewajiban pertama baginya adalah belajar dua kalimat syahadat dan mengerti maknanya, yakni kalimat la ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah.

2. Maslak al-Atqiyaa ' 'ala Hidayah al-Adzkiyaa ' 2

وَتَفْصِيْلُ ذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ الْعَاقِلَ إِذَا بَلَغَ ضَحْوَةً نَهَارٍ مَثَلاً فَأَوَّلُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ تَعَلَّمُ كَلِمَتِي الشَّهَادَةِ وَفَهْمُ مَعْنَاهِمَا. وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحَصِّلَ كَشْفَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ بِالنَّظَرِ وَالْبَحْثِ وَتَعْرِيْرِ الْأَدِلَّةِ بَلْ يَكْفِيْهِ التَّصْدِيْقُ وَالْإِعْتِقَادُ الْجَازِمُ مِنْ غَيْرِ احْتِلاَجِ رَبْبٍ وَذَلِكَ قَدْ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ التَّقْلِيْدِ وَالسِّمَاعِ.

Adapun perinciannya adalah, bahwa apabila di siang hari seorang lakilaki yang berakal memasuki baligh dengan bermimpi (keluar sperma) atau mencapai usia (genap 15 tahun *qamariyah*) misalnya, maka kewajiban pertama baginya adalah belajar dua kalimat syahadat dan mengerti maknanya. Dan ia tidak wajib berupaya mengungkap maknanya untuk

126

¹ Hujjah al-Islam al-Ghazali, Ihya' Ulum al-Din, (Mesit: Musthafa al-Halabi, 1358 H/1939 M), Jilid I, h. 21.

² Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari, Maslak al-Atqiyaa' 'ala Hidayah al-Adzkiyaa'.

kebutuhan dirinya itu dengan memikir, meneliti dan mengurai dalil-dalilnya (sendiri), namun cukup baginya (sekedar) mempercayai dan meyakininya secara mantap tanpa keraguan sama sekali. Dan yang demikian itu bisa diperoleh dengan hanya bertaklid dan mendengar dari orang lain.

131. Memberikan Zakat Kepada Salah Seorang Anggota Koperasi

- S. Apakah boleh memberikan zakat perdagangan koperasi kepada salah seorang anggota koperasi (Andil-Hower)?
- J. Apabila koperasi itu sah, maka boleh zakatnya diberikan kepada salah seorang dari anggota, seperti zakat itu, bilamana si anggota itu termasuk orang yang berhak menerima zakat, karena termasuk salah satu dari delapan yang berhak menerima zakat, atau diberikan seluruhnya zakat kalau tidak terdapat yang berhak menerima zakat dalam tempat itu selain dia.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Fatawa al-Kubra³

Demikian pula dikatakan pada 'amil (pihak yang bekerja) dalam akad qiradh (bagi hasil) beserta pemilik (modal). Sesunguhnya ia di awal akad merupakan wakil dan di akhir akad merupakan kolega. Jika terdapat laba maka masing-masing dari keduanya bisa saling memberi zakat meskipun berasal dari harta qiradh, baik modal maupun labanya seperti telah dijelaskan.

132. Menyentuh Imam Oleh Orang yang Akan Bermakmum

S. Bagaimana hukum menyentuh imam oleh orang yang akan bermakmum?

J. Adapun hukumnya menyentuh semata-mata, maka boleh (mubah) tetapi kalau mendatangkan terkejutnya si imam yang sangat, maka hukumnya haram, atau terkejut sedikit atau menjadikan sangkaan orang, bahwa menyentuh itu sunat atau wajib, maka hukumnya itu makruh, kalau meyakinkan ketidak-terkejutnya imam bahkan menyangka dapat mengingatkan imam supaya niat menjadi imam, maka hukum menyentuhnya itu baik (*mustahab*).

127

³ Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1493 H/1984 M), Jilid II, h. 37.

Keterangan, dari kitab:

1. Mauhibah Dzi al-Fadhl4

(وَيَحْرُمُ) عَلَى كُلِّ أَحَدٍ (الجُهْرُ) فِي الصَّلاَةِ وَخَارِجِهَا (إِنْ شَوَّشَ عَلَى غَيْرِهِ) مِنْ خَوْ مُصَلِّ أَوْ قَارِيُ أَوْ نَاثِمِ لِلضَّرَرِ وَيُرْجَعُ لِقَوْلِ الْمُتَشَوِّشِ وَلَوْ فَاسِقًا لِأَنَّهُ لاَ يُعْرَفُ إِلاَّ مِنْهُ. وَمَا ذَكْرَهُ مِنَ الْحُرْمَةِ ظَاهِرُ لَكِنْ يُنَافِيْهِ كَلاَمُ الْمَجْمُوْعِ وَغَيْرِهِ. فَإِنَّهُ كَالصَّرِيْعِ فِي عَدَمِهَا إِلاَّ أَنْ يُجْمَعَ بِحَمْلِهِ عَلَى مَا إِذَا خَافَ التَّشْوِيْشَ

(قَوْلُهُ عَلَى مَا إِذَا خَافَ التَّشُونِيْسَ) أَيْ وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مِنَ الْحُرْمَةِ عَلَى مَا إِذَا الشَّتَدَّ. وَعِبَارَهُ الْإِيْعَابِ يَنْبَغِيْ حَمْلُ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ وَإِنْ آذَى جَارَهُ عَلَى إِيْذَاءٍ خَفِيْفٍ لِشَامَحُ بِهِ بِخِلاَفِ جَهْرِ يُعَطِّلُهُ عَنِ الْقِرَاءَةِ بِالْكُلِيَّةِ فَيَنْبَغِيْ حُرْمَتُهُ.

(Dan diharamkan) bagi siapapun (bersuara keras), baik di dalam shalat atau di luar shalat (jika mengganggu orang lain), seperti orang yang sedang shalat, membaca atau tidur, karena merugikan. Dan kasus ini dikembalikan pada pendapatnya orang yang terganggu, meskipun ia orang yang fasik. Sebab, terganggu dan tidaknya sesorang hanya diketahui oleh dirinya. Keharaman yang disebut penulis itu cukup jelas, namun pendapat kitab al-Majmu' dan lainnya menafikannya. Sebab pendapat tersebut seolah jelas-jelas menafikan keharaman itu, kecuali bila dijami'kan (dicarikan titik temunya) dengan mengarahkannya pada kasus ketika khawatir akan mengganggu.

(Ungkapan penulis: "Pada kasus ketika khawatir akan mengganggu.") Maksudnya, dan mengarahkan keharaman yang disebut penulis pada kasus ketika sangat mengganggu. Dan redaksi kitab al-I'ab menyebutkan: "Semestinya ungkapan al-Majmu': "Dan meskipun mengganggu orang yang di dekatnya." itu diarahkan pada gangguan ringan yang ditolelir. Lain halnya dengan mengeraskan suara yang bisa membuat orang di dekatnya itu lalai dari semaua bacaan al-Qur'annya, maka semestinya hal tersebut haram."

2. Fathul Mu'in⁵

(وَنِيَهُ إِمَامَةٍ) أَوْ جَمَاعَةٍ (سُنَّةُ لِإِمَامِ فِيْ غَيْرِ جُمْعَةٍ) لِيَنَالَ فَضْلَ ... جَمَعَةٍ. وَإِنْ نَوَاهُ فِي الْأَثْنَاءِ حَصَلَ لَهُ الْفَضْلُ مِنْ حِيْنَئِذٍ، أَمَّا فِي الْجُمُعَةِ فَتَلْزَمُهُ مَعَ التَّحَرُّمِ.

⁴ Muhammad Mahfudz al-Tarmasi al-Jawi, *Mauhibah Dzi al-Fadhl*, (Mesir: al-Amirah al-Syarafiya, 1326 H), Jilid II, h. 396-397.

⁵ Zainuddin al-Malibari, *Fath al-Mu'in* pada *l'anah al-Thalibin*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t .th). Jilid II, h. 21.

Niat menjadi imam atau berjamaah bagi imam adalah sunah, di luar shalat jamaah, supaya mendapat keutamaan berjamaah. Bila ia meniatinya di tengah mengerjakan shalat, maka ia mendapat keutamaan itu. Adapun dalam shalat Jum'at wajib baginya niat menjadi imam bersamaan takbiratul ihram.

133. Wanita Mendatangi Kegiatan Keagamaan

- S. Bagaimana hukum para wanita yang keluar dari rumahnya dengan berpakaian rapi dan memakai wangi-wangian mendatangi rapat-rapat keagamaan yang tidak termasuk fardhu 'ain? Haram, makruh, ataukah sunat? (Gresik).
- J. Hukumnya haram apabila berkeyakinan mendapat fitnah walaupun tidak berpakaian rapi dan tidak memakai wangi-wangian atau tidak diizinkan suaminya atau sayyidnya dan termasuk dosa besar.

Apabila tidak yakin, tetapi menyangka adanya fitnah, maka hukumnya haram dosa kecil. Kalau hanya ketakutan fitnah, maka hukumnya haram makruh, dan apabila keyakinan tidak adanya fitnah dan tidak melalui laki-laki lain, maka hukumnya boleh (mubah).

Keterangan, dari kitab:

1. Is ad al-Rafiq6

قَالَ فِي الزَّوَاجِرِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَاثِرِ لِصَرِيْحِ هَذِهِ اْلأَحَادِيْثِ. وَيَنْبَغِيْ حَمْلُهُ لِيُوَافِقَ عَلَى قَوَاعِدِنَا عَلَى مَا إِذَا تَحَقَّقَتْ الْفِتْنَةُ. أَمَّا مُجَرَّدُ خَشْيَتِهَا فَإِنَّمَا هُوَ مَكْرُوهُ. وَمَعَ ظَنِّهَا حَرَامٌ غَيْرُ كَبِيْرَةٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ.

Dalam al-Zawajir Ibn hajar al-Haitami berkata: "Keluarnya wanita dari rumah dengan memakai parfum dan berhias meskipun seizin suami itu dosa besar. Dan agar sesuai dengan kaidah-kaidah madzhab Syafi'iyah mestinya hukum itu diarahkan pada kasus ketika nyata-nyata akan terjadi fitnah. Sedangkan bila hanya menghawatirkannya saja, maka makruh dan bila disertai dugaan kuat akan terjadi fitnah maka haram (namun) bukan dosa besar sebagaimana keterangan yang cukup jelas."

2. Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab⁷

وَيُكُرَهُ حُضُوْرُهُنَّ الْمَسْجِدَ فِيْ جَمَاعَةِ الرِّجَالِ إِنْ كُنَّ مُشْتَهَاةً خَوْفَ الْفِتْنَةِ (قَوْلُهُ وَيُكُرِّهُ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ الْحَلِيْلُ. إه ح ل. إِلَى أَنْ قَالَ:

⁶ Muhammad Babashil, *Is'ad al-Rafiq 'ala Syarh Sullam al-Taufiq*, (Singapura: al-Haramain, t. th.) Juz II, h. 136.

⁷ Sulaiman al-Jamal, Futuhat al-Wahhab, (Beirut: Dar al-Fikr t. th.) Jilid I, h. 503.

وَيَحْرُمُ عَلَيْهِنَّ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّ أَوْ حَلِيْلٍ أَوْسَيِّدٍ أَوْ هُمَا فِي أَمَةٍ مُتَزَوِّجَةٍ وَمَعَ خَشْيَةِ فِتْنَةٍ مِنْهَا أَوْ عَلَيْهَا اِنْتَهَتْ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَيُكْرَهُ حُضُوْرُهُنَّ الْمَسْجِدَ) أَي مَحَلَّ الْجُمَاعَةِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِ الرِّجَالِ فَذِكْرُ الْمَسْجِدِ وَالرِّجَالِ لِلْغَالِبِ.

Kaum wanita dimakruhkan mendatangi mesjid yang berisikan jamaah laki-laki jika wanita tersebut *musytahah* (sudah mengundang birahi laki-laki) karena khawatir timbulnya fitnah.

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Kaum wanita dimakruhkan mendatangi.") Maksudnya adalah makruh tahrim (haram) bila tanpa seizin suami. Begitu pendapat al-Halabi. ... Dan baginya haram (keluar rumah) tanpa seizin wali, suami, sayyid atau suami dan sayyid bagi budak wanita yang bersuami dan disertai kekhawatiran akan timbut fitnah darinya atau menimpanya. (Ungkapan beliau lagi: "Kaum wanita makruh mendatangi mesjid."), maksudnya adalah tempat jamaah, meski tidak bersama jamaah lakilaki. Maka penyebutan mesjid dan laki-laki tersebut karena umumnya (saja).

134. Mengubah Nama Seperti Kebiasaan Jamaah Haji

- S. Bagaimana hukum mengubah nama, sebagaimana kebiasaan para jamaah haji yang mengubah namanya di Mekkah atau di Madinah? Apakah sunat atau tidak. (Gresik).
- J. Adapun hukumnya mengubah nama, itu adakalanya wajib, apabila namanya itu haram, seperti Abdusysyaithan (hamba setan), dan adakalanya sunat, apabila namanya itu hukumnya makruh, seperti Himar, Kambing, dan adakalanya boleh apabila namanya itu tidak haram, juga tidak makruh, diganti dengan nama yang tidak dilarang oleh agama.

Keterangan, dari kitab:

Tanwir al-Qulub⁸

Mengubah nama-nama yang haram itu hukumnya wajib, dan namanama yang makruh hukumnya sunah.

2. Hasyiyah al-Bajuri9

⁸ Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir al-Qulub, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 234.

⁹ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. th.), Jilid II, h. 305.

فَحَسِّنُوا أَسْمَاتَكُمْ إِلَى أَنْ قَالَ: وَتُكْرَهُ الْأَسْمَاءُ الْقَبِيْحَةُ كَحِمَارٍ وَكُلِّ مَا يُتَطَيَّرُ نَفْيُهُ أَوْ إِثْبَاتُهُ وَتَخْرُمُ التَّسْمِيَّةُ بِعَبْدِ الْكَعْبَةِ أَوْ عَبْدِ الْحُسَنِ أَوْ عَبْدِ عَلِيَّ وَيَجِبُ تَغْيِيْرُ الْاسْمِ الْحُرَامِ عَلَى الْأَقْرَبِ لِأَنَّهُ مِنْ إِزَالَةِ الْمُنْكِرِ وَإِنْ تَرَدَّدَ الرَّحْمَانِيُّ فِيْ وُجُوْدِهِ وَنَدْبِهِ.

Dan disunahkan memperbagus nama sesuai dengan Hadis: "Kamu sekalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian, maka perbaguskanlah nama-nama kalian". Dimakruhkan nama-nama yang berarti jelek, seperti himar (keledai) dan setiap nama yang diprasangka buruk (tathayyur) penafian atau penetapannya .. Haram menamai dengan Abdul Ka'bah, Abdul Hasan atau Abdu Ali (Hamba Ka'bah, Hamba Hasan atau Hamba Ali). Menurut pendapat yang lebib benar wajib mengubah nama yang haram, karena berarti menghilangkan kemungkaran, walaupun al-Rahmani ragu-ragu apakah mengubah nama demikian, wajib atau sunah.

135. Keluarnya Wanita dengan Wajah Terbuka dan Kedua Tangannya dan Bahkan Kedua Kakinya

- S. Bagaimana hukum keluarnya wanita akan bekerja, dengan terbuka muka dan kedua tangannya? Apakah haram atau makruh? Kalau dihukumi haram, apakah ada pendapat yang menghalalkan? Karena demikian itu telah menjadi darurat, atau tidak? (Surabaya).
- J. Hukumnya wanita keluar yang demikian itu haram, menurut pendapat yang mu'tamad. Menurut pendapat lain boleh wanita keluar untuk jual beli dengan terbuka muka dan kedua telapak tangannya, dan menurut mazhab Hanafi, demikian itu boleh, bahkan dengan terbuka kakinya, apabila tidak ada fitnah.

Keterangan, dari kitab:

1. Maraq al-Falah¹⁰

(وَجَمِيْعُ بَدَنِ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ إِلاَّ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا) بَاطِنَهُمَا وَظَاهِرَهُمَا فِي الْأَصَحِّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ. وَخِيْعُ بَدَنِ الْحُرَّةِ عَوْرَةٌ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَهُوَ الْأَصَحُّ. وَعَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ (وَ) إِلاَّ وَقَدَمَيْهَا) فِيْ أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ بَاطِنِهِمَا وَظَاهِرِهِمَا لِعُمُوْمِ الضَّرُوْرَةِ لَيْسَا مِنَ الْعَوْرَةِ فَشَعْرُ الْحَرَّةِ حَتَّى الْمُسْتَرْسِلِ عَوْرَةً فِي الْأَصَحِّ وَعَلَيْهِ الْفَتَوَي.

Hasan al-Syaranbilali al-Hanafi, Maraq al-Falah Syarah Nur al-Idhah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1366 H/1947), h. 45.

Menurut pendapat yang paling sahih dan terpilih, seluruh anggota badan wanita merdeka itu aurat kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya, baik bagian dalam ataupun luarnya. Demikian pula lengannya termasuk aurat. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang tidak menganggap lengan tersebut sebagai aurat. Menurut salah satu riwayat yang sahih, kedua telapak kaki wanita itu tidak termasuk aurat baik bagian dalam atau luarnya. Sedangkan rambutnya sampai bagian yang menjurai sekalipun termasuk aurat, menurut qaul al-ashshah dan demikian yang harus fatwakan.

2. Hasyiyah al-Bajuri¹¹

(قَوْلُهُ إِلَى أَجْنَبِيَّةٍ) أَيْ إِلَى شَيْءٍ مِنِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ أَيْ غَيْرِ مَحْرَمَةٍ وَلَوْ أَمَةً وَشَمِلَ ذَلِكَ وَجْهَهَا وَكَوْ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ أَوْ خَوْفِ فِتْنَةٍ عَلَى الصَّحِيْجِ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَكَفَّيْهَا فَيَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِمَا وَلَوْ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ أَوْ خَوْفِ فِتْنَةٍ عَلَى الصَّحِيْجِ كَمَا فِي الْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَقِيْلَ لاَ يَحْرُمُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَهُوَ مُفْسَرُ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ. وَلاَ بَأْسَ بِتَقْلِيْدِ الظَّانِي لاَ سِيَّمَا فِيْ هَذَا الرَّمَانِ مُفْسَمِّرُ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ. وَلاَ بَأْسَ بِتَقْلِيْدِ الظَّانِي لاَ سِيَّمَا فِيْ هَذَا الرَّمَانِ النَّهُ مِنْ كَثْرُ فِيْهِ خُرُوجُ النِّسَاءِ فِي الطُّرُقِ وَالْأَسْوَاقِ وَشَمِلَ ذَلِكَ أَيْضًا شَعْرَهَا وَظَفْرَهَا.

(Ungkapan Ibn Qasim al-Ghazi: "-Lelaki melihat- wanita lain." Maksudnya ke bagian tubuh wanita lain, yaitu wanita yang bukan mahramnya walaupun budak. Ungkapan tersebut mencakup wajah dan kedua telapak tangannya. Maka haram melihat keduanya walaupun tanpa syahwat atau khawatir timbulnya fitnah, menurut pendapat al-sahih seperti yang tertera dalam kitab al-Minhaj dan lainnya. ... Pendapat lain menyatakan tidak haram, sesuai firman Allah (al-Nur: 31): "Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) nampak dari padanya." yang ditafsirkan dengan wajah dan kedua telapak tangan. Pendapat pertama (haram) adalah pendapat yang mu'tamad, dan tidak apa-apa (boleh) mengikuti pendapat kedua (tidak haram). Terutama pada masa sekarang ini di mana banyak wanita keluar di jalan-jalan dan pasar-pasar. Keharaman tadi juga mencakup rambut dan kukunya.

136. Menyewakan Rumahnya Kepada Orang Majusi, Lalu Si Majusi Menaruh dan Menyembah Berhala di Rumah Itu

S. Kalau orang Islam menyewakan rumahnya pada orang Majusi kemudian si Majusi menaruh berhalanya dan menyembahnya dalam rumah itu. Apakah penyewaan itu sah? Dan uang sewaannya halal ataukah tidak? (Demak).

¹¹ Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. th.), Jilid II, h. 97.

J. Penyewaannya sah dan uang sewaannya halal, dengan tidak ada selisih pendapat ulama. Tetapi sewaktu menyewakan mengerti atau menduga kalau si Majusi (penyewa) akan menyembah berhala dalam rumah itu, maka hukumnya haram, kecuali pendapat Imam Hanafi.

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Mu'in¹²

وَحُرِمَ أَيْضًا (بَيْعُ نَحْوِعِنَبٍ مِمَّنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ يَتَّخِذُهُ مُسْكِرًا) لِلشُّرْبِ وَالأَمْرَدِ مِمَّنْ عُرِفَ بِالْفُجُورِ بِهِ وَالدَّيْكِ لِلْمُهَارَثَةِ وَالْكَبْشِ لِلْمُنَاطَحَةِ وَالْحَرِيْرِ لِرَجُلٍ يَلْبَسُهُ وَكَذَا بَيْعُ الْمِسْكِ لِكَافِرٍ يَالْفُجُورِ بِهِ وَالدَّيْكِ الْمُهَارَثَةِ وَالْكَبْشِ لِلْمُنَاطَحَةِ وَالْحَرِيْرِ لِرَجُلٍ يَلْبَسُهُ وَكَذَا بَيْعُ الْمِسْكِ لِكَافِرٍ يَاللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَلا يَجُورُ الْإِعَانَةُ عَلَيْهِمَا وَخَوْدِ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ تَصَرُّفٍ يُفْضِي إِلَى مَعْصِيَّةٍ يَقِينًا أَوْ ظَنَّا وَمَعَ ذَلِكَ يَصِحُ الْبَيْعُ.

Diharamkan juga menjual semisal anggur pada orang yang diyakini atau diduga akan manjadikannya minuman keras, atau budak amrad (anak lakilaki kecil ganteng) pada orang yang terkenal berbuat lacur dengannya, ayam jago untuk disabung, kambing jantan untuk diadu (dengan saling membentur kepala) atau sutera yang akan dikenakan oleh laki-laki.

Demikian halnya haram menjual minyak wangi kepada orang kafir yang akan digunakan untuk mengharumkan berhala, atau binatang kepada orang kafir yang diketahui ia akan memakannya tanpa disembelih. Sebab menurut pendapat *al-sahih*, orang-orang kafir itu dikenai hukum syariat seperti kaum muslimin. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah Ra. Karena itu, maka tidak boleh membantu keduanya atau semisalnya dari setiap tasaruf yang bisa menjurus maksiat, secara meyakinkan atau dalam dugaan kuat. Meskipun begitu, jual-belinya tetap sah.

137. Zakat Ikan dalam Tambak

- S. Bagaimana pendapat Anda sekalian, atas hukumnya orang memelihara ikan dalam tambak (kolam), kebiasaan diambil dua kali setahun, maka bagaimana caranya memberikan zakatnya? (Demak).
- J. Kalau sewaktu membeli bibit ikan dan tambaknya untuk berdagang, yakni sengaja akan dijual lagi dengan keuntungan, maka kewajiban memberikan zakat perdagangan itu dalam akhir tahun. Bila membelinya kolam itu untuk dimiliki atau menyewa dan membelinya bibit ikan itu

¹² Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in dalam al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.th). Jilid III, h. 23-24.

untuk berdagang, maka hanya berkewajiban membayar zakat tijarahnya ikan saja dalam akhir tahun (terhitung mulai membeli bibit).

Catatan: Tidak diragukan lagi dalam masalah ini, bahwa yang diperdagangkan adalah bibit ikan itu, bukan keturunannya. Sedang ikan itu, bukan termasuk barang yang wajib dizakati seperti padi dan lain-lain. (Pen.)

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Wahhab13

وَالْوَاجِبُ (فِيْمَا مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ) مَقْرُوْنَةِ (بِنِيَّةِ تِجَارَةِ) وَإِنْ لَمْ يُجَدِّدْهَا فِي كُلِّ تَصَرُّفٍ (كَشِرَاءٍ وَإِصْدَاقٍ) وَهِبَّةٍ بِثَوَابٍ لاَ إِقَالَةٍ وَرَدِّ بِعَيْبٍ وَهِبَّةٍ بِلاَ ثَوَابٍ لِانْتِفَاءِ الْمُعَاوضَةِ (رُبُعُ عُشُرِ قِيْمَتِهِ).

Maka kadar zakat yang wajib ditunaikan pada harta yang dimiliki dengan *mu'awadhah* (pertukaran) yang disertai niat berniaga, walapun tidak diperbarui dalam setiap pembelanjaannya, seperti membeli, memberi mas kawin, memberi dengan imbalan. Bukan *iqalah* (membatalkan akad), mengembalikan barang yang dibeli karena cacat, dan pemberian tanpa imbalan, karena tidak adanya *mu'awadhah*, adalah 2,5 % dari harganya.

2. Tuhfah al-Muhtaj dan Hasyiyah al-Syirwani¹⁴

وَإِنَّمَا يَصِيْرُ الْعَرَضُ لِلتِّجَارَةِ إِذَا اقْتَرَنَتْ نِيَّتُهَا بِكَسْبِهِ بِمُعَاوَضَةٍ
قَوْلُ الْمَثْنِ (إِذَا اقْتَرَنَتْ نِيَتُهَا إِلَخْ) أَي نِيَّةُ التِّجَارَةِ بِهذَا الْعَرَضِ بِكَسْبِ ذَلِكَ الْعَرَضِ وَتَمَلُّكِهِ
بِمُعَاوَضَةٍ وَتَقَدَّمَ أَيْضًا أَنَّ التِّجَارَةَ تَقْلِيْبُ الْمَالِ بِالتَّصَرُّفِ فِيْهِ بِنَحْوِ الْبَيْعِ لِطَلَبِ النَّمَاءِ فَتَبَيَّنَ
بِمُعَاوَضَةٍ وَتَقَدَّمَ أَيْضًا أَنَّ التِّجَارَةَ تَقْلِيْبُ الْمَالِ بِالتَّصَرُّفِ فِيْهِ بِنَحْوِ الْبَيْعِ لِطَلَبِ النَّمَاءِ فَتَبَيَّنَ
بِذَلِكَ أَنَّ الْبَرْرَ الْمُشْتَرى بِنِيَّةِ أَنْ يُزْرَعَ ثُمَّ يُتَّجَرَ بِمَا يَنْبُتُ وَيَحْصُلُ مِنْهُ كَبَرْدِ الْبَقَمِ لاَ يَكُونُ
عَرَضَ يَجَارَةٍ لاَ هُوَ وَلاَ مَا يَنْبُثُ مِنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَلاَ يُقَاسُ الْبَذْرُ الْمَذْكُورُ عَلَى غَوْ صِبْعِ أَشْتُرِي
لِيَصْبَعَ بِهِ لِلنَّاسِ بِعِوضٍ لِأَنَّ التِّجَارَةَ هُنَاكَ بِعَيْنِ الصِّبْغِ الْمُشْتَرَى لاَ بِمَا يَنْشَأُ مِنْهُ بِعِكْفِ الْبَذْرِ الْمَنْ مَن يَلْكَ أَنْ التِّجَارَةَ هُنَاكَ بِعَيْنِ الصِّبْغِ الْمُشْتَرَى لاَ بِمَا يَنْشَأُ مِنْهُ بِعِلافِ الْبَذْرِ الْمَدْكُورُ فَإِنَّهُ بِعَكْسِ ذَلِكَ

Suatu barang menjadi komoditas dagang hanya bila niat dagangnya bersamaan dengan mendapat barang tersebut dengan cara tukar menukar.

(Ungkapan kitab *Matn*: "Bila niat dagangnya bersamaan ...") maksudnya adalah niat dagang dengan barang ini bersamaan dengan mendapatkannya,

Sulaiman al-Jamal, Fath al-Wahhab pada Futuhat al-Wahhab, (Beirut: Dar al-Fikr t. th.) Jilid II, h. 264-265.

Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani 'ala Tuhfah al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), Cet. Ke-1, Jilid III, h. 325.

dan dimilikinya dengan tukar menukar. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa tijarah adalah mengelola harta dengan membelanjakannnya dengan seperti akad jual-beli untuk memperoleh keuntungan. Dengan begitu, jelaslah bahwa bibit yang dibeli dengan tujuan ditanam, lalu sesuatu yang tumbuh ataupun yang dihasilkan darinya diperdagangkan, seperti bibit baqm (nama jenis pepohonan/tanaman), itu tidak termasuk komoditas perdagangan, baik bibit itu sendiri atau apapun yang tumbuh darinya ... Dan bibit tersebut tidak bisa diqiyaskan dengan pewarna yang dibeli untuk (dijadikan) pewarna pakaian bagi orang banyak dengan menarik biaya. Sebab tijarah (bisnis) dalam pewarna tersebut adalah dengan pewarna yang dibelinya, bukan dari barang yang tumbuh darinya. Berbeda dengan usaha bibit di atas, karena kebalikannya.

138. Pengertian Aman dari Siksa Kubur

S. Apa yang diartikan aman dalam hadits yang artinya: "Siapa yang meninggal dunia pada hari Jum'at maka ia aman dari siksa kubur. Apakah amannya itu hanya pada hari Jum'at itu? Ataukah sampai hari Kiamat? (Pekalongan)

J. Bahwa amannya itu sampai hari kiamat.

Keterangan, dari kitab:

1. Qathr al-Ghaits15

وَإِنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ يَكُوْنُ الْعَذَابُ سَاعَةً وَاحِدَةً وَضَغْطَهُ الْقَبْرِ كَذَلِكَ ثُمَّ يَنْقَطِعُ وَلاَ يَعُودُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Apabila seseorang mati pada hari Jum'at atau malam harinya, maka siksa kubur yang menimpanya hanya sesaat, begitu pula menghimpitnya kubur. Kemudian akan berhenti dan tidak terulang lagi sampai hari kiamat.

2. Al-Dur al-Nadhid16

قَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجُمَاعَةُ عَذَابُ الْقَبْرِ حَقَّ... ثُمَّ الْمُؤْمِنُ عَلَى وَجْهَيْنِ إِنْ كَانَ مُطِيعًا لَا يَكُونُ لَهُ عَذَابُ الْقَبْرِ لَهُ عَذَابُ الْقَبْرِ وَضَغْطَةُ الْقَبْرِ لَكِ وَخَوْفَهُ وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا يَكُونُ لَهُ عَذَابُ الْقَبْرِ وَضَغْطَةُ الْقَبْرِ لَكِنْ يَعُودُ الْعَذَابُ وَضَغْطَةُ الْقَبْرِ لَكِنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمْعَةِ ثُمَّ لَا يَعُودُ الْعَذَابُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ يَكُونُ لَهُ الْعَذَابُ سَاعَةً وَاحِدَةً وَضَغْطَةُ

Muhammad Nawai al-Jawi, Qathr al-Ghaits, (Indonesia: al-Haramain, 1427 H/2006 M), Cet. Ke-1, h. 10.

Al-Harawi, al-Dur al-Nadhid, dan lihat Ahmad bin Muhammad al-Hamawi, Ghamzu Uyun al-Bashair, (Beirut: Dar al-Kutub al-Imiyah 1985), Juz IV, h. 72.

الْقَبْرِثُمَّ يَنْقَطِعُ عَنْهُ الْعَذَابِ كَذَا فِي الْمُعْتَقَدَاتِ لِلشَّيْخِ أَبِي الْمُعِينِ النَّسَفِيّ الْحُتَفِيّ

Kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah berpendapat, bahwa adzab kubur itu memang benar adanya ... Seorang mukmin itu terbagi dua kondisi, apabila dia taat maka dia tidak akan memperoleh siksa dan tetap mendapat himpitan kubur dan kengeriannya. Jika seorang mukmin itu bermaksiat maka dia akan memperoleh siksa dan tetap mendapat himpitan kubur, tetapi siksa kubur tersebut akan terhenti sampai hari dan malam Jum'at, lalu siksaan itu tidak terulang kembali sampai hari kiamat. Dan jika ia mati pada hari atau malam Jum'at maka ia mendapat siksaan itu sesaat dan himpitan kubur, lalu siksaan itu terhenti. Begitu keterangan dalam kitab al-Mu'taqadat karya Syaikh Abu al-Mu'in al-Nasafi al-Hanafi.

139. Musafir Sebelum Sampai Tempat yang Dituju, Menjalani Shalat Jama' Qashar

S. Apakah musafir (orang yang bepergian) jauh, kemudian singgah di suatu tempat sebelum sampai tempat yang dimaksud, masih boleh menjalankan jamak (mengumpulkan shalat) dan qashar (menyingkat shalat) dalam tempat singgahnya tersebut? (Pekalongan)

J. Boleh jamak dan qashar, asal tidak niat singgah sampai empat hari empat malam penuh (selain hari datang dan berangkat).

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Minhaj al-Qawim¹⁷

Dan selesai pula (suatu perjalanan) dengan sampainya pada suatu tempat yang diniati oleh seorang mustaqil (orang yang tidak diatur orang lain, bukan seperti istri dan budak) untuk bermukim secara mutlak tanpa batas waktu, walaupun tempat tersebut tidak layak untuk dihuni atau ia niat mukim selama empat hari empat malam penuh, yakni selain hari masuk dan hari keluarnya dari tempat tersebut.

2. Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab18

¹⁷ Ibn Hajar al-Haitami, al-Minhaj al-Qawim dalam Muhammad Mahfudz al-Tarmasi al-Jawi, Mauhibah Dzi al-Fdhl, (Mesir. al-Amirah al-Syarafiya, 1326 H), Jilid III, h. 163-164.

¹⁸ Zakaria al-Anshari dan Sulaiman al-Jamal, Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab, (Beirut: Dar al-Fikr t. th.) Jilid I, h. 601.

وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ أَوَّلاً عَنِ الدَّوَامِ فَلاَ يُشْتَرَطُ فِيْهِ حَتَّى لَوْ نَوَى مَسَافَةً قَصْرٍ ثُمَّ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ الْمَحَلَّ الَّذِي يَصِيْرُ بِهِ مُسَافِرًا نَوَى أَنَّهُ يَرْجِعُ إِنْ وَجَدَ غَرَضَهُ أَوْ يُقِيْمُ فِيْ طَرِيْقِهِ وَلَوْ بِمَحَلِّ قَرِيْبٍ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّهُ يُتَرَخَّصُ إِلَى وُجُوْدٍ غَرَضِهِ أَوْ دُخُوْلِهِ ذَلِكَ الْمَحَلَّ لِإِنْهِقَادِ سَبَبِ الرُّخْصَةِ فِيْ حَقِّهِ فَيَكُوْنُ حُكْمُهُ مُسْتَمِرًّا إِلَى وُجُوْدٍ مَا غَيَّرَ النَّيَّةَ إِلَيْهِ.

Syarat (shalat jama' qashar) yang ketiga adalah di awal perjalanan menuju tempat yang telah diketahui, walaupun belum ditentukan.

Dan redaksi Syarh al-Ramli: "Dengan ungkapan: "Di awal perjalanannya." al-Nawawi mengecualikan setelah awal perjalanan, maka hal itu tidak disyaratkan." Sehingga bila ia berniat melakukan perjalanan semasafah al-qashr (perjalanan minimal yang membolehkan qashr shalat; 94 km). Lalu setelah melewati tempat yang membuatnya berstatus musafir, ia berniat akan pulang bila telah memperoleh tujuannya, atau bermukim di tengah perjalanannya meskipun di dekat (tempat asal bepergiannya) selama empat hari dan empat malam, maka ia (tetap) mendapat rukhshah sampai menemukan tujuannya atau sampai masuknya ke tempat asal ia bepergian. Karena perkara yang menjadi sebab rukhshah telah ada baginya, maka hukum tersebut tetap berlaku sampai ia merubah niat bepergiannya.

3. Bughyah al-Mustarsyidin¹⁹

(مَسْأَلَهُ بِ شِ) أَقَامَ الْحَاجُ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْوُقُوفِ دُوْنَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ صِحَاجٍ لَمْ يَنْقَطِعُ سَفَرُهُ وَحِيْنَئِذٍ فَلَهُ التَّرَخُصُ فِي خُرُوجِهِ بِعَرَفَاتَ وَإِنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الْإِقَامَةَ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْحَجِّ إِذْ لاَ يَنْقَطِعُ سَفَرُهُ بِذَلِكَ حَتَّى يُقِيْمَ الْإِقَامَةَ الْمُؤَثِّرَةَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.

Jamaah haji yang bermukim di Makkah sebelum wukuf di Arafah selama kurang dari empat hari penuh, maka perjalanannya tidak putus, maka pada waktu tersebut dia tetap boleh mengambil rukhshah ketika keluar ke Arafah, walaupun ia niat bermukim di Makkah setelah pelaksanaan haji. Sebab hak perjalanannya tidak putus dengan mukimnya di Makkah tadi sampai ia mukim dengan waktu yang bisa memutus perjalanannya (empat hari empat malam penuh). Demikian menurut pendapat mu'tamad.

140. Kewajiban Zakat bagi Orang yang Memiliki Uang Simpanan Sampai Senishab

S. Apakah kewajiban zakat orang yang memiliki uang simpanan sampai senishab itu hanya dalam tahun pertama? Ataukah tiap tahun sehingga uang itu kurang

¹⁹ Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 H/1952 M)), h. 76.

dari nishab? (Tegal)

J. Kewajiban zakat, tiap-tiap tahun sehingga uangnya kurang dari nishab.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah al-Bajuri²⁰

(Ungkapan Ibn Qasim al-Ghazi: "2,5 %) maksudnya untuk setiap tahun. Berbeda dengan biji-bijian, maka zakatnya hanya sekali saja walaupun biji-bijian tersebut tetap ada selama beberapa tahun. Karena biji-bijian cepat rusak, tidak seperti emas dan perak.

2. Tuhfah al-Habib²!

(Ungkapan Ibn Qasim al-Ghazi: "2,5 %), yakni untuk setiap tahun selama masih satu nishab penuh, berbeda dengan biji-bijian yang zakatnya hanya setahun sekali, walaupun masih ada selama bertahun-tahun.

141. Merawat Jenazah yang Tidak Pernah Shalat dan Puasa

- S. Seorang yang tak pernah shalat dan puasa selama hidupnya, ia adalah putra Indonesia, sewaktu meninggal dunia. Apakah ia dirawat sebagai orang Islam, ataukah tidak? (Nganjuk)
- J. Betul harus dirawat sebagai orang Islam, karena dia itu orang Islam selama tidak menyatakan kekufuran, dalam perkataan atau perbuatan.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Igna '22

وَيُحْكَمُ لِلصَّبِيِّ أَوْ لِلصَّغِيْرِ ذَكَّرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى بِالْإِسْلاَمِ عِنْدَ وُجُوْدِ ثَلاَثَةِ

Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. th.), Jilid I, h. 272.

²¹ Sulaiman al-Bujairimi, Tuhfah al-Habib 'ala al-Iqna', (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1370 H/1951 M), Cet. Ke-1, Jilid II, h. 292.

Muhammad al-Khatib al-Syarbini, al-Iqna' dalam Sulaiman al-Bujairimi, Tuhfah al-Habib 'ala al-Iqna', (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1338 H), Jilid IV, h. 206.

أَسْبَابِ أَوَّلُهَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ أَنْ يُسْلِمَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ.

Seorang anak kecil lelaki ataupun perempuan atau pula banci dihukumi sebagai orang Islam jika sudah terdapat tiga sebab, yang pertama salah satu dari kedua orang tuanya telah Islam.

2. Bughyah al-Mustarsyidin²³

Wajib merawat (jenazah) setiap muslim yang dihukumi/diakui islamnya walaupun banyak dosanya, meninggalkan shalat dan lainnya selama tidak mengingkarinya.

142. Mendirikan Mesjid di Luar Batas Desanya

- S. Kalau mendirikan mesjid di luar batas desa sampai kira-kira sejauh 50 meter (seperti mesjid Binangun Sedayu) demikian itu karena mengikuti mata air (sumber air) atau karena memudahkan datangnya orang. Walaupun di luar batas, tetapi masih termasuk desa itu, apakah boleh mendirikan Jum at dalam mesjid tersebut? (Banyuwangi)
- J. Betul boleh dan sah mendirikan Jum'at di mesjid tersebut asal tempat mesjid itu masih termasuk desa itu, yakni belum diperbolehkan shalat qashar di tempat itu, bagi orang yang bepergian (musafir). Apabila tidak termasuk desa itu, maka tidak sah mendirikan Jum'at.

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin²⁴

وَلَوْ بِفَضَاءَ مَعْدُوْدٍ مِنْهَا بِأَنْ كَانَ فِيْ مَحَلِّ لاَ تُقْصَرُ فِيْهِ الصَّلاَةُ وَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ بِالأَبْنِيَةِ بِخِلاَفِ مَحَلِّ غَيْرِمَعْدُوْدٍ مِنْهَا وَهُوَ مَا يُجَوِّزُ السَّفَرُ الْقَصْرَ مِنْهُ.

قَالَ الْأَذْرَعِيّ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْقُرَى يُؤَخِّرُوْنَ الْمَسْجِدَ عَنْ جِدَارِ الْقَرْيَةِ قَلِيْلاً صِيَانَةً لَهُ عَنْ نَجَاسَةِ الْبَهَاثِمِ. وَعَدَمُ انْعِقَادِ الْجُمْعَةِ فِيْهِ بَعِيْدُ. إه

Walaupun di tanah lapang yang masih terhitung bagian daerah tersebut, seperti di tempat yang belum boleh meng*qashar* shalat, meski tidak sambung dengan bangunan pemukiman. Berbeda dengan tempat yang

Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 H/1952 M)), h. 92.

Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in dalam al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.th). Jilid II, h. 59.

tidak terhitung sebagai bagian daerah tersebut, yaitu tempat yang bepergian bisa menjadi sebab bolehnya shalat *qashar* dari tempat tersebut.

Menurut Imam al-Adzra'i, kebanyakan penduduk desa meletakkan mesjid sedikit di belakang tembok (batas) desa demi menjaga terkena najis binatang. Dan ketidakabsahan shalat Jum'at di tempat itu adalah kesimpulan sangat jauh dari kebenaran.

2. Asna al-Mathalib25

Perkataan Abu Thayyib: "Ashhab kita (Syafi'iyah) berpendapat: "Bila penduduk suatu daerah membangun mesjid mereka di luar daerahnya, maka tidak boleh mendirikan shalat Jum'at di mesjid itu karena terpisah dari bangunan-bangunan pemukiman." itu diarahkan pada kasus mesjid terpisah yang tidak terhitung dari bagian desa.

143. Mendirikan Jum'at di dalam Penjara

- S. Bagaimana hukum mendirikan Jum'at di dalam penjara yang berada di luar batas kota, seperti di Sukamiskin. Adapun yang bersembahyang Jum'at ialah para orang hukuman yang berada di penjara itu, yang datang dari berbagai tempat. Sahkah Jum'at itu? (Bandung)
- J. Tidak sah Jum'atnya orang yang dihukum selama hidup menurut Qaul Azhhar, dan pula tidak sah bagi orang-orang yang dihukum terbatas, menurut semua pendapat ulama.

Keterangan, dari kitab:

1. Mughni al-Muhtaj 26

(وَلَوْ لاَزَمَ أَهْلُ الْخِيَامِ الصَّحْرَاءَ) أَي مَوْضِعًا مِنْهَا (أَبَدًا) وَلَمْ يَبْلُغْهُمْ النِّدَاءُ مِّنْ مَحَلِّ الجُمْعَةِ (فَلاَ مُمْعَةً) عَلَيْهِمْ وَلاَ تَصِحُّ مِنْهُمْ (فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهُمْ عَلَى هَيْئَةِ الْمُسْتَوْفِزِيْنَ وَلَيْسَ لَهُمْ أَبْنِيَةُ الْمُسْتَوْطِنِيْنَ.

Seandainya penghuni kemah berdomisili selamanya di padang pasir dan mereka tidak mendengar seruan adzan dari tempat shalat Jum'at, maka mereka tidak wajib shalat Jum'at dan (andaikan shalat Jum'at pun)

²⁵ Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1422 H/2001 M), Cet. Ke-1, Jilid II, h. 112-113.

Muhammad al-Khathib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj 'ala al-Minhaj, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424 H/2003 M), Jilid I, h. 382.

tidak sah menurut qaul al-azhhar. Karena mereka seperti kalangan nomaden (selalu berpindah-pindah) dan tidak memiliki bangunan tempat tinggal.

144. Membaca Allah dalam Shalawat Masyisyiyah

- S. Bagaimana hukum membaca wirid Masyisyiyah karangan Imam Abdussalam Al-Masyisyi, guru Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili dengan panjang alifnya Aallah, Aallah, Aallah, dengan berhenti pada tiap-tiap kalimat, tiga kali. Sementara orang yang mengerti, bahwa panjangnya hamzah itu untuk bersumpah untuk mengharapkan diterimanya doa, menurut hadits yang artinya: "Sementara hamba Allah ada yang sewaktu sumpah harus melaksanakan sumpahnya.", seperti dalam Hizib Syadzili berbunyi: Inqatha'at aamaalunaa wa 'izzatika illaa minka, wakhaba rajaunaa wahaqqika illaa fiika, tetapi kebanyakan orang tidak mengerti, apakah pasti boleh membaca panjang hamzahnya atau tidak? Mohon keterangan dari Muktamar, karena para ulama di Martapura telah berselisih dalam hal itu (Martapura, Kalimantan Selatan).
- J. Sesungguhnya membaca Aallah, Aallah dalam Shalawat Masyisyiyah dengan pendek hamzahnya atau panjang itu hukumnya boleh (jaiz). Apabila dibaca panjang, maka hamzahnya yang disambung dengan hamzah ta'rif itu untuk bersumpah sebagaimana dalam hadis Muslim yang berbunyi: "Aallah maa aradhtu maa'aradhtu illaa wahidatan", maka berkata: "Aallah maa aradhtu illa wahidatan", dan siapa yang mendapat ijazah dari guru dengan panjang untuk memperkuat doa dengan sumpah, maka harus membaca dengan panjang, dan sumpah sebagaimana hadis tersebut dalam soal.

Putusan ini sama dengan jawaban *al-'Allamah* Syaikh Sa'id bin Muhammad al-Yamani, seorang pengajar di Masjidil Haram Makkah.[]

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-9 Di Banyuwangi Pada Tanggal 8 Muharram 1353 H. / 23 April 1934 M.

145. Meminum Minyak Al-Qur'an 146. Menyewa Tambak untuk Mengambil Ikannya 147. Menyewa Tambak Milik Pemerintah 148. Masa Hancurnya Jasad Mayit

149. Masih Ditemukan Tulang Mayat yang Lama, Setelah Kubur Digali

150. Shalat yang Menghadap Lurus ke Barat Benar (Tidak Membelok ke Arah Kiblat)

151. Mendirikan Mesjid di Wilayah Islam

152. Mengangkut Mayit dengan Kendaraan yang Ditarik Kuda atau Manusia

153. Menelaah Kitab-kitab Karangan Orang Kafir

154. Menyewa Perahu dengan Seperenam Pendapatan

155. Mengamalkan Pendapat yang Bertentangan dengan Pendapat Mazhab Empat

156. Orang Islam yang Menjadi Kristen Sampai Matinya

145. Meminum Minyak Al-Qur'an

- S. Bagaimana hukum meminum yang dinamakan minyak al-Qur'an untuk memperkuat badan dan untuk menjauhkan diri dari perbuatan zina. Apakah haram, atau makruh, ataukah sunat, atau boleh (mubah)? (Tuban)
- J. Kalau yang dimaksudkan itu air untuk merendam lafal-lafal al-Qur'an sampai hancur, maka hukumnya tidak haram.

Keterangan, dari kitab:

1. I'anah al-Thalibin¹

Tidak haram meminum air larutan tulisan al-Qur'an. Dalam kitab al-Mughni dijelaskan, tidak dimakruhkan menulis sesuatu (ayat-ayat) yang terdapat dalam al-Qur'an ke suatu bejana untuk diminumkan airnya untuk penyembuhan.

146. Menyewa Tambak untuk Mengambil Ikannya

- S. Kalau menyewa tambak (balong) untuk mengambil ikannya dengan memancing atau menjaring, si penyewa kadang-kadang mendapat ikan banyak dan kadang-kadang tidak mendapat. Apakah menyewanya itu sah atau tidak? (Bandung dan Purwokerto)
- J. Tidak sah menyewanya, dan uang sewanya pun tidak halal, karena barang itu tidak boleh menjadi hak milik dengan akad sewa.

Keterangan, dari kitab:

1. I'anah al-Thalibin²

وَخَرَجَ بِغَيْرِ مُتَضَمِّنٍ لِاسْتِيْفَاءِ عَيْنٍ مَا تَضَمَّنَ اسْتِيْفَاؤُهَا أَيِ اسْتِفْجَارُ مَنْفَعَةٍ تَضَمَّنَ اسْتِيْفَاؤُهَا أَيِ اسْتِفْجَارُ مَنْفَعَةٍ تَضَمَّنَ اسْتِيْفَاءَ عَيْنٍ كَاسْتِفْجَارِ الشَّاةِ لِلَبَنِهَا وَبِرْكَةٍ لِسَمَكِهَا وَشُمْعَةٍ لِوُقُوْدِهَا وَبُسْتَانٍ لِتَمْرَتِهِ اسْتِيْفَاءَ عَيْنٍ كَاسْتِهُ وَلَيْقَعُ كَثِيْرًا.

Dan dengan kalimat: "Tanpa berkonsekwensi mengambil barang" tidak termasuk pemakaian manfaat barang sewaan yang berkonsekwensi mengambil barangnya, seperti menyewa kambing untuk diperah susunya,

¹ Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t .th). Jilid I, h. 69.

² Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.th). Jilid III, h. 114.

kolam untuk diambil ikannya, lilin untuk dinyalakan dan kebun untuk dipetik buahnya. Semua itu tidak sah. Hal seperti ini termasuk cobaan yang sudah mewabah dan banyak terjadi.

2. Al-Anwar li A'mal al-Abrar3

Dan bila seseorang menyewa balong (tambak) untuk diambil ikannya, itu tidak sah; dan bila ia menyewanya untuk membendung air supaya ikan-ikan berkumpul di situ, maka boleh. Sebab barang itu (ikan) tidak bisa berpindah hak milik dengan akad sewa.

147. Menyewa Tambak Milik Pemerintah

- S. Tambak (balong) milik Jawatan. Apakah hukumnya persewaannya sama dengan yang lalu? (Bandung)
- J. Betul sama dengan ketidaksahnya dan tidak halalnya uang persewaannya.

148. Masa Hancurnya Jasad Mayit

- S. Berapa tahun hancurnya mayat kecuali Ujbuzzanab? Hingga kuburnya boleh digali setelah hancur, untuk ditanami mayat yang lain.? (Surabaya)
- J. Hancurnya mayat tidak dapat dibatasi dengan waktu yang tertentu, karena berbeda-beda menurut tempat dan iklimnya, tetapi harus ada ketetapan dari orang yang ahli dalam bidang itu, mengingat tempat dan iklimnya. *Keterangan*, dari kitab:
- 1. Fath al-Wahhab4

Diharamkan menggali kubur sebelum mayat di dalamnya hancur sesuai dengan pendapat para pakar daerah tersebut setelah mayat itu dikubur.

2. Al-Umm5

Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.th). Jilid III, h. 114.

Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Fath al-Wahhab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M), Juz I, h. 118.

Muhammad bin Idris al-Syafi'i, al-Umm, (Mesir: Mathba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 1381 H/1961 M), Cet. Ke-1, Jilid I, h. 277.

أَنَّ ذَلِكَ قَدْ ذَهَبَ وَذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِالْبُلْدَانِ فَيَكُونُ فِي السَّنَةِ وَأَكْثَرَ.

Menurut redaksi kitab al-Umm, jika mayat sudah dikubur maka tidak seorangpun boleh menggali kembali kuburannya sampai berlalu suatu masa yang menurut pakar daerah tersebut, mayat tersebut telah hilang (hancur). Dan hal ini berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain, biasanya bisa setahun atau lebih.

149. Masih Ditemukan Tulang Mayat yang Lama, Setelah Kubur Digali

- S. Jika menggali kubur, menemui tulang mayat lama, apakah menggalinya boleh diteruskan dan ditanami mayat yang baru, atau harus pindah ke tempat lain? (Surabaya)
- J. Sesungguhnya hukumnya menggali kubur yang telah lama, apabila telah ada tanda-tanda yang kuat, bahwa mayat itu sudah hancur, maka hukumnya jaiz (boleh), kemudian kalau menemukan tulang-tulang sebelum sempumanya penggalian, maka harus pindah, tetapi kalau menemukan tulang-tulang itu setelah penggalian sempuma, maka tidak wajib pindah, boleh menanam mayat baru dan semua tulang-tulang yang terdapat supaya ditanam kembali. Keterangan, dari kitab:
- 1. Fath al-Jawwad6

Seandainya ditemukan sebagian tulang belulangnya sebelum penggalian sempurna, yakni belum mencapai kedalaman minimal untuk penguburan, maka tanahnya harus dikembalikan lagi, atau setelah penggalian sempurna, maka tidak perlu mengembalikan tanahnya kembali. Dan boleh mengubur (mayit baru) bersama tulang (dari mayit lama).

2. *Al-Umm*⁷

فَإِنْ عَجَلَ بِحَفْرِ قَبْرِهِ فَوَجَدَ مَيْتًا أَوْ بَعْضَهُ أُعِيْدَ عَلَيْهِ التَّرَابُ وَإِنْ خَرَجَ مِنْ عِظَامِهِ شَيْءُ أُعِيْدَ فِي الْقَبْرِ.

Apabila keburu-buru dalam menggali kubur, kemudian mendapatkan

⁶ Ibn Hajar al-Haitami, Fath al-Jawwad, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1391 H/1971 M), Cet. Ke-2, Jilid I, h. 245.

Muhammad bin Idris al-Syafi'i, al-Umm, (Mesir: Mathba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 1381 H/1961 M), Cet. Ke-1, Jilid I, h. 277.

mayat atau sebagian dari padanya, maka tanahnya harus dikembalikan lagi. Jika mencuat sesuatu dari tulang-tulangnya, maka harus dikembalikan ke dalam kubur.

150. Shalat yang Menghadap Lurus ke Barat Benar (Tidak Membelok ke Arah Kiblat)

S. Apakah hukum orang sembahyang dengan menghadap lurus ke barat benar, tidak membelok ke arah kiblat, dengan tidak niat mengikuti pendapat mazhab Hanafi yang memperbolehkan menghadap Jihah. Dan bagaimana hukum makmum pada orang yang menghadap demikian dengan tidak mengetahui apakah si imam itu niat mengikuti mazhab Hanafi, atau tidak mengerti pula bahwa menghadap demikian itu tidak sah menurut mazhab Syafi'i, sahkah sembahyangnya? (Banyumas)

J. Sah sembahyangnya, bagi orang yang tidak mengerti mencari tandatanda kiblat yang sah, juga sembahyang makmum yang meyakinkan imamnya demikian halnya. Sedang bagi orang yang mengerti mencari tanda-tanda kiblat, dan dapat menghasilkan maka tidak sah sembahyangnya kecuali menghadap ke Ka'bah, juga tidak sah sembahyang yang dilakukan makmum yang tidak mengerti ketidaksahnya imam.

Keterangan, dari kitab:

1. Bughyah al-Mustarsyidin⁸

تَحَلُّ الْإِكْتِفَاءِ بِالْجِهَّةِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِأَدِلَّةِ الْعَيْنِ إِذِ الْقَادِرُ عَلَى الْعَيْنِ إِنْ فُرِضَ حُصُولُهُ بِالْإِجْتِهَادِ لاَ يُجْزِيْهِ اسْتِقْبَالُ الْجِهَّةِ قَطْعًا وَمَا حَمَلَ الْقَائِلِيْنَ بِالْجِهَّةِ فَلْعًا وَمَا حَمَلَ الْقَائِلِيْنَ بِالْجِهَّةِ ذَلِكَ إِلاَّ كُونُهُمْ رَأَوْا أَنَّ اسْتِقْبَالَ الْعَيْنِ بِالْإِجْتِهَادِ مُتَعَدِّرُ.

Kondisi cukup menghadap arah (ka'bah ke barat saja misalnya) adalah saat tidak mengetahui tanda-tanda arah ka'bah. Karena orang yang mampu mengetahui ka'bah bila diandaikan bisa dihasilkan dengan berijtihad, maka ia tidak cukup menghadap arah saja secara pasti (tanpa khilafiyah). Tidak ada yang mendorong ulama yang membolehkan menghadap ke arah ka'bah melainkan mereka memandang bahwa menghadap ka'bah dengan berijtihad itu sulit dilakukan.

151. Mendirikan Mesjid di Wilayah Islam

S. Bagaimana hukum mendirikan mesjid di kepulauan Islam yang penduduknya orang-orang Islam untuk melahirkan syiar Islam dan mendirikan jamaah, sunah

⁸ Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 H/1952 M)), h. 39-40.

ataukah fardhu kifayah?

J. Sesungguhnya mendirikan mesjid itu hukumnya sunat *muakkadah. Keterangan,* dari kitab:

1. Al-Siraj al-Munir9

Rasulullah Saw. bersabda: 'Bangunlah mesjid dan jadikanlah sebagai tempat shalat berjamaah". Perintah Rasululah Saw. ini berpengertian sunah muakkad (sangat dianjurkan).

2. Al-Fatawa al-Kubra¹⁰

وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي عِمَارَةِ السُّورِ إِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ الَّذِيْ يَنْدَفِعُ بِهِ الضَّرُوْرَةُ فَقَطْ. وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ مَنْ جَعَلَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ كَعِمَارَةِ السُّورِ فَقَدْ أَبْعَدَ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ لاَ يَضْطَرُ إِلَيْهِ إِذْ لاَ تَتَوَقَّفُ صَلاَةً عَلَى صِحَّتِهِ.

Dengan demikian dipahami bahwa yang wajib dalam membangun pagar (mesjid) adalah sekedar sebagaimana yang sangat dibutuhkan oleh keadaan yang sangat mendesak saja. Hal ini berarti, bahwa orang yang menjadikan bangunan mesjid sama seperti bangunan pagarnya, maka ia telah menjauhkannya, karena mesjid tidak sangat memerlukannya dan keabsahan shalat pun tidak terikat dengan keabsahan keberadaannya.

152. Mengangkut Mayit dengan Kendaraan yang Ditarik Kuda atau Manusia

S. Bagaimana hukum mengangkut mayat dengan kendaraan yang ditarik kuda atau manusia, seperti mayatnya orang kafir. Apakah itu boleh (mubah) mutlak, atau sewaktu ada masyaqqat, atau dilarang (mamnu'). (Mojokerto)

J. Sesungguhnya mengangkut mayat dengan kendaraan itu boleh (jaiz), tetapi tidak dapat keutamaan seperti mengangkut di antara kedua batang kayu yang ditetapkan keutamaannya oleh para ulama.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Minhaj al-Qawim¹¹

⁹ Ali al-Azizi, al-Siraj al-Munir, (Mesir, Musthafa al-Halabi, 1377 H/1957 M), Cet. Ke-2, Jilid I, h. 24. Hadis di atas diriwayatkan oleh al-'Uqaili, Ibn Abi Syaibah, dan al-Baihaqi dari Anas bin Malik.

¹⁰ Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra, (Beirut: Dar al-Fikr, 1493 H/1984 M), Jilid IV, h. 244.

Ibn Hajar al-Haitami, al-Minhaj al-Qawim dalam Muhammad Mahfudz al-Tarmasi al-Jawi, Mauhibah Dzi al-Fdhl, (Mesir. al-Amirah al-Syarafiya, 1326 H), Jilid III, h. 328-329.

(وَالْحُمْلُ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ أَفْضَلُ مِنَ التَّرْبِيْعِ) إِنْ أُرِيْدَ الافْتِصَارُ عَلَى أَحَدِهِمَا إِلَى أَنْ قَالَ: (وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَخْمِلَ الْجُنَازَةَ) عِنْدَ عَجْزِ الْمُتَقَدَّمِ عَنْ حَمْلِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ كَمَا ذُكِرَ (خَمْسَةٌ) إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِنْ عَجَزُوا فَسَبْعَةُ أَوْ تِسْعَةُ أَوْ أَكْثَرَ أَوْتَارَ بِحَسْبِ الْحَاجَةِ

Membawa jenazah di antara dua batang kayu (satu orang di depan dan dua orang di belakang) itu lebih baik dibanding dengan cara tarbi' (empat orang dengan dua orang di depan dan dua belakang) jika ingin meringkasnya ... Dan ketika satu orang di bagian depan yang memikul dua ujung kayu lemah, seperti keterangan yang telah disebutkan, yang lebih baik hendaknya pembawa jenazah itu lima orang ... tujuh, sembilan atau selebihnya dengan jumlah ganjil sesuai kebutuhan.

153. Menelaah Kitab-kitab Karangan Orang Kafir

- S. Bagaimana hukum manelaah kitab-kitab karangan orang Kristen, seperti Munjid dan lain sebagainya, apakah haram atau tidak? (Jepara)
- J. Tidak boleh menelaah kitab-kitab karangan bukan orang Islam, kecuali bagi orang yang mengerti dan dapat membedakan haq dan bathil. *Keterangan*: dari kitab:
- 1. Mukhtashar al-Fawaid al-Makkiyah¹²

قَالَ فِي الْفَتَاوَي الْحَدِيْئِيَّةِ لاَ يَجُوْزُ قِرَاءَهُ سِيْرَةِ الْبَكْرِيِّ لِأَنَّ غَالِبَهَا بَاطِلُ وَكَذِبُ وَقَدْ الْحَتَلَظ فَحَرُمَ الْكُلُ حَيْثُ لاَ مُمَيَّزَ إِهْ وَمِنْ ذَلِكَ تُعْلَمُ حُرْمَةُ قِرَاءَةِ نُزْهَةِ الْمَجَالِسِ وَخُوْهَا مِمَّا الْحُلُقِ الْمُجَالِسِ وَخُوْهَا مِمَّا الْحُنْفَةِ الْمُجَالِسِ وَخُوْهَا مِمَّا الْحُنْفَةِ الْمُحَافِقِ اللَّحْفَةِ الْحُرْمُ عَلَى غَيْرِ عَلَيْهِ مُتَبَحِّرٍ مُطَالَعَةُ نَحْوِ تَوْراةٍ عُلِمَ تَبْدِيْلَهَا أَوْشُكَّ فِيهِ

Dalam al-Fatawa al-Haditsiyah Ibn Hajar al-Haitami berkata: "Tidak boleh membaca buku Sirah al-Bakri karena sebagian besar isinya merupakan kebatilan dan kebohongan yang bercampuraduk, maka keseluruhannya menjadi haram sekira tidak terdapat perbedaan (antara yang batil dan yang haq). Dengan demikian dapat diketahui keharaman membaca Nuzhah al-Majalis dan semisalnya dari buku-buku yang di dalamnya termuat kebatilan yang bercampur dengan lainnya sekira tidak terdapat perbedaan, ..." Dalam Tuhfah al-Muhtaj beliau berkata: "Bagi selain orang yang berpengetahuan luas diharamkan membaca kitab seperti Taurat, yang sudah diketahui atau diragukan terdistorsi (terubah)."

¹² Alawi al-Saqqaf, Mukhtashar al-Fawaid al-Makkiyah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t. th.), h. 102-103.

154. Menyewa Perahu dengan Seperenam Pendapatan

S. Kalau menyewa perahu, bagi para nelayan (pencari ikan) dengan seperenam pendapatan, kemudian si nelayan pinjam beberapa rupiah dari pemilik perahu, dengan berjanji: Apabila tidak menyewa perahunya, maka wajib membayar pinjamannya seketika. Apa akad demikian itu sah? Atau tidak? Dan apa termasuk dalam larangan Nabi Saw. Pinjaman karena mengambil keuntungan? Atau tidak? (Jepara)

J. Tidak sah akad demikian itu, karena tidak ada ketentuan ongkos sewanya, maka semua pendapatan menjadi hak milik nelayan, dan wajib membayar sewa ongkos perahu menurut yang biasa, dan tidak masuk dalam larangan Nabi Saw. "Pinjaman karena menarik keuntungan". Sebab di sini yang mendapat keuntungan bukan yang memberi pinjaman, tetapi si peminjam.

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Wahhab13

... dan tidak sah akad sewa menggiling gandum dengan upah sebagian tepung dari gandum tersebut seperti sepertiganya, karena tidak diketahuinya ketebalan kulit (dalam akad sewa menguliti kambing dengan upah kulitnya) dan tidak diketahuinya kadar tepung, serta karena tidak mampu membayar upah seketika itu.

2. Bughyatul Mustarsyidin¹⁴

(مَسْأَلَةُ بِ) اَسْتُؤْجِرَ لِحِمْلِ شَيْءٍ يُوْصِلُهُ فِي مَرْكَبِهِ إِلَى مَكَانِ كَذَا وَشَرَطَ صَاحِبُ الْحَمْلِ أَنْ يُفِرضَهُ دَرَاهِمَ إِلَى أَنْ يَبِيْعَ مَا حَمَلَهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْقَرْضِ الْمُحَرَّمِ وَإِنْ وَقَعَ فِيْ صُلْبِ الْعَقْدِ لِأَنَّ النَّفْعَ حِيْنَئِذٍ إِنَّمَا لِلْمُقْتَرِضِ لِأَنَّهُ الَّذِي شَرَطَهُ وَإِنْ وَقَعَ فِيْ صُلْبِ الْعَقْدِ لِأَنَّ النَّفْعَ حِيْنَئِذٍ إِنَّمَا لِلْمُقْتَرِضِ لِأَنَّهُ الَّذِي شَرَطَهُ وَإِنْ وَقَعَ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ.

¹³ Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Fath al-Wahhab dalam Muhammad al-Bujairimi, al-Tajrid li Nafi al-'Abid, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1369 H/1950 M), Jilid III, h. 167.

¹⁴ Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 H/1952 M)), h. 135.

Bila seseorang disewa untuk mengangkut barang dalam kendaraanya untuk diantar ke tempat tertentu, kemudian ia menyaratkan supaya pemilik barang menghutanginya beberapa dirham sampai ia menjual barang tersebut, maka yang jelas demikian itu tidak termasuk pinjaman yang diharamkan, walaupun terjadi di tengah transaksi. Sebab, keuntungan dalam penyaratan tersebut hanya kembali kepada si peminjam. Karena ia sendiri yang menyaratkannya, meskipun meskipun syarat tersebut juga menguntungkan bagi pihak yang memberi pinjaman.

155. Mengamalkan Pendapat yang Bertentangan dengan Pendapat Mazhab Empat

- S. Bagaimana pendapat Muktamar, atas pendapat salah satu Sahabat atau Ulama yang tidak cocok dengan pendapat ahli Mazhab Empat, bahkan ahli mazhab telah menerangkan kelemahan pendapat itu. Apakah boleh menjalankan pendapat tersebut? Atau tidak?
- J. Tidak boleh menjalankan pendapat yang bertentangan dengan pendapat Mazhab Empat, apabila tidak mengetahui syarat-syaratnya dan segala ketentuannya.

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin¹⁵

إِذَا تَمَسَّكَ الْعَامِيُّ بِمَدْهَبٍ لَزِمَهُ مُوَافَقَتُهُ وَإِلاَّ لَزِمَهُ التَّمَدْهُبُ بِمَدْهَبٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْأَرْبَعَةِ لاَ غَيْرِهَا (قَوْلُهُ لاَ غَيْرَهَا) أَي غَيْرَ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَهَذَا إِذَا لَمْ يُدَوَّنْ مَذْهَبُهُ. فَإِنْ دُوِّنَ جَازَ كَمَا فِي التَّحْفَةِ وَنَصُّهُ: يَجُوْزُ تَقْلِيْدُ كُلِّ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَكَذَا مَنْ عَدَاهُمْ مِمَّنْ حُفِظَ مَذْهَبُهُ فِي التَّحْفَةِ وَنَصُّهُ: يَجُوزُ تَقْلِيْدُ كُلِّ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَكَذَا مَنْ عَدَاهُمْ مِمَّنْ حُفِظَ مَذْهَبُهُ فِي التَّحْفَةِ الْمَسْأَلَةِ وَدُوِّنَ حَتَّى عُرِفَتْ شُرُوطُهُ وَسَائِرُ مُعْتَبَرَاتِهِ.

Apabila orang awam berpedoman pada suatu mazhab, maka ia harus cocok dengan mazhab tersebut, jika tidak, maka ia harus bermazhab dengan mazhab tertentu dari empat mazhab yang ada dan tidak boleh dengan mazhab lainnya, yakni selain empat mazhab. Hal ini jika mazhabnya itu memang belum terkodifikasi, jika sudah dikodifikasi maka boleh, sebagaimana dalam al-Tuhfah, redaksinya yaitu: "Boleh bertaklid kepada siapapun dari empat mazhab yang ada (Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hanbali), dan juga imam mazhab lainnya yang mazhabnya terjaga dalam masalah terkait, dan terkodifikasi, sehingga diketahui syarat-syarat dan semua ketentuannya.

Zainuddin al-Malibari dan al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, Fath al-Mu'in dan Tanah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.th). Jilid IV, h. 217.

156. Orang Islam yang Menjadi Kristen Sampai Matinya

- S. Bagaimana pendapat Muktamar atas orang Islam yang menjadi Kristen sampai meninggal dunia belum kembali ke agama Islam. Apakah boleh ditanam dalam kuburan Islam atau tidak?
- J. Tidak boleh ditanam dalam kuburan Islam (haram). *Keterangan*, dari kitab:
- 1. Mirqah Shu'ud al-Tashdiq16

Dan tidak boleh mengubur orang murtad di pemakaman orang Islam, karena keluarnya dari golongan orang islam dengan murtadnya.[]

Muhammad Nawawi al-Jawi, Mirqah Shu'ud al-Tashdiq, (Semarang: Usaha Keluarga, t. th.). h. 15.

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-10

Di Surakarta Pada Tanggal 10 Muharram 1354 H. / April 1935 M.

157. Puasa Sunat dengan Niat Qadha Ramadhan 158. Membayar Fidyah Sebab Meninggalkan Kewajiban 159. Ucapan Seseorang Bahwa: Puasa Itu Hanya untuk Orang yang Tidak Mempunyai Makanan

160. Hukum Tonel dan Pelakunya

161. Munculnya Perempuan untuk Pidato Keagamaan

162. Mendengarkan Suara Radio dan Menyimpannya

163. Lupa Kalau Sedang Junub, Langsung Shalat

164. Si Junub yang Shalat Karena Lupa Itu, Menjadi Imam 165. Pengertian "Permusuhan Lahir Batin" antara Suami Istri

166. Pengertian Sekufu yang Menjadi Syarat Sahnya Nikah Paksa

167. Pengertian Mampu Membayar Maskawin dengan Tunai

168. Dalam Akad Nikah Dinyatakan "Kukawinkan Padamu

Perempuan Pinanganmu". Padahal Lelaki Tidak Pernah Meminangnya

169. Mushalla yang Diwakafkan Tidak Bisa Menjadi Mesjid, Kalau Tidak Diniatkan

170. Kawin yang Dipaksa, Sebab Berbuat Zina

171. Ongkos Sewa untuk Pasar Malam, Dipergunakan untuk Biaya Asrama Yatim Piatu

172. Orang Shalat di Dekat Ka'bah, Harus Benar-benar Menghadap Ka'bah

173. Pindah dari Thariqah ke Thariqah Lain

174. Nikah Secara *Tahlil* dengan Sengaja Akan Dicerai Sesudah Bersetubuh

175. Menyerahkan Zakat kepada Salah Seorang Pezakat 176. Memindahkan Zakat ke Dalam Batas Kota

177. Melihat Barang yang Dijual dengan Memakai Kacamata 178. Bersentuhan Kulit Laki-laki dengan Kulit Perempuan Lain Tanpa

aki-laki dengan Kulit Perempuan Lain Tanpa Beraling-aling

179. Qadha Shalat dan Puasa Oleh Orang Lain yang Masih Ada Hubungan Famili atau Diizini Famili Mayat

180. Shalat Tarawih Bermakmum Kepada Imam yang Fasik 181. Hasil Barang Gadaian Dipakai Beramal Saleh

157. Puasa Sunat dengan Niat Qadha Ramadhan

S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang nasehat dari sementara ulama kepada murid-muridnya supaya tidak puasa sunat, kecuali dengan niat qadha Ramadhan, padahal di antara mereka ada yang berkeyakinan tidak pernah meninggalkan puasa Ramadhan, sejak mulai baligh. Apakah nasehat itu benar atau tidak? (Pekalongan)

J. Orang yang yakin atau menyangka, bahwa ia tidak berkewajiban qadha puasa Ramadhan, maka haramlah niat qadha Ramadhan, karena berisengiseng ibadah, bagi orang yang sangsi, maka boleh niat qadha Ramadhan karena salah, (tidak bernazar) maka wajiblah niat qadha.

Maka dengan keterangan tersebut, apabila nasehat ulama tersebut kaitannya dengan keterangan di atas, maka benarlah nasehat itu.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah¹

وَيُؤْخَذُ مِنْ مَسْأَلَةِ الْوُضُوْءِ هَذِهِ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءً مَثَلاً فَنَوَاهُ إِنْ كَانَ وَإِلاَّ فَتَطَوَّعَ صَحَّتْ نِيَّتُهُ أَيْضًا وَحَصَلَ لَهُ الْقَضَاءُ بِتَقْدِيْرِ وُجُوْدِهِ بَلْ وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ عَلَيْهِ وَإِلاَّ حَصَلَ لَهُ التَّطَوُّعُ لَيَّهُ أَنْ الْأَفْضَلَ لِمُرِيْدِ التَّطَوُّعُ التَّطَوُّعُ كَمَا يَخْصُلُ فِي مَسْأَلَةِ الْوُضُوءِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْأَفْضَلَ لِمُرِيْدِ التَّطَوُّعِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْأَفْضَلَ لِمُرِيْدِ التَّطَوُّعِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْأَفْضَلَ لِمُرِيْدِ التَّطَوُّعِ إِلَى أَنْ قَالتَّعَلُوعِ لَلهُ مَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَالتَّطَوُّعَ لِيَحْصُلَ لَهُ مَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَالتَّطَوُّعَ لِيَحْصُلَ لَهُ مَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَالتَّطَوُّعَ لِيَحْصُلَ لَهُ مَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَالتَّطُوعَ لِيَحْصُلَ لَهُ مَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَالتَّعَلُوعَ لِيَحْصُلَ لَهُ مَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَالتَّعَلُوعَ لِيَحْصُلَ لَهُ مَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَإِلاَّ فَالتَّعُلُوعَ لِيَعْلَمُ أَنْ الْأَوْمِ لَيْهِ وَالْا فَالْتَطُوعُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَيْهِ وَإِلاَ فَالتَّالَةُ الْتَعْلَقُ عَلَى الْمُعْلَى لَهُ مَا عَلَيْهِ إِلَى كَانَ عَلَيْهِ وَإِلاَ فَالتَعْطُوعُ أَلَى اللَّهُ الْوَلُولُو الْمَ

Dari masalah wudhu ini (kasus orang yang yakin sudah hadats dan ragu sudah bersuci atau belum, lalu ia wudhu dengan niat menghilangkan hadats bila memang hadats, dan bila tidak maka niat memperbarui wudhu, maka sah wudhunya) bisa dipahami bahwa jika seseorang ragu punya kewajiban mengqadha puasa misalnya, lalu ia niat mengqadhanya bila memang punya kewajiban qadha puasa, dan bila tidak maka niat puasa sunnah, maka niatnya itu juga sah, dan qadha puasanya berhasil dengan mengira-ngirakan memang wajib mengqadha, bahkan bila memang jelas wajib mengqadha. Bila tidak, maka ia mendapat puasa sunnah seperti halnya dalam masalah wudhu. ... Dengan demikian diketahui, bahwa yang lebih baik bagi orang yang ingin puasa sunnah, maka ia berniat mengqadha puasa wajib bila memang ada kewajiban mengqadha, dan bila tidak maka puasa sunnah, agar menghasilkan qadha bila memang punya kewajiban qadha.

2. Al-Minhaj al-Qawim²

¹ Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra, (Beirut: Dar al-Fikr, 1493 H/1984 M), Jilid II, h. 90.

² Ibn Hajar al-Haitami, al-Minhaj al-Qawim pada Muhammad Sulaiman al-Kurdi, Hamisy al-Hawasy al-Madaniyah, (Singapura: al-Haramain, 1397 H), Cet. Ke-2, Jilid II, h. 7.

وَتَجِبُ الْمُبَادَرَةُ وَمُوَالَتُهُ إِنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ عُذْرٍ.

Dan harus segera melaksanakan (puasanya) secara bersambung tanpa putus, jika memang berbuka tanpa sebab.

158. Membayar Fidyah Sebab Meninggalkan Kewajiban

- S. Kalau orang yang berkewajiban qadha shalat fardhu delapan hari, meninggal dunia, di antara ulama memberi petunjuk supaya membayar fidyah empat puluh mud, untuk fidyah qadha delapan hari, tetapi di antara ulama lain memberi petunjuk supaya berfidyah sejak waktu baligh sampai meninggal dunia. Maka mana yang benar di antara dua petunjuk tadi? (Pekalongan)
- J. Adapun yang benar: yaitu petunjuk yang pertama yakni membayar fidyah empat puluh mud, karena meninggalkan shalat delapan hari kali lima waktu sama dengan empat puluh waktu. Tiap-tiap waktu satu mud. *Keterangan*, dari kitab:
- 1. I'anah al-Thalibin³

Dalam suatu pendapat yang banyak dianut para ulama dari kalangan kita adalah, bahwa ia harus memberi makan satu *mud* untuk setiap kali shalat (yang ditinggalkan).

159. Ucapan Seseorang Bahwa: Puasa Itu Hanya untuk Orang yang Tidak Mempunyai Makanan

- S. Di antara pedagang ada yang tidak puasa Ramadhan sewaktu ditanya; "Karena apa saudara tidak puasa?" Maka ia menjawab; "Bagaimana saya puasa? Sedang saya mempunyai makanan dan minuman yang berlebihan. Puasa itu hanya bagi orang-orang yang tidak mempunyai makanan dan minuman." Apakah orang yang berkata demikian itu termasuk orang yang menentang agama atau tidak? (Pekalongan)
- J. Kalau yang mengucapkan demikian itu sengaja merendahkan perintah agama, atau memperbolehkan meninggalkan puasa, maka orang itu menjadi orang yang menentang agama dan menjadi kafir. Kalau tidak sengaja demikian, tetapi hanya sekedar bergurau, maka ucapan itu termasuk dosa besar.

³ Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t .th). Jilid I, h. 24.

Keterangan, dari kitab:

1. Bughyah al-Mustarsyidin4

(Jika seseorang) dihukum oleh hakim kemudian ia merasa jenuh/dongkol dan berkata dengan sikap melecehkan: "Syariat ini tidak ada artinya sama sekali", maka ia kafir.

2. Is'ad al-Rafiq⁵

(وَحَاصِلُ أَكْثَرِ تِلْكَ الْعِبَارَةِ يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ كُلَّ عَقْدٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ يَدُلُّ عَلَى اسْتِهَانَةٍ أَوِ اسْتِهَانَةٍ أَوِ اسْتِهَانَةٍ أَوْ اسْتِهَانَةٍ أَوْ اسْتِهَانَةٍ أَوْ اسْتِهَانَةٍ أَوْ الْمُعَالِمِ وَيْنِهِ أَوْ أَخْمَامِهِ أَوْ اسْتِخْفَافٍ وَعِيْدِهِ كُفْرٌ أَوْ مَعْصِيَّةً) كُفَرٌ خَبَرُ أَنَّ أَي إِنْ قَصَدَ قَائِلُ ذَلِكَ الْاِسْتِخْفَافَ وَالْاِسْتِهْزَاءَ بِذَلِكَ (أَوْ مَعْصِيَّةً) مُحَرَّمَةً شَدِيْدَةُ التَّحْرِيْمِ إِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ.

Kesimpulan dari kebanyakan redaksi tersebut kembali pada (ketentuan) bahwa semua keyakinan, perbuatan atau ucapan yang menunjukkan penghinaan atau pelecehan terhadap Allah, kitab-kitabNya, para nabiNya, para malaikatNya, syiar-syiarNya, simbol-simbol agamaNya, hukumhukumNya, atau janji baik dan ancamanNya, maka ia telah menjadi kafir atau bermaksiat. Kata kufur menjadi khabar kata anna, yakni jika si pembicara itu memang berniat melecehkan dan menghina. Jika memang tidak berniat melecehkan dan menghina, maka hukumnya bermaksiat dengan maksiat yang sangat diharamkan.

160. Hukum Tonel dan Pelakunya

- S. Bagaimana hukumnya tonel? Dan bagaimana hukumnya para pelakon dalam tonel itu? (Ponorogo)
- J. Kalau dalam tonel itu terdapat *munkarat* yang dilarang agama Islam, seperti ketoprak yang bercampur di antara laki-laki dan perempuan, atau ada orang wanita berpakaian berlagak pria atau sebaliknya, maka hukumnya haram tidak diridhai Allah, sebagaimana telah dimaklumi oleh orang yang mengerti syariat agama Islam.

⁴ Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 H/1952 M)), h. 248.

⁵ Muhammad Babashil, Is'ad al-Rafiq, (Singapura: al-Haramain t. th.), h. 61

161. Munculnya Perempuan untuk Pidato Keagamaan

- S. Bagaimana hukumnya orang perempuan berdiri di tengah-tengah lelaki lain untuk pidato keagamaan? Boleh ataukah tidak? (Ponorogo)
- J. Muktamar memutuskan bahwa berdiri orang perempuan di tengahtengah lelaki lain, itu haram, kecuali kalau bisa sunyi dari larangan agama Islam, seperti dapat menutup auratnya dan selamat dari segala fitnah, maka hukumnya boleh (jaiz) karena suara orang perempuan itu tidak termasuk aurat, menurut pendapat yang ashshah.

Keterangan, dari kitab:

1. Ittihaf al-Sadah al-Muttaqin6

"Sesungguhnya telinga Rasulullah Saw. pernah mendengar suara dua gadis (jariyah) pembantu wanita ketika beliau sedang tiduran di atas pembaringan." Seandainya andaikan dibunyikan gitar di suatu tempat, niscaya beliau beranjak dari duduk dari tempat itu karena suara gitar yang terdengar ditelinganya. Hal ini menunjukkan bahwa suara wanita tidak diharamkan seperti keharaman seruling. Namun suara wanita hanya haram ketika khawatir adanya fitnah secara pasti (tanpa khilafiyah).

2. Syarah al-Sittin⁷

Wanita tidak boleh mengeraskan suara membaca al-Qur'an demi menghindari timbulnya fitnah, walaupun pendapat yang lebih benar menyatakan bahwa suara wanita itu bukan *aurat*.

3. Al-Fawa al-Kubra al-Fiqhiyah8

Yang dimaksud fitnah tersebut adalah perzinaan dan muqaddimah-nya.

⁶ Muhammad Murtadha al-Zabidi, Ithaf al-Sadah al-Muttaqin, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1422 H/2002 M), Jilid VI, h. 495.

⁷ Abdul Karim al-Mathari al-Dimyathi, Syarah al-Sittin, (Singapura: al-Haramain, t. th.), h. 109.

⁸ Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra, (Beirut: Dar al-Fikr, 1493 H/1984 M), Jilid I, h. 203.

162. Mendengarkan Suara Radio dan Menyimpannya

- S. Bagaimana hukumnya mendengarkan suara radio? Dan bagaimana hukumnya menyimpannya? (Ponorogo)
- J. Hukumnya mendengarkan suara radio, itu sebagaimana hukumnya yang didengarkannya. Kalau yang didengarkan itu haram maka haramlah mendengarnya. Kalau makruh, ya makruhlah mendengarnya, begitulah seterusnya, begitu pula menyimpannya.

Keterangan, dari:

1. Majalah al-Hidayah al-Islamiyah⁹

إِنَّ الَّذِيْ يُسْمَعُ مِنَ الْكُلامِ بِوَاسِطَةِ الرَّادِيُوْ هُوَ كُلاَمُ الْمُتَكَلِّمِ وَصَوْتُ الْقَارِئِ وَلَيْسَ صُدَى كَلِمَاتٍ كَالَّذِيْ يُسْمَعُ مِنَ الرَّادِيُوْ قُرْآنًا حَقِيْقَةً إِلَى كَالَّذِيْ يُسْمَعُ فِي الْجِبَالِ وَالصَّحَارَى وَغَيْرِهَا. وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمَسْمُوعُ مِنَ الرَّادِيُوْ قُرْآنًا حَقِيْقَةً إِلَى أَنْ قَالَ: وَمِثْلُ الْقِرَاءَةِ غَيْرُهَا فِيْ أَنَّ الْمَسْمُوعَ هُو نَفْسُ الْمُتَكَلِّمِ وَإِنْ كَانَ مُغَنَّيًا فَحُكْمُهُ مُكِنَّهُ حُكْمُ الْفِنَاءِ وَإِنْ تَكَلَّمَ بِمَا هُو مُبَاحُ فَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ وَإِنْ تَكَلَّمَ بِمُحَرَّمٌ كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا.

Sesungguhnya kalimat yang didengar melalui perantara radio adalah kalimat orang yang berbicara dan suara orang yang membaca al-Qur'an, dan bukan gema kalimat seperti yang didengar di gunung-gunung, padang sahara, dan lainnya. Dengan demikian, maka yang didengar dari radio itu adalah al-Qur'an yang sebenarnya ... Dan seperti bacaan al-Qur'an yaitu selainnya dalam hal niscaya yang didengar itu adalah pembicara itu sendiri. Jika nyanyian maka hukumnya sama dengan (mendengar) nyanyian, jika ia berbicara tentang hal mubah maka hukumnya mubah dan jika berbicara tentang yang haram maka hukumnya pun haram.

163. Lupa Kalau Sedang Junub Langsung Shalat

- S. Apakah wajib qadha bagi orang junub (hadas besar) lalu sembahyang dan lupa kalau ia junub? (Ponorogo)
- J. Kalau sembahyangnya dengan tayamum, di tempat-tempat yang diperbolehkan tayamum, maka tidak wajib qadha, tetapi kalau sembahyangnya dengan wudhu atau di tempat yang tidak diperbolehkan tayamum, maka wajib qadha.

Keterangan, dalam kitab:

⁹ Syaikh Bakhit al-Muthi'i (Mufti Mesir), Majalah al-Hidayah al-Islamiyah, (Mesir: Jumadil Ula 1352 H/ Agustus 1933 M), Jilid I, h. 203 dan Lihat pula, Syaikh Thaha Jib, Majalah al-Azhar, (Mesir).

1. Hasyiyah al-Bajuri¹⁰

أَلَيْسَ عَجِيْبًا أَنَّ شَخْصًا مُسَافِرًا * إِلَى غَيْرِ عِصْيَانٍ تُبَاحُ لَهُ الرُّخَصُ إِذَا مَا تَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ أَعَادَهَا * وَلَيْسَ مُعِيْدًا لِلَّتِيْ بِالتُّرَابِ خُصَّ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ:

لَقَدْ كَانَ هَذَا لِلْجِنَابَةِ نَاسِيًا * وَصَلَّى مِرَارًا بِالْوُصُوْءِ أَتَى بِنَصِّ قَضَاءُ الَّتِي فِيهَا تَوَضَّأَ وَاجِبٌ * وَلَيْسَ مُعِيدًا لِلَّتِي بِالتُّرَابِ خُصَّ كَذَاكَ مِرَارًا بِالتَّيَمُّمِ يَا فَتَى * عَلَيْكَ بِكُتُبِ الْعِلْمِ يَآ خَيْرَ مَنْ فَحَص لِأَنَّ مَقَامَ الْغُسْلِ قَامَ تَيَمُّمُ * خِلاَفُ وُضُوْءَ هَاكَ فَرْقًا بِهِ تُخَصُّ

Bukankah aneh, ada seseorang bepergian bukan bertujuan maksiat yang boleh melakukan rukhshah,

ketika ia wudhu untuk shalat, maka ia harus mengulangi shalatnya kembali, dan ia tidak perlu mengulang shalat kembali ketika tayamum dengan debu saja? Sebagian ulama menjawab:

Hukum ini adalah untuk orang junub yang lupa, lalu shalat berkali-kali dengan berwudhu, maka sangat jelas,

bahwa mengadha shalat yang bersucinya dengan wudhu itu wajib dan ia tidak perlu mengulang shalat kembali ketika tayamum dengan debu saja.

Begitulah ia tayamum berulangkali wahai pemuda. Bacalah buku-buku ilmu pengetahuan wahai orang yang terbaik penelitiannya.

Karena kewajiban mandi (junub) bisa digantikan tayamum, berbeda dengan wudhu dalam kasus tersebut, karena adanya pembeda tertentu (antara keduanya) sehingga kasus junub tersebut mempunyai hukum khusus.

164. Si Junub yang Shalat Karena Lupa Itu, Menjadi Imam

- S. Kalau si junub yang sembahyang karena lupa itu menjadi imam, apakah ia wajib memberitahu pada orang-orang yang turut makmum, sewaktu ia ingat? (Ponorogo)
- J. Kalau bagi si makmum yang tidak *masbuq* (ketinggalan rakaat) maka si imam tidak wajib mengingatkan, tetapi bagi makmum yang *masbuq*, maka si imam wajib memberitahu pada si *masbuq*, kalau pemberitahuan itu sewaktu si *masbuq* belum salam atau sesudah salam dalam tempo pendek,

¹⁰ Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid I, h. 95-96.

maka si *masbuq* harus menyempurnakan dengan satu rakaat dari sujud sahwi, kalau pemberitahuan itu setelah salam dalam tempo yang lama, maka si *masbuq* harus sembahyang lagi (*i'adah*).

Keterangan, dari kitab:

1. Tanwir al-Qulub¹¹

لَوْ تَذَكَّرَ الْإِمَامُ بَعْدَ صَلاَتِهِ مُحْدِثًا أَوْ ذَا نَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ وَعَلِمَ أَنَّ بَعْضَ الْمَسْبُوْقِيْنَ رَكَعَ مَعَهُ قَبْلَ أَنْ يُتَمِّمَ الْفَاتِحَةَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعَلِّمَهُ بِحَالِهِ لِيُعِيْدَ صَلاَتَهُ إِنْ كَانَ قَدْ سَلِمَ وَطَالَ الْفَصْلُ وَإِلاَّ فَسَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ.

Seandainya imam baru ingat setelah shalat bahwa ia berhadats (seperti tidak berwudhu) atau terkena najis dengan najis yang samar, dan imam itu tahu bahwa sebagian makmum *masbuq* (yang ketinggalan) telah melakukan *ruku'* bersamanya sebelum menyempurnakan *Fatihah*nya, maka ia wajib memberitahu makmum tersebut agar mengulangi kembali shalatnya jika memang sudah selesai dan waktunya tidak lama. Jika belum, maka ia harus melaksanakan satu rakaat lagi dan sujud *sahwi*.

165. Pengertian "Permusuhan Lahir Batin" antara Suami Istri

S. Apa yang dimaksud dengan bermusuhan antara suami istri yang lahir atau yang batin, dalam keterangan ulama bahwa nikah paksa (ijbar) itu sah apabila di antara kedua mempelai itu tidak terdapat bermusuhan yang lahir. Kalau seorang calon mempelai perempuan mengucap: "Kalau saya akan dinikahkan dengan si anu, maka saya akan marah karena saya benci sekali pada si anu itu." Apakah ucapan yang demikian itu termasuk bermusuhan yang lahir, atau sewaktu mengetahui akan dinikahkan, lalu tidak mau makan dan minum, ia sangat setuju kalau pernikahannya tidak terlaksana, apakah perbuatan demikian itu namanya bermusuhan ('adawah)? Atau tidak? (Tegal)

J. Yang dinamakan bermusuhan ('adawah) yang lahir, yaitu bermusuhan yang diketahui para penduduk setempat, dan bermusuhan ('adawah) yang batin yaitu yang tidak diketahui penduduk setempat. Adapun ucapan-ucapannya bahwa ia marah dan ia benci sekali, itu termasuk bermusuhan ('adawah), dan perbuatan tidak makan dan minum kalau akan dinikahkan, itu bukan nama bermusuhan, tetapi sekedar benci saja.

Keterangan, dari kitab:

¹¹ Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir al-Qulub, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 166.

1. I anah al-Thalibin 12

قَوْلُهُ حَيْثُ لاَ عَدَاوَةً ظَاهِرَةً أَيْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ وُجِدَتْ الْعَدَاوَةُ الظَّاهِرَةُ وَهِيَ الَّتِيْ لاَ تَخْفَى عَلَى أَهْلِ مَحْلَتِهَا فَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيْجُهَا إِلاَّ بِإِذْنِهَا بِخِلاَفِ غَيْرِ الظَّاهِرَةِ وَهِيَ الَّتِيْ خَفِيَتْ عَلَى عَلَى أَهْلِ مَحْلَتِهَا فَلاَ تُوَقِّرُ لِأَنَّ الْوَلِيَّ يَحْتَاطُ لِحَوْفِ الْعَارِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ. وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لاَ أَهْلِ مَحْلَتِهَا فَلاَ تُوَقِّرُ لِأَنَّ الْوَلِيَّ يَحْتَاطُ لِحَوْفِ الْعَارِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ. وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لاَ يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ عَدَاوَةً وَلَوْ غَيْرَ ظَاهِرَةٍ. وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرُ ظُهُورُ الْعَدَاوَةِ فِيهِ كَمَا اعْتُونَ الْعَرِيقِ الْوَلِيِّ لِأَنَّ عَدَاوَةً وَلِهُ عَيْرَ ظَاهِرَةٍ. وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرُ ظُهُورُ الْعَدَاوَةِ فِيهِ كَمَا اعْتُورِ فِي الْوَلِيِّ لِأَنَّ عَدَاوَتُهُ الْحُفِيَّةَ تَحْمِلُهُ عَلَى إِضْرَارِهَا بِمَا لاَ يُحْتَمَلُ بِسَبَبِ الْمُعَاشَرَةِ.

Pernyataan sekiranya tidak ada permusuhan yang jelas, yakni antara keduanya (suami-istri). Jika terdapat permusuhan yang jelas, yakni yang tidak tersembunyi dari penduduk setempat, maka si wali tidak punya otoritas untuk mengawinkannya, kecuali dengan seizinnya (wanita). Lain halnya jika permusuhan itu tidak jelas, yakni tidak diketahui penduduk setempat, maka tidak ada pengaruhnya sama sekali, karena si wali akan berhati-hati oleh adanya celaan terhadapnya dan terhadap yang lain.

Disyaratkan pula agar antara si istri dan suami tidak terdapat permusuhan walaupun tidak nampak jelas. Tidak dipertimbangkannya permusuhan yang nampak jelas bagi calon suami, sebagaimana dipertimbangkan pada wali, karena permusuhannya tidak nampak jelas akan membuat calon suami itu menyakiti si wanita dengan sesuatu yang tidak bisa dibiarkan, karena kehidupan bersama antara keduanya.

2. Futuhat al-Wahhab13

أَمَّا عُجَرَّدُ كَرَاهَتِهَا لَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فَلاَ يُؤَثِّرُ لَكِنْ يُكُونُ لَهُ تَزْوِيْجُهَا مِنْهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ... وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْعَقْدِ حِيْنَئِذٍ عَدَمُ عَدَاوَةٍ ظَاهِرَةٍ مِنَ الْوَلِيِّ لَهَا بِأَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهَا أَهْلُ عَلَيْهَا إِلَى أَنْ قَالَ: وَخَرَجَ بِالْعَدَاوَةِ الْكَرَاهَةُ لِنَحْوِ بُخُلٍ أَوْ عَنَى أَوْ تَشَوُّهِ خِلْقَةٍ فَيُكُرَهُ لَكَمَّا إِلَى أَنْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلا حَاجَة لاِشْتِرَاطِ عَدَمِ عَدَاوَةِ الرَّوْجِ لِأَنَّ شَفَقَةَ الرَّوْفِ وَلا حَاجَة لاِشْتِرَاطِ عَدَمِ عَدَاوَةِ الرَّوْجِ لِأَنَّ شَفَقَة الرَّوْقِ فَل اللَّهُ وَيَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لاَ يُزَوِّجُهَا مِنْ عَدُوهَا. اه قَوْلُهُ لَيْسَ بَيْنَهَا عَدَاوَةً أَي بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلِيِّ تَدْعُوهُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُزَوِّجُهَا مِنْ عَدُوهَا. اه قَوْلُهُ لَيْسَ بَيْنَهَا عَدَاوَةً أَي بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلِيِّ تَدْعُوهُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُزَوِّجُهَا مِنْ عَدُوهَا. اه قَوْلُهُ لَيْسَ بَيْنَهَا عَدَاوَةً أَي بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَلِيِّ وَالْمُرَادُ بِالطَّهَارَةِ أَنْ يَعْرِفَهَا أَهْلُ تَعَلِّيهِ وَالْبَاطِنَةُ خِلاَفُهَا.

Adapun sekedar rasa benci atau tidak suka si wanita terhadap si pria tanpa bahaya, maka hal tersebut tidak berpengaruh apapun. Namun,

Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.th). Jilid III, h. 308.

Sulaiman al-Jamal, Futuhat al-Wahhab 'ala Fath al-Wahhab, (Beirut: Dar al-Fikr t. th.)
Jilid IV, h. 147-148.

dimakruhkan bagi si wali untuk mengawinkannya dengan pria tersebut, seperti termaktub dalam kitab al-Umm ...

Dan disyaratkan bagi sahnya akad, tidak adanya rasa permusuhan yang jelas dari pihak wali terhadap si wanita, dengan permusuhan yang diketahui penduduk setempat ... Dengan kata permusuhan, maka mengecualikan rasa tidak suka, misalnya karena kikir, buta atau buruk rupa(fisik), maka hukum mengawinkannya hanya makruh. Dalam Syarh al-Raudh Syaikh Zakaria bin Muhammad bin Zakaria al-Anshari berkata: "Tidak perlu menyaratkan tidak adanya rasa permusuhan suami, karena kasih sayang si wali akan membuatnya tidak mengawinkan dengan musuh si calon istri.

(Pernyataan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Tidak ada permusuhan antara si perempuan.") maksudnya antara dia dan walinya. Maksud permusuhan yang tampak adalah yang diketahui penduduk setempat, sedang permusuhan batin adalah sebaliknya.

3. Futuhat al-Wahhab14

Dan antara permusuhan dan kebencian itu dibedakan, yaitu permusuhan adalah yang mendorong kejahatan fisik, sedangkan kebencian adalah permusuhan yang terpendam dalam hati.

166. Pengertian Sekufu yang Menjadi Syarat Sahnya Nikah Paksa

- S. Apa yang dimaksud dengan setingkat (kufu) antara kedua mempelai yang menjadi syarat sahnya nikah paksa? Apakah seorang wanita yang patuh ('afifah) setingkat dengan lelaki pencoleng, sehingga dapat dinikahkan dengan paksa, atau tidak? (Tegal)
- J. Bahwa seorang wanita yang patuh agamanya itu tidak setingkat dengan lelaki pencoleng yang berbuat dosa besar.

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Wahhab15

162

فَلَيْسَ فَاسِقُ كُفْؤَ عَفِيْفَةٍ.

Orang fasik itu tidak sepadan/selevel dengan wanita terhormat.

¹⁴ Sulaiman al-Jamal, Futuhat al-Wahhab 'ala Fath al-Wahhab, (Beirut: Dar al-Fikr t. th.) Jilid V, h. 358.

Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Fath al-Wahhab dalam Muhammad al-Bujairimi, al-Tajrid li Nafi al-'Abid, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1369 H/1950 M), Jilid III, h. 353.

167. Pengertian Mampu Membayar Maskawin dengan Tunai

S. Apa yang dimaksud dengan mampu membayar maskawin (mahar) dengan tunai yang menjadi syarat sahnya nikah? Jejaka lelaki yang tidak mempunyai pekerjaan dan harta, ia menikah menurut perintah orang tuanya dan sewaktu akad tidak mampu membayar maskawin, apakah sah nikahnya ataukah tidak? (Tegal)

J. Sesungguhnya nikahnya jejaka tersebut dalam soal tidak sah menurut pendapat yang mu'tamad oleh Ibn Hajar dan Ramli, tetapi menurut pendapat lain sah, demikian itu apabila nikahnya dengan maskawin tunai, kalau dengan maskawin tempo (nasiah) maka nikahnya sah dengan tidak ada selisih di antara ulama, apabila demikian itu telah menjadi kebiasaan. Keterangan, dari kitab:

1. Tuhfah al-Habib¹⁶

وَقُولُهُ مُعْسِرًا بِالْمَهْرِ أَي بِالْحَالِ دُونَ مَا اعْتِيْدَ تَأْجِيْلُهُ.

Pernyataannya tentang seseorang tidak mampu membayar maskawin, yakni jika dibayar secara kontan dan bukan yang biasa terhutang.

2. Fatawa Ibn Ziyad¹⁷

الْمُعْتَمَدُ فِي الْفَتَاوَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي تَزُونِجِ الْبِكْرِ بِالْإِجْبَارِ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مُوْسِرًا بِمَهْرِ الْمُعْتَمَدُ فِي الْفَقَاوَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي تَزُونِجِ الْمِكْرِ بِالْإِجْبَارِ أَنْ يَكُونَ الزَّوْجُ مُوْسِرًا بِمَهْرِ الْمُعْمَهُ كَلاَمُ الشَّيْخَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ رَجَّحَ ابْنُ حَجَ و م ر وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُ لاَ بُدَّ فِي تَزُونِجِ الْمُجْبِرِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا مِنْ يَسَارِ الزَّوْجِ فَلْتُ رَجَّحَ ابْنُ حَجَ و م ر وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُ لاَ بُدَّ فِي تَزُونِجِ الْمُجْبِرِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا مِنْ يَسَارِ الزَّوْجِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَإِلاَّ لَمْ يَصِحَ النَّكَاحُ فَكَلاَمُ صَاحِبِ الْفَتَاوَى وَمَا بُنِي عَلَيْهِ ضَعِيْفٌ فَتَأَمَّلُهُ

Dan yang menjadi kitab al-Fatawa adalah, sungguh tidak disyaratkan dalam menikahkan gadis secara paksa, si suami berkemampuan membayar mahar mitsli, sebagaimana pendapat yang diunggulkan Imam Zakaria, al-Bulqini, al-Zarkasyi dan al-Qumathi, serta kesimpulan pendapat al-Nawawi dan al-Rafi'i. Menurut pendapatku, sebagaimana yang diunggulkan Ibn Hajar, al-Ramli dan lainnya, bahwa dalam pernikahan secara paksa tanpa izin si wanita, diharuskan dengan seorang suami yang mampu membayar mahar mitsli. Jika si suami tersebut tidak mampu, maka perkawinan itu tidak sah. Dengan demikian, maka pendapat penulis kitab al-Fatawa dan pendapat yang didasarkan padanya adalah pendapat lemah, maka kajilah!

Sulaiman al-Bujairimi, Tuhfah al-Habib, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 H/1951 M), Jilid III, h. 350.

¹⁷ Ibn Ziyad, Talhis al-Murad pada hamisy Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 H/1952 M), h. 39-40.

168. Dalam Akad Nikah Dinyatakan "Kukawinkan Padamu Perempuan Pinanganmu", Padahal Lelaki Tidak Pernah Meminangnya

- S. Bagaimana orang mengucapkan, dalam akad nikah; aku menikahkan padamu akan perempuan pinanganmu, padahal si lelaki (mempelai) tidak pernah meminangnya, apakah sah nikahnya? (Tegal)
- J. Sah nikahnya apabila telah ditentukan dengan nama atau sifatnya, atau dengan menunjuk, atau tidak ditentukan dengan nama atau sifat, tetapi kedua yang berakad mempelai dan wali dalam hatinya telah menentukan. Adapun ucapan pinanganmu, itu dianggap sia-sia (lagha).

Keterangan: dari kitab:

1. Fath al-Mu'in18

Dan (dalam akad nikah) čukup menentukan (calon mempelai wanita) dengan sifat atau isyarat.

2. Tufah al-Muhtaj¹⁹

Maka dengan ungkapanku "Dalam sighat," mengecualikan kinayah dalam wanita yang diakadi, seperti bila seorang ayah beberapa wanita berkata: "Aku nikahkan dirimu dengan salah satunya, anak perempuanku, atau Fatimah, dan keduanya (wali dan mempelai pria) meniati pada perempuan tertentu, meskipun bukan yang disebutkan, maka akad nikah tersebut sah.

169. Mushalla yang Diwakafkan Tidak Bisa Menjadi Mesjid, Kalau Tidak Diniatkan

- S. Bagaimana hukumnya tempat yang diwakafkan untuk sembahyang, apakah tempat itu menjadi mesjid sebagaimana keterangan dalam kitab safinah?
- J. Bahwa tempat itu tidak menjadi mesjid apabila tidak diniatkan menjadi mesjid.

Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in dalam al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.th). Jilid III, h. 280.

¹⁹ Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj dalam Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid VII, h. 262.

Keterangan, dari kitab:

1. Mughni al-Muhtaj20

وَلاَ يَصِحُّ الْوَقْفُ إِلاَّ بِلَفْظِ مِنْ نَاطِقٍ يُشْعِرُ بِالْمُرَادِ إِلَى أَنْ قَالَ: تَنْبِيْهُ يُسْتَثْنَى مِنْ اَشْتِرَاطِ اللَّفْظِ مَا إِذَا بَنَى مَسْجِدًا فِي مَوَاتٍ وَنَوَى جَعْلَهُ مَسْجِدًا فَإِنَّهُ يَصِيْرُ مَسْجِدًا وَلَمْ يَحْتَجَّ إِلَى النَّفْظِ كَمَا قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِي لِأَنَّ الْفِعْلَ مَعَ النَّيَّةِ مُغْنِيَانِ عَنِ الْقَوْلِ. وَوَجَّهَهُ لَفْظِ كَمَا قَالَهُ فِي الْكِفَايَةِ تَبَعًا لِلْمَاوَرْدِي لِأَنَّ الْفِعْلَ مَعَ النَّيَّةِ مُغْنِيَانِ عَنِ الْقَوْلِ. وَوَجَّهَهُ السَّبُكِيّ بِأَنَّ الْمَوَاتِ لَمْ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ مَنْ أَخْيَاهُ مَسْجِدًا وَإِنَّمَا اخْتِيْجَ لِلْفُظِ لِإِخْرَاجِ مَا كَانَ مِلْكَهُ عَنْهُ وَصَارَ لِلْبِنَاءِ حُصِيمُ الْمَسْجِدِ تَبَعًا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَقِيَاسُ ذَلِكَ إِجْرَاؤُهُ فِي عَيْرِ الْمَسْجِدِ أَيْضًا مِنَ الْمَوَاتِ يَدُلُّ لَهُ.

Wakaf itu tidak sah kecuali disertai ucapan (dari yang mewakafkan) yang memberikan pengertian (pewakafan) yang dimaksud ... dikecualikan dari syarat mengucapan, bila seseorang membangun mesjid di lahan bebas, dan ia berniat menjadikannya mesjid, maka bangunan tersebut menjadi mesjid tanpa memerlukan ucapan pewakafan. Hal ini sebagaimana pendapat Ibn Rif'ah dalam kitab al-Kifayah dengan mengikuti al-Mawardi: "Sebab aktifitas membangun disertai niat menjadikannya mesjid sudah mencukupi pewakafan dari pengucapan wakaf. Al-Subki memperkuatnya, bahwa lahan bebas tersebut tidak menjadi milik seseorang yang membukanya sebagai mesjid. Diperlukannya pengucapan wakaf itu untuk mengeluarkan lahan dari kepemilikan seseorang. Dan untuk bangunannya diberlakukan hukum mesjid karena mengikuti lahannya. Al-Isnawi berpendapat: "Dan hukum qiyas kasus tersebut adalah pemberlakuannya pada selain mesjid, yaitu sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, dan selainnya. Pendapat al-Rafi'i dalam bab Ihya al-Mawat juga menunjukkan demikian.

2. I ánah al-Thalibin²¹

(قَوْلُهُ وَرَقَفْتُهُ لِلصَّلاَةِ إِلَخ) أَيْ وَإِذَا قَالَ الْوَاقِفُ وَقَفْتُ هَذَا الْمَكَانَ لِلصَّلاَةِ فَهُوَ صَرِيْحٌ فِيْ مُطْلَقِ الْوَقْفِيَّةِ (قَوْلُهُ وَكِنَايَةٌ فِيْ خُصُوْصِ الْمَسْجِدِيَّةِ فَلاَ بُدَّ مِنْ نِيَّتِهَا) فَإِنْ نَوَى الْمَسْجِدِيَّةَ صَارَ مَسْجِدًا وَإِلاَّ صَارَ وَقْفًا عَلَى الصَّلاَةِ فَقَطْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْجِدًا كَالْمَدْرَسَةِ.

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Saya mewakafkannya untuk shalat."), yakni jika si pewakaf berkata: "Saya wakafkan tempat ini untuk

Muhammad al-Khathib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj 'ala al-Minhaj, (Beirut: Dar al-Fikr, 1424 H/2003 M), Jilid II, h. 517.

²¹ Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.th). Jilid III, h. 160.

shalat." Maka ucapan itu termasuk sharih (jelas) dalam kemutlakan wakaf. (Ungkapan beliau: "Dan kinayah dalam kekhususannya sebagai mesjid, maka harus ada niat menjadikannya mesjid.") Jika ia berniat menjadikan mesjid, maka tempat tersebut menjadi mesjid. Jika tidak, maka hanya menjadi wakaf untuk shalat saja, dan tidak menjadi mesjid seperti sekolahan.

170. Kawin yang Dipaksa, Sebab Berbuat Zina

- S. Apakah sah nikah yang dipaksa polisi karena berbuat zina? Atau tidak sah? Karena nikahnya itu tidak dengan keinginannya sendiri. (Tegal)
- J. Tidak sah nikahnya, apabila pemaksaannya memenuhi syarat, menurut ahli fiqh, atau diperintah hakim, walaupun tidak ditakuti, karena syarat sahnya nikah, harus dengan kemauan si calon suami.

Keterangan, dari kitab:

1. Tanwir al-Qulub 22

Maka si suami harus dalam keadaan bisa memilih. Tidak sah pernikahan orang yang dipaksa.

2. Bughyah al-Mustarsyidin²³

Jika seseorang diperintahkan hakim untuk thalaq lalu ia menjatuhkan thalaq, maka thalaqnya tidak sah, meskipun hakim itu tidak mengintimidasinya. Dan tidak berbeda antara hakim yang berkemampuan memaksa secara fisik atau tidak, karena yang kasus itu termasuk pemaksaan syar'i.

171. Ongkos Sewa untuk Pasar Malam, Dipergunakan untuk Biaya Asrama Yatim Piatu

- S. Apakah ongkos sewa tempat untuk melihat sepak bola atau pasar malam, atau ongkos sewa tanah, halal dipergunakan untuk perongkosan asrama yatim piatu atau fakir miskin? (Tegal)
- J. Apabila kita menetapkan haramnya sepak bola dan pasar malam atau tonil, maka kita menetapkan haramnya uang ongkos sewa tersebut,

- 166

Muhammad Amin al-Kurdi, Tamwir al-Qulub, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 312.

Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 H/1952 M)), h. 231.

walaupun digunakan untuk asrama yatim piatu atau fakir miskin, karena mengingat kaidah menjauhi maksiat didahulukan dari mencari kebaikan. Lihat keputusan Muktamar ke-10 nomor 160.

172. Orang Shalat di Dekat Ka'bah Harus Benar-benar Menghadap Ka'bah

- S. Kalau seseorang bermazhab Syafi'i juga mengerti kewajiban menghadap Ka'bah, apakah boleh bersembahyang dengan menghadap jihah, seperti bersembahyang menghadap ke barat benar, tidak sedikit ke arah utara? Dan apakah tidak sebaiknya mesjid-mesjid yang tidak benar kiblatnya diberi tanda kiblat yang benar.
- J. Kalau orang bersembahyang itu di dekat Ka'bah yang bisa melihat atau menyentuh Ka'bah, maka tidaklah sah sembahyangnya bila tidak benarbenar menghadap Ka'bah, begitu pula bagi orang-orang yang berkuasa ijtihad kiblat dengan tanda-tanda yang sah dan ia sengaja mengikuti pendapat yang diperbolehkan menghadap jihah, maka sembahyangnya tidak sah. Kemudian Muktamar menyatakan baik memberi tanda kiblat yang benar untuk mesjid-mesjid yang kurang benar kiblatnya.

Keterangan, dari kitab:

1. Bughyah al-Mustarsyidin²⁴

(Kasus dari al-Kurdi) Pendapat yang unggul adalah sungguh harus menghadap wujud kiblat (ka'bah), walaupun bagi orang yang berada di luar Makkah. Maka harus bergeser sedikit dalam shaf yang panjang sekiranya seseorang menyangka dirinya telah sejajar dengan kiblat (ka'bah) dalam keadaan jauhnya.

2. Ketetapan Muktamar²⁵

Dan mu'tamar menilai baik pemberian tanda pada mesjid yang jauh dari Ka'bah dengan tanda yang dapat menunjukkan ke arah wujud kiblat.

Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 H/1952 M)), h. 39.

²⁵ Ketetapan Muktamar Ke-9, Nomor 150.

2. Bughyah al-Mustarsyidin²⁶

تَحَلُّ الاَكْتِفَاءِ بِالْحِيِّةِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِأَدِلَّةِ الْعَيْنِ إِذِ الْقَادِرُ عَلَى الْعَيْنِ إِنْ فُرِضَ حُصُولُهُ بِالْإِجْتِهَادِ لاَ يُجْزِيْهِ اسْتِقْبَالُ الْجِهَّةِ قَطْعًا وَمَا حَمَلَ الْقَائِلُونَ بِالْجِهَّةِ عَلْمًا وَمَا حَمَلَ الْقَائِلُونَ بِالْجِهَّةِ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ كَوْنَهُمْ رَأُوا أَنَّ اسْتِقْبَالَ الْعَيْنِ بِالْجِهَّةِ مُتَعَدِّرٌ.

Kondisi cukup menghadap arah (ka'bah ke barat saja misalnya) adalah saat tidak mengetahui tanda-tanda arah ka'bah. Karena orang yang mampu mengetahui ka'bah bila diandaikan bisa dihasilkan dengan berijtihad, maka ia tidak cukup menghadap arah saja secara pasti (tanpa khilafiyah). Tidak ada yang mendorong ulama yang membolehkan menghadap ke arah ka'bah melainkan mereka memandang bahwa menghadap ka'bah dengan berijtihad itu sulit dilakukan.

173. Pindah dari Thariqah ke Thariqah Lain

- S. Apakah boleh bagi murid Thariqah Naqsabandi pindah ke thariqat lain seperti syaratnya atau lain-lain? Dan apakah boleh orang ahli thariqah mengusir orang-orang dari mesjid untuk dipergunakan tawajuh (menjalankan wirid) dalam mesjid itu? (Kroya)
- J. Adapun pindah dari suatu thariqah ke thariqah lain itu boleh asal dapat mengikuti semua syarat yang ditentukan. Adapun mengeluarkan orang-orang dari mesjid, apabila mesjid itu ditentukan wakafnya untuk para ahli thariqah, atau dengan keridhaan orang-orang yang dikeluarkan, maka tidak dilarang mengeluarkan itu. Tetapi kalau mesjid itu tidak ditentukan wakaf khusus untuk para ahli thariqah, dan tidak dengan keridhaan orang-orang yang dikeluarkan, maka hukumnya haram mengeluarkan orang-orang itu.

Keterangan, dari kitab:

1. Majmu'ah al-Rasa'il 27

اِعْلَمْ أَنَّ الطَّرِيْقَةَ الْمَشْهُوْرَةَ الْمُعَنْعَنَةَ الْوَاصِلَةَ مِنَ السَّلَفِ إِلَى الْخَلَفِ كَالْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ الْمَقْبُوْلَةِ يَجُوْرُ الْإِنْتِقَالُ مِنْ مَذْهَبِ إِلَى مَذْهَبِ آخَرَ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَلْفِيْقِ لِلْعَاتِي، وَكَذَلِكَ الْمَقْبُولَةِ يَجُورُ الْإِنْتِقَالُ مِنْ طَرِيْقَةٍ إِلَى طَرِيْقَةٍ أُخْرَى بِشَرْطِ الْوَفَاءِ فِيْمَا دَخَلَ فِيْهِ وَالاسْتِقَامَةِ بِأَدَابِهِ.

168

Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 H/1952 M)), h. 39-40.

²⁷ Sulaiman al-Zuhdi al-Naqsyabandi, Majmu'ah al-Rasa'il.

Ketahuilah, sesungguhnya thariqah yang termasyhur dengan sanad yang bersambung dari ulama salaf ke khalaf (antar generasi sampai ke Nabi) adalah sama seperti empat mazhab yang diterima oleh umat Islam (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali). Boleh berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain secara bebas, tanpa talfiq bagi orang awam. Demikian pula boleh berpindah dari satu thariqah ke thariqah lain dengan syarat mampu memenuhi segala aturan dan konsisten dengan adab thariqah yang ia masuki.

2. I'anah al-Thalibin²⁸

(أَواخْتِصَاصِ) أَي أَوْ كَشَرْطِ اخْتِصَاصٍ مِنْ نَخْوِ مَسْجِدٍ بِطَاثِفَةٍ كَشَافِعِيَّةٍ فَلاَ يُصَلِّى وَلاَ يَغْتَكِفُ بِهِ غَيْرُهُمْ رِعَايَةً لِغَرَضِهِ وَإِنْ كُرِهَ هَذَا الشَّرْطُ.

Atau seperti syarat khusus misalnya mesjid hanya untuk golongan Syafi'i, maka selain mereka tidak boleh shalat dan i'tikaf di mesjid tersebut demi menjaga tujuan dari persyaratan tersebut, walaupun syarat seperti ini hukumnya makruh.

3. Mughni al-Muhtaj²⁹

(وَ) الْأَصَةُ (أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ) الْيَدَاءُ (فِي وَقْفِ الْمَسْجِدِ) بِأَنْ وَقَفَ شَخْصٌ مَكَانَا مَسْجِدًا وَشَرَطَ فِيهِ (اخْتِصَاصَهُ بِطَائِفَةٍ كَالشَّافِعِيَّةِ اُخْتُصً) بِهِمْ أَيْ اثَّيِعَ شَرْطُهُ كَمَا فِي الْمُحَرَّدِ كَالرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فَلَا يُصَلِّي وَلَا يَعْتَكِفُ فِيهِ عَيْرُهُمْ (كَالْمَدْرَسَةِ وَالرَّبَاطِ) إِذَا شَرَطَ فِي وَقْفِهِمَا اخْتِصَاصَهُمَا بِطَائِفَةٍ فَلَا يُصَلِّي وَلَا يَعْتَكِفُ فِيهِ عَيْرُهُمْ (كَالْمَدْرَسَةِ وَالرِّبَاطِ) إِذَا شَرَطَ فِي وَقْفِهِمَا اخْتِصَاصَهُمَا بِطَائِفَةٍ الْحَتُصَا الْمَسْجِدُ بِهِمْ لِأَنَّ جَعْلَ الْبُقْعَةِ مَسْجِدًا كَالتَّحْرِيرِ فَلَا مَعْنَى لِخَتَصَاصِهِ بِجَمَاعَةٍ وَلَوْخَصَّ الْمَشْجِدُ بِهِمْ لِأَنَّ جَعْلَ الْبُقْعَةِ مَسْجِدًا كَالتَّحْرِيرِ فَلَا مَعْنَى لِاخْتِصَاصِهِ بِجَمَاعَةٍ وَلَوْخَصَّ الْمَقْبَرَةَ بِطَائِفَةٍ الْخُتُصَّتْ بِهِمْ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ

Pendapat yang lebih sahih adalah jika disyaratkan sejak semula dalam mewakafkan mesjid, seperti seseorang yang mewakafkan suatu tempat untuk dijadikan mesjid dan menyaratkan penggunaanya khusus untuk satu golongan seperti Syafi'i, maka mesjid itu menjadi khusus hanya untuk mereka. Yakni, persyaratannya itu diikuti, sebagaimana dalam kitab al-Muharrar, al-Raudhah dan asalnya. Maka selain mereka tidak boleh shalat dan i'tikaf di mesjid itu. Seperti halnya sekolah dan pemondokan, jika dalam pewakafannya disyaratkan secara khusus hanya untuk golongan tertentu saja, maka hanya untuk mereka saja, seperti pendapat al-Imam al-Haramain.

²⁸ Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.th). Jilid III, h. 169.

Muhammad al-Khathib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Fikr, 1423 H/2003 M), Cet. Ke-1, Jilid II, h. 522.

Sedangkan menurut pendapat kedua, mesjid tersebut tidak dikhususkan untuk mereka saja, karena menjadikan sesuatu tempat sebagai mesjid sama seperti membebaskannya (menjadi tidak bertuan), sehingga tidak 'illat (dasar hukum) yang mengkhususkannya untuk kelompok tertentu saja. Menurut pendapat kebanyakan ulama, kalau seseorang mengkhususkan suatu kuburan untuk golongan tertentu, maka kuburan itu hanya untuk mereka saja.

174. Nikah Secara Tahlil dengan Sengaja Akan Dicerai Sesudah Bersetubuh

- S. Apakah sah nikah karena tahlil (memperoleh perkembangan pada istri yang telah dicerai tiga kali ba'in) dengan sengaja akan dicerai setelah bersetubuh? Atau tidak? (Solo)
- J. Sahlah nikahnya, tapi makruh apabila sewaktu nikah tidak dijanjikan bercerai di dalam akad, kalau dijanjikan demikian, maka hukumnya tidak sah, karena termasuk nikah sementara (mut'ah).

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah al-Syarqawi³⁰

Seperti pernikahan *muhallil* (orang yang menikahi wanita yang sudah dithalaq tiga oleh suami pertamanya) yang menikahinya agar suami pertamanya yang itu bisa menikahinya kembali setelah dithalaq (oleh si *muhallil*) dengan persyaratannya. Jika si *muhallil* tersebut menikahinya dengan syarat telah menyetubuhinya maka ia harus mencerainya, maka pernikahannya menjadi batal, karena yang demikian itu termasuk nikah *mut tah* (kawin kontrak).

175. Menyerahkan Zakat kepaca Salah Seorang Pezakat

- S. Apakah orang yang mengeluarkan zakat, boleh mengambil zakat dari amil dengan atas nama peminjam (ghurama')? (Banyuwangi)
- J. Boleh mengambil zakat dari amil, asal ia termasuk salah seorang yang berhak menerima zakat.

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Mu'in³¹

170

³⁰ Abdullah ai Syarqawi, Hasyiyah al-Syarqawi 'ala al-Tuhfah, (Indonesia: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), Jilid II, h. 245.

وَالْمِسْكِيْنُ مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ أَوْ كُسْبٍ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِ وَلاَ يَكْفِيْهِ كُمَنْ يَحْتَاجُ لِعَشْرَةِ وَعِنْدَهُ ثَمَانِيَةً.

Dan orang miskin itu adalah orang yang punya harta atau pekerjaan namun tidak cukup memenuhi kebutuhannya, seperti orang yang butuh sepuluh sementara ia hanya mempunyai delapan.

176. Memindahkan Zakat ke Dalam Batas Kota

S. Seseorang di dalam batas kota, memberikan zakatnya kepada orang yang di luar batas kota, termasuk memindahkan zakat, atau tidak? Dan orang yang datang dari bepergian, kemudian sewaktu matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan, ia belum datang di tempatnya (di luar batas kota), bolehkah ia memberikan fitrahnya kepada mustahiqqin di tempatnya? (Kudus)

J. Bahwa menerimakan zakat kepada *mustahiqqin* di luar batas kota, bagi orang-orang yang berada di kota, itu termasuk memindahkan zakat ke lain tempat. Adapun orang yang sewaktu matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan belum sampai di tempatnya, maka ia wajib memberikan zakat fitrahnya kepada *mustahiqqin* yang berada di tempat ia berada waktu itu termasuk orang yang berkewajiban zakat fitrah, karena ia mempunyai kelebihan untuk keperluan sehari semalamnya.

Apabila ia memberikan zakat fitrahnya kepada *mustahiqqin* yang berada di tempatnya, maka termasuk memindahkan zakat, yang tidak sah menurut kebanyakan ulama (*jumhur*), yaitu *Qaul Azhhar* dari beberapa *Qaul* Imam Syafi'i Ra., dan sah menurut beberapa ulama yang memperbolehkan memindahkan zakat.

Keterangan, dari kitab:

1. Bughyah al-Mustarsyidin³²

الرَّاجِعُ فِي الْمَذْهَبِ عَدَمُ جَوَازِ نَقْلِ الزَّكَاةِ وَاخْتَارَ جَمْعُ الْجُوَازَ كَانْنِ عُجَيْلٍ وَابْنِ الصَّلاَجِ وَغَيْرِهِمَا قَالَ أَبُوْ مَخْرَمَةَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ إِذَا كَانَ لِنَحْوِ قَرِيْبٍ وَاخْتَارَهُ الرَّوْيَانِيّ وَنَقَلَهُ الْخَطَّابِيُّ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَتِيْقٍ فَيَجُوْزُ تَقْلِيْدُ هَوُّلاَءِ

(مَسْأَلَةٌ ي ك) لاَ يَجُوْزُ نَقْلُ الزَّكَاةِ وَالْفِطْرَةِ عَلَى الْأَظْهَرِ مِنْ أَقْوَالِ الشَّافِعِيّ نَعَمْ اُسْتُثْنِيّ فِي

Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in dalam al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.th). Jilid II, h. 188-189.

Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 H/1952 M)), h. 105.

التُّحْفَةِ وَالنَّهَايَةِ مَا يُقُرُبُ مِنَ الْمَوْضِعِ وَيُعَدُّ مَعَهُ بَلَداً وَاحِدًا وَإِنْ خَرَجَ عَنِ السُّوْرِ. زَادَك وح. فَالْمَوْضِعُ الَّذِيْ حَالَ الْحُوْلُ وَالْمَالُ فِيْهِ هُوَ مَحَلُّ إِخْرَاجُ زَكَاتِهِ هَذَا إِنْ كَانَ قَارًا بِبَلَدٍ وَإِنْ كَانَ سَائِرًا وَلَمْ يَكُنْ خَوْلُ اللّهِ مَعَهُ جَازَ تَأْخِيْرُهَا حَتَّى يَصِلَ إِلَيْهِ وَالْمَوْضِعُ الَّذِيْ غَرُبَتْ الشَّمْسُ وَالشَّخْصُ بِهِ هُوَ مَحَلُّ إِخْرَاجٍ فِطْرَتِهِ.

Pendapat mazhab (Syafi'i) yang unggul tidak boleh memindah zakat ke (daerah lain). Sekelompok ulama memilih diperbolehkan pemindahan zakat seperti pendapat Ibn 'Ujail dan Ibn al-Shalah. Menurut Ibn Makhramah itulah pendapat yang terpilih ketika zakat diberikan kepada semisal kerabat. Pendapat tersebut dipilih pula oleh al-Rauyani. Al-Khaththabi menukilnya dari mayoritas ulama, dan Ibn 'Atiq juga berpendapat seperti itu. Maka boleh mengikuti mereka itu.

Menurut salah satu pendapat Imam Syafi'i yang lebih kuat (al-Azhhar), tidak diperkenankan memindahkan zakat (mal) dan fitrah. Dalam kitab Tuhfah dan Nihayah terdapat pengecualian untuk tempat yang berdekatan dan masih dianggap satu daerah walaupun di luar perbatasan. Al-Qurdi dan seorang ulama menambahkan: "Oleh sebab itu, tempat harta mencapai haul dan harta itu di situ, maka menjadi tempat pengeluaran zakatnya. Hal ini jika si pemilik menetap di suatu tempat, sedangkan ia bepergian dan tidak ada harta yang bersamanya, maka boleh menunda zakat hingga sampai ke tempatnya. Dan tempat terbenamnya matahari sementara seseorang berada di situ, maka tempat itu merupakan tempat zakat fitrahnya.

177. Melihat Barang yang Dijual dengan Memakai Kacamata

S. Apakah cukup melihat barang yang dijual (mabi') dengan memakai kacamata, atau tidak? (Kudus)

J. Tidak cukup melihat barang yang dijual, apabila dilihat dengan kacamata itu mengubah macamnya barang yang dijual daripada dilihat dengan mata biasa, dan tidak sah penjualan itu, karena kurang sempurnanya melihatnya.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah al-Syarqawi³³
 وَتَكْفِى رُؤْيَةُ الْمَبِيْعِ أَي وَإِنْ رَأَى مِنْ كَوَّةٍ لاَ مِنْ وَرَاءِ الزُّجَاجِ كَالْأَلَةِ الْمُسَمَّى بِالْعُيُوْنِ.

³³ Abdullah al-Syarqawi, Hasyiyah al-Syarqawi 'ala Tuhfah al-Thullab, (Indonesia: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), Jilid II, h. 16.

Cukup melihat barang yang dijual, yakni walaupun melihatnya dari lobang dan bukan dari balik kaca seperti peralatan yang disebut dengan 'uyun (kaca mata).

178. Bersentuhan Kulit Laki-laki dengan Kulit Perempuan Lain Tanpa Beraling-aling

- S. Apakah batal wudhu seseorang yang bermazhab Syafi'i karena menyentuh perempuan lain? Karena di antara orang tertentu, mengatakan tidak batal? (Boyolali)
- J. Sesungguhnya bersentuhan kulit lelaki dengan kulit perempuan lain (tidak mahram) dengan tidak beraling-aling itu membatalkan wudhu, menurut madzhab Syafi'i dengan tidak ada selisih di antara ulama Syafi'i. *Keterangan*, dari kitab:
- 1. Fath al-Mu'in34

Dan yang keempat (yang membatalkan wudhu) adalah bertemunya dua kulit pria dan wanita, walaupun tanpa syahwat, dan salah satu dari keduanya dalam keadaan dipaksa atau menjadi mayat.

179. Qadha Shalat dan Puasa Oleh Orang Lain yang Masih Ada Hubungan Famili atau Diizini Famili Mayat

- S. Seseorang meninggal dunia, masih meninggalkan qadha shalat dan puasa Ramadhan. Apakah selain putranya boleh mengerjakan qadha salat atau puasa? Kalau boleh apakah putra-putranya juga masih boleh mengerjakan qadha itu, walaupun telah dikerjakan oleh orang lain? (Boyolali)
- J. Qadha itu boleh dikerjakan oleh orang lain, apabila masih ada hubungan famili atau izin famili. Apabila qadha itu telah dikerjakan, maka tidak boleh dikerjakan lagi oleh salah satu putra-putranya, setelah berkeyakinan bahwa si mayat itu tidak mempunyai qadha.

Keterangan, dari kitab:

1. Tarsyih al-Mustafidin³⁵

وَمَتَى أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ مَعَ تَمَكُّنِهِ حَتَّى دَخَلَ آخَرُ فَمَاتَ أُخْرِجَ مِنْ تِرْكَتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدَّانِ. مُدُّ لِلْفَوَاتِ وَمُدُّ لِلتَّأْخِيْرِ إِنْ لَمْ يَصُمَّ عَنْهُ قَرِيْبُهُ أَوْ مَأْذُوْنُهُ ...إِلَى أَنْ قالَ (فَائِدَةُ)

35 Alawi al-Saqqaf, Tarsyih al-Mustafidin, (Indonesia: al-Haramain, t.th.), h. 122.

Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in dalam al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, l'anah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.th). Jilid I, h. 64.

وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلاَةً فَلاَ قَضَاءَ وَفِدْيَةً وَفِيْ قَوْلٍ كَجَمْعِ مُجْتَهِدِيْنَ أَنَّهَا تُقْضَى عَنْهُ لِخَبْرِ الْبُخَارِيّ وَغَيْرِهِ وَمِنْ ثَمَّ اخْتَارَهُ جَمْعٌ مِنْ أَثِمَّتِنَا وَفَعَلَ بِهِ السُّبُكِيُّ عَنْ بَعْضِ أَقَارِبِهِ.

Bila mengakhirkan qadha (berpuasa sebagai tebusan dari puasa yang ditinggalkan sebelumnya) Ramadhan, padahal ia mampu untuk melaksanakannya sampai masuk Ramadhan berikutnya, maka harus dikeluarkan dari harta warisannya setiap hari (dari hitungan puasa yang ditinggalkan) dua mud, satu mud (6 ons beras) sebagai karena tidak puasanya pada waktunya dan satu mud lagi karena menunda qadhanya, jika memang tidak ada kerabatnya atau orang lain yang diizinkannya untuk melaksanakan qadha tersebut ... Barang siapa meninggal dunia dengan meninggalkan hutang shalat, maka tidak perlu diqadha dan membayar fidyah. Dan dalam satu pendapat, seperti kalangan ulama ahli ijtihad, shalat tersebut boleh diqadha oleh orang lain berdasar hadits riwayat Bukhari dan lainnya. Oleh sebab itu, sekelompok imam madzhab kita (Syafi'iyah) memilih pendapat tersebut, dan al-Subki melakukannya untuk menggadha sebagian kerabatnya.

2. Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah³⁶

فَإِنْ لَمْ يَظُنَّ أَنَّ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَلاَ شَكَّ فِيْهِ فَنِيَّةُ الْقَضَاءِ بَاطِلَةٌ.

Jika tidak ada dugaan bahwa yang meninggal itu punya kewajiban untuk mengqadha dan tidak ada keraguan sedikitpun kepadanya, maka niat untuk mengqadha tersebut batal.

180. Shalat Tarawih Bermakmum Kepada Imam yang Fasik

- S. Sahkah salat tarawih bermakmum pada imam yang biasa meninggalkan shalat fardhu? Atau tidak? (Boyolali)
- J. Sah bermakmum pada orang yang demikian, tetapi makruh karena ia fasik dengan membiasakan meninggalkan shalat *fardhu*, dan ia (imam) haram mengerjakan shalat seperti tarawih dan lain-lain.

Keterangan, dalam kitab:

1. Fath al-Mu'in³⁷

(وَكُرِهَ) اقْتِدَاءُ (بِفَاسِقٍ وَمُبْتَدِعٍ)

³⁶ Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1493 H/1984 M), Jilid II, h. 90.

³⁷ Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in pada l'anah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.th). Jilid II, h. 47.

Makruh makmum di belakang orang fasik dan pelaku bid'ah.

2. I'anah Thalibin38

Dan orang yang mempunyai kewajiban qadha shalat fardhu tanpa udzur haram shalat sunah, maksudnya besertaan keabsahannya.

181. Hasil Barang Gadaian Dipakai Beramal Saleh

- S. Kalau membeli tanah dari uang penghasilan barang gadaian, kemudian penghasilan tanah diperuntukkan beramal pada orang-orang miskin, apakah penghasilan itu haram? Atau tidak? (Boyolali)
- J. Kalau penghasilan dari barang gadaian (marhun) itu halal seperti gadaian yang tidak dijanjikan dalam akad (lihat putusan Muktamar ke IV nomor 69), maka pembeliannya juga sah dan amalnya pada para orang miskin juga halal. Sebaliknya, kalau barang gadaian itu haram, karena dijanjikan dalam akad, atau mengikuti pendapat mengharamkan, yaitu yang lebih berhati-hati (sebagaimana dalam putusan Muktamar ke II, jika pembeliannya dengan tempo atau dengan kontan, tetapi si penjual telah mengetahui bahwa uang pembeliannya dari uang haram), maka juga sah pembeliannya dan amalnya pun halal. Kalau pembeliannya kontan dan si penjual tidak mengerti bahwa uang itu haram, maka tidak sah pembeliannya dan haram amalnya pada para miskin itu.

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Mu'in³⁹

Jika seseorang membeli makanan yang berada dalam jaminan dan membayar dengan uang haram, jika si penjual menyerahkan padanya dengan ridhanya sebelum pembayaran harga, maka pembeli halal memakannya, atau sesudah pembayaran besertaan si penjual tahu uang itu haram, maka juga halal. Jika tidak, maka haram sampai si penjual membebaskannya atau si pembeli membayarnya dengan uang halal. []

³⁸ Abu Bakar bin Muhammad Syaththa al-Dimyathi, l'anah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th). Juz I, h. 23.

³⁹ Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in pada l'anah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.th). Jilid III, h. 9.

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-11 Di Banjarmasin Pada Tanggal 19 Rabiul Awwal 1355 H./9 Juni 1936 M.

182. Lelaki Memulai Salam Kepada Perempuan 183. Orang yang Telinganya Bersuara *Nging* 184. Perbedaan antara Al-Qur'an dan Hadis Qudsi 185. Shalat Ghaib untuk Mayit yang Berada dalam Negerinya 186. Organisasi yang Melarang Meminjamkan Hak Miliknya Kecuali pada Anggotanya

187. Doa dari Nabi dengan *Sighat Jama'* Diubah *Mufrad* 188. Kentongan dan Bedug yang Dipukul untuk Memberitahukan Waktu Shalat

189. Menyerahkan Kurban Tanpa Wakil 190. Memberi Ongkos Pengetam Hasil Pengetaman 191. Berhukum Langsung dengan al-Qur'an dan Hadis Tanpa Memperhatikan Kitab Fiqh yang Ada 192. Nama Negara Kita Indonesia

193. Nazhir Mesjid Membeli Tegel Kembang untuk Mesjid, dengan Uang yang Diwakafkan untuk Mesjid 194. Memindah Bagian dari Mesjid

195. Mengulang Bacaan Alhamdulillah Oleh Khatib 196. 'Iddahnya Perempuan yang Belum Sampai Tahun Lepas dari Haid yang Lalu

182. Lelaki Memulai Salam Kepada Perempuan

- S. Apakah sunnah bagi laki-laki memulai salam kepada orang perempuan, apakah tafsilnya?
- J. Sunnah bagi lelaki mulai memberi salam kepada perempuan, apabila si perempuan itu istrinya sendiri, atau ada hubungan mahram atau jariyahnya, atau nenek-nenek yang telah lanjut, dan tidak menimbulkan asmara, atau kepada wanita yang baik-baik perbuatannya. Dan makruh mulai salam dengan perempuan yang masih menimbulkan asmara dan tidak berombongan, dengan wanita-wanita yang baik perbuatan, dan tidak pula disertai para lelaki. Dan boleh mulai salam, apabila pemberi salam berombongan dengan lelaki, walaupun si perempuan tidak berombongan dengan para wanita yang baik perbuatannya.

Keterangan, dari kitab:

1. I'anah al-Thalibin1

مَسْنُونُ سَلاَمُ امْرَأَةٍ عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ نَحْوِ مَحْرَمِ أَوْ سَيِّدٍ أَوْ زَوْجٍ وَكَذَا عَلَى أَجْنَبِيٍّ وَهِيَ عَجُوزُ لاَ تُشْتَهَى وَيَلْزَمُهَا فِي هَذِهِ الصُّورِ رَدُّ سَلاَمِ الرَّجُلِ أَمَّا مُشْتَاهَةُ لَيْسَ مَعَهَا امْرَأَةُ أُخْرَى فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا رَدُّ سَلاَمِ أَجْنَبِيٍّ وَمِثْلُهُ ابْتِدَائُهُ، وَيُحْرَهُ رَدُّ سَلاَمِهَا وَمِثْلُهُ ابْتِدَائُهُ أَيْضًا. وَالْفَرْقُ أَنَّ رَدَّهَا وَابْتِدَائَهَا يُطْمِعُهُ. وَلَوْ سَلَّمَ عَلَى جَمْعِ نِسْوَةٍ وَجَبَ رَدُّ إِحْدَاهُنَّ إِذْ لاَ يَخْشَى فِنْنَةً حِيْنَفِذٍ. وَقَوْلُهُ رَدُّ سَلاَمِ الرَّجُلِ أَي إِذَا سَلَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهَا وَهِيَ عَجُوزُ لاَ تُشْتَهَى لَوْمَهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ سَلاَمَهُ عَلَيْهَا مَسْنُونٌ كَسَلاَمِهَا عَلَيْهِ.

Disunatkan wanita memberi salam kepada wanita lain, mahramnya, majikannya, atau suaminya. Demikian juga kepada pria lain, sementara si wanita tersebut sudah tua dan tidak menimbulkan syahwat. Dalam contoh seperti ini, wajib menjawab salam dari pria tersebut. Adapun jika wanita tersebut masih menimbulkan gairah syahwat, sementara tidak ada wanita lain yang menyertainya, maka ia haram menjawab salam dari pria lain, demikian pula memulai salam. (Bagi laki-laki) makruh menjawab salam dari wanita tersebut, demikian pula memulai memberi salam.

Perbedaannya adalah, bahwa jawaban salam wanita dan memulainya dapat membangkitkan gairah laki-laki terhadap wanita tersebut. Andaikan

Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t .th). Jilid IV, h. 185. Dikemukakan juga dalam Muhyiddin al-Nawawi, al-Adzkar dan Abdul Hamid al-Syirwani dalam Hasyiyah al-Syirwani.

ada pria memberi salam kepada sekelompok wanita, maka salah satu dari mereka harus menjawabnya. Sebab, dalam hal ini tidak dikhawatirkan adanya fitnah.

Jika seorang laki-laki memberi salam kepada wanita yang sudah tua dan tidak menimbulkan syahwat, maka wanita tersebut harus menjawab salamnya, karena salam pria kepada wanita tersebut hukumnya sunah, demikian halnya salam wanita tersebut kepada pria.

2. Mughni al-Muhtaj2

Tidak makruh menjawab salam bagi sekelompok wanita atau yang sudah tua karena tidak ada kekhawatiran timbulnya fitnah, bahkan disunatkan memulai salam oleh sekelompok wanita tersebut kepada selain mereka, dan demikian pula sebaliknya.

183. Orang yang Telinganya Bersuara Nging

- S. Apakah sebab musababnya telinga bersuara nging? Karena musababnya ada yang mengatakan dengan tidak berpedoman, bertahayul dan sangkaan jelek terhadap hal itu keterangan yang jelas, agar mohon dapat mengetahui yang sebenarnya dan jelas.
- J. Sesungguhya suara "nging" dalam telinga itu Rasulullah Saw. menyebut orang yang telinganya bersuara, dalam perkumpulan yang tertinggi (mala' al-a'laa) dan supaya ia ingat pada Rasulullah Saw. dan membaca shalawat. Keterangan, dari kitab:
- 1. Al-Siraj al-Munir³

قَالَ ﷺ إِذَا طَنَتْ أُذُنُ أَحَدِكُمْ فَلْيَذْكُرْنِيْ وَلْيُصَلِّ عَلَيَّ وَلْيَقُلْ ذَكَرَ اللَّهُ مَنْ ذَكَرَنِيْ بِخَيْرٍ. قَالَ الْمُنَاوِيُّ فَإِنَّ الْأَذُنَ إِنَّمَا تَطُنُّ لَمَّا وَرَدَ عَلَى الرُّوْجِ مِنَ الْحَبْرِ الْخَيْرِ وَهُوَ أَنَّ الْمُصْطَفَى ﷺ قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ جِنَيْرٍ فِي الْمَلاَءِ الأَعْلَى فِيْ عَالَمِ الْأَرْوَاجِ.

Jika telinga salah seorang kalian berdengung, maka hendaknya ia mengingat aku (Rasulullah Saw.) dan membaca shalawat kepadaku

² Muhammad al-Khathib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Fikr, 1424 H/2003 M), Jilid IV, h. 267.

³ Ali al-Azizi, al-Siraj al-Munir, (Mesir, Musthafa al-Halabi, 1377 H/1957 M), Cet. Ke-3, Jilid I, h. 156.

serta mengucapkan: اَكُرُاللَهُ مَنْ ذَكُرُنْ بِخَيْنٍ اللهُ مَنْ ذَكُرُنْ بِخَيْرٍ Allah akan mengingat yang mengingatku dengan kebaikan. Imam al-Munawi berkata, sesungguhnya telinga itu berdengung hanya ketika datang berita baik ke ruh, bahwa Rasasulullah Saw. telah menyebutkan orang (pemilik telinga yang berdengung) tersebut dengan kebaikan di al-Mala' al-A'la (majlis tertinggi) di alam ruh.

184. Perbedaan antara Al-Qur'an dan Hadis Qudsi

- S. Apa perbedaan antara al-Qur'an, hadits Nabi, dan hadits qudsi? Dan apa hikmahnya mengingat al-Qur'an itu dari Allah, begitu pula hadits, karena Rasulullah Saw. tidak akan berkata, kecuali dari wahyu yang diterimanya?
- J. Perbedaan: Bahwa al-Qur'an itu diturunkan dengan lafazh dan artinya, yang dapat pahala membacanya, dan manusia tidak dapat meniru menyusun seperti itu, walaupun berupa sesurat yang pendek. Adapun hadits qudsi, yaitu wahyu yang diterima Rasulullah Saw., tidak dengan perantara malaikat menurut kebiasaan, tetapi dengan ilham atau mimpi, adakalanya diterima lafazh dan artinya, dan adakala hanya artinya saja. Kemudian Rasulullah Saw. menyusun ibaratnya dan dilakukan kepada Allah, dan tidak menjadi ibadah membacanya. Adapun hadits Nabawi, yaitu yang diwahyukan artinya, dan disusun ibaratnya oleh Nabi, dengan tidak dilakukan kepada Allah. Yang termulia dari tiga itu adalah al-Qur'an, kemudian hadits qudsi, lalu hadits Nabawi.

Keterangan, dari kitab:

1. Tanwir al-Qulub4

Perbedaan antara al-Qur'an dan hadits qudsi serta hadits Nabi adalah, bahwa al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Saw. dengan lafazh dan maknanya,

⁴ Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir al-Qulub fi Mu'amalat al-'Allam al-Ghuyub, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), h. 475.

membacanya dinilai ibadah, dan mengandung mu'jizat yang melemahkan semua makhluk untuk bisa membuat padanan surat yang paling pendek dari padanya.

Sedangkan hadits qudsi, diturunkan kepada Nabi Saw. biasanya tanpa melalui perantaraan malaikat, namun dengan ilham, atau mimpi. Adakalnya dengan lafazh dan maknanya sekaligus, dan adakalanya hanya maknanya saja, Nabi Saw. yang membuat redaksinya dan kemudian menisbatkannya (mengatasnamakan) kepada Allah Swt., membacanya tidak dinilai ibadah dan tidak pula mengandung mu'jizat yang melemahkan (sehingga bisa saja seseorang menirunya).

Adapun hadits Nabi, diwahyukan oleh Allah kepadanya dengan maknanya saja, dan Nabi Saw. yang membuat redaksinya, serta tidak menisbatkannya kepada Allah Swt. Yang paling mulia dari ketiganya adalah al-Qur'an lalu hadits qudsi.

185. Shalat Ghaib untuk Mayit yang Berada dalam Negerinya

- S. Adakah pendapat ulama yang memperbolehkan shalat ghaib atas mayat yang berada dalam negerinya? Atau Tidak?
- J. Memang ada pendapat ulama yang memperbolehkan menyalatkan ghaib atas mayat yang berada dalam satu negara sewaktu terdapat kesulitan mendatangi, menurut pendapat yang *aujah* dari Imam Ramli. Adapun yang *mu'tamad* dari Imam Ibn Hajar, tidak boleh.

Keterangan, dari kitab:

1. I'anah al-Thalibin⁵

لاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ عَلَى مَيِّتٍ غَائِبٍ عَنْ مَجْلِسِ مَنْ يُرِيْدُ الصَّلاَةَ عَلَيْهِ وَهُوَ حَاضِرُ فِي الْبَلَدِ وَلَمْ الْمَكَانِ حُضُوْرِهِ وَشَبَّهُوهُ بِالْقَضَاءِ عَلَى مَنْ بِالْبَلَدِ مَعَ اِمْكَانِ حُضُوْرِهِ ... وَإِنْ كَبُرَتْ الْبَلَدِ لِتَكِيسَّرِ حُضُوْرِهِ وَشَبَّهُوهُ بِالْقَضَاءِ عَلَى مَنْ بِالْبَلَدِ مِعَ اِمْكَانِ حُضُوْرِهِ ... الْمُتَّجَهُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَةَ الْمَشَقَّةُ وَعَدَمُهَا فَحَيْثُ شَقَّ الْحُضُورُ وَلَوْ فِي الْبَلَدِ لِكِبَرِهَا وَنَحْوِهِ صَحَّتْ وَحَيْثُ لاَ وَلَوْ خَارِجَ السُّوْرِ لَمْ تَصِحَّ.

Tidak sah shalat jenazah atas mayit yang ghaib yang tidak berada di tempat orang yang ingin menyalatinya, sementara ia berada di negeri (daerah) di mana mayat itu berada walaupun negeri tersebut luas, karena dimugkinkan mendatanginya. Para ulama menyamakannya dengan *qadha* bagi orang yang berada di suatu negeri sementara ia bisa menghadirinya. ... Yang

⁵ Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *l'anah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth.) Jilid II, h. 133.

menjadi pedoman adalah adanya atau tidak adanya kesulitan untuk mendatangi tempat mayat. Jika sekiranya sulit untuk mendatanginya walaupun berada di negerinya misalnya karena sudah tua atau sebab yang lain, maka shalat ghaibnya sah. Sedangkan jika tidak ada kesulitan, maka shalatnya tidak sah walaupun berada di luar batas negeri yang bersangkutan. 2. Tarsyih al-Mustafidin⁶

Dalam kitab *Tuhfah* Ibn Hajar al-Haitami berpedoman, bahwa seseorang tidak boleh melakukan shalat gaib pada mayat yang meninggal dalam satu negeri walaupun besar dan ia *'udzur* karena sakit atau dipenjara.

186. Organisasi yang Melarang Meminjamkan Hak Miliknya Kecuali pada Anggotanya

- S. Apakah boleh perkumpulan (jam'iyyah) menetapkan peraturan melarang meminjamkan hak milik berupa alat-alat makan, alat tikar dan lain-lain, kecuali kepada anggotanya sendiri? Kalau peraturan itu boleh, maka apakah artinya firman Allah dalam surat al-Ma'un yang artinya: "Dan mereka menghalangi meminjamkan alat-alat."?
- J. Penetapan peraturan itu boleh, karena dalam pokoknya meminjamkan itu hanya sunat, tidak wajib. Adapun firman Allah dalam surat al-Ma'un itu telah *mansukh* (dibatalkan) atau yang dimaksudkan dalam firman Allah itu, keseluruhannya yakni: Melarang meminjamkan, berlaku kasar terhadap yatim piatu dan tidak mengajukan memberi pertolongan kepada orang-orang miskin dan lain-lain.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah al-Syarqawi⁷

وَوَيْلُ لِلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآؤُوْنَ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ. وَكَانَتْ كَذَلِكَ فِيْ صَدْرِ الْإِسْلاَمِ ثُمَّ نُسِخَ وُجُوْبُهَا بِقَوْلِهِ عَلَيْ لاَ يَجِلُّ لِمُسْلِمِ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيْهِ إِلاَّ عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ. وَقِيْلَ لاَ دَلاَلَةَ عَلَى الْوُجُوْبِ. وَالْوَيْلُ مُرَتَّبٌ عَلَى الْمَجْمُوعِ أَعْنِيْ تَرْكَ الصَّلاَةِ وَالرَّيَاءِ أَوْ مَحْمُولَةً عَلَى حَالَةِ إِضْرَارِ الْمُسْتَعِيْرِ.

Allah berfirman: "Maka kecelekaanlah bagi orang-orang yang shalat (yaitu)

Alawi al-Saqqaf, Tarsyih al-Mustafidin, (Indonesia: al-Haramain, t.th.), h. 141.

Abdullah al-Syarqawi, Hasyiyah al-Syarqawi 'ala al-Tuhfah al-Thullab, (Indonesia: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), Jilid II, h. 90.

orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya, dan enggan (menolong dengan) barang berguna".

Ayat ini berlaku di masa awal penyebaran Islam, kemudian kewajibannya dibatalkan oleh sabda Raslullah Saw.: "Tidak halal bagi seorang muslim untuk mengambil harta saudaranya/orang lain kecuali dengan kerelaannya". Pendapat yang lain menyebutkan, dalam ayat di atas tidak ada petunjuk wajib. Dan kata wail (kecelakaan) berlaku untuk semuanya, yakni meninggalkan shalat dan sekaligus riya', atau dipahami pada situasi yang mencelakakan orang yang meminjamnya.

187. Doa dari Nabi dengan Sighat Jama' Diubah Mufrad

- S. Bolehkah mendoakan dengan shighat jamak dalam doa yang dari Rasulullah Saw. dengan mufrad, seperti "Allaahumma anta rabbi, kemudian dibaca Allaahumma anta rabbanaa"?
- J. Sesungguhnya doa-doa yang datang dari syara' dengan *mufrad*, tidak boleh diubah, kecuali kalau doa itu diubah sendiri, maka sunat dengan *shighat* jamak sewaktu orang lain mengamininya.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Minhaj Syarah Muslim8

وَاخْتَارَ الْمَازَرِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ سَبَبَ الْإِنْكَارِ أَنَّ هَذَا ذِكْرٌ وَدُعَاءُ فَيَنْبَغِي الْإِخْتِصَارُ عَلَى اللَّهُ لَهُ اللَّهِ الْمَازِدِ بِحُرُوفِهِ وَقَدْ يَتَعَلَّقُ الْجُزَاءُ بِتِلْكَ الْحُرُوفِ وَلَعَلَّهُ أَوْحَى اللهُ لَهُ اللَّهِ هَذِهِ اللَّهُ لَهُ اللهُ الْكَلِمَاتِ فَيَتَعَيَّنُ أَدَاوُهَا بِحُرُوفِهِ وَهَذَا الْقَوْلُ حَسَنُ.

Pendapat yang dipilih oleh al-Mazari dan lainnya adalah, sebab pengingkaran (tidak memperbolehkan) karena ini adalah dzikir dan doa, maka harus mengikuti redaksinya secara utuh, dan pembalasan (pahala) terkait dengan bunyi *lafazh-lafazh* dalam doa tersebut. Barang kali Allah Swt. memang mewahyukan kepada Nabi Saw. redaksi dari kalimat-kalimat dari dzikir dan doa tersebut, sehingga mengikuti redaksinya secara utuh menjadi suatu keharusan. Pendapat ini adalah pendapat yang baik.

188. Kentongan dan Bedug yang Dipukul untuk Memberitahukan Waktu Shalat

S. Apakah hukum kentongan yang dipukul untuk memberitahukan waktuwaktu shalat fardhu, dipukul sebelum adzan, malah sering dipukul pula setelah

⁸ Muhyiddin al-Nawawi, al-Minhaj Syarah Muslim, (Beirut: Dar al-Fikr, 1421 H/2000 M), Juz IX, h. 30.

adzan, yang demikian itu tidak memberi bekas dalam hati, selain menyerupai orang Yahudi atau Nasrani (walau sekarang ini mereka meninggalkannya). Dan bagaimana hukumnya "Bedug" yang dipukul bersama kentongan, tetapi seringkali dipukul bersama-sama dengan adzan, apakah hukumnya seperti kentongan itu? Apakah sunah beradzan di tempat yang tinggi seperti menara atau atap mesjid? Dan bagaimana hukumnya memukul bedug untuk memberitahukan mulai bulan Ramadhan, atau hari raya, atau waktu sahur, dan lain-lain.

Bagaimana kebiasaan di desa-desa dalam mesjid sering mengganggu, terutama orang-orang yang berada di sekitar mesjid? Apakah demikian itu layak bagi agama yang suci maka tidak dilarang dan diingkari?

J. Adapun hukumnya kentongan, telah menjadi berselisih di antara pendapat para ulama yang besar-besar, kalau ingin mengetahui dalilnya masing-masing haraplah membaca kitab-kitabnya yang telah dicetak, kemudian supaya diingat kemaslahatannya dan mafsadahnya, serta diperhatikan benar-benar.

Adapun hukumnya "bedug", maka tidak ada larangan tentang memukul bedug itu, apalagi kalau dengan bedug itu dapat menimbulkan syiar agama Islam. Tapi kalau mengganggu orang yang sembahyang atau orang yang tidur, maka haramlah bedug itu karena mengganggunya.

Adapun adzan di tempat yang tinggi, seperti menara atau di atap mesjid, maka hukumnya setidak-tidaknya di pintu mesjid.

Keterangan, dalam kitab-kitab fiqh.

189. Menyerahkan Kurban Tanpa Wakil

- S. Seorang menerimakan seekor sapi atau uang harganya, kepada Zaid misalnya dengan mengucapkan; "Pak Zaid inilah kurbanku dan kurban serumah tanggaku." Apakah Zaid itu menjadi wakil dalam kurban itu atau tidak?
- J. Hukum kurban itu sah dan Zaid menjadi wakilnya kurban itu, tentang pembelian, memotong, dan membaginya, (lihatlah) putusan Muktamar ke-4 nomor 66.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab9

وَلَوْ قَالَ جَعَلْتُ هَذِهِ الشَّاةَ فَهَلْ يَكْفِيْهِ التَّعْيِيْنُ وَالْقَصْدُ عَنْ نِيَّةِ التَّضْحِيَّةِ وَالذَّبْحِ فِيْهِ وَجْهَانِ، أَصَحُّهَا عِنْدَ الْأَكْثَرِيِّيْنَ لاَ يَكْفِيْهِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَرَجَّحَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ

⁹ Muhyiddin al-Nawawi, al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab, (Cairo: Al-Maktabah al-Ilmiah, 1971 M), Jilid VIII, h. 306.

وَالْغَرَالِيّ الْإِكْتِفَاءَ لِتَضَمُّنِهِ النَّيَةَ. وَبِهَذَا قَطَعَ الشَّيْخُ أَبُوْ حَامِدٍ. قَالَ لَوْ ذَبَحَهَا وَيَعْتَقِدُهَا شَاةً لَخْمٍ أَوْ ذَبَحَهَا لِصُّ وَقَعَتْ الْمَوْقِعَ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ.

Seandainya (pemilik binatang korban) berkata: "Aku jadikan kambing ini". Apakah cukup penentuan dan tujuan dari niat berkurban dan menyembelih, dalam hal ini ada dua pendapat, dan yang paling benar menurut kebanyakan ulama adalah, bahwa yang demikian itu tidak cukup (untuk sah berkurban) ... Imam al-Haramain dan al-Ghazali lebih mengunggulkan kecukupannya, karena adanya cakupan niat. Karenanya, Imam al-Ghazali menegaskan seandainya binatang itu disembelih dan si penyembelih meyakininya sebagai binatang potong biasa, atau disembelih oleh pencuri, maka sah menjadi kurban. Pendapat pertama (yang mengatakan tidak cukup) adalah pendapat mazhab (Syafi'i) yang lebih baik.

190. Memberi Ongkos Pengetam Hasil Pengetaman

S. Bolehkah memberi ongkos mengetam padi dengan padi hasil pengetamnya sebagaimana yang berlaku di tanah air kita?

J. Tidak boleh memberi ongkos mengetam padi dari padi hasil pengetaman, menurut pendapat yang masyhur, tetapi menurut pendapat lain, tidak dilarang.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Tsimar al-Yani'ah 'ala al-Riyadh al-Badi'ah¹⁰

فَيَحْرُمُ دَفْعُ أُجْرَةِ الْحَصَّادِيْنَ مِنَ الْحُبُوْبِ. وَيَمْتَنِعُ أَكُلُ الْفَرِيْكِ وَالْفُوْلِ الْأَحْضِرِ وَيَجِبُ اِجْتِنَابُ ذَلِكَ إِنْ عُلِمَ أَنَّ زَرْعَهُ يَجِبُ فِيْهِ الزَّكَاةُ .

Haram memberikan upah kepada tenaga pengetam dengan biji-bijian yang diketamnya. Dan tidak boleh memakan kedelai dan kacang hijau dan harus menjauhinya jika diketahui bahwa tanamannya itu masih harus dizakati. 2. Irsyad al-Sari¹¹

(قَوْلُهُ وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُجُتَنَى الْقَطْنُ عَلَى النِّصْفِ) وَمِثْلُ الْقُطْنِ الْعُصْفُرُ وَلَقَاطُ النَّيْتُونِ وَالْحُصَادُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَجْهُوْلٌ فَأَجَازَهُ جَمَاعَةُ مِنَ التَّابِعِيْنَ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ قِيَاسًا عَلَى الْقِرَاضِ لِأَنَّهُ يَعْمَلُ بِالْمَالِ عَلَى جُزْءٍ مِنْهُ مَعْلُومٌ لاَ يُدْرَى مَبْلُغُهُ (وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ وَابْنُ سِيْرِيْنَ

Muhammad Nawawi al-Jawi, Al-Tsimar al-Yani'ah 'ala al-Riyadh al-Badi'ah, (Indonesia: al-Haramain, 1427 H/2006 M), h. 55.

¹¹ Syihabuddin Ahmad al-Qisthalani, Irsyad al-Sari, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid IV, h. 177-178.

وَعَطَاءُ وَالْحَكَمُ وَالزَّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ) أَي يُعْطِيَ الْغَزْلَ لِلنَّسَاجِ يَنْسُجُهُ (بِالتَّلُثِ أَوِ الرُّيُعِ وَنَحْوِهِ) أَي يَكُوْنُ التَّلُثُ أَوْ الرُّبُعُ وَنَحُوُهُ لِلنَّسَّاجِ وَالْبَاقِي لِمَالِكِ الْغَزْلِ.

Maksudnya, al-Hasan al-Bashri berkata: Kapas boleh dipanen dengan upah separuhnya. Dipandang sama dengan kapas adalah ushfr (jenis biji tanaman bahan minyak), petikan buah zaitun, hasil panen dan lainnya yang tidak diketahui, maka sekumpulan ulama tabi'in memandang boleh. Ini juga merupakan pendapat Imam Ahmad karena mengqiyaskan atas hukum qiradh, yaitu seseorang mengerjakan suatu pekerjaan dengan upah sebagian daripadanya walaupun belum diketahui jumlah keseluruhannya. Ibrahim, Ibn Sirin, 'Atha', al-Hakam, al-Zuhri dan Qatadah berpendapat, boleh memberikan sebagian kain, yakni memberikan upah sebagian kain tenunan kepada penenunnya, sepertiga, seperempat dan sebagainya yang diberikan kepada penenunnya itu. Dan sisanya (yang ada) untuk pemilik alat tenun.

191. Berhukum Langsung dengan al-Qur'an dan Hadis Tanpa Memperhatikan Kitab Fiqh yang Ada

- S. Apakah boleh putra-putra sekarang ini memberi hukum agama Islam dengan dalil al-Qur'an dan hadits, tidak dari kitab-kitab fiqh, seperti Fath al-Qarib, Minhaj al-Qawim, dan lain-lain dengan alasan menurut firman Allah yang artinya; "Dan harap memberi hukum di antara manusia dengan apa yang diturunkan Allah", dan yang artinya; "Apakah tidak mencukupi kepada mereka, sesungguhnya aku telah menurunkan pada mereka kitab al-Qur'an."?
- J. Sesungguhnya demikian itu tidak boleh, dan yang berbuat demikian itu tidak benar juga sesat dan menyesatkan.

Keterangan, dari kitab:

1. Tanwir al-Qulub12

وَمَنْ لَمْ يُقَلِّدُ وَاحِدًا مِنْهُمْ وَقَالَ أَنَا أَعْمَلُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُدَّعِيًا فَهُمَ الأَحْكَامِ مِنْهُمَا فَلاَ يُسْلَمُ لَهُ بَلْ هُوَ مُخْطِئُ ضَالًا مُضِلًّ سِيَّمَا فِيْ هَذَا الزَّمَانِ الَّذِيْ عَمَّ فِيْهِ الْفِسْقُ وَكَثُرَتْ فِيْهِ الدَّعْوَى الْبَاطِلَةُ لِأَنَّهُ اسْتَظْهَرَ عَلَى أَثِمَّةِ الدَّيْنِ وَهُوَ دُوْنَهُمْ فِي الْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ وَالْإِطِّلاَعِ.

Dan barangsiapa yang tidak mengikuti salah satu dari mereka (imamimam mazhab) dan berkata: "Saya beramal berdasarkan al-Qur'an dan

Muhammad Amin al-Kurdi Al-Irbili, Tanwir al-Qulub fi Mu'ammalah 'Allam al-Ghuyub, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M). 75.

hadits", dan mengaku telah mampu memahami hukum-hukum al-Qur'an dan hadits, maka orang tersebut tidak bisa diterima, bahkan termasuk orang yang bersalah, sesat dan menyesatkan, terutama pada masa sekarang ini dimana kefasikan merajalela dan banyak tersebar dakwah-dakwah yang salah, karena ia ingin mengungguli para pemimpin agama padahal ia di bawah mereka dalam ilmu, amal, keadilan dan analisis.

192. Apakah Negara Kita Indonesia Negara Islam

- S. Apakah nama negara kita menurut syara' agama Islam?
- J. Sesungguhnya negara kita Indonesia dinamakan "negara Islam" karena telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir, tetapi nama negara Islam tetap selamanya. *Keterangan*, dari kitab:
- 1. Bughyah al-Mustarsyidin¹³

(مَسْأَلَةُ ي) كُلُّ مَحَلِّ قَدَرَ مُسْلِمٌ سَاكِنُ بِهِ ... فِي زَمَنٍ مِنَ الْأَزْمَانِ يَصِيْرُ دَارَ إِسْلاَمٍ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أَحْكَامُهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَمَا بَعْدَهُ وَإِنْ انْقَطَعَ امْتِنَاعُ الْمُسْلِمِيْنَ بِاسْتِيْلاَءِ الْكُفَّارِ عَلَيْهِمْ وَمَنْ دُخُوْلِهِ وَإِخْرَاجِهِمْ مِنْهُ وَحِيْنَئِذٍ فَتَسْمِيَّتُهُ دَارَ حَرْبٍ صُوْرَةً لاَ حُكْمًا فَعُلِمَ أَنَّ أَرْضَ بَتَاوِي بَلْ وَغَالِبَ أَرْضِ جَاوَةً دَارُ إِسْلاَمٍ لِاسْتِيْلاَءِ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَيْهَا قَبْلَ الْكُفَّارِ.

Semua tempat di mana muslim mampu untuk menempatinya pada suatu masa tertentu, maka ia menjadi daerah Islam yang syariat Islam berlaku pada pada masa itu dan pada masa sesudahnya, walaupun kekuasaan umat Islam telah terputus oleh penguasaan orang-orang kafir terhadap mereka, dan larangan mereka untuk memasukinya kembali atau pengusiran terhadap mereka, maka dalam kondisi semacam ini, penamaannya dengan "daerah kafir harbi" hanya merupakan bentuk formalnya dan tidak hukumnya. Dengan demikian diketahui bahwa tanah Betawi dan bahkan sebagian besar tanah Jawa adalah "daerah Islam" karena umat Islam pernah menguasainya sebelum penguasaan orang-orang kafir.

193. Nadzir Mesjid Membeli Tegel Kembang untuk Mesjid, dengan Uang yang Diwakafkan untuk Mesjid

S. Apakah nadzir mesjid boleh membeli tegel kembang untuk mesjid dengan uang yang diwakafkan untuk mesjid? Kalau sudah terlanjur, apakah wajib mengganti uang itu?

¹³ Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 H/1952 M), h. 254.

J. Menurut pendapat yang *mu'tamad*, tidak boleh, sedangkan pendapat lain memperbolehkan.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah¹⁴

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ وَقَفَ عَلَى عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ هَلْ يَجُوْرُ صَرْفُ الرَّيعِ إِلَى نَحْوِنَقْشِهِ وَمُؤَنِّنِيْهِ وَقَوَّامِهِ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لاَ يَجُوْرُ صَرْفُهُ إِلَى النَّقْشِ وَالتَّزْوِيْقِ قَالَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ وَفِي الْعُدَّةِ أَيْ وَالْحَاوِي (فَأَجَابِ) بِقَوْلِهِ لاَ يَجُوْرُ إِلَى قَوَّامِهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْقَيِّمَ لِحِفْظِ الْعِمَارَةِ وَالْحَيْصَاصَ الْأَيْمَةِ وَالْمُوَدِّنِيْنَ بِأَحْوَالِ الْمُصَلِّيْنَ قَالَ وَلاَ يُشْتَرَى مِنْهُ الدُّهْنُ يَخِلاَفِ الْبَوَارِيْ قَالَ الرَّافِعِي وَكَانَ وَالْمُوتِي وَالْمُونَى أَنَّ مَا يُفْرَقُ أَنَّ مَا يُفْرَشُ حَافِظًا لِلْعِمَارَةِ وَمَنْفَعَةَ الدُّهْنِ تَخْتَصُّ بِالْمُصَلِّى. قَالَ الزَّوْكَشِي وَغَيْرُهُ وَالَّذِيْ الْمُورِقُ وَالَّذِي الْمُعَلِّقُ وَمَنْفَعَةَ الدُهْنِ تَخْتَصُ بِالْمُصَلِّى. قَالَ الزَّوْكَشِي وَغَيْرُهُ وَالَّذِي الْمُورِي وَلَا الْحُورِي وَاللَّذِي وَاللَّهُ أَنَّ مَا يُفْرَشُ حَافِظًا لِلْعِمَارَةِ وَمَنْفَعَةَ الدُّهْنِ تَخْتَصُ بِالْمُصَلِّى. قَالَ الزَّوْكَشِي وَغَيْرُهُ وَالَّذِي وَاللَّهُ اللهُ هُونَ وَقَفَ عَلَى السَّهُ اللهُ لَا يُشْتَرَى بِهِ الدُّهُنُ وَلاَ الْحُصْرُ وَالَّذِي وَاللَّهُ مِنْ الْعِمَارَةِ وَقِي الْجُرْجَانِيَّاتِ حِكَايَةُ وَجْهَيْنِ فِي جَوَازِ الصَّرْفِ إِلَى النَّعْوِي وَهُو كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى عِمَارَتِهِ وَفِي الْجُرْجَانِيَّاتِ حِكَايَةُ وَجْهَيْنِ فِي جَوَازِ الصَّرْفِ إِلَى النَّقْشِ وَالنَّعْوِي وَهُو كَمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى عِمَارَتِهِ وَفِي الْجُرْجَانِيَّاتِ حِكَايَةُ وَجْهَيْنِ فِي جَوَازِ الصَّرْفِ إِلَى النَّقُونِ وَالتَّوْمِ وَاللَّهُ وَلَا النَّوْمِيْ وَالْمُعْتَمَدُ الْأُورُقِ وَلَى الْمُعْتَمَدُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْونِ وَالْعَوْمِ الْمُعْتَعَدُدُ الْأُورُلُ

Dan Ibn Hajar al-Haitami ditanya tentang seseorang yang wakaf untuk perawatan mesjid, bolehkah membelanjakan hasil pengembangan wakaf itu untuk mengukir dan menghias mesjid, membayar muadzin dan pengelolanya. Maka beliau menjawab: "Tidak boleh membelanjakannya mengukir dan menghias mesjid. Demikian pendapat al-Nawawi dalam al-Raudhah. Beliau berkata: "Dalam al-'Uddah al-Rauyani, maksudnya dan dalam al-Hawi al-Mawardi berpendapat: "Tidak boleh untuk membayar para imam dan muadzinnya, dan boleh untuk pengelolanya." Perbedaannya adalah, pengelola untuk menjaga kemakmuran mesjid, sedangkan tugas para imam dan muadzin khusus hal-hal yang terkait dengan orang yang shalat." Al-Rauyani berkata: "Tidak diperbolehkan untuk membeli minyak, berbeda dengan tikar. Al-Rafi'i berkata: "Barang yang dijadikan alas itu menjaga bangunan mesjid, sedangkan manfaat minyak hanya khusus untuk orang yang shalat."

Al-Zarkasyi dan selainnya berkata: "Pendapat yang disampaikan penulis al-Tahdzib (al-Baghawi) serta mayoritas ulama yang menyinggung masalah ini adalah, tidak boleh membeli minyak, tikar (alas) dan kapur batu yang

¹⁴ Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra, (Beirut: Dar al-Fikr, 1493 H/1984 M), Jilid III, h. 285.

... Seandainya berwakaf untuk mesjid secara mutlak (tanpa disebutkan penggunaannya secara khusus), maka sah. Al-Baghawi berkata: "Wakaf tersebut seperti seseorang yang wakaf untuk perawatan masjid. Dan dalam al-Jurjaniyat terdapat kutipan dua pendapat Ashhab al-Syafi'i terkait kebolehan menggunakan hasil pengembangan wakaf tersebut untuk mengukir dan menghias mesjid, dan pendapat mu'tamad adalah pendapat pertama.

194. Memindah Bagian dari Mesjid

S. Apakah hukumnya memindah alat-alat mesjid, seperti atapnya ke atap kamar mandinya? Dan bolehkah mengambil alat-alat mesjid yang telah rusak?

J. Tidak boleh mengambil alat-alat mesjid dipergunakan untuk lainlainnya, kecuali diperuntukkan mesjid, dan tidak boleh dijual atau diberikan orang lain, tetapi kalau sudah rusak dan tidak dapat dipakai, maka menjadi hak milik mesjid.

Keterangan, dari kitab:

1. I'anah al-Thalibin¹⁵

(وَلاَ يُبَاعُ مَوْقُوْفٌ وَإِنْ خَرُبَ) إِلَى أَنْ قَالَ وَإِنْ تَعَدَّرَ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ إِلاَّ بِالْإِسْتِهْلاَكِ كَأَنْ صَارَ لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ إِلاَّ بِالْإِحْرَاقِ انْقَطَعَ الْوَقْفُ أَيْ وَيَمْلِكُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ حِيْنَئِذٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.

(قَوْلُهُ وَلَا يُبَاعُ مَوْقُوفٌ) أَيْ وَلاَ يُوْهَبُ لِلْخَبَرِ الْمَارِّ أَوَّلَ الْبَابِ وَكَمَا يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ وَهِبَّتُهُ يَمْتَنِعُ تَغْيِيْرُ هَيْئَتِهِ كَجَعْلِ الْبُسْتَانِ دَارًا

Tidak boleh menjual barang yang telah diwakafkan walaupun sudah rusak. ... Bila sulit untuk dimanfaatkan, kecuali dengan menghancurkannya, seperti tidak akan termanfaatkan kecuali harus dibakar, maka terputuslah wakafnya, maksudnya dan mauquf 'alaih (pihak yang diwakafi) dalam kondisi semacam ini bisa memilikinya sesuai dengan pendapat mu'tamad.

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Tidak boleh menjual barang yang telah diwakafkan.") yakni dan tidak boleh diberikan, berdasar hadits yang telah lalu di awal bab. Dan seperti dilarang menjual dan menghibahkannya, dilarang mengubah keadaannya, seperti mengubah kebun menjadi rumah.

2. Fath al-Mu'in16

Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, l'anah al-Thalibin dan Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mulin, (Singapura: Maktabah Sulaiman Mar'i, t.th). Jilid III, h. 179-180.

وَسُئِلَ شَيْخُنَا عَمَّا إِذَا عُمِّرَ مَسْجِدٌ بِالآتٍ جُدُدٍ وَبَقِيَتْ الآثُهُ الْقَدِيْمَةُ فَهَلْ يَجُوْزُ عِمَارَةُ مَسْجِدٍ آخَرَ قَدِيْمٍ بِهَا أَوْ تُبَاعُ وَيُحْفَظُ ثَمَنُهَا فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يَجُوْزُ عِمَارَةُ مَسْجِدٍ قَدِيْمٍ وَحَادِثٍ بِهَا حَيْثُ قُطّعَ بِعَدَمِ احْتِيَاجِ مَا هِيَ مِنْهُ إِلَيْهَا قَبْلَ فَنَائِهَا وَلاَ يَجُوْزُ بَيْعُهُ بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ.

Guruku, Ibn Hajar al-Haitami, ditanya tentang mesjid yang dimakmurkan dengan peralatan baru sementara peralatan yang lama masih ada. Bolehkah memakmurkan mesjid lain yang lama dengan peralatan yang lama tersebut atau menjualnya dan menyimpan uang penjualannya. Maka beliau menjawab: "Boleh memakmurkan mesjid lama dan baru lain dengan peralatan usang tersebut jika sekiranya sudah dipastikan sebelum menjadi hancur peralatan itu tidak dibutuhkan lagi. Dan tidak boleh menjualnya sama sekali.

195. Mengulang Bacaan Alhamdulillah Oleh Khatib

- S. Bagaimana hukumnya khatib yang mengulangi bacaan alhamdulillah, apakah sunah atau makruh?
- J. Bahwa mengulangi bacaan "alhamdulillah" itu dianggap sama dengan mengulangi di antara rukun khutbah yang hukumnya tidak dilarang. *Keterangan*, dari kitab:
- 1. Hasyiyah al-Syarqawi¹⁷

وَكَذَا لاَ يَضُرُّ تَكْرِيْرُ بَعْضِ الأَرْكَانِ كَمَا يَقَعُ الآنَ أَيْضًا.

Demikian pula boleh mengulang-ulang sebagian rukun-rukunnya sebagaimana yang terjadi sekarang ini.

196. 'Iddahnya Perempuan yang Belum Sampai Tahun Lepas dari Haid yang Lalu

- S. Bagaimana 'iddah seorang perempuan yang dicerai suaminya, lalu ia sampai satu setengah tahun tidak haid, karena sakit dioperasi perutnya, padahal ia belum sampai tahun lepas dari haid (sinn al-ya'si). Kemudian cinta pada lelaki yang ingin menikahinya, apakah boleh kawin setelah 'iddah syuhur, ataukah boleh 'iddah menurut pendapat qaul qadim dengan 'iddah sembilan bulan setelah 'iddah tiga bulan?
- J. Tidak boleh kawin (nikah) sebelum iddah tiga sucian atau usia lanjut

Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in pada l'anah al-Thalibin, (Singapura: Maktabah Sulaiman Mar'i, t.th). Jilid III, h. 182.

¹⁷ Abdullah al-Syarqawi, *Hasyiyah al-Syarqawi 'ala Tuhfah al-Thullab*, (Indonesia: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), Jilid I, h. 267.

sampai tahun lepas dari haid (sinn al-ya'si) ittifaq antara pendapat ulama. Keterangan, dari kitab:

1. Talkhis al-Murad¹⁸

Wanita yang darah menstruasinya terputus oleh sebab-sebab yang diketahui seperti menyusui, sakit, ketakutan dan tekanan kehidupan yang berat, maka menurut pendapat yang ditetapkan dalam mazhab adalah bahwa 'iddahnya tiga kesucian, dan wanita tersebut harus bersabar (tidak boleh kawin lagi) sampai ia haid kembali atau sudah mencapai umur manopaus yaitu 62 tahun, lalu ia ber'iddah dengan hitungan bulan.

2. Fath al-Mu'in19

Adapun wanita yang terputus darah menstruasinya karena sebab yang diketahui seperti menyusui dan sakit, maka disepakati tidak boleh kawin lagi sampai ia berhaid atau manopaus, walaupun tenggang waktunya lama.[]

¹⁸ Ibn Ziyad, Talkhis al-Murad pada Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 H/1952 M), h. 242.

¹⁹ Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in pada I'anah al-Thalibin, (Singapura: Maktabah Sulaiman Mar'i, t.th). Jilid IV, h. 42.

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-12

Di Malang Pada Tanggal 12 Rabiul Tsani 1356 H. / 25 Maret 1937 M.

197. Saksi Diminta Bersumpah Supaya Tidak Berdusta 198. Sebab Kitab *Tasrifan* Karangan K. Hasyim Padangan Tidak Dimulai dengan *Basmalah*

199. Suami berkata: "Kalau Istri Saya Minta Cerai, Saya Cerai Saja", Kaitannya dengan *Ta'liq Talaq*

200. Membakar Lembaran al-Qur'an yang Terserak-serak 201. Anak Zina *Ilhaq* pada Suaminya

202. Orang Kafir pada Akhir Hayatnya Mengucapkan "Laailaha Illallaah"

203. Menjalankan Apa yang Tersebut dalam al-Qur'an dan Hadis, Tanpa Mazhab

204. Menitipkan Uang dalam Bank

205. Pakaian yang Berkotoran Darah Nyamuk Menempel pada Badan yang Masih Basah

206. Membaca Manaqib Syaikh Abdul Qadir

207. Menghilangkan Najis dan Hadas Hanya dengan Satu Kali Basuhan 208. Wali Nikah yang Sudah Mewakilkan Ikut Datang dalam Majelis Nikah

209. Menukar Tanah Wakaf untuk Mesjid dengan Tanah yang Lebih Banyak Manfaatnya

210. Tobat Sesudah Matahari Terbit dari Barat

211. Cabang/MWC/Ranting NU yang Tidak Mengerjakan Anggaran Dasar NU dengan Tidak Karena Maksud Salah

212. Mendirikan Jum'at yang Lebih dari yang Dibutuhkan

213. Mengerjakan Shalat Sunat, Padahal Masih Berkewajiban Mengqadha Shalat Wajib

214. Masyaqat yang Memperbolehkan Jum'at Lebih dari Satu Tempat

197. Saksi Diminta Bersumpah Supaya Tidak Berdusta

- S. Apakah boleh minta sumpahnya saksi, supaya tidak berdusta dalam keterangannya? (Jombang)
- J. Tidak boleh menurut madzhab Syafi'i dan boleh menurut pendapat ulama dari mazhab Hanafi, apabila disangsikan kebenarannya. *Keterangan*, dari kitab:
- 1.Fath al-Wahhab1

وَلاَ يُحَلَّفُ قَاضٍ عَلَى تَرْكِهِ ظُلْمًا فِيْ حُكْمِهِ وَلاَ شَهِيْدُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ فِيْ شَهَادَتِهِ لِارْتِفَاعِ مَنْصِبِهِمَا عَنْ ذَلِكَ

Hakim tidak boleh disumpah untuk tidak berbuat zhalim dalam ketetapan hukumnya, demikian saksi tidak boleh disumpah dalam kesaksiannya, karena tingginya derajat mereka berdua (yang tidak pantas) disumpah.

2. Al-Fawaid al-Makkiyyah2

وَفِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى عَنْ مُعِيْنِ الْحُكَّامِ لِلْقُضَاةِ تَعَاطِي كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ حَتَّى تَعَاطِي الْخُبْسِ وَالْإِغْلَاقِ وَغَيْرِهِ وَتَحْلِيفِ الْخُبْسِ وَالْإِغْلَاقِ وَغَيْرِهِ وَتَحْلِيفِ الْمُتَّهَمِ وَالطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ وَتَحْلِيفِ الْمُتَّهَمِ لِإغْتِبَارِ حَالِهِ أَوْ الْمُتَّهَمِ الشَّهُودِ إِذَا ارْتَابَ مِنْهُمْ ذَكَرَهُ فِي التَّتَارْخَانِيَّةِ وَتَحْلِيفِ الْمُتَّهَمِ لِإغْتِبَارِ حَالِهِ أَوْ الْمُتَّهَمِ بِسَرقةٍ يَضُرُّ بِهِ وَيَحْبِسُهُ الْوَالِي وَالْقَاضِي.

Dan dalam al-Dur al-Muntaqa, dari Mu'in al-Hukkam: "Para hakim boleh mengambil beberapa hal dari beberapa tindakan ini, sampai tidakan menahan, menghukum berat penjahat dengan membelenggunya, menyumpah, mentalak dan lain sebagainya, serta menyumpah para saksi jika ia meragukan mereka. Demikian 'Alim bin 'Ala menyebutnya dalam al-Tatarkhaniyah. Dan menyumpah orang yang diduga (berbuat kejahatan) karena melihat gerak-geriknya, atau diduga mencuri sehingga pejabat atau hakim dapat memenjarakannya.

198. Sebab Kitab *Tasrifan* Karangan K. Hasyim Padangan Tidak Dimulai dengan *Basmalah*

S. Mengapa kitab Tasrifan karangan K. Hasyim Padangan tidak dimulai dengan Basmalah, tetapi dengan fa'ala yaf'ulu? (Blitar)

Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Fath al-Wahhab pada al-Tajrid li Nafi al-'Abid, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1369 H/1950 M), Jilid IV, h. 402.

² Alawi al-Saqqaf, Al-Fawaid al-Makkiyyah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t. th.), Cet. Ke-1, h. 60.

J. Sesungguhnya permulaan dengan *Bismillah* itu sunah, dan mulai dengan *Bismillah* itu, cukup dengan ucapan walaupun tidak tertulis, sebaiknya harus diyakinkan, bahwa si pengarang telah mulai *Bismillah* dengan ucapan yang tidak tertulis, agar si pengarang diyakinkan menjadi seorang hidup bahagia atau mati syahid.

Keterangan, dari kitab:

1. I'anah al-Thalibin³

Barangsiapa ingin hidup mulia dan matipun mulia, maka ia harus mengucapkan basmalah pada setiap permulaan segala sesuatu.

199. Suami berkata: "Kalau Istri Saya Minta Cerai, Saya Cerai Saja", Kaitannya dengan Ta'liq Thalaq

- S. Bagaimana pendapat Muktamar atas seseorang yang mengadukan pada Zaid, umpamanya, "Istrimu minta cerai", kemudian si Zaid berkata, "Apabila istri saya demikian, maka saya cerai saja." Apakah si Zaid itu termasuk orang yang mengucapkan ta'liq al-thalaq pada istrinya?
- J. Sesungguhnya ucapan si Zaid itu bukan ta'liq al-thalaq, tapi hanya ancaman yang tidak memberi kesan apa-apa.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah4

Ibn Hajar al-Haitami ditanya, mudah-mudahan Allah memberi manfaat kaum muslimin dengan ilmu dan berkahnya, (Jika seorang suami berkata kepada istrinya) "Jika kamu masuk rumah maka kamu terceraikan." apakah ucapan suami tersebut termasuk ta'liq (jika si istri benar-benar masuk rumah maka ia sungguh terceraikan) atau termasuk laghw (ucapan yang tidak berpengaruh apapun), maka beliau menjawab: "Al-Syafi'i menjelaskan

³ Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dirnyathi, *l'anah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), Filid I, h. 4.

Ibn Hajar al-Haitami, al-Fawa al-Kubra al-Fiqhiyah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1493 H/1984 M), Jilid IV, h. 145.

dalam kitab al-Umm: "Ucapan tersebut adalah janji, maka tidak mempunyai dampak apapun.

200. Membakar Lembaran al-Qur'an yang Terserak-serak

S. Apakah boleh membakar lembaran al-Qur'an yang tersebar karena mengkhawatirkan terhina, ataukah tidak?

J. Boleh, bahkan apabila dengan maksud menjaga kemuliaan al-Qur'an dari jatuh ke tempat yang kurang patut atas kemuliaan al-Qur'an, atau khawatir jatuh ke najis. Kalau tidak demikian maka hukumnya makruh, bilamana tidak dengan maksud menghina al-Qur'an. Kalau maksud menghina al-Qur'an, maka hukumnya haram, malah bisa menjadikan kufur.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Iqna' dan Tuhfah al-Habib⁵

وَقَوْلُهُ إِحْرَاقُ خَشَبٍ أَي مَثَلاً فَالْوَرَقُ كَذَلِكَ وَيَحْرُمُ وَظءُ ذَلِكَ. ق ل إِلَى أَنْ قَالَ: وَلاَ يَجُوْزُ تَمْزِيْقُ الْوَرَقِ لِمَا فِيْهِ مِنْ تَقْطِيْعِ الْحُرُوفِ وَتَفْرِيْقِ الْكَلِمِ وَفِيْ ذَلِكَ اِزْرَاءٌ بِالْمَكْتُوْبِ.

Makruh membakar kayu yang pada permukaannya terdapat ukiran al-Qur'an, kecuali bermaksud menjaganya, maka tidak dimakruhkan sebagaimana yang dipahami dari pendapat Ibn Abdissalam, maka pada kondisi iulah pembakaran *mushaf-mushaf* oleh Usman Ra. dipahami.

(Ungkapan Syaikh al-Khathib al-Syirbini: "Membakar kayu." Maksudnya sekadar contoh. Maka kertas (yang bertuliskan al-Qur'an) pun seperti itu pula dan haram menginjaknya. Begitu kata al-Qulyubi ... Tidak boleh menyobeknyobek kertas tersebut karena dapat memotong huruf-huruf dan memisah-kalimat-kalimatnya. Dan dalam perbuatan tersebut terdapat pelecehan terhadap tulisan (al-Qur'an).

201. Anak Zina Ilhaq pada Suaminya

S. Seorang istri mempunyai anak perempuan, kemudian suaminya meninggal, lalu berzina dengan seorang kafir, setelah dua tahun, mempunyai anak laki-laki, apakah si perempuan dan anak lelaki itu saudara sekandung atau tidak? (Ampenan).

196

Muhammad al-Khatib al-Syarbini, al-Iqna' dan Sulaiman al-Bujairimi, Tuhfah al-Habib, (Mesir: Musthafa al-Hal'abi, 1338 H), Jilid I, h. 303.

J. Sesungguhnya si anak lelaki dan perempuan itu saudara kandung (seibu sebapak) karena si anak lelaki itu menjadi anaknya suami yang meninggal, sebab lahir sebelum lewat empat tahun dari meninggalnya suami.

Sebagaimana putusan Muktamar ke 5 nomor 98, yang menerangkan dalilnya dengan lengkap:

Keterangan, dari kitab:

1. Tuhfah al-Muhtaj⁶

(وَلَوْ بَانَهَا) أَيْ زَوْجَتَهُ بِحُلْعِ أَوْ ثَلَاثٍ وَلَمْ يَنْفِ الْحُمْلَ (فَوَلَدَثْ لِأَرْبَعِ سِنِيْنَ) فَأَقَلَّ وَلَمْ يَنْفِ الْحُمْلَ (فَوَلَدَثْ لِأَرْبَعِ سِنِيْنَ) فَأَقَلَّ وَلَمْ يَكُنْ كُونُ الْوَلَدِ مِنَ الطَّانِي (لَحِقَهُ) وَبَانَ وُجُوْبُ شُكْنَاهَا وَنَفَقَتِهَا وَإِنْ أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لِقِيَامِ الْإِمْكَانِ إِذَا كَثُرَ الْحُمْلُ أَرْبَعَ سِنِيْنَ لِللَّهُ عَلَيْهَ وَلَا لِللَّهُ عَلَى إِلَى أَنْ قَالَ: (وَلَوْ طَلَقَهَا رَجْعِيًّا) فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَرْبَعِ سِنِيْنَ لَمِقَهُ وَبَانَ وُجُوْبُ نَفَقَتِهَا وَسُكُنَاهَا أَي وَأَنَّ الْمَرْأَةَ مُعْتَدَّةً إِلَى الْوَضْعِ حَتَى يَثْبُتَ لِلزَّوْجِ رَجْعَتُهَا.

Seandainya suami menceraikan istrinya secara khulu' atau tiga kali, dan ia tidak mengingkari kehamilannya, lalu si istri melahirkan dalam rentang waktu empat tahun atau kurang, dan belum kawin dengan orang lain, atau sudah kawin dengan orang lain, namun tidak memungkinkan adanya anak tersebut dari suami yang kedua, maka anak tersebut harus diikutkan pada suami yang pertama dan ia berkewajiban memberikan perumahan dan nafkah, meskipun istri tersebut berikrar bahwa 'iddahnya habis, sebab waktu kehamilan yang paling lama adalah empat tahun sesuai dengan penelitian ... Jika suami tersebut mentalaqnya dengan talaq raj'i dan lalu si istri melahirkan anak dalam rentang waktu empat tahun, maka anak tersebut harus diikutkan sebagai anaknya dan ia pun berkewajiban memberi papan dan pangan si istri. Dan sesungguhnya wanita tersebut ber'iddah sampai melahirkan sehingga ada ketetapan bagi suami untuk merujuknya lagi.

2. Asna al-Mathalib7

(فَإِنْ طَلَّقَهَا) بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا أَوْ فَسَخَ نِكَاحَهَا وَلَوْ بِلِعَانٍ (وَلَمْ يُنْفِ الْحَمْلَ فَوَلَدَتْ لِأَرْبَعِ سِنِيْنَ فَأَقَلَ مِنْ) وَقْتِ (إِمْكَانِ الْعُلُوقِ قُبَيْلَ الطَّلاَقِ) أَوِ الْفَسْخِ (لَحِقَهُ) وَبَانَ أَنَّ الْعِدَّةَ لَمْ

⁶ Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada hamisy Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani (Beirut: Dar ihya' al-Turats al-Arabi, t. th.), Jilid VIII, h. 243.

⁷ Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib, (Indonesia: Menara Kudus, t. th.), Jilid III, h. 393.

تَنْقَضِ إِنْ لَمْ تَنْكِحْ الْمَرْأَةُ اَخَرَ أَوْ نَكَحَتْ وَلَمْ يُمْكِنْ كُوْنُ الْوَلَدِ مِنَ القَّانِي لِقِيَامِ الْإِمْكَانِ سَوَاءً أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَبْلَ وِلاَدَتِهَا أَمْ لاَ. لِأَنَّ النَّسَبَ حَقُّ الْوَلَدِ. فَلاَ يَنْقَطِعُ بِإِقْرَارِهَا.

Apabila suami menceraikan istrinya, baik secara ba'in atau raj'i atau pernikahan batal meskipun karena li'an, dan si suami tidak mengingkari kehamilan, kemudian si istri melahirkan dalam rentang waktu empat tahun atau kurang yang terhitung dari kemungkinan bersetubuh beberapa saat sebelum terjadinya perceraian ataupun pembatalan nikah, maka anak tersebut nasabnya diikutkan suaminya itu, dan 'iddahnya menjadi jelas belum habis selama istri tersebut belum menikah dengan orang lain, atau sudah menikah lagi namun anak tersebut tidak mungkin berasal dari suami kedua, karena adanya kemungkinan anak tersebut dari suami pertama, baik si istri mengakui habisnya 'iddah sebelum lahirnya anak itu atau tidak mengakuinya. Sebab, nasab merupakan hak anak dan tidak bisa putus oleh pengakuan ibu.

202. Orang Kafir pada Akhir Hayatnya Mengucapkan "Laailaha Illallaah"

- S. Seseorang yang tidak mengakui hari kiamat dan perintah-perintah agama Islam (kafir) dalam akhir umurnya mengucapkan "Laa ilaha illallaah". Apakah dihukumi menjadi muslim ataukah tidak? (Surabaya)
- J. Tidak dihukumi menjadi orang muslim, karena tidak menyaksikan, menurut pendapat yang mu'tamad oleh para ulama yang terakhir, dan karena tidak mengakui Nabi Muhammad Saw. sebagai utusan (suruhan) Allah menurut intisarinya kitab Raudhah.

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Mu'in⁸

198

وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُلَقَّنُهُمَا قَطْعًا مَعَ لَفْظِ أَشْهَدُ لِوُجُوْبِهِ أَيْضًا عَلَى مَا سَيَأْتِي فِيْهِ إِذْ لاَ يَصِيْرُ مُسْلِمًا إِلاَّ بهمَا.

Adapun orang kafir maka secara pasti (tanpa khilafiyah) ia harus ditalqin dua kalimah syahadat yang disertai kata asyhadu (Saya bersaksi), karena kata itu juga wajib diucapkannya sebagaimana penjelasannya yang akan datang. Sebab, seseorang tidak menjadi muslim kecuali dengan keduanya (syahadatain).

2. Irsyad al-'Ibad ila Sabil al-Rasyad9

⁸ Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in (Beirut: Dar al-Fikr, t.th). h. 139.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيْ إِسْلاَمِ كُلِّ كَافِرٍ التَّلَقُظُ بِالشَّهَادَتَيْنِ لاَ الْإِثْيَانُ بِلَفْظِ أَشْهَدُ فَالْأَظْهَرُ الْإِكْتِفَاءُ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلاَمِ الرَّوْضَةِ.

Maka ketahuilah, bahwa disyaratkan dalam masuk Islamnya setiap orang kafir untuk membaca dua kalimat syahadah, dan tidak hanya dengan lafadz asyhadu saja. Menurut qaul al-Azhhar, cukup dengan membaca لآ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ مُسَدِّرُ مُنْوُلُ اللهِ Pendapat ini sesuai dengan pendapat dalam kitab al-Raudhah.

203. Menjalankan Apa yang Tersebut dalam al-Qur'an dan Hadis, Tanpa Mazhab

- S. Bagaimana hukumnya orang yang menjalankan apa yang tersebut dalam al-Qur'an dan hadits menurut arti yang tidak sebenarnya, sehingga bertentangan dengan empat Mazhab? (Purworejo)
- J. Orang itu tidak benar, sesat dan menyesatkan, sebagaimana putusan Muktamar ke 11 nomor 191.

Keterangan, dari kitab:

1. Tanwir al-Qulub10

وَمَنْ لَمْ يُقَلِّدُ وَاحِدًا مِنْهُمْ وَقَالَ أَنَا أَعْمَلُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُدَّعِيًا فَهُمَ الْأَحْكَامِ مِنْهُمَا فَلاَ يُسْلَمُ لَهُ بَلْ هُوَ مُخْطِئُ ضَالً مُضِلُّ سِيَّمَا فِيْ هَذَا الزَّمَانِ الَّذِيْ عَمَّ فِيْهِ الْفِسْقُ وَكَثُرَتْ فِيْهِ الدَّيْنِ وَهُوَ دُوْنَهُمْ فِي الْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ وَالْإِطّلاَعِ. الدَّعْنِ وَهُوَ دُوْنَهُمْ فِي الْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ وَالْإِطّلاَعِ.

Dan barangsiapa yang tidak mengikuti salah satu dari mereka (imamimam mazhab) dan berkata: "Saya beramal berdasarkan al-Qur'an dan hadits", dan mengaku telah mampu memahami hukum-hukum al-Qur'an dan hadits, maka orang tersebut tidak bisa diterima, bahkan termasuk orang yang bersalah, sesat dan menyesatkan, terutama pada masa sekarang ini dimana kefasikan merajalela dan banyak tersebar dakwah-dakwah yang salah, karena ia ingin mengungguli para pemimpin agama padahal ia di bawah mereka dalam ilmu, amal, keadilan dan analisis.

204. Menitipkan Uang dalam Bank

S. Bagaimana hukumnya menitipkan uang dalam bank. Kemudian pemerintah menetapkan pajak, karena mendapat bunga. Halalkah bunga itu? Bagaimana

⁹ Zainuddin al-Malibari, Irsyad al-'Ibad ila Sabil al-Rasyad, (Surabaya: al-Hidayah, t. th.), h. 3.

Muhammad Amin al-Kurdi Al-Irbili, Tanwir al-Qulub fi Mu'ammalah 'Allam al-Ghuyub, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M). 75.

hukum menitipkan uang dalam bank karena menjaga keamanannya saja, tidak ingin bunganya, bolehkan atau tidak? (Jember)

J. Adapun hukumnya bank dan bunganya, itu sama dengan hukumnya gadai yang telah ditetapkan hukumnya dalam putusan Muktamar ke 2 nomor 28. *Keterangan*, dari kitab:

1. Asybah Wa al-Nazha'ir11

Seandainya sudah umum di masyarakat kebiasaan kebolehan memanfaatkan barang gadai bagi pemberi pinjaman/penerima gadai, apakah kebiasaan itu dianggap sama dengan menjadikannya sebagai syarat, sehingga akad gadainya rusak? Jumhur ulama berpendapat: "Tidak diposisikan sebagai syarat." Sedangkan al-Qaffal berpendapat: "Ya (diposisikan sebagai syarat).

2. Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin 12

وَجَازَ لِمُقْرِضٍ نَفْعٌ يَصِلُ لَهُ مِنْ مُقْتَرِضٍ كَرَدِّ الزَّائِدِ قَدْرًا أَوْ صِفَةً وَالْأَجْوَدِ فِي الرَّدِئِ (بِلاَ شَرْطٍ) فِي الْعَقْدِ بَلْ يُسَنُّ ذَلِكَ لِمُقْتَرِضِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَأَمَّا الْقَرْضُ بِشَرْطٍ جَرِّ نَفْعٍ لِمُقْرِضٍ فَفَاسِدً وَأَمَّا الْقَرْضُ بِشَرْطِ جَرِّ نَفْعٍ لِمُقْرِضٍ فَفَاسِدً فَفَاسِدً فَالَ ع ش وَمَعْلُومُ أَنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ حَيْثُ وَقَعَ الشَّرْطُ فِي الْعَقْدِ فَلاَ فَسَادَ حَيْثُ وَقَعَ الشَّرْطُ فِي الْعَقْدِ فَلاَ فَسَادَ.

Si peminjam/si pemberi gadaian boleh memanfaatkan sesuatu yang berasal dari orang yang menggadaikan, seperti tambahan pengembalian, baik dalam ukuran atau sifat, atau mengembalikan yang lebih baik dari yang buruk sebelumnya, tanpa disyaratkan dalam akad, bahkan disunahkan yang demikian itu ... Sedangkan pinjaman/gadaian dengan disertai syarat boleh memanfaatkan barang yang digadaikan, maka yang demikian itu bathil sesuai dengan hadis "Semua barang yang digadaikan yang menarik sesutau manfaat darinya, maka itu berarti riba". Menurut Imam Ali al-Syibramalisy, dimaklumi bahwa ketidakbolehan tersebut jika memang disyaratkan di tengah akad transaksi. Sedangkan seandainya mereka saling sepakat atas pemanfaatan tersebut, maka tidak dianggap sebagai syarat dalam akad dan tidak rusak (boleh).

¹¹ Jalaluddin al-Suyuthi, Asybah wa al-Nazha'ir, (Mesir: Maktabah Mustahafa Muhammad, t. th.), h. 86.

¹² Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in dalam al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, l'anah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.th). Jilid III, h. 53.

Adapun hukumnya pajak adalah seperti hukum pajak-pajak yang lain. Adapun menitipkan uang dalam bank, karena keamanannya saja, dan tidak yakin bahwa uangnya dipergunakan untuk larangan agama, maka hukumnya makruh.

205. Pakaian yang Berkotoran Darah Nyamuk Menempel pada Badan yang Masih Basah

- S. Bagaimana hukumnya memakai pakaian yang berkotoran dengan darah nyamuk, setelah mandi biasa (tidak wajib) pakaiannya menempel dengan badannya yang masih basah. Apakah dimaafkan karena sulitnya menjaga? Ataukah tidak? (Tuban)
- J. Dalam hal ini para ulama berselisih pendapat, menurut Imam Mutawalli dimaafkan, tetapi menurut Imam lainnya tidak dimaafkan.

Keterangan, dari kitab:

1. I'anah al-Thalibin¹³

Para ulama berbeda pandapat tentang memakai baju yang terkena darah nyamuk, sementara badannya basah. Al-Mutawalli berkata: "Boleh.", dan Syaikh Abu Ali berkata: "Tidak boleh, karena tidak ada kondisi darurat untuk mengotori badannya." Dan dengan pendapat ini al-Muhib al-Thabari mantap dengan kajiannya.

206. Membaca Manaqib Syaikh Abdul Qadir

- S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang orang yang mengundang tetangganya, lalu membaca Manaqib Syaih Abdul Qadir Jailani, lalu mengajukan makanan. Bagaimana hukumnya, haram, sunah, ataukah makruh? (Tegal)
- J. Adapun membaca Manaqib para wali, itu baik, karena dapat mendatangkan kecintaan terhadap para wali. Adapun memberi makanan itu hukumnya sunah, kalau dengan maksud memuliakan tamu, dalam hadits dinyatakan, yang artinya, "Siapa yang beriman kepada Allah, supaya menghormati tamunya".

Keterangan, dari kitab:

1. Misbah al-Anam wa Jala' al-Zhulam¹⁴

¹³ Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *l'anah al-Thalibin*, (Beirut Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), Jilid I, h. 110.

اعْلَمْ يَنْبَغِي لِكُلِّ مُسْلِم طَالِبِ الْفَصْلِ وَالْحَيْرَاتِ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَرَّكَاتِ وَالنَّفَحَاتِ وَاسْتِجَابَةَ التَّعَاءِ وَنُزُولِ الرَّحْمَاتِ فِي حَضَرَاتِ الأَوْلِيَآءِ فِي مَجَالِسِهِمْ وَجَمْعِهِمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَعِنْدَ قُبُوْرِهِمْ وَحَالَ ذِكْرِهِمْ وَعِنْدَ كَثْرَةِ الْجُمُوعِ فِي زِيَارَاتِهِمْ وَعِنْدَ مُذَاكَرَاتِ فَصْلِهِمْ وَنَشْرِ مَنَاقِبِهِمْ.

Ketahuilah! Seyogyanya bagi setiap muslim yang mencari keutamaan dan kebaikan, agar ia mencari berkah dan anugrah, terkabulnya doa dan turunnya rahmat di depan para wali, di majelis-majelis dan kumpulan mereka, baik yang masih hidup ataupun sudah mati, di kuburan mereka, ketika mengingat mereka, dan ketika banyak orang berkumpul dalam berziarah kepada mereka, serta ketika mengingat keutamaan mereka, dan pembacaan riwayat hidup mereka.

207. Menghilangkan Najis dan Hadas Hanya dengan Satu Kali Basuhan

- S. Mana yang dipilih Muktamar di antara dua pendapat yaitu pendapat Imam Nawawi yang mengatakan, bahwa menghilangkan najis dan hadas cukup dengan sebasuhan, ataukah pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan tidak cukup? (Blora)
- J. Muktamar memilih pendapat Imam Nawawi, sebagaimana putusan Muktamar pertama nomor 2, yaitu pendapat yang lebih menang dalam madzhab.

Keterangan, dari kitab:

1. I'anatuh al-Thalibin¹⁵

إِنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي الْمَذْهَبِ لِلْحُصْمِ وَالْفَتْوَى مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فَمَا جَزَمَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فَالرَّافِعِيُّ فَمَا رَجَّحَهُ الْأَكْثَرُ فَالْأَعْلَمُ فَالْأَوْرَعُ ... فَإِنْ قُلْتَ مَا الَّذِيْ يُفْتَى بِهِ النَّوَوِيُّ فَالرَّافِعِيُّ فَمَا اللَّهُمُ وَجَ وَالْحُواشِيْ كَكُتُبِ ابْنِ حَجَرٍ وَالرَّمْلِيَّيْنِ مِنَ الْكُتُبِ وَمَا الْمُقَدَّمُ مِنْهَا وَمِنْ الشَّمُوجِ وَالْحُواشِيْ كَكُتُبِ ابْنِ حَجَرٍ وَالرَّمْلِيَّيْنِ وَالنَّهُ الْمُعَلِيْنِ وَالرَّمْلِيْنِي وَالرَّمْلِيْنِي وَالْمُنْ وَهَلْ كَتُبُهُمْ مُعْتَمَدةً أَوْ لاَ ؟ وَهَلْ يَجُوزُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ كُلِّ مِنْ الْمَالِيْنِي وَالْمَالُونِي وَعَيْرِهِمْ فَهَلْ كُتُبُهُمْ مُعْتَمَدةً أَوْ لاَ ؟ وَهَلْ يَجُوزُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ كُلِّ مِنْ الْمَالَمْ وَالْمَالِيْنِ إِذَا إِخْتَلَفُوا أَوْ لاَ؟ إِلَى أَنْ قَالَ اَلْجُوابُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَجْوِبَةِ الْعَلاَمَةِ الْمَالَمُةِ الْمُنْوِي وَعَيْرِهِمْ فَهَلْ كُتُبُهُمْ مُعْتَمَدةً أَوْ لاَ؟ وَهَلْ يَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْ أَجْوِبَةِ الْعَلاَمَةِ الْمُعَلِيْفِي وَعَيْرِهِمْ فَهَلْ كُتُنِهُمْ مُعْتَمَدةً أَوْلاَ كُمَا يُؤْوِي وَلَا الْحَلَقُولُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْونِ إِنْ الْعَلْمَةِ فَلْ كُولُولُ كُولُولُ كُولُولُ كُولُولُ كُولُولُ مُنْ الْمُؤْونِ وَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ كُولُولُ كُولُولُ كُولُولُ كُولُولُ كُولُولُ كُولُولُ كُولُولُ كُولُولُ مُؤْلِدُ مِنْ الْمُعْتَمِ وَمَا لَلْمُولُولُ مُنْهُمْ وَمِنْ اللْمُؤْلِقُولُ عُولِيْنَ إِذَا الْمُعْتَمَدِهُ الْمُؤْلِقُولُ مُنْ الْمُؤْلِقُولُ مُنْ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ مُعْتَمَدُهُ وَلِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ أَولُولُ اللْمُؤْلُولُ أَولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ أَولُولُ أَولُولُ أَولُولُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

¹⁴ Habib 'Alawi al-Haddad, Misbah al-Anam wa Jala' al-Zhulam, (Istanbul Turki, Maktabah al-Haqiqah, 1996 M), h. 90.

¹⁵ Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *l'anah al-Thalibin*, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid I, h. 19.

الشَّيْخِ سَعِيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ سُنْبُولِي الْمَكِّيِّ كُلُّ هَذِهِ الْكُتُبِ مُعْتَمَدَةً وَمُعَوَّلُ عَلَيْهَا لَكِنْ مَعَ مُرَاعَاةِ تَقْدِيْمِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضِ وَالْأَخْذُ بِالْعَمَلِ لِلنَّفْسِ يَجُوْزُ بِالْكُلِّ. وَأَمَّا الْإِفْتَاءُ فَيُقَدَّمُ مِنْهَا عِنْدَ الْإِخْتِلاَفِ التُّحْفَةُ وَالتَّهَايَةُ فَإِنِ اخْتَلَفَا فَيُخَيِّرُ الْمُفْتِي بَيْنَهُمَا إِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلاً لِلتَّرْجِيْحِ فَإِنْ كَانَ أَهْلاً لَهُ فَيُفْتِي بِالرَّاجِحِ.

Sesungguhnya pendapat yang dijadikan pedoman dalam mazhab dalam penetapan hukum dan fatwa, adalah yang disepakati oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, kemudian yang ditetapkan oleh Imam Nawawi, dan kemudian yang ditetapkan oleh Imam Rafi'i, kemudian yang diunggulkan oleh mayoritas ulama, kemudian yang paling pandai dan yang paling wira'i (berhati-hati dalam halal dan haram).

Apabila Anda bertanya: "Kitab-kitab apakah yang bisa dijadikan pedoman untuk berfatwa dan yang lebih dikedepankan dari kitab-kitab, syarh, hawasy (catatan pinggir), seperti kitab karya Ibn Hajar, al-Ramli dan al-Rafi'i, Syaikh al-Islam, al-khatib, Ibn Qasim, al-Mahali, al-Zayadi, Syibramalisi, Ibn Ziyad al-Yamani, al-Qulyubi dan yang lainnya, apakah kitab-kitab mereka bisa dijadikan pedoman atau tidak? Dan apakah boleh berpedoman pada masing-masing ulama yang telah disebutkan apabila mereka berbeda pendapat atau tidak?"

Jawabnya adalah sebagaimana yang diperoleh dari jawaban al-'Allamah Sa'id Ibn Muhammad Sunbuli al-Makky, seluruh kitab-kitab tersebut bisa dijadikan pedoman dan rujukan, akan tetapi harus memperhatikan untuk mendahulukan sebagian dari yang lain. Sedangkan untuk amalan diri sendiri boleh secara keseluruhan. Adapun dalam memberi fatwa, jika terjadi perbedaan ia harus mendahulukan kitab al-Tuhfah dan al-Nihayah dibandingkan yang lain. Jika keduanya berbeda maka seorang Mufti boleh memilih antara keduanya, jika ia tidak mampu mengunggulkan salah satunya. Namun jika mampu, maka ia harus berfatwa dengan yang lebih unggul.

208. Wali Nikah yang Sudah Mewakilkan Ikut Datang dalam Majelis Nikah

- S. Seorang wali nikah telah mewakilkan, tetapi turut hadir dalam majelis nikah, apakah akad nikah yang dilaksanakan wakil itu sah? Kalau sah, bagaimana pendapat Muktamar atas keterangan kitab Kifayatul Akhyar, yang menerangkan tidak sah? (Blora)
- J. Akad nikahnya sah, meskipun si wali yang mewakilkan itu turut hadir.

Adapun keterangan kitab *Kifayah al-Akhyar*, itu diartikan apabila si wali yang mewakilkan dan hadir itu adalah juga menjadi saksi nikah.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah al-Bajuri16

Seandainya si ayah atau saudara mewakilkan kepada orang lain dalam melaksanakan akad (nikah), dan ia hadir bersama orang lain untuk menjadi saksi (rangkap fungsi sebagai orang yang mewakilkan dan juga sebagai saksi) maka akadnya tidak sah, karena ia ditentukan untuk melaksanakan akad bukan sebagai saksi.

209. Menukar Tanah Wakaf untuk Mesjid dengan Tanah yang Lebih Banyak Manfaatnya

- S. Bolehkah bagi nadzir tanah wakaf keperluan mesjid ditukarkan dengan tanah yang lebih banyak manfaatnya?
- J. Haram menukarkan tanah wakaf, menurut mazhab Syafi'i, dan menurut mazhab Hanafi boleh, asal dengan tanah yang lebih banyak manfaatnya. *Keterangan*, dari kitab:
- 1. Hasyiyah al-Syarqawi¹⁷

Menurut kami (Syafi'i) tidak boleh mengganti barang wakaf, berbeda dengan kalangan Hanafi. Gambarannya menurut mereka adalah, tempat yang akan runtuh kemudian diganti tempat lain yang lebih baik setelah penetapan hakim yang berpendapat tentang keabsahannya.

210. Tobat Sesudah Matahari Terbit dari Barat

S. Setelah matahari terbit dari barat. Apakah tobat orang mukmin masih diterima? (Wonosobo)

Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Jilid II, h. 102.

¹⁷ Abdullah al-Syarqawi, Hasyiyah al-Syarqawi 'ala al-Tahrir, (Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), Jilid II, h. 178.

J. Masih diterima tobatnya orang mukmin, menurut pendapat yang mu'tamad, dan ada qaul yang menyatakan tidak diterima.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Kharidah al-Bahiyah18

Tidak diterima tobat orang kafir kecuali masih kecil kemudian masuk Islam, maka tobatnya diterima. Sedangkan orang mukmin yang berdosa, menurut pendapat yang kuat, tobatnya diterima. Tobat seseorang tidak diterima sejak terbitnya matahari dari barat sampai hari kiamat.

2. Tuhfah al-Murid¹⁹

Demikian itu, pintu tobat tertutup manakala matahari terbit dari arah barat. Maka tobat itu tertutup bagi orang yang tobat menjelang saat terbit matahari dari arah barat (saat hari kiamat).

211. Cabang/MWC/Ranting NU yang Tidak Mengerjakan Anggaran Dasar NU dengan Tidak Karena Maksud Salah

- S. Apakah Cabang atau Ranting NU yang tidak mengerjakan anggaran dasar NU yang telah ditetapkan itu termasuk orang yang tidak menepati janji? (Klaten)
- J. Bahwa tetapnya menjadi Cabang atau Ranting NU itu setelah menerima blesit, apabila setelah menerima ketetapan, maka wajib mengerjakan segala anggaran dasarnya, apabila tidak dapat mengerjakan yang tidak karena maksud salah, dan tidak sengaja ia akan tidak menepati janji, maka tidak berdosa.

Keterangan, dari kitab:

1. Sullam al-Taufiq²⁰

18 Ahmad al-Dardiri, Al-Kharidah al-Bahiyah, (Cairo: Dar al-Bashair, t. th.), h. 168.

¹⁹ Ibrahim al-Bajuri, Tuhfah al-Murid 'ala Jauhar al-Tauhid, (Singapura: al-Haramain, t. th.), h. 122.

²⁰ Salim Ibn Samir al-Hadrami, Sullam al-Taufiq, (Pekalongan: Maktabah Raja Murah, t. th.), 49.

وَالْحُلَفُ فِي الْوَعْدِ إِذَا وَعَدَهُ وَهُوَ يُضْمِرُ الْخَلَفَ.

Dan melanggar janji, ketika menjanjikannya ia berniat melanggarnya.

212. Mendirikan Jum'at yang Lebih dari yang Dibutuhkan

- S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang Jum'at yang lebih dari satu dalam tempat yang tidak memerlukan Jum'at lebih dari satu, padahal tidak dapat diketahui mana yang dahulu, dan para yang berjum'at sebenarnya bermazhab Syafi'i, maka bagaimana hukumnya beberapa Jum'at itu? (Bunting)
- J. Tidak sah beberapa Jum'at tersebut, dan wajib mengulangi shalat Jum'at dalam tempat yang tidak boleh lebih dari Jum'at yang diperlukan. Adapun mendirikan Jum'at yang lebih dari pada yang diperlukan itu hukumnya berdosa bagi orang yang mendirikan.

Keterangan, dalam kitab:

1.I'anah al-Thalibin²¹

الْحَالَةُ النَّالِئَةُ أَنْ يَشُكَّ فِي السَّبْقِ وَالْمَعِيَّةِ فَيَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْتَمِعُواْ وَيُعِيْدُوْهَا عِنْدَ الشَّاعِ الْوَقْتِ ... فَإِنْ كَانَ الْمُتَعَدِّدُ زَاثِدًا عَلَى الْحَاجَةِ فَتَصِحُّ السَّابِقَاتُ إِلَى أَنْ تَنْتَهِى الْحَاجَةُ ثُمَّ تَبْطُلُ الزَّائِدَاتُ وَمَنْ شَكَّ أَنَّهُ مِنَ الْأَوّلِيْنَ أَوْ مِنَ الْأَخِرِيْنَ أَوْ فِي أَنَّ التَّاجَةُ ثُمَّ تَبْطُلُ الزَّائِدَاتُ وَمَنْ شَكَّ أَنَّهُ مِنَ الْأَوّلِيْنَ أَوْ مِنَ الْأَخِرِيْنَ أَوْ فِي أَنَّ التَّعَدُّدَ لِحَاجَةٍ أَوْ لاَ، لَزِمَتْهُ إِعَادَةُ الْجُمْعَةِ

Masalah yang ketiga adalah, jika sulit dalam mendahulukan shalat dan mengadakannya secara serentak, maka mereka (para jamaah) harus berkumpul dan sama-sama mengulangi shalat jika waktu memang masih cukup ...

Apabila (shalat Jum'at) yang banyak itu melebihi kebutuhan, maka shalat yang lebih dahululah yang sah, sampai kebutuhan yang dimaksud habis, dan sisanya batal. Barangsiapa ragu-ragu apakah termasuk shalat yang pertama atau yang terakhir atau apakah Jum'atan yang banyak itu karena adanya kebutuhan atau tidak, maka ia harus mengulangi shalat Jum'at.

2. Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah²²

يَجِبُ أَهْلَ البَلَدِالْمُقَلِّدِيْنَ لِلشَّافِعِيِّ الإِجْتِمَاعُ لِلْجُمْعَةِ فِيْ مَحَلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ إِنْ

²¹ Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin*, (Semarang: Maktabah 'Alawiyah, t. th.), Jilid II, h. 63.

²² Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra, (Beirut: Dar al-Fikr, 1493 H/1984 M), Jilid I, h. 251.

أَمْكَنَ، وَمَتَى خَالَفُوا ذَلِكَ صَلُوا صَلاَّةً فَاسِدَةً آثِمُوا وَفَسَقُوا وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ.

Bagi mereka yang mengikuti pendapat mazhab Syafi'i, mereka wajib berkumpul untuk melakukan shalat Jum'at di satu tempat di negeri yang bersangkutan jika memang memungkinkan. Jika mereka melanggar ketentuan tersebut (mengadakan shalat Jum'at lebih dari satu kali), maka mereka berarti telah melaksanakan shalat yang rusak, dan mereka pun berdosa serta menjadi fasik, dan kesaksian mereka ditolak.

213. Mengerjakan Shalat Sunat, Padahal Masih Berkewajiban Mengqadha Shalat Wajib

- S. Apakah orang berkewajiban qadha shalat fardhu, boleh mengerjakan shalat sunat? (Purwokerto)
- J. Kalau meninggalkan shalat fardhu itu karena ada uzur (halangan), maka sah dan tidak haram mengerjakan salat sunat, tetapi kalau meninggalkan itu tidak karena uzur maka haramlah mengerjakan shalat sunat, tetapi sahlah shalatnya, menurut pendapat Imam Ibn Hajar, tetapi menurut Imam Zarkasyi tidak sah.

Keterangan, dari kitab:

1. I'anatuth Thalibin²³

وَيُبَادِرُ مَنْ مَرَّ بِفَائِتٍ وُجُوبًا إِنْ فَاتَتْ بِلاَ عُذْرٍ فَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ فَوْرًا، قَالَ شَيْخُنَا ابْنُ حِجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ وَالَّذِيْ يَظْهَرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَرْفُ جَمِيْعِ زَمَنِهِ لِلْقَضَاءِ مَا عَدَا مَا يَحْتَاجُ لِصَرْفِهِ فِيْمَا لاَ بُدَّ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّطَوُّعُ أَي مَعَ صِحَّتِهِ خِلاَفًا لِلزَّرْكَشِيّ.

Orang yang ketinggalan melaksanakan shalat wajib tanpa uzur, maka ia harus segera mengqadhanya. Ibn Hajar berpendapat, ia wajib memanfaatkan semua waktunya untuk melaksanakan qadha kecuali untuk melaksanakan sesuatu yang memang merupakan keharusan. Dalam hal ini, ia haram melakukan shalat sunah, walaupun hukumnya sah, berbeda dengan pendapat Imam Zarkasyi.

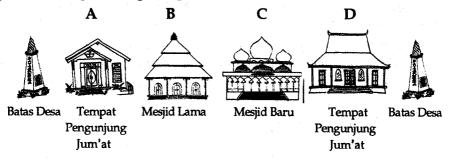
214. Masyaqat yang Memperbolehkan Jum'at Lebih dari Satu Tempat

S. Muktamar ke VI di Cirebon telah menetapkan bahwa masyaqqat yang memperbolehkan Jum'at lebih dari satu tempat itu, karena sulitnya berkumpul

²³ Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin 'ala Fath al-Mu'in, (Beirut Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), Jilid I, h. 31.

dalam satu tempat Jum'at, sebab jauhnya antara tempatnya yang berkunjung Jum'at dari tempat Jum'at, sampai perjalanan semil (lihat putusan ke 118). Dalam muktamar ini, mengharapkan keterangan lebih lanjut agar dapat dipahami dengan baik? (Gresik)

J. Sesungguhnya yang dihitung ada perjalanan semil syar'i yaitu tempat antara para pengunjung Jum'at (mujammi'in) dan tempat Jum'at (mesjid) bukan antara desa dan mesjid, dan bukan pula antara kedua tempat Jum'at (lihat gambar). Maka yang dihitung semil syar'i (1,666 Km) yaitu antara A dan D, tidak pula antara C dan D. Apabila antara B dan D, telah ada semil syar'i, maka di B boleh mendirikan Jum'at di C, perhatikan agar hilang keraguan.



KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-13

Di Menes Banten Pada Tanggal 13 Rabiuts Tsani 1357 H. / 12 Juli 1938 M.

215. Shalat Dhuha dengan Berjamaah 216. Membaca al-Fatihah Oleh Makmum 217. Shalat Hari Raya di Lapangan

218. Bermakmum Kepada Golongan Khawarij Kaitannya dengan I'adah/Mengulang Lagi Shalatnya

219. Pengertian "Dharurat" Menurut Syara'

220. Membeli Padi dengan Janji Dibayar Besok Panen

221. Menggarapkan Sawah Kepada Orang yang Tidak Mau Mengeluarkan Zakatnya

222. Menyewa Pohon Karet untuk Diambil Getahnya

223. Pemberian Hadiah untuk Melariskan Dagangannya 224. Membeli Serumpun Pohon Bambu

225. Inventarisasi Kantor yang Dibeli dengan Uang Sumbangan dengan Maksud Wakaf

226. Menyumpah Pendakwa yang Sudah Mempunyai Bukti

227. Memberikan Kepada Sebagian Ahli Waris Tanpa Ijab Qabul 228. Menyerahkan Padi dengan Maksud Zakat

229. Kepada Anak Muslim, Orang Tua Bernasehat: "Kamu Harus Tetap Pada Agamamu." Dan Kepada Anak Kristen, Bernasehat: "Kamu Harus Tetap Pada Agamamu."

230. Pengertian "Balad" dalam Bab Zakat

231. Berobat untuk Mencegah Hamil

232. Membaca al-Qur'an dengan Putus-putus untuk Memudahkan Mengajar Hijaiyyah

233. Memasuki Organisasi Islam

234. Menuduh Organisasi Nahdlatul Ulama Sebagai Sesuatu yang Bid'ah 235. Perkawinan Perempuan yang Dithalaq Raj'i 236. Menggambar Binatang dengan Sempurna Anggotanya

215. Shalat Dhuha dengan Berjamaah

- S. Bagaimana hukumnya shalat Dhuha dengan berjamaah untuk memperingati kelahiran salah satu pembesar pemerintah atau perkawinan. Apakah perbuatan demikian itu hukumnya boleh (jaiz)? Ataukah haram? (Tasikmalaya)
- J. Hukumnya berjamaah yang diperuntukkan keperluan tersebut itu haram, karena dapat menimbulkan pelanggaran agama, seperti sangkaan orang banyak, bahwa jamaah itu, menurut perintah agama, pula tidak mendapat pahala.

Keterangan, dari kitab:

1. Bughyah al-Mustarsyidin¹

(مَسْأَلَةُ بِ كِ) تُبَاحُ الْجُمَاعَةُ فِي خَوْ الْوِثْرِ وَالتَّسْبِيْجِ فَلاَ كَرَاهَةَ فِيْ ذَلِكَ وَلاَ ثَوَابَ إِلَى أَنْ قَالَ: إِذَا لَمْ تَقْتَرِنْ بِذَلِكَ مَحْدُوْرٌ كَنَحْوِ إِيْذَاءٍ وَاعْتِقَادِ الْعَامَّةِ مَشْرُوْعِيَّةِ الْجِمَاعَةِ وَإِلاَّ فَلاَ ثَوَابَ بَلْ يَحْرُمُ وَيُمْنَعُ مِنْهَا.

Diperbolehkan berjamaah misalnya pada shalat witir dan tasbih. Dalam hal ini tidak dimakruhkan namun juga tidak berpahala ... jika tidak disertai dengan sesuatu yang dikhawatirkan seperti adanya gangguan atau timbulnya keyakinan di kalangan umum tentang disyariatkannya jamaah tersebut. Jika tidak disertai hal tersebut, maka tidak berpahala dan bahkan haram dan harus dilarang.

216. Membaca al-Fatihah Oleh Makmum

- S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang pendapat sementara orang yang mengatakan bahwa makmum tidak wajib membaca al-Fatihah, karena al-Fatihah ditanggung imam. Pula ia berkewajiban mendengarkan bacaan imam, menurut firman Allah, yang artinya: "Bila ada pembacaan al-Qur'an, maka kamu sekalian harus mendengarkan dengan mengheningkan." Apakah pendapat dan fatwa itu benar dan tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah Saw., yang artinya: "Tidak sahlah shalatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah"? (Purwokerto)
- J. Kalau yang dimaksud dengan makmum ini, makmum *muwafiq* (bukan *masbuq*) maka pendapat dan fatwa itu tidak benar, menurut pendapat yang sahih dan mazhab Syafi'i, yakni makmum itu harus membaca al-Fatihah, demikian itu tidak bertentangan dengan firman Allah yang

Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 H/1952 M)), h. 67.

maksudnya supaya mendengarkan dan mengheningkan bila ada bacaan al-Qur'an, karena yang dimaksudkan dengan firman Allah itu, ialah melarang berbicara sewaktu mendengarkan bacaan al-Qur'an, atau melarang membaca keras di belakang imam, bukan membaca al-Fatihah bagi makmum.

Keterangan, dari kitab:

1. Kasyifah al-Saja Syarah Safinah al-Naja²

وَتَجِبُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ سَوَاءُ الصَّلاَةُ السِّرِّيَّةُ وَالْجَهْرِيَّةُ وَسَوَاءُ الْإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ وَالْمُنْفَرِدُ لِحَبْرِ الصَّحِيْحَيْنِ: لاَ صَلاَةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

(Membaca al-Fatihah) wajib di setiap rakaat, baik shalat dengan bacaan pelan (Zhuhur dan Ashar), ataupun keras (Maghrib, Isya', Subuh dan Jum'at), sebagai imam, makmum ataupun sendirian, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim: "Tidak sah shalat orang yang tidak membaca al-Fatihah."

Hasyiyah Tafsir al-Baidhawi³

قَوْلُهُ تَعَالَى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنْصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ. وَلَمَّا كَانَ الْمَقْصُودُ مِنَ الْأَمْرِ بِالْإِنْصَاتِ النَّهْ يُ عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلاَةِ أَوْ عَنِ الجَهْرِ بِالْقِرَأَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ لَمْ يَكُنْ فِي الْأَمْدِ وَمَعَ هَذَا فَحُكُمُ ظَاهِرِ الْآيَةِ مَرْعًى عِنْدَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللّهُ لِأَنَّ السُّنَّةَ عِنْدَهُ أَنْ يَسْكُتَ الْإِمَامُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْقَاتِحَةِ لِيَقْرَأَ الْمَامُومُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللّهُ لِأَنَّ السُّنَّةَ عِنْدَهُ أَنْ يَسْكُتَ الْإِمَامُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْقَاتِحَةِ لِيَقْرَأَ الْمَامُومُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللّهُ لِأَنَّ السُّنَّةَ عِنْدَهُ أَنْ يَسْكُتَ الْإِمَامُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْقَاتِحَةِ لِيَقْرَأَ الْمَامُومُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَوْ لَهُ وَأَنْصِتُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَهُ وَأَنْفُومُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَة لِللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فِي الْبَابِ أَنَّ مَنْ أَوْجَبَ الْقِرَأَةُ عَلَى الْمَامُومُ قَالَ الْآيَةُ الْإِمَامُ فِي الْقِرَآقِ وَلَالُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْقَوْآنِ فِلْ الْمَامِ وَيُنَازِعُ الْإِمَامُ فِي الْقِرَأَةِ عَلَى الْمَامُ فِي الْمَامَ فِي الْمِنَاقِ وَالْقِيرَاقِ وَلَالْمُ اللّهُ الْمَامَ فِي الْمُعَامِ فَي الْمُعَامِ فِي الْمِنَامُ فِي الْمِورَاةِ وَلَا الْمَامِ وَيُنَازِعُ الْإِمَامَ فِي الْقِرَأَةِ وَلَا الْمَامِ وَيُعَالِمُ الْمُؤْمِ وَالْ الْمُعَامِ وَيُعَالِهُ الْمَامَ فِي الْقَرْآةِ وَيَقُولُهُ الْمُؤْمِ وَالَ الْمُؤْمِ وَاللّمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُو

Allah Swt. berfirman: "Dan apabila dibacakan al-Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat" (al-A'raf: 204). Dan ketika yang dimaksud dari perintah untuk memperhatikan

Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi, Kasyifah al-Saja Syarah Safinah al-Naja, (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, t. th.), h. 54.

Muhyiddin Syekh Zadah, Hasyiyah Tafsir al-Baidhawi, (Turki: al-Maktabah al-Islamiyah, t. th.), Jilid II, h. 293.

adalah larangan berbicara dalam shalat, atau membaca keras di belakang imam, maka dalam ayat tersebut tidak ada petunjuk larangan bacaan makmum. Meskipun begitu, makna lahiriyah ayat tersebut tetap diaplikasikan menurut al-Syafi'i Ra., karena menurutnya imam itu disunahkan untuk diam sejenak setelah selesai membaca al-Fatihah agar makmum berkesempatan membaca al-Fatihah saat diamnya imam tersebut. Selain itu, keumuman firman Allah Swt. surat al-A'raf ayat 204 di atas, Nabi Saw. mewajibkan makmum diam (yaitu dengan sabda beliau Saw.): "Jika kalian berada di belakangku (sebagai makmum), maka jangan membaca apapun kecuali al-Fatihah. Sesungguhnya shalat itu tidak sah tanpa membaca al-Fatihah.", dan sabdanya: "Sesungguhnya shalat itu tidak sah tanpa membaca al-Fatihah." itu mengkhususkan keumuman ayat al-Qur'an tersebut. Sebab, mengkhususkan keumuman al-Qur'an dengan hadits itu boleh. Dan dalam bab ini disebutkan, bahwa ulama yang mewajibkan membaca al-Fatihah bagi makmum berpendapat: "Bahwa ayat di atas itu diterapkan pada selain al-Fatihah, makmum bisa membaca al-Fatihah ketika imam diam dan menyaingi imam dalam membaca al-Fatihah."

217. Shalat Hari Raya di Lapangan

- S. Bagaimana hukum shalat hari Raya di lapangan, apabila mesjid tidak muat? (Jakarta)
- J. Sunat shalat hari Raya di lapangan, apabila mesjidnya tidak mencukupi, itu hukumnya sunat dan sunat pula mengadakan shalat hari Raya di mesjid untuk orang-orang yang tidak mampu datang ke lapangan.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Minhajul al-Qawim4

وَيُسَنُّ فِعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ لِشَرَفِهِ فَإِنْ صَلَّى فِي الصَّحْرَاءِ كُرِهَ وَيَقِفُ خَوُ الحُيْضِ بِبَابِهِ إِلاَّ إِذَا ضَاقَ عَنِ النَّاسِ فَالسُّنَّةُ فِعْلُهَا فِي الصَّحْرَاءِ لِلاَّتِّبَاعِ. وَيُصُورُهُ فِعْلُهَا حِيْنَفِذِ فِي الْمَسْجِدِ وَكَاتِّسَاعِهِ حُصُولُ خَوِ مَطَرٍ مَانِعٍ مِنَ الصَّحْرَاءِ. وَتُسَنُّ فِيْ مَسْجِدِ مَكَّةَ وَبَيْتِ الْمُقَدَّسِ مُطْلَقًا تَبَعًا لِلسَّلَفِ وَالْخَلَفِ.

Disunatkan melaksanakan shalat hari raya di mesjid demi kemuliaan mesjid, jika shalat di lapangan maka hukumnya makruh, wanita haid berdiri di pintu mesjid, kecuali jika mesjid sudah tidak muat lagi maka disunatkan melaksanakannya di lapangan karena mengikuti Rasulullah Saw. Dalam keadaan mesjid tidak muat, maka makruh melaksanakannya di mesjid. Sama dengan cukupnya mesjid, adanya hujan yang mencegah

Ibn Hajar al-Haitami, al-Minhaj al-Qawim, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1358 H/1939 M), Cet. Ke-4, Juz I, h. 400.

pelaksanaan shalat di lapangan (yakni tentang kemakruhannya). Secara mutlak disunatkan shalat di mesjid al-Haram Mekkah dan Bait al-Maqdis (Palestina) karena mengikuti ulama salaf dan khalaf.

Tuhfah al-Muhtaj⁵

Dan ketika Imam shalat di lapangan, maka bagi orang yang shalat di masjid karena lemah fisiknya dan orang yang tidak shalat di lapangan sunnah menggantikannya mengimami shalat di masjid.

218. Bermakmum Kepada Golongan Khawarij Kaitannya dengan *I'adah*/Mengulang Lagi Shalatnya

- S. Apakah sah bermakmum kepada orang Khawarij yang tidak mengikuti salah satu empat mazhab, yang memberi hukum menurut al-Qur'an dan hadis yang diartikan sendiri? Kalau diputus sah, maka bagaimana pendapat Muktamar tentang keterangan Imam Shawi, yang artinya: "Mengambil dari al-Qur'an dan hadis menurut pendapat sendiri, itu menjadi pokok kekufuran?" Kalau diputus sah, apakah si makmum wajib i'adah (shalat lagi) ataukah tidak? (Menggala)
- J. Tidak sah makmumnya dan si makmum wajib i'adah (shalat lagi) apabila si imam berbuat bid'ah yang menjadikan kufur, seperti tidak mengakui, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Kalau tidak demikian, maka sahlah bermakmumnya dan hukumnya makruh tapi haram apabila si makmum itu orang terkemuka, karena mengkhawatirkan sesatnya para pengikutnya.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Minhaj al-Qawim6

أَمَّا مَنْ يَكُفُرُ بِبِدْعَتِهِ كَمُنْكِرِ عِلْمِ اللهِ بِالْجُزْثِيَّاتِ وَبِالْمَعْدُوْمِ وَالْبَعْثِ وَالحُشْرِ لِلأَجْسَادِ وَكَذَا الْمُجَسِّمُ عَلَى تَنَاقُضِ فِيْهِ. وَالْقَائِلُ بِالْجِهَةِ عَلَى قَوْلٍ نُقِلَ عَنِ الْأَثِمَّهِ الْاَرْبَعَةِ فَلاَ يَصِحُّ الْإِفْتِدَاءُ بِهِ كَسَائِرِ الْكُفَّارِ.

Adapun orang yang kufur dengan bid'ahnya sama dengan orang yang mengingkari ke Mahatahuan Allah Swt. dengan hal-hal yang parsial dan

⁵ Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada hamisy Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani (Mesir: Dar al-Shadr, t. th.), Jilid III, h. 48.

⁶ Ibn Hajar al-Haitami, al-Minhaj al-Qawim pada hamisy Muhammad Mahfudz al-Tarmasi, Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: al-Amirah al-Sarafiyah, 1326 H), Jilid III, h. 137-138

sesuatu yang tidak ada, yang mengingkari kebangkitan dari kubur, dan penghimpunan makhkuk di padang mahsyar, begitu pula orang yang menganggap Allah Swt. berjizim yang masih diperselisihkan, dan orang yang berpendapat Allah Swt. terbatasi dengan arah (yang disinyalir) berdasarkan satu pendapat dari imam madzhab empat, maka hukum kepada mereka tidak sah, seperti halnya orang-orang kafir.

2. Al-Minhaj al-Qawim⁷

Dan keimaman pelaku bid'ah yang tidak sampai kufur dengan bid'ahnya, dan bermakmum dengannya meskipun tidak ada selain dirinya, itu seperti bermakmum kepada orang fasik, bahkan lebih makruh. Imam al-Adzra'i membahas keharaman bermakmum dengan orang tersebut bagi orang pandai yang terkenal, karena dapat menyebabkan keterpedayaan orang awam dengan bid'ahnya itu.

3. Pendapat Muktamar

Sedang pendapat al-Shawi, tidak bisa dijadikan dalil penetapan kekufuran, karena melihat statemen sebelumnya, yaitu: "Mungkin hal itu bisa mengantar dirinya pada kekufuran.

219. Pengertian "Dharurah" Menurut Syara'

- S. Agar tidak menjadi dalil bagi orang-orang yang akan melepaskan nafsu dengan menjalankan keinginannya. Apakah yang dimaksud keadaan dharurah yang memperbolehkan menjalankan larangan? (Brebes)
- J. Sesungguhnya, yang diartikan dharurah, yaitu urusan yang apabila tidak dikerjakan, maka akan binasa atau mendekati binasa.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Asybah wa al-Nazha'ir8

⁷ Ibn Hajar al-Haitami, al-Minhaj al-Qawim pada Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: al-Amirah al-Sarafiyah, 1326 H), Jilid III, h. 137.

⁸ Jalaluddin al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H), h. 60-61.

Dharurah dapat menghalalkan larangan dengan syarat kadarnya tidak lebih kecil dari pada kadar larangan tersebut. ... Pengertian dharurah itu adalah seseorang mencapai batas bila tidak memakan sesuatu yang dilarang, maka ia akan mati atau mendekati mati. Dan kondisi ini membolehkannya memakan barang haram.

220. Membeli Padi dengan Janji Dibayar Besok Panen

- S. Kalau seorang menerimakan uang satu rupiah dengan janji dibayar sekwintal pada besok waktu panen, padahal pada waktu panen sekwintal harga dua rupiah, apakah itu termasuk akad salam (tempah) ataukah pinjam untuk menarik keuntungan? (Indramayu)
- J. Sesungguhnya akad yang demikian itu akad fasid (tidak sah) karena kalau dikatakan akad salam, maka menjadi akad salam yang fasid karena temponya dianggap tidak tentu yang tidak boleh, menurut Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah, kalau dikatakan pinjam pun tidak tepat, karena tidak dikembalikan dengan sesamanya, karena tidak sah akadnya, maka wajib mengembalikan yang diterima.

Keterangan, dari kitab:

1. Asna al-Mathalib9

Dalam akad pemesanan, maka disyaratkan tempo waktunya diketahui.

2. Rahmah al-Ummah10

Disyaratkan dalam jenis yang telah diketahui dengan sifat, kadar dan tempo yang telah diketahui.

3. I'anah al-Thalibin¹¹

Menghutangi adalah memberi hak milik sesuatu agar dikembalikan dengan sesamanya.

⁹ Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1422 H/2001), Jilid III, h. 134.

¹⁰ Ibn Abdurrahman Muhammad al-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Ainmah, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th.), h. 146-147.

Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *l'anah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), Jilid III, h. 48.

221. Menggarapkan Sawah Kepada Orang yang Tidak Mau Mengeluarkan Zakatnya

- S. Bagaimana hukumnya orang yang menggarapkan sawah (bibit dari penggarap) pada orang yang tidak mau memberikan zakatnya, apakah orang yang menggarapkan itu berdosa karena tidak zakat? (Cilacap)
- J. Bahwasanya orang yang menggarapkan sawah dalam soal itu tidak berdosa, karena si penggarap tidak memberikan zakat, asal orang yang menggarapkan itu telah menentang (inkar) dan telah memerintahkan kebaikan dan menghalangi kemungkaran sekuasanya, kemudian padi yang diterima oleh penggarap, masih ada di dalamnya hak para yang berhak menerima zakat. Cara untuk membersihkannya, supaya yang menggarapkan sawah minta izin dari si penggarap akan memberikan zakat padi yang diterimanya, lalu ia memberikan zakat kepada *mustahiqqin*.

Keterangan, dari kitab:

1. Mirqah al-Shu'ud al-Tashdiq Syarh Sullam al-Taufiq¹²

وَلاَ تَعَارُضَ بَيْنَ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ الْحَدِيْتَ، وَيَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ. إِذْ مَعْنَاهُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ أَيَّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَا كُلِفَ عِنْدَ الْمُحَقِّقِيْنَ أَنْكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ بِهِ لاَ يَضُرُّكُمْ تَقْصِيْرُ غَيْرِكُمْ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَا كُلِفَ عِنْد المُحَقِّقِيْنَ أَنْكُو إِلْمَعْرُوفِ وَالتَّهْيُ عَنِ الْمُنْكِرِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَمْتَقِلُ الْمُخَاطِبُ فَلاَ عَتْبَ بِهِ لِا اللهَ عَلْهِ الْأَمْرُ لاَ الْقَبُولُ هَكَذَا أَفَادَهُ الْفَشَنِيُ. بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْفُرُولُ هَكَذَا أَفَادَهُ الْفَشَنِيُ.

Tidak ada kontradiksi antara sabda Rasul: "Barangsiapa melihat kemungkaran maka hendaknya ia mencegahnya ..." dan antara firman Allah SWT: "Wahai orangorang yang beriman, jagalah diri Anda; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi madharat kepada Anda apabila Anda telah mendapat petunjuk" (al-Maidah: 105). Karena pengertiannya menurut para pakar adalah: "Jika kalian mengerjakannya, maka keteledoran selain kalian tidak akan menyebabkan madharat terhadap kalian". Jika memang demikian, maka seseorang tidak dibebani kecuali memerintahkan dengan kebaikan dan melarang kemungkaran. Jika hal ini sudah dilaksanakan dan orang yang diajak bicara/diberi dakwah tidak mau melaksanakan, maka ia tidak tercela karena kewajibannya hanyalah menyuruh kebaikan dan tidak ada keharusan untuk diterima. Demikian pemahaman yang disampaikan al-Fasyani.

¹² Muhammad Nawawi al-Jawi, Mirqah Shu'ud al-Tashdiq Syarhah Sullam al-Taufiq, (Indonesia: Griya Insan, t. th.). h. 16.

(فَلَوْ بَاعَهُ) أَيْ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ الزَّكَاةُ أَوْ بَعْضَهُ قَبْلَ إِخْرَاجِهَا (بَطَلَ فِيْ قَدْرِهَا) وَإِنْ أَبْقَى فِي القَّانِيَةِ قَدْرَهَا لِأَنَّ حَقَّ الْمُسْتَحِقِّيْنَ شَائِعٌ فَأَيُّ قَدْرٍ بَاعَهُ كَانَ حَقُّهُ وَحَقُّهُمْ.

Seandainya ia menjualnya, yakni sesuatu yang masih terkait dengan zakat atau sebagiannya sebelum zakatnya dikeluarkan, maka penjualannya batal dalam kadar zakatnya. Meskipun ia menyisakan sejumlah kadar zakat dalam kasus yang kedua -menjual sebagian-. Sebab hak orang-orang yang berhak menerima zakat itu mencakup semuanya. Oleh sebab itu, berapa pun kadar yang dijualnya, kadar itu merupakan haknya dan hak para penerima zakat.

3. Tuhfah al-Muhtaj¹⁴

وَذَلِكَ أَعْنِيْ مَا بَحَنَهُ السُّبُكِيُّ هُوَ مَا مُلَخُصُهُ، آجَرَ أَرْضًا لِلزَّرْعِ وَأَخَذَ أُجْرَتَهَا مِنْ حَبَّةٍ قَبْلَ إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فَهُو كَمَا لَوِ ابْتَاعَهُ فَلِلْفُقَرَاءِ مُطَالَبَتُهُ إِذْ لِلسَّاعِي أَخْذُهَا مِنَ الْمُشْتَرِي عَبْلَ إِخْرَاجِ زَكَاتِهِ فَهُو كَمَا لَوِ ابْتَاعَهُ فَلِلْفُقَرَاءِ مُطَالَبَتُهُ إِذْ لِلسَّاعِي أَخْذُهَا مِنَ الْمُشْتَرِي عَلَى كُلِّ قَوْلٍ وَيَرْجِعُ بِمَا أُخِذَ مِنْهُ عَلَى الزَّارِعِ إِنْ أَيْسَرَ وَطَرِيْقُ بَرَاتَتِهِ أَيْ الْمُؤجِرِ مِنْ قَدْرِ الزَّكَاةِ النَّذِي قَبَضَهُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الزَّارِعَ فِي إِخْرَاجِهَا أَوْ يُعْلِمَ الْإِمَامَ أَوِ السَّاعِيَ لِيَأْخُذَهَا وَنُهُ فَإِنْ تَعَدَّرَ فَيَنْبَغِي إِيْصَالُهَا لِلْمُسْتَحِقِيْنَ وَإِنْ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ وَيَنْبَغِي إِشَاعَتُهُ.

Dan hal tersebut, maksudku yang dibahas al-Subki, ringkasnya adalah: "Bila seseorang menyewakan tanah untuk ditanami, dan mengambil upahnya dari hasil tanamannya sebelum dikeluarkan zakatnya, maka kasus tersebut seperti bila ia membelinya. Maka bagi kaum fakir miskin berhak untuk memintanya, karena Sa'i (penarik zakat yang diangkat pemerintah) berhak mengambilnya dari pembeli, dan pembeli boleh mengambil kembali uang yang sudah diberikan kepada si penanam bila si penanam mampu. Dan cara pemilik tanah membebaskan diri dari kadar zakat yang ia terima (dari si penanam) adalah dengan meminta izin si penanam untuk mengeluarkan zakat tersebut, atau memberi tahu penguasa atau penarik zakat untuk mengambil zakat itu darinya. Jika kesulitan, maka ia harus memberikan zakat itu kepada orang yang berhak menerimanya. Saya belum melihat ulama lain menerangkan cara tersebut, dan semestinya disebarluaskan.

¹³ Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Fath al-Wahhab, (Indonesia: Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, t. th.), Juz I, h. 118.

¹⁴ Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada hamisy Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani (Mesir: Dar al-Shadr, t. th.), Jilid III, h. 367.

222. Menyewa Pohon Karet untuk Diambil Getahnya

- S. Bagaimana hukumnya menyewa pohon karet dengan waktu terbatas, umpama sebulan atau setahun untuk diambil getahnya? Apakah sah persewaan itu atau tidak? (Tembilahan)
- J. Bahwasanya akad tersebut tidak sah, karena kalau dengan akad jual beli maka tidak sah, karena pohon karetnya tidak dibeli, dan juga karena dalam tempo terbatas, kalau dengan akad sewa, juga tidak sah, menurut pendapat yang ashah, karena barang (getah) tidak dapat dimiliki dengan akad persewaan.

Keterangan, dari kitab:

1. Asna al-Mathalib¹⁵

Dan penjualan bertempo, karena larangan yang diriwayatkan Imam Muslim. Yaitu menjual buah kurma atau membatasi penjualan, seperti misalnya: "Aku menjual ini kepadamu dalam jangka waktu dua tahun. Jika sudah lewat dua tahun, maka tidak ada akad jual beli antara kita. Sebab batalnya penjualan tersebut, karena penjualan yang dimaksud tidak ada, dan karena adanya pembatasan waktu.

2. Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin 16

فَلاَ يَصِحُّ اِكْتِرَاءُ بُسْتَانِ لِتَمْرَتِهِ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ لَا تُمْلَكُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ قَصْدًا وَنَقَلَ التَّاجُ السُّبُكِيُّ فِيْ تَوْشِيخِهِ اخْتِيَارَ وَالِدِهِ الْتَقَيُّ السُّبُكِيُّ فِيْ آخِرِ عُمْرِهِ صِحَّةَ إِجَارَةِ الْأَشْجَارِ لِتَمَرِهَا، وَصَرَّحُوا بِصِحَّةِ اسْتِهْجَارِ قَنَاةٍ أَوْ بِثْمِ لِلانْتِفَاعِ بِمَاءِهَا لِلْحَاجِةِ. قَوْلُهُ وَنَقَلَ التَّاجُ السُّبُكِي إِلخ ضَعِيفٌ

Menyewakan kebun guna memanen buah pepohonan yang tumbuh di dalamnya itu tidak sah, karena barang tidak bisa dimiliki dengan akad sewa dengan menjadi pokok barang yang diakadi. Al-Taj al-Subki dalam kitab Tausyihnya, mengutip pilihan ayahnya, yaitu al-Taqi al-Subki, di akhir umurnya yaitu keabsahan menyewa pohon untuk memanen buahnya. Dan para ulama jelas-jelas menyatakan keabsahan menyewa kolam atau sumur

218

¹⁵ Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1422 H/2001 M), Jilid II, h. 31.

¹⁶ Zainuddin al-Malibari dan Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, Fath al-Mu'in dan l'anah al-Thalibin, (Beirut Dar al-Fikr, t th.), Jilid III, h. 110.

untuk memanfaatkan airnya, karena alasan hajat (dibutuhkan).

Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Al-Taj al-Subki mengutip ..." adalah pendapat lemah.

223. Pemberian Hadiah untuk Melariskan Dagangannya

- S. Bagaimana hukum hadiah untuk memajukan perdagangan dengan cara menyelipkan kertas yang ditulis nomor atau nama hadiah, tidak semua bungkus terselip kertas itu, atau dengan cara lain? Apakah itu boleh (jaiz) atau tidak? (Blora)
- J. Penjualannya sah asal telah mencukupi syarat-syarat jual beli yang diperlukan, dan hadiahnya pun halal, karena tidak terdapat rugi untung, karena hadiah itu, maka tidak termasuk judi.

Keterangan, dari kitab-kitab fiqh.

224. Membeli Serumpun Pohon Bambu

- S. Bagaimana pendapat Muktamar atas seorang yang membeli serumpun pohon bambu, kemudian tumbuh beberapa bambu di sekelilingnya, apakah yang bertumbuh itu hak pembeli ataukah hak milik penjual?
- J. Kalau pembeliannya tidak dijanjikan memotong, maka yang bertumbuh itu, hak milik pembeli.

Keterangan, dari kitab:

1. Tuhfah al-Muhtaj¹⁷

وَاخْتَلَفَ جَمْعُ مُتَأَخِّرُونَ فِيْ أَوْلاَدِ الشَّجَرَةِ الْمَوْجُودَةِ وَالْحَادِثَةِ بَعْدَ الْبَيْعِ هَلْ تَدْخُلُ فِيْ
بَيْعِهَا وَالَّذِيْ يُتَّجَهُ الدُّحُولُ حَيْثُ عُلِمَ أَنَّهَا مِنْهَا سَوَاءً نَبَتَتْ مِنْ جَدْعِهَا أَوْ عُرُوقِهَا الَّتِي
بِالْأَرْضِ لِأَنَّهَا حِيْنَئِذٍ كَأَغْصَانِهَا بِخِلاَفِ اللاَّحِقِ بِهَا مَعَ مُخَالَفَةِ مَنْبَتِهِ لِمَنْبَتِهَا لِأَنَّهُ اَجْنَبِيُّ
بِالْأَرْضِ لِأَنَّهَا حِيْنَئِذٍ كَأَغْصَانِهَا بِخِلاَفِ اللاَّحِقِ بِهَا مَعَ مُخَالَفَةِ مَنْبَتِهِ لِمَنْبَتِهَا لِأَنَّهُ اَجْنَيِيً
عَنْهَا وَإِذَا دَخَلَتْ اسْتَحَقَّ إِبْقَاءَهَا كَالْأَصْلِ كَمَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ مِنْ احْتِمَالَاتٍ قَالَ ابْنُ
الرِّفْعَةِ وَمَا عُلِمَ اِسْتِخْلَافُهُ كَشَجَرَةِ الْمُوزِ لاَ شَكَّ فِيْ وُجُوبِ إِبْقَائِهِ.

Segolongan ulama *muta'akhkhirin* berbeda pendapat tentang tunas pohon yang sudah tumbuh dan yang baru tumbuh setelah (induknya) dijual. Apakah tunas tersebut masuk dalam transaksi penjualan induknya atau tidak. Dan pendapat yang kuat menyatakan masuknya dalam penjualan tersebut

¹⁷ Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada hamisy Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid IV, h. 502.

sekiranya bisa diketahui bahwa tunas itu tumbuh dari induk tersebut, baik dari batang atau akarnya, karena ketika memang demikian maka sama seperti cabangnya. Berbeda dengan tunas yang tumbuh sesudahnya dengan tempat yang berlainan dengan tempat tumbuknya induk yang terjual. Karena tunas itu bukan merupakan bagian dari induk tersebut.

Tika sebuah tunas baru (sudah dipastikan) masuk dalam penjualan induknya, maka pembeli berhak membiarkannya tumbuh disitu, seperti induknya. Ibn Rif'ah berpendapat: "Tanaman yang diketahui bisa tumbuh tunasnya sebagai pengganti induk, seperti pohon pisang, maka tidak diragukan lagi keharusan dibiarkan tumbuh di situ."

2. Hasyiyah 'Umairah18

لَكِنْ لَوْ فُرِعَتْ بِجَانِيهَا شَجَرَةً أُخْرَى هَلْ يَسْتَحِقُ الْإِبْقَاءُ لَهَا إِلْحَاقًا بِالْغُصْنِ وَالْعُرُوقِ أَوْ يُؤْمَرُ بِقَطْعِهَا أَوْ يُفَرِّقُ يَيْنَ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِاسْتِخْلَافِهِ وَعَدَمِهِ. أَوْ تُبْقَى مُدَّةَ الْأَصْلِ فَقَطْ إحْتِمَالاَتُ لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِيْنَ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالَّذِيْ يُعْلَمُ اسْتِخْلاَفُهُ كَالْمُوْزِلاَ شَكَّ فِي وُجُوْبِ اِبْقَاثِهِ.

Akan tetapi jika di samping induk pohon tersebut tumbuh pohon lain, apakah berhak untuk dibiarkan, karena disamakan dengan cabang dan akar, atau diperintahkan memotongnya atau dipilah antara pohon yang biasa tumbuh berganti dengan yang tidak, atau dibiarkan saja sampai batas umur pohon induk tersebut. Dalam hal ini terdapat beberapa kemungkinan dari sebagian ulama mutakhir. Ibn Rif'ah berkata: "Pohon yang diketahui bisa tumbuh berganti seperti pisang, maka tidak diragukan lagi keharusan dibiarkan tumbuh di situ.

225. Inventarisasi Kantor yang Dibeli dengan Uang Sumbangan dengan Maksud Wakaf

S. Bagaimana hukumnya inventarisnya organisasi berupa kursi, almari, tikar dan lain-lain, yang dibeli dengan uang yang didapat dari para penyokong dengan maksud wakaf. Apakah inventaris itu menjadi barang wakaf yang tidak diucapkan? Kalau tidak sehingga bolehkah dijual untuk membayar pinjaman organisasi tersebut? (K. Faqih, Gresik)

J. Inventaris itu tidak menjadi wakaf kalau tidak diucapkan oleh hakim atau nazhir dengan wakaf.

Keterangan, dari kitab:

¹⁸ Syihabuddin Ahmad al-Barisi 'Umairah, Hasyiyah 'Umairah 'ala syarah al-Mahalli dalam Qulyubi wa 'Umairah, (Cairo: Dar Ihyai al-Kutub al-Arabiyah, t. th.), Jilid II, h. 229.

(وَلاَ يَصِيْرُ الْمُشْتَرَى وَقْفًا حَتَّى يُوقِفَهُ) الْفَصِيْحُ يَقِفَهُ (الْحَاكِمُ) وَفُرِقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَبْنِيِّ فِي عِمَارَةِ الْجُدُرِ أَنَّ الْمَوْقُوفَةَ وَتَرْمِيْمَهَا حَيْثُ يَصِيْرُ وَقْفًا بِالْبِنَاءِ لِجِهَّةِ الْوَقْفِ بِأَنَّ الْعَبْدَ الْمَوْقُوفَةَ بَاقِيَةٌ وَالطَّيْنَ وَالْحَجَرَ الْمَبْنِيَّ بِهِمَا كَالْوَصْفِ الْمَوْقُوفَةَ بَاقِيَةٌ وَالطَّيْنَ وَالْحَجَرَ الْمَبْنِيَّ بِهِمَا كَالْوَصْفِ النَّابِعِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْحُاكِمَ يَتَوَالَى الشِّرَاءَ وَالْوَقْفَ مَعَلَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَقْفِ نَاظِرٌ خَاصًّ وَإِلاَّ فَهُو الَّذِي يَتَوَالَى بِهِمَا كَمَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلاَمِهِمْ فِيمُنْ يَتَوَلَى أَمْرَ الْوَقْفِ.

Budak yang dibeli –sebagai ganti budak wakafan yang mati- tidak menjadi barang wakaf -shighat fashih dari kata عَرَفَفَ adalah sampai hakim mewakafkannya. Perbedaan antara budak yang dibeli tersebut dan bangunan yang ditegakkan dalam perawatan dinding yang hukum bangunan wakaf dan pembuatan dindingnya bisa langsung menjadi barang wakaf dengan dibangun pada arah lahan wakaf, adalah budak yang diwakafkan sama sekali sudah tidak bisa dimanfaatkan, sementara lahan wakaf masih ada dan tanah liat serta batu yang digunakan membangun itu hukumnya seperti sifat yang mengikuti lahan wakaf.

Keterangan yang telah disebutkan, yaitu hakim itu menangani pembelian dan pewakafannya adalah jika tidak ada *nazhir* khusus yang mengelola wakaf tersebut. Jika ada, maka dia yang menangani keduanya, sebagaimana yang dipahami dari pernyataan para ulama tentang pihak yang menangani urusan perwakafan.

226. Menyumpah Pendakwa yang Sudah Mempunyai Bukti

- S. Bolehkah pendakwa yang telah mempunyai bukti boleh disumpah? Kalau boleh, apakah nama sumpah itu?(Ponorogo)
- J. Betul pendakwa yang mempunyai bukti boleh disumpah dalam tujuh perkara, dan sumpahnya dinamakan sumpah istizhhar.

Keterangan, dari kitab:

1. Tuhfah al-Thullab²⁰

(وَالْيَمِيْنُ مَعَ الشَّاهِدَيْنِ) وَتَقَعُ (فِي الرَّدِّ) أَيْ دَعْوَى رَدِّ الْمُشْتَرِى الْمَبِيْعَ (بِعَيْبٍ

¹⁹ Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1422 H/2001), Jilid III, h. 474.

²⁰ Zakaria al-Anshari, Tuhfah al-Thullab pada hamisy al-Syarqawi, (Indonesia: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t. th.), Jilid II, h. 475-476.

وَدَعُوى) الزَّوْجَةِ (الْعَنَةَ) عَلَى الزَّوْجِ (وَ) دَعُوَى (الْجِرَاحَةِ فِي عُضْوٍ بَاطِنٍ) ادَّعَى الْجَارِحُ أَنَّهُ غَيْرُ سَلِيْمٍ (وَ) دَعْوَى (الْإِعْسَارِ) أَي إِعْسَارِ نَفْسِهِ إِذَا عُهِدَ لَهُ مَالُّ (وَ) الْجَارِحُ أَنَّهُ غَيْرُ سَلِيْمٍ (وَ) دَعْوَى (الْإِعْسَارِ) أَي إِعْسَارِ نَفْسِهِ إِذَا قَالَ لِرَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقُ السَّعْوَى (عَلَى الْغَائِبِ وَ) عَلَى (الْمَيِّتِ) وَتَخْوِهِمَا (وَفِيْمَا إِذَا قَالَ لِرَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقُ أَمْسِ ثُمَّ قَالَ أَرَدْتُ) أَنَّهَا طَالِقُ (مِنْ غَيْرِيْ) فَيُقِيْمُ فِيْ هَذِهِ الصَّورِ الْبَيِّنَةَ بِمَا إِدَّعَاهُ وَيُعَلِّفُ مَعَهَا طَلَبًا لِلإِسْتِظْهَارِ.

Dan sumpah beserta dua orang saksi. Hal ini terjadi pada klaim pengembalian barang oleh si pembeli karena cacatnya barang, klaim istri atas impotensi suami, klaim luka bagian dalam tubuh dari orang yang melukai yang menyatakan bahwa anggota tubuh bagian dalam itu memang sudah tidak sehat, klaim kebangkrutan pada diri sendiri ketika diketahui ia punya harta, klaim kepada orang yang tidak ada, klaim kepada mayit dan semisalnya, dan klaim dalam kasus ketika seorang suami berkata kepada istrinya: "Anda tertalak kemarin." lalu ia berkata: "Yang kumaksud adalah isrtiku itu tertalak oleh selainku.", maka seseorang dalam kasus-kasus tersebut harus mendatangkan bukti yang membenarkan klaim(dakwaan)nya itu. Kemudian ia harus di sumpah besertaan bukti tersebut, karena istizhhar (memperjelas masalah).

227. Memberikan Kepada Sebagian Ahli Waris Tanpa Ijab Qabul

- S. Bagaimana pendapatmu sekalian tentang orang yang memberikan pada antara waris, tidak dengan ijab qabul, malah pemberiannya dengan perantara yang lain. Sahkah pemberian itu? Atau tidak? Karena di antara ulama memberi fatwa sah (Mestercornelis).
- J. Bahwa pemberian itu tidak sah, karena belum mencukupi syaratnya. *Keterangan*, dari kitab:
- 1. Fath al-Mu'in²¹

Hibah adalah pemberian hak milik sesuatu tanpa imbalan apapun, dengan ijab seperti perkataan: "aku memberikannya padamu" dan qabul seperti ucapan: "aku terima darimu".

²¹ Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in (Beirut: Dar al-Fikr, t.th). h. 84.

228. Menyerahkan Padi dengan Maksud Zakat

S. Bagaimana pendapat Muktamar atas seorang yang menerimakan padi pada Mantri Irigasi yang mewajibkan pada tiap-tiap pemilik tanah satu bahu memberikan 30 Kg. Kemudian orang yang memberikan itu dengan maksud zakat, sedang si Mantri Irigasi tidak mengerti bahwa pemberian itu untuk zakat, tetapi menganggap bahwa pemberian itu adalah padi yang diwajibkan pada tiap pemilik tanah, sebagai ongkos pemberian air. Apakah yang demikian dianggap mencukupi memberikan zakat? (Banyuwangi)

J. Tidak mencukupi pemberian untuk zakat, karena terdapat maksud lain yang menghalangi.

Keterangan, dari kitab:

1. I'anah al-Thalibin²²

Pendapat mereka para ulama yang memperbolehkan memberikan zakat kepada orang yang tidak tahu bahwa itu adalah zakat, karena yang menjadi ukuran adalah niat pemiliknya, maka hal tersebut adalah ketika tidak ada hal yang mengalihkan pengambilan zakat tersebut. Sedangkan jika ada, seperti si pengambil mengambilnya dengan maksud lain, maka tidak boleh.

229. Kepada Anak Muslim, Orang Tua Bernasehat: "Kamu Harus Tetap Pada Agamamu." Dan Kepada Anak Kristen, Bernasehat: "Kamu Harus Tetap Pada Agamamu."

- S. Kalau seorang Islam memberi nasehat kepada anaknya yang beragama Islam, dengan ucapan: "Kamu harus tetap dalam agamamu." Begitu pula pada anaknya yang beragama Kristen dengan ucapan yang sama. Apakah si ayah itu menjadi kufur dengan ucapannya itu? (K. Faqih, Gresik)
- J. Kalau tidak ada maksud dengan ucapannya itu, *ridha* akan kekristenannya si anak, maka tidak menjadi *kufur*. Tetapi kalau sengaja *ridha* atas kekristenannya si anak, maka menjadi kufur dan terlepas dari agama Islam.

Keterangan, dari kitab:

1. Bughyah al-Mustarsyidin²³

²² Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *l'anah al-Thalibin*, (Beirut Dar al-Fikr, t. th.), Jilid IV, h. 130.

²³ Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Indonesia: Syirkah Nur Asia, t, th.), h. 297.

وَمِنْهَا أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا صَدَرَ مِنْهُ مُكَفِّرُ لاَ يَعْرِفُ مَعْنَاهُ أَوْ يَعْرِفُهُ وَدَلَّتْ الْقَرَاثِنُ عَلَى عَدَمِ إِرَادَتِهِ أَوْ شَكَّ لاَ يَكْفُرُ.

Sesungguhnya seorang muslim jika keluar darinya ucapan yang bisa membuat kafir, sementara ia tidak mengetahui artinya, atau mengetahuinya namun ada indikasi yang menunjukkan ketidakinginannya, atau ragu-ragu, maka ia tidak menjadi kafir.

230. Pengertian "Balad" dalam Bab Zakat

- S. Apa yang diartikan "balad" dalam bab Zakat "Pokok bahan makanan dalam balad." Apakah propinsi, atau Karesidenan, Kabupaten, ataukah Kelurahan, ataukah Pedukuhan? (Jember)
- J. Yang diartikan dengan balad dan bab Zakat, itu umumnya tempat, berupa Kelurahan ataupun pedukuhan atau lainnya.

Keterangan, dari kitab:

1. Mauhibah Dzi al-Fadhl²⁴

(قَوْلُهُ بِغَالِبِ قُوْتِ بَلَدِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ لاَ الْمُؤَدِّى) أَشَارَ بِذِكْرِ الْمَحَلِّ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْبَلَدِ الْوَاقِعِ فِيْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ كَالْمِنْهَاجِ وَغَيْرِهِ مُطْلَقُ الْمَحَلِّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَدًا وَمِنْ ثَمَّ عَبَّرَ فِي الْمَنْهَجِ بِالْمَحَلِّ وَقَالَ فِيْ شَرْحِهِ وَتَعْبِيْرِي بِالْمَحَلِّ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيْرِهِ بِالْبَلَدِ.

Yang dimaksud dengan al-balad (negeri/negara) dalam ungkapan redaksi pengarang al-Minhaj dan lainnya adalah, semua tempat secara mutlak, walaupun tidak berbentuk negeri. Oleh karenanya, Syaikh Zakaria al-Anshari dalam al-Manhaj mengungkapkannya dengan kata al-mahal (tempat/daerah). Dan dalam Syarhnya (Fath al-Wahhab), beliau berkata: "Ungkapanku dengan kata al-mahal itu maknanya lebih umum dari pada ungkapan al-Nawawi dengan kata al-balad."

231. Berobat untuk Mencegah Hamil

- S. Bagaimana hukum berobat untuk mencegah bunting, karena takut menularnya penyakit sesama LEPRA, bolehkah atau tidak? (Mojokerto)
- J. Tidak boleh dan haram, walaupun takut menularnya penyakit, karena ketakutannya hanya sangkaan yang belum tentu.

Keterangan, dari kitab:

²⁴ Muhammad Mahfudz al-Tarmasi, Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: al-Amirah al-Sarafiyah, 1326 H), Jilid IV, h. 65.

1. Talkhis al-Murad²⁵

Syaikh Ibn Abdussalam dan Ibn Yunus berfatwa bahwa bagi wanita tidak halal mengunakan obat pencegah kehamilan walaupun dengan persetujuan suami.

2. I'anah al-Thalibin26

Haram penggunaan perkara yang mencegah kehamilan.

232. Membaca al-Qur'an dengan Putus-putus untuk Memudahkan Mengajar Hijaiyyah

- S. Bagaimana hukum membaca al-Qur'an dengan diputus-putus seperti aliffathah, lam-fathah, mim-sukun, alam mim nun fathah, syin-sukun, nas-ra-fathah kha-sukun-rah, alam nasirah, apakah termasuk mengubah yang diharamkan? Atau tidak? Demikian itu untuk memudahkan mengajar Hijaiyyah. (Jepara)
- J. Bahwasanya membaca al-Qur'an terputus-putus itu boleh, dan tidak termasuk mengubah, karena sangat diperlukan.

Keterangan, dari kitab:

1. Syarwani²⁷

Menurut pendapat yang terakhir, dalam membaca al-Qur'an boleh memotong-motong huruf-hurufnya.

233. Memasuki Organisasi Islam

S. Sewaktu kerusakan merajalela dalam daratan dan lautan, dan kefasikan, kekufuran tersebar di kota dan desa, juga umat Islam terjepit dalam menjaga agamanya untuk menjalankan agama Allah. Apakah wajib atas tiap-tiap umat Islam lelaki dan perempuan menjadi anggota organisasi dari organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk dapat mengerjakan amar ma'ruf dengan menjalankan

²⁵ Ibn Ziyad al-Yamani, Talkhis al-Murad pada Bughyah al-Mustarsyidin, (Indonesia: Syirkah Nur Asia, t. th.), h. 247.

²⁶ Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *l'anah al-Thalibin*, (Beirut Dar al-Fikr, t.th.), Jilid IV, h. 130.

kewajiban organisasi seperti membayar iuran dan lain-lain, ataukah tidak? (Semarang)

J. Bagi orang yang berkeyakinan tidak dapat menjaga agamanya kecuali dengan memasuki organisasi Islam, maka wajiblah ia menjadi anggota organisasi untuk menjaga agamanya.

Keterangan, dari kitab:

1. Sullam al-Taufiq28

Setiap muslim berkewajiban menjaga keislamannya, serta melindunginya dari apapun yang merusaknya dan membatalkannya.

234. Menuduh Organisasi Nahdlatul Ulama Sebagai Sesuatu yang Bid'ah

- S. Bagaimana hukumnya orang yang berkata: "Sesungguhnya Nahdlatul Ulama itu bid'ah dan pembikinan baru, karena NU itu tidak terdapat dalam zaman Rasulullah Saw. Apakah orang tersebut terlepas dari golongan Islam dan menjadi kufur karenanya, ataukah tidak?
- J. Orang tersebut dalam soal, tidak keluar dari golongan Islam, tetapi salah pengertian, karena belum paham anggaran dasar NU, sebab NU itu berdasar haluan Ahli Sunnah wal Jamaah, sebagaimana tersebut dalam anggaran dasar NU, walaupun tidak terdapat nama NU pada zaman Rasulullah Saw., karena nama itu sekedar logika yang tidak perlu menjadi dasar pertentangan.

235. Perkawinan Perempuan yang Dithalaq Raj'i

- S. Bagaimana pendapat Muktamar atas seorang yang menceraikan istrinya, kemudian sebelum iddah dirujuk, lalu si istri diajak kembali ke rumah lelaki, tetapi si istri tidak mau dan menentang, sehingga tujuh tahun, dengan tidak diberi nafkah dan rumah, kemudian si istri kawin dengan lelaki lain, lalu si lelaki pertama melaporkan pada hakim bahwa ia telah merujuk pada istrinya itu sebelum iddah, tetapi si hakim menetapkan sahnya nikah dan menolak dakwaan rujuk dengan alasan tidak diberi nafkah dan rumah. Apakah benar penetapan si hakim tersebut atau tidak benar? (Lubuhan)
- J. Muktamar memutuskan sebagaimana putusan Muktamar ke II

²⁸ Al-Sayyid Abdullah bin Thahir, Sullam al-Taufiq pada Mirqah Shu'ud al-Tashdiq, (Indonesia: Syirkah Nur Asia, t. th.). h. 9.

nomor 42 yang tidak mengesahkan pernikahan itu, apabila si lelaki dapat mengajukan tanda-tanda yang terang, kalau tidak ada bukti, maka sahlah nikahnya, apabila si lelaki yang mulai mendakwa, dan si istri tidak mengakui adanya rujuk.

Keterangan, dari kitab:

1. Asna al-Mathalib²⁹

(وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ) انْقِضَاءِ (الْعِدَّةِ) رَوْجًا آخَرَ (وَادَّعَى مُطَلِّقُهَا) تَقَدُّمَ الرَّجْعَةِ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ (فَلَهُ الدَّعْوَى) بِهِ (عَلَيْهَا وَكَذَا عَلَى الزَّوْجِ) إِلَى أَنْ قَالَ: (فَإِنْ أَقَامَ) بَيْنَةً بِمُدَّعَاهُ (انْتَرَعَهَا) الْعِدَّةِ (فَإِنْ بَدَأَ بِهَا) فِي الدَّعْوَى (فَأَقَرَّتْ) لَهُ مِنَ الزَّوْجِ سَوَاءً دَخَلَ بِهَا أَمْ لا (وَإِلاَّ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُقِمْ بَيّنَةً (فَإِنْ بَدَأَ بِهَا) فِي الدَّعْوَى (فَأَقَرَّتْ) لَهُ بِالرَّجْعَةِ (لَمْ يُقْبَلْ) إِثْرَارُهَا (عَلَى النَّانِي مَا دَامَتْ فِيْ عِصْمَتِهِ) لِتَعَلَّقِ حَقِّهِ بِهَا (فَإِنْ زَالَ حَقَّهُ) بِنَوْتٍ أَوْ طَلاَقٍ أَوْ إِقْرَارٍ أَوْ حَلَّفَ الْأَوَّلُ يَمِيْنَ الرَّدِّ بَعْدَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ أَوْ عَيْرَهَا (سُلِّمَتْ بِمَوْتٍ أَوْ طَلاَقٍ أَوْ إِقْرَارٍ أَوْ حَلَّفَ الْأَوَّلُ يَمِيْنَ الرَّدِّ بَعْدَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ أَوْ غَيْرَهَا (سُلِّمَتْ الْعَوْلِ كَمَّ الْعَيْلُولَةِ وَالتَّصْرِيْحُ بِحَوْنِهِ لِلْعَيْمَا اللَّمَانُ لِللَّهُ اللَّوْرَالِ حَقَّ التَّانِي حَقِي اللَّهُ اللَّوْلِ مَهْرُ مِثْلِهَا لِلْحَيْلُولَةِ) أَيْ لِأَنَّهَا حَالَتْ بَيْنَهَا وَيَيْنَ حَقِّهِ بِالتَّكَاحِ التَّانِي حَقَّ التَانِي حَقَّ التَّانِي حَقَّ التَّانِي حَقُ التَّانِي رَدَّ لَهَا الْمَهُرُ لا رُبْقَاعِ الْحَيْلُولَةِ وَالتَّصْرِيْحُ بِحَوْنِهِ لِلْحَيْلُولَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ إِلَى وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَالَةً مَنْ وَلَا اللَّهُ مُولُ لِالْفَرَامِ) مَلْ الْمَعْرُ الْفَالَ الْمَعْرُ لَهُ وَلَالْتُ مَا فَلَا وَلَوْلُ أَنْ فَالَذَ (وَلُو أَنْحَرَتُهُ إِلَى الْمَعْرُ لَلَكُمْ الْفَالِي مَا اللَّهُ وَيَ اللَّهُ وَالْمَالُ إِلَا أَقَرَامُ أَوْلَةً وَلَالَ الْمَالُ إِلَا أَقَرَامُ أَوْلَ أَنْ وَلَا الْمَعْرُ لَلْفَالُولُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ وَالْمَالُ إِلَا أَوْلَا أَلْوَلَهُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَلْولُ الْمَالِقُولُ اللْمَالُولُ الْمُؤْلِلَ الْمَالُولُ الللّهُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللْمُولُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالِلْمُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُولُ اللْمُولُ الْمُولُولُ

Jika seorang wanita yang dicerai kawin lagi dengan laki-laki lain sehabis masa 'iddahnya, dan suami pertama mengklaim lebih dahulu rujuknya dari pada waktu habisnya 'iddah, maka suami pertama berhak mendakwa demikian. Suami pertama boleh pula mendakwa suami kedua. ...

Jika ia mampu memberikan saksi atas dakwaanya, maka ia berhak mengambil kembali istrinya itu dari suaminya yang baru, baik sudah disetubuhi atau belum. Namun jika ia tidak mampu memberikan saksi, jika ia memulai dakwaannya kepada si wanita, kemudian si wanita itu mengakui adanya rujuk, maka pengakuan yang merugikan suami kedua itu tidak diterima selama wanita itu masih dalam ikatan pernikahannya, karena keterkaitan hak suami kedua itu dengannya. Lalu jika hak suami kedua hilang karena kematian, perceraian atau sumpah suami pertama dengan sumpah penolakan setelah dakwaan padanya atau sumpah selainnya, maka ia harus diserahkan pada suami pertama. Masalahnya sama seperti

²⁹ Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1422 H/2001), Jilid VII, h. 255-256.

jika seseorang mengaku telah membebaskan budak, lalu ia membelinya kembali, maka budak tersebut dihukumi telah merdeka. Dan sebelum hak suami kedua hilang, maka wanita itu harus memberi *mahr mitsl* pada suami pertama karena adanya keterhalangan, yakni dengan perkawinan kedua tersebut, berarti wanita itu telah menghalangi hak suami pertama atas dirinya, sehingga jika hak suami kedua hilang, maka suami pertama harus mengembalikan *mahr mitsl* kepada si istri. ...

Jika wanita itu mengingkari rujuk suami pertama, maka suami pertama berhak menyumpahnya atas ketidaktahuan wanita itu atas rujuknya agar ia menanggung *mahr mitsl* jika -suatu saat- mengakuinya. Atau bila wanita itu enggan bersumpah dan suami pertama sudah bersumpah, -kemudian-jika wanita itu mau bersumpah, maka gugurlah dakwaan dari suami pertama tersebut.

2. Hasyiyah al-Syarqawi30

وَإِنْ بَدَأَ بِالزَّوْجِ فِي الدَّعْوَى فَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِيْنِهِ وَإِنْ أَقَرَّ أَوْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِيْنِ وَحَلَفَ الْأَوَّلُ الْيَمِيْنِ الْمَرْدُودَةَ بَطَلَ نِكَاحُ الثَّانِي وَلاَ يَسْتَحِقُّهَا الْأَوَّلُ حِيْنَئِذِ إِلاَّ بِإِفْرَارِهَا لَهُ أَوْ حَلَفٍ بَعْدَ نُكُوْلِهَا وَلَهَا عَلَى الثَّانِي بِالْوَطْءِ مَهْرُ الْمِثْلِ إِنْ اسْتَحَقَّهَا الْأَوَّلُ وَإِلاَّ فَالْمُسَمَّى إِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَنِصْفُهُ إِنْ كَانَ قَبْلَهُ.

Jika suami pertama memulai dakwaan pada suami kedua, lalu ia mengingkarinya maka ia bisa dibenarkan dengan sumpahnya. Jika ia mengakuinya atau enggan bersumpah, dan suami pertama bersumpah, maka pernikahan kedua batal. Dan seketika itu suami pertama belum berhak atas wanita tersebut, kecuali dengan pengakuan si wanita atau sumpah suami pertama setelah si wanita menolak bersumpah. Dan sebab disetubuhi suami kedua, si wanita berhak mendapat mahr mitsl darinya bila (terbukti) suami pertama sudah berhak atasnya. Bila belum, maka ia (berhak atas) mahar yang disebut dalam akad bila dakwaan suami pertama terjadi setelah persetubuhan dengan suami kedua, dan separonya bila dakwaan tersebut terjadi sebelumnya.

236. Menggambar Binatang dengan Sempurna Anggotanya

S. Bagaimana hukum menggambar hewan (hayawan) yang sempurna anggotanya dengan potret. Apakah haram atau tidak? Karena menggambar

³⁰ Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani 'ala Tuhfah al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), Cet. Ke-1, Jilid VII, h. 177.

demikian itu hanya mengambil bayangan, ataukah ada selisih pendapat di antara ulama yang terhitung menurut ahli fiqh, kalau dikatakan boleh, apakah hanya menggambarnya saja? Atau juga memindahkan gambar dari film ke kertas? Mengharap keterangan, mudah-mudahan Allah memberi pahala.

J. Bahwasanya menggambar hewan (hayawan) yang sempurna anggotanya dengan potret, begitu memindahkan gambar dari film ke kertas itu hukumnya haram dengan tidak terdapat khilaf yang terhitung.

Catatan, haram dengan tidak terdapat khilaf yang terhitung, demikianlah putusan Muktamar ke XIII, tetapi Konferensi Besar sebagai pengganti Muktamar ke XXII, membicarakan putusan tersebut secara mendalam, maka bisa mendapatkan khilaf yang terhitung oleh ulama fiqh yang mengatakan bolehnya menggambar hewan dengan potret, sebagaimana tersebut dalam majalah Nur al-Islam ke 10 jilid pertama.

Keterangan, dari:

1. Majalah Nahdhah al-Ishlahiyah³¹

أَحَبُّ أَنْ نَجْزِمَ الْجُزْمَ كُلَّهُ أَنَّ التَّصْوِيْرَ بِآلَةِ التَّصْوِيْرِ (فُوْتُوْغِرَافِ) كَالتَّصْوِيْرِ بِالْيَدِّ تَمَامًا فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ تَمْكِيْنُ مُسَلَّطِهَا لِالْتِقَاطِ تَمَامًا فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ تَمْكِيْنُ مُسَلَّطِهَا لِالْتِقَاطِ صُوْرَتِهِ بِهَا لِأَنَّهُ بِهِذَا التَّمْكِيْنِ يُعِيْنُ عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ غَلِيْظٍ. وَقَالَ أَيْضًا تَنْبِيهُ لَعَلَّكَ صُوْرَتِهِ بِهَا لِأَنَّهُ بِهِذَا التَّمْكِيْنِ يُعِيْنُ عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ غَلِيْظٍ. وَقَالَ أَيْضًا تَنْبِيهُ لَعَلَّكَ فَهِمْتَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّ الْكَلاَمَ فِي الصُّورِ لَهُ مَقَامَانِ الْمَقَامُ الْأُوّلُ فِي نَفْسِ التَّصْوِيْرِ وَهُو حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ دُوْنَ أَيْ تَفْصِيلٍ وَقَدْ عَلِمْتَ مِمَّا قَدِمْنَا أَنَّ التَّصْوِيْرَ بِآلَةِ التَّصْوِيْرِ وَهُو كَالتَّصُويْرِ بِالْيَدِ تَمَامًا لاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا.

Ketetapan yang menyeluruh adalah, bahwa pengambilan gambar dengan tustel (photografi) hukumnya sama persis seperti menggambar dengan tangan. Maka haram bagi setiap mukmin mempergunakan tustel untuk mengambil gambar dan haram pula menguasakannya kepada orang lain untuk mengambil gambar, karena dengan demikian berarti ia telah membantu atas pekerjaan yang sangat diharamkan. Disebutkan pula sebagai peringatan semoga Anda memahami, bahwa pembicaraan dalam masalah gambar ini ada dua tahap, yang pertama perihal pengambilan gambar itu sendiri yang diharamkan secara ijmak tanpa rincian apapun. Sebagaimana Anda ketahui dari keterangan yang lalu bahwa pengambilan gambar dengan tustel itu sama persis dengan menggambar/melukis dengan tangan, keduanya tidak ada perbedaan sama sekali.

³¹ Majalah al-Nahdlatul Ishlahiyah, h. 264

2. Majalah Nur al-Islam³²

وَرَأَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِيْمَا حَكَاهُ الْجُوَيْنِيّ جَوَازَ نَسْجِ الصُّورِ فِي النَّوْبِ. وَأَفْتَى آخَرُوْنَ بِإِبَاحَةِ التَّصْوِيْرِ عَلَى الْأَرْضِ وَنَعْوِهَا. وَقَالَ الْحَطَّابِيُّ الَّذِيْ يُصَوِّرُ أَشْكَالَ الْحَيَوَانِ أَيْ يَضَعُ صُوْرَتَهَا دُوْنَ أَنْ يَكُوْنَ لَهَا ظِلَّ أَرْجُوْ أَنْ لاَ يَكُونَ دَاخِلاً فِي هَذَا الْوَعِيْدِ، وَمِمَّا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ دُونَ أَنْ يَكُونَ لَهَا ظِلَّ أَرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ دَاخِلاً فِي هَذَا الْوَعِيْدِ، وَمِمَّا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدًا لِهَوُلاَءِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ لَمَّا أَخْبَرَ أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً، قَالَ: إِلاَّ مُسْتَنَدًا لِهَوُلاَءِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ لَمَّا أَخْبَرَ أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً، قَالَ: إِلاَّ رَقْمَا فِي تَوْدِ. وَهَذَا الْإِسْتِثْنَاهُ وَإِنْ وَرَدَ فِيْ سِيَاقِ النَّهْ عِنْ الثِّخَاذِ الصُّورِ فَهُو يُؤْذِنُ بِأَنَّ رَقْمَ السَّعُورِ فِي النَّوْبِ عَيْرُ دَاخِلٍ فِيْمَا حُرِّمَ مِنَ التَّصُويْرِ مَا لَيْسَ لَهُ ظِلُّ فَمَنْ يَذْهَبُ إِلَى إِبَاحَةِ رَقْمِ السَّورِ فِي الثَّوْبِ غَيْرُ التَّصُويْرِ بِهَذِهِ الْآلَةِ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ، إِذْ لاَ تَزِيْدُ عَلَى الرَّفْمِ فِي التَوْمِ. السَّورِ فِي الثَّوْبِ يُعِيْرُ التَّصُويْرِ بِهَذِهِ الْآلَةِ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ، إِذْ لاَ تَزِيْدُ عَلَى الرَّفْمِ فِي التَوْمِ. وَالتَقْشِ مَنْعَهَا.

Sebagian ulama fiqh berpendapat kebolehan menenun gambar pada baju dalam riwayat yang diceritakan al-Juwaini. Sebagian ulama lain berfatwa atas kebolehan menggambar di atas tanah dan semisalnya. Al-Khaththabi berkata: "Orang yang menggambar bentuk-bentuk binatang, yakni membuat lukisannya tanpa mempunyai bayangan (bukan tiga dimensi), aku harap ia tidak masuk dalam ancaman (yang dinyatakan dalam hadits)." Dan di antara dalil yang sah dijadikan sandaran para ulama tersebut adalah bahwa Nabi Saw. ketika memberitahukan bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat lukisan, beliau bersabda: "Kecuali lukisan (yang tidak memiliki ruh, seperti pohon dan semisalnya/tidak mempunyai bayangan -bukan tiga dimensi-) di baju". Pengecualian ini walaupun terdapat dalam rangkaian larangan menggambar, ia memberi pengertian bahwa gambar (yang tidak memiliki ruh, seperti pohon dan semisalnya/tidak mempunyai bayangan -bukan tiga dimensi-) di baju itu tidak termasuk menggambar yang diharamkan ...

Alat untuk mengambil gambar (tustel) ini belum dikenal di masa penurunan wahyu dalam menggambar sesuatu yang tidak mempunyai bayangan. Maka ulama yang berpendapat tentang kebolehan menggambar sesuatu yang tak mempunyai bayangan di baju, maka tanpa keraguan berarti ia memperbolehkan pula menggambar dengan alat tersebut, karena tidak melebihi lukisan yang tidak mempunyai bayangan di baju. Sedangkan mengukir di atas kertas dengan sesuatu (seperti kanvas) maka dilarang.[]

230

³² Majalah Nurul Islam, Vol. 10, Jilid 1.

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-14 Di Magelang Pada Tanggal 14 Jumadil Ulaa 1358 H. / 1 Juli 1939 M.

237. Pengertian "Al-Sawad al-A'zham" dalam Hadis Nabi 238. Ta'wil Hadis "Di mana Tuhan Sebelum Terjadi Langit dan Bumi." 239. Pengertian Menyerupai Orang Kafir

240. Pengertian "Kejelekan" dalam Hadis yang Ada Pada Kitab Qurrah al-'Uyun

241. Diam di Tengah Merajalelanya Bid'ah dan Kezhaliman 242. Menyimpan Gambar yang Diambil dengan Potret, Lain dengan Menggambar Binatang dengan Potret

243. Memperbaiki Mesjid dan Sesamanya dengan Uang yang Dipungut dari Pasar Malam

244. Memberikan Zakat kepada Yatim Piatu yang Tidak Faqir atau Sesamanya

245. Menjual Zakat Fitrah

246. Perbedaan antara *Balad al-Jum'ah* dan *Balad al-Zakat* 247. Memberikan Zakat kepada Satu Orang Saja

248. Mengadakan *Syirkah*/Perseroan dengan Jenis Barangnya 249. Pinjam dari Koperasi

250. Maksud "Jrangkong, Thethian, Cenunuk" 251. Lelaki Diberi Nafkah oleh Istrinya

252. Membaca al-Qur'an di Gedung Zender Radio

253. Kitab Taurat, Injil dan Zabur yang Ada pada Tangan Orang Kristen dan Yahudi Sekarang

254. Sebab Diwajibkan Mengikuti Salah Satu dari Empat Mazhab 255. Orang Perempuan Belajar Naik Sepeda 256. Asuransi Jiwa

257. Mengkhususkan Hak Milik untuk Anaknya Tertua

237. Pengertian "Al-Sawad al-A'zham" dalam Hadis Nabi

- S. Apakah yang diartikan "al-Sawad al-A'zham" dalam hadis yang memerintahkan supaya mengikuti "Sawad al-A'zham"? Apakah organisasi yang terbanyak anggotanya? Walaupun tidak berhaluan Mazhab? Ataukah organisasi yang terbesar dalam tempat itu? (Purwokerto)
- J. Yang diartikan "al-Sawad al-A'zham" dalam hadis, mengingat akhirnya hadis itu, yang artinya, disertai kebenaran dan yang menjalankannya, yaitu golongan yang dalam kebenaran, di antaranya yang menjadi anggota organisasi yang berdasar kebenaran. Adapun yang benar dalam ushuluddin, yaitu yang mengikuti mazhab Asy'ariyyah dan Maturidiyyah, dan dalam furu'iiyah yang mengikuti salah satu di antara empat mazhab.

Keterangan, dari kitab;

1. Sullam al-Wushul Syarh Nihayah al-Sul¹

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: اِتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، وَلَمَّا انْدَرَسَتْ الْمَذْهَبُ الْحُقَّةُ بِانْقِرَاضِ أَثِمَّتِنَا إِلاَّ الْمَذَاهِبَ الْأَرْبَعَةَ الَّتِي انْتَشَرَتْ أَثْبَاعُهَا كَانَ اِتِّبَاعُهَا اِتَّبَاعًا لِلسَّوَادِ الْأَعْظِمِ وَالْحُرُوْجُ عَنْهَا خُرُوْجًا عَنِ السَّوَادِ الْأَعْظِمِ.

Rasulullah Saw. bersabda: "Ikutlah kalian kepada al-Sawad al-A'zham". Ketika mazhab-mazhab yang benar telah punah dengan kematian para imamnya kecuali empat mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali) yang pengikutnya tersebar luas, maka mengikuti empat mazhab tersebut berarti mengikuti al-Sawad al-A'zham, dan keluar dari empat mazhab tersebut berarti keluar dari al-Sawad al-A'zham.

2. Al-Nashaih al-Diniyah2

إِنَّ أُمِّتِي لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُ ٱلْإِخْتِلاَفَ فَعَلَيكُمْ بِالسَّوَادِ ٱلْأَعْظَمِ. "Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan. Jika kamu melihat suatu perbedaan, maka wajib bagimu mengikuti al-sawad al-a'zham." (HR. Ibnu Majah dari Anas bin Malik). Ibarah ini terdapat pula pada kitab 'Iq al-Jid fi Ahkam al-Ijtihad karya Syaikh Ahmad Waliyullah al-Dahlawi, Cairo: al-Mathba'ah al-Salafiyah, 1965 M, h. 13. Dapat dirujuk pula kepada pendapat Fakhruddin Muhammad al-Razi, al-Mashul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1408H/1988 M), Cet. Ke-1, Juz II, h. 535-540.

² Abdullah Ba'alawi al-Haddad, al-Shaih al-Diniyah, (Semarang: Thoha Putera, t. th.), h. 7

Muhammad Bakhit al-Muthi'i, Sullam al-Wushul Syarah Nihayah al-Sul (Mesir: Bahrul Ulum, t.th.), jilid III, h. 921 dan jilid IV h. 580 dan 581. Hadits tersebut tercantum pada kitab ini di jilid III adalah sebagai dasar ijma'. Sedang yang tercantum di jilid IV merupakan kesimpulan tentang al-istifta'. Hadits di atas selengkapnya:

وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ السُّنَّةِ بِحَمْدِ اللهَ تَعَالَى مِنَ الرَّمَانِ الْأَوَّلِ إِلَى الْيَوْمِ هُمْ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ. Golongan Ahl al-Sunnah berkat puji Allah Swt. sejak masa pertama sampai sekarang, adalah al-sawad al-a'zham (golongan mayoritas).

3. Al-Yawaqit wa al-Jawahir³

Ketahuilah wahai saudaraku, bahwa yang dimaksud dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah dalam pemahaman orang-orang sekarang ini adalah, Syaikh Abu al-Hasan al-Asy'ari dan imam sebelumnya seperti Syaikh Abu Manshur al-Maturidi.

238. *Ta'wil* Hadis "Di mana Tuhan Sebelum Terjadi Langit dan Bumi."

- S. Apa arti hadis dalam Badai' al-Zuhur dan bagaimana ta'wilnya? Imam Ahmad menceritakan dalam kitab Musnadnya dari 'Amir al-'Uqaili berkata: "Saya berkata begini, ya Rasulullah, di mana Tuhan sebelum terjadinya bumi dan langit?" Rasulullah Saw. menjawab: "Tuhan berada di awan, di atasnya angin dan bawahnya angin pula." (Surakarta)
- J. Sesungguhnya hadis dalam *Badai' al-Zuhur* itu ada ucapan yang tersirat, yaitu '*Arasy*; lengkapnya pertanyaan begini: : "Di mana '*Arasy* Tuhan?" *Keterangan*, dari kitab:
- 1. Al-Fatawal al-Haditsiyah⁴

وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّهَ آيْنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ ؟ قَالَ: كَانَ فِيْ غَمَامٍ مَا تَخْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ وَخَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَلاَ بُدَّ فِي الحَدِيْثِ مِنْ حَذْفِ مُضَافٍ تَقْدِيْرُهُ آيْنَ كَانَ عَرْشُ رَبِّنَا فَحُذِفَ ...الخ

Diriwayatkan oleh al-Tirmidzi, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, di manakah Tuhan kita sebelum menciptakan makhluk-Nya? Rasulullah menjawab: "Dia berada di awan, di bawahnya angin dan di atasnya angin, Dia menciptakan 'Arsy-Nya di atas air ...". Dalam Hadis tersebut tentu ada mudhaf yang tidak disebutkan, ungkapan sepenuhnya: "Dimanakah Arsy Tuhan kita ..."

³ Abdul Wahhab al-Sya'rani, Al-Yawaqit wa al-Jawahir, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1378 H/1959 M), Jilid I, h. 3.

⁴ Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Haditsiyah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1390 H/1971 M), h. 191.

239. Pengertian Menyerupai Orang Kafir

- S. Apa yang diartikan sabda Rasulullah Saw.; "Siapa yang menyerupai golongan, maka ia termasuk golongan itu." menyerupai dalam waktu sekarang ini bagaimana? Dan bagaimana hukumnya menyerupai orang kafir? (Mister Cornelis, Jatinegara)
- J. Yang diartikan *menyerupai* ialah memakai pakaian yang ditentukan hanya untuk golongan itu sendiri, J akaian itu baik atau jelek sekalipun, seperti memakai lencana Salib (†), dan berpakaian yang menunjukkan bahwa itu bukan pakaian orang Islam, juga seperti menutup toko pada hari Minggu dan lain sebagainya.

Adapun hukumnya menyerupai, maka telah diputuskan dalam Muktamar II masalah nomor 33. Kemudian ada keterangan dalam kitab *Fath al-Bari* juz X, yang artinya: Sesungguhnya yang dilarang menyerupai, ialah menyerupai dalam pakaian dan lain sebagainya bukan menyerupai dalam hal yang baik.

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Bari⁵

قَالَ الشَّيْخُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ نَفَعَ اللهُ بِهِ مَا مُلَخَّصُهُ: ظَاهِرُ اللَّفْظِ الزَّجْرُ عَنِ النَّشَبُّهِ فِي النَّيِّ النَّشَبُّهُ فِي الزَّيِّ وَالْخُرَى أَنَّ الْمُرَادَ النَّشَبُّهُ فِي الزَّيِّ وَبَعْضِ الصِّفَاتِ وَنَحْوِهَا لاَ التَّشَبُّهُ فِيْ أُمُوْرِ الْخَيْرِ.

Kesimpulan dari pendapat Syaikh Abu Muhammad Ibn Abi Hamzah adalah, pengertian *zhahir* dari lafal (hadits tersebut) adalah mencegah dari menyerupai dalam segala hal. Namun yang dipahami dari dalil-dalil lain, yang dimaksud adalah menyerupai dalam atribut, sebagian sifat-sifat orang kafir, dan semisalnya. Bukan menyerupai dalam hal kebaikan.

2. Bughyah al-Mustarsyidin6

(مَسْأَلَةُ ي) حَاصِلُ مَا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ فِي التَّزَيِّي بِزَيِّ الْكُفَّارِ أَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَتَزَيَّى بِزَيِّهِمْ مَيْلاً إِلَى دِيْنِهِمْ وَقَاصِدًا التَّشَبُّة بِهِمْ فِيْ شِعَارِ الْكُفَّارِ أَوْ يَمْشِيَ مَعَهُمْ إِلَى مُتَعَبِّدَاتِهِمْ فَيَكُفُرُ إِلَى دِيْنِهِمْ وَإِمَّا أَنْ لاَ يَقْصُدَ كَذَلِكَ بَلْ يَقْصُدُ التَّشَبُّة بِهِمْ فِيْ شِعَارِ الْعِيْدِ أَوِ التَّوَصُّلَ إِلَى مُعَامَلةٍ جَائِزَةٍ مَعَهُمْ فَيَأْثُمُ وَإِمَّا أَنْ يَتَّفِقَ لَهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَيُكُرَهُ كَشَدِّ الرِّدَاءِ فِي الصَّلاَةِ.

⁵ Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari, (Beirut: Dar al-Fikr, 1420 H/2000 M), Juz XI, h. 521.

Abdurrahman βa'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1371 H/1952 M)), h. 248.

Kesimpulan dari pernyataan para ulama tentang memakai atribut orang-orang kafir adalah, jika dalam memakai atribut itu karena rasa suka kepada agama mereka dan bertujuan untuk bisa serupa dengan mereka dalam syiar-syiar kafir, atau agar bisa bepergian bersama mereka ke tempattempat peribadatan mereka, maka dalam dua hal tersebut orang itu menjadi kafir. Namun jika tidak punya tujuan seperti itu, yakni hanya sekedar bisa menyerupai mereka dalam syiar-syiar hari raya, atau sebagai media agar bisa bermuamalah berhubungan dengan mereka dalam hal-hal yang diperkenankan, maka ia hanya berdosa, atau ia secara kebetulan memakai atribut orang kafir tanpa bertujuan apapun, maka hukumnya makruh seperti mengikat selendang dalam shalat.

240. Pengertian "Kejelekan" dalam Hadis yang Ada Pada Kitab *Qurrah al-'Uyun*

S. Dalam kitab Qurrat al-'Uyun dinyatakan: ditulis dalam pintu surga. Kamu surga! Dilarang masuk orang yang kikir dan dayyus. Apa dayyus itu, ya Rasulullah! Rasulullah Saw. berkata: "Yaitu orang yang mengetahui perbuatan kejelekan pada istrinya, tetapi ia diam." Apa yang diartikan kejelekan? Apakah perzinaan saja ataukah yang lainnya seperti bergaul bebas dengan lelaki lain? (Pandeglang)

J. Yang diartikan kejelekan, yaitu perzinaan atau yang dapat menjadikan perzinaan, seperti bergaul bebas dan lain-lain.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Siraj al-Munir⁷

قَالَ فُقَهَاؤُنَا هُوَ الدَّيُّوسُ الَّذِيْ لاَ يَمْنَعُ الدَّاخِلَ عَلَى زَوْجَتِهِ مِنَ الدُّخُوْلِ وَقَالَ الْحُفَنِيُّ وَلاَ مَانِعَ مِنَ التَّفْسِيْرَيْنِ كُلُّ مِنْهُمَا قَدْ وَرَدَ وَأَلْحِقَ بَعْضُهُمْ بِالزَّوْجَةِ الْمَحَارِمَ وَالْإِمَاءَ قُلْتُ فَفُهِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَبِيْجِ الزِّنَا وَمَا أَدَّى إِلَيْهِ.

Para pakar ahli fiqh berpendapat, yang dimaksud dengan al-Dayyus adalah, suami yang tidak melarang orang lain untuk berzina dengan istrinya. Al-Hafani berpendapat: "Kedua tafsiran tidak salah, karena masing-masing mempunyai dasar." Sebagian ulama yang lain menyamakan istri itu dengan para mahramnya dan budak-budak wanita. Menurutku, dari uraian tersebut bisa dipahami bahwa yang dimaksud dengan al-qabih (keburukan), adalah perzinaan dan hal-hal yang dapat menimbulkan perzinaan.

Ali al-Azizi, al-Siraj al-Munir dan Ta'liq Syekh al-Islam al-Hifni pada hamisynya, (Mesir, Musthafa al-Halabi, 1377 H/1957 M), Cet. Ke-3, Jilid II, h. 196.

241. Diam di Tengah Merajalelanya Bid'ah dan Kezaliman

S. Termasuk hal yang tidak dapat dirahasiakan lagi, bahwa kemodelan-kemodelan agama, dan fitnahan-fitnahan telah merajalela dan tersebar dalam waktu ini, maka bagaimana hukumnya ulama kita, yang hanya bermenung di rumah tidak menghalangi kemungkaran, hanya diam dan senang makan seadanya, sampai meninggal dunia, yakni tidak maju ke muka menjalankan amar ma'ruf nahi munkar di desa-desa. Kemudian apakah lebih utama menjadi anggota salah satu organisasi Islam seperti NU ataukah tidak? (Ngawi)

J. Kalau dalam tempat itu telah ada yang tampil beramar ma'ruf nahi munkar yang mencukupi, maka hukumnya ulama tersebut dalam soal, tidak haram, tetapi kalau tidak ada yang tampil ke muka, atau belum mencukupi, maka hukumnya haram.

Adapun menjadi anggota organisasi Islam, maka lebih utama, bahkan ada yang wajib, seperti orang yang berkeyakinan tidak dapat menjaga kehormatan agama kecuali dengan menjadi anggota organisasi Islam.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Da'wah al-Tammah8

وَوَاجِبُ عَلَى كُلِّ فَقِيْهٍ فَرِغَ مِنْ فَرْضِ عَيْنِهِ وَتَفَرَّغَ لِفَرْضِ الْكِفَايَةِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى مَنْ يُجَاوِرُ بَلَدَهُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَمِنَ الْعَرَبِ وَالْآكْرَادِ وَغَيْرِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ دِيْنَهُمْ وَفَرَائِضَ يُجَاوِرُ بَلَدَهُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَمِنَ الْعَرَبِ وَالاَكْرَادِ وَغَيْرِهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ دِيْنَهُمْ وَفَرَائِضَ شَرْعِهِمْ إِلَى أَنْ قَالَ: فَإِنْ قَامَ بِهَذَا الْأَمْرِ وَاحِدُ سَقَطَ الْحَرَبُ عَنِ الْأَخَرِيْنَ وَإِلاَّ عَمَّ الْحَرَبُ الْكَافَّةَ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا الْعَالِمُ فَلِتَقْصِيْرِهِ فِي الْخُرُوجِ. أَمَّا الْجَاهِلُ فَلِتَقْصِيْرِهِ فِي تَرْكِ التَّعَلَّمِ...الخ.

Setiap ahli fiqh yang telah selesai dari kewajiban individualnya (fardhu 'ain) dan kewajiban kolektif (fardhu kifayah), ia harus keluar menemui orang lain yang berada berdampingan dengan daerahnya, baik kalangan umum, Arab, Kurdi dan lainnya. Ia harus mengajari mereka tentang agama dan ketentuan-ketentuan syariat ... Jika salah seorang telah melaksanakan hal ini, maka gugurlah dosa dari warga yang lain. Jika tidak, maka dosa akan menimpa segenap warga secara keseluruhan. Bagi orang yang pandai, maka dosa itu disebabkan oleh keteledorannya tidak mau keluar (mengajari mereka). Sedangkan bagi orang bodoh, karena keteledorannya tidak mau belajar.

⁸ Abdullah bin Alwi al-Haddad, al-Da'wah al-Tammah wa al-Tadzkirah al-'Ammah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1352 H/1933 M), h. 11. Demikian juga dalam Hujjah al-Islam al-Ghazali, Ihya' 'Ulumuddin.

242. Menyimpan Gambar yang Diambil dengan Potret, Lain dengan Menggambar Binatang dengan Potret

S. Apakah boleh mengambil dalil dengan keterangan dalam kitab Tarsyih al-Mustafidin yang artinya: "Dan boleh menyimpan gambar yang diambil dengan potret," untuk diperbolehkan menggambar hewan yang sempurna anggotanya dengan potret? Dan apakah termasuk menggambar pula orang yang mengecap stempel yang mewujudkan gambar hewan? Dan atau menempel papan yang terpisah-pisah kemudian merupakan gambar hewan atau tidak? (Gresik)

J. Tidak dapat untuk dalil, karena yang diterangkan dalam kitab tersebut ialah menyimpan bukan menggambar, tentang hukumnya menggambar, dengan potret, supaya melihat putusan Muktamar ke XIII masalah nomor 236, serta peninjauannya dalam Konferensi Besar. Adapun mengecapkan stempel gambar hewan, dan menempelkan papan hingga merupakan gambar hewan, itu termasuk hukumnya menggambar hewan, yakni mewujudkan gambar.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Jawab al-Syafi⁹

Menggambar atau melukis itu adalah mewujudkan lukisan, yakni bahwa si pelukis mewujudkan lukisan binatang dengan pekerjaan dan karyanya.

2. Qamus al-Marbawi10

Melukis secara etimologi dan terminologi adalah, mewujudkan lukisan dan menjadikannya.

3. Majalah Nahdhah al-Ishlahiyah¹¹

أَحَبُّ أَنْ نُجْذِمَ الْجُزْمَ كُلَّهُ أَنَّ التَّصْوِيْرَ بِآلَةِ التَّصْوِيْرِ (فُوْتُوْغِرَافِ) كَالتَّصْوِيْرِ بِالْيَدِّ تَمَامًا فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ تَمْكِيْنُ مُسَلَّطِهَا لِالْتِقَاطِ تَمَامًا فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ تَمْكِيْنُ مُسَلَّطِهَا لِالْتِقَاطِ صُوْرَتِهِ بِهَا لِأَنَّهُ بِهَذَا التَّمْكِيْنِ يُعِيْنُ عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ غَلِيْظٍ. وَقَالَ أَيْضًا تَنْبِيْهُ لَعَلَّكَ صُوْرَتِهِ بِهَا لِأَنَّهُ بِهَذَا التَّمْكِيْنِ يُعِيْنُ عَلَى فِعْلٍ مُحَرَّمٍ غَلِيْظٍ. وَقَالَ أَيْضًا تَنْبِيْهُ لَعَلَّكَ فَعُومَ مَمَّا سَبَقَ أَنَّ الْكُلامَ فِي الصُّورِ لَهُ مَقَامَانِ الْمَقَامُ الْأُوّلُ فِي نَفْسِ التَّصْوِيْرِ وَهُو

⁹ Al-Jawab al-Syafi.

¹⁰ Idris Abdul Rauf al-Marbawi, Qamus al-Marbawi, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t. th.), Cet. Ke-4, Juz I, h.

¹¹ Majalah al-Nahdlatul Ishlahiyah, h. 264

حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ دُوْنَ أَيْ تَفْصِيْلٍ وَقَدْ عَلِمْتَ مِمَّا قَدِمْنَا أَنَّ التَّصْوِيْرَ بِآلَةِ التَّصْوِيْرِ كَالتَّصْوِيْرِ بِالْيَدِ تَمَامًا لاَ فَرْقَ بَيْنَهُمَا.

Ketetapan yang menyeluruh adalah, bahwa pengambilan gambar dengan tustel (photografi) hukumnya sama persis seperti menggambar dengan tangan. Maka haram bagi setiap mukmin mempergunakan tustel untuk mengambil gambar dan haram pula menguasakannya kepada orang lain untuk mengambil gambar, karena dengan demikian berarti ia telah membantu atas pekerjaan yang sangat diharamkan. Disebutkan pula sebagai peringatan semoga Anda memahami, bahwa pembicaraan dalam masalah gambar ini ada dua tahap, yang pertama perihal pengambilan gambar itu sendiri yang diharamkan secara ijmak tanpa rincian apapun. Sebagaimana Anda ketahui dari keterangan yang lalu bahwa pengambilan gambar dengan tustel itu sama persis dengan menggambar/melukis dengan tangan, keduanya tidak ada perbedaan sama sekali.

243. Memperbaiki Mesjid dan Sesamanya dengan Uang yang Dipungut dari Pasar Malam

- S. Bagaimana hukumnya memperbaiki mesjid atau mendirikan madrasah, atau memelihara anak yatim piatu dengan uang yang dipungut dari pasar malam, atau pertandingan main bola dan lain-lain. Apakah itu boleh atau tidak? (Martapura)
- J. Kalau dalam pasar malam itu terdapat yang dilarang agama, maka haramlah uang itu, karena itu termasuk uang yang dipungut secara tidak benar, dan haram pulalah memperbaiki mesjid dan sesamanya dengan uang itu.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kabair¹²

لِأَنَّ الْأَكْلَ بِالْبَاطِلِ يَشْمُلُ كُلَّ مَأْخُوْذِ بِغَيْرِ حَقِّ سَوَاءُ كَانَ عَلَى جِهَّةِ الظَّلْمِ كَالْغَصَبِ وَالْجِيَانَةِ وَالسَّرِقَةِ وَالْهَزُوْءِ وَاللَّعْبِ كَالْمَأْخُوْذِ بِالْقِمَارِ وَالْمَلاَهِي وَسَيَأْتِي ذَلِكَ عَلَى جِهَّةِ الْمَكْرِ وَالْحَدِيْعَةِ كَالْمَأْخُوْذَةِ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ.

Karena pengertian memakan dengan batil mencakup semua yang diambil tanpa hak, baik secara zhalim seperti pinjam tanpa izin pemiliknya, khianat, mencuri dan permainan seperti yang diperoleh dengan judi dan mainan. Dan hal tersebut akan dijelaskan dengan cara penipuan dan memperdaya seperti yang diperoleh dengan akad yang rusak.

¹² Ibn Hajar al-Haitami, Al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kabair, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M), Juz 1, h. 230.

2. Ihya' Ulum al-Din13

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْمَعَاصِي وَهِيَ لَا تَتَغَيَّرُ عَنْ مَوْضِعِهَا بِالنِّيَّةِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَيَبْنِي مَدْرَسَةً أَوْ مَسْجِدًا أَوْ رِبَاطًا بِمَالٍ حَرَامٍ قَصَدَ الْحَيْرَ فَهَذَا كُلُّهُ جَهْلُ وَالنَّيَّةُ لَا تُؤَثِّرُ فِيْ إِخْرَاجِهِ عَنْ كُوْنِهِ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا وَمَعْصِيَّةً.

Bagian yang pertama adalah maksiat, yaitu yang tidak bisa berubah posisinya oleh adanya niat ... Seseorang yang membangun sekolah, mesjid, atau pondok dengan uang haram dengan niat berbuat kebajikan, maka semuanya itu merupakan kebodohan. Niat itu tidak berpengaruh dalam mengeluarkannya dari perbuatan aniaya dan maksiat.

244. Memberikan Zakat kepada Yatim Piatu yang Tidak Faqir atau Sesamanya

- S. Apakah boleh memberikan zakat pada yatim piatu, karena mereka tidak termasuk dalam salah satu dari delapan orang yang berhak menerima zakat? (Temanggung)
- J. Boleh (sah) menerimakan zakat pada yatim piatu, apabila mereka termasuk dari salah satu delapan orang yang berhak menerima zakat, seperti mereka itu fakir miskin dan tidak keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib menurut pendapat yang sahih.

Keterangan, dari kitab:

1. Kifayah al- Akhyar¹⁴

(فَرْعُ) الصَّغِيْرُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ فَقِيْلَ لاَ يُعْطَى لاِسْتِغْنَائِهِ بِمَا لِلْيَتَامَى مِنَ الْغَنِيْمَةِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُعْطَى فَيُدْفَعُ إِلَى قَيِّمِهِ قُلْتُ: أَمْرُ الْغَنِيْمَةِ فِيْ زَمَنِنَا هَذَا قَدْ تَعَطَّلَ فِيْ بَعْضِ النَّوَاحِي لِجُوْرِ الْحُكَّامِ فَيَنْبَغِي الْقَطْعُ بِجَوَازِ اعْطَاءِ الْيَتِيْمِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَرِيْفًا فَلاَ يُعْطَى وَإِنْ مُنِعَ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ عَلَى الصَّحِيْجِ.

Anak (yatim) yang masih kecil jika tidak ada yang menafkahinya, maka sebagian pendapat menyatakan ia tidak boleh diberi (zakat), karena sudah cukup dari bagian ghanimah (rampasan). Menurut pendapat yang lebih sahih, ia boleh diberi zakat dan diserahkan kepada perawatnya. Menurut

¹³ Hujjah al-Islam al-Ghazali, *Inya' Ulum al-Din*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1387 H/1968 M), Jilid IV, h. 458.

¹⁴ Taqiyuddin al-Husain al-Dimasyqi, Kifayah al- Akhyar, (Surabaya: Dar al-Ilmi, t.th.), Juz I, h. 160.

saya, perihal *ghanimah* pada masa sekarang ini sudah tiada lagi di sebagian daerah, karena kebobrokan para penguasanya. Karenanya, maka semestinya dipastikan kebolehan memberi zakat anak yatim, kecuali jika ia termasuk bangsawan (Bani Hasyim), maka ia tidak boleh diberi, walaupun ia juga dilarang menerima pembagian dari *khumus*, menurut pendapat yang sahih.

245. Menjual Zakat Fitrah

- S. Apakah amil zakat diperbolehkan menjual zakat fitrah kemudian uang harganya diterimakan pada yang berhak?
- J. Tidak boleh, kecuali dalam keadaan memaksa, seperti mengkhawatirkan menjadi rusak atau kesulitan pengangkutan yang besar.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Anwar li al-a'mal al-Abrar¹⁵

Imam/penguasa dan penarik zakat tidak diperkenankan menjual zakat kecuali karena dharurat, seperti cepat rusak, adanya kekhawatiran (keamanan) di jalan, atau memerlukan biaya transportasi.

246. Perbedaan antara Balad al-Jum'at dan Balad al-Zakat

- S. Apa perbedaan baladul Jum'at dan Baladuz zakat? (Banyuwangi)
- J. Tidak ada perbedaan, karena yang dimaksud dengan *balad*, itu tempattempat yang berada dalam lingkungan perumahan, sekira tidak diperbolehkan jamak *qashar* bagi musafir dalam lingkungan itu.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah al-Syarqawi¹⁶

Yang dimaksud dengan balad adalah tempat atau daerah, yang haram memindahkan zakat keluar perbatasan ke tempat/daerah diperkenankannya menggashar shalat.

¹⁵ Yusuf al-Ardabil, Al-Amwar li al-A'mal al-Abrar, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t. th.), Juz I, h. 155.

¹⁶ Abdullah al-Syarqawi, Hasyiyah al-Syarqawi 'ala al-Tahrir, (Indonesia: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t. th.), Jilid II, h. 393.

Pengertian balad al-Jum'ah (daerah pelaksanaan shalat Jum'at) adalah yang sekiranya diperkenankan pelaksanaan shalat Jum'at di daerah yang dibatasi oleh bangunan-bangunan yang berhimpitan, yang tidak diperkenankan pelaksanaan shalat qashar.

247. Memberikan Zakat kepada Satu Orang Saja

- S. Termasuk urusan yang terang, bagi orang yang bermazhab Syafi'i, dalam memberikan zakat itu harus kepada delapan orang yang berhak menerima zakat, selama mereka ada, tetapi kebiasaan di negeri kita ini memberikan zakat fitrah hanya pada orang satu dari salah satu delapan orang, menurut pendapat Imam Ibn 'Ujail, seperti dalam kitab Fath al-Mu'in, apakah perbuatan demikian itu cocok dengan al-Qur'an? Kalau cocok, bagaimana hujjahnya? Kalau tidak, maka dari mana pengambilannya Imam Ibn 'Ujail? Padahal kami tidak menyangka bahwa Ibn 'Ujail itu seorang yang bodoh tentang apa yang dimaksud al-Qur'an atau kekhilafan arti al-Qur'an, mengharap penjelasan dari Muktamar. (Bangkalan)
- J. Sesungguhnya hujjah Imam Ibn 'Ujail, tentang bolehnya memberikan zakat pada seorang, yaitu bahwa perkataan al-fuqaha yang isim jinis itu termasuk juga satu orang.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Mizan al-Kubra¹⁸

فَينْ ذَلِكَ قَوْلُ الْأَثِمَّةِ الثَّلَاثَةِ إِنَّهُ يَجُوزُ صَرْفُ الصَّدَقَاتِ إِلَى صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الْأَصْنَافِ الشَّمَانِيَةِ الْمَذْكُورِينَ فِي آيَةٍ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنِ ... وَوَجْهُ اْلأَوَّلِ أَنَّ الْمُرَادَ مِن الآية الْجِنْسُ

Termasuk yang diperselisihan adalah pendapat Imam Tsalatsah, bahwa boleh mentasarufkan zakat kepada kepada satu golongan, dari delapan golongan yang disebut dalam ayat: "Sesungguhnya zakat itu bagi kaum fakir dan miskin." ... Pertimbangan pendapat pertama adalah, yang dimaksud -sighat jama'- dalam ayat itu adalah jenis.

248. Mengadakan *Syirkah*/Perseroan dengan Jenis Barangnya

S. Apakah sah mengadakan syirkah (perseroan) dengan perbedaan uang modal

¹⁷ Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1422 H/2001), Jilid I, h. 248.

¹⁸ Abdul Wahhab Al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, (Indonesia: Dar alKutub al-Islamiyah, tth.), Juz II, h. 14.

dari masing-masing andilhower (ada yang dengan uang emas, ada pula dengan uang perak, berupa rupiahan, tengahan dan lain-lain). Kalau Muktamar berpendapat tidak sah, apakah dalam masalah ini ada pendapat ulama yang mengesahkan atau tidak ada? (Probolinggo)

J. Tidak sah menurut mazhab Syafi'i, tetapi menurut salah satu pendapat mazhab Maliki dianggap sah.

Keterangan, dari kitab:

1. Tuhfah al-Thullab19

(Disyaratkan dalam perseroan itu) hendaknya dua modal itu sama, baik dalam jenis maupun sifatnya, sekiranya bila keduanya dicampur tidak bisa dibedakan lagi.

2. Bidayah al-Mujathid wa Nihayah al-Muqtashid²⁰

Adapun jika dua bagian harta itu termasuk yang tidak boleh ditempo, seperti perseroan satu pihak dengan dinar dan pihak lain dengan dirham, atau dengan dua jenis makanan yang berbeda, maka dalam hal ini pendapat Imam Malik berbeda-beda, suatu kali membolehkannya dan dalam kesempatan lain melarangnya.

249. Pinjam dari Koperasi

S. Bagaimana hukumnya pinjam dari koperasi? (Purwokerto)

J. Bahwa pinjam dari koperasi atau lainnya, apabila dijanjikan memberi bunga (rente) dan janjinya itu dalam akad atau sesudah akad tetapi sebelum ada ketetapan pinjam, maka hukumnya haram dengan kesepakatan (mufakat) para ulama; karena itu termasuk pinjaman dengan menarik keuntungan, tetapi kalau tidak dengan perjanjian bicara atau tulisan, maka hukumnya boleh dengan tidak selisih antara para ulama, kalau dengan perjanjian dengan tulisan zonder dibaca, atau tentang bunga itu telah menjadi kebiasaan, walaupun tidak dijanjikan, maka hukumnya ada dua pendapat yaitu haram, yang kedua boleh.

¹⁹ Zakaria al-Anshari, Tuhfah al-Thullab pada hamisy Abdullah al-Syarqawi, Hasyiyah al-Syarqawi, (Mesir: Dar al-Kutub al-Arabiyah al-Kubra, t. th.), Jilid II, h. 106.

²⁰ Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujathid wa Nihayah al-Muqtashid, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1427 H/2006 M), Juz I, h. 550.

Keterangan, dari kitab:

1. I'anah al-Thalibin²¹

وَمِنْ رِبَا الْفَضْلِ رِبَا الْقَرْضِ وَهُوَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ غَيْرِ نَحْوِ رَهْنٍ لَكِنْ لاَ يَحْرُمُ عِنْدَنَا إِلاَّ إِذَا اشْتُرِطَ فِيْ عَقْدِهِ .

Dan di antara riba al fadhl adalah riba al qardh, yakni semua pinjaman yang memberikan manfaat kepada si peminjam, kecuali seperti gadai. Menurut kita, yang demikian itu tidak haram kecuali disyaratkan dalam akad menghutangi. 2. Tuhfah al-Muhtaj²²

وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ شَرْطِ مُنَافِ لِمُفْتَضَى الْعَقْدِ إِنَّمَا يَبْطُلُ إِنْ وَقَعَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ لُزُوْمِهِ لاَ إِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ وَلَوْ فِي تَجْلِسِهِ.

Dan kesimpulannya adalah, semua syarat yang menafikan konsekuensi akad akan membatalkannya jika terjadi dalam akad atau sesudahnya dan sebelum *luzum*(tetap)nya. Bukan bila mendahului akad, walaupun di majlisnya.

3. Fathul Mu'in dan I'anah al-Thalibin23

وَجَازَ لِمُقْرِضٍ نَفْعُ يَصِلُ لَهُ مِنْ مُقْتَرِضٍ كَرَدِّ الزَّائِدِ قَدْرًا أَوْصِفَةً وَالْأَجْوَدِ فِي الرَّدِئِ بِلاَ شَرْطٍ فِي الْعَقْدِ بَلْ يُسَنُّ ذَلِكَ لِمُقْتَرِضِ لِقَوْلِه ﷺ: إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. وَأَمَّا الْقَرْضُ بِشَرْطِ جَرِّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا، وَمِنْهُ الْقَرْضُ لِمَنْ يَسْتَأْجِرُ مِلْكُهُ أَيْ مَثَلًا بِأَكْثَرَ مِنْ قَيْمَتِهِ لِأَجْلِ الْقَرْضِ إِنْ وَقَعَ ذَلِكَ شَرْطًا إِذْ هُوَ حِيْنَيْذٍ حَرَامٌ إِجْمَاعًا وَإِلاَّ كُرُهَ عِنْدَنَا وَحُرِمَ عِنْدَ كَثِيْرِ مِنَ الْعُلَمَآءِ.

(قَوْلُهُ فَفَاسِدٌ) قَالَ ع ش وَمَعْلُوْمُ أَنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ حَيْثُ وَقَعَ الشَّرْطُ فِيْ صُلْبِ الْعَقْدِ. أَمَّا لَوْ تَوَافَقًا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعْ شَرْطُ فِي الْعَقْدِ فَلاَ فَسَادَ.

Diperkenankan bagi kreditur untuk memperoleh manfaat yang diberikan debitur seperti pengembalian pinjaman yang lebih baik ukuran atau sifatnya, yang lebih bagus dari barang yang dipinjamkan yang tidak disyaratkan dalam akad, bahkan yang demikian itu disunatkan bagi debitur karena sabda

²¹ Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *l'anah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), Jilid III, h. 26.

²² Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj bi Syarah Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyah al-Syirwani, (Mesir: at-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid IV, h. 296.

²³ Zainuddin al-Malibari dan al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, Fath al-Mu'in dan l'anah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), Jilid III, h. 64-66.

Rasul Saw.: "Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya." Sedangkan pinjaman yang disertai syarat keuntungan bagi pihak yang meminjami, maka merupakan akad fasid (rusak) karena hadits: "Semua utang yang menarik keuntungan adalah riba." Termasuk kategori ini adalah misalnya menghutangi orang yang menyewa hartanya dengan harga lebih karena hutang tersebut, jika persewaan itu menjadi syarat menghutangi, karena dalam kondisi seperti tersebut penghutangan itu haram secara ijma'. Bila tidak menjadi syarat, maka menurut kita hukumnya makruh dan menurut ulama banyak hukumnya haram.

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Maka merupakan akad fusid.") Ali Syibramallisi berkata: "Dan telah maklum, fusidnya akad tersebut bila penyaratan menyewa dengan harga lebih itu terjadi dalam pelaksanaan akad menghutangi. Bila kedua pihak menyepakati sewa dengan harga lebih itu dan tidak menjadi syarat dalam akad penghutangan, maka akad hutang tidak rusak.

3. Bughyah al-Mustarsyidin24

(مَسْأَلَةُ ب) مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ مُجَرَّدَ الْكِتَابَةِ فِيْ سَآثِرِ العُقُوْدِ وَالْأِخْبَارَاتِ وَالْإِنْشَاءَآتِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ.

Menurut madzhab Syafi'i, bahwa sekedar tulisan di semua transaksi, beberapa pemberitahuan dan pengajuan bukan hujjah syar'i (dalil syara'). 5. Al-Asybah wa al-Nazha'ir²⁵

الْعَادَةُ الْمُطَّرِدَةُ فِي نَاحِيَةٍ هَلْ تُنْزَلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ فِيْهِ صُوَرٌ ... وَمِنْهَا لَوْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُقْتَرِضِ بِرَدِّ أَزْيَدَ مِمَّا اقْتَرَضَ فَهَلْ يُنْزَلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ فَيَحْرُمُ إِقْرَاضُهُ وَجْهَانِ أَصَحَّهُمَا لاَ.

Adat yang berlaku di suatu daerah, apakah adat mereka diposisikan sebagaimana syarat, dalam kaidah ini ada beberapa kasus. ... Di antaranya, seandainya berlaku adat yang mengharuskan peminjam mengembalikan barang yang lebih baik dari yang dipinjamnya. Maka apakah adat itu diposisikan sebagaimana syarat, sehingga hukum menghutanginya haram? Dalam kasus ini ada dua pendapat, yang lebih sahih adalah tidak diposisikan sebagaimana syarat.

250. Maksud "Jrangkong, Thethian, Cenunuk"

S. Apa sebenarnya yang dinamakan "jrangkong" menurut dugaan mereka, bahwa setelah beberapa hari dari wafatnya, lalu menjadi jrangkong yang berputar-

²⁴ Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Pekalongan: Syirkah Nur Asia, t. Th), h. 186.

²⁵ Jalaluddin al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 67.

putar dalam waktu malam di sekitar rumahnya dari rumah tetangganya, kadangkadang dinamakan "Thethian", atau "cecunuk", apakah itu ruhnya si mayat atau tulang belulangnya? (Lamongan)

J. Bahwa itu bukan ruh mayat dan bukan tulangnya, tetapi kalau ada yaitu makhluk yang lain.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah Abi Jamrah²⁶

فِيْ شَرْجٍ قَوْلِهِ ﷺ: لَاعَدُوى وَلاَطِيْرَةَ الْحَدِيْثَ. قَالَ: وَكَانَتْ الْيَهُوْدُ تَزْعُمُ أَنَّهَا تَدُوْرُ حَوْلَ قَبْرِهِ سَبْعَةَ أَيَامٍ ثُمَّ تَذْهَبُ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ كَانُوْا يَزْعَمُوْنَ أَنَّ عِظَامَ الْمَيِّتِ تَصِيْرُ هَامَّةً فَتَطِيْرُ وَيُسَمُّوْنَ ذَلِكَ الصَّدَى. فَعَلَى هَذَا فَالْمَعْنَى لاَحَيَاةً لِهَامَّةِ الْمَيِّتِ.

Adalah orang-orang Yahudi mengira bahwa ruh itu mengitari kuburannya selama tujuh hari kemudian pergi. Abu Ubaidah berkata, bahwa orang-orang Yahudi mengira bahwa tulang belulang orang mati itu akan menjadi semacam serangga, kemudian beterbangan. Mereka menamakannya dengan ashshuda. Dengan demikian dimengerti, bahwa maksud hadits tersebut adalah tidak ada kehidupan bagi serangga yang tumbuh dari mayat.

251. Lelaki Diberi Nafkah oleh Istrinya

S. Bagaimana pendapat peserta Muktamar tentang seorang lelaki yang istrinya bekerja, kemudian si lelaki diberi nafkah oleh istrinya, malahan kadang-kadang memerintahkan bekerja pada istrinya, padahal menurut firman Allah yang artinya: "Para lelakilah yang berkuasa memberikan segala keperluan para istri, bukannya terbalik para istri yang berkuasa memberikan segala keperluan para suami." Apakah halal bagi lelaki makan nafkah pemberian istrinya? (Palembang) J. Jikalau si lelaki berkeyakinan, atau ada tanda-tanda bahwa si istri senang hati untuk memberi nafkah, dan bekerja, maka halal nafkah itu, dimakan oleh si lelaki, disamakan dengan mahar yang disebut dalam firman Allah, yang artinya: "Jikalau mereka para istri senang hati untukmu, maka makanlah mahar itu dengan baik dan tulus.", demikian pula halal si istri bekerja dengan seizin si lelaki.

252. Membaca al-Qur'an di Gedung Zender Radio

S. Bagaimana hukumnya membaca al-Qur'an di zender radio, sedang tempat itu dipergunakan pula untuk malahi yang dilarang agama, apakah membaca

Muhammad Ali al-Syinwani, Hasyiyah Mukhtashar Abi Jamrah/Jam'u al-Nihayah, (Mesir: Isa al-Halabi, t. th.), h. 184.

al-Qur'an itu boleh, atau makruh, ataukah haram? Masalah ini telah dibahas oleh ulama di Kudus tetapi akhirnya tawaqquf dan diserahkan kepada Muktamar. (Kudus)

J. Bahwa membaca al-Qur'an dalam gedung zender, itu sama dengan membaca al-Qur'an di tempat lain, yakni hukumnya menurut perincian di bawah ini:

Apabila si pembaca duduk dalam tempat yang tidak terhina, dan pembacaannya terjaga apa yang perlu dijaga, dan mencukupi syarat-syaratnya membaca, pula dalam pembacaannya tidak salah, maka membacanya boleh, dan yang terdengar benar-benar al-Qur'an, mendengarkannya boleh dan mendapat pahala, adapun kalau tidak mencukupi syarat-syarat seperti duduk di tempat yang terhina, atau melanggar syarat-syarat lain, atau sengaja bacaannya untuk senang-senang dan foya-foya maka tidak boleh, kemudian kita menjadikan dosanya pembaca yang telah mencukupi syarat-syaratnya, apabila al-Qur'an itu terdengar dari tempat-tempat yang kurang layak, bagi para pendengar harus mendengarkan, apabila ada yang mengganggu harus melarang, karena yang terdengar itu nyata-nyata al-Qur'an yang terbaca.

Keterangan, dari:

1. Majalah Al-Azhar²⁷

إِنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِيْ مَرْكَرِ الْإِذَاعَةِ كَالْقِرَاءَةِ وَغَيْرِهِ أَيْ حُكْمُهَا عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي: فَإِنْ كَانَ الْقَارِئُ جَالِسًا فِيْ مَحُلِّ غَيْرِ مُمْتَهَنٍ وَكَانَ فِي قِرَاءَتِهِ مُرَاعِيًا مَا يَجِبُ مُرَاعَاتُهُ مُسْتَوْفِيًا شُرُوطِ الْقِرَاءَةِ وَلَيْسَ فِي قِرَاءَتِهِ خَلَلً. كَانَتْ قِرَاءَتُهُ جَائِزَةً وَالْمَسْمُوعُ مِنْهُ قُرْآنًا وَسَمَاعُهُ جَائِزًا وَمُعَابًا عَلَيْهِ. أَمَّا إِذَا لَمْ يَسْتَوْفِ الشَّرُوطِ الْقِرَاءَةِ أَوْ قَصَدَ مِنْ قِرَاءَتِهِ اللَّهُو يَسْتَوْفِ الشَّرُوطِ الْقِرَاءَةِ أَوْ قَصَدَ مِنْ قِرَاءَتِهِ اللَّهُو وَاللَّعْبَ فَلَا تَجُورُ. وَلاَ يَضُرُّ الْقَارِئُ مَتَى كَانَ مُسْتَوْفِيَ الشَّرُوطِ مُرَاعِيًا أَحْكَامَ التَّجُويْدِ وَكَانَ عَلَى الشَّرْفِ النَّيْمُ وَلَا يَضُرُّ الْقَارِئُ مَتَى كَانَ مُسْتَوْفِيَ الشَّرُوطِ مُرَاعِيًا أَحْكَامَ التَّجُويْدِ وَكَانَ عَلَى السَّامِعِ أَنْ يَسْتَعِ مَوْتُهُ فِي مَعَلِّ لاَتَجُورُ الْقِرَاءَةُ فِيْهِ وَعَلَى السَّامِعِ أَنْ يَسْتَمِعَ وَإِذَا وَجَدَمَنْ الْوَصْفِ النَّيْمُ فَلْ الْقَرَاءَةُ عَيْرُهَا فِيْ أَنَّ الْمَسْمُوعَ هُونَفْسُ الْمُتَكَلِمِ

Sesungguhnya bacaan al-Qur'an di pusat siaran (studio) itu sama seperti dengan bacaan yang lainnya. Yakni hukumnya sesuai dengan rincian berikut: Jika si pembaca bisa duduk di tempat yang tidak hina, dan bacaannya

²⁷ Syaikh Thaha Jib, Majalah al-Azhar, (Mesir, t. th.).

memperhatikan segala ketentuan yang harus diperhatikan, serta memenuhi segala persyaratan bacaan, dan dalam bacaannya dalak tenda et cacat, maka bacaannya itu boleh dan yang didengar itu malah bacaan paran, mendengarnya boleh dan berpahala. Sedangkar jika tidak mempuhi persyaratan, seperti duduk di tempat yang hiru atau casat dalam salah satu syarat bacaan, atau bertujuan untuk main-main, mini bacaan yang demikian itu tidak boleh.

Selama si pembaca memenuhi persyaratan dan menjaga hakum-hukum tajwid, dan ia memenuhi kriteria yang telah kami paparkan, maka bila suaranya didengar di tempat yang tidak diperbolehkan adanya bacaan (al-Qur'an), maka hal itu tidak membahayakannya. Bagi yang mendengar harus serius mendengarkannya. Jika ada yang mengganggu, maka harus dicegah. Sama dengan bacaan al-Qur'an adalah selainnya, bahwa yang didengar itu adalah benar-benar orang yang berbicara.

2. Risalah Bakhit al-Muthi'i28

إِنَّ الَّذِيْ يُسْمَعُ مِنَ الْكُلامِ بِوَاسِطَةِ الرَّادِيُوْ هُوَ كَلاَمُ الْمُتَكَلِّمِ وَصَوْتُ الْقَارِيُ وَلَيْسَ صُدَى كَلِمَاتٍ كَالَّذِيْ يُسْمَعُ مِنَ الرَّادِيُوْ قُرْآنًا حَقِيْقَةً إِلَى كَالَّذِيْ يُسْمَعُ فِي الْجِبَالِ وَالصَّحَارَى وَغَيْرِهَا. وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمَسْمُوعُ مِنَ الرَّادِيُوْ قُرْآنًا حَقِيْقَةً إِلَى أَنْ قَالَ: وَمِثْلُ الْقِرَاءَةِ غَيْرُهَا فِيْ أَنَّ الْمَسْمُوعَ هُو نَفْسُ الْمُتَكَلِّمِ وَإِنْ كَانَ مُغَنَّيًا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْإِبَاحَةُ وَإِنْ تَكَلِّم مِئِنْ كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا. الْغِنَاءِ وَإِنْ تَكَلَّم بِمَا هُو مُبَاحُ فَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ وَإِنْ تَكَلَّم بِمُحَرَّمٌ كَانَ ذَلِكَ حَرَامًا.

Sesungguhnya kalimat yang didengar melalui perantara radio adalah kalimat orang yang berbicara dan suara orang yang membaca al-Qur'an, dan bukan gema kalimat seperti yang didengar di gunung-gunung, padang sahara, dan lainnya. Dengan demikian, maka yang didengar dari radio itu adalah al-Qur'an yang sebenarnya ... Dan seperti bacaan al-Qur'an yaitu selainnya dalam hal niscaya yang didengar itu adalah pembicara itu sendiri. Jika nyanyian maka hukumnya sama dengan (mendengar) nyanyian, jika ia berbicara tentang hal mubah maka hukumnya mubah dan jika berbicara tentang yang haram maka hukumnya pun haram.

253. Kitab Taurat, Injil dan Zabur yang Ada pada Tangan Orang Kristen dan Yahudi Sekarang

S. Manakah kitab Samawiyah yang wajib diimankan dari Taurat, Injil dan Zabur? Apakah kitab-kitab yang berada di tengah orang-orang Kristen, Katolik dan Yahudi sekarang ini? Ataukah tidak? Karena mereka telah mengubah beberapa

²⁸ Muhammad Bakhit al-Muthi'i, Risalah Syaikh Bakhit al-Muthi'i pada Majalah al-Hidayah al-Islamiyah, (Mesir: Jumadil Ula 1352 H/ Agustus 1933 M), Jilid I, h. 203.

kalimatnya. (Malang)

J. Sesungguhnya kitab Taurat, Injil dan Zabur yang berada di tangan orang-orang Kristen, Katolik dan Yahudi sekarang ini bukan kitab Samawiyah yang wajib diimankan.

Keterangan, dari kitab:

1. Izhhar al-Haq²⁹

قَالَ الْإِمَامُ الْقُرْطُبِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِحِتَابِ الْإِغْلَامِ بِمَا فِي دِيْنِ التَّصَارَى مِنَ الْفَسَادِ وَالْأَوْهَامِ فِي الْبَابِ القَّالِثِ هَكَذَا أَنَّ الْكِتَابَ الَّذِيْ بِيَدِ النَّصَارَى الَّذِيْ يُسَمُّوْنَهُ بِالإِنْجِيْلِ وَالْأَوْهَامِ فِي الْبَابِ القَّالِثِ هَكَلَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ مِنْ قَبْلُ لَيْسَ هُو الْإِنْجِيْلُ اللَّهُ فِيهِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ مِنْ قَبْلُ لَيْسَ هُو اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُوسَى النَّهُ مِنْ الْبَهُودِ وَالنَّصَارَى فَي أَجُوبِهِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِلَّ هَذِي التَّوْرَاةِ اللهُ عَلَى مُوسَى النَّوْرَاةِ اللهُ عَلَى مُوسَى الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ قَطْعاً أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللهُ عَلَى مُوسَى الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ قَطْعاً أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللهُ عَلَى مُوسَى

Al-Qurthubi dalam kitabnya yang disebut al-I'lam bima fi Din al-Nashara min al-Fasad wa al-Auhaam pada bab ketiga berkata begini: "Sesungguhnya kitab yang berada di tangan orang Nasrani yang mereka namakan dengan Injil, bukanlah Injil sebagaimana Injil yang difirmankan oleh Allah Swt. melalui Rasul Saw.: "Dan Dia turunkan Taurat dan Injil sebelum (al-Qur'an) menjadi petunjuk bagi manusia ... (Ali Imran: 3-4)." Demikian redaksinya secara persis. ... Dan penulis Hidayah al-Hiyara fi Ajwibah al-Yahudi wa al-Nashara (Ibn Qayyim al-Jauziyah) berkata: "Sungguh Taurat yang berada di tangan orang Yahudi itu sudak terdapat penambahan, distorsi dan pengurangan, yang tidak samar lagi bagi orang-orang yang berpengetahuan luas. Mereka mengetahui secara pasti Taurat tersebut sudah tidak dalam kondisi Taurat asli yang Allah turunkan pada Nabi Musa As.

254. Sebab Diwajibkan Mengikuti Salah Satu dari Empat Mazhab

- S. Mengapa wajib mengikuti salah satu empat mazhab, padahal empat mazhab itu mengambil dari al-Qur'an dan hadits? (Palembang)
- J. Kewajiban umat Islam untuk mengikuti salah satu empat mazhab itu, karena dikhawatirkan mencampurkan haq dan batil, atau tergelincir

248

²⁹ Rahmatullah bin Khalilurrahman al-Hindi, Izhhar al-Haq, (Maroko: al-Dar al-Baidha', t. th.), h. 198 dan 200.

dalam kesalahan, atau mengambil yang mudah saja. *Keterangan*, dari kitab:

1. Bughyah al- Mustarsyidin³⁰

تَقْلِيْدُ مَذْهَبِ الْغَيْرِ يَصْعَبُ عَلَى عُلَمَآءِ الْوَقْتِ فَضْلاً عَنْ عَوَّامِهِمْ إِلَى أَنْ قَالَ: وَأَنْ لاَ يَتَتَبَّعَ الرُّخَصَ بِأَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ مَا هُوَ الْأَهْوَنُ عَلَيْهِ وَأَنْ لاَ يُلَفِّقَ بَيْنَ قَوْلَيْنِ تَتَوَلَّدُ مِنْهُمَا حَقِيْقَةً لاَ يَقُولُ بِهَا كُلُّ مِنَ الْقَائِلَيْنِ.

Mengikuti mazhab lain, adalah sulit bagi ulama masa kini, apalagi bagi kalangan awam ... dan hendaknya tidak mencari-cari dispensasi, dengan mengambil masing-masing mazhab pendapat yang paling ringan, dan tidak boleh menggabungkan antara dua pendapat yang akan menimbulkan suatu kenyataan yang tidak pernah dinyatakan oleh kedua madzhab.

2. Al-Mizan al-Kubra31

كَانَ سَيِّدِيْ عَلِيُّ الْحَوَّاصُ رَحِمَهُ اللهِ تَعَالَى إِذَا سَأَلَهُ إِنْسَانُ عَنِ التَّقَيُّدِ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ الْآنَ. هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَوْ لاَ. يَقُولُ لَهُ يَجِبُ عَلَيْكَ التَّقَيُّدُ بِمَذْهَبٍ مَا دُمْتَ لَمْ تَصِلْ إِلَى شُهُودِ عَيْنِ الشَّرِيْعَةِ الْأُولَى خَوْفاً مِنَ الْوُقُوعِ فِي الضَّلاَلِ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ الْيَوْمَ.

Adalah yang mulia Ali al-Khawwash, jika ditanyakan oleh seseorang tentang mengikuti mazhab tertentu sekarang ini apakah wajib atau tidak, maka ia menjawab: "Kamu harus mengikuti suatu mazhab selama kamu belum bisa mencapai inti syariat karena khawatir terjatuh pada kesesatan. Dan begitulah yang mesti dilakukan orang-orang sekarang ini."

3. Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah32

وَبِأَنَّ التَّقْلِيْدَ مُتَعَيَّنُ لِلأَثِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَقَالَ لِأَنَّ مَذَاهِبَهُمْ اِنْتَشَرَتْ حَتَّى ظَهَرَ تَقْيِيْدُ مُطْلَقِهَا وَتَخْصِيْصُ عَامِّهَا بِخِلاَفِ غَيْرِهِمْ.

Dan sesungguhnya bertaklid itu tertentu pada empat imam mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali). Ibn Hajar al-Haitami berkata: "Karena mazhab mereka telah tersebar luas, sehingga nampak pembatasan hukum mutlaknya dan pengkhususan hukum umumnya, berbeda dengan madzab selain mereka.

4. Sullam al-Wushul Syarh Nihayah al-Sul33

³⁰ Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Pekalongan: Syirkah Nur Asia, t. Th), h. 9.

³¹ Abdul Wahhab Al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t.th.), Cet I, Juz I, h. 34.

³² Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Fighiyah al-Kubra, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H), Jilid IV, h. 307.

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اِتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، وَلَمَّا انْدَرَسَتْ الْمَذْهَبُ الْحُقَّةُ بِانْقِرَاضِ أَيْمَّيْنَا إِلاَّ الْمَذَاهِبَ الْأَرْبَعَةَ الَّتِي انْتَشَرَتْ أَتْبَاعُهَا كَانَ اِتِّبَاعُهَا اِتِّبَاعُا لِلسَّوَادِ الْأَعْظِمِ. الأَعْظِمِ وَالْحُرُوجُ عَنْهَا خُرُوجًا عَنِ السَّوَادِ الْأَعْظِمِ.

Rasulullah Saw. bersabda: "Ikutlah kalian kepada al-Sawad al-A'zham". Ketika mazhab-mazhab yang benar telah punah dengan kematian para imamnya kecuali empat mazhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali) yang pengikutnya tersebar luas, maka mengikuti empat mazhab tersebut berarti mengikuti al-Sawad al-A'zham, dan keluar dari empat mazhab tersebut berarti keluar dari al-Sawad al-A'zham.

255. Orang Perempuan Belajar Naik Sepeda

- S. Bagaimana hukum orang perempuan belajar naik sepeda, apakah itu boleh atau tidak? (Barabai)
- J. Sesungguhnya orang perempuan belajar naik sepeda, asal hukumnya tidak dilarang, tetapi apabila menimbulkan perbuatan munkar yang dilarang syara', sudah tentu menjadi dilarang, kemudian naik sepeda bagi orang perempuan itu berbeda-beda karena perbedaan tempat, umpamanya menjadi tanda para perempuan jelek, atau pelacur di sementara tempat, dan bukan demikian di lain tempat maka ada hukumnya sendiri-sendiri.

256. Asuransi Jiwa

S. Bagaimana hukumnya asuransi jiwa dalam waktu sekarang, para yang mengasuransikan membayar tiap bulan uang yang ditentukan dalam tempo sepuluh tahun umpamanya, apabila orang itu mati sebelum waktu yang ditanggungkan, maka di kantor asuransi harus memberi ganti yang telah ditentukan untuk para ahli waris, demikian pula apabila telah sampai waktu penanggungannya. Apakah demikian itu boleh atau tidak? (Tulungagung) J. Sesungguhnya mengasuransikan jiwa atau lainnya di kantor asuransi itu hukumnya haram, karena termasuk judi.

Keterangan, dari kitab:

1. Risalah Syaikh Bakhit al-Muthi'i³⁴

وَأَمَّا التَّأْمِيْنُ عَلَى الْحَيَاةِ فَهُوَ أَبْعَدُ عَنِ الْعَقْلِ السَّلِيْمِ وَأَوْجَبُ لِلدَّهْشَةِ وَالاسْتِغْرَابِ فَمَا كَانَتْ

³³ Muhammad Bahith al-Muthi'i, Sullam al-Wushul Syarah Nihayah al-Sul (Mesir: Bahrul Ulum, t.th.), jilid III, h. 921 dan jilid IV h. 580-581.

³⁴ Bakhit, Risalah Syaikh Bakhit pada Majalah Nur al-Islam, (Mesir: Th. Ke-6), Juz I, h. 267.

الشَّرِكَةُ لِمُطِيْلَ لَهُ عُمْرًا وَمَا كَانَتْ لِمُبْعِدَ عَنْهُ قَدْرًا وَلَكِنَّهَا التَّعَلُّلاَتُ بِالْأَمَانِيِّ وَمَا أَشْبَهَهَا بِشُؤُونِ الدَّجَّالِيْنَ وَالْمُشَعْوِذِيْنَ سَيَقُولُ لَكَ قَائِلُهُمْ نَفْسَ الْمَقَالَةِ الْأُولَى (الْمَذْكُورَةُ فِي بَحْثِ التَّأْمِيْنِ عَلَى الأَمْوَالِ) أَوْ قَرِيْبًا مِنْهَا سَيَقُولُ أَنِّي مَتَى دَفَعْتُ وَلَوْ قِسْطًا وَاحِدًا فَإِذَا فَاجَأَتْنِي الْمَنِيَّةُ اسْتَحَقَّ وَرَثَتَيْ مَا أَمَنْتُ بِهِ عَلَى حَيَاتِيْ فَكَانَ لَهُمْ بِذَلِكَ عَزَاءً وَسَلْوَةً عَنْ فَقْدِيْ. وَإِذَا بَقِيَتْ الْمُدَّةُ الْمَضْرُوْبَةُ إِلَيَّ اسْتَرْجَعْتُ كُلُّ مَا دَفَعْتُ بِأَرْبَاحِهِ فَأَنَا مُسْتَفِيْدٌ عَلَى كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ. وَلِلشَّرِكَةِ فَاتِدَتُهَا أَيْضًا وَهِيَ التَّصَرُّفُ فِي تِلْكَ ٱلأَمْوَالِ مِمَّا يَجْتَمِعُ لَهَا مِنِّي وَمِنْ غَيْرِيْ فَيَتَكَوَّنُ لَهَا رَأْسُ مَالٍ عَظِيْمٍ تَسْتَغِلُّهُ فِيْمَا تَرَى مِنَ الْمَشْرُوْعَاتِ التِّجَارِيَّةِ وَمُفَاجَأَةُ الْعُطْبِ قَلِيْلَةٌ فَعَزْمُهَا نَادِرٌ لاَ يُؤَثِّرُ فِيْهَا لِأَنَّ كُلَّ امْرِئِ حَرِيْصٌ عَلَى حَيَاتِهِ وَمَالِهِ وَمُحَافِظٌ عَلَيْهِمَا جُهْدًا اسْتِطَاعَتَهُ فَكُلُّ وَاحِدٍ يَعْمَلُ لِمَصْلَحَتِهَا مِنْ حَيْثُ يَعْمَلُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ فَكِلاَ الطَّرَفَيْنِ مُسْتَفِيْدً. وَنَقُولُ لَهُ لِيَكُنْ كُلُّ مَا تَقُولُ فَمَا خَرَجْتَ عَنْ أَنَّهَا مُعَامَلَةً فِيْهَا غَرْمُ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ حَتْمًا بِلاَ مُقَابِلِ وَمَا كَانَتْ الْعَدَالَةُ إِلاَّ فِي الْمُعَاوَضَةِ وَأَنْ يَكُوْنَ مِنْ كُلِّ طَرَفٍ عِوَضٌ يُعَادِلُ مَا اسْتَفَادَهُ وَأَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ الْعِوَضَيْنِ مُنَاسَبَةً تُحَقِّقَ الْمُعَادَلَةَ وَلَوِ التَّقْرِيْبِيَّةَ حَتَّى تَسْتَقِيْمَ رُوْحُ الْعَدَالَةِ فَأَمَّا وَاحِدُ الطَّرَفَيْنِ غَارِمٌ حَتْمًا بِلاَ غَنَمٍ أَوْ غَانِمٌ حَتْمًا بِلاَ غَرْمٍ فَلاَ عَدَالَةَ بَلْ هِيَ الْمُقَامَرَةُ وَالْمَيْسِرُ غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ ثَوَابًا لَمَّاعًا. وَجَاءَ عَنْ قَوْمٍ أَوْلَيْنَاهُمْ ثِقَتَنَا الْعُمْيَاءَ وَأَخَذْنَا عَنْهُمْ كُلُّ مَا قَالُوْا بِالتَّقْلِيْدِ الْأَعْمَى. وَمَا مَنْشَأُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّ جَمَاعَةً مِنْهُمْ بَهَرُوا النَّاسَ بِقُوَّةِ اسْتِخْدَامِهِمْ لِلْمَادَّةِ وَاسْتِنْبَاطِهِمْ لِقُوَى الطَّبِيْعَةِ مِمَّا لاَ تَغْمِطُهُمْ حَقُّهُمْ فِيْهِ فَكَانَ لِمَجْمُوعِهِمْ فِي التَّفُوسِ عِزَّةُ الْغَلَبَةِ فَأَسْلَمَ النَّاسُ الْقِيَادَ لَهُمْ شَأْنَ كُلِّ غَالِبٍ مَعَ كُلِّ مَعْلُوْبٍ وَإِلاَّ فَمَتَى وَزَنْتَ تِلْكَ التَّصَرُّفَاتِ بِمِيْزَانِ الْعَقْلِ السَّلِيْمِ وَالتَّقْدِ النَّزِيْهِ وَجَدْتَ ضَرَرَهَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهَا وَهَكَذَا شَأْنُ أَغْلَبِ الْمَضَارِّ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا لِمَصْلَحَةِ الْمُجْتَمِعِ ضَرَرُهَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهَا حَتَّى أَنَّ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَهُمَا مَا هُمَا فِي الضَّرَرِ لَمْ يَخْلُ عَنْ نَفْعِ مَا وَلَكِنَّهُ ضَيْئُلَ إِذَا قِيْسَ بِكِبَرِ ضَرَرِهِمَا كَمَا قَالَ جَلَّ شَأْنُهُ: .. يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. وَشَأْنُ التَّشْرِيْعِ الصَّحِيْحِ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى الْمُوَازَنَةِ بَيْنَ النَّفْعِ وَالظَّرَرِ فَمَا غَلَبَ نَفْعُهُ أَحَلَّهُ وَمَا غَلَبَ ضَرَرُهُ حَرَّمَهُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

Adapun Asuransi Jiwa maka ia jauh dari akal sehat, sangat membingungkan dan aneh. Maka tidak ada perusahaan asuransi yang mampu memperpanjang umur dan menjauhkan takdir. Ia hanya memberikan iming-iming keamanan dan semisalnya seperti yang dilakukan oleh para Dajjal dan tukang.

Para petugas mereka akan berkata kepada Anda sama seperti pernyataan yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang asuransi harta benda atau pernyataan yang sejenisnya. Ia akan berkata: "Sesungguhnya ketika aku membayar satu premi, jika aku mendadak meninggal, maka ahli warisku berhak mendapatkan apa yang telah aku jaminkan (di perusahaan asuransi) ketika aku masih hidup. Dan itu berarti, menadi pemasukan dan pelipur lara bagi ahli waris setelah kematianku. Dan jika aku tetap hidup tempo yang telah ditetapkan, maka aku berhak memperoleh kembali semua yang telah dibayarkan dan keuntungannya. Dengan begitu, maka aku beruntung dalam dua hal tersebut (mati atau hidup). Begitu halnya perusahaan asuransi, ia berhak mengelola keuangan yang dihimpun dariku dan dari orang lain, sehingga menjadi modal yang besar yang dikelola sebagaimana yang Anda lihat berbentuk proyek-proyek niaga. Resiko kerugian sangat sedikit, karena masing-masing orang sangat berkeinginan menjaga hidup dan hartanya, dan akan berusaha semampunya. Masing-masing akan berkarya bagi kepentingan dirinya, sehingga masing-masing pihak beruntung."

Kami katakan kepada peserta asuransi tersebut, bahwa semestinya setiap yang Anda ucapkan tidak keluar dari suatu transaksi yang mengandung klaim denda terhadap salah satu pihak secara wajib tanpa suatu pengganti yang sepadan dengan keuntungan yang mungkin diraupnya. Dan semestinya dari dua pihak terdapat pengganti yang pantas sehingga mampu mewujudkan keadilan walaupun relatif, sehingga ruh keadilan terwujud. Adapun bila salah satu pihak saja yang menanggung kerugian tanpa mendapat imbalan baliknya, atau menerima keuntungan tanpa ada tanggung jawab memberi kompensasi, maka keadilan tidak ada, bahkan itu merupakan gambling dan perjudian.

Sebagian orang menyatakan: "Kami memberikan kepercayaan penuh kepada mereka dan dari mereka mengambil semua yang mereka katakan dengan taklid buta (tanpa pertimbangan apapun)." Maka, sesungguhnya sekelompok dari mereka telah membingungkan orang-orang dengan kekuatan materi dan eksplorasi psikis yang tidak bisa ditutup-tutupi. Lalu mereka berhasil menguasai jiwa orang lain, sehingga orang lain pun menjadi tunduk berpasrah diri sebagaimana kondisi pemenang terhadap orang yang dikalahkannya.

Jika tidak, maka bila Anda menimbang semua asuransi itu dengan neraca akal yang sehat dan hati yang bersih, maka Anda akan mendapatkan bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Demikian halnya semua hal yang berbahaya yang dilarang bagi kepentingan umum, maka Anda akan mendapatkan bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Sehingga

minuman keras dan judi, keduanya dalam kemudharatannya tidak lepas dari adanya manfaat. Hanya saja manfaat tersebut tidak akan berarti jika dibandingkan dengan bahayanya. Sebagaimana firman Allah SWT: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya." (Al-Bagarah: 219)

Perundang-undangan Allah Swt. yang benar itu mesti berpedoman pada adanya keseimbangan antara keuntungan dan bahaya. Jika keuntungannya lebih besar, maka Allah Swt. akan menghalalkannya. Sedangkan jika bahayanya lebih besar, maka Allah Swt. akan mengharamkannya.

257. Mengkhususkan Hak Milik untuk Anaknya Tertua

- S. Bagaimana pendapat Anda, ayyuhal mu'tamirun, tentang seorang berumah tangga yang menentukan hak miliknya seperti ladang dan lain-lain untuk putraputrinya yang terbesar. Apabila meninggal dunia salah satu dari suami istri, atau meninggal keduanya, maka dengan sendirinya dimiliki putra putri yang terbesar, bukan ahli waris lainnya, dengan tidak ada wasiat atau pemberian lagi, kemudian apabila putra putri itu meninggal maka menjadi hak milik putra putrinya yang terbesar pula, begitu seterusnya sampai ada tiga/empat keturunan. Apakah halal bagi putra putri terbesar itu memilikinya dengan adat yang telah berlaku itu? Atau tidak sehingga harus dibagi para ahli waris? (Tanjung Raja)
- J. Bahwa barang model itu tidak boleh dimiliki putra putri terbesar itu dengan cara demikian, tetapi harus dibagi oleh para ahli waris menurut yang ditetapkan agama, itu tidak boleh dilakukan, dan pula tidak boleh dilaksanakan kecuali kalau semua ahli waris yang dewasa dapat mengizinkan pelaksanaan itu, pula kalau dianggap itu pemberian orang tua, syarat-syarat pemberian yang ditentukan.

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Muin³⁵

(الْهِبَهُ تَمْلِيْكُ عَيْنٍ) ... (بِلاَ عِوَضٍ) ... (بِإِيْجَابٍ كَوَهَبْتُكَ) هَذَا ... (وَقَبُوْلٍ) مُتَّصِلٍ بِهِ (كَقَبِلْتُكَ) أَوْ رَضِيْتُ ... (وَتَلْزَمُ) ... (بِقَبْضٍ) ... وَيُكْرَهُ لِأَصْلٍ تَفْضِيْلٌ فِيْ عَطِيَةِ فُرُوْعٍ وَإِنْ سَفَلُوْا وَلَوِ الْأَحْفَادَ مَعَ وُجُوْدِ الْأَوْلاَدِ .

Hibah adalah memberikan hak milik sesuatu tanpa pengganti, dengan

³⁵ Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in pada I'anah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.th.), Jilid III, h. 142, 147 dan 153.

lafal ijab (penyerahan) seperti: "Aku memberikan ini kepadamu". Dan lafal qabul (penerimaan) secara langsung seperti: "Aku terima darimu atau aku rela." Hibah menjadi terlaksana dengan menerima barang yang dihibahkan. Dikatakan juga, makruh bagi orang tua pilih kasih dalam pemberian kepada anak, walaupun ke bawah atau cucu dengan adanya anak.[]

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-15 Di Surabaya Pada Tanggal 10 Dzulhijjah 1359 H./9 Pebruari 1940 M.

258. Keluarnya Orang Perempuan Bersama Wanita Lain untuk Bershalat Hari Raya

> 259. Tidak Mau Membeli di Toko Orang Islam 260. Menjual Padi di Tangkainya

261. Percekcokan Suami Istri Tidak Bisa Didamaikan, Bisa Dianggap Syiqaq

262. Menyusulnya Anggota Perseroan Pada Syirkah

263. Mendatangi Rapat Organisasi atau Mengajar

264. Shalat di Mesjid yang Dibangun dengan Uang Haram 265. Berdalihkan Dharurat untuk Memperbolehkan Keluarnya Wanita dengan Membuka Aurat

266. Hasil Perkebunan yang Dibeli dengan Uang Haram

267. Menikahi Perempuan yang Bukan Pinangannya

268. Jual Kontrak (Penjualan Tempo dengan Janji yang Tertentu dalam Tempo yang Tertentu Pula)

269. Menyaksikan Gila untuk Pembubaran Nikah

270. Adzan Pertama (Sebelum Khotib Naik Mimbar)

258. Keluarnya Orang Perempuan Bersama Wanita Lain untuk Bershalat Hari Raya

- S. Bagaimana hukum keluarnya orang-orang perempuan untuk mendatangi shalat Id bersama-sama dengan para wanita yang berbuat baik? Dan apakah sah khotbah Id dengan khotib perempuan, ataukah tidak sah? (Gresik)
- J. Disunnahkan bagi para perempuan, bershalat Id, berjamaah di rumahnya, adapun keluar untuk mendatangi shalat Id di mesjid atau lainnya, maka hukumnya sunat bagi perempuan yang tua-tua, dan perempuan yang tidak beraksi, atau cantik dengan tidak berpakaian necis dan tidak memakai wangi-wangian, serta aman dari fitnah, dan makruh bagi orang-orang tua yang pakai wangi-wangian atau berpakaian necis, dan makruh pula bagi perempuan yang beraksi atau cantik dengan tidak berpakaian necis dan tidak pakai wangi-wangian atau dengan takut fitnah, dan haram bagi orang perempuan beraksi atau cantik apabila berpakaian necis atau pakai wangi-wangian atau menyangka adanya fitnah, atau dengan tidak seizin lelakinya, dan tidak sah khotbah Id dengan khotib perempuan, bahkan haram apabila sengaja khotbah syariah atau sengaja menyerupai laki-laki, karena mengerjakan ibadah yang tidak sah (fasid) dan disamakan dengan hukumnya azan.

Keterangan, dari kitab:

1. Fatawa al-Imam al-Nawawi¹

Pertanyaan, apakah disunatkan bagi wanita untuk melaksanakan shalat hari raya secara berjamaah di rumah mereka dan salah seorang dari mereka menjadi imam, atau mahramnya atau anak kecil yang sudah pandai?

Jawaban, ya demikian itu disunatkan, dan disunatkan mendorong wanita untuk melaksanakannya.

2. Al-Minhaj al-Qawim²

وَيُسَنُّ خُرُوْجُ الْعَجُوْزِ لِصَلَوَاتِ الْعِيْدِ وَالْجُمَاعَاتِ بِبَذْلَةٍ أَيْ فِيْ ثِيَابِ مِهْنَتِهَا وَشُغْلِهَا بِلاَّ طِيْبِ وَيَتَنَظَّفْنَ بِالْمَاءِ وَيُكْرَهُ بِالطِّيْبِ وَالزِّيْنَةِ كَمَا يُكْرَهُ الْحُضُوْرُ لِذَوَاتِ الْهَيْآتِ .

Alauddin Ibn al-Authar, Fatawa al-Imam al-Nawawi, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1402 H/1983 M), h. 43.

² Ibn Hajar al-Haitami, al-Minhaj al-Qawim pada al-Hawasyi al-Madaniyah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1366 H), Jilid II, h. 57.

Disunatkan bagi wanita yang sudah tua untuk keluar melaksanakan shalat hari raya secara berjamaah dengan mengenakan pakaian kerja kesehariannya tanpa memakai parfum dan membersihkan tubuhnya dengan air. Dimakruhkan mempergunakan parfum dan *make up* sebagaimana dimakruhkan bagi wanita muda yang cantik untuk menghadirinya.

3. Fath al-Wahhab dan al-Tajrid li Naf al-'Abid3

أَمَّا النِّسَآءُ فَيُكْرَهُ لِذَوَاتِ الْهَيْآتِ الْحُضُورُ فَيُسَنُّ لِغَيْرِهِنَّ وَيَتَنَظَّفْنَ بِالْمَاءِ وَلاَيَتَطَيَّبْنَ وَيَخْرُجْنَ فِيْ ثِيَابِ بَذْلَتِهِنَّ

وَتَخْرُجُ الْعَجُوْزُ وَالشَّابَةُ غَيْرُ الْجَمِيْلَةِ إِذَا لَمْ تَتَزَيَّنَا بَرْمَاوِي فَالْمُرَادُ بِنَوَاتِ الْهَيْثَةِ بَدَنًا وَمَلْبَسًا.

Adapun wanita, maka makruh menghadiri jamaah shalat Id bagi mereka yang cantik. Maka bagi selain mereka, disunatkan menghadirinya, dan membersihkan tubuhnya dengan air, tidak memakai parfum dan keluar dengan pakaian kesehariannya.

Wanita yang sudah tua dan gadis yang tidak cantik boleh menghadiri jamaah shalat Id jika tidak berhias. Begitu menurut al-Barmawi. Maka yang dimaksud dengan *dzawat al-hay'ah* (cantik) adalah cantik tubuh dan busananya.

4. Is'ad al-Rafiq 'ala Sullam al-Taufiq4

وَقَوْلُهُ عَلَيْ انْهَوْا نِسَآنُكُمْ عَنْ لُبْسِ الزِّيْنَةِ وَالتَّبَخْتُرِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّ بَنِي إِسْرَآئِيْلَ لَمْ يُلْعَنُواْ حَقَى لَيْسَتْ نِسَآئُهُمْ الزِّيْنَةَ وَالتَّبَخْتُرَ فِي الْمَسْجِدِ. قَالَ فِي الزَّوَاجِرِ: وَهُوَ مِنَ الْكَبَآثِرِ لِصَرِيْحَ هَذِهِ الْأَحَادِيْثِ. وَيَنْبَغِيْ حَمْلُهُ لِيُوَافِقَ قَوَاعِدَنَا عَلَى مَا إِذَا تَحَقَّقَتْ الْفِتْنَةُ. أَمَّا مُجَرَّدُ خَشْيَتِهَا فَإِنَّمَا هُوَ مَكُونُوهُ وَمَعَ طَنِّهَا حَرَامُ غَيْرُ كَبِيْرَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ. وَعُدَّ مِنَ الْكَبَآثِرِ أَيْضًا خُرُوجُهَا بَغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا وَرَضَاهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةِ شَرْعِيَّةٍ.

Rasulullah Saw. bersabda: "Laranglah wanita kalian memakai perhiasan dan berlagak genit di mesjid. Sesungguhnya Bani Israil tidak dilaknat sampai wanitawanita mereka memakai perhiasan dan bergenit ria di mesjid."

Dalam al-Zawajir Ibn Hajar al-Haitami berkata: "Bahwa sesuai kejelasan hadits-hadits ini, perbuatan semacam itu termasuk dosa besar. Dan hal ini, semestinya dipahami jika nyata-nyata menimbulkan fitnah. Sedangkan sekedar kekhawatiran adanya fitnah maka hukumnya makruh, dan bila besertaan dugaan kuat adanya fitnah maka haram yang tidak termasuk dosa

³ Zakaria al-Anshari dan Muhammad Sulaiman al-Bujairimi, Fath al-Wahhab dan al-Tajrid li Naf'i al-'Abid, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1369 H/1950 M), Jilid I, h. 427.

Muhammad Babashil, Is'ad al-Rafiq 'ala Sullam al-Taufiq, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah t. th.), Juz II, h. 136.

besar, sebagaimana cukup jelas. Termasuk dosa besar juga, adalah keluarnya wanita tanpa izin dan persetujuan suaminya untuk keperluan yang tidak mendesak secara syar'i.

5. Hasyiyah al-Syirwani⁵

(قَوْلُهُ بِقَدْرِ مَا يُسْمَعْنَ إِلَح) أَيْ وَلَمْ تَقْصُدْ الْأَذَانَ الشَّرْعِيَّ. فَإِنْ رَفَعَتْ فَوْقَ ذَلِكَ أَوْ أَرَادَتْ الْأَذَانَ الشَّرْعِيَّ. فَإِنْ رَفَع عَدَم رَفْع أَرَادَتْ الْأَذَانَ الشَّرْعِيَّ حَرُمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ أَجْنَبِيُّ. نَعَمْ إِنْ قَصَدَتْ مَعَ عَدَم رَفْع صَوْتِهَا التَّشَبُهُ بِالرِّجَالِ حَرُمَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. وَكَذَا إِنْ قَصَدَتْ حَقِيْقَةَ الْأَذَانِ فِيْمَا يَظْهَرُ لِقَصْدِهَا عِبَادَةً فَاسِدَةً وَمَا يَتَضَمَّنُ التَّشَبُّهُ بِالرِّجَالِ.

(Yang diperbolehkan) hanya sekedar bisa didengar sesama jamaah wanita, dan tidak bermaksud untuk mengumandangkan azan syar'i. Jika seorang wanita mengeraskan suaranya lebih dari itu, atau bermaksud mengumandangkan azan syar'i, maka hukumnya haram walaupun di sana tidak ada laki-laki lain (bukan mahram). Memang begitu, jika ia bermaksud menyerupai laki-laki walaupun tanpa mengeraskan suara, sebagaimana cukup jelas. Begitu pula bila ia bermaksud mengumandangkan adzan, menurut pendapat yang cukup kuat, karena maksudnya melakukan ibadah fasidah (rusak) dan unsur tasyabuh (menyerupai) laki-laki yang ada. 6. Hasyiyah al-Bajuri⁶

(قَوْلُهُ خُطْبَتَيْنِ) كَخُطْبَتِي الْجُنْعَةِ فِي الْأَرْكَانِ لاَ فِي الشُّرُوطِ فَإِنَّهَا لاَتُشْتَرَطُ هُنَا بَلْ تُسْتَحَبُّ الْإِسْمَاعُ وَالْسَّمَاعُ وَكَوْنُ الْخُطْبَةِ عَرَبِيَّةً وَكُوْنُ الْحَطِيْبِ ذَكْرًا.

(Dua khotbah) seperti khotbah Jum'at dalam rukun-rukunnya dan bukan dalam syarat-syaratnya, karena syarat-syaratnya tidak disyaratkan di sini. Namun, disunatkan memperdengarkan dan mendengarkan khotbah, adanya khotbah dengan bahasa arab dan si khotib laki-laki.

259. Tidak Mau Membeli di Toko Orang Islam

- S. Bagaimana hukum orang Islam yang tidak membantu pada orang Islam, umpama: Tidak suka dan senang membeli di toko orang Islam, tetapi membeli dari toko orang kafir, apakah itu haram, atau makruh? (Probolinggo)
- J. Sesungguhnya meninggalkan tolong menolong di antara umat Islam itu ada yang wajib, yaitu meninggalkan membantu maksiat, sebagaimana

⁵ Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani (Mesir: Dar al-Shadir, t. th.), Jilid I, h. 467.

⁶ Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 1340 H/1922 M), Jilid I, h. 235.

firman Allah, yang artinya: "Kamu sekalian jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan menganiaya." Dan ada yang haram, seperti meninggalkan membantu atas fardhu ain, seperti tidak membantu pada orang yang mendapat bahaya. Dan ada pula yang sunat, yaitu membantu meninggalkan membantu dalam urusan yang dibenci syara' agama. Ada pula yang makruh, seperti tidak membantu dalam urusan yang dianggap baik oleh agama, di antaranya tidak membeli di toko orang Islam, dan ada juga yang bertentangan dengan keutamaan (khilafu al-aula) seperti meninggalkan membantu urusan yang utama, juga ada pula yang membantu itu boleh (mubah) seperti tidak membantu dalam urusan mubah.

Keterangan, dari kitab:

1. Kasyifah al-Saja⁷

Tolong menolong itu ada empat macam, bahkan lebih ... Dan dari berbagai macam pertolongan itu masih tersisa dua, yang sunah, yaitu seperti membantu seseorang yang berdiri sendirian dalam *shaf* dengan menemaninya di *shaf* itu, dan yang haram, yaitu membantu perbuatan haram.

2. Al-Ibdaa' fii Madhaarri al-Ibtidaa'8

وَمِنْ هَذِهِ الْعَادَاتِ وُلُوْعُ النَّاسِ بِالشِّرَآءِ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ يُفَضِّلُوْنَهُ عَلَى أَبْنَآءِ الْوَطَنِ إِلَى أَنْ قَالَ وَأَيْضًا يُكُونُ لِأَنَّ فِي الشِّرَآءِ مَنْفَعَةً لَهُمْ وَالْمُسْلِمُوْنَ أَحَقُّ بِالنَّفْعِ مِنْهُمْ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ مَأْمُوْرُ بِإِعَانَةِ أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ مَهْمَا أَمْكَنَهُ.

Dan di antara kebiasaan-kebiasaan (yang buruk) adalah lebih suka membeli dari orang-orang asing dan mengesampingkan anak negeri ... Dan dimakruhkan juga, karena dalam pembelian tersebut terdapat manfaat bagi orang asing, sementara orang-orang Islam lebih berhak terhadap manfaat itu, dan karena orang Islam diperintahkan semampu mungkin untuk membantu saudaranya sesama muslim.

260. Menjual Padi di Tangkainya

S. Bagaimana hukumnya menjual padi di tangkainya, dijual dengan tempo, atau dengan kontrak (salam)? (Pasuruan dan Semarang)

Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi, Kasyifah al-Saja 'ala Safinah al-Naja, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1343 H) h. 106-107.

⁸ Ali Mahfudz, Al-Ibdaa' fii madhaarri al-Ibtidaa', (Mesir: Dar al-I'tisham, t.th.), Cet. Ke-7, h. 379.

J. Tidak sah menjual padi di tangkainya, dengan tempo atau kontrak. Keterangan, dari kitab:

1. Tuhfah al-Habib9

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَبِيْعَ إِذَا كَانَ مُعَيَّنًا غَيْرَ مُحْتَلِطٍ بِغَيْرِ الْمَبِيْعِ كَفَّتْ مُعَايَنَتُهُ عَنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِهِ تَحْقِيْقًا بِمَعْنَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْقَدْرِ بِكَيْلٍ وَلاَ وَزْنٍ وَلاَ ذَرْعٍ. وَإِنْ كَانَ فِي الدِّمَّةِ أَوْ مُخْتَلِطًا بِغَيْرِهِ كَصَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ فَالشَّرْطُ الْعِلْمُ بِقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ لاَ عَيْنِهِ

Kesimpulannya, jika barang yang dijual tersebut tertentu dan tidak bercampur dengan selain barang yang dijual, maka dengan menentukannya tanpa mengetahui kadarnya secara tepat, dalam arti tidak disyaratkan mengetahui ukurannya dengan takaran, timbangan dan meteran. Dan jika barang tersebut masih dalam pesanan atau tercampur dengan yang lain, seperti satu sha' (2,751 kg) dari barang tumpukan, maka syaratnya adalah mengetahui kadar ukuran dan sifatnya, bukan barangnya.

2. Al-Figh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah10

Tidak sah dalam akad salam (pesan) gandum kecuali sudah terpisah dari tangkainya. Demikian halnya semua biji-bijian.

261. Percekcokan Suami Istri Tidak Bisa Didamaikan, Bisa Dianggap Syiqaq

- S. Bagaimana pendapat ayyuhal muktamirun dalam masalah seorang istri yang murka dan benci pada suaminya karena si lelaki orang yang kurang baik ucapannya, kadang-kadang bisa menjadikan bercekcok di antaranya, telah beberapa kali didamaikan tetapi tidak berhasil. Apakah demikian itu dapat dianggap syiqaq? Sehingga hakim dapat memberikan hukum syiqaq ataukah tidak? (Ampenan)
- J. Demikian itu ialah nyatanya syiqaq, maka berlakulah hukum syiqaq atas kedua suami istri yang tersebut dalam soal, dan bisa diadakan hakamain.

Keterangan, dari kitab:

1. Syarh al-Mahali¹¹

Sulaiman al-Bujairimi, Tuhfah al-Habib 'ala Syarah al-Khatib, (Mesir: al-Taqaddum al-Ilmiyah, t. th), Jilid III, h. 5.

Abdurrahman al-Juzairi, Al-Figh 'ala Madzahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M), Jilid II, h. 248.

¹¹ Jalaluddin al-Mahalli, Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata al-Qulyubi wa Umairah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M), Jilid III, h. 307.

(وَلَوِاشْتَدَّ الشَّقَاقُ) أَيْ الْخِلاَفُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ دَامَا عَلَى التَّسَابِ وَالتَّضَارُبِ إِلَى أَنْ قَالَ وَهَلْ بَعْثُهُ وَاجِبٌ أَوْمُسْتَحَبُّ وَجْهَانِ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وُجُوْبَهُ لِظَاهِرِ ٱلأَمْرِ فِي ٱلآيَةِ

Jika pertengkaran sudah amat sengit antara suami istri, dimana keduanya terus menerus saling mencaci dan memukul ... Apakah mengirim juru damai itu wajib atau sunnah? Ada dua pendapat. Dalam al-Raudhah al-Nawawi membenarkan yang wajib sesuai makna lahir perintah dalam al-Qur'an.

2. Syarh al-Tahrir¹²

(فَإِنْ ادَّعَى كُلُّ) مِنَ الرَّوْجَيْنِ (تَعَدَّى أَلاَخَرِ) عَلَيْهِ (وَاشْتَبَهَ) الْحَالُ (بَعَثَ الْقَاضِي وُجُوْبًا حَكَمَيْنِ بِرِضَاهُمَا) لِيَنْظُرَا فِيْ أَمْرِهِمَا بَعْدَ اخْتِلاَءِ حَكَمِهِ بِهِ وَحَكَمِهَا بِهَا وَمَعْرِفَةِ مَا عِنْدَهُمَا فِيْ ذَلِكَ ثُمَّ (يَفْعَلاَنِ الْمَصْلَحَةَ) بَيْنَهُمَا (مِنْ إِصْلاَج وَتَفْرِيْقٍ) قَالَ تَعَالَى فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ يَيْنِهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا الآية

Jika masing-masing dari suami istri saling menuduh kesalahan pihak lain padanya, sementara kondisinya samar, maka hakim wajib mengutus dua hakam (orang yang dipercaya untuk mengambil keputusan) dengan persetujuan pihak suami dan istri, agar mempertimbangan hubungan suami istri itu setelah hakam pihak suami bertemu secara empat mata dengan suami dan hakam pihak istri bertemu secara empat mata dengan istri dan diketahui sumber permasalahannya. Kemudian kedua hakam itu mengambil keputusan yang maslahat untuk suami istri tersebut, dari damai dan cerai. Allah Swt. berfirman: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga perempuan..." (al-Nisa': 35)

262. Menyusulnya Anggota Perseroan Pada Syirkah

S. Bagaimana hukumnya menyusul andilhower setelah perseroannya terbentuk beberapa bulan? Dan bagaimana hukumnya akad perseroan, sebelum berkumpul uang andilnya, sahkah akad itu? (Malang)

J. Tidak boleh menyusul andilhower, begitu pula tidak sah perseroan sebelum kumpul uang andilnya menurut pendapat yang ashah, tetapi menurut pendapat yang memperbolehkan (bai' mu'athah) maka hukumnya boleh.

Keterangan, dari kitab:

¹² Zakariya al-Anshari, Syarh al-Tahrir pada Hasyiyah al-Syarqawi 'ala al-Tahrir, (Mesir: Dar al-Kutub al-Arabiyah, t. th.), Jilid II, h. 273-274.

1. Hasyiyah Kamtsari¹³

وَاعْلَمْ أَنَّ خِلاَفَ الْمُعَاطَاةِ كَمَا يَجْرِيْ فِي الْبَيْعِ يَجْرِيْ فِيْ عُقُوْدِ الْمَالِيَةِ كَالْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالْهِبَّةِ وَنَحْوِهَا.

Sesungguhnya khilafiyah tentang al-mu'athah (transaksi tanpa ijab qabul) seperti halnya berlaku dalam jual beli berlaku pula dalam transaksi harta (lain), seperti persewaan, gadai, hibah dan semisalnya.

263. Mendatangi Rapat Organisasi atau Mengajar

- S. Mana yang didahulukan, mendatangi rapat-rapat kepentingan Islam, ataukah mengajar agama dalam pesantren? (Kendal)
- J. Mendahulukan yang lebih baik dan utama.

Keterangan, dari kitab:

1. Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam14

إِذَا اجْتَمَعَتْ الْمُصَالِحُ الْأُخْرَوِيَّةُ الْحَالِصَةُ فَإِنْ أَمْكَنَ تَحْصِيْلُهَا حَصَّلْنَاهَا. فَإِذَا تَعَذَّرِ الْحَبْعِ تَخْيَرْنَا وَقَدْ حَصَّلْنَا الْأَصْلَحَ فَالأَصْلَحَ وَالْأَفْضَلَ فَالْأَفْضَلَ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا اسْتَوَتْ مَعَ تَعَذُّرِ الْجُمْعِ تَخَيَّرْنَا وَقَدْ يُغْتَلِفُ فِي التَّسَاوِي والتَّفَاوُتِ وَلاَفَرْقَ فِيْ ذَلِكَ بَيْنَ الْمَصَالِحِ الْوَاجِبَاتُ وَالْمَنْدُوبَاتُ.

Jika berbagai kepentingan ukhrawi murni berhimpun, jika mungkin diperoleh seluruhnya, maka hendaknya diambil semuanya. Jika tidak mungkin memperoleh seluruhnya, maka kita ambil yang lebih penting, lalu yang lebih penting (setelahnya) dan lebih utama kemudian yang lebih utama (setelahnya) ... Jika semuanya sama penting dan utamanya, dan sulit mengambil semuanya, maka kita harus memilih di antaranya dan terkadang dengan diundi. Terkadang kepentingan-kepentingan ukhrawi itu berbeda-beda dalam kesamaan dan perbedaannya. Dalam hal itu tidak ada perbedaan antara yang wajib dan yang sunnah.

264. Shalat di Mesjid yang Dibangun dengan Uang Haram

S. Apakah sah shalat di mesjid yang didirikan dengan uang haram? (Kebumen) J. Sah shalatnya, tetapi haram dan tidak dapat pahala shalatnya. Keterangan, dari kitab:

262

¹³ Al-Kamtsari, *Hasyiyah Kamtsari*, pada *hamisy* Yusuf al-Ardabili, *al-Anwar li A'mali al-Abrar*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t. th.), Jilid I, h. 209.

¹⁴ Muhammad Izzuddin Ibn Abdissalam al-Sulami, Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1421 H/2000 M), Cet. Ke-1, Juz I, h. 91.

1. Ihya' Ulum al-Din15

وَأَمَّا الْمَسْجِدُ فَإِنْ بُنِيَ فِي أَرْضِ مَغْصُوْبَةٍ أَوْ بِحَشَبٍ مَغْصُوْبٍ مِنْ مَسْجِدٍ آخَرٍ أَوْ مِلْكِ مُعَيَّنٍ فَلاَ يَجُوْزُ دُخُوْلُهُ أَصْلاً وَلاَ لِلْجُمْعَةِ بَلْ لَوْ وَقَفَ الْإِمَامُ فِيْهِ فَلْيُصَلِّ هُوَ خَلْفَ الْإِمَامُ وَلْيَقِفْ خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَإِنَّ الصَّلاَة فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوْبَةِ تُسْقِطُ الْفَرْضَ وَتَنْعَقِدُ فِي حَقِّ الْإِقْتِدَاءِ فَلِنَلِكَ جُوِّزَ الْمُقْتَدِيَ الْإِقْتِدَاءُ بِمَنْ صَلَّى فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوْبَةِ وَإِنْ عَصَى صَاحِبُهُ بِالْوُقُوفِ فِي الْغَصَبِ الْمُقْتَدِيَ الْإِقْتِدَاءُ بِمَنْ صَلَّى فِي الْغَصَبِ

Adapun mesjid yang dibangun di tanah ghasaban (milik orang lain tanpa izin) atau menggunakan kayu ghasaban dari mesjid lain atau milik orang tertentu, maka sama sekali tidak boleh memasukinya dan tidak boleh pula untuk pelaksanaan shalat Jum'at. Bahkan seandainya ada imam yang shalat di masjid tersebut, maka makmum hendaknya shalat di belakangnya di luar mesjid. Sebab shalat di tanah ghasaban bisa menggugurkan kewajiban dan sah menjadi makmum orang yang shalat di tanah ghasaban tersebut. Oleh sebab itu, kita memperbolehkan seseorang bermakmum dengan imam yang shalat di tanah ghasaban walaupun si imam berdosa dengan berada di sana.

2. Fath al-Mu'in16

Haram melakukan shalat menghadap kuburan nabi (karena tabarruk/mengagungkan, bukan kebetulan saja) ... dan tidak makruh di tanah ghasaban, bahkan shalatnya sah, seperti shalat dengan memakai baju ghasaban.

(Dan ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Di tanah *ghasab*an.") kata itu di'*athaf*kan pada kata kuburan nabi. Maksudnya haram shalat di situ. 3. *Is'ad al-Rafiq*¹⁷

Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa membeli baju seharga sepuluh dirham, satu dirham di antaranya adalah uang haram, maka Allah Swt. tidak akan menerima shalatnya selama ia masih memakai baju tersebut".

¹⁵ Hujjah al-Islam al-Ghazali, *Ilnya' Ulum al-Din*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1387 H/1968 M), Jilid II, h. 193-194.

¹⁶ Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in dan al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, (Beirut Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M), Jilid I, h. 227.

¹⁷ Muhammad Babashil, Is'ad al-Rafiq 'ala Sullam al-Taufiq, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah t. th.), Juz I, h. 87.

265. Berdalihkan Dharurat untuk Memperbolehkan Keluarnya Wanita dengan Membuka Aurat

S. Apakah boleh kita mengambil dalil dengan kaidah: "Darurat itu memperbolehkan mengerjakan larangan", atau kaidah "apabila urusan itu sempit, maka menjadi longgar", untuk memperbolehkan keluarnya perempuan dengan membuka auratnya di samping lelaki lain, karena telah menjadi biasa di Indonesia? (Pagaralam)

J. Tidak boleh menggunakan dalil tersebut, karena menutup aurat waktu keluar itu, tidak membahayakan diri, karena dharurat yang memperbolehkan menjalankan larangan itu, apabila tidak mengerjakan larangan, dapat membahayakan diri, atau mendekati bahaya.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Asybah wa al-Nazha'ir18

Dharurah dapat menghalalkan larangan dengan syarat kadarnya tidak lebih kecil dari pada kadar larangan tersebut. ... Pengertian dharurah itu adalah seseorang mencapai batas bila tidak memakan sesuatu yang dilarang, maka ia akan mati atau mendekati mati. Dan kondisi ini membolehkannya memakan barang haram.

266. Hasil Perkebunan yang Dibeli dengan Uang Haram

S. Bagaimana pendapat Anda sekalian tentang perkebunan yang dibeli dengan uang haram, apakah haram pula hasilnya? (Purworejo)

J. Apabila sewaktu membeli, si penjual mengerti bahwa uangnya itu haram, maka halallah perkebunan itu, dan juga hasilnya, tetapi kalau si penjual tidak mengerti, maka haramlah perkebunan itu berikut hasilnya, sehingga si penjual telah meluluskan (meridhakan) atau dibayar lagi dengan uang halal.

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Mu'in¹⁹

264

¹⁸ Jalaluddin al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H), h. 60-61.

¹⁹ Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in pada l'anah al-Thalibin, (Beirut Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M), Jilid III, h. 13.

وَلَوِ اشْتَرَى طَعَامًا فِي الذِّمَّةِ وَقَضَى مِنْ حَرَامٍ فَإِنْ أَقْبَضَهُ لَهُ الْبَاثِعُ بِرِضَاهُ قَبْلَ تَوْفِيَةِ الشَّمَنِ حَلَّ لَهُ الْبَاثِعُ بِرِضَاهُ قَبْلَ تَوْفِيَةِ الشَّمَنِ حَلَّ لَهُ أَكْلُهُ أَوْ بَعْدَهَا مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهُ حَرَامٌ حَلَّ أَيْضًا وَإِلاَّ حَرُمَ إِلاَّ أَنْ يُبْرِفَهُ أَوْ يُوفِيّهُ مِنْ حِلِّ.

Jika seseorang membeli makanan yang berada dalam jaminan dan membayar dengan uang haram, jika si penjual menyerahkan padanya dengan ridhanya sebelum pembayaran harga, maka pembeli halal memakannya, atau sesudah pembayaran besertaan si penjual tahu uang itu haram, maka juga halal. Jika tidak, maka haram sampai si penjual membebaskannya atau si pembeli membayarnya dengan uang halal.

267. Menikahi Perempuan yang Bukan Pinangannya

S. Bagaimana pendapat Anda sekalian tentang seorang yang menikah dengan calon istri, bukan yang dipinang, umpamanya ia meminang putri yang muda namanya Aisyah, tetapi si wali mengatakan namanya Fatimah, padahal Fatimah itu namanya putri yang tua, kemudian dalam akad nikah si wali berkata: "Aku nikahkan padamu dengan anakku bernama Fatimah", lalu si lelaki berkata: "Aku menerima nikahnya Fatimah", dengan maksud yang terpenting yaitu yang muda, sahkah pernikahan itu? (Kediri)

J. Tidak sah, karena perbedaan yang dimaksud wali dan calon lelaki.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah al-Bajuri²⁰

وَكُوْنُهُ عَالِمًا بِاسْمِ الْمَرْأَةِ وَنَسَبِهَا أَوْ عَيْنَهَا وَحِلَّهَا لَهُ فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ جَاهِلٍ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ... وَشُرُوطِ الزَّوْجَةِ كَوْنُهَا حَلَالًا فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ مُحْرَمَةٍ وَكَوْنُهَا مُعَيَّنَةً فَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ إِحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ

Dan syarat seorang calon suami adalah mengetahui nama, dan nasab calon istri, atau wujudnya, dan halalnya calon istri baginya. Maka calon suami yang tidak mengetahui hal-hal tersebut tidak sah nikahnya. ... Dan syarat calon istri adalah halal dinikahi oleh calon suaminya. Maka pernikahan dengan calon istri yang semahram (haram dinikah) tidak sah hukumnya. Dan calon istri itu sudah tertentu. Maka tidak sah pernikahan dengan salah satu dari dua perempuan.

²⁰ Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.) Juz II, h. 103.

268. Jual Kontrak (Penjualan Tempo dengan Janji yang Tertentu dalam Tempo yang Tertentu Pula)

S. Apakah sah jual kontrak (penjualan tempo dengan janji-janji yang tertentu dalam tempo yang tertentu pula) apabila salah satu dari pembeli dan penjual tidak memenuhi janji, maka diadakan denda yang tertentu? (Jember)

J. Penjualan itu tidak sah apabila janji-janji itu dalam akad atau setelah akad tapi belum ada ketetapan penjualan.

Keterangan, dari kitab:

1. Syarah al-Mahali²¹

(Dan -Nabi Saw. melarang- dari jual beli dan disertai persyaratan), riwayat Abdul Haqq dalam al-Ahkam dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, dan Abu Dawud serta ulama lain meriwayatkannya dengan jalur sanad ini, yaitu: "Tidak halal menghutang dan sekaligus jual beli, dan tidak halal persyaratan dan sekaligus jual beli."

Tarsyih al-Mustafidin²²

Ibn Hajar dan al-Ramli dalam al-Tuhfah dan al-Nihayah berkata: "Sebab setiap persyaratan yang menafikan konsekuensi akad itu membatal akad tersebut, hanya jika terjadi dalam akad, atau sesudahnya dan sebelum luzum (tetap)nya, bukan bila mendahului akad walaupun di majlis akad.

269. Menyaksikan Gila untul Pembubaran Nikah

S. Bagaimana pendapat Anda sekalian tentang orang yang berkata: "Tidak sah menyaksikan gila untuk pembubaran nikah, kecuali kalau saksi itu dokter." dengan tidak mengingat apa yang tersebut dalam kitab fiqh, benarkah perkataan itu? Kalau perkataan itu benar, apakah sah penyaksian dokter kafir? (Tegal) J. Perkataan itu benar, dan tidak sah penyaksian dokter kafir.

²¹ Jalaluddin al-Mahalli, Syarah Minhaj al-Thalibin pada Hamisy al-Quhyubi dan Umairah, (Beirut: Dar al-F^{*}kr, 1415 H/1995 M), Jilid II, h. 177.

²² Alawi al-Saggaf, *larsyil: 1l-Mustafidin*, (Beirut, Dar al-Fikr, t.th.), h. 226.

Keterangan, dari kitab:

1. Mughni al-Muhtaj23

Disyaratkan bagi saksi tentang aib, mengetahui ilmu kedokteran, sebagaimana pendapat yang dikisahkan al-Rafi'I dalam al-Tahdzib.

270. Adzan Pertama (Sebelum Khotib Naik Mimbar)

- S. Bagaimana hukumnya azan sebelum khotib di atas mimbar (azan pertama), dan bagaimana hukumnya Muraqqi membaca: Ma'asyiral muslimin dan seterusnya, dan bagaimana hukumnya mengucapkan "amin" sewaktu khotib mendoa. Apakah semua itu sunat atau boleh? Ataukah haram? (Karanganyar)
- J. Adapun adzan pertama, hukumnya sunat, tentang bacaannya *Muraqqi* di dalam soal itu adalah *bid'ah hasanah*. Adapun ucapan "amin" sewaktu khotib membaca doa tidak dengan suara keras, maka hukumnya tidak jauh dari sunat.

Lihat putusan Muktamar ke I masalah nomor 2, tentang hukumnya ucapan "radhiyallah" dan shalawat sewaktu khotbah.

Keterangan, dari kitab:

1. Tanwir al-Qulub24

فَلَمَّا كَثُرَ النَّاسُ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ أَمَرَهُمْ بِأَذَانِ آخَرَ عَلَى الزَّوْرَآءِ وَاسْتَمَرَّ الْأَمْرُ إِلَى زَمَانِنَا هَذَا. وَهَذَا الْأَذَانُ لَيْسَ مِنَ الْبِدَعِ لِأَنَّهُ فِي زَمَانِ الْخُلَفَآءِ الرَّاشِدِيْنَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَآءِ الرَّاشِدِيْنَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ)

Ketika orang-orang sudah semakin banyak pada masa Khalifah Utsman, maka beliau memerintahkan untuk mengumandangkan azan lagi di al-Zaura' (tempat yang menjulang tinggi seperti menara di pasar Madinah yang berdekatan dengan masjid), dan adzan yang ke dua itu berlangsung sampai sekarang. Dan adzan yang kedua itu bukan bid'ah karena telah terjadi di masa Khulafaur Rasyidin, sesuai sabda Rasulullah Saw.: "Berpegang teguhlah kalian dengan sunnah (ajaran)ku dan sunnah Khulafa' al-Rasyidin." (HR. Abu Dawud dan selainnya)

²³ Muhammad al-Khathib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Fikr, 1424 H/2003 M), Jilid IV, h. 420-421.

²⁴ Muhammad Amin al-Kurdi Al-Irbili, Tanwir al-Qulub fi Mu'ammalah 'Allam al-Ghuyub, (Indonesia: maktabah Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyah), h. 179.

2. Al-Tajrid li Naf' al-'Abid²⁵

(قَوْلُهُ فَيُوَدِّنُ وَاحِدٌ) وَأَمَّا مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِيْ زَمَانِنَا مِنْ مُرَقِّ يَخْرُجُ بَيْنَ يَدَيِ الْخَطِيْبِ يَقُولُ إِنَّ اللهَ وَمَلاَثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ الآيَةَ إِلَى أَنْ قَالَ فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا بِدْعَةُ حَسَنَةً.

Adapun adat yang berlaku pada masa kita sekarang ini yaitu seorang muraqqi di depan khotib dengan membaca إِنَّ اللهُ وَمَلاَئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّجِيِّ ... maka diketahui bahwa hal ini adalah bid'ah hasanah.

3. Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin26

وَيُسَنُّ تَشْمِيْتُ الْعَاطِشِ وَالرَّدُّ عَلَيْهِ وَرَفْعُ الصَّوْتِ مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةٍ بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَيْهِ ﷺ عَنْدَ فَكُمْ الصَّحَابَةِ بِلاَ عِنْدَ ذِكْرِ الْخَطِيْبِ اسْمَهُ أَوْوَصْفَهُ ﷺ قَالَ شَيْخُنَا وَلاَ يَبْعُدُ نَدْبُ التَّرَضِّي عَلَى الصَّحَابَةِ بِلاَ رَفْعِ صَوْتٍ وَكَذَا التَّأْمِيْنُ لِدُعَاءِ الْخَطِيْبِ.

(قَوْلُهُ وَرَفْعُ الصَّوْتِ) أَيْ وَيُسَنُّ رَفْعُ الصَّوْتِ حَالَ الْحُظْبَةِ (قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ مُبَالَغَةِ) أَمَّا مَعَهَا فَيُكُرَّهُ (قَوْلُهُ وَلاَ يَبْعُدُ نَدْبُ التَّرَضَّى عَنِ الصَّحَابَةِ) أَيْ تَرَضِّى السَّامِعِيْنَ عَنْهُمْ عِنْدَ ذِكْرِ الْحَطِيْبِ أَسْمَاءَهُمْ (قَوْلُهُ بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ) مُتَعَلِّقُ بِنَدْبُ أَمَّا مَعَ رَفْعِ الصَّوْتِ فَلاَ يُنْدَبُ لِأَنَّ فِيْهِ تَشْوِيْشًا.

Disunnahkan membaca hamdalah bagi orang bersin dan menjawabnya, serta mengeraskan suara shalawat dan salam pada Nabi Saw. tanpa berlebihan ketika khotib menyebut nama atau sifat beliau. Guruku (Ibn Hajar al-Haitami) berkata: "Dan tidak jauh dari kebenaran kesunnahan membaca radhiyallahu 'anh bagi para sahabat tanpa mengeraskan suara. Begitu pula membaca amin karena doa khotib.

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Dan mengeraskan suara.") maksudnya dan sunnah mengeraskan suara ketika khotbah. (Ungkapan beliau: "Tanpa berlebihan.") Bila disertai berlebihan, maka dimakruhkan. (Ungkapan beliau: "Dan tidak jauh dari kebenaran kesunnahan membaca radhiyallahu 'anh bagi para sahabat.") Maksudnya taradhi orang-orang yang mendengar para sahabat disebutkan namanya oleh khotib. (Ungkapan beliau: "tanpa mengeraskan suara.") berhubungan dengan kata 选。 Sedangkan bila dengan mengeraskan suara maka tidak disunnahkan, karena menggangu orang lain.[]

²⁵ Sulaiman al-Bujairimi, al-Tajrid li Naf al-'Abid, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1345), Jilid I, h. 395-393.

²⁶ Zainuddin al-Malibari dan Abu Bakar bin Muhammad Syatha al-Dimyathi, Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), Juz II, h. 86-87.

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-16 Di Purwokerto Pada Tanggal 26-29 Maret 1946 M.

271. Memerangi Tentara Musuh yang Sudah Ada di Tengah-tengah Kita 272. Mengeluarkan Zakat Bagian Sabilillah 273. Perempuan Berpakaian Seragam Tentara 274. Mayit Syuhada Dikubur di Tempat Kematiannya 275. Muslim Masuk Organisasi yang Tidak Berdasar Islam

271. Memerangi Tentara Musuh yang Sudah Ada di Tengah-tengah Kita

- S. Bagaimana hukumnya kita berperang untuk menolak musuh yang sudah menginjakkan kakinya di tanah air kita sebagaimana yang telah terjadi sekarang ini? (Jombang)
- J. 1. Bahwa berperang menolak penjajah dan para pembantunya adalah wajib 'ain atas tiap-tiap jiwa, baik laki-laki atau perempuan, dan anak-anak juga yang sama berada di tempat yang dimasuki oleh mereka itu (penjajah atau pembantunya).
 - 2. Wajib 'ain pula atas tiap-tiap jiwa yang berada di dalam tempattempat yang jaraknya kurang dari 94 Km. terhitung dari tempat mereka itu (musuh).
 - 3. Wajib kifayah atas segenap orang-orang yang berada di tempattempat yang jaraknya ada 94 Km. tersebut.
 - 4. Jikalau jiwa-jiwa yang tersebut dalam nomor 1 dan 2 di atas tidak mencukupi untuk menolaknya maka jiwa yang tersebut di dalam nomor 3 wajib membantu sampai cukup.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Tajrid li Naf' al-'Abid1

(قَوْلُهُ وَإِنْ دَخَلُواْ إِلَخ) هَذَا مَفْهُوْمُ قَوْلِهِ سَابِقًا وَالْكُفَّارُ بِبِلاَدِهِمْ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ مَثَلاً) مُتَعَلِّقُ بِدَخَلُواْ لِإِدْخَالِ مَا لَوْصَارَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَلْدَةِ دُوْنَ مَسَافَةِ قَصْرٍ فَإِنَّهُ فِي حُكْمِ دُخُولِ الْبَلَدِ كَمَا فِي مُ روَيَصِحُ أَيْضًا بِبَلْدَةٍ لِإِدْخَالِ الْقَرْيَةِ وَيَصِحُ تَعَلَّقُهُ بِقَوْلِهِ لَنَا لِإِدْخَالِ الْبِلاَدِ الذِّمِّيِّنَ تَأْمَلُ فِي مُ روَيَصِحُ أَيْضًا بِبَلْدَةٍ لِإِدْخَالِ الْقَرْيَةِ وَيَصِحُ تَعَلَّقُهُ بِقَوْلِهِ لَنَا لِإِدْخَالِ الْبِلاَدِ الذِّمِيِّيْنَ تَأْمَلُ (قَوْلُهُ وَقُولُهُ تَأَهُّبُهُمْ) أَي اسْتِعْدَادُهُمْ لِقِتَالِ زي بِأَنْ لَمْ يَهْجُمُواْ بَعْتَةً شرح م ر إِلَى أَنْ قَالَ (قَوْلُهُ وَقُولُهُ كَانَةٍ فِيْ حَقِّ مَنْ بَعُدَ) يَنْبَغِيْ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِكُونِهِ فِيْ فَرْضِ كِفَايَةٍ فِيْ حَقِّ مَنْ بَعُدَ وَمَنْ بَعُدَ وَمَنْ بَعُدَا وَمُؤْلِهُ مُصَاعَدَتُهُمْ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ وَإِلاَّ فَلاَ يَجِبُ عَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَوْضِعِ وَمَنْ قُرُبَ مِنْهُمْ وَجَبَ عَلَيْهِمْ مُسَاعَدَتُهُمْ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ وَإِلاَّ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ شَيْءُ سم

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Apabila mereka masuk ...") ini merupakan *mafhum* dari ungkapan beliau tadi: "Dan orang-orang kafir masih berada di daerah mereka." Demikian menurut guruku -Muhamamd al-'Amwasyi-. (Ungkapan beliau: "Misalnya.") berhubungan dengan kata

Sulaiman al-Bujairimi, al-Tajrid li Naf al-'Abid, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1345), Jilid IV, h. 251.

, karena memasukkan kasus bila antara orang-orang kafir dan daerah muslimin kurang dari masafah al-qashr -94 km-, maka hukumnya seperti mereka telah masuk daerah muslimin, seperti keterangan dalam Syarh al-Ramli. Bisa juga berhubungan dengan kata نافر , karena memasukkan kasus bila mereka masuk ke desa muslimin. Benar pula berhubungan dengan kata ย์, karena memasukkan kasus mereka masuk ke daerah kafir dzimmi. Renungkanlah! (Ungkapan beliau: "Persiapan mereka."), maksudnya persiapan mereka untuk perang. Demikian menurut al-Zayyadi. Yakni mereka tidak menyerang secara mendadak. Demikian dalam Syarh al-Ramli. ... (Ungkapan beliau: "Dan perang itu fardhu kifayah bagi orang yang jauh.") Semestinya yang dikehendaki dengan ungkapan beliau tentang perang itu hukumnya fardhu kifayah bagi orang yang jauh, bukanlah secara mutlak ada sebagian dari mereka yang telah berperang. Namun yang dimaksud adalah bila selain mereka, yakni muslimin yang daerahnya dimasuki tentara kafir dan muslimin di dekat mereka tidak mencukupi, maka bagi muslimin yang berada di tempat jauh wajib menolong mereka dengan kadar sampai cukup. Bila tidak begitu, maka muslimin yang berada di tempat jauh tidak wajib apa-apa. Demikian menurut Ibn Oasim al-'Ubbadi.

2. Hasyiyah al-Bajuri²

(قَوْلُهُ الثّانِي) أَيْ مِنَ الْحَالَيْنِ السَّاقِقَيْنِ وَقَوْلُهُ أَنْ يَدْخُلَ الْكُفَّارُ بَلْدَةً مِنْ بِلاَدِ الْمُسْلِمِيْنَ أَيْ مَنْ الْجَلْدَةُ مِنْ بِلاَدِ الْمُسْلِمِيْنَ الْبَلْدَةُ مِنْ بِلاَدِ النَّمْ فَعِوْلُهُ أَوْ يَنْ بِلاَدِ الْمُسْلِمِيْنَ الْبَلْدَةُ مِنْ بِلاَدِ الْمُسْلِمِيْنَ الْبَلْدَةُ مِنْ بِلاَدِ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْ نَزَلُوا قَرِيْباً مِنْهَا وَقَوْلُهُ وَوَنَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْهَا كَمَا قَالَهُ الشَّمْسُ الرَّمْلِي (قَوْلُهُ الْجَهَادُ حِيْنَتِذٍ) أَيْ حِيْنَ إِذْ دَخَلُوا بَلْدَةً مِنْ بِلاَدِ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْ نَزَلُوا قَرِيْباً مِنْهَا وَقَوْلُهُ فَرْضُ الْجَهَادُ حِيْنَتِذٍ) أَيْ حِيْنَ إِذْ دَخَلُوا بَلْدَةً مِنْ بِلاَدِ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْ نَزَلُوا قَرِيْباً مِنْهَا وَقَوْلُهُ فَرْضُ عَيْنِ عِلَى مَنْ كَانَ فِي أَهْلِها كَنْ مَسَافَةٍ قَصْرٍ مِنْهَا وَإِنْ كَانَ فِي أَهْلِها كَنْ مَنْ كَانَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ إِذَا احْتَاجُواْ الِيْهِمْ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ فِي عَلَى مَنْ كَانَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ إِذَا احْتَاجُواْ الِيْهِمْ بِقَدْرِ الْكِفَايَةِ فِي عَلَى مَنْ كَانَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ إِذَا احْتَاجُواْ الْمُهِمْ فِي مَنْ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَوْلُهُ مَنْ مَنْ كَانَ فِي عَلَى مَنْ عَنْ بَعُدَ لِلْكَالَةِ فِي حَقِّى مَنْ الْمَسْلِمِيْنَ وَالنَّسَاءَ وَالْعَبِيْدِ ...

(Ungkapan Syaikh Ibn Qasim al-Ghazi: "Kondisi kedua.") maksudnya dari dua kondisi yang telah lewat. (Ungkapan beliau: "Bila orang-orang kafir masuk ke suatu negara dari negara muslimin.") maksudnya sebagai contoh.

² Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri, (Mesir: Isa al-Halabi, 1922), Jilid II, h. 269.

Maka seperti halnya negara adalah suatu desa dan semisalnya, dan seperti halnya negara muslimin adalah negara kafir dzimmi. (Ungkapan beliau: "Atau mereka berada di dekat suatu negara muslimin.") maksudnya mereka berada dalam radius yang kurang dari masafah al-qashr -94 km-, sebagaimana yang diutarakan al-Syams al-Ramli. (Ungkapan beliau: "Berperang dalam kondisi tersebut.") maksudnya mulai ketika mereka masuk ke suatu negara dari negara muslimin atau berada di dekatnya. (Ungkapan beliau: "Fardhu 'ain.") maksudnya bagi penduduk daerah tersebut dan penduduk sekitar dalam radius kurang dari masafah al-qashr, meskipun penduduk daerah tersebut telah mencukupi, sebab penduduk dalam radius kurang dari masafah al-qashr itu seperti hadir bersama penduduk daerah yang diserang tersebut, serta bagi penduduk dalam radius masafah al-qashr bila dibutuhkan dengan kadar secukupnya untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan. Maka hukum berperang menjadi fardhu 'ain bagi orang yang dekat dari tempat yang diserang dan fardhu kifayah bagi yang jauh darinya. (Ungkapan beliau: "Maka wajib bagi penduduk negara tersebut.") sehingga anak-anak, kaum wanita, para budak ...

3. Fath al-Wahab3

(وَإِن دَخَلُوا) أَيْ الْكُفَّارُ (بَلْدَةً لَنَا) مَثَلاً (تَعَيَّنَ) الجِهَادُ (عَلَى أَهْلِهَا) سَوَاءً أَمْ صَن تَأَهُ بُهُمْ لِقِتَالٍ أَمْ لَمْ يُمْصِنْ لَكِنْ عَلِمَ كُلُّ مَنْ قَصِدَ أَنَّهُ إِنْ أُخِذَ قُتِلَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ إِن اِمْتَنَعَ مِنَ الاسْتِسْلاَمِ قُتِلَ أَوْ لَمْ تَأْمَنْ الْمَرْأَةُ فَاحِشَةً إِنْ أُخِذَتْ (وَعَلَى مَنْ دُوْنَ مَسَافَةِ قَصْرٍ مِنَهَا) وَإِنْ كَانَ فِي أَهْلِهَا كِفَايَةٌ لِأَنَّهُ كَالْحَاضِرِ مَعَهُمْ فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ ذُكِرَ (حَتَّى عَلَى مَنْ فُكِرَ (حَتَّى عَلَى مَنْ فُكِرَ (حَتَّى عَلَى فَيْدِ وَوَلَدٍ وَمَدِيْنٍ وَرَقِيْقٍ بِلاَ إِنْنِ) مِنَ الْأَصْلِ وَرَبِّ الدَّيْنِ وَالسَّيِّدِ (وَعَلَى مَنْ بِهَا) أَيْ فَيْمِ الْهَمْ وَإِنْقَاذًا مِنَ الْهَلَكَةِ فَيَصِيرُ فَرْضَ عَيْنٍ فِي حَقِّ مَنْ قَرُبَ وَفَرْضَ كِفَايَةٍ فِي حَقِّ مَنْ بَعُدَ .

(Dan bila mereka masuk), maksudnya tentara kafir (ke negara kita muslimin) misalnya, (maka fardhu 'ain) berperang (bagi penduduknya), baik tentara kafir tersebut mungkin melakukan persiapan perang maupun tidak, namun setiap orang yang dituju mereka mengetahui bila ia ditawan maka akan dibunuh, atau tidak mengetahui bila ia tidak mau menyerah maka akan dibunuh, atau kaum wanita tidak aman dari dizinai bila ditawan, (dan bagi orang yang berada di radius kurang dari masafah al-Qashr -94 km-

³ Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Fath al-Wahhab pada hamisy Sulaiman al-Jamal, Hasyiyah al-Jamal 'ala Syarah Manhaj al-Thullab, (Mesir: Musthafa Muhammad t. th.), Juz V, h. 191.

darinya), meskipun penduduk daerah tersebut sudah mencukupi, karena orang yang berada di radius tersebut seperti orang yang hadir bersama mereka, maka berperang wajib baginya, (sehingga bagi seorang fakir, anak, yang punya hutang dan budak, tanpa izin) dari orang tua, orang yang menghutangi dan sayyid-pemilik budak-, (dan bagi orang yang ada di radius tersebut), maksudnya orang yang berada di radius masafah al-qashr, maka baginya wajib pergi membantu mereka ketika dibutuhkan, (dengan sesuai kebutuhan), karena membela dan menyelamatkan mereka dari penjajahan. Maka hukum berperang menjadi fardhu 'ain bagi orang yang dekat dari tempat yang diserang dan fardhu kifayah bagi yang jauh darinya.

4. Raudhah al-Thalibin4

الجِهادُ الَّذِيْ هُوَ فَرْضُ عَيْنٍ فَإِذَا وَطِئَ الْكُفَّارُ بَلْدَةَ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْ أَطَلُّوا عَلَيْهَا وَنَرَلُوا بَابَهَا قَاصِدِيْنَ وَلَمْ يَدْخُلُوا صَارَ الجِهادُ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى التَّفْصِيْلِ الَّذِيْ نُبَيِّنُهُ إِنْ شَآءَ اللهُ وَعَنْ ابْنِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَبْقَى فَرْضَ كِفَايَةٍ وَالصَّحِيْحُ الْأَوَّلُ فَيَتَعَيَّنُ عَلَى اللهُ وَعَنْ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ يَبْقَى فَرْضَ كِفَايَةٍ وَالصَّحِيْحُ الْأَوَّلُ فَيَتَعَيَّنُ عَلَى أَهْلِ يَلْكَ الْبَلْدَةِ الدَّفْعُ بِمَا أَمْكَنَهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْكُفَّارُ دَارَ الإِسْلاَمِ فَالجِهادُ فَرْضَ عَيْنِ عَلَى مَنْ قَرُبَ وَفَرْضُ كِفَايَةٍ فِي حَقِّ مَنْ بَعُدَ وَعَلَى هَذَا فَحُصُمُ أَهْلِ فَرْضَ عَيْنِ عَلَى مَنْ قَرُبَ وَفَرْضُ كِفَايَةٍ فِي حَقِّ مَنْ بَعُدَ وَعَلَى هَذَا فَحُصُمُ أَهْلِ الْإِعْذَارِ عَلَى مَا ذَكُرْنَاهُ فِي الضَّرْبِ الْأَوِّلِ وَفِيْهِ وَجُهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى جَمِيْعِهِمْ الْمُسَاعَدَةُ الْعُصَرِ وَإِنْ كَانَ فِي أَهْلِ الْمُسَاعَدَةُ وَلِيَكُنْ هَوْ عَلَى مَسَافَةِ الْقُصْرِ وَإِنْ كَانَ فِي أَهْلِ الْمُسَاعَدَةُ وَلِيَتُ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَإِنْ كَانَ فِي أَهُلُ لِلْمُ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَإِنْ كَانَ فِي أَهْلِ الْمُسَاعَدَةُ لِأَنَهُ يُونَدُيْنَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَإِنْ كَانَ فِي أَلْمُ الْمَلِي الْمُسَاعَدَةُ لِأَنَهُ يُونَوْنَهُمْ كِفَايَةً فَالْأَصَةُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الذِيْنَ فَوْقَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَالْمَاعِدَةُ لِأَنَّهُ يُونَدُيْ لَلْكَعْرِ حَاجَةٍ

Jihad yang hukumnya fardhu 'ain adalah ketika orang-orang kafir menduduki daerah muslimin, atau mendekatinya, berada di gerbangnya dengan bertujuan -memasukinya- dan belum memasukinya. Maka hukum jihad adalah fardhu 'ain sesuai perincian hukum yang akan saya terangkan insya Allah. Menurut Ibn Abi Hurairah dan ulama lainnya jihad tetap berhukum makruh. Namun pendapat yang shahih (benar) adalah pendapat pertama. Maka bagi penduduk daerah tersebut wajib melakukan pembelaan diri dengan alat seadanya ...

Ketika orang-orang kafir memasuki daerah Islam, maka jihad hukumnya fardhu 'ain bagi orang yang dekat dan fardhu kifayah bagi orang yang jauh. Berdasarkan pendapat (al-Baghawi) ini, maka hukum orang-orang

Muhyiddin al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin, (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1985), Cet. Ke-2, Jilid X, h. 214-1215.

yang mempunyai udzur -seperti anak-anak, perempuan, orang buta dan semisalnya- itu sesuai dengan keterangan yang telah aku sampaikan dalam jihad bagian pertama (ketika orang-orang kafir masih berada di daerah mereka). Dan dalam kasus ini ada satu pendapat yang menyatakan bahwa bagi mereka semua wajib menolong dan bersegera ikut berperang. Dan hendaknya pendapat ini untuk mereka yang dekat, yaitu orang yang ada dalam radius masafah al-qashr. Bila penduduk daerah yang serang dan daerah yang dekat dengannya sudah mencukupi, maka pendapat al-ashshah menyatakan bahwa bagi orang yang berada pada radius di atas masafah al-qashr tidak wajib memberi pertolongan, karena bila begitu akan berarti mewajibkan jihad bagi seluruh umat Islam. Dan hal itu akan menimbulkan kesulitan diluar kebutuhan.

5. Radd al-Muhtar⁵

وَحَاصِلُهُ أَنَّ كُلَّ مَوْضِع خِيْفَ هُجُومُ الْعَدُوِّ مِنْهُ فُرِضَ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ عَلَى أَهْلِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ حِفْظُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوْا فُرِضَ عَلَى الْأَقْرَبِ الْمَيْهِمْ إِعَانَتُهُمْ اِلَى حُصُولِ الْكِفَايَةِ بِمُقَاوَمَةِ الْعَدُوِّ إِلَى أَنْ قَالَ (قَوْلُهُ بَلْ يُفْرَضُ عَلَى الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبُ الِخ) أَيْ يُفْرَضُ عَلَيْهِمْ عَيْنًا وَقَدْ يُقَالُ كِفَايَةً بِدَلِيْلِ أَنَّهُ لَوْ قَامَ بِهِ الْأَبْعَدُ حَصَلَ الْمَقْصُودُ فَيَسْقُطُ عَلَى الْأَقْرَبِ عَيْنًا وَقَدْ يُقَالُ كِفَايَةً بِدَلِيْلِ أَنَّهُ لَوْ قَامَ بِهِ الْأَبْعَدُ حَصَلَ الْمَقْصُودُ فَيَسْقُطُ عَلَى الْأَقْرَبِ عَيْنًا وَقَدْ يُقَالُ كِفَايَةً بِدَلِيْلِ أَنَّهُ لَوْ قَامَ بِهِ الْأَبْعَدُ حَصَلَ الْمَقْصُودُ فَيَسْقُطُ عَلَى الْأَقْرَبِ كَعَنّا وَقَدْ يُقَالُ كَفَايَةً بِدَلِيْلِ أَنَّهُ لَوْ قَامَ بِهِ الْأَبْعَدُ حَصَلَ الْمَقْصُودُ فَيَسْقُطُ عَلَى الْأَقْرَبِ كَاللّهُ لِللّهُ وَهُمْ يَقُولُ عَلَى اللّهُ وَعَبَارَةُ اللّهُ وَقَمْ مَنْ قَرُبُ مِنْ فَكُولُ عَلَى عَنْ إِنْ هَجَمُوا عَلَى الْخُولِ فَنْمُ وَهُمْ يَقُدِرُونَ عَلَى الْجَهَادِ وَنَقَلَ صَاحِبُ النّهَايَةِ عَنِ الذَّخِيْرَةِ أَنَّ الْجِهَادَ إِذَا جَآءَ التّفِيرُ إِنَّمَا يَصِيرُ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى مَنْ قَرُبَ مِنْ الْعَدُو فَهُو فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَيْهِمْ .

Dan kesimpulannya, setiap tempat yang rawan diserang musuh, maka penguasa atau penduduk daerah tersebut wajib menjaganya. Bila tidak mampu, maka muslimin yang dekat dengannya wajib membantu mereka sampai mampu mengalahkan musuh ...

(Ungkapan 'Alauddin al-Hashkafi: "Namun fardhu bagi muslim yang terdekat, lalu yang terdekat setelahnya.") maksudnya fardhu 'ain bagi mereka. Dan dikatakan fardhu kifayah. Dalilnya adalah bila orang yang jauh dari musuh telah berperang dan berhasil mengalahkan musuh, maka kewajiban berperang bagi orang yang dekat dengannya gugur. Namun, pemyataan ini disebutkan Syaikh Munlakhusru di kitab *Durar al-Ahkam* dalam kasus bila

⁵ Ibn Abidin, Radd al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar, (Beirut: Dar İhya' al-Turats al-Arabi, t. th.), Jilid III, h. 219-220.

musuh menyerang secara mendadak. Redaksi Durar al-Ahkamnya yaitu: "Dan perang itu fardhu 'ain apabila musuh melakukan serangan mendadak di suatu perbatasan daerah Islam. Maka hukum berperang menjadi wajib bagi orang yang berada didekatnya dalam keadaan mereka mampu. Dan penulis al-Nihayah (al-Husain bin Ali al-Sighnaqi) mengutip dari kitab al-Dzakhirah bahwa fardhu 'ain jihad ketika musuh menyerang itu hanya bagi orang yang dekat dengan musuh. Sedangkan orang yang jauh, maka hukum berjihad bagi mereka adalah fardhu kifayah.

Diwajibkan bagi yang lebih dekat dan yang lebih dekat lagi untuk berjihad sebagai fardhu 'ain. Menurut pendapat yang lain sebagai fardhu kifayah dengan dalil, seandainya yang lebih jauh sudah melaksanakannya, maka maksud berjihad sudah terpenuhi dan gugurlah kewajibannya bagi mereka yang berada paling dekat.

6. Al-Hawi al-Kabir6

وَالْقِسْمُ الْقَالِثُ أَنْ يَذْخُلَ الْعَدُو بِلاَدَ الْإِسْلاَمِ وَيَطُوُهَا فَيَتَعَيَّنُ فَرْضُ قِتَالِهِ عَلَى أَهْلِ الْبِلاَدِ الَّتِيْ وَطِئْهَا وَدَخَلَهَا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَهْلِهَا قُدْرَةً عَلَى دَفْعِهِ تَعَيَّنَ فَرْضُ الْقِتَالِ عَلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْعَدُو عَنْهُمْ إِلَى بِلاَدِهِ. وَإِنْ كَانَ بِهِمْ قُدْرَةً عَلَى دَفْعِهِ لَمْ كَافَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا كَانَ الْعَدُو بَاقِيًا فِي دَارِهِمْ وَهَلْ يَصِيْرُ فَرْضُ قِتَالِهِ مُتَعَيَّنًا عَلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ كَمَا تَعَيَّنَ أَهْلُ القَغْرِ أَمْ لاَ ؟ عَلَى وَجَهَيْنِ: أَحَدُهَا يَتَعَيَّنُ لِأَنَّ جَمِيْعَ الْمُسْلِمِيْنَ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ فَيَصِيْرُ فَرْضُ قِتَالِهِمْ مُتَعَيِّنًا عَلَى كَافَةِ لِمُدْوِي الْكِفَايَةِ لِقُدْرَةِ أَهْلِ لَتَعْبَى لَا اللّهُ فِي وَالْمَهُمْ وَيَكُونُ بَاقِيًا عَلَى الْكِفَايَةِ لِقُدْرَةِ أَهْلِ الشَّغْرِ عَلَى دَوْلُ وَتِعَلِيهِمْ وَيَكُونُ بَاقِيًا عَلَى الْكِفَايَةِ لِقُدْرَةِ أَهْلِ الشَّغْرِ عَلَى دَوْفُ قِتَالِهِ مُتَعَيِّنًا عَلَى كَافَة لِهُ مُتَعَيِّنَ عَلَيْهِمْ وَيَكُونُ بَاقِيًا عَلَى الْكِفَايَةِ لِقُدْرَةِ أَهْلِ الشَّغْرِ عَلَى دَوْفِ الْكِفَايَةِ لِقُدْرَةِ أَهْلِ الشَّغْرِ عَلَى دَوْعِهِمْ فَيَصِيْرُ فَرْضُ قِتَالِهِ مُتَعَيِّنًا وَعَلَى الْكَافَةِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ لِقُدْرَةٍ أَهْلِ الشَّغْرِ عَلَى دَفْعِهِمْ فَيَصِيْرُ فَرْضُ قِتَالِهِ مُتَعَيِّنًا وَعَلَى الْكَافَةِ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ .

Bagian yang ketiga, jika musuh memasuki negeri Islam dan mendudukinya, maka bagi penduduk negeri fardhu 'ain memeranginya. Jika penduduk negeri tersebut tidak punya kemampuan untuk melawan, maka kewajiban berperang berlaku bagi seluruh ummat Islam sampai musuh terusir ke negeri mereka. Jika penduduk negeri tersebut punya kemampuan untuk membela, kewajiban berjihad sebagai fardhu kifayah tetap tidak gugur bagi segenap umat Islam selama musuh masih berada di negeri tersebut.

Namun apakah kewajiban memerangi musuh menjadi kewajiban seluruh umat Islam seperti mereka yang berada di daerah perbatasan, ada dua

⁶ Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), Jilid XVIII, h. 161-162.

pendapat. Pertama, menjadi kewajiban. Sebab, semua umat Islam itu ibarat penguasa bagi umat selainnya, sehingga kewajiban memerangi musuh menjadi kewajiban semua umat Islam. Kedua, tidak menjadi kewajiban semua umat Islam. Dan hukumnya tetap fardhu kifayah karena penduduk daerah perbatasan telah mencukupi untuk melawan musuh. Maka berperang bagi mereka hukumnya fardhu 'ain dan bagi selainnya fardhu kifayah.

272. Mengeluarkan Zakat Bagian Sabilillah

- S. Mohon dipertimbangkan bagaimana hukumnya membagi barang zakat kita dalam masa sekarang ini, wajibkah mengeluarkan bagian sabilillah? Hubungan dengan keadaan di tanah air kita ini. (Gresik) Penjelasan:
- 1. Di mana-mana tempat telah diadakan tentara Hizbullah yang bersedia untuk berjihad fi sabilillah dengan tidak mendapat kecukupan dari Pemerintah.
- 2. Di beberapa tempat telah terjadi pertempuran antara Hizbullah dan pihak musuh yang kita sekalian sama mengetahuinya. Umpamanya betul wajib, maka bagaimanakah aturan pembagian atau pemberian kepada tentara tersebut?
- J. 1. Bahwa pada waktu sekarang wajib memberikan zakat bagian sabil pada Sabilillah yang telah ada di tanah air kita ini, sekalipun mereka itu kaya raya.
 - 2. Hizbullah yang telah ada pada sekarang adalah termasuk dalam sabililah tersebut.
 - 3. Adapun aturan pemberian barang zakat tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Sabillah atau Hizbullah tadi harus diberi bilamana mereka itu akan berangkat perang atau tinggal di markas pertahanan.
 - b. Para warga Sabilillah tersebut yang memang wajib diberi nafkah oleh mereka harus diberi bagian dari barang zakat tersebut sampai kadar kecukupannya.
 - c. Apabila warga Sabilillah tersebut sudah pulang dari peperangan atau markas pertahanan, kemudian barang zakat yang telah diterima tadi ada kelebihan, sedang pemakaiannya cukup sederhana, maka kelebihan itu wajib dikembalikan.
 - d. Orang yang wajib zakat boleh menyerahkan barang zakat tersebut kepada para nazhir Sabilillah tadi, untuk menerimakan pada mereka.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah al-Bajuri⁷

⁷ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Mesir: Isa al-Halabi, 1922), Jilid I, h. 295.

(قَوْلُهُ وَأَمَّا سَبِيْلُ اللهِ فَهُمْ الْغُزَّاةُ) إِلَى أَنْ قَالَ وَقَوْلُهُ بِلْ هُمْ مَتَطَوِّعُوْنَ بِالْجِهَادِ أَيْ فَيُعْطَوْنَ وَلَوْ أَغْنِيآ ٤ إِعَانَةً لَهُمْ عَلَى الْغَزْوِ وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مِنْهُمْ رَدُّ مَا أَخَذَهُ إِنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ مَا فَصُلَ بَعْدَ غَزْوهِ إِنْ فَضُلَ بَعْدَ غَزْوهِ شَيْءً لَهُ.

(Ungkapan Syaikh Ibn Qasim al-Ghazi: "Adapun Sabililah adalah pasukan perang.") ... Dan ungkapan beliau: "Namun mereka adalah sukarelawan perang." maksudnya mereka diberi zakat meskipun kaya, karena untuk menolong mereka berperang. Dan mereka semua wajib mengembalikan zakat yang telah diambil bila tidak berperang, atau sisanya setelah perang usai, bila memang setelah usai perang terdapat sisa zakat tersebut.

2. I'anah al-Thalibin8

(قَوْلُهُ وَلَوْ غَنِيًّا) غَايَةً لِمُقَدَّرٍ أَيْ فَيُعْطَى وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا وَلَوْ أَخَرَهُ عَنِ الْفِعْلِ بَعْدَهُ لَكَانَ أَوْلَى وَيُعْطَى النَّفَقَة إلخ بِحَذْفِ لَفْظِ الْمُجَاهِدِ إِذِ الْمَقَامُ لِلْإِضْمَارِ وَلَهُ عَلَى الْمُعْنَى أَنَ هَذَا الْقَائِمَ لِلْجِهَادِ يُعْطَى كُلَّ مَا يَحْتَاجُهُ لِتَفْسِهِ أَوْ لِمَمُوْنِهِ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسُوةٍ وَالْمَعْنَى أَنَّ هَذَا الْقَائِمَ لِلْجِهَادِ يُعْطَى كُلَّ مَا يَحْتَاجُهُ لِتَفْسِهِ أَوْ لِمَمُوْنِهِ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسُوةٍ وَغَيْرِهِمَا إِذَا حَانَ وَقْتُ خُرُوجِهِ لَهُ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِ الرَّمْلِي وَيُعْطَى الْعَازِيُّ إِذَا حَانَ وَقْتُ خُرُوجِهِ لَهُ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِ الرَّمْلِي وَيُعْطَى الْعَازِيُّ إِذَا حَانَ وَقْتُ خُرُوجِهِ لَهُ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِ الرَّمْلِي وَيُعْطَى الْعَازِيُّ إِذَا حَانَ وَقْتُ خُرُوجِهِ لَهُ وَعِبَارَةُ الْمِنْهَاجِ مَعَ شَرْحِ الرَّمْلِي وَيُعْطَى الْعَازِيُّ إِذَا حَانَ وَقْتُ خُرُوجِهِ قَدْرَ حَاجَتِهِ اللاَّيْقَةِ بِهِ وَبِمَمُونِهِ لِنَقَقَةٍ وَكِسُوةٍ ذَاهِبًا وَرَاجِعًا وَمُقِيْمًا هُنَاكَ أَيْ اللَّهُ عِن وَخُوهِ إِلَى الْفَتْحِ وَإِنْ طَالَتِ الْإِقَامَةُ لِأَنَّ اسْمَهُ لاَيَرُولُ بِذَلِكَ.

(Walaupun kaya) tetap berhak menerima zakat. Yakni pejuang tersebut berhak diberi semua yang diperlukan bagi dirinya atau orang yang menjadi tanggungannya baik nafkah maupun pakaian dan lainnya, ketika waktu berperang tiba. Dan redaksi kitab al-Minhaj sekaligus Syarh al-Ramli adalah "Jika waktu berperang sudah tiba, maka pejuang itu dan orang yang menjadi tanggungannya berhak diberi biaya kebutuhan hidup yang pantas baginya dan orang-orang yang wajib dinafkahinya untuk kebutuhan nafkah dan pakaian selama pulang pergi, berada di perbatasan dan semisalnya sampai berhasil menaklukkan musuh. Meskipun waktunya lama, karena namanya sebagai pejuang tetap melekat dan tidak hilang karenanya.

3. Minhajul Qawim9

(الْغُزَاةُ الذُّكُوْرُ الْمُتَطَوِّعُوْنَ) بِالجِهَادِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ رِزْقٌ فِي الْفَيْءِ وَهُمْ الْمُرَادُ بِسَبِيْلِ

⁸ Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M), Jilid II, h. 219.

⁹ Ibn Hajar al-Haitami, al-Minhaj al-Qawim, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1391 H/1942 M), h. 110.

الله فِي الآيَةِ فَيُعْظَى كُلُّ مِنْهُمْ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا كِفَايَتَهُ وَكِفَايَةَ مَمُوْنِهِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِشَوَةٍ ذَهَابًا وَإِيَابًا وَإِقَامَةً فِي الظَّفْرِ وَنَحْوِهِ إِلَى الْفَتْحِ وَإِنْ طَالَتْ إِقَامَتُهُ.

(-Golongan penerima zakat ketujuh adalah- tentara laki-laki yang suka rela) berperang yang tidak mendapatkan gaji dari harta fai' (harta yang diperoleh dari orang kafir tanpa peperangan, seperti jizyah, kompensasi perdamaian, dan semisalnya). Merekalah yang dimaksud sabilillah dalam ayat (QS. al-Taubah: 60). Masing-masing walaupun kaya diberi zakat sebesar biaya hidupnya dan orang-orang yang wajib dinafkahinya berupa nafkah dan pakaian selama pulang pergi, dan berada di perbatasan dan semisalnya sampai berhasil menaklukkan musuh, meskipun waktunya lama.

4. Al-Syarh al-Kabir 10

(مَسْأَلَةُ) السَّابِعُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَهُمْ الْغُرَاةُ الَّذِيْنَ لاَدِيْوَانَ لَهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ (فَصْلُ) وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ هَذَا السَّهْمَ الْغُزَّاةُ الَّذِيْنَ لاَدِيْوَانَ لَهُمْ وَإِنَّمَا يَتَطَوَّعُونَ بِالْغَزْوِ إِذَا نَشَطُوْا قَالَ أَحْمَدُ يَسْتَحِقُّ هَذَا السَّهْمَ الْغُزَّاةُ الَّذِيْنَ لاَدِيْوَانَ لَهُمْ وَإِنَّمَا يَتَطَوَّعُونَ بِالْغَزْوِ إِذَا نَشَطُواْ قَالَ أَحْمَدُ يُعْطَى ثَمَنَ الْفَرَسِ وَلَا يَتَوَلَّى مُخْرِجُ الزَّكَاةِ شِرَاءَ الْفَرَسِ بِنَفْسِهِ لِأَنَّ الْوَاحِبَ إِيتَاءُ الرَّكَاةِ فَإِذَا الْفَرَسِ بِنَفْسِهِ لِأَنَّ الْوَاحِبَ إِيتَاءُ الرَّكَاةِ فَإِذَا الْفَرَسِ بِنَفْسِهِ لِأَنَّ الْوَاحِبَ إِيتَاءُ الرَّكَاةِ فَإِذَا الْفَرَسِ بِنَفْسِهِ لِأَنَّ الْوَاحِبَ إِيتَاءُ الرَّكَاةِ فَرَسًا وَكَذَلِكَ الْحُصُمُ فِي شِرَاءِ السِّلاَحِ وَالْمُؤْنَةِ

(Masalah) Golongan penerima zakat ketujuh adalah sabilillah, yaitu para pejuang yang tidak mempunyai gaji resmi ... (Pasal) Sabilillah yang berhak mendapat bagian zakat ini adala mereka yang tidak mempunyai gaji resmi. Mereka hanya berperang secara sukarela ketika mau. Imam Ahmad berpendapat: "Mereka berhak diberi biaya pembelian kuda, dan pembayar zakat tidak wajib membelikan kuda sendiri, karena kewajibannya adalah memberikan zakat. Bila ia membelikan kuda sendiri, maka hanya kuda itu yang harus diberikannya. Begitu pula hukum pembelian senjata dan kebutuhan hidup seharia-hari.

5. Minah al-Jalil¹¹

(وَمُجَاهِدُ) أَيْ مُتَلَبِّسُ بِهِ أَوْ غَارِمٌ عَلَيْهِ قَالَ اِبْنُ عِرْفَةَ يُعْطَى مَنْ عَزَمَ عَلَى الْخُرُوجِ لِلْجِهَادِ أَوِ السَّفَرِ لَهُ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ الْبَالِغُ الذَّكُرُ الْقَادِرُ عَلَيْهِ وَيُشْتَرَطُ أَلاَّ يَكُونَ هَاشِمِيًّا وَيَدْخُلُ فِيْهِ الْمُرَابِطُ (وَآلَتُهُ) أَيْ الْجِهَادِ كَسَيْفٍ

¹⁰ Abdurrahman bin Muhammad, al-Syarh al-Kabir pada al-Mughni, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1983), Jilid II, h. 700-701.

¹¹ Muhammad Ulais, Minah al-Jalil li Mukhtashar al-Khalil, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid II, h. 91.

تَشْتَرِيْ مِنْهَا إِنْ كَانَ فَقِيْرًا بَلْ (وَلَوْ كَانَ الْمُجَاهِدُ كَانَ غَنِيًّا) أَيْ مَعَهُ مَا يَكْفِيْهِ لِجِهَادِهِ. وَأَشَارَ لِقَوْلِ عِيْسَى بْنِ دِيْنَارِ لاَ يُعْطَى مِنْهَا مَنْ مَعَهُ مَا يَكْفِيْهِ.

(-Pos alokasi zakat adalah-... dan orang yang berperang), maksudnya orang yang sedang perang atau bertekad ikut perang. Ibn 'Irfah berkata: "Orang yang bertekad ikut perang atau perjalanan perang itu berhak diberi zakat. Yaitu orang merdeka, muslim, baligh, laki-laki dan mampu perang. Disyaratkan bukan keturunan Bani Hasyim. Dan penjaga daerah perbatasan termasuk kategori orang perang. (dan alatnya), maksudnya alat perang yang boleh dibeli dengan harta zakat, bila orangnya fakir. Bahkan (meski dia kaya) maksudnya ia mempunyai bekal perang yang cukup. Syaikh Khalil berkata demikian karena menyinggung pendapat Isa bin Dinar: "Orang yang cukup perbekalan perangnya tidak berhak diberi zakat."

273. Perempuan Berpakaian Seragam Tentara

- S. Bagaimana hukumnya orang perempuan berpakaian uniform seperti T.R.I. (Tentara Republik Indonesia) dan sampai di mana batas-batas perjuangan kaum wanita dalam pertempuran?
- J. Perjuangan perempuan dalam soal jika perang itu telah menjadi fardhu 'ain atas mereka (perempuan), maka tidak ada batas, yakni sama dengan laki-laki, begitu juga tentang latihannya. Hanya saja pasti di tempat yang tersendiri dari orang-orang lelaki, sebagaimana mestinya. Mereka di waktu latihan atau bejuang, boleh beruniform tentara wanita untuk meringankan gerakannya, asal saja pakaian uniform itu menutup aurat.

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Mu'in12

(وَإِنْ دَخَلُوا) أَيْ الْكُفَّارُ (بَلْدَةً لَنَا تَعَيَّنَ) الْجِهَادُ (عَلَى أَهْلِهَا) أَيْ يَتَعَيَّنُ عَلَى أَهْلِهَا الدَّفْعُ بِمَا أَمْكَنَهُمْ وَلِلَّدْفُعُ مِرْتَبَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَنْ يَحْتَمِلَ الْحَالَ اجْتِمَاعُهُمْ وَتَأَهَّبُهُمْ لِلْحَرْبِ فَوَجَبَ الدَّفْعُ عَلَى مَنْ لَا يَلْزَمُهُ الْجِهَادُ خَوُ فَقِيرٍ وَوَلَدٍ وَمَدِيْنٍ وَعَبْدٍ عَلَى مَنْ لَا يَلْزَمُهُ الْجِهَادُ خَوُ فَقِيرٍ وَوَلَدٍ وَمَدِيْنٍ وَعَبْدٍ عَلَى مَنْ لَا يَلْزَمُهُ الْجِهَادُ خَوُ فَقِيرٍ وَوَلَدٍ وَمَدِيْنٍ وَعَبْدٍ عَلَى مَنْ لَا يَلْزَمُهُ الْجِهَادُ خَوُ فَقِيرٍ وَوَلَدٍ وَمَدِيْنٍ وَعَبْدٍ وَامْرَأَةٍ فِيهَا قُوَّةً بِلَا إِذْنٍ مِثَنْ مَرَّ وَيُغْتَقَرُ ذلِكَ لِهِذَا الْحَظِيرِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا سَبِيلَ لِإِهْمَالِهِ وَالْمَرَأَةِ فِيهَا قُوَّةً بِلَا إِذْنٍ مِثَنْ مَرَّ وَيُغْتَقُرُ ذلِكَ لِهِذَا الْحَظِرِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا سَبِيلَ لِإِهْمَالِهِ وَالْمَرَأَةِ فِيهَا قُوَّةً بِلَا إِذْنٍ مِثَنْ مَرَّ وَيَعْتَفُرُ ذلِكَ لِهِذَا الْحَظِيرِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا سَبِيلَ لِإِهْمَالِهِ وَالْمَرَأَةِ فِيهَا أَنْ يَخْشَاهُمُ الْكُفَّارُ وَلَا يَتَمَكَّنُونَ مِنِ اجْتِمَاعٍ وَتَأَهُّتِ فَمَنْ قَالُ إِنْ أَخَذَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَدُفَعَ عَنْ نَفْسِهِ بِمَا أَمْكَنَ وَإِنْ كَانَ مِتَنْ لَا جِهَادَ كُفَّارُ وَلَا مَتَنَ قَالُ إِنْ أَخَذَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَدُفَعَ عَنْ نَفْسِهِ بِمَا أَمْكَنَ وَإِنْ كَانَ مِتَنْ لَا جِهَادَ

¹² Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in pada l'anah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-fikr, t. th.)
Juz IV, h. 196-197.

(Dan apabila mereka memasuki) maksudnya orang-orang kafir (suatu daerah kita -muslimin-, maka hukumnya fardhu 'ain) jihad (bagi para penduduknya). Maksudnya mereka wajib melakukan perlawanan dengan senjata seadanya.

Cara melakukan perlawanan itu ada dua fase. Pertama, kondisi masih memungkinkan mereka untuk berkumpul dan bersiap-siap melakukan peperangan. Maka perlawanan semacam ini wajib bagi setiap penduduk dengan senjata seadanya, sehingga bagi orang yang sebenarnya tidak wajib perang, seperti orang fakir, anak, orang yang mempunyai hutang, budak dan perempuan yang kuat, tanpa seizin orang-orang yang telah disebutkan -orang tua, pihak yang menghutangi, majikan dan suami-. Dan jihad tanpa izin tersebut diperbolehkan karena bahaya besar ini yang tidak mungkin dibiarkan. Kedua, pasukan kafir telah mengepung mereka dan kondisi sudah tidak memungkinkan lagi untuk berkumpul dan bersiap-siap. Maka, siapa saja yang didatangi satu atau segerombolan orang kafir dan yakin bahwa bila ditangkap pasti akan dibunuh, maka ia wajib membela diri semampunya, meskipun ia termasuk orang yang tidak wajib perang, karena tidak diperbolehkan menyerah kepada pasukan kafir.

2. I'anah al-Thalibin13

(قَوْلُهُ الدَّفْعُ بِمَا أَمْكُنَهُمْ) أَيْ بِأَيِّ شَيْءٍ أَطَاقُوهُ وَلَوْ بِحِجَارَةٍ أَوْ عَصَا (قَوْلُهُ وَلِلدَّفْعِ مَرْتَبَتَانِ الخَالَ الْجَتِمَاعُهُمْ) النخ) الْقَصْدُ مِنْ هذَا بَيَانُ كَيْفِيَةِ الدَّفْعِ وَأَنَّ فِيهَا تَفْصِيلًا (قَوْلُهُ أَنْ يَعْتَمِلَ الْحَالَ الْجَتِمَاعُهُمْ) النخ يُعْتَمِلُ الْجَتَمَاعُهُمْ الْعَدُو (وَقَوْلُهُ وَتَأَهَّبُهُمْ لِلْحَرْبِ) أَيْ الْمَعْدَادُهُمْ أَيْ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمْ بِأَنْ لَمْ يَهْجُمْ عَلَيْهِمُ الْعَدُو (وَقَوْلُهُ وَتَأَهَّبُهُمْ لِلْحَرْبِ) أَيْ الشِعْدَادُهُمْ لَهُ (قَوْلُهُ فَوَجَبَ الدَّفْعُ) الْفَاءُ لِلتَّقْرِيعِ وَالْأُولَى التَّعْبِيرُ بِالْمُضَارِعِ أَيْ فَنِي هِذِهِ الْمَرْتَبَةِ يَجِبُ الدَّفْعُ مَظْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدِ بَشِيءٍ (وَقَوْلُهُ عَلَى كُلِّ مِنْهُمْ) أَيْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ النَّفْعُ مُظْلَقًا مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدِ بَشِيءٍ (وَقَوْلُهُ بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ) مُتَعَلِقُ بِالدَّفْعِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ الْبَلَدِ وَمِثَنْ دُونَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ (وَقَوْلُهُ بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ) مُتَعَلِقُ بِالدَّفْعِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ عَلَى اللّهُ فَلِللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَنْ لَا يَلْزَمُهُ الْجِهَادُ (قَوْلُهُ خَوْفَقِيرِ الخ) تَمْثِيلُ لِمَنْ مَلَّ عَلَى مَنْ لَا يَلْزَمُهُ الْجِهَادُ (قَوْلُهُ خَوْفَقِيرِ الخ) تَمْثِيلُ لِمَنْ مَلَّ عَلَى مَنْ لَا يَلْوَمُهُ الْجِهَادُ (قَوْلُهُ خِوْفَقِيرِ الخَ) تَمْثِيلُ لِمَنْ مَلَّ وَالسَّيْدِ أَيْفُ وَالسَّيْدِ أَيْفِ وَالتَّوْقِ وَإِنْ

¹³ Muhammad Syaththa al-Dimyati, I'anah al-Thalibin, (Surabaya: al-Haramain, t. th.) Juz IV, h. 196.

لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهُ ذِكْرٌ (قَوْلُهُ وَيُغْتَفَرُ ذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ وُجُودُ الْإِذْنِ فِي هَوُلاَءِ (وَقَوْلُهُ لَهِذَا الْحَطْرِ الْعَظِيمِ) أَيْ لَهِذَا الْأَمْرِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُوَ دُخُولُ الْكُفَّارِ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ (وَقَوْلُهُ الذي الَّذِي لَا سَبِيلَ لِإِهْمَالِهِ) أَيْ تَرْكِهِ أَيْ هذَا الْحَطْرِ

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "melakukan perlawanan dengan senjata seadanya.") maksudnya dengan senjata apapun yang bisa mereka gunakan, meskipun berupa batu dan tongkat. (Ungkapan beliau: "Cara melakukan perlawanan itu ada dua fase.") Maksudnya adalah menerangkan cara melakukan perlawanan dan dalam hal ini terdapat perinciannya. (Ungkapan beliau: "kondisi masih memungkinkan mereka untuk berkumpul.") maksudnya mereka masih mungkin berkumpul, yaitu ketika musuh tidak datang secara tiba-tiba. (Ungkapan beliau: "dan bersiap-siap melakukan peperangan.") maksudnya adalah persiapan mereka untuk berperang. (Ungkapan beliau: "Maka perlawanan semacam ini wajib.") Huruf 🕹 dalam redaksi tersebut berfungsi tafri'-mengembangkan permasalahan- dan yang lebih utama mestinya diungkapkan dengan bentuk fi'il mudhari'. Maknanya dalam fase kondisi semacam ini secara mutlak wajib melakukan perlawanan tanpa qayyid -ketentuanapapun. (Ungkapan beliau: "bagi setiap penduduk.") maksudnya adalah penduduk daerah tersebut dan orang-orang yang berada di radius masafah al-Qashr -94 km-. (Ungkapan beliau: "dengan senjata seadanya.") berkaitan dengan kewajiban membela diri bagi mereka. (Ungkapan beliau: "sehingga bagi...") maksudnya wajib melakukan perlawanan, sehingga bagi orang-orang yang sebenarnya tidak wajib jihad. (Ungkapan beliau: "Seperti orang fakir ...") adalah contoh orang yang tidak wajib jihad. (Ungkapan beliau: "tanpa seizin orangorang yang telah disebutkan.") maksudnya orang tua, pihak yang menghutangi, majikan dan suami meskipun pada redaksi sebelumnya tidak disebutkan. (Ungkapan beliau: "karena bahaya besar ini.") maksudnya karena bahaya besar ini, yaitu masuknya tentara kafir di daerah muslimin. (Ungkapan beliau: "yang tidak mungkin dibiarkan.") maksudnya membiarkan serangan pasukan kafir tersebut.

274. Mayit Syuhada Dikubur di Tempat Kematiannya

- S. Bagaimana hukumnya mayit (syuhada) yang dibawa pulang ke rumahnya masing-masing dan ditanam dengan upacara sehingga berbau?
- J. Bahwa orang yang mati syahid dalam medan pertempuran, tidak boleh

dibawa pulang ke rumahnya atau ke lain tempat untuk dikubur di tempat itu, tetapi wajib dikubur di tempat kematiannya.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyyah Bujairami ʻala Fath al-Wahhab¹⁴

وَقَوْلُهُ جَازَلَهُمْ النَّقْلُ إِلَى مَا لَيْسَ كَذَلِكَ أَيْ وَلَوْ لِبَلَدٍ آخَرَ لِيَسْلَمَ الْمَيِّتُ مِنْ الْفَسَادِ وَهَذَا إِذَا كَانَ غَيْرَ شَهِيدٍ أَمَّا هُوَ فَلَا يُنْقَلُ أَيْ وَإِنْ كَانَ بِقُرْبِ أَحَدِ الْأَمَاكِنِ الثَّلَاثَةِ لِأَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَ فِي قَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ وَكَانُوا نُقِلُوا إِلَى النَّذِينَةِ كَمَا فِي فَرْحٍ م ر وَالرَّشِيدِيِّ عَلَيْهِ

Ungkapan al-Ramli: "Mereka boleh memindah jenazah ke pemakaman yang tidak seperti itu -yang tidak kondusif, seperti terancam banjir-," maksudnya meskipun ke daerah lain agar jenazah terhindar dari kerusakan. Hukum demikian bila jenazah tidak mati syahid. Sedangkan jenazah yang mati syahid, maka tidak boleh dipindah -dari tempat wafatnya-, maksudnya meskipun dekat dengan salah satu dari tiga tempat, Makkah, Madinah dan Bait al-Maqdis. Sebab Nabi Saw. telah memberi perintah mengembalikan jenazah pahlawan perang Uhud ke tempat wafatnya saat dipindah ke Madinah, seperti keterangan dalam Syarh al-Ramli dan Hasyiyah al-Rasyidi atas Syarh al-Ramli.

6. Al-Syarh al-Kabir 15

فَصْلُ وَيُسْتَحَبُّ دَفْنُ الشَّهِيْدِ حَيْثُ قُتِلَ قَالَ أَحْمَدُ أَمَّا الْقَثْلَى فَعَلَى حَدِيْثِ جَابِر أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذْفَنُوا الْقَتْلَى فِي مَصَارِعِهِمْ. وَرَوَى إِبْنُ مَاجَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدِ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ وَلاَ يُنْقَلُ الْمَيَّتُ مِنْ بَلَدِ الدَّاخِرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ وَلاَ يُنْقَلُ الْمَيِّتُ مِنْ بَلَدِ الدَّاخِرِ إللهَ لِنَا لِهُ اللهُ وَزَاعِي وَابْنُ مُنْذِر.

Disunatkan menguburkan syuhada (orang yang mati dalam peperangan membela Islam) di tempat terbunuhnya. Imam Ahmad berkata: "Adapun para syuhada yang terbunuh itu sesuai dengan hadits riwayat Jabir, bahwa Nabi Saw. bersabda: "Kuburkanlah mereka (pejuang) yang gugur di tempat mereka meninggal." Dan hadits riwayat Ibn Majah, bahwa Nabi Saw. memerintah bagi mereka yang terbunuh di perang Uhud untuk dikembalikan ke tempat

¹⁴ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, Hasyiyah Bujairami 'ala Fath al-Wahhab, (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t. th.), Juz I, h. 498.

Abdurrahman bin Muhammad, al-Syarh al-Kabir pada hamisy Ibn Qudamah, al-Mughni, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1403 H/1983 M), Jilid II, h. 400.

mereka gugur. Mereka yang gugur itu tidak boleh dipindahkan ke tempat yang lain kecuali ada tujuan benar sebagaimana pendapat al-Awza'i dan Ibn Mundzir.

275. Muslim Masuk Organisasi yang Tidak Berdasar Islam

- S. Bagaimana hukumnya orang Islam yang masuk pada perkumpulan yang tidak berdasar Islam, bolehkah atau tidak? Jika tidak boleh, maka bagaimana sikap PBNU terhadap anggota yang ada di dalam perkumpulan tersebut?
- J. Bahwa orang Islam yang masuk perkumpulan/partai yang tidak berdasar Islam, ditafsil:
- a. Jika sekiranya merugikan Islam maka Haram.
- b. Jika sekiranya menguntungkan Islam maka Baik.
- c. Jika sekiranya tidak merugikan dan tidak menguntungkan Islam maka Boleh (Jaiz).

Keterangan, dari kitab:

1. Qurrah al-'Ain li Syarh Waraqat16

(وَهِيَ) أَيْ صِيغَةُ الْأَمْرِ (عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَالتَّجَرُّدِ عَنِ الْقَرِينَةِ) الصَّارِفَةِ عَنِ الْوُجُوبِ
(تُحْمَلُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْوُجُوبِ نَحْوُ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ [الْأَنْعَامُ ٧٧] (إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ
عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ النَّدْبُ) خَوُ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرِهِ [الْنُورُ ٣٣] لِأَنَّ الْمُقَامَ يَقْتَضِى عَدَمَ الْوُجُوبِ فَإِنَّ الْكِتَابَةَ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ (أَوِ الْإِبَاحَةُ) خَوُ وَإِذَا الْمُقَامَ يَقْتَضِى عَدَمَ الْوُجُوبِ فَإِنَّ الْكِتَابَةَ مِنَ الْمُعَامَلَاتِ (أَوِ الْإِبَاحَةُ) خَوُ وَإِذَا حَلَّلْتُمْ فَاصْطَادُوا [الْمَاثِدَةُ ٢] فَإِنَّ الاصْطِيَادَ أَحَدُ وُجُوهِ التَّكَسُّبِ وَهُو مُبَاحُ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْكِتَابَةِ وَالاصْطِيَادِ

(Dan hal itu) maksudnya sighat amr -kata perintah-, (ketika mutlak dan tanpa indikasi) yang membelokkan dari makna wajib, (maka diarahkan menunjukkan makna wajib), maksudnya dipahami dengan makna wajib. Contoh: "Kalian dirikanlah shalat!" [QS. Al-An'am: 72] (Kecuali terdapat dalil yang menunjukkan bahwa yang dikehendaki adalah makna sunnah), contoh: "Maka akadi kitabah mereka para budak, bila kalian ketahui kebaikan mereka." [QS. al-Nur: 33]. Sebab, konteksnya memastikan tidak berhukum wajib, karena akad kitabah -memerdekakan

Muhammad bin Muhammad al-Rua'aini al-Maliki, Qurrah al-'Ain li Syarh Waraqat pada Lathaif al-Isyarat, (Bandung: al-Ma'arif, t. th.) Juz IV, h. 23.

budak dengan membayar secara bertahap- termasuk *mu'amalah*. (atau makna mubah), seperti: "Dan ketika kalian sudah bertahallul, maka berburulah." [QS. al-Maidah: 2]. Sebab, berburu adalah salah satu cara bekerja yang hukumnya mubah. Dan para ulama telah *ijma'* atas ketidakwajiban akad *kitabah* dan berburu.

2. Qurrah al-'Ain li Syarh Waraqat17

(وَأَمَّا الْحُظَرُ) أَيِ الْحُرْمَةُ (وَالْإِبَاحَةُ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَنَّ الْأَشْيَاءَ) بَعْدَ الْبِعْثَةِ (عَلَى الْحُظِرِ) أَيْ مُسْتَمِرَةُ عَلَى الْحُرْمَةِ لِأَنْهَا الْأَصْلُ فِيهَا (إِلَّا مَا أَبَاحَتْهُ الشَّرِيعَةُ) وَالاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعُ الْحُظرِ) أَيْ مُسْتَمِرةُ عَلَى الْحُرْمَةِ لِأَنْهَا الْخُرْمَةُ عِنْدَهُ (فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي الشَّرِيعَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى فَإِنَّ مَا أَبَاحَتْهُ الشَّرِيعَةُ الْأَصْلُ فِيهِ أَيْضًا الْحُرْمَةُ عِنْدَهُ (فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فِي الشَّرِيعَةِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْإِبَاحَةِ يُتَمَسَّكُ بِالْأَصْلِ) وَهُوَ الْحَظرُ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ بِضِدِّهِ) أَيْ بِضِدِّ هذَا الْقَوْلِ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ بِضِدِّهِ) أَيْ بِضِدِّ هذَا الْقَوْلِ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ بِضِدِّهِ) أَيْ يَصِدِّ هذَا الْقَوْلِ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ بِضِدِّهِ) أَيْ يَضِدِّ هذَا الْقَوْلِ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ بِضِدِّهِ) أَيْ يَضِدِّ هذَا الْقَوْلِ (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ بِضِدِّهِ) أَيْ عَرَّمَهُ وَالْمَعْرِي وَهُو أَنَّ الشَّرْعُ) أَيْ حَرَّمَهُ وَالْمَنَافِعِ الْمُقَالِقُ الْمَنْوِي النَّاسِ مَنْ يَقُولُ الْمَعْرَهُ الشَّرْعُ) أَيْ عَلَى الْإِبَاحَةِ إِلَّا مَا حَظَرَهُ الشَّرْعُ) أَيْ عَلَى الْمَتَافِعِ الْمُقَالِ الْمُضَارِ التَّحْرِيمُ وَالْمَنَافِعِ الْحُلُقُ فِي الْمُقَالَ الْمُضَارِ التَّحْرِيمُ وَالْمَنَافِعِ الْحُلُقُ الْمُعْرِدُ فَى الْمُعْرِقُ أَنَّ أَصُلُ الْمُضَارِ التَّحْرِيمُ وَالْمَنَافِعِ الْحُلُقُ الْمُعَالِقُ الْمُعْرِقُ أَنَّ أَنْهُ الْمَالِ الْمُعْرِفِي الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُومِ أَنَّ أَلِهُ الْمُعْرِقُ الْمُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلَاقِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقِ الْمُولِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُو

(Dan adapun hazhar) maksudnya keharaman, (dan mubah, maka sebagian ulama ada yang berpendapat, bahwa sungguh segala perkara) setelah Nabi Saw. diutus (itu hukumnya haram), maksudnya tetap haram, karena keharaman adalah hukum asalnya, (kecuali perkara yang diperbolehkan syariat), dan istitsna' ini adalah istitsna' munqathi'. Sebab, perkara yang diperbolehkan syariat menurut pendapat ini huhum asalnya juga haram. (Oleh sebab itu, apabila dalam syariat tidak ditemukan dalil yang memperbolehkannya, maka yang dipedomani adalah hukum asalnya) yaitu haram. (Ada pula ulama yang berpendapat sebaliknya), maksudnya berlawanan dengan pendapat ini, (yaitu sungguh hukum asal dalam segala perkara) setelah Nabi Saw. diutus (adalah mubah, kecuali perkara yang diharamkan syariat. Namun pendapat yang shahih adalah sungguh hukum asal setiap perkara yang membahayakan adalah haram dan hukum asal perkara yang bermanfaat adalah halal.

3. Mirqah Su'ud al-Tashdiq Syarh Sulam al-Taufiq18

¹⁷ Muhammad bin Muhammad al-Rua'aini al-Maliki, Qurrah al-'Ain li Syarh Waraqat al-Imam al-Haramain pada Lathaif al-Isyarat, (Bandung: al-Ma'arif, t. th.) Juz IV, h. 55.

¹⁸ Muhammad Nawawi al-Bantani, Mirqah Su'ud al-Tashdiq Syarh Sulam al-Taufiq, (Bandung: Maktabah Nur Asia, t. th.), h. 16.

مُسْلِمً] وَ بَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ [الْمَائِدَةُ ٢] إِذْ مَعْنَاهُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ إِذَا فَعَلْتُمْ مَا كُلِّفْتُمْ بِهِ لَا ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ وَالْمَائِدَةُ ٢] إِذْ مَعْنَاهُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ إِذَا فَعَلْتُمْ مَا كُلِّفَتُمْ بِهِ لَا يَضُرُّكُمْ تَقْصِيرُ غَيْرِكُمْ وَإِذَا كَانَ كَذلِكَ فَمِمًّا كُلِّفَ بِهِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالتَّهْيُ عَنِ الْمُنْكِرِ فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ عَلْم لِللَّهُ عَلْم عَتْب بَعْدَ ذلِكَ عَلَى الْفَاعِلِ لِكُونِهِ الْمُنْكَرِ فَإِذَا فَعَلَ ذلِكَ وَلَمْ يَمْتَيْلُ الْمُخَاطَبُ فَلَا عَتْبَ بَعْدَ ذلِكَ عَلَى الْفَاعِلِ لِكُونِهِ أَدًى مَا عَلَيْهِ فَإِذَا عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَالتَّهْيُ لَا الْقَبُولُ

(Peringatan.) Tidak ada pertentangan antara sabda Nabi Saw. "Barangsiapa melihat kemungkaran, maka rubahlah ... dan firman Allah Ta'ala: "Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian; Tiadalah orang yang sesat itu akan membahayakan diri kalian, apabila kalian telah mendapat petunjuk." [HR. Muslim]. Sebab maknanya menurut para pakar yang pandai menyelesaikan masalah dengan dalil-dalilnya adalah: "Apabila kalian telah melaksanakan hukum yang dibebankan pada kalian, maka kecerobohan orang lain yang sesat tidak akan membahayakan kalian ketika kalian telah mendapat hidayah." [QS. Al-Maidah: 105]. Bila demikian, maka termasuk hukum yang dibebankan kalian adalah Amr al-Ma'ruf dan Nahi al-Munkar. Ketika dia sudah melaksanakannya dan orang lain yang diajak tidak mengikuti, maka tidak ada cercaan bagi orang yang telah melaksanakannya. Sebab, ia telah melakukan kewajibannya. Dia hanya wajib memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, bukan masalah diterimanya.[]

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-20 Di Surabaya Pada Tanggal 10 - 15 Muharram 1374 H. / 8 - 13 September 1954 M.

276. Menerjemahkan Khotbah Jum'at Selain Rukunnya 277. Presiden Republik Indonesia Adalah Waliyul Amri Dharuri bi asy-Syaukah

278. Mengumumkan Awal Ramadhan/Syawal untuk Umum dengan Hisab

> 279. Sandiwara dengan Propaganda Islam 280. Kas Mesjid Dinamakan Baitul Mal

276. Menerjemahkan Khotbah Jum'at Selain Rukunnya

- S. Bagaimana hukumnya menerjemahkan khotbah Jum'at selain rukunnya? Apakah boleh dengan tidak ada khilaf ataukah ada khilaf? Dan kalau tidak ada khilaf, maka bagaimana hukumnya orang yang ingkar? (NU Cab. Matraman dan Jakarta)
- J. Hukumnya boleh menerjemahkan khotbah Jum'at selain rukunnya asalkan tidak panjang dan tidak keluar dari peringatan, dengan tidak ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Kalau panjang dan tidak keluar dari peringatan, maka menurut satu pendapat bisa memutuskan *muwalat*. Akan tetapi kalau panjang dan keluar dari peringatan, maka pasti menghilangkan *muwalat* seperti diam. Dan tidak boleh ingkar kepada orang yang menerjemahkan.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah al-Bujairimi¹

(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ أَرْكَانُهُمَا) يُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَا بَيْنَ أَرْكَانِهِمَا بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ لَمْ يَضُرَّ قَالَ م رَعَلُهُ مَا إِذَا لَمْ يَظُلْ الْفَصْلُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ وَإِلَّا ضَرَّ لِإِخْلَالِهِ بِالْمُوالَاةِ كَالسُّكُوتِ بَيْنَ الْأَرْكَانِ إِذَا طَالَ بِجَامِعِ أَنَّ عَيْرَ الْعَرَبِيَّةِ لَغُولًا يُخْسَبُ لِأَنَّ عَيْرَ الْعَرَبِيِّ لَا يُجْزِئُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْعَرَبِيِّ فَهُو لَغُوسِم وَالْقِيَاسُ عَيْرَ الْعَرَبِيِّ لَا يُجْزِئُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْعَرَبِيِّ فَهُو لَغُوسِم وَالْقِيَاسُ عَنْمُ الضَّرَرِ مُطْلَقًا وَيُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَيَيْنَ السُّكُوتِ بِأَنَّ فِي السُّكُوتِ إِعْرَاضًا عَنِ الْخُطْبَةِ بِالْكُلِّيَةِ عِلْمَ الْخَلْبَةِ عَلَى الْعَرَبِيِّ فَالِ الْعَرَبِيِّ فَالِ الْعَلْبَةِ عَلَى اللَّهُ الْمَاكِلُونِ عَنْمِ الْعَرَبِيِّ فَالِ الْعَلَيْةِ عَلَى السُّكُوتِ إِنْ السُّكُوتِ إِعْرَاضًا عَنِ الْخُطْبَةِ وَالْكُلِيَّةِ الْمُعْرَبِ عَنْمُ الْعَرَبِيِّ فَالِيَّةُ فَلَا يَعْرُبُحُ بِذَلِكَ عَنْ كُونِهِ مِنَ الْخُطْبَةِ عَسْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ الْمَالِيَةِ الْعَرْبُ الْعَرَبِيِّ فَالِهُ وَلَا فِي الْمُعْرَالُولُ عَلْمُ اللْمُولِ لَهُ عَلَى اللْعَرَبِيِّ فَالْمَالُولُ عَلَى اللْمُ لَهِ اللْمُ الْعَلَى السُّكُوتِ الْمُعْرَبِي الْعَرَبِيِّ فَالِهُ الْمُعْلَةِ عَلْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ عَلْمُ الْمُؤْلِقُ عَلْمَ الْفُلْمُ الْمُلْلُولُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ عَلْمُ الْقِيلُولُ عَلَى الْعَلَيْقِ الْمُؤْلِقُ عَلْمُ الْقُولُ الْمُؤْلِقُ عَلَى السَّعَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْم

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Dan yang dimaksud adalah rukun-rukun dua khutbah jum'at.") memberi pengertian, bila khutbah yang disampaikan selain rukun-rukun dua khutbah jum'at itu dengan selain bahasa Arab maka tidak apa-apa. Al-Ramli berkata: "Penerapan hukum tersebut bila pemisah -antara rukun-rukun khutbah- dengan selain bahasa Arab itu tidak panjang. Bila tidak, maka mempengaruhi keabsahan khutbah, karena merusak muwalah (kesinambungan antara rukun-rukunnya). Seperti halnya diam di antara rukun ketika diam itu panjang, yakni dengan titik temu bahwa selain bahasa Arab itu laghw (tidak berguna) yang tidak dianggap. Sebab bahasa selain Arab itu tidak mencukupi untuk khutbah ketika mampu berbahasa arab. Maka bahasa selain Arab itu laghw. Demikian kata Ibn Qasim al-'Ubbadi. Namun yang

Sulaiman al-Bujairimi, al-Tajrid li Naf al-'Abid, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1345 H), Jilid I, h. 389.

sesuai qiyas adalah tidak apa-apa secara mutlak. Maka antara selain bahasa Arab dan diam dibedakan, yakni bahwa diam itu berpaling dari khutbah secara total, sedangkan selain bahasa Arab itu dalam sebagian kesempatan mengandung mau'idah (nasehat). Maka dengan hal itu, selain bahasa Arab tidak keluar dari khutbah. Begitu hemat Ali Syibramallisi.

2. Tuhfatul Muhtaj 2

Adapun seseorang yang melakukan apa yang menurut pendapatnya boleh dengan mengikuti pendapat yang benar, maka ia tidak boleh diingkari.

277. Presiden Republik Indonesia Adalah Waliyul Amri Dharuri bisy Syaukah

S. Sahkah atau tidak Keputusan Konferensi Alim Ulama di Cipanas tahun 1954, bahwa Presiden RI (Ir. Soekarno) dan alat-alat negara adalah waliyul amri dharuri bisy syaukah (Penguasa Pemerintahan secara dharurat sebab kekuasaannya)? (NU Cab. Blitar)

J. Betul, sudah sah keputusan tersebut.

Keterangan, dalam kitab:

1.Ihya' Ulum al-Din³

الأَصْلُ الْعَاشِرُ أَنَّهُ لَوْ تَعَذَّرَ وُجُودُ الْوَرَعِ وَالْعِلْمِ فِيمَنْ يَتَصَدَّى لِلْإِمَامَةِ وَكَانَ فِي صَرْفِهِ إِثَارَةُ فِتْنَةٍ لَا تُطَاقُ حَكَمْنَا بِانْعِقَادِ إِمَامَتِهِ لِأَنَّا بَيْنَ أَنْ نُحَرِّكَ فِتْنَةً بِالاسْتِبْدَالِ فَمَا يَلْقَى الْمُسْلِمُونَ فِيهِ مِنَ الطَّرَرِ يَزِيدُ عَلَى مَا يَفُوتُهُمْ مِنْ نُقْصَانِ هذِهِ الشُّرُوطِ الَّتِي أُثْبِتَتْ لِمَزِيَّةِ الْمَصْلَحَةِ فَيهِ مِنَ الطَّرَرِ يَزِيدُ عَلَى مَا يَفُوتُهُمْ مِنْ نُقْصَانِ هذِهِ الشُّرُوطِ الَّتِي أُثْبِتَتْ لِمَزِيَّةِ الْمُصْلَحَةِ فَلَا يُهْدَمُ أَصْلُ الْمَصْلَحَةِ شَغَفًا بِمَزَايَاهَا كَالَّذِي يَبْنِي قَصْرًا وَيَهْدِمُ مِصْرًا وَيَهْنَ أَنْ نَحْصُمَ عَلَا يُهْدَمُ أَصْلُ الْمَصْلَحَةِ شَغَفًا بِمَزَايَاهَا كَالَّذِي يَبْنِي قَصْرًا وَيَهْدِمُ مِصْرًا وَيَهْنَ أَنْ خَصُمَا عَلَا لَهُ عَلَى مَا يَفُودُ قَضَاءِ أَلْ فَضِي بِعُلُو الْبَعْفِي بِنُفُوذٍ قَضَاءِ أَهْلِ الْبَغْيِ فِي بِكُلُوهُمْ لِمَامَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالطَّرُورَةِ

Dasar yang kesepuluh, seandainya tidak ada orang wara' (bertakwa) dan berilmu untuk diangkat menjadi imam (penguasa pemerintah) dalam hal fitnah yang ditimbulkan karena kebijakannya tidak dapat

² Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj bi Syarah Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyah al-Syirwani, (Mesir: at-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid IX, h. 218.

³ Abu Hamid al-Ghazali, Ihya' Ulum al-Din, (Mesir: Muassasah al-Halabi, 1387 H/1968 M), Jilid I, h. 157.

dihindari, maka kita memandang sah kedudukannya sebagai imam. Sebab kita dihadapkan kepada dua pilihan. *Pertama*, timbulnya fitnah manakala dilakukan pergantian (imam yang zalim), artinya *madharat* yang menimpa umat Islam akan lebih besar dibanding dengan membiarkan imam yang tidak memenuhi syarat, di mana syarat tersebut memang diperlukan untuk kemaslahatan. Sebab, prinsip kemaslahatan tidak boleh dihancurkan karena ingin mencapai kemaslahatan yang sempurna, seperti orang yang membangun suatu gedung tetapi menghancurkan kotanya. *Kedua*, membiarkan Negara tanpa imam dan rusaknya tatanan hukum, suatu hal yang tidak boleh terjadi.

Kita memandang sah keputusan hukum *qadhi* (hakim) yang zalim dalam wilayah kekuasaanya karena memang sangat diperlukan (dalam kehidupan mereka). Bagaimana mungkin kita tidak memandang sah seorang imam (yang tidak memenuhi syarat) dalam keadaan yang sangat dibutuhkan dan karena darurat.

2. Kifayah al-Akhyar4

قَالَ الْغَزَالِيُّ وَاجْتِمَاعُ هَذِهِ الشُّرُوطِ مُتَعَذِّرُ فِيْ عَصْرِنَا لِحُلُوِّ الْعَصْرِ عَنِ الْمُجْتَهِدِ الْمُسْتَقِلِّ فَالْوَجْهُ تَنْفِيْذُ قَضَاءِ كُلِّ مَنْ وَلاَهُ سُلْطَانُ ذُو شَوْكَةٍ وَإِنْ كَانَ جَاهِلاَ أَوْفَاسِقًا لِعَلاَّ تَتَعَطَّلَ مَصَالِحُ الْمُسْلِمِيْنَ. قَالَ الرَّافِعِي وَهَذَا أَحْسَنُ.

Imam al-Ghazali berpendapat: "Keberadaan syarat-syarat (yang selayaknya ada bagi seorang pemimpin) secara lengkap itu sulit ditemukan pada masa kita, karena tidak adanya mujtahid mandiri. Dengan begitu maka boleh melaksanakan semua keputusan yang telah ditetapkan penguasa walaupun bodoh atau fasik agar kepentingan umat Islam tidak tersiasia. Menurut al-Rafi'i pendapat ini adalah yang paling baik.

278. Mengumumkan Awal Ramadhan/Syawal untuk Umum dengan Hisab

- S. Bagaimana hukumnya mengumumkan awal Ramadhan atau awal Syawal untuk umum dengan hisab atau orang yang mempercayai sebelum ada penetapan hakim atau siaran dari Departemen Agama? Boleh ataukah tidak? (NU Cab. Banyuwangi)
- J. Sesungguhnya mengkabarkan tetapnya awal Ramadhan atau awal Syawal dengan hisab itu tidak terdapat di waktu Rasulullah dan

⁴ Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni al-Dimasyqi, *Kifayah al-Akhyar*, (Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhan, t.th.), Juz II, h. 110.

Khulafaur Rasyidin. Sedang pertama-tama orang yang memperbolehkan puasa dengan hisab ialah: Imam Muththarif, guru Imam Bukhari. Adapun mengumumkan tetapnya awal Ramadhan atau Syawal berdasarkan hisab sebelum ada penetapan/siaran dari Departemen Agama, maka Muktamar memutuskan tidak boleh, sebab untuk menolak kegoncangan dalam kalangan umat Islam, dan Muktamar mengharap kepada pemerintah supaya melarangnya.

Keterangan, dalam kitab:

1. Al-Bughyah al-Mustarsyidin⁵

(Kasus dari Sulaiman al-Kurdi) Bulan Ramadhan, sebagaimana bulan-bulan lain, tidak bisa ditetapkan kecuali dengan *ru'yah* atau menyempumakan 30 hari tanpa perbedaan, kecuali masuknya Ramadhan yang bisa ditetapkan dengan satu orang adil.

2. Al-Bughyah al-Mustarsyidin6

(مَسْأَلَةُ ي ك) يَجُوزُ لِلْمُنْجِمِ وَهُوَ مَنْ يَرَى أَنَّ أَوَّلَ الشَّهْرِ طُلُوعُ النَّجْمِ الْفُلَانِي وَالْحَاسِبُ وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ مَنَازِلَ الْقَمَرِ وَتَقْدِيرَ سَيْرِهِ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَى ذلِكَ لَكِنْ لَا يُجْزِيهِمَا عَنْ رَمَضَانَ لَوْ ثَبَتَ كُونُهُ مِنْهُ بَلْ يَجُوزُ لَهُمَا الْإِقْدَامُ فَقَطْ ... نَعَمْ إِنْ عَارَضَ الْحِسَابَ الرُّوْيَةُ فَالْعَمَلُ عَلَيْهَا لَا عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ

(Kasus dari Abdullah bin Umar al-'Alawi al-Hadhrami dan Muhammad Sulaiman al-Kurdi) *Munjim*, yaitu orang yang berpendapat bahwa permulaan bulan adalah -dengan munculnya bintang tertentu, dan Ahli *Hisab*, yaitu orang yang berpedoman pada tempat perputaran bulan dan kadar perputarannya, boleh mengamalkan pedomannya tersebut. Namun, andaikan terbukti hari yang mereka puasai itu adalah hari Ramadhan, puasa mereka -tetap- tidak mencukupi dari puasa Ramadhan. Mereka itu hanya diperbolehkan berpuasa -saja- ... Meskipun begitu, bila *hisab* bertentangan dengan *ru'yah*, maka yang diamalkan adalah *ru'yah*, bukan *hisab* menurut pendapat manapun.

2. Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah⁷

⁵ Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1952), h. 108.

⁶ Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir. Musthafa al-Halabi, 1952), h. 110.

وَحِينَيْذٍ يُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعَقِيدَةِ الْحَاكِمِ مُطْلَقًا فَمَتَى أَثْبَتَ الْهِلَالَ حَاكِمُ يَرَاهُ وَلَا يُنْقَضُ حُكْمُهُ بِأَنْ لَمْ يُخَالِفْ نَصَّا صَرِيحًا لَا يَقْبَلُ التَّأْوِيلَ أَعْتُدَّ بِحُكْمِه

Dan dari bukti-bukti pendapat ulama tersebut bisa disimpulkan, bahwa yang menjadi pedoman adalah keyakinan hakim secara mutlak. Oleh sebab itu, ketika hakim yang melihat hilal sudah menetapkannya dan keputusan hukumnya tidak terbantah, sebab berlawanan dengan nash sharih yang tidak mungkin dita'wil, maka keputusan hukumnya dibenarkan.

279. Sandiwara dengan Propaganda Islam

- S. Bagaimana hukumnya sandiwara dengan propaganda Islam? Boleh ataukah tidak? (NU Cab. Banyuwangi)
- J. Hukumnya tidak boleh, kalau di dalamnya terdapat kemungkaran. Keterangan, dari kitab:
- 1. Al-Mawahib al-Saniyah8

إذَا اجْتَمَعَ الْحُلاَلُ وَالْحُوَّامُ غُلِبَ الْحُرَّامُ.

Bila ada halal dan haram (dalam suatu kasus) maka yang haram yang dimenangkan.

280. Kas Mesjid Dinamakan Baitul Mal

- S. Bolehkah kas mesjid yang didirikan oleh Departemen Agama itu dinamakan Baitul Mal yang teratur menurut syara', sehingga bisa mempunyai hukum seperti hukumnya Baitul Mal? (NU Cab. Kudus)
- J. Kas mesjid tidak bisa dinamakan Baitul Maal yang teratur menurut syara', sebab kas tersebut hanya khusus untuk mesjid. Dan *Baitul Mal* yang teratur memang tidak akan dijumpai sampai turunnya Nabi Isa As.

Keterangan, dari kitab:

1. Syarah al-Rahabiyah⁹

292

لِأَنَّ بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ سَبَبًا رَابِعًا عَلَى الْأَصَحِّ فِي أَصْلِ مَذْهَبِنَا قَدْ أَطْبَقَ الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى

⁷ Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H), Jilid II, h. 81.

⁸ Abdullah Ibn Sulaiman al-Jurhuzi, al-Mawahib al-Saniyah pada al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Mesir: Amin Abdul Majid, 1955), h. 156.

Muhammad bin Muhammad Sabth al-Maradini, Syarah al-Rahabiyah fi 'Ilmi al-Faraidh, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2004), Cet. 11, h. 33.

ا شُتِرَاطِ انْتِظَامِ بَيْتِ الْمَالِ نَقَلَهُ ابْنُ سُرَاقَةَ وَهُوَ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ عَنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ وَقَدْ أَيْسَنَا مِنِ انْتِظَامِهِ إِلَى أَنْ يَنْزِلَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ

Sebab baitul mal, meskipun merupakan sebab keempat -yang berhak menerima waris, yang selainnya adalah hubungan keturunan, pernikahan dan pemerdekaan budak-, menurut pendapat al-Ashhah dalam dasar madzhab kita -Syafi'iyyah-, namun para ulama muta'akhkhirun sepakat atas syarat profesionalitas baitul mal. Pendapat itu pernah dikutip -pula- oleh Ibn Suraqah, salah seorang ulama mutaqaddimin, dari ulama berbagai penjuru. Padahal kita telah putus asa atas profesionalitas baitul mal sampai Nabi Isa As. turun.[]

KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR SYURIAH NAHDLATUL ULAMA Di Surabaya Pada Tanggal 16 - 17 Sya'ban 1376 H./ 19 Maret 1957 M.

281. Wanita Menjadi Anggota DPR/DPRD 282. Peninjauan Kembali Hukum Borg dan Gadai

281. Wanita Menjadi Anggota DPR/DPRD

- S. Bagaimana hukumnya wanita menjadi anggota DPR/DPRD? Apakah yang demikian itu tidak termasuk di dalam hadits yang artinya: "Tidak berbahagialah suatu golongan yang menyerahkan urusannya kepada orang perempuan." Karena anggota hanya berhak memberi pertimbangan kepada ketua sidang, yang selanjutnya buah pertimbangan itu bisa dijadikan bahan/dasar oleh ketua untuk memutuskan sesuatu persoalan? (Syuriah PB NU)
- J. DPR/DPRD adalah badan permusyawaratan untuk menentukan hukum (tsubutu amrin li amrin), bukan untuk menentukan qadha (lizamil hukmi). Oleh sebab itu wanita menjadi anggota DPR/DPRD menurut hukum Islam diperbolehkan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. 'Afifah.
- b. Ahli dalam hal-hal tersebut di atas.
- c. Menutupi auratnya.
- d. Mendapat izin dari yang berhak memberi izin.
- e. Aman dari fitnah.
- f. Tidak menjadikan sebab timbulnya mungkar menurut syara'.

Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka haram. Dan syuriah dengan kebijaksanaan serta persetujuan PB Syuriah NU berhak menariknya.

Keterangan, dari kitab:

1. Mughni al-Muhtaj¹

(وَيُنْدَبُ) عِنْدَ اخْتِلاَفِ وُجُوْهِ النَّظِرِ وَتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ فِي الحَّكِمِ (أَنْ يُشَاوِرَ الْفُقَهَاءَ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ. قَالَ الْحُسَنُ الْبَصْرِيُّ. كَانَ النَّبِيُ ﷺ مُسْتَغْنِيًا عَنْهَا وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ تَصِيْرَ سُنَّةً لِلْحُكَّامِ إِلَى أَنْ قَالَ الْمُرَادُ بِالْفُقَهَاءِ كَمَا قَالَهُ جَمْعُ مِنَ الْأَصْحَابِ الَّذِيْنَ لَعْبَلُ وَالْمَرْأَةُ . يُقْبَلُ قَوْلُهُمْ فِي الْإِفْتَاءِ فَيَدْخُلُ الْأَعْمَى وَالْعَبْدُ وَالْمَرْأَةَ .

Ketika terjadi perbedaan pandangan dan kontradiksi dalil dalam suatu hukum para fuqaha disunnahkan bermusyawarah, sesuai firman Allah SWT: "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu." (Ali Imran: 159). Al-Hasan al-Bashri berkata: "Nabi Saw. itu tidak perlu musyawarah, namun beliau ingin menjadikannya sebagai tradisi bagi para juru hukum

Muhammad al-Khathib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj, (Mesir: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1329 H), Jilid IV, h. 371. Lihat pula, Tuhfah al-Muhtaj (Hasyiyyah al-Syirwani), Jilid X, h. 136 dan Hasyiyyah al-Qulyubi 'ala Syarh al-Mahalli, Jilid IV, h. 302.

... Yang dimaksud dengan al-Fuqaha adalah mereka yang diterima fatwanya, maka termasuk orang buta, budak dan wanita.

282. Peninjauan Kembali Hukum Borg dan Gadai

- S. Mohon ditinjau kembali sekitar masalah bank dan gadai yang sudah diputuskan:
- a. Bagaimana hukumnya bank dan segala bentuk dan macamnya?
- b. Uang rente/bunga yang dipungut oleh bank pegadaian dan lain sebagainya dari orang yang mengebankkan itu, bagaimana hukumnya?
- c. Apakah hukumnya seperti NV, CV, Firma dan sebagainya yang mengambil uang bank dengan ditentukan membayar bunganya kepada bank. Dan kalau tidak mau membayarnya tidak diberinya hutang. Apakah hal yang sedemikian itu telah sampai ke batas dharurat yang memperbolehkan mahzhurat? Dan apakah tulis menulis dalam perjanjian itu sama dengan lafal? (NU Cab. Jambi)
- d. Bagaimana hukumnya lotre dengan segala macamnya? (NU Cab. Kota Besar Bandung)
- J. Mengenai a, b ialah seperti jawaban Muktamar NU ke 2 di Surabaya, Muktamar NU ke 12 di Malang, Muktamar NU ke 14 di Magelang, dan Muktamar NU ke 17 di Madiun, tentang masalah gadai, kredit, koperasi dan bank. Sedang masalah c, tidak termasuk kaidah *dharurat* tersebut di atas. Dan jawaban itu terdapat tiga paham, yaitu: Pertama paham haram, kedua paham halal, dan ketiga paham syubhat. Maka Muktamar berpendapat bahwa *al-ahwath* (berhati-hati) adalah paham haram.

Keterangan, dalam kitab:

1. I'anah al-Thalibin²

Dan di antara riba *al fadhl* adalah riba *al-qardh* yakni semua utang yang memberikan manfaat kepada si penghutang, kecuali selain dalam bentuk gadai. Menurut kita, yang demikian itu tidak haram kecuali disyaratkan dalam akad.

2. Tuhfatul Muhtaj³

² Al-Bakri bin Muhammad Syatha al-Dimyathi, *l'anah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), Jilid III, h. 26.

³ Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyyah al-Syirwani, (Mesir: at-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid IV, h. 296.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ مُنَافٍ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ إِنَّمَا يَبْطُلُ إِنْ وَقَعَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ لُزُوْمِهِ لاَ إِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ وَلَوْ فِي مَجْلِسِهِ.

Kesimpulannya adalah, semua syarat yang bertentangan dengan tuntutan aqad akan batal hanya jika terjadi pada saat pelaksanaan aqad atau sesudahnya, dan bukan sebelum aqad walaupun di tempat pelaksanaannya.

3. Fathul Mu'in dan I'anah al-Thali in4

وَجَازَ لِمُقْرِضِ نَفْعٌ يَصِلُ لَهُ مِنْ مُقْتَرِضِ كَرَدِّ الزَّائِدِ قَدْرًا أَوْصِفَةً وَالْأَجْوَدِ فِي الرَّدِئِ بِلاَ شَرْطِ فِي الْعَقْدِ بَلْ يُسَنُّ ذَلِكَ لِمُقْتَرِضِ لِقَوْلِهِ وَلَيْ إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. وَأَمَّا الْقَرْضُ بِشَرْطِ جَرِّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا، وَمِنْهُ الْقَرْضُ لِمَنْ يَسْتَأْجِرُ مِلْكَهُ جَرِّ مَنْفَعَةً فَهُو رِبًا، وَمِنْهُ الْقَرْضُ لِمَنْ يَسْتَأْجِرُ مِلْكَهُ أَيْ مَثَلاً بِأَكْثَرَ مِنْ قِيْمَتِهِ لِأَجْلِ الْقَرْضِ إِنْ وَقَعَ ذَلِكَ شَرْطًا إِذْ هُوَ حِيْنَتِيْ حَرَامُ الْحُمَاعًا وَإِلاَّ كُوهِ عِنْدَنَا وَحُرِمَ عِنْدَ كَثِيْرِ مِنَ الْعُلَمَآءِ.

(قَوْلُهُ فَفَاسِدٌ) قَالَ ع ش وَمَعْلُومُ أَنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ حَيْثُ وَقَعَ الشَّرْطُ فِيْ صُلْبِ الْعَقْدِ. أَمَّا لَوْ تَوَافَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعْ شَرْطُ فِي الْعَقْدِ فَلاَ فَسَادَ.

Diperkenankan bagi kreditur untuk memperoleh manfaat yang diberikan debitur seperti pengembalian pinjaman yang lebih baik ukuran atau sifatnya, yang lebih bagus dari barang yang dipinjamkan yang tidak disyaratkan dalam akad, bahkan yang demikian itu disunatkan bagi debitur karena sabda Rasul Saw.: "Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya." Sedangkan pinjaman yang disertai syarat keuntungan bagi pihak yang meminjami, maka merupakan akad fasid (rusak) karena hadits: "Semua utang yang menarik keuntungan adalah riba." Termasuk kategori ini adalah misalnya menghutangi orang yang menyewa hartanya dengan harga lebih karena hutang tersebut, jik i persewaan itu menjadi syarat menghutangi, karena dalam kondisi se perti tersebut penghutangan itu haram secara ijma'. Bila tidak menjadi syarat, maka menurut kita hukumnya makruh dan menurut ulama banyak hukumnya haram.

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Maka merupakan akad fasid.") Ali Syibramallisi berkata: "Dan telah maklum, fasidnya akad tersebut bila penyaratan menyewa dengan harga lebih itu terjadi dalam pelaksanaan akad menghutangi. Bila kedua pihak menyepakati sewa dengan harga

⁴ Zainuddin al Malibari dan al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, Fath al-Mu'in dan I'anah a' 1 halibin (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/1997 M), Jilid III, h. 64-66.

lebih itu dan tidak menjadi syarat dalam akad penghutangan, maka akad hutang tidak rusak.

4. Bughyatul Mustarsyidin⁵

(Fatwa masalah dari Abdullah bin al-Husain bin Abdullah Bafaqih). Mazhab Syafi'i menyatakan, bahwa sekedar tulisan dalam semua transaksi, *ikhbar* (pemberitahuan) dan pengajuan bukan *hujjah syar'iyah* (*hujjah* menurut syari'at).

5. Al-Asybah wa al-Nazha'ir6

Adat yang berlaku di suatu daerah, apakah adat mereka diposisikan sebagaimana syarat, dalam kaidah ini ada beberapa kasus. ... Di antaranya, seandainya berlaku adat yang mengharuskan peminjam mengembalikan barang yang lebih baik dari yang dipinjamnya. Maka apakah adat itu diposisikan sebagaimana syarat, sehingga hukum menghutanginya haram? Dalam kasus ini ada dua pendapat, yang lebih sahih adalah tidak diposisikan sebagaimana syarat.

Catatan: Tentang masalah d, yaitu hukum lotre. Lotre adalah bahasa asing yang artinya adalah undian atau qur'ah/yanashib. Adapun hukumnya apabila surat membeli lotre itu didasarkan atas untung atau rugi, maka haram sebab termasuk qimar/judi seperti surat-surat lotre yang biasa.

Sedang lotre yang tidak didasarkan untung atau rugi seperti membeli barang dengan harga mitsl (sepadan) dengan mendapat kupon berhadiah yang akan dilotre, atau bersedekah untuk mendirikan suatu kebaikan, seperti madrasah, pondok pesantren, mesjid dan lain sebagainya dengan mendapat kupon hadiah uang akan dilotre, maka tidak haram, karena tidak termasuk qimar/judi dengan cacatan bahwa barang hadiah yang akan dihadiahkan itu tidak diambil dari hasil sedekah tersebut.

6. Hasyiyah al-Bajuri⁷

⁵ Abdurrahman Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, (Pekalongan: Syirkah Nur Asia, t. th.), h. 176.

⁶ Jalaluddin al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 67.

⁷ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid II, h. 320.

... Dari bentuk judi yang diharamkan. Judi adalah semua permainan yang masih simpang siur antara untung dan rugi. Seperti permainan kertas dan yang lain.

7. Al-Amradh al-Ijtima'iyah8

Dan termasuk judi terburuk adalah membeli kupon yang disebut Ya Nashib (lotre). Kupon ini haram menurut empat mazhab.[]

⁸ Al-Amradh al-Ijtima'iyah, h. 391.

KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR PENGURUS BESAR SYURIAH NAHDLATUL ULAMA KE 1

Di Jakarta Pada Tanggal 21 - 25 Syawal 1379 H. / 18 - 22 April 1960 M.

283. Family Planning (Perencanaan Keluarga)
284. Menyerahkan Kambing untuk Mendapat Separo Anaknya
285. Membeli Tanah untuk Ditanami, Kaitannya dengan
Kewajiban Zakat

286. Pengurus Panitia Zakat Tidak Termasuk Amil 287. Pincin (Semacam Bubuk Putih untuk Bumbu) Mengandung Otak Babi

288. Mengawini Anak Tiri

289. Wali Nikah bagi Anak Hasil dari *Wathi Syubhat* 290. Melepaskan Burung di Tanah Airnya bagi Orang yang Ihram Haji/Umrah

291. Iddah Seorang Gadis yang Sudah Lama Tidak Berhaid

292. Perempuan (yang Dithalaq) Melahirkan Anak Sebelum Lewat Empat Tahun

293. Menunda Zakat untuk Dibagi pada Waktu Paceklik 294. Ulama di Pemerintahan

295. Shalat Jamak Qashar bagi Orang yang Bepergian Kurang dari Dua Marhalah

296. Belum Pergi Haji Sebab Tidak Mendapat Kotum 297. Muslim Kawin dengan Perempuan Kafir 298. I'adah Shalat Jum'at dengan Shalat Zhuhur 299. Maksud Hadits "Meninggalkan Shalat Menjadi Kafir"

300. Asuransi Jiwa

301. Membagi Waris Secara Gono Gini

283. Family Planning (Perencanaan Keluarga)

- S. Bagaimana hukumnya membatasi keturunan/merencanakan keluarga (family planning)? (NU Cab. Situbondo-Banyuwangi)
- J. Kalau dengan 'azl (mengeluarkan air mani di luar rahim) atau dengan alat yang mencegah sampainya mani ke rahim seperti kopacis/kondom, maka hukumnya makruh. Begitu juga makruh hukumnya kalau dengan meminum obat untuk menjarangkan kehamilan. Tetapi kalau dengan sesuatu yang memutuskan kehamilan sama sekali, maka hukumnya haram, kecuali kalau ada bahaya. Umpamanya saja karena terlalu banyak melahirkan anak yang menurut pendapat orang yang ahli tentang hal ini bisa menjadikan bahaya, maka hukumnya boleh dengan jalan apa saja yang ada.

Keterangan, dari kitab:

1. Asna al-Mathalib1

Adapaun al-azl (mengeluarkan sperma di luar rahim) adalah makruh walaupun pihak wanita mengizinkan, baik sebagai wanita merdeka maupun budak. Karena al-azl tersebut merupakan cara untuk memutus keturunan.

2. Talkhis al-Murad²

Ibn Abdussalam dan Ibn Yunus berfatwa, sesungguhnya tidak halal bagi istri menggunakan obat anti kehamilan walaupun dengan persetujuan suami.

3. Hasyiyah al-Bajuri³

Demikian halnya wanita menggunakan sesuatu (seperti alat kontrasepsi) yang memperlambat dan memutus kehamilan. Maka hukumnya makruh untuk yang pertama dan haram utuk yang kedua.

4. Pendapat Muktamar

¹ Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib, (Kairo: al-Kutub al-Islami, t. th.), Jilid III, h. 186.

² Abdurrahman bin Muhammad Ba' alawi, Ghayah Talkhis al-Munad min Fatawa Ibn Ziyad, (Indonesia: Syirkah Nur Asia, t. th.), h. 247.

³ Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri, (Mesir: Isa al-Halabi, 1922), Jilid II, h. 95.

ضَرَارًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا مَفْسَدَةً.

Dan ketika dharurat maka sesuai dengan kaidah fiqhiyah; jika ada dua bahaya saling mengancam maka diwaspadai yang lebih besar bahayanya dengan melaksanakan yang paling ringan bahayanya.

284. Menyerahkan Kambing untuk Mendapat Separo Anaknya

S. Bagaimana hukumnya menyerahkan kambing untuk dipelihara dengan janji mendapat separuh anaknya atau tambahannya? (NU Cab. Situbondo)

J. Hukum akad tersebut tidak sah, sebab anak dan tambahan itu bukan dari pekerjaan pemeliharaan tersebut.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Igna' 4

نَنِمَّةُ لَوْ أَعْطَى شَخْصُ آخَرَ دَابَّةً لِيَعْمَلَ عَلَيْهَا أَوْ يَتَعَهَّدَهَا وَفَوَائِدُهَا بَيْنَهُمَا لَمْ يَصِحَّ الْعَقْدُ لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى يُمْكِنُهُ إِيجَارُ الدَّابَّةِ فَلَا حَاجَةً إِلَى إِيرَادِ عَقْدٍ عَلَيْهَا فِيهِ غَرَرٌ وَفِي الثَّانِيَةِ الْفُوائِدُ لَا تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ وَلَوْ أَعْطَاهَا لَهُ لِيَعْلِفَهَا مِنْ عِنْدِهِ بِنِصْفِ دُرِّهَا فَفَعَلَ ضَمِنَ لَهُ الْمَالِكُ الْفُوائِدُ لَا تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ وَلَوْ أَعْطَاهَا لَهُ لِيَعْلِفَهَا مِنْ عِنْدِهِ بِنِصْفِ دُرِّهَا فَفَعَلَ ضَمِنَ لَهُ الْمَالِكُ الْفَالِثُ وَهُو الْقَدْرُ الْمَشْرُوطُ لَهُ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ بَيْعِ فَاسِدٍ وَلَا يَضْمَنُ الدَّابَةَ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُقَابَلَةٍ بَعُوضٍ وَإِنْ قَالَ لِتَعْلِفُهَا بِنِصْفِهَا فَفَعَلَ فَالتَصْفُ الْمَشْرُوطُ مَضْمُونُ عَلَى الْعَالِفِ لِحُصُولِهِ بِحُكْمِ الشِّرَاءِ الْفَاسِدِ دُونَ النَّصْفِ الْآخِرِ.

(Penyempurna) Bila seseorang menyerahkan hewan peliharaan kepada orang lain -dengan akad- agar digunakan bekerja, atau agar dipelihara dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua, maka akad tersebut tidak sah. Sebab dalam kasus pertama orang tersebut bisa mengakadi sewa pada hewan tersebut, maka tidak perlu mengakadinya dengan akad yang mengandung ketidakjelasan, dan dalam kasus kedua hasilnya tidak diperolehkan dari kerja si pemelihara.

Bila ia menyerahkan hewan tersebut -dengan akad- supaya diberi makan dengan upah separo air susunya. Lalu orang yang diserahi melaksanakannya, maka si pemilik menanggung makanan yang telah diberikan bagi si pemberi makan, dan si pemberi makan menanggung separo air susu bagi si pemilik. Separo air susu itu merupakan kadar yang disyaratkan baginya, sebab

Muhammad al-Khatib al-Syarbini, al-Iqna' pada Tuhfah al-Habib, (Mesir: Mathba'ah al-Tagadum al-Ilmiyah, t. th.), Jilid III, h. 176.

diperoleh dengan hukum jual beli yang rusak. Dan si pemberi makan tidak menanggung hewan tersebut, karena tidak dibandingi dengan imbal balik.

Bila si pemilik berkata: "Kamu beri makan hewan itu dengan upah separonya.", lalu si penerima melaksanakannya, maka separo hewan yang dijanjikan itu menjadi tanggungan si penerima, sebab diperoleh dengan hukum jual beli yang rusak, bukan separo yang satunya.

285. Membeli Tanah untuk Ditanami, Kaitannya dengan Kewajiban Zakat

- S. Apakah berkewajiban bagi orang yang membeli anak ikan untuk dipelihara atau bibit tanaman yang tidak ada zakatnya 'ain, atau tanah dengan niat akan ditanami atau untuk perusahaan garam (tidak niat akan dijual lagi)? Semua ini tentu ingin mendapatkan keuntungan. Apakah itu termasuk tijarah yang diwajibkan zakat dalam akhir tahun, karena demikian itu memutarkan uang untuk mendapatkan keuntungan? Kalau termasuk, apakah yang dihitung sesudah akhir tahun? (NU Cab. Demak)
- J. Membeli anak ikan untuk dipelihara atau biji untuk ditanam atau tanah untuk ditanami/perusahaan garam, kalau membeli tidak niat dijual lagi (diperdagangkan), maka tidak termasuk tijarah yang berkewajiban zakat. Keterangan, dari kitab:
- 1. Fath al-'Alam5

Jika seseorang ingin membeli barang untuk diperdagangkan, maka harus ada niat ketika terjadi pertukaran barang pada saat akad atau di majelisnya. Dan diharuskan pula pembaruan niat pada setiap pembelanjaan sampai selesainya jual beli dengan modal (sampai modal habis).

286. Pengurus Panitia Zakat Tidak Termasuk Amil

S. Apakah pengurus panitia pembagian zakat yang didirikan oleh suatu organisasi Islam itu termasuk amil menurut syara', ataukah tidak? (NU Cab. Malang)

304

Muhammad Abdullah al-Jurdani, Fath al-'Alam bi Syarhi Musrsyid al-Anam, (Mesir: al-Amirah, 1323 H), Jilid II, h. 126.

J. Panitia pembagian zakat yang ada pada waktu ini tidak termasuk amil zakat menurut agama Islam, sebab mereka tidak diangkat oleh Imam (kepala negara).

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib⁶

Yang disebut dengan amil ialah orang yang diangkat oleh pemerintah seperti sa'i yang menarik zakat, katib pencatat zakat yang diserahkan pemilik harta, qasim yang membagikan zakat kepada para mustahiq dan hasyir yang mengumpulkan mereka (untuk diberi zakat).

287. Pincin⁷ (Semacam Bubuk Putih untuk Bumbu) Mengandung Otak Babi

- S. Bagaimana hukumnya Pincin (semacam bubuk putih untuk bumbu) menurut orang yang meyakinkan bahwa pincin itu mengandung otak babi, sucikah atau tidak? (NU Cab. Kediri)
- J. Menurut pendapat yang kuat hukumnya suci, karena mengamalkan pada asalnya disamakan dengan jukh (sutra halus yang terkenal dengan nama kain laken) yang sudah masyhur dalam perkataan orang banyak pembuatannya dicampur dengan gajih babi.

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin8

(قَاعِدَةُ مُهِمَّةُ) وَهِيَ أَنَّ مَا أَصْلُهُ الطَّهَارَةُ وَغُلِبَ عَلَى الظَّنِّ تَنَجُّسُهُ لِغَلَبَةِ النَّجَاسَةِ فِي مِثْلِهِ فِيْهِ قَوْلاَنِ مَعْرُوْفَانِ بِقَوْلِي الْأَصْلِ وَالظَّا رِ أَوِ الْغَالِبِ أَرْجَحُهُمَا أَنَّهُ طَا رَرُ عَمَلاً بِالأَصْلِ الْمُتَيَقَّنِ لِأَنْهُ أَصْبَطُ مِنَ الْغَالِبِ الْمُخْتَلَفِ بِالأَحْوَالِ وَالْأَزْمَانِ وَذَلِكَ (كَثِيَابٍ خُمَّارٍ إِلَى أَنْ قَالَ (وَجُوْخُ ... لِأَنَّهُ أَصْبَطُ مِنَ الْعَالِبِ الْمُخْتِى سُئِلَ ابْنُ الصَّلاَحِ عَنْ الْجُوْخِ الَّذِي اشْتَهَرَ عَلَى أَنْسِنَةِ النَّاسِ (وَوَلْكَ وَبُوخِ الَّذِي اشْتَهَرَ عَلَى أَنْسِنَةِ النَّاسِ الْمُغْنِي سُئِلَ ابْنُ الصَّلاَحِ عَنْ الْجُوْخِ الَّذِي اشْتَهَرَ عَلَى أَنْسِنَةِ النَّاسِ أَنَّ فِيْهِ شَحْمُ الْخِنْزِيْرِ فَقَالَ لاَ يُحْصَى مُ بِنَجَاسَتِهِ إِلاَّ بِتَحْقِيْقِ النَّجَاسَةِ

⁶ Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Mesir: Isa al-Halabi, 1922), Jilid I, h. 294.

Mungkin yang dimaksud pincin adalah micin (bubuk putih untuk bumbu masak).
 Zainuddin al-Malibari dan al-Bakri bin Muhammad Syaththa al-Dimyathi, Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), Jilid I, h. 124-125.

(Kaidah penting) yaitu sesungguhnya sesuatu yang aslinya suci lalu diduga kuat menjadi najis karena pada umumnya barang seperti itu najis, maka dalam hal ini ada dua pendapat yang terkenal dengan istilah dua pendapat asl (asal) dan zhahir atau ghalib. Pendapat yang lebih unggul adalah sesuatu itu suci berdasarkan hukum asal yang telah diyakini, karena lebih kuat dibanding ghalib (pada umumnya) yang berbeda-beda dalam beberapa kondisi dan waktu. Kasus dari kaidah tersebut seperti pakaian pembuat atau peminum khamr dan ... jukh ...

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Jukh ...") Dalam al-Mughni terdapat redaksi, "Ibn al-Shalah pernah ditanya tentang jukh yang populer dalam perbincangan banyak orang bahwa ia mengandung lemak babi. Maka beliau menjawab: "Jukh tidak dihukumi najis sampai kenajisannya terbukti.

2. Sunan Abi Dawud⁹

Dari Qabishah bin Hulb dari ayahnya yang mengatakan: "Saya mendengar Rasulullah Saw. tatkala ada orang bertanya: "Ada makanan yang saya hindari." beliau menjawab: "Janganlah suatu keraguan itu membuat dirimu seperti Rahib Nasrani." (HR. Abu Dawud)

288. Mengawini Anak Tiri

- S. Apakah boleh mengawini anak dari istri yang telah dithalaq (bekas anak tirinya) yang tidak dipelihara/kumpul dengan pengawin? (NU Cab. Pendopo SVPM)
- J. Mengawini anak tiri itu tidak boleh, kalau dia sudah pernah bersetubuh dengan ibunya. Sebab termasuk *mahram* yang haram dinikah. *Keterangan*, dari kitab:
- 1. Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin¹⁰

⁹ Sulaiman al-Sijistani, Sunan Abi Dawud, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, 1950), Cet. Ke-2, Jilid III, h. 480.

¹⁰ Zainuddin al-Malibari dan al-Bakri bin Muhammad Syaththa al-Dimyathi, Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), Jilid III, h. 335-336.

(Dan begitu pula anak perempuannya) ... (bila seseorang pernah bersetubuh dengan si istri)

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Dan begitu pula anak anak perempuannya.") ... Maksudnya sebagaimana haram menikahi ibu si istri, haram pula menikahi anak perempuannya.

289. Wali Nikah bagi Anak Hasil dari Wathi Syubhat

- S. Siapakah wali nikah bagi anak yang hasil dari wathi syubhat? Apakah orang yang wathi ataukah lainnya? (NU Cab. Situbondo)
- J. Sesungguhnya wali nikah bagi anak perempuan yang hasil dari wathi syubhat adalah orang yang wathi itu sendiri.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah al-Syarqawi¹¹

Berbeda jika seseorang dipaksa berzina dengan wanita, maka wanita tersebut tidak harus beriddah dan persetubuhan yang terjadi tidak menyebabkan nasab (garis keturunan) ... Berbeda dengan seseorang yang bersetubuh karena syubhat (keliru dan tidak sengaja) karena adanya penetapan nasab dengan persetubuhan tersebut adalah karena berdasarkan dugaan orang yang menyetubuhi itu (bahwa yang disetubuhi adalah istrinya sendiri).

290. Melepaskan Burung di Tanah Airnya bagi Orang yang Ihram Haji/Umrah

- S. Seorang ihram haji/umrah, wajibkah melepaskan burungnya yang terpelihara di tanah airnya (tanah halal)? (NU Cab. Bangkalan)
- J. Mereka wajib melepaskan burungnya yang halal dagingnya dan semua hewan wahsyi (liar) yang dimiliki, karena hilangnya hak memilikinya sewaktu ihram.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah al-Bajuri¹²

Abdullah al-Syarqawi, Hasyiyah al-Syarqawi 'ala al-Tahrir, (Mesir: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1332 H), Jilid II, h. 314.

(قَوْلُهُ وَوَضْعُ الْيَدِّ عَلَيْهِ) أَيْ بِحَيْثُ يَكُونُ فِيْ تَصَرُّفِهِ وَلَوْ بِشِرَاءِ أَوْهِبَةٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ إِعَارَةٍ فَيَجِبُ عَلَى مَالِكِهِ إِرْسَالُهُ إِذَا أَحْرَمَ لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ بِالْإِحْرَامِ وَلاَ يَعُوْدُ لَهُ بِالتَّحَلُّلِ مِنَ النُّسُكِ إِلاَّ بَتَمَلُّكِ جَدِيْدٍ.

(Ungkapan Syaikh Ibn Qasim al-Ghazi: "Dan haram menguasai hewan buruan- ketika *ihram-*.") Maksudnya sekira hewan itu berada dalam pemeliharaannya, meskipun dengan membeli, hibah, menyewa, atau meminjam. Maka si pemilik wajib melepasnya ketika dirinya *ihram*, karena hilangnya hak milik dari hewan tersebut disebabkan *ihram*nya. Dan hak milik hewan itu tidak kembali lagi padanya dengan sebab ia *tahallul* dari *manasik*, kecuali dengan kepemilikan baru.

291. Iddah Seorang Gadis yang Sudah Lama Tidak Berhaid

- S. Bagaimana iddahnya seorang gadis yang sampai lama putus/tidak berhaid? (NU Cab. Temanggung)
- J. Kalau putusnya haid itu karena illat/sakit yang diketahui, maka tidak boleh dikawin sehingga suci dari tiga haid, atau telah sampai umur putus haid lalu beriddah dengan beberapa bulan (4 bulan 10 hari).

Dan kalau putusnya haid tidak karena illat/sakit yang diketahui hingga bisa iddah lagi, juga tidak boleh kawin hingga berhaid atau sampai umur putus darah kemudian menjalankan iddah quru' (suci). Menurut qaul yang mu'tamad dari madzhab Syafi'i, juga menurut qaul qadim yaitu mazhab Maliki dan Ahmad bin Hanbal, dia supaya menunggu selama sembilan bulan untuk mengetahui kekosongan rahimnya.

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Mu'in¹³

(وَمَنْ اِنْقَطَعَ حَيْضُهَا) بَعْدَ أَنْ كَانَتْ تَحِيْضُ (بِلاَ عِلَّةٍ) تُعْرَفُ (لَمْ تَتَزَوَّجْ حَتَّى تَحِيْضَ أَوْ تَيْلُسُ) ثُمَّ تَعْتَدُ بِالْأَقْرَاءِ أَوِ الْأَشْهُرِ. وَفِي الْقَدِيْمِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ أَنَّهَا تَتَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرِ ثُمَّ تَعْتَدُ بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ لِيُعْرَفَ فَرَاغُ الدَّمِّ الذَّهِي غَالِبُ مُدَّةِ الْخُمْلِ. وَانْتَصَرَ لَهُ الشَّافِعِيُّ أَشْهُرِ ثُمَّ تَعْتَدُ بِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ لِيُعْرَفَ فَرَاغُ الدَّمِّ الذَّهِي غَالِبُ مُدَّةِ الْخُمْلِ. وَانْتَصَرَ لَهُ الشَّافِعِيُّ

¹² Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri, (Mesir: Isa al-Halabi, 1922), Jilid I, h. 330.

¹³ Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in dan l'anah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), Jilid IV, h. 49 dan 50.

المُّ Dalam kitab al-Tuhfah dengan redaksi وَرَاغُ الرَّحِي (kosongnya rahim), sehingga redaksi وَرَاغُ الدَّمُ (kosongnya darah) disinyalir oleh Sayyid al-Bakri sebagai kesalahan penulisan.

بِأَنَّ عُمَرَ ﷺ قَضَى بِهِ بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَلَمْ يُنْكُرْ عَلَيْهِ. وَمِنْ فَمَّ أَفْتَى بِهِ سُلْطَانُ الْعُلَمَاءِ عِزُّ الدَّيْنِ الْبُنُ عَبْدِ السَّلاَمِ والْبَارِزِيُّ وَإِسْمَاعِيْ ُ الْحُضْرَيُّ واخْتَارَهُ الْبُلْقِيْنِيُّ وَشَيْخُنَا ابْنُ الزِّيَادِ رَحِمَهُمُ اللهُ أَمَّا مَنْ انْقَطَعَ حَيْضُهَا بِعِلَّةٍ تُعْرَفُ كَرَضَاعٍ وَمَرَضِ فَلاَ تَتَزَوَّجُ اتِّفَاقًا حَتَّى تَحِيْضَ أَوْ تَيْأَسَ وَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ.

(قَوْلُهُ وَانْتَصَرَ لَهُ إِلَخ) أَيِ اسْتَدَلَّ الشَّافِعِي لِقَوْلِهِ الْقَدِيْمِ بِأَنَّ سَيِّدَنَا عُمَرَ قَضَى بِهِ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ ضَعِيْفُ إِذِ الْمُعْتَمَدُ الْجَدِيْدُ.

Wanita yang berhenti haidnya setelah sebelumnya berhaid tanpa sebab yang diketahui, maka tidak boleh nikah sampai ia haid atau menopause, lalu dia beriddah dengan hitungan qur' (suci dari haid) atau bulan. Dalam qaul qadim, yang juga mazhab Malik dan Ahmad, wanita itu harus menunggu sembilan bulan, lalu beriddah tiga bulan untuk mengetahui kosongnya rahim (dari janin), karena masa itu merupakan masa kehamilan pada umumnya. Imam Syafi'i menguatkannya dengan penetapan Umar Ra. pada hukum tersebut di antara kalangan Muhajirin dan Anshar, serta tidak seorang pun yang mengingkarinya. Oleh sebab itu, Sulthan al-'ulama Izzudin Ibn Abdissalam, al-Barizi, Isma'il al-Hadhrami berfatwa dengannya, dan pendapat itu dipilih al-Bulqini, dan guruku Ibn Ziyad -rahimahumullah-. Adapun wanita yang terhenti haidnya karena 'illat yang diketahui, seperti menyusui dan penyakit, maka wanita tersebut tidak boleh nikah sampai haid lagi atau menopause dengan kesepakatan ulama, walaupun dalam waktu lama.

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Imam Syafi'i menguatkannya ... "), maksudnya beliau mengambil dalil *qaul qadim* dengan penetapan Umar Ra. dengan hukum tersebut. Meskipun begitu, pendapat itu adalah pendapat lemah, karena yang dijadikan pedoman adalah *qaul jadid*.

2. Talkhish al-Murad¹⁵

أَمَّا مَنْ انْقَطَعَ دَمُّهَا لِعِلَّةٍ تُعْرَفُ كَرَضَاعِ وَمَرَضِ وَخَوْفِ وَضَيْقِ عَيْشِ فَالْمَجْزُوْمُ بِهِ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّ عِدَّتَهَا بِالْأَقْرَاءِ وَإِنَّهَا تَصْبِرُ حَتَّى تَحِيْضَ أَوْ تَبْلُغَ سِنَّ الْإِيَاسِ اِثْنَتَانِ وَسِتُّوْنَ سَنَةً فَتَعْتَدُّ حِيْنَتِذٍ بِالْأَشْهُرِ.

Lihat al-Bakri bin Muhammad Saththa al-Dimyathi, *I'anah Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.) Juz IV, h. 42. (Pen.)

¹⁵ Abdurrahman bin Muhammad Ba' alawi, Ghayah Talkhis al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad, (Mesir: Musthafa al-Halabi1952), h. 242.

Wanita yang terhenti darah haidnya karena 'illat yang diketahui, seperti menyusui, sakit, ketakutan, atau derita hidup, maka hukum yang dimantapkan dalam madzhab (Syafi'i) adalah bahwa iddahnya menggunakan qur' (suci dari haid). Dan ia harus bersabar (tidak menikah) sampai haid lagi atau mencapai usia menopause yaitu 62 tahun, lalu ia beriddah dengan hitungan bulan (3 bulan).

292. Perempuan (yang Dithalaq) Melahirkan Anak Sebelum Lewat Empat Tahun

- S. Perempuan (yang dithalaq suaminya) melahirkan anak sebelum lewat empat tahun, apakah anak itu dapat dipertemukan dengan lelaki yang menthalaq atau tidak? Demikian pula kalau suami yang mentalaq itu melepaskan anak dengan mengucapkan li'an, apakah anak masih tetap menjadi anaknya suami yang menthalaq atau tidak? (NU Cab. Situbondo)
- J. Dalam muktamar NU ke 5 dan ke 12 pernah memutuskan semacam masalah ini, yakni: Anak tersebut dapat dipertemukan dengan lelaki yang menthalaq, kalau istri belum bersuami lagi yang memungkinkan anak tersebut dari suami yang kedua. Tetapi kalau suami yang menthalaq mengucapkan li'an dengan meniadakan anaknya, maka anak tidak bisa dipertemukan dengan suami yang menthalaq.

Keterangan, dalam kitab:

1. Bughyah al-Mustarsyidin¹⁶

Maka kesimpulannya adalah bahwa anak yang dilahirkan dari istri seorang suami itu nasabnya ikut kepadanya secara mutlak billa anak itu mengkin berasal dari hasil persetubuhannya. Dan nasab anak itu tidak bisa ternafikan darinya kecuali dengan sumpah *li'an*. Hukum penafian itu terkadang wajib dan terkadang haram. Dan pengakuan zina si istri tidak diterima meskipun si suami membenarkannya dan terdapat tanda-tanda yang cukup jelas.

2. Tuhfah al-Muhtaj¹⁷

¹⁶ Abdurrahman Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Bandung: Syirkah Nur Asia, t. th.), h. 236.

¹⁷ Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj, pada Hasyiyah al-Syirwani, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t. th.), Jilid VIII, h. 243. Demikian pula diterangkan dalam kitab al-

(وَلَوْ أَبَانَهَا) أَيْ زَوْجَتَهُ بِخُلْعِ أَوْ ثَلَاثٍ وَلَمْ يُنْفِ الْحَمْلَ (فَوَلَدَتْ لِأَرْبَعِ سِنِيْنَ) فَأَقَلَّ وَلَمْ يَمْكِنْ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنَ الشَّانِي (لَحِقَهُ) وَبَانَ وُجُوْبُ تَتَزَوَّجْ بِغَيْرِهِ أَوْ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنَ الشَّانِي (لَحِقَهُ) وَبَانَ وُجُوْبُ شُكْنَاهَا وَنَفَقَتِهَا وَإِنْ أَقَرَّتْ بِانْقِطَاعِ الْعِدَّةِ لِقِيّامِ الْإِمْكَانِ إِذْ أَكْثُرُ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِيْنَ لِمَاكَةُ سِنِيْنَ لِلْإِمْتِقْرَاءِ إِلَى أَنْ قَالَ: (وَلَوْ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا) فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِأَرْبَعِ سِنِيْنَ لَحِقَهُ وَبَانَ وُجُوْبُ نَفْقَتِهَا وَسُكْنَاهَا أَيْ وَإِنَّ الْمَرْأَةَ مُعْتَدَّةً إِلَى الْوَضْعِ حَتَى يَثْبُتَ لِلرَّوْجِ رَجْعَتُهَا.

Seandainya suami menceraikan istrinya secara khulu' atau tiga kali, dan ia tidak mengingkari kehamilannya, lalu si istri melahirkan dalam rentang waktu empat tahun atau kurang, dan belum kawin dengan orang lain, atau sudah kawin dengan orang lain, namun tidak memungkinkan adanya anak tersebut dari suami yang kedua, maka anak tersebut harus diikutkan pada suami yang pertama dan ia berkewajiban memberikan perumahan dan nafkah, meskipun istri tersebut berikrar bahwa 'iddahnya habis, sebab waktu kehamilan yang paling lama adalah empat tahun sesuai dengan penelitian ... Jika suami tersebut mentalaqnya dengan talaq raj'i dan lalu si istri melahirkan anak dalam rentang waktu empat tahun, maka anak tersebut harus diikutkan sebagai anaknya dan ia pun berkewajiban memberi papan dan pangan si istri. Dan sesungguhnya wanita tersebut ber'iddah sampai melahirkan sehingga ada ketetapan bagi suami untuk merujuknya lagi.

293. Menunda Zakat untuk Dibagi pada Waktu Paceklik

S. Bagaimana menunda zakat untuk dibagi pada waktu paceklik? (NU Cab. Situbondo)

J. Demikian itu haram dan orang yang melakukannya berdosa, kecuali kalau karena menunggu kerabat atau tetangga, maka tidak berdosa. Tetapi wajib mengganti kalau ada kerusakan karena tertunda. Demikian itu kalau tidak terlalu membahayakan mereka yang telah hadir dari para *mustahiq*. Kalau sudah sampai membahayakan, maka berdosalah menundanya.

Keterangan, dalam kitab:

1. Fath al-Mu'in18

(يَجِبُ أَدَاوُهَا) ... (فَوْرًا) ... (بِتَمَكُنٍ) مِنَ الْأَدَاءِ فَإِنْ أَخَّرَ أَثِمَ وَضَمِنَ إِنْ تَلِفَ بَعْدَهُ. نَعَمْ

Raudh bab "Lamanya Masa Kandungan", dan kitab Hamisy Tarsyikh.

¹⁸ Zainuddin al-Malibari dan al-Bakri bin Muhammad Syatha al-Dimyathi, Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002, Jilid II, h. 199-200.

إِنْ أَخَّرَ لِانْتِظَارِ قَرِيْبٍ أَوْ جَارٍ أَوْ أَحْوَجَ أَوْ أَصْلَحَ لَمْ يَأْثُمْ لَكِنَّهُ يَضْمَنُهُ إِنْ تَلِفَ (قَوْلُهُ لَمْ يَأْثُمْ) مَحَلَّهُ مَا لَمْ يَشْتَدَّ ضَرَرُ الْحَاضِرِيْنَ. وَإِلاَّ أَثِمَ بِالتَّأْخِيْرِ لِأَنَّ دَفْعَ ضَرَرِهِمْ فَرْضٌ فَلاَ يَجُوْزُ تَرْكُهُ لِجِيَازَةِ الْفَضِيْلَةِ .

Pembayaran zakat itu wajib dilaksanakan segera jika mungkin dilaksanakan. Bila seseorang menunda, maka berdosa dan menanggung penggantinya bila setelahnya rusak. Namun bila ia menunda karena menunggu famili, tetangga, orang yang lebih membutuhkan, atau yang lebih saleh, maka tidak berdosa namun harus menanggungnya bila terjadi kerusakan.

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Berdosa.") yakni ketika tidak terlalu membahayakan *mustahiqqin*. Bila tidak begitu, maka ia berdosa karena menunda pembayaran zakat. Sebab, menolak bahaya itu wajib, maka tidak boleh ditinggalkan dalam rangka memperoleh *fadhilah*.

294. Ulama di Pemerintahan

S. Bagaimana ulama-ulama kita yang menjabat dalam pemerintahan? Apakah tidak termasuk dalam sabda Nabi Muhammad Saw.:

Artinya: "Para ulama adalah kepercayaan para Rasul atas para hamba Allah selama mereka tidak bergaul dengan para penguasa. Akan tetapi kalau mereka bergaul dan berbuat demikian, maka sungguh mereka telah berkhianat kepada para rasul dan para hamba Allah, maka takut dan hindarilah mereka."

Dalam kitab Majmu' bahasa Jawa karangan K. Sholeh Darat Semarang ditegaskan bahwa: "Ulama pejabat pemerintahan adalah orang-orang yang terhina dan tertipu", ataukah tidak termasuk dalam hadits tersebut? (NU Cab. Kudus)

J. Para ulama pejabat pemerintah itu tidak termasuk dalam hadits dan pendapat K. Sholeh seperti tersebut di atas, jika menjabatnya karena ada hajat/dharurat/kemaslahatan agama, dan dengan niat yang baik.

Keterangan, dari kitab:

1. Is'ad al-Rafiq¹⁹

وَأَنْ لاَ يَكُوْنَ مُتَرَدِّدًا عَلَى السَّلاَطِيْنَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَرْبَابِ الرِّيَاسَةِ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ لِحَاجَةٍ

¹⁹ Muhammad Babashil, Is'ad al-Rafiq 'ala Sullam al-Taufiq, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah t. th.), Juz II, h. 31.

وَضَرُوْرَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ دِيْنِيَّةٍ رَاجِحَةٍ عَلَى الْمَفْسَدَةِ إِذَا كَانَتْ بِنِيَّةٍ حَسَنَةٍ صَالِحةٍ. وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا جَاءَ لِبَعْضِهِمْ مِنَ الْمَشْيِ وَالتَّرَدُّدِ إِلَيْهِمْ كَالزُّهْرِي وَالشَّافِعِي وَغَيْرِهِمَا لاَ عَلَى أَنَّهُمْ قَصَدُوْا بِذَلِكَ فُضُوْلَ الأَغْرَاضِ الدُنْيَوِيَّةِ قَالَهُ السَّمْهُوْدِي.

Dan hendaknya tidak bolak-balik pergi ke sultan dan para penguasa dunia lainnya kecuali karenas hajah, dharurah, atau maslahat agama yag lebih besar dari pada mafsadahnya, jika disertai niat baik. Pada konteks seperti inilah pergaulan para ulama seperti al-Zuhri, al-Syafi'i dan selainnya dengan para penguasa dipahami. Bukan dalam konteks mereka mencari kepentingan duniawi. Demikian kata al-Samhudi.

295. Shalat Jamak Qashar bagi Orang yang Bepergian Kurang dari Dua Marhalah

- S. Apakah ada pendapat yang terbilang menurut para ulama/imam yang memperbolehkan shalat jama' qashar bagi orang yang bepergian kurang dari dua marhalah?
- J. Adapun masalah *qashar* shalat dalam perjalanan yang kurang dari dua *marhalah*, tidak terdapat pendapat yang terbilang yang memperbolehkan. Akan tetapi kalau jamak antara dua shalat sewaktu di rumah, memang ada pendapat yang terbilang yang memperbolehkan, asalkan ada keperluan untuk orang yang tidak menjadikan kebiasaan.

Keterangan, dari kitab:

1. Syarh Muslim²⁰

وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَثِمَّةِ إِلَى جَوَازِ الجُمْعِ فِي الْحَضَرِ لِلْحَاجَةِ لِمَنْ لاَ يَتَّخِذُهُ عَادَةً وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيْرِيْنَ وَأَشْهَبَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكِ وَحَكَاهُ الْخَطَّائِيُّ عَنِ الْقَفَّالِ وَالشَّاشِي الْكَبِيْرِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحاقَ الْمَرْوَزِي عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ.

Sejumlah imam berpendapat tentang kebolehan menjamak shalat di rumah karena hajah bagi orang yang tidak menjadikannya sebagai kebiasaan. Itu adalah pendapat Ibn Sirin, Asyhab murid Imam Malik. Al-Khaththabi menghikayatkan pendapat tersebut dari al-Qaffal, al-Syasyi al-Kabir murid al-Syafi'i, dari Abu Ishaq al-Marwazi dari sekelompok ulama ahli hadis. Pendapat itu dipilih pula oleh Ibn Mundzir.

²⁰ Muhyiddin al-Nawawi, Syarh Muslim, (Cairo: al-Sya'b, 1390.H), Jilid II, h. 359.

296. Belum Pergi Haji Sebab Tidak Mendapat Kotum

S. Apakah berdosa orang yang sudah mampu haji, tetapi belum pergi haji karena tidak mendapat Kotum dari Pemerintah? (NU Cab.Temanggung)

J. Tidak berdosa, karena belum istitha'ah/mampu pergi haji.

Keterangan, Dalam kitab:

1. Al-Mizan al-Kubra²¹

Para ulama sepakat bahwa orang yang sudah berkewajiban haji, lalu belum melakukannya dan mati sebelum berkemungkinan melakukannya, maka kewajiban haji itu gugur darinya.

2. Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimah²²

(Pasal) Seseorang yang wajib haji, lalu belum melakukannya dan ia mati sebelum berkemungkinan melakukannya, maka kewajiban haji itu gugur darinya dengan kesepakatan ulama.

297. Muslim Kawin dengan Perempuan Kafir

- S. Bagaimana hukumnya lelaki muslim menikahi perempuan kafir, apakah boleh?
- J. Tidak boleh/haram dan tidak sah, kalau perempuan kafir tersebut bukan kafir Kitabi yang mumi yang keturunan asli (orang tua)nya masuk ke dalam agama tersebut sebelum dinaskh (ubah) dengan kerasulan Nabi Muhammad Saw. seperti perempuan murtad, Majusi, Watsani, kafir Kitabi yang orang tuanya masuk ke dalam agama itu sesudah dimansukh (ubah) seperti anak-anak putri bangsa kita Indonesia.

Keterangan, dari kitab:

1. Tuhfah al-Thullab bi Syarh al-Tahrir dan Hasyiyah al-Syarqawi²³
... (وَنِكَا لُهُ سُلِمٍ كَافِرَةً غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ خَالِصَةً) كَأَنْ كَانَتْ وَثَنِيَّةً أَوْ جُوْسِيَةً أَوْ أَحَدُ أَبُونِهَا كَذَلِكَ ... (إِنْ لَمْ تَدْخُلْ أُصُونُهَا فِيْ ذَلِكَ الدِّيْن بَعْدَ نَسْخِهِ)

(فَإِنْ كَانَتْ) كِتَابِيَّةً (خَالِصَةً وَهِيَ إِسْرَائِيلِيَّةٌ) ... (إِنْ لَمْ تَدْخُلْ أُصُونُهَا فِيْ ذَلِكَ الدِّيْن بَعْدَ نَسْخِهِ)

²¹ Abdul Wahhab al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, (Singapura-Jeddah: al-Haramain, t. th.), Juz II, h. 29.

Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimah pada al-Mizan al-Kubra, (Singapura-Jeddah: al-Haramain, t. th.), Juz I, h. 125.

²³ Zakaria al-Anshari dan Abdullah al-Syarqawi, Tuhfah al-Thullab bi Syarh al-Tahrir dan Hasyiyah al-Syarqawi, (Surabaya: al-Hidayah, t. th.), Juz II, h. 237-240.

(قَوْلُهُ أُصُولُهَا) ... وَعِبَارَهُ الْمِنْهَجَ أَنْ لاَ يُعْلَمَ دُخُولُ أَوَّلِ أَبَاثِهَا فِيْ ذَلِكَ الدَّيْنِ بَعْدَ بِعْثَةٍ تَنْسَخُهُ اه... (قَوْلُهُ بَعْدَ نَسْخِهِ) ... وَبِعْثَةَ نَبِيّنَا ﷺ نَاسِخةٌ لَهُمَا

(Pernikahan-pernikahan yang batal adalah) ... dan pernikahan seorang muslim dengan wanita non muslim selain kitabiyah murni, seperti wanita penyembah berhala, majusi atau salah satu dari kedua orang tuanya beragama seperti itu ... Apabila wanita itu kitabiyah murni, yaitu wanita israiliyah, -maka wanita itu halal bagi muslimin- selama nenek moyangnya tidak memeluk agama israiliyah itu setelah dinaskh (diganti dengan syari'ah lain).

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Nenek moyangnya.") ... Dan redaksi kitab Manhaj al-Thullab adalah: "Yakni pucuk nenek moyangnya -yang masih diketahui, seperti pucuk marga atau klan- tidak diketahui memeluk agama itu setelah terutusnya Rasul yang menaskh(menyalin)nya. ... (Ungkapan beliau: "Setelah dinaskh.") ... Dan sungguh terutusnya Nabi kita Muhammad Saw. itu menyalin syari'ah Nabi Musa As. dan Nabi Isa As.

298. I'adah Shalat Jum'at dengan Shalat Zhuhur

- S. Bagaimana hukumnya i'adah (mengulang lagi) **shalat Jum'at dengan** shalat Zhuhur, karena orang yang berjum'at kurang da**ri 40 orang yang sempu**rna? (NU Cab. Pendopo SVPM)
- J. Bahwa mengulang shalat Jum'at dengan shalat Zhuhur dianggap bagus. Bahkan ada pendapat yang mengatakan sunat, kalau bilangan orang yang bershalat Jum'at kurang dari 40 orang, dengan niat taqlid pada qaul yang memperbolehkan.

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Mu'in²⁴

Sejumlah ulama benar-benar telah memperbolehkan shalat Jum'at -bagi jamaah yang kurang dari empat puluh-, dan pendapat ini kuat. Jika mereka semua bertaqlid pada ulama yang berpendapat ini, maka mereka boleh melaksanakan shalat Jum'at. Dan jika mereka bersikap hati-hati, lalu mereka shalat Jum'at kemudian shalat Zhuhur, maka hal itu baik.

²⁴ Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in pada I'anah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), Jilid II, h. 70.

وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَأَقُولُ إِنَّ الْحَاصِلَ أَنَّ لِلشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ فِي الْعَدَدِ الَّذِيْ تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمْعَةُ أَرْبَعِيْنَ. وَثَلاَثَةُ فِي الْمَذَاهِبِ صَعِيْفَةٌ أَحَدُهَا أَرْبَعِيْنَ. وَثَلاَثَةٌ فِي الْمَذَاهِبِ صَعِيْفَةٌ أَحَدُهَا أَرْبَعَيْنَ. وَثَلاَثَةٌ إِثْنَا عَشَرَ أَحَدُهُمْ الْإِمَامُ وَعَلَى كُلِّ أَرْبَعَةٌ أَحَدُهُمْ الْإِمَامُ وَالتَّالِيَةُ إِثْنَا عَشَرَ أَحَدُهُمْ الْإِمَامُ وَعَلَى كُلِّ الْعَالِينَةُ اللهِ مَعْلَى كُلِّ الْمُؤْولِ الطَّالِبِ مَا عِنْدَ اللهِ تَعَالَى الْأَقُوالِ تُشْتَرَطُ فِيْهِمْ الشَّرُوطُ الْمَذْكُورَةِ إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَعَلَى الْعَاقِلِ الطَّالِبِ مَا عِنْدَ اللهِ تَعَالَى الْأَقُوالِ تَشْتَرُطُ فِيْهِمْ الشَّرُوطُ الْمَذْكُورَةِ إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَعَلَى الْعَاقِلِ الطَّالِبِ مَا عِنْدَ اللهِ تَعَالَى أَنْ لَا يَتُرُكَ الْجُمْعَةُ مَا تَأَنَّى فِعْلُهَا عَلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقُوالِ وَإِذَا لَمْ تُعْلَمْ الْجُمْعَةُ أَنَّهَا مُتَوَقِّرَةً فِيهِا الشَّرُوطُ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوْلِ وَهُو قَوْلُ الْجُدِيْدِ فَيُسَنَّ لَهُ إِعَادَةُ الظَّهْرِ بِهَا إِحْتِيَاطًا.

Jika hal tersebut sudah menjadi keputusan maka aku berpendapat, sesungguhnya kesimpulan pendapat Imam al-Syafi'i -rahimahullah- tentang bilangan jamaah yang mengabsahkan shalat Jum'at ada empat. Pendapat yang dijadikan pedoman dan merupakan qaul jadid yaitu 40 orang, dan tiga pendapat lain yang lemah dalam madzhab. Pertama, 3 orang, termasuk imam. Kedua, 4 orang termasuk imam. Ketiga, 12 orang termasuk imam. Masing-masing pendapat tersebut disertai berbagai syarat yang telah disebutkan.

Jika hal itu sudah dimaklumi, maka bagi setiap orang yang berakal dan mencari ridha Allah Swt. maka tidak boleh meninggalkan shalat Jum'at selama masih memungkinkan sesuai (pilihan) pendapat-pendapat tersebut. Dan jika shalat Jum'at tidak diketahui memenuhi syarat-syaratnya seperti pendapat pertama, yaitu *qaul jadid*, maka disunatkan mengulangi dengan shalat Zhuhur di samping shalat Jum'at karena berhati-hati.

299. Maksud Hadis "Meninggalkan Shalat Menjadi Kafir"

- S. Apakah orang yang meninggalkan shalat itu sampai menjadi kafir? Sebab ada hadits, yang artinya: "Barangsiapa meninggalkan shalat dengan sengaja, maka menjadi kufur yang nyata." (NU Cab. Pendopo SVPM)
- J. Bahwa orang yang meninggalkan shalat itu tidak sampai menjadi kafir, tetapi menjadi fasik dan harus tobat. Adapun arti hadits tersebut ditujukan kepada orang yang ingkar atau menganggap halal akan meninggalkan shalat. Demikian menurut pendapat kebanyakan ulama salaf dan khalaf seperti Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i.

²⁵ Al-Bakri bin Muhammad Syatha, al-Wus'ah wa al-Ifadah pada Sulh al-Jama'atain bi Jawaz Ta'addud al-Jum'atain, (Mesir: Mathba'ah al-Miyariyah, 1312 H), h. 25.

Keterangan, dari kitab:

1. Figh al-Sunnah26

ٱلْأَحَادِيْثُ الْمُتَقَدِّمَةُ ظَاهِرُهَا يَقْتَضِيْ كُفْرَ تَارِكِ الصَّلاَةِ وَإِبَاحَةَ دَمِّهِ وَلَكِنَّ كَثِيْرًا مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وَالْبَافِيِّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَكْفُرُ بَلْ يَفْسُقُ عَلَمَاءِ السَّلَفِ وَالشَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَكْفُرُ بَلْ يَفْسُقُ وَهُسْتَتَابُ فَإِنْ لَمْ يَتُبُ ثُولَ حَدَّا عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ لاَ يُقْتَلُ بَلْ وَيُسْتَتَابُ فَإِنْ لَمْ يَتُبُ ثُمِّلَ حَدًّا عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ لاَ يُقْتَلُ بَلْ وَيُعْبَلُ عَلَى الْجَاحِدِ وَالْمُسْتَحِلِّ لِلتَّرْكِ.

Adapun hadits yang telah lewat ("Barang siapa meninggalkan shalat dengan sengaja, maka ia telah menjadi kafir secara nyata"), pengertian zhahirnya menetapkan kekufuran orang yang meninggalkan shalat dan kebolehan untuk dibunuh. Akan tetapi banyak ulama dari kalangan salaf dan khalaf, di antaranya Imam Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i menyatakan bahwa orang yang meninggalkan tersebut tidak kafir, namun fasik dan disuruh bertobat. Jika tidak mau, maka menurut Imam Malik dan Syafi'i serta lainnya, ia harus dibunuh dalam rangka menerapkan hukum had. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, ia tidak dibunuh namun cukup dita'zir (diberi sanksi) dan dipenjara sampai mau shalat. Para ulama mengarahkan hadits pengkafiran di atas bagi orang yang mengingkari dan menganggap halal meninggalkan (kewajiban shalat).

300. Asuransi Jiwa

- S. Bagaimana hukum asuransi? Boleh ataukah tidak? (NU Cab. Pekalongan)
- J. Majlis Musyawarah memutuskan seperti yang sudah diputuskan oleh Konggres NU ke 14, yakni mengasuransikan jiwa atau lainnya di kantor asuransi itu haram hukumnya, karena termasuk judi.

Keterangan, dari kitab:

1. Risalah Syaikh Bakhit al-Muthi'i²⁷

وَأَمَّا التَّأْمِيْنُ عَلَى الْأَمْوَالِ فَفُرُوْعُهُ كَثِيْرَةٌ جِدًّا. وَلَنَتَكَلَّمُ عَلَى فَرْعِ وَاحِدٍ مِنْهَا وَهُوَ فَرْعُ الْبُيُوْتِ إِلَى أَنْ قَالَ وَلَكِنَّ هَذَا التَّعَاقُدَ تَعَاقُدُ قِمَارٍ وَلاَ نَزَاعَ. وَهُوَ أَشْبَهَ بِأَوْرَاقِ يَانَصِيْبُ الَّتِيْ تَمْكُثُ الْمَرْءَ طُوْلَ حَيَاتِهِ يَشْتَرِيْ مِنْهَا دُوْنَ أَنْ يُصَادِفَ وَرَقَةَ رِبْج. وَإِنَّمَا

²⁶ Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Cet. Ke-4, Jilid I, h. 81-82.

Muhammad Bakhit al-Muthi'i, Risalah Syaikh Bakhit al-Muthi'i pada al-Nahdhah al-Islamiyah, h. 471 dan 472.

تَعَاقُدُ تِلْكَ الشَّرِكَاتِ مَعَ زَبَائِنِهِمْ أَشْبَهَ تِلْكَ الْأَوْرَاقِ مِنْ نَاحِيَةِ الْمُتَعَاقِدِ مَوْعُوْدٌ بِضَمَانِ الْبَيْتِ إِحْتَرَقَ وَهُوَ ضَمَانُ مَحْبُوْبُ لَهُ رُبَّمَا مَكَثَ طُوْلَ حَيَاتِهِ بِدَفْعِ مَا فُرِضَ عَلَيْهِ فِي الْبَيْتِ إِحْتَرَقَ وَهُوَ ضَمَانُ مَحْبُوبُ لَهُ رُبَّمَا مَكَثَ طُوْلَ حَيَاتِهِ بِدَفْعِ مَا فُرِضَ عَلَيْهِ فِي الْبَيْدِ وَيَمُونُ وَمَا حَدَثَ لِبَيْتِهِ حَرْقُ يَأْخُذُ بِسَبَيهِ مَبْلَغَ ذَلِكَ الضَّمَانِ إِذَنْ هُوَ قِمَارُ مُقَابِلِهِ وَيَمُونُ وَمَا حَدَثَ لِبَيْتِهِ حَرْقُ يَأْخُذُ بِسَبَيهِ مَبْلَغَ ذَلِكَ الضَّمَانِ إِذَنْ هُوَ قِمَارُ خَالِكُ الضَّمَانِ إِنَنْ هُو قِمَارُ خَالِكُ اللَّهُ مَنْ الْمُقَامِرَةِ لاَ يَدْرِيْ كُلُّ مِنْهُمَا لِمَنْ تَكُونُ الْعَلَى الْمُقَامِرَةِ لاَ يَدْرِيْ كُلُّ مِنْهُمَا لِمَنْ تَكُونُ الْعَلَيْنِ حِيْنَ الْمُقَامِرَةِ لاَ يَدْرِيْ كُلُّ مِنْهُمَا لِمَنْ تَكُونُ الْعَلَى الْمَعْمُونُ وَهَكَذَا الْحَالُ هُنَا .

Adapun asuransi harta kekayaan, maka cabangnya banyak sekali, dan kita berbicara satu cabang saja yaitu asuransi rumah ... Namun akad asuransi rumah ini merupakan transaksi perjudian dan tidak diperselisihkan lagi. Ia menyerupai pembelian kupon *Ya Nashib* (lotre), yang membuat seseorang selalu membelinya sepanjang hidup tanpa memperoleh lotre kemenangan.

Transaksi perusahaan asuransi dengan para nasabahnya menyerupai kupon Ya Nashib dari sisi nasabah dijanjikan memperoleh jaminan rumah bila terbakar. Asuransi rumah yang merupakan jaminan yang diminati itu sering membuat seseorang harus membayar premi selama hidupnya kepada perusahaan asuransi sebagai imbal balik dari jaminan, dan sampai mati tidak mengalami kebakaran rumah, yang hal itu bisa membuatnya memperoleh sejumlah uang jaminan tersebut.

Dengan begitu, asuransi rumah merupakan perjudian murni. Sebab dua orang yang murni berjudi ketika melakukan perjudiannya tidak mengetahui siapa yang menang, sampai taruhan yang mereka sepakati diberikan pihak yang kalah kepada pihak yang menang. Hal seperti ini pula yang terjadi dalam akad asuransi rumah ini.

2. Risalah Syaikh Bakhit al-Muthi'i28

وَأَمَّا التَّأْمِيْنُ عَلَى الْحَيَّاةِ فَهُو أَبْعَدُ عَنِ الْعَقْلِ السَّلِيْمِ وَأَوْجَبُ لِلدَّهْشَةِ وَالاسْتِغْرَابِ فَمَا كَانَتْ الشَّرِكَةُ لِيُطِيْلُ لَهُ عُمْرًا وَمَا كَانَتْ لِتُبْعِدَ عَنْهُ قَدْرًا وَلَكِنَّهَا التَّعَلَّلاَثُ بِالْأَمَانِيِّ وَمَا أَشْبَهَهَا بِشُؤُونِ الشَّرِكَةُ لِيُطِيْلُ لَهُ عُمْرًا وَمَا كَانَتْ لِتُبْعِدَ عَنْهُ قَدْرًا وَلَكِنَّهَا التَّعَلَلاَثُ بِالْأَمَانِيِّ وَمَا أَشْبَهَهَا بِشُؤُونِ الشَّرْعَ اللَّهُ مَنْ وَالْمُسَعُوذِيْنَ سَيَقُولُ لَكَ قَائِلُهُمْ نَفْسَ الْمَقَالَةِ الْأُولَى (الْمَذْكُورَةُ فِيْ بَعْثِ التَّافُينِ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَهُمْ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُلْكَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِي الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلَةُ الللْمُلِلُولُ اللللللَّالِ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الل

²⁸ Bakhit al-Muthi'i, Risalah Syaikh Bakhit pada Majalah Nur al-Islam, (Mesir: Th. Ke-6), Juz I, h. 267.

التَّصَرُّفُ فِيْ تِلْكَ الْأَمْوَالِ مِمَّا يَجْتَمِعُ لَهَا مِنِّي وَمِنْ غَيْرِيْ فَيَتَكَوَّنُ لَهَا رَأْسُ مَالٍ عَظِيْمٍ تَسْتَغِلُّهُ فِيْمَا تَرَى مِنَ الْمَشْرُوْعَاتِ التِّجَارِيَّةِ وَمُفَاجَأَةُ الْعُطْبِ قَلِيْلَةٌ فَعَزْمُهَا نَادِرُ لاَ يُؤَثِّرُ فِيْهَا لِأَنَّ كُلَّ امْرِيْ حَرِيْصٌ عَلَى حَيَاتِهِ وَمَالِهِ وَمُحَافِظٌ عَلَيْهِمَا جُهْدًا اسْتِطَاعَتَهُ فَكُلُّ وَاحِدٍ يَعْمَلُ لِمَصْلَحَتِهَا مِنْ حَيْثُ يَعْمَلُ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ فَكِلاَ الطَّرَفَيْنِ مُسْتَفِيْدً وَنَقُولُ لَهُ لِيَكُنْ كُلُّ مَا تَقُولُ فَمَا خَرَجْتَ عَنْ أَنَّهَا مُعَامَلَةً فِيْهَا غَرْمُ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ حَتْمًا بِلاَ مُقَابِلِ وَمَا كَانَتْ الْعَدَالَةُ إِلاَّ فِي الْمُعَاوَضَةِ وَأَنْ يَكُوْنَ مِنْ كُلِّ طَرَفٍ عِوَضٌ يُعَادِلُ مَا اسْتَفَادَهُ وَأَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ الْعِوَضَيْنِ مُنَاسَبَةً تُحَقِّقَ الْمُعَادَلَةَ وَلَوِ التَّقْرِيْبِيَّةَ حَتَّى تَسْتَقِيْمَ رُوْحُ الْعَدَالَةِ. فَأَمَّا وَاحِدُ الطَّرَفَيْنِ غَارِمٌ حَتْمًا بِلاَ غَنَمٍ أَوْ غَانِمُ حَتْمًا بِلاَ غَرْمٍ فَلاَ عَدَالَةَ بَلْ هِيَ الْمُقَامَرَةُ وَالْمَيْسِرُ غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ ثَوَابًا لَمَّاعًا. وَجَاءَ عَنْ قَوْمٍ أَوْلَيْنَاهُمْ ثِقَتَنَا الْعُمْيَاءَ وَأَخَذْنَا عَنْهُمْ كُلَّ مَا قَالُوْا بِالتَّقْلِيْدِ الْأَعْمَى. وَمَا مَنْشَأُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّ جَمَاعَةً مِنْهُمْ بَهَرُوا النَّاسَ بِقُوَّةِ اسْتِخْدَامِهِمْ لِلْمَادَّةِ وَاسْتِنْبَاطِهِمْ لِقُوى الطّبِيْعَةِ مِمَّا لاَ تَغْمِطُهُمْ حَقُّهُمْ فِيْهِ فَكَانَ لِمَجْمُوعِهِمْ فِي التَّفُوسِ عِزَّةُ الْغَلَبَةِ فَأَسْلَمَ النَّاسُ الْقِيَادَ لَهُمْ شَأْنَ كُلِّ غَالِبٍ مَعَ كُلِّ مَغْلُوبٍ وَإِلاَّ فَمَتَى وَزَنْتَ تِلْكَ التَّصَرُّفَاتِ بِمِيْزَانِ الْعَقْلِ السَّلِيْمِ وَالنَّقْدِ النَّزِيْهِ وَجَدْتَ ضَرَرَهَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهَا وَهَكَنَا شَأْنُ أَغْلَبِ الْمَضَارِّ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا لِمَصْلَحَةِ الْمُجْتَمِعِ ضَرَرُهَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهَا حَتَّى أَنَّ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَهُمَا مَا هُمَا فِي الضَّرَرِ لَمْ يَخْلُ عَنْ نَفْعِ مَا وَلَكِنَّهُ ضَيْلٌ إِذَا قِيْسَ بِكِبَرِ ضَرَرِهِمَا كَمَا قَالَ جَلَّ شَأْنُهُ: .. يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيْهِمَا إِثْمُ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. وَشَأْنُ التَّشْرِيْعِ الصَّحِيْحِ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى الْمُوَازَنَةِ بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ فَمَا غَلَبَ نَفْعُهُ أَحَلَّهُ وَمَا غَلَبَ ضَرَرُهُ حَرَّمَهُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ.

Adapun Asuransi Jiwa maka ia jauh dari akal sehat, sangat membingungkan dan aneh. Maka tidak ada perusahaan asuransi yang mampu memperpanjang umur dan menjauhkan takdir. Ia hanya memberikan iming-iming keamanan dan semisalnya seperti yang dilakukan oleh para Dajjal dan tukang.

Para petugas mereka akan berkata kepada Anda sama seperti pernyataan yang telah disebutkan dalam pembahasan tentang asuransi harta benda atau pernyataan yang sejenisnya. Ia akan berkata: "Sesungguhnya ketika aku membayar satu premi, jika aku mendadak meninggal, maka ahli warisku berhak mendapatkan apa yang telah aku jaminkan (di perusahaan asuransi) ketika aku masih hidup. Dan itu berarti, menadi pemasukan dan pelipur lara bagi ahli waris setelah kematianku. Dan jika aku tetap hidup tempo yang telah ditetapkan,

maka aku berhak memperoleh kembali semua yang telah dibayarkan dan keuntungamnya. Dengan begitu, maka aku beruntung dalam dua hal tersebut (mati atau hidup). Begitu halnya perusahaan asuransi, ia berhak mengelola keuangan yang dihimpun dariku dan dari orang lain, sehingga menjadi modal yang besar yang dikelola sebagaimana yang Anda lihat berbentuk proyek-proyek niaga. Resiko kerugian sangat sedikit, karena masing-masing orang sangat berkeinginan menjaga hidup dan hartanya, dan akan berusaha semampunya. Masing-masing akan berkarya bagi kepentingan dirinya, sehingga masing-masing pihak beruntung."

Kami katakan kepada peserta asuransi tersebut, bahwa semestinya setiap yang Anda ucapkan tidak keluar dari suatu transaksi yang mengandung klaim denda terhadap salah satu pihak secara wajib tanpa suatu pengganti yang sepadan dengan keuntungan yang mungkin diraupnya. Dan semestinya dari dua pihak terdapat pengganti yang pantas sehingga mampu mewujudkan keadilan walaupun relatif, sehingga ruh keadilan terwujud. Adapun bila salah satu pihak saja yang menanggung kerugian tanpa mendapat imbalan baliknya, atau menerima keuntungan tanpa ada tanggung jawab memberi kompensasi, maka keadilan tidak ada, bahkan itu merupakan gambling dan perjudian.

Sebagian orang menyatakan: "Kami memberikan kepercayaan penuh kepada mereka dan dari mereka mengambil semua yang mereka katakan dengan taklid buta (tanpa pertimbangan apapun)." Maka, sesungguhnya sekelompok dari mereka telah membingungkan orang-orang dengan kekuatan materi dan eksplorasi psikis yang tidak bisa ditutup-tutupi. Lalu mereka berhasil menguasai jiwa orang lain, sehingga orang lain pun menjadi tunduk berpasrah diri sebagaimana kondisi pemenang terhadap orang yang dikalahkannya. Jika tidak, maka bila Anda menimbang semua asuransi itu dengan neraca akal yang sehat dan hati yang bersih, maka Anda akan mendapatkan bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Begitu halnya semua hal yang berbahaya yang dilarang bagi kepentingan umum, maka Anda akan mendapatkan bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Sehingga minuman keras dan judi, keduanya dalam kemudharatannya tidak lepas dari adanya manfaat. Hanya saja manfaat tersebut tidak akan berarti jika dibandingkan dengan bahayanya. Sebagaimana firman Allah SWT: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya." (al-Baqarah: 219) Syari'ah Allah Swt. yang benar itu mesti berpedoman pada adanya keseimbangan antara keuntungan dan bahaya. Jika keuntungannya lebih besar, maka Allah Swt. akan menghalalkannya. Sedangkan jika lebih besar bahayanya, maka Allah Swt. akan mengharamkannya.

301. Membagi Waris Secara Gono Gini

- S. Mohon ditinjau kembali Keputusan Muktamar NU ke 1 soal nomor 6 tentang membagi waris secara gono-gini. Apakah itu sudah mengikuti ketentuan Allah atau belum? (NU Cab. Kudus)
- J. Sesudah keputusan tersebut dibahas kembali, maka Majlis Musyawarah sepakat bahwa memberi gono-gini diperbolehkan dengan jalan perdamaian di antara para ahli waris, tidak atas ketentuan dari Allah. Sedang perdamaian mereka hendaknya menurut yang diterangkan dalam hamisy (pinggir) kitab Syarqawi bab Syirkah. Sehingga tidak boleh dilakukan gono-gini tanpa mendapat persetujuan sebagian ahli waris atau di antara ahli warisnya terdapat mahjur. Lihat Ahkamul Fuqaha buku ini, soal nomor 6.[]

.# ...

KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR PENGURUS BESAR SYURIAH NAHDLATUL ULAMA KE-2 Di Jakarta Pada Tanggal 1 - 3 Jumaadil Ulaa 1381 H. / 11 - 13 Oktober 1961 M.

302. Hukum Land Reform
303. Haul (Peringatan Wafat Ulama Besar)
304. Talqin Mayit Sesudah Dikubur
305. Salam Sesudah Bicara, Mendengar Salam dari Radio dan Salam dengan Tambahan "Walaikunna"
306. Memperdagangkan Barang Waqaf
307. Kewakafan Alat-alat Mesjid yang Sudah Rusak
308. Berjabatan Tangan Antara Laki-laki dan Perempuan Tanpa
Tutup Ketika Baiat

302. Hukum Land Reform

- S. Apakah keputusan diharamkannya land reform kecuali dalam keadaan dharurat itu benar atau tidak?
- J. Keputusan tersebut sudah benar. Dan keputusan tersebut diperkuat oleh keterangan dari kitab-kitab.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Islam wa Hajah al-Insan Ilaih1

وَرَوَى الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ لَمَا فَتَحَ اللهُ الْعِرَاقَ وَالشَّامَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنُ آيَامَ عُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرَادَ فَرِيْقُ مِنَ الصَّحَابَةِ قِسْمَةَ الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهَا بَيْنَ أَصْحَابِ الْحُقِّ مِنَ
الْمُسْلِمِيْنَ الْفَاتِحِيْنَ. لَكِنَّ الْفَارُوقَ رَأَى أَنْ يَتُرُكَ الْأَرْضَ بِيَدِ مُلَّا كِهَا عَلَى أَنْ يَدْفَعُوا
الْمُسْلِمِيْنَ الْفَاتِحِيْنَ. لَكِنَّ الْفَارُوقَ رَأَى أَنْ يَتُرُكَ الْأَرْضَ بِيدِ مُلَّاكِهَا عَلَى أَنْ يَدْفَعُوا
الْمُسْلِمِيْنَ الْفَاتِحِيْنَ الْمُعْلَمِينَ جَمِيْعًا وَكَانَ هَذَا الرَّأَيُ تَوْفِيْقًا مِنَ اللهِ
الْحُورَاجَ وَالْجِرْنِيَةَ لِلْمُسْلِمِينَ مَعْ وَيُعْمِينِهِ لَهُ مِنْ اِقْتِدَاءِ الْغَيْرِ عَلَيْهِ بِشَرْطِ أَنْ
الْحُقَّ لِصَاحِبِهِ وَيُبِيْحُ لَهُ السَيْعُمَالَهُ كَمَا يُرِيْدُ وَيَحْمِيْهِ لَهُ مِنْ اِقْتِدَاءِ الْغَيْرِ عَلَيْهِ بِشَرْطِ أَنْ
الْحُقَّ لِصَاحِبِهِ وَيُبِيْحُ لَهُ السَيْعُمَالَهُ كَمَا يُرِيْدُ وَيَحْمِيْهِ لَهُ مِنْ اِقْتِدَاءِ الْغَيْرِ عَلَيْهِ بِشَرْطِ أَنْ
الْحُقَّ لِصَاحِبِهِ وَيُبِيْحُ لَهُ السَيْعُمَالَة كَمَا يُرِيْدُ وَيَحْمِيْهِ لَهُ مِنْ اِقْتِدَاءِ الْغَيْرِ عَلَيْهِ بِشَرْطِ أَنْ
الْحُقَلِقِ الْمُعْرِورَ وَلَاضِرَارَ ثُمَّ قَالَ فِي تَطْبِيْقِهَا تَحْقِيْقُ الْحَورَارَ وَلَاضِرَارَ ثُمْ قَالَ فِي تَطْبِيْقِهَا تَحْقِيْقُ الْفَاعِدَةُ لَا مُنْ مَا لَوْنَ صَاحِبَ الْحَقِّ فِي الْسَيْعُمَالِهِ سَيَّدُ لاَ مُسَاحِبِ الْحُقِّ فِي الْسَيْعُمَالِهِ مِنَ الْأَصْرَارِتِ الَّيْ تَجْيِقُ بِغَيْرِهِ .

Al-Imam Abu Yusuf meriwayatkan, ketika Allah Swt. menaklukkan Iraq dan Syam bagi umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khaththab, sebagian tentara sahabat yang ikut penaklukan menginginkan pembagian tanah dan apa yang ada di atasnya bagi mereka yang berhak, yaitu muslimin yang mengikuti penaklukan tersebut. Namun Khalifah Umar al-Faruq berpendapat untuk membiarkan tanah-tanah tersebut tetap berada di tangan pemiliknya dengan syarat mereka harus membayar kharaj (upeti sebagai imbal balik atas diperbolehkannya non muslim berdomisili di wilayah setelah ditaklukkan muslimin) dan jizyah (upeti bagi non muslim dzimmi sebagai konsekuansi atas tidak diperanginya mereka) bagi kepentingan umum umat Islam secara keseluruhan. Pendapat ini merupakan pertolongan dari Allah Swt. kepada Khalifah Umar sebagaimana yang biasa Allah Swt. berikan kepadanya di berbagai kesempatan

324

Dr. Muhammad Yusuf Musa, Al-Islam wa Hajah al-Insan Ilaihi, (Kuwait: Maktabah al-Falah, 1398 H/1978 M), Cet. Ke-3, h. 199-200.

... Sesungguhnya fiqh Islam menjaga hak bagi pemiliknya dan memperbolehkan penggunaannya sebagaimana yang diinginkan, dan melindunginya dari gangguan pihak lain, dengan syarat tidak mengganggu pihak lain dengan penggunaan hak tersebut oleh pemiliknya dengan gangguan/bahaya yang lebih besar dari batas keleluasaan pemilik hak. Dan hal itu merupakan aplikasi dari kaidah: "La dharara wa la dhirara" (Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan pihak lain). Lalu Abu Yusuf berkata: "Dalam penerapan kaidah tersebut terdapat pengejawantahan kemaslahatan bagi pemilik hak dan orang lain." Beliau lalu berkata lagi: "Sungguh pemilik hak itu merupakan penguasa yang tidak diminta pertanggungjawaban atas bahaya yang menimpa orang lain akibat penggunaan atas haknya itu."

2. Al-Islam wa Audha'una al-Siyasiyyah2

(حُرِّيَّةُ التَّمْلِيْكِ) وَقَدْ أَطْلَقَ الْإِسْلاَمُ الْحُرَّيَّةَ لِلْبَشَرِفِي أَنْ يَتَمَلَّكُواْ مَا يَشَاؤُنَ مِنَ الْعِقَارِ وَالْمَنْقُولِ وَلْمَاتِهِ فِي مِلْكِيَّةِ الْمَالِ. فَلِكُلِّ إِنْسانِ أَنْ يَمْلِكَ أَيَّ قَدْرٍ شَاءَ مِنَ الْأَمْوَالِ عَلَى اخْتِلاَفِ أَشْكَالِهَا وَأَنْوَاعِهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ الاَّمِلْكِيَّةَ الْإِنْتِقَاعِ وَعَلَى أَنْ يَنْتَفِعَ مِنْهَا بِقَدْرٍ حَاجَاتِهِ فِي غَيْرِ سَرَفٍ وَلاَ تَقْتِيْرٍ وَعَلَى أَنْ يُؤدِّي مَا يُوجِبُهُ الْإِسْلاَمُ لِللَّهُ مِنْ مُثُونِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِيْ بَيَّنَّاهُ فِيْ صَدْرِ الْإِسْلاَمِ.

(Kemerdekaan Hak Milik) Islam secara mutlak memberi kebebasan manusia untuk memiliki tanah, harta yang bisa dipindah dan semua harta berharga yang mereka inginkan dalam batas-batas pandangan Islam tentang kepemilikan harta.

Setiap orang berhak untuk memiliki seberapapun jumlah harta yang diinginkan dengan beragam bentuk dan macamnya, dengan catatan bahwa ia (sebenarnya) hanya memiliki hak guna dan harus mempergunakannya sesuai dengan kebutuhannya tanpa berlebihan, dan harus memenuhi hak -hak orang lain yang ditetapkan Islam sebagaimana kami jelaskan dalam kitab Shadr al-Islam.

3. Hasyiyah Al-Qulyubi3

(فَرْعُ) مِنَ الْإِكْرَاهِ بِحَقِّ إِكْرَاهُ الْحَاكِمِ مَنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ عَلَى بَيْعِهِ عِنْدَ حَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ إِنْ بَقِيَ لَهُ قُوْتُ سَنَةٍ. قَالَ شَيْخُنَا وَهَذَا خَاصٌّ بِالطَّعَامِ فَرَاجِعْهُ.

² Abdul Qadir 'Audah, Al-Islam wa Audha'una al-Siyasiyyah, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981), h. 272.

³ Syihabuddin al-Qulyubi, Hasyiyah al-Qulyubi, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1956), Cet. Ke-3, Juz II, h. 156.

Di antara paksaan dengan kebenaran adalah paksaan hakim kepada orang yang memiliki makanan ketika orang-orang sangat membutuhkan selama ia masih memiliki bahan pokok untuk kebutuhan setahun. Guruku berkata: "Hal ini terbatas pada makanan saja, maka silakan merujuknya."

303. Haul (Peringatan Wafat Ulama Besar)

- S. Apakah keputusan Konggres ke-2 Jam'iyyah Thariqah Mu'tabarah tentang peringatan wafat (haul) itu termasuk mengikuti Sunnah Rasul Allah dan Khulafaur Rasyidin? Apakah keputusan tersebut benar atau tidak?
- J. Sambil membenarkan keputusan tersebut, maka kebiasaan peringatan wafat (haul) yang berlaku itu mengandung tiga persoalan:
- a. Mengadakan ziarah kubur dan tahlil.
- Mengadakan hidangan makanan dengan niat sedekah dari almarhum.
 Kedua persoalan ini sudah jelas tidak terlarang.
- c. Mengadakan bacaan al-Qur'an dan nasehat agama. Kadang-kadang diadakan penerangan tentang sejarah orang yang diperingati, untuk dijadikan suri tauladan.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah4

وَيَحْرُمُ النَّذُبُ عَلَى الْبُكَاءِ كَمَا حَكَاهُ فِي الأَذْكَارِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمَجْمُوْعِ وَصَوَّبَهُ الْأَسْنَوِيُّ إِلَى أَنْ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَّمِ أَنَّ بَعْضَ الْمَرَافِي حَرَامٌ كَالنَّوْجِ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّبَرُم بِالْقَضَاءِ اللَّا إِذَا ذُكِرَ مَنَاقِبُ عَالِم وَرَعِ أَوْ صَالِحٍ لِلْحَتِّ عَلَى سُلُوكِ طَرِيْقَتِهِ وَحُسْنُ الظَّنِّ بِهِ بَلْ هِيَ اللَّا إِذَا ذُكِرَ مَنَاقِبُ عَالِم وَرَعِ أَوْ صَالِحٍ لِلْحَتِّ عَلَى سُلُوكِ طَرِيْقَتِهِ وَحُسْنُ الظَّنِّ بِهِ بَلْ هِي اللَّهِ إِنْ الْمُرَاقِينِ وَمِنْ ثَمَّ مَا زَالَ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَعُيْرِهِمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ يَفْعَلُونَهَا عَلَى مَمَرً الْإِعْصَارِ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ .

Dan haram meratapi orang mati dengan tangisan seperti penuturan al-Nawawi dalam kitab al-Adzkar, beliau mantap pula dengan hukum tersebut dalam kitab al-Majmu', dan dibenarkan al-Asnawi ... Hukum haram tersebut diperkuat pendapat Ibn Abdissalam: "Sungguh sebagian ratapan itu haram, seperti meratapi (dengan tangisan), karena berarti tidak rela dengan takdir Allah Swt., kecuali bila disebutkan manaqib (sejarah hidup) orang alim yang wirai atau yang saleh untuk mendorong agar mengikuti pola hidupnya, dan berbaik sangka kepadanya. Bahkan

326

Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra, (Mesir: al-Maktabah al-Islamiyah, t. th.), Jilid II, h. 18.

dalam konteks tersebut, meratapi mayit lebih menyerupai amal ketaatan karena kebaikan yang muncul darinya. Oleh sebab itu, banyak sahabat Nabi Saw. dan ulama selainya selalu melakukannya sepanjang masa tanpa ada yang mengingkari.

304. Talqin Mayit Sesudah Dikubur

- S. Apakah talqin mayit sesudah dikubur itu terdapat dalil dari hadits dan qaul ulama yang mu'tabar atau tidak?
- J. Bahwa mentalqinkan mayit yang baru dikuburkan itu terdapat dalil dari hadits dan pendapat ulama yang terbilang.

Imam Nawawi menyatakan bahwa sanad hadis talqin yang diriwayatkan oleh Abi Umamah adalah dha'if. Akan tetapi kedha'ifannya sudah disokong dengan hadits-hadits lain, seperti tatsbit (tetap dan tabah dalam menjawab pertanyaan malaikat) dan hadits wasiat Amr bin Ash (tentang memberi hiburan ketika ditanya malaikat).

Serta arti hadis "mautakum" dengan orang yang sudah mati menurut pengertian hakekat, bukan orang yang akan mati menurut pengertian majaz. Menurut mazhab Syafi'i yang kuat bahwa talqin itu hukumnya sunat. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah al-Qadhi Husain, al-Mutawalli, Nashr al-Muqaddashi, al-Rafi'i dan lain-lain. Adapun dalil hadis serta qaul ulama tercantum dalam kitab.

Keterangan, dari kitab:

1. Asna al-Mathalib⁵

(فَرْعُ يُسْتَحَبُّ) لِمَنْ حَضَرَ دَفْنَ الْمَيْتِ أَوْ عَقِبَهُ أَنْ يَقِفَ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ الدَّفْنِ وَالْمَأْثُورِ) ... قَالَ وَيَسْتَغْفِرَ) الله وَيَدْعُو (لَهُ) ... (وَأَنْ يُلَقِّنَ الْمَيْتُ) ... (بَعْدَ الدَّفْنِ وِالْمَأْثُورِ) ... قَالَ النَّوْرِيّ وَهُوَ ضَعِيْفُ لَكِنَّ أَحَادِيْتَ الْفَضَائِلِ يُتَسَامَحُ فِيْهَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَدْ النَّوْرِيّ وَهُوَ ضَعِيْفُ لَكِنَّ أَحَادِيْتِ الصَّحِيْحَةِ كَقَوْلِهِ عَلَيْ أَسْأَلُوا الله لَهُ التَّشْمِيْتَ، وَوَصِيَّةُ عَمْرَو بْنِ الْعَاصِ السَّابِقَةُ. قَالَ بَعْضُهُمْ وَقَوْلُهُ عَلَيْ لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لاَ إِلَهَ النَّهُ دَلِيْلُ عَلَيْهِ لِأَنَّ حَقِيْقَةَ الْمَيِّتِ مَنْ مَاتَ. وَأَمَّا قَبْلَ الْمَوْتِ وَهُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْأَصْحَاتُ كَمَا مَ قَنْ فَمَحَانُ.

(Sub Masalah) Disunnahkan bagi orang yang menghadiri penguburan

⁵ Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), Jilid I, h. 329-330.

mayit atau setelahnya berdiri di atas kuburan setelah menguburnya itu, memohonkan ampunan (istighfar) dan berdoa kepada Allah untuknya ... dan mentalqin mayit ... setelah dikubur dengan talqin yang ma'tsur (dikutip dari rasulullah Saw.).

Imam Nawawi berkata: "Hadits riwayat al-Thabrani tentang talqin itu dha'if, namun hadits-hadits fadhail (yang berkaitan dengan amal kebajikan) itu ditolelir para ulama. Hadits tersebut telah diperkuat oleh hadits-hadits lain yang sahih, seperti: "Is aluu allaaha lahu al-tasbiita" (Mohonlah kalian kepada Allah Swt. agar mayit tetap dalam keimanan) dan wasiat Amr bin Ash yang telah lewat (agar setelah dikuburkan beliau ditemani selama kurang lebih waktu penyembelihan onta dan pembagian dagingnya, sehingga beliau merasa nyaman)."

Sebagian ulama berkata: "Sabda Nabi Saw.: "Laqqinuu mautaakum laa ilaaha illallaah." (Bacakanlah laa ilaaha illallah pada orang mati kalian), merupakan dalil talqin. Sebab makna hakikat orang mati (dalam redaksi hadits tersebut) adalah orang yang sudah mati. Sedangkan talqin yang dilakukan sebelum kematian, seperti pendapat para Ashhab yang telah lewat itu merupakan makna majaznya.

2. Dalil al-Falihin6

وَمُعْتَمَدُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ سُنَّةُ التَّلْقِيْنِ بَعْدَ الدَّفْنِ كَمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ جَمَاعَاتٍ مِنَ الْأَصْحَابِ. قَالَ وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ الْقَاضِيْ حُسَيْنٌ وَالْمُتَوَلِّيُّ وَالشَّيْخُ نَصُرُ الْمُقَدَّسِيُّ وَالرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ. وَنَقَلَ الْقَاضِيْ حُسَيْنٌ عَنْ أَصْحَابِنَا مُطْلَقًا. وَقَالَ ابْنُ الصَّلاَجِ هُوَ الَّذِيْ نَخْتَارُهُ وَنَعْمَلُ بِهِ. وَقَالَ السَّخَاوِيُّ وَقَدْ وَافَقَنَا الْمَالِكِيَّةُ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ الصَّلاَجِ هُوَ الَّذِيْ نَخْتَارُهُ وَنَعْمَلُ بِهِ. وَقَالَ السَّخَاوِيُّ وَقَدْ وَافَقَنَا الْمَالِكِيَّةُ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ الصَّلاَجِ هُو اللَّذِيْ خَعْلَ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ أَيْضًا وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِهِ مِنْهُمْ الْقَاضِيْ أَبُو بَكُمْ الْعِزِيُّ. قَالَ وَهُو فِعْلُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالْأَخْيَارِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَنَا بِقُرْطُبَةَ وَأَمَّا الْحُنفِيَّةُ فَاخْتَلَفَ فِيْهِ وَالصَّالِحِيْنَ وَالأَخْيَارِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَنَا بِقُرْطُبَةَ وَأَمَّا الْحُنفِيَّةُ فَاخْتَلَفَ فِيْهِ مَلَامَةً وَأَمَّا الْحُنفِيَّةُ الْمُحَمِّلُ مِنْ كُتَافِي الْمُحِيْطِ مِنْ كُتَبِهِمْ وَكَذَا اخْتَلَفَ فِيْهِ الْحُتَابِلَةُ اه مُلَخَصًا

Pendapat yang menjadi pedoman mazhab al-Syafi'iyah adalah kesunnahan talqin setelah penguburan jenazah. Seperti kutipan penulis (al-Nawawi) dalam kitab al-Majmu' dari para Ashhab. Di antara ulama' yang jelas-jelas yang menyatakan kesunahan talqin adalah al-Qadhi Husain, al-Mutawalli, Nashr al-Muqaddasi, al-Rafi'i dan selainnya. Al-Qadhi Husain mengutipnya dari para Ashhab secara mutlak. Ibn Shalah berkata: "Itulah yang kami pilih dan kami amalkan." Al-Sakhawi berkata: "Dan ulama madzhab

⁶ Ibn 'Allan al-Shiddiqi, Dalil al-Falihin, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid III, h. 397.

Malikiyah sependapat dengan kita atas kesunahan talqin. Dan sebagian ulama yang jelas-jelas menyatakan kesunahan talqin dari golongan mereka adalah al-Qadhi Abu Bakr al-'Izzi. Ia berkata: "Talqin adalah amalan penduduk Madinah, pada shalihin dan orang-orang baik. Dan begitu pula yang di amalkan di Cordova (kota di Spanyol) berdasar madzhab Malikiyah. Sementara para tokoh ulama Hanafiyah berselisih tentang talqin, seperti dalam salah satu kitab mereka al-Muhith. Begitu pula para ulama Hanabilah, mereka berbeda pendapat tentangnya.

Catatan: Dalam penetapan hukum tersebut ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa yang menjadi dalilnya ialah hadis Abi Umamah, tetapi tidak sebagai hadis dha'if, melainkan sebagai hadis Hasan ligharih, sebab sudah disokong dengan hadis-hadis lain sebagai syahid (al-Jami').

3. I'anah al-Thalibin7

(قَوْلُهُ وَتَلْقِيْنُ بَالِغِ) ... أَيْ وَيُنْدَبُ تَلْقِيْنُ بَالِغِ إِلَىٰ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الدِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ. وَأَحْوَجُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى التَّذْكِيْرِ فِيْ هَذِهِ الْحَالَةِ .

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Dan mentalqin orang baligh") ... maksudnya disunnahkan mentalqin orang baligh ... Hal itu karena firman Allah Swt.: "Dan berilah peringatan, karena sungguh peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman." (al-Dzariyaat: 55). Dalam kondisi inilah seorang hamba sangat butuh diperingatkan.

4. Nihayah al-Muhtaj8

يُسْتَحَبُّ تَلْقِينُ الْمَيِّتِ الْمُكَلِّفِ بَعْدَ تَمَامِ دَفْنِهِ لِخَبْرِ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوْلَى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ فَإِذَا انْصَرَفُوا أَتَاهُ مَلَكَانِ الْحَدِيثَ فَتَأْخِيرُ تَلْقِينِهِ لِمَا بَعْدَ إِهَالَةِ النَّرَابِ أَقْرَبُ إِلَى حَالَةِ سُؤَالِهِ فَيَقُولُ لَهُ يَا عَبْدَ اللهِ ابْنَ أَمَةِ اللهِ أَذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ إِهَالَةِ التُرَابِ أَقْرَبُ إِلَى حَالَةِ سُؤَالِهِ فَيَقُولُ لَهُ يَا عَبْدَ اللهِ ابْنَ أَمَةِ اللهِ أَذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنْ اللهُ ثَنَا اللهِ وَأَنَّ اللهِ وَأَنَّ اللهِ وَأَنَّ النَّارَ حَقَّ وَأَنَّ النَّارَ حَقَّ وَأَنَّ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

Disunahkan mentalqin mayit mukallaf setelah selesai dikuburkan, berdasar hadits: "Sesungguhnya seorang hamba ketika sudah diletakkan di kuburnya dan para pengiringnya berpaling pulang, ia mendengar suara alas kaki mereka.

⁷ Al-Bakri bin Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin*, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid II, h. 140.

⁸ Syamsuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1938), Jilid III, h. 40.

Jika mereka sudah pergi, lalu ia didatangi oleh dua malaikat ..." Sempurnakanlah hadits ini sampai selesai."

Mengakhirkan pembacaan talqin setelah ratanya tanah (selesai penguburan) itu lebih mendekati waktu si mayit diberi pertanyaan oleh malaikat. Maka si pentalqin membacakan untuknya: "Wahai abdullah bin amatillah (Wahai ... anak dari perempuan ...). Ingatlah engkau kondisi di saat kamu keluar dari alam dunia, yaitu bersaksi bahwa sungguh tiada yang berhak disembah selain Allah dan sungguh Muhammad adalah Rası lullah. Sungguh surga itu nyata, neraka itu nyata, kebangkitan dari kubur i' 1 nyata, hari kiamat pasti akan terjadi tanpa diragukan lagi, sungguh Allah Swt. akan membangkitkan manusia dari kuburnya, sungguh engkau setuju dengan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad Saw. sebagai nabi, al-Qur'an sebagai pemimpin, Ka'bah sebagai kiblat dan orang-orang mukmin sebagai saudara."

5. Kanz al-Ummal9

قَالَ أَبُوْ أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُ إِذَا أَنَا مِتُ فَاصْنَعُوا بِنِ كَمَا أَمَرِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَصْنَعَ بِمَوْتَانَا.
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِذَا مَاتَ أَحَدُ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَسَوَّيْتُمْ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ فَلْيَقُمْ أَمْرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: إِذَا مَاتَ أَحَدُ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَسَوَّيْتُمْ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ فَلْيَقُمْ أَحْدُكُمْ عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمَّ لِيَقُلُ يَا فُلاَنُ ابْنُ فُلاَنَةً فَإِنَّهُ يَقُولُ أَرْشِدْنَا يَرْحَمُكَ اللهُ وَلَكِنْ اللهُ وَلَكِنْ لاَ اللهُ وَلَكِنْ لاَ اللهُ وَلَكِنْ لاَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

Abu Umamah al-Bahili berkata: "Jika aku mati, maka perlakukanlah diriku seperti perlakuan yang Rasulullah Saw. perintahkan kepada kita untuk orang-orang mati kami." Rasulullah Saw. memerintah kami, beliau bersabda: "Bila seseorang dari kalian mati, maka ratakanlah tanah di kuburnya. Lalu hendaknya salah seorang di antara kalian berdiri di atas kuburnya kemudian berkata: "Wahai Fula; putra si Fulanah'. Sungguh si mayit akan menjawab Mati akan menjawav: "Berilah aku petunjuk, semoga Allah Swt. merahmatimu.", namun kalian (orang-orang yang mentalqin) tidak merasa (tidak mendengar) jawaban si mayit tersebut. Kemudian si pentalqin hendaklah berkata: "Ingatlah engkau kondisi di saat kamu keluar dari alam dunia, yaitu bersaksi bahwa sungguh tiada yang berhak disembah selain Allah dan sungguh Muhammad adalah hamba dan RasulNya. Sungguh engkau setuju dengan Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad Saw. sebagai nabi, al-

⁹ Ali bin Hisami ddin al-Hindi al-Burhanfuri, Kanz al-Uammal fi Sunan al-Aqwal wa al-Afal, (Beir at: Muas asah al-Risalah, 1989), Jilid XV, h. 737.

Qur'an sebagai pemimpin." Maka (bila kamu berkata begitu, sungguh malaikat Munkar dan Nakir saling bertarik tangan seraya berkata: "Mari kita pergi."

305. Salam Sesudah Bicara, Mendengar Salam dari Radio dan Salam dengan Tambahan "Walaikuma"

- S. Bagaimana hukumnya:
- a. Salam sesudah bicara? Contohnya: Saudara-saudara yang terhormat, "Assalamu'alaikum."
- b. Mendengar salam dari radio atau tape recorder/gramaphone?
- c. Salam dengan tambahan "Walaikunna". Jadi berbunyi "Assalamu'alaikum Walaikunna Warahmatullahi Wabarakatuh," karena yang hadir terdapat wanitanya.
- J. a. Salam yang didahului dengan pembicaraan tidak wajib dijawab karena sudah lewat waktunya.
 - b. Mendengar salam dari radio wajib menjawab, sebab suara radio dianggap sebagai suara asli dari orang yang memberi salam. Adapun mendengar salam dari tape recorder/gramaphone tidak wajib menjawab, sebab dianggap sebagai suatu benda-benda padat yang tidak berakal.
 - c. Salam dengan tambahan "Walaikunna" itu tidak sesuai dengan yang warid/berlaku dari Nabi Saw.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Siraj al-Munir¹⁰

رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ التَّبِيُّ ﷺ: السَّلاَمُ قَبْلَ الْكَلاَمِ قَالَ الْعَزِيْزِيُّ يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُعْنَى يُنْدَبُ السَّلاَمُ قَبْلَ الْكَلاَمِ لِأَنَّهُ تَحِيَّةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ. فَإِذَا شَرَعَ الْمُقْبِلُ فِي الْكَلاَمِ لَأَنَّهُ تَحِيَّةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ. فَإِذَا شَرَعَ الْمُقْبِلُ فِي الْكَلاَمِ فَاتَ عَلَهُ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ وَالسَّنَةُ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ قَبْلَ كُلِّ كَلاَمٍ. إه

Al-Tirmidzi meriwayatkan dari Jabir, Nabi Saw. bersabda: "Ucapan salam itu sebelum berbicara." Al-Azizi berkata: "Hadis itu bisa bermakna; disunahkan salam sebelum berbicara, karena salam merupakan penghormatan bagi umat ini. Al-Nawawi berpendapat: "Sunnahnya adalah seorang Muslim memulai salam sebelum setiap pembicaraan.

2. Al-Siraj al-Munir¹¹

¹⁰ Ali al-Azizi, al-Siraj al-Munir, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1957), Cet. Ke-3, Jilid II, h. 363.

¹¹ Ali al-Azizi, al-Siraj al-Munir, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1957), Cet. Ke-3, Jilid III,

رَوَى الطَّبْرَانِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: مَنْ بَدَأَ الْكَلاَمَ قَبْلَ السَّلاَمِ فَلاَ تَجِيْبُوهُ, فَيْهُ حَثْ عَلَى السَّلاَمِ فَلاَ تَجِيْبُوهُ,

Al-Thabrani meriwayatkan dari Ibn Umar Ra. ia berkata: "Nabi Saw. bersabda: "Barangsiapa memulai berbicara sebelum salam, maka janganlah kalian jawab." Dalam hadits ini terdapat anjuran mengucapkan salam dan mencegah dari meninggalkannya.

3. Dalil al-Falihin12

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُوْلَ الْمُبْتَدِئُ بِالسَّلاَمِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَخْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ فَيَأْتِيْ بِضَمِيْرِ الْجَمْعِ وَإِنْ كَانَ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاحِدًا

(وَإِنْ كَانَ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاحِدًا) ذَكَّرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى جَلِيْلاً أَوْ حَقِيْرًا.

Disunatkan bagi yang memulai salam untuk mengucapkan *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*. Maka ia sunnah menggunakan *dhamir jama'* (عَلَيْطَة) atas kalian) walaupun orang yang diberi salam hanya satu.

(-Ungkapan al-Nawawi:- "Walaupun orang yang diberi salam hanya satu.") Maksudnya baik lelaki atau wanita, dan orang terhormat atau orang biasa.

306. Memperdagangkan Barang Wakaf

- S. Apakah boleh memperdagangkan barang wakaf?
- J. Kalau yang dimaksud barang wakaf itu barang hasil dari wakaf untuk mesjid yang lebih dari kebutuhan mesjid, maka hukumnya menurut fatwa sebagian ulama akhir adalah boleh (tidak dilarang) diperdagangkan. Kalau tidak demikian, artinya mauquf 'alaih bukan mesjid, atau tidak lebih dari kebutuhan mauquf 'alaih maka haram diperdagangkan.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah Umairah¹³

(فَرْعُ) فَضُلَ مِنَ الْوَقْفِ شَيْءٌ هَلْ يَجُوْزُ الْإِتِّجَارُ فِيْهِ أَفْتَى الْمُتَأَخِّرُوْنَ بِالْجَوَازِ إِنْ كَانَ لِلْمُسَجِدِ وَإِلاَّ فَلاَ .

332

h. 344. Lihat keputusan Muktamar dalam masalah soal nomor 162 di buku ini.

¹² Muhyiddin al-Nawawi dan Ibn 'Allan al-Shiddiqi, *Riyadh al-Shalihin* dan *Dalil al-Falihin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid III, h. 335.

¹³ Syihabuddin Ahmad al-Barlisy/Umairah, Hasyiyah Qulyubi-Umairah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1375 H/1956 M), Juz III, h. 110.

Bila ada sejumlah harta wakaf tersisa, apakah boleh memperjualbelikannya? Para ulama *mutaakhkhirun* berfatwa dengan memperbolehkannya, bila sejumlah harta wakaf itu milik masjid. Bila bukan, maka tidak boleh.

307. Kewakafan Alat-alat Mesjid yang Sudah Rusak

- 307. S. Bagaimana hukumnya alat-alat mesjid yang sudah rusak seperti tikar dan pelepah kurma? Apakah masih tetap kewakafannya/kemesjidannya, ataukah tidak?
- J. Alat-alat mesjid yang sudah rusak yang tidak patut dipakai lagi kecuali dibakar, itu masih tetap hukum kewakafannya, tetapi boleh dijual kalau kemaslahatannya hanya dijual, kecuali menurut segolongan ulama.

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin 14

وَيَجُوْرُ بَيْعُ حَصْرِ الْمَسْجِدِ الْمَوْقُوْفَةِ عَلَيْهِ إِذَا بَلِيَتْ بِأَنْ ذَهَبَ جَمَالُهَا وَنَفْعُهَا وَكَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي بَيْعِهَا وَكَذَا جُذُوْعُهُ الْمُنْكَسِرَةُ خِلاَقًا لِجَمْعِ فِيْهِمَا

(قَوْلُهُ وَيَجُوْزُ بَيْعُ حَصْرِ الْمَسْجِدِ إِلَخ) قَالَ فِي التُّحْفَةِ أَيْ لِئَلاَّ تَضِيْعَ فَتَحْصِيْلُ يَسِيْرٍ مِنْ ثَمَيْهَا يَعُودُ عَلَى الْوَقْفِ لِأَنَّهَا صَارَتُ كَالْمَعْدُومَةِ ... وَزَادَ فِي مَثْنِ الْمِنْهَاجِ وَلَمْ تَصْلُحْ إِلاَّ للإِحْرَاقِ قَالَ فِي التُّحْفَةِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَلَمْ تَصْلُحْ إِلاَّ للإِحْرَاقِ قَالَ فِي التُّحْفَةِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَلَمْ تَصْلُحْ إلاَ للإِحْرَاقِ قَالَ فِي التُّحْفَةِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَلَمْ تَصْلُحْ إلاَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْ

Diperbolehkan menjual tikar yang diwakafkan untuk mesjid yang sudah rusak, dengan hilangnya keindahan dan fungsinya, sedangkan kemaslahatnya adalah dengan menjualannya. Begitu pula batang kayu mesjid yang patah, berbeda dengan sejumlah ulama dalam keduanya.

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Diperbolehkan menjual tikar yang diwakafkan untuk mesjid.") Dalam kitab al-Tuhfah Ibn Hajar al-Haitami berkata: "Maksudnya supaya tidak tersia-sia, karena menghasilkan harta -uang-sedikit dari harga penjualannya yang kembali pada barang wakaf itu

¹⁴ Zainuddin al-Malibari dan Al-Bakri bin Muhammad Syaththa al-Dimyathi, Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz III, h. 180.

lebih baik dari pada menyia-yiakannya. Penjualan tersebut dikecualikan dari -larangan penjualan barang wakaf karena tikar dan batang kayu tersebut seperti sudah tidak ada." Dalam Matn al-Minhaj al-Nawawi menambahkan: "Dan tikar serta batang kayu tersebut tidak layak kecuali dibakar." Dalam al-Tuhfah Ibn Hajar berkata: "Dengan ungkapan: "Dan tikar serta batang kayu tersebut tidak layak ...", al-Nawawi mengecualikan kondisi bila batang kayu itu masih bisa dibuat papan, maka tidak boleh dijual tanpa khilafiyah para ulama." Namun hakim -daerah terkait- harus melakukan pertimbangan matang dan menggunakannya dalam perkara yang lebih dekat dengan tujuan si pewakaf. Al-Subki berkata: "Sehingga bila mungkin digunakan sebagai alat-alat perawatan masjid, maka tidak boleh dijual menurut pengkajian yang kuat." Sampai disini pernyataan Ibn Hajar.

(Ungkapan beliau: "Berbeda dengan sejumlah ulama dalam keduanya.") Maksudnya dalam kasus tikar dan batang kayu. Mereka membenarkan ketidakbolehan menjualnya dengan kondisi tersebut, demi mengabadikan -sifat- wakaf dalam kedua barang itu.

2. Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin 15

(وَلاَ يُبَاعُ مَوْقُوْفٌ وَإِنْ خَرُبَ) ... فَإِنْ تَعَذَّرَ الْاِنْتِفَاعُ بِهِ إِلاَّ بِالْإِسْتِهْلاَكِ كَأَنْ صَارَ لاَ يَنْتَفِعُ بِهِ إِلاَّ بِالْأَحْرَاقِ اِنْفَطَعَ الْوَقْفُ أَيْ وَيَعْلِكُهُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ حِيْنَثِذٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ... (وَسُئِلَ) شَيْخُنَا عَمَّا إِذَا عُمِّرَ مَسْجِدُ بِآلَآتٍ جُدُدٍ وَبَقِيَّهُ إِلاَّلَةِ الْقَدِيْمَةِ فَهَلْ يَجُوزُ عِمَارَةُ مَسْجِدِ آخِر قَدِيْمٍ بِهَا أَوْ تُبَاعُ وَ يُحْفَظُ ثَمَنُهَا (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ عِمَارَةُ مَسْجِدٍ قَدِيْمٍ وَحَادِثٍ بِهَا آخِر قَدِيْمٍ بِهَا أَوْ تُبَاعُ وَ يُحْفَظُ ثَمَنُهَا (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ عِمَارَةُ مَسْجِدٍ قَدِيْمٍ وَحَادِثٍ بِهَا لَخَر قَدِيْمٍ بِهَا أَوْ تُبَاعُ وَ يُحْفَظُ ثَمَنُهَا (فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَجُوزُ عِمَارَةُ مَسْجِدٍ قَدِيْمٍ وَحَادِثٍ بِهَا حَيْثُ قُطِعَ بِعَدَمِ احْتِيَاجٍ مَا هِيَ مِنْهُ إِلَيْهَا قَبْلَ فَنَائِهَا وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ. وَعَالَمُ مُونَعُونُ الْوَجُومِ مِنَ الْوُجُوهِ . وَعَالَمُ مَا عُنِي مَوْفُوفُ) أَيْ وَلاَ يُوْهَبُ لِلْخَبَرِ الْمَآرِ أَوَلَ الْبَابِ وَكُمَا يَمْتَنِعُ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ (فَوْلُهُ وَلاَ يُعْيِرُ هَيْتُهِ كَجَعْلِ الْبُسْتَانِ دَارًا

Barang wakaf tidak boleh dijual meski sudah rusak ... Maka bila sudah tidak bisa difungsikan, kecuali dengan pemanfaatan yang menghabiskannya, seperti tidak akan termanfaatkan kecuali dengan dibakar, maka -sifatwakafnya terputus. Maskudnya maka dalam kondisi seperti ini mauquf 'alih (pihak yang diwakafi) bisa memilikinya menurut qaul mu'tamad. ...

Guruku (Ibn Hajar al-Haitami) pernah ditanya tentang mesjid yang direnovasi dengan bahan bagunan baru, dan bahan bangunan yang

¹⁵ Zainuddin al-Malibari dan Al-Bakri bin Muhammad Syaththa al-Dimyathi, Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz III, h. 179-182.

lama (tidak digunakan lagi). Maka apakah boleh merenovasi mesjid lain yang kuno dengan bahan bangunan yang sudah tidak digunakan itu?

Maka beliau menjawab: "Boleh merenovasi mesjid lama atau membangun mesjid baru yang lain dengan bahan bagunan yang sudah tidak digunakan tersebut, sekiranya sudah dipastikan mesjid yang direnovasi dengan bahan bagunan baru (dalam soal) tidak membutuhkannya sebelum bahan bangunan yang sudah tidak digunakan itu rusak total. Dan tidak boleh menjualnya sama sekali.

308. Berjabatan Tangan antara Laki-laki dan Perempuan Tanpa Tutup Ketika Baiat

- S. Adakah pendapat yang memperbolehkan guru thariqah lelaki berjabat tangan tanpa tutup dengan murid-murid perempuan lain ketika baiat?
- J. Tidak seorangpun ulama yang memperbolehkan kecuali kalau muridnya itu muhrimnya sendiri.

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Mu'in16

وَحَيْثُ حَرُمَ نَظْرُهُ حَرُمَ مَشُهُ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي اللَّذَةِ.

Dan sekira haram melihatnya, maka haram pula memegangnya, sebab memegang itu lebih nikmat.

2. Tafsir al-Qur'an al-Azhim¹⁷

يَتَأْيُهُمَا ٱلِنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْءً وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أُوْلَئِدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَن يِفْتَرِينَهُۥ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞

قَالَ الْبُخَارِي ... قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّتْ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَدْ بَايَعْتُكِ كَلاَمًا وَلاَ وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ فِي الْمُبَايَعَةِ قَطُّ مَا يُبَايِعُهُنَّ إِلاَّ بِقَوْلِهِ قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكَ

"Wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya,

¹⁶ Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in, (Semarang: Pustaka Alawiyah, t. th.), h. 98.

¹⁷ Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-Azhim, (Kairo: Dar al-Hadits, 1423 H/2003 M), Jilid IV, h. 419.

tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. al-Mumtahanah: 12)

Imam Bukhari berkata: "... Urwah berkata: "Aisyah Ra. berkata: "Maka siapa saja perempuan yang berikrar dengan ketentuan ini (dalam ayat di atas), maka Rasulullah Saw. bersabda padanya: "Aku baiat engkau perempuan." dengan ucapan. Sungguh demi Allah, dalam baiat itu tangan beliau tidak menyentuh tangan mereka, melainkan (hanya) dengan sabda beliau: "Aku baiat engkau perempuan atas ketentuan itu."

3. Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil18

Ibn al-Jauzi berkata: "Jumlah wanita yang mengikuti baiat Rasulullah Saw. tersebut pernah saya hitung, yaitu 457 wanita. Dan Rasulullah Saw. sama sekali tidak berjabat tangan dengan satu wanita pun (dari mereka). Beliau hanya membaiat mereka dengan ucapan saja.[]

¹⁸ Ali bin Muhammad al-Khazin, Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), Juz VII, h. 81-82.

KEPUTUSAN RAPAT DEWAN PARTAI NAHDLATUL ULAMA Di Salatiga Pada Tanggal Jumaadil Ulaa 1381 H./ 25 Oktober 1961 M.

309. Perempuan Menjadi Kepala Desa

309. Perempuan Menjadi Kepala Desa

- S. Bagaimana hukumnya perempuan menjadi Kepala Desa? Bolehkah atau tidak? (Fraksi NU DPRGR Pusat)
- J. Sebenarnya mencalonkan orang perempuan untuk pilihan Kepala Desa itu tidak boleh, kecuali dalam keadaan memaksa, sebab disamakan dengan tidak bolehnya orang perempuan menjadi hakim.

Demikianlah menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hanbali dan yang dilakukan oleh ulama salaf dan khalaf. Tetapi mazhab Hanafi memperbolehkan dalam urusan harta benda. Sedang Imam Ibn Jarir memperbolehkan dalam segala urusan dari apa saja.

Keterangan, dari kitab:

1. Bidayatul Mujtahid¹

وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي اِشْتِرَاطِ الدُّكُورَةِ فَقَالَ الجُمْهُورُ هِي شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الحُكْمِ وَقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ يَجُورُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ قَاضِيًا فِي الْأَمْوَالِ قَالَ الطَّبَرِي يَجُورُ اَنْ تَكُونَ حَاكِمًا عَلَى الإِطْلاَقِ فِي كُلِّ شَيْءٍ. قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَلاَ أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلاَفًا فِي اشْتِرَاطِ الْحَرِّيَّةِ. فَمَنْ رَدَّ قَضَاءَ الْمَرْأَةِ شَبَّهُهُ بِقَضَاءِ الإِمَامَةِ الْكُبْرَى وَقَاسَهَا أَيْضًا عَلَى الْعَبْدِ لِنُقْصَانِ حُرْمَتِهَا. وَمَنْ أَجَازَ حُكْمَهَا فِي الْأَمْوَالِ فَتَشْبِيْهَا بِجَوَازِ شَهَادَتِهَا فِي الْأَمْوَالِ وَمَنْ رَأَى حُكْمَهَا نَافِذًا فِي كُلِّ شَيْءٍ. قَالَ إِنَّ الْأَصْلَ هُو كُلُّ مَا يَتَأَتَّى مِنْهُ الْفَصْلُ بَيْنَ النَّاسِ فَحُكْمُهُ جَائِزُ إِلاَّ مَا خَصَّصَهُ الإِجْمَاعُ مِنَ الإِمَامَةِ الْكُبْرَى. وَأَمَّا اِشْتِرَاطُ الْحُرِّيَّةِ فَلاَ خِلاَفَ فِيْهِ.

Demikian pula para ulama berbeda pendapat tentang persyaratan jenis kelamin laki-laki (untuk menjadi hakim). Mayoritas ulama berpendapat, jenis kelamin laki-laki merupakan syarat keabsahan hukumnya. Imam Abu Hanifah berpendapat, perempuan boleh menjadi hakim dalam masalah harta. Imam al-Thabari berpendapat, perempuan boleh menjadi hakim secara mutlak dalam hal apapun. Abdul Wahab berpendapat, bahwa tidak ada perbedaan di kalangan ulama dalam pensyaratan status merdeka.

Maka ulama yang menolak hakim perempuan, maka ia menyamakan hakim perempuan dengan kepimpinan tertinggi (negara) dan mengqiyaskan perempuan dengan budak karena kehormatannya yang kurang. Ulama yang memperbolehkan hakim perempuan untuk masalah harta, maka ia

¹ Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujathid wa Nihayah al-Muqtashid, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 2006), Juz II, h. 707.

menyamakannya dengan kesaksian perempuan dalam masalah harta. Dan ulama yang memperbolehkan hakim perempuan dalam segala hal, maka ia menyatakan bahwa hukum asal dalam masalah ini adalah setiap perkara yang mudah diputuskan di antara manusia maka hukumnya boleh kecuali kepemimpinan tertinggi Negara yang telah dikhususkan oleh *ijma'* (atas ketidakbolehannya). Sedangkan persyaratan merdeka, maka tidak ada *khilaf* di dalamnya.

2. Al-Mizan al-Kubra²

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْأَيْمَةِ الطَّلاَقِةِ أَنَهُ لاَ يَصِحُ تَوْلِيَّهُ الْمَرْأَةِ الْقَضَاءَ مَعَ قَوْلِ أَيْ حَنِيْفَةَ إِلَنَّهُ يَصِحُ أَنْ تَصُوْنَ قَاضِيَةً فِي كُلِّ شَيْءٍ تُقْبَلُ فِيْهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ. وَعِنْدَهُ أَنَّ شَهَادَةً النِّسَاءِ تُقْبَلُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ الحُدُودَ وَالْجَرَاحَ فَإِنَّهَا لاَ تُقْبَلُ عِنْدَهُ. وَمَعَ قَوْلِ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيْدٍ الطَّبَرِيِّ يَصِحُ أَنْ تَصُوْنَ الْمَزَأَةُ قَاضِيَةً فِي كُلِّ شَيْءٍ. فَالأَوَّلُ مُشَدَّدُ وَعَلَيْهِ بْنِ جَرِيْ الطَّبَرِيِّ يَصِحُ أَنْ تَصُونَ الْمَزَأَةُ قَاضِيَةً فِي كُلِّ شَيْءٍ. فَالأَوَّلُ مُشَدَّدُ وَعَلَيْهِ جَرَى السَّلَفُ وَالْحَلَقِي فِيهِ تَغْفِيفُ وَالقَالِثِ عَنْ الْمَنْوَلِ إِلْمَعْرُوفِ جَرَى السَّلَفُ وَالْحَلَقِي وَالقَالِثِ إِنْ فَصْلَ الْحُصُومَاتِ مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ الْمِيْزَانِ، وَوَجْهُ الظَّافِي وَالقَالِثِ إِنْ فَصْلَ الْحُصُومَاتِ مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ الْمِيْزَانِ، وَوَجْهُ الظَّافِي وَالقَالِثِ إِنْ فَصْلَ الْحُصُومَاتِ مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ الْمِيْزَانِ، وَوَجْهُ الطَّافِي وَالقَالِثِ إِنْ فَصْلَ الْحُصُومَاتِ مِنْ بَابِ الْمُرْهُمِ الْمَعْرُوفِ الشَيْرَافِ الْمُرْعُمِ وَلَمْ يَشْتَوطُوا فِي ذَلِكَ الدُّكُورَةِ فِي الْمُنْعَرِ فَوْمُ وَلَوْا أَمْرَهُمُ الْمُزَاقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِ فَي الْمُنْ الْمَعْرُولُ اللَّهُ الْمُولِعِيقِ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمَنْ الْمَالِعِ تَصَدَّرَتُ لِلَّ اللَّهُ مَنَ النَّاسِ وَسَلِيْكُومَ فِي مَقَامَاتِ الولَاكَمَالُ وَلَوْ الْمُحْتَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَلْقُ وَرَدَ الْكَمَالُ وَلَالَقُونَ لَا اللَّهُ مُنْ النَّاسِ وَسَلِيْكُومَ فِي مَقَامَاتِ الولَايَاتِ

Termasuk yang diperselisihkan pada ulama adalah pendapat *Imam Tsalatsah* (Maliki, Syafi'i dan Hanbali), yaitu sungguh seorang perempuan tidak sah menangani keputusan hukum, dengan pendapat Abu Hanifah yaitu sungguh perempuan itu sah menjadi hakim dalam segala hal yang di dalamnya kesaksian perempuan diterima. Menurut beliau kesaksian wanita itu bisa diterima dalam segala hal kecuali yang berkaitan dengan masalah hukum *had-had* dan kejahatan (kekerasan) fisik. Begitu pula dengan pendapat Muhammad Ibn Jarir al-Thabari yang menyatakan keabsahan

² Abdul Wahhab al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t.th.), Cet I, Juz II, h. 189.

perempuan menjadi hakim dalam hal apapun.

Pendapat pertama merupakan pendapat ketat. Dan pendapat inilah yang berlaku bagi ulama salaf dan khalaf. Dalam pendapat kedua terdapat keringanan, dan pendapat ketiga merupakan pendapat sangat ringan. Argumen pendapat kedua dan ketiga adalah bahwa sungguh setiap penentuan hukum atas perseteruan-perseturuan itu termasuk bab amar ma'ruf nahi munkar (menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran) dan dalam hal ini para tidak menyaratkan jenis lelaki.

Sementara Rasulullah Saw. sungguh telah bersabda: "Tidak akan pernah sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan." Beliau bersabda demikian ketika masyarakat mengangkat putri Raja Kisra (gelar raja Persia zaman dahulu) sebagai ratu sesudahnya. Para ulama ahli kasyf bersepakat atas persyaratan jenis lelaki bagi mursyid yang mengajak kepada ridha Allah. Kita tidak pernah mendengar bahwa salah seorang perempuan al-salaf al-shalih telah tampil sebagai mursyid yang membimbing para murid (untuk wushul ilallah), karena derajat perempuan yang kurang (sempurna). Meskipun ada sebagian yang sempurna dari kalangan mereka, seperti Maryam putri Imran dan Asiyah istri Fir'aun. Maka kesempurnaan mereka tersebut terkait dengan ketakwaan dan agamanya. Tidak terkait dengan penetapan hukum di kalangan masyarakat dan menuntun mereka suluk (menapaki) maqam-maqam kewalian.[]

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-23 Di Solo Pada Tanggal 29 Rajab - 3 Sya'ban 1382 H. / 25 - 29 Desember 1962 M.

310. Hukum Alkohol

311. Membangun Gedung Madrasah di Tanah yang Diwakafkan untuk Mesjid

312. Akad Indekost

313. Wakaf untuk Sekolah Negeri

314. Terjemah Akad Nikah

315. Mengambil Bola Mata Mayit untuk Mengganti Bola Mata Orang Buta

310. Hukum Alkohol

- S. Bagaimana hukumnya benda cair yang dinamakan alkohol? Najiskah atau tidak? Kalau najis, maka bagaimana hukumnya minyak wangi yang dicampur dengan alkohol. Apakah dimaafkan untuk shalat atau tidak? Kalau dimaafkan, apakah memang dimaafkan secara mutlak atau dengan syarat telah hancur. Karena kami mengetahui campurannya minyak wangi itu 1.000 alkohol dan 50 gram wangi-wangian. (NU Cab. Senori Tuban)
- J. Bahwa alkohol itu termasuk benda yang menjadi perselisihan hukumnya di antara para ulama.

Dikatakan bahwa alkohol itu najis, sebab memabukkan. Dan juga dikatakan bahwa alkohol itu tidak najis, sebab tidak memabukkan, bahwa mematikan seperti racun. Dan Muktamar berpendapat najis hukumnya, karena alkohol itu menjadi arak. Adapun minyak wangi yang dicampuri alkohol itu, kalau campurannya hanya sekedar menjaga kebaikannya, maka dimaafkan. Begitupun halnya obat-obatan.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Mabahits al-Wafiyyah fi Hukm al-A'thar al-Afranjiya1

اَلْمَبْحَثُ الثَّالِثُ فِي تَعْرِيْفِ الْكُحُولِ الَّذِيْ اسْتَفَدْنَاهُ مِنْ كَلاَمِ مَنْ يَعْرِفُ حَقِيْقَتَهُ النَّذِيْ يَقْبَلُهُ الْحِسُ مَعَ مَا رَأَيْنَاهُ مِنْ آلاَتِ صِنَاعَتِهِ. وَهُوَ عُنْصُرُ بُخَارِيُّ يُوْجَدُ فِي النَّيْحَرَّاتِ الْمُسْكِرَاتِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ. فَبِوُجُودِهِ فِيْهَا يَحْصُلُ الْإِسْكَارُ وَيُوْجَدُ هَذَا الْمُتَخَمِّرَاتِ الْمُسْكِرَاتِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ مِنْ مُتَخَمِّرَاتِ نَقِيْعِ الْأَزْهَرِ وَالْأَثْمَارِ الَّذِيْ يُتَّخَدُ الْكُحُولُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْأَشْرِبَةِ مِنْ مُتَخَمِّرَاتِ نَقِيْعِ الْأَزْهَرِ وَالْأَثْمَارِ الَّذِيْ يُتَّخَدُ الْكُحُولُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْأَشْرِبَةِ مِنْ مُتَخَمِّرَاتِ نَقِيْعِ الْأَزْهَرِ وَالْأَثْمَارِ الَّذِيْ يُتَخَدُ الْكُحُولُ أَيْضَا فِي غَيْرِ الْأَشْرِبَةِ مِنْ مُعْقُودِ الْحَشَبِ بِآلاَتٍ حَدِيْدِيَّةٍ تَخْصُوصَةٍ وَهَذَا الْأَخِيْرُ الْمُعَلِي كَمَا أَنَّ أَقْوَاهُ الَّذِيْ يُوْجَدُ فِي خَمْرِ الْعِنَب.

Pengertian alkohol sebagaimana yang kami dapatkan dari pernyataan orang yang mengetahui hakekatnya, yang bisa dirasakan dan yang kami lihat dari peralatan industri pembuatannya adalah suatu unsur uap yang terdapat pada minuman yang memabukkan. Keberadaannya akan mengakibatkan mabuk. Alkohol ini juga terdapat pada selain minuman, seperti pada rendaman air bunga dan buah-buahan yang dibuat untuk wewangian dan lainnya, sebagaimana juga terdapat pada kayu-kayuan yang diproses dengan mempergunakan peralatan khusus dari logam.

Sayyid Utsman al-Batawi, al-Mabahits al-Wafiyah fi Hukm al-A'thari al-Afranjiya, beberapa naskah tulisan tangan yang didapat dari Perpustakaan Nasional RI, h. 6.

Dan yang terakhir ini merupakan alkohol dengan kadar paling rendah, sedangkan yang terdapat pada perasan anggur merupakan alkohol dengan kadar tertinggi.

2. Al-Figh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah2

Termasuk najis yang dima'fu (ditoleransi) adalah, cairan-cairan najis yang dicampur untuk komposisi obat-obatan dan parfum untuk menjaga kualitas keduanya. Cairan tersebut bisa ditoleransi dengan kadar yang diperlukan untuk menjaga kualitas.

311. Membangun Gedung Madrasah di Tanah yang Diwakafkan untuk Mesjid

- S. Bolehkah membangun gedung madrasah di dalam tanah yang diwakafkan untuk mesjid? (NU Cab. Senori Tuban)
- J. Tidak boleh, apabila diketahui bahwa hal itu benar-benar menyalahi janji si waqif. Dan kalau tidak menyalahi maka boleh, asalkan tidak bertentangan dengan adat kebiasaan.

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab3

Jika yang mewakafkan menyaratkan sesuatu yang tidak menafikan pewakafan, seperti menyaratkan barang yang diwakafkan tidak boleh disewakan, mengutamakannya salah seorang mauquf 'alaih (orang yang diwakafi) atau menyamaratakannya, mengkhususkan semacam mesjid seperti sekolah dan pondok kaum sufi untuk segolongan tertentu seperti golongan madzhab Syafi'iyah (saja), maka syaratnya itu harus dipenuhi demi menjaga tujuannya dan melaksanakan persyaratannya.

2. Tuhfah al-Muhtaj4

Abdurrahman al-Juzairi, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Cet. Ke-1, Jilid I, h. 22.

³ Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1996), Cet. Ke-1, Juz I, h. 442.

Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada Hasyiyata al-Syirwani wa al-'Abbadi, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Cet. I, Juz VI, h. 298.

(تَنْبِينُهُ) حَيْثُ أَحْمَلَ الْوَاقِفُ شَرْطَهُ أَتْبِعَ فِيْهِ الْعُرْفُ فِيْ زَمَنِهِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِهِ

(Peringatan) Seandainya orang yang mewakafkan itu memberikan persyaratan yang bersifat umum, maka harus dipenuhi sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masanya, sebab kebiasaan itu berposisi seperti halnya syarat.

312. Akad Indekost

- S. Dinamai akad apakah akad indekost itu? Contohnya: Bagi orang yang bertempat di rumah saya dengan dijamin makan dan minumnya sebulan harus membayar seribu rupiah. Apakah itu termasuk akad ijarah (sewa), atau bai' (jual beli) atau lainnya?
- J. Sesungguhnya akad tersebut adalah akad ju'alah (menyanggupi) yang sah sebagaimana ju'alah memelihara orang sakit.

Keterangan, dari kitab:

1. Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Syarh Manhaj al-Thullab 5:

(Sub Masalah) Boleh melakukan akad ju'alah untuk menyembuhkan penyakit dengan doa (bacaan) yang diperbolehkan, seperti penjelasan yang telah lewat, merawat orang sakit dan mengobatinya, meskipun hewan. Kemudian apabila seseorang menentukan akad itu dengan batas tertentu, seperti (sampai) sehat dan kesehatan itu terwujud, maka si pekerja berhak mendapat biaya yang disebutkan dalam akad. Bila tidak terwujud, maka ia berhak mendapat biaya standar.

313. Wakaf untuk Sekolah Negeri

- S. Apakah sah wakaf untuk sekolah negeri? (NU Cab. Senori Tuban)
- J. Bahwa wakaf untuk sekolah negeri itu sah, karena wakaf itu tidak disyaratkan nyata-nyata adanya *qurbah* (mendekatkan diri kepada Allah), tetapi juga harus tidak maksiat (durhaka).

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Qarib 'ala Matn al-Abi al-Syuja'⁶

Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Syarh Manhaj al-Thullab, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid III, h. 621.

وَأَفْهَمَ كَلاَمُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي الْوَقْفِ ظُهُوْرُ قَصْدِ الْقُرْبَةِ بَلِ انْتِفَاءُ الْمَعْصِيَّةِ

Pernyataan al-Mushamif (Abu Syuja') memberikan pengertian bahwa tidak disyaratkan tujuan qurbah (mendekatkan diri kepada Allah Swt.) dalam pewakafan, namun (yang disyaratkan adalah) tidak terdapat kemaksiatan.

314. Terjemah Akad Nikah

- S. Benarkah terjemah "ankahtuka wa zauwajtuka" dengan bahasa Indonesia demikian "saya nikahkan engkau" atau "engkau saya nikahkan", sebab seakanakan calon suami yang dinikahkan oleh wali padahal sebenarnya yang dinikahkan oleh wali adalah si perempuan. Demikian pula bagaimana terjemah qabul "qabiltu nikahaha", dengan bahasa Indonesia demikian "saya terima nikahnya", sebab seolaholah si perempuan menikahi si lelaki, padahal lelaki menikahi si perempuan? (K. Ibrahim Hasan, Palembang)
- J. Bahwa terjemah itu sudah betul, karena si calon suami menikahi si perempuan, juga si perempuan pun menikahi si calon suami, menurut pendapat yang *arjah* (lebih kuat) seperti dalam surat al-Nisa' ayat 21, surat al-Baqarah ayat 221, 230, 231.

Keterangan, dari:

1. Pendapat Muktamar

Para ulama berbeda pendapat tentang pihak yang diakadi, apakah suami atau istri atau keduanya. Pendapat yang paling kuat adalah yang kedua (istri). -Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Nisa' 21, al-Bagarah 221, 231, 230.-

2. Al-Qur'an

"Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (QS. al-Nisa': 21)

وَلَا تَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتَكُمْ ۗ وَلَا تَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُوْلَتِهِكَ تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُوْلَتِهِكَ تَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُوْلَتِهِكَ

⁶ Ibn al-Qasim al-Ghazi, Fath al-Qarib 'ala Matn al-Abi al-Syuja', (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz II, h. 46.

يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَآللَهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ عَلَّهُمْ وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ عِللنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran." (QS. al-Baqarah: 221)

فَإِن طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ أَوْلِ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّبُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُ فَ عَمْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ مِمَعْرُوفٍ وَلَا مُشِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا فَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوا وَاذَكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِتَنبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ عَلَيْهُ وَٱتَّقُوا ٱللَّهُ وَآعَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمٌ هَا

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui. Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab dan al-Hikmah (al-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkanNya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Baqarah: 230-231)

315. Mengambil Bola Mata Mayit untuk Mengganti Bola Mata Orang Buta

- S. Bagaimana pendapat Muktamar tentang ifta (fatwa) mufti Mesir yang memperbolehkan mengambil bola mata mayit untuk mengganti bola mata orang buta? Benarkah fatwa tersebut?
- J. Bahwa ifta (fatwa) mufti Mesir itu tidak benar, bahkan haram mengambil bola mata mayit, walaupun mayit itu tidak terhormat (ghair muhtaram) seperti mayitnya orang murtad. Demikian pula haram menyambung anggota tubuh dengan anggota tubuh lain, karena bahayanya buta itu tidak sampai melebihi bahayanya merusak kehormatan mayit.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad ⁷:

Adapun (jasad) manusia, maka adanya sama dengan tidak adanya sebagaimana yang dinyatakan al-Halabi dalam catatannya atas kitab al-Manhaj, walaupun tidak terhormat, seperti orang murtad dan kafir harbi. Karenanya maka haram tranplantasi (dengan organ mereka) dan harus dicopot kembali. 2. Hadits Nabi Saw.

"Dari Aisyah ra., sungguh Rasulullah Saw. telah bersabda: "memecahkan tulang orang mati itu sama dengan memecahkan tulangnya ketika masih hidup." (HR. Ahmad dalam al-Musnad, Abu Dawud dengan standar sanad Muslim dan Ibn Majah)

"Dari Ummu Sulaim, dari Nabi Saw., beliau berkata: "Memecah tulang orang mati itu sama dengan memecah tulangnya ketika masih hidup dalam hal dosanya." (HR. Ibn Majah dari Ummu Salamah).[]

Husain al-Rasyidi, Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), h. 26-27.

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-25 Di Surabaya Pada Tanggal 20 - 25 Desember 1971 M.

316. Mendepositokan Uang dalam Bank 317. Shalat *Birrul Walidain*

318. Mengumpulkan Air Susu dari Beberapa Ibu untuk di Rumah Sakit

319. Pembuatan Sajadah dengan Bertuliskan Kalimah Tauhid 320. Memphoto Orang dengan Tidak Seizin yang Diphoto

321. Tatswib (ucapan ash-shalatu khairum minannaum) pada Shalat Subuh

322. Memindahkan Kuburan ke Tempat Lain

323. Menggunakan Tanah untuk Madrasah, Kaitannya dengan Wakaf

324. Anggota DPR Melanggar Baiat

316. Mendepositokan Uang dalam Bank

- S. Bagaimana hukumnya mendepositokan uang dalam bank? Bisakah hal tersebut dikatakan sebagai qardh atau wadi'ah atau lainnya?
- J. Berdasarkan keputusan Konggres NU ke 12 tahun 1937 soal nomor 204, keputusan Konggres NU ke 2 tahun 1927 soal nomor 28, maka hukum mendepositokan uang kepada bank tersebut ada tiga pendapat, yaitu (a) Haram, (b) halal dan (c) Syubhat.

Dan Konggres berpendapat bahwa yang ahwath (lebih hati-hati/baik adalah pendapat yang pertama (haram).

317. Shalat Birrul Walidain

- S. Di dalam kitab Khazinah al-Asrar ada keterangan tentang shalat Birrul Walidain, shalat Waj'uladras dan lain sebagainya. Apakah shalat-shalat tersebut baik untuk diamalkan, dan apakah dasarnya kuat? Lagi pula apakah kitab tersebut termasuk di antara kitab-kitab yang mu'tamad atau tidak?
- J. Shalat Birrul Walidain, Waj'uladras, Liqadhai'dain dan lain sebagainya, adalah tidak sah dan hukumnya haram.

Keterangan, dari kitab:

1. Tuhfatul Muhtaj¹

وَلاَ تَصِحُّ الصَّلَوَاتُ بِتِلْكَ النَّيَّاتِ الَّتِيُّ اسْتَحْسَنَهَا الصُّوْفِيَةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرِدَ لَهَا أَصْلُ فِي السُّنَّةِ. نَعَمْ إِنْ أَطْلَقَ الصَّلاَةَ ثُمَّ دَعَا بَعْدَهَا بِمَا يَتَضَمَّنُ نَحْوَ اسْتِعَاذَةٍ وَاسْتِخَارَةٍ مُطْلَقَةٍ لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسُ.

Tidak sah shalat dengan niat-niat yang dianggap baik oleh kalangan sufi tanpa adanya dasar hadis sama sekali. Namun jika memutlakkan niat salat kemudian berdoa sesudahnya dengan doa yang berisikan permohonan perlindungan atau istikharah (meminta petunjuk Allah Swt. untuk dipilihkan yang baik) secara mutlak, maka hal tersebut diperbolehkan.

318. Mengumpulkan Air Susu dari Beberapa Ibu untuk di Rumah Sakit

S. Sebuah rumah sakit mengumpulkan air susu dari beberapa kaum ibu (benar-benar susu mereka) untuk dikirimkan kepada bayi-bayi yang dirawat

¹ Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada Hasyiyata al-Syirwani wa al-'Ubbadi, (Mesir: Mushtafa Muhammad, t.th.), Juz II, h. 238.

dalam rumah sakit tersebut. Apakah yang demikian itu dapat menjadikan/ menimbulkan mahram radha'?

- J. Pengumpulan susu oleh rumah sakit dari kaum ibu yang diberikan pada bayi-bayi yang dirawat dalam rumah sakit tersebut bisa menjadikan mahram radha' dengan syarat:
- 1. Perempuan yang diambil air susunya itu masih dalam keadaan hidup, dan (kira-kira) berusia sembilan tahun *qamariyah*.
- 2. Bayi yang diberi air susu itu, belum mencapai umur dua tahun.
- Pengambilan dan pemberian air susu tersebut, sekurang-kurangnya lima kali.
- 4. Air susu itu harus dari perempuan yang tertentu.
- 5. Semua syarat yang tersebut di atas harus benar-benar yakin (nyata). *Keterangan*, dari kitab:
- 1. I'anah al-Thalibin²

Lalu makna lahiriah teks Fath al-Mu'in menyatakan (persusuan yang menjadikan hubungan mahram) itu cukup dengan sampainya air susu perempuan yang menyusui ke dalam perut anak yang disusui lima kali tahapan, meskipun air susu tersebut keluar dari tetek (payudara) sekali tahapan (saja). Dan yang benar bukan seperti itu. Namun air susu itu harus keluar dari tetek lima kali tahapan dan sampai ke perut anak yang disusui lima kali tahapan pula.

2. Al-Mizan al-Kubra³

Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya keharaman itu berkaitan dengan susu yang bercampur dengan makanan dan minuman, bila diminum oleh bayi sebanyak lima kali, baik susu tersebut langsung habis atau berdasarkan kebiasaan.

² Muhammad Syaththa al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t.th.), Jilid III, h. 287.

³ Addul Wahhab al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, (Indonesia: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.), Juz II, h. 138.

319. Pembuatan Sajadah dengan Bertuliskan Kalimah Tauhid

- S. Dapatkah dibenarkan pembuatan sajadah yang dijual kepada umum dengan bertuliskan kalimat Tauhid dan sesamanya? (PBNU)
- J. Membuat/menjual sajadah yang bertuliskan kalimat Tauhid dan sesamanya tidak bisa dibenarkan, karena *mumtahan* (dihina), sebab sajadah itu disediakan untuk alas shalat.

Keterangan, dari kitab:

1. I'anah al-Thalibin4

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Dan haram memanjangkan kaki.") dengan dibaca raf', di'athfkan pada kata تَنْكِنْنِ pula. Maksudnya dan haram memanjangkan kaki -ke arah al-Qur'an-karena mengandung penghinaan padanya. Dalam al-Mughni Syaikh al-Khatib al-Syirbini berkata: "Dan haram menginjak alas atau kayu yang berukir al-Qur'an, seperti dalam kitab al-Anwar, atau berukir sebagian nama-nama Allah Ta'ala.

2. Al-Iqna' fi Hill Alfazh Abi Syuja'5

Dimakruhkan menulis al-Qur'an di dinding walaupun milik mesjid, pakaian, makanan dan semisalnya. ... Dan haram berjalan di atas alas atau kayu yang berukir ayat al-Qur'an.

320. Memphoto Orang dengan Tidak Seizin yang Diphoto

- S. Bagaimana hukum menggambar/memphoto orang dengan tidak seizin orang yang digambar/diphoto? (NU Cab. Jombang)
- J. Kalau orang yang digambarkannya itu tidak ridha, maka hukumnya

⁴ Muhammad Syaththa al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin*, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t.th.), Jilid I, h. 69.

Muhammad Khatib al-Syirbini, al-Iqna' fi Hill Alfazh Abi Syuja', (Mesir: Mushtafa al-Halabi, 1951), Jilid I, h. 328.

haram, karena menyakitkan, kecuali dalam hal-hal yang dibutuhkan menurut hukum.

321. Tatswib (Ucapan ash-shalatu khairum minannaum) pada Shalat Subuh

- S. Masalah tatswib pada adzan Subuh, dalam hadits Sunan Abi Dawud dinyatakan pada adzan sebelum Subuh. Sedangkan di Indonesia tidak dilakukan adzan sebelum Subuh. Apakah tatswib itu boleh dibaca pada adzan Subuh? (Dari Jakarta)
- J. Boleh dilakukan tatswib pada adzan Subuh, bahkan sunat hukumnya. Untuk shalat Subuh disunatkan dua adzan. Adzan pertama pada sebelum waktu yang berfungsi membangunkan orang tidur, sedang adzan kedua ketika sesudah masuk waktunya yang fungsinya mengajak orang mengerjakan shalat. Dan kedua adzan Subuh itu disunatkan bertatswib, yakni mengucapkan "ash-shalatu khairum minannaum" (pahala shalat lebih baik daripada kelezatan tidur). Meskipun kebiasaan penduduk Mekkah menentukan tatswib ini untuk adzan yang kedua saja, sebab tujuannya untuk membedakan dengan adzan yang pertama. Keterangan, dari kitab:

1. Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin⁶

رَيُسَنُّ إِذْرَاجُهَا وَتَرْتِيْلُهُ وَالتَّرْجِيْعُ فِيْهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَالتَّنْوِيْبُ فِي الصَّبْحِ وَهُوَ أَنْ يَقُوْلَ بَعْدَ الْحَيَّعَلَتَيْنِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ لِوُرُوْدِهِ فِيْ حَدِيْثِ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ كَمَا قَالَهُ فِيْ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَالَ وَسَوَاءً مَا قَبْلَ الْفَجْرِ وَمَا بَعْدَهُ

Dan disunnahkan mengucapkan *iqamah* secara cepat, adzan secara pelan, *tarji'* (membaca dua kalimah syahadat dengan suara kecil sebelum mengucapkannya secara kerasa) dalam adzan ... dan *tatswib* dalam adzan subuh, yaitu setelah bacaan عَنْ عَلَ النَّلَاتِ dan عَنْ عَلَ النَّلَاتِ muadzin mengucapkan sebanyak dua kali. Karena adanya redaksi *tatswib* itu dalam hadits riwayat Abu Dawud dan selainnya dengan sanad yang baik, seperti dinyatakan oleh al-Nawawi dalam *Syarh al-Muhadzab*. Beliau berkata: "Baik adzan sebelum fajar maupun setelahnya."

2. I'anah al-Thalibin⁷

⁶ Jalahuddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1956), Jilid I, h. 123.

(قَوْلُهُ وَيُسَنُّ تَثْوِيْبُ) أَيْ لِمَا صَحَّ أَنَّ بِلاَلاَّ أَذَّنَ لِلصَّبْحِ فَقِيْلَ لَهُ أَنَّ النَّبِيّ ﷺ نَائِمُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فَقَالَ ﷺ اِجْعَلْهُ فِيْ تَأْذِيْنِكَ لِلصَّبْحِ

Disunahkan tatswib tersebut karena hadits sahih tentang kisah Bilal yang pernah mengumandangkan adzan subuh, dan dikabarkan kepadanya bahwa Nabi Saw. sedang tidur. Lalu Bilal mengucapkan lafal السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهُ الصَّلامُ خَيْرُ مِنَ النَّوْمِ dan Nabi Saw. pun bersabda: "Jadikanlah tatswib itu pada adzan subuhmu."

322. Memindahkan Kuburan ke Tempat Lain

- S. Bolehkah memindahkan kuburan ke tempat lain, dan mendobelkan kuburan di dalam satu tempat? (Dari Jakarta)
- J. Memindahkan mayit dari satu kuburan ke kuburan yang lain, haram hukumnya, kecuali karena dharurat. Adapun mendobelkan kuburan di satu tempat, boleh hukumnya dengan syarat harus seagama dan sama jenis kelaminnya.

Keterangan, dari kitab:

1. Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin8

Menggali kembali kuburan untuk dipindahkan atau tujuan lainnya, hukumnya haram kecuali karena kondisi darurat.

2. I'anah al-Thalibin9

Haram menguburkan dua jenazah yang berbeda kelamin dalam satu liang, kecuali antara keduanya terdapat hubungan mahram atau suami istri.

3. Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin¹⁰

Al-Bakri bin Muhammad Syaththa al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t.th.), Jilid I, h. 236.

⁸ Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1956), Jilid I, h. 352.

⁹ Al-Bakri bin Muhammad Syaththa al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t.th.), Jilid II, h. 118.

Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Jilid I, h. 400.

Dan sekolompok ulama secara jelas menyatakan, bahwa disunahkan dua jenazah tidak dikubur dalam satu liang. Pendapat ini sesuai dengan pernyataan al-Nawawi dalam kitab al-Raudhah seperti kitab asalnya (al-Syarh al-Kabir/al-'Aziz): "Dalam kondisi normal disunnahkan menguburkan masing-masing jenazah pada satu liang." Maksudnya mengubur dua jenazah dalam satu liang itu hukumnya makruh, kecuali dalam kondisi darurat, seperti banyaknya jenazah karena wabah atau selainnya, serta sulit mengubur masing-masing dengan liang tersendiri.

323. Menggunakan Tanah untuk Madrasah, Kaitannya dengan Wakaf

- S. Ada panitia Nahdhiyyin mengumpulkan barang atau uang derma untuk membeli tanah dan alat-alat pergedungan fi al-ardh al-muhyat laa min al-mawat. Kemudian tanah dan gedung itu dipergunakan untuk madrasah dan mushalla atau kantor. Akan tetapi tidak ada shighat wakaf dari siapapun dan belum ada syarat-syarat dan peraturan mengenai nazhir serta tidak ada hubungannya dengan sesuatu yayasan, oleh karena itu:
- a. Apakah tanah dan gedung itu sudah menjadi wakaf.
- b. Siapakah yang berhak membuat/menjadikan wakafnya dan membuat syaratsyaratnya?
- c. Siapakah yang berkompeten menjadi nazhir?
- d. Kalau sebagian dari anggota panitia itu masuk organisasi lain, bolehkah tanah dan gedung tersebut dimiliki dan dibuatkan peraturan-peraturan atau diawasi oleh mereka yang dari organisasi lain NU? (NU Cab. Semarang)
- J. a. Barang-barang dan gedung-gedung belum menjadi barang wakaf.
 - b. Yang berhak membuat/menjadikan barang-barang wakaf dan membuat syarat-syaratnya adalah:
 - 1) Waqif (orang yang mewakafkan),
 - 2) Panitia yang mengumpulkan,
 - 3) Hakim syar'i.
 - c. Yang berkompeten menjadi *nazhir* adalah: kalau *waqif* menentukan maka *nazhir*nya adalah orang yang ditentukan oleh *waqif*. Kalau *waqif* tidak menentukan, maka *nazhir*nya adalah panitia yang mengumpulkan. Kalau panitia itu sudah tidak ada, maka yang

- berkompeten menjadi nazhir adalah hakim syar'i, kalau tidak ada nazhir yang khos.
- d. Tidak boleh sebagian dari anggota panitia yang pindah ke organisasi lain, memiliki dan membuat peraturan-peraturan atau *manazhir*nya (barang itu tetap menjadi hak milik NU).

Keterangan, dari kitab:

1. Asna al-Mathalib¹¹

(وَلاَ يَصِيْرُ الْمُشْتَرَى وَقْفًا حَتَّى يُوْقِفَهُ) الْفَصِيْحُ يَقِفَهُ (الْحَاكِمُ) وَفُرِقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَبْنِيَّ فِي عِمَارَةِ الْجُدُرِ أَنَّ الْمَوْقُوفَةَ وَتَرْمِيْمَهَا حَيْثُ يَصِيْرُ وَقْفًا بِالْبِنَاءِ لِجِهَّةِ الْوَقْفِ بِأَنَّ الْعَبْدَ الْمَوْقُوفَةَ بَاقِيَةٌ وَالطِّيْنَ وَالْحُجَرَ الْمَبْنِيَّ بِهِمَا كَالْوَصْفِ الْمَوْقُوفَةَ بَاقِيَةٌ وَالطِّيْنَ وَالْحُجَرَ الْمَبْنِيَّ بِهِمَا كَالْوَصْفِ التَّابِعِ وَمَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْحَاكِمَ يَتَوَالَى الشِّرَاءَ وَالْوَقْفَ مَحَلَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْوَقْفِ نَاظِرُ خَاصً وَإِلاَّ فَهُو الَّذِي يَتَوَالَى بِهِمَا كَمَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلاَمِهِمْ فِيْمَنْ يَتَوَلَّى أَمْرَ الْوَقْفِ.

Budak yang dibeli –sebagai ganti budak wakafan yang mati- tidak menjadi barang wakaf -shighat fashih dari kata عُرَفَّهُ adalah عُرَفَهُ, sampai hakim mewakafkannya. Perbedaan antara budak yang dibeli tersebut dan bangunan yang ditegakkan dalam perawatan dinding yang hukum bangunan wakaf dan pembuatan dindingnya bisa langsung menjadi barang wakaf dengan dibangun pada arah lahan wakaf, adalah budak yang diwakafkan sama sekali sudah tidak bisa dimanfaatkan, sementara lahan wakaf masih ada dan tanah liat serta batu yang digunakan membangun itu hukumnya seperti sifat yang mengikuti lahan wakaf.

Keterangan yang telah disebutkan, yaitu hakim itu menangani pembelian dan pewakafannya adalah jika tidak ada *nazhir* khusus yang mengelola wakaf tersebut. Jika ada, maka dia yang menangani keduanya, sebagaimana yang dipahami dari pernyataan para ulama tentang pihak yang menangani urusan perwakafan.

2. Tuhfah al-Muhtaj dan Hawasyai al-Syarwani wa al-'Ubbadi¹² قَالَ الشَّيْخُ أَبُوْ مُحَمَّدٍ وَكَذَا لَوْ أَخَذَ مِنَ النَّاسِ شَيْقًا لِيُبْنَى بِهِ زَاوِيَةً أَوْ رِبَاطًا فَيَصِيْرُ كَذَلِكَ بِمُجَرَّدٍ بِنَاثِهِ وَاعْتَرَضَ بَعْضُهُمْ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ بِأَنَّهُ فَرَّعَهُ عَلَى طَرِيْقَةٍ ضَعِيْفَةٍ

¹¹ Syaikh al-Islam Zakariya al-Anshari, Asna al-Mathalib, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), Jilid III, h. 474.

¹² Ibn Hajar al-Haitami, al-Syarwani dan al-'Ubbadi, Tuhfah al-Muhtaj dan Hawasyai al-Syarwani wa al-'Ubbadi, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Cet. I, Juz VI, h. 298.

(قَوْلُهُ عَلَى طَرِيقَةٍ ضَعِيفَةٍ) وَهِيَ عَدَمُ اشْتِرَاطِ اللَّفْظِ فِي الْوَقْفِ مُطْلَقًا وَكِفَايَةُ الْفِعْلِ وَالنَّيَّةِ فَقَطْ

Syaikh Abu Muhammad berkata: "Begitu pula bisa menjadi wakaf tanpa mengucapkan sighat wakaf, bila seseorang mengumpulkan sumbangan (dana dan semisalnya) untuk digunakan membagun zawiyah atau ribath (tempat ibadah khusus para sufi), maka sumbangan tersebut langsung menjadi wakaf dengan digunakannya membangun (tanpa memerlukan sighat wakaf). Sebagian ulama menentang pendapat beliau tersebut dengan menyatakan, bahwa pendapat itu beliau kembangkan atas dasar riwayat yang lemah.

(Ungkapan Ibn Hajar al-Haitami: "Atas dasar riwayat yang lemah.") Yaitu tidak disyaratkannya pengucapan *shighat* wakaf secara mutlak, dan wakaf cukup dengan pelaksanaan -pembangunan- serta niat saja.

324. Anggota DPR Melanggar Baiat

- S. Sesuai dengan instruksi PB Syuriah NU tanggal 27 Jumadil Ulaa 1398 H., tentang baiat anggota-anggota DPR dari NU kalau mereka sudah menjalankan baiat sebagaimana tercantum dalam instruksi tersebut, kemudian umpamanya:
- a. Gerak-gerik atau hal-ihwal mereka tidak sesuai dengan ajaran Islam.
- b. Tidak selalu berusaha untuk menegakkan syariat Islam dan berlakunya hukum Islam, maka bagaimana hukumnya, berdosakah atau tidak? Kalau berdosa, apakah termasuk dosa kecil atau besar?
- J. Jikalau mereka melanggar baiat, maka hukumnya berdosa. Sedangkan nilai dosanya:
- Jikalau yang dilanggar itu persoalan yang mengakibatkan dosa kecil, maka dosanya termasuk dosa kecil.
- b. Jikalau yang dilanggar itu persoalan yang mengakibatkan dosa besar, maka dosanya termasuk dosa besar.[]

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-26 Di Semarang Pada Tanggal 10 - 16 Rajab 1399 H./ 5 - 11 Juni 1979 M.

325. Al-Qur'an Ditulis dengan Huruf/Brayel
326. Piringan Hitam atau Kaset dari Al-Qur'an
327. Terjemah Al-Qur'an oleh Orang yang Bukan Islam
328. Penggantian Kelamin
329. Memberi Imbalan Kepada Pengedar Derma
330. Menambah Kalimah "Abdul Qadir Waliyullah" Sesudah
Kalimah Thayyibah

325. Al-Qur'an Ditulis dengan Huruf/Brayel

- S. Apakah al-Qur'an boleh ditulis atau dicetak dengan huruf latin (selain huruf Arab rasm Utsman) atau dengan tanda baca lain selain huruf brail? Dan apakah sama hukumnya dengan mushaf?
- J. Setelah meneliti dengan seksama ternyata dalam penulisan al-Qur'an dengan tulisan selain dengan tulisan Arab termasuk tulisan latin, terdapat dua pendapat, yaitu: (1) Pendapat Imam Ibn Hajar adalah haram. (2) Pendapat Imam Ramli adalah boleh.

Catatan:

- a. Pendapat Imam Ramli yang memperbolehkan tersebut di atas kalau tidak terjadi perubahan sebagaimana tersebut.
- b. Penulisan al-Qur'an dengan huruf latin ada manfaatnya terutama bagi orang yang buta huruf Arab, tetapi bahayanya lebih banyak. Antara lain akan mengurangi perhatian terhadap belajar membaca dan menulis huruf Arab.
- c. Huruf latin tidak mencukupi bunyi-bunyi huruf Arab. Apabila al-Qur'an ditulis dengan huruf latin, maka bunyinya tidak akan sama dengan bunyi al-Qur'an yang berbahasa Arab itu dan akan mengubah bunyi al-Qur'an dan tulisannya. Sedangkan mengubah al-Qur'an dilarang (haram).

Kesimpulan:

Memperhatikan keterangan tersebut di atas, maka berkesimpulan sebagai berikut:

- a. Menulis al-Qur'an dengan tulisan selain tulisan Arab termasuk tulisan latin sudah sepakat antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli tentang haramnya, apabila mengubah bunyi dan tulisan al-Qur'an.
- b. Apabila tidak mengubah, maka menurut Imam Ibn Hajar hukumnya tetap haram. Sedangkan menurut Imam Ramli hukumnya boleh. Pendapat Imam Ibn Hajar inilah yang *mu'tamad* (kuat).
- c. Selanjutnya menurut pendapat Rais 'Am PBNU KH. Bisri Syansuri mengenai keterangan dalam kitab *Hasyiyah al-Qulyubi* I/36 atau sesamanya adalah sebagai berikut:
 - "Selanjutnya apabila menulis al-Qur'an dengan tulisan bukan tulisan Arab dianggap boleh, maka hukumnya sama dengan mushaf di dalam hal menyentuh dan membawanya, dan sebaliknya. Selanjutnya berkenaan dengan penulisan al-Qur'an dengan huruf brail bagi orang-orang buta, hukumnya boleh karena hajat. Dan mengenai

penulisan al-Qur'an dengan huruf Arab bukan *rasm* Utsmani terdapat tiga pendapat. Dan yang kuat adalah pendapat Imam Malik serta Imam Ahmad ialah tidak boleh, sebagaimana keterangan kitab *I'anah al-Thalibin* I/68 (Pen.)."

Keterangan, dari kitab:

1. I'anah al-Thalibin¹

وَغَرُمُ كِتَابَتُهُ بِالْعَجَمِيَّةِ وَرَأَيْتُ فِي فَتَاوَى الْعَلاَّمَةِ ابْنِ حَجَرٍ أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ تَحْرُمُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ
بِالْعَجَمِيَّةِ كَقِرَآءَتِهِ فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ قَضِيَّةُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنِ الْأَصْحَابِ
الْعَجْمِيَّةِ كَقِرَآءَتِهِ فَأَجَابَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ قَضِيَّةُ مَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنِ الْأَصْحَابِ
التَّحْرِيْمُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَالَ وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ سَلْمَانَ هُ اللهُ أَنَّ قَوْمًا مِنَ الْفُرْسِ سَأَلُوهُ أَنْ يَصُعُبُ
التَّحْرِيْمُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَكَتَبَ لَهُمْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ بِالْفَارِسِيَّةِ فَأَجَابَ عَنْهُ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهُ كَتَبَ
النَّهِمْ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَكَتَبَ لَهُمْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ بِالْفَارِسِيَّةِ فَأَجَابَ عَنْهُ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهُ كَتَبَ
تَفْسِيْرَهُ الْفَاتِحَةَ لاَ حَقِيْقَتَهَا اهِ فَظَاهِرُ أَوْ صَرِيْحٌ فِي تَعُويْمٍ كِتَابَتِهَا بِالْعَجَمِيَّةِ

Haram menulis al-Qur'an dengan tulisan latin. Saya melihat dalam Fatawa al-'Alamah Ibn Hajar, bahwasannya beliau pernah ditanya: "Apakah haram menulis al-Qur'an dengan tulisan sebagaimana membacanya?" Ibn Hajar menjawab: "Berdasarkan ketetapan dalam kitab al-Majmu', penulisan tersebut haram." Adapun tentang yang dikutip dari Salman Ra., bahwa sekelompok orang Persia pernah memintanya menuliskan untuk mereka sesuatu dari al-Qur'an. Kemudian Salman Ra. menulis surat al-Fatihah dengan bahasa Persia, maka dalam hal ini Ibn Hajar menerangkan, bahwa yang ditulis oleh Salman Ra. itu adalah tafsir al-Fatihah dan bukan surat al-Fatihah itu sendiri. Dengan demikian, maka jelaslah keharaman menulis al-Qur'an dengan tulisan latin.

2. Hawasyai al-Syarwani wa al-'Ubbadi²

فَرْعُ أَفْتَى شَيْخُنَا أَحْمَدُ الرَّمْلِيُ بِجَوَازِ كِتَابَةِ الْقُرْآنِ بِالْقَلَمِ الْهِنْدِيِّ وَقِيَاسُهُ جَوَازُهُ بِنَحْوِ التُّرْكِيِّ أَيْضًا

Syeikh Ahmad Ramli berfatwa, boleh menulis al-Qur'an dengan bahasa India. Hal ini berarti, boleh juga dengan bahasa Turki.

3. Tuhfah al-Habib³

وَتَجُوْرُ كِتَابَهُ الْقُرْآنِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ بِخِلاَفِ قِرَآءَتِهِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ فَيَمْتَنِعُ وَالْحَالُ مَا ذُكِرَ

361

Muhammad Syaththa al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.), Jilid I, h. 67-68.

Al-Syarwani dan al-'Ubbadi, Hawasyai al-Syarwani wa al-'Ubbadi, (Mesir: Dar al-Shadir, 1997), Juz I, h. 154.

³ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, Tuhfah al-Habib, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1338 H), Juz I, h. 304.

لِأَنَّ مُسَمَّيَاتِهَا وَذَوَاتِهَا إِنَّمَا هُوَ الْقُرْآنُ

Boleh menulis al-Qur'an dengan selain bahasa Arab. Berbeda dengan membacanya, maka tidak boleh selain bahasa Arab. Hal ini mengingat bahwa substansi dan penamaannya adalah al-Qur'an itu sendiri.

4. Hasyiyah Qulyubi4

Dan boleh menulis al-Qur'an dengan selain bahasa Arab, bukan membacanya. Hukumnya sama dengan hukum mushaf, baik dalam memegang dan membawanya.

5. Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Syarh Manhaj al-Thullab 5

(فَاثِدَةٌ) سُئِلَ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ هَلْ تَحْرُمُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ الْعَزِيْزِ بِالْقَلَمِ الْهِنْدِيِّ أَوْ غَيْرِهِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لاَ تَحْرُمُ لِأَنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى لَفْظِهِ الْعَزِيْزِ وَلَيْسَ فِيْهِ تَغْيِيْرُ لَهُ بِخِلاَفِ تَرْجَمَتِهِ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ لِأَنَّ فِيْهَا تَغْيِيْرًا وَعِبَارَةُ الْإِثْقَانِ فِيْ عُلُومِ الْقُرْآنِ لِلإِمَامِ السَّيُوطِيّ هَلْ تَحْرُمُ كِتَابَتُهُ بِقَلَمِ غَيْرِ الْعَرَبِيِّ قَالَ الزَّرْكَشِيّ لَمْ أَرَ فِيْهِ كَلاَمًا لِأَحَدٍ مِنَ الْعُلَمَآءِ وَيُحْتَمَلُ الْجُوَارُ لِأَنَّهُ قَدْ يُحْسِنُهُ مَنْ يَقْرَؤُهُ. وَالْأَقْرَبُ الْمَنْعُ إِنْتَهَتْ وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوْلُ إِهْ بَرْمَاوِي

Imam Syihab al-Ramli pernah ditanya, apakah haram menulis al-Qur'an dengan tulisan India atau lainnya? Maka beliau menjawab, bahwa tidak haram, karena tulisan itu menunjukkan pada (bunyi) lafalnya, dan tidak menimbulkan perubahan dalam pelafalannya, berbeda dengan terjemahannya dengan selain bahasa Arab, karena di dalam terjemahan itu terdapat perubahan (pelafalan).

Dalam redaksi kitab al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an karya Imam al-Suyuthi disebutkan, apakah haram menulis al-Qur'an dengan tulisan selain Arab? Imam al-Zarkasyi menyatakan: "Aku tidal pernah mendapatkan pendapat di kalangan ulama. Hal ini berarti adanya kemungkinan kebolehannya, karena orang yang membacanya (al-Qur'an dengan tulisan selain Arab) terkadang dapat membacanya dengan baik. Pendapat yang lebih dekat pada kebenaran adalah terlarang. Sedangkan pendapat yang lebih sahih adalah yang pertama (tidak terlarang).

⁴ Syihabuddin al-Qulyubi, *Hasyiyah al-Qulubi*, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Juz I, h. 36.

⁵ Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Syarh Manhaj al-Thullab, (Mesir: Musthafa Muhammad, t. th.), Juz I, h. 76.

6. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib⁶
وَهَذَا التَّفْسِيْرُ لَيْسَ مُرَادًا هُنَا وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ هُنَا كُلُّ مَا كُتِبَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ لِدِرَاسَتِهِ وَلَوْ عَمُوْدًا أَوْ لَوْحًا أَوْ خَوْهُمَا

Tafsir ini bukan yang dimaksud di sini, adapun yang dimaksud adalah semua benda yang ditulis al-Qur'an untuk dipelajari, walaupun dalam bentuk pilar, papan tulis atau lainnya.

7. I'anah al-Thalibin7:

أَنَّ مَالِكًا ﴿ سُثِلَ: هَلْ يُحْتَبُ الْمُصْحَفُ عَلَى مَا أَحْدَثَهُ النَّاسُ مِنَ الْهِجَآءِ؟ فَقَالَ: لاَ، إِلاَّ عَلَى الْكُتْبَةِ الْأُولَى أَي الَّتِيْ كَتَبَهَا الْإِمَامُ وَهُوَ الْمُصْحَفُ الْعُثْمَانِيُّ. قَالَ أَبُوْ عَمْرٍو لاَ مُخَالِفَ فِيْ ذَلِكَ مِنْ عُلَمَآءِ الْأَثِمَّةِ

Imam Malik pernah ditanya: "Apakah mushaf itu ditulis dengan model huruf-huruf sebagaimana yang dibuat oleh orang-orang?" Beliau menjawab: "Tidak, kecuali sesuai dengan model tulisan yang pertama, yakni seperti yang ditulis oleh al-Imam sebagaimana yang termuat dalam *mushaf 'usmani*. Abu Umar berkata, dalam hal ini tidak ada perbedaan ulama dari kalangan para imam ulama.

326. Piringan Hitam atau Kaset dari Al-Qur'an

- S. Apakah piringan hitam atau kaset (yang merupakan tasjil shaut) dari al-Qur'an itu mempunyai kedudukan hukum Qur'aniyah yang sama pula?
- J. Piringan hitam atau kaset yang merekam al-Qur'an adalah bukan mushaf, sebab barang-barang tersebut tidak masuk dalam ta'rif Mushaf. Selanjutnya mengenai hukum mendengarkan suara al-Qur'an yang keluar dari piringan hitam atau kaset adalah:
- a. Suara yang didengar dari piringan hitam atau kaset itu sama dengan suara al-Qur'an yang didengar dari jamadat (benda mati), maka tidak dihukumi al-Qur'an. Keterangan ini diambil dari kitab Anwar al-Syuruq fi Ahkam al-Shunduq, halaman 31 bahwa Syaikh Abdul Qadir al-Ahdali membolehkan mendengarkan piringan hitam dengan istilah laa ba'sa bih. Beliau menjelaskan hal ini dengan syairnya:

⁶ Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Beirut Dar al-Fikr, t. th.), Juz I, h. 118.

Muhammad Syaththa al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.), Jilid I, h. 68.

Aku pernah ditanya tentang mendengarkan alat musik,

Maka aku jawab sesuai dengan penelitian, yang demikian itu tidak mengapa.

- b.Pendapat Syaikh Muhammad Ali al-Maliki dalam kitabnya Anwar al-Syuruq fi Ahkam Al-Shunduq, halaman 31 setelah beliau memberi alasan-alasan secara panjang lebar, akhirnya beliau memberi kesimpulan, bahwa merekam al-Qur'an dalam kaset atau piringan hitam dan menggunakannya itu tidak lepas dari menghina atau merendahkan martabat al-Qur'an. Karena itu, merekam al-Qur'an dalam kaset atau piringan hitam sebagaimana yang maklum itu hukumnya haram pula mendengarkan al-Qur'an darinya.
- c. Menurut qaul mukhtar 'inda al-Hanafiyah sebagaimana tersebut dalam al-Fatawa al-Syar'iyyah, karya Husain Mahluf Juz I, halaman 289: "Mendengar ayat sajadah dari burung seperti Beo, menurut pendapat yang terpilih, tidak wajib sujud karena bukan bacaan yang sebenarnya, namun sekedar kicauan yang tidak dimengerti. Pendapat yang lain menyatakan, wajib bersujud karena orang yang mendengarkan itu telah mendengarkan firman Allah Swt. walaupun dari burung yang sedang berkicau."

Keterangan, dari kitab:

1. I'anah al-Thalibin 8

Dan tidak samar lagi, bahwa mushaf itu adalah nama bagi kertas yang tertulis firman Allah *Ta'ala*.

2. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib9

Mushaf adalah nama bagi sesuatu yang tertulis firman Allah Swt. yang berada di antara dua sampul.

3. Anwar al-Syuruq fi Ahkam al-Shunduq¹⁰

Aku pernah ditanya tentang mendengarkan alat musik,

Maka aku jawab sesuai dengan penelitian, yang demikian itu tidak mengapa.

4. Al-Fatawa al-Syar'iyah¹¹

⁸ Muhammad Syaththa al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.), Jilid I, h. 66.

⁹ Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Matn Abi Syuja, (Bandung: Syarikah al-Ma'rif, t. th.), Juz I, h. 118.

¹⁰ Muhammad Ali al-Maliki, Anwar al-Syuruq fi Ahkam al-Shunduq, h. 30.

¹¹ Husain Makhluf, al-Fatawa al-Syar'iyah, Juz I, h. 298.

وَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ إِنْ سَمِعَ آيَةَ السَّجْدَةِ مِنَ الطَّيْرِ كَالْبَبْغَاءِ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ السَّجْدَةُ فِي الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ قِرَآءَةً بَلْ مُحَاكَةً لِعَدَمِ التَّمْيِيْزِ. وَقِيْلَ يَجِبُ لِأَنَّ السَّامِعَ قَدْ سَمِعَ كَلاَمَ اللهِ وَإِنْ كَانَ مِنَ الطَّيْرِ الْحَاكِي

Kalangan Hanafiyah menyatakan, bahwa mendengar ayat sajadah dari burung seperti Beo, menurut pendapat yang terpilih, tidak wajib sujud karena bukan bacaan yang sebenarnya namun sekedar kicauan karena tidak terdapat sifat tamyiz darinya. Pendapat yang lain menyatakan, wajib bersujud karena orang yang mendengarkan itu telah mendengarkan firman Allah Swt. walaupun dari burung yang sedang berkicau.

327. Terjemah al-Qur'an oleh Orang yang Bukan Islam

- S. Bagaimana hukumnya terjemahan/tafsiran al-Qur'an dalam bahasa asing oleh orang-orang yang bukan Islam atau orang-orang Islam yang menerjemahkannya dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing itu?
- J. Terjemahan atau tafsiran al-Qur'an yang dibuat oleh orang yang tidak beragama Islam sangat diragukan kebenarannya. Maka bagi orang awam dilarang membaca dan mengutip dari terjemah/tafsir yang seperti itu.

328. Penggantian Kelamin

- S. Bagaimana hukumnya penggantian kelamin?
- J. Penggantian kelamin hukumnya haram.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah Shawi 'ala Tafsir al-Jalalain¹²

(قَوْلُهُ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ) أَي مَا خَلَقَهُ وَمِنْ ذَلِكَ تَغْيِيْرُ صِفَاتِ نَبِيِّنَا ﷺ الْوَاقِعُ مِنَ الْمَهُودِ وَالنَّصَارَى وَتَغْيِيْرُ الشَّعْرِ بِالْوَصْلِ.

"Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan mendorong mereka (memotong telinga-

¹² Ahmad al-Shawi, Hasyiyah Shawi 'ala Tafsir al-Jalalain, (Mesir: Isa al-Halabi, t.th.), Juz I, h. 214.

telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku mendorong mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu mereka benar-benar mengubahnya." (QS. Al-Nisa: 119)

Firman Allah Swt.: "Lalu mereka benar-benar mengubahnya." Yakni mengubah segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Swt., seperti mengubah sifat-sifat Nabi Saw. oleh kalangan Yahudi dan Nasrani, dan mengubah kitab-kitab mereka. Termasuk pula mengubah tubuh dengan membuat tato dan mengubah rambut dengan menyambungnya.

329. Memberi Imbalan Kepada Pengedar Derma

- S. Panitia pembangunan sarana keagamaan (seperti mesjid atau madrasah) menjanjikan kepada para pengedar (pencari) derma untuk keperluan pembangunan tersebut diberikan imbalan, misalnya sepuluh persen dari hasil pengumpulan derma itu. Hal yang demikian itu bagaimana hukumnya? Andaikata hal itu termasuk ju'alah yang fasidah karena menjanjikan sesuatu yang majhul dan bukan miliknya panitia maka bagaimana pekerjaan para pengedar (pencari) derma itu? Apakah menjadi cuma-cuma ataukah mereka berhak menerima ujrah mitsil itu diambilkan dari hasil derma tersebut?
- J. Akad tersebut termasuk ju'alah fasidah. Dan pencari derma tersebut berhak menerima ujrah mitsil dan boleh diambilkan dari hasil derma tersebut.

Keterangan, dari kitab:

1. Bughyah al-Mustarsyidin¹³:

(مَسْأَلَةُ ك) اِنْكَسَرَ مَرْكَبٌ فِي الْبَحْرِ فَأَمَرَ صَاحِبُهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ أَخْرَجَ مِنَ الْمَتَاعَ شَيْئًا فَلَهُ رُبْعَهُ مَثَلًا، فَإِنْ كَانَ الْمَجْعُولُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا عِنْدَ الْجَعِيْلِ بِأَنْ كَانَ شَاهَدَهُ قَبْلَ الْغَرْقِ أَوْ وَصَفَهُ لَهُ صَحَّ الْعَقْدُ وَاسْتَحَقَّ الْمُسَمَّى وَإِلاَّ فَسَدَ وَاسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْل

(Kasus dari Muhammad bin sulaiman al-Kurdi) Bila ada kapal pecah di lautan, dan pemiliknya memerintahkan pada setiap orang yang mengeluarkan seberapapun dari muatannya, ia akan mendapat imbalan seperempatnya, maka bila maj'ul 'alaih (barang yang dijanjikan) itu diketahui oleh ja'il (orang yang dijanjikan imbalan), yakni dengan ia lihat sebelum kapal tenggelam, atau si pemilik kapal menyebutkan sifat barang tersebut kepadanya, maka akad ju'alah tersebut sah dan ia berhak

¹³ Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 168-169.

mendapat upah yang disebut dalam akad (yang dijanjikan). Bila tidak, maka akadnya rusak dan ia berhak mendapat upah standar.

2. Ahkam al-Fuqaha, Keputusan Muktamar NU Ke-2, soal nomor 35.

330. Menambah Kalimah "Abdul Qadir Waliyullah" Sesudah Kalimah Thayyibah

- S. Bagaimana hukumnya menambah kalimat "Abdul Qadir Waliyullah" sesudah kalimah Thayyibah?
- J. Jawaban masalah ini ada dua redaksi, yang satu dari Tim Perumus, sedang yang satu lagi dari Pimpinan Sidang dalam Konggres:
- a. Dari Perumus: Boleh asal tidak dimasukkan dalam rangkaian dzikir.
- b. Dari Pimpinan Sidang: Dzikir yang warid/berlaku adalah: Laailaaha illallaah Muhammad Rasulullah. Adapun menyebut menambah kalimah Syekh Abdul Qadir Waliyullah boleh.[]

KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA

Di Kaliurang Yogyakarta Pada Tanggal 30 Syawal 1401 H. / 30 Agustus 1981 M.

> 331. Bayi Tabung 332. Cangkok Mata 333. Bank Mata

334. Cangkok Ginjal dan Jantung

335. Lembaga Zakat Hubungannya dengan Amil Zakat

336. Memberikan Zakat kepada Mesjid, Pondok, Madrasah

337. Zakat Tanaman Tebu, Cengkeh dan Sesamanya 338. Zakat Perhotelan, Pengangkutan

339. Peranan Uang Emas/Perak Diganti dengan Uang Kertas, Cek, Obligasi, Saham Perusahaan dan Macam-macam Surat Berharga 340. Memulai Ihram dari Jeddah

341. Hukumnya Pemotongan Hewan dengan Mesin

331. Bayi Tabung

- S. Bagaimana hukumnya mengerjakan proses bayi tabung? Bayi tabung ialah bayi yang dihasilkan bukan dari persetubuhan, tetapi dengan cara mengambil mani/sperma laki-laki dan ovum/mani perempuan, lalu dimasukkan dalam suatu alat dalam waktu beberapa hari lamanya. Setelah hal tersebut dianggap mampu menjadi janin, maka dimasukkan ke dalam rahim ibu.
- J. Hukumnya memproses bayi tabung ditafsil sebagai berikut:
- Apabila mani yang ditabung dan yang dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut ternyata bukan mani suami istri, maka hukumnya haram.
- 2. Apabila mani yang ditabung tersebut mani suami istri, tetapi cara mengeluarkannya tidak *muhtaram*, maka hukumnya juga haram.
- 3. Apabila mani yang ditabung itu mani suami istri dan cara mengeluarkannya termasuk *muhtaram*, serta dimasukkan ke dalam rahim istrinya sendiri, maka hukumnya boleh.

NB:

- a. Mani *muhtaram* ialah mani yang keluar/dikeluarkan dengan cara tidak dilarang oleh syara'. Sedang mani bukan *muhtaram* ialah selain yang tersebut di atas.
- b. Tentang anak yang dari mani tersebut dapat ilhaq atau tidak kepada pemilik mani, terdapat khilaf antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Menurut Imam Ibnu Hajar tidak bisa ilhaq kepada pemilik mani secara mutlak (baik keluarnya mani tersebut muhtaram atau tidak), sedangkan menurut Imam Ramli anak tersebut bisa ilhaq kepada pemilik mani, bila mani tersebut keluarnya termasuk muhtaram.

Keterangan, dari kitab:

1. Tafsir al-Qur'an al-'Azhim1

Dari Ibn Abbas, beliau berkata: "Rasulullah Saw. bersabda: "Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dari pada mani yang ditaruh seorang lakilaki (berzina) di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya."

2. Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh²

370

¹ Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), Juz III, h. 50.

² Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), Juz II, h. 25.

Barangsiapa yang beriman kepada Allah Swt. dan hari kiamat, maka janganlah sekali-kali berzina dengan istri saudaranya.

3. Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin3

Seandainya ada wanita melahirkan seorang anak yang diketahui bukan berasal dari suaminya, besertaan adanya kemungkinan berasal darinya, maka si suami itu harus menafikannya, karena tidak adanya penafian itu mengandung unsur menemukan nasab anak itu kepadanya. Sementara menemukan nasab anak yang tidak berasal darinya itu haram.

4. Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib4

الْحَاصِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَنِيِّ الْمُحْتَرَمِ حَالَ خُرُوْجِهِ فَقَطْ عَلَى مَا اعْتَقَدَهُ م ر وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ حَالَ الدُّخُوْلِ وَتَجِبُ الْعِدَّةُ بِهِ إِذَا طُلِقَتْ الزَّوْجَةُ قَبْلَ الْوَطْءِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلاَقًا لِابْنِ حَجَرٍ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ أَنْ يَكُونَ مُحْتَرَمًا فِي الْحَالَيْنِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا

Kesimpulannya adalah, bahwa yang dimaksud dengan mani muhtaram (terhormat/tidak haram) itu adalah kondisi keluarnya saja, sebagaimana yang diyakini oleh Imam Ramli, walaupun tidak muhtaram ketika masuk. Maka seorang wanita wajib ber'iddah dengan sebab masuknya mani tersebut bila ia tertalak sebelum bersetubuh menurut pendapat mu'tamad. Berbeda dengan Ibn Hajar, sebab beliau mempertimbangkan mani tersebut muhtaram dalam dua kondisinya (saat keluar dari si laki-laki dan saat masuk ke rahim si perempuan) sebagaimana yang ditetapkan Syaikhuna.

10. Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar⁵

(Faidah) Seandainya seorang lelaki berusaha mengeluarkan spermanya (beronani) dengan tangan istri atau budak wanitanya, maka hal tersebut boleh karena istri dan budaknya itu memang tempat bersenang-senangnya.

Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Juz IV, h. 32.

⁴ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1951), Juz IV, h. 37.

⁵ Abu Bakar bin Muhammad al-Khishni, Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar, (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Juz I, h. 478.

332. Cangkok Mata

S. Bagaimana hukumnya cangkok mata? Transplantansi-kornea atau cangkok mata ialah mengganti selaput mata seseorang dengan selaput mata orang lain atau kalau mungkin dengan selaput mata binatang. Jadi yang diganti hanya selaputnya saja bukan bola mata seluruhnya. Adapun untuk mendapatkan kornea/selaput mata ialah dengan cara mengambil bola mata seluruhnya dari orang yang sudah mati. Bola mata itu kemudian dirawat baik-baik dan mempunyai kekuatan paling lama 72 jam (tiga hari tiga malam). Sangat tipis sekali dapat dihasilkan cangkok kornea dari binatang.

J. Hukumnya ada dua pendapat:

 Haram, walaupun mayit itu tidak terhormat seperti mayitnya orang murtad. Demikian pula haram menyambung anggota manusia dengan anggota manusia lain, bahaya buta itu tidak sampai melebihi bahayanya merusak kehormatan mayit.

2. Boleh, disamakan dengan diperbolehkannya menambal dengan

tulang manusia, asalkan memenuhi 4 syarat:

a. Karena dibutuhkan.

- b. Tidak ditemukan selain dari anggota tubuh manusia.
- c. Mata yang diambil harus dari mayit yang muhaddaraddam.
- d. Antara yang diambil dan yang menerima harus ada persamaan agama.

Keterangan, dari kitab:

Ahkamul Fuqaha'⁶

مَسْأَلَةُ مَا قَوْلُكُمْ فِي افْتَاءِ مُفْتِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ بِجَوَازِ أَخْذِ حَدَاقَةِ الْمَيِّتِ لِوَصْلِهَا إِلَى عَيْنِ الْأَعْنَى هَلْ هُوَ صَحِيْحٍ، بَلْ يَحْرُمُ أَخْذُ الْإِفْتَاءَ غَيْرُ صَحِيْحٍ، بَلْ يَحْرُمُ أَخْذُ حَدَاقَةِ الْمَيِّتِ وَلَوْ غَيْرُ صَحِيْحٍ، بَلْ يَحْرُمُ أَخْذُ حَدَاقَةِ الْمَيِّتِ وَلَوْ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ كَمُرْتَدًّ وَحَرْبِيٍّ. وَيَحْرُمُ وَصْلُهُ بِأَجْزَاءِ الْأَدَيِّ لِأَنَّ ضَرَرَ الْعَمَى لاَ يَرِيْدُ عَلَى مَفْسَدَةِ انْتِهَاكِ حُرُمَاتِ الْمَيِّتِ كَمَا فِيْ حَاشِيَةِ الرَّشِيْدِيِّ عَلَى ابْنِ الْعِمَادِ صـ ٢٦

Permasalahan, bagaimana pendapat Anda sekalian tentang fatwa oleh Mufti Mesir yang memperbolehkan cangkok bola mata mayat untuk dipasangkan ke mata orang buta. Apakah fatwa ini benar apa tidak? Muktamar menetapkan, bahwa fatwa itu tidak benar, dan bahkan haram mencangkok bola mata mayat meskipun dari orang yang tidak terhormat, seperti orang murtad dan orang kafir musuh. Haram pencangkokan

⁶ Ahkamul Fuqaha, Keputusan Muktamar NU ke-23 tahun 1962 di Solo (masalah nomor 315).

dengan bagian-bagian tubuh manusia, karena bahaya kebutaan tidak melebihi kerusakan pencemaran kehormatan mayat.

2. Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad'

"Adapun tulang manusia, ketika kondisinya demikian (terdapat alternatif menyambung tulang dengan selain tulang najis dan selain tulang manusia) maka keberadaannya sama seperti tidak ada, sebagaimana dinyatakan oleh al-Halabi dalam penjelasannya atas kitab al-Manhaj. Walaupun bukan orang terhormat seperti orang murtad dan orang kafir. Maka haram menyambung tulang dengannya dan harus dicabut."

3. Hadits Nabi Saw.

a. Riwayat Aisyah Ra.

"Memecahkan tulang mayat sama seperti memecahkannya ketika masih hidup." (HR. Ahmad dalam al-Musnad, Abu Dawud dan Ibn Majjah)

b. Riwayat Ummu Salamah Ra.

"Memecahkan tulang mayat, dosanya sama dengan memecahkannya dalam keadaan masih hidup." (HR. Ibn Majjah), hadits hasan.

2. Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad⁸

قَالَ الْحَلَبِيُّ وَيَبْقَى مَا لَوْ لَمْ يُوجَدْ صَالِحٌ غَيْرُهُ فَيَحْتَمِلُ جَوَازُ الْجَبْرِ بِعَظْمِ الْآدَيِّ الْمَيِّتِ كَمَا يَجُورُ لِلْمُضْطَرِّ أَكُلُ الْمَيْتَةِ وَإِنْ لَمْ يَخْشَ إِلَّا مُبِيحَ التَّيَمُّمِ فَقَطْ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِبَقَاءِ الْعَظْمِ هُنَا فَالِامْتِهَانُ دَائِمٌ وَجَزَمَ الْمَدَابِغِيُّ عَلَى الْحَطِيبِ بِالْجُوازِ وَنَصُّهُ فَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ إِلَّا عَظْمُ الْأَدِيِّ قُدِمَ عَظْمُ نَحْوِ الْحَرْقِ كَالْمُرْتَدِ ثُمَّ الدِّمِّ ثُمَّ الْمُسْلِمِ

Al-Halabi berkata: "Dan masih menyisakan kasus, andaikan tidak ditemukan tulang penambal yang layak selain tulang manusia. Maka mungkin saja boleh menambal pasien dengan tulang manusia yang telah mati. Seperti halnya diperbolehkan memakan bangkai bagi seseorang

Husain al-Rasyidi, Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), h. 26-27.

⁸ Husain al-Rasyidi, Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), h. 26-27.

dalam kondisi darurat, meskipun dia hanya khawatir atas udzur yang memperbolehkan tayamum saja. Dan kasus (menambal dengan tulang manusia) tersebut terkadang dibedakan (dengan kasus memakan bangkai dalam kondisi darurat), sebab tulang yang digunakan menambal masih wujud, maka penghinaan terhadap mayit (yang diambil tulangnya) terus terjadi. Dan al-Madabighi dalam catatannya atas karya al-Khatib, mantap atas diperbolehkannya menambal dengan tulang mayit, redaksinya yaitu: "Bila tidak ada yang layak kecuali tulang manusia, maka tulang kafir harbi seperti orang murtad harus didahulukan, kemudian tulang kafir dzimmi, dan baru tulang mayit muslim.

2. Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin9

(Dan dipebolehkan baginya) maksudnya adalah orang dalam kondisi darurat, (memakan manusia yang telah mati), sebab kehormatan orang hidup lebih besar -dari orang pada yang telah mati-.

3. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj¹⁰

(Dan dipebolehkan baginya) maksudnya adalah orang dalam kondisi darurat, (memakan manusia yang telah mati), ketika ia tidak menemukan bangkai selainnya, sebagaimana telah dibatasi oleh al-Rafi'i dan al-Nawawi dalam kitab al-Syarh al-Kabir dan al-Raudhah. Sebab kehormatan orang hidup lebih besar -dari orang pada yang telah mati-.

4. Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin¹¹

(Dan bila seseorang menyambung tulangnya) karena pecah dan butuh menyabungnya, (dengan najis) maksudnya tulang najis, (karena tidak menemukan tulang yang suci) yang layak dijadikan penyambung, (maka

⁹ Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Juz IV, h. 262.

Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1957), Juz IV, h. 307.

¹¹ Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Juz IV, h. 128.

ia adalah orang yang berudzur) dalam hal tersebut.

5. Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab12

(Dan bila seseorang menyambung tulangnya) dengan qayyid yang saya tambahkan, (karena butuh) menyambungnya, (dengan najis) maksudnya tulang najis, (yang tidak layak) dijadikan penyambung (tulang selainnya), dan redaksi tersebut lebih tepat dari redaksi al-Nawawi: "Karena tidak adanya tulang suci.", (maka ia dianggap udzur) dalam hal tersebut, oleh sebab itu shalatnya tetap sah besertaan tulang najis tersebut —di tubuhnya-.

- 6. Referansi lain
 - a. Bujairimi Igna' IV/272.
 - b. Al-Muhadzdzab I/251.

333. Bank Mata

- S. Bagaimana hukumnya Bank mata? Bank Mata ialah semacam badan atau yayasan yang tugasnya antara lain mencari dan mengumpulkan daftar orangorang yang menyatakan dirinya rela diambil bola matanya sesudah mati untuk kepentingan manusia.
- J. Hukumnya Bank Mata adalah sama hukumnya pencangkokan mata, sebagaimana keterangan dan penjelasan di atas. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

لِلْوَسَائِلُ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Suatu media penetapan hukum itu memiliki status hukum yang sama dengan obyek hukum itu sendiri. ¹³

334. Cangkok Ginjal dan Jantung

- S. Bagaimana hukumnya cangkok ginjal dan jantung?
- a. Cangkok ginjal ialah mengganti ginjal seseorang dengan ginjal orang lain. Ginjal pengganti itu dapat diambil dari orang yang masih hidup atau orang yang sudah mati. Pengambilan ginjal dari orang hidup itu mungkin

¹² Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab pada al- Tajrid li Naf' al-'Abid, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1950) Juz I, h. 238-239.

¹³ Izzuddin Ibn Abdissalam, Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000 M), Juz I, h. 177.

karena setiap orang mempunyai dua ginjal.

b. Transplantasi jantung ialah mengganti jantung seseorang dengan jantung orang lain. Transplantasi jantung ini hanya dapat dilakukan dari orang yang sudah mati saja, karena setiap orang hanya mempunyai satu jantung.

Kiranya sangat sulit melakukan transplantasi jantung dan ginjal dari binatang. Karena dua hal ini dibutuhkan adanya persamaan antara darah yang memberikan ginjal atau jantung (donor) dengan orang yang mendapatkan ganti ginjal atau jantung tadi.

J. Hukumnya cangkok ginjal dan jantung adalah sama dengan hukumnya

pencangkokan mata. (Lihat masalah no. 332)

335. Lembaga Zakat Hubungannya dengan Amil Zakat

- S. Bagaimana kedudukan hukum/status syar'i lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan fiqh tentang Amil?
- J. Hukumnya lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah adalah sah, karena pemerintah Indonesia mempunyai hak syar'i untuk membentuk Amil.

Keterangan, dari kitab:

1. Mauhibah Dzi al-Fadhl14

وَالصِّنْفُ الْحَامِسُ الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا وَمِنْهُمْ السَّاعِيُ الَّذِيْ يَبْعَثُهُ ٱلإِمَامُ لِأَخْذِ الزَّكَوَاتِ، وَبَعْثُهُ وَاجِبٌ. وَالْعَامِلُوْنَ عَلَيْهَا أَي الزَّكَاةِ يَعْنِي مَنْ نَصَبَهُ الْإِمَامُ فِيْ أَخْذِ الْعُمَّالَةِ مِنَ الزَّكُواتِ

Bagian kelima adalah para Amil, mereka antara lain adalah Sa'i yang diutus penguasa untuk menarik zakat. Dan pengangkatannya itu wajib. Amil zakat adalah orang yang diangkat imam untuk menjadi pegawai penarik zakat.

2. Ihya' 'Ulum al-Din15

الْأَصْلُ الْعَاشِرُ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّرَ وُجُودُ الْوَرَعِ وَالْعِلْمِ فِيمَنْ يَتَصَدَّى لِلْإِمَامَةِ وَكَانَ فِي صَرْفِهِ إِثَارَةُ فِتْنَةٍ لَا تُطَاقُ حَكَمْنَا بِانْعِقَادِ إِمَامَتِهِ لِأَنَّا بَيْنَ أَنْ نُحَرِّكَ فِتْنَةً بِالاسْتِبْدَالِ فَمَا يَلْقَى الْمُسْلِمُونَ فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ يَزِيدُ عَلَى مَا يَفُوتُهُمْ مِنْ نُقْصَانِ هذِهِ الشُّرُوطِ الَّتِي أُثْبِتَتْ لِمَزيَّةِ الْمَصْلَحَةِ فَلَا

376

¹⁴ Mahfud al-Termasi, Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: Al-Amirah al-Syarafiyah, 1326 H), Jilid IV, h. 130.

¹⁵ Abu Hamid al-Ghazali, Ihya 'Ulum al-Din, (Mesir: Muassasah al-Halabi, 1968), Juz I, h. 157.

يُهْدَمُ أَصْلُ الْمَصْلَحَةِ شَغْفًا بِمَزَايَاهَا كَالَّذِي يَبْنِي قَصْرًا وَيَهْدِمُ مِصْرًا وَبَيْنَ أَنْ خَصُّمَ بِخُلُوِّ الْبِلَادِ عَنِ الْإِمَامِ وَبِفَسَادِ الْأَقْضِيَةِ وَذَلِكَ مُحَالً وَخَنْ نَقْضِي بِنُفُوذِ قَضَاءِ أَهْلِ الْبَغْيِ فِي بِلَادِهِمْ لِمَسِيسِ حَاجَتِهِمْ فَكَيْفَ لَا نَقْضِي بِصِحَّةِ الْإِمَامَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ

Ajaran pokok kesepuluh -dari sepuluh pokok ajaran yang dibawa Nabi Saw.- adalah sungguh bila tidak ditemukan sifat wira'i dan sifat kealiman pada orang yang menguasai kepimpinanan Negara, sementara bila penurunannya akan menimbulkan fitnah yang tidak bisa dibendung, maka kita menghukumi sah kepemimpinannya. Sebab kita dalam berada di antara (dua opsi), (i) menyulut fitnah dengan (menurunkan dan) mencari penggantinya, maka bahaya yang dialami kaum muslimin lebih besar dari pada tidak terpenuhinya syarat kepemimpinan yang ditetapkan karena kemaslahatan yang sempurna. Oleh sebab itu, prinsip maslahat tidak boleh dirusak demi tercapainya kemaslahatan yang sempurna, seperti halnya orang yang membangun istana dan merusak kota. (ii) Kita hukumi negara tidak memiliki pemimpin dan rusaknya hukum, dan hal tersebut tentu mustahil, sementara kita mengakui keabsahan hukum para pemberontak di daerahnya karena sangat dibutuhkan warga sekitar, maka bagaimana kita tidak menghukumi keabsahan kepemimpinan negara dalam kondisi hajat dan darurat?

3. Kifayah al-Akhyar16

قَالَ الْغَزَالِيّ وَاجْتِمَاعُ هِذِهِ الشُّرُوطِ مُتَعَدِّرُ فِي عَصْرِنَا لِحُلُوِّ الْعَصْرِ عَنِ الْمُجْتَهِدِ الْمُسْتَقِلِّ فَالْوَجْهُ تَنْفِيْدُ قَضَاءِ كُلِّ مَنْ وَلاَّهُ سُلْطَانُ ذُو الشَّوْكَةِ وَإِنْ كَانَ جَاهِلاً أَوْ فَاسِقًا لِعَلاَّ تَعَطَّلَ مَصَالِحُ الْمُسْلِمِيْنَ. قَالَ الْإِمَامُ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا أَحْسَنُ

Al-Ghazali menyatakan, adanya syarat-syarat (menjadi penguasa yang benar) tersebut sangat sulit di masa kita sekarang ini, sebab tidak ada mujtahid yang mandiri. Karenanya, maka boleh melaksanakan semua keputusan dari siapapun yang memiliki kekuasaan yang efektif, meski bodoh atau fasik, agar kepentingan umat Islam tidak terbengkalai. Imam al-Rafi'i menyatakan, pendapat ini adalah pendapat yang baik.

- 5. Referansi Lain
 - a. Keputusan Muktamar NU ke-20, masalah no. 277.
 - b. I'anah al-Thalibin, Juz II, h. 190.
 - c. Minhaj al-Qawim, h. 115.

¹⁶ Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni, Kifayah al-Akhyar, (Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhan, t. th.), Juz II, h. 210.

336. Memberikan Zakat kepada Mesjid, Pondok, Madrasah

- S. Bagaimana hukumnya apa yang berlaku di masyarakat umum dengan memberikan zakatnya kepada mesjid, madrasah, panti-panti asuhan, yayasan sosial/keagamaan dan lain-lain pembagian tertentu?
- J. Memberikan zakat kepada mesjid, madrasah, pondok pesantren dan sesamanya hukumnya ada dua pendapat:
- 1. Tidak boleh, berdasarkan keputusan Muktamar NU ke-1, masalah nomor 5.
- 2. Boleh berdasarkan kitab Tafsir al-Munir I/344. Demikian pula para ahli fiqh menyatakan boleh menyalurkan zakat kepada segala macam sektor sosial yang positif, seperti membangun mesjid, madrasah, mengurus orang mati dan lain sebagainya. Pendapat ini dikuatkan juga oleh fatwa Syaikh Ali al-Maliki dalam kitab Qurrah al-'Ain, 73, yang menyatakan: "Praktek-praktek zaman sekarang banyak yang berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, sebagaimana Imam Ahmad dan Ishaq yang memperbolehkan penyaluran zakat pada sektor di jalan Allah, seperti pembangunan mesjid, madrasah dan lain-lainnya.

Keterangan, dari kitab:

1. Bughyah al-Musytarsyidin 17

Masjid sama sekali tidak berhak menerima zakat. Sebab zakat itu penyalurannya tidak boleh kecuali untuk orang muslim yang merdeka.

2 Al-Mizan al-Kubra 18

Imam empat mazhab sepakat, tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat untuk membangun masjid atau mengkafani orang mati.

3. Murah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid¹⁹

¹⁷ Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 106.

¹⁸ Abdul Wahhab al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t. th.), Juz II, h. 13.

¹⁹ Muhamad Nawawi bin Umar al-Jawi, Murah Labid li Kasyf Ma'na al-Qur'an al-Majid, (Mesir: Isa al-Halabi, 1314 H), Juz I, h. 344.

وَنَقَلَ الْقَفَّالُ مِنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَارُوا صَرْفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيْعِ وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِيْنِ الْمَيِّتِ وَبِنَاءِ الْحُصُوْنِ وَعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى فِي سَبِيْلِ اللهِ عَامُ فِي الْكُلِّ

Al-Qaffal menukil dari sebagian ahli fiqh, mereka memperbolehkan penyaluran zakat ke semua sektor sosial seperti mengkafani mayat, membangun benteng dan merehab mesjid. Sebab firman Allah Swt. fi sabilillah (al-Baqarah: 60) pengertiannya umum mencakup semuanya.

4. Qurah al-'Ain20

أَنَّ الْعَمَلَ الْيَوْمَ بِالْقَوْلِ الْمُقَابِلِ لِلْجُمْهُوْرِ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهُ فِيْ الْمُسْلِمِيْنَ لِلاسْتِعَانَةِ بِهِ عَلَى رَاهَوَيْهُ فِيْ أَخْذِ سَهْمِ سَبِيْلِ اللهِ مِنَ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ لِلاسْتِعَانَةِ بِهِ عَلَى تَأْسِيْسِ الْمُدَارِسِ وَالْمُعَاهِدِ الدِّيْنِيَّةِ صَارَ الْيَوْمَ مِنَ الْمُتَعَيَّنِ.

Sungguh praktek sekarang ini dengan qaul muqabil Jumhur, yang menjadi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih perihal pengambilan bagian sabilillah yang diperoleh dari zakat wajib orang-orang kaya muslim untuk membantu pendirian sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga keagamaan, maka praktek itu menjadi suatu keharusan.

3. Al-Fatawa al-Syar'iyah wa al-Buhuts al-Islamiyah²¹

أَنَّ مِنْ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ الثَّمَانِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الآيَةَ إِنْفَاقُهَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَسَبِيْلُ اللهِ يَشْمُلُ جَمِيْعَ وُجُوْهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِيْنِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْحُصُوْنِ وَعِمَارَةِ الْمُسْلِمِيْنَ كَمَا اللهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا فِيْهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ كَمَا الْمَسْجِدِ وَتَجُهِيْزِ الْغُزَاةِ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا فِيْهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ كَمَا وَرَجَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَاعْتَمَدَ الْإِمَامُ الْقَقَالُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَنَقَلَهُ عَنِ الرَّازِيِّ فِيْ تَفْسِيْرِهِ وَهُو النَّذِي فَعْتَارُهُ لِلْفَتْوَى

Sungguh termasuk penyaluran ke delapan golongan penerima zakat seperti yang tertera dalam firman Allah Swt.: Zakat itu hanya untuk orang-orang fakir ... (al-Taubah: 60), adalah untuk sabilillah. Sedangkan sabilillah itu mencakup semua sektor sosial, seperti mengkafani mayat, membangun benteng, merehab masjid, dan pembekalan prajurit yang akan berperang serta lainnya yang memuat kepentingan umum umat Islam. Sebagaimana sebagian ahli fiqh telah memasukkan sektor sosial tersebut ke dalam kategori sabilillah dan dipedomani Imam al-Qaffal

²⁰ Ali al-Maliki, Qurrah al-'Ain, h. 73.

²¹ Muhamad Mahluf, al-Fatawa al-Syar'iah wa al-Buhuts al-Islamiyah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1965), Jilid I, h. 297.

dari kalangan al-Syafi'iyah serta dinukil al-Razi dalam tafsirnya yang menjadi pilihan kami dalam berfatwa.

337. Zakat Tanaman Tebu, Cengkeh dan Sesamanya

- S. Apakah wajib zakat bagi penanam tanam-tanaman yang bukan tanaman zakawi (seperti yang sudah dinash) dengan tujuan diperdagangkan, seperti tanaman tebu, cengkeh dan sesamanya?
- J. Menanam tanaman yang bukan tanaman *zakawi* dengan niat diperdagangkan, apabila telah memenuhi syarat-syarat *tijarah*, maka wajib zakat seperti zakat barang dagangan.

Keterangan, dari kitab:

1. Busyra al-Karim²²

Abu Dawud meriwayatkan tentang kewajiban zakat dari barang yang dipersiapkan untuk diperdagangkan.

2. Hawasyi al-Madaniyah²³

Kami telah menetapkan, bahwa barang yang tidak wajib dizakati karena dzatnya itu wajib dizakati tijarah, seperti batang kayu, jerami dan tanah. Sebab semuanya itu tidak terkena wajib zakat karena dzatnya, sementara barang yang tidak terkena wajib zakat karena dzatnya, maka terkena wajib zakat tijarah.

338. Zakat Perhotelan, Pengangkutan

- S. Apakah wajib zakat usaha perniagaan mutakhir (modern) yang bergerak di dalam bidang jasa, seperti perhotelan, pengangkutan dan sesamanya?
- J. Perniagaan jasa seperti perhotelan, pengangkutan dan sesamanya adalah termasuk *tijarah* yang mengandung arti *tijarah*, maka wajib zakat. *Keterangan*, dari kitab:
- 1. Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar²⁴

²² Sa'id Ibn Muhammad, Busyra al-karim, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. th), h. 50.

²³ Sulaiman al-Kurdi, *Hawasyi al-Madaniyah*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1340H), Juz II, h. 95.

²⁴ Abu Bakar bin Muhammad al-Khishni, *Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar*, (Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhan, t. th.), Juz I, h. 145.

وَلَوْ أَجَّرَ الشَّخْصُ مَالَهُ أَوْ نَفْسَهُ وَقَصَدَ بِالْأُجْرَةِ إِذَا كَانَتْ عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ تَصِيْرُ مَالَ يَجَارَةٍ لِأَنْ الْإِجَارَةَ مُعَاوَضَةُ

Seandainya seseorang menyewakan harta atau dirinya dengan maksud ketika memperoleh upah akan dijadikannya barang dagangan, maka upah tersebut menjadi harta dagangan. Sebab akad sewa merupakan mu'awadhah -pertukaran-.

2. Bughyah al-Musytarsyidin²⁵

(Faedah), kata al-'ardh dengan difathah huruf 'ain dan disukun ra'nya, adalah nama bagi setiap macam harta yang membandingi emas perak.

- 3. Referensi lain:
 - a. Tuhfah al-Muhtaj, Juz III, h. 394.
 - b. Mauhibah Dzi al-Fadhl, Juz IV, h. 31.
 - c. Al-Majmu' Syarh al-Muadzdzab, Juz VI, h. 49.

339. Peranan Uang Emas/Perak Diganti dengan Uang Kertas, Cek, Obligasi, Saham Perusahaan dan Macammacam Surat Berharga

- S. Bagaimana yang berlaku secara umum di bidang keuangan dengan digantikannya peranan uang emas/perak oleh uang kertas, cek, obligasi, saham-saham perusahaan dan macam-macam kertas berharga?
- J. Uang kertas, cek, obligasi, saham-saham perusahaan dan sesamanya, apabila telah mencapai seharga emas satu *nishab* dan telah *haul*, maka wajib zakat seperti emas.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Figh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah26

Mayoritas fuqaha berpendapat dengan kewajiban zakat terhadap uang kertas, karena peranannya dalam transaksi sama dengan peran uang emas dan perak.

²⁵ Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, *Bughyah al-Musytarsyidin*, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 100.

²⁶ Abdurrahman al-Jazairi, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), Jilid I, h. 512-513.

- 2. Referensi Lain
 - a. Keputusan Muktamar NU ke-5, Masalah Nomor 90.
 - b. Mauhibah Dzi al-Fadhl, Juz IV.

340. Memulai Ihram dari Jeddah

- S. Orang Indonesia yang menunaikan ibadah haji melalui Jeddah yang akan langsung menuju Mekkah, apabila mereka memulai ihramnya dari Jeddah, apakah terkena wajib membayar dam bagi mereka?
- J. Mengingatkan bahwa lapangan terbang Jeddah di mana jamaah haji Indonesia mendarat, ternyata tidak memenuhi ketentuan sebagai miqat, maka apabila para jamaah haji Indonesia (yang berangkat pada hari-hari terakhir) akan langsung menuju Mekkah, hendaknya mereka melakukan niat ihramnya pada waktu pesawat terbang memasuki daerah Qarnul Manaazil atau daerah Yalamlam atau miqat-miqat yang lain (yaitu setelah mereka mendapat penjelasan dari petugas pesawat udara yang bersangkutan). Untuk memudahkan pelaksanaannya, dianjurkan agar para jamaah memakai pakaian ihramnya sejak dari lapangan terbang Indonesia tanpa niat terlebih dahulu. Kemudian niat ihram baru dilakukan pada waktu pesawat terbang memasuki daerah Qarnul Manaazil atau Yalamlam. Tetapi kalau para jamaah ingin sekaligus niat ihram di Indonesia, itupun diperbolehkan.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Muhadzdzab²⁷

Orang yang rumahnya melewati di atas miqat (batas tempat dimulainya keharusan berpakaian ihram), maka ia boleh berihram dari miqat tersebut, dan boleh juga berihram dari atas miqat tersebut.

2. Al-Majmu Syarh al-Muhadzdzab28

Sedangkan orang yang datang dari suatu daerah dan tidak melewati migat serta tidak pula searah dengan migat (sebagaimana tertera pula

²⁷ Abu Ishaq al-Syairazi, al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz I, h. 203.

²⁸ Muhyiddin al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Kairo: al-Ahsin, t. th.), Juz VII, h. 197.

dalam *al-Qulyubi*), maka para ulama kita menetapkan bahwa orang tersebut harus ber*ihram* pada jarak dua *marhalah* jauhnya dari Mekkah. Demikian karena mengikuti amal Umar bin Khaththab ketika ber*miqat* di *Dzati Irqin*.

341. Hukumnya Pemotongan Hewan dengan Mesin

- S. Bagaimana hukumnya pemotongan hewan dengan mesin?
- J. Hukumnya pemotongan hewan dengan mesin adalah halal, kalau mesin dan cara pemotongannya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Pemotongnya seorang muslim.
- b. Alat mesin yang dipergunakan untuk penyembelihan tersebut memenuhi syarat-syarat penyembelihan syar'i.

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Wahhab dan Al-Tajrid li Naf al-'Abid29

(وَشُرِطَ فِي الذَّبْحِ قَصْدُ) أَيْ قَصْدُ الْعَيْنِ أَوْ الْجِنْسِ بِالْفَعْلِ (قَوْلُهُ قَصْدُ الْعَيْنِ) وَإِنْ أَخْطَأَ فِي ظَنِّهِ أَوِ الْجِنْسِ وَإِنْ أَخْطَأَ فِي الْإِصَابَةِ حِ ل وَالْمُرَادُ بِقَصْدِ الْعَيْنِ أَوْ الْجِنْسِ بِالْفِعْلِ أَيْ قَصْدُ إِيقَاعِ الْفِعْلِ عَلَى الْعَيْنِ أَوْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ الْجِنْسِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الذَّبْحَ

Dan dalam penyembelihan disyaratkan ada kesengajaan mengarahkan tindakannya pada hewan tertentu atau jenisnya.

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Kesengajaan mengarahkan tindakannya pada hewan tertentu.") Meskipun prasangkanya salah, atau jenisnya meskipun salah sasaran. Begitu menurut al-Halabi. Dan maksud kesengajaan mengarahkan tindakannya pada hewan tertentu atau jenisnya adalah sengaja mengarahkan tindakannya pada hewan tertentu atau seekor hewan dari suatu jenis, meskipun tidak bermaksud menyembelih.

2. Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab 30 (و) شُرِطَ (فِي الْآلَةِ كَوْنُهَا مُحَدَّدَةً) بِفَتْحِ الدَّالِ الْمُشَدَّدَةِ أَيْ ذَاتَ حَدِّ (تَجْرَحُ كَحَدِيدٍ) أَيْ كَمُحَدَّدِ حَدِيدٍ (وَقَصَبٍ وَحَجَرٍ) وَرَصَاصٍ وَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ (إلَّا عَظْمًا)

²⁹ Zakaria al-Anshari dan Sulaiman al-Bujairami, Fath al-Wahhab dan al-Tajrid li Naf al-Abid, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1345 H), Jilid VI, h. 286.

³⁰ Zakaria al-Anshari dan Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1345 H), Jilid VI, h. 286.

كَسِنِّ وَظُفُرٍ لِخَبَرِ الشَّيْخَيْنِ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَأُلْحِقَ بِهِمَا بَاقِي الْعِظَامِ

(قَوْلُهُ إِلَّا عَظْمًا إِلَخْ) أَفَادَ أَنَّهُ يَكْتِنِي بِغَيْرِ مَا ذُكِرَ وَلَوْ شَعْرًا إِذَا كَانَ لَا عَلَى وَجْهِ الْأَحْنَافِ" ... يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي أَوْ كَوْنِهَا جَارِحَةَ سِبَاعٍ أَوْ طَيْرٍ إِلَخْ حَيْثُ أَطْلَقَ فِيهِ وَلَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ تَقْتُلُهُ بِوَجْهٍ مَخْصُوصٍ فَيُسْتَفَادُ مِنْ الْإِطْلَاقِ أَنَّهُ يَجِلُ مَقْتُولُهَا بِسَائِرِ أَنْوَاعِ الْقَتْلِ

Disyaratkan pada alat pemotongannya harus dalam keadaan tajam sehingga dapat melukai, seperti senjata tajam dari besi, bambu, batu, emas dan perak, kecuali dari gigi dan kuku, berdasarkan hadits riwayat Bukhari Muslim: "Apapun yang bisa mengalirkan darah (binatang sembelihan) yang bukan terbuat dari gigi dan kuku, serta disebutkan (ketika disembelih) nama Allah Swt. maka makanlah." Dan hukumnya disamakan dengan gigi dan kuku, semua jenis tulang.

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Kecuali tulang ...") memberi pengertian bahwa penyembelihan cukup pula dilakukan dengan selain alat yang telah disebutkan, meski berupa rambut selama tidak dengan cara mencekik ... Dari pernyataannya nanti, yaitu: "Atau alat penyembelih itu berupa binatang atau burung pemburu ..." di mana Syaikh Zakaria memutlakkannya dan tidak menyaratkan binatang atau burung pemburu itu membunuh buruannya dengan cara tertentu. Maka dari kemutlakan tersebut bisa diketahui bahwa buruan yang dibunuh binatang atau hewan pemburu itu halal, dengan berbagai cara pembunuhan.[]

³¹ Mungkin yang dimaksud adalah kata افتق (pencekikan). Pen.

KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA

Di Sukorejo Situbondo Pada Tanggal 13 - 16 Rabiul Awwal 1404 H./18 - 21 Desember 1983 M.

342. Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal dengan Menggunakan Dasar Hisab 343. Kriteria Al-Kutub Al-Mu'tabarah 344. Memukul Hewan untuk Memudahkan Penyembelihan 345. Fakir/Miskin Menjual Daging/Kulit Kurban 346. Tugas Dokter Terhadap Pasien 347. Tabanni (Adopsi)

Pimpinan Sidang Komisi Masail Diniyah

KH. Rodli Sholeh ... Ketua

Drs. H. Asnawi Lathif ... Sekretaris

KH. Sahal Mahfudh ... Pendamping

KH. Mahfudh Anwar ... Pendamping

Tim Perumus Komisi I (Masail Diniyah)

KH. Imron Hamzah ... Ketua

KH. Aziz Masyhuri ... Sekretaris

KH. Rodli Sholeh ... Anggota

KH. Sahal Mahfudh ... Anggota

KH. Mahfudh Anwar ... Anggota

342. Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal dengan Menggunakan Dasar Hisab

Penetapan Pemerintah tentang awal Ramadhan dan awal Syawal dengan menggunakan dasar hisab, tidak wajib diikuti. Sebab menurut Jumhur al-Salaf bahwa tsubut awal Ramadhan dan awal Syawal itu hanya bi al-ru'yah au itmam al-'adad tsalatsina yauman.

Keterangan, dari kitab:

1. Bughyatul Mustarsyidin¹

Bulan Ramadhan sama seperti bulan lainnya tidak tetap kecuali dengan melihat hilal, atau menyempurnakan bilangan menjadi tiga puluh hari.

2. Al-'Ilm al-Manshur fi Itsbat al-Syuhur²

Para tokoh madzhab Malikiyah berpendapat: "Bila seorang penguasa mengetahui hisab tentang (masuknya) suatu bulan, lalu ia menetapkan bulan tersebut dengan hisab, maka ia tidak boleh diikuti, karena ijma' ulama salaf bertentangan dengannya."

343. Kriteria Al-Kutub Al-Mu'tabarah

Al-Kutubul Mu'tabarah fi Masail al-Diniyah 'indanaa ialah kitab-kitab 'ala Al-Madzhab Al-Arba'ah.

Keterangan, dari kitab:

1. Bughyah al-Mustarsyidin³

Ibn al-Shalah mengutip *ijma'* tentang, tidak diperbolehkan bertaqlid selain empat imam mazhab yang ada, meski untuk diamalkan sendiri,

¹ Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 108.

² Taqiyuddin al-Subki, al-'Ilm al-Manshur fi Itsbat al-Syuhur, (Indonesia: Madrasah al-Salafiyah al-Sayfi'iyah Tebuireng-tulis tangan/roneo, 1354 H), h. 14.

³ Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 8.

apalagi untuk memutuskan hukum dan fatwa, karena tidak penisbatan pendapat tersebut kepada pemiliknya tidak bisa dipercaya.

2. I'anah al-Thalibin 4

تَنْبِيهُ كُلُّ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى الصَّوَابِ وَيَجِبُ تَقْلِيدُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَمَنْ قَلَّدَ وَاحِدًا مِنْهُمْ خَرَجَ عَنْ عُهْدَةِ التَّكْلِيفِ وَعَلَى الْمُقَلِّدِ اعْتِقَادُ أَرْجَحِيَّةِ مَذْهَبِهِ أَوْ مُسَاوَاتَهُ وَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ غَيْرِهِمْ فِي إِفْتَاءٍ أَوْ قَضَاءٍ

Peringatan. Setiap imam madzhab empat itu menetapi kebenaran, dan wajib mengikuti salah satu dari mereka. Siapa saja yang telah mengikuti salah satunya, maka ia telah bebas dari tuntutan taklif (telah memenuhi tuntutan menjalankan syari'at). Dan seorang muqallid (pengikut) harus meyakini keunggulan madzhab yang dianutnya atau kesetaraannya (dengan madzhab lain), dan tidak boleh mengikuti pendapat selain mereka dalam rangka berfatwa ataupun memutuskan hukum.

3. Al-Fawaid al-Makkiyah5

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَابُدَّ لِلْمُكَلَّفِ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ الْتِزَامُ التَّقْلِيدِ لِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَذَاهِبِ الْأَيْمَةِ الْأَيْمَةِ الْأَرْبَعَةِ وَلَا يَجُورُ لَهُ الاسْتِدْلَالُ بِالْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الزَّسُولِ وَإِلَى أُولِى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ [النِّسَاء ٨٣] هُمُ الَّذِينَ تَأَهَّلُوا لِلجَّتِهَادِ دُونَ غَيْرِهِمْ كَمَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي مَحَلِّهِ

Dan ketahuilah, sungguh bagi seorang mukallaf yang bukan mujtahid mutlak harus menetapi taqlid pada madzhab tertentu dari madzhab imam empat. Dia tidak diperbolehkan mengambil dalil ayat-ayat dan haditshadits (sacara langsung), karena firman Allah Ta'ala: "Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri)." [Al-Nisa': 83], mereka (ulil amri) tersebut adalah yang ahli ijtihad, bukan yang lainnya, seperti diuraikan luas dalam tempatnya.

344. Memukul Hewan untuk Memudahkan Penyembelihan

Memukul hewan untuk memudahkan pemotongan (disembelih) seperti terjadi di rumah pemotongan hewan dengan mesin, hukumnya

⁴ Muhammad Syaththa al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin*, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.), Jilid I, h. 17.

⁵ Alawi al-Saqqaf, al-Fawaid al-Makkiyah dalam Majmu'ah Sab'ah al-Kutub al-Mufidah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t.th.), h. 50.

haram, karena termasuk ta'dzib al-hayawan.

Adapun pemotongan (penyembelihan) yang didahului semacam itu, jika pada hewan tersebut masih terdapat hayah mustaqarrah, hukumnya sah dan madzbuhnya halal. Sedangkan menguliti hewan sesudah dipotong (disembelih) tetapi masih bergerak-gerak (belum mati) demikian pula memotong dagingnya, hukumnya makruh, tetapi dagingnya tetap halal. Keterangan, dari kitab:

1. Al-Igna'6

Seandainya seseorang menusuk pisau ke telinga musang, misalnya dan kemudian ia memotong hulqum (saluran makanan) dan mari' (saluran nafas)nya dari dalam kulit agar mendapatkan kulitnya -tanpa tersobekdan hewan tersebut masih dalam kondisi hayat mustaqirrah (hidup secara normal), maka binatang sembelihan tersebut halal walaupun perbuatan tersebut haram, karena mengandung penyiksaan.

2. Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib⁷

Dimakruhkan memisahkan kepalanya seketika (memotong sampai putus), menambah pemotongan, memecahkan leher, memotong anggota tubuhnya, menggerak-gerakkan dan memindahkannya sampai menemui ajalnya.

2. Jawahir al-Iklil 'ala Syarh al-'Allamah al-Khalil⁸

(وَكُرِهَ ذَبْعُ) لِحِيَوَانَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ (بِدَوْرِ حُفْرَةٍ) لِعَدَمِ اسْتِفْبَالِ بَعْضِهَا وَلِيَا الْهَامُ فَهُوَ تَعْذِيبُ لَهَا فِيهَا بَلَغَ مَالِكًا ﷺ أَنَّ الْجُزَّارِينَ يَعْضِهَا بَعْضُهَا وَلَهَا الْهَامُ فَهُوَ تَعْذِيبُ لَهَا فِيهَا بَلَغَ مَالِكًا ﷺ أَنَّ الْجُزَّارِينَ يَعْضِيهَا لَيْعَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَهُمْ بِتَوْجِيهِهَا يَعْتَمِعُونَ عَلَى الْخُفْرَةِ يَدُورُونَ بِهَا فَيَذْبَحُونَ حَوْلَهَا فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَهُمْ بِتَوْجِيهِهَا

⁶ Muhammad al-Khatib al-Syirbini, al-Iqna' dalam Hamisy Hasyiyah Sulaiman al-Bujairami, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid IV, h. 297.

Sulaiman bin Muhammad al-Bujairamai, Hasyiyah Sulaiman al-Bujairami 'ala al-Khatib, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid IV, h. 298.

⁸ Shalih Abdissami' al-Azhari, Jawahir al-Iklil 'ala Syarh al-'Allamah al-Khalil, (Mesir: Dar al-Rasyad al-Haditsiyah, t. th.), Juz I, h. 213-214.

إِلَى الْقِبْلَةِ (وَ) كُرِهَ (سَلْخُ) لِجِلْدِ الْحَيَوَانِ عَنْ لَخَمِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ لِأَنَّهُ تَعْذِيبُ (أَوْ قَطْعُ) لِشَيْءٍ مِنْ الْحَيَوَانِ بَعْدَ ذَبْحِهِ أَوْ خَرِهِ وَ (قَبْلَ الْمَوْتِ) لِحَبْرِ النَّهْيِ عَنْهُ وَأَنْ تُتْرَكَ حَتَّى لِشَيْءٍ مِنْ الْحَيَوَانِ بَعْدَ ذَبْحِهِ أَوْ خَرِهِ وَ (قَبْلَ الْمَوْتِ) لِحَبْرِ النَّهْيِ عَنْهُ وَأَنْ تُتْرَكَ حَتَّى تَبْرُدَ أَيْ تَمُوتَ إِلَّا السَّمَكَ فَيَجُوزُ الْقَاوُهُ فِي النَّارِ قَبْلَ مَوْتِهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ (وَ) كُرِهَ تَمْدُ إِبَانَةِ) أَيْ فَصْلِ (رَأْسِ) عَنْ بَدَنٍ حَالَ الذَّبْحِ لِأَنَّهُ قَطْعٌ قَبْلَ الْمَوْتِ

Dimakruhkan menyembelih binatang dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang bersamaan di satu lobang galian bundar, sebab sebagiannya tidak menghadap kiblat dan sebagian dari binatang itu melihat sebagian yang lain (sedang disembelih), sementara mereka punya rasa kesedihan, maka hal itu berarti menyiksanya di lobang tersebut.

Imam Malik pernah mendengar, para jagal berkumpul di suatu lobang galian bundar, mereka mengitari dan melakukan penyembelihan di sekitarnya (secara serentak). Maka beliau lalu melarang mereka berbuat demikian, dan memerintahkan untuk menghadapkan ke kiblat hewan sembelihannya.

Dan makruh menguliti hewan sebelum kematiannya, sebab merupakan penyiksaan, atau memotong bagian tertentu dari tubuhnya setelah disembelih sebelum benar-benar mati, sesuai dengan larangan dalam hadits yang melarangnya. Hendaknya dibiarkan sampai dingin, maksudnya mati, kecuali ikan. Maka menurut Ibn al-Qasim boleh memasukkannya ke api sebelum mati.

Dan makruh sengaja memisahkan kepala dari badan ketika menyembelih, karena berarti telah memotongnya sebelum mati.

345. Fakir/Miskin Menjual Daging/Kulit Kurban

Fuqara, masakin yang menerima pembagian daging/kulit udhhiyah lalu menjualnya kepada ghair al-muslim hukumnya sah ma' al-hurmah 'ala al-mu'tamad.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Bashuniy⁹

وَخَرَجَ بِقَيِّدِ الْمُسْلِمِيْنَ غَيْرُهُمْ فَلاَ يَجُوْزُ إِعْطَاؤُهُمْ مِنْهَا شَيْئًا كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْبُوَيْطِيّ وَوَقَعَ فِي الْمَجْمُوعِ جَوَازُ إِطْعَامِ فَقَرَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ أُضْحِيَّةِ التَّطَوُّعِ دُوْنَ الْوَاجِبَةِ وَتَعَجَّبَ الْأَذْرَعِيُّ فَقَالَ فَالْحُقُّ أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ إِطْعَامُ الذِّمِّيِّيْنَ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ مُطْلَقًا لاَ

⁹ Al-Bashuni, II, h. 201.

تَصَدُّقًا وَلاَ إِهْدَاءً حَتَى لَوْ أَخَذَهَا فَقَرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ صَدَقَةً وَأَغْنِيَا وُهُمْ هَدِيَّةً حَرُمَ عَلَيْهِمْ التَّصَدُّقُ بِشَيْءٍ مِمَّا أَخَذُوهُ أَوْ إِهْدَاءُ شَيْءٍ مِنْهُ لِأَهْلِ الذَّمَّةِ وَكَذَا بَيْعُهُ لَهُمْ ... كَمَا قَالَ التَّصَدُّقُ بِشَيْءٍ مِمَّا أَخَذُوهُ أَوْ إِهْدَاءُ شَيْءٍ مِنْهُ لِأَهْلِ الذَّمَّةِ وَكَذَا بَيْعُهُ لَهُمْ ... كَمَا قَالَ الشَّيْخُ الشِّبْرَامَلِيْسِيُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْفَقِيْرَ وَالْمَهْدِيَّ إِلَيْهِ لاَ يُطْعِمُهُ مِنْهً الشَّيْخُ الشَّبْرَامَلِيْسِيُّ وَهُو الْمُعْتَمَدُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَلَ الْفَقِيْرِ وَالْمَهْدِيِّ إِلَيْهِ لاَ يُطْعِمُهُ مِنْهُ ... وَيُوجَّهُ بِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا إِرْفَاقُ الْمُسْلِمِينَ بِأَكْلِهَا فَلَمْ يَجُزْ لَهُمْ تَمْكِيْنُ عَيْرِهِمْ مِنْهُ ... وَلِلْفَقِيْرِ التَّصَرُّفُ فِيْهِ بِبَيْعِ وَغَيْرِهِ أَيْ لِمُسْلِمٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ

Dengan adanya persyaratan harus orang Islam, maka tidak boleh memberikan apapun dari hewan kurban kepada selain orang Islam. Dalam al-Majmu' disebutkan, boleh memberikan kepada kafir dzimmi bagian dari hewan kurban sunnah dan bukan kurban yang wajib. Al-Adzra'i merasa heran dengan pendapat tersebut. Menurutnya, tidak diperkenankan memberikan kepada orang selain muslim bagian apapun dari hewan kurban secara mutlak, baik bersifat sedekah atau hadiah. Bahkan, seandainya para fakir muslim mengambilnya sebagai sedekah dan orang kaya muslim mengambilnya sebagai hadiah, maka haram memberikan sedekah atau menghadiahkan dengan sesuatu apapun dari yang sudah diambil oleh orang-orang muslim tersebut kepada orang-orang non muslim. Seperti halnya menjual kepada orang non muslim, ... sebagaimana pendapat Syaikh al-Syibramalisi. Dan pendapat itu adalah pendapat mu'tamad.

Berdasarkan uraian tersebut dipahami, bahwa orang fakir dan yang mendapatkan hadiah tidak boleh member makan non muslim dengan daging kurban tersebut. Pendapat ini dikuatkan argumen, bahwa tujuan kurban adalah mengasihi muslimin, dengan memberikan daging kurban agar dimakannya. maka mereka tidak boleh memberi kesempatan selain mereka untuk ikut memakannya. ... Bagi orang fakir itu diperbolehkan untuk membelanjakannya dengan menjual atau lainnya kepada sesama muslim saja. Seperti dikatetahui dari keterangan tadi.

2. Hawasyai al-Syarwani wa al-Ubbadi 10

Pernyataan Ibn Hajar: "Maksudnya kepada orang Islam." artinya bagi fakir penerima daging *qurban* tidak boleh menjualnya kepada non muslim.

Al-Syarwani dan al-Ubbadi, Hawasyai al-Syarwani wa al-Ubbadi, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid IX, h. 328.

Begitu pendapat Ibn Qasim. Saya (al-Syarwani) berpendapat: "Pendapat ulama yang kuat menunjukkan, bahwa ia juga tidak boleh menjual kulit hewan *qurban* kepada non muslim. Maka, rujuklah kasus ini."

346. Tugas Dokter Terhadap Pasien

Apabila pasien dalam keadaan kritis serta tidak mampu, tidak mempunyai keluarga yang mampu/bersedia membiayai dan bukan muhaddar, maka dokter yang menangani kalau ia muslim wajib berusaha untuk merawatnya baik dengan biaya dari dokter itu sendiri atau dari yang lain dengan cara wajib 'ain atau wajib kifayah.

Keterangan, dari kitab:

1. Kanz Raghibin dan Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah¹¹

Menyelamatkan orang yang dalam keadaan sangat kritis adalah fardhu kifayah (kewajiban kolektif) demi menjaga jiwa yang terhormat dari kematian.

Pernyataan al-Mahalli: "Fardhu kifayah." tersebut berlaku terhadap orang yang mengerti dan berjumlah banyak. Sedangkan jika sendirian, maka fardhu 'ain.

2. Bughyah al-Mustarsyidin¹²

(مَسْأَلَةُ ك) مِنَ الْحُقُوْقِ الْوَاجِبَةِ شَرْعًا عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ وَحَدُّهُ مَنْ مَلَكَ زِيَادَةً عَلَى كُفَايَةِ سَنَةٍ وَلِمَمُوْنَةٍ سَنَةٍ مَنْ الْجَائِعِ وَفَكُ أَسِيْرٍ وَكَذَا ذِيِّيِّ وَلِمَمُوْنَةٍ سَثْرُ عَوْرَةِ الْعَارِيْ وَمَا بَقِيَ بَدَنُهُ مِنْ مُبِيْحِ تَيَمُّم وَاطْعَامُ الْجَائِعِ وَفَكُ أَسِيْرٍ وَكَذَا ذِيِّيِ بِتَفْصِيْلِهِ وَعِمَارَةُ سُوْرٍ بَلَدٍ وَكِفَايَةُ الْقَائِمِيْنَ بِحِفْظِهَا وَالْقِيَامُ بِشَأْنِ نَازِلَةٍ نَزَلَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَيْرُ ذَلِكَ إِنْ لَمْ تَنْدَفِعْ بِنَحْوِ زَكَاةٍ وَكَفَّارَةٍ وَوَقْفٍ وَسَهْمِ الْمَصَالِحِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

(Kasus dari Muhammad Sulaiman al-Kurdi), Yang termasuk hak-hak wajib dalam syari'ah bagi setiap orang kaya, yaitu orang yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan bidup diri dan orang yang wajib dinafkahinya selama setahun, adalah memberi pakaian orang yang tidak punya pakaian, memberi barang yang menjaga tubuhnya dari bahaya dalam kadar yang

¹¹ Al-Mahalli, Qulyubi dan 'Umairah, Kanz Raghibin dan Hasyiyata Quhyubi wa 'Umairah, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Juz III, h. 123.

¹² Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 253.

memperbolehkan tayamum, memberi makan orang yang tidak punya makanan, menebus tawanan muslim, begitu pula tawanan kafir dzimmi, membangun perbatasan negeri dan mencukupi kebutuhan penjaganya, menagani bencana yang menimpa muslimin, dan semisalnya, bila semuanya itu tidak tercukupi dengan harta zakat, denda kafarat, wakaf dan harta kemaslahatan dari bait al-mal.

347. Tabanni (Adopsi)

Mengangkat anak orang lain untuk diperlakukan, dijadikan, diakui sebagai anak sendiri (waladush shulbi au radha') hukumnya tidak sah.

Keterangan, dari kitab:

1. Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil¹³

Sungguh Nabi Saw. bersabda: "Barangsiapa mengaku orang lain sebagai bapaknya, dan ia tahu bahwa orang tersebut memang bukan bapaknya, maka surga diharamkan terhadap dirinya."

2. Ma'alim al-Tanzil14

Qatadah berkata: "Siapa pun tidak boleh berkata tentang Zaid bin Haritsah: "Zaid bin Muhammad." Jika seseorang dengan sengaja mengatakan seperti itu, maka ia telah maksiat, dan barang siapa bermaksiat kepada Allah Swt. dan RasulNya, maka niscaya ia tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh."

Penjelasan:

Pengangkatan anak tidak bisa menjadikan anak tersebut sederajat dengan anak sendiri di dalam *nasab, mahram* maupun hak waris.[]

¹³ Ali bin Muhammad al-Khazin, Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 2004), Jilid III, h. 409.

¹⁴ Abu Muhammad al-Baghawi, Ma'alim al-Tanzil pada Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil, (Beirut: Dar al- Fikr, 1979), Jilid V, h. 230. Redaksi ini merupakan gubahan dari teks aslinya yang cukup panjang, dalam penafsiran ayat 5, surah al-Ahzab.

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-27

Di Situbondo Pada Tanggal 8-12 Desember 1984

348. Keutamaan Dana untuk Naik Haji Ghairul Wajib untuk Membiayai Amaliyah yang Bersifat Sosial Kemasyarakatan 349. Menyembelih Kurban tidak Dibagikan 350. Kurban Bukan dengan Hewan Tetapi dengan Uang 351. Menyembelih Kurban di Luar Hari Nahr dan Hari Tasyriq 352. Tidak Menyembelih Kurban untuk Diserahkan Kepada Fakir/Miskin Sebagai Modal Usaha yang Lebih Produktif 353. Kulit Hewan Kurban Dikumpulkan dan Dijual untuk Membangun Mushalla, Madrasah 354. Panitia Zakat yang Dibentuk Kelurahan

354. Panitia Zakat yang Dibentuk Kelurahan 355. Badan-badan Sosial Mendapat Zakat

356. Sebagian Zakat Tidak Diberikan Kepada Golongan yang Berhak 357. Sebagian Zakat Dijadikan Modal Usaha

358. Zakat Fitrah Dijual Oleh Panitia dan Digunakan Menurut Kebijaksanaan Panitia

359. Menyelenggarakan Shalat Jum'at di Kantor-kantor 360. Menyelenggarakan Shalat Jum'at di Daerah yang Ada Mesjid dan Telah Menyelenggarakan Shalat Jum'at 361. Masalah Cek

362. Pembayaran Menggunakan Cek Kosong 363. Mencairkan Cek Mundur Mendapat Potongan Berdasarkan Prosentase

Pimpinan Sidang Komisi I (Masail Diniyah)

KH. Alie Yafie	Ketua
KH. Rodli Shaleh	Wakil Ketua
H. A. Mustofa Bisri	Sekretaris
KH. Imron Hamzah	Wakil Sekretaris
KH. Amin Shaleh	Tim Perumus
KH. Aziz Masyhuri	Tim Perumus
KH. Sairazy	Tim Perumus
KH. Mahfudh Anwar	
KH. Subadar	Tim Perumus
KH. Muntaha	Tim Perumus
KH. Fayyumi	Tim Perumus
KH. Mahshuni	

348. Keutamaan Dana untuk Naik Haji *Ghair al-Wajib* untuk Membiayai Amaliyah yang Bersifat Sosial Kemasyarakatan

- S. Bagaimanakah pandangan Muktamar terhadap keutamaan penggunaan dana untuk naik haji ghair al-wajib dibandingkan dengan untuk membiayai amaliyah yang bersifat sosial kemasyarakatan?
- J. Pengertian haji *ghair al-wajib* eperti yang ditanyakan itu, dapat berarti haji *fardhu kifayah*, yaitu apabila yang melakukan haji kedua dan seterusnya itu orang yang merdeka, yang *mukallaf*; dan dapat berarti haji sunnah -yaitu apabila yang melakukan hamba sahaya (*raqiq*), anak kecil (yang belum baligh) dan orang gila.

Sementara itu, amal sosial kemasyarakatan pun ada yang fardhu kifayah, ada pula yang sunah. Maka apabila haji ghair al-wajib dan amal sosial sama-sama fardhu kifayah atau sama-sama sunah, mengenai mana yang lebih utama, ada dua pendapat:

- 1. Lebih utama naik haji.
- 2. Lebih utama sosial.

Keterangan, dari kitab:

1. I'anah al-Thalibin¹

وَيَجِبَانِ أَيْضًا وُجُوبًا كِفَاثِيًا كُلَّ سَنَةٍ لِإِحْيَاءِ الْكَعْبَةِ الْمُشَرَّفَةِ عَلَى اْلأَحْرَارِ الْبَالِغِيْنَ إِلَى أَنْ قَالَ وَيُسَنَّانِ مِنَ اْلاَرِقَّاءِ وَالصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِيْنِ

Keduanya (naik haji dan umrah) juga wajib kifayah dilakukan setiap tahun bagi orang-orang merdeka dan baligh, agar dapat menghidupkan Ka'bah yang mulia ... dan keduanya sunah bagi hamba sahaya, anakanak dan orang gila.

2. Hasyiyah 'ala al-Idhah fi al-Manasik²

(قَوْلُهُ وَمِنْ أَعْظَمِ الطَّاعَاتِ) وَمِنْ ثَمَ وَجَّهُواْ قَوْلَ الشَّافِعِي ﷺ الْإِشْتِغَالُ بِالْعِلْمِ أَفْضَلُ مِنَ الشَّفْلِ وَيَأْتِي عَلَى مَا مِنَ الصَّلَةِ النَّافِلَةِ لِأَنَّ الْإِشْتِغَالَ بِالْعِلْمِ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ النَّفْلِ وَيَأْتِي عَلَى مَا ذَكُرْتُهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ فَرْضَ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ مِنْ فَرْضِ الحُجِّ وَنَفْلُهَا أَفْضَلُ مِنْ نَفْلِهِ وَهُوَ مَا يَدُلُ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الْعِبَارَاتِ فِيْمَا فُهِمَ مِنْهَا كَلاَمُ الْعُبَادِيِّ فِيْ زِيَادَتِهِ مِنْ أَنَّ حَجَّ يَدُلُ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الْعِبَارَاتِ فِيْمَا فُهِمَ مِنْهَا كَلاَمُ الْعُبَادِيِّ فِيْ زِيَادَتِهِ مِنْ أَنَّ حَجَّ

¹ Al-Bakri bin Muhammad Syaththa al-Dimyati, *I'anah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) Juz II, h. 280

² Ibn Hajar al-Flaitami, . lasyiyah 'ala al-Idhah fi al-Manasik, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 5.

التَّطَوُّع أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّع

Pernyataan al-Nawawi, "Dan di antara amal-amal ketaatan yang paling besar." dari situ para ulama menguatkan pendapat Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa menekuni ilmu lebih utama dari pada shalat sunnah, sebab belajar ilmu itu fardhu kifayah dan lebih utama dibanding ibadah sunnah. Dan akan diterangkan nanti atas apa yang telah saya sampaikan, berdasarkan sedekah wajib -zakat- lebih utama dari pada haji wajib, dan sedekah sunnah lebih utama dari haji sunnah. Begitu kesimpulan yang ditunjukkan mayoritas redaksi -kitab fiqh- dalam masalah yang dari redaksi tersebut dipahami pernyataan al-'Ubbadi dalam kitab Ziadahnya: "Sungguh haji sunnah lebih utama dari pada sedekah sunah."

3. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj³

وَ تَقَدَّمَ فِي بَابِ صَلاَةِ التَّفْلِ عَنِ الْقَاضِي حُسَيْنِ أَنَّ حَجَّ الطَّطَوُّعِ أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْمَالِ وَالْبَدَنِ وَقَالَ الْحُلِيْمِيُّ الْحُجُّ يَجْمَعُ مَعَانِيَ الْعِبَادَاتِ كُلَّهَا فَمَنْ حَجَّ فَكَأَنَّمَا صَلَّى وَصَامَ وَاعْتَكَفَ وَزَكَّى وَرَابَطَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَغَزَا

Sebagaimana telah dijelaskan di bab shalat sunah yang dikutip dari al-Qadhi Husain, haji sunnah itu adalah ibadah yang paling afdhal, sebab mencakup harta dan badan. Al-Halimi berpendapat: "Haji itu menghimpun seluruh pengertian ibadah. Maka orang yang berhaji, seakan ia sekaligus melaksanakan shalat, berpuasa, beri'tikaf, berzakat, berjuang di jalan Allah Swt. Dan berperang.

4. I'anah al-Thalibin4

قَوْلُهُ خِلاَفًا لِلْقَاضِي أَيْ فَإِنَّهُ قَالَ الْحَجُّ أَفْضَلُ مِنْهَا أَيْ وَمِنْ غَيْرِهَا مِنْ سَاثِرِ الْعِبَادَاتِ
أَيْ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْمَالِ وَالْبَدَنِ وَلِأَنَّا دُعِينَا إِلَيْهِ وَخَوْنُ فِي الْأَصْلَابِ كَمَا أُخِذَ عَلَيْنَا
الْعَهْدُ بِالْإِيمَانِ حِينَثِذٍ وَلِأَنَّ الْحَجَّ يَجْمَعُ مَعَانِي الْعِبَادَاتِ كُلِّهَا فَمَنْ حَجَّ فَكَأَنَّمَا صَلَّى
الْعَهْدُ بِالْإِيمَانِ حِينَثِذٍ وَلِأَنَّ الْحَجَّ يَجْمَعُ مَعَانِي الْعِبَادَاتِ كُلِّهَا فَمَنْ حَجَّ فَكَأَنَّمَا صَلَّى
وَصَامَ وَاعْتَكَفَ وَزَكَى وَرَابَطَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَغَزَا كَمَا قَالَهُ الْحُلَيْمِيِّ قَالَ الْعَلَّمَةُ عَبْدُ
الرَّوُونِ الْمُنَاوِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَ الْقَاضِي هُو أَفْضَلُ مَفْرُوضٍ فِيْ غَيْرِ الْعِلْمِ

Pernyataan Syaikh Zainudin al-Malibari: "Berbeda dengan al-Qadhi." Maksud Qadhi Husain adalah haji lebih utama dari pada shalat, begitu

³ Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid I, h. 360.

⁴ Muhammad Syaththa al-Dimyati, *I'anah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid II, h. 277.

pula lebih utama dari ibadah selainnya. Sebab, haji mencakup --ibadah-harta benda dan badan, kita -manusia- telah dipanggil berhaji di saat masih -berupa air mani- dalam tulang rusuk -seorang ayah- seperti halnya saat itu kita dijanji dengan iman, dan haji mengumpulkan semua subtansi ibadah. Maka siapa yang melaksanakannya, seolah ia telah melakukan shalat, puasa, i'tikaf, membayar zakat, bergabung dengan pasukan jihad fi sabilillah dan berperang, seperti penjelasan al-Halimi. Al-'Allamah Abd al-Ra'uf al-Munawi berkata: "Yang jelas pendapat Qadhi Husain "Haji itu ibadah paling utama.", adalah untuk selain ilmu.

- 6. Referensi lain:
 - a. Hasyiyah al-Sittin, karya al-Matharai, h. 130.
 - b. Al-Fatawa al-Kubra, karya Ibn Hajar al-Haitami, Jilid III, h. 143.
 - c. Bughyah al-Mustarsyidin, h. 116.
 - d. I'anah al-Thalibin, Juz II, h. 284.

349. Menyembelih Kurban Tidak Dibagikan

- S. Bagaimanakah pendapat Muktamar mengenai menyembelih kurban tidak dibagikan, tetapi dibiarkan; yang membutuhkan silahkan mengambil sendiri?
- J. Kurbannya sah. Adapun mengenai membiarkan kurban (tidak membagikannya), maka jikalau kurban tersebut qurban mandub, maka menurut qaul ashah 'inda al-Syafi'iyyah adalah meninggalkan kewajiban; dan jika kurban tersebut qurban wajib maka hukumnya menurut al-Syafi'iyyah adalah meninggalkan kewajiban, dan menurut al-Hanafiyah meninggalkan kesunahan.

Keterangan, dari kitab:

1. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj⁵

Dalam memperoleh pahala, maka cukup dengan sekedar pengaliran darah (penyembelihan) disertai niat mendekatkan diri kepada Allah Swt.

2. Bughyah al-Mustarsyidin6

Dalam kurban sunah wajib menyedekahkan daging dengan kadar yang bisa disebut daging.

⁵ Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, (Mesir: al-Maktabah al-Islamiyah, t. th.), Juz VIII, h. 134.

⁶ Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 258.

3. Fath al-Qarib dan Hasyiyah al-Bajuri 7

(Dan memberi makan) hukumnya wajib dari kurban sunnah kepada orang-orang fakir dan miskin.

Pernyataan Ibn Qasim al-Ghazi: "Orang-orang fakir dan miskin." maksudnya adalah sejenis mereka, meskipun hanya seorang. Maka kewajiban itu bisa dicukupkan dengan mentasarufkan daging kurban kepada salah seorang fuqara' dan masakin.

4. Minhaj al-Qawim8

Dalam kurban sunah, maka harus menyedekahkan kadar yang bisa disebut daging ... pengertian menyedekahkan tersebut adalah memberikan walaupun tanpa disertai dengan ucapan kepemilikan.

350. Kurban Bukan dengan Hewan Tetapi dengan Uang

- S. Bagaimana hukumnya kurban bukan dengan hewan, tetapi dengan nilai uang?
- J. Kurban tidak boleh dengan nilai uang.

Keterangan, dari kitab:

1. Riyadh al-Badi'ah9

Kurban tidak sah kecuali dengan hewan ternak, yaitu unta, sapi atau kerbau dan kambing. Hal ini, karena kurban itu terkait dengan hewan, maka dikhususkan dengan ternak sama seperti zakat, sehingga tidak sah selain dengan hewan ternak.

⁷ Ibn Qasim al-Ghazi dan Ibrahim al-Bajuri, Fath al-Qarib dan Hasyiyah al-Bajuri, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. th.), Jilid II, h. 301-302.

⁸ Ibn Hajar al-Haitami, Minhaj al-Qawim pada Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: Al-Amirah al-Syarafiyah, 1326 H), Jilid IV, h. 695.

Muhammad Nawawi bin Umar al-bantani, Riyadh al-Badi'ah, (Mesir: Al-Amirah al-Syarafiyah, 1326 H), Jilid IV, h. 695. Lihat pula, Mahfudz al-Termasi, Mauhibah Dzi al-Fadhl, Jilid IV, h. 682.

351. Menyembelih Kurban di Luar Hari Nahr dan Hari Tasyriq

S. Bagaimana hukumnya menyembelih kurban di luar hari Nahr dan Tasyriq dengan alasan agar pembagian dagingnya lebih mengenai sasaran?

J. Apabila penyembelihan dilakukan di luar hari-hari Nahr dan Tasyriq, tidak sah sebagai kurban sunah dan sah sebagai kurban wajib; tapi dalam hal kurban wajib ini, mudhahhinya (orang yang berkurban) berdosa dan status kurbannya menjadi kurban qadha.

Keterangan, dari kitab:

1. Kifayah al-Akhyar¹⁰

Disyaratkan beberapa ketentuan dalam penyembelihan hewan kurban: 1. Penyembelihan, 2. Penyembelih, 3. Waktu penyembelihan, 4. Hewan unta, sapi dan kambing dalam berbagai jenisnya, sesuai al-Qur'an dan hadits.

352. Tidak Menyembelih Kurban untuk Diserahkan Kepada Fakir/Miskin Sebagai Modal Usaha yang Lebih Produktif

- S. Bagaimana hukumnya tidak menyembelih hewan kurban dan membiarkan hidup untuk diserahkan kepada fakir/miskin sebagai modal usaha yang lebih produktif?
- J. Tidak boleh membiarkan hewan kurban tetap hidup untuk diserahkan kepada fakir/miskin sebagai modal usaha yang lebih produktif. Akan tetapi menurut ba'dh al-Hanafiyah, jika hewan ditahan hingga melewati ayyamat Tasyriq, maka hewan itu wajib disedekahkan hidup-hidup.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah Qulyubi¹¹

¹⁰ Abu Bakar bin Muhammad al-Khishni, Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar, (Indonesia: Dar al-'Ilm, t. th.), Juz II, h. 190.

¹¹ Qulyubi, Hasyiyah Qulyubi pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Jilid IV, h. 254.

الْفُقُرَاءِ كُمَا فِي اللَّحْمِ وَإِلَّا فَلاَ فَلْيُرَاجِعُ

Sebagian ulama memperbolehkan orang yang memperoleh daging kurban untuk mengelola (sesudahnya), dengan menjual atau lainnya. Pendapat tersebut sangat kuat, jika pihak yang mengambil tersebut dari kalangan fakir miskin seperti halnya dalam pengambilan dagingnya. Jika bukan kalangan fakir, maka tidak diperbolehkan. Silahkan merujuk kembali (permasalahan tersebut).

353. Kulit Hewan Kurban Dikumpulkan dan Dijual untuk Membangun Mushalla, Madrasah

- S. Bagaimana hukumnya kulit-kulit hewan kurban yang dikumpulkan dan dijual, kemudian hasilnya untuk membangun mushalla, madrasah dan sebagainya?
- J. Menjual kulit-kulit hewan kurban tidak boleh kecuali oleh mustahiqnya (yang berhak atas kulit-kulit tersebut) yang fakir/miskin. Sedangkan bagi mustahiq yang kaya, menurut pendapat yang mu'tamad, tidak boleh. Keterangan, dari kitab:
- 1. Mauhibah Dzi al-Fadhl12

Tidak boleh menjual apapun dari hewan kurban sunnah, meski hanya kulitnya, sesuai hadits: "Barangsiapa yang menjual kulit hewan kurban, maka ia tidak memperoleh kurban apapun." (HR. Hakim, dan beliau sahihkan)

2. Bughyah al-Mustarsyidin¹³

Bagi orang fakir yang mengambil bagian hewan kurban, maka ia berhak mengelola, walaupun dengan menjualnya pada orang muslim, karena ia telah memiliki apa yang telah diberikan kepadanya. Berbeda jika yang mengambil tersebut dari kalangan orang kaya.

- 3. Referensi Lain
 - a. Busyral Karim, h. 127.
 - b. Fathul Wahhab, Jilid IV, h. 296 dan 299.
 - c. Asnal Mathalib, Jilid I, h. 525.

Mahfudz al-Termasi, Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: Al-Amirah al-Syarafiyah, 1326 H), Jilid IV, h. 697.

Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 258.

354. Panitia Zakat yang Dibentuk Kelurahan

- S. Bagaimana pendapat Muktamar mengenai panitia-panitia zakat yang ada: panitia yang dibentuk kelurahan misalnya, dapatkah disebutkan amil zakat yang berhak juga menerima zakat?
- J. Dapat disebut *amil* zakat, bila memenuhi persyaratan-persyaratan yang antara lain: adanya pengangkatan langsung dari Imam. *Keterangan*, dari kitab:

1. Hasyiyah al-Bajuri 'ala fath al-Qarib¹⁴

Pernyataan Ibn Qasim al-Ghazi, "Amil yaitu orang yang dipekerjakan imam ..." maksudnya seperti, Sa'i yang menarik zakat atau Katib yang mencatat harta zakat yang diberikan pemiliknya (selaku wajib zakat).

355. Badan-badan Sosial Mendapat Zakat

- S. Bisakah badan-badan sosial mendapat bagian zakat (bagian sabilillah, misalnya)?
- J. Badan-badan sosial tidak dapat bagian zakat, karena tidak termasuk salah satu *al-ashnaf al-tsamaniyah* (golongan delapan yang berhak memperoleh zakat).

356. Sebagian Zakat Tidak Diberikan Kepada Golongan yang Berhak

- S. Dapatkah zakat, atau sebagian zakat tidak diberikan kepada golongangolongan yang berhak, tetapi ditasarufkan untuk kepentingan kemaslahatankemaslahatan umum yang lain?
- J. Zakat atau sebagian zakat, tidak boleh ditasarufkan untuk kepentingan kemaslahatan umum yang lain.

Namun ada *qaul* yang dikutip Imam Qaffal yang menyatakan boleh. *Keterangan*, dari kitab:

1. Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil/Tafsir al-Khazin¹⁵

¹⁴ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. th.), Jilid II, h. 301-302.

¹⁵ Ali bin Muhammad al-Khazin, Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil/Tafsir al-Khazin, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. th.), Jilid III, h. 240.

وَقَدْ أَجَازَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ صَرْفَ سَبِيْلِ اللهِ إِلَى وُجُوْهِ الْخَيْرِ مِنْ تَصُفِيْنِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْجُسُوْرِ وَالْحُصُوْنِ وَعِمَارَةِ الْمُسَاجِدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيْحُ لِإِجْمَاعِ الْجُنْهُوْرِ عَلَيْهِ الصَّحِيْحُ لِإِجْمَاعِ الْجُنْهُوْرِ عَلَيْهِ

Sebagian ahli fiqh memperbolehkan pengalokasian bagian "sabilillah" untuk berbagai sektor sosial, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan, benteng, mesjid dan lain sebagainya. ... Namun pendapat yang pertama (yang tidak memperbolehkannya) adalah yang sahih, karena sesuai dengan kesepakatan mayoritas ulama.

357. Sebagian Zakat Dijadikan Modal Usaha

- S. Dapatkah zakat atau sebagian zakat dijadikan modal usaha bagi panitia-panitia atau badan-badan sosial tersebut?
- J. Juga tidak boleh zakat atau sebagiannya dijadikan modal usaha bagi panitia-panitia atau badan-badan sosial.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Muhadzdzab 16

وَلاَ يَجُوْزُ لِلسَّاعِي وَلاَ لِلْأَمَامِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْمَا يَحْصُلُ عِنْدَهُ مِنَ الْفَرَائِضِ حَتَّى يُوْصِلَهَا إِلَى أَهْلِهَا لِأَنَّ الْفُقَرَاءَ أَهْلُ رُشْدٍ لاَ يُوَالِيْ عَلَيْهِمْ فَلاَ يَجُوْزُ التَّصَرُّفُ فِيْ مَالِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

Bagi panitia penarik zakat dan penguasa tidak boleh membelanjakan zakat yang diperolehnya, sehingga menyampaikannya kepada (fakir miskin) yang berhak. Sebab para fakir miskin itu adalah *ahl rusyd* (pihak bisa mengatur sendiri) yang tidak dikuasainya, sehingga penarik zakat dan penguasa tidak boleh membelanjakan harta mereka tanpa seizinnya.

358. Zakat Fitrah Dijual Oleh Panitia dan Digunakan Menurut Kebijaksanaan Panitia

- S. Bolehkah zakat fitrah dijual oleh panitia zakat dan dipergunakan (hasil penjualannya tersebut) menurut kebijaksanaan panitia?
- J. Zakat fitrah tidak boleh dijual kecuali oleh mustahiqnya.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah al-Bajuri 'ala fath al-Qarib¹⁷

¹⁶ Abi Ishaq al-Syairazi, al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), Jilid I, h. 236.

¹⁷ Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib', (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid I, h. 292-293.

وَيُعْظَى فَقِيْرٌ وَمِسْكِيْنُ كِفَايَةَ عُمْرٍ غَالِبٍ فَيَشْتَرِيَانِ بِمَا يُعْطَيَانِهِ عِقَارًا يَشْتَغِلَانِهِ وَلِلأَمَامِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُمَا ذَلِكَ كَمَا فِيْ الْغَازِيْ وَهَذَا فِيْمَنْ لَا يُحْسِنُ الْكَسْبَ أَمَّا مَنْ يُحْسِنُهُ بِحِرْفَةٍ فَيُعْطَى مَا يَشْتَرِيْ آلاَتَهَا وَمَنْ يُحْسِنُهُ بِتِجَارَةٍ يُعْطَى مَا يَشْتَرِيْ بِهِ مَا يُحْسِنُ التِّجَارَةَ فِيْهِ بِقَدْرِ مَا يُفِي رِبْحُهُ بِكِفَايَةٍ غَالِبًا

Fakir dan miskin diberikan zakat sebesar kebutuhan selama umur umum manusia (sampai 60 tahun). Maka keduanya harus membeli lahan yang digunakannya bekerja dengan zakat yang diberikan. Bagi penguasa boleh membelikan lahan itu bagi mereka berdua seperti halnya bagi orang yang berperang. Pembelian lahan tersebut bagi orang yang tidak pandai bekerja. Sedangkan orang yang pandai bekerja dengan suatu keahlian maka diberi zakat untuk membeli peralatan kerjanya, dan orang yang pandai berdagang maka diberi zakat untuk membeli barang yang bisa diperdagangkannya dengan kadar laba dagangan tersebut bisa mencukupi kebutuhannya secara umum.

- 2. Referensi Lain
 - a. Al-Iqna', Jilid I, h. 200.
 - b. Ahkamul Fuqaha soal nomor 245.

359. Menyelenggarakan Shalat Jum'at di Kantor-kantor

- S. Bolehkan menyelenggarakan shalat Jum'at di tempat-tempat seperti kantor-kantor dan sebagainya?
- J. Menyelenggarakan shalat Jum'at di tempat-tempat seperti kantorkantor, apabila diikuti orang-orang yang tinggal menetap sampai bilangan yang menjadi syarat sahnya Jum'at dan tidak terjadi penyelenggaran Jum'at lebih dari satu, maka hukumnya sah.

Keterangan, dari kitab:

1. Bughyah al-Mustarsyidin¹⁸

وَالْحَاصِلُ مِنْ كَلاَمِ الْأَثِمَّةِ أَنَّ أَسْبَابَ جَوَازِ تَعَدُّدِهَا ثَلاَثَةٌ ضِيْقُ تَحَلِّ الصَّلاَة بِحَيْثُ لاَ يَسَعُ الْمُجْتَمِعِيْنَ غَالِبًا وَالْقِتَالُ بَيْنَ الْفِئَتَيْنِ بِشُرُوطِهِ وَبُعْدُ أَطْرَافِ الْبَلَدِ بِأَنْ كَانَ بِمَحَلٍ لاَ يَسَعُ النِّدَاءَ أَوْ بِمَحَلٍ لَوْ خَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ الْفَجْرِ لَمْ يُدْرِكُهَا إِذْ لاَ يَلْزَمُ السَّعْيُ إِلَيْهَا إِلاَّ بَعْدَ الْفَجْرِ

¹⁸ Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, *Bughyah al-Musytarsyidin*, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 79.

Kesimpulan dari pendapat para tokoh ulama adalah, bahwa sebab-sebab diperbolehkan shalat Jum'at lebih dari satu itu ada tiga: 1) Tempat pelaksanaan shalat sempit sehingga tidak mampu memuat jamaah secara umum, 2) Terjadi peperangan antara dua golongan dengan berbagai syaratnya, 3) Jauhnya jarak antara batas daerahnya, sehingga suara azan tidak terdengar darinya, atau berada di suatu tempat (daerah tersebut) yang seandainya keluar (melaksanakan jum'atan) setelah terbit fajar, maka tidak menemukannya (telat). Sebab, tidak ada keharusan pergi ke Jum'atan kecuali setelah terbitnya fajar.

360. Menyelenggarakan Shalat Jum'at di Daerah yang Ada Mesjid dan Telah Menyelenggarakan Shalat Jum'at

- S. Bagaimanakah hukumnya menyelenggarakan Jum'at di daerah yang telah ada mesjid yang menyelenggarakan Jum'at sebelumnya?
- J. Dalam mazhab Syafi'i, penyelenggaraan Jum'at lebih dari satu (ta'addud al-Jum'ah) yang melebihi hajah hukumnya tidak boleh. Yang dimaksud hajah ialah: Sulit berkumpul ('usr al-ijtima') antara lain karena sempitnya (dhaiq al-makan) atau adanya permusuhan ('adawah), atau jauhnya pinggir-pinggir negeri (athraf al-balad).

Keterangan, dari kitab:

1. Shulh al-Jama' atain bi Jawaz Ta' addud al-Jum' atain 19

إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ أَصْلَ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ عَدَمُ جَوَازِ تَعَدُّدِ الْجُمْعَةِ فِيْ بَلَدٍ وَاحِدٍ وَأَنَّ جَوَازَ تَعَدُّدِهِ أَخْذَهُ الْأَصْحَابُ مِنْ سُكُوْتِ الشَّافِعِيِّ عَلَى تَعَدُّدِ الْجُمْعَةِ فِيْ بَغْدَادَ وَحَمَّلُوا الْجُوَازَ عَلَى مَا إِذَا حَصَلَتِ الْمَشَقَّةُ فِي الاَجْتِمَاعِ كَالْمَشَقَّةِ الَّتِيْ حَصَلَتْ بِبَغْدَادَ وَلَمْ يُصْبِطُوهَا بِصَابِطٍ لَمْ يَخْتَلِفُ حَصَلَتْ المَّعْدَادَ وَلَمْ يُصْبِطُوهَا بِصَابِطٍ لَمْ يَخْتَلِفُ فَجَاءَ الْعُلَمَاءُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَصَبَطَهَا كُلُّ عَالِم مِنْهُمْ بِمَا ظَهَرَ لَهُ وَبَنَى الشَّعْرَافِيُّ أَنَّ مَنْعَ التَّعَدُّدَ فَجَاءَ الْعُلَمَاءُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَصَبَطَهَا كُلُّ عَالِم مِنْهُمْ بِمَا ظَهْرَ لَهُ وَبَنَى الشَّعْرَافِيُّ أَنَّ مَنْعَ التَّعَدُّدَ فَخَاءَ الْعُلَماءُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَصَبَطَهَا كُلُّ عَالِمِ مِنْهُمْ بِمَا ظَهْرَ لَهُ وَبَنَى الشَّعْرَافِيُّ أَنَّ مَنْعَ التَّعَدُّدَ لَاللَّهُ الْأَصْلِ فِي إِقَامَةِ الجُمْعَةِ وَقَالَ أَنَّ مَنْعَ التَّعَدُّدُ مَنْهِيًّا بِذَاتِهِ لَوْرَدَ فِيهِ صَدِيْثُ وَلَوْ وَاحِدًا وَالْحَالُ مُرَادُ الشَّارِعِ وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ التَّعَدُّدُ مَنْهِيًّا بِذَاتِهِ لَوْرَدَ فِيهِ صَيْءً عَلَى أَنْ اللَّعَدُدُ مَنْهِيًّا بِذَاتِهِ لَوْرَدَ فِيهِ صَيْءً عَلَى أَلَوْ وَاحِدًا وَالْحَالُ الشَّوْمِ فَيْهِ شَيْءً فَدَلَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ التَّعَدُّ وَمَنْ النَّيْقِ عَلَى التَّوْمِ عَلَى أَلُو كَانَ التَّعَدِّ وَالْمَالِ فَيْ اللَّوْمِ الْقَوْمِ عَلَى أَنْ اللَّهُ مَنْ النَّيْ عَلَى التَّوْمِ عَلَى أَنْ اللَّهُ وَمَا النَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى التَّوْمِ فَيْ إِنْ السَّعْرِ عَلَى الْمَالِ عَلَى أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُ اللَّوْمِ الْمُؤْمِ الْمَالَ عَلَى أَلَى الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللْهُ وَالْمَالِقُومُ اللْهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُولِ السَّوْمِ الْمَالِ الْمُؤْمَ اللْمُ الْمَالُولُ الْمُعْلِقُومُ الْمُؤْمِ اللْمُعْرِقُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِقُومُ اللْمُ الْمُؤْمُ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُ الْمُعْلَى الْمُؤْمُ اللْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُومُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعْمُ الْم

Jika Anda tahu, bahwa dasar mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan shalat Jum'at lebih dari satu di satu daerah, dan kebolehannya telah diambil oleh para *Ashhab* dari diamnya Imam Syafi'i atas Jum'atan lebih dari satu

¹⁹ Ahmad Khatib al-Minagkabawi, Shulh al-Jama'atain bi Jawaz Ta'addud al-Jum'atain, (Mesir: al-Mathba'ah al-Miyariyah, 1312 H), h. 29.

di kota Baghdad, dan para Ashhab memahami kebolehannya pada situasi para jamaah sulit berkumpul, seperti kesulitan yang terjadi di Baghdad, mereka pun tidak memberi ketentuan kesulitan itu yang tidak (pula) diperselisihkan, lalu muncul para ulama dan generasi sesudahnya, dan setiap ulama menentukan kesulitan tersebut sesuai dengan pemahaman mereka, dan al-Sya'rani menyatakan bahwa pencegah Jum'atan lebih dari satu adalah kekhawatiran terjadi jum'ah dan hal itu sudah hilang, maka kebolehan Jum'atan lebih dari satu itu berdasarkan hukum asal tentang pelaksanaan shalat Jum'at. Beliau berkata: "Inilah maksud (Nabi Saw.) pembawa syari'ah." Beliau berargumen, bahwa bila pendirian shalat Jum'at lebih dari satu itu dilarang secara dzatnya, niscaya akan terdapat hadits yang menerangkannya, meskipun hanya satu. Sementara tidak ada satupun hadits yang menyatakan begitu. Maka hal itu menunjukkan bahwa diamnya Nabi Saw. Itu bertujuan member kelonggaran kepada umatnya.

2. Al-Mizan al-Kubra²⁰

Termasuk yang diperselisihkan adalah pendapat imam madzhab empat, yaitu tidak boleh jum'atan lebih dari satu dalam satu daerah, kecuali jika penduduknya banyak dan sulit berkumpul di satu tempat.

3. Bughyah al-Mustarsyidin²¹

وَالْحَاصِلُ مِنْ كَلَامِ الْأَثِمَّةِ أَنَّ أَسْبَابَ جَوَازِ تَعَدُّدِهَا ثَلَاثَةٌ ضَيِّقٌ مَحَلِّ الصَّلَاةِ بِحَيْثُ لَّا يَسَعُ الْمُجْتَمِعِينَ لَهَا غَالِبًا وَالْقِتَالُ بَيْنَ الْفِئَتَيْنِ بِشَرْطِهِ وَبُعْدُ أَطْرَافِ الْبَلَدِ بِأَنْ كَانَ بِمَحَلِّ لَا يُسْمَعُ مِنْهُ التَّدَاءِ أَوْبِمَحَلِّ لَوْ خَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ الْفَجْرِلَمُ يُدْرِكُهَا إِذْ لَا يَلْزَمُهُ السَّعْيُ إِلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ

Dan kesimpulan pendapat para imam adalah, sungguh sebab boleh mendirikan jum'atan lebih dari satu itu ada tiga. (i) Tempat shalat jum'at yang sempit, yakni tidak cukup menampung para jamaah jum'at secara umum. (ii) Pertikaian antara dua kelompok masyarakat dengan syaratnya. (iii) Jauhnya ujung desa, yaitu bila seseorang berada di satu tempat (ujung desa) tidak bisa mendengar adzan, atau di tempat yang bila ia pergi dari situ setelah waktu fajar ia tidak akan menemui shalat jum'at, sebab ia tidak wajib pergi jum'atan melainkan setelah fajar.

Abdul Wahhab al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t. th.), Juz II, h. 13.
 Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 79.

361. Masalah Cek

- S. Bagaimanakah pandangan Muktamar terhadap masalah cek?
- J. Menggunakan cek dalam *mu'amalah/tijarah* hukumnya boleh. *Keterangan*, dari kitab:

1. Takmilah al-Majmu'22

إِنَّ أَمَّا الشِّيْكُ فَهُوَ صَكُّ يَأْمُرُ فِيْهِ الصَّاحِبُ الْمَسْحُوْبَ عَلَيْهِ بِدَفْعِ مَبْلَغِ مِنَ التُقُوْدِ مِنْ حِسَابٍ لَدَيْهِ إِمَّا إِلَى صَاحِبِ نَفْسِهِ وَإِمَّا إِلَى شَخْصٍ آخَرَ وَإِمَّا لِحَامِلِهِ... عَلَى أَنَّنَا إِذَا أَجَزْنَا الْحُكْمَ بِالسِّنْدِ الْأَدْنَى، وَالشَّيْكِ وَالْكَمْبِيَالَةِ فِي إِثْبَاتِ الْحُقُوقِ فَإِنَّمَا نَسْتَمِدُ ذَلِكَ مِنْ أَصْلٍ عَظِيْمٍ وَهُوَ أَمْرُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِكِتَابِةِ الدَّيْنِ فِي آيَةِ الدَّيْنِ وَنَهْيُهُ الْكَاتِبَ عَنْ آبَآءِ الْكِتَابَةِ وَلاَ يَسْتَطِيْعُ آحَدُ فِي عَصْرِنَا هَذَا أَنْ يُنْكِرَ الْحُقُوقَ الْمُسْتَنِدَة إِلَى وَثِيْقَةٍ أَمْضَاهَا بِيَدِهِ

Sedangkan cek adalah akta atau kertas dokumen keuangan yang pemiliknya bisa meminta pihak yang dikuasakan (semacam Bank) untuk mencairkan sejumlah uang sesuai permintaannya, baik dicairkan untuk dirinya sendiri, orang lain, atau pembawanya ... berdasarkan kita telah melegalkan paper berharga, cek dan wesel untuk menetapkan hak-hak (kepemilikan). Kita simpulkan begitu dari dasar yang kuat, yaitu perintah Allah Swt. untuk mencatat hutang dalam ayat tentang hutang dan laranganNya kepada juru tulis untuk enggan menulisnya. Pada masa sekarang ini, tidak seorangpun bisa mengingkari keabsahan hak-hak yang tertera dalam dokumen ia buat sendiri ...

2. Takmilah al-Majmu'23

وَأَصْبَحَتْ الْتَوْفِيْقَاتُ وَالاتِصَالاَتُ أَهَمُّ الْبَيِّنَاتِ وَأَعْظَمُهَا فِي الْإِثْبَاتِ وَلِذَا كَانَ لِلعُرْفِ حُكْمُهُ وَلِلْعَصْرِ وَتَطَوُّرِهِ أَثَرُهُ فِي نَظْرَةِ الْفِقْهِ إِلَى حُصْمِ الْكِتَابَةِ فَإِنَّ الْكِتَابَةَ إِذَا تُوجَبُ بِالتَّوْقِيْعِ وَالْإِمْضَاءِ كَانَتْ بَيْنَهُ يَتَحَتَّمُ الْحُصْمِ بِمُوْجِبِهَا إِلاَّ إِذَا طُعِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالتَّرْوِيْرِ فِيْهَا

Tandatangan dan pernyataan tertulis merupakan keterangan yang kuat dalam menetapkan hak. Oleh karena itu, setiap 'urf memiliki hukum tersendiri, dan setiap masa serta perkembangannya mempengaruhi pandangan fiqh atas hukum tulisan. Sebab suatu tulisan (yang diajukan

^{22 ...,} Takmilah al-Majmu', (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t. th.), jilid XII, h. 176-177.

^{23 ...,} Takmilah al-Majmu', (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t. th.), jilid XII, h. 176.

pihak terdakwa) ketika dikukuhkan dengan legalitas dan tandatangan, maka ketetapan hukum harus berdasarkan padanya, kecuali bila pihak terdakwa itu tertuduh membuat kepalsuan pada tulisan tersebut.

362. Pembayaran Menggunakan Cek Kosong

- S. Sahkah pembayaran menggunakan cek kosong?
- J. Pembayaran menggunakan cek kosong adalah tidak sah, sebab termasuk tsaman majhul.

Keterangan, dari kitab:

1. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj²⁴

Dan kedua orang yang bertransaksi harus mengetahui harganya (secara tepat) atau hal lain yang fungsinya sama. Seandainya salah satu dari keduanya tidak mengetahuinya, maka transaksipun batal menurut pendapat sahih.

363. Mencairkan Cek Mundur Mendapat Potongan Berdasarkan Prosentase

- S. Bagaimanakah hukumnya mencairkan/menguangkan cek mundur dengan potongan berdasar prosentase?
- J. Adapun hukumnya mencairkan/menguangkan cek mundur dengan potongan berdasar prosentase itu melihat akadnya:
- a. Kalau dalam akad jual beli, maka hukumnya sah, sebab cek termasuk dapat dimanfaatkan (muntafa' bih).
- b. Kalau dengan akad *qardh*, tidak sah, karena termasuk *qardh* yang menarik kemanfaatan/keuntungan.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah Mawahib al-Shamad fi Hall Alfazh al-Zubad²⁵

Yang bisa dimanfaatkan secara indrawi maupun syar'i, sesuai dengan keumuman hadits: "Semua transaksi peminjaman yang menarik keuntungan

406

²⁴ Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid II, h. 78.

²⁵ Ahmad Fasani, Mawahib al-Shamad fi Hall Alfazh al-Zubad, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid II, h. 78.

(bagi pihak yang memberi pinjaman) manfaat termasuk riba." (HR. Baihaqi, dari Ibn Abbas)

Mengenai Masalah Thalaq

Muktamar NU yang ke 27 mengusulkan kepada pemerintah agar meninjau kembali peraturan perundang-undangan tentang beberapa hal yang menyangkut masalah perkawinan dan khususnya mengenai perceraian (talaq) bagi yang beragama Islam.[] and the second of the second o

MASAIL DINIYAH KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA NU Di Pesantren Ihya Ulumuddin Kesugihan Cilacap Pada Tanggal 23 - 26 Rabiul Awwal 1408 H./15 - 18 Nopember 1987 M.

364. Melakukan Wuquf yang Bertentangan dengan Hasil Hisabnya 365. Zakat Peternakan Bandeng

366. Zakat Perkebunan Tebu

367. Zakat Usaha Perhotelan

368. Dispensasi Bagi Orang yang Selalu Bepergian 369. Dasar Penetapan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha 370. Zakat Hasil Pertanian yang Menggunakan Pupuk 371. Koperasi Simpan Pinjam

Pimpinan Sidang Komisi A (Masail Diniyah):

1. KH. M. Rodli Sholeh ... Ketua

2. H. Irfan Zidny MA. ... Wakil Ketua

Perumus:

- 1. Mawawi Abdul Aziz
- 2. KH. Shidqy Mudzhar
 - 3. KH. Amin Sholeh
- 4. KH. Abdul Aziz Masyhuri
 - 5. KH. Abdullah
- 6. Dr. KH. Aqil Husain Al-Munawwar
 - 7. KH. Masyhuri Syahid MA.
 - 8. KH. Darman Fauzy

364. Melakukan Wuquf yang Bertentangan dengan Hasil Hisabnya

S. Seorang hasib melakukan wuquf pada hari yang ditetapkan oleh Kerajaan Saudi Arabia, sedang hal ini bertentangan dengan hasil hisabnya. Sahkah wuqufnya?

J. Sah.

Keterangan, dari kitab:

1. Bughyah al-Musytarsyidin¹

Jika terjadi pertentangan antara hasil hisab (hitungan astronomi/falak) dengan ru'yah (melihat bulan secara langsung), maka yang diamalkan adalah hasil ru'yah dan bukan hasil hisab menurut semua pendapat.

- 2. Referensi lain:
 - a. Hasyiyah al-Idhah, h. 153
 - b. Mauhibah Dzi al-Fadhl, Juz IV, h. 497.

365. Zakat Peternakan Bandeng

S. Orang yang beternak ikan bandeng dengan tujuan bahwa hasil panennya akan diambil dan dijual untuk keperluan hidup sebagaimana lazimnya orang berumah tangga.

Setelah delapan bulan sejak awal beternak, maka semua ikan diambil dan dijual laku dengan memperoleh uang senilai setengah kilo gram emas. Sesudah dibelanjakan barang guna keperluan hidup, kemudin sisa uang senilai lima puluh gram emas dibelikan bibit bandeng untuk diternakkan lagi dengan tujuan yang sama.

Apakah peternakan bandeng dengan tujuan dan cara tersebut, wajib dizakati? Apabila wajib dizakati, kapan harus dikeluarkan? Kalau wajib dizakati, dapatkah diberikan contoh peternakan hewan bukan zakawi di Indonesia yang memenuhi syarat-syarat tijarah?

J. Tidak wajib dizakati, sebab tidak memenuhi persyaratan zakat tijarah. Adapun contoh peternakan hewan bukan zakawi tetapi wajib dizakati ialah peternakan bandeng dengan sengaja diperdagangkan dan telah memenuhi syarat-syarat yang lain.

410

¹ Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, *Bughyah al-Musytarsyidin*, (Mesir: Musthafa al-HAlabi, 1952), h. 110.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Muhadzdzab2

Suatu barang tidak menjadi komoditas perdagangan kecuali dengan dua syarat: 1) Dimiliki dengan akad yang mengharuskan adanya 'iwad (penukar), seperti akad jual beli, persewaan, pernikahan dan khulu', 2) Ketika melakukan akad berniat memilikinya dengan tujuan diperdagangkan.

2. Itsmid al-'Ainain3

مَسْأَلَةُ أَفَادَ أَيْضًا أَنَّ مَذْهَبَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وُجُوْبُ الرَّكَاةِ فِيْ كُلِّ مَا خَرَجَ مِنَ اْلأَرْضِ إِلاَّ حَطَبًا أَوْ خَصْبًا أَوْ حَشِيْشًا وَلاَ يَعْتَبِرُ نِصَابًا وَعِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِيْمَا يُوْكُلُ أَوْ يُوْزَنُ أَوْ يُدَّخِّرُ لِلْقُوْتِ وَلاَ بُدَّ مِنَ النِّصَابِ عِنْدَ مَالِكٍ كَالشَّافِعِيِّ

Permasalahan, Syaikh Sa'id Ba'asyan juga menjelaskan, bahwa mazhab Abu Hanifah itu mewajibkan zakat dalam setiap yang tumbuh dari bumi kecuali kayu bakar, tebu atau rerumputan dan tidak mempertimbangkan nishab tertentu. Dan menurut Imam Ahmad, zakat wajib pada semua yang ditakar, ditimbang, atau disimpan untuk makanan pokok, dan menurut pendapat Imam Malik harus memenuhi nishab sebagaimana Imam Syafi'i.

- 2. Referensi Lain
 - a. Ahkamul Fuqaha, soal nomor 140 dan 272.
 - b. Tuhfah al-Muhtaj, Juz II, h. 195.

366. Zakat Perkebunan Tebu

S. Ada usaha perkebunan tebu di sawah dengan tujuan bahwa hasil panennya akan dijual semua untuk keperluan hidup. Setelah tebu berumur 18 bulan, maka semua tebu ditebang dan dijual laku dengan memperoleh uang senilai setengah kilogram emas. Hasil penjualan tebu ini, apakah wajib dizakati dan apa alasannya? Kalau tidak wajib dizakati, dapatkah diberikan contoh penanaman (pertanian/perkebunan) tanaman bukan zakawi yang memenuhi syarat-syarat tijarah?

² Abu Ishaq al-Syairazi, al-Muhadzdzab, Mesir: Isa al-Halabi, t. th.), h. 195.

³ Ali Bashabrin, Itsmid al-'Ainain pada Bughyah al-Mustarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1952), h. 47-48.

J. Tidak wajib zakat, karena tidak memenuhi persyaratan tijarah. Adapun contoh penanaman tanaman bukan zakawi tetapi dizakati ialah tanaman tebu yang ditujukan untuk diperjual belikan.

Keterangan, dari kitab:

1. Busyra al-Karim⁴

Dan Abu Dawud meriwayatkan tentang (kewajiban) mengeluarkan zakat dari barang dagangan.

2. Hawasyi al-Madaniyah⁵

Kami telah menetapkan, bahwa barang yang tidak wajib dizakati karena dzatnya itu wajib dizakati tijarah, seperti batang kayu, jerami dan tanah. Sebab semuanya itu tidak terkena wajib zakat karena dzatnya, sementara barang yang tidak terkena wajib zakat karena dzatnya, maka terkena wajib zakat tijarah.

367. Zakat Usaha Perhotelan

S. Orang yang membuka hotel dengan modal senilai satu kilogram emas, bertujuan agar dari uang hasil sewa hotel dapat dipergunakan untuk mencukupi keperluan hidup pengusaha hotel.

Rata-rata setiap bulan menghasilkan uang sewa senilai empat puluh gram emas, dan setiap bulannya uang sewa ini selalu habis untuk keperluan hidup dan biaya pemeliharaan/perbaikan hotel. Karena demikian, maka pada akhir tahun hanya tersisa uang sewa senilai lima puluh gram emas. Hotel yang selalu diperbaiki dengan uang sewa ini, sekarang menjadi bagus dan harga jualnya naik menjadi senilai satu setengah kilogram emas.

Usaha perhotelan dengan cara demikian ini, apakah wajib dizakati pada akhir tahun dan apa alasannya? Kalau wajib dizakati, berapa harus dibayar; apakah dari hasil sewa saja atau dari/beserta harga hotel. Kalau tidak wajib, dapatkah diberikan contoh usaha perhotelan yang mengandung makna tijarah yang wajib dizakati?

J. Tidak wajib dizakati. Contoh usaha perhotelan dan usaha semisal

412

⁴ Sa'id bin Muhammad Baasan, Busyra al-Karim, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. th.), Juz II, h. 50.

⁵ Sulaiman al-Kurdi, *Hawasyi al-Madaniyah*, (Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhan, t. th.), Juz I, h. 95.

yang wajib dizakati ialah usaha perhotelan yang hasilnya pertahun telah memenuhi persyaratan tijarah.

Keterangan, dari kitab:

1. Kifayah al-Akhyar⁶

Seandainya seseorang menyewakan harta atau dirinya dengan maksud ketika memperoleh upah akan dijadikannya barang dagangan, maka upah tersebut menjadi harta dagangan. Sebab akad sewa merupakan mu'awadhah -pertukaran-.

2. Mauhibah Dzi al-Fadhl⁷

Pernyataan penulis: "Dan akad sewa untuk diri atau hartanya." maksudnya maka bila seseorang menyewakan dirinya dalam rangka memperoleh upah untuk digunakan berdagang, maka upah tersebut menjadi harta dagangan.

3. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab8

Dan barang siapa yang menyewakan dirinya (jual jasa) ataupun (mempekerjakan) orang lain dengan memperoleh upah berupa barang dengan tujuan berdagang, maka barang tersebut menjadi barang dagangan dan wajib zakat.

368. Dispensasi Bagi Orang yang Selalu Bepergian

S. Bagaimana pendapat Musyawarah mengenai orang yang hampir selalu musafir (sejauh masafah al-qashri), dan mengenai orang yang mempunyai

⁶ Abu Bakar bin Muhammad al-Khishni, Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar, (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Juz I, h. 145. Lihat Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj, Juz III, hlm. 394.

Mahfud al-Termasi, Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: al-Amirah al-Syarafiyah, 1326 H) Juz IV, h. 31.

⁸ Muhyiddin al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Jilid VI, h. 31.

dua atau lebih tempat tinggal yang berjauhan (sejauh masafah al-qashri), namun semuanya dihuni dalam hubungannya dengan rukhshah?

- J. a. Orang yang selalu musafir (sejauh masafah al-qashri), maka dalam hal rukhshah qashar shalat, hukumnya lebih utama itmam (tidak mengqashar). Dan dalam hal rukhshah ifthar (tidak puasa), bila ada harapan dapat mengqadha puasanya di hari lain, maka ia boleh ifthar. Tetapi apabila harapan itu tidak ada, maka tidak boleh ifthar, demikian pendapat Imam Subki yang didukung Imam Ramli; sedang menurut Imam Ibn Hajar al-Haitami, boleh ifthar secara mutlak.
 - b. Orang yang mempunyai dua atau lebih tempat tinggal yang berjauhan (sejauh masafah al-qashri), apabila sedang berada di tempat tinggal yang mana saja, maka hukumnya sama dengan orang yang muqim, karena dia tinggal di tempat tinggalnya sendiri. Dan apabila sedang pergi dari tempat tinggal yang lain maka selama masih dalam perjalanan dia termasuk musafir "munsyi al-safar", artinya boleh melaksanakan rukhshah safar, namun untuk dapat meninggalkan shalat Jum'at dan boleh berbuka puasa, masih disyaratkan bahwa sebelum fajar ia harus sudah keluar dari batas desa yang bersangkutan.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib9

وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي جَوَازِ قَصْرِهِ مَنِ اخْتُلِفَ فِي جَوَازِ قَصْرِهِ كَمَلاَّ جِ يُسَافِرُ فِي الْبَحْرِ وَمَعَهُ عِيَالُهُ فِيْ سَفِيْنَةٍ وَمَنْ يُدِيْمُ السَّفَرَ مُطْلَقًا كَالسَّاعِي فَإِنَّ الْإِثْمَامَ أَفْضَلُ لَهُ خُرُوجًا مِنْ خِلاَفِ مَنْ أَوْجَبَهُ كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ ﷺ

Dan terkecualikan dengan ucapanku: "Dan kebolehan meng*qashar*nya tidak diperselisihkan." seperti sopir kapal yang melakukan pelayaran bersama keluarganya di kapal, dan orang yang selalu bepergian seperti *Sa'i* (pengelana), maka menyempurnakan shalat (tidak meng*qashar* itu lebih utama baginya karena keluar dari *khilaf* ulama yang mewajibkannya seperti Imam Ahmad Ra.

2. Tuhfah al-Muhtaj¹⁰

⁹ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*, (Bandung: Syirkah Ma'arif, t. th.), Jilid I, h. 201.

¹⁰ Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada Hasyiyata al-Syirwani wa al-'Abbadi, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), Jilid III, h. 73.

وَقَالَ السُّبُكِيّ بَحْثًا وَلاَ أَيْ وَلاَ يَجُوْزُ الْإِفْطَارُ لِمَنْ لاَ يُرْجَى زَمَنًا يَقْضِيْ فِيْهِ لِإِدَامَتِهِ السَّفَرَ أَمَدًا وَفِيْهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ فَالأَوْجَهُ خِلاَفُهُ

Imam Subki berpendapat, tidak diperkenankan membatalkan puasa bagi orang yang tidak punya harapan di waktu lain untuk meng*qadha* karena terus menerus bepergian. Dan dalam hal itu ada kajian ulang yang jelas. Pendapat yang lebih kuat *al-awjah* adalah kebalikannya.

3. Fath al-Wahhab11

Salat Jum'at tidak wajib bagi musafir walaupun dalam perjalanan pendek, karena ia termasuk orang yang tersibukkan dengan perjalanan tersebut dan hal-hal yang terkait dengan perjalanannya.

4. Tuhfah al-Thullab12

Haram bepergian bagi orang yang berkewajiban Jum'at, walaupun untuk tujuan ketaatan (ibadah) setelah fajar hari Jum'at terkait, kecuali jika memungkinkan untuk bisa salat Jum'at di tengah perjalanan atau di tempat tujuannya, atau akan memperoleh kesulitan tertinggal dari teman seperjalanan.

3. Miraqah Shu'ud al-Tashdiq¹³

Boleh berbuka puasa bagi musafir dalam perjalanan yang jauh sehingga boleh meng-qashar shalat, dan sudah keluar dari bangunan-bangunan (batas kota) sebelum fajar sebagaimana pendapat yang dianut oleh Imam Ramli.

369. Dasar Penetapan Awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha

S. Tentang penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha?

¹¹ Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab, (Bandung: Syirkah Ma'arif, t. th.), Juz I, h. 72.

¹² Zakaria al-Anshari, Tuhfah al-Thullab, (Mesir: Mushtafa al-Halabi, 1340 H), h. 32.

¹³ Nawawi bin Umar al-Bantani, Miraqah Shu'ud al-Tashdiq, (Kudus: Menara Kudus, t. th.), h. 43.

- J. 1. Bahwa dasar ru'yah al-hilal atau istikmal dalam penetapan awal Ramadhan, Idul Fithri dan Idul Adha, adalah dasar yang diamalkan oleh Rasulullah Saw., Khulafaur Rasyidin dan yang dipegangi oleh seluruh ulama Madzhab al-Arba'ah. Sedang dasar hisab falak untuk penetapan tiga hal ini, ialah dasar yang tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah Saw. dan Khulafa al-Rasyidin serta diperselisihkan keabsahannya di kalangan para ulama.
 - 2. Bahwa itsbat al-'am (penetapan secara umum) oleh Qadhi atau Penguasa mengenai awal Ramadhan, Idul Fithri dan Idul Adha atas dasar hisab tanpa dihasilkan ru'yah al-hilal atau istikmal, adalah tidak dibenarkan oleh Mazhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali); (Kitab Fiqh 'ala al-Madzhabil al-Arba'ah).
 - 3. Bahwa Nahdlatul Ulama adalah Jam'iyyah yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah (Anggaran Dasar pasal 4), yaitu, Jam'iyyah yang menjunjung tinggi dan mengikuti ajaran Rasulullah Saw. dan tuntunan para sahabat serta ijtihad para ulama Mazhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali).
 - 4. Bahwa Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama tanggal 13 16 Rabiul Awwal 1404 H./18 21 Desember 1983 M. di Situbondo telah mengambil keputusan mengenai penetapan awal Ramadhan dan Idul Fithri, yang intinya bahwa NU menggunakan dasar *ru'yah al-hilal* atau *istikmal*. Keputusan ini telah dikukuhkan oleh Muktamar NU ke-27 tahun 1405 H/1984 M.
 - 5. Dan untuk keseragaman di kalangan warga NU dalam melaksanakan keputusan dimaksud termasuk dalam hal penetapan mengenai Idul Adha, maka Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama tanggal 23 - 24 Rabiul Awwal 1408 H./15 - 16 Nopember 1987 M. di Pondok Pesantren Ihya 'Ulumuddin Kesugihan Cilacap, Jawa Tengah, telah mengambil kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Menegaskan bahwa penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha oleh Qadli atau Penguasa yang diberlakukan kepada masyarakat (itsbat al-'am) dapat dibenarkan jika berdasarkan ru'yah al-hilal atau istikmal.
 - b. NU telah lama mengikuti pendapat ulama yang tidak membedakan *Mathla'* dalam penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha, yakni *ru'yah al-hilal* di salah satu tempat di Indonesia yang diterima oleh Pemerintah sebagai dasar penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha

- di seluruh wilayah Indonesia walaupun berbeda mathla'nya.
- c. Melakukan ru'yah al-hilal untuk penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha adalah fardhu kifayah menurut Madzhab al-Arba'ah kecuali Madzhab Hanbali yang berpendapat bahwa hukumnya sunah. Pelaksanaan ru'yah al-hilal yang diusahakan oleh Pemerintah/Departemen Agama adalah sudah cukup sebagai pelaksanaan fardhu kifayah tersebut bagi seluruh umat Islam Indonesia.
- d. Lajnah Falakiyah dan Ru'yah PBNU perlu melakukan upaya bagi terlaksananya prinsip ru'yah al-hilal atau istikmal antara lain dengan cara:
 - Membuat kepastian awal Sya'ban dengan *ru'yah al-hilal* atau *istikmal* untuk keperluan awal Ramadhan.
 - Melakukan ru'yah al-hilal pada malam 30 Syawal dan 30 Dzul Qa'dah, selanjutnya menanyakan hasil ru'yah al-hilal tanggal 01 Dzul Hijjah kepada Pemerintah. Hal ini dilakukan sebab seringkali pemerintah tidak mengeluarkan pengumuman penetapan tanggal 01 Dzul Hijjah secara rinci. Kemudian hasilnya diumumkan kepada Wilayah dan Cabang NU di seluruh Indonesia untuk keperluan Idul Adha segera.
- e. Untuk keperluan memulai puasa Ramadhan, melaksanakan Idul Fitri dan menyelenggarakan Idul Adha, maka kepada warga NU terutama anggota pimpinan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat ranting diinstruksikan agar menyimak pengumuman dan penetapan Pemerintah/Departemen Agama melalui RRI dan TVRI mengenai tiga hal ini.

Jika pengumuman dan penetapannya berdasarkan *ru'yah al-hilal* atau *istikmal*, maka warga NU wajib mengikuti dan mentaatinya. Tetapi jika pengumuman dan penetapannya hanya semata-mata berdasarkan *hisab*, maka warga NU tidak wajib mengikuti dan mentaatinya, selanjutnya mengawali puasa Ramadhan, melaksanakan Idul Fitri dan menjalankan Idul Adha pada hari berikutnya.

Sikap demikian ini sesuai dengan pendapat *Jumhur al-Salaf*, sesuai dengan jiwa Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1404 H./1983 M. dan Keputusan Muktamar ke-27 tahun 1405 H./1984 M. dan dilindungi Undangundang Dasar 1945, pasal 29, ayat 2.

Keterangan, dari kitab:

1. Bughyah al-Musytarsyidin¹⁴

Bulan Ramadhan sama seperti bulan lainnya tidak tetap kecuali dengan melihat hilal, atau menyempurnakan bilangan menjadi tiga puluh hari.

2. Al-'Ilm al-Mantsur fi Itsbat al-Syuhur¹⁵

Para tokoh madzhab Malikiyah berpendapat: "Bila seorang penguasa mengetahui hisab tentang (masuknya) suatu bulan, lalu ia menetapkan bulan tersebut dengan hisab, maka ia tidak boleh diikuti, karena ijma' ulama salaf bertentangan dengannya."

370. Zakat Hasil Pertanian yang Menggunakan Pupuk

- S. Pertanian yang menggunakan pupuk relatif lebih berat mu'nahnya dari pada pertanian yang menggunakan mu'nah al-saqyi (biaya pengairan). Apakah hasil pertanian yang menggunakan pupuk itu harus dizakati nishf al-usyr (5 %) atau (10 %)?
- J. 1. Mu'nah al-saqyi (biaya pengairan) tidak sama dengan biaya pupuk, karena air berpengaruh langsung pada hidup atau matinya tanaman, sedang pupuk hanya berpengaruh pada kesuburan tanaman dan kelipatan hasil produksinya.
- 2. Jika sebidang tanah yang diairi dengan biaya tanpa diberi pupuk akan menghasilkan gabah sebanyak lima kwintal misalnya, maka tanah tersebut jika diairi dengan biaya pengairan dan diberi pupuk akan dapat menghasilkan gabah sebanyak sepuluh kwintal atau lebih, sedang biaya pupuk yang dipergunakan tentu lebih murah dari harga kelipatan gabah yang dihasilkan dengan pupuk tersebut, sehingga dengan demikian biaya pupuk tersebut telah tertutup oleh harga kelipatan yang dihasilkan.

Jadi zakat dari tanaman yang diberi pupuk tetap "usyr" (10 %) dan bukan "nishful usyr" (5 %).

¹⁴ Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1952), h. 108.

¹⁵ Taqiyuddin al-Subki, al-'Ilm al-Mantsur fi Itsbat al-Syuhur, (Indonesia: Madrasah al-Salafiyah al-Syafi'iyah Tebuireng-tulis tangan/roneo, 1354 H), h. 14.

Keterangan, dari kitab:

1. I'anah al-Thalibin¹⁶

أَنَّ مُؤَنَ السَمَاءِ لَيْسَتْ مُؤَنَ السَّقِي بِالدَّوْلاَبِ فَزَكَاتُهَا الْعُشُرُ لاَ نِصْفُ الْعُشُرِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيَّ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوِ الْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا الْعُشُرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْجِ نِصْفُ الْعُشُرِ

Sesungguhnya biaya pengairan berdasarkan tadah hujan itu tidak sama dengan biaya penyiraman dengan hewan. Maka zakatnya sepersepuluh (10 %) dan bukan separuhnya (5 %). Sesuai hadits riwayat Bukhari: "Dalam hal (pertanian) yang diairi oleh hujan, mata air atau yang dengan akarnya bisa menyerap air disekitarnya, maka (zakatnya) 10 %. Sedangkan yang diairi dengan suatu peralatan, maka separuhnya (5 %)."

2. Al-Iqna'17

(نِصْفُ الْعُشُرِ) وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ ﷺ: فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَلَمْ يَا الْعُشُرُ وَفِيْمَا سُقَتْ بِالنَّصْحِ نِصْفُ الْعُشُرِ وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ كَمَا قَالَ الْبَيْهَةِ يُ وَغَيْرُهُ وَالْمَعْنَى فِيْهِ كُثْرَةُ الْمُؤْنَةِ وَخِفَّتِهَا

(Wajib zakat 10%) berdasarkan sabda Rasulullah Saw.: "Dalam pertanian yang diairi oleh hujan ataupun mata air atau yang dengan akarnya bisa menyerap air (disekitarnya), maka (zakatnya) 10 %. Sedangkan yang diairi dengan peralatan, maka separuhnya 5 %." Hal ini sesuai dengan ijma' seperti kata al-Baihaqi dan lainnya. 'Illat dalam hadits tersebut adalah banyak atau sedikitnya biaya pengairan.

3. Fath al-Wahhab18

(قَوْلُهُ لَا بِأَكْثَرِهِمَا) مُتَعَلِّقُ بِمَحْدُوفٍ أَيْ لَا يُعْتَبَرُ بِأَكْثَرِهِمَا وَقَوْلُهُ وَلَا بِعَدَدِ السَّقْيَاتِ مُتَعَلِّقُ بِمَحْدُوفٍ أَيْ وَلَا يَسْقُطُ بِعَدَدِ السَّقْيَاتِ وَغَرَضُهُ بِهَذَا الرَّدِّ عَلَى قَوْلَيْنِ ضَعِيفِينَ مُتَعَلِّقُ بِمَحْدُوفٍ أَيْ وَلَا يَسْقُطُ بِعَدَدِ السَّقْيَاتِ وَغَرَضُهُ بِهَذَا الرَّدِّ عَلَى قَوْلَيْنِ ضَعِيفِينَ حَكَاهُمَا فِي الْمُنْ مَعَ شَرْحِ الْمَحَلِّ وَوَاجِبُ مَا سُقِيَ بِهِمَا أَيْ بِالتَّوْعَيْنِ كَالنَّضْحِ وَالْمَطَرِ سَوَاءً ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ أَيْ الْمُشْرِ عَمَلًا بِوَاجِبِ النَّوْعَيْنِ فَإِنْ غَلَبَ أَحَدُهُمَا فَنِي قَوْلٍ وَالْمَطَرِ سَوَاءً ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ أَيْ الْمُشْرِ عَمَلًا بِوَاجِبِ النَّوْعَيْنِ فَإِنْ غَلَبَ أَحَدُهُمَا فَنِي قَوْلٍ

Muhammad Syaththa al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.th.), Jilid II, h. 161. Lihat pula, al-Fuyudhat al-Rabbaniyah, Himpunan Keputusan Muktamar Jam'iyah Ahli Thariqah al-Muktabarah al-Nahdhiyah, masalah no. 75.

Muhammad al-Khatib al-Syirbini, al-Iqna', (Bandung: Syirkah Ma'arif, t. th.), Juz I, h. 194.

¹⁸ Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab pada Hasyiyah al-Jamal, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid II, h. 246.

يُعْتَبَرُ هُوَ فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ الْمَطَرُ فَالْوَاجِبُ الْعُشْرُ أَوْ النَّصْحُ فَنِصْفُ الْعُشْرِ وَالْأَظْهَرُ يُقَسَّطُ وَالْغَلَبَةُ وَالتَّقْسِيطُ بِاعْتِبَارِ عَيْشِ الزَّرْعِ أَوْ القَّمَرِ وَنَمَاثِهِ وَقِيلَ بِعَدَدِ السَّقْيَاتِ

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Tidak dengan yang terbanyak dari masa hidup buah-buahan dan tanaman, dan masa pertumbuhannya.) itu terkait dengan kata yang dibuang, maksudnya tidak dihitung dengan yang terbanyak dari dua masa tersebut. Ungkapan beliau: "Tidak dengan hitungan penyiraman.", itu terkait dengan kata yang dibuang, maksudnya tidak diprosentase dengan hitungan penyiraman. Tujuan beliau dengan ungkapan ini adalah menyanggah dua qaul dha'if yang dihikayatkan al-Nawawi dalam kitab Minhaj al-Thalibin. Redaksinya sekaligus Syarh al-Mahalli adalah:

"Dan zakat pertanian yang diairi dengan keduanya, yakni dengan dua macam pengairan, seperti hewan pengangkut air dan hujan secara sama adalah 3/4, maksudnya dari 1/10, karena mengamalkan kewajiban zakat dalam dua macam pertanian tersebut. Bila salah satu pengairan itu mendominasi, maka dalam satu pendapat, yang diperhitungkan (untuk menentukan zakat) adalah pengairan yang mendominasi itu. Bila yang mendominasi itu pengairan dengan hujan, maka zakatnya 1/10, atau yang mendominasi itu pengairan dengan hewan pengangkut air, maka zakatnya 1/20. Sedangkan menurut qaul al-azhhar kadar zakatnya diqisth (diprosentase antara keduanya). Dominasi dan taqsith (prosentase) tersebut dengan mempertimbangkan masa kehidupan tanaman atau buah-buahan, dan pertumbuhannya. Sementara menurut pendapat lain dengan hitungan penyiraman.

4. I'anah al-Thalibin¹⁹

(قَوْلُهُ وَسَبَبُ التَّفْرِقَةِ) أَيْ مَا بَيْنَ مَا سُقِيَ بِلاَ مُؤْنَةٍ حَيْثُ كَانَ وَاجِبُهُ الْعُشُرَ وَمَا سُقِيَ بِمُؤْنَةٍ حَيْثُ كَانَ وَاجِبُهُ نِصْفَ الْعُشُرِ (قَوْلُهُ ثَقْلَ الْمُؤْنَةُ فِيْ هَذَا) أَيْ فِيْمَا سُقِيَ بِمُؤْنَةٍ

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Sebab perbedaan."), maksudnya perbedaan antara pertanian yang diairi tanpa biaya yang zakatnya 10% dan yang diairi dengan biaya yang zakatnya 5%. (Unkapan beliau: "Besarnya biaya dalam pertanian ini."), maksudnya pertanian yang diairi dengan biaya.

5. Fatawi Zubairi20

¹⁹ Muhammad Syaththa al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.th.), Jilid II, h. 161.

²⁰ Muhammad Rais al-Zubairi, Fatawa Zubairi pada Qurrah al-'Ain bi Fatawa 'Ulama al-

(بَابُ زَكَاةِ النَّبَاتِ) سُئِلَ ﴿ فَيْ أَهْلِ بَلَدٍ يَمْتَادُوْنَ تَسْمِيْدَ أَشْجَارِهِمْ بَدَلَ السِّقَايَةِ بَلْ أَكْثَرَ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى مَالِكِ الْأَشْجَارِ الْعُشُرُ أَوْ نِصْفُهُ وَأَيْضًا هَلْ يُحْرَهُ أَكُلُ الثَّمْرَةِ مِنْ أَجْلِ التَّسْمِيْدِ أَمْ لَا يَكُنَ الثَّمْرَةِ مِنْ أَجْلِ التَّسْمِيْدِ أَمْ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانُوا يَمْتَادُوْنَ تَحْرِيْثَ أَشْجَارِهِمْ بَدَلَ السِّقَايَةِ مَا حُكْمُهُ فِي وُجُوْبِ الزَّكَاةِ أَفْتُونَا لَا تَسْمِيْدُ وَالتَّحْرِيْثُ لاَ يُغَيِّرُ حُحْمَ الْوَاحِبِ فَيَجِبُ مَا اللهُ عَنْهُ يَقُولُ التَّسْمِيْدُ وَالتَّحْرِيْثُ لاَ يُغَيِّرُ حُحْمَ الْوَاحِبِ فَيَجِبُ مِنْ الْعُشْرِ وَلا يُحْرَقُ أَكُلُ القَّمْرَةِ الْمَدْكُورَةِ وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

(Bab Zakat Tanaman) Syaikh al-Zubairi Ra, pernah ditanya tentang penduduk suatu daerah yang melakukan pemupukan pohon-pohon sebagai pengganti dari pengairan, dan bahkan biayanya lebih besar. "Apakah pemilik pohon terbebani zakat 10% atau separuhnya (5%), dan apakah dimakruhkan memakan buah-buahan karena pemupukan tersebut, serta bagaimana jika mereka membajak lahan (sekitar) pohon-pohon tersebut sebagai pengganti pengairan, bagaimana hukumnya terkait dengan kewajiban zakatnya? Berilah fatwa kami, semoga anda mendapatkan imbalan pahala."

Beliau, 'afallahu 'anh, menjawab dengan berkata: "Pemupukan dan pembajakan lahan tidak merubah kewajiban zakat, lalu wajib zakatnya menjadi 5%, dan tidak makruh memakan buah-buahan tersebut. Wallah subhanah wa ta'ala a'lam."

5. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab21

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَزَّكَاتُهُ الْعُشْرُ فِيمَا سُقِيَ بِغَيْرِ مُؤْنَةٍ ثَقِيلَةٍ كَمَاءِ السَّمَاءِ وَالْأَنْهَارِ وَمَا شَرِبَ بِالْعُرُوقِ وَنِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِمُؤْنَةٍ ثَقِيلَةٍ كَالنَّوَاضِحِ وَالدَّوَالِيبِ وَمَا أَشْبَهَهَا لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَرَضَ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلًا وَرُوِيَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Penulis (Abu Ishaq al-Syairazi) -rahimallahu 'anh ta'ala- berkata: "Dan zakatnya (kurma dan anggur), 10 % bagi yang diairi tanpa biaya besar, seperti dengan air hujan, air sungai, dan air yang diserap oleh akar. Dan 5% bagi yang diairi dengan biaya besar, seperti dengan onta-onta pengangkut air, alat penyiram tanaman dan semisalnya. Karena hadits riwayat Ibn Umar -radhiyallah 'anhuma-: "Sungguh Nabi Saw. mewajibkan zakat 10 % bagi tanaman yang diairi oleh hujan, sungai, atau tanaman yang

Haramain, (Mesir: al-Tijariyah ak-Kubra, 1937) h. 100.

²¹ Muhyiddin al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Mesir: al-Imam, t. th.), Jilid V, h. 445.

menyerap air dengan akarnya,- dalam riwayat lain dengan redaksi: "'Atsariyyan" yaitu tanaman yang menyerap air yang mengalir disekitarnya, dan 5 % bagi tanaman yang diairi dengan onta pengangkut air.

371. Koperasi Simpan Pinjam

- S. Koperasi Simpan Pinjam (Kosipa) apakah boleh? Dan apakah uang administrasi termasuk "riba"? Dan apakah wajib zakat?
- J. 1. Modal yang dikumpulkan oleh KOSIPA dari uang "simpanan pokok" dan "simpanan wajib" para anggota koperasi untuk dipinjamkan kepada yang memerlukan pinjaman, tidak dapat memenuhi ketentuan "syirkah", sebagaimana yang disebutkan dalam kitabkitab fiqh, karena:
 - a. Dalam "syirkah" pengumpulan modal itu disyaratkan harus ada lafal yang dapat dirasakan sebagai pemberian izin dalam perdagangan. Sedangkan dalam "Kosipa" pengumpulan modal tersebut dimaksudkan untuk dipinjamkan.
 - b. Dalam "syirkah" modal harus sudah terkumpul sebelum dilakukan syirkah. Sedangkan dalam "Kosipa" biasanya modal baru dikumpulkan sesudah disetujui oleh rapat anggota.

Jadi "akad" pengumpulan modal dalam "Kosipa" tersebut tidak sah menurut ketentuan syara'.

- 2. Uang administrasi yang dipungut oleh Kosipa dari setiap anggota Kosipa yang meminjam uang, hanyalah merupakan "istilah lain" dari bunga, karena:
 - a. Uang administrasi tersebut merupakan "keharusan" yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang meminjam uang; sehingga pada hakekatnya tidak berbeda dengan manfaat yang ditarik oleh yang meminjamkan uang, dalam hal ini "Kosipa" dari para peminjam uang.
 - b. Besarnya uang administrasi yang dipungut oleh "Kosipa" dari para peminjam uang telah ditentukan sesuai dengan besarnya uang yang dipinjam, yaitu sekian persen dari jumlah pinjaman sesuai dengan keputusan rapat anggota.
 - Jadi tanpa memperhatikan apakah syarat pemberian uang administrasi sedang berlangsung, atau sebelum akad ataupun sesudah akad, atau apakah syarat tersebut berbentuk ucapan atau berbentuk tulisan, yang kesemuanya itu memerlukan pembahasan tersendiri, maka pungutan uang administrasi tersebut dapat dimasukkan dalam makna hadits Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

"Semua peminjaman yang dapat menyebabkan adanya sesuatu manfaat, maka hukumnya riba."

- 3. Oleh karena akad pengumpulan modal dalam "Kosipa" tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan "syirkah", maka masalah zakatnya dikembalikan kepada masing-masing anggota "Kosipa" tersebut. Oleh karena "Kosipa" ini telah dilaksanakan di seluruh tanah air Indonesia, maka seluruh musyawirin telah bersepakat untuk memberikan jalan keluar yang dapat dibenarkan oleh syara' sebagai berikut:
 - a. "Kosipa" harus diganti bentuknya dengan bentuk "koperasi biasa" yang dibenarkan oleh syara'.
 - b. Uang yang telah menjadi milik koperasi dapat dipinjamkan kepada para anggota tanpa dikenakan uang administrasi dari prosentase jumlah uang yang dipinjam.

Keterangan, dari kitab:

1. Manhaj al-Thullab22

Kitab Tentang Syirkah ... Dan dalam syirkah disyaratkan lafal yang menunjukkan izin berdagang ... dan dalam barang yang disyirkahkan disyaratkan berupa barang mitsl (barang yang diukur takaran atau timbangan dan oleh diakadi salam) yang sudah dicampur (dengan barang dari pihak lain) sebelum dilakukan akad sehingga tidak bisa dibedakan lagi.[]

²² Zakaria al-Anshari, Manhaj al-Thullab pada Fath al-Wahhab, (Bandung: Syirkah Ma'arif, t. th.), Juz I, h. 217.

•

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-28

Di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Pada Tanggal 26 - 29 Rabiul Akhir 1410 H. / 25 - 28 Nopember 1989 M.

372. Tayamum di Pesawat dengan Menggunakan Kursi Sebagai Alatnya 373. Usaha untuk Menangguhkan Haid Supaya Bisa Menyelesaikan Ibadahnya

374. Arisan Haji yang Jumlah Setorannya Berubah-ubah 375. Haji dengan Cara Mengambil Kredit Tabungan Haji Pegawai Negeri 376. Nikah Atara Dua Orang Berlainan Agama di Indonesia 377. Akad Nikah dengan Mahar Muqaddam Sebelum Akad 378. Kedudukan Thalaq di Pengadilan Agama 379. Sebelum Berakhir Masa Iddahnya, Ternyata Rahim Tidak Berisi Janin

380. Memberi Nama Anak dengan Lafal Abdun yang *Mudhaf* selain Nama Allah

> 381. Vasektomi dan Tubektomi 382. Menggunakan Spiral/IUD

383. Wasiat Mengenai Organ Tubuh Mayit

384. Tindakan Medis Terhadap Pasien yang Sulit Diharapkan Hidupnya

385. Menjual Barang dengan Dua Macam Harga

386. Air Bersih Hasil Proses Pengolahan 387. Mu'amalah dalam Bursa Efek

388. Bursa Valuta dan Kaitannya dengan Zakat

389. Kedudukan Hak Cipta dalam Hukum Waris

390. Nama Akad Program Tebu Rakyat Intensifikasi

391. Hasil dari Kerja Pada Pabrik Bir dan Tempat Hiburan Maksiat

392. Menghimpun Dana Kesejahteraan Siswa

393. Mengembangkan Macam-macam Mal Zakawi

394. Mendayagunakan Harta Zakat dalam Bentuk Usaha Ekonomi

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA Nomor: 03/MNU-28/1989

Tentang

ITTIFAQ HUKUM MENGENAI BEBERAPA MASALAH DINIYAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

MUKTAMAR NAHDI ATUL ULAMA XXVIII

Yang berlangsung pada tanggal 26 - 23 Rabiul Akhir 1410 H/25 - 28 Nopember 1989 di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta

- Memperhatikan: a. Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
 - b. Penjelasan tentang Pedoman Bahtsul Masail Diniyyah yang disampaikan oleh Katib PBNU;
 - c. Bahan Muktamar Nahdlatul Ulama XXVIII, khususnya bagian Bahtsul Masail Diniyyah;
- Mendengar
- : a. Laporan Komisi 1 (Masail Diniyyah) Muktamar Nahdlatul Ulama XXVIII tentang pembahasan: illat, adillah syari'iyyah dan ittifaq atas beberapa masalah diniyyah, yang dilakukan dalam permusyawaratan tanggal 27 - 28 Rabiul Akhir 1410 H/26 - 27 Nopember 1989
 - b. *Ittifaq* peserta Muktamar Nahdlatul Ulama XXVIII dalam sidang pleno tanggal 28 Nopember 1989 atas laporan Komisi 1 (Masail Diniyyah), maka dengan berdoa:

MENSAHKAN:

ITTIFAQ DENGAN ADILLAH SYAR'IYYAH ATAS HUKUM DARI BEBERAPA MASALAH DINIYYAH DENGAN RUMUSAN SEBAGAIMANA TERLAMPIR.

Ditetapkan di Krapyak, Yogyakarta

Krapyak: 29 Rabiul Akhir 1418 H 28 Nopember 1989 M

MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA XXVIII PIMPINAN SIDANG PLENO

ttd

ttd

KH M.A. SAHAL MAHFUDH

H. AHMAD BAGDJA

Ketua

Sekretaris

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-28

Di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta Pada Tanggal 26-29 Rabiul Akhir 1410 H./ 25-28 Nopember 1989 M.

TIM PERUMUS KOMISI I MASAIL DINIYAH Sub Komisi I/A

Dr. H. Agil Munawwar MA. (Ketua)

Dr. H. Abdul Muhith Fattah MA. (Wakil Ketua)

KH. Munzir Tamam MA. (Anggota)

KH. A. Aziz Masyhuri (Anggota)

KH. Drs. Shidqi Mudhar (Anggota)

KH. Maimun Zubair (Anggota)

KH. Fauzi (Anggota)

KH. Abdullah Mukhtar (Anggota)

KH. Sirazi (Anggota)

KH. Zainal Abidin (Anggota)

KH. Asyhari Marzuki (Anggota)

Sub Komisi I/B

KH. Masyhuri Syahid MA. (Ketua)

KH. M. Cholil Bisri (Wakil Ketua)

Drs. K. A. Masduqi (Sekretaris)

KH. Zainal Abidin (Anggota)

KH. Drs. Nadjib Hasan (Anggota)

KH. M. Subadar (Anggota)

KH. Yazid Romli (Anggota)

Ustadz A. Yasin (Anggota)

KH. Amin Mubarok (Anggota)

KH. Drs. Adzro'i (Anggota)

372. Tayamum di Pesawat dengan Menggunakan Kursi Sebagai Alatnya

- S. Di pesawat, jamaah haji tanpa wudhu tetapi tayamum dengan menggunakan kursi sebagai alatnya. Kemudian mengerjakan shalat dengan duduk dan tidak menghadap kiblat? Bagaimana hukumnya? Apakah shalat demikian ini termasuk li hurmatil waqti?
- J. Tayamumnya tidak sah, sedangkan kedudukan shalatnya hanya semata-mata karena mulianya waktu (li hurmatil waqti).

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Majmu' Syarh Muhadzdzab1

أَمَّا حُصُمُ الْمَسْأَلَةِ فَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ لاَ يَصِحُ التَّيَمُّمُ إِلاَّ بِتُرَابٍ هَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي الْمَدْهَبِ وَبِهِ قَطَعَ الْأَصْحَابُ وَتَطَاهَرَتْ عَلَيْهِ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ، وَحَكَى الرَّافِعِيُّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ الْحُنَاطِيِّ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالنُّوْنِ أَنَّهُ حَكَى فِي جَوَازِ التَّيَمُّمِ بِالدَّرِيْرَةِ وَالنُّوْرَةِ عَبْدِ اللهِ الْحُنَاطِيِّ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالنُّوْنِ أَنَّهُ حَكَى فِي جَوَازِ التَّيَمُ بِالدَّافِعِيِّ وَهَذَا نَقُلُ وَالنَّورْنِيخِ وَالأَحْجَارِ الْمَدْقُوقَةِ وَالْقَوَارِيْرِ الْمَسْحُوقَةِ وَأَشْبَاهِهَا قَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ وَهَذَا نَقُلُ وَالنَّورْنِيخِ وَالْأَحْجَارِ الْمَدْقُوقَةِ وَالْقَوَارِيْرِ الْمَسْحُوقَةِ وَأَشْبَاهِهَا قَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ وَهَذَا نَقُلُ عَرِيْبُ صَعِيْفُ شَاذُ مَرْدُودُ وَإِنَّمَا أَذْكُرُهُ لِلتَّنْبِيْدِ عَلَيْهِ لِعَلَا يَغْتَرَّ بِهِ وَالصَّحِيْحُ فِي عَرِيْبُ صَعِيْفُ شَاذُ مَرْدُودُ وَإِنَّهَا أَذْكُرُهُ لِلتَّنْبِيْدِ عَلَيْهِ لِعَلَا يَغْتَرَ بِهِ وَالصَّحِيْحُ فِي الْمَنْفِي وَمَالِكُ يَعْرُدُ اللَّيْمِ وَالْقَاضِيِّ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ إِلاَ بِثَوْلِ الْفُقَهَاءِ وَقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ وَمَالِكُ يَجُوزُ بِكُلِ مَا الْمَنْ الْمُنْ وَالْقَاضِي اللَّيْ مِعْنُ أَلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِي وَمَالِكُ يَجُوزُ بِكُلِ مَا وَقِي الْمِلْعِ مُلَاثَةُ أَوْوالٍ لِأَصْحَابِ مَالِكٍ جُوزُ بِكُلِ مَالِكُ أَحْدُهَا يَجُوزُ وَالْمَالِي أَحْدُهُ الْمُنْ أَلُولُ الْمُؤْنِ الْمُعْمَا وَفِي الْمِلْحِ ثَلَاثَةُ أَوْوالٍ لِأَصْحَابِ مَالِكِ أَحَدُهَا يَجُوزُ

Sedangkan hukum permasalahannya, maka menurut madzhab kami, tidak sah bertayamum kecuali dengan debu. Pendapat ini adalah yang populer di mazhab kami dan telah ditetapkan oleh para *Ashhab*, serta yang tampak jelas pada *nash-nash* Imam Syafi'i.

Al-Rafi'i menghikayatkan dari Ibn Abdillah al-Hanathi, dengan huruf tanpa titik dan ¿; bahwa beliau menghikayatkan kebolehan tayammum dengan dzarirah (bedak pewangi), kapur, batu zirnikh (warangan), batu yang ditumbuk halus, botol kaca yang ditumbuk halus dan semisalnya, dalam benda-benda itu terdapat dua pendapat Imam Syafi'i. Pengutipan riwayat ini adalah pengutipan yang asing, lemah, syadz (tidak sesuai

¹ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Juz II, h. 245.

kaidah), dan tertolak. Saya menyebutkannya untuk mengingatkan agar tidak tertipu dengannya. Dan pendapat yang shahih dalam madzhab Syafi'i adalah tidak boleh tayammum kecuali dengan debu. Demikian pula pendapat Imam Ahmad, Ibn Mundzir dan Dawud al-Zhahiri. Al-Azhar dan al-Qadhi Abu Thayyib berkata: "Itu adalah pendapat mayoritas Fuqaha."

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat: "Boleh tayammum dengan setiap bagian-bagian tanah, hingga dengan batu yang dibasuh." Sebagian murid Imam Malik berkata: "Boleh tayammum dengan setiap benda yang bersambung dengan tanah, seperti kayu, salju dan selainnya." Terkait tayammum dengan garam ada tiga pendapat menurut muridmurid Imam Malik. Pendapat pertama menyatakan boleh.

2. Al-Majmu' Syarh Muhadzdzab2

وَأَمَّا حُكُمُ الْمَسْأَلَةِ: فَإِذَا لَمْ يَجِدُ الْمُكَلَّفُ مَاءً وَلاَ ثُرَابًا بِأَنْ حُبِسَ فِيْ مَوْضِع نَجْسِ أَوْ كَانَ فِي أَرْضِ ذَاتِ وَحْلٍ وَلَمْ يَجِدُ مَاءً يُجَفِّفُهُ بِهِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَفِيْهِ أَرْبَعَهُ أَقُوالٍ حَكَاهَا أَصْحَابُنَا الْحُرَاسَانِيُّوْنَ. (أَحَدُهَا) يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْحَالِ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْمَعْرَضُ فِيْهِ بِالتَّيَتُم. وَهَذَا قَوْلُ هُو عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ إِذَا وَجَدَ مَاءً أَوْ ثُرَابًا فِي مَوْضِع يَسْقُطُ الْفَرْضُ فِيْهِ بِالتَّيَتُم. وَهَذَا قَوْلُ هُو عَلَيْهِ اللّهَيْمُ اللّهَ فِي مَوْضِع يَسْقُطُ الْفَرْضُ فِيْهِ بِالتَّيَتُم. وَهَذَا قَوْلُ هُو الصَّحِيْحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ كَثِيرُونَ مِنَ الْأَصْحَابِ أَوْ أَكْثَرُهُمْ وَصَحَّحَهُ الْبَاقُونَ وَهُو الصَّحِيْحُ اللّهِ فَي الْكُتُبِ الْجَدِيْدَةِ (وَالطَّافِيُّ) لاَ يَجِبُ الصَّلاةُ بَلْ تُسْتَحَبُ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ الْمَامُ الْحُرَمِيْنِ وَجَمَاعَةً مِنَ الْعِرَاقِيَّيْنَ مَن الْعِرَاقِيِّيْنَ وَلَا لَا إِنْ مَامُ الْحُرَمِيْنِ وَجَمَاعَةً مِنَ الْمُوالِيقِيْنَ عَنِ الْقَدِيْمِ (وَالطَّافِيُّ) فَي مُنْ مُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ فِي الْقَلْقَاءُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعِرَاقِيِّيْنَ وَالطَّالِ عَلَى حَسِبِ حَالِهِ وَلاَ تَجِبُ الْإِعَادَةُ حَكَاهُ عَنِ الْقَدِيْمِ (وَالرَّابِعُ) يَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ فِي الْحَالِ عَلَى حَسَبِ حَالِهِ وَلاَ يَجِبُ الْإِعَادَةُ حَكَاهُ عَنِ الْقَدِيْمِ الْمُعَاءِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى

Sedangkan hukum permasalahannya adalah jika seorang *mukallaf* tidak mendapatkan air dan debu, misalnya ia dipenjara di tempat yang najis, atau berada di tanah yang berlumpur dan ia tidak mendapatkan air untuk mengeringkannya, dan kasus lain yang serupa, maka dalam hal ini ada empat pendapat seperti yang diriwayatkan *Ashhab* kita yang berbangsa Khurasan:

 Ia wajib shalat seketika itu sesuai keadaannya dan wajib mengulanginya jika mendapatkan air atau debu di tempat lain yang kewajiban shalat

² Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Juz II, h. 303-304.

di tempat itu bisa gugur dengan tayammum. Pendapat ini adalah yang shahih dan yang ditetapkan banyak Ashhab, atau mayoritas mereka dan yang lain menilainya shahih. Pendapat itu tertera secara jelas dalam kitab-kitab baru (pada masa al-Nawawi; 631 – 676 H/1233 – 1277 M).

- 2. Tidak wajib shalat, namun sunnah dan wajib meng*qadha*, baik sudah shalat atau belum. Pendapat itu dihikayatkan dari *qaul qadim*. Syaikh Abu Hamid al-Ghazali dan ulama Irak lain pernah menghikayatkannya.
- 3. Haram shalat dan wajib meng*qadha*. Pendapat ini diriwayatkan Imam Haramain serta sekelompok ulama Hurasan dari *qaul qadim*.
- 4. Wajib shalat seketika sesuai keadaannya, dan tidak wajib mengulanginya. Pendapat itu juga dari *qaul qadim*. Dan dalil-dalil beberapa pendapat ini akan dijelaskan pada Sub *Madzahib al-Ulama*, *Insya'allah ta'aala*.
- 3. Fath al-Wahhab3

التَّوَجُهُ لِلْقِبْلَةِ بِالصَّدْرِ لاَ بِالْوَجْهِ شَرْطُ لِصَلاَةِ قَادِرٍ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: "فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ" أَيْ جِهَّتُهُ وَالتَّوَجُهُ لاَ يَجِبُ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ فَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ فَيْهَا. وَلِخْبَرِ الشَّيْخَيْنِ أَنَّهُ عَلَيْ رَكْعَ رَكْعَتَيْنِ قِبَلَ الْكَعْبَةِ أَيْ وَجْهِهَا وَقَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ مَعَ خَبْرِ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّ فَلاَ تَصِحُ الصَّلاَةُ بِدُونِهِ إِجْمَاعًا. أَمَّا الْعَاجِرُ عَنْهُ لِمَرِيْضِ خَبْرِ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّ فَلاَ تَصِحُ الصَّلاَةُ بِدُونِهِ إِجْمَاعًا. أَمَّا الْعَاجِرُ عَنْهُ لِمَرِيْضِ لَا يَجِدُ مَنْ يُوجِهُهُ إِلَيْهَا وَمَرْبُوطٍ عَلَى خَشَبَةٍ فَيُصَلِّى عَلَى حَالِهِ وَيُعِيْدُ وُجُوبًا

Menghadap ke kiblat dengan dada dan bukan dengan wajah, adalah syarat bagi shalat orang yang mampu melaksanakannya. Karena firman Allah SWT: "Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjid al-Haram." (QS. al-Baqarah: 149-150). Menghadap kiblat tidak wajib di luar shalat, maka tentu wajib di dalam shalat. Dan karena hadits riwayat Bukhari-Muslim: "Sesungguhnya Nabi Saw. melaksanakan shalat dua rakaat dengan menghadap Kiblat." serta hadits: "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Maka tidak sah shalat tanpa menghadap kiblat menurut ijma'. Adapun orang yang tidak mampu menghadap kiblat, seperti orang sakit yang tidak mendapatkan orang lain yang menghadapkannya ke kiblat, atau orang yang terikat pada kayu, maka ia wajib shalat sesuai keadaannya dan wajib mengulanginya kembali.

4. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib4

³ Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab pada Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Manhaj, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz I, h. 175-176.

⁴ Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Bandung: Syirkah Ma'arif, t. th.), Jilid I, h. 201.

(تِتِمَّةُ) عَلَى فَاقِدِ الطَّهُوْرَيْنِ وَهُمَا الْمَاءُ وَالتُّرَابُ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَيُعِيْدَهُ إِذَا وَجَدَ أَحَدُهُمَا

Bagi orang yang tidak mendapatkan dua alat bersuci yaitu air dan debu, maka ia wajib shalat fardhu demi menghormati waktu dan wajib mengulanginya kembali jika mendapatkan salah satu dari keduanya.

5. Referensi Lain

- a. Al-Tsimar Al-Yani'ah, h. 24.
- b. Kifayah al-Akhyar, Juz I, h. 54 55.
- c. Kanz al-Raghibin dan Hasyiyah Qulyubi, Juz I, h. 144.
- d. Al-Syarqawi 'ala al-Tahrir, Juz I, h. 174.
- e. Al-Idhah, hlm. 86.
- f. Rahmad al-Ummah, h. 20.
- g. Al-Madzahib al-Arba'ah, Juz I, h. 160.
- h. Al-Mizan al-Kubra, Juz I, h. 132.
- i. Maraq al-Falah Syarh Nur al-Idhah, h. 30 (al-Hanafi).
- j. Kifayah al-Mathalib al-Rabani, h. 105 (al-Maliki).

373. Usaha untuk Menangguhkan Haid Supaya Bisa Menyelesaikan Ibadahnya

- S. Bagaimana hukumnya usaha menangguhkan haid dengan maksud agar dapat menyelesaikan ibadah haji, dan bagaimana pula hukum hajinya?
- J. Usaha menangguhkan haid tersebut boleh, asal tidak membahayakan, dan hukum hajinya sah.

Keterangan, dari kitab:

1. Ghayah Talkhish al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad⁵

Dan kesimpulan dalam *Fatawa al-Qimath* adalah boleh menggunakan obat-obatan untuk mencegah haid.

2. Qurrah al-'Ain fi Fatawa al-Haramain6

⁵ Abdurrahman bin Muhammad Ba' alawi, Ghayah al-Talkhish fi Fatawa Ibn Ziyad pada Bughyah al-Mustarsyidin, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 247.

⁶ Muhamad Ali al-Maliki, Qurrah al-'Ain fi Fatawa al-Haramain, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 30.

Jika wanita memakai obat untuk mencegah haid atau memenguranginya, maka hukumnya makruh bila tidak menyebabkan keturunan terputusnya atau memenguranginya.

3. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah7

أَمَّا إِذَا خَرَجَ دَمُ الْحَيْضِ بِسَبَبِ دَوَاءٍ فِي غَيْرِ مَوْعِدِهِ فَإِنَّ الظَّاهِرَ عِنْدَهُمْ لاَ يُسَمَّى حَيْضًا. فَعَلَى الْمَزْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَتُصَلِّي وَلَكِنْ عَلَيْهَا أَنْ تَقْضِيَ الصِّيَامَ احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا وَلاَ تَنْقَضِيْ بِهِ عِدَّتُهَا وَهَذَا بِخِلاَفِ مَا إِذَا اسْتَعْمَلَتْ لاَحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا وَلاَ تَنْقَضِيْ بِهِ عِدَّتُهَا وَهَذَا بِخِلاَفِ مَا إِذَا اسْتَعْمَلَتْ دَوَاءً يَنْقَطِعُ بِهِ الْحِيْقُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ. فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ طُهْرًا وَتَنْقَضِيْ بِهِ الْعِيَّةُ عَلَى دَوَاءً يَنْقَطِعُ بِهِ الْحِيْقُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ. فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ طُهْرًا وَتَنْقَضِيْ بِهِ الْعِدَّةُ عَلَى وَالْعَبْرُ طُهْرًا وَتَنْقَضِيْ بِهِ الْعِدَّةُ عَلَى الْمُحَافِقُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَمْنَعَ حَيْضَهَا أَوْ تَسْتَعْجِلَ إِنْزَالَهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ صِحَّتَهَا لِأَنَّ الْمُحَافِظَةَ عَلَى الصَّحَةِ وَاجِبَةً

Adapun jika darah haid itu keluar di luar siklusnya disebabkan oleh obat-obatan, maka menurut pendapat kuat ulama Malikiyah adalah darah tersebut tidak dinamakan haid. Maka si wanita wajib puasa dan shalat dan wajib mengqadha puasanya karena kehati-hatian. Sebab ada kemungkinan darah itu adalah haid dan 'iddahnya tidak habis dengan sebab keluarnya darah tersebut. Hal ini berbeda dengan kasus wanita yang memakai obat yang menghentikan haidnya di luar waktu siklus biasanya, maka ia dianggap suci dan 'iddahnya habis sebab haidnya terhenti. Semuanya atas dasar seorang wanita tidak boleh mencegah atau memajukan haid bila hal itu membahayakan kesehatannya, sebab menjaga kesehatan itu hukumnya wajib.

- 4. Referensi Lain
 - a. I'anah al-Thalibin, Juz IV, h. 39.
 - b. Al-Syarqawi 'ala al-Tahrir, Juz II, h. 320.
 - c. Al-Idhah, hlm. 387.

374. Arisan Haji yang Jumlah Setorannya Berubah-ubah

S. Bagaimana kedudukan arisan haji yang jumlah uang setorannya berubahubah dan bagaimana hukum hajinya?

Abdurrahman al-Juzairi, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Juz IV, h. 16.

J. Pada dasarnya arisan dibenarkan, sedangkan arisan haji karena berubah-ubah ONHnya maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, tentang hajinya tetap sah.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah Qulyubi8

Perkumpulan populer (semacam arisan) di kalangan wanita, di mana salah seorang wanita mengambil sejumlah tertentu (uang) dari peserta setiap jumatnya dan memberikannya kepada salah seorang dari mereka secara sampai wanita yang terakhir, maka tradisi demikian itu boleh, seperti pendapat al-Wali al-Iraqi.

2. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj9

(قَوْلُهُ الَّذِي هُوَ تَمْلِيكُ الشَّيْءِ) أَيْ شَرْعًا (قَوْلُهُ: بِردِّ بَدَلِهِ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ وَلَعَلَّ الشَّارِحَ إِنَّمَا عَبَّرَ بِالْبَدَلِ لِيَتَمَشَّى عَلَى الرَّاجِحِ الْآتِي مِنْ أَنَّهُ يَرُدُّ الْمِثْلِ فِي الْمُتَقَوِّمِ وَعَلَى الْمُرْجُوحِ مِنْ أَنَّهُ يَرُدُ الْمِثْلَ فِي الْمِثْلِ وَالْقِيمَةَ فِي الْمُتَقَوِّمِ الْمُثَوِّمِ

(Ungkapan al-Ramli: "-Akad Iqradh- yaitu memeberi hak milik sesuatu."), maksudnya dalam arti syara'. (Ungkapan beliau: "Dengan mengembalikan gantinya.") Redaksi kitab Manhaj al-Thullab adalah: "Dengan syarat pengembalian barang yang semisalnya." Dan mungkin al-Syarih -al-Ramlimengungkapkannya dengan kata "ganti" supaya nanti beliau berpijak pada qaul rajih yang akan datang, yaitu dalam pinjaman barang mitsli (barang yang nilainya diukur dengan takaran atau timbangan), si peminjam harus mengembalikan barang yang sama persis dan dalam pinjaman barang yang mutaqawwam (barang yang nilainya diukur dengan harga) ia harus mengembalikan barang bentunya sama. Sementara menurut qaul marjuh dia harus mengembalikan barang yang sama persis dalam pinjaman barang mitsli dan harus mengembalikan sejumlah harganya dalam pinjaman barang mutaqawwam.

4. Referensi Lain

a. Hasyiyah al-Syarqawi, Juz I, h. 460.

⁸ Qulyubi, Hasyiyah Qulyubi pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1956), Juz II, h. 258.

Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1938), Juz IV, h. 215.

375. Haji dengan Cara Mengambil Kredit Tabungan Haji Pegawai Negeri

- S. Bagaimana kedudukan hukum haji dengan cara mengambil Kredit Tabungan Haji Pegawai Negeri dengan borg (jaminan) dan angsuran dari gajinya?
- J. Hukum hajinya sah.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah al-Syarqawi¹⁰

Orang yang tidak mampu, maka tidak wajib haji, akan tetapi jika ia melaksanakannya, maka hajinya sah.

2. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj 11

Maka hukumnya mencukupi (*ijza'*) haji orang fakir dan setiap orang yang tidak mampu selama dalam dirinya terkumpul sifat merdeka dan *mukallaf*, seperti bila orang sakit memaksakan diri shalat Jum'at.

376. Nikah Antara Dua Orang Berlainan Agama di Indonesia

- S. Bagaimana hukumnya nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia ini?
- J. Hukum nikah demikian tidak sah, sebagaimana telah diputuskan dalam Muktamar NU tahun 1962 dan Muktamar Thariqah Mu'tabarah tahun 1968.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah al-Syarqawi¹²

Ibrahim al-Syarqawi, Hasyiyah al-Syarqawi 'ala al-Tuhfah, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), Juz I, h. 460.

Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1938), Juz III, h. 233.

¹² Ibrahim al-Syarqawi, Hasyiyah al-Syarqawi 'ala al-Tuhfah, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), Juz II, h. 237.

كَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَتَغْلِيْبًا لِلتَّحْرِيْمِ فِي الآخِيْرَةِ. وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ لَكِنْ ذُكِرَ فِي الْكِفَايَةِ فِي حِلِّ الْوَثَنِيَّةِ لِلْكِتَابِيِّ وَجْهَيْنِ وَهَلْ تَخْرُمُ الْوَتَنِيَّةُ عَلَى الْوَقَنِيِّ قَالَ السُّبُكِيِّ يَنْبَغِي التَّحْرِيْمُ إِنْ قُلْنَا أَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ بِالْفُرُوعِ وَإِلاًّ فَلاَ حِلَّ وَلاَ حُرْمَةَ (فَإِنْ كَانَتْ) كِتَابِيَّةُ (خَالِصَةُ وَهِيَ إِسْرَاثِيْلِيَّةُ) حَلَّتْ لَنَا قَالَ تَعَالَى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَيْ حَلٌّ وَالْمُرَادُ مِنَ الْكِتَابِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيْلُ دُوْنَ سَاثِرِ الْكُتُبِ قَبْلَهَا كَصُحُفِ شِيْتَ وَإِذْرِيْسَ وَإِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمُ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَمُ لِأَنَّهَا لَمْ تُنْزَلُ بِنَظْمٍ يُدْرَسُ وَيُتْلَى وَإِنَّمَا أُوْحِيَ إِلَيْهِمْ مَعَانِيْهَا وَقِيْلَ لِأَنَّهَا حِكَمُّ وَمَوَاعِظُ لاَ أَحْكَامُ وَشَرَافِعُ هَذَا (إِنْ لَمْ تَدْخُلْ أُصُولُهَا فِيْ ذَلِكَ الدِّيْنِ بَعْدَ نُسْخَةٍ) سَوَاءُ أَعُلِمَتِ الْقَبْلِيَّةُ أَوْشُكَ فِيْهَا لِتَمَسُّكِهِمْ بِذَلِكَ الدِّيْنِ حِينَ كَانَ حَقًّا وَإِلاَّ فَلاَ تَحِلُّ لِسُقُوطِ فَضِيْلَةِ ذَلِكَ الدِّيْنِ (أَوْ) وَهِيَ (غَيْرُ إِسْرَاثِيْلِيَّةٍ حَلَّتْ) لِمَا مَرَّ (إِنْ عُلِمَ دُخُولُهُمْ فِيْ ذَلِكَ الدِّيْنِ قَبْلَ نُسْخِهِ وَلِوْ بَعْدَ تَبْدِيْلِهِ إِنْ تَجَنَّبُوا الْمُبْدَلَ) وَإِلاَّ فَلاَ تَحِلُّ لِمَا مَرَّ أَخْذًا بِالأَغْلَظِ فِيْمَا إِذَا شُكَّ فِي الْمَذْكُورِ وَتَعْبِيْرُهُ بِمَا ذُكِرَ هُوَ مُرَادُ الْأَصْلِ بِمَا عَبَّرَ بِهِ (فَتَحِلُّ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُولِ فِي الْإِسْرَائِيليَّةِ وَغَيْرِهَا (وَ) كَذَا (السَّامِرَةُ) وَالصَّائِبَةُ إِنْ وَافَقَتَا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فِي أَصْل دِيْنِهِمْ وَإِنْ لَمْ تُوَافِقَاهُمْ فِي فُرُوعِهِ فَإِنْ خَالَفَتَاهُمْ فِيْ أَصْلِ دِيْنِهِمْ حُرِمَتَا وَهَذَا التَّفْصِيْلُ هُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِيْ مُخْتَصَرِ الْمُزَنِّيِّ وَعَلَيْهِ مُمِلَ إِطْلَاقُهُ فِي مَوْضِعٍ بِالْحِلِّ وَفِي آخَرَ بِعَدَمِهِ (وَالْمُنْتَقِلُ مِنْ دِيْنِ لِلآخَرِ) كَيَهُوْدِيِّ أَوْ وَثَنِيٌّ تَنَصَّرَ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ تَهَوَّدَ إِلَى تَنَصَّرَ وَعَكْسُهُ (لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ إِلاًّ ٱلإِسْلاَمُ) لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِبُطْلاَنِ مَا انْتَقَلَ عَنْهُ وَكَانَ مُقِرًّا بِبُطْلاَنِ مَا انْتَقَلَ إِلَيْهِ (وَلاَ تَحِلُ مُسْلِمَةً لِكَافِرٍ) حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً بِالْإِتَّفَاقِ (وَلاً) تَحِلُّ (مُرْتَدَّةً لِأَحَدٍ) لاَ لِمُسْلِم لِأَنَّهَا كَافِرَةُ لَا تُقَرُّ وَلَا لِكَافِرِ لِبَقَاءِ عُلْقَةِ الْإِسْلَامِ فِيْهَا

(Pernikahan-pernikahan yang batal adalah) ... dan pernikahan seorang muslim dengan wanita non muslim selain kitabiyah murni, seperti wanita penyembah berhala, Majusi atau salah satu dari kedua orang tuanya beragama seperti itu karena firman Allah SWT: "Dan janganlah kamu nikahi wanitawanita musyrik sebelum mereka beriman ..." (QS. al-Baqarah: 221) dan karena memenangkan hukum haram dalam kasus yang terakhir (salah satu

dari kedua orang tuanya beragama seperti itu). Dan terkecualikan dengan kata "muslim" orang kafir. Namum dalam kitab al-Kifayah disebutkan tentang keabsahan pernikahan perempuan penyembah berhala untuk laki-laki kitabi itu terdapat dua pendapat. Apakah perempuan penyembah berhala halal dinikah bagi lelaki penyembah berhala? Al-Subki berkata: "Semestinya haram bila kita berpendapat mereka dikhitabi dengan furu' syari'ah. Bila tidak, maka tidak halal dan tidak haram."

Apabila wanita tersebut kitabiyah murni, yaitu wanita Israiliyah, maka wanita itu halal bagi kita muslimin, Allah Ta'aala berfirman: "(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang memiliki kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu ..." (QS. al-Maidah: 4), maksudnya mereka halal. Yang dimaksud dengan al-Kitab adalah Taurat dan Injil, bukan seluruh kitab sebelum keduanya, seperti shuhuf (lembar-lembaran) Nabi Syits, Nabi Idris, Nabi Ibrahim —'alaihimussalam-. Sebab, kitab-kitab itu tidak diturunkan dengan urutan yang dapat dipelajari dan dibaca, yang diturunkan kepada para nabi tersebut hanyalah maknanya saja. Menurut pendapat lain, karena kitab-kitab itu hanya berisi hikmah-hikmah dan nasehat-nasehat, bukan hukum dan syari'ah.

Hukum tersebut berlaku selama nenek moyangnya tidak memeluk agama Israiliyah itu setelah dinaskh (diganti dengan syari'ah lain). Baik sebelum dinaskhnya itu diketahui secara yakin atau diragukan, karena mereka berpegangan dengan agama tersebut semasa agama itu masih benar. Bila tidak, maka perempuan itu tidak halal karena gugurnya keutamaan agama tersebut.

Atau perempuan itu bukan *Israiliyah* maka halal karena ayat yang telah lewat (QS. al-Maidah: 4), bila diketahui nenek moyangnya masuk agama tersebut sebelum penyalinannya, meskipun setelah didistorsi bila mereka terhindar dari agama yang terlah didistorsi. Bila tidak, maka tidak halal karena gugurnya kemuliaan keutamaan agama tersebut dan karena mengambil hukum yang terberat dalam kasus ketika mereka diragukan memeluk agama tersebut sebelum disalin dengan *syari'ah* lain atau sebelum didistorsi. Ungkapanku (Syaikh Zakaria al-Anshari) itu merupakan maksud ungkapan kitab asal (*Tanqih al-Lubab* karya Abu Zar'ah al-'Iraqi, 762-826 H/1361-1423 M).

Maka wanita Yahudi dan Nasrani halal dengan syarat yang telah disebut dalam wanita *Israiliyah* dan selainnya. Demikian pula wanita pengikut Musa al-Samiri dan wanita Nasrani sekte *Sabi'ah*, bila *ushul aldin*nya sesuai dengan Yahudi dan Nasrani, meskipun *furu'*nya berbeda. Bila *ushul al-din*nya berbeda dengan Yahudi dan Nasrani, maka keduanya haram. Perincian hukum inilah yang dijelaskan Imam Syafi'i dalam

kitab Mukhtashar al-Muzani. Pada perincian itulah keterangan mutlak beliau, yaitu di satu tempat halal dan di tempat lain tidak halal, diarahkan.

Sementara orang yang pindah dari suatu agama ke agama lain, seperti Yahudi atau penyembah berhala memeluk agama Nasrani, redaksi itu lebih umum dari pada redaksi kitab asal: "Orang Yahudi pindah ke Nasrani dan sebaliknya. ", maka hanya keislamannya yang diterima. Sebab ia mengakui kebatilan agama yang ditinggalkan dan pernah mengakui kebatilan agama barunya.

Dan seorang wanita muslimah tidak halal bagi laki-laki non muslim, baik wanita tersebut merdeka atau budak dengan kesepakatan ulama. Sedangkan wanita murtad tidak halal bagi siapapun. Tidak halal bagi laki-laki muslim karena dia wanita non muslim yang tidak dibiarkan (seperti non muslim asli) dan tidak halal bagi laki-laki non muslim sebab masih adanya hubungan Islam padanya.

2. Al-Muhadzdzab13

وَمَنْ دَخَلَ فِيْ دِيْنِ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارِى بَعْدَ التَّبْدِيْلِ لاَ يَجُوْزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ حَرَائِرَهُمْ وَلاَ أَنْ يَطَأَ إِمَاءَهُمْ بِمِلْكِ الْيَمِيْنِ لِأَنَّهُمْ دَخَلُوا فِيْ دِيْنِ بَاطِلٍ فَهُمْ كَمَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَمَنْ دَخَلَ فِيهِمْ وَلاَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ دَخَلُوا قَبْلَ التَّبْدِيْلِ وَبَعْدَهُ كَنَصَارَى الْعَرَبِ وَهُمْ تَنُوْخُ وَمَنْ دَخَلَ فِيهِمْ وَلاَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ دَخَلُوا قَبْلَ التَّبْدِيْلِ وَبَعْدَهُ كَنَصَارَى الْعَرَبِ وَهُمْ تَنُوخُ وَبَنُو تَغْلَبُ وَبَهْرَاءَ لَمْ يَحِلَّ نِكَالًا اللَّهُمُ وَلاَ وَطْءُ إِمَاءِهِمْ بِمِلْكِ الْيَمِيْنِ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي الْهُرُوجِ الْحُطَرُ لاَ تُسْتَبَاحُ مَعَ الشَّكَ

Pemeluk agama Yahudi dan Nashrani setelah terjadinya perubahan, maka lelaki muslim tidak boleh menikahi wanita merdeka mereka dan tidak boleh menyetubuhi budak wanita mereka dengan memilikinya, sebab mereka telah memeluk agama batil, seperti muslim yang murtad. Pemeluk agama Yahudi dan Nashrani yang tidak mengetahui bahwa mereka memeluknya sebelum terjadinya perubahan atau sesudahnya, seperti Nasrani bangsa Arab, seperti Tanukh, Bani Taghlib dan Bahra', maka tidak sah menikahi wanita merdeka mereka dan tidak pula boleh menyetubuhi para budak mereka dengan memilikinya. Karena hukum asal dalam masalah farji adalah haram, yang tidak bisa dihalalkan ketika terdapat keraguan.

3. Referensi Lain

- a. Al-Umm, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, juz V, hlm. 7.
- b. Ahkamul Fuqaha, soal nomor 297 pada Keputusan Konferensi

¹³ Abu Ishaq al-Syairazi, al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz II, h. 44.

Besar Syuriah NU, Tahun 1960.

- c. Al-Faidhat al-Rabbaniyah, Ketetapan Jam'iyyah Thariqah Al-Mu'tabarah NU, h. 81 82.
- d. Keputusan NU Jawa Timur, h. 67.
- e. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Juz II, h. 44.
- f. Tanwir al-Qulub, h. 342.

377. Akad Nikah dengan Mahar Muqaddam Sebelum Akad

S. Sahkah akad nikah dengan mahar muqaddam (terlebih dahulu) sebelum akad?

J. Sah, baik akad nikahnya maupun maharnya.

Keterangan, dari kitab:

1. Bughyah al-Musytarsyidin¹⁴ (مَسْأَلَةُ ش) دَفَعَ لِمَخْطُوْبَتِهِ مَالاً ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ بِقَصْدِ الْمَهْرِ وَأَنْكَرَتْ صُدِّقَتْ هِي إِنْ كَانَ الدَّفْعُ قَبْلَ الْعَقْدُ وَإِلاَّ صُدِّقَ هُوَ. اه قُلْتُ وَافَقَهُ فِي التُّحْفَةِ وَقَالَ فِي الْفَتَاوَى وَأَبُو مَحْرَمَةَ يُصَدَّقُ الرَّوْجُ مُطْلَقًا وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِمْ صُدِّقَتْ أَكَيْهُ لَوْ أَقَامَ الرَّوْجُ بَيِّنَهُ بِقَصْدِهِ الْمَذْكُورِ صُدِّقَتْ إِنَّهُ لَوْ أَقَمَ الرَّوْجُ بَيِّنَهُ بِقَصْدِهِ الْمَذْكُورِ قُبِلَتْ

(Kasus dari Muhammad bin Abu Bakr al-Asykhar al-Yamani), seorang pria menyerahkan harta kepada wanita pinangannya. Lalu ia mengklaim pemberian itu dengan tujuan sebagai mahar, dan wanita itu mengingkarinya, maka wanita tersebut dibenarkan bila penyerahan itu terjadi sebelum akad nikah. Bila tidak, maka si pria yang dibenarkan.

Saya (Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi) berkata: "Dalam kitab al-Tuhfah Ibn Hajar berpendapat sama dengan Syaikh Muhammad bin Abu Bakr." Dan dalam al-Fatawa beliau berkata: "Dan Abu Makhramah membenarkan si pria secara mutlak." Dari perkataan mereka: "Wanita tersebut dibenarkan." diambil kesimpulan, bila si pria bisa mengajukan bukti atas klaimnya tadi, maka bukti itu diterima.

2. Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain15

لَوْ خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ أَرْسَلَ أَوْ دَفَعَ بِلاَ لَفْظٍ إِلَيْهَا مَالاً قَبْلَ الْعَقْدِ أَيْ وَلَمْ يَقْصِدْ

¹⁴ Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, *Bughyah al-Musytarsyidin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 214.

¹⁵ Zainuddinal-Malibari, Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain pada l'anah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), Juz III, h. 355.

التَّبَرُّعَ ثُمَّ وَقَعَ الْإِعْرَاضُ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ رَجَعَ بِمَا وَصَلَهَا مِنْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعُ مُحَقِّقُوْنَ وَلَوْ أَعْطَاهَا مَالاً فَقَالَتْ هَدِيَّةً وَقَالَ صِدَاقًا صُدِّقَ بِيَمِيْنِهِ

Bila seseorang melamar wanita, kemudian ia mengirim atau memberi sejumlah harta kepadanya sebelum akad nikah tanpa disertai pernyataan apapun, dan ia tidak bermaksud member secara cuma-cuma, kemudian terdapat ketidakmauan menikah dari pihak wanita ataupun pihak lelaki itu, maka si lelaki boleh mengambil lagi pemberiannya, seperti penjelasan sekelompok ulama *muhaqqiqun*. Seandainya lelaki tersebut memberikan harta, lalu si wanita mengklaimnya sebagai hadiah, sementara si lelaki menyatakannya sebagai mahar, maka si lelaki yang dibenarkan dengan sumpahnya.

3. Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra¹⁶

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ خَطَبَ امْرَأَةً فَأَجَابُوهُ فَأَعْطَاهُمْ شَيْتًا مِنَ الْمَالِ يُسَمَّى الْجِهَازَ هَلْ تَمْلِكُهُ الْمَخْطُوْبَهُ أَوْ لاَ بَيِّنُوا لَنَا ذَلِكَ (فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْعِبْرَةَ نِيَّةُ الْحَاطِبِ الدَّافِعِ فَإِنْ دَفَعَ بِنِيَّةِ الْهَدِيَّةِ مَلَكَتْهُ الْمَخْطُوبَةُ أَوْ بِنِيَّةِ حُسْبَانِهِ مِنَ الْمَهْرِ حُسِبَ مِنْهُ. وَإِنْ كَانَ دَفَعَ بِنِيَّةِ الْهَدِيَّةِ مَلَكَتْهُ الْمُخْطُوبَةُ أَوْ بِنِيَّةِ حُسْبَانِهِ مِنَ الْمَهْرِ حُسِبَ مِنْهُ. وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ بِنِيَّةِ الرَّجُوعِ بِهِ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ يَحْصُلْ زَوَاجٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةً لَمْ مَنْ عَيْرِ جِنْسِهِ أَوْ بِنِيَّةِ الرَّجُوعِ بِهِ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ يَحْصُلْ زَوَاجٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةً لَمْ تَمْلِكُهُ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا

Syaikh Ibn Hajar al-Haitami pernah ditanya, tentang seorang pria yang melamar wanita, lalu keluarga wanita menerimanya, lalu pria itu memberi mereka harta yang disebut jihaz (pengikat). "Apakah wanita yang dipinang itu berhak memilikinya? Mohon jelaskan kepada kami masalah tersebut."

Lalu beliau menjawab: "Sungguh yang menjadi pedoman adalah niat si pria. Bila ia memberi dengan niat sebagai hadiah, maka wanita pinangannya berhak memilikinya, atau dengan niat sebagai bagian dari mahar, maka dihitung sebagai mahar. Bila bukan dari jenis mahar atau dengan niat memintanya lagi bila tidak berhasil menikah, atau tanpa niat apapun, maka si wanita pinangannya itu tidak bisa memilikinya dan si pria bisa memintanya kembali.

4. Referensi Lain

a. Tuhfah al-Muhtaj, Juz VII, h. 378.

¹⁶ Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra, (Mesir: al-Maktabah al-Islamiyah, t. th.), Juz IV, h. 111.

- b. Kanz al-Raghibin/Syarh al-Mahalli, Juz III, h. 254.
- c. Asna al-Mathalib, Juz III, h. 301.
- d. Al-Bujairimi 'ala al-Iqna', Juz III, h. 392.
- e. Al-Syargawi, Juz I, h. 264.

378. Kedudukan Thalaq di Pengadilan Agama

- S. Bagaimana kedudukan thalaq di Pengadilan Agama dan kaitannya dengan thalaq di luar Pengadilan Agama, baik mengenai hitungan thalaq dan penetapan iddahnya?
- J. 1. Apabila suami belum menjatuhkan thalaq di luar Pengadilan Agama, maka thalaq yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu dihitung thalaq yang pertama dan sejak itu pula dihitung 'iddahnya.
 - 2. Jika suami telah menjatuhkan thalaq di luar Pengadilan Agama, maka thalaq yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan thalaq yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu iddah raj'iyyah. Sedangkan perhitungan 'iddahnya dimulai dari jatuhnya thalaq yang pertama dan selesai setelah berakhirnya 'iddah yang terakhir yang dihitung sejak jatuhnya thalaq yang terakhir tersebut.
 - Jika thalaq yang di depan Hakim Agama dijatuhkan setelah habis masa 'iddah atau di dalam masa 'iddah bain, maka thalaqnya tidak diperhitungkan.
 - Jika thalaq di depan Hakim Agama itu dilakukan karena terpaksa (mukrah) atau sekedar menceritakan thalaq yang telah diucapkan, maka tidak diperhitungkan juga.

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain¹⁷

Sungguh talak seorang suami yang tidak terpaksa, mukallaf, maksudnya baligh dan berakal, hanya terjadi pada wanita yang selain tertalak bain, meski wanita yang tertalak raj'i yang belum habis 'iddahnya. Maka talak tidak terjadi pada wanita yang terkhulu' dan tertalak raj'i yang telah habis 'iddahnya.

¹⁷ Zainuddinal-Malibari, Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain pada I'anah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz IV, h. 4.

2. Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain18

'Iddah itu wajib karena berpisah dengan suami yang masih hidup ... yang telah menggaulinya, ... walupun telah yakin dengan kebersihan rahim (dari sisa sperma).

3. Tuhfah al-Muhtaj¹⁹

Seandainya suami berkata: "Kamu saya thalaq, kamu saya thalaq, kamu saya thalaq." atau "Kamu saya thalaq thalaq thalaq.", dan di antara kalimat thalaq yang berulang-ulang tersebut terdapat pemisah dengan diam yakni lebih dari sekedar bernafas dan gagap berbicara, atau pemisah dengan pembicaraan si suami atau pembicaraan si istri, ... maka terjadi thalaq tiga, meski si suami bermaksud menjadikan pengulangan itu sebagai pengukuhan. Sebab, kemungkinan hal itu jauh disertai adanya pemisah.

4. Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain 20

Seandainya terhimpun dua 'iddah seorang suami pada istrinya, seperti ia menyetubuhi istrinya yang ditalak raj'i secara mutlak, atau yang ditalak bain dengan persetubuhan syubhat, maka cukuplah 'iddah yang terakhir dari kedua iddah itu. Si wanita itu lalu ber'iddah sejak usai persetubuhan dan sisa 'iddah pertama masuk pada 'iddah kedua.

5. Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain²¹

¹⁸ Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, *Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 328.

¹⁹ Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada Hasyiyata al-Syirwani wa al-'Abbadi, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), Jilid VIII, h. 52-53.

Zainuddinal-Malibari, Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain pada Tarsyih al-Mustafidin, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h.347.

²¹ Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, *Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 321.

(لا) يَقَعُ طَلاَقُ (مُكْرَهِ بِمَحْدُوْرٍ) بِمَا يُنَاسِبُ حَالَهُ وَيَخْتَلِفُ الْمَحْدُوْرُ بِاخْتِلاَفِ طَبَقَاتِ النَّاسِ وَأَخْوَالِهِمْ حَتَّى أَنَّ الضَّرْبَ الْيَسِيْرَ بِحَضْرَةِ الْمَلَا إِكْرَاهُ فِيْ حَقِّ ذَوِي الْمُرُوءَاتِ لاَ فِيْ حَقِّ غَيْرِهِمْ وَأَنَّ الشَّتْمَ فِيْ حَقِّ أَهْلِ الْمُرُوءَاتِ حَقِّ عَيْرِهِمْ وَأَنَّ الشَّتْمَ فِيْ حَقِّ أَهْلِ الْمُرُوءَاتِ إِكْرَاهُ وَالضَّابِطُ أَنَّ كُلَّ مَا يَسْهُلُ فِعْلُهُ عَلَى الْمُكْرَهِ بِفَتْحِ الرَّاءِ لَيْسَ إِكْرَاهًا وَعَكْسُهُ إِكْرَاهُ إِكْرَاهُ وَالضَّابِطُ أَنَّ كُلَّ مَا يَسْهُلُ فِعْلُهُ عَلَى الْمُكْرَهِ بِفَتْحِ الرَّاءِ لَيْسَ إِكْرَاهًا وَعَكْسُهُ إِكْرَاهُ وَالضَّابِطُ أَنَّ كُلَّ مَا يَسْهُلُ فِعْلُهُ عَلَى الْمُكْرَةِ بِفَتْحِ الرَّاءِ لَيْسَ إِكْرَاهًا وَعَكْسُهُ إِكْرَاهُ

Talak tidak terjadi dari orang terpaksa sebab kekhawatiran yang sesuai pada kondisi dirinya. Kekhawatiran itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan derajat manusia, sehingga suatu pukulan ringan di depan orang banyak itu merupakan paksaan bagi orang-orang yang mempunyai muruah (harga diri tinggi), dan bukan paksaan bagi selain mereka. Pelecehan bagi orang yang berpangkat itu merupakan paksaan dan makian bagi orang yang mempunyai muruah merupakan paksaan pula. Parameternya adalah apapun yang mudah dilakukan mukrah (orang yang dipaksa), dengan fathah huruf ing nya, itu tidak termasuk paksaan, dan yang sebaliknya termasuk paksaan.

6. Bughyah al-Musytarsyidin²²

(مَسْأَلَةُ ي) قِيْلَ لَهُ أَطَلَقْتَ زَوْجَتَكَ فَقَالَ نَعَمْ فَإِنْ قَصَدَ السَّاثِلُ طَلَبَ الإِيْقَاعَ مِنَ الزَّوْجِ فَصَرِيْحُ وَإِنْ قَصَدَ الاِسْتِخْبَارَ عَنْ طَلاَقٍ سَابِقٍ أَوْ جُهِلَ قَصْدُهُ فَإِقْرَارٌ بِهِ إِنْ كَانَ قَدْ طَلَقَ صَحَّ وَإِلَّا فَلَا

(Kasus dari Abdullah bin Umar bin Abi Bakr bin Yahya) Bila pada seorang suami ditanyakan: "Apakah kamu mentalak istrimu? Lalu si suami menjawab: "Ya.", maka bila si penanya bermaksud agar si suami mentalak, maka jawaban tersebut merupakan talak yang sharih. Bila ia bermaksud menanyakan talak yang sudah terjadi, atau maksudnya tidak diketahui, maka jawaban itu merupaka ikrar talak. Bila si suami benar-benar mentalak, maka sah talaknya, dan bila belum maka tidak.

7. Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain 23

أَمَّا إِذَا قَالَ لَهُ ذَلِكَ مُسْتَخْبِرًا فَأَجَابَ بِنَعَمْ فَإِقْرَارٌ بِالطَّلاَقِ وَيَقَعُ عَلَيْهِ ظَاهِرًا إِنْ كَذِبَ وَيُدَيَّنُ وَكَذَا لَوْ جُهِلَ حَالُ السُّؤَالِ فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ طَلاَقًا مَاضِيًّا وَرَجَعْتُ صُدِقَ بِيَمِيْنِهِ

²² Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, *Bughyah al-Musytarsyidin*, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 224.

²³ Zainuddinal-Malibari, Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain pada I'anah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz IV h.10-11.

لِاحْتِمَالِهِ وَلَوْ قِيْلَ لِمُطَلِّقِ أَطَلَقْتَ زَوْجَتَكَ ثَلاَثًا فَقَالَ طَلَقْتُ وَأَرَادَ وَاحِدَةً صُدِقَ بِيَمِيْنِهِ

Adapun bila ada yang mengatakannya (Apakah kamu mentalak istrimu?) dengan maksud bertanya, lalu si suami menjawab: "Ya.", maka jawaban itu merupakan ikrar talak, dan secara hukum *zhahir* talak itu sah bila ia berbohong dan tidak sah dalam urusan antara dirinya dan Allah bila ia jujur.

Dan bila ditanyakan kepada suami yang telah mentalak: "Apakah kamu mentalak istrimu tiga kali?" Lalu ia menjawab: "Saya mentalak.", dan yang ia maksud adalah talak satu, maka ia dibenarkan dengan sumpahnya.

8. Bughyah al-Musytarsyidin²⁴

(Kasus dari Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi) Seandainya hakim memerintahkan suami untuk mentalak istri, lalu ia mentalaknya, maka talaknya tidak sah, meki si hakim tidak menakut-nakutinya.

379. Sebelum Berakhir Masa Iddahnya, Ternyata Rahim Tidak Berisi Janin

- S. Apabila sebelum berakhir masa iddahnya, bahwa rahim diketahui dengan teknologi kedokteran ternyata tidak berisi janin dari mantan suaminya, bagaimana kedudukan iddahnya?
- J. Kedudukan 'iddahnya tidak berubah sebagaimana yang telah ditentukan oleh nash syara', walaupun rahimnya diketahui kosong dari janin, sebab tujuan 'iddah itu bukan hanya semata-mata untuk mengetahui kekosongan rahimnya dari janin, tetapi ada unsur ta'abudnya dan rasa duka cita.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib²⁵

لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَجِمِهَا أَوْ لِلتَّعَبُّدِ أَوْ لِتَفَجُّعِهَا عَلَى زَوْجِهَا وَالْمُعَلِّبُ فِيْهَا التَّعَبُّدُ بِدَلِيْلِ عَدَمِ الاكْتِفَاءِ بِقُرْءٍ وَاحِدٍ مَعَ حُصُوْلِ الْبَرَاءَةِ بِهِ وَبِدَلِيْلِ وُجُوْبِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ((lddah) itu untuk mengetahui bersihnya rahim wanita (dari janin))

²⁴ Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, *Bughyah al-Musytarsyidin*, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 231.

²⁵ Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Beirut: Dar al-fikr, t. th.), Jilid II, h. 173.

untuk beribadah, atau untuk berbelasungkawa (atas kematian) suaminya. Dan yang dominan adalah tujuan ibadah, buktinya tidak cukup 'iddah hanya dengan satu masa suci antara dua haid besertaan rahim wanita sudah bisa suci dengan lewatnya masa itu, dan juga terbukti dengan kewajiban 'iddah wafat walaupun si suami belum menyetubuhinya.

2. Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain26

(تَجِبُ عِدَّةُ لِفُرْقَةِ زَوْجٍ حَيِّ) بِطَلاَقٍ أَوْ فَسْخِ بِنَحْوِ عَيْبٍ أَوِ انْفِسَاخِ بِنَحْوِ لِعَانٍ (وَطِئَ) ... (وَإِنْ تَيَقَّنَ بَرَاءَةَ رَحِمٍ) كَمَا فِي الصَّغِيْرَةِ الَّيْ لاَ يُمْكِنُ وَطُوُهَا وَالْآيِسَةِ وَكَمَا فِي الْمُعَلَّقِ طَلاَقُهَا عَلَى يَقِيْنِ الْبَرَاءَةِ فَإِذَا مَضَى عَلَيْهَا بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ طُلِّقَتْ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ تَعَبُّدًا

'Iddah itu wajib karena bercerai dengan suami yang masih hidup dan telah menyetubuhinya, baik perceraian karena talak, atau perusakan akad nikah disebabkan semisal adanya cacat, atau rusak karena semacam li'an, ... meski telah diyakini bersihnya rahim dari janin, seperti wanita kecil yang belum mungkin disetubuhi, wanita yang telah manopaus, dan wanita yang talaknya dikaitkan atas keyakinan kebersihan rahimnya, maka setelah melahirkan dan melewati masa enam bulan wanita tersebut tertalak dan wajib 'iddah karena murni menjalankan ajaran Allah (ta'abbudi).

3. Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain²⁷

وَهِيَ أَيِ الْعِدَّةُ شَرْعًا مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فِيْهَا الْمَرْأَةُ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحِيهَا مِنَ الحُمْلِ أَوْ لِلتَّعَبُّدِ وَهُوَ اصْطِلاَحًا مَا لاَ يُعْقَلُ مَعْنَاهُ عِبَادَةً كَانَ أَوْ غَيْرَهَا أَوْ لِتَفَجُّعِهَا عَلَى زَوْجٍ وَشُرِعَتْ اَصَالَةً صَوْنَا لِلنَّسَبِ عَلَى الاِخْتِلاَطِ

Iddah secara syar'i adalah masa penungguan oleh wanita untuk mengetahui kebersihan rahimnya atau untuk tujuan ta'abbud (beribadah), yang secara istilahi merupakan sesuatu yang pengartiannya tidak bisa dirasionalisasikan, baik bersifat ibadah murni ataupun lainnya atau untuk berbelasungkawa atas kematian suaminya. Iddah semula disyaratkan untuk menjaga keturunan dari ketercampuran (dengan bibit dari lelaki lain).

4. Al-Asybah wa al-Nazha'ir28

²⁸ Abdurrahman al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 268.

Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 328.

²⁷ Zainuddinal-Malibari, Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain pada l'anah al-Thalibin, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Juz IV h.37-38.

عِدَّةُ الْمُتَوَقَى عَنْهَا رَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَمَنْ وَقَعَ عَنْهَا الطَّلاَقُ بِيَقِيْنِ بَرَاءَةِ الرَّحْمِ وَمَوْطُوَةُ الصَّبِيِّ الَّذِيْ لاَ يُولَدُ لِمِثْلِهِ وَالصَّغِيْرَةُ الَّتِيْ لاَ تَعْبَلُ قَطْعًا (الطَّالِثُ) مَا فِيْهِ الأَمْرَانِ وَالْمَعْنَى أَعْلَلُهِ وَالصَّغِيْرَةُ الَّتِيْ لاَ يُمْكِنُ حَبْلُهَا مِثَنْ يُولَدُ لِمِثْلِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ وَالْمَعْنَى أَعْلَلُهِ مِلَا يَعْدَدِ الْمُعْتَبَرِ، (الرَّابِعُ) مَا فَيْهِ الأَمْرَانِ وَالتَّعَبُّدِ بِالْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ، (الرَّابِعُ) مَا فِيْهِ الأَمْرَانِ وَالتَّعَبُّدُ أَعْلَلُ وَهِيَ عِدَّةُ الْوَفَاةِ لِلْمَدْخُولِ بِهَا الَّتِيْ يُمْكِنُ حَبْلُهَا وَتَمْضِي أَقْرَاعُهَا فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ فَإِنَّ الْعَدَدَ الْحَاصِ أَعْلَلُ فِي التَّعَبُّدِ بِالْعَدَدِ الشَهْرِ فَإِنَّ الْعَدَدَ الْحَاصِ أَعْلَلُ فِيْ التَّعَبُدِ اللَّهُ مِي عَلَّهُ الْعَدَدَ الْحَاصِ أَعْلَلُ فِي التَّعَبُدِ

Ketentuan. 'Iddah itu beberapa macam:

- 1. Murni bertujuan mengetahui bersihnya rahim, yaitu 'iddah wanita hamil.
- 2. Murni ta'abbud (ibadah), yaitu 'iddah wanita yang mati suaminya dan belum sempat menyetubuhinya, 'iddah wanita yang ditalak dengan keyakinan rahimnya memang sedang bersih dari kehamilan, 'iddah wanita yang disetubuhi suami yang masih kecil dan belum produktif, dan 'iddah wanita kecil yang belum bisa hamil sama sekali.
- 3. Mempunyai dua tujuan (mengetahui bersihnya rahim dan ta'abbudi) dan yang dominan adalah tujuan pertama. Yaitu 'iddah wanita yang mungkin hamil dari suami yang produktif. Baik 'iddahnya dengan masa suci antara dua haid atau dengan hitungan bulan. Sebab tujuan mengetahui bersihnya rahim lebih dominan dari nilai ta'abbuddinya dengan waktu 'iddah yang diperhitungkan.
- 4. Mempunyai dua tujuan (mengetahui bersihnya rahim dan ta'abbudi) dan yang dominan adalah tujuan kedua. Yaitu 'iddah wanita yang berkemungkinan hamil dari kematian suaminya dan masa sucinya telah lewat di tengah-tengah bulan. Sebab, hitungan khusus masa 'iddahnya didominasi oleh nilai ta'abbudi.
- 5. Referensi Lain
 - a. Mughni al-Muhtaj, Juz III, h. 383.
 - b. Hasyiyah Qulyubi, Juz 4, h. 41.
 - c. Fath al-Mu'in pada I'anah al-Thalibin, Juz III, h. 38
 - d. Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Iqna, Juz IV, h. 25.
 - e. Tuhfah al-Muhtaj, Juz II, h. 230.
 - f. Bughyah al-Mustarsyidin, h. 236.

380. Memberi Nama Anak dengan Lafal Abdun yang Mudhaf selain Nama Allah

S. Bagaimana hukum memberi nama anak dengan lafal Abdun yang

dimudhafkan kepada lafal selain Allah?

J. Memberi nama dengan kata *Abdun* yang di*mudhaf*kan kepada selain Allah, hukumnya adalah haram, karena menimbulkan *tasyrik*. Kalau di*mudhaf*kan kepada Nabi (*abdun nabi*) hukumnya makruh, menurut pendapat yang kuat. Ada pendapat dari Ibn Ziyad yang mengatakan bahwa memberi nama *abdun nabi* dan sesamanya itu tidak haram, apabila tidak dimaksudkan sebagai penghambaan yang sebenarnya.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib²⁹

وَتَحْرُمُ التَّسْمِيَّةُ بِعَبْدِ الْكَعْبَةِ أَوْ عَبْدِ الْحُسَنِ أَوْ عَبْدِ عَلِيٍّ وَكَذَا كُلُّ مَا أُضِيْفَ إِلَيْهِ بِالْعُبُوْدِيَّةِ لِغَيْرِ أَسْمَائِهِ تَعَالَى لِإِيْهَامِهِ التَّشْرِيْكَ كَمَا فِيْ شَرْحِ الرَّمْلِيِّ إِلاَّ عَبْدَ النَّبِيِّ فَتُكْرَهُ التَّسْمِيَّةُ بِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلاَقًا لِمَا وَقَعَ فِيْ حَاشِيَةِ الرَّحْمَافِيِّ مِنْ حُرْمَةِ التَّسْمِيَّةِ بِهِ

Dan haram memberi nama dengan Abdul Ka'bah (hamba Ka'bah), atau Abdul Hasan atau pula Abdu Ali. Demikian halnya semua nama yang digandengkan dengan kata Abdu (hamba) kecuali terangkai dengan nama-nama Allah Swt., karena mengesankan kesyirikan, seperti yang tertera dalam Syarh al-Ramli, kecuali nama Abdul Nabi, maka hukumnya makruh menurut pendapat mu'tamad. Berbeda dengan yang tertera dalam Hasyiyah al-Rahmani yang mengharamkan penamaan Abdul Nabi.

2. I'anah al-Thalibin³⁰

(قَوْلُهُ وَكَذَا عَبْدُ النَّبِيِّ) أَيْ وَكَذَا يَحْرُمُ التَّسْمِيَّةُ بِعَبْدِ النَّبِيِّ أَيْ لِإِيهَامِ التَّشْرِيكِ أَيْ أَنَّ النَّبِيِّ مَن التَّحْرِيمِ هُوَ مُعْتَمَدُ ابْنِ حَجَرٍ أَمَّا مُعْتَمَدُ الرَّمْلِيِّ فَا لَهُ وَمَا ذُكِرَ مِنَ التَّحْرِيمِ هُوَ مُعْتَمَدُ ابْنِ حَجَرٍ أَمَّا مُعْتَمَدُ الرَّمْلِيِّ فَالْجُورُ وَعِبَارَتُهُ وَمِثْلُهُ عَبْدُ النَّبِيِّ عَلَى مَا قَالَهُ الْأَكْثَرُونَ وَالْأَوْجَهُ جَوَازُهُ لَا سِيمًا عِنْدَ إِرَادَةِ فَالْجُورُ وَعِبَارَتُهُ وَمِثْلُهُ رَفِيقُ اللهِ لِإِيهَامِ النِّسْبَةِ لَهُ عَلِي وَقُولُهُ وَجَارُ اللهِ) أَيْ وَكَذَا يَحْرُمُ التَّسْمِيَّةُ بِجَارِ اللهِ وَمِثْلُهُ رَفِيقُ اللهِ لِإِيهَامِ النَّشْرِيكِ وَتَحْرُمُ التَّسْمِيَّةُ أَيْضًا بِعَبْدِ الْكَعْبَةِ أَوْ عَبْدِ الْحُسَنِ أَوْ عَبْدِ عَلِي وَكَذَا كُلُّ مَا أُضِيفَ التَّشْرِيكِ وَتَحْرُمُ التَّسْمِيَّةُ بِعَبْدِ الْعَالِ لِأَنَّ كُلًا مِنْهُمَا لَمْ يَرِدْ وَأَسْمَاوُهُ تَعَالَى تَوْقِيفِيَّةً وَكَذَا كُلُّ مِنْهُمَا لَمْ يَرِدْ وَأَسْمَاوُهُ تَعَالَى تَوْقِيفِيَّةُ وَتَعُرُمُ التَّسْمِيَّةُ بِعَبْدِ الْعَالِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَمْ يَرِدْ وَأَسْمَاوُهُ تَعَالَى تَوْقِيفِيَّةً وَاللهَ لِمَا اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا أَسْمَاوُهُ تَعَالَى تَوْقِيفِيَةً لَا عَلِي الْمَاجُورِيِّ وَعَبْدِ الْفَالِ لِأَنَّ كُلًا مِنْهُمَا لَمْ يَرِدْ وَأَسْمَاوُهُ تَعَالَى تَوْقِيفِيَّةً لَا اللهُ عَبْدِ الْعَالِ لِأَنَّ كُلًا مِنْهُمَا لَمْ يَرِدْ وَأَسْمَاوُهُ تَعَالَى تَوْقِيفِيَّةً

²⁹ Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Beirut: Dar al-fikr, t. th.), Jilid II, h. 314.

Muhammad Syaththa al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t.th.), Jilid II, h. 337.

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Begitu pula Abdul Nabi.") Maksudnya begitu pula haram memberi nama dengan Abdul Nabi, yakni karena mengesankan kesyirikan, maksudnya Nabi sama dengan Allah dalam hal beliau memiliki hamba-hamba. Hukum haram yang telah disebutkan itu pendapat mu'tamad versi Ibn Hajar. Sedangkan pendapat mu'tamad versi al-Ramli adalah boleh. Redaksinya yaitu: "Dan seperti halnya haram member nama dengan Abdul Ka'bah, haram pula Abdul Nabi menurut pendapat yang disampaikan mayoritas ulama. (Namun) al-Aujah (yang kuat) adalah boleh, apalagi bila menghendaki penghambaan yang panntas- dinisbatkan kepadabeliau Saw..

(Ungkapan beliau: "Dan Jarullah."), maksudnya begitu pula haram memberi nama dengan Jarullah (Tetangga Allah), begitu pula Rafiqullah (Teman Allah), sebab mengesankan kesyirikan. Dan haram pula memberi nama dengan Abdul Ka'bah, Abdul Hasan, Abdu Ali. Begitu pula setiap nama penghambaan yang diidhafahkan -dirangkai- dengan selain namanama Allah Swt., seperti Abdul 'Uzza, Abdu Manaf. Hal itu karena mengesankan kesyirikan. Dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri terdapat teks: "Dan haram memberi nama dengan Abdul 'Athi dan Abdul 'Al, sebab keduanya tidak terdapat dalil naqlinya. Padahal nama-nama Allah Swt. itu tauqifi (murni dari Nabi Saw.)."

3. Ghayah Talkhish al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad31

(مَسْأَلَةٌ) التَّسْمِيَّةُ بِعَبْدِ النَّبِيِّ وَخُوهِ لاَ تَحُرُمُ إِلاَّ إِذَا قُصِدَ حَقِيْقَةُ الْعُبُودِيَّةِ وَقَدْ غَلَبَ عَلَى الْفُقَرَاءِ الْمُنْتَسِينِ إِلَى الْمَشَايِخِ مِنْ أَهْلِ اللهِ تَعَالَى أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ أَنَا عَبْدُ سَيِّدِ الشَّيْخِ وَلاَ الْفُقَرَاءِ الْمُنْتَسِينِ إِلَى الْمَشَايِخِ مِنْ أَهْلِ اللهِ تَعَالَى أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ أَنَا عَبْدُ سَيِّدِ الشَّيْخِ وَلاَ يُرِيْدُونَ بِذَلِكَ إِلاَّ شَرَفَ النِّسْبَةِ لاَ حَقِيْقَةَ الْعُبُودِيَّةِ الَّتِيْ لِلهِ تَعَالَى وَلَوْ قِيْلَ لِإِنْسَانٍ مَا اسْمُكَ يَرِيْدُونَ بِذَلِكَ إِلاَّ شَرَفَ النِّسْبَةِ لاَ حَقِيْقَةَ الْعُبُودِيَّةِ الَّتِيْ لِلهِ تَعَالَى وَلَوْ قِيْلَ لِإِنْسَانٍ مَا اسْمُكَ وَلَا عَبْدُكُمْ مُولَا لِللهُ عَلَمُ مُعَمَّدُ عَلَى مَا اللهُ عَنْدُمُ وَمِثْلُ ذَلِكَ قَوْمُوا لِسَيِّدِكُمْ وَقَالَ عُمَرُ: أَبُو بَحْرٍ سَيِّدُنَا وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا وَعَيْقَ مَا اللهُ عَنْهُمْ

(Masalah) Penamaan dengan Abdul Nabi (Hamba Nabi) dan semisalnya itu tidak haram, kecuali bila maksudnya adalah pengertian kehambaan sebenarnya. Bagi para murid tarekat yang menisbatkan diri kepada para guru yang dekat dengan Allah Swt., sudah lumrah bila salah seorang dari mereka berkata: "Saya hamba Tuan Guru ..." Dan mereka dengan ucapan itu tidak lain hanyalah menghendaki kemuliaan gurunya saja,

³¹ Abdurrahman bin Muhammad Ba' alawi, Ghayah al-Talkhish fi Fatawa Ibn Ziyad pada Bughyah al-Mustarsyidin, (Singapura-Jeddah: al-Haramain, t. th.), h. 254.

bukan hakikan penghambaan yang hanya milik Allah Swt. saja.

Demikian halnya tidak haram, seandainya ada seseorang bertanya: "Siapa namamu?", lalu ia menjawab: "Hambamu, Muhammad.", dengan maksud menjaga etika, sebagaimana umumnya.

Begitu pula ucapan: "Tuanku adalah Fulan.", sebab dalam hadits disebutkan: "Berdirilah untuk menghormati tuan kalian.", dan Sahabat Umar pernah berkata: "Abu Bakar itu tuanku, dan memerdekakan tuanku.", maksudnya Bilal —radhiyallahu 'anhum-.

- 4. Referensi Lain
 - a. Tanwir al-Qulub, h. 249.
 - b. Hasyiyah al-Syarwani, Juz IX h. 373
 - c. Hasyiyah al-Jamal 'ala Fath al-Wahhab, Juz V, h. 266.

381. Vasektomi dan Tubektomi

- S. Apabila vasektomi dan tubektomi dapat direhabilitasi, bagaimana hukumnya?
- J. Penjarangan kelahiran melalui cara apapun tidak dapat diperkenankan, kalau mencapai batas mematikan fungsi berketurunan secara mutlak. Karenanya sterilisasi yang diperkenankan hanyalah yang bersifat dapat dipulihkan kembali kemampuan berketurunan dan tidak sampai merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib³²

Begitu pula menggunakan obat yang menunda atau memutus kehamilan sama sekali (sehingga tidak hamil selamanya), maka dimakruhkan dalam kasus pertama dan diharamkan dalam kasus kedua.

2. Nihayah al-Muhtaj³³

أَمَّا اسْتِعْمَالُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ دَوَاءً لِمَنْعِ الْحَبَلِ فَقَدْ سُئِلَ عَنْهَا الشَّيْخُ عِزُ الدِّينِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ ذَلِكَ وَظَاهِرُهُ التَّحْرِيمُ وَبِهِ أَفْتَى الْعِمَادُ بْنُ يُونُسَ فَسُئِلَ عَمَّا إِذَا تَرَاضَى الزَّوْجَانِ

448

³² Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*, (Beirut: Dar al-fikr, t. th.), Jilid II, h. 95.

³³ Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, (Beirut: Dar al-fikr, t. th.), Juz VIII, h. 443.

الْحُرَّانِ عَلَى تَرْكِ الْحَبَلِ هَلْ يَجُوزُ التَّدَاوِي لِمَنْعِهِ بَعْدَ طُهْرِ الْحَيْضِ أَجَابَ لَا يَجُوزُ ا ه وَقَدْ يُقَالُ هُو لَا يَزِيدُ عَلَى الْعَزْلِ وَلَيْسَ فِيهِ سِوى سَدُّ بَابِ النَّسْلِ ظَنَّا وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْمَنْعِ فَلَوْ فُرِّقَ بَيْنَ مَا يَمْنَعُ بِالْكُلِّيَّةِ وَبَيْنَ مَا يَمْنَعُ فِي وَقْتِ دُونَ وَقْتِ الْحَقِّ شَيْئًا وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْمَنْعِ فَلَوْ فُرِّقَ بَيْنَ مَا يَمْنَعُ بِالْكُلِّيَّةِ وَبَيْنَ مَا يَمْنَعُ فِي وَقْتِ دُونَ وَقْتِ الْحَلَّمُ الزَّرْكَشِي فَيْوُ هَذَا ا هَ كُلَامُ الزَّرْكَشِي

"Adapun penggunaan obat seorang pria dan wanita untuk mencegah kehamilan, maka Syaikh Izzuddin telah ditanyakan tentang hal itu. Lalu ia jawab: "Bagi wanita hal itu tidak boleh." Makna lahiriah jawaban itu adalah mengharamkan. Al-Imad bin Yunus berfatwa dengan hukum haram. Kemudian Syaikh Izzuddin ditanya bila kedua suami istri yang merdeka saling menyetujui untuk menghindari hamil, "Apakah boleh mengkonsumsi obat untuk mencegahnya setelah suci dari haid?" Beliau jawab: "Tidak boleh." Sampai disini ungkapan beliau. Dan terkadang bisa disanggah: "Cara tersebut tidak melebihi 'azl, dan dalam cara itu hanya menutup adanya keturunan secara zhan (prasangka). Sedangkan zhan sama sekali tidak selevel dengan kenyataan." Berdasar pendapat yang mencegah, bila antara obat yang mencegah kehamilan secara total dan obat yang mencegahnya sementara waktu dibedakan hukumnya, maka pembedaan itu cukup kuat. Dalam Syarh al-Tanbih karya al-Balisi terdapat pertimbangan semacam ini."

4. Ghayah Talkhish al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad³⁴

وَفِي فَتَاوَى الْقِمَاطِ مَا حَاصِلُهُ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ الدَّوَاءِ لِمَنْعِ الْحَيْضِ

Dan kesimpulan dalam *Fatawa al-Qimath* adalah boleh menggunakan obat-obatan untuk mencegah haid.

2. Pendapat Muktamar

وَقَدْ فَرَقَ الشِّبْرَامَلِسِيّ بَيْنَ مَا يَمْنَعُ الْحَمْلَ بِالْكُلِّيَّةِ وَبَيْنَ مَا يَمْنَعُهُ مُؤَقَّتًا، وَقَالَ بِتَحْرِيْمِ الْأَوَّلِ وَاعْتُبِرَ الطَّانِيّ شَبِيْهًا بِالْعَزْلِ بِالْإِبَاحَةِ. وَصَرَحَ الرَّمْلِيُّ نَقْلاً عَنِ الزَّرْكَشِيِّ بِأَنَّ الْمَاتِعْمَالَ مَا يَمْنَعُ الْحُمْلَ قَبْلَ إِنْزَالِ الْمَنِيِّ حَالَ الْجِمَاعِ مَثَلاً فَلاَ مَانِعَ مِنْهُ. وَكَذَا الْمَبْعُمَالَ مَا يَمْنَعُ الْحُمْلَ قَبْلَ إِنْزَالِ الْمَنِيِّ حَالَ الْجِمَاعِ مَثَلاً فَلاَ مَانِعَ مِنْهُ. وَكَذَا السِّيْعَمَالُ الْمَرْأَةِ الشَّيْءَ الَّذِي يُبْطِئُ الْحَبْلَ وَيَقْطَعُهُ مِنْ أَصْلِهِ فَيُكُرّهُ فِي الْأَوَّلِ وَيَحْرُمُ فِي النَّاقِ وَيَحْرُمُ فِي النَّاقِ وَيَحْرُمُ فِي النَّاقِ وَيَعْرَمُ أَنِي الْفَاعِدَةِ الْفَقْهِيَّةِ. إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ الثَّانِيّ اهِ وَعِنْدَ وُجُودِ الضَّرُورَةِ فَعَلَى الْقَاعِدَةِ الْفِقْهِيَّةِ. إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ

³⁴ Abdurrahman bin Muhammad Ba' alawi, Ghayah al-Talkhish fi Fatawa Ibn Ziyad pada Bughyah al-Mustarsyidin, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 247.

أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا مَفْسَدَةً اهِ

Sungguh al-Syibramallisi membedakan antara obat yang mencegah kehamilan secara total dan obat yang mencegah sementara waktu. Ia menyatakan keharaman yang pertama, dan yang kedua dinyatakan mubah sama dengan 'azl (mengeluarkan sperma di luar vagina). Al-Ramli secara jelas mengutip dari al-Zarkasyi, bahwa penggunaan obat yang mencegah kehamilan sebelum mani keluar saat persetubuhan umpamanya, itu maka tidak tercegah. Begitu pula menggunakan obat yang menunda atau memutus kehamilan sama sekali (sehingga tidak hamil selamanya), maka dimakruhkan dalam kasus pertama dan diharamkan dalam kasus kedua. Dan ketika terdapat kondisi darurat, maka berlaku kaidah fiqhiyah, "Jika dua mafsadah bertentangan, maka yang diperhatikan adalah yang paling berbahaya dengan melakukan yang kecil resikonya."

3. Referensi Lain

a. Hasyiyah Syibramallisi, Juz VIII, h. 416.

382. Menggunakan Spiral/IUD

- S. Bagaimana hukumnya menggunakan spiral (IUD) dalam KB mengingat caranya dengan melihat aurat?
- J. Pada dasarnya menggunakan spiral (IUD) itu hukumnya boleh, sama dengan 'azl, atau alat-alat kontrasepsi yang lain, tetapi karena cara memasangnya harus melihat aurat mughallazhah, maka hukumnya haram. Oleh karena itu harus diusahakan dengan cara yang dibenarkan oleh syara', seperti dipasang oleh suaminya sendiri. Masalah ini telah dibahas dalam buku PBNU "Membina Kemaslahatan Keluarga" (hlm. 92-95).

Keterangan, dari kitab:

Sulam al-Taufiq³⁵

وَمِنْ مَعَاصِي الْعَيْنِ النَّظُرُ إِلَى النِّسَاءِ الأَجْنَبِيَّاتِ وَكَذَا نَظْرُهُنَّ اِلَيْهِمْ وَنَظْرُ الْعَوْرَاتِ فَيَحْرُمُ نَظْرُ الرَّجُلِ إِلَى شَيْءٍ مِنْ بَدَنِ الْمَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ غَيْرِ الْحَلِيْلَةِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا كَشْفُ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا بِحَضْرَةِ مَنْ يَحْرُمُ نَظْرُهُ إِلَيْهَا وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا كَشْفُ شَيْءٍ مِمَّا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ

عِحَضْرَةِ مُطَّلِعٍ عَلَى الْعَوْرَاتِ وَلَوْ مَعَ جِنْسٍ وَتَحْرَمِيَّةٍ غَيْرٍ حَلِيْلَةٍ

Dan di antara maksiat mata adalah laki-laki melihat perempuan non mahram, begitu pula perempuan melihat laki-laki non mahram, dan melihat

³⁵ Abdullah Ba'lawi, Sulam Taufiq pada Mirqah Su'ud al-Tashdiq, (Indonesia: CV. Karya Insan, t. th.), h. 66.

aurat. Oleh sebab itu, laki-laki haram melihat bagian tubuh perempuan non mahram selain istrinya. Bagi perempuan haram membuka bagian tubuhnya di depan orang yang haram melihatnya. Bagi laki-laki dan perempuan haram membuka bagian tubuh antara pusar dan lutut di depan orang yang bisa melihatnya, meski sejenis dan semahram selain istri.

2. Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin³⁶

Dan bila haram melihat, maka haram menyentuh, karena menyentuh lebih kuat nikmatnya dari pada melihat.

3. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj³⁷

(وَ) اعْلَمْ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حُرْمَةِ النَّظْرِ وَالْمَسِّ هُوَ حَيْثُ لاَ حَاجَةَ إِلَيْهِمَا وَأَمَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ فَالنَّظْرُ وَالْمَسُّ (مُبَاحَانِ لِفَصْدٍ وَحِجَامَةٍ وَعِلاَجٍ) وَلَوْ فِيْ فَرْجٍ لِلْحَاجَةِ الْمُلْجِئَةِ إِلْحَاجَةِ الْمُلْجِئَةِ إِلَى ذَلِكَ لِلْأَجُلِ مُدَاوَاةُ الْمَرْأَةِ وَعَكُسُهُ وَلْيَكُنْ ذَلِكَ إِلَى ذَلِكَ لِلْأَجُلِ مُدَاوَاةُ الْمَرْأَةِ وَعَكُسُهُ وَلْيَكُنْ ذَلِكَ إِلَى ذَلِكَ لِلْأَجُلِ مُدَاوَاةُ الْمَرْأَةِ وَعَكُسُهُ وَلْيَكُنْ ذَلِكَ بِكَ مَنْ وَهُ الرَّاجِحُ

Dan ketahuilah, bahwa penjelasan tentang keharaman melihat dan menyentuh itu sekiranya tidak ada keperluan. Sedangkan ketika dalam keadaan perlu, maka melihat dan memegang itu boleh untuk bekam, cantuk dan pengobatan, sekalipun di vagina, karena adanya keperluan yang mendesak. Sebab pengharaman dalam kondisi seperti itu akan menyulitkan. Oleh karenanya, laki-laki boleh mengobati wanita dan sebaliknya, namun harus di depan *mahram*, suami, ataupun perempuan lain yang terpercaya. Hal ini bila kita memperbolehkan laki-laki menyendiri bersama dua wanita, dan ini merupakan pendapat yang *rajih* (unggul).

4. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib³⁸

-Kebolehan dokter laki-laki melihat tubuh perempuan dalam rangka pengobatan, itu bila- di depan *mahram*, suami, atau pemilik budak.

³⁶ Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, (Surabaya: Dar Nasyr al-Mishriyah, t. th.), Juz III, h. 211.

³⁷ Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj*, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Juz III, h. 133.

³⁸ Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Beirut: Dar al-fikr, t. th.), Jilid II, h. 102.

Maksudnya atau di depan seorang perempuan bila kita memperbolehkan seorang laki-laki menyendiri dengan dua wanita. Itu adalah pendapat yan *rajih* (unggul) selama kedua wanita itu merupakan orang yang terpercaya. Sebab, masing-masing dari keduanya akan merasa malu melakukan perbuatan mesum di sesamanya.

5. Kasyifah al-Saja³⁹

اِعْلَمْ أَنَّ نَظْرَ الْمَرْأَةِ إِلَى زَوْجِهَا جَائِزُ فِي جَمِيْعِ بَدَنِهِ كَعَكْسِهِ نَعَمْ إِنْ مَنَعَهَا مِنَ التَّظْرِ إِلَى عَوْرَتِهِ امْتَنَعَ عَلَيْهَا النَّظُرُ بِخِلاَفِ الْعَكْسِ فَإِنَّهُ جَائِزُ قَطْعًا لأَنَّهُ يَمْلِكُ التَّمَتُّعَ بِهَا وَلاَ تَمْلِكُ التَّمَتُّعَ بِهَا وَلاَ تَمْلِكُ التَّمَتُّعَ بِهَ اللهُ اللهُ اللهُ التَّمَتُّعَ بِهَا وَلاَ تَمْلِكُ التَّمَتُّعَ بِهِ لَكِنْ نَظَرُهُ إِلَى فَرْجِهَا قُبُلاً أَوْ دُبُرًا مَكْرُوهُ إِذَا كَانَ بِغَيْرِ حَاجَةٍ وَإِلَى بَاطِيهَا أَشَدُ كَرَاهَةً

Ketahuilah, bahwa wanita itu boleh melihat seluruh anggota tubuh suaminya, sebagaimana sebaliknya. Memang begitu, namun bila suami melarang istri melihat auratnya, maka istri tidak boleh melihatnya, tidak sebaliknya. Maka suami secara pasti boleh melihat aurat istri, sebab ia memiliki hak menikmati tubuh istri, sedangkan istri tidak memiliki hak menikmati tubuh suami. Namun suami makruh melihat kemaluan istrinya, baik *qubul* atau *dubur*nya, bila tidak terdapat *hajat*. Dan melihat bagian dalam kemaluan istri hukumnya lebih makruh.

383. Wasiat Mengenai Organ Tubuh Mayit

- S. Sahkah wasiat mengenai organ tubuh mayit untuk diberikan dan dicangkokkan kepada orang yang memerlukan mengingat di antara sahnya wasiat adalah wujud mutlaq al-milk?
- J. Hukum wasiat tersebut tidak sah (batal), karena tidak memenuhi syarat-syarat wasiat yang antara mutlaq al-milki. Menurut syara' organ mayit itu hak Allah bukan milik seseorang. Adapun pecangkokan organ tubuh manusia ada yang membolehkan dengan syarat:
- Karena diperlukan, dengan ketentuan tertib pengamanan.
- Tidak ditemukan selain organ tubuh manusia itu.

Masalah ini telah dibahas pada Munas Alim Ulama NU di Kaliurang pada tahun 1981, bisa dirujuk ke masalah Nomor 334.

Keterangan, dari kitab:

³⁹ Muhamad Nawawi bin Umar al-Jawi, Kasyifah al-Saja, (Semarang: Toha Putra, t. th.), h. 50.

1. Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain40

وَشُرِطَ فِيْ الْمُوْصَى بِهِ كُوْنُهُ مُبَاحًا يَقْبَلُ التَّقْلَ مِنْ شَخْصٍ إِلَى آخَرَ فَتَصِحُ بِحَمْلٍ مَوْجُوْدٍ إِنِ انْفَصَلَ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا مَضْمُوْنًا بِأَنْ كَانَ وَلَدَ أَمَةٍ وَجُنِيَ عَلَيْهِ بِخِلاَفِ وَلَدِ الْبَهِيْمَةِ إِنِ انْفَصَلَ مَيَّتًا بِجِنَايَةٍ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ تَبْطُلُ وَمَا يُغْرِمُهُ الْجَانِيُ حِيْنَئِذٍ مِمَّا لَنَهِيْمَةِ أُمِّهِ يَكُوْنُ لِلْوَارِثِ

Dan barang yang diwasiatkan disyaratkan merupakan barang mubah yang bisa dipindahkan dari seseorang ke orang lain. Maka sah wasiat janin (hewan atau budak) bila lahir dalam keadaan hidup, atau janin yang lahir dalam keadaan mati dan menjadi tanggung jawab seseorang, yaitu anak budak perempuan yang dilukai. Berbeda dengan janin hewan ketika lahir dalam keadaan mati karena dilukai, sebab wasiat dengannya batal, dan tanggung jawab orang yang melukai dalam kasus ini yaitu berkurangnya harga induknya menjadi milik ahli waris (bukan orang yang diwasiati).

2. Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad41

قَالَ الْحَلَبِيُّ وَيَبْقَى مَا لَوْ لَمْ يُوجَدْ صَالِحٌ غَيْرُهُ فَيَحْتَمِلُ جَوَازُ الْجَبْرِ بِعَظْمِ الْآذِيِّ الْمَيَّتِ كَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَإِنْ لَمْ يَخْشَ إِلَّا مُبِيحَ التَّيَمُّمِ فَقَطْ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِبَقَاءِ الْعَظْمِ هُنَا فَالِامْتِهَانُ دَاثِمٌ وَجَزَمَ الْمَدَابِغِيُّ عَلَى الْحَطِيبِ بِالْجَوَازِ وَنَصُّهُ فَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ إِلَّا عَظْمُ الْأَدَيِّ قُدِمَ عَظْمُ أَلْأَدَيِّ قُدِمَ عَظْمُ أَلْمُدْلِمِ عَظْمُ الْمُدَيِّ فَدِمَ عَظْمُ عَلَى اللَّهُ وَيَعْدُمُ اللَّهُ وَالْمُرْتِدِ ثُمَّ الْمُسْلِمِ

Al-Halabi berkata: "Dan masih menyisakan kasus, andaikan tidak ditemukan tulang penambal yang layak selain tulang manusia. Maka mungkin saja boleh menambal pasien dengan tulang manusia yang telah mati. Seperti halnya diperbolehkan memakan bangkai bagi seseorang dalam kondisi darurat, meskipun dia hanya khawatir atas *udzur* yang memperbolehkan tayamum saja. Dan kasus (menambal dengan tulang manusia) tersebut terkadang dibedakan (dengan kasus memakan bangkai dalam kondisi darurat), sebab tulang yang digunakan menambal masih wujud, maka penghinaan terhadap mayit (yang diambil tulangnya) terus terjadi. Dan *al-Madabighi* dalam catatannya atas karya al-Khatib, mantap atas diperbolehkannya menambal dengan tulang mayit, redaksinya yaitu:

Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 279.

⁴¹ Husain al-Rasyidi, *Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad*, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), h. 26-27.

"Bila tidak ada yang layak kecuali tulang manusia, maka tulang kafir harbi seperti orang murtad harus didahulukan, kemudian tulang kafir dzimmi, dan baru tulang mayit muslim.

3. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj42

(Dan dipebolehkan baginya) maksudnya adalah orang dalam kondisi darurat, (memakan manusia yang telah mati), ketika ia tidak menemukan bangkai selainnya, sebagaimana telah dibatasi oleh al-Rafi'i dan al-Nawawi dalam kitab al-Syarh al-Kabir dan al-Raudhah. Sebab kehormatan orang hidup lebih besar -dari orang pada yang telah mati-.

4. Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin43

Baginya, yaitu orang dalam kondisi darurat, boleh memakan mayat manusia, karena kehormatan orang hidup lebih besar dari kehormatan orang mati.

5. Al-Muhadzdzab44

Jika seseorang terpaksa dan (hanya) menemukan mayat manusia, maka ia boleh memakannya. Sebab, kehormatan orang hidup lebih kuat dari kehormatan orang mati.

6. Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin⁴⁵

(Dan bila seseorang menyambung tulangnya) karena pecah dan butuh menyabungnya, (dengan najis) maksudnya tulang najis, (karena tidak menemukan tulang yang suci) yang layak dijadikan penyambung, (maka

⁴² Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1957), Juz IV, h. 307.

⁴³ Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Juz I, h. 128.

⁴⁴ Abu Ishaq al-Syairazi, al-Muhadzdzab, (Beirut: ..., t. th.), Juz I, h. 251.

⁴⁵ Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Juz IV, h. 128.

ia adalah orang yang berudzur) dalam hal tersebut.

7. Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib46

Dan pendapat al-Aujah (yang lebih kuat) seperti makna lahir pernyataan para ulama, adalah tidak menilai keutamaan mayit, ketika sama-sama Islam dan terjaga (tidak boleh dibunuh).

8. Ahkamul Fuqaha'47

مَسْأَلَةٌ مَا قَوْلُكُمْ فِي افْتَاءِ مُفْتِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ بِجَوَازِ أَخْذِ حَدَاقَةِ الْمَيِّتِ لِوَصْلِهَا إِلَى عَيْنِ الْأَعْمَى هَلْ هُوَ صَحِيْحٌ أَوْ لاَ قَرَّرَ الْمُؤْتَمَرُ بِأَنَّ ذَلِكَ الْإِفْتَاءَ غَيْرُ صَحِيْحٍ، بَلْ يَحْرُمُ أَخْذُ حَدَاقَةِ الْمَيِّتِ وَلَوْ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ كَمُرْتَدِّ وَحَرْبِيٍّ. وَيَحْرُمُ وَصْلُهُ بِأَجْزَاءِ الْأَدَيِّ لِأَنَّ ضَرَرَ الْعَمَى لاَ يَرِيْدُ عَلَى مَفْسَدَةِ انْتِهَاكِ حُرُمَاتِ الْمَيِّتِ كَمَا فِيْ حَاشِيَةِ الرَّشِيْدِيِّ عَلَى ابْنِ الْعِمَادِ صـ ٢٦

Permasalahan, bagaimana pendapat Anda sekalian tentang fatwa oleh Mufti Mesir yang memperbolehkan cangkok bola mata mayat untuk dipasangkan ke mata orang buta. Apakah fatwa ini benar apa tidak? Muktamar menetapkan, bahwa fatwa itu tidak benar, dan bahkan haram mencangkok bola mata mayat meskipun dari orang yang tidak terhormat, seperti orang murtad dan orang kafir musuh. Haram pencangkokan dengan bagian-bagian tubuh manusia, karena bahaya kebutaan tidak melebihi kerusakan pencemaran kehormatan mayat.

384. Tindakan Medis Terhadap Pasien yang Sulit Diharapkan Hidupnya

S. Tindakan medis terhadap pasien yang dinilai sudah sulit diharapkan hidup, dengan tujuan atau berakibat meninggalnya pasien secara perlahan-lahan. Bagaimana hukumnya?

J. Tindakan medis demikian ini hukumnya haram.

Keterangan, dari kitab:

1. Bughyah al-Musytarsyidin⁴⁸

⁴⁶ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz I, h. 323.

⁴⁷ Ahkamul Fuqaha, Keputusan Muktamar NU ke-23 tahun 1962 di Solo (masalah nomor 315).

⁴⁸ Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Haalabi, t. th.), h. 245.

فَقَالَ لَا يُمْكِنُ إِذْخَالُ الشَّبَكَةِ لِكَوْنِهَا يَبِسَتْ فَقَطَعَهَا فَمَاتَ بَعْدَ أَيَّامٍ فَإِنْ تَعَمَّدَ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّ الْقَطْعَ يَقْتُلُ غَالِبًا وَمَاتَ بِالْفِعْلَيْنِ أَوْ قَطَعَهَا بِلَا إِذْنٍ مِنَ الْمَجْرُوجِ الْكَامِلِ وَوَلِيِّ عِلْمِهِ بِأَنَّ الْقَطْعَ يَقْتُلُ غَالِبًا وَمَاتَ بِالْفِعْلَيْنِ أَوْ قَطَعَهَا بِلَا إِذْنٍ مِنَ الْمَجْرُوجِ الْكَامِلِ وَوَلِيِّ النَّاقِصِ فَعَلَى كُلِّ مِنَ الطَّاعِنِ وَلَوْ سَكْرَانَ تَعْلِيظًا عَلَيْهِ إِذْ هُوَ فِي حُكْمِ الْمُكَلَّفِ وَالطَّبِيبِ النَّاقِصِ فَعَلَى كُلُّ مِنَ الطَّاعِنِ وَلَوْ سَكْرَانَ تَعْلِيظًا عَلَيْهِ إِذْ هُوَ فِي حُكْمِ الْمُكَلَّفِ وَالطَّبِيبِ كَانَ مَاهِرًا بِأَنْ لَا يُعْطِىءَ إِلَّا نَادِرًا أَوْلَا الْقِصَاصُ بِشَرْطِهِ وَلَا عِبْرَةً بِإِذْنِ الْوَارِثِ

(Kasus dari Muhammad bin Abu Bakar al-Asykhar al-Yamani) Seseorang ditikam, dan isi perutnya dikeluarkan, lalu dibiarkan sehari semalam. Kemudian didatangkan dokter untuk mengobatinya. Ia berkata: "Isi perutnya tidak bisa mungkin dimasukkan (ke perut lagi) karena sudah kering." Lalu ia memotongnya. Setelah beberapa hari si korban tersebut meninggal. Maka bila ia sengaja memotongnya dan tahu bahwa tindakannya itu secara umum bisa membunuh, dan si korban tersebut mati karena dua tindakan (tikaman dan pemotongan isi perut), atau ia memotongnya tanpa izin dari si korban yang kamil (diperhitungkan dalam hukum), dan wali korban yang nagish (tidak diperhitungkan dalam hukum), maka bagi masing-masing penikam meski dalam keadaan mabuk karena memberatkan hukum baginya, sebab ia dihukumi mukallaf, dan bagi si dokter pandai yang jarang melakukan malpraktik maupun tidak, hukuman qishash dengan syaratnya. Dan izin ahli waris tidak dipertimbangkan (dalam kasus ini). 2. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib49

وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْلُهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى وَأَخْبَارُ كَخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيلَ وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الشَّرْكُ بِاللهِ تَعَالَى وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ...

Dan dalil dalam masalah jinayah (kriminal) sebelum ijma' adalah firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh." dan hadits shahih Bukhari dan Muslim: "Jauhilah tujuh perkara yang membuat binasa." Lalu ditanyakan: "Apakah tujuh perkara itu wahai Rasulullah?" Beliau bersabda: "Menyekutukan Allah Ta'ala, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak ..."

3. Referensi Lain

⁴⁹ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*, (Beirut: Dar al-fikr, t. th.), Jilid II, h. 199-200.

- a. Fath al-Wahhab, Juz II, h. 128.
- b. I'anah al-Thalibin, juz IV, hlm. 110 119.
- c. Al-Mahalli, Juz IV, h. 96 dan 102.
- d. Kifayah al-Akhyar, Juz II, h. 201.
- e. Tuhfah al-Muhtaj, Juz III, h. 205.
- f. Tarsyih al-Mustafidin, h. 367.

385. Menjual Barang dengan Dua Macam Harga

- S. Bagaimana hukumnya menjual barang dengan dua macam harga yang berlainan antara cash dan kredit, antara kredit berjangka pendek dan berjangka panjang?
- J. Menjual barang dengan dua macam harga jika dilakukan dalam suatu akad, hukumnya tidak boleh/tidak sah. Tetapi jika dilakukan dengan akad mustaqil (akad yang terpisah), hukumnya boleh/sah.

Keterangan, dari kitab:

1. Tuhfah al-Muhtaj⁵⁰

(وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ) رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ (بِأَنْ) أَيْ (كَأَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ إِلَى سَنَةٍ) فَخُذْ بِأَيِّهِمَا شِثْتَ أَنْتَ وَأَنَا أَوْ شَاءَ فُلاَنُ لِلْجَهَالَةِ بِخِلاَفِهِ بِأَلْفٍ نَقْدًا وَ بِأَلْفَيْنِ لِسَنَةٍ وَبِخِلاَفِ نِصْفِهِ بِأَلْفٍ وَنِصْفِهِ بِأَلْفَيْنِ

(Dan Rasulullah Saw. melarang dua jual beli dalam satu akad), diriwayatkan al-Tirmidzi dan dishahihkannya. Yaitu bila seseorang berkata: "Aku jual padamu seharga 1000 kontan, dan seharga 2000 kredit setahun. Maka silahkan beli dengan harga yang kamu dan aku kehendaki, atau yang dikehendaki Fulan.", karena ketidakpastian harga. Berbeda dengan: "... seharga 1000 kontan atau seharga 2000 kredit setahun." dan dengan ucapan: "... separonya seharga 1000 dan separonya lagi seharga 2000."

2. Fath al-Wahhab⁵¹

(Dan Nabi Saw. melarang dari dua jual beli dalam satu akad), diriwayatkan al-Tirmidzi dan selainnya, ia berkata: "Hadits ini shahih *hasan.*" Seperti ucapan: "Aku jual padamu barang ini seharga 1000 kontan, atau seharga

⁵⁰ Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada Hasyiyata al-Syirwani wa al-'Abbadi, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th), Jilid IV, h. 294.

⁵¹ Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab pada Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Manhaj, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz I, h. 175-176.

2000 kredit setahun. Maka silahkan beli dengan harga yang kamu atau si fulan kehendaki." Ketidakabsahannya itu karena ketidakpastian harga.

386. Air Bersih Hasil Proses Pengolahan

- S. Dinilai ma' al-mutlaq apabila air bersih hasil proses pengolahan tetapi mempunyai kelainan baik rasa, bau ataupun warna.
- J. Air tersebut pada prinsipnya nasih termasuk air mutlak, karena proses kimiawinya tidak mengubah kemutlakan air tersebut, selama perubahannya tidak terlalu berat.

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Qarib52

Apabila perubahan itu tidak mencegah kemutlakan nama air, seperti bila perubahannya itu dengan benda suci dalam kadar sedikit, atau dengan benda yang sifatnya sama dengan sifat-sifat air (rasa, warna dan bau), yang dikira-kira berbeda dengannya dan tidak sampai mengubahnya, maka perubahan itu tidak mencabut sifat bisa mensucikannya, maka air itu suci yang bisa mensucikan selainnya.

2. Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain⁵³

Air mutlak adalah air yang disebut dengan nama air tanpa ikatan nama tertentu, (air teh, gula, kopi dan sebagainya), meski berasal dari resapan uap air suci yang dididihkan, atau yang ampurannya rusak, atau terikat dengan nama tempatnya, seperti air laut

3. Kifayah al-Akhyar⁵⁴

⁵² Ibn Qasim al-Ghazi, Fath al-Qarib pada Hasyiyah al-Bajuri, (Beirut: Dar al-fikr, t. th.), Jilid I, h. 33-34.

⁵³ Zainuddinal-Malibari, Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain pada I'anah al-Thalibin, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid I, h.27.

⁵⁴ Abu Bakar bin Muhammad al-Khishni, *Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar*, (Semarang: Toha Putra t. th.), Juz I, h. 10.

Maka bila air berubah dengan perubahan sedikit, maka menurut pendapat al-Ashshah air itu suci dan mensucikan, sebab kemutlakan namanya masih tetap.

387. Mu'amalah dalam Bursa Efek

S. Bagaimana kedudukan mu'amalah dalam Bursa Efek dan kaitannya dengan zakat?

J. Setelah melakukan pembahasan dengan seksama maka Muktamar Nahdlatul Ulama ke 28 berpendapat bahwa, ternyata *mu'amalah* dalam Bursa Efek (Pasar Modal) itu terdapat praktek *gharar*.

Keterangan, dari kitab:

1. Mauhibah Dzi al-Fadhl55

Dan mengunggulkan bagian pertama itu yang utama, karena diketahui secara nyata bahwa yang maksud oleh dua orang yang bertransaksi itu adalah kadar yang dimaklumi dari nominal yang dikandung oleh uang kertas itu dan bukan kertas itu sendiri.

2. Kifayah al-Akhyar⁵⁶

وَقَدْ نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Dan Rasulullah Saw. melarang jual beli yang mengandung tipu daya. 3. *Kifayah al-Akhyar*⁵⁷

(وَيَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوْفٍ فِي النِّمَّةِ فَجَائِزُ وَيَيْعُ عَيْنِ غَائِيَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ فَلاَ يَجُوزُ) الْبَيْعُ إِنْ كَانَ سَلَمًا فَسَيَأْتِيْ وَإِنْ كَانَ عَلَى عَيْنٍ غَائِيَةٍ لَمْ يَرَهَا الْمُشْتَرِيْ وَلاَ الْبَائِعُ أَوْ لَمْ يَرَهَا أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَفِي فَسَيَانِيْ وَإِنْ كَانَ عَلَى عَيْنٍ غَائِيَةٍ لَمْ يَرَهَا الْمُشْتَرِيْ وَلاَ الْبَائِعُ أَوْ لَمْ يَرَهَا أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَفِي مَعْنَى الْغَائِيَةِ الْحَاضِرَةُ الَّتِيْ لَمْ تُرَ وَفِي صِحَّةِ بَيْعِ ذَلِكَ قَوْلاَنِ أَحَدُهُمَا وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْقَدِيْمِ وَالْمُونِيُ وَاللَّهُ الْعَلاَئَةُ وَطَائِفَةً مِنْ أَئِمَّتِنَا وَأَفْتُوا بِهِ مِنْهُمْ الْبَغَوِيُّ وَالرَّوْيَانِيُّ قَالَ النَّوْلُ قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ النَّوْوِيُّ وَالرَّوْيَائِيُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

⁵⁵ Mahfud al-Termasi, Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: al-Amirah al-Syarafiyah, 1326 H) Juz IV, h. 29.

⁵⁶ Abu Bakar bin Muhammad al-Khishni, Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar, (Damaskus: Dar al-Khair, t. th.), Juz I, h. 234.

⁵⁷ Abu Bakar bin Muhammad al-Khishni, *Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar*, (Semarang: Toha Putra, t. th.), Juz I, h. 195.

قُلْتُ وَنَقَلَهُ الْمَاوَرْدِيُ عَنْ جُمْهُوْرِ أَصْحَابِنَا قَالَ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِيْ سِتَّةِ مَوَاضِعَ وَاحْتَجُوْا لَهُ بِحَدِيْثٍ إِلاَّ أَنَّهُ ضَعِيْفٌ ضَعَفَهُ الدَّارُ قُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَاللَّهُ اَعْلَمُ وَالْجَدِيْدُ الْأَظْهَرُ وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِيْ سِتَّةِ مَوَاضِعَ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ لِأَنَّهُ عَرَرُ

Dan menjual barang yang ditetapkan kriterianya dalam tanggungan (terpesan) itu boleh, dan menjual barang yang tidak ada di tempat serta belum dilihat itu tidak boleh.

Apabila yang dimaksud adalah salam (pesan) maka akan dijelaskan nanti. Dan apabila penjualan barang yang tidak ada di tempat akad dan belum di lihat oleh pembeli dan penjual atau salah satu dari keduanya, semakna dengan barang yang tidak ada di tempat akad, barang yang ada di tempat akad namun beleum dilihat, maka keabsahan jual beli barang semacam itu ada dua pendapat. Pertama, sah. Dalam qaul qadim dan qaul jadid Imam Syafi'i menjelaskan, bahwa jual beli tersebut sah. Imam Tsalatsah, sekelompok Imam madzhab Syafi'i pun berpendapat begitu, dan mereka berfatwa dengannya. Di antaranya al-Baghawi dan al-Rauyani. Dalam Syarh al-Muhadzdzab al-Nawawi berkata: "Pendapat ini disampaikan mayoritas ulama sahabat dan tabiin. Wallahu A'lam. Saya berkata: "Al-Mawardi mengutipnya dari mayoritas murid Imam Syafi'i. Beliau berkata: "Imam Syafi'i menjelaskannya dalam enam tempat." Mereka berhujjah dengan suatu hadits, hanya saja hadits tersebut lemah, yang dinilai lemah oleh al-Daruduthni dan al-Baihaqi." Wallahu a'lam.

Sementara al-qaul al-jadid al-azhhar dan dijelaskan Imam Syafi'i dalam enam tempat menyatakan bahwa jual beli tersebut tidak sah, karena merupakan jual beli barang yang masih samar/simpangsiur.

388. Bursa Valuta dan Kaitannya dengan Zakat

- S. Bursa Valuta apakah mu'amalah dan bagaimana zakatnya?
- J. Bursa valuta termasuk mu'amalah *tijariyyah* yang berarti masuk dalam *babul ba'i*, dan zakatnya sebagaimana lazimnya zakat *tijarah* yang telah memenuhi syarat.

Keterangan, dari kitab:

1. Mauhibah Dzi al-Fadhl58

وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُوْنَ فِيْ الْوَرَقَةِ الْمَعْرُوفِ بِالتَّوْطِ فَعِنْدَ الشَّيْخِ سَالِمِ بْنِ سُمَيْرٍ وَالْحَبِيْبِ عَبْدِ

⁵⁸ Mahfud al-Termasi, Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: al-Amirah al-Syarafiyah, 1326 H) Juz IV, h. 29.

الله بْنِ سَمِيْطٍ أَنَّهَا مِنْ قَبِيْلِ الدُّيُوْنِ نَظْرًا إِلَى مَا تَضَمَّنَتُهُ الْوَرَقَةُ الْمَذْكُوْرَةُ مِنَ التَّقُوْدِ الْمُتَعَامَلِ بِهَا وَعِنْدَ الشَّيْخِ مُحَمَّدٍ الْأَنْبَائِيَ وَالْحَبِيْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ بَصُورٍ أَنَّهَا كَالْفُلُوْسِ الْمَضْرُوْبَةِ وَالتَّعَامُلُ بِهَا صَحِيْحُ عِنْدَ الْأُولِينَ زَكَاةُ مَا تَضَمَّنَتُهُ الْأَوْرَاقُ مِنَ النَّقُوْدِ عِنْدَ الْأَوَلِيْنَ زَكَاةُ عَيْنِ وَتَجِبُ زَكَاةً مَا تَضَمَّنَتُهُ الْأَوْرَاقُ مِنَ النَّقُوْدِ عِنْدَ الْأَولِيْنَ زَكَاةً عَيْنِ وَتَجِبُ زَكَاةً عَيْنِ وَتَجِبُ زَكَاةً عَمْدَ بِهَا التَّجَارَةَ

Ulama-ulama modern berbeda pendapat tentang uang kertas (valuta). Menurut Syaikh Salim bin Sumair dan Habib Abdullah bin Sumaith, uang kertas tersebut termasuk kelompok duyun (utang) sesuai dengan nominal yang dikandung oleh kertas tersebut yang ditransaksikannya. Sedangkan menurut Syaikh Muhammad al-Anba'i dan Habib Abdullah bin Abi Bakar, bahwa uang kertas itu seperti uang (logam) cetakan.

Semuanya berpendapat, bahwa bertransaksi dengan uang kertas itu sah, dan wajib zakat sesuai nominal yang dikandungnya menurut Syaikh Salim bin Sumair dan Habib Abdullah bin Sumaith, dan wajib zakat sebagai barang dagangan menurut Syaikh Muhammad al-Anba'i dan Habib Abdullah bin Abi Bakar.

389. Kedudukan Hak Cipta dalam Hukum Waris

- S. Apakah Hak Cipta menghasilkan uang atau nilai ekonomi selama dalam waktu yang ditetapkan menurut Undang-undang Hak Cipta, bagaimanakah kedudukannya dalam Hukum Waris, sedangkan harta mayit yang lain sudah lama dibagi waris; dan bagaimana pula kaitannya dengan zakat?
- J. Kedudukan Hak Cipta dalam hukum waris adalah termasuk *tirkah* sekalipun harta almarhum yang lain sudah lama dibagi. Adapun kaitannya dengan zakat adalah seperti halnya mal (harta) biasa.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah Qulyubi⁵⁹

قَوْلُهُ تَرَكَهُ هِيَ مَا تَخَلَّفَ عَنِ الْمَيِّتِ وَلَوْ بِسَبَبٍ أَوْ غَيْرِ مَالٍ كَاخْتِصَاصٍ وَلَوْ خَمْرًا تَخَلَّلُتْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَحَدِّ قَذَفٍ وَمَا وَقَعَ مِنْ صَيْدٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فِيْ شَبَكَةٍ نَصَبَهَا قَبْلَهُ

(Harta pusaka) adalah yang ditinggalkan oleh mayit, walaupun dengan sesuatu sebab atau bukan berupa harta seperti ikhtishash (barang yang tidak bisa dimiliki namun boleh digunakan seperti pupuk

⁵⁹ Qulyubi, Hasyiyah Qulyubi pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1956), Juz III, h. 135.

kandang dan semisalnya), atau walaupun dalam bentuk *khamr* yang kemudian berubah menjadi cuka setelah kematiannya, atau *had* menuduh zina, atau buruan yang masuk dalam jaring yang telah dipasang sebelum kematiannya.

2. I'anah al-Thalibin60

Harta pusaka adalah peninggalan mayit berupa harta atau hak.

- 3. Referensi Lain
 - a. Futuhat al-Wahhab/Hasyiyah al-Jamal, Juz IV, h. 403.
 - b. I'anah al-Thalibin, Juz III, h. 155 dan h. 223.

390. Nama Akad Program Tebu Rakyat Intensifikasi

S. Program TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi) yang berlaku di daerah-daerah tertentu (lihat lampiran) termasuk akad apa? Dan bagaimana penghasilan dari padanya?

Praktek Penyelenggaraan TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi)

Program Penyelenggaraan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) melalui proses:

- Langkah pertama adalah membentuk kelompok. Prosesnya beberapa petani yang lokasi tanahnya mendapat giliran untuk ditanami tebu, berkumpul untuk bersepakat membentuk kelompok, yang strukturnya ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Ketua kelompok berfungsi untuk mewakili anggota kelompoknya dalam segala urusan yang berkaitan dengan pihak luar.
- Langkah berikutnya adalah mengurus izin penanaman kepada instansi yang terkait, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua kelompok.
- 3. Setelah mendapat izin, Ketua kelompok dapat mengajukan kredit pembiayaan tanaman dan biaya hidup, yang telah diatur melalui SK Bupati kepada KUD, yang pembayarannya setelah selesai penebangan.
- 4. Hasil gula petani digiling di pabrik gula yang telah ditentukan. Pabrik gula dalam hal ini berfungsi menjual jasa penggilingan kepada petani, yang bagi hasilnya; pabrik gula kurang lebih 38 %,

462

Muhammad Syaththa al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin*, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t.th.), Juz III, h. 223.

- sedang petani kurang lebih 62 % (ada kemungkinan menurut rendemen).
- 5. Hasil gula petani yang 98 % dijual kepada DOLOG dengan harga yang ditentukan. Sedang 2 % dapat diambil dalam bentuk natura.
- 6. Penjualan gula petani kepada DOLOG diwakili dan dikoordinir oleh KUD kemudian uang diserahkan kepada masing-masing kelompok (diwakili oleh ketuanya) setelah memenuhi kewajiban kelompok, antara lain membayar utang, membayar biaya tebang dan lain-lain.
- J. TRI termasuk akad *ijarah, muzara'ah, mukhabarah,* dan tidak termasuk *wakalah*. Oleh karena itu pelaksanaan TRI seperti tersebut dalam pertanyaan (soal) termasuk *mu'amalah fasidah*.

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Wahhab61

Dan akad penghutangan itu rusak sebab syarat menarik keuntungan bagi pihak yang meminjami, seperti pengembalian dengan kelebihan, baik dalam ukuran atau sifatnya. Seperti mengembalikan barang utuh dari hutangan yang pecah.

2. Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab62

Dan dimaklumi bahwa rusaknya penghutangan tersebut bila pernyaratan itu terjadi dalam akad. Namun bila pihak penghutang dan pihak yang menghutang) bersepakat terhadap persyaratan yang dimaksud, dan tidak terjadi penyaratan dalam akad, maka akad penghutangan itu sah.

3. Fath al-Wahhab⁶³

⁶¹ Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab, (Indonesia: Dar Ihya' al-kutub al-'Arabiyah, t. th.), Juz I, h. 192.

⁶² Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz I, h. 192.

⁶³ Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab, (Indonesia: Dar Ihya' al-kutub al-'Arabiyah, t. th.), Juz I, h. 247.

مَا يُعْلَفُ بِهِ لِلْجَهْلِ فِيْ ذَلِكَ فَإِنْ ذَكَرَ مَعْلُوْمًا وَأَذَنَ لَهُ خَارِجَ الْعَقْدِ فِيْ صَرْفِهِ لِلْعِمَارَةِ أُو الْعَلْفِ صَحَّتْ

Tidak sah menyewakan rumah atau hewan dengan ongkos berupa perawatan dan memberi makan rumput, kata غلب dengan disukun atau dibaca fathah huruf yi nya, karena ketidaktahuan pada ongkos sewa. Maka bila pihak yang menyewakan telah menyebut ongkos sewa tertentu dan diluar akad mengizinkannya untuk dibelanjakan dalam perawatan atau pemberian makan rumput, maka akad sewa tersebut sah.

4. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib64

Dan tanpa paksaan dengan selain kebenaran. Maka tidak sah akad jual beli seseorang yang terpaksa tanpa kebenaran dalam hartanya. Bila paksaan itu dengan kebenaran maka sah. Seperti ia tertuntut menjual hartanya untuk melunasi hutang, lalu hakim memaksanya.

391. Hasil dari Kerja Pada Pabrik Bir dan Tempat Hiburan Maksiat

- S. Bagaimana hukum hasil kerja pada Pabrik Bir dan tempat hiburan "maksiat", dan bagaimana pula hukum menjariyahkan/amal untuk tempat ibadah?
- J. Hasil dari kerja Pabrik Bir dan tempat hiburan "maksiat", adalah tidak dibenarkan oleh syariat Islam, dan menjariyahkan/amal untuk tempat ibadah tidak diterima.

Keterangan, dari kitab:

1. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj⁶⁵

وَلاَ اسْتِئْجَارٍ لِتَعْلِيْمِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالسِّحْرِ وَالْفُحْشِ وَالنَّجُوْمِ وَالرَّمْلِ وَلاَ لِجِتَانِ الصَّغِيْرِ الَّذِيْ لاَ يَحْتَمِلُ وَلاَ لِجِتَانِ الْكَبِيْرِ فِيْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَالْبَرَدِ وَلاَ لِتَنْقِيْبِ الْأُذُنِ وَلَوْ لِأُنْثَى وَلاَ لِلزَّمْرِ وَالنِّيَاحَةِ وَحَمْلِ الْخَمْرِ غَيْرَ الْمُحْتَرَمَةِ لاَ لِلْإِرَاقَةِ وَلاَ لِتَصْوِيْرِ الْحَيَوَانَاتِ وَسَائِدِ الْمُحَرَّمَاتِ.

⁶⁴ Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Beirut: Dar al-fikr, t. th.), Jilid I, h. 352.

Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, 1957), Jilid II, h. 337.

وَجَعَلَ فِيْ التَّنْبِيْهِ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ الْغِنَاءَ وَفِيْهِ كَلاَمُّ ذَكَرْتُهُ فِيْ شَرْحِهِ وَلاَ يَجُوْزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ كَبَيْعِ الْمَيْتَةِ

Dan tidak sah menyewa seseorang untuk mengajar Taurat, Injil, sihir, perbuatan mesum, ilmu perbintangan (perdukunan), meramal, mengkhitan anak kecil yang belum kuat dikhitan atau orang dewasa dalam cuaca sangat panas atau dingin, melubangi telinga meski telinga wanita, meniup seruling, meratapi kematian, membawa minuman keras, bukan (sah menyewa orang) untuk menumpahkannya, tidak sah menyewa orang untuk melukis hewan-hewan dan semua yang diharamkan. Dalam kitab al-Tanbih Syaikh Abu Ishaq al-Syairazi menilai nyanyian termasuk perkara yang diharamkan. Dan hal itu perlu dikaji ulang yang telah aku sebutkan dalam kitab Syarhnya. Dan tidak boleh mengambil upah untuk semuanya itu seperti mengambil uang dari penjualan bangkai.

3. Ihya 'Ulum al-Din66

Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa memperoleh harta dari pekerjaan dosa, lalu ia pergunakan untuk menyambung kerabat, meyedekahkannya, atau membelanjakannya di jalan Allah Swt., maka Allah Swt. akan menghimpun semua itu, lalu melemparkannya ke neraka."

392. Menghimpun Dana Kesejahteraan Siswa

- S. Bagaimana hukum menghimpun dana untuk kesejahteraan siswa yang boleh jadi sebagian siswa tidak memanfaatkan hasilnya, sementara itu juga dipergunakan untuk keperluan yang tidak langsung dengan kebutuhan siswa?
- J. Menghimpun dana untuk kesejahteraan siswa yang boleh jadi sebagian siswa tidak memanfaatkan hasilnya, dan juga dipergunakan untuk keperluan yang tidak langsung dengan kebutuhan siswa adalah tidak dibenarkan apabila bertentangan dengan syarat-syarat yang telah disepakati/ditentukan.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Siraj al-Munir⁶⁷

⁶⁶ Abu Hamid al-Ghazali, Ihya' 'Ulum al-Din, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Jilid II, h. 81.

⁶⁷ Ali al-Azizi, al-Siraj al-Munir, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1957), Jilid III, h. 406.

الْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوطِهِمْ الْجَائِزَةِ شَرْعًا أَيْ ثَابِتُوْنَ عَلَيْهَا وَاقِفُوْنَ عِنْدَهَا قَالَ العَلْقَمِيّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَهَذَا فِي الشُّرُوطِ الْجَائِزَةِ دُوْنَ الْفَاسِدَةِ وَهُوَ مِنْ بَابِ مَا أُمِرَ فِيْهِ الْوَفَاءُ بِالْعُقُودِ يَعْنَى عُقُودَ الدَّيْنِ وَهُوَ مَا يَنْفَذُهُ الْمَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ.

Orang-orang muslim itu terikat dengan persyaratan mereka yang diperbolehkan syari'ah. Al-'Alqami berkata: "Al-Mundziri berkata: "Keterikatan ini dalam persyaratan yang diperbolehkan, bukan yang fasidah (rusak), yaitu termasuk bab perkara yang diperintahkan untuk dipenuhi dengan akad-akad." Yakni akad tentang hutang-piutang, yaitu akad yang disanggupi seseorang untuk dilaksanakannya.

2. Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin68

وَقِيْسَ بِوَلِيِّ الْيَتِيْمِ فِيْمَا ذُكِرَ مَنْ جَمَعَ مَالاً لِفَكِّ أَسِيْرٍ أَيْ مَثَلاً فَلَهُ إِنْ كَانَ فَقِيْرًا الْأَكُلُ مِنْهُ قَوْلُهُ أَيْ مَثَلاً أَيْ إِنَّ فَكَ الْأَسِيْرِ لَيْسَ بِقَيِّدٍ بَلْ مِثْلُهُ إِصْلاَحُ ثُغْرَةٍ أَوْ حَفْرُ بِثْرٍ أَوْ تَرْبِيَّةُ يَتِيْمٍ

Dan diqiyaskan dengan pengampu anak yatim dalam kewenangan yang telah disebutkan, yaitu orang yang menghimpun harta, untuk pembebasan tawanan misalnya, maka bila fakir, ia boleh memakan dari sebagian harta tersebut.

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Misalnya", maksudnya pembebasan tawanan bukan suatu *qayyid* (ketentuan), namun seperti halnya pembebasan tawanan adalah perbaikan benteng pertahanan, penggalian sumur, atau pendidikan anak yatim.

3. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an⁶⁹

يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ قَالَ الزَّجَّاجُ الْمَعْنَى أَوْفُوا بِعَقْدِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَبِعَقْدِكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

"Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu ..." (QS. al-Maidah: 1) al-Zajjaj berkata: "Makna ayat itu adalah penuhilah akad Allah Swt. yang diwajibkan terhadap kalian, dan akad kalian antara yang satu dengan yang lain."

393. Mengembangkan Macam-macam Mal Zakawi

S. Dapatkah mal zakawi itu dikembangkan macam-macamnya mengingat

⁶⁸ Zainuddin al-Malibari and Muhammad Syaththa al-Dimyathi, Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t.th.), Jilid II, h. 73-74.

⁶⁹ Muhammad al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, (Kairo: Dar al-Sya'b, t. th.) Cet. ke-2, Jilid VI, h. 33.

sekarang ini lapangan usaha ekonomi semakin luas?

J. Sesuai dengan ketentuan kutub al-fiqh, maka mal zakawi tidak dapat dikembangkan macam-macamnya, kecuali dengan cara menjadikan tijarah.

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Wahhab⁷⁰

(Dan) zakat yang wajib dikeluarkan (dalam harta yang dimiliki dengan cara tukar-menukar) besertaan (dengan niat berbisnis), meski tidak diulang-ulang dalam setiap pembelanjaan, (seperti membeli, memberi mahar), hibah dengan imbal balik, dan menerima sewa, bukan seperti iqalah (mengurungkan akad), pengembalian barang karena cacat dan hibah tanpa imbal balik, karena tidak adanya unsur tukar-menukar, adalah sejumlah 2,5 % dari harganya.

2. Al-Muhadzdzab⁷¹

Barangsiapa wajib zakat dan mampu untuk mengeluarkannya, maka tidak boleh menundanya, sebab zakat merupakan suatu hak yang harus disalurkan kepada sesama manusia, yang mana tuntutan penyalurannya tertuju padanya, maka ia tidak boleh menundanya, seperti barang titipan ketika pemiliknya meminta kembali. Bila ia menundanya, sementara ia mampu untuk membayarnya seketika, maka ia menanggungnya.

394. Mendayagunakan Harta Zakat dalam Bentuk Usaha Ekonomi

- S. Agar kehidupan ekonomi mustahiq itu lebih meningkat bagaimana mendayagunakan harta zakat dalam bentuk usaha ekonomi?
- J. Mendayagunakan harta zakat (mal) dalam bentuk usaha ekonomi

⁷⁰ Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H), Juz I, h. 194.

⁷¹ Abu Ishaq al-Syairazi, al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid IV, h. 164.

untuk meningkatkan kehidupan ekonomi itu boleh dengan seizin lebih dahulu dari *mustahiq* itu sendiri.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Majmu' Syarh Muhadzdzab⁷²

Bagi petugas penarik zakat dan penguasa tidak boleh mengelola harta zakat yang mereka dapat, sehingga menyampaikannya kepada yang berhak. Sebab, para fakir adalah golongan orang-orang cakap yang tidak dikuasai orang lain. Maka tidak boleh mengelola harta mereka tanpa seizinnya.

Rekomendasi Kepada PBNU

- Untuk membentuk LAJNAH BAHTSUL MASAIL DINIYAH yang bersifat permanen dengan tujuan untuk membahas masalah-masalah yang mauquf dan masalah-masalah waqi'ah yang harus segera mendapat kepastian hukumnya.
- 2. Agar mengembalikan lambang NU kepada asli dengan tanpa tulisan NU.
- 3. Agar merealisasikan Keputusan Muktamar ke 27 tentang *thalaq* di Pengadilan Agama bagi umat Islam.
- 4. Agar menghubungi Pemerintah c.q. Departemen Agama untuk menjelaskan kepada jamaah haji bahwa shalatnya di pesawat itu hanya semata-mata untuk menghormati waktu.
- Perlu menyebarkan informasi secara mendalam dan teliti mengenai Bursa Efek/Pasar Modal (Saham maupun Obligasi) sehingga dapat diketahui dan dipahami bahwa dalam mu'amalah ini terdapat gharar.
- Perlu dilakukan ikhtiyar untuk menata TRI sedemikian rupa sehingga pelaksanaannya terwujud saling ridha antara muta'aqidain (dua orang/ pihak yang mengadakan transaksi) dengan tidak menyalahi ketentuan syariat.[]

⁷² Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Juz II, h. 303-304.

KEPUTUSAN MUNAS ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA Di Bandar Lampung Pada Tanggal 16 - 20 Rajab 1412 H. / 21 - 25 Januari 1992 M.

395. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdlatul Ulama 396. Masalah Bank Islam 397. Asuransi Menurut Islam

395. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdlatul Ulama

A. KETENTUAN UMUM

- 1. Yang dimaksud dengan kitab adalah *al-kutub al-mu'tabarah*, yaitu kitabkitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah *Ahlussunah wal Jamaah* (rumusan Muktamar NU ke XXVII).
- 2. Yang dimaksud dengan bermazhab secara *qauli* adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah "jadi" dalam lingkup mazhab tertentu.
- 3. Yang dimaksud dengan bermazhab secara *manhaji* adalah bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab.
- 4. Yang dimaksud dengan istinbath adalah mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan qawa'id ushuliyyah dan qawa'id fiqhiyyah.
- 5. Yang dimaksud dengan qaul adalah pendapat imam mazhab.
- 6. Yang dimaksud dengan wajah adalah pendapat ulama mazhab.
- 7. Yang dimaksud dengan taqrir jama'i adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa qaul/wajah.
- 8. Yang dimaksud dengan ilhaq (ilhaq al-masail bi nazha'iriha) adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan dengan pendapat yang sudah "jadi").
- Yang dimaksud dengan usulan masalah adalah permintaan untuk membahas suatu kasus/masalah, baik hanya berupa "judul" masalah maupun telah disertai pokok-pokok pikiran atau pula hasil pembahasan awal dengan maksud dimintakan tanggapan.
- 10. Yang dimaksud dengan pengesahan adalah pengesahan hasil suatu *Bahtsul Masail* oleh PB Syuriah NU, Munas Alim Ulama NU atau Muktamar NU.

SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUKUM

I. PROSEDUR PENJAWABAN MASALAH

Keputusan bahtsul masail di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermazhab kepada salah satu mazhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermazhab secara *qauli*. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

 Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat hanya satu qaul/wajah, maka dipakailah qaul/wajah sebagaimana diterangkan dalam ibarat tersebut.

- 2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat kitab* dan di sana terdapat lebih dari satu *qaul/wajah*, maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih satu *qaul/wajah*.
- 3. Dalam kasus tidak ada satu *qaul/wajah* sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaqul-masail bi nazha'iriha* secara *jama'i* oleh para ahlinya.
- 4. Dalam kasus tidak ada satu qaul/wajah sama sekali dan tidak mungkin dilakukan ilhaq, maka bisa dilakukan istinbath, jama'i dengan prosedur bermazhab secara manhaji oleh para ahlinya.

II. HIRARKI DAN SIFAT KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL

- Seluruh keputusan Bahtsul Masail di lingkungan NU yang diambil dengan prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luarnya mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling membatalkan.
- Suatu hasil keputusan bahtsul masail dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh Pengurus Besar Syuriah NU tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Muktamar.
- 3. Sifat keputusan dalam bahtsul masail tingkat Munas dan Muktamar adalah:
 - a. Mengesahkan rancangan keputusan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan/atau,
 - b. Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang.

III. KERANGKA ANALISIS MASALAH

Terutama dalam memecahkan masalah sosial, Bahtsul Masail hendaknya mempergunakan kerangka pembahasan masalah (yang sekaligus tercermin dalam hasil keputusan) antara lain sebagai berikut:

- 1. Analisa Masalah (sebab mengapa terjadi kasus ditinjau dari berbagai faktor):
 - a. Faktor ekonomi,
 - b. Faktor budaya,
 - c. Faktor politik,
 - d. Faktor sosial dan lainnya.
- Analisa Dampak (dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang hendak dicari hukumnya ditinjau dari berbagai aspek), antara lain:
 - a. Secara sosial ekonomi,
 - b. Secara sosial budaya,

- c. Secara sosial politik,
- d. Dan lain-lain.
- 3. Analisa Hukum (fatwa tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala bidang). Di samping putusan fiqh/yuridis formal, keputusan ini juga memperhatikan pertimbangan Islam dan hukum positif.
 - a. Status hukum (al-ahkam al-khamsah/sah batal),
 - b. Dasar dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah,
 - c. Hukum positif.
- 4. Analisa Tindakan, Peran dan Pengawasan (apa yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari fatwa di atas). Kemudian siapa saja yang akan melakukan, bagaimana, kapan, dan di mana hal itu hendak dilakukan, serta bagaimana mekanisme pemantauan agar semua berjalan sesuai dengan rencana.
 - a. Jalur politik (berusaha pada jalur kewenangan negara dengan sasaran mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah).
 - b. Jalur budaya (berusaha membangkitkan pengertian dan kesadaran masyarakat melalui berbagai media massa dan forum seperti pengajian dan lain-lain).
 - c. Jalur ekonomi (meningkatkan kesejahteraan masyarakat).
 - d. Jalur sosial lainnya (upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, lingkungan dan seterusnya).

B. PETUNJUK PELAKSANAN

I. PROSEDUR PEMILIHAN QAUL/WAJAH

- 1. Ketika dijumpai beberapa *qaul/wajah* dalam satu masalah yang sama, maka dilakukan usaha memilih salah satu pendapat.
- 2. Pemilihan salah satu pendapat dilakukan:
 - a. Dengan mengambil pendapat yang lebih *maslahat* dan/atau yang lebih kuat.
 - b. Sedapat mungkin dengan melaksanakan ketentuan Muktamar NU ke I, bahwa perbedaan pendapat diselesaikan dengan memilih:
 - 1. Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (al-Nawawi dan al-Rafi'i).
 - 2. Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi saja.
 - 3. Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i saja.
 - 4. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
 - 5. Pendapat ulama yang terpandai.
 - 6. Pendapat ulama yang paling wara'.

II. PROSEDUR ILHAO

Dalam hal ketika suatu masalah/kasus belum dipecahkan dalam kitab, maka masalah/kasus tersebut diselesaikan dengan prosedur ilhaq almasail bi nazha'iriha secara jama'i. Ilhaq dilakukan dengan memperhatikan mulhaq bih, mulhaq ilaih dan wajhul ilhaq oleh para mulhiq yang ahli.

III. PROSEDUR ISTINBATH

Dalam hal ketika tak mungkin dilakukan ilhaq karena tidak adanya mulhaq bih dan wajhul ilhaq sama sekali di dalam kitab, maka dilakukan istinbath secara jama'i, yaitu dengan mempraktekkan qawa'id ushuliyyah dan qawa'id fiqhiyyah oleh para ahlinya.

396. Masalah Bank Islam

- 1. Para musyawirin masih berbeda pendapatnya tentang hukum bunga bank konvensional sebagai berikut:
 - Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram.
 - Ada pendapat yang tidak mempersamakan antara bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh.
 - c. Ada pendapat yang mengatakan hukumnya *syubhat* (tidak indentik dengan haram).

Pendapat pertama dengan beberapa variasi antara lain sebagai berikut:

- a. Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram.
- b. Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sementara sebelum beroperasinya sistem perbankan yang Islami (tanpa bunga).
- c. Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat (hajah rajihah).

Pendapat kedua juga dengan beberapa variasi antara lain sebagai berikut:

- a. Bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram, dan bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
- b. Bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
- c. Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank hukumnya boleh.
- d. Bunga bank tidak haram, kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.
- 2. Mengingat warga NU merupakan potensi terbesar dalam pembangunan

nasional dan dalam kehidupan sosial ekonomi, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan sebagai peminjam dan pembina yang memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan keyakinan kehidupan warga NU, maka dipandang perlu mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam, yakni bank tanpa bunga dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Sebelum tercapainya cita-cita di atas, hendaknya sistem perbankan yang dijalankan sekarang ini harus segera diperbaiki.

b. Perlu diatur:

- 1. Dalam penghimpunan dana masyarakat dengan prinsip:
 - a) Al-Wadi'ah (simpanan) bersyarat atau dhaman, yang digunakan untuk menerima giro (current account) dan tabungan (saving account) serta pinjaman dari lembaga keuangan lain yang menganut sistem yang sama.
 - b) Al-Mudharabah. Dalam prakteknya, bentuk ini disebut investment account (deposito berjangka), misalnya 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya, yang pada garis besarnya dapat dinyatakan dalam:
 - 1. General investment account (GIA).
 - 2. Special investment account (SIA).
- 2. Penanaman dana dan kegiatan usaha:
 - a. Pada garis besarnya ada 3 kegiatan, yaitu:
 - Pembiayaan proyek.
 - Pembiayaan perdagangan perkongsian.
 - Pemberian jasa atas dasar upaya melalui usaha patungan, profit sharing dan sebagainya.
 - b. Untuk proyek financing system yang dapat digunakan antara lain:
 - 1. Mudhabarah muqaradhah.
 - Musyarakah syirkah.
 - 3. Murabahah.
 - 4. Pemberian kredit dengan service change (bukan bunga).
 - 5. Ijarah.
 - 6. Bai' al-dain, termasuk di dalamnya bai' al-salam.
 - 7. Al-Qardh al-hasan (pinjaman kredit tanpa bunga, tanpa service change).
 - 8. Bai' bi tsaman aajil.
 - c. Untuk aqriten participation, bank dapat membuka LC (Letter of Credit) dan pengeluaran surat jaminan. Untuk ini dapat ditempuh kegiatan atas dasar:
 - 1. Wakalah.
 - 2. Musyarakah.

- 3. Murabahah.
- 4. Ijarah.
- 5. Sewa beli.
- 6. Bai' al-salam.
- 7. Al-Bai' al-aajil.
- 8. Kafalah (garansi bank).
- 9. Warking capital financing (pembiayaan modal kerja) melalui purshase order dengan menggunakan prinsip murabahah.
- d. Untuk jasa-jasa perbankan (banking service) lainnya, seperti pengiriman dan transfer uang, jual beli valuta dan penukarannya dan lain-lain, tetap dapat dilaksanakan dengan prinsip tanpa bunga.

397. Asuransi Menurut Islam

I. Pengertian Asuransi dan Macam-Macamnya

1. Definisi Asuransi

Menurut KUHP Pasal 246:

"Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena sesuatu yang tak tertentu."

2. Macam-Macam Asuransi

- a. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan ini diadakan, baik kerugian itu berupa:
 - Kehilangan nilai pakai atau
 - Kekurangan nilainya atau
 - * Kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung.

Sifat Asuransi Kerugian

Penanggung tidak harus membayar ganti rugi kepada tertanggung kalau selama jangka waktu perjanjian obyek pertanggungan tidak mengalami bencana atau bahaya yang dipertanggungkan.

b. Asuransi jiwa adalah perjanjian tentang pembayaran uang dengan nikmat dari premi dan yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang termasuk juga perjanjian asuransi kembali uang dengan pengertian catatan dengan perjanjian dimaksud tidak termasuk perjanjian asuransi kecelakaan (yang masuk dalam asuransi kerugian) berdasarkan pasal I. a. Bab I. Staatbload 1941 - 101.

Sifat Asuransi Jiwa (yang mengandung SAVING)

Penanggung akan tetap mengembalikan jumlah uang yang diperjanjikan, kepada tertanggung:

- 1. Kalau tertanggung meninggal dalam masa berlaku perjanjian, atau,
- 2. Pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian keperluannya suka rela.
- c. Asuransi sosial, ialah asuransi yang memberikan jaminan kepada masyarakat dan diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu:
 - Asuransi kecelakaan lalu lintas (Jasa Raharja).
 - Asuransi TASPEN, ASTEK, ASKES, ASABRI.

Sifat Asuransi Sosial

- 1. Dapat bersifat asuransi kerugian.
- 2. Dapat bersifat asuransi jiwa.

II. Hukum Asuransi

1. Asuransi Sosial

Asuransi sosial diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1.1. Asuransi sosial tidak termasuk akad mu'awadhah, tetapi merupakan syirkah ta'awuniyah.
- 1.2. Diselenggarakan oleh Pemerintah. Sehingga kalau ada ruginya ditanggung oleh Pemerintah, dan kalau ada untungnya dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.

2. Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian diperbolehkan dengan syarat apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 2.1. Apabila asuransi kerugian tersebut merupakan persyaratan bagi obyek-obyek yang menjadi agunan bank.
- 2.2. Apabila asuransi kerugian tersebut tidak dapat dihindari, karena terkait oleh ketentuan-ketentuan Pemerintah, seperti asuransi untuk barang-barang yang diimport dan dieksport.

3. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa hukumnya haram kecuali apabila memenuhi ketentuanketentuan sebagai berikut:

3.1. Apabila asuransi jiwa tersebut mengandung unsur saving (tabungan).

- 3.2. Pada waktu menyerahkan uang premi, pihak tertanggung berniat untuk menabung untungnya pada pihak penanggung (perusahaan asuransi).
- 3.3. Pihak penanggung berniat menyimpan uang tabungan milik pihak tertanggung dengan cara-cara yang dibenarkan/dihalalkan oleh syariat agama Islam.
- 3.4. Apabila sebelum jatuh tempo yang telah disepakati bersama antara pihak tertanggung dan pihak penanggung seperti yang telah disebutkan dalam polis (surat perjanjian), ternyata pihak penanggung sangat memerlukan (keperluan yang bersifat darurat) uang tabungannya, maka pihak tertanggung dapat mengambil atau menarik kembali sejumlah uang simpanannya dari pihak penanggung dan pihak penanggung berkewajiban menyerahkan sejumlah uang tersebut kepadanya.
- 3.5. Apabila pada suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak dapat membayar uang premi, maka:
 - 3.5.1. Uang premi tersebut menjadi utang yang dapat diangsur oleh pihak tertanggung pada waktu-waktu pembayaran uang premi berikutnya.
 - 3.5.2. Hubungan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung dinyatakan tidak putus.
 - 3.5.3. Uang tabungan milik pihak tertanggung tidak dinyatakan hangus oleh pihak penanggung.
 - 3.5.4. Apabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal dunia, maka ahli warisnya berhak untuk mengambil sejumlah uang simpanannya, sedang pihak penanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah uang tersebut.
- 4. Para musyawirin mendukung dan menyetujui berdirinya Asuransi secara Islam.
- 5. Sebelum tercapainya cita-cita terwujudnya Asuransi Islam, hendaknya sistem perasuransian yang ada sekarang ini diperbaiki dengan menghilangkan unsur-unsur yang terlarang, sehingga tidak bertentangan dengan tuntunan ajaran Islam. Untuk itu perlu diatur langkah-langkah seperti yang ada pada komisi bank.[]

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-29 Di Cipasung Tasikmalaya Pada Tanggal 1 Rajab 1415 H. / 4 Desember 1994 M.

398. Transplantasi Organ Babi untuk Manusia 399. Kontrasepsi dengan Vaksin yang Bahan Mentahnya Sperma Lelaki 400. Menitipkan Sperma Suami dan Indung Telur ke Rahim Perempuan Lain

401. Melontar Jumrah pada Hari Tasyriq Sebelum Tergelincir Matahari 402. Intervensi Pemerintah dengan Menentukan UMR

403. Mempekerjakan Wanita pada Malam Hari di Luar Rumah 404. Akad TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi)

405. Menggusur Tanah Rakyat untuk Kepentingan Umum 406. Mencemarkan Lingkungan

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA Nomor: 02/MNU-29/1994

Tentang

PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI AHKAM/ MASAIL DINIYAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

MUKTAMAR KE-29 NAHDLATUL ULAMA

Memperhatikan:

- a. Khutbah Iftitah Pelaksana Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama:
- b. Penjelasan tentang Materi Ahkam/Bahtsul Masail yang disampaikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
- c. Bahwa Perkembangan yang selalu terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seringkali mendesakkan perubahan dan pergeseran yang menyangkut tatanilai dan pandangan yang dianut. Untuk itu, dalam fungsinya sebagai pembimbing umat, Nahdlatul Ulama dituntut untuk senantiasa dapat memberikan respon yang positif dan kreatif.
- d. Bahwa Muktamar Nahdlatul Ulama sebagai lembaga aspirasi dan Jam'iyyah menyadari sepenuhnya perlunya memperhatikan segala perkembangan masyarakat, baik mengenai masalah-masalah sosial dan ekonomi serta pembinaan dan kesejahteraan umat
- e. Permusyawaratan-permusyawaratan yang berlangsung dalam Muktamar NU ke-29 di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat
- Kesepakatan yang telah diputuskan dalam Sidang Pleno Komisi Ahkam/Masail Diniyah Sabtu tanggal 29 Rabiul Akhir 1415 H/3 Desember 1994.

Mengingat

480

- a. Ittifaq peserta Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama dalam sidang pleno tanggal 1 Rajab 1415 H/4 Desember 1994, atas laporan Komisi Ahkam/Masail Diniyyah,
- b. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 22 Desember 1993 Nomor 2055/BL01/XII/1993 tentang Penetapan Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat sebagai tempat penyelenggaraan Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama : Mengesahkan hasil-hasil Keputusan Sidang Komisi Ahkam/

Masail Diniyah seperti yang tertera dalam lampiran 1,

lampiran 2, lampiran 3, dan lampiran 4;

Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

periode 1994-1999 untuk memimpin dan mengkoordinasikan usaha dan ikhtiar dalam rangka melaksanakan keputusan-

keputusan tersebut di atas.

Ditetapkan di: Cipasung, Tasikmalaya

Tasikmalaya: 2 Rajab 1415 H

5 Desember 1994 M

PIMPINAN SIDANG PLENO XXVIII

ttd ttd ttd

KH Ma'ruf Amin DR. H. S Agil Almunawwar, MA Prof. H. Chatibul Umam
Ketua Wakil Ketua Sekretaris

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-29

Di Cipasung Tasikmalaya Pada Tanggal 1 Rajab 1415 H. / 4 Desember 1994 M.

TEAM PERUMUS KOMISI AHKAM:

- 1. Prof. KH. Chatibul Umam ... Ketua
- 2. Dr. KH. Agiel Al-Munawar, MA. ... Wakil Ketua
 - 3. KH. Aziz Masyhuri ... Sekretaris
 - 4. KH. Ghozali ... Wakil Sekretaris
 - 5. KH. Shidqi Mudzhar ... Anggota
 - 6. KH. Adzro'ie ... Anggota
 - 7. KH. Abdullah Mukhtar ... Anggota
 - 8. KH. Asyhari ... Anggota
 - 9. KH. Adnan Iskandar ... Anggota
 - 10. KH. Mas'udy ... Anggota
 - 11. KH. Tgk. Nuruzzahri ... Anggota
 - 12. KH. Utsman Hasyim ... Anggota
 - 13. KH. Farihin ... Anggota
 - 14. K.M. Ardani ... Anggota
 - 15. K. Yasin Asmuni ... Anggota
 - 16. KH.M. Najib Mohammad ... Anggota
 - 17. K. Romadlon Chotib ... Anggota

PIMPINAN SIDANG KOMISI I (MASAIL DINIYAH)

Prof. KH. Chatibul Umam ... Ketua KH. Aziz Masyhuri ... Sekretaris

398. Transplantasi Organ Babi untuk Manusia

- S. Sebuah penelitian ilmiah berhasil dipertahankan dalam forum ujian disertasi doktor di Universitas Airlangga. Hasil penelitian itu adalah bahwa tulang rawan babi efektif untuk mengganti gigi manusia. Sementara hasil pengujian tim klinis RS. Dr. Sardjito Yogyakarta membuktikan bahwa katup jantung babi paling sesuai sebagai pengganti katup jantung manusia. Bagaimana hukum transplantasi organ babi (khinzir) untuk menggantikan organ sejenis/lainnya pada manusia?
- J. 1. Transplantasi gigi dengan organ babi dan sejenisnya, hukumnya tidak boleh. Sebab masih banyak benda lain yang bisa digunakan sebagai pengganti dan karena belum sampai pada tingkat kebutuhan yang mendesak.
 - 2. Transplantasi dengan organ babi untuk menggantikan organ sejenisnya pada manusia, hukumnya tidak boleh, kecuali jika sangat diperlukan dan tidak ada organ lain yang seefektif organ babi tersebut. Maka hukumnya boleh menurut pendapat Imam Ramli, Imam Isnawi dan Imam Subki. Adapun menurut Imam Ibn Hajar, orang yang menerima transplantasi tersebut harus *ma'shum*.

Pengertian TRANSPLANTASI

Transplantasi berasal dari bahasa Inggris to transplant, yang berarti to move from one place to another, bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Adapun pengertian menurut ahli ilmu kedokteran, transplantasi itu ialah pemindahan jaringan atau organ dari tempat satu ke tempat lain. Yang dimaksud jaringan di sini ialah kumpulan sel-sel (bagian terkecil dari individu) yang sama mempunyai fungsi tertentu.

Yang dimaksud organ ialah kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi berbeda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu, seperti jantung, hati, dan lain-lain.

Pembagian TRANSPLANTASI

Melihat dari pengertian di atas, kita bisa membagi transplantasi itu pada dua bagian:

- 1. Transplantasi jaringan seperti pencangkokan cornea mata.
- 2. Transplantasi organ seperti pencangkokan ginjal, jantung, dan sebagainya.

Melihat dari hubungan genetik antara donor (pemberi jaringan atau organ yang ditransplantasikan) dan *resipien* (orang yang menerima pindahan jaringan atau organ), ada 3 macam pencangkokan:

- Auto transplantasi, yaitu transplantasi di mana donor resipiennya satu individu. Seperti seorang yang pipinya dioperasi, untuk memulihkan bentuk, diambilkan daging dari bagian badannya yang lain dalam badannya sendiri.
- 2. Homo transpalantasi, yakni di mana transplantasi itu donor dan resipiennya individu yang sama jenisnya, (jenis di sini bukan jenis kelamin, tetapi jenis manusia dengan manusia).
 - Pada homo trasplantasi ini bisa terjadi donor dan resipiennya dua individu yang masih hidup; bisa juga terjadi antara donor yang telah meninggal dunia yang disebut *cadaver* donor, sedang resipien masih hidup.
- 3. Hetero transplantasi ialah yang donor dan resipiennya dua individu yang berlainan jenisnya, seperti transplantasi yang donornya adalah hewan sedangkan resipiennya manusia.

Pada auto transplantasi hampir selalu tidak pernah mendatangkan reaksi penolakan, sehingga jaringan atau organ yang ditransplantasikan hampir selalu dapat dipertahankan oleh resipien dalam jangka waktu yang cukup lama. Pada homo transpalantasi dikenal 3 kemungkinan:

- Apabila resipien dan donor adalah saudara kembar yang berasal dari satu telur, maka transplantasi hampir selalu tidak menyebabkan reaksi penolakan. Pada golongan ini hasil transpalantasinya serupa dengan hasil transpalantasi pada auto transplantasi.
- 2. Apabila resipien dan donor adalah saudara kandung atau salah satunya adalah orang tuanya, maka reaksi penolakan pada golongan ini lebih besar dari pada golongan pertama, tetapi masih lebih kecil dari pada golongan ketiga.
- Apabila resipien dan donor adalah dua orang yang tidak ada hubungan saudara, maka kemungkinan besar transplantasi selalu menyebabkan reaksi penolakan.

Pada waktu sekarang homo transpalantasi paling sering dikerjakan dalam klinik, terlebih-lebih dengan menggunakan cadaver donor, karena:

- Kebutuhan organ dengan mudah dapat dicukupi, karena donor tidak sulit dicari.
- Dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, terutama dalam bidang immunologi, maka reaksi penolakan dapat ditekan seminimal mungkin.

Pada hetero transplantasi hampir selalu menyebabkan timbulnya reaksi penolakan yang sangat hebat dan sukar sekali diatasi. Maka itu penggunaannya masih terbatas pada binatang percobaan. Tetapi pernah diberitakan adanya percobaan mentransplantasikan kulit babi yang sudah di*iyophilisasi* untuk menutup luka bakar yang sangat luas pada manusia.

Sekarang hampir semua organ telah dapat ditransplantasikan, sekalipun sebagian masih dalam taraf menggunakan binatang percobaan, kecuali otak, karena memang tehnisnya amat sulit. Namun demikian pernah diberitakan bahwa di Rusia sudah pernah dilakukan percobaan mentransplantasikan "kepala" pada binatang dengan hasil baik.

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab1

(وَلَوْ وَصَلَ عَظْمَهُ) بِقَيْدٍ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (لِحَاجَةٍ) إِلَى وَصْلِهِ (بِنَجَسٍ) مِنْ عَظْمٍ (لَا يَصْلُحُ) لِلْوَصْلِ (غَيْرُهُ) هُوَ أُوْلَى مِنْ قَوْلِهِ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ (عُذِرَ) فِي ذَلِكَ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَهُ

(قَوْلُهُ لِحَاجَةٍ إِلَى وَصْلِهِ) كَخَلَلٍ فِي الْعُضْوِ أَوْ خَوْهِ اهْ بَرْمَاوِيُّ. وَخِيَاطِهِ الْجَرْحَ بِخِيَاطَةِ خَيْسِ ... (قَوْلُهُ مِنْ عَظْمٍ) أَيْ وَلَوْ مُغَلِّظًا اهْ بَرْمَاوِيُّ (قَوْلُهُ لاَ يَصْلُحُ لِلْوَصْلِ غَيْرُهُ) أَيْ أَصْلاً وَقْتَ إِرَادَتِهِ حَتَى لَوْ صَلْحَ غَيْرُهُ وَكَانَ هَذَا أَصْلَحَ أَوْ أَسْرَعَ إِلَى الْجَبْرِ لَمْ يَجُزُ الْوَصْلُ بِهِ خِلاقًا لِلسَّبُكِيِّ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ قَالَ أَهْلُ الْحِبْرَةِ إِنَّ لَحْمَ الْأَدَيِّ لاَ يَنْجَبِرُ سَرِيْعًا إِلاَّ بِعَظْمِ خَوْ الْكُلْبِ لِلسَّبُكِيِّ حَيْثُ قَالَ وَلَوْ قَالَ أَهْلُ الْحِبْرَةِ إِنَّ لَحْمَ الْأَدَيِّ لاَ يَنْجَبِرُ سَرِيْعًا إِلاَّ بِعَظْمِ خَوْ الْكُلْبِ لِلسَّبُكِيِّ حَيْثُ مَا لَهُ الْعَلاَمَةُ وَلَا مَعْلَمِ غَيْرُ مُغَلَّظٍ فَيْتُ مَا أَنَّهُ وَكُونِ الْمُغَلِّظِ سَرِيْعَهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الْوَلَى الْمُعَلِّظِ مَعَ كُونِهِ بَطِيءَ الْبُرُهِ وَكُونِ الْمُغَلِّظِ سَرِيْعَهُ وَالْمُعَلِّظِ مَعَ لَوْنِهِ بَطِيءَ الْبُرُهِ وَكُونِ الْمُغَلِّظِ سَرِيْعَهُ لَا لِهُ الْعَلَامَةُ وَكُونِ الْمُغَلِّظِ سَرِيْعَهُ عَلْمِ الْمُونَ وَالْمُؤْلُونَ الْمُغَلِّظِ سَرِيْعَهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ مَعَلَّظِ مَعَ كُونِهِ بَطِيءَ الْبُرُهِ وَكُونِ الْمُغَلِّظِ سَرِيْعَهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ وَلَوْنِ الْمُغَلِّطِ مَلَ هُواللَّاهِمُ وَلَوْهِ الْمُؤْمِ وَلَوْهِ الْمُؤْمِ وَلَوْلُوسُ الْمُؤْمِ وَلَالْمُ الْمُؤْمِ وَلَا اللْمُؤْمِ وَلَالْمُ الْمُؤْمِ وَلَوْهِ الْمَالِمَةُ الْعَلَيْقِ مَا لِنْجَالِهُ الْعُلَامِ مَعَ لَوْمِ الْمُؤْمِ الْمِؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْعُومِ الْمُؤْمِ وَلِهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

(Dan bila seseorang menyambung tulangnya) dengan qayyid yang saya tambahkan, (sebab butuh) menyambungnya, (dengan najis) maksudnya tulang najis, (yang tidak layak) dijadikan penyambung (tulang selainnya), dan redaksi tersebut lebih tepat dari redaksi al-Nawawi: "Karena tidak adanya tulang suci.", (maka ia dianggap udzur) dalam hal tersebut, oleh sebab itu shalatnya tetap sah besertaan tulang najis tersebut -di tubuhnya-.

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Sebab butuh menyambungnya."), seperti terdapat aib pada anggota tubuh atau semisalnya. Begitu menurut Syaikh Barmawi. Dan menjahit luka dengan benang najis ...

(Ungkapan beliau: "Maksudnya tulang najis."), maksudnya meski najis *mughalazhah*. Begitu menurut Syaikh Barmawi.

Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid I, h. 416-417.

(Ungkapan beliau: "Yang tidak layak dijadikan penyambung tulang selainnya."), maksudnya sama sekali tidak layak di waktu hendak menyambungnya. Sehingga bila ada tulang lain yang layak, dan tulang najis ini lebih layak, atau lebih cepat lekatnya, maka tidak boleh menyambung dengan tulang najis tersebut. Berbeda dengan al-Subki yang menyatakan: "Dan bila seorang pakar berkata: "Sungguh daging manusia itu tidak bisa tertambal kecuali dengan tulang semacam anjing.", maka kondisi tersebut dinilai kuat sebagai udzur (boleh menambal dengannya)." Al-'Allamah al-Khatib mengikuti pendapat itu dan al-'Allamah al-Zayyadi menetapkannya. Bila najis selain mughalazah bertentangan dengan najis mughalazah, maka cukup jelas diprioritaskan najis selain mughalazah meski sembuhnya agak lambat, dan najis mughalazah sembuhnya cepat.

2. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj²

(وَلَوْ وَصَلَ عَظْمَهُ) لِانْكِسَارِهِ مَثَلاً وَاحْتِيَاجِهِ إِلَى الْوَصْلِ (بِنَجْسِ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ) الصَّالِحِ لِلْوَصْلِ أَوْ وَجَدَهُ وَقَالَ أَهْلُ الْخُبْرَةِ أَنَّهُ لاَ يَنْفَعُ وَوَصَلَهُ بِالنَّجِسِ (فَمَعْدُورٌ) فِي ذَلِكَ فَتَصِحُ لِلْوَصْلِ أَوْ وَجَدَهُ وَقَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ أَنَّ لَحْمَ الْأَدْمِيِّ لاَ يَنْجَبِرُ سَرِيْعًا إِلاَّ بِعَظْمِ خَوْ صَلَاتُهُ مَعَهُ لِلضَّرُورَةِ ... وَلَوْ قَالَ أَهْلُ الْخِبْرَةِ أَنَّ لَحْمَ الْأَدْمِيِّ لاَ يَنْجَبِرُ سَرِيْعًا إِلاَّ بِعَظْمِ خَوْ كُلْبٍ فَيُتَجَهُ كَمَا قَالَ الْأَسْنَوِيُّ أَنَّهُ عُذْرٌ ... (وَإِلاَّ) أَيْ وَإِنْ وَصَلَ بِهِ مَعَ وُجُودِ الطَّاهِرِ الصَّالِحِ أَوْ لَمْ يَحْتَجُ إِلَى الْوَصْلِ حَرُمَ عَلَيْهِ لِتَعَدِّ بِهِ وَ (وَجَبَ) عَلَيْهِ (نَوْعُهُ) وَأُجْبِرَ عَلَى الْصَالِحِ أَوْ لَمْ يَحْفُ ضَرَرًا ظَاهِرًا)

(Dan bila seseorang menyambung tulangnya) karena pecah misalnya, dan butuh disambung, (dengan najis karena tidak ada tulang suci) yang layak) dijadikan penyambung, atau ada namun seorang pakar berkata: "Sungguh tulang suci tersebut tidak berguna.", dan ia menyambungnya dengan tulang najis, (maka ia dianggap udzur) dalam hal tersebut, oleh sebab itu shalatnya tetap sah besertaan tulang najis tersebut—di tubuhnya-, karena kondisi darurat. ... Dan bila seorang pakar berkata: "Sungguh daging manusia itu tidak bisa tertambal kecuali dengan tulang semacam anjing.", maka kondisi itu dinilai kuat sebagai udzur -boleh menambal dengannya-seperti hemat al-Isnawi, ... (dan bila tidak begitu), maksudnya bila ia menyambungnya dengan tulang najis dalam kondisi terdapat tulang suci, atau tidak butuh menyabungnya, maka penyambungan itu haram karena keteledorannya, dan (wajib) baginya (mencopot tulang najis itu), dan ia dipaksa mencopotnya (bila tidak khawatir bahaya yang nyata).

486

Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid I, h. 190-191.

3. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj³

(وَلُوْ وُصِلَ عَظْمُهُ) أَيْ عِنْدَ احْتِيَاجِهِ لَهُ بِحَسْرٍ وَخَوِهِ (بِنَجِسٍ) مِنَ الْعَظْمِ وَلَوْ مُغَلَّظًا، وَمِثْلُ ذَلِكَ بِالْأُولَى دَهْنُهُ بِمُغَلَّظٍ أَوْ رَبْطُهُ بِهِ (لِفَقْدِ الطَّاهِرِ) الصَّالِحِ لِذَلِكَ (فَمَعْدُورٌ) فِيْهِ وَمِثْلُ ذَلِكَ بِالْأُولَى دَهْنُهُ بِمُغَلَّظٍ أَوْ رَبْطُهُ بِهِ (لِفَقْدِ الطَّاهِرِ) الصَّالِحِ لِذَلِكَ (فَمَعْدُورٌ) فِيْهِ فَتَصِحُ صَلاَتُهُ مَعَهُ لِلضَّرُورَةِ وَلاَ يَلْزَمُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ نَزْعُهُ إِذَا وُجِدَ الطَّاهِرُ، أَيْ وَإِنْ لَمْ يَعَفْ مِنْ نَزْعِهِ ضَرَرًا خِلاَفًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِيْنَ

(Dan bila seseorang menyambung tulangnya), maksudnya ketika butuh menyambungnya karena pecah dan semisalnya, (dengan najis), maksudnya tulang najis, meski najis mughalazah. Dan sama dengan hal tersebut, bahkan lebih, adalah meminyaki dengan minyak najis mughalazhah, atau mengikat dengan ikat najis mughalazah, (karena tidak ada tulang suci), yang layak dijadikan penyambung, (maka ia dianggap uzdur) dalam penyambungan dengan tulang najis tersebut. Maka shalatnya sah beserta tulang najis itu karena kondisi darurat. Dan ia tidak wajib mencopotnya ketika menemukan tulang suci, seperti dalam kitab al-Raudhah. Maksudnya meski tidak khawatir bahaya, berbeda dengan sebagian ulama mutaakhkhirin.

6. Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad4

قَالَ الْحُلَبِيُّ وَيَبْقَى مَا لَوْ لَمْ يُوجَدْ صَالِحٌ غَيْرُهُ فَيَحْتَمِلُ جَوَازُ الْجُبْرِ بِعَظْمِ الْآدَمِيِّ الْمَيِّتِ كَمَا يَجُوزُ لِلْمُضْطَرِّ أَكْلُ الْمَيْتَةِ وَإِنْ لَمْ يَخْشَ إِلَّا مُبِيحَ النَّيَمُّمِ فَقَطْ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِبَقَاءِ الْعَظْمِ هُنَا فَالِامْتِهَانُ دَائِمٌ وَجَزَمَ الْمُدَابِغِيُّ عَلَى الْحُطِيبِ بِالْجُوَازِ وَنَصَّهُ فَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ إِلَّا عَظْمُ الْأَدَيِّ قُدِمَ عَظْمُ أَلْأَدَيِّ قُدِمَ عَظْمُ الْأَدَيِّ قُدِمَ الْمُسْلِمِ عَظْمُ أَخُو الْحَرْبِيِّ كَالْمُرْتَدِ ثُمَّ الدِّمِّ ثُمَّ الْمُسْلِمِ

Al-Halabi berkata: "Dan masih menyisakan kasus, andaikan tidak ditemukan tulang penambal yang layak selain tulang manusia. Maka mungkin saja boleh menambal pasien dengan tulang manusia yang telah mati. Seperti halnya diperbolehkan memakan bangkai bagi seseorang dalam kondisi darurat, meskipun dia hanya khawatir atas *udzur* yang memperbolehkan tayamum saja. Dan kasus (menambal dengan tulang manusia) tersebut terkadang dibedakan (dengan kasus memakan bangkai dalam kondisi darurat), sebab tulang yang digunakan menambal masih wujud, maka penghinaan terhadap mayit (yang diambil tulangnya) terus

Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1967), Jilid II, h. 21.

⁴ Husain al-Rasyidi, Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), h. 26-27.

terjadi. Dan *al-Madabighi* dalam catatannya atas karya al-Khatib, mantap atas diperbolehkannya menambal dengan tulang mayit, redaksinya yaitu: "Bila tidak ada yang layak kecuali tulang manusia, maka tulang *kafir harbi* seperti orang murtad harus didahulukan, kemudian tulang *kafir dzimmi*, dan baru tulang mayit muslim.

- 4. Referensi Lain
 - a. Tuhfah al-Muhtaj, Juz III, h. 125.
 - b. Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib, Juz I, h. 172.
 - c. Hasyiyah Qulyubi wa 'Umairah, Juz I, h. 182.

399. Kontrasepsi dengan Vaksin yang Bahan Mentahnya Sperma Lelaki

S. Sebuah rekayasa laboratoris telah mampu menghasilkan vaksin yang bahan mentahnya adalah sperma laki-laki. Vaksin tersebut dimanfaatkan untuk proses pengebalan (imunisasi), agar wanita yang telah memperoleh injeksi vaksin tersebut diharapkan tidak hamil.

Dalam rangka menyukseskan program KB, bolehkah melakukan kontrasepsi (menghambat kehamilan) dengan menggunakan cara tersebut?

J. Melakukan kontrasepsi (menghambat kehamilan) dengan cara imunisasi menggunakan injeksi vaksin yang bahan mentahnya sperma lakilaki adalah boleh, karena sifat *istiqdzar* (menjijikkan) sudah luntur dan sudah hilang.

Catatan: Tidak boleh mengeluarkan air sperma dengan cara yang tidak *muhtaram*.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib⁵

(قَوْلُهُ وَلاَ لِاسْتِقْدَارِهَا) أَيْ وَلَيْسَ تَحْرِيْمُ تَنَاوُلِهَا لِاسْتِقْدَارِهَا وَهَذَا الْقَيِّدُ لِإِخْرَاجِ الْمَنِيِّ وَخَوْهِ مِنَ الْمُخَاطِ وَالْبُرَّاقِ كَمَا سَيَذْكُرُهُ فَإِنَّهُ وَإِنْ حَرُمَ تَنَاوُلُهُ لَكِنْ لِاسْتِقْدَارِهِ فَلَيْسَ بِنَجَسٍ، وَمَحَلُّ حُرْمَةِ تَنَاوُلِهِ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَعْدَنِهِ

(Ungkapan Syaikh Ibn Qasim al-Ghazi: "Dan bukan karena menjijikkannya."), maksudnya keharaman mengkonsumsinya bukanlah karena menjijikkannya. Ketentuan ini untuk mengecualikan mani dan semisalnya, yaitu ingus dan ludah seperti yang akan disebutkannya.

488

⁵ Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid I, h. 103.

Sebab, meski air mani haram dikonsumsi, namun karena menjijikkannya. Maka air mani tidak najis, dan keharaman mengkonsumsinya itu bila keluar dari tempat keluarnya.

2. Tuhfah al-Thullab dan Hasyiyah al-Syarqawi6

(وَإِنْ كَانَ) غَيْرُ الْمُسْكِرِ (طَاهِرًا فَإِنْ كَانَ مُضِرًّا) بِمَنْ يَتَنَاوَلُهُ كَالسُّمِّ (أَوْ مُسْتَقْذَرًا غَالِبًا كَمُخَاطٍ فَحَرَامٌ) تَنَاوَلُهُ لِتَضَرُّرِهِ بِهِ وَاسْتِقْذَارِهِ لَهُ ... (فَإِنِ انْتَفَى ذَلِكَ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِمَّا يَقْتَضِيْ التَّحْرِيْمَ (فَحَلاَلُ)

(Dan bila) minuman yang tidak memabukkan itu (suci, maka bila membahayakan) pada orang yang mengkonsumsinya seperti racun, (atau secara umum menjijikkan seperti ingus, maka haram) mengkonsumsinya karena bahaya dan menjijikkannya ... (Bila hal itu tidak ada), maksudnya unsur yang membuatnya haram, (maka halal).

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Unsur yang membuatnya haram."), yaitu ada 4, yaitu memabukkan, menjijikkan, membahayakan dan najis.

- 4. Referensi Lain
 - a. Al-Syarqawi, Juz II, h. 332.
 - b. Al-Majmu', Juz II, h. 556.
 - c. Hasyiyah al-Syarwani 'ala al-Tuhfah, Juz VIII, h. 241.

400. Menitipkan Sperma Suami dan Indung Telur ke Rahim Perempuan Lain

- S. Pasangan suami istri yang cukup subur dan sehat menghendaki seorang anak. Namun ternyata kondisi rahim sang istri tidak cukup siap untuk mengandung seorang bayi. Tetapi dengan kemajuan teknologi modern, keinginan pasangan tersebut dapat diwujudkan dengan cara menitipkan sperma suami dan indung telur istri ke rahim perempuan lain dengan akad sewa.
- a. Bagaimana hukum menyewakan rahim untuk kepentingan tersebut di atas?
- b. Kepada siapa nisbah anak tersebut dalam hal nasab, kewalian, hukum waris dan hadhanah?

⁶ Zakarita al-Anshari dan Abdullah al-Syarqawi, Tuhfah al-Thullab dan Hasyiyah al-Syarqawi, (Indonesia: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t. th), Juz II, h. 451.

J. a. Tidak sah dan haram.

- b. 1. Dalam hal nasab, kewalian, waris dan hadhanah tidak bisa dinisbatkan kepada pemilik sperma menurut Imam Ibn Hajar, karena masuknya tidak muhtaram.
 - 2. Yang menjadi ibu secara syar'i adalah:
 - 2.1. Apabila sperma dan indung telur yang ditanam itu tidak memungkinkan campur dengan indung telur pemilik rahim, maka yang menjadi ik 1 anak tersebut adalah pemilik indung telur.
 - 2.2. Jika dimungkinkan adanya percampuran indung telur dari pemilik rahim, maka ibu anak itu adalah pemilik rahim (yang melahirkan).

Keterangan, dari kitab:

1. Tafsir al-Qur'an al-'Azhim7

وَقَالَ أَبُوْ بَكِرِ بْنِ أَبِي الدُّنْيَا حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا بَقَيَّةُ عَنْ أَبِيْ بَكِرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ مَالِكِ الطَّائِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَّا مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلُ فِي رَحْمٍ لاَ يَحِلُ لَهُ

Dan Abu Bakr bin Abi al-Dunya berkata: "'Ammar bin Nashr bercerita kepadaku: "Baqayyah bercerita kepadaku, dari Abu Bakr bin Abi Maryam, dari al-Haitsam bin Malik al-Tha'i dari Nabi Saw., beliau bersabda: "Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dibandingkan seseorang yang menaruh spermanya di rahim wanita yang tidak halal baginya."

2. Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh8

Dan diriwayatkan dari Rasulullah Saw.: "Barangsiapa yang beriman pada Allah Swt. dan hari kiamat, maka jangan sekali-kali mengalirkan spermanya (berzina) di tanaman (istri) saudaranya." (F. 3. Ibn Syaibah)

3. Hasyiyah 'Ali Sibramallisi 'ala Nihayah al-Muhtaj' (قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ مَسَحَ ذَكَرَهُ) أَفْهَمَ أَنَّهُ لَوْ أَلْقَتْ امْرَأَةً مُضْغَةً أَوْ عَلَقَةً فَاسْتَدْخَلَتْهَا امْرَأَةً أُخْرَى حُرَّةً أَوْ أَمَةُ فَحَلَّتُهَا الْحُيَاةُ وَاسْتَمَرَّتْ حَتَّى وَضَعَتْهَا الْمَرْأَةُ وَلَدًا لَا يَصُونُ ابْنَا لِلثَّانِيَةِ وَلَا

⁷ Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid III, h. 327.

⁸ Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), Juz II, h. 25.

⁹ Ali Syibramall si, Hasyiyah 'Ali Sibramallisi pada Nihayah al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 431.

تَصِيرُ مُسْتَوْلَدَةً لِلْوَاطِئِ لَوْ كَانَتْ أَمَةً لِأَنَّ الْوَلَدَ لَمْ يَنْعَقِدْ مِنْ مَنِيٍّ الْوَاطِئِ وَمَنِيَّهَا بَلْ مِنْ مَنِيٍّ الْوَاطِئ وَالْمَوْطُوءَةِ فَهُوَ وَلَدُّ لَهُمَا

(Pernyataan Syaikh Syamsuddin al-Ramli: "Begitu pula bila seorang lelaki mengusap penisnya.") memberi pemahaman bahwa bila seorang wanita melahirkan segumpal daging atau darah, lalu oleh wanita merdeka atau wanita budak lain dimasukkan ke rahimnya, lalu berkembang hidup dan terus hidup sehingga ia melahirkannya berupa bayi, maka bayi itu tidak menjadi anak bagi wanita kedua itu, dan si wanita budak tidak menjadi mustauladah lelaki yang menyetubuhi, bila wanita yang disetubuhi adalah seorang budak. Sebab bayi itu tidak berasal dari mani si lelaki yang menyetubuhi dan mani si wanita budak, namun dari si lelaki yang menyetubuhi dan perempuan yang disetubuhi -wanita pertama-. Maka ia adalah anak mereka berdua.

4. Hasyiyah al-'Ubbadi 10

(قَوْلُهُ وَاسْتِدْخَالِهِ) خِلاَفًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَلاَ أَثَرَ لِوَقْتِ اسْتِدْخَالِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ وَإِنْ نَقَلَ الْمَاوَرْدِيُّ عَنِ الْأَصْحَابِ اعْتِبَارَ حَالِةِ الْإِنْزَالِ وَالاسْتِدْخَالِ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَوِ اسْتَنْجَى جِحَجَرٍ فَأَمْنَى ثُمَّ اسْتَدْخَلَتْهُ أَجْنَبِيَّةً عَالِمَةٌ بِالْحَالِ أَوْ أَنْزَلَ فِيْ زَوْجَتِهِ فَسَاحَقَتْ بِنْتَهُ مَثَلاً فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لَحِقَهُ

(Pernyataan Ibn Hajar al-Haitami: "Dan waktu memasukkan mani.") berbeda dengan kitab Nihayah al-Muhtaj, redaksinya yaitu: "Dan waktu memasukkan mani itu tidak berdampak apapun, seperti yang fatwa al-Walid -Syihabuddin al-Ramli-, meski al-Mawardi mengutip pendapat Ashhab Syafi'i tentang pertimbangan waktu keluar dan masuknya mani. Sebab mereka terang-terangan berkata: "Bila seorang laki-laki bercebok dengan batu, lalu keluar mani. Lalu oleh seorang perempuan lain yang mengetahui peristiwa tersebut mani itu dimasukkan dalam rahimnya, atau si lelaki itu mengeluarkan mani di rahim istrinya, kemudian si istri melakukan lesbi (hubungan seksual sesama jenis), umpamanya dengan anak perempuan si lelaki itu, kemudian si anak perempuan itu melahirkan bayi, maka nasab bayi itu ditemukan pada si lelaki itu.

5. Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib 11

Ahmad bin Qasim al-'Ubbadi, Hawasayi al-Ubbadi pada Hawasyai al-Syarwani wa al-'Ubbadi, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid IX, h. 328.

¹¹ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairamai, Hasyiyah Sulaiman al-Bujairami 'ala al-Khatib, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid IV, h. 298.

الْحَاصِلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَنِيِّ الْمُحْتَرَمِ حَالَ خُرُوْجِهِ فَقَطْ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ م ر وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْتَرَمِ حَالَ الدُّخُوْلِ

Al-hasil, maksud sperma *muhtaram* (terhomat) adalah saat keluarnya saja, menurut yang dipedomani al-Ramli, meskipun tidak *muhtaram* saat masuk (ke vagina wanita lain).

- 6. Referensi Lain
 - a. Faidh al-Qadir Syarh al-Jami' al-Shaghir, Juz VI, h. 211.
 - b. I'anatuth Thalibin, Juz IV, h. 38.
 - c. Hasyiyah al-Syarwani, Juz VIII, h. 231.
 - d. Al-Bajuri, Juz II, h. 26, 181dan 172.
 - e. Al-Bujairimi 'alal Khatib, Juz IV, h. 38.
 - f. Bughyatul Mustarsyidin, Juz, h. 238.
 - g. Tuhfatul Muhtaj, Juz VII, h. 299 dan 303.
 - h. Asnal Mathalib, Juz VII, h. 389.
 - i. Nihayatul Muhtaj, Juz VIII, h. 421.
 - j. Fathul Wahhab, Juz I, h. 247.
 - k. Al-Bujairimi 'alal Manhaj, Juz IV, h. 178.
 - l. Al-Muhadzdzab, Juz I, h. 349.
 - m. Tafsir al-Razi, Juz X, h. 28.
 - n. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz VII, h. 681.

401. Melontar Jumrah pada Hari Tasyriq Sebelum Tergelincir Matahari

- S. Salah satu sebab dari tragedi "jamarat" di Mina beberapa waktu lalu karena adanya asumsi di kalangan masyarakat umum bahwa melontar jumrah harus dilakukan setelah zawalusy syamsi. Sementara itu, jumlah hujjaj yang bertambah terus tiap tahun tidak dapat diimbangi dengan penyediaan fasilitas yang cukup. Tragedi jamarat terjadi, karena semua orang hendak melontar jumrah setelah zawal, sementara tempat melontar jumrah tidak cukup luas untuk menampung jumlah hujjaj yang begitu besar, sehingga terjadilah desakdesakan. Bagaimana hukum melontar jumrah Qabl al-zawal?
- J. Hukum melontar jumrah *qabl al-zawal* terhitung sejak terbit fajar adalah diperbolehkan menurut Imam Rafi'i yang didukung oleh Imam Isnawi. Qaul tersebut dinilai *dha'if*, namun boleh diamalkan.

Keterangan, dari kitab:

1. Tuhfah al-Muhtaj12

Kemantapan al-Rafi'i dengan kebolehan melempar jumrah qabl al-zawal (sebelum matahari condong ke barat) seperti al-Imam al-Haramain itu pendapat dha'if (lemah), meski dipedomani oleh al-Isnawi dan ia kira pendapat itu adalah pendapat populer dalam mazhab. Maka berdasar pendapat dha'if tersebut, semestinya boleh melempar jumrah mulai fajar.

2. Syarh Bafadhal¹³

Dan menurut satu pendapat, sah melempar jumrah qabl al-zawal bagi orang hadhir (yang tinggal di makkah) besertaan hukum makruh. Al-Rafi'i mantap dengan pendapat itu dan ia nilai mu'tamad.

3. Fath al-Mujib fi Syarh Mukhtashar al-Khatib¹⁴

Waktu melempar jumrah 'aqabah itu dimulai tengah malam hari kurban, berbeda dengan melempar jumrah pada hari tasyriq (11, 12, 13 Dzu al-Hijjah), maka waktu masuknya dengan matahari condong ke barat dengan kesepakatan Imam mazhab empat. Imam al-Haramain dan al-Rafi'i memperbolehkan pelemparan jumrah hari tasyriq pada qabl al-zawal (sebelum matahari condong ke barat), dan al-Isnawi menilainya mu'tamad. Pendapat itu adalah pendapat dha'if.

4. I'anah al-Thalibin15

وَالْمُعْتَمَدُ جَوَازُهُ فِيْهَا أَيْضًا وَجَوَازُهُ قَبْلَ الزَّوَالِ بَلْ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ وَتَبِعَهُ ٱلإِسْنَوِيُّ وَقَالَ أَنَّهُ

¹² Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada Hawasyai al-Syirwani wa al-'Ubbadi, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th), Jilid IV, h. 138.

Bafadhal, Syarh Bafadhal pada Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: Al-Amirah al-Syarafiyah, 1326 H), Jilid IV, h. 831.

¹⁴ Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, Fath al-Mujib fi Syarh Mukhtashar al-Khatib pada 'Umdah al-Abrar, (Makah: Musthafa al-Amirah, t. th.), h. 22.

Muhammad bin Syaththa al-Dimyati, *l'anah al-Thalibin*, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th) Juz II, h. 307.

الْمَعْرُوْفُ بِجَوَازِ رَفِي كُلِّ يَوْمٍ قَبْلَ الزَّوَالِ وَعَلَيْهِ فَيَدْخُلُ بِالْفَجْرِ

Dan pendapat mu'tamad adalah boleh melempar jumrah (hari tasyriq yang belum dilempar pada waktunya) di malam harinya pula, dan boleh melemparnya qabl al-zawal. Bahkan, al- Rafi'i mantap dengannya dan al-Isnawi mengikutinya. Al-Isnawi berkata: "Pendapat yang populer adalah boleh melempar jumrah masing-masing hari qabl al-zawal, maka waktu melempar jumrah masuk dengan terbitnya fajar.

5. Bughyah al-Mustarsyidin¹⁶

(فَاثِدَةُ) قَالَ فِيْ فَتَاوَى ابْنِ حَجَرٍ لَيْسَ لِمَنْ قَرَأَ كِتَابًا وَلَمْ يَتَأَهَّلْ لِلإِفْتَاءِ أَنْ يُفْتِيَ إِلاَّ فِيْمَا عُلِمَ مِنْ مَذْهَبِهِ عِلْمًا جَازِمًا كُوجُوْبِ النَّيَّةِ فِي الْوُضُوْءِ وَنَقْضِهِ بِمَسِّ الذَّكْرِ نَعَمْ إِنْ نَقَلَ لَهُ الْحُصْمَ عَنْ مُفْتٍ آخَرَ أَوْ عَنْ كِتَابٍ مَوْنُوْقٍ بِهِ جَازَ وَهُوَ نَاقِلٌ لاَ مُفْتٍ

(Faidah) Dalam al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra Ibn Hajar al-Haitami berkata: "Bagi orang yang bisa membaca suatu kitab dan tidak punya keahlian berfatwa maka tidak boleh berfatwa, kecuali dalam hal yang diketahui dari madzhabnya dengan pengetahuan yang mantap, seperti kewajiban niat dalam wudhu dan batalnya wudhu sebab menyentuh penis. Memang begitu, namun bila ia mengutip untuk orang awam suatu hukum dari seorang mufti lain atau dari kitab terpercaya, maka boleh, namun ia sebagai pengutip (saja), bukan mufti.

5. Syarh al-Mahalli 'ala Jam' al-Jawami'17

(Dan yang keempat dari pendapat tentang berfatwa) adalah bagi *muqallid* -bukan mujtahid- boleh berfatwa, (meski ia tidak mampu) mampu mentafri'- menggali hukum dari *nash* imam madzhabnya- dan mentarjih -menilai unggul suatu pendapat dari selainnya-, (sebab ia merupakan pengutip), hukum yang difatwakan dari imamnya, meski ia tidak menjelaskan pengutipannya dari imam tersebut. Hal seperti ini terjadi di masa-masa belakangan ini.

6. Al-Fawaid al-Makkiyah18

494

Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 7.

¹⁷ Al-Mahalli, Syarh al-Mahalli 'ala Jam' al-Jawami' pada Hasyiyah al-'Aththar, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), Juz II h. 438.

¹⁸ Alawi al-Saqaf, al-Fawaid al-Makkiyah pada Sab'ah Kutub Mufidah, h. 44 dan 61.

وَكَذَا يَجُوْزُ الْأَخْذُ وَالْعَمَلُ لِنَفْسِهِ بِالْأَقْوَالِ وَالطُّرُقِ وَالْوُجُوْهِ الضَّعِيْفَةِ إِلاَّ بِمُقَابِلِ الصَّحِيْجِ فَإِنَّ الْغَالِبَ فِيْهِ فَاسِدُ. وَيَجُوْزُ الْإِفْتَاءُ بِهِ لِلْغَيْرِ بِمَعْنَى الْإِرْشَادِ

Demikian halnya boleh mengambil dan mengamalkan untuk diri sendiri qaul-qaul, riwayat-riwayat dan wajh-wajh dha'if, kecuali dengan muqabil alshahih. Sebab, pada umumnya dalam muqabil al-shahih itu adalah pendapat yang fasid (rusak) dalam merupakan pendapat yang rusak atau tidak benar. Dan boleh berfatwa dengan muqabil al-shahih dalam pengertian memberi petunjuk.

7. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari¹⁹

Dan dalam kesunnahan melempar jumrah hari nahr (10 Dzu al-Hijjah) setelah zawal, Atha' dan Thawus tidak sepakat. Mereka berdua berkata: "Tidak boleh melempar jumrah sebelum zawal secara mutlak. Ulama madzhab Hanafiyah memberikan dispensasi boleh melempar jumrah pada hari nafr (12 dan 13 Dzul al-Hijjah) sebelum zawal. Dan Ishaq berkata: "Jika seseorang melempar jumrah sebelum al-zawal, ia harus mengulangi kembali, kecuali pada hari ke tiga, maka akan mencukupinya (sah)."

- 8. Referensi Lain
 - a. Itsmid al-'Ainain, h. 69.
 - b. Al-Tsimar al-Yani'ah, h. 72.
 - c. Al-Hawasyi al-Madaniyah, Juz II, h. 260.
 - d. Syarh Muslim, Juz V, h. 678.
 - e. Al-Majmu', Juz VIII, h. 282.
 - f. Tarsyih al-Mustafidin, h. 172.

REKOMENDASI UNTUK PBNU

Berkenaan dengan keputusan Dar al-Ifta li Haiat Kibar al-Ulama Kerajaan Arab Saudi perihal waktu pelaksanaan lempar jumrah. Demi untuk menjaga keselamatan (perlindungan jiwa) jamaah haji Indonesia, hendaknya PBNU mengupayakan agar pemerintah Arab Saudi memperbolehkan dan memberi kesempatan kepada jamaah haji Indonesia untuk melempar jumrah sebelum zawal (tergelincir) matahari.

Hal ini mengingat:

¹⁹ Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989), Juz I, h. 576.

- 1. Fatwa ulama fiqh mazhab Syafi'i (Ibn Hajar al-Haitami dan lainlain) yang memperkenankan pelaksanaan jumrah sebelum zawal.
- 2. Para petugas Arab Saudi sering kali mendatangi para jamaah di *maktab*nya masing-masing untuk melarang pelaksanaan lempar jumrah sebelum *zawal*.

402. Intervensi Pemerintah dengan Menentukan UMR

- S. Seiring dengan meningkatnya proses industrialisasi di negara kita, akhirakhir ini muncul banyak sekali masalah perburuhan seperti pemogokan, PHK, demonstrasi buruh memprotes masalah itu biasanya muncul dikarenakan sistem upah di negara kita belum sesuai dengan tuntutan kebutuhan minimum para buruh. Sebab lain, adalah karena para pemilik pabrik tidak menerapkan UMR (Upah Minimum Regional) yang telah ditetapkan oleh pemerintah secara benar, sehingga muncul konflik antara buruh dan pengusaha. Sementara itu konsep fiqh mengenai perburuhan belum begitu jelas, bahkan parsial.
- a. Bagaimana konsep fiqh mengenai hubungan perburuhan, khususnya mengenai pengupahan?
- b. Tepatkah Pemerintah melakukan intervensi dengan menentukan UMR (Upah Minimum Regional) tersebut?
- c. Bila terjadi gejolak, maka diadakan islah di antara kedua belah pihak, sedangkan pemerintah yang menjadi hakimnya dengan syarat-syarat yang telah ada?
- J. a. Konsep fiqh mengenai upah buruh ada dua macam, yaitu:
 - 1. *Ujrah Musamma* yang ditentukan oleh kesepakatan kedua belah pihak (majikan dan buruh).
 - 2. Ujrah Mitsl yang disesuaikan dengan upah standart umum.
 - b. Pemerintah dalam menentukan UMR adalah:
 - 1. Menurut Jumhur tidak boleh.
 - 2. Menurut pendapat yang *dha'if* boleh, dan wajib diikuti apabila *ada maslahah 'ammah*.
 - c. Bila terjadi gejolak, maka diadakan islah antara kedua belah pihak. Sedangkan pemerintah yang menjadi hakim dengan syarat-syarat yang telah ada.

Keterangan, dari kitab:

1. Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'²⁰

²⁰ Mahmud bin Ahmad al-Kasani, Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syarai', (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Jilid IV, h. 179.

وَأَمَّا شَرُطُ الصَّحَةِ فَلِصِحَّةِ هَذَا الْعَقْدِ شَرَائِطُ بَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْعَاقِدِ ... وَأَمَّا الَّذِيْ يَرْجِعُ إِلَى الْعَاقِدِ فَرِضَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (يَا ٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ يَرْجِعُ إِلَى الْعَاقِدِ فَرِضَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ (يَا ٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمُ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ يَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) وَالإِجَارَةُ يَجَارَةً لِأَنَ التِّجَارَة تَبَادُلُ الْمَالِ بِالْمَالِ وَالإِجَارَةُ كَذَلِكَ وَلِهَذَا يَمْلِكُهَا الْمَأْذُونُ وَأَنَّهُ لاَ يَمْلِكُ مَا لَيْسَ بِتِجَارَة فَنَبَدَ أَنَّ الْإِجَارَةَ يَجَارَةً فَذَخَلَتْ عَنْ النَّي اللَّهُ لاَ يَمْلِكُ مَالُ امْرِئُ مُسلِم إِلاَّ فَيَا الْمَالُونُ اللَّهِي الْمَالِ وَالْمَوْلِ وَالْحَتَاءِ لِأَنَّ هَذِهِ الْعَوَارِضَ تُنَافِي الرِّضَا فَتَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِجَارَةِ

Adapun syarat keabsahan, maka keabsahan akad ijarah (persewaan) ini mempunyai beberapa syarat, sebagiannya terkait dengan pelaku akad. ... Adapun syarat yang terkait dengan pelaku akad adalah kerelaan kedua pelaku akad, karena firman Allah SWT: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling rela di antara kamu." (QS. al-Nisa': 29). Ijarah adalah tijarah. Sebab tijarah adalah menukar harta dengan harta lain, dan ijarah demikian itu. Oleh karenanya, budak yang diizini berbisnis boleh melakukan akad ijarah, padahal ia tidak boleh melakukan akad melainkan dengan cara tijarah. Maka bisa disimpulkan bahwa ijarah adalah tijarah. Maka tijarah masuk dalam cakupan nash al-Qur'an. Dan Nabi Saw. bersabda: "Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya." Maka akad ijarah tidak sah besertaan dengan paksaan, gurauan, dan kesalahan (ketidak sengajaan). Sebab, hal-hal tersebut menafikan kerelaan pelaku akad, maka mencegah keabsahan ijarah.

2. Fath al-'Alam bi Syarh al-A'lam bi Ahadits al-Ahkam 21 عَنْ أَنْسٍ ﴿ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّهِ عَلَى فَسَعَرْ لَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَى إِنَّ اللّهَ الْمُسْعِرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُوْا أَنْ أَلْقَى اللّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدُ مِنْكُمْ يَظْلُبُنِي بِظُلْمٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ وَلَيْسَ أَحَدُ مِنْكُمْ يَظْلُبُنِي بِظُلْمٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَصَحَّحَهُ التَّسْعِيْرِ وَلَوْ فِي وَقْتِ الْغَلاَءِ وَالْمَعْنَى فِيهِ التَّضْيِيقُ التَّرْمِذِيُ وَالْمَالِ مِثَالُ فَغَيْرُهُا مِنَ السِّعْرُ بِالرُّخْصِ وَعَلَى الْمُشْتَرِيْنَ إِنْ قَدَرَ بِغَيْرِ الرُّخْصِ وَعَلَى الْمُشْتَرِيْنَ إِنْ قَدَرَ بِغَيْرِ الرَّخْصِ وَعَلَى الْمُشْتَرِيْنَ إِنْ قَدَرَ بِغَيْرِ الرُّخْصِ وَعَلَى الْمُشْتَرِيْنَ إِنْ قَدَرَ بِغَيْرِ الرَّخْصِ وَعَلَى الْمُشْتَرِيْنَ إِنْ قَدَرَ بِغَيْرِ الرَّخْصِ وَعَلْمُ الْمَالِمِ مِثَالُ فَغَيْرُهَا مِنَ الْعَرَضِ وَغَيْرِهِ مِثْلُهَا

²¹ Zakaria al-Anshari, Fath al-'Alam bi Syarh al-A'lam bi Ahadits al-Ahkam, h. 432.

Diriwayatkan dari Anas Ra., pada masa Rasulullah Saw. di kota Madinah al-Musyarrafah pernah terjadi kenaikan harga-harga barang: "Maka tetapkanlah standar harga barang bagi kami wahai Rasulullah Saw.! Lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah Swt. adalah Dzat Yang Maha Menetapkan harga, Yang Maha Memegang, Yang Maha Melepas, dan Yang Maha Memberikan rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah Swt. tanpa seorangpun dari kalian yang menuntutku dengan tuduhan kezaliman yang terkait darah (jiwa) dan harta." (HR. Abu Dawud dan selainnya, al-Tirmidzi dan Ibn Hibban menshahihkannya).

Dalam hadits itu terdapat pengharaman penetapan harga, meski saat kondisi harga-harga sedang naik. 'Illat dalam hadits tersebut adalah merugikan pedagang bila harga ditetapkan murah, dan merugikan pembeli bila harga ditetapkan tidak murah. Sedangkan penyebutan (kezaliman) darah dan harta merupakan contoh, maka selain keduanya itu sama (Nabi Saw. juga mengharap selamat dari tuntutan kezaliman yang terkait dengan selain darah dan harta).

3. Al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi'22

وَلاَ يَنْبَغِيْ لِلسَّلْطَانِ أَنْ يُسَعِّرَ عَلَى النَّاسِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لاَ تُسَعِّرُوْا فَإِنَّ الله الْمُسْعِرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ، وَلِأَنَّ الثَّمَنَ حَقُّ الْعَاقِدِ فَإِلَيْهِ تَقْدِيْرُهُ فَلاَ يَنْبَغِيْ لِلإِمَامِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِحَقِّهِ إِلاَّ إِذَا تَعَلَّقَ بِهِ ضَرَرُ الْعَامَّةِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ

Penguasa tidak berhak menetapkan harga bagi masyarakat sesuai sabda Rasulullah Saw.: "Janganlah kalian menetapkan harga, sesungguhnya hanya Allah Swt. Dzat Yang Maha Menetapkan harga, Dzat Yang Maha Memegang dan Maha Melepas." Selain itu, karena harga suatu barang itu adalah hak pihak yang bertransaksi, maka ketentuan harga diserahkan kepadanya. Maka penguasa tidak boleh mencampuri haknya, kecuali bila terkait dengan keadaan bahaya bagi masyarakat umum, sesuai apa yang kami jelaskan. 4. Al-Mughni²³

وَلَيْسَ لِلاِمَامِ أَنْ يُسَعِّرَ عَلَى النَّاسِ بَلْ يَبِيْعُ النَّاسُ أَمْوَالَهُمْ عَلَى مَا يَخْتَارُوْنَ وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيُّ

Dan bagi penguasa tidak boleh menentukan harga bagi masyarakat. Namun (membiarkan) masyarakat memperjualbelikan harta mereka sesuai

²² Ali al-Marghinani, al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi', (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, t. th.), Jilid IV, h. 94.

²³ Ibn Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni, (Beirut dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), Jilid IV, h. 303.

pada harga yang dipilihnya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i.

5. Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin²⁴

الْقِسْمُ الثَّانِي فِي الْمَنَاهِيْ مَا لاَ يَقْتَضِيْ الْفَسَادَ ... وَمِنْهَا التَّسْعِيْرُ وَهُوَ حَرَامٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ عَلَى الصَّحِيْحِ. وَالثَّانِي يَجُوْرُ فِيْ وَقْتِ الْفَلاَءِ دُوْنَ الرُّخْصِ. قَالَ: وَإِذَا سَعَرَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ فَخَالَفَ اسْتَحَقَّ التَّعْزِيْرَ

Bagian kedua tentang larangan-larangan yang tidak menimbulkan kerusakan ... di antaranya adalah penetapan harga. Han itu haram di setiap waktu menurut pendapat *al-shahih*. Pendapat kedua menyatakan penetapan harga itu boleh di saat harga barang sedang mahal, bukan di saat sedang murah. Jika penguasa sudah menetapkan harga di saat harga sedang mahal, lalu ada yang melanggarnya, maka ia berhak dihukum.

5. 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud²⁵

قَالَ الْعَلاَّمَةُ أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ شَمْسُ الْحُقِّ أَبَادِيْ فِيْ شَرْحِ هَذَا الْحَدِيْثِ وَقَدِ اسْتُدِلَّ بِالْحُدِيْثِ وَمَا وَرَدَ فِيْ مَعْنَاهُ عَلَى تَحْرِيْمِ التَّسْعِيْرِ وَإِنَّهُ مَظْلَمَةٌ وَوَجْهُهُ أَنَّ النَّاسَ مُسَلِّطُوْنَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَالتَّسْعِيْرُ حِجْرً عَلَيْهِمْ وَالْإِمَامُ مَأْمُورُ بِرِعَايَةٍ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَيْسَ نَظُرُهُ فِيْ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَيْسَ نَظْرُهُ فِيْ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَيْسَ نَظْرُهُ فِيْ مَصْلَحَةِ الْبَائِعِ بِتَوْفِيْرِ الثَّمَنِ فَلْهُ وَإِنَّا مُ صَاحِبِ وَإِذَا تَقَابَلَ الْأَمْرَانِ وَجَبَ تَمْكِيْنُ الْفَرِيْقَيْنِ مِنَ الاجْتِهَادِ لِأَنْفُسِهِمْ وَإِلْزَامُ صَاحِبِ السَّلْعَةِ أَنْ لاَ يَبِيْعَ بِمَا لاَ يَرْضَى بِهِ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى "إِلاَّ أَنْ تَكُونَ يَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ" السَّلْعَةِ أَنْ لاَ يَبِيْعَ بِمَا لاَ يَرْضَى بِهِ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى "إِلاَّ أَنْ تَكُونَ يَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ" وَلِمَا لاَ يَرْضَى بِهِ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى "إِلاَّ أَنْ تَكُونَ يَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ" وَلِي هَذَا ذَهَبَ جُمُهُورُ الْعُلَمَاء

Al-'Allamah Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq Abadi dalam menjelaskan hadits ini mengatakan: "Hadits itu dan hadits-hadits lain yang senada dijadikan dalil bagi keharaman penetapan harga, dan bahwa penetapan harga merupakan tindakan zalim. Hal ini mengingat, bahwa masyarakat merupakan pihak yang menguasai harta, dan penetapan harga merupakan pembatasan kewenangan. Sementara penguasa diperintahkan melindungi kemaslahatan umat Islam. Tidaklah pandangannya tentang kemaslahatan pembeli dengan memurahkan harga itu lebih utama dari pada pandangannya tentang kemaslahatan penjual dengan meninggikan

²⁴ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, (Beirut: al-Maktab al-Islami, t. th.), Jilid III, h. 211.

²⁵ Muhammad Syamsul Haq Abadi, 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H), Jilid IX, h. 230.

harga. Ketika terdapat kontradiksi antara dua hal tersebut, maka mereka harus diberi kesempatan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk kepentingan diri mereka sendiri. Mewajibkan pemilik barang dagangan untuk menjualnya dengan harga yang tidak sesuai kehendaknya, itu bertentangan dengan firman Allah SWT: "Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu ..." (QS. al-Nisa': 29). Pendapat inilah yang dianut Jumhur ulama.

6. Kasyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'26

(وَأَوْجَبَ الشَّيْخُ اِلْزَامَهُمْ) أَيْ الْبَاعَةِ (الْمُعَاوَضَةَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ وَإِنَّهُ لَا نِزَاعَ فِيهِ لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لِحِقِّ اللهِ تَعَالَى وَلَا تَتِمُّ مَصْلَحَهُ النَّاسِ إِلَّا بِهَا كَالْجِهَادِ ...

(Dan al-Syaikh -Ibn Taimiyah- mengharuskan mereka), maksudnya para pelaku akad jual beli untuk melakukan (pertukaran dengan tsaman al-mitsl -harga standar-, dan sungguh hal itu tidak diperdebatkan, sebab merupakan kemaslahatan publik karena hak Allah Ta'ala, dan kemaslahatan publik tidak tidak akan sempurna kecuali dengan pertukaran dengan harga standar tadi, seperti halnya jihad ...

7. Tuhfah al-Ahwadzi 'ala Syarh al-Tirmidzi²⁷

وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجُوْزُ لِلإِمَامِ التَّسْعِيْرُ

Diriwayatkan dari Imam Malik, bahwa penguasa berhak menetapkan harga.

8. 'Aridhah al-Ahwadzi fi Syarh al-Tirmidzi28

وَالتَّسْعِيْرُ عَلَى النَّاسِ إِذَا خِيْفَ عَلَى أَهْلِ السُّوْقِ أَنْ يُفَسِّرُوْا أَحْوَالَ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَالَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ بِظَاهِرِ الْحَدِيْثِ لاَ يُسَعِّرُ عَلَى أَحَدٍ. وَالْحَقُّ التَّسْعِيْرُ وَصُبِطَ الْأَمْرُ عَلَى قَانُوْنٍ لاَ يَكُوْنُ فِيْهِ مَظْلَمَةٌ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ وَذَلِكَ قَانُوْنُ لاَ يُعْرَفُ إِلاَّ بِالضَّبْطِ يَكُونُ فِيْهِ مَظْلَمَةٌ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ وَذَلِكَ قَانُونٌ لاَ يُعْرَفُ إِلاَّ بِالضَّبْطِ وَالْأَوْقَاتِ وَمَقَادِيْرِ الْأَحْوَالِ وَحَالِ الرِّجَالِ. وَاللهُ الْمُوفِّقُ لِلصَّوَابِ. وَمَا قَالَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ حَقْ وَمَ صَحَّ ثَبَاتُهُمْ وَاسْتَسْلَمُوْا إِلَى رَبِّهِمْ وَأَمَّا قَوْمُ قَصَدُوا أَكُلَ وَمَا فَعَلَمُ مُولًا عَوْمُ قَصَدُوا أَكُلَ النَّاسِ وَالتَّضْيِيْقَ عَلَيْهِمْ فَبَابُ اللهِ أَوْسَعُ وَحُكُمُهُ أَمْضَى

²⁶ Manshur bin Yunus al-Bahuti, Kasyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna', (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), Jilid III, h. 187.

Abu al-'Ala al-Mubarakfuri, Tuhfuh al-Ahwadzi 'ala Syarh al-Tirmidzi, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th.), Jilid IV, h. 452.

²⁸ Ibn al-'Arabi, Tuhfah al-Ahwadzi 'ala Syarh al-Tirmidzi, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th.), Jilid VI, h. 54.

Penetapan harga pada masyarakat itu (boleh) jika dikhawatirkan pelaku pasar akan menafsirkan ketaatan kaum muslimin (dengan penafsiran yang negatif). Semua ulama berdasarkan zhahir hadits, yaitu tidak memperbolehkan penetapan harga pada siapapun. Namun yang benar, adalah penetapan harga itu (boleh). Parameternya adalah berdasarkan undang-undang yang tidak memuat kezhaliman terhadap pihak-pihak yang terkait, dan undang-undang itu tidak diketahui kecuali dengan memperhatikan waktu dan fluktuasi situasi dan keadaan masyarakat.

Apa yang disabdakan Nabi Saw. (yang melarang penetapan harga) itu benar dan yang dilakukannya merupakan ketetapan hukum. Namun, hal itu berlaku bagi suatu komunitas masyarakat yang beriman teguh dan berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Sedangkan komunitas yang bermaksud untuk memangsa sesama anggota masyarakat dan mempersulit mereka, maka pintu Allah Swt. sangat luas dan hukumNya terus berjalan.

- 9. Referensi Lain
 - a. Hasyiyah al-Syarwani, Juz VII, h. 17.
 - b. Al-Ahkam al-Sulthaniyyah Abi Ya'la.
 - c. Nihayah al-Muhtaj, Juz III, h. 473.

403. Mempekerjakan Wanita pada Malam Hari di Luar Rumah

- S. Angkatan kerja wanita mendominasi pekerjaan yang tidak banyak memerlukan keahlian. Jumlah mereka juga sangat besar. Di pabrik yang bekerja dengan mesin besar dan full time (24 jam), berlaku pembagian sift (giliran) setiap 8 jam, termasuk malam hari. Sift malam hari mengundang kerawanan, khususnya bagi pekerja wanita. Bagaimana hukumnya mempekerjakan wanita pada malam hari di luar rumah?
- J. Hukumnya mempekerjakan wanita pada malam hari di luar rumah, hukumnya adalah haram, kecuali:
- 1. Aman dari fitnah dan mendapat izin dari suami dan atau wali, maka hukumnya boleh.
- 2. Diduga terjadi fitnah, maka hukumnya haram dan dosa.
- 3. Takut terjadi fitnah, maka hukumnya makruh.

Keterangan, dari kitab:

1. 'Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari²⁹

²⁹ Badruddin al-'Aini, 'Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari, (Mesir: al-Muniriyah, t. th.), Juz XX, h. 218.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا مُطَابَقَتُهُ لِلتَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةً فِي الْمَسْجِدِ فِيْ غَيْرِ الْمَسْجِدِ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ وَالشَّرْطُ فِي الْجُوَارِ فِيْهِمَا الْأَمْنُ مِنَ الْفِتْنَةِ

Diriwayatkan dari Abdullah Ibn Umar al-Khaththab, bahwa Nabi Saw. bersabda: "Jika istri salah seorang dari kalian meminta izin pergi ke mesjid, maka janganlah melarangnya." (HR. Bukhari). Keserasian hadits ini dengan judul bab yang dibuat Imam Bukhari (Bab Permintaan Izin Istri kepada Suaminya untuk Pergi ke Masjid dan ke Selainnya), adalah wanita tersebut pergi ke masjid, dan perginya ke selain masjid dengan diqiyaskan padanya. Persyaratan bagi kebolehan pergi mesjid dan luar mesjid bagi seorang wanita adalah aman dari fitnah.

2. Is'ad al-Rafiq Syarh Sulam al-Taufiq30

قَالَ فِيْ الزَّوَاجِرِ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ لِصَرِيْحِ هَذِهِ الْأَحَادِيْثِ وَيَنْبَغِيْ حَمْلُهُ لِيُوَافِقَ عَلَى قَوَاعِدِنَا عَلَى مَا إِذَا تَحَقَّقَتِ الْفِتْنَةُ أَمَّا مُجَرَّدُ خَشْيَتِهَا فَإِنَّمَا هُوَ مَكْرُوهُ وَمَعَ ظَنِّهَا حَرَامٌ غَيْرُ كَبِيْرٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرً

Dalam kitab al-Zawajir Ibn Hajar al-Haitami berkata: "Sesuai dengan kejelasan hadits-hadits ini, maka (keluarnya wanita dari rumah) termasuk dosa besar. Agar pernyataan ini sesuai dengan kaidah-kaidah kita (madzhab Syafi'i), maka harus dipahami dalam keadaan jika memang benar-benar akan terjadi fitnah. Sementara jika hanya sekedar terdapat kekhawatiran terjadinya fitnah, maka hukumnya makruh. Sedangkan jika disertai dengan dugaan kuat adanya fitnah, maka hukumnya haram, namun bukan dosa besar.

3. Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab³¹

وَيُكُونُهُ وَيُكُونُهُنَّ الْمَسْجِدَ فِيْ جَمَاعَةِ الرِّجَالِ إِنْ كَانَ مُشْتَهَاةً خَوْفَ الْفِتْنَةِ
(قَوْلُهُ وَيُكُونُهُ حُضُوْرُهُنَّ) أَيْ كَرَاهَةً تَحْرِيْمٍ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ الْحَلِيْلُ. اه ح ل ... إِلَى أَنْ قَالَ ... وَيَحْرُمُ عَلَيْهِنَّ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيٍّ أَوْ حَلِيْلٍ أَوْ سَيِّدٍ أَوْ هُمَا فِيْ أَمَةٍ مُتَزَوَّجَةٍ وَمَعَ خَشْيَةٍ فِتْنَةٍ مِنْهَا أَوْ عَلَيْهَا إِنْتَهَتْ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَيُكُونُهُ خُضُورُهُنَّ الْمَسْجِدَ) أَيْ مَحَلَّ الْجُمَاعَةِ وَلَوْ مَعَ غَيْرِ الرِّجَالِ فَذِكُرُ الْمَسْجِدِ وَالرِّجَالِ لِلْغَالِبِ

502

Muhammad Salim Bafadhal, Is'ad al-Rafiq Syarh Sulam al-Taufiq, (Surabaya: al-Hidayah, t. th.), Juz VI, h. 125.

³¹ Zakaria al-Anshari dan Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid I, h. 416-417.

Dimakruhkan wanita datang ke mesjid berjamaah dengan laki-laki, jika wanita tersebut mempesona karena khawatir timbulnya fitnah.

(Pernyataan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Dimakruhkan wanita datang.") maksudnya, makruh tahrim jika si suami tidak mengizinkan. Demikian menurut al-Halabi ... Haram bagi wanita tanpa izin wali, suami, tuan atau keduanya bagi budak wanita yang sudah bersuami, dan dalam keadaan khawatir timbulnya fitnah dari atau yang membahayakannya.

(Pernyataan beliau: "Dimakruhkan wanita datang."), maksudnya datang ke mesjid tempat berjamaah walaupun tidak ada laki-laki di sana. Penyebutan mesjid dan kaum laki-laki hanya berdasar kebiasaan saja.

4. Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin³²

وَمِنْهَا إِذَا خَرَجَتْ لِإِكْتِسَابِ نَفَقَةٍ بِتِجَارَةٍ أَوْسُؤَالٍ أَوْ كَسْبٍ إِذَا عَسُرَ الزَّوْجُ (قَوْلُهُ وَمِنْهَا) أَيْ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِيْ يَجُوْزُ الْحُرُوْجُ لِلَّجْلِهَا ... وَقَوْلُهُ أَوْ سُؤَالٍ أَيْ سُؤَالِ نَفَقَةٍ أَيْ طَلَبِهَا عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ

Dan di antaranya, jika keluarnya itu untuk mencari nafkah dengan berdagang, meminta atau bekerja ketika suami melarat -tidak mampu memberi nafkah-.

(Pernyataan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Dan di antaranya.") maksudnya adalah dari beberapa hal yang memperbolehkan wanita keluar rumah ... (Dan pernyataan beliau: "Atau meminta.") maksudnya adalah meminta nafkah, maksudnya mencari nafkah dengan cara mencari sedekah.

5. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam³³

أَنَّ الظَّنَّ بِالْمَفْسَدَةِ وَالطَّرَرِ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْقَصْدِ إِلَيْهِ فَالْأَصْلُ الْجَوَّازُ مِنَ الْجُلْبِ أَوِ الدَّفْعِ وَقَطْعُ النَّظْرِ عَنِ اللَّوَازِمِ الْحَارِجِيَّةِ إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ تُسَبِّبُ مَفْسَدَةً مِنْ بَابِ الْحِيَلِ أَوْ مِنْ بَابِ التَّعَاوُنِ مُنِعَ مِنْ هذِهِ الْجِهَةِ لَا مِنْ جِهَةِ الْأُصِلِ

Sungguh zhan (dugaan kuat) tentang mafsadah dan bahaya tidak bisa diposisikan sebagai mafsadah dan bahaya tersebut. Sebab, hukum asal adalah diperbolehkan mengupayakan kebaikan dan menolek bahaya, serta tanpa memandang konsekuensi eksternal (kharijiyah). Kecuali ketika suatu maslahat menyebabkan mafsadah dari sisi hilah (rekayasa)

³² Zainuddin al-Malibari dan Muhammad Syaththa al-Dimyathi, Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t.th.), Jilid II, h. 73-74.

³³ Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, (Kairo: al-Madani, t.th.), Juz II, h. 265.

atau dari sisi tolong-menolong, maka maslahat tersebut dicegah (tidak diperbolehkan) dari kedua sisi ini, bukan dari hukum asalnya.

- 6. Referensi Lain
 - a. Tuhfah al-Muhtaj, Juz II, h. 252.
 - b. Nihayah al-Muhtaj, Juz II, h. 140
 - c. Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra, Juz I, h. 203.

404. Akad TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi)

- S. Menurut Inpres 9/75 berlaku sistem TRI (Tebu Rakyat Intensifikasi). Pemilik tanah memperoleh uang tunggu, sedangkan bagi hasil dikeluarkan setelah penetapan rendemen. Tapi, pada kenyataannya proses penetapan rendemen tersebut dilakukan secara sepihak, yakni oleh pemilik pabrik gula, sementara petani sendiri seringkali dirugikan.
- a. Bagaimana hukum akad TRI?
- b. Sahkah penetapam bagi hasil dengan cara tersebut?
- J. 1. Hukum akad TRI ada yang *fasidah* sesuai dengan keputusan Muktamar ke-28, masalah soal nomor 390, di samping itu dalam pelaksanaannya di lapangan terjadi *ikrah* (pemaksaan) terhadap peserta TRI.
 - Tetapi juga ada yang tidak fasidah, yaitu petani hutang modal ke bank atau pihak lain, kemudian tebunya digilingkan ke pabrik gula tersebut dengan akad ijarah, menurut kebanyakan Hanabilah dan satu qaul dari Hanafiyah. Namun pendapat tersebut dinyatakan dha'if oleh Ibn Qudamah. Dengan catatan harus ada lembaga yang membantu petani untuk mengontrol penetapan rendement, penimbangan dan lain-lain, guna menghilangkan unsur gharar.
 - 2. Penetapan bagi hasil dengan cara tersebut hukumnya sah sesuai dengan jawaban di atas.

Catatan: Tentang hukumnya Qardh tafsil seperti dalam Ahkamul Fuqaha.

PRAKTEK PENYELENGGARAAN TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI

Program Penyelenggaraan Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) melalui proses:

1. Langkah pertama adalah membentuk kelompok. Prosesnya beberapa petani yang lokasi tanahnya mendapat giliran untuk ditanami tebu, berkumpul untuk bersepakat membentuk kelompok, yang strukturnya ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Ketua kelompok berfungsi untuk mewakili anggota kelompoknya dalam segala urusan yang berkaitan dengan pihak luar.

- Langkah berikutnya adalah mengurus izin penanaman kepada instansi yang terkait, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua kelompok.
- Setelah mendapat izin, Ketua kelompok dapat mengajukan kredit pembiayaan tanaman dan biaya hidup, yang telah diatur melalui SK Bupati kepada KUD, yang pembayarannya setelah selesai penebangan.
- 4. Hasil gula petani digiling di pabrik gula yang telah ditentukan. Pabrik gula dalam hal ini berfungsi menjual jasa penggilingan kepada petani, yang bagi hasilnya; pabrik gula kurang lebih 38 %, sedang petani kurang lebih 62 % (ada kemungkinan menurut rendemen).
- 5. Hasil gula petani yang 98 % dijual kepada DOLOG dengan harga yang ditentukan. Sedang 2 % dapat diambil dalam bentuk natura.
- 6. Penjualan gula petani kepada DOLOG diwakili dan dikoordinir oleh KUD, kemudian uang diserahkan kepada masing-masing kelompok (diwakili oleh ketuanya) setelah memenuhi kewajiban kelompok, antara lain membayar hutang, membayar biaya tebang dan lain-lain.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Anwar li A'mal al-Abrar34

وَيُشْتَرَطُ أَنْ لاَ تَكُوْنَ الْأَجْرَةُ شَيْئًا يَخْصُلُ بِعَمَلِ الْأَجِيْرِ فَلَوِ اسْتَأْجَرَ السِّلاَّ لِيُسْلِمَ الشَّاةَ بِجُلْدِهَا أَوْ بِصَاعٍ مِنْهُ أَوْ بِالنَّخَالَةِ أَوِ الشَّاةَ بِجُلْدِهَا أَوْ بِصَاعٍ مِنْهُ أَوْ بِالنَّخَالَةِ أَوِ الشَّمَارَ بِجُزْءٍ مِنْهَا بَعْدَ الْقِطَافِ الْمُرْضِعَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الرَّقِيْقِ الْمُرْتَضِعِ بِعَدَمِ الْحِطَامِ أَوْ قَاطَفَ الثِّمَارَ بِجُزْءٍ مِنْهَا بَعْدَ الْقِطَافِ أَوْ لِيَنْسُجَ الثَّوْبَ بِنِصْفِهِ فَكُلُّ هَذَا فَاسِدٌ وَلِلأَجِيْرِ أُجْرَةُ مِثْلِهِ

Disyaratkan bagi upah itu bukan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh pekerjaan yang dilakukan buruh. Jika seandainya menyewa tukang jagal untuk menguliti kambing dengan upah kulitnya, atau tukang giling roti untuk menggiling gandum dengan upah sepertiga atau satu sha' (2,751 kg) tepung yang digilingnya, atau wanita tukang menyusui dengan upah sebagian dari budak yang menyusui padanya setelah masa sapih, atau pemetik buah-buahan dengan upah sebagian dari buah yang dipetiknya, atau untuk menenun pakaian dengan upah separuh dari pakaian tersebut, maka semua persewaan itu fasid dan buruh berhak

Yusuf al-Ardabili, al-Anwar li A'mal al-Abrar, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t. th.), Jilid I, h. 590.

mendapatkan upah standar.

2. Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil³⁵
أَنَّ الْإِجَارَةَ تَفْسُدُ إِذَا جَعَلَ أُجْرَةَ النُّسَّاجِ جُزْءَ الثَّوْبِ الَّذِيْ يُنْسِجُهُ لِلْجَهْلِ وَكَذَلِكَ جُزْءُ الْجَارَةُ مِنَ الْمُدَوَّنَةِ وَلاَ يَجُوْزُ أَنْ تُوَاجِرَهُ عَلَى جِلْدٍ أَوْ جُلُوْدٍ لِدَبَّاعِ، قَالَ فِي كِتَابِ الْجُعْلُ وَالْإِجَارَةُ مِنَ الْمُدَوَّنَةِ وَلاَ يَجُوْزُ أَنْ تُوَاجِرَهُ عَلَى دَبْغِ جُلُوْدٍ أَوْ عَمَلِهَا أَوْ يُنْسِجُ ثَوْبًا عَلَى أَنَّ لَهُ نِصْفَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا فَرَغَ لاَ يَدْرِيْ كَيْفَ دَبْغِ جُلُودٍ أَوْ عَمَلِهَا أَوْ يُنْسِجُ ثَوْبًا عَلَى أَنَّ لَهُ نِصْفَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا فَرَغَ لاَ يَدْرِيْ كَيْفَ يَعْمُونُ أَنْ يُوَاجِرَ بِهِ إِنْتَهَى. فَهَذَا تَجْهُولُ، وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلاَمُ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَلْيُعَلِّمُهُ بِأَجْرِهِ

Sesungguhnya *ijarah* itu rusak jika penyuruh menjadikan bagian baju yang ditenunnya itu sebagai upah menenun, karena tidak diketahui (ukurannya). Begitu pula tidak boleh mengupah dengan sebagian kulit dari binatang yang dikulitinya. Pada kitab *al-Ju'l wa al-Ijarah* dalam kitab *al-Mudawnah* Imam Malik berkata: "Dan kamu tidak boleh menyewa seseorang untuk menyamak kulit hewan, pekerjaannya, atau menenun pakaian dengan upah separuhnya jika sudah selesai, karena ia tidak mengetahui bagaimana (berapa) hasilnya. Karena yang tidak diperbolehkan adalah menyewanya dengan upah tersebut. Sampai di sini perkataan beliau. Maka ini adalah upah yang tidak diketahui. Nabi Saw. bersabda: "Barangsiapa yang menyewa buruh, maka ia beritahukanlah dia upahnya."

3. Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'36

إِذَا اسْتَأْجَرَ رَجُلاً لِيُطْحِنَ لَهُ قَفِيْزًا مِنْ حِنْطَةٍ بِرُبُعِ مِنْ دَقِيْقِهَا أَوْ لِيُغْصِرَ لَهُ قَفِيْزًا مِنْ سِمْسِمٍ بِجُزْءٍ مَعْلُوْمٍ مِنْ دُهْنِهِ أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ لِأَنَّ الْأَجِيْرَ يَنْتَفِعُ بِعَمَلِهِ مِنَ الطَّحْنِ وَالْعَصْرِ فَيَكُوْنُ عَامِلاً لِتَفْسِهِ ... وَبَعْضُ مَشَا يِخِنَا بِبَلْجِ جَوَّزَ هَذِهِ الْإِجَارَةَ وَهُوَ مُحَمَّدٌ بْنُ سَلَمَةَ وَنَصْرٌ بْنُ يَحْتِي

Jika seseorang menyewa orang lain untuk menggiling satu qafiz (±27,817 kg) gandum untuk dijadikan roti dengan upah seperempat dari tepungnya, atau untuk memeras satu qafiz simsim dengan upah sebagian dari minyaknya, maka hal ini tidak boleh. Karena si buruh mendapat untung dengan pekerjaannya berupa penggilingan dan pemerasan itu. Berarti ia bekerja untuk dirinya sendiri ... sebagian ulama kita (madzhab Hanafiyah) di kota Balkha, yaitu Muhammad bin Salamah dan Nashr bin Yahya memperbolehkan ijarah semacam ini.

506

³⁵ Ibn Abdurrahman al-Maghribi, Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil, (Beirut: Dar al-Nasyr, 1398 H), Jilid V, h. 390-399.

³⁶ Mahmud bin Ahmad al-Kasani, Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syarai', (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Jilid IV, h. 192.

الْقِسْمُ النَّالِثُ إِجَارَتُهَا يِجُزْءِ مُشَاعٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا كَنِصْفِ وَثُلُثِ فَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ جَوَازُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَاخْتَارَ أَبُوْ الْحُطَّابِ أَنَّهَا لاَ تَصِحُّ وَهُوَ قَوْلُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَهُوَ الصَّحِيْحُ إِنْ شَاءَ اللهُ كَمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحَادِيْثِ فِي التَّهْيِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ لَهَا وَالشَّافِعِيِّ وَهُوَ الصَّحِيْحُ إِنْ شَاءَ اللهُ كَمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَحَادِيْثِ فِي التَّهْيِ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ لَهَا لِأَنَّهَا إِجَارَةً بِعِوْضٍ مَجْهُولِ فَلَمْ تَصِحَّ كَإِجَارَتِهَا بِثُلُثِ مَا يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ أُخْرَى، فَأَمَّا نَصُ لَا خَتَارِ فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى الْمُزَارَعَةِ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ فَيَكُونُ حُكْمُهَا حُصُمُ الْمُزَارَعَةِ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ فَيَكُونُ حُكْمُهَا حُصُمُ الْمُزَارَعَةِ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ فَيَكُونُ حُكْمُهَا حُصُمُ الْمُزَارَعَةِ

Bagian ketiga adalah menyewakan lahan tanah dengan sebagian hasilnya secara menyeluruh yang belum ditentukan, seperti setengah dan sepertiga, maka menurut pendapat al-manshush (yang dijelaskan) dari Imam Ahmad hal ini boleh. Pendapat itu adalah pendapat mayoritas Ashhab Hanabilah. Sementara Abu al-Khaththab memilih bahwa ijarah itu tidak sah. Pendapat itu juga menjadi pendapat Imam Abu Hanifah dan Syafi'i. Pendapat ini merupakan yang shahih insyaallah seperti hadits-hadits tadi yang melarang tanpa ada penentangnya. Sebab, ijarah tersebut adalah ijarah dengan upah yang tidak jelas, maka tidak sah. Seperti menyewakannya dengan upah sepertiga dari hasil tanah yang lain.

Adapun pendapat Imam Ahmad yang memperbolehkannya itu, maka harus dipahami untuk kasus *muzara'ah* (menyerahkan lahan kepada orang yang menanaminya dengan hasil dibagi kedua pihak) dengan lafal *ijarah*. Karenanya, maka hukumnya adalah hukum *muzara'ah*.

- 5. Referensi Lain
 - a. Kasyf al-Qina', Juz III, h. 525.
 - b. Al-Mudawwanah al-Kubra, Juz III, h. 390.
 - c. Jawahir al-Iklil, Juz II, h. 185.
 - d. Al-Hidayah, Juz III, h. 271.
 - e. Raudlah al-Thalibin, Juz IV, 251.
 - f. Nihayah al-Muhtaj, Juz V, h. 268.

405. Menggusur Tanah Rakyat untuk Kepentingan Umum

S. Pembangunan ternyata banyak menimbulkan ekses. Di antaranya yang cukup serius dan merugikan kepentingan rakyat, adalah penggusuran tanah

³⁷ Abdullah bin Ahmad al-Maqdisi, al-Mughni, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.), Juz V, h. 249.

untuk kepentingan pembangunan. Dalih penggusuran tersebut biasanya untuk kepentingan umum. Tetapi, tak jarang diktum kepentingan umum itu adalah selubung saja untuk menutupi kepentingan beberapa oknum tertentu. Hal ini diperparah lagi oleh kenyataan bahwa ganti rugi penggusuran biasanya tidak sesuai dengan yang dikehendaki rakyat.

- a. Bagaimana hukum menggusur tanah rakyat untuk kepentingan umum?
- b. Bagaimana cara terbaik untuk menentukan ganti rugi penggusuran menurut fiqh?
- J. a. Hukum penggusuran tanah oleh pemerintah demi kepentingan umum (al-maslahah al-'ammah) boleh, dengan syarat betul-betul pemanfaatannya oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang dibenarkan oleh syara' dan dengan ganti rugi yang memadai.
 - b.Cara yang terbaik dalam menentukan ganti rugi penggusuran tanah menurut fiqh ditempuh melalui musyawarah atas dasar keadilan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Keterangan, dari kitab:

1. Ahkam al-Sulthaniyah38

فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ ﷺ وَكَثُرَ النَّاسُ وَسَّعَ الْمَسْجِدَ وَاشْتَرَى دَوْرًا هَدَمَهَا وَزَادَهَا فِيْهِ وَهَدَمَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ جِيْرَانِ الْمَسْجِدِ أَبَوْا أَنْ يَبِيْعُوْا وَوَضَعَ لَهُمْ الْأَثْمَانَ حَتَّى أَخَذُوْهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَاتَّخَذَ لِلْمَسْجِدِ جِدَارًا قَصِيْرًا دُوْنَ الْقَامَةِ وَكَانَتْ الْمَصَابِيْحُ تُوضَعُ عَلَيْهِ وَكَانَ عُمَرُ فَلِكَ وَاتَّخَذَ لِلْمَسْجِدِ جِدَارًا لِلْمَسْجِدِ. فَلَمَّا السُتُخْلِفَ عُثْمَانُ ﷺ اِبْتَاعَ مَنَازِلَ فَوسَّعَ بِهَا الْمَسْجِد وَأَكُنْ مَنْ يَتَّخِذُ جِدَارًا لِلْمَسْجِدِ. فَلَمَّا السُتُخْلِفَ عُثْمَانُ ﷺ اِبْتَاعَ مَنَازِلَ فَوسَّعَ بِهَا الْمَسْجِدِ وَلَاعَ مَنَازِلَ أَقْوَامٍ وَوَضَعَ لَهُمْ أَثْمَانَهَا فَضَجُوا مِنْهُ عِنْدَ الْبَيْتِ فَقَالَ: إِنَّمَا لَلْهُ بُنِ خَالِدِ بْنِ أَسَدٍ فَخَلً فَأَوْرَاتُمْ وَرَضِيْتُمْ ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسَدٍ فَخَلً سَبِيْلَهُمْ

Ketika Umar r.a diangkat sebagai Khalifah dan jumlah penduduk semakin banyak, ia perluas mesjid Nabawi dengan membeli rumah dan dirobohkannya. Lalu ia menambah perluasannya dengan merobohkan (bangunan) penduduk sekitar mesjid yang enggan menjualnya. Beliau lalu memberi harga tertentu sehingga mereka mau menerimanya. Beliau membangun dinding yang pendek kurang dari tinggi manusia, dan memasang lampu-lampu di atasnya. Beliau adalah orang yang pertama kali membuat dinding untuk mesjid.

³⁸ Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Mesir: Musthafa al-halabi, 1966), Cet. 2, h. 162.

Ketika Utsman r.a. diangkat sebagai khalifah, ia lalu membeli rumahrumah (untuk perluasan mesjid Nabawi). Beliau mengambil rumahrumah penduduk dan menetapkan harganya. Mereka lalu berdemo di kediamannya. Beliau lalu berkata: "Sungguh kesabarankulah yang membuat kalian berani terhadapku, sungguh hal ini pernah dilakukan Umar terhadap kalian, dan kalian menyetujuinya". Lalu beliau memerintah memenjarakan mereka, sampai Abdullah bin Khalid bin Asad berbicara kepadanya, dan ia melepas mereka kembali.

2. Qurrah al-'Ain bi Fatawa 'Ulama al-Haramain³⁹

إِذَا ضَاقَ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ وَاحْتَاجَ إِلَى تَوْسِعَتِهِ وَبِجَانِبِهِ عِقَارٌ وُقِفَ أَوْ مُلِكَ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ الْحُبْسِ لِتَوْسِعَةِ الْمَسْجِدِ وَإِنْ أَبَى صَاحِبُ الْحُبْسِ أَوِ الْمِلْكِ مِنْ بَيْعِ ذَلِكَ فَالْمَشْهُوْرُ الْجُبْرُ عَلَى الْبَيْعِ وَيَشْتَرِيْ بِثَمَنِ الْحُبْسِ حَبْسًا كَالأَوِّلِ وَمِثْلُ تَوْسِعَةِ الْمَسْجِدِ تَوْسِعَةُ طَرِيْقِ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَمَقْبَرَتِهِمْ. وَأَمَّا تَوْسِعَةُ بَعْضِ الطَّلاَثَةِ مِنْ بَعْضِ فَفِيْ "ح ج" أَنَّهُ يُوْخَذُ الْجُوَارُ مِنَ الشَّارِجِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَاتَّبِعَ شَرْطُهُ إِنْ جَازَ أَنَّ مَا كَانَ لِللهِ فَلاَ بَأْسَ فِيهِ أَنْ مِن الشَّرَاحِ التَّنْصِيْصِ بِأَنَّهُ لاَ يُهْدَمُ الْمَسْجِدُ لِتَوْسِعَةِ الطَّرِيْقِ بِخِلاَفِ الدَّفْنِ فِيْهِ لِضَيْقِ الْمُقْبَرَةِ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ بَاقٍ بِحَالِهِ لاَ يُعْضِ التَّوْسِعَةِ الْمَسْجِدَ بَاقٍ بِحَالِهِ

Bila mesjid sudah sempit tidak muat lagi dan membutuhkan perluasan, sedangkan di sampingnya terdapat tanah wakaf atau milik seseorang, maka boleh menjual tanah wakaf itu untuk perluasan mesjid tersebut walaupun pemilik wakaf atau tanah tersebut menentangnya. Menurut pendapat masyhur, boleh memaksa penjualan dan kemudian membeli tanah lain dengan hasil penjualan tanah wakaf itu. Sama dengan perluasan mesjid adalah perluasan jalan dan kuburan bagi umat Islam.

Adapun memperluas sebagian dari ketiganya (mesjid, jalan dan kuburan umum) dengan sebagian lainnya, maka dalam kitab ७, ८, sungguh diambil kesimpulan hukum boleh dari ungkapan al-Syarih pada ungkapan al-mushannif: "Dan syarat pihak yang mewakafkan itu harus diikuti, bila syarat tersebut boleh.", yaitu ucapan beliau: "Sungguh wakaf yang menjadi hak milik Allah, maka sebagiannya boleh digunakan untuk menolong sebagian yang lain." Hanya saja di sebagian Syarh terdapat kejelasan, bahwa mesjid tidak boleh dirobohkan untuk perluasan jalan. Berbeda mengubur jenazah di mesjid karena sempitnya kuburan. Sebab

³⁹ Muhammad Ali al-Maliki, Qurrah al-'Ain bi Fatawa 'Ulama al-Haramain, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, 1937), h. 259.

mesjid tetap eksis pada kondisinya.

3. Hasyiyah 'Ali Syibramallisi 'ala Nihayah al-Muhtaj⁴⁰

وَقَعَ السُوَّالُ عَمَّا يَقَعُ بِمِصْرِنَا كَثِيْرًا مِنَ الْمُنَادَاةِ مِنْ جَانِبِ السُّلْطَانِ بِقَطْعِ الطُّرُقَاتِ الْقَدْرَ الْفُلاَنِيَّ هَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ وَهَلْ هُو مِنَ الْأُمُورِ الَّتِيْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مَصْلَحَةً لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ الْفُلاَنِيَّ هَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ وَهَلْ هُو مِنَ الْأُمُورِ الَّتِيْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا مَصْلَحَةً لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ أَمْ لاَ ؟ وَالْجُوَابُ الظَّاهِرُ الْجُوارُ بَلِ الْوُجُوبُ حَيْثُ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ صَرْفُ أَجْرَةِ ذَلِكَ مِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ صَرْفُ أَجْرَةِ ذَلِكَ مِنْ أَمُوالِ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ ذَلِكَ لِظُلْمِ مُتَوَلِّيهِ فَعَلَى مَيَاسِرِ الْمُسْلِمِيْنَ

Ada pertanyaan tentang kasus yang sering terjadi di kota kami, tentang orang-orang pemerintahan yang menyerukan pemotongan beberapa ruas jalan dengan ukuran tertentu: "Apakah hal itu boleh? Apakah termasuk perkara yang menghasilkan kemaslahatan umum umat Islam, maka wajib bagi penguasa, lalu orang-orang kaya muslim atau tidak?"

Jawabannya adalah: "Yang jelas hal itu boleh, bahkan wajib bagi penguasa sekira menghasilkan kemaslahatan. Yang jelas kewajiban itu dibebankan bagi penguasa, dan ia wajib membayar biayanya dari bait almal. Bila hal itu tidak mudah dilakukan karena kezaliman pegawainya, maka biaya itu dibebankan pada orang-orang kaya muslim.

4. Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil⁴¹

أَنَّ مِنَ الْجَبْرِ الشَّرْعِيِّ جَبْرُ مَنْ لَهُ رَبْعٌ يُلاَصِقُ الْمَسْجِدَ وَافْتُقِرَ لِتَوْسِيعِ الْمَسْجِدِ بِهِ عَلَى بَيْعِهِ لِتَوْسِيعِ الْمَسْجِدِ وَكَذَلِكَ مَنْ لَهُ أَرْضُ تُلاَصِقُ الطَّرِيْقَ بِذَلِكَ أَفْتَى ابْنُ الرُّشْدِ وَاحْتَجَّ عَلَى لِتَوْسِيعِ الْمَسْجِدِ وَكَذَلِكَ مَنْ لَهُ أَرْضُ تُلاَصِقُ طَرِيْقًا هَدَمَهَا نَهْرُ لاَ مَمَرَ لِلنَّاسِ إِلاَّ فِيْهَا عَلَى فَتْيَاهُ بِقَوْلِ سَحْنُونٍ يُجْبَرُ ذُو أَرْضِ تُلاَصِقُ طَرِيْقًا هَدَمَهَا نَهْرُ لاَ مَمَرَ لِلنَّاسِ إِلاَّ فِيْهَا عَلَى بَيْعِ طَرِيْقٍ فِيْهَا لَهُمْ بِثَمَنٍ يَدْفَعُهُ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَبِفِعْلِ عُنْمَانَ ﴿ فَي تَوْسِعَةِ مَسْجِدِهِ بَيْعِ فَيْهِ اللهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَبِفِعْلِ عُنْمَانَ ﴿ فَي تَوْسِعَةِ مَسْجِدِهِ عَلَى السَّوْقِ وَيَقُولِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ إِذَا غَلاَ الطَّعَامُ وَاحْتِيْجَ إِلَيْهِ أَمَرَ الْإِمَامُ أَهْلَهُ بِإِخْرَاجِهِ إِلَى السَّوْقِ

Sungguh yang termasuk pemaksaan syar'i adalah pemaksaan pada seseorang yang punya rumah bergandengan dengan mesjid dan dibutuhkan untuk perluasannya, agar menjual rumahnya untuk keperluan perluasan mesjid. Begitu pula orang yang memiliki tanah bergandengan dengan jalan umum. Ibn Rusyd berfatwa dengan hukum itu, dan berhujjah

⁴⁰ Ahmad bin Qasim al-'Abbadi, Hawasyi Ibn Qasim al-'Abbadi pada Hawasyai al-Syirwani wa al-'Abbadi, (Beirut: dar Ihya a-Turats al-'Arabi, t. th.), Juz VI, h. 216.

⁴¹ Ibn Abdurrahman al-Maghribi, Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil, (Beirut: Dar al-Nasyr, 1398 H), Jilid V, h. 390-399.

atas fatwanya dengan (i) pendapat Sahnun: "Orang yang memiliki tanah bergandengan dengan jalan yang dihantam sungai dan masyarakat tidak mempunyai jalan selain tanah itu, maka si pemiliknya dipaksa untuk menjual jalan yang berada ditanahnya itu demi kepentingan masyarakat, dengan harga yang dibayarkan penguasa dari bait al-mal, (ii) dengan tindakan Utsman Ra. Yang memperluas Masjid Nabawi, dan (iii) dengan pendapat Imam malik dan selainnya, yaitu ketika harga makanan mahal, dan sangat dibutuhkan, maka penguasa harus memerintahkan pemiliknya untuk menjualnya ke pasar.

5. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam42

... sesungguhnya kepentingan umum itu didahulukan di atas kepentingan khusus, berdasarkan dalil pelarangan pembelian barang sebelum sampai pasar, penjualan barang orang kota ke orang pedalaman (yang buta harga) dan kesepakatan ulama salaf terhadap jaminan yang harus ditanggung oleh tukang (jika terjadi kerusakan) besertaan hukum dasar bagi mereka adalah amanah. ... sekiranya yang khusus itu tidak mengalami bahaya.

6. Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir43

Adapun jika dipaksa untuk menjual dengan pemaksaan yang halal, maka penjualannya sah sebagaimana pemaksaan menjual tanah untuk perluasan mesjid, jalan umum atau kuburan.

7. Al-Dur al-Mukhtar44

Boleh mengambil tanah, rumah atau toko yang berada di samping mesjid yang sempit bagi jamaah dengan ganti rugi harga secara paksa.

⁴² Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, (Kairo: al-Madani, 1969), Juz II, h. 257.

⁴³ Ibn 'Irfah al-Dasuqi, Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir, (Beirut: Dar al-Fikr, 1969), Jilid III, h. 6.

⁴⁴ Muhammad bin Ali al-Hashkafi, al-Dur al-Mukhtar pada Rad al-Muhtar, (Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H), Jilid IV, h. 379.

7. Madkhal al-Fiqh al-'Amm45

وَالصَّوْرَةُ الثَّانِيَةُ هِيَ الاسْتِمْلاَكُ لِأَجْلِ مَصَالِحِ الْعَامَّةِ فَقَدْ أَجَازَ الشَّرْعُ الْإِسْلاَيُ اسْتِمْلاَكَ الْأَرْضِ الْمُجَاوِرَةِ لِلْمَسْجِدِ جَبْرًا عَلَى أَصْحَابِهَا إِذَا امْتَنَعُوْا عَنْ بَيْعِهَا وَضَاقَ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ الْأَرْضِ الْمُجَاوِرَةِ لِلْمَسْجِدِ جَبْرًا عَلَى أَصْحَابِهَا إِذَا امْتَنَعُوا عَنْ بَيْعِهَا وَضَاقَ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ وَاحْتَاجَ إِلَيْهَا كَمَا أَجَازُوا مِثْلَ ذَلِكَ لِأَجْلِ تَوْسِيْعِ الطَّرِيْقِ إِذَا دَعَتْ حَاجَةُ النَّاسِ إِلَى تَوْسِيْعِ وَذَلِكَ بِالْقِيْمَةِ الَّتِيْ يُسَاوِيْهَا الْعِقَارُ الْمُسْتَمْلَكُ حَتَّى لَقَدْ نَصَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُوْخَذَ لِتَوْسِيْعِ الطَّرِيْقِ جَانِبٌ مِنَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

Contoh kedua adalah pengambilan hak milik demi kepentingan umum. Agama Islam memperbolehkan pengambilan hak milik tanah yang berdampingan dengan mesjid secara paksa jika si pemilik enggan menjualnya. Sementara mesjid sudah sempit bagi para jamaahnya dan mereka membutuhkannya. Seperti halnya para ulama memperbolehkan kasus semacam itu untuk perluasan jalan umum ketika masyarakat sangat membutuhkannya, dengan memberikan (ganti rugi) harga yang sepadan dengan harga tanah yang diambil hak miliknya. Bahkan para fuqaha juga telah menjelaskan, bahwa boleh mengambil satu sisi dari mesjid untuk keperluan perluasan jalan umum ketika dibutuhkan.

406. Mencemarkan Lingkungan

- S. Industrialisasi yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah, ternyata membawa ekses yang cukup serius, dan dampaknya juga merugikan kepentingan rakyat banyak, yakni biasanya hanya mengejar keuntungan sendiri, serta melupakan kewajiban untuk menangani dampak limbah yang ditimbulkan oleh pabrik.
- a. Bagaimana hukum mencemarkan lingkungan?
- b. Bagaimana konsep Islam dalam menangani ekses pencemaran lingkungan?
- J. a. Hukum mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah, apabila menimbulkan *dharar*, maka hukumnya haram dan termasuk perbuatan kriminal (*jinayat*).
 - b. Konsepsi Islam dalam menangani ekses pencemaran lingkungan adalah:
 - 1. Apabila ada kerusakan, maka wajib diganti oleh pencemar.
 - 2. Memberikan hukuman yang menjerakan (terhadap pencemar)

⁴⁵ Musthafa Ahmad al-Zarqa, al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm, (Damaskus: Alif Ba al-Adib, 1968H), Jilid I, h. 248.

yang pelaksanaannya dengan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan tingkatannya.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Tafsir al-Kabir/Mafatih al-Ghaib46

قَالَ اللّهُ تَعَالَى "وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا" (الأعراف: ٥٦) فَقَوْلُهُ "وَلاَ تُفْسِدُوا" مَنْعُ عَنْ إِدْخَالِ الْمَاهِيَةِ فِي الْوُجُودِ وَالْمَنْعُ مِنْ إِدْخَالِ الْمَاهِيَةِ فِي الْوُجُودِ تَفْسَدِ فِي هَنْ إِدْخَالِ الْمَاهِيَةِ فِي الْوُجُودِ وَالْمَنْعُ مِنْ الإِفْسَادِ فِي هَذِهِ الْحُمْسَةِ. وَأَمَّا يَقْتَضِي الْمَنْعَ مِنْ الإِفْسَادِ فِي هَذِهِ الْحُمْسَةِ. وَأَمَّا وَوُلُهُ "بَعْدَ إِصْلاَحِهَا" فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بَعْدَ أَنْ أَصْلَحَ خِلْقَتَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمُطَابِقِ لِمَنَافِعِ الْمُكَلَّفِيْنَ الْمُطَابِقِ لِمَنَافِعِ الْمُكَلَّفِيْنَ

Allah Swt. berfirman: "Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah Swt.) memperbaikinya ..." (QS. Al-A'raf: 56). Firman Allah Swt. "Dan janganlah kalian membuat kerusakan." adalah larangan membuat kerusakan apapun dalam barang yang wujud, dan larangan dalam barang yang wujud berarti larangan pula dalam segala macam dan jenisnya. Sehingga larangan tersebut mencakup larangan membuat kerusakan pada lima perkara ini (jiwa, harta, nasab, agama dan akal). Sedangkan firman Allah Swt.: "(Sesudah (Allah Swt.) memperbaikinya." bisa berarti yang dimaksud adalah setelah Allah Swt. membuat baik bentuk semulanya pada bentuk yang cocok bagi kepentingan makhluk dan sesuai dengan kemaslahatan para mukallaf.

2. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an47

قَالَ اللهُ تَعَالَى "وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا" فِيْهِ مَسْأَلَةٌ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَهَى عَنْ كُلِّ فَسَادٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ بَعْدَ صَلاَحٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَهُوَ عَلَى الْعُمُومِ عَلَى الصَّحِيْجِ مِنَ الْأَقْوَالِ وَقَالَ الضَّحَّاكُ مَعْنَاهُ لاَ تَعَوَّرُوا الْمَاءَ الْمُعَيَّنَ وَلاَ تَقْطَعُوا الشَّجَرَ الْمُثْمِرَ

Dalam firman Allah Swt.: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah Swt.) memperbaikinya ..." (QS. Al-A'raf: 56) di dalamnya terdapat satu permasalahan, yaitu bahwa Allah Swt. telah melarang semua tindakan pengrusakan, sedikit ataupun banyak setelah perbaikan, sedikit atau banyak. Menurut pendapat yang sahih, larangan

⁴⁶ Muhammad al-Razi, al-Tafsir al-Kabir/ Mafatih al-Ghaib, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Juz XIV, h. 139.

⁴⁷ Muhammad bin Abi Bakar al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1967), Jilid VII, h. 226.

itu berlaku secara umum. Sementara menurut al-Dhahhak artinya yaitu: "Janganlah kalian mencemari air tertentu, dan janganlah memotong pohon yang berbuah."

3. Al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fawa'id al-Bahiyah48

Ungkapan la dharara wala dhirara, maksudnya adalah secara umum tidak berdosa melakukan tinadkan yang merugikan bagi seseorang atas sesuatu yang berada dalam kekuasaannya, baik berupa hak milik atau manfaat, dan siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan saudaranya sesama muslim.

4. Tabyin al-Haqa'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq49

Dan bila seseorang ingin membangun dapur api di rumahnya untuk selalu membuat roti seperti yang ada di toko-toko, atau penggilingan untuk menggiling tepung, atau penumbuk untuk tukang setrika, maka hal itu tidak boleh karena mengganggu para tetangga dengan gangguan jelas yang tidak dapat dihindari. Sedangkan menurut qiyas, hal tersebut semestinya boleh, sebab merupakan pemberdayaan pada harta miliknya sendiri. Namun hal tersebut harus ditinggalkan berdasar pada istihsan demi kepentingan (umum).

5. Al-Kharraj⁵⁰

Tidak halal bagi orang muslim sengaja (memasuki tanah) milik orang muslim lainnya ataupun milik kafir dzimmi dengan maksud ingin menenggelamkan sawahnya dan dengan tujuan untuk menimbulkan

⁴⁸ Abdullah bin Sulaiman, al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fawa'id al-Bahiyah pada al-Asybah wa al-Nadzair, (Indonesia: dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), h. 114.

⁴⁹ Utsman bin Ali al-Zaila'i, Tabyin Haqaiq Syarh Kanz al-Daqa'iq, (Pakistan: Maktabah Imdadiyah, t. th.), Jilid III, h. 196.

⁵⁰ Abu Yusuf, al-Kharraj, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979), h. 99.

kerusakan padanya. Sungguh Rasul Saw. telah melarang tindakan yang merugikan orang lain. Sungguh beliau bersabda: "Terlaknat orang yang membahayakan seorang muslim ataupun selainnya."

6. Al-Ahkam al-Sulthaniyah51

Apa bila seseorang membangun penggilingan atau mempekerjakan tukang pandai besi dan tukang setrika di rumahnya (sehingga mengganggu tetangga), maka hal itu tidak dilarang.

7. Majma' al-Dhamanat⁵²

رَجُلُ أَرَادَ أَنْ يُحْرِقَ حَصَافِدَ أَرْضِهِ فَأَوْقَدَ النَّارَ فِيْ حَصَافِدِهِ فَذَهَبَتْ النَّارُ إِلَى أَرْضِ جَارِهِ فَأَحْرَقَ رَرْعَهُ لاَ يَضْمَنُ إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَوْ أَحْرَقَ حَصَافِدَهُ تَتَعَدَّى النَّارُ إِلَى زَرْعِ جَارِهِ فَأَحْرَقَ رَبْعَهُ لاَ يَضْمَنُ إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَوْ أَحْرَقَ حَصَافِدَهُ تَتَعَدَّى النَّارُ إِلَى زَرْعِ جَارِهِ لِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ كَانَ قَاصِدًا إِحْرَاقَ زَرْعِ الْغَيْرِ ... وَكَذَلِكَ رَجُلُ لَهُ قَطْنُ فِيْ أَرْضِهِ وَأَرْضُ جَارِهِ لاَ يَعْلَى لَكُ اللَّهُ فَلْ فَيْ أَرْضِهِ وَأَرْضُ جَارِهِ لاَ يَعْلَى اللَّهُ فَلْ كَانَ ضَمَانُ الْقُطْنِ عَلَى لاَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلْ عَلَى اللَّهُ فَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّارَ لِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّ نَارَهُ تَتَعَدَّى إِلَى الْقُطْنِ كَانَ قَاصِدًا إِحْرَاقَ الْقُطْنِ عَلَى اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللَّةُ الللْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّل

Jika seseorang ingin membakar panenan (jerami) di tanahnya, lalu ia menyalakan api dan kemudian menjalar ke tanah tetangganya sehingga membakar tanamannya, maka ia tidak harus bertanggungjawab. Kecuali ia mengetahui, bila ia membakar sawahnya maka api akan menjalar ke tanaman tetangganya. Sebab, jika ia sudah mengetahui maka berarti ia sengaja membakar tanaman orang lain. ... Begitu pula seseorang yang memiliki tanaman kapas di tanahnya dan tanah orang lain bergandengan dengannya. Lalu orang lain itu menyalakan api dari sisi tanahnya sendiri dan menjalar ke bagian kapas, maka ganti rugi kapas adalah kewajiban bagi orang yang menyalakan api. Sebab ketika ia sudah mengetahui bahwa apinya akan menjalar ke kapas itu, berarti ia sengaja membakarnya.

8. Mirqah Su'ud al-Tashdiq Syarh Sulam al-Taufiq⁵³

وَمِنْ مَعَاصِيْ الْبَدَنِ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ وَإِيْذَاءِ الْجَارِ وَلَوْ كَافِرًا لَهُ أَمَانُ كَالْمُسْتَأْمَنِ وَالْمُعَاهَدِ أَذَى ظَاهِرًا لِقَوْلِهِ ﷺ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

⁵¹ Abu Ya'la al-Farra', al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Surabaya: Ahmad Nabhan, 1974), h. 301-302.

⁵² Ghanim bin Muhammad al-Baghawi, Majma' al-Dhamanat, (Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, t.th), h. 390.

⁵³ Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, Mirqah Su'ud al-Tashdiq Syarh Sulam al-Taufiq (Indonesia: CV. Karya Insan, t. th.), h. 79.

فَلاَ يُؤْذِي جَارَهُ ذَكَرَهُ الرَّمْلِيُّ

Dan di antara maksiat badan adalah durhaka terhadap orang tua, melarikan diri dari medan pertempuran, memutus tali persaudaraan, dan mengganggu tetangga dengan gangguan yang nyata walaupun orang non muslim yang berhak memperoleh keamanan, seperti non muslim musata'man dan mu'ahad, berdasarkan sabda Nabi Saw.: "Barangsiapa yang beriman kepada Allah Swt. dan hari akhir, maka janganlah mengganggu tetangganya." Begitu penuturan al-Ramli.

9. Ihya' 'Ulum al-Din54

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ فَفِي الْلَائِجَ بَيَانُ الْإِنْجَابِ ... وَفِيْهَا بَيَانُ أَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ لاَ فَرْضُ عَيْنٍ وَأَنَّهُ إِذَا قَامَ بِهِ أُمَّةً سَقَطَ الْفَرْضُ عَنِ الْآخِرِيْنَ إِذْ لَمْ يَقُلْ كُونُواْ كُلُّكُمْ آمِرِيْنَ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang yang beruntung." (QS. Ali Imran: 104). Dalam ayat ini terdapat perintah wajib. ... Dalam ayat itu terdapat penjelasan pula bahwa amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan fardhu kifayah bukan fardhu 'ain, dan ketika ada sekelompok umat yang melakukannya, maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Sebab Allah Swt. tidak berfirman: "Dan jadilah kalian semua sebagai orang yang menyuruh perkara baik."

- 10. Referensi Lain
 - a. Hasyiyah al-Jamal, Juz V, h. 196.
 - b. Tafsir Ibn Katsir, Juz II, 222. []

⁵⁴ Abu Hamid al-Ghazali, Inya' 'Ulum al-Din, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Jilid III, h. 131-132.

HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA TENTANG MASAIL DINIYAH WAQI'IYYAH 16-20 Rajab 1418 H/17-20 Nopember 1997 M Di Ponpes QOMARUL HUDA Bagu, Pringgarata Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat

407. Menyelenggarakan Shalat Jum'at Dua Angkatan 408. Menyelenggarakan Shalat Jum'at Tanpa Mustauthinin dan Muqimin

> 409. Pemindahan Komplek Makam 410. Nikah Mut'ah

411. Bai'ud Dain (Jual Beli Piutang)

412. Bai'ul 'Inah (Jual Beli Barang Yang Berasal Dari Berhutang Kepada Pemberi Hutang)

413. Memanfaatkan Tanah Jaminan, Selama yang Berhutang Belum Melunasi

414. Mencetak dan Menerbitkan Karya Tulis Orang Lain 415. Pernikahan Pengidap HIV/AIDS

416. Penggunaan Insulin Bagi Penderita Kencing Manis

417. Kloning Gen pada Tanaman, Hewan dan Manusia 418. Demonstrasi dan Unjuk Rasa

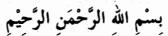
419. Pembebasan Tanah Rakyat Dengan Harga yang Tidak Memadai

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M

Nomor: 001/Munas/1997

Tentang

ITTIFAQ HUKUM MENGENAI BEBERAPA MASALAH DINIYAH WAQI'IYYAH



MUSYAWARAH NASIONAL ATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M

Khutbah Iftitah Rais Aam PBNU pada pembukaan Munas dan Konbes NU tanggal 16 Rajab 1418 H/17 Nopember 1997;

- Pandangan umum dan pendapat para peserta Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tanggal 17 Nopember 1997.
- Permusyawaratan yang berlangsung selama Munas NU tahun 1997;
- d. Kesepakatan yang telah diputuskan dalam sidang Komisi A Masail Diniyah Waqi'iyyah.

Mengingat:

- a. Anggaran Dasar NU Bab IX Pasal 18 ayat b dan ART NU bab XIX Pasal 51 ayat 1 s.d. 7;
- b. Surat Keputusan PB NU Nomor: 167/A.II.e/VII 1997 tanggal 3 Rab. Akhir 1418 H/7 Agustus 1997;

MEMUTUSKAN

Mengingat:

- Mengesahkan Hasil Sidang Komisi A, tentang Ittifaq Hukum Mengenai Beberapa Masalah Diniyah Waqi'iyyah, seperti terlampir;
- Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, serta perangkatnya di seluruh Indonesia untuk melaksanakan keputusan ini, dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan amanat Munas.

Lombok: <u>19 Rajab</u> <u>1418 H</u> 20 Nopember 1997 M

MUSYAWARAH NASIONAL NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M PIMPINAN SIDANG PLENO

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

KH MA'RUF AMIN DR. H. AQIL SIRADJ, MA

MUNAS NAHDLATUL ULAMA 16-20 Rajab 1418 H/17-20 Nopember 1997 M Di Ponpes QOMARUL HUDA Bagu, Pringgarata Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat

Pimpinan Sidang Masail Diniyah Waqi'iyyah KH.A. Aziz Masyhuri Ketua KH. Ghazali Masruri Sekretaris

Pendamping

- 1. KH. M. Rodli Sholeh
- 2.. KH. Dr. Nahrowi Abd. Salam
 - 1. KH. Yusuf Amin
 - 1. KH. Drs. Dawam Anas
 - 5. KH. Imron Hamzah

Anggota Tim Perumus

- 1. KH. Drs. Masduqi Mahfudz
 - 2. KH. Drs. Safruddin Syarif
 - 3. KH. Nadhif Zuhri
 - 4. KH. A. Wahid Zuhdi
 - KH. Drs. Ahmad Ansori
 - 6. KH. Subadar
 - 7. KH. Drs. Siddiqi Muhdar
 - 8. KH. Drs. Hasyim Abbas
 - 9. KH. Abdullah Mukhtar
 - 10. KH. Anang Manshur
 - KH. Cholil Anwar
 - 12. KH. Drs. Sanusi Nasution
 - 13. KH. A. Waris Ilyas

407. Menyelenggarakan Shalat Jum'at Dua Angkatan

Kesadaran umat Islam untuk menjalankan kewajiban agamanya dewasa ini dirasakan semakin meningkat. Hal ini antara lain ditandai dengan syiar agama yang kian semarak, dan membludaknya mesjid-mesjid dalam shalat Jum'at. Penyelenggaraan shalat Jum'at tidak hanya di pemukiman, tapi juga di perkantoran, pertokoan dan kawasan industri.

Namun hal ini belum sepenuhnya diimbangi oleh penyediaan sarana dan prasarana ibadah yang cukup memadai, serta masih terdapatnya faktor-faktor kondisional yang menyebabkan tidak terpenuhinya hasrat untuk menjalankan ibadah sebagaimana mestinya. Para karyawan pabrik kaca, misalnya, tidak dapat secara bersama-sama melaksanakan shalat Jum'at karena ada proses yang tidak dapat ditinggal sama sekali. Ada pula pertokoan yang tetap buka saat shalat Jum'at, sehingga tidak memungkinkan pramuniaga prianya secara serentak meninggalkan tugasnya. Hal ini bisa diatasi dengan menyelenggarakan shalat Jum'at secara bergantian, bertahap, atau shalat Jum'at dalam dua shif (angkatan).

- S: Bolehkah menyelenggarakan shalat Jum'at kedua dan seterusnya oleh orang-orang yang bekerja di tempat yang tidak mungkin ditinggalkan sama sekali pada hari Jum'at itu karena menjaga produksi dari kerusakan.
- J: Ta'addud Jum'at berbeda dengan Jum'atan dua shif/angkatan atau lebih (insya al- jum'ah ba'da al-jum'ah).

Ta'addud Jum'at ialah berbilangnya penyelenggaraan jamaah Jum'at dalam satu masa di suatu tempat, dan hukumnya boleh dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana keputusan Muktamar NU di Situbondo, Nopember 1984, dalam masalah nomor 359.

Adapun Jum'atan dua shif/angkatan atau lebih (insya al- jum'ah ba'da al-jum'ah) yang artinya penyelenggarana shalat Jum'at lebih dari satu di suatu tempat, maka hukumnya tidak sah.

Jalan Keluar

- Karyawan seperti itu wajib berikhtiar seoptimal mungkin agar dapat menunaikan jum'atan shiff pertama.
- b. Sebaiknya ditugaskan kepada karyawati untuk menjaga produksi agar karyawan dapat menunaikan shalat Jum'at.
- c. Dalam hal ikhtiar tersebut bila tidak berhasil maka kewajiban shalat Jum'at menjadi gugur dan wajib menunaikan shalat Zhuhur dan dianjurkan berjamaah. Jika ada udzur syar'i di dalam meninggalkan

shalat Jum'at demikian ini dengan mengganti shalah Zhuhur hukumnya tidak berdosa. Tetapi jika tidak ada udzur syar'i, hukumnya berdosa.

Rekomendasi:

Kepada Pemerintah dan para produsen/pengusaha agar memberikan jaminan kebebasan kepada para karyawan untuk menjalankan agamanya, dan melaksanakan shalat Jum'at.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Minhaj al-Qawim1

Adapun selain makmum, maka tidak boleh mengganti imam shalat jum'at (ketika si imam hadats di tengah-tengah shalat), karena serupa dengan membentuk salat Jum'at setelah salat Jum'at yang lain (dalam satu masa secara serentak di tempat yang sama). Dan hal tersebut tidak tidak diperbolehkan.

2. Tanwir al-Qulub2

... حَتَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ لَمْ يُقِمْهَا إِلاَّ فِي مَسْجِدِهِ اللَّهِ وَلَمْ يُرَخِّصْ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ مَعَ فَرَطِ حُبِّهِ لِلتَّيْسِيْرِ عَلَى أُمَّتِهِ فِي أَنْ يُقِيْمُوْهَا فِيْ مَسَاجِدَ مُتَعَدِّدَةٍ أَوْ يُصَلِّي بِمَنْ يَتَيَسَّرُ لَهُ الحُضُورُ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَيَأْذَنُ فِيْ أَنْ تُقَامَ بَعْدَهُ جُمْعَةٌ وَجُمْعَةٌ وَقَالِئَةٌ وَهَكَذَا لِبَاقِيْ الَّذِيْنَ لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَحْضُرُوا، وَكَانَ ذَلِكَ أَيْسَرَ عَلَيْهِمْ لَوْ كَانَ

... sehingga jika sudah datang hari Jum'at, maka beliau Saw. tidak melaksanakan salat Jum'at kecuali di mesjidnya Saw. dan beliau Saw. meskipun sangat ingin memberikan kemudahan kepada umatnya tidak memberi dispensasi untuk mendirikan shalat Jum'at di banyak mesjid, atau shalat bersama orang yang bisa datang kepadanya di awal waktu, dan mendirikan shalat jumat kedua, ketiga dan seterusnya bagi mereka yang tidak bisa datang (di awal waktu). Padahal cara itu lebih mudah bagi mereka seandainya memang diperkenankan.

3. Hasyiyah al-Syarwani³

Ibn Hajar al-Haitami, Minhaj al-Qawim pada al-Hawasyi al-Madaniyah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1340 H), Juz II, h. 50.

Muhammad Ain al-Irbili, Tanwir al-Qulub, (Surabaya: Syirkah Bugkul Indah, t. th.), h. 189.

³ Abdul Hamid al-Syirwani, Hawasyi al-Syirwani pada Hawasyai al-Syirwani wa al-'Abbadi, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid II, h. 406.

وَأُمَّا مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ إِحْضَارِ الْخُنْزِلِمَنْ يُخْبِرُهُ وَيُعْطِيْ مَا جَرَتْ لَهُ الْعَادَةُ مِنَ الْأُجْرَةِ فَلَيْسَ اشْتِغَالُهُ بِالْخُنْزِ عُذْرًا بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ حُضُورُ الْجُمْعَةِ وَإِنْ أَدَّى إِلَى تَلَفِهِ مَا لَمْ يُكْرِهْهُ صَاحِبُ الْخُنْزِ عَلَى عَدَمِ الْحُضُورِ فَلاَ يَعْصِ

Adapun kebiasaan yang berlaku, yaitu menghidangkan roti bagi bagi orang yang menyuruhnya membuat roti dan memberikan upah seperti biasanya, maka kesibuka nnya dengan roti itu tidak menjadi udzur (meninggalkan shalat jum'at), namun ia wajib mengikuti shalat Jum'at walaupun dapat menyebabkan kerusakan roti itu selama pemilik roti tidak memaksanya untuk tidak mengikuti. Maka dalam hal ini ia tidak berdosa.

4. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah4

Para ulama Syafi'i berpendapat, barangsiapa yang ketinggalan shalat Jum'at karena sesuatu *udzur* atau lainnya, maka disunatkan untuk shalat Zhuhur berjamaah.

408. Menyelenggarakan Shalat Jum'at Tanpa Mustauthinin dan Muqimin

Di kota-kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya, banyak kantor, pertokoan, kawasan industri dan kompleks perumahan yang menyelenggarakan shalat Jum'at. Jamaah shalat Jum'at terdiri dari para pegawai/karyawan atau orang-orang yang tidak tergolong penduduk asli atau berdomisili di tempat tersebut (*mustauthin*). Kalau pun ada *mustauthin* jumlahnya sedikit.

- S: Bagaimana hukum shalat Jum'at tanpa mustauthin dan muqimin atau ada mustauthin, tetapi tidak mencukupi syarat, seperti yang terjadi di hotelhotel dan restauran-restauran di kota Jakarta dan Surabaya?
- J: Shalat Jum'at tanpa *mustauthin* dan *muqimin* atau dengan *mustauthin* dan *muqimin*, tetapi tidak memenuhi syarat, hukumnya *tafshil*:
 - a. Tidak sah, menurut mayoritas ulama Syafi'iyyah. Sementara Imam Syafi'i sendiri dalam *qaul qadim* yang dikuatkan oleh al-Muzanni memandang sah bila jumlah jamaah itu diikuti *mustauthin* minimal 4 orang.

⁴ Abdurrahman al-Juzairi, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid I, h. 382.

b. Imam Abu Hanifah mengesahkan secara mutlak.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab5

Menurut mayoritas ulama, tidak sah shalat Jum'at bagi budak dan musafir, berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang mengesahkannya.

2. Risalah Bulugh al-Umniyah fi Fatawa al-Nawazil al-'Ashriyah 6

Bahkan guruku, al-Bakri bin Muhammad Syaththa, dalam catatan atas kitab I'anah al-Thalibinnya berkata: "Sungguh Imam Syafi'i punya dua qaul qadim tentang jumlah jamaah shalat Jum'at pula. Salah satunya adalah minimal empat orang. Pendapat ini dikutip oleh pengarang kitab al-Talkhish dan dihikayatkan al-Nawawi dalam Syarh al-Muhadzdzab.

3. Al-Muhadzdzab⁷

مِنْ شَرْطِ الْعَدَدِ أَنْ يَكُوْنُوا رِجَالاً أَحْرَارًا مُقِيْمِيْنَ بِالْمَوْضِعِ فَأَمَّا النِّسَاءُ وَالْعَبِيْدُ وَالْمُسَافِرُ فَلاَ تَنْعَقِدُ بِهِمْ الْجُمْعَةُ لِأَنَّهُ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِمْ الْجُمْعَةُ فَلاَ تَنْعَقِدُ بِهِمْ كَالصَّبْيَانِ وَهَلْ تَنْعَقِدُ بِمُقِيْمِيْنَ غَيْرَ مُسْتَوْطِنِيْنَ فِيْهِ وَجْهَانِ قَالَ أَبُوْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ تَنْعَقِدُ بِهِمْ لِأَنَّهُ تَلْزَمُهُمْ الْجُمْعَةُ فَانْعَقَدَتْ بِهِمْ كَالْمُسْتَوْطِنِيْنَ

Di antara syarat jumlah jamaah tersebut adalah, mereka terdiri dari laki-laki, merdeka dan menetap di suatu tempat. Adapun perempuan, budak dan musafir, maka shalat Jum'at tidak menjadi sah dengan kehadiran mereka, karena mereka tidak berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at sehingga shalat itu pun tidak menjadi sah dengan kehadiran mereka, sama seperti anak-anak. Apakah shalat Jum'at itu sah dengan jamaah terdiri dari para muqimin (penduduk) yang tidak menetap. Dalam hal itu terdapat dua wajh; Abu Ali bin Abi Hurairah berpendapat: "Shalat

⁵ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid IV, h. 382.

Muhammad Ali al-Maliki, Risalah Bulugh al-Umniyah fi Fatawa al-Nawazil al-'Ashriyah pada Inarah al-Duja Syarh Tanwir al-Hija Nadzm Safinah al-Naja, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1952), h. 232.

Abu Ishaq al-Syairazi, al-Muhadzdzab pada al-Majmu', (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid IV, h. 420.

Jum'at dengan mereka itu sah karena mereka berkewajiban shalat Jum'at, sehingga shalat itu menjadi sah, sama seperti para penduduk tetap."

4. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh⁸

Dan jumlah minimal jamaah Jum'at menurut Abu Hanifah dan Muhammad dalam pendapat al-Ashah adalah tiga orang selain imam, walaupun mereka itu musafir dan orang sakit, karena minimal jumlah jamak yang sahih itu adalah tiga.

409. Pemindahan Komplek Makam

Dengan berbagai macam alasan, dewasa ini makin banyak kompleks makam atau makam seseorang dipindah ke tempat lain.

- S: Bagaimana hukum pemindahan kompleks makam dan makam seseorang ke tempat lain?
- J: Pemindahan kompleks makam dan makam seseorang ke tempat lain hukumnya tafshil:
 - a. Pemindahan makam ke tempat lain haram hukumnya, kecuali menurut mazhab Hanafi.
 - b. Memindah mayat seseorang dari makamnya ke tempat lain menurut mazhab Syafi'i hukumnya haram, kecuali karena darurat. Sedangkan menurut mazhab Maliki hukumnya boleh dengan syarat:
 - 1). Tidak terjadi perusakan pada tubuh mayat;
 - 2). Tidak menurunkan martabat mayat;
 - 3). Pemindahan tersebut atas dasar maslahat.

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah al-Syarqawi 'ala al-Tahrir⁹

Menurut kami (mazhab Syafi'i) tidak boleh mengganti barang wakaf, berbeda dengan ulama Hanafi. Gambarannya menurut mereka adalah,

524

⁸ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Jilid II, h. 275.

⁹ Al-Syarqawi, Hasyiyah al-Syarqawi 'ala al-Tahrir, (Mesir: Dar al-Kutub al-'Arabiyah al-Kubra, 1332 H), Jilid II, h. 170.

ada suatu tempat yang nyaris runtuh, lalu diganti dengan tempat lain yang lebih bagus setelah ada keputusan hakim yang mengabsahkan penggantian itu.

2. Fath al-Wahhab10

Haram membongkar kuburan sebelum mayat hancur sesuai dengan pendapat para pakar tentang tanahnya setelah penguburannya, untuk dipindahkan ataupun lainnya, seperti mengkafani dan menyalati. Sebab dalam hal itu terdapat perusakan terhadap kehormatan mayat. Kecuali karena darurat, seperti dikuburkan tanpa disucikan dengan dimandikan atau tayamum, sedangkan mayat itu termasuk orang yang harus disucikan.

3. Nihayah al-Zain¹¹

Seandainya tanahnya berupa pekuburan yang diperuntukkan umum, yaitu tanah yang kebiasaan pemakaman penduduk daerah itu di situ, maka haram mendirikan bangunan di atasnya dan harus dirobohkan.

4. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah 12

الْمَالِكِيَّةُ قَالُواْ: يَجُوْزُ نَقْلُ الْمَيِّتِ قَبْلَ الدَّفْنِ وَبَعْدَهُ مِنْ مَكَانٍ إِلَى آخَرَ بِشَرُوطٍ ثَلاَثَةٍ أَوَّلُهَا أَنْ لاَ يَنْفَجِرَ حَالَ نَقْلِهِ ثَانِيْهَا أَنْ لاَ تُهْتَكَ حُرْمَتُهُ بِأَنْ يُنْقَلَ عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ فِيْهِ تَحْقِيْرٌ لَهُ ثَالِئُهَا أَنْ يَكُونَ نَقْلُهُ بِمَصْلَحَةٍ ... فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ الثَّلاَثِ حَرُمَ نَقْلُهُ

Ulama Maliki berpendapat, boleh memindahkan mayat sebelum dan sesudah dikubur dari satu tempat ke tempat lain dengan tiga syarat; pertama mayat tidak pecah (rusak) ketika dipindah, *kedua* tidak sampai menodai kehormatannya, yaitu memindahkannya dengan cara yang di dalamnya terdapat penghinaan baginya, *ketiga* kepindahannya karena suatu maslahat. ... Jika satu syarat dari ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka haram memindahkannya.

Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab pada Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid II, h. 211.

Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 155.

Abdurrahman al-Juzairi, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid I, h. 505-506.

410. Nikah Mut'ah

Secara lughawi nikah mut'ah berarti al-damm wa al-jam' (penggabungan dan pengumpulan) atau al wath'u (persetubuhan). Secara istilahi nikah adalah ikatan perjanjian ('aqd) yang telah ditetapkan Allah untuk melegitimasi pemilikan seorang laki-laki atas upaya istimta' terhadap wanita yang bukan mahramnya. Selain ibadah, nikah merupakan wujud sikap ta'awun antara individu, pendirian lembaga keluarga dan sarana reproduksi.

Jumhur fuqaha berpendapat, ada 4 macam nikah fasidah (rusak, tidak sah), yakni nikah syighar (tukar menukar anak perempuan atau saudara perempuan tanpa mahar), nikah mut'ah (dibatasi dengan waktu tertentu yang diucapkan dalam 'aqd), nikah yang dilakukan terhadap seorang wanita yang dalam proses khitbah (pinangan) lakilaki, dan nikah muhallil (siasat penghalalan menikahi mantan istri yang dithalaq bain). Namun ada juga yang menghalalkan nikah mut'ah, dengan dasar surat al-Nisa' ayat 24 yang artinya: "Maka istriistri yang telah kamu nikmati [campuri] di antara mereka, berikanlah al-ujr [biaya kontrak] kepada mereka." Selain itu dasar penghalalannya adalah hadits Nabi Saw. yang meriwayatkan, ketika perang Tabuk para sahabat diperkenankan menikahi wanita dengan sistem kontrak waktu.

Ada titik singgung antara nikah *mut'ah* dan nikah biasa. Pertama, pada nikah *mut'ah*, batas waktu dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, pada nikah biasa, dikenal istilah *thalaq* (cerai) untuk mengakhiri ikatan pernikahan.

- S: Nikah mut'ah bila dikaitkan dengan titik singgung waktu yang diperpanjang melalui kesepakatan kedua belah pihak dan titik singgung mengakhiri ikatan pernikahan melalui thalaq pada pernikahan biasa, mengingat semakin maraknya prostitusi, perselingkuhan, dipersulitnya poligami dan kemampuan ekonomi yang semakin meningkat dan memicu meningkatnya hubungan seksual di luar nikah, bagaimana hukum nikah mut'ah tersebut?
- J: Nikah *mut'ah* menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya mazhab empat, hukumnya haram dan tidak sah (batal).

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Umm 13

وَكَذَا كُلُّ نِكَاجٍ إِلَى وَقْتٍ مَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُوْلٍ فَالنِّكَاحُ مَفْسُوْخُ لاَ مِيْرَاتَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ

¹³ Al-Syafi'i, al-Umm, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Jilid V, h. 86.

وَلَيْسَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مِنْ أَحْكَامِ الأَزْوَاجِ طَلاَقُ

Demikian halnya semua nikah yang ditentukan berlangsungnya sampai waktu yang diketahui ataupun yang tidak diketahui (temporer), maka nikah tersebut tidak sah, dan tidak ada hak waris ataupun thalaq antara kedua pasutri.

2. Fatawa Syar'iyah wa Buhuts Islamiyah¹⁴

(السُّوَّالُ) تَزَوَّجَ بِعَقْدِ وَبِشُهُوْدِ لِمُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ فَمَا حُكُمُ هَذَا الزَّوَاجِ شَرْعًا (الْجُوَابُ) هَذَا الرَّوَاجُ الْمُوَقَّتُ بَاطِلُ شَرْعًا كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُوْرُ الْحَتَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَتَابَلَةِ. وَفِي الْهِدَايَةِ وَالنَّكَاحُ الْمُوَقَّتُ بَاطِلُ شَرْعًا كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُوْرُ الْحَتَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَتَابَلَةِ. وَفِي الْهِدَايَةِ وَالنَّكَاحُ الْمُوَقَّتُ بَاطِلُ. وَفِي مِنَحِ الْجَلِيْلِ وَفُسِخَ النَّكَاحُ لِأَجَلٍ مُسَمِّى وَلَوْ بَعْدَ الْأَجَلِ وَهُو نَالمَتْعَةِ. وَفِي الْمُغْنِي لِابْنِ قُدَامَةً وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا فِيْ وَقْتٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَنْعَقِدُ النَّكَاحُ لِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ مَانِعُ مِنْ بَقَاءِ النَّكَاحِ فَأَشْبَهَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ

Pertanyaan: "Seseorang kawin dengan akad dan saksi untuk masa tertentu, maka bagaimanakah hukum perkawinan ini menurut syar'i."

Jawaban: "Nikah temporer ini batal secara syar'i. Seperti pendapat Jumhur ulama madzhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Dan dalam kitab Minah al-Jalil disebutkan, nikah yang ditentukan untuk masa tertentu itu dirusak, meskipun setelah lewan masa itu, dan pernikahan tersebut termasuk nikah mut'ah. Dalam al-Mughni karya Ibn Qudamah disebutkan: "Bila ada lelaki mengawini perempuan untuk dicerai pada waktu yang telah ditentukan, maka perkawinannya tidak sah karena syarat itu mencegah kelanggengan perkawinan, maka serupa dengan nikah mut'ah."

3. Rahmah al-Ummah¹⁵

وَأَجْمَعُوْا عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ بَاطِلُ لاَ خِلاَفَ بَيْنَهُمْ فِيْ ذَلِكَ وَصِفَتُهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى مُدَّةٍ وَيَقُوْلُ زَوَّجْتُكِ إِلَى شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَهُوَ بَاطِلُ مَنْسُوْخٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ قَدِيْمًا وَحَدِيْثًا

Para ulama bersepakat, bahwa nikah mut'ah itu tidak sah tanpa ada perselisihan pendapat antara mereka. Bentuknya adalah, seseorang mengawini perempuan untuk masa tertentu dengan berkata: "Aku mengawini kamu untuk masa satu bulan, satu tahun dan semisalnya."

Hasanain Muhammad Makhluf, Fatawa Syar'iyah wa Buhuts Islamiyah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1965), Jilid II, h. 7.

Abu Abdillah al-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah pada al-Mizan al-Kubra, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1965), Juz II, h. 39.

Perkawinan ini tidak sah dan telah dihapus oleh ijma' para ulama masa lalu dan sekarang.

- 4. Referensi Lain
 - a. I'anah al-Thalibin, Juz III, h. 278 279.
 - b. Al-Mizan al-Kubra, Juz II, h. 113.
 - c. Al-Syarwani 'ala al-Tuhfah, Juz VII, h. 224.

411. Bai'ud Dain (Jual Beli Piutang)

Si A berhutang pada B. Perjanjian hutang-piutang tersebut dikuatkan dalam akte perjanjian hutang-piutang. Karena mendesaknya kebutuhan, sebelum jatuh tempo oleh B, akte perjanjian hutang-piutang itu dijual kepada C. Berdasarkan akte perjanjian hutang-piutang itu C menagih kepada si A.

- S: Bagaimana hukum jual beli hutang-piutang (bai' al-dain)? Misalnya si A berhutang kepada si B. Perjanjian hutang-piutang dikuatkan dalam akte perjanjian hutang-piutang. Karena terdesak kebutuhan, sebelum jatuh tempo, akte perjanjian hutang-piutang tersebut dijual kepada si C. Berdasarkan akte perjanjian tersebut si C menagih kepada si A?
- J: Jual beli hutang-piutang (bai' al-dain) seperti tersebut di atas hukumnya boleh, jika nilainya sama. Dan jika nilainya berkurang, hukumnya tidak boleh.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Iqna' fi Hill Alfazh Abi Syuja'16

Sah menjual hutang dengan selain hutang kepada orang lain yang tidak punya kewajiban atasnya, seperti Bakar menjual kepada Umar hutang senilai seratus yang menjadi kewajiban Zaid dengan nilai seratus pula. Pendapat ini diunggulkan dalam *al-Raudhah*, berbeda dengan *al-Minhaj* yang tidak mengesahkannya.

2. Bughyah al-Mustarsyidin¹⁷

Muhammad Khatib al-Syirbini, al-Iqna' fi Hill Alfazh Abi Syuja', (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H), Juz I, h. 280.

Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1952), h. 131.

(مَسْأَلَةُ كَ) لاَ يَصِحُّ بَيْعُ الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ بِأَنْقَصَ مِنْهُ حَالاً مِنْ جِنْسِهِ مِنَ الْمَدِيْنِ رِبَوِيًّا أَوْ غَيْرَهُ كَمَا لَوْ صَالَحَ مِنْ عَشْرَةٍ مُؤَجَّلَةٍ عَلَى خَمْسَةٍ حَالَةٍ لِأَنَّهُ جَعَلَ التَّقْصَ فِي مُقَابَلَةِ الْحُلُوْلِ وَهُوَ لاَ يَجِلُّ

(Kasus dari Muhammad Sulaiman al-Kurdi) Tidak sah menjual hutang bertempo dengan sesuatu yang nilainya lebih rendah dari jenis hutang tersebut secara kontan kepada orang yang menghutangi, baik berupa barang *ribawi* atau selainnya. Seperti akad *shulh* (damai) dari 10 yang ditempo pada 5 secara kontan. Sebab, ia menjadikan kekurangannya sebagai imbal balik dari pembayaran kontannya dan hal itu tidak halal.

Al-Mizan al-Kubra¹⁸

وَكَذَلِكَ اتَّفَقُوْا عَلَى تَحْرِيْمِ النَّجْشِ وَعَلَى تَحْرِيْمِ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَهُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ هَذَا مَا وَجَدْتُهُ مِنْ مَسَائِلِ الْاِتِّفَاقِ

Dan begitu pula para ulama sepakat atas keharaman najsy (menawar dengan bertujuan agar orang lain menawarnya dengan harga yang lebih dari semestinya) dan atas bai' al-kali' bi al-kali', yaitu keharaman menjual hutang dibeli dengan hutang. Inilah sebagian kasus yang disepakati ulama yang aku temukan.

4. Referensi Lain

a. Sullam al-Taufiq, h. 53.

412. Bai'ul 'Inah (Jual Beli Barang Yang Berasal Dari Berhutang Kepada Pemberi Hutang)

Si A berhutang suatu barang kepada B, seharga Rp. 100.000,00. Setelah menerima barang itu, A menjual barang tersebut kepada B seharga Rp. 75.000,00.

- S: Bagaimana hukum menjual barang yang berasal dari berhutang kepada yang memberinya hutang (bai' al-'inah)?
- J: Imam Asy-Syafi'i dan ulama mazhab berpendapat bahwa hukum bai' al-'inah sah, namun makruh tanzih. Sedangkan imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal tidak memperbolehkan.

Keterangan, dari kitab:

¹⁸ Abdul Wahhab al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t. th.), Juz II, h. 72.

1. Al-Mizan al-Kubra¹⁹ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِجَوَازِ بَيْعِ الْعِيْنَةِ مَعَ الْكَرَاهَةِ ... مَعَ قَوْلِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ بِعَدَمِ جَوَازِ ذَلِكَ

Dan termasuk yang diperselisihkan ulama adalah pendapat Imam Syafi'i tentang keabsahan bai'u al-'inah (menjual kembali barang yang sudah dibeli secara berhutang kepada pemilik barang semula yang menghutanginya) besertaan hukum makruh, ... serta pendapat Imam Abu Hanifah, Malik dan Ahmad, tentang ketidakbolehannya.

2. Al-Anwar li A'mal al-Abrar²⁰

Jual beli 'inah tidak termasuk larangan-larangan yang diharamkan dan bukan yang dimakruhkan, jika tidak dibiasakan. Pengertian jual beli 'inah adalah seseorang menjual sesuatu secara kredit, dan menyerahkannya kepada pembeli, lalu ia membelinya lagi secara kontan dengan harga yang lebih murah dari harga awal.

3. Hadits Abu Dawud

"Dari Ibn Umar, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Jika kalian melakukan jual beli secara 'inah, mengambil ekor sapi (sibuk membajak sawah), rela dengan pertanian dan meninggalkan jihad, maka Allah Swt. akan menimpakan kehinaan terhadap kalian yang tidak akan dicabunNya sampai kalian kembali ke agama kalian." (HR. Abu Dawud).

413. Memanfaatkan Tanah Jaminan, Selama yang Berhutang Belum Melunasi

Si A berhutang kepada B sejumlah uang, dengan agunan/jaminan sebidang tanah. Selama A belum mampu melunasi hutangnya, B berhak menanami tanah A.

S: Bagaimana hukum memanfaatkan sebidang tanah agunan fjaminan selama

530

¹⁹ Abdul Wahhab al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t. th.), Juz II, h. 70.

²⁰ Yusuf al-Ardabili, al-Arwar li A'mal al-Abrar, (Mesir: Musthafa al-Halabi, t. th.), Jilid I, h. 229.

orang yang berhutang belum mampu melunasi hutangnya?

J: Menggunakan kemanfaatan agunan oleh pihak penerima gadai, hukumnya haram, sebab barang agunan hanya sekedar borg (jaminan), kecuali dengan jalan nadzar atau ibadah (pemberian perkenan) dari pihak orang yang menggadaikan (rahin).

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah al-Syarqawi 'ala al-Tahrir²¹

Dan seperti penyaratan pemanfaatan barang barang gadai bagi pihak yang menghutangi, atau niscaya tambahan-tambahan barang gadai seperti buah dari suatu pohon dan anak dari seekor kambing ikut digadaikan, maka akad gadai dan syarat tersebut tidak sah. Begitu penjelasan Syaikh Zakaria al-Anshari dala Syarh Manhaj al-Thullab.

2. Fath al-Mu'in²²

Dan akad gadai itu sah, yaitu menjadikan suatu barang yang boleh diperjualbelikan sebagai agunan hutang yang akan dilunasi dari barang tersebut ketika tidak bisa melunasinya. Maka tidak sah menggadaikan barang wakaf dan budak *umm walad* (budak wanita yang melahirkan anak majikannya). ... Akad gadai tidak sah dengan sebab persyaratan yang merugikan pihak yang menggadaikan atau yang menerima gadai. ... Dan seperti menyaratkan pemanfaatan barang yang digadaikan bagi pihak yang menerima gadai (pemberi hutang).

3. Fath al-Mu'in²³

قَالَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الْعَلاَّمَةُ الْمُحَقِّقُ الطَّنْبَدَاوِيُّ فِيْمَا إِذَا نَذَرَ الْمَدْيُونُ لِلدَّائِنِ مَنْفَعَةَ

²¹ Abdullah bin Hijazi al-Syarqawi, Hasyiyah al-Syarqawi 'ala al-Tahrir, (Mesir: Dar al-Kutub al-'Arabiyah al-Kubra, 1332 H), Juz II, h. 123.

²² Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in pada I'anah al-Thalibin, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t.th.), Jilid IV, h. 37-38.

²³ Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in pada I'anah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Jilid II, h. 370.

اْلاَّرْضِ الْمَرْهُوْنَةِ مُدَّةَ بَقَاءِ الدَّيْنِ فِيْ ذِمَّتِهِ. وَالَّذِيْ رَأَيْتُهُ لِمُتَأَخِّرِيْ أَصْحَابِنَا الْيَمَنِيِّيْنَ مَا هُوَ صَرِيْحُ فِيْ الصِّحَّةِ وَمِمَّنْ أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُ الْإِسْلاَمِ مُحَمَّدُ بْنُ حُسَيْنٍ الْقِمَاطِ وَالْعَلاَّمَةُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّمْمَنِ الْأَهْدَالِ

Syaikh Masyayikhina al-'Allamah al-Muhaqqiq al-Thanbadawi berkata tentang hukum kasus ketika pihak penghutang bernadzar memberi penghasilan sebidang lahan yang digadaikan bagi pihak pemberi hutang selama hutang tersebut masih dalam tanggungannya: "Pendapat yang aku lihat dari generasi akhir madzhab Syafi'i bangsa Yaman adalah kejelasan atas keabsahannya. Sebagian ulama yang berfatwa demikian adalah Syaikh al-Islam Muhammad bin Husain al-Qimath dan al-Allamah al-Husain bin Abdirrahman al-Ahdal."

4. Bughyah al-Mustarsyidin24

(مَسْأَلَةُ ش) رَهَنَ أَرْضًا وَأَبَاحَ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ غَيْرِهِ مَنَافِعَهَا مُدَّةَ بَقَاءِ الدَّيْنِ اِنْتَهَتْ الاِبَاحَةُ بِمَوْتِ الْمُبِيْجِ فَيَغْرُمُ الْمَنَافِعَ مِنْ حِيْنَثِذٍ

(Kasus dari Muhammad bin Abi Bakr al-Asykhar al-Yamani) Bila seseorang menggadaikan tanah dan ia memperbolehkan pihak penerima gadai atau yang lainnya untuk mengambil penghasilannya selama hutang belum terbayar, maka kebolehan tersebut habis dengan meninggalnya pemilik tanah. Maka sejak itu pihak penerima gadai atau orang lain tersebut harus bertanggungjawab atas penghasilan tanah tersebut.

5. Al-Asybah wa al-Nazha'ir25

لَوْ عَمَّ فِي النَّاسِ اعْتِيَادُ إِبَاحَةِ مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ حَتَّى يَفْسُدَ الرَّهْنُ قَالَ الْجُمْهُورُ لاَ وَقَالَ الْقَقَّالُ نَعَمْ.

Bila sudah umum di masyarakat kebiasaan kebolehan memanfaatkan barang gadai bagi penerima gadai, apakah kebiasaan itu dianggap sama dengan menjadikannya sebagai syarat, sehingga akad gadainya rusak? *Jumhur* ulama berkata: "Tidak diposisikan sebagai syarat." Sedangkan al-Qaffal berpendapat: "Ya (diposisikan sebagai syarat).

532

Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Bandung: Syirkah Nur Asia, t. th.), h. 178.

Abdurrahman al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1403 H), h. 67.

414. Mencetak dan Menerbitkan Karya Tulis Orang Lain

Belakangan ini banyak karya ilmiah ulama masa lalu diterbitkan kembali baik dalam bahasa aslinya maupun terjemahan.

- S: a. Bagaimana pandangan Islam tentang hak cipta atas karya ilmiah yang dihasilkan seseorang?
 - b. Bolehkah karya ulama masa lalu diterbitkan tanpa sepengetahuan ahli waris mu'allif/mushanifnya atas dasar al-wijadah atau dengan dalih agar lebih bermanfaat?
- J: 1. Hak cipta dilindungi oleh hukum Islam sebagai hak milik dan dapat menjadi tirkah bagi ahli warisnya, sebagaimana keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama ke 28 di Krapyak Yogyakarta tahun 1989, maslah nomor 389.
 - Mencetak dan menerbitkan karya tulis pihak lain hukumnya haram, kecuali ada izin dari pemilik hak/pengarang/penulis atau ahli waris atau pemegang kuasa atas hak cipta tersebut.
 - Apabila pemilik hak/pengarang/penulis atau ahli waris atau pemegang kuasa atas hak cipta sudah tidak ada, maka hak cipta karya tulis tersebut menjadi hak kaum muslimin untuk kemaslahatan mereka secara umum.

Keterangan, dari kitab:

1. Al-Fatawa al-Haditsiyah²⁶

وَيَنْبَغِيْ أَنْ يَعْتَنِيَ بِتَحْصِيْلِ الْكُتُبِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا مَا أَمْكَنَهُ بِشِرَاءٍ وَإِلاَّ فَبِأُجْرَةٍ أَوْ عَارِيَةٍ وَلاَ يَشْخِ شَيْءٍ مِنْهَا إِلاَّ مَا يَتَعَدَّرُ تَحْصِيْلُهُ بِغَيْرِ النَّسْخِ ... وَلاَ يَنْسَخُ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ إِذْ مُطْلَقُ الاسْتِعَارَةِ لاَ تَتَنَاوَلُ النَّسْخَ إِلاَّ إِذَا قَالَ لَهُ الْمَالِكُ لِتَنْتَفِعْ بِهِ كَيْفَ شِئْتَ وَلاَ بَأْسَ بِالنَّسْخِ مِنْ مَوْقُوفٍ عَلَى مَنْ يَنْتَفِعُ كِتَابَهُ

Dan harus diusahakan memperoleh kitab-kitab yang dibutuhkan, sebisa mungkin dengan membeli, atau jika tidak mungkin maka dengan menyewa atau meminjam. Dan hendaknya tidak melakukan penyalinan kecuali jika memang tidak mungkin bisa dihasilkan tanpa menyalinnya kembali. ... Dan tidak boleh menyalin kecuali dengan izin pemiliknya, karena peminjaman secara mutlak tidak mencakup (izin) penyalinan, kecuali si pemilik berkata: "Silakan manfaatkan buku itu sebagaimana

²⁶ Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Haditsiyah, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 163.

yang Anda inginkan." Dan boleh menyalin kitab yang diwakafkan bagi orang yang bisa memanfaatkannya.

2. Bughyah al-Mustarsyidin²⁷

(Kasus dari 'Alawi bin Saqqaf bin Muhammad al-Ja'fari al-'Alawiyun al-Hadhramiyun) Jika seseorang mengambil harta dari seseorang yang menguasainya tanpa izin, dan ia putus asa untuk mengetahui pemiliknya, maka harta itu diberikan ke bait al-mal, lalu untuk kepentingan umum umat Islam, keamanan jalan dan semisalnya.

3. Madkhal al-Fiqh al-'Amm28

Dan pembagian ini tidak sesuai dengan pengertian harta menurut pandangan syara' yang menjadi landasan pembahasan kita. Fiqh yang kita anut telah membedakan antara harta dan hak milik. Maka hak dan manfaat-manfaat dianggap sebagai hak milik yang bisa dinikmati. Bukan sebagai harta yang bisa dijadikan obyek berbagai akad, kecuali yang dikecualikan sebagaimana uraian sebelumnya.

4. Hasyiyah Qulyubi 29

(Harta pusaka) adalah yang ditinggalkan oleh mayit, meski dengan sesuatu sebab atau bukan berupa harta seperti ikhtishash (barang yang tidak bisa dimiliki namun boleh digunakan seperti pupuk kandang dan semisalnya), atau meski dalam bentuk khamr yang kemudian berubah menjadi cuka setelah kematiannya, atau had menuduh zina, atau buruan

534

²⁷ Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1952), h. 159.

²⁸ Musthafa Ahmad al-Zarqa, Madkhal al-Fiqh al-'Amm, (Damaskus: Dar al-Fikr, t. th.), h. 232.

²⁹ Syihabuddin Al-Qulyubi, Hasyiyah Qulyubi pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1956), Juz III, h. 135.

yang masuk dalam jaring yang telah dipasang sebelum kematiannya.

5. I'anah al-Thalibin30

Harta pusaka adalah peninggalan mayit berupa harta atau hak.

415. Pernikahan Pengidap HIV/AIDS

Penyakit Aids (Acquired Immune Deficiency Syndrome) adalah kumpulan gejala akibat menurun/hilangnya daya tahan/kekebalan tubuh. Penyebab AIDS adalah kuman HIV (Human Immuno Deficiency Virus). Dewasa ini AIDS sudah menjadi masalah sosial dan kemanusiaan, karena sifatnya yang mematikan dan belum diketemukan obat untuk menyembuhkannya dan vaksin untuk mencegah penularannya.

Karena virus HIV dapat berada dalam darah, cairan vagina dan sperma, maka penularan dan penyebaran dapat terjadi melalui:

- a. Sexual (hubungan kelamin);
- b. Parenteral (melalui alat tusuk/suntik), darah dan produk darah yang tercemar HIV;
- c. Perinatal (dari ibu hamil pengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya).

Sebagian besar (90 %) penularan HIV terjadi secara seksual, selebihnya terjadi secara parenteral dan perinatal. Berbeda dengan penyakit lain, pengidap HIV/AIDS tidak dapat disembuhkan, karenanya menurut perhitungan medis pengidapnya pasti mati. Hanya saja, dari HIV menjadi AIDS melalui beberapa stadium dalam kurun waktu yang cukup lama, yang memungkinkan penularannya kepada orang lain.

- S: a. Bagaimana hukum pernikahan pengidap HIV/AIDS, baik dengan sesama pengidap maupun bukan?
 - b. Bagaimana cara memandikan jenazah pengidap HIV/AIDS?
 - c. Mengingat belum diketemukannya obat penyembuh, beban psikologis penderita dan kemungkinan penularannya, bagaimana hukum euthanasia (tindakan mengakhiri hidup) pengidap HIV/AIDS?
- J: a. Pernikahan pengidap HIV/AIDS dengan sesama pengidap maupun bukan, hukumnya sah namun makruh.
 - b. Jenazah pengidap HIV/AIDS tetap dimandikan sebagaimana

³⁰ Muhammad Syaththa al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t.th.), Jilid III, h. 223.

biasa dengan memperhatikan petunjuk dokter/ahlinya. Jika dikhawatirkan terjadi penularan, maka ditayammumi.

c. Hukum euthanasia (tindakan mengakhiri hidup) ialah haram.

Keterangan, dari kitab:

1. Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib31

Begitu pula bagi wali wanita boleh memfaskh (merusak) akad nikah dengan sebab penyakit kusta dan lepra yang sudah lama diderita suami. Sebab mereka bisa menerima aib dengan masing-masing kedua penyakit itu dan sebab aib penyakit tersebut bisa menjalar kepada si wanita dan keturunanya.

2. Hadits Nabi Saw.

Nabi Saw. bersabda: "Larilah dari penderita lepra seperti larimu dari singa."

3. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj³²

Dalam kitab *al-Umm* Imam Syafi'i berkata: "Adapaun lepra dan kusta, maka sungguh masing-masing dari keduanya bisa menular kepada suami (atau ke istri) dan anak. ... Adapun anak, maka sedikit sekali yang selamat dari (penularan) penyakit tersebut.

4. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj³³

(Dan jenazah yang sulit dimandikan) sebab tidak ada air atau selainnya, seperti terbakar atau terkena racun binatang ... atau dikhawatirkan

536

³¹ Zakaria al-Anshari, Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib, (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, t. th.), Jilid III, h. 176.

Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid III, h. 203.

³³ Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid I, h. 358.

orang yang memandikannya tertulari -semisal racun dari tubuh jenazahdan tidak mungkin menjaga diri -darinya-, maka (jenazah itu ditayammumi) secara wajib, karena men*qiyas*kan pada mandi *jinabah*.

Al- Hawasyi al-Madaniyah³⁴

Dan sekiranya sulit untuk memandikan jenazah, yaitu akan membuatnya rontok -bila dimandikan-, maka jenazah itu wajib ditayammumi.

(Ungkapan penulis: "Yaitu akan membuatnya rontok."), maksudnya seperti sebab luka bakar, digigit binatang beracun atau dikhawatirkan orang yang memandikannya tertulari -semisal racun dari tubuh jenazah-dan tidak mungkin menjaga diri -darinya-.

6. Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin35

(Masa -pembayaran diyat- pembunuhan jiwa dimulai dari keluarnya) ruh, (dan -masa pembayaran diyat dari selain pembunuhan jiwa dimulai-dari -permulaan- terlukai).

7. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj³⁶

Dalam pembunuhan al-'amd -secara sengaja- disyaratkan pembunuhan itu merupakan kezaliman dari sisi pembunuhan itu menghilangkan ruh. Berbeda dengan pembunuhan yang bukan merupakan kezaliman ... (Dan pembunuhan itu), maksudnya kesengajaan membunuh seseorang (adalah bermaksud melakukan tindakan) jahat, (pada tubuh seseorang dengan alat yang bisa membunuh) secara pasti (atau pada umumnya).

³⁴ Sulaiman al-Kurdi, *al-Hawasyi al-Madaniyah*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1366 H), Juz II, h. 71.

³⁵ Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, (Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Jilid IV, h. 156.

³⁶ Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid IV, h. 4 dan 5.

8. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj³⁷ وَيَبْقَى إِلَى الْمَوْتِ فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ عَمْدُ لِأَنَّهُ يَقْتُلُ غَالِبًا ... (وَلَوْ حَبَسَهُ وَمَنَعَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ) أَوْ أَحَدَهُمَا (وَ) مَنَعَهُ أَيْضًا (الطَّلَبَ) لِذَلِكَ (حَتَّى ... (وَلَوْ حَبَسَهُ وَمَنَعَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ) أَوْ أَحَدَهُمَا (وَ) مَنَعَهُ أَيْضًا (الطَّلَبَ) لِذَلِكَ (حَتَّى مَاتَ) هِسَبَبِ الْمَنْعِ (فَإِنْ مَضَتْ) عَلَيْهِ (مُدَّةً يَمُوتُ مِثْلُهُ) أَيْ الْمَحْبُوسِ (فِيهَا غَالِبًا جُوعًا أَوْ عَطَشًا فَعَمْدُ) لِظُهُورِ قَصْدِ الْإِهْلَاكِ بِهِ

Dan -termasuk syarat pembunuhan syibh al-'amd seperti membunuh dengan cambuk atau tongkat kecil- sakitnya tidak parah dan sampai mati. Maka bila dalam kasus itu terdapat sebagian hal tersebut maka kasus itu merupakan pembunuhan 'amd -secara sengaja-. Sebab pembunuhan itu pada umumnya bisa membuat orang terbunuh. ... (Dan bila seseorang memenjara korban dan mencegahnya dari makanan dan minuman) atau salah satunya, (dan) dan mencegahnya pula dari (mencari) makanan, minuman atau salah satunya (sehingga mati) dengan sebab pencegahan itu, (maka bila telah lewat) baginya (suatu masa yang orang semisalnya bisa mati), maksudnya orang seperti korban yang dipenjara itu, (dalam masa itu secara umum karena kelaparan atau kehausan, maka kasus itu merupakan pembunuhan 'amd -secara sengaja-), karena begitu jelasnya tujuan membunuh dengan tindakan pencegahan tersebut.

416. Penggunaan Insulin Bagi Penderita Kencing Manis

Dengan semakin meningkatnya usia harapan hidup manusia, maka kebutuhan hidup manusia terhadap insulin semakin bertambah. Karena secara alami, dengan bertambahnya usia, maka fungsi pankreas akan semakin menurun. Dengan menurunnya fungsi pankreas, maka menurun pula fungsi insulin yang dapat dihasilkan tubuh manusia. Dengan menurunnya insulin dalam tubuh manusia, maka kemampuan tubuh manusia untuk memecah gula dalam darah akan semakin turun. Pada saat itulah manusia terkena penyakit yang disebut kencing manis (diabetes melitus), dan memerlukan suntikan insulin.

Pernah dicoba membuat insulin dari ekstraksi pankreas sapi. Namun hasilnya kurang menggembirakan, meskipun gennya cocok dengan sapi. Dari seekor sapi, hanya dihasilkan insulin 1/2 cc saja, yang berarti tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seorang sekali suntik.

³⁷ Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th.), Jilid V, h. 14 dan 15.

Percobaan pembuatan insulin dari pankreas kera, menunjukkan gennya tidak cocok dengan manusia. Akhirnya dicoba membuat insulin dengan ekstraksi pankreas babi, dan ternyata hasilnya selain gennya cocok dengan manusia, jumlah cc-nya pun mencukupi.

Mula-mula insulin dibuat dari gen pankreas babi yang diklon dalam bakteri. Dalam waktu 24 jam, dari satu gen menghasilkan milyaran gen. Kini insulin dibuat dari gen pankreas babi yang diklon dalam ragi. Karena organisme ragi lebih kompleks dari bakteri, maka hasilnya lebih baik. Dari satu gen pankreas babi yang diklon dalam ragi pada tabung fermentor kapasitas 1.000 liter dihasilkan 1 liter insulin. Insulin dari bahan dan proses seperti itulah yang kini beredar di seluruh dunia.

- S: Bagaimana hukum penggunaan insulin yang terbuat dari pankreas babi guna penderita kencing manis (diabetes melitus)?
- J: Hukumnya boleh , jika tidak ditemukan obat lain dari bahan yang suci. *Keterangan*, dari kitab:
- 1. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab38

Adapun berobat dengan bahan-bahan najis selain *khamr* itu boleh. Hal ini berlaku pada seluruh jenis najis selain yang memabukkan. Ini adalah pendapat *al-Madzhab, al-Manshush* dan *Jumhur* ulama memastikannya (sebagi keputusan hukum tunggal).

3. Al-Iqna' fi Hill Alfazh Abi Syuja'39

وَأَمَّا أَمْرُهُ ﷺ الْعُرَنِيِّينَ بِشُرْبِ أَبْوَالِ الْإِبِلِ فَكَانَ لِلتَّدَاوِي وَالتَّدَاوِي بِالنَّجِسِ جَائِزُ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِي يَقُومُ مَقَامَهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ ﷺ لَمْ يَجْعَلْ اللهُ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا فَعْدُ اللهُ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا

Dan adapun perintah Nabi Saw. kepada orang-orang suku Urainah agar meminum air kencing unta, maka hal itu untuk tujuan pengobatan.

³⁸ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid IX, h. 45-46.

³⁹ Muhammad Khatib al-Syirbini, al-Iqna' fi Hill Alfazh Abi Syuja' pada Tuhfah al-Habib, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz I, h. 313-314. Ibarah ini beliau sampaikan pula dalam kitab Mughni Muhtaj. Bukan merupakan kesimpulan Muktamirin. Lihat, Muhammad Khatib al-Syirbini, Mughni Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th.), Juz I, h. 233. (Pen.)

Sementara pengobatan dengan obat najis itu boleh ketika tidak menemukan obat suci yang bisa menggantikannya. Dan Adapun sabda Nabi Saw.: "Allah Swt. tidak menjadikan kesembuhan umatku dalam obat yang Ia haramkan bagi mereka.", maka dipahami untuk khamr (saja).

2. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj⁴⁰

Dan semua najis yang telah berubah bentuk menjadi hewan itu suci, seperti darah telor yang telah berubah menjadi anak ayam, menurut qaul yang menganggapnya najis, meski ulat dari anjing. Sebab, sifat hidup itu mempunyai dampak nyata dalam menghilangkan najis. Oleh karenanya, maka najis itu hilang karena hilangnya sifat hidup. Selain itu, karena ulat itu lahir dalam diri anjing, bukan berasal darinya.

3. Al-Iqna' fi Hill Alfazh Abi Syuja'41

Dan bila seseorang menyambung tulangnya karena dibutuhkan, dengan tulang najis yang selainnya tidak layak untuk dijadikan penyambung, maka ia dianggap *udzur* dalam hal itu. Oleh karenanya, shalatnya sah besertaan tulang tersebut (berada di tubuhnya).

4. Al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fawa'id al-Bahiyah⁴²

Barangsiapa mengkhawatirkan keselamatan diri atau sakit yang bisa menyebabkan kematian, atau semisalnya dari semua perkara yang bisa menyebabkan boleh bertayammum, dan ia (hanya) menemukan barang haram namun tidak memabukkan, seperti bangkai meski dari binatang najis mughallazhah, maka ia wajib memakan atau meminumnya.

Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid I, h. 83.

⁴¹ Muhammad Khatib al-Syirbini, al-Iqna' fi Hill Alfazh Abi Syuja', (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Jilid I, h. 443.

⁴² Abdullah bin Sulaiman al-Jurhuzi, al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fawa'id al-Bahiyah pada al-Asybah wa al-Nadzair, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), h. 117.

5. Referensi Lain

- a. Tuhfah al-Muhtaj, Juz I, h. 201, 211 dan 296.
- b. Nihayah al-Muhtaj, Juz I, h. 174 dan 427.
- c. Kanz al-Raghibin/al-Mahalli, Juz I, h. 199.
- d. Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Iqna', Juz I, h. 296
- e. Fatawa li al-Syaikh Hasanain Muhammad Makhluf, Juz II, h. 164.

417. Kloning Gen pada Tanaman, Hewan dan Manusia

Istilah *klon* atau *clone* berasal dari bahasa Yunani yang artinya pemangkasan (tanaman). Istilah ini semula digunakan untuk potongan/pangkasan tanaman yang akan ditanam. Kini, dalam term ilmu pengetahuan kloning bibit unggul secara efektif dan efisien. berarti sebuah rekayasa genetika untuk mereproduksi makhluk organik secara aseksual (tanpa diawali proses pembuahan sel telur oleh sperma, tapi diambil dari inti sebuah sel). Saat ini aplikasi kloning sudah mencakup bidang yang cukup luas, yakni kloning gen (kloning pada bakteri dan sel dalam kultur jaringan), kloning tanaman (buah, sayuran dan bunga) dan kloning hewan (katak, tikus dan domba). Manfaat kloning gen bagi kehidupan antara lain adalah untuk memperoleh hormon pertumbuhan, insulin, interferon, vaksin, terapi gen dan diagnosis penyakit genetik. Sedangkan kloning tanaman dan hewan sangat bermanfaat untuk mengembangbiakkannya yang digunakan sesuai kebutuhan manusia.

Kloning hewan pertama kali dicoba pada tahun 1950an pada katak. Kini selain pada tikus, kera dan bison, juga pada domba yang cukup menghebohkan. Kloning bison dilakukan dari sel bison yang sudah mati (fosil bison). Sedangkan kloning domba dilakukan dari sel domba yang masih hidup. Secara teoritik, kloning manusia (human cloning) juga bukan hal yang mustahil, baik dari sel manusia yang masih hidup maupun yang sudah mati, karena prosesnya tidak berbeda dengan kloning hewan. Untuk kloning manusia, sebagaimana kloning hewan, selain sel yang akan dikloning, harus ada ovum (sel telur) dan rahim. Tanpa ovum, tidak bisa dikloning. Dan tanpa rahim, sel yang dikloning pada ovum itu akan mati.

Kloning manusia ada dua cara. Cara pertama, sel langsung dikloning pada ovum. Setelah terjadi pembelahan, diambil satu langsung ditanam dalam rahim. Proses seterusnya seperti kehamilan pada umumnya. Cara kedua hampir sama dengan proses bayi tabung. Pertama-tama dilakukan pembuahan sperma atas ovum (sel telur) di luar rahim. Setelah terjadi

pembelahan (sampai maksimal 64 pembelahan), ditanam dalam rahim, sel intinya diambil dan diganti dengan sel inti manusia yang akan dikloning. Proses selanjutnya adalah sebagaimana kehamilan biasa. Namun demikian, baik melalui cara pertama maupun kedua, manusia hasil kloning tak akan persis sama dengan manusia yang dikloning, karena juga dipengaruhi oleh sperma (bagi cara kedua), ovum dan kondisi ibu yang mengandungnya. Kloning manusia juga dapat dilakukan untuk menghindarkan seseorang dari penyakit. Caranya, hasil pembuahan yang terdeteksi mengandung suatu penyakit diambil sel intinya kemudian diganti dengan sel lain yang sehat. Kemudian hasil pembuahan itu ditanamkan dalam rahim.

S: Bagaimana hukum kloning gen tanaman, hewan dan manusia?

- J: a. Pemanfaatan teknologi cloning gen pada tanaman diperbolehkan, karena hajat manusia untuk kemaslahatannya.
 - b. Kloning gen pada hewan diperbolehkan dengan catatan dilakukan dalam rangka kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat.
 - c. Adapun kloning gen pada manusia hukumnya haram.
 - 1). Proses tanasul (berketurunan) harus melalui pernikahan secara syar'i.
 - 2). Bisa mengakibatkan kerancuan nasab.
 - Penanamannya kembali ke dalam rahim tidak dapat dilakukan tanpa melihat aurat besar.

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab43

(وَعَلَى الْعَامِلِ) عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (مَا يَحْتَاجُهُ الثَّمَرُ) لِصَلَاحِهِ وَتَنْمِيَتِهِ (مِمَّا يَتَكَرَّرُ) مِنْ الْعَمَلِ (كُلَّ سَنَةٍ كَسَفْيٍ وَتَنْقِيَةِ نَهَرٍ) أَيْ مَجْرَى الْمَاءِ مِنْ طِينٍ وَنَحْوِهِ (وَإِصْلَاحِ أَجَّاجِينَ) يَقِفُ فِيهَا الْمَاءُ حَوْلَ الشَّجَرِ لِيَشْرَبَهُ شُبِّهَتْ بِإِجَّانَاتِ الْغَسِيلِ جَمْعُ إِجَّانَةٍ (وَتَلْقِيحٍ) لِلنَّخْلِ (قَوْلُهُ وَتَلْقِيجٍ لِلنَّخْلِ) وَهُوَ وَضْعُ طَلْعِ ذَكْرٍ فِي طَلْعِ أَنْنَى

(Dan wajib bagi pekerja -dalam akad *musaqah*; penyiraman buah anggur dan kurma dengan hasil panennya dibagi antara kedua pihak) ketika dimutlakkan, (pekerjaan yang dibutuhkan buah) untuk kualitas dan perkembangannya, (dari yang berulang-ulang), maksudnya pekerjaan yang berulang-ulang, (setiap tahun, seperti menyiram dan membersihkan sungai), maksudnya saluran air dari lumpur dan semisalnya, (memperbaiki

⁴³ Zakaria al-Anshari dan Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid III, h. 526-527.

ajjajin -galian tempat air- di sekitar pohon), yang menjadi tempat air di sekitar pohon agar diserapnya. Ajjajin itu diserupakan dengan beberapa wadah baju yang dibasuh, bentuk jama' dari kata إِجَانِ (dan mengawinkan) kurma.

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Mengawinkan kurma."), yaitu meletakkan mayang kurma jantan dalam mayang kurma betina.

2. Shahih Muslim⁴⁴

Dari Anas Ra., sungguh Nabi Saw. melewati kaum yang sedang mengawinkan kurma. Lalu beliau Saw. bersabda: "Seandainya kalian tidak melakukannya niscaya kurma itu akan baik." Anas Ra. berkata: "Ternyata kurma itu berbuah dengan buah muda jelek (yang saat kering berkualitas jelek pula)." Lalu Nabi Saw. melewati mereka kembali dan bersabda: "Apa yang terjadi pada kurma kalian?" Mereka menjawab: "Aku melakukan ini dan itu (sesuai anjuran Nabi Saw.)." Nabi Saw. bersabda: "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian." (HR. Muslim)

3. Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab45

Dan dalam kitab *al-Mishbah* ... Dan menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah mengawinkan hewan itu sendiri. Itu adalah pendapat yang lemah. Sebab, sungguh reproduksi hewan itu dianjurkan demi kemaslahatan manusia, maka tidak dilarang karena dzatnya, agar menolak kontradiksi dalil, namun karena unsur eksternal.

4. Tarsyih al-Mustafidin⁴⁶

Dan dimakruhkan mengawinkan keledai pada kuda, maka diharamkan mengawinkan kuda pada sapi, karena besarnya alat kelamin.

5. Tuhfah al-Muhtaj⁴⁷

44 Muslim al-Naisaburi, Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-Jail, t. th.), Juz VIII, h. 95.

46 Alawi al-Saqqaf, Tarsyih al-Mustafidin, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 365.

⁴⁵ Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid III, h. 68.

(تَنْبِيْهُ) مَرَّ أَنَّ الْاسْتِدْخَالَ كَالْوَطْءِ بِشَرْطِ احْتِرَامِهِ حَالَةَ الْإِنْزَالِ ثُمَّ حَالَةَ الاسْتِدْخَالِ بِأَنْ يَكُوْنَ لَهَا شُبْهَةً فِيْهِ

(Perlu diingat), telah dijelaskan, sungguh memasukkan air mani ke rahim hukumnya seperti persetubuhan, dengan syarat mani itu *muhtaram* (halal) saat dikeluarkan dan saat dimasukkan (ke rahim), yaitu saat memasuknya itu mempunyai keserupaan dengan persetubuhan.

6. Tafsir Jalalain⁴⁸

(فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ) مِنَ الزَّوْجَاتِ وَالسَّرَارِيْ كَالْإِسْتِمْنَاءِ بِالْيَدِ فِيْ إِتْيَانِهِنَّ (فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ) الْمُتَجَاوِزُوْنَ إِلَى مَا لاَ يَجِلُّ لَهُمْ

(Barang siapa mencari di balik itu) dari para istri dan budak wanita, seperti beronani dalam menggauli mereka, (maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.") [QS. al-Mukminun: 7] yang melewati batas pada perbuatan yang tidak halal bagi mereka.

7. Yas'alunaka 'an al-Din wa al-Hayat⁴⁹

إِنَّ عَوَاطِفَ الْأُبُوَّةِ وَالْأُمُوْمَةِ لاَ تَتَحَقَّقُ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّسْلِ إِلاَّ إِذَا كَانَ هَذَا النَّسْلُ قَدْ تَكَوَّقُ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّسْلِ إِلاَّ إِذَا كَانَ هَذَا النَّسْلُ قَدْ تَكَوَّن وَخَرَجَ إِلَى الْحُيَاةِ بِالطَّرِيْقِ الطَّبِيْعِيِّ الْمَأْلُوْفِ. أُولَئِكَ الَّذِينَ يَفْتَحُونَ الْبَابَ لِمِثْلِ هَذَا الْأَسَالِيبِ الشَّاذَةِ الْمُلْتَوِيَةِ الَّتِي سَتُأَدِّي إِلَى هَدْمِ كِيَانِ الْأَسْرَةِ وَخَلْطِ الْأَنْسَابِ وَالسَّرَفِ بِأُصُوْلِ الْفَضَائِلِ وَأَرْكَانِ الْعِفَّةِ وَالشَّرَفِ

Sungguh kasih sayang kebapakan dan keibuan tidak akan terwujud dalam hal yang terkait dengan keturunan, kecuali jika keturunan ini terwujud dan menjadi hidup dengan cara alami yang seperti biasanya. Mereka yang membuka pandangan pada semacam metode asing dan kabur ini, yang bisa mengakibatkan rutuhnya wujud sebuah keluarga, menyampur nasab, dan meremehkan prinsip-pinsip keutamaan, dan tiang kehormatan dan kemuliaan.

8. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an⁵⁰

⁴⁷ Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj* pada *Hasyiyata al-Syirwani wa al-'Abbadi*, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th), Jilid VII, h. 303.

⁴⁸ Jalaluddin al-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahalli, *Tafsir Jalalain* pada *al-Futuhat al-Ilahiyat*, (Mesir: Isa al-Halabi, t. th), Jilid III, h. 184.

⁴⁹ Ahmad al-Syarbasyi, *Yas'alunaka 'an al-Din wa al-Hayat*, (Beirut: Dar al-Jail, t. th), Jilid II, h. 220.

Muhammad al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, t. th.), Juz V, h. 39.

Dan adapun pengebirian bagi manusia merupakan musibah. Sebab sungguh saat seseorang dikebiri, maka rusaklah hati dan kekuatannya, kebalikannya hewan. Dan terputus keturunannya yang diperintahkan dalam sabda Nabi Muhammad 'alaih al-Salam: "Saling nikahlah kalian maka kalian akan memiliki keturunan. Sebab sungguh aku beromba-lomba banyaknya pengikut dengan kalian pada umat-umat lain."

9. Al-Siraj al-Munir⁵¹

Dari Sa'id bin Hilal al-Laitsi, sungguh Nabi Saw. bersabda: "Nikahlah kalian dan perbanyaklah keturunan, sungguh aku bangga dengan sebab kalian pada umat-umat lain pada hari kiamat." (HR. Baihaqi)

418. Demonstrasi dan Unjuk Rasa

Akhir-akhir ini terjadi banyak demonstrasi, unjuk rasa, pemogokan dan bahkan pengrusakan fasilitas umum (kerusuhan). Motif dan tujuannya beragam, tapi intinya tidak puas atas kebijakan, sikap atau tindakan suatu lembaga/instansi, dan mencari keadilan.

- S: a. Bolehkah mencari keadilan melalui demonstrasi? Sampai batas manakah demonstrasi dibenarkan Islam?
 - b. Bagaimana hukum orang/massa membuat kerusuhan? Bagaimana pula hukum tokoh/otak penggerak kerusuhan? Bagaimana hukum merusak fasilitas umum termasuk sarana ibadah?
- J: Demonstrasi dan unjuk rasa yang bermuatan *amar ma'ruf nahi munkar* untuk mencari kebenaran dan demi tegaknya keadilan itu boleh selama:
- 1. Tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar.
- 2. Sudah tidak ada jalan lain seperti menempuh musyawarah dan lobi.
- 3. Apabila ditujukan pada penguasa pemerintah, hanya boleh dilakukan dengan cara ta'rif (menyampaikan penjelasan) dan al- wa'zhu (pemberian nasihat).

Keterangan, dari kitab:

⁵¹ Ali al-Azizi, al-Siraj al-Munir, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1957), Jilid II, h. 173.

1. Ihya 'Ulum al-Din⁵²

قَدْ ذَكُرْنَا دَرَجَاتِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّ أَوَّلَهُ التَّعْرِيْفُ وَقَانِيْهِ الْوَعْظُ وَثَالِئَهُ التَّحْشِيْنُ فِيْ الْقَوْلِ وَرَابِعَهُ الْمَنْعُ بِالْقَهْرِ فِي الْحَمْلِ عَلَى الْحَقِّ بِالضَّرْبِ وَالْعُقُوْبَةِ. وَالْجَائِرُ مِنْ مُحْلَةِ ذَلِكَ مَعَ السَّلاَطِيْنِ الرُّثْبَتَانِ الْأَوَّلَيَانِ وَهُمَا التَّعْرِيْفُ وَالْوَعْظُ. وَأَمَّا الْمَنْعُ بِالْقَهْرِ فَلَيْسَ ذَلِكَ لِآحَادِ السَّلاَطِيْنِ الرُّثْبَتَانِ الْأَوَّلِيَانِ وَهُمَا التَّعْرِيْفُ وَالْوَعْظُ. وَأَمَّا الْمَنْعُ بِالْقَهْرِ فَلَيْسَ ذَلِكَ لِآحَادِ السَّلاَطِيْنِ الرُّثْبَتَانِ اللَّوَّلَيْنَ وَهُمَا التَّعْرِيْفُ وَالْوَعْظُ. وَأَمَّا الْمَنْعُ بِالْقَهْرِ فَلَيْسَ ذَلِكَ لِآحَادِ الرَّعِيَّةِ مَعَ السَّلْطَانِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّكُ الْفِتْنَةَ وَيُهَيِّجُ الشَّرَّ وَيَصُونُ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ مِنَ الْمَحْدُورِ الرَّعِيَّةِ مَعَ السَّلْطَانِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّكُ الْفِتْنَةَ وَيُهَيِّجُ الشَّرَّ وَيَصُونُ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ مِنَ الْمَحْدُورِ الرَّعِيَّةِ مَعَ السَّلْطَانِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحَرِّكُ الْفِتْنَةَ وَيُهَيِّعُ السَّمْ وَيَعْفُونُ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْ الْمَحْدُورِ أَكُنَ لَا يَخَافُ اللهَ وَمَا يَجُرِيُ عَجْرًاهُ فَذَلِكَ الْمَعْدِيْ فَلَالَهُ مَا التَّعْرُبُ إِلَيْهِ فَهُو جَائِلُ اللّهُ مِنْ اللّهُ فَعْلِكَ الْمَعْرِيْحُ وَالتَّعْرُفُ إِلَى عَيْرِهِ لَمْ التَّعْرُضُ لِلْأَخْطَارِ وَالتَّصْرِيْحُ بِالْإِنْكَ وَلَى اللّهُ وَلَا عَرْفُ اللّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِا وَيهَا لِللّهُ مَالِكَ شَهَادَةً وَالتَّعْرُضُ لِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ ذَلِكَ شَهَادَةً

Telah kami jelaskan, bahwa memerintah kebaikan itu mempunyai beberapa tingkatan. Pertama memberi pengertian, kedua memberi nasehat, ketiga berbicara kasar, keempat mencegah secara paksa agar mau melakukan kebaikan dengan memukul dan memberi hukuman. Adapun cara yang diperbolehkan dari cara-cara itu dalam menghadapi penguasa yaitu dua cara pertama. Sedangkan mencegah dengan kekerasan, maka tidak boleh dilakukan rakyat terhadap penguasa karena dapat menyulut fitnah, menimbulkan gelombang keburukan, dan lebih banyak bahaya yang timbul darinya. Adapun berbicara kasar, misalnya seperti ucapan: "Hai orang yang zalim. Hai orang yang tidak takut Allah Swt." dan semisalnya, jika perkataan itu bisa menimbulkan fitnah yang keburukannya bisa menimpa pihak lain, maka tidak diperbolehkan. Namun, jika ia hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka boleh dan bahkan sunnah.

Dan sungguh kebiasaan ulama salaf adalah berani menghadapi bahaya dan secara terang-terangan mengingkari perkara munkar tanpa peduli dengan bencana yang menimpa dirinya dan siap menantang berbagai macam siksaan. Sebab mereka tahu bahwa semuanya merupakan kesyahidan.

2. Al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kabair⁵³

وَالنَّسَائِيُّ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَغَيَّرَهُ بِيَدِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ

546

⁵² Abu Hamid al-Ghazali, Ihya' 'Ulum al-Din, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1939), Jilid II, h. 337.

⁵³ Ibn Hajar al-Haitami, al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kabair, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1950), Cet. ke-1, Juz II, h. 156.

Dan al-Nasai meriwayatkan: "Barangsiapa melihat kemungkaran kemudian ia mengubahnya dengan tangan (kekuasaan)nya, maka ia telah terbebas (dari dosa kewajiban memberantas kemungkaran). Dan orang yang tidak mampu mengubahnya dengan tangannya, dan kemudian mengubahnya dengan lisannya, maka ia pun telah terbebaskan. Dan orang yang tidak mampu mengubahnya dengan lisannya, lalu ia mengubahnya dengan hatinya (tidak menyetujuinya) maka ia pun telah terbebaskan pula. Dan yang terakhir itu adalah iman yang paling lemah."

3. Al-Jami' al-Shaghir min Hadits al-Basyir al-Nadzir⁵⁴

"Barang siapa melihat kemungkaran, maka ia harus mengubahnya dengan tangan (kekuasaan)nya. Lalu jika ia tidak mampu, maka dengan lidahnya. Lalu jika ia tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu adalah iman yang paling lemah. (HR. Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Muslim, Ashhab Sunan al-Arba'ah), dari Abu Sa'id, (shahih).

419. Pembebasan Tanah Rakyat Dengan Harga yang Tidak Memadai

Dewasa ini banyak terjadi pembebasan tanah milik rakyat, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta yang disokong pemerintah, baik untuk kepentingan umum maupun untuk bisnis semata, misalnya untuk kawasan perumahan. Biasanya ganti rugi yang ditawarkan tidak memadai, karenanya rakyat menolak. Namun biasanya juga dengan berbagai cara, akhirnya rakyat terpaksa menyerahkan tanahnya dengan ganti rugi yang tidak memadai, dan pindah entah kemana.

- S: a. Bagaimana hukum pembebasan tanah semacam itu?
 - b. Jika pemerintah ikut terlibat, siapakah pejabat pemerintah/orang-orang yang bertanggung jawab di hadapan Allah?
 - c. Bagaimana hukum keuntungan yang diperoleh dari usaha semacam itu? Dan bagaimana hukumnya jika keuntungan yang diperoleh digunakan untuk membangun sarana ibadah?

⁵⁴ Abdurrahman al-Suyuthi, al-Jami' al-Shaghir min Hadits al-Basyir al-Nadzir, Juz II, h. 327.

- d. Bagaimana hukum tinggal di kawasan perumahan yang dibangun di atas tanah dengan pembebasan seperti itu?
- J: a. Pembebasan tanah dengan harga yang tidak memadai dan tanpa kesepakatan kedua belah pihak, tergolong perbuatan zalim karena termasuk bai' al-mukrah dan hukumnya haram serta tidak sah. Apabila pembebasan tanah tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang dibenarkan menurut syara', dengan harga yang memadai, maka hukumnya boleh sekalipun tanpa kesepakatan.
 - b. Yang bertanggungjawab adalah semua pejabat instansi pemerintah yang terkait.
 - Keuntungan tersebut hukumnya haram. Bila dimanfaatkan untuk membangun sarana ibadah juga tetap haram.
 - d. Hukumnya tafshil:
 - 1. Apabila pihak yang menempati bangunan itu mengetahui bahwa prosedurnya haram, maka hukumnya haram juga.
 - 2. Jika tidak mengetahui prosedur tersebut, maka hukumnya boleh.

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Wahhab55

Tidak sah akad seseorang yang dipaksakan dalam hartanya tanpa hak, karena tidak ada kerelaannya sesuai dengan firman Allah Swt.: "Kecuali harta-harta itu adalah harta perniagaan yang keluar dari persetujuan dari kalian." (QS. al-Nisa': 29).

2. Rahmah al-Ummah56

Para Imam sepakat atas sungguh jual beli itu sah dari orang baligh, berkehendak sendiri, dan bebas membelanjakan hartanya.

3. Al-Asybah wa al-Nazhair⁵⁷

⁵⁵ Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab Pada al-Tajrid li Naf al-'Abid, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1950), Jilid II, h. 174.

Abu Abdillah al-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah pada al-Mizan al-Kubra, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz I, h. 158.

⁵⁷ Abdurrahman al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Indonesia: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1403 H), h. 67.

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Tindakan penguasa atas rakyatnya itu terbatasi dengan maslahat. 4. *Al-Asybah wa al-Nazhair*⁵⁸

إِذَا كَانَ فِعْلُ الْإِمَامِ مَبْنِيًّا عَلَى الْمَصْلَحَةِ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُورِ الْعَامَّةِ لَمْ يَنْفَذْ أَمْرُهُ شَرْعًا إِلاَّ إِذَا وَافَقَهُ فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يُنَفَّذْ. وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ فِيْ كِتَابِ الْحَرَّاجِ مِنْ بَابِ إِذًا وَافَقَهُ فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يُنقَذْ. وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَبُو يُوسُفَ فِيْ كِتَابِ الْخَرَّاجِ مِنْ بَابِ إِحْمَاءِ الْمَوَاتِ: وَلَيْسَ لِلإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ شَيْمًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلاَّ بِحَقِّ ثَابِتٍ مَعْرُونٍ

Ketika tindakan penguasa dalam hal yang terkait kepentingan umum itu harus didasarkan pada maslahat, maka secara syar'a perintahnya itu tidak berlaku kecuali sesuai dengannya. Dan jika bertentangan, maka tidak berlaku. Oleh karenanya, Imam Abu Yusuf dalam kitab al-Kharraj dari bab Ihya al-Mawat menyatakan: "Dan seorang penguasa tidak boleh mengeluarkan apapun dari tangan seseorang kecuali dengan hak yang sudah tetap serta ketahui."

5. Al-Ahkam al-Sulthaniyah⁵⁹

فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ ﷺ وَكَثْرَ النَّاسُ وَسَّعَ الْمَسْجِدَ وَاشْتَرَى دَوْرًا هَدَمَهَا وَزَادَهَا فِيْهِ وَهَدَمَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ جِيْرَانِ الْمَسْجِدِ أَبَوْا أَنْ يَبِيْعُوْا وَوَضَعَ لَهُمْ الْأَثْمَانَ حَتَى أَخَذُوهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَاتَّخَذَ لِلْمَسْجِدِ جِدَارًا قَصِيْرًا دُوْنَ الْقَامَةِ وَكَانَتْ الْمَصَابِيْحُ تُوضَعُ عَلَيْهِ وَكَانَ عُمَرُ لَكَ وَاتَّخَذَ لِلْمَسْجِدِ جِدَارًا لِلْمَسْجِدِ. فَلَمَّا السُتُخْلِفَ عُثْمَانُ ﷺ اِبْتَاعَ مَنَازِلَ فَوسَّعَ بِهَا لَمُسْجِد وَأَخَذَ مَنَازِلَ أَقْوَامٍ وَوَضَعَ لَهُمْ أَثْمَانَهَا فَضَجُّوْا مِنْهُ عِنْدَ الْبَيْتِ فَقَالَ: إِنَّمَا لَلْهُ بِهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنِ خَالِد بْنِ أَسَدٍ فَخَلَ سَبِيْلَهُمْ وَرَضِيْتُمْ ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ إِلَى اخْبُسِ حَتَى كُلْمَ فِيْهِمْ عَبْدُ اللهِ بْنِ خَالِد بْنِ أَسَدٍ فَخَلَّ سَبِيْلَهُمْ

Ketika Umar r.a diangkat sebagai Khalifah dan jumlah penduduk semakin banyak, ia perluas mesjid Nabawi dengan membeli rumah dan dirobohkannya. Lalu ia menambah perluasannya dengan merobohkan (bangunan) penduduk sekitar mesjid yang enggan menjualnya. Beliau lalu memberi harga tertentu sehingga mereka mau menerimanya. Beliau membangun dinding yang pendek kurang dari tinggi manusia, dan memasang lampu-lampu di atasnya. Beliau adalah orang yang pertama

⁵⁸ Ibn Najim al-Mishri, al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Makkah: Nizar Musthafa al-Baz, 1997), Jilid I, h. 124.

⁵⁹ Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1966), h. 162.

kali membuat dinding untuk mesjid.

Ketika Utsman r.a. diangkat sebagai khalifah, ia lalu membeli rumahrumah (untuk perluasan mesjid Nabawi). Beliau mengambil rumahrumah penduduk dan menetapkan harganya. Mereka lalu berdemo di kediamannya. Beliau lalu berkata: "Sungguh kesabarankulah yang membuat kalian berani terhadapku, sungguh hal ini pernah dilakukan Umar terhadap kalian, dan kalian menyetujuinya". Lalu beliau memerintah memenjarakan mereka, sampai Abdullah bin Khalid bin Asad berbicara kepadanya, dan ia melepas mereka kembali.

6. Tahqiq al-Asybah wa al-Nazhair li Tajuddin al-Subki 60

Dan barangkali maksud al-Rafi'i dengan kutipan kesepakatan para sahabat dan ulama setelahnya itu adalah sungguh Umar Ra. pernah membeli beberapa rumah dari pemiliknya untuk perluasan mesjid. Begitu pula Utsman Ra. Sementara para sahabat pada masa beliau berdua masih banyak dan tidak pernah dikutip riwayat yang mengingkari hal tersebut.

7. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj61

Adapun pemaksaan dengan hak (kebenaran), maka akad jual belinya sah, sebab memposisikan persetujuan *syara'* pada posisi persetujuan pelaku akad.

8. Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir62

(Ungkapan Syaikh Ahmad bin Muhammad al-Dardiri: "Dengan paksaan yang haram."), maksudnya bila pelaku akad dipaksa menjual dengan paksaan yang halal, maka akad jual belinya lazim –tetap-, seperti

⁶⁰ Adil Ahmad Abdul Maujud dan Ali Muhammad 'Aud, Tahqiq pada al-Asybah wa al-Nazha'ir li Tajuddin al-Subki, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001), Jilid I, h. 116.

⁶¹ Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid II, h. 3.

⁶² Ibn 'Irfah al-Dasuqi, Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir, (Beirut: Dar al-Fikr, 1969), Jilid III, h. 6.

memaksanya menjual rumah untuk perluasan mesjid, jalan umum, atau kuburan.

9. Mirqah Su'ud al-Tashdiq Syarh Sulam al-Taufiq⁶³

وَمِنْ مَعَاصِيْ الْبَطْنِ أَكُلُ الرِّبَا ... أَوْ مَا يَأْخُذُهُ أَعْوَانُ السُّلْطَانِ ظُلْمًا عِنْدَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ

Dan di antara maksiat perut adalah memakan riba ... atau harta yang diambil oleh aparat penguasa secara zalim ketika jual beli.

10. Ihya 'Ulum al-Din64

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ الْمَعَاصِيْ وَهِيَ لاَ تَتَغَيَّرُ عَنْ مَوْضِعِهَا بِالنِّيَّةِ ... أَوْ يَبْنِي مَدْرَسَةً أَوْ مَسْجِدًا أَوْ رِبَاطًا بِمَالٍ حَرَامٍ قَصَدَ الْحَيْرَ فَهَذَا كُلُهُ جَهْلُ وَالنِّيَّةُ لاَ تُؤَثِّرُ فِيْ إِخْرَاجِهِ عَنْ كَوْنِهِ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا وَمَعْصِيَّةً

Bagian pertama adalah maksiat. Dan maksiat itu tidak akan berubah dari posisinya (sebagai hal yang diharamkan) disebabkan niat (baik). ... atau seseorang membangun sekolahan, mesjid atau pondokan dengan uang haram dengan bermaksud melakukan kebajikan, maka semua itu adalah kebodohan, dan niat tidak akan berpengaruh mengeluarkan tindakan itu dari keberadaannya sebagai kezaliman, kejahatan dan maksiat.

11. Fath al-Mu'in dan I'anah al-Thalibin65

لَوْ أَخَذَ مِنْ غَيْرِهِ بِطَرِيْقٍ جَائِزٍ مَا ظُنَّ حِلَّهُ فَهُوَ حَرَامٌ بَاطِنًا فَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ الْحَيْرَ لَمْ يُطَالَبْ فِي الآخِرَةِ وَإِلَّا طُولِبَ

(وَقَوْلُهُ وَإِلَّا طُولِبَ) أي وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرُهُ الْخَيْرَ وَالصَّلاَحَ بِأَنْ كَانَ ظَاهِرُهُ الْفُجُوْرَ وَالْخِيَانَةَ طُوْلِبَ فِي الآخِرَةِ وَأَمَّا فِي الدُّنْيَا فَلاَ يُطَالَبُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِطرِيْقٍ جَائِزِ

Seandainya seseorang mengambil sesuatu yang diduga halal dari orang lain dengan cara yang diperbolehkan, sementara pada hakikatnya sesuatu itu merupakan sesuatu yang haram, maka bila lahiriah orang yang diambil sesuatunya itu baik, maka si pengambil tidak akan dituntut di akhirat, bila tidak maka ia akan dituntut.

(Pernyataan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Bila tidak maka ia akan

⁶³ Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, Mirqah Su'ud al-Tashdiq Syarh Sulam al-Taufiq (Bandung:Syirkah Nur Asia, t. th.), h. 65.

⁶⁴ Abu Hamid al-Ghazali, Ilnya' 'Ulum al-Din, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1939), Jilid IV, h. 65.

⁶⁵ Zainuddin al-Malibari dan Muhammad Syaththa al-Dimyathi, fath al-Mu'in dan l'anah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Jilid III, h. 13.

dituntut."), maksudnya bila lahiriah orang yang diambil sesuatunya itu tidak baik dan saleh, yakni lahiriahnya lacur dan suka berkhianat, maka si pengambil akan dituntut di akhirat. Sedangkan di dunia, ia tidak akan dituntut sama sekali karena ia mengambil sesuatu tersebut dengan cara yang diperbolehkan.[]

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL AL-DINIYYAH AL-WAQI'IYYAH MUKTAMAR XXX NU DI PP. LIRBOYO KEDIRI JAWA TIMUR TANGGAL 21 s/d 27 NOPEMBER 1999

420. Penetapan Awal/Akhir Bulan Dengan Rukyat Internasional
421. Doa Bersama Antar umat Beragama
422. Wali Hakim Dalam Pernikahan
423. Perempuan Di Masa Iddah Naik Haji
424. Puasa Hari 'Arafah
425. Budi Daya Jangkrik
426. Jual Beli Ulat, Cacing, Semut Untuk Makanan Burung
427. Lomba Dengan Pemungutan Uang
428. Hak Atas Tanah
429. Anggota DPR/MPR Beragama Non Islam

KEPUTUSAN MUKTAMAR XXX NAHDLATUL ULAMA

NOMOR: 005/MNU-30/11/1999

TENTANG

BAHTSUL MASAIL AL-DINIYYAH AL-WAQI'IYYAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

MUKTAMAR XXX NAHDLATUL ULAMA

Menimbang

- a. Bahwa Perkembangan yang selalu terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seringkali mendorong perubahan dan pergeseran yang menyangkut tata-nilai dan pandangan yang dianut Nahdlatul Ulama dalam fungsinya sebagai pembimbing umat, dituntut untuk senantiasa memberikan respon untuk senantiasa positif dan produktif.
- Muktamar Nahdlatul Ulama mencermati sepenuhnya untuk memperhatikan segala perkembangan yang terjadi di masyarakat baik mengenai masalah-masalah agama. Sosial-ekonomi, budaya dan lainnya;
- c. Permusyawaratan-permusyawaratan yang berlangsung dalam muktamar XXX Nahdlatul Ulama di Ponpes Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo, Kediri.

Memperhatikan:

- Amanat Presiden Republik Indonesia pada pembukaan Muktamar XXX Nahdlatul Ulama tanggal 13 Sya'ban 1420H/21 Nopember 1999 M.
- Khutbah Iftitah Rais Aam PB Nahdlatul Ulama pada pembukaan Muktamar XXX Nahdlatul Ulama tanggal 13 Sya'ban 1420H/21 Nopember 1999 M.;
- c. Laporan hasil-hasil sidang Pleno Komisi Bahtsul Masail Ad-Diniyah Al-Waqi'i yah Muktamar XXX NU tanggal 17 Sya'ban 1420H/25 Nopember 1999 M.;

Mengingat

- Keputusan Muktamar XXX Nomor 001/MNU-30/11/1999 tentang Peraturan Tata-tertib Muktamar XXX Nahdlatul Ulama;
- Keputusan Muktamar XXX Nomor 003/MNU-30/11/1999 tentang Keorganisasian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama : Mengesahkan hasil-hasil Keputusan Sidang Komisi Bahtsul

Masail Ad-Diniyah Al-Waqi'iyyah seperti tersebut dalam

lampiran keputusan ini;

Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

periode 1999-2004 dan segenap perangkatnya dan jajarannya untuk memimpin dan mengkoordinasikan usaha dan ikhtiar dalam rangka pemasyarakatan dan pelaksanaan keputusan-

keputusan tersebut.

Ditetapkan di: Kediri

Pada tanggal: 17 Sya'ban 1420 H

26 Nopember 1999 M

MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA XXX PIMPINAN SIDANG PLENO X

ttd

KH M. Irfan Zidny MA Prof. DR. K H. Said Agil Husin Almunawwar, MA

ttd

Ketua Sekretaris

TIM PERUMUS BAHTSUL MASAIL AD-DINIYAH AL-WAQI'IYAH MUKTAMAR XXX NAHDLATUL ULAMA DI PP. LIRBOYO KEDIRI JAWA TIMUR TANGGAL 21 S/D 27 NOPEMBER 1999

- 1. KH. A. Aziz Masyhuri ... Ketua
- 2. KH. Irfan Zidni, MA. ... Wakil Ketua
- 3. KH. Drs. Ghazali Masruri ... Sekretaris
- 4. KH. Drs. Hasyim Abbas ... Wakil Sekretaris 5. KH. Abdullah Mukhtar ... Anggota
- 6. Drs. Ki Sanusi Solomon Nasution ... Anggota
 - 7. TGK. Syamsul Hadi, MA. ... Anggota
- 8. KH. Makmun Muhammad Murai ... Anggota
 - 9. Drs. Moch. Damory Harahap ... Anggota
 - 10. KH. Sidqi Mudhar ... Anggota
 - 11. KH. A. Subadar ... Anggota
 - 12. KH. A. Luthfi A. Hadi ... Anggota
 - 13. KH. Drs. Syafruddin ... Anggota
 - 14. KH. Moh Yasin Asmuni ... Anggota 15. KH. M. Ardani ... Anggota
 - KH. Abdul Wahid Zuhdi ... Anggota
 KH. Najib Hasan ... Anggota
 - 18. KH. Asep Burhanuddin ... Anggota
 - 19. KH. Miftahul Akhyar ... Anggota
 - 20. KH. Abdul Matin ... Anggota
 - 21. TGK. Samaun Risyad ... Anggota
 - 22. KH. Ahmad Farichin ... Anggota
 - 23. KH. M. Najib Muhammad ... Anggota 24. KH. Mujtaba, MA. ... Anggota
 - 25. KH. Amri Syafruddin ... Anggota
 - 26. KH. Dr. Masyhuri Naim MA. ... Anggota

PIMPINAN SIDANG KOMISI BAHTSUL MASAIL AD-DINIYAH AL-WAQI'IYAH MUKTAMAR XXX NAHDLATUL ULAMA

KH. M. Irfan Zidni, MA. ... Ketua

KH. Drs. A. Ghozalie Masruri ... Wakil Ketua

KH. Abdul Aziz Masyhuri ... Sekretaris

KH. Masyhuri Syahid, MA. ... Anggota

KH. Drs. Hasyim Abbas ... Anggota

KH. Masduqi Mahfud ... Anggota

KH. Yusuf Muhammad ... Anggota

420. Penetapan Awal/Akhir Bulan Dengan Rukyat Internasional

A. Diskripsi Masalah

Visibilitas hilal yang terjadi dengan melihat hilal memperbantukan indera mata (ru'yah al-hilal) merupakan pilihan utama dalam pemikiran jumhur fuqaha bila akan menetapkan awal/akhir bulan Qamariyah. Cara lain bila mengalami kegagalan adalah dengan metode istikmal. Hisab astronomi (perhitungan falakiyyah) ditempatkan sebagai pendukung, guna memperkirakan waktu konjungsi (al-ijtima') dan kadar ketinggian hilal di atas ufuk. Konsekuensi dari metode hisab astronomi adalah berlakunya peta mathla' secara lokal (pernegara). Penetapan mathla' hanya berlaku lokal negara setempat bisa dipahami dari perintah Rasulullah Saw. kepada pejabat Amir kota Mekkah saat beliau menunaikan ibadah haji. (HR. Abu Dawud dari Husein bin al-Haris al-Jadaliy).

Masyarakat akhir-akhir ini sering dikacaukan oleh seruan berhari raya Idul Fitri berpedoman pada hari raya Idul Fitri di Saudi Arabia. Baru-baru ini yayasan Al-Ihtikam merayakan hari raya Idul Adha juga mengikuti Idul Adha di Saudi Arabia. Kedua cara tersebut bermaksud melegalisir *ru'yah al-hilal* negara Saudi Arabia sebagai rukyat internasional.

B. Pertimbangan Hukum

- Lokasi kepulauan Indonesia juga berbeda mathla'nya dengan Saudi Arabia.
- 2. Ru'ya h al-hilal yang gagal terjadi di seluruh Indonesia, bisa saja berhasil dilakukan di negara lain, termasuk Saudi Arabia karena saat terbenam matahari selisih 4 (empat) jam lebih belakang dibanding waktu standar Indonesia.
- 3. Kriteria imkan al-ru'yah hasil kesepakatan MABIMS adalah:
 - a. Ketinggian hilal dua derajat;
 - b. Umur bulan minimal delapan jam saat konjungsi.
- 4. Ibn Abidin dalam kitab *Radd al-Mukhtar* juz II, hlm. 393 dalam substansi uraiannya menempatkan *mathla'* negara setempat sebagai acuan pokok penetapan awal/akhir bulan Qamariyah, utamanya bulan Dzul hijjah.

C. Pertanyaan

Bagaimana hukum menetapkan awal bulan Qamariyah khususnya Ramadlan, Syawal, dan Dzulhijjah berdasarkan ru'yah al-hilal internasional untuk pedoman beribadah di Indonesia?

D. Jawaban

Umat Islam Indonesia maupun Pemerintah Republik Indonesia tidak dibenarkan mengikuti *rukyah al-hilal* internasional karena tidak berada dalam kesatuan hukum (*al-balad al-wahid*).

Keterangan, dari kitab:

1. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari¹

ثَانِيْهَا مُقَابِلُهُ إِذَا رُوِيَ بِبَلْدَةٍ لَزِمَ أَهْلَ الْبَلَدِ كُلَّهَا وَهُوَ الْمَشْهُوْرُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، لَكِنْ حَكَى الْبُنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْاِجْمَاعَ عَلَى خِلاَفِهِ وَقَالَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ تُرَاعَيْ الرُّوْيَةُ فِينْمَا بَعُدَ مِنَ الْبِلاَدِ كَخُرَاسَانَ وَالْأَنْدَلُسِ قَالَ الْقُرْطِيُّ قَدْ قَالَ شُيُوخُنَا إِذَا كَانَتْ رُوْيَةُ الْهِلَالِ طَاهِرَةً الْبِلاَدِ كَخُرَاسَانَ وَالْأَنْدَلُسِ قَالَ الْقُرْطِيُّ قَدْ قَالَ شُيُوخُنَا إِذَا كَانَتْ رُوْيَةُ الْهِلَالِ طَاهِرَةً قَاطِعَةً بِمَوْضِع ثُمَّ نُقِلَ إِلَى غَيْرِهِمْ بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ لَزِمَهُمُ الصَّوْمُ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونَ لاَ يَلْزَمُهُمْ بِالشَّهَادَةِ إِلاَّ لِأَهْلِ الْبَلِدِ الَّذِيْ ثَبَتَتْ فِيْهِ الشَّهَادَةُ إِلاَّ أَنْ يَثْبُتَ عِنْدَ الْإِمَامِ الْأَعْظِمِ فَيَالَ اللَّاسُ كُلُهُمْ لِأَنَّ الْبِلاَدَ فِيْ حَقِّهِ كَالْبَلَدِ الْوَاحِدِ إِذْ حُكْمُهُ نَافِذٌ فِيْ حُصْمِ الْجَمِيْعِ فَيَالِلَا الْبَلْدِ الْوَاحِدِ إِذْ حُكُمُهُ نَافِذٌ فِيْ حُصْمِ الْجَمِيْعِ الشَّهَادَةِ فِيْ حُصْمِ الْمَامِ الْبَلْدِ الْوَاحِدِ إِذْ حُكْمُهُ نَافِذٌ فِيْ حُصْمِ الْجَمِيْمِ الشَّهُمُ النَّاسُ كُلُهُمْ الْإِلَى الْبِلادَ فِيْ حَقِّهِ كَالْبَلَدِ الْوَاحِدِ إِذْ حُكْمُهُ نَافِذٌ فِيْ حُصْمِ الْجَمِيْمِ الشَّهُ السَّاسُ كُلُهُمْ الْفَالِدُ فَيْ حُسْمِ اللْفَامِ الْبَالِدُ الْوَاحِدِ إِذْ حُكْمُهُ نَافِذُ فِيْ حُصْمِ الْمَوْمِ الْمُهِمْ الْمُ الْمَامِ الْمُعْلِى

Yang kedua (dari khilafiyah tentang ru'yah al-hilal) yaitu pembanding pendapat pertama, bila hilal terlihat di suatu daerah, maka seluruh penduduknya (harus mulai berpuasa). Pendapat ini masyhur di kalangan ulama Maliki. Namun Imam Ibn Abdil Barr meriwayatkan ijma' ulama yang berbeda denganya. Ia berkata: "Ulama sepakat, bahwa terlihatnya hilal itu tidak dapat dijadikan pedoman bagi daerah yang jauh (dari tempat terlihatnya hilal tersebut).

Al-Qurthubi berkata: "Guru-guruku berkata: "Ketika ru'yah al-hilal tampak secara pasti di suatu tempat, lalu hal itu diberitakan kepada penduduk selain daerah tersebut dengan kesaksian dua orang saksi, maka mereka wajib berpuasa." Sementara Ibn al-Majisyun berkata: "Mereka tidak wajib berpuasa karena kesaksian itu kecuali bagi penduduk daerah yang di sana syahadah itu berlaku, kecuali hilal itu telah tetap menurut pemimpin tertinggi negara, maka mereka semua wajib berpuasa. Sebab, bagi pemimpin tertinggi negara beberapa daerah itu hukumnya seperti satu daerah. Sebab keputusan hukumnya berlaku dalam semua daerah kekuasaannya."

421. Doa Bersama Antar Umat Beragama

A. Diskripsi Masalah

558

Adanya krisis (moneter, kepercayaan, keimanan) yang melanda

¹ Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), Jilid I, h. 619.

bangsa Indonesia dewasa ini, menuntut bangsa Indonesia untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Di antara usaha-usaha yang dilakukan adalah mengadakan doa bersama antar berbagai umat beragama (Islam, Katholik, Kristen, Hindu dan Budha).

B. Pertanyaan

- a. Bagaimana hukum doa bersama antar berbagai umat beragama yang sering dilakukan di Indonesia?
- b. Mohon dijelaskan batas-batas kerjasama antar umat beragama yang diperbolehkan oleh syari'at agama Islam?

C. Jawaban

 a. Tidak boleh, kecuali cara dan isinya tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

D. Dasar Pengambilan Hukum

1. Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab²

Dan wajib bagi kita (muslimin) mencegah non muslim menampakkan kemungkaran di hadapan kita, seperti memperdengarkan ucapan mereka kepada kita: "Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan."

2. Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab3

Dan tidak boleh mengamini doa non muslim karena doanya tidak diterima sesuai dengan firman Allah Swt.: "Dan doa (ibadah) orang-orang kafir itu, hanyalah sia-sia belaka." (QS. al-Ra'du: 14)

3. Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib'

Ungkapan Syaikh Muhammad al-Syirbini al-Khatib: ("Haram mengasihi dengan non muslim."), maksudnya menyukai, dan simpati dengan hati.

² Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid V, h. 226.

³ Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid III, h. 119.

Sulaiman bin Muhammad al-Bujairamai, Hasyiyah Sulaiman al-Bujairami 'ala al-Khatib, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1951), Jilid IV, h. 245.

Adapun pergaulan lahiriah, maka hukumnya makruh. ... Sedangkan bergaul untuk menolak bahaya atau mengambil keuntungan dari mereka, maka tidak haram.

4. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj⁵

(وَلاَ يُمْنَعُ أَهْلُ الذِّمَّةِ الْحُضُورَ) لِأَنَّهُمْ يَسْتَرْزِقُونَ وَفَضْلُ اللهِ وَاسِعٌ وَقَدْ يُجِيبُهُمُ اسْتِدْرَاجًا

وَطَمَعًا فِي الدُّنْيَا قَالَ تَعَالَى سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ [الْأَعْرَافُ ١٨٢ | الْقَلَمُ ٣٣]

(وَلاَ يَغْتَلِطُونَ) أَهْلُ الدِّمَّةِ وَلاَ غَيْرُهُمْ مِنْ سَائِرِ الْكُفَّارِ (بِنَا) فِي مُصَلاً نَا وَلاَ عِنْدَ الْخُرُوجِ أَيْ يُعْتَلِطُونَ) أَهْلُ الدِّمَّةِ وَلاَ غَيْرُهُمْ مِنْ سَائِرِ الْكُفَّارِ (بِنَا) فِي مُصَلاً نَا وَلاَ عِنْدَ الْخُرُوجِ أَيْ يُعْتَلِطُونَ) أَهْلُ الدِّمَّةِ وَلاَ غَيْرُهُمْ مِنْ سَائِرِ الْكُفَّارِ (بِنَا) فِي مُصَلاً نَا وَلاَ عِنْدَ الْخُرُوجِ أَيْ يُعْلَى إِلَّا نَهُمْ أَعْدَاءُ اللهِ تَعَالَى إِذْ قَدْ يَجِلُّ بِهِمْ عَذَابُ أَيْ يُحْرَهُ فَلِكُ مِنْ عَلَا فِي مُكَانِ لِأَنَّهُمْ أَعْدَاءُ اللهِ تَعَالَى إِذْ قَدْ يَجِلُ بِهِمْ عَذَابُ إِلَّا يَعْلَى وَاتَقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً [الْأَنْفَالُ وَمِنْهُمْ عَنَا فِي مُعَلَى وَاتَقُوا فِيْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً [الْأَنْفَالُ وَمِنْهُمْ عَنَا فِي مُعَالِلَهُ وَيَانِي لِأَنْ دُعَاءَ الْكَافِرِ غَيْرُ الْمَقْبُولِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يُسْتَجَابُ لَهُمْ كَمَا اسْتُجِيْبَ دُعَاءُ إِبْلِيْسَ بِالْإِنْظَارِ

(Dan non muslim dzimmi -yang dijamin keamanannya oleh pemerintah Islam- tidak dilarang mengikuti istisqa' -permintaan hujan-), sebab mereka berhak mencari rezeki, sedangkan anugerah Allah Swt. sangat luas. Terkadang Allah Swt. mengabulkan harapan mereka dalam rangka istidraj (melalaikan) dan membuat mereka tamak pada dunia. Allah Swt. berfirman: "Nanti Kami akan menarik mereka secara berangsur-angsur (ke arah kebinasaan), dengan cara yang tidak mereka ketahui." [QS. al-A'raf: 182/al-Qalam: 44].

(Dan mereka tidak boleh berkumpul), yakni non muslim dzimmi dan selainnya (dengan kita muslimin) di tempat shalat istisqa' kita, dan tidak pula saat pergi -menuju tempat istisqa'-. Maksudnya hal itu makruh, dan mereka harus dibedakan dari kita umat Islam di suatu tempat. Sebab, mereka adalah musuh-musuh Allah Swt., karena terkadang mereka akan tertimpa suatu adzab dengan sebab kekufurannya, maka adzab itu akan mengenai kita pula. Allah Swt. Berfirman: "Dan takutlah pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu." [QS. al-Anfal: 25]. Tidak boleh mengamini doa mereka sebagaimana pendapat al-Rauyani, karena doa mereka tidak akan diterima. Sebagian ulama ada yang berpendapat, bahwa doa mereka bisa saja dikabulkan sebagaimana dikabulkannya doa Iblis agar ditundak kematiannya.

Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, (Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t. th.), Jilid I, h. 323.

5. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab6

(فَرْعٌ) فِيْ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي خُرُوجٍ أَهْلِ الذِّمَّةِ لِلإِسْتِسْقَاءِ قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ مِنَ الْخُرُوجِ مُتَمَيَّزِيْنَ وَبِهِ قَالَ يُمْنَعُونَ مِنَ الْخُرُوجِ مُتَمَيَّزِيْنَ وَبِهِ قَالَ النُّهْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَبُو حَنِيْفَةَ وَقَالَ مَكْحُولُ لاَ بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِمْ

(Sub Masalah) tentang berbagai mazhab ulama perihal non muslim ikut keluar untuk istisqa'. Telah kami paparkan, bahwa mazhab kami - Syafi'iyah- menyatakan mereka dilarang keluar bercampur dengan orang-orang Islam dan mereka tidak dilarang dari keluar dengan mebedakan diri dari orang-orang Islam. Dengan ini al-Zuhri, Ibn al-Mubarak dan Abu Hanifah berpendapat. Dan Makhul berkata: "Tidak mengapa mereka keluar (ikut istisqa').

6. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab7

Dan dimakruhkan non muslim ikut keluar untuk istitsqa', mengingat mereka adalah musuh-musuh Allah Swt., maka tidak boleh menjadikan mereka sebagai media tawasul kepada Allah Swt. Jika mereka hadir dan membedakan diri ari umat Islam, maka mereka tidak boleh dilarang. Sebab, mereka datang untuk mencari rezeki.

7. Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab8

Dan suatu pendapat menyatakan boleh mengamini doa non muslim, bahkan sunnah jika misalnya ia berdoa agar dirinya mendapat hidayah dan agar kita mendapat pertolongan.

Jawaban

b. Batas-batas kerjasama antar umat beragama yang diperbolehkan oleh syari'ah Islam yaitu sepanjang kerjasama itu menyangkut urusan duniawi yang ada manfaatnya bagi umat Islam seperti perdagangan dan pergaulan yang positif.

Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid V, h. 72.

⁷ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid V, h. 66.

⁸ Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab, (Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t. th.), Jilid II, h. 119.

Dasar Pengambilan Hukum

1. Murah Labid li Kasyf Ma'ani al-Qur'an al-Majid⁹

Yang kedua, bergaul dengan baik di dunya secara lahiriah (saja). Dan hal itu tidak terlarang.

2. Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib 10

Ungkapan Syaikh Muhammad al-Syirbini al-Khatib: ("Haram mengasihi dengan non muslim."), maksudnya menyukai, dan simpati dengan hati. Adapun pergaulan lahiriah, maka hukumnya makruh. ... Sedangkan bergaul untuk menolak bahaya atau mengambil keuntungan dari mereka, maka tidak haram.

422. Wali Hakim Dalam Pernikahan

A. Diskripsi Masalah

Mengikuti perkembangan kondisi politik di tanah air pasca Pemilu 1999 ini, kiranya perlu segera ada sikap dan konsep yang jelas dari PBNU, mengenai masalah yang sangat prinsip bagi kaum muslimin, yaitu masalah "wali hakim" dalam pernikahan, apabila Presiden RI dijabat oleh seorang perempuan.

Dalam hal ini NU telah menetapkan sejak Bung Karno, bahwa presiden RI adalah wali al-amri al-dharuri bi al-syaukah agar mengesahkan pernikahan yang dilakukan oleh wali hakim.

B. Pertanyaan

- a. Apakah wali hakim dalam pernikahan berada di tangan Presiden atau Menteri Agama saja?
- b. Bila di tangan Presiden, apakah wanita sah menjadi wali hakim?

C. Jawaban

562

 Wilayah Hakim dalam pernikahan berada di tangan Presiden dan aparat yang ditunjuk Presiden.

⁹ Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani, Futuhat Murah Labid li Kasyf Ma'ani al-Qur'an al-Majid, (Mesir: Isa al-Halabi, t. th.), Juz I, h. 94.

¹⁰ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairamai, Hasyiyah Sulaiman al-Bujairami ' ala al-Khatib, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1951), Jilid IV, h. 245.

D. Dasar Pengambilan Hukum

1. Al-Mughni/al-Syarh al-Kabir¹¹

لَا نَعْلَمُ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي أَنَّ لِلسُّلْطَانِ وِلَايَةَ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ عَدَمِ أَوْلِيَائِهَا أَوْ عَضْلِهِمْ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ النَّهِمْ وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ النَّيِيِّ عَلَيْ فَالسَّلْطَانُ وَلِي مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ... وَالسُّلْطَانُ هَاهُنَا هُوَ الْإِمَامُ أَوْ الْحَاكِمُ أَوْ مَنْ فَوَصَا إلَيْهِ ذَلِكَ

Kami tidak mengetahui khilaf di antara ahli ilmu tentang bahwa sulhtan mempunyai wilayah (hak menjadi wali) untuk menikahkan seorang wanita ketika tidak ada walinya, atau ketika mereka enggan menikahkannya. Dan dengan itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Ishaq, Abu 'Ubaid dan Ashhab al-Ra'yi berpendapat. Dalilnya adalah sabda Nabi Saw.: "Maka Sulthan adalah wali bagi wanita tang tidak ada walinya." ... Sulthan dalam hal ini yaitu penguasa tertinggi negara, hakim atau orang yang mereka berdua beri mandat menagani urusan tersebut.

2. I'anah al-Thalibin¹²

(قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ) أَي السُّلْطَانُ مَنْ لَهُ وِلاَيَةٌ أَيْ عَامَّةٌ أَوْ خَاصَّةٌ ... أَنَّ الْمُرَادَ بِالسُّلْطَانِ كُلُّ مَنْ لَهُ وَلاَيَةٌ أَيْ عَامَّةٌ أَوْ خَاصًا كَالْقَاضِيْ وَالْمُتَوَلَّى لِعُقُوْدِ الْأَنْكِحَةِ لَهُ سُلْطَانُ وَوِلاَيَةٌ عَلَى الْمُرْأَةِ عَامًا كَانَ كَالْإِمَامِ أَوْ خَاصًا كَالْقَاضِيْ وَالْمُتَوَلَّى لِعُقُوْدِ الْأَنْكِحَةِ

(Ungkapan Syaikh Zainuddin al-Malibari: "Yang dimaksud."), yakni sulthan adalah orang yang memiliki kekuasaan, baik umum atau khusus ... sungguh yang dimaksud dengan sulthan adalah semua orang yang mempunyai kekuasaan dan hak perwalian bagi wanita, baik secara umum seperti penguasa tertinggi negara, atau secara khusus seperti hakim dan orang yang dijadikan wali untuk pelaksanaan akad nikah.

3. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib¹³

Lalu hakim, baik yang umum atau yang khusus, seperti qadhi (pengulu), orang yang dijadikan wali untuk pelaksanaan akad pernikahan atau untuk akad ini secara khusus.

¹¹ Ibn Qudamah, al-Mughni, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.), Juz VII, h. 13.

¹² Muhammad Syaththa al-Dimyati, I'anah al-Thalibin, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th) Jilid III, h. 314.

¹³ Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. th.), Jilid II, h. 106.

Jawaban

b. Sah karena kelembagaan Presiden sebagai wilayah 'ammah.

Dasar Pengambilan Hukum

1. Al-Tajrid li Naf' al-'Abid14

(قَوْلُهُ لَا تَعْقِدُ امْرَأَةُ نِكَاحًا) أَيْ لَا يَكُونُ لَهَا دَخْلُ فِيهِ وَالْمُرَادُ بِالنِّكَاحِ أَحَدُ شِقَيْهِ أَيْ الْإِيجَابِ أَوْ الْقَبُولِ قَالَ حِل إِلَّا إِذَا وَلِيَتْ الْإِمَامَةَ الْعُظْمَى فَإِنَّ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَ غَيْرَهَا لَا نَفْسَهَا كَمَا أَنَّ السُّلْطَانَ لَا يَعْقِدُ لِتَفْسِهِ

(Pernyataan Syaikh Zakari al-Anshari: "Wanita tidak boleh melakukan akad nikah."), maksudnya adalah ia tidak mempunyai wewenang melakukan akad nikah. Yang dimaksud dengan akad adalah salah satu unsurnya, yaitu ijab atau qabul. Al-Halabi berpendapat: "Kecuali jika ia memegang jabatan tertinggi negara, maka ia boleh menikahkan wanita selain dirinya, tidak boleh menikahkan dirinya sendiri seperti sulthan tidak boleh mengakadi untuk dirinya sendiri.

2. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib¹⁵

(وَقَوْلُهُ وَلاَ غَيْرَهَا) أَيْ وَلاَ تُزَوِّجُ غَيْرَهَا لاَ بِوِلاَيَةٍ وَلاَ وَكَالَةٍ لِخَبْرِ: لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ وَلاَ وَكَالَةٍ لِخَبْرِ: لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةُ الْإِمَامَةَ الْعُظْمَى وَالْعِيَادُ بِاللّهِ تَعَالَى نَفَذَتْ وَلاَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا ... نَعَمْ، إِنْ تَوَلَّتِ امْرَأَةُ الْإِمَامَةَ الْعُظْمَى وَالْعِيَادُ بِاللّهِ تَعَالَى نَفَذَتْ أَحْكَامُهَا لِلظَّرُورَةِ كَمَا قَالَهُ عِزُ الدِّيْنِ بْنِ عَبْدِ السَّلاَمِ وَغَيْرُهُ وَقِيَاسُهُ صِحَّةُ تَزْوِيْجِهَا غَيْرَهَا بِالْوِلاَيَةِ الْعَامَّةِ

(Ungkapan Syaikh Ibn Qasim al-Ghazi: "Dan tidak boleh menikahkan selain dirinya."), yakni dan seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain, tidak dengan hak perwalian atau perwakilan, karena hadits: "Perempuan tidak boleh mengawinkan wanita lain, dan tidak boleh pula mengawinkan dirinya sendiri." ... Memang begitu, namun bila seorang perempuan menjabat sebagai pimpinan tertinggi Negara, semoga Allah Swt. melindungi kita darinya, maka keputusan hukum-hukumnya berlaku, seperti pendapat 'Izzuddin bin Abdissalam dan selainnya. Dan qiyasnya yaitu sah ia menikahkan perempuan selainnya dengan kekuasaan umumnya.

¹⁴ Sulaiman al-Bujairami, al-Tajrid li Naf al-'Abid, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1950), Jilid III, h. 337.

¹⁵ Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid II, h. 104.

423. Perempuan Di Masa Iddah Naik Haji

A. Diskripsi Masalah

Seorang perempuan sedang menjalani 'iddah karena ditinggal mati suaminya. Sementara itu secara ekonomis mampu melaksanakan ibadah haji dan secara akomodatif sudah mendaftarkan diri naik haji.

B. Pertanyaan

Apakah wanita dalam 'iddah boleh menunaikan ibadah haji?

C. Jawaban

Wanita dalam masa 'iddah pada dasarnya tidak boleh menunaikan ibadah haji, kecuali sebab udzur syar'i seperti:

- Kekhawatiran yang mengancam diri atau hartanya.
- b. Ada petunjuk dokter yang adil bahwa penundaan ibadah haji ke tahun depan tidak menguntungkan.
- c. Haji tahun tersebut dinadzarkan.
 Selain itu didapat qaul yang membolehkan tanpa syarat.

Dasar Pengambilan Hukum

1. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib16

نَعَمْ لَهَا الْخُرُوْجُ لِحِجِّ أَوْ عُمْرَةٍ إِنْ كَانَتْ أَحْرَمَتْ بِذَلِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ أَوِ الْفِرَاقِ وَلَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَإِنْ لَمْ تَخَفْ الْفَوَاتَ فَإِنْ كَانَتْ أَحْرَمَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ أَوِ الْفِرَاقِ فَلَيْسَ لَهَا الْخُرُوْجُ فِيْ الْعِدَّةِ وَإِنْ تَحَقَّقَتْ الْفَوَاتُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَتَمَّتْ عُمْرَتَهَا أَوْ حِجَتَّهَا إِنْ بَقِيَ وَقْتُ الْحِجِّ وَإِلاَّ تَحَلَّلَتْ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ وَدَمُّ الْفَوَاتِ

Ya memang begitu, namun seorang wanita boleh keluar rumah untuk menunaikan haji atau umrah jika memang sudah berihram sebelum kematian suami atau terjadinya perceraian, meski tanpa seizinnya dan tidak khawatir ketinggalan. Sedangkan jika ia berihram setelah kematian suami atau setelah bercerai, maka ia tidak boleh keluar selama masa 'iddah meski nyata-nyata ketinggalan (haji atau umrah). Jika ia sudah melewati masa 'iddah, maka ia harus menyempurnakan kembali hajinya atau umrahnya jika memang masih ada waktu. Dan jika waktunya sudah habis, maka ia bertahallul dengan melaksanakan umrah dan wajib menggadha dan membayar dam atas ketertinggalannya.

2. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj17

¹⁶ Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. th.), Jilid II, h. 177.

(أَوْ) أَذِنَ لَهَا (فِي سَفَرِ حَجِّ أَوْ) عُمْرَةٍ وَ (يَجَارَةٍ) أَوْ اسْتِحْلَالِ مَظْلَمَةٍ أَوْ نَحُو ذَلِكَ كَرَدِّ آبِقٍ وَالسَّفَرِ لِحَاجَتِهَا (ثُمَّ وَجَبَتْ) عَلَيْهَا الْعِدَّةُ (فِي) أَثْنَاءِ (الطَّرِيقِ فَلَهَا الرُّجُوعُ) إلى الْأُولِ (وَالْمُضِيُّ) فِي السَّفَرِ لِأَنَّ فِي قَطْعِهَا عَنْ السَّفَرِ مَشَقَّةً لَا سِيَّمَا إِذَا بَعُدَتْ عَنِ الْبَلَدِ وَخَافَتِ الانْقِطَاعَ عَنْ الرُّفْقَةِ وَلَكِنَّ الْأَفْضَلَ الرُّجُوعُ وَالْعَوْدُ إلى الْمَنْزِلِ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَأَقَرَّاهُ وَهِيَ فِي سَيْرِهَا مُعْتَدَّةً وَخَرَجَ بِالطَّرِيقِ مَا لَوْ وَجَبَتْ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ الْمَنْزِلِ فَلَا تَخْرُجُ قَطْعًا

Atau bila suami mengizinkan istrinya pergi haji, umrah, berdagang, mencari halal suatu kezaliman dan semisalnya mengembalikan budak yang minggat dan perjalanan untuk memenuhi kebutuhannya, lalu ia wajib 'iddah di tengah perjalanannya, maka ia boleh kembali ke tempat semula dan melanjutkan perjalanan. Sebab dalam mengurungkan perginya itu terdapat masyaqah (beban), terutama bila sudah jauh dari daerahnya dan khawatir terputus dari rombongannya. Akan tetapi, yang lebih afdhal adalah pulang dan kembali ke rumah semula, serta menjalani 'iddahnya, seperti kutipan al-Nawawi dan al-Rafi'i dari Syaikh Abu Hamid. Dan dalam perjalanannya ia menjalani sudah menjalani 'iddah. Dengan kata عريف, mengecualikan kasus bila 'iddah wajib dijalankan sebelum keluar dari rumah, maka ia tidak boleh keluar rumah tanpa khilafiyah ulama.

3. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj18

(فَرْعُ) لَوْ أَحْرَمَتْ بِحَبِّ أَوْ قِرَانٍ بِإِذْنِ زَوْجِهَا أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ثُمَّ طَلَقَهَا أَوْ مَاتَ فَإِنْ خَافَتْ الْفَوَاتَ كَضَيْقِ الْوَقْتِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْخُرُوجُ مُعْتَدَّةً لِتَقَدُّمِ الْإِحْرَامِ وَإِنْ لَمْ تَخَفْ الْفَوَاتَ لِسَعَةِ الْفَوَاتَ كَضَيْقِ الْوَقْتِ جَازَلَهَا الْخُرُوجُ إِلَى ذَلِكَ وَإِنْ أَحْرَمَتْ بَعْدَ أَنْ طَلَقَهَا هُو مَاتَ بِإِذْنٍ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ أَوْ الْوَقْتِ جَازَلَهَا الْخُرُوجُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لِبُطْلاَنِ الْإِذْنِ بِغَيْرِ إِذْنِ بِحَبِّ أَوْ عِهمَا المُتَنَعَ عَلَيْهَا الْخُرُوجُ سَوَاءً أَخَافَتْ الْفَوَاتَ أَوْ لاَ لِبُطْلاَنِ الْإِذْنِ بِغَيْرِ إِذْنِ بِحَبِّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بِهِمَا المُتَنَعَ عَلَيْهَا الْخُرُوجُ سَوَاءً أَخَافَتْ الْفَوَاتَ أَوْ لاَ لِبُطْلاَنِ الْإِذْنِ الْمُؤْتِ فِي الطَّانِيَةِ فَإِذَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ أَتَمَتْ عَلَيْهَا الْمُؤْتِ فِي الطَّانِيَةِ فَإِذَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ أَتَمَتْ عُمْرَةٍ وَلَوْمَهَا الْقَضَاءُ وَدَمُ الْفَوَاتِ الْعَرَاتِ عَمْرَتَهَا أَوْ حَجَّهَا إِنْ بَقِيَ وَقْتُهُ وَإِلاَ تَحَلَّلَتْ بِأَفْعَالِ عُمْرَةٍ وَلَزِمَهَا الْقَضَاءُ وَدَمُ الْفَوَاتِ الْكَوْتِ فَى الْقَالِعُ عُمْرَةً وَلَوْمَهَا الْقَضَاءُ وَدَمُ الْفَوَاتِ الْعَمَاءُ وَدَمُ الْفَوَاتِ الْمُوتِ فِي الْقَالِ عُمْرَةٍ وَلَزِمَهَا الْقُضَاءُ وَدَمُ الْفَوَاتِ الْعَصَاءُ وَدَمُ الْفَوَاتِ عَمْرَتَهَا أَوْ حَرَامِ اللّهُ اللّهُ طَلَّا الْفَالِمُ عَلَى الْمُعْتَلِ عُمْرَةً وَلَوْمَ الْمُوتُ اللّهُ اللّهُ الْمُوتُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُولِ وَلِي اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُعْتَلِ عُمْرَةً وَلَوْمَ اللّهُ الْعُلُولُ وَلِولُولُ وَلِعَلَى الْفُولُولُ وَلِولُولُ وَلِي الْمُؤْمِقِيْنِ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ الْمُؤْمِلُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَالْمُ الْفُولُولُ وَلِ اللْمُؤْمِلُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَ

¹⁷ Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, (Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t. th.), Jilid III, h. 404-405.

¹⁸ Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, (Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t. th.), Jilid II, h. 405.

secara serentak) izin suami, atau tanpa izin, lalu suami mencerainya atau meninggal dunia, maka jika wanita itu khawatir ketinggalan haji seperti sempitnya waktu, maka ia harus keluar berhaji dengan sambil menjalani 'iddah, karena lebih dahulu ihramnya. Jika tidak khawatir ketinggalan haji mengingat waktunya masih luas, maka ia boleh keluar untuk berhaji. Dan jika wanita itu berihram setelah suami mencerainya atau ia mati dengan mengizinkan istrinya berihram sebelum mencerainya, atau ia ihram haji, umrah atau keduanya tanpa seizin suami, maka wanita itu tidak boleh keluar, baik khawatir ketinggalan waktu berhaji atau tidak, karena batalnya izin suami sebelum ihram dengan adanya perceraian atau kematian pada kasus pertama, dan tidak adanya izin suami pada kasus kedua. Jika 'iddah selesai, maka ia boleh menyempurnakan haji atau umrah jika waktunya masih. Jika tidak, maka ia bertahallul dengan ritual umrah, harus mengqadha dan membayar dam ketertinggalan hajinya.

4. Hawasyi al-'Abbadi19

(قَوْلُهُ وَتَعْجِيلِ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ نَذَرَتْهُ فِيْ وَقْتٍ مُعَيَّنٍ أَوْ أَخْبَرَهَا طَبِيْبُ عَدْلٌ بِأَنَّهَا إِنْ أَخَرَتْ عُضِبَتْ فَتَخَرَّجَ لِذَلِكَ حِيْنَئِذٍ بَلْ هُوَ أَوْلَى مِنْ خُرُوْجِهَا لِلْحَاجَةِ الْمَارَةِ

(Ungkapan Ibn Hajar al-Haitami: "Dan segera menunaikan haji Islam"), dengan ungkapan itu mengecualikan kasus bila wanita yang sedang 'iddah itu telah menadzarinya dalam waktu tertentu, atau seorang dokter adil memberitahu padanya, bahwa bila ia menunda hajinya maka ia akan menderita lumpuh, maka ia harus menunaikan haji islam -wajib- itu dalam kondisi seperti ini. Bahkan pergi hajinya itu lebih penting dari pada keluarnya untuk memenuhi hajat yang penjelasannya telah lewat.

5. Takmilah al-Majmu'20

وَإِنْ خَرَجَتْ فَمَاتَ زَوْجُهَا فِي الطَّرِيْقِ رَجَعَتْ إِنْ كَانَتْ لَمْ تُفَارِقِ الْبُنْيَانَ، فَإِنْ فَارَقَتِ الْبُنْيَانَ فَإِنْ فَارَقَتِ الْبُنْيَانَ فَلَهَا الْخِيَارُ بَيْنَ الرُّجُوْعِ وَالتَّمَامُ لأَنَّهَا صَارَتْ فِيْ مَوْضِعِ أُذِنَ لَهَا فِيْهِ وَهُوَ السَّفَرُ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَتْ قَدْ بَعُدَتْ ... وَإِنْ أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا وَخَشِيَتْ فَوَاتَهُ يَجُوْزُ لَهَا أَنْ تَمْضِيَ إِلَيْهِ لِمَا فِي بَقَائِهَا فِي الإِحْرَامِ مِنَ الْمَشَقَّةِ

Jika wanita bepergian dan suaminya meninggal dunia ketika si istri

¹⁹ Ibn Qasim al-'Abbadi, Hawasyai al-'Abbadi pada Tuhfah al-Muhtaj, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.), Juz VIII, h. 264.

²⁰ Bakhit al-Muthi'i, Takmilah al-Majmu', (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid VII, h. 172-173.

masih dalam perjalanan, maka ia harus kembali ke rumah jika belum meninggalkan bangunan (batas daerah). Jika ia sudah meninggalkan bangunan tersebut, maka ia boleh memilih antara kembali lagi ke rumah atau melanjutkan perjalanan, karena ia telah berada di suatu posisi yang telah diizinkan, yaitu perjalanan tersebut. Maka kasus itu serupa dengan seandainya ia telah berada di tempat yang jauh ... seandainya ia telah ihram haji setelah kematian suaminya, dan khawatir ketinggalan haji, maka ia boleh melanjutkannya karena masyaqah dalam ihramnya.

6. Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab21

(أَوْ سَافَرَتْ بِإِذْنٍ) لِحَاجَتِهَا أَوْ لِحَاجَتِهِ كَحَجِّ وَعُمْرَةٍ وَتِجَارَةٍ وَاسْتِحْلَالٍ مِنْ مَظْلِمَةٍ وَرَدِّ آبِقٍ أَوْ لَا لِحَاجَتِهِمَا كُنُزْهَةٍ وَزِيَارَةٍ (فَوَجَبَتْ فِي طَرِيقِ ...

(قَوْلُهُ فَوَجَبَتْ فِي طَرِيقِ إِلَخْ) سَكَتَ عَمَّا إِذَا وَجَبَتْ قَبْلَ الْخُرُوجِ وَفِي الرَّوْضِ لَمْ تُسَافِرْ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَقِيلَ تَتَخَيَّرُ لِأَنَّ عَلَيْهَا ضَرَرًا فِي إِبْطَالِ سَفَرِهَا بِخِلَافِ سَفَرِ النَّقْلَةِ فَإِنَّ مُؤْنَتَهُ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ ظَاهِرُ النَّصِّ وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ بَلْ صَرِيحُهُ اه

(Atau bepergian dengan izin suami) untuk keperluan dirinya atau keperluan suami, seperti haji, umrah, berdagang, mencari halal suatu kezaliman dan mengembalikan budak yang minggat, atau bukan untuk keperluan diri dan suaminya, seperti piknik dan ziarah, maka 'iddahnya wajib di perjalanan ...

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "maka wajib 'iddah di tengah perjalanan. ...") beliau diam dari kasus bila 'iddahnya wajib sebelum bepergian. Dalam kitab Raudh al-Thalib terdapat redaksi: "Maka ia tidak boleh bepergian." Dalam Syarhnya -Asna al-Mathalib-, Syaikh Zakaria bin Muhammad bin Zakaria al-Anshari berkata: "Menurut satu pendapat ia boleh memilih (melanjutkan atau kembali ke rumah). Sebab, ia akan mengalami kerugian dalam pembatalan perjalanannya. Berbeda dengan perjalanan pindah rumah, sebab ongkosnya menjadi tanggungan suami. Al-Rafi'i berkata: "Itu merupakan makna lahiriah nash Imam Syafi'i." Dan al-Bulqini berkata: "Bahkan nash sharih."

424. Puasa Hari 'Arafah

A. Diskripsi Masalah

Waktu di Indonesia lebih cepat kira-kira 4 - 5 jam dari waktu Saudi

²¹ Zakaria al-Anshari dan Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab, (Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t. th.), Jilid II, h. 464-465.

Arabia. Dengan demikian, waktu sahur atau buka puasa bagi muslimin di Indonesia lebih cepat kira-kira 4 - 5 jam.

B. Pertanyaan

Puasa sunnah hari 'Arafah bagi kaum muslimin yang tidak sedang melakukan ibadah haji, apakah karena peristiwa wuquf ataukah karena kalender hari 'Arafah?

C. Jawaban

Puasa yang dilakukan adalah karena yaumu 'Arafah yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah berdasarkan kalender negara setempat yang berdasarkan rukyat.

D. Dasar Pengambilan Hukum

1. Fath al-Wahhab22

Pada hari Arafah disunahkan berpuasa, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah bagi selain orang yang sedang melaksanakan haji. Karena hadits riwayat Muslim: "Puasa pada hari Arafah bisa menghapus (dosa) setahun yaitu tahun yang sebelum dan sesudahnya."

2. Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab23

وَقَدْ قَالُوا لَيْسَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَوَّلَ شَوَّالٍ مُطْلَقًا بَلْ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَكَذَا يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ وَيَوْمُ عَرَفَةَ النَّاسِعُ وَالْعَاشِرُ لِخَبْرِ الْفِطْرُ يُضَحِّي النَّاسُ وَيَوْمُ عَرَفَةَ سَوَاءً التَّاسِعُ وَالْعَاشِرُ لِخَبْرِ الْفِطْرُ يُضَمِّي النَّاسُ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّافِعِيِّ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّافِعِيِّ وَعَرَفَةُ يَوْمَ يَعْرِفُ النَّاسُ وَمَنْ رَأَى الْهِلَالَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ وَشَهِدَ بِهِ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ وَعَرَفَةً يَوْمُ لِمَعَهُمْ وَيُجْزِيهِ إِذْ الْعِبْرَةُ فِي دُخُولِ وَقْتِ عَرَفَةَ وَخُرُوجِهِ بِاعْتِقَادِهِ

Para ulama sungguh telah berkata: "Hari raya fitri itu bukan berarti awal Syawwal secara mutlak, (namun) adalah hari di mana orang-orang sudah tidak berpuasa lagi, demikian halnya hari *nahr* adalah hari orang-orang menyembelih kurban, dan begitu pula hari Arafah adalah hari yang menurut orang-orang tampak sebagai hari Arafah, meski tangal 9

²² Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz I, h. 145.

²³ Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab, (Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t. th.), Jilid II, h. 460.

dan 10 Dzul Hijjah, mengingat hadits: "Berbuka (tidak puasa lagi) yaitu hari orang-orang tidak berpuasa dan Idul Adha adalah hari orang-orang menyembelih kurban." HR. Tirmidzi, dan ia *shahih*kan. Dalam riwayat Imam Syafi'i ada hadits: "Hari Arafah adalah hari yang telah dimaklumi oleh orang-orang."

Barang siapa melihat hilal sendirian atau bersama orang lain dan ia bersaksi dengannya, lalu kesaksiannya itu ditolak, maka ia harus wuquf sebelum orang-orang, tidak boleh wukuf bersama mereka, dan fuqufnya mencukupi (sebagai rukun haji). Sebab yang menjadi pedoman perihal waktu masuk dan keluarnya hari Arafahadalah keyakinannya sendiri.

3. Fath al-Mu'in²⁴

Disunahkan dengan sunnah muakkad berpuasa hari Arafah bagi selain orang yang haji, karena puasa tersebut dapat menghapus dosa setahun yang sedang dijalaninya dan setahun sesudahnya. Seperti dalam hadits riwayat Muslim. Hari Arafah adalah tanggal sembilan Dzulhijjah.

425. Budi Daya Jangkrik

A. Diskripsi Masalah

Di zaman modern sekarang ini, perkembangan IPTEK semakin pesat. Di antara perkembangan tersebut adalah membudidayakan jangkrik untuk berbagai keperluan.

B. Pertanyaan

- a. Bagaimana hukum budidaya jangkrik?
- b. Bagaimana hukum jual beli jangkrik?

C. Jawaban

a. Budidaya jangkrik hukumnya boleh.

D. Dasar Pengambilan Hukum

1. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah ²⁵

²⁴ Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in pada Tarsyih al-Mustafidin, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 170.

²⁵ Abdurrahman al-Juzairi, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid I, h. 382.

وَاحِدًا أَمَّا إِذَا اعْتَادَ قَوْمٌ أَكْلَهَا وَلَمْ تَضُرَّهُمْ وَقِبْلَتْهَا أَنْفُسُهُمْ فَالْمَشْهُوْرُ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا لاَ تَحْرُمُ

Ulama madzhab Malikiyah - Tidak terdapat pertentangan di antara mereka tentang keharaman memakan barang berbahaya. Maka tidak boleh makan serangga yang membahayakan, dengan (hanya terdapat) satu pendapat. Sedangkan jika suatu kaum sudah terbiasa memakannya, tidak membahayakan mereka, dan mereka menerimanya, maka menurut pendapat masyhur ulama Malikiyah maka serangga yang membahayakan itu tidak haram.

2. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab26

وَأَمَّا الصَّرَارَةُ فَحَرَامٌ عَلَى أَصَعِّ الْوَجْهَيْنِ كَالْخُنْفُسَاءِ وَاللهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ (فَرْعُ) فِيْ مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِيْ حَشَرَاتِ الْأَرْضِ ... وَقَالَ مَالِكٌ حَلاَلٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى قُلْ لاَ أَجِدُ فِيْمَا أُوجِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً الْآيَةَ

Adapun jangkrik itu haram menurut ashshah al-wajhain (pendapat yang paling shahih dari dua pendapat ashhab) seperti kumbang. Dan Allah, Maha Suci Dia, adalah Dzat Yang Maha Mengetahui. (Cabang Kasus) Tentang mazhab-mazhab ulama perihal serangga ... Imam Malik berkata: "Serangga itu halal, karena firman Allah Swt.: "Katakanlah! "Tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali jika makanan itu bangkai, ..." (QS. al-An'am: 145)

3. Al-Mughni²⁷

Dan kami (madzhab Hanabilah), memiliki pendapat bahwa ulat itu adalah hewan suci dan boleh membudidayakannya untuk memiliki barang yang keluar darinya, sama seperti binatang ternak.

Jawaban

- b. Hukum jual beli jangkrik khilaf;
 - 1) Madzhab Maliki dan Mazhab Hanafi mensahkan hukum jual belinya.
 - 2) Menurut ashah al-wajhain dari mazhab Syafi'i, hukumnya haram.

Dasar Pengambilan Hukum

1. Al-Figh al-Islami wa Adillatuh²⁸

²⁶ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid XI, h. 16.

²⁷ Abdullah bin Ahmad al-Maqdisi, al-Mughni, (Mesir: Hijr, 1992), Jilid IX, h. 391.

وَيَصِحُ بَيْعُ الْحَشَرَاتِ وَالْهَوَامِ كَالْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ إِذَا كَانَ يُنْتَفَعُ بِهِ ... وَالضَّابِطُ عِنْدَهُمْ أَنَّ كُلُّ مَا فِيْهِ مَنْفَعَةُ تَحِلُ شَرْعًا فَإِنَّ بَيْعَهُ يَجُوزُ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ خُلِقَتْ لِمَنْفَعَةِ الْإِنْسَانِ بِدَلِيْلِ كُلُّ مَا فِيهُ الْأَرْضِ جَمِيْعًا [البقرة:٢/٢٩].

Dan sah jual beli hewan serangga dan binatang melata, seperti ular dan kalajengking jika bisa dimanfaatkan. ... Dan parameternya menurut mereka (ulama Hanafiyah) adalah, semua yang mengandung manfaat itu halal menurut syara'. Maka boleh menjualbelikannya. Sebab, semua makhluk yang ada itu memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia, dengan dalil firman Allah Swt.: "Dialah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu ..." (QS. al-Baqarah: 29)

2. Fath al-Wahhab dan Futuhat al-Wahhab²⁹

(وَ) ثَانِيهَا (نَفْعُ) بِهِ ... (فَلَا يَصِحُ بَيْعُ حَشَرَاتٍ)

(قَوْلُهُ وَنَفْعٌ بِهِ) ... فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِمُجَرَّدِهِ وَإِنْ تَأَتَّى النَّفْعُ بِهِ بِضَمِّهِ إِلَى غَيْرِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي نَحْوِ حَبَّتَيْ حِنْطَةٍ إِذْ عَدَمُ النَّفْعِ إِمَّا لِلْقِلَّةِ كَحَبَّتَيْ بُرِّ وَإِمَّا لِلْخِسَّةِ كَالْحُشَرَاتِ

(Dan yang kedua dari syarat barang sah diperjualbelikan adalah bermanfaat), ... (maka tidak sah jual beli serangga).

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Bermanfaat.") ... Maka tidak sah menjualbelikan barang yang tidak bermanfaat secara tersendiri, meski bisa dimanfaatkan dengan dirangkai pada parang lain seperti akan dijelaskan dalam contoh dua biji gandum. Sebab, tidak adanya manfaat suatu barang itu adakalanya karena terlalu sedikit, seperti dua biji gandum, dan adakalanya karena hinanya, seperti serangga.

3. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab³⁰

وَأَمَّا الصَّرَارَةُ فَحَرَامٌ عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ كَالْخُنْفُسَاءِ

Adapun jangkrik itu haram menurut ashshah al-wajhain (pendapat yang paling shahih dari dua pendapat ashhab) seperti kumbang.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Jilid IV, 329

²⁹ Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Fath al-Wahhab, (Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t. th.), Jilid III, h. 24-25.

³⁰ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid XI, h. 16.

426. Jual Beli Ulat, Cacing, Semut Untuk Makanan Burung

A. Diskripsi Masalah

Di masyarakat terjadi jual beli barang yang diharamkan, dan itu terjadi *ma'ruf* sekarang, benda itu diharamkan, yaitu jual beli ulat, cacing, semut, ular makanan burung, bahkan harganya sangat mahal. Itu sudah jelas niatnya membeli ulat, semut atau ular, bukan ongkos menangkap atau ongkos membungkus barang.

B. Pertanyaan

Bagaimana hukum jual beli barang tersebut (ulat, cacing, semut dan ular) untuk makanan burung?

C. Jawaban

Hukumnya terdapat *khilaf* (beda pendapat) di kalangan ulama. Ada yang mengharamkan, karena dianggap hina. Dan ada yang membolehkannya, karena ada unsur manfaatnya.

D. Dasar Pengambilan Hukum

1. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh 31

وَلَمْ يَشْتَرِطُ الْحَتَفِيَّةُ هَذَا الشَّرْطَ فَأَجَازُوا بَيْعَ النَّجَاسَاتِ كَشَعْرِ الْخِنْزِيْرِ وَجِلْدِ الْمَيْتَةِ لِلانْتِفَاعِ بِهَا إِلاَّ مَا وَرَدَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِهِ مِنْهَا كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ كَمَا أَجَازُوا بَيْعَ الْخُتَوَانَاتِ الْمُتَوَحِّشَةِ وَالْمُتَنَجِّسِ الَّذِيْ يُمْكِنُ الْانْتِفَاعُ بِهِ فِيْ الْأَكْلِ وَالضَّابِطُ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْحُيَوانَاتِ الْمُتَوَحِّشَةِ وَالْمُتَنَجِّسِ الَّذِيْ يُمْكِنُ الْانْتِفَاعُ بِهِ فِيْ الْأَكْلِ وَالضَّابِطُ عِنْدَهُمْ أَنَّ كُلُ مَا فِيْهِ مَنْفَعَةً تَعِلُ شَرْعًا فَإِنَّ بَيْعَهُ يَجُوزُ لِأَنَّ الْأَعْيَانَ خُلِقَتْ لِمَنْفَعَةِ الْإِنْسَانِ كُلُو مَا فِيْهِ مَنْفَعَةً لَكِنْ لَكُولِ وَالْمَانِ

Dan ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan syarat ini (barang yang dijualbelikan harus suci, bukan najis dan terkena najis). Maka mereka memperbolehkan jualbeli barang-barang najis, seperti bulu babi dan kulit bangkai karena bisa dimanfaatkan. Kecuali barang yang terdapat larangan memperjual-belikannya, seperti minuman keras, (daging) babi, bangkai dan darah, sebagaimana mereka juga memperbolehkan jualbeli binatang buas dan najis yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan. Dan parameternya menurut mereka (ulama Hanafiyah) adalah, semua yang mengandung manfaat yang halal menurut syara.', maka boleh menjualbelikannya. Sebab, semua makhluk yang ada itu memang diciptakan

³¹ Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Jilid IV, 181-182.

untuk kemanfaatan manusia.

2. Al-Figh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah 32

Dan begitu pula sah jualbeli serangga dan binatang melata, seperti ular dan kelajengking ketika bermanfaat. Dan parameternya menurut mereka (ulama Hanafiyah) dalam hal itu adalah semua yang mengandung manfaat yang halal menurut *syara*.', maka boleh menjualbelikannya. Sebab, semua benda itu diciptakan untuk kemanfaatan manusia.

- 3. Referensi Lain
 - a. Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz IV, h. 446.
 - b. Al-Tajrid li Naf al-'Abid, Juz II, h. 78

427. Lomba Dengan Pemungutan Uang

A. Pertanyaan

Lomba dengan menarik uang pendaftaran untuk hadiah, apakah termasuk judi?

B. Jawaban

Lomba dengan menarik uang saat pendaftaran dari peserta untuk hadiah termasuk judi. Sedangkan yang bukan untuk hadiah tidak termasuk judi.

Solusi yang ditawarkan untuk penyelenggaraan lomba berhadiah:

- a. Uang pendaftaran tidak menjadi hadiah.
- b. Hadiah diperoleh dari sumber lain (sponsor).
- c. Jenis yang dilombakan tidak termasuk dalam larangan syari'at seperti ketrampilan dalam perang, jalan cepat, memanah, menembak, balap kuda dan lain-lain.

C. Dasar Pengambilan Hukum

1. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib³³

³² Abdurrahman al-Juzairi, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid I, h. 382.

³³ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. th.), Jilid II, h. 310.

Dan jika kedua pihak yang berlomba mengeluarkan hadiah secara bersama, maka lomba itu tidak boleh ... dan hal itu, maksudnya judi yang diharamkan adalah semua permainan yang masih simpangsiur antara untung dan ruginya.

2. Is'ad al-Rafiq Syarh Sulam al-Taufiq34

(كُلُّ مَا فِيْهِ قِمَارٌ) وَصُوْرَتُهُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا أَنْ يَخْرُجَ الْعِوَضُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَعَ تَكَافَئِهِمَا وَهُوَ الْمُرَادُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَعَ تَكَافَئِهِمَا وَهُوَ الْمُرَادُ مِنَ الْمَيْسِرِ فِيْ الْآيَةِ. وَوَجْهُ حُرْمَتِهِ أَنَّ كُلُّ وَاحِدٍ مُتَرَدِّدُ بَيْنَ أَنْ يَغْلِبَ صَاحِبَهُ فَيَعْنَمَ. فَإِنْ يَنْفَرِدْ أَحَدُ اللاَّعِبَيْنِ بِإِخْرَاجِ الْعِوَضِ لِيَأْخُذَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مَغْلُوبًا وَعَكْسُهُ إِنْ كَانَ عَلْمُ أَنْ وَعَكْسُهُ إِنْ كَانَ عَلْمُ أَنْ اللَّعْمَا

(Setiap kegiatan yang mengandung perjudian) Bentuk judi yang disepakati adalah hadiah berasal dua pihak disertai kesetaraan keduanya. Itulah yang dimaksud *al-maisir* dalam ayat al-Qur'an. [QS. Al-Maidah: 90]. Alasan keharamannya adalah masing-masing dari kedua pihak masih simpang siur antara mengalahkan lawan dan meraup keuntungan -atau dikalahkan dan mengalami kerugian-. Jika salah satu pemain mengeluarkan haidah sendiri untuk diambil darinya bila kalah, dan sebaliknya -tidak diambil-bila menang, maka pendapat *al-Ashah* mengharamkannya pula.

3. Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib³⁵

وَيَجُوْزُ شَرْطُ الْعِوَضِ مِنْ غَيْرِ الْمُتَسَابِقَيْنِ مِنَ الْإِمَامِ أَوِ الْأَجْنَبِيِّ كَأَنْ يَقُوْلَ الْإِمَامُ مَنْ سَبَقَ مِنْكُمَا فَلَهُ عَلَيَّ كَذَا، وَكَأَنْ يَقُوْلَ الْأَجْنَبِيُّ: مَنْ سَبَقَ مِنْكُمَا فَلَهُ عَلَيَّ كَذَا، لأَنَّهُ بَذْلُ مَالِ فِيْ طَاعَةٍ سَبَقَ مِنْكُمَا فَلَهُ عَلَيَّ كَذَا، لأَنَّهُ بَذْلُ مَالِ فِيْ طَاعَةٍ

Dan boleh menjanjikan hadiah dari selain kedua peserta lomba balap hewan, seperti penguasa atau pihak lain. Seperti penguasa berkata: "Siapa yang menang dari kalian berdua, maka aku akan memberi sekian dari hartaku, atau ia memperoleh sekian jumlah dari bait al-mal." Dan seperti pihak lain itu berkata: "Siapa yang menang dari kalian berdua, maka ia berhak mendapat sekian harta dariku." Karena pernyataan itu merupakan penyerahan harta dalam ketaatan.

³⁴ Muhammad Salim Bafadhal, *Is'ad al-Rafiq Syarh Sulam al-Taufiq*, (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Juz II, h. 102.

³⁵ Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, t. th.), Jilid II, h. 309.

4. Minhaj al-Thalibin³⁶

كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ هُمَا سُنَّةً وَيَحِلُ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَيْهِمَا، وَتَصِحُّ الْمُنَاضَلَةُ عَلَى سِهَامٍ وَكَذَا مَزَارِيْقُ وَرِمَاحُ وَرَئِيُ بِأَحْجَارٍ وَمَنْجَنِيْقٍ وَكُلُّ نَافِعٍ فِيْ الْحُرْبِ عَلَى الْمَذْهَبِ

Kitab tentang lomba balap dan lomba membidik. Keduanya sunah dan boleh mengambil hadiah dari keduanya. Lomba membidik itu sah dengan panah. Begitu pula tombak pendek, tombak, melempar dengan batu, manjaniq (alat perang pelempar batu jaman kuno), dan semua yang bermanfaat dalam peperangan menurut madzhab Syafi'iyah.

428. Hak Atas Tanah

A. Diskripsi Masalah

Si A telah bertahun-tahun, bahkan turun temurun menempati tanah negara. Belakangan datang si B kepada si A dan memintanya untuk mengosongkan tanah tersebut, karena permohonan pada pemerintah untuk memiliki tanah tersebut dikabulkan. Untuk meyakinkan si A, si B memperlihatkann bukti kepemilikan tanah yang sah.

B. Pertanyaan

Manakah yang berhak atas tanah tersebut?

C. Jawaban

Yang lebih berhak atas tanah tersebut adalah orang yang lebih dulu menguasai tanah tersebut dengan menunjukkan alat bukti yang sah.

D. Dasar Pengambilan Hukum

1. Bughyah al-Mustarsyidin³⁷

(مَسْأَلَةُ بِ شِ) أَحْيَا قِطْعَةً مِنْ أَرْضِ وَتَرَتَّبَتْ يَدُهُ عَلَيْهَا سِنِيْنَ ثُمَّ ادَّعَى آخَرُ جَمِيْعَ الْأَرْضِ وَأَنَّ الْمُحَيِّيَ بَسَطَ عَلَى بَعْضِهَا مِنْ غَيْرِ مُسَوِّعْ، فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةَ مُؤَرِّخَةِ الْأَحْيَاءِ الْأَرْضِ وَأِنَّ الْمُدَّعَى مِلْكُهُ وَرَثَهَا مِنْ آبَائِهِ مَثَلًا وَلَيْسَتْ مَوَاتًا، بَلْ لَهَا آثَارُ عِمَارَةٍ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ رَدَّ الْيَمِينَ فَحَلَفَ هُوَ وَأَنَّ لَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ رَدَّ الْيَمِينَ فَحَلَفَ هُوَ

576

³⁶ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Minhaj al-Thalibin pada Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, (Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t. th.), Jilid IV, h. 311.

³⁷ Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, *Bughyah al-Musytarsyidin*, (Bandung: Syirkah Nur Asia, t. th.), h.289.

الْمَرْدُودَةَ تَبَيَّنَ أَنَّ يَدَ الْمُحْيِي عَادِيَةً لَكِنْ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِعُذْرِهِ ... وَلَوْ ثَبَتَتْ أَنَّهَا مَوَاتُ مَلَكُهَا الْمُحَيِّي لِتَرَتُّب يَدِهِ عَلَيْهَا

(Kasus dari Syaikh Abdullah bin al-Husain bin Abdillah Bafagih dan Syaikh Muhammad bin Abi Bakr al-Ayskhar al-Yamani). Bila seseorang membuka sebidang lahan dan telah menguasainya selama bertahun-tahun, lalu ada orang lain yang mengklaim seluruh lahan adalah miliknya- dan al-muhyi (orang yang membuka lahan itu) menguasai sebagian lahan miliknya tanpa hak, maka bila ia bisa mengajukan bukti sejarah pembukaan lahan yang menyatakan bahwa lahan dan termasuk yang diklaim adalah miliknya, yang ia warisi dari nenek moyangnya misalnya, dan bukan termasuk lahan bebas, bahkan terdapat tanda-tanda pernah dikelola serta penguasaannya atas lahan itu tidak diperselisihkan, atau si terdakwa mengakuinya atau menolak bersumpah lalu si pendakwa mau bersumpah dengan sumpah al-mardudah (yang diberikan kepadanya setelah si terdakwa menolak bersumpah), maka menjadi jelas bahwa penguasaan si almuhyi adalah suatu kecerobohan, namun ia tidak berdosa karena udzur (atas ketidaktahuannya). ...

Namun jika terbukti bahwa lahan tersebut adalah lahan bebas, maka si al-muhyi berhak memiliknya, karena ia telah menguasainya.

2. Bughyah al-Mustarsyidin³⁸

(مَسْأَلَةُ ي) كُلُّ أَرْضِ حُكِم بِأَنَّهَا إِسْلاَمِيَّةُ لِاسْتِلاَءِ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَيْهَا أَوَّلاً وَإِنِ اسْتَوْلَى عَلَيْهَا الْكُفَّارُ بَعْدُ وَمَنَعُوا الْمُسْلِمِيْنَ كَغَالِبِ أَرْضِ جاور " حُكْمُهَا حُكُمُ الْمَوَاتِ فَإِذَا أَحْيَاهَا الْمُسْلِمُ لَا غَيْرُهُ وَلَوْ ذِمِيًّا أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ مَلَكَهَا سَوَاءٌ عُلِمَ أَنَهَا لَمْ تُعْمَرْ قَطُّ أَوْ شُكَّ وَلَيْسَ بِهَا أَثَرُ الْمُسْلِمِينَ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ يَدِ مُسْلِمٍ قَبْلَ عَمَارَةٍ وَكَذَا لَوْ عَمَرَهَا كَافِرٌ قَبْلَ اسْتِيلَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ بَعْدَهُ وَلَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ يَدِ مُسْلِمٍ قَبْلَ الْعِمَارَةِ هَلْ هِيَ إِسْلَامِينَةٌ أَوْ جَاهِلِيَّةٌ وَلَمْ تَحُنْ تَحْتَ يَدِ مُسْلِمٍ قَبْلَ الْعِمَارَةِ هَلْ هِيَ إِسْلَامِينَةٌ أَوْ جَاهِلِيَّةٌ وَلَمْ تَصُنْ تَحْتَ يَدِ أَحَدِ الْعِمَارَةِ أَوْ الْعِمَارَةِ هَلْ هِيَ إِسْلَامِينَةٌ أَوْ جَاهِلِيَّةٌ وَلَمْ تَحُنْ عَنْ الْعِمَارَةِ هَلْ هِيَ إِسْلَامِينَةٌ أَوْ جَاهِلِيَّةٌ وَلَمْ تَحُنْ تَحُنْ الْيَدَ وَلَوْ كَافِرًا وَإِنْ حَكَمْنَا بِعَدَم صِحَّةٍ إِحْيَاثِهِ لَهَا لِكُونِهَا دَارَ إِسْلَامٍ لِأَنَّ الْيَدَ دَلِيلُ

577

³⁸ Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Bandung: Syirkah Nur Asia, t. th.), h.167.

³⁹ Mungkin maksudnya adalah kata [] (Jawa), seperti dalam redaksi kasus lain dari Abdullah bin Umar bin Abi Bakr bin Yahya dalam bab al-Aman wa al-Hudnah wa al-Jizyah. Lihat, Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h.254.

الْمِلْكِ وَالْأَصْلُ وَضْعُهَا جِئَقً إِلاَّ أَنْ يَثْبُتَ نَقِيْضُهُ

(Kasus dari Abdullah bin Umar bin Abi Bakr bin Yahya) Seluruh tanah dihukumi sebagai tanah Islam karena pernah dikuasai umat Islam pada awalnya, meski kemudian sesudah itu dikuasai non muslim, dan mereka melarang umat Islam tinggal di situ. Seperti halnya mayoritas tanah di pulau Jawa yang hukumnya masih berhukum lahan bebas. Maka ketika tanah itu dibuka oleh seorang muslim, bukan selainnya meski non muslim dzimmi, yang diizini oleh penguasa, maka ia berhak memilikinya. Baik tanah itu diketahui belum pernah dibuka sama sekali, atau diragukan dan tidak terdapat bekas-bekas pengelolaannya. Dan begitu pula bila seorang non muslim membuka lahan tersebut sebelum dikuasai oleh umat Islam, atau setelahnya dan belum pernah dimiliki oleh seorang muslim sebelum dikelola non muslim itu, atau setelah dikelola, seperti ketika pengelolaannya diragukan, apakah bersifat Islam atau bersifat Jahiliyah, dan belum pernah dimiliki siapa pun. Bila tidak, maka tanah itu menjadi milik orang yang menguasainya, meski non muslim, meski kita hukumi ketidakabsahan pembukaan lahan itu olehnya karena Jawa merupakan wilayah Islam. Sebab, penguasaan lahan merupakan tanda hak milik, dan hukum asalnya adalah dilakukan dengan cara yang benar, kecuali ada yang merusaknya.

3. Fath al-Mu'in40

فَلَوْ شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ لِأَحَدِ الْمُتَنَازِعَيْنِ فِيْ عَيْنٍ بِيَدِهِمَا أَوْ يَدِ ثَالِثٍ أَوْ لاَ بِيَدِ أَحَدٍ بِمِلْكِ مِنْ سَنَةٍ إِلَى الْآنَ وَشَهِدَتْ بَيِّنَةُ أُخْرَى لِلاّخَرَ بِمِلْكِ لَهَا مِنْ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ إِلَى الآنَ كَسَنَتَيْنِ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ ذِيْ الْأَكْثَرِ لِأَنَّهَا تُثْبِتُ الْمِلْكَ فِيْ وَقْتٍ لا تعارضها فيه الأخرى

Maka bila seorang saksi bersaksi bagi salah satu dari dua pihak yang berseteru dalam barang yang sedang mereka kuasai, atau dikuasai pihak ketiga, atau tidak dia dikuasai siapa pun, tentang hak milik mulai dari setahun lalu sampai sekarang, dan saksi lain bersaksi bagi satu pihak berseteru lainnya, tentang hak milik pada barang itu semenjak lebih dari setahun lalu, seperti dua tahun lalu sampai sekarang, maka diunggulkan saksi pihak yang waktu hak miliknya lebih lama. Sebab saksi itu menetapkan kepemilikan pada waktu yang tidak ditentang pihak lainnya itu.

4. Hasyiyah al-'Ibn Qasim al-'Abbadi41

⁴⁰ Zainuddin al-Malibari, Fath al-Mu'in pada Tarsyih al-Mustafidin, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), h. 413.

⁴¹ Ibn Qasim al-Ubbadi, Hasyiyah al-'Ubbadi pada Hawasyai al-Syarwani wa al-'Ubbadi,

(مَسْأَلَةً) رَجُلُ بِيَدِهِ رَزْقَةً اشْتَرَاهَا ثُمَّ مَاتَ فَوَضَعَ شَخْصٌ يَدَهُ عَلَيْهَا بِتَوْقِيْعِ سُلْطَافِيِّ، فَهَلْ لِلْوَرَثَةِ مُنَازَعَتُهُ؟ الْجُوَابُ: إِنْ كَانَتْ الرَّزْقَةُ وَصَلَتْ إِلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ لِطَرِيْقٍ شَرْعِيِّ بِأَنْ أَلْفَرَثَةِ مُنَازَعَتُهُ؟ الْجُوَابُ: إِنْ كَانَتْ الرَّزْقَةُ وَصَلَتْ إِلَى الْبَائِعِ الْأَوَّلِ لِطَرِيْقٍ شَرْعِيِّ بِأَنْ أَقْطَعَهُ السُّلْطَانُ إِيَّاهَا وَهِيَ أَرْضُ مَوَاتُ فَهُو يَمْلِكُهَا، وَيَصِحُّ مِنْهُ بَيْعُهَا وَيَمْلِكُهَا الْمُشْتَرِيْ مِنْهُ، وَإِنْ مَاتَ فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ وَلاَ يَجُوزُ لِأَحْدٍ وَضْعُ الْيَدِ عَلَيْهَا لِأَمْرِ سُلْطَانٍ وَلاَ غَيْرِهِ

(Kasus), seseorang menguasai suatu razqah (bagian harta dari bait almal yang diberikan penguasa pada orang tertentu seperti qadhi, mufti, muadzin dan semisalnya) yang ia beli, lalu ia mati. Kemudian seseorang menguasainya dengan perintah penguasa. Maka, apakah ahli waris boleh menggugatnya?

Jawab: "Bila razqah sampai pada penjual pertama dengan cara syar'i, yakni penguasa memberikan razqah itu kepadanya pada saat razqah itu berupa lahan bebas, maka penjual itu memilikinya. Maka ia sah menjualnya dan pembeli bisa memiliki darinya. Bila si pembeli mati, maka razqah itu menjadi milik ahli warisnya, dan orang lain tidak boleh menguasainya dengan perintah penguasa atau selainnya.

Referensi Lain

a. Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib, Juz III, h. 199.

429. Anggota DPR/MPR Beragama Non Islam

A. Pertanyaan

Bagaimana hukum orang Islam menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam?

B. Jawaban

Orang Islam tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam kecuali dalam keadaan darurat, yaitu:

- a. Dalam bidang-bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang Islam secara langsung atau tidak langsung karena faktor kemampuan.
- b. Dalam bidang-bidang yang ada orang Islam berkemampuan untuk menangani, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan khianat.
- Sepanjang penguasaan urusan kenegaraan kepada non Islam itu nyata membawa manfaat.

Catatan: Orang non Islam yang dimaksud berasal dari kalangan ahl al-dzimmah dan harus ada mekanisme kontrol yang efektif.

C. Dasar Pengambilan Hukum

1. Al-Quran Al-Karim

"Dan Allah Swt. sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman." (QS. al-Nisa': 141)

2. Tuhfah al-Muhtaj dan Hawasyi al-Syarwani⁴²

(وَلاَ يُسْتَعَانُ عَلَيْهِمْ بِكَافِرٍ) ذِئِّيٍّ أَوْ غَيْرِهِ إِلاَّ إِنِ اضْطُرِرْنَا لِذَلِكَ

(قَوْلُ الْمَثْنِ وَلَا يُسْتَعَانُ إِلَخْ) أَيْ يَحْرُمُ ذَلِكَ ا هسم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنَّهَايَةِ تَنْبِيهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَلَوْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ إِلَيْهِ لَكِنَّهُ فِي التَّتِمَّةِ صَرَّحَ بِجَوَازِ الاِسْتِعَانَةِ بِهِ أَيْ الْكَافِرِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ

(Dan tidak diperbolehkan meminta bantuan orang kafir dalam memerangi *bughat* -pemberontak-), baik kafir dzimmi atau yang lainnya, kecuali kita diharuskan begitu.

(Pernyataan kitab matn -Minhaj al-Thalibin-, "Dan tidak diperbolehkan ..."), maksudnya hal tersebut haram, demikian pendapat Ibn Qasim al-'Abbadi. Sementara teks kitab Mughni al-Muhtaj dan Nihayah al-Muhtaj adalah, "Peringatan. Menurut zhahir pendapat para ulama, meminta bantuan orang kafir itu tidak diperbolehkan walaupun dalam keadaan darurat. Namun, Abu Sa'id al-Mutawalli dalam kitab al-Tatimmah terangterangan menjelaskan kebolehan meminta bantuan orang non muslim dalam keadaan darurat.

3. Hawasyi al-Syirwani⁴³

نَعَمْ إِنِ اقْتَضَتْ الْمَصْلَحَةُ تَوْلِيَّتَهُ فِي شَيْءٍ لاَ يَقُوْمُ بِهِ غَيْرُهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْ ظَهَرَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْ ظَهَرَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَوْ ظَهَرَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ خِيَانَةٌ وَأَمِنَتُ فِي ذِيِّ. فَلاَ يَبْعُدُ جَوَازُ تَوْلِيَّتِهِ لِضَرُوْرَةِ الْقِيَامِ بِمَصْلَحَةِ مَا وَلَّى الْمُسْلِمِيْنَ فِيهِ، وَمَعَ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَى مَنْ يَنْصِبُهُ مُرَاقَبَتُهُ وَمَنْعُهُ مِنَ التَّعَرُّضِ لِأَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِيهِ، وَمَعَ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَى مَنْ يَنْصِبُهُ مُرَاقَبَتُهُ وَمَنْعُهُ مِنَ التَّعَرُّضِ لِأَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ لِيهِ عَلَى مَنْ يَنْصِبُهُ مُرَاقَبَتُهُ وَمَنْعُهُ مِنَ التَّعَرُّضِ لِأَحَدِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَيْهِ عَلَى مَنْ يَنْصِبُهُ مُرَاقَبَتُهُ وَمَنْعُهُ مِنَ التَّعَرُّضِ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَيْ لَيْعَامِ إِلَيْ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَيْ الْعَنْ عَلَى مَنْ يَنْصِبُهُ مُرَاقَبَتُهُ وَمَنْعُهُ مِنَ التَّعَرُّضِ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلَيْ لَكُونَ اللَّهُ عَرُضَ لِلْكَ يَجِبُ عَلَى مَنْ يَنْصِبُهُ مُرَاقَبَتُهُ وَمَنْ عَلَى إِلَا لَيْعَامُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَنْصِبُهُ مُرَاقَبَتُهُ وَمَنْ التَّعَرُّضِ لِلْمَ لَهُ مِنَ السَّعْرُونَ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَنْصِبُهُ مُواقِيّةٍ وَلَمْ يَعُهُ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلْ الْعَلَوْلَ اللَّهُ مِنَ السَّلَمِينَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ يَنْصِبُهُ مُوالْقَبَهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ إِلَيْ لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْعُلِمُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ
⁴² Ibn Hajar al-Haitami dan Abdul Hamid al-Syirwani, Tuhfah al-Muhtaj dan Hasyiyah al-Syirwani pada Hasyiyata al-Syirwani wa al-'Abbadi, (Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t. th), Jilid IX, h. 72-72.

⁴³ Abdul Hamid al-Syirwani, *Hawasyi al-Syirwani* pada *Hawasyai al-Syarwani wa al-'Ubbadi*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.), Juz IX, h. 73.

bisa dilaksanakan oleh orang lain dari kalangan umat Islam atau tampak adanya pengkhianatan pada si pelaksana dari kalangan umat Islam dan aman berada di kafir dzimmi, maka boleh menyerahkannya padanya karena darurat. Namun demikian, bagi pihak yang menyerahkan, harus ada pengawasan terhadap orang kafir tersebut dan mampu mencegahnya dari adanya gangguan terhadap siapapun dari kalangan umat Islam.

4. Kanz al-Raghibin dan Hasyiyah al-Qulyubi44

(Dan tidak diperbolehkan meminta bantuan orang kafir dalam memerangi bughat -pemberontak-), karena haram menguasakan orang kafir terhadap umat Islam.

(Pernyataan Imam Nawawi: "Dan tidak diperbolehkan meminta.") Maka meminta bantuan kepada orang kafir itu hukumnya haram, kecuali karena darurat.

Al-Ahkam al-Sulthaniyah⁴⁵

Kementerian itu ada dua macam, wuzarah tafwid (kementerian pengkonsep) dan wuzarah tanfidz (kementerian pelaksana). Adapun wuzarah tafwid adalah bila seorang penguasa tertinggi negara mengangkat seorang menteri yang bertugas menggantikan dirinya dalam mengatur segala urusan sesuai dengan pertimbangannya sendiri dan melaksanakan semaksialnya.

6. Al-Ahkam al-Sulthaniyah⁴⁶

Sedangkan wuzarah tanfidz, maka kekuasaannya lebih lemah dan persyaratannya lebih sedikit karena pertimbangannya terbatas pada pendapat imam dan pengaturannya.

⁴⁴ Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, (Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), Jilid IV, h. 156.

⁴⁵ Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1966), h. 22.

⁴⁶ Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1966), h. 25.

REKOMENDASI KOMISI BAHTSUL MASAIL AL-DINIYAH AL-WAQI'YAH

- 1. Mendesak Pemerintah cq. Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama agar sekolah diliburkan selama bulan puasa.
- Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI, Departemen Agama RI, serta Mahkamah Agung agar meninjau kembali Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres No. 1 Tahun 1991).
- 3. Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI agar mempertimbangkan hukum agama Islam dalam menjatuhkan pidana atas pelaksanaan *muhakkam* dalam perkawinan tanpa wali kerabat.
- 4. Korpri pada unit-unit instansi pemerintah tidak melakukan pemotongan gaji PNS terkait dengan zakat/zakat fitrah.
- Departemen Agama agar menfasilitasi terbentuknya majlis fatwa yang on line, mudah terjangkau masyarakat luas dan terkoordinasi dengan baik.
- Lajnah Bahtsul Masail PBNU supaya menyelenggarakan Bahtsul Masail tingkat Nasional setiap tahun sekali, utamanya diselenggarakan di wilayah-wilayah luar Jawa.
- Departemen Agama RI agar menjelaskan kembali tentang peraturan perundang-undangan yang menyangkut hukum-hukum agama Islam seperti keabsahan talak di luar Peradilan Agama.
- 8. Pelayanan/penyelenggaraan ibadah haji.
 - Hendaknya PBNU menghubungi Pemerintah RI cq. DEPAG RI untuk:
 - a. Mengadakan perbaikan/peningkatan mutu SDM petugas haji (TPHI, TPIH dan TPHD).
 - b. Meniadakan pemotongan atas ONH bila calon jamaah haji terpaksa menunda ibadah haji sampai tahun berikutnya.
 - c. Membenarkan tanazul apabila jamaah haji wanita belum dapat melaksanakan thawaf ifadhah berhubung dengan menstruasi.
 - d. Menjelaskan kepada jamaah haji bahwa tayamum di pesawat tidak sah, sedangkan kedudukan shalatnya hanya semata-mata untuk menghormati waktu (lihurmah al-waqti). Sesudah sampai di bandara King Abdul Aziz, shalatnya wajib diulangi (i'adah) menurut Imam Syafi'i. Sebab ketiadaan air itu merupakan halangan yang jarang terjadi. Sedang sesuatu yang jarang terjadi itu seperti tidak ada. Maka kewajiban mengulangi shalat tanpa wudhu itu tidak gugur.
 - e. Memberikan kesempatan kepada jamaah haji gelombang kedua

yang menjadikan Yalamlam sebagai *Miqat Makani*nya. Oleh sebab itu, jamaah haji supaya memakai pakaian ihram sebelum sampai di *miqat* (Yalamlam) tanpa niat ihram, dan kalau pesawat akan memasuki kawasan Yalamlam, baru melakukan niat ihram.

- f. Mengupayakan agar Pemerintah Saudi Arabia memberi kesempatan kepada jamaah haji Indonesia gelombang kedua yang menjadikan bandara King Abdul Aziz sebagai miqat makaninya, untuk melakukan niat ihram dari sana.
- g. Melempar jumrah pada hari-hari Tasyriq dilakukan setelah tergelincir matahari. Namun bagi yang punya keperluan/hajat yang sangat mendesak diperbolehkan melempar sebelum tergelincir matahari, dengan ketentuan keluar dari Mina dan dilakukan sesudah tergelincir matahari.

Ditetapkan di: Kediri

Pada tanggal: 16 Sya'ban 1420 H/24 Nopember 1999

MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA XXX PIMPINAN SIDANG KOMISI BAHTSUL MASAIL AD-DINIYAH AL-WAQI'IYYAH

ttd

Ketua

ttd

KH. M. Irfan Zidny, MA.

<u>L</u>.

KH. A. Aziz Masyhuri

Sekretaris

HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA Di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta 25-28 Juli 2002/14-17 Rabiul Akhir 1423 Tentang: MASAIL DINIYYAH WAQI'IYYAH

430. Mabit Mina di Muzdalifah 431. Badal Haji bagi yang Meninggal Sebelum Wukuf 432. Zakat Profesi 433. Wakaf dengan Uang Kontan/Cash 434. Penyakit Antraks

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA

Tahun 1423 H/2002 M

NOMOR: 002/Munas/7/2002

TENTANG

MASAIL WAQI'IYYAH UBUDIYYAH/MUAMALAT

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Mengingat:

- Keputusan Muktamar 30 NU tahun 1999 di Lirboyo Kediri; a.
- Surat Keputusan PBNU No. 274/A.II.03d/7/2002 tanggal 1 Dzulhijjah 1422/13 Pebruari 2002, tentang pembentukan Panitia Munas dan Konbes:
- Tatakerja Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tahun 1985.

Memperhatikan: a.

- Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar, tanggal 14 Rabiul Akhir 1423 H/25 Juli 2002 M;
- b. Laporan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar, tanggal 14 Rabiul Akhir 1423 H/25 Juli 2002 M;
- Pemandangan Umum para peserta Munas tanggal 15 Rabiul Akhir 1423 H/26 Juli 2002 M;
- Permusyawatan yang berlangsung pada komisi masail Waqi'iyyah Ubudiyyah/Muamalat;
- Sidang pleno pengesahan komisi-komisi Munas Nasional Alim Ulama tanggal 17 Rabiul Akhir 1423 H/28 Juli 2002 M;

MEMUTUSKAN:

Pertama: Mengesahkan hasil-hasil Sidang Komisi Masail Waqi'iyyah Ubudiyyah/ Muamalat; pada Musyawarah Nasional Alim Ulama tanggal 17 Rabiul Akhir 1423 H/28 Juli 2002 M, seperti terlampir dalam keputusan ini;

Kedua:

Mengamanatkan kepada Pengurus B sar Nahdlatul Ulama serta perangkatnya di seluruh Indonesia untuk melaks inakan keputusan ini dengan sebaikbaiknya dan penuh tanggung jawab, serta disampaikan kepada pihakpihak yang terkait sesuai dengan amanat Munas.

Jakarta: 17 Rabiul Akhir 1423 H

28 I u l i 2002 M

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA PIMPINAN SIDANG PLENO

ttd

ttd

KH M. Irfan Zidny MA

Ketua

Prof. Drs. K H. A. Ghozali Masroeri Sekretaris

TIM PERUMUS

- 1. Prof. KH. Irfan Zidni, MA. ... (Ketua)
- 2. KH. A. Aziz Masyhuri ... (Wakil Ketua)
- 3. Drs. KH. Ghazali Masroeri ... (Sekretaris)
- 4. Drs. Khoirul Huda, Lc. ... (Wakil Sekretaris)
- 5. Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tyanggo, MA. ... (PBNU)
 - 6. KH. Mujatba Ismail, MA. ... (Kaltim)
 - 7. Drs. Sanusi Ghulam Nasution ... (Sumsel)
 - 8. KH. Muhammad Ardani ... (Jatim)
 - 9. TGR. H. Ma'arif Mahmud ... (NTB)
 - 10. KH. Mas'ud ... (Banten)
 - 11. KH. M. Achya Al-Ansori ... (DKI)
 - 12. KH. Mahfudz Asirun ... (DKI)
 - 13. KH. Ahmad Baidowi ... (DKI)
 - 14. KH. M. Luthfi Abdul Hadi, SH. ... (Jatim)
 - 15. KH. A. Wahid Zuhdi ... (Jateng)
 - 16. KH. Ahmad Yasin Asmuni ... (Jatim)
 - 17. KH. Imam Hurmain, Mk ... (Riau)
 - 18. KH. Masykur Muhammad ... (DIY)
 - 19. KH. A. Rahman ... (Jambi)
 - 20. KH. Ma'arif Makmun ... (NTB)
 - 21. KH. Jamil ... (Jatim)

430. Mabit Mina di Muzdalifah

A. Deskripsi Masalah

Sejak beberapa tahun belakangan ini, jumlah jama'ah haji secara terus menerus bertambah dan tampaknya akan terus demikian sesuai dengan semakin bertambahnya jumlah umat Islam di dunia dan bertambahnya kemampuan ekonomi serta kemudahan atas transportasi. Dalam jumlah sekitar 2 (dua) jutaan, beberapa tempat penyelenggaraan manasik seperti Sa'i antara Shafa dan Marwa, tempat mabit di Mina, dan tempat melempar batu (jamarat) semakin tidak mampu menampung luapan jama'ah. Bukan hanya itu, akan tetapi kesulitan dan kecelakaan yang membawa korban jiwa hampir selalu terjadi khususnya di tempat melempar batu. Usaha perbaikan dan perluasan tempat-tempat tersebut oleh pemerintah Arab Saudi tampaknya semakin terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah dan bahkan terkesan telah sampai ke jalan buntu. Yang paling mencolok adalah bahwa ketentuan Mabit di Mina selama hari-hari melempar jumrah terpaksa harus dijalani di Muzdalifah. Sementara kita tahu, bahwa bagaimanapun Muzdalifah bukan Mina.

B. Pertanyaan

- a. Bagaimana hukumnya Mabit Mina tetapi dijalankan di Muzdalifah?
- b. Jika hal itu dimasukkan dalam kondisi keterpaksaan (darurat), bagaimana jika yang darurat menjadi norma yang terabaikan?
- c. Adakah jalan keluar yang bisa ditawarkan oleh para ulama terhadap semakin terbatasnya tempat-tempat pelaksanaan ibadah (manasik) haji di satu pihak dan semakin bertambahnya jama'ah haji di lain fihak?

C. Jawaban

Pengertian mabit Mina, bukan berarti bertempat tinggal dan tidur di Mina, oleh karenanya orang yang berhaji bisa saja bertempat tinggal dan tidur di luar Mina (misalnya Muzdalifah, Makkah dan lain-lain) asalkan ia melaksanakan mabit di Mina.

Hukum mabit Mina, secara syar'i jika dilaksanakan di Mina pada malam-malam tasyriq (11-13 Dzulhijjah) pada waktu antara ghurub alsyams hingga terbit fajar dalam tempo selama mu'dham al-lail (sekurangkurangnya separo malam lewat sebentar/lahzhah) misalnya berkemah di Muzdalifah, Makkah, dan lain-lain, maka wajib melaksanakan mabit di Mina dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Dan jika tidak melaksanakannya maka ia diwajibkan membayar dam. Menurut Imam al-Rafi'i hukum mabit Mina sunnah, karena itu bagi jama'ah haji yang

bertempat tinggal di luar Mina, misalkan berkemah di Muzdalifah dan Makkah, maka sunnah melaksanakan mabit Mina dengan ketentuan-ketentuan tersebut, dan jika tidak melaksanakannya, maka sunnah membayar dam.

D. Dasar Pengambilan Hukum

1. Nihayah al-Zain¹

وَثَانِيْهَا (مَبِيْتُ بِمُزْدَلِفَة) وَالْوَاجِبُ فِيْهِ لَحَظَةٌ مِنَ التِصْفِ الثَّانِي مِنَ اللَّيْلِ، فَإِنْ دَفَعَ مِنْهَا قَبْلَ النِّصْفِ الثَّانِي مِنَ اللَّيْلِ، فَإِنْ دَفَعَ مِنْهَا قَبْلَ النِّصْفِ الثَّانِي لَزِمَهُ الْعَوْدُ فَإِنْ لَمْ يَعُدْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ لَزِمَهُ دَمَّ، ... وَثَالِعُهَا، مَبِيْتُ (بِمِنَى التَّالُونِ التَّلْوَبُ الْقَلْاثَةِ وَالْوَاجِبُ فِيْهِ مُعْظَمُ اللَّيْلِ، وَهَذَا يَتَحَقَّقُ بِمَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ وَلَوْ بِلَحْظَةٍ

Yang kedua dari wajib haji adalah *mabit* (bermalam) di Muzdalifah. Kewajiban mabit di tempat tersebut cukup sesaat (sebentar) dari sebagian waktu setelah tengah malam. Jika seseorang meninggalkan Mudzdalifah sebelum waktu tengah malam, ia wajib kembali. Jika ia tidak kembali sampai terbit fajar maka ia wajib membayar *dam* ...

Yang ketiga, mabit di Mina di ketiga malam hari-hari tasyriq, dan kewajiban mabit di tempat ini adalah pada sebagian besar malam, dan hal ini bisa terpenuhi bila orang bermalam lebih dari separoh malam, sekalipun hanya sebentar.

2. Kifayah al-Akhyar²

اخْتُلِفَ فِيْ مَبِيْتِ لَيَالِيْ مِنَى فَقِيْلَ بِوُجُوْبِهِ وَصَحَّحَهُ التَّوَوِي، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بَاتَ بِهَا، قَالَ: خُذُوا عَنِيْ مَنَاسِكَكُمْ، وَقِيْلَ إِنَّهُ مُسْتَحَبُّ وَهُوَ الَّذِيْ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَصَحَّحَهُ الرَّافِعِي وِبِهِ قَطَعَ بَعْضُهُمْ كَالْمَبِيتِ بِمِنَى لَيْلَةَ عَرَفَةَ.

Mabit pada malam hari di Mina itu diperselisihkan. Ada yang mengatakan wajib dan pendapat itu dishahihkan oleh al-Nawawi, karena Rasulullah Saw. melakukan mabit di Mina, sedangkan beliau bersabda: "Ambillah dariku manasik kalian." Pendapat lain mengatakan: mabit di Mina adalah sunnah. Pendapat inilah yang disebutkan oleh al-Syaikh Abu Syuja' dan dishahihkan al-Rafi'i. Dan dengan pendapat

Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 192.

² Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni, Kifayah al-Akhyar, (Makkah: Maktabah al-Tujjariyah, 1995), Juz I, h. 219-220.

itu sebagian ulama memastikan (tanpa khilafiyah), seperti mabit di Mina pada malam 'arafah.

Rekomendasi

- 1. Menghimbau kepada Pemerintah Arab Saudi untuk membangun fasilitas *mabit* Mina secara vertikal.
- Menghimbau kepada Pemerintah Republik Indonesia agar meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah haji dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya memberikan bimbingan kepada jamaah haji terhadap problem mabit Mina agar mereka dapat melaksanakan mabit secara yakin dan sah.

431. Badal Haji Bagi yang Meninggal Sebelum Wukuf

A. Deskripsi Masalah

Pelaksanaan badal (orang yang mewakili) haji yang selama ini dilaksanakan adalah bagi mereka yang umumnya sudah meninggal dunia di tanah airnya. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh keluarga atau orang yang dipercayainya.

B. Pertanyaan

Hukum orang meninggal sebelum menyempurnakan rukun-rukun hajinya:

- a. Bagaimana kelanjutan hajinya?
- b. Siapa pelaksananya?
- c. Dari mana biayanya?
- d. Kapan pelaksanaannya?

C. Jawaban

Apabila orang yang meninggal tersebut sudah *istiqrar* (berkewajiban haji) dan ia memiliki harta peninggalan (*tirkah*), maka ahli warisnya wajib menghajikannya. Apabila tidak memiliki harta kekayaan (*tirkah*), maka sunnah bagi ahli waris menghajikannya.

Cara menghajikannya:

- a. Menurut *qaul adzhar*, harus dimulai dari awal (ihram). Adapun menurut *qaul qadim*, boleh dengan meneruskan rukun-rukun haji yang belum dilaksanakan.
- b. Untuk pelaksanaan hajinya, dilakukan pada tahun seketika itu pula (fauran), jika tidak memungkinkan bisa dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

D. Dasar Pengambilan Hukum

1. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj³

(النَّوْعُ الثَّانِي اسْتِطَاعَةُ تَحْصِيْلِهِ) أَي الْحَجِّ لَا بِالْمُبَاشَرَةِ بَلْ (بِغَيْرِهِ فَمَنْ مَاتَ) غَيْرَ مُرْتَدٍ (وَفِيْ ذِمَّتِهِ حَجٌّ) وَاجِبٌ مُسْتَقِرٌّ وَلَوْ بِنَحْوِ نَذْرِ بِأَنْ تَمَكَّنَ بَعْدَ قُدْرَتِهِ عَلَى فِعْلِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَدَلِكَ بَعْدَ انْتِصَافِ لَيْلَةِ النَّحْرِ وَمَضَى إِمْكَانُ الرَّمْيِ وَالطَّوَافِ وَالسَّعْي إِنْ دَخَلَ الْحَاجُ بَعْدَ الْوُقُوفِ ثُمَّ مَاتَ أَيْمَ وَلَوْ شَابًا وَإِنْ لَمْ تَرْجِعْ الْقَافِلَةُ وَ (وَجَبَ ٱلْإِحْجَاجُ عَنْهُ) وَزَادَ عَلَى الْمُحَرَّرِ قَوْلَهُ (مِنْ تِرْكَتِهِ) وَلاَبُدَّ مِنْهُ كَمَا يُقْضَى مِنْهَا دَيْنُهُ سَوَاءً فِي الْمُتَصَرِّفِ فِيْهَا أَكَانَ وَارِثًا أَمْ وَاصِيًا أَمْ حَاكِمًا وَالْعُمْرَةُ إِذَا اسْتَقَرَّتْ كَالْحَجِّ فِيْمَا تَقَرَّرَ وَإِنْ لَمْ يُوْصِ بِذَلِكَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ تِرْكَةُ أَسْتُحِبَّ لِوَارِثِهِ الْحَجُّ عَنْهُ بِنَفْسِهِ أَوْ نَاثِيهِ وَلِأَجْنَبِيّ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْوَارِثُ وَيَبْرَأُ بِهِ الْمَيِّثُ وَفَارَقَ الصَّوْمَ بِأَنْ تَوَقَّفَ عَلَى إِذْنٍ مِنْهُ بِأَنَّهُ عِبَادَةً بَدَنِيَّةً مَحْضَةً بِخِلاَفِ الْحَجِّ. وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا صَحَّ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكْتْ أَبِيْ شَيْخًا كَبِيْرًا لاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُ عَنْهُ؟ قَالَ ﷺ نَعَمْ. وَمَا صَحَّ أَيْضًا إِنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُتِيْ مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُ عَنْهَا؟ قَالَ ﷺ: حُجِّي عَنْهَا. وَإِنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُخْتِيْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ أَفَأَحُجُ عَنْهَا ؟ قَالَ ﷺ لَوْكَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضَيْتَهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاقْضُوْا حَقَّ اللهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ. فَشَبَّهَ الْحَجَّ بِالدِّيْنِ الَّذِي لا يَسْقُطُ بِالْمَوْتِ فَوَجَبَ أَنْ يُعْطَى حُكْمَهُ

(Macam yang kedua -dari dua macam ishitha'ah/mampu haji- adalah mampu melaksanakan haji tidak secara langsung, namun (dengan dilaksanakan orang lain. Maka seseorang yang mati) dalam kondisi tidak murtad (dan mempunyai tanggungan haji) wajib yang sudah tetap, meski disebabkan nadzar. Yakni ia mungkin melakukannya setelah mampu melaksanakannya sendiri atau dilaksanakan orang lain, dan kematian itu terjadi setelah separo malam hari nahr -Idul Adha-, serta telah lewat kemungkinan melempar jumrah, thawaf dan sa'i bila orang

³ Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1938), Jilid V, h. 245.

yang haji masuk -Makkah- setelah wukuf, lalu ia mati, maka ia berdosa, meski seorang yang masih muda dan rombongannya belum pulang. Dan (wajib menghajikannnya), al-Nawawi menambahi redaksi kitab al-Muharrar pada ungkapan beliau (dari tirkahnya), dan biaya haji itu harus diambil darinya seperti hutangnya dilunasi dari tirkah tersebut. Baik yang membelanjakan tirkahnya adalah ahli waris, orang yang diwasiati atau hakim. Dan umrah ketika telah menjadi tanggungan maka seperti haji dalam hukum yang telah ditetapkan, meski ia tidak mewasiatkannya. Bila ia tidak meninggalkan tirkah, maka bagi ahli warisnya sunnah menghajikannya, baik menghajikan sendiri maupun dengan penggantinya. Bagi orang lain boleh -pula-menghajikannya, meski ahli waris tidak mengizinkan, dan dengan hajinya mayit pun bebas dari tanggungannya. Haji berbeda dengan puasa yang harus mendapat izin dari ahli waris dengan keberadaan puasa sebagai ibadah badaniyah murni, berbeda dengan haji.

Dalil dalam masalah tersebut adalah hadits shahih, yaitu seorang perempuan berkata pada Nabi Saw.: "Wahai Rasulullah, Sungguh kewajiban kepada Allah atas hambaNya yang terkait haji telah menjadi beban ayahku yang sudah tua sekali, yang tidak mampu menaiki kendaraan. Apakah aku boleh menghajikannya?" Rasulullah Saw. menjawab: "Ya." Dan hadits shahih yang menyatakan bahwa seorang perempuan berkata: "Wahai Rasulullah, sungguh Ibuku telah mati dan belum pernah haji sama sekali, apakah aku boleh menghajikannya?" Rasulullah Saw. menjawab: "Hajikanlah sebagai ganti darinya." Dan seorang lelaki berkata: "Wahai Rasulullah, sungguh saudariku telah bernadzar haji dan mati sebelum melaksanakannya. Apakah aku boleh menghajikannya?" Rasulullah Saw. menjawab: "Ya." Beliau bersabda: "Maka lunasilah hak Allah, sebab hak Allah lebih berhak dilunasi." Maka Rasulullah Saw. menyamakan haji dengan hutang yang tidak akan gugur dengan kematian, maka dalam haji harus diterapkan -pulahukum hutang.

2. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab4

(فَرْعُ) إِذَا مَاتَ الْحَاجُّ عَنْ نَفْسِهِ فِيْ أَثْنَائِهِ هَلْ يَجُوْزُ النِّيَابَةُ عَلَى حَجِّهِ فِيْهِ قَوْلاَنِ مَشْهُوْرَانِ ٱلأَصَحُّ الْجَدِيْدُ لاَ يَجُوْزُ كَالصَّلاَةِ وَالصَّوْمِ وَالْقَدِيْمُ يَجُوْزُ لِدُخُوْلِ النِّيَابَةِ فِيْهِ فَعَلَى الْجَدِيْدِ يَبْطُلُ

592

⁴ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid VII, h. 135.

الْمَأْتِي بِهِ إِلاَّ فِي النَّوَابِ، وَيَجِبُ الْإِحْجَاجُ عَنْهُ مِنْ يَرْكَتِهِ إِنْ كَانَ قَدِ اسْتَمَّرً الْحَجُ فِي ذِمَّتِهِ، وَإِنْ كَانَ تَطُوعًا لَمْ يُسْتَطَعْ إِلاَّ هَذِهِ السَّنَةَ لَمْ يَجِبْ. وَعَلَى الْقَدِيْمِ قَدْ يَمُوْتُ وَقَدْ بَهْنِ وَقَدْ بَهُوْ الْمَيْقَاتِ الْإِحْرَامِ وَقَدْ يَمُوْتُ بَعْدَ خُرُوجِهِ فَإِنْ بَقِي أَحْرَمَ النَّائِبُ بِالحَجِ وَيَقِفُ بِعْرَفَةَ إِنْ لَمْ يَبَقِ الْمَيْقَاتِ لِأَنَّهُ مِنْ عَلَى إِنْ كَانَ وَقَفَ، وَيَأْتِي بِبَاقِ الْأَعْمَالِ فَلاَ بَأْسَ بِوقُوعِ إِحْرَامِ النَّائِثِ دَاخِلَ الْمِيْقَاتِ لِأَنَّهُ يَهْ فَيْ عَلَى إِحْرَامِ النَّائِثِ وَالْمَ الْمِيْقَاتِ لِلْأَنَّةُ وَيَعْلَى الْمَيْقَاتِ لِلْأَنَّةُ وَيَعْلَى الْمَيْقَاتِ لِلْأَنَّةُ وَلَيْعَ عَلَى إِحْرَامِ أَيْ أَنْشِئَ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ وَقْتُ الْإِحْرَامِ فَيَمْ يَكُومُ بِهِ النَّائِبُ وَجْهَانِ الْمَيْقَاتِ الْمُعْرَةِ وَلَحِنْ يُجْوَلُهُ عَنْ طَوَافِ الْحَجِ وَسَعْيِهِ وَمَعْلَى إِحْرَامِ فَيْمَ يُحْرِمُ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ يَطُوفُ وَيَسْعَى فَيُجْزِثُهُ عَنْ طَوَافِ الحَجِ وَسَعْيِهِ وَالْمَاعُ الْمُعْمَرِ وَلَحِنْ يُجْتَرَانِ بِالدَّمِ (وَأَصَحُهُمَا) وَبِهِ قَطْعِ وَالْمَاعُ الْمُعْرَةِ وَلَحِنْ يُجْتَرَانِ بِالدَّمِ (وَأَصَحُهُمَا) وَبِهِ قَطْعَ الْمُعْرَوقُ وَلَحِينَ يُجْتَرَانِ بِالدَّمِ وَالْمَعْمَ الْمُحْرَامِ فَلَا الْمُعْرَةِ وَلَحِيْ يَعْمَلُوفُ وَيَسْعَى فَيَجْرَانِ بِالدَّمِ وَالْمَاءُ الْإِحْرَامِ فَلَا الْمَاعُولُ الْمُعْرَةِ وَلَحَيْمُ اللَّهُ فَي الْمَاعُ الْمُوعُ وَالْمَاءُ الْإِنْ عَلَى الْمُعْرَامِ فَلْ الْمُعْرَامِ فَلْ وَلَعْمَ فِي أَمْعَلَى الْمُعْرَامِ فَلْ الْمَنْ الْتَعَلَّلَيْنِ الْمَالِمُ الْمَاعُولُ الْمَاعُولُ الْمَاعُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمَاءُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْلُولُ وَالْمَاءُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُ الْمُعْلِي الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُو

(Sub Masalah): Bila orang yang tengah mengerjakan haji bagi dirinya sendiri meninggal dunia di saat mengerjakannya, bolehkah orang lain menggantikan untuk (melanjutkan) hajinya? Dalam hal ini ada dua pendapat yang masyhur; Yang lebih shahih adalah dari qaul jadid, yaitu tidak boleh. Sebagaimana dalam shalat dan puasa. Sedangkan menurut gaul gadim boleh, dikarenakan dalam ibadah ini dimungkinkan untuk digantikan orang lain. Berdasarkan qaul jadid amaliah haji yang sudah dijalani menjadi batal, namun pahalanya tidak, dan wajib menghajikannya dengan mengambilkan biaya dari harta warisannya, jika ibadah haji sudah berketapan dalam tanggungannya, dan jika hajinya merupakan sunnah yang tidak bisa dilaksanakan kecuali pada tahun ini, maka tidak wajib. Adapun berdasarkan qaul qadim, terkadang seseorang mati sedangkan waktu untuk mengambil (niat) ihram masih ada, dan terkadang orang meninggal dunia sedangkan waktu mengambil (niat) ihram sudah habis. Jika masih ada waktu untuk mengambil (niat) ihram, maka penggantinya memulai (niat) ihram haji dan wuquf di 'Arafah jika almarhum belum wuquf, namun ia tidak wajib wuquf jika almarhum sudah wuquf, dan ia tinggal melaksanakan amalan yang selanjutnya. Sehingga tidak menjadi masalah terjadinya niat ihram dalam bulan-bulan haji, karena ia mendasarkan ihramnya atas ihram (orang lain), yakni ia memulai dari ihramnya. Dan bila waktu (mengambil niat) ihram sudah habis, maka apakah ia harus ihram? Ada dua pendapat; Pertama, dan ini juga merupakan pendapat Ishaq, hendaknya ia mengambil (niat) ihram 'umrah, kemudian thawaf dan sa'i. Maka hal itu sudah mencukupi untuk (mengganti) thawaf haji dan sa'inya, tanpa perlu melakukan mabit dan melempar jumrah, karena kedua amalan ini bukan bagian dari amalan 'umrah, namun keduanya harus diganti dengan membayar dam. Adapun pendapat kedua, dan ini yang lebih shahih dan dipastikan oleh kebanyakan ulama sebagai penjabaran atas gaul gadim, bahwa orang yang mewakili/menggantikan harus mengambil (niat) ilmam haji, lalu meneruskan amalan yang belum dikerjakan, adapun larangan mengambil (niat) ihram haji di luar bulan-bulan haji adalah jika ia memulai (dari awal). Sedangkan yang (dijalankan) ini bukan permulaan, namun didasarkan pada ihram yang sudah terjadi pada bulan-bulan haji. Berdasarkan pada pendapat ini, jika orang meninggal dunia dalam waktu antara dua tahallul, maka (pengganti/wakilnya) mengambil niat ihram, namun tidak terlarang memakai pakaian dan memotong (kuku atau rambut), namun bagi wanita tetap haram sebagaimana seandainya si mayit masih hidup. Semua ketentuan ini adalah jika ia meninggal sebelum (melaksanakan) dua tahallul. Adapun jika ia meninggal setelah (melakukan) keduanya maka tidak boleh digantikan tanpa ada perbedaan pendapat, karena amalan yang tersisa bisa ditutup dengan membayar dam. Al-Rafi'i menyatakan, sebagian orang salah paham menerapkan khilaf dalam kasus ini, dan itu adalah kekeliruan.

3. Referensi Lain

- a. Al-'Aziz Syarh al-Wajiz, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1417 H, Juz III, h. 232-233.
- b. Hidayah al-Salik ila al-Madzahib al-Arba'ah fi al-Manasik, Dar al-Baya'ir al-Islamiyah, 1414 H, Juz I, h. 227.
- c. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, Kairo, Dar al-Istiqamah, 1374 H, Juz I, h. 329.
- d. Al-Fatawa al-Fiqhiyah, al-Kubra, Juz VI, h. 137.
- e. Raudhah al-Thalibin, Juz II, h. 304.

432. Zakat Profesi

A. Deskripsi Masalah

Deskripsi masalah UU. RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Pasal 11 (ayat 2) yang mengatur rincian harta yang dikenai zakat mencakup "hasil pendapatan dan jasa". Pendapatan itu mancakup gaji, honorarium, dan sebagainya. Jasa memasukkan jasa konsultan, notaris, doktor, biro travel, pergudangan, komissioner, dan lain-lain. Jenis usaha meliputi perhotelan, hiburan, industri, kontraktor, dan lain-lain.

B. Pertanyaan

- a. Apakah hasil pendapatan kerja dan jasa yang halal patut dipandang terkena beban zakat menurut syariat?
- b. Sekira terbeban zakat bagaimana penggolongan ke dalam mal zakawi dan berapa ketetapan standar nishab yang harus dipedomani?
- c. Tepatkah bila kadar zakat atau gaji PNS dipotong langsung per bulan oleh Badan Amil Zakat tertentu?

C. Jawaban

- a. Pada dasarnya, semua hasil pendapatan halal yang mengandung unsur *mu'awadhah* (tukar-menukar) baik dari hasil kerja profesional/non profesional maupun hasil industri jasa dalam segala bentuknya yang telah memenuhi persyaratan zakat antara lain, mencapai jumlah 1 (satu) *nishab* dan niat *tijarah* dikenakan kewajiban zakat. Akan tetapi realitasnya jarang yang bisa memenuhi persyaratan tersebut lantaran tidak terdapat unsur *tijarah* (pertukaran harta terus-menerus untuk memperoleh keuntungan).
- b. Hasil pendapatan kerja dan jasa (yang telah memenuhi persyaratan) dalam konteks zakat digolongkan zakat tijarah yang berpedoman pada standar nishab emas.
- c. Tidak boleh. Kalaupun dipahami bahwa gaji wajib dizakati, pemotongan gaji tersebut tetap belum sah diperhitungkan sebagai pembayaran zakat, sebab perhitungan maupun kadar kewajibannya pada akhir tahun bukan dari gaji bruto dan belum diterima oleh pemiliknya.

D. Dasar Pengambilan Hukum

1. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj⁵

(وَإِنَّمَا يَصِيْرُ الْعَرْضُ لِلتِّجَارَةِ إِذَا اقْتُرِنَتْ نِيَّتُهَا بِكَسْبِهِ بِمُعَاوَضَةٍ) مَحْضَةٍ, وَهِيَ الَّتِيْ تَفْسُدُ بِفَسَادِ عِوَضِهَا (كَشِرَاءٍ) سَوَاءً أَكَانَ بِعِوَضٍ أَمْ نَقْدٍ أَمْ دَيْنٍ حَالٍ أَمْ مُؤَجَّلٍ لِانْضِمَامِ قَصْدِ التِّجَارَةِ إِلَى فِعْلِهَا، وَمِنَ الْمَمْلُوكِ بِمُعَاوَضَةٍ مَا اتَّهَبَهُ بِثَوَابِ أَوْ صَالَحَ عَلَيْهِ وَلَوْ عَنْ دَمِ وَمَا آجَرَ

⁵ Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, (Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t. th.), Jilid I, h. 398.

بِهِ نَفْسَهُ أَوْ مَالَهُ أَوْ مَا اسْتَأْجَرَهُ أَوْ مَنْفَعَةُ مَا اسْتَأْجَرَهُ بِأَنْ كَانَ يَسْتَأْجِرُ الْمَنَافِعَ يُؤَجِّرُهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ، أَوْ عَيْرِ مَحْضَةٍ وَهِيَ الَّتِيْ لاَ تَفْسُدُ بِفَسَادِ عِوَضِهَا كَمَا ذَكَرَ ذلِكَ بِقَوْلِهِ (وَكَذَا الْمَهْرُ وَعِوْضَ الْخُلْعِ) فَإِنَّهُمَا يَصِيْرَانِ لِلتِّجَارَةِ إِذَا اقْتُرِنَا بِنِيَّتِهَا (في الْأَصَحِ) لِأَنَّهُمَا مُلِكَا بِمُعَاوضَةٍ وَلِهَذَا تَثَبَتْ الشَّفْعَةُ فِيْمَا مُلِكَ بِهِمَا. وَالتَّانِيْ لاَ، لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ عُقُوْدِ الْمُعَاوَضَاتِ الْمَحْضَةِ وَصَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ الْقَطْعَ بِالْأَوَّلِ.

(Suatu barang bisa menjadi komoditas tijarah manakala niat tijarahnya disertai usaha mendapatkannya dengan cara tukar menukar) yang murni, yaitu yang rusak dengan sebab rusaknya barang imbalan, seperti jual beli, baik yang dengan ganti barang atau uang, dihutangkan ataupun kontan, karena berkumpulnya niat tijarah dengan praktiknya. Termasuk barang yang dimiliki dengan cara pertukaran adalah hibah yang diterima dengan imbal balik atau yang diakadi damai, meski dalam kasus pembunuhan -diyat dam-, upah atas penyewaan diri atau hartanya, barang atau jasa yang ia sewa, yakni ia menyewa manfaat suatu barang dan ia sewakan dengan maksud tijarah. Atau -pertukaran- yang tidak murni, yaitu -pertukaranyang tidak rusak karena rusaknya imbalan, sebagaimana hal itu al-Nawawi sebutkan dengan ucapannya (demikian pula mahar dan imbalan pengganti dalam khulu'). Dua-duanya bisa menjadi tijarah bila disertai dengan niat dagang (menurut pendapat al-ashshah), karena keduanya merupakan barang yang dimiliki dengan jalan pertukaran. Karenanya dalam hal barang yang dimiliki karena menjadi mahar atau imbalan pengganti dalam khulu' bisa terjadi syufah. Namun menurut pendapat kedua tidak bisa, karena mahar dan imbalan pengganti dalam khulu' bukan akad pertukaran yang murni. Al-Nawawi dalam al-Majmu' memastikan bahwa yang benar adalah pendapat pertama.

2. I'anah al-Thalibin6

وَاعْلَمْ أَنَّ لِزَكَاةِ الْتِجَارَةِ شُرُوطًا، سِتَّةً زِيَادَةً عَلَى مَا مَرَّ فِي زَكَاةِ النَّقْدَيْنِ. أَحَدُهَا أَنْ يَكُوْنَ مِلْكُ ذَلِكَ الْمَالِ بِمُعَاوَضَةٍ وَلَوْ غَيْرَ مَحْضَةٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُعَاوَضَةِ قِسْمَانِ مَحْضَةً وَهِيَ مَا تَفْسُدُ بِفَسَادِ مُقَابِلِهَا كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَغَيْرُ مَحْضَةٍ وَهِيَ مَا لاَ تَفْسُدُ بِفَسَادِ مُقَابِلِهَا كَالتِكَاجِ. ثَانِيْهَا أَنْ تَقْتَرِنَ نِيَّةُ التِّجَارَةِ بِحَالِ الْمُعَاوَضَةِ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَوْ فِي مَجْلِسِهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ

⁶ Muhammad Syaththa al-Dimyati, *l'anah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997) Jilid II, h. 173.

بِالْمُعَاوَضَةِ قَدْ يُقْصَدُ بِهِ غَيْرُهَا فَلاَ بُدَّ مِنْ نِيَّةٍ مُمَيِّزَةٍ إِنْ لَمْ يُجَدِّدْهَا فِيْ كُلِّ تَصَرُّفِ بَعْدَ الشِّرَاءِ بِجَمِيْعِ رَأْسِ الْمَالِ.

Ketahuilah bahwa zakat tijarah memiliki enam syarat sebagai tambahan atas syarat dalam zakat emas dan perak. Pertama, kepemilikan harta tersebut melalui pertukaran meski tidak bersifat murni. Yang demikian karena pertukaran ada 2 jenis; bersifat murni, yaitu yang menjadi rusak karena rusaknya barang imbalannya, seperti menjual dan membeli. Dan bersifat tidak murni, yaitu yang tidak menjadi rusak dengan sebab rusak imbalannya, seperti akad nikah. Syarat kedua, dibarengi dengan niat tijarah begitu terjadi pertukaran, di dalam transaksi itu sendiri atau di tempat transaksi. Yang demikian itu karena sesuatu yang dimiliki dengan jalan pertukaran adakalanya dimaksudkan untuk tijarah dan adakalanya untuk maksud lain, karenanya harus ada niat yang membedakannya jika ia tidak memperbaharui niatnya dalam setiap pengelolaannya setelah membeli dengan seluruh modalnya.

3. Al-Mauhibah Dzi al-Fadhl⁷

(قَوْلُهُ وَالْإِجَارَةُ لِنَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ) أَيْ فَإِذَا آجَرَ نَفْسَهُ بِعِوَضٍ بِقَصْدِ التِّجَارَةِ صَارَ ذَلِكَ الْعِوضُ مَالَ يَجَارَةٍ. قَالَ فِي التَّحْفَةِ وَالْمَالُ يَنْقَسِمُ إِلَى عَيْنِ وَمَنْفَعَةٍ وَإِنْ آجَرَهَا فَإِنْ كَانَتْ الْأُجْرَةُ نَقْدًا عَيْنًا أَوْ دَيْنًا حَالاً أَوْ مُؤَجَّلاً تَأْتِي فِيْهِ مَا يَأْتِي أَيْ مِنَ التَّفْصِيْلِ أَوْ عَرْضًا فَإِنِ اسْتَهْلَكُهُ أَوْ نَوَى قِنْيَتَهُ فَلاَ زَكَاةً وَإِنْ نَوَى التِّجَارَةَ فِيْهِ اسْتَمَرَّتْ زَكَاةُ التِّجَارَةِ وَهَذَا فِيْ كُلِّ عَامٍ

(Ungkapan penulis: "Dan menyewakan diri atau hartanya."), yakni jika seseorang menyewakan dirinya dengan suatu imbalan dengan maksud tijarah, maka imbalan tersebut menjadi harta tijarah. Ibn Hajar al-Haitami dalam Thuhfah al-Muhtaj mengatakan: "Harta itu terbagi 2 macam; benda dan manfaat. Jika seseorang menyewakannya, maka jika upahnya berupa mata uang kontan atau dengan dihutang langsung atau bertempo, maka padanya berlaku perincian hukum. Atau berupa barang, maka jika ia menghabiskannya atau berniat menyimpannya, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Dan jika meniati tijarah padanya, maka zakat tijarah terus berlaku padanya, dan ini berlangsung setiap tahun.

Mahfud al-Termasi, *Mauhibah Dzi al-Fadhl*, (Mesir: al-Amirah al-Syarafiyah, 1362 H), Jilid IV, h. 31.

4. Minhaj al-Qawim8

(الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ التَّمْلِيْكُ بِمُعَاوَضَةٍ) خَصْةٍ وَهِيَ الَّتِيْ تَفْسُدُ بِفَسَادِ الْعِوَضِ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ بِثَوَابٍ وَالْإِجَارَةِ لِنَفْسِهِ أَوْ مَا اسْتَأْجَرَهُ أَوْ غَيْرِ مَحْضَةٍ كَالصِّدَاقِ وَعِوَضِ الْخُلْعِ وَصُلْحِ اللَّهِ مَا اسْتَأْجَرَهُ أَوْ غَيْرِ مَحْضَةٍ كَالصِّدَاقِ وَعِوَضِ الْخُلْعِ وَصُلْحِ اللَّهِ. بِخِلافِ مَا مَلَكُهُ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ كَالْإِرْثِ وَالْهِبَةِ بِلاَ ثَوَابٍ وَالصَّيْدِ وَمَا اقْتَرَضَهُ أَوْ اللَّهِ. فِإِنَا اقْتُرِنَ بِهِ نِيَّةُ التِجَارَةِ لِأَنَّهُ لاَ يُعَدُّ مِنْ أَسْبَابِهَا لِانْتِهَاءِ الْمُعَاوَضَةِ.

(Keempat, kepemilikan terjadi dengan cara pertukaran) yang bersifat murni, yaitu pertukaran yang rusak karena rusaknya barang imbalan, seperti jual beli dan hibah dengan imbalan, menyewakan diri atau hartanya, atau barang yang ia sewa, atau tukar menukar yang tidak bersifat murni, semisal maskawin, imbalan pengganti dalam *khulu'* dan perdamaian (dalam kasus) pembunuhan. Berbeda dengan harta yang dimiliki tanpa pertukaran, semisal warisan, hibah murni, berburu, hutang dan harta yang dimiliki melalui pembatalan akad, atau pengembalian barang karena cacat, maka tidak ada zakat padanya, sekalipun dibarengi dengan niat *tijarah*, karena barang itu tidak dianggap sebagai sebab *tijarah*, karena tidak adanya pertukaran.

4. Tuhfah al-Muhtaj dan Hawasyi al-Syirwani9

(وَإِنَّمَا يَصِيْرُ الْعَرْضُ لِلتِّجَارَةِ إِذَا اقْتُرِنَتْ نِيَّتُهَا بِكَسْبِهِ بِمُعَاوَضَةٍ) مَحْضَةٍ وَهِيَ مَا تَفْسُدُ بِفَسَادِ عِوَضِهَا (كَشِرَاءِ) بِعِوَضٍ أَوْ نَقْدٍ أَوْ دَيْنٍ حَالٍ أَوْ مُوَجَّلٍ وَكَإِجَارَةِ لِنَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ. وَمِنْهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْمَنَافِعَ وَيُوَجِّرُهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ فَفِيْمَا إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيُوَجِّرَهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ فَفِيْمَا إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيُوَجِّرَهَا بِقَصْدِ التِّجَارَةِ وَفِيْمَا إِذَا اسْتَأْجَرَ الْمِثْلِ حَوْلًا وَيُحْرِجُ زَكَاةً تِلْكَ فَمَضَى حَوْلً وَلَمْ يُؤَجِّرُهَا تَلْزَمُهُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ, فَيُقَوِمُهَا بِأُخْرَةِ الْمِثْلِ حَوْلًا وَيُحْرِبُ زَكَاةً تِلْكَ الْأُجْرَةِ وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ لِأَنَّهُ حَالَ الْحُولُ عَلَى مَالٍ لِلتِّجَارَةِ عِنْدَهُ, وَالْمَالُ يَنْقَسِمُ إِلَى عَيْنِ الْأَجْرَةِ وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ لِأَنَّهُ حَالَ الْحُولُ عَلَى مَالٍ لِلتِّجَارَةِ عِنْدَهُ, وَالْمَالُ يَنْقَسِمُ إِلَى عَيْنِ الْمُحْرَةِ وَإِنْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُ لِأَنَّهُ حَالَ الْحُولُ عَلَى مَالٍ لِلتِّجَارَةِ عِنْدَهُ, وَالْمَالُ يَنْقَسِمُ إِلَى عَيْنِ وَمِنَ الْمُعْدِةِ وَإِنْ لَمْ عَنْهُ الْمُعْرَاقِ فِيهِ مَا مَرَّ وَمِنَ الْمَعْلُودِ بِمُعَاوِضَةٍ مَا آجَرَهُ اللهُ لِيَعْمِ وَاليَهَايَةِ: وَمِنَ الْمَمْلُوكِ بِمُعَاوضَةٍ مَا آجَرَهُ الْمُعْلَى وَلِيهِ اللّهِ الْمَالُولِ بِمُعَاوضَةٍ مَا اسْتَأْجَرَهُ بِي اللّهِ مَا الْمُعْلَى الْمَالُولِ الْمُعْلَى الْمَالُولِ الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَالُولِ الْمَعْلَى الْمَالُولِ الْمُعْلِقُ مَا الْمُعْلَى الْمَوْلِ الْمُعْلَى الْمَالُولِ الْمَالُولِ الْمُعْلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْلَى الْمَالِهِ الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالُولِ الْمُعْلَوقِ الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُلِي الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُلْولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِقُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمُ الْمُ

⁸ Ibn Hajar al-Haitami, Minhaj al-Qawim pada Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: al-Amirah al-Syarafiyah, 1362 H), Jilid IV, h. 31-33.

⁹ Ibn Hajar dan Abdul Hamid al-Syirwani, Tuhfah al-Muhtaj dan Hawasyi al-Syirwani pada Hawasyai al-Syarwani wa al-'Ubbadi, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid III, h. 295-296.

التّجَارَةِ اهوَكَذَا فِي الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ إِلاَّ أَنَّهُ أَبْدَلَ الْمَنَافِعَ بِالْمُسْتَغَلَاَّتِ، وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ إِلاَّ قَوْلَهُمْ بِأَنْ كَانَ النح قَالَ سم وَقَوْلُهُ أَوْ مَا اسْتَأْجَرَهُ عَطْفٌ عَلَى نَفْسِهِ أَيْ مِنْ الْمَمْلُوكِ بِمُعَاوَضَةِ مَا اسْتَأْجَرَهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مَا مِنْ قَوْلِهِ مَا الْمَعْلُوكِ بِمُعَاوَضَةِ مَنْفَعَةِ مَا اسْتَأْجَرَهُ كَذَا يَظْهَرُ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ آجَرَ بِهِ نَفْسَهُ أَيْ مِنْ الْمَمْلُوكِ بِمُعَاوَضَةِ مَنْفَعَةِ مَا اسْتَأْجَرَهُ كَذَا يَظْهَرُ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ النّبَارَةِ مَنْ الْمَمْلُوكِ بِمُعَاوَضَةِ مَنْفَعَةِ مَا اسْتَأْجَرَهُ كَذَا يَظْهَرُ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْعِبَارَةِ النّبَي قَدْ يَلْتَهِسُ فَلْيُتَأَمَّلُ اله وقالَ ع ش قَوْلُهُ أَوْ مَنْفَعَةً مَا اسْتَأْجَرَهُ يُتَأَمَّلُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْعَبْرَةِ وَمَا قَبْلُهَا فَإِنَّ الْإِجَارَةَ وَإِنْ وَرَدَتْ عَلَى الْعَيْنِ مُتَعَلِّقَةً بِمَنْفَعَتِهَا وَقَدْ يُقَالُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ مَنْفَعَةِ مَا اسْتَأْجَرَهُ الْعُولُ الْقَرْقُ مَا اسْتَأْجَرَهُ الْعُولُ الْمَنْفَعَةِ اللّهِ مَا الْمَتَأْجَرَهُ الْمُهُمُ وَلِهُ مَا اللّهَ عَلَى الْعَيْفِ مَا الْمَعْمَا مَالُ التّحَرَّهُ وَمِنْ قَوْلِهِ أَوْ مَنْفَعَةَ اللّهِ مَا فَعَقَ إِلَحْ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ عَلَى الْمُعَلِقَةُ اللّهِ مَا فَعَمَا مَالُ التِجَارَةِ انتهى. فَالْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ: أَوْ مَنْفَعَة إلى حَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ لِقَوْلِهِ عَلَى الْمُعَلِقَةُ اللّهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ الْمَنَافِعَ الْحَ

(Suatu barang dapat diperuntukkan tijarah bila niat tijarahnya dibarengi dengan usaha mendapatkannya dengan cara pertukaran) murni, yaitu yang rusak sebab rusaknya imbalan, (seperti membeli), baik dengan ganti barang atau uang, hutang hal -yang wajib dilunasi ketika ditagih- ataupun hutang mu'ajjal -yang wajib dilunasi ketika sampai waktu tertentu-, dan seperti menyewakan diri atau hartanya. Termasuk di antaranya adalah ia menyewa suatu manfaat dan menyewakannya dengan maksud tijarah. Maka dalam hal apabila orang menyewa tanah untuk disewakan kembali dengan maksud tijarah, lalu telah lewat masa setahun namun belum disewakannya, maka ia terkena wajib zakat tijarah. Lalu ia hitung tanah itu dengan harga sewa standar selama setahun dan ia keluarkan zakat harga sewa tersebut, meski ia tidak mendapatkannya. Sebab telah lewat masa setahun pada harta tijarah yang dimilikinya. Sementara harta itu terbagi dua jenis; benda dan manfaat barang. Jika tanah tersebut disewakan, maka jika ongkos sewanya kontan, hutang hal atau hutang muajjal, maka padanya berlaku hukum yang telah disebutkan.

(Ungkapan Ibn Hajar al-Haitami: "Dan seperti menyewakan diri atau hartanya ...), redaksi dalam kitab Mughni al-Muhtaj dan Nihayah al-Muhtaj: "Termasuk harta yang dimiliki dengan cara pertukaran adalah upah atas penyewaan diri atau harta seseorang, barang yang disewanya atau manfaat barang yang disewanya, yakni ia menyewa

suatu manfaat dan menyewakannya dengan maksud *tijarah."* Sampai di sini redaksi dua kitab tersebut.

Demikian pula dalam kitab *al-'Ubab* dan *Syarh*nya, hanya saja al-Nawawi dan Ibn Hajar mengganti kata النُسْتَغَلَّاتِ -jasa- dengan الْنُسْتَغَلَّاتِ (barang produktif/alat kerja). Dan -redaksi itu disebut- dalam kitab *Raudh al-Thalib* dan *Syarh*nya kecuali ucapan mereka: "Yakni ..."

Ibn Qasim al-'Abbadi Berkata: "Ungkapan beliau: "Barang yang disewanya." 'athaf pada kata نفئة, artinya termasuk harta yang dimiliki dengan jalan pertukaran adalah upah dari barang yang ia sewa. Demikianlah makna yang jelas dari redaksi ini yang terkadang menjadi samar -bagi sebagian orang-, maka renungkanlah!

Dan Ali Syibamallisi berkata: "Ungkapan al-Ramli -dalam Nihayah al-Muhtaj di atas: "Atau manfaat barang yang disewanya.", kajilah perbedaan antara redaksi ini dengan redaksi sebelumnya. Sebab, meski akad sewa terjadi pada barang, namun berkaitan dengan manfaatnya. Kadang dikatakan: "Perbedaannya jelas". Karena maksud ucapan beliau: "Barang yang disewanya." adalah upah yang diambil dari manfaat barang yang disewanya, yakni ia menyewakan barang yang disewanya dengan upah beberapa dirham, maka dirham tersebut merupakan harta tijarah. Dan maksud ucapan beliau: "Atau manfaat ..." adalah manfaat itu sendiri." Sampai di sini ungkpan Ali Sibramallisi. Maka maksud perkataan mereka: "Atau manfaat ..." adalah makna yang disampaikan al-Syarih -Ibn Hajar- dengan ungkapannya: "Termasuk di antaranya adalah ia menyewa ..."

433. Wakaf dengan Uang Kontan/Cash

A. Diskripsi Masalah

Kelaziman mewakafkan yang selama ini dilakukan adalah wakaf berupa tanah darat/empang atau harta/bangunan yang tidak bergerak.

B. Pertanyaan

Bagaimana pandangan syariat Islam tentang masalah wakaf dengan uang cash (kontan) termasuk cara pemanfaatannya?

C. Jawaban

a. Menurut jumhur ulama (Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian Hanafiyah), wakaf dengan uang kontan/cash hukumnya tidak sah, karena tidak memenuhi syarat-syarat wakaf. Adapun menurut sebagian Hanafiyah diperbolehkan.

 Mengenai tata cara pemanfaatannya dengan menjaga dan melestarikan nilainya seperti investasi melalui *mudharabah* dan semisalnya.

D. Dasar Pengambilan Hukum

1. Al-Fatawa al-Hindiyah / al-Fatawa al-'Alamkariyah¹⁰

وَأَمَّا وَقْفُ مَا لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ إِلاَّ بِالْإِثْلاَفِ كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوْبِ فَغَيْرُ جَائِزٍ فِيْ قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ. وَالْمُرَادُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيْرُ وَمَا لَيْسَ بِحُلِيِّ ... وَقِيْلَ فِيْ مَوْضِعِ تَعَارَفُوا ذَلِكَ يُفْتَى بِالْجُوازِ. قِيْلَ كَيْفَ: قَالَ الدَّرَاهِمُ تُقْرَضُ لِلْفُقَرَاءِ ثُمَّ تُدْفَعُ مُضَارَبَةً بِهِ وَيَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ وَالْحِنْطَةُ تُقْرَضُ لِلْفُقَرَاءِ يَزْرَعُونَ ثُمَّ تُؤخَذُ مِنْهُمْ وَالثَّيَابُ وَالْأَكْسِيَةُ تُعْطَى لِلْفُقَرَاءِ لِيَلْبَسُوهَا عِنْدَ حَاجَتِهِمْ ثُمَّ تُؤخَذُ كَذَا فِي الْفَتَاوَى الْعَتَّابِيَّةِ

Adapun mewakafkan harta yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya semisal emas, perak, makanan dan minuman, maka menurut pendapat mayoritas fuqaha tidak boleh. Yang dimaksud emas dan perak adalah dinar dan dirham, bukan perhiasan. Demikian dalam kitab Fath al-Qadir. Menurut satu pendapat di suatu tempat, para fuqaha mengakui hal itu dan difatwakan boleh. Ditanyakan: "Bagaimana caranya?" Pemilik pendapat itu menjawab: "Dirham-dirham itu dihutangkan kepada para fakir, lalu ia ambil lagi. Atau diberikan dengan diakadi mudharabah dan orang itu menyedekahkan keuntungannya. Gandum dihutangkan pada para fakir, lalu mereka tanam dan diambil lagi dari mereka. Pakaian dan baju diberikan kepada mereka agar mereka pakai ketika membutuhkan, kemudian diambilnya." Begitu dalam al-Fatawa al-'Attabiyah.

2. Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin¹¹

الرُّكْنُ الثَّانِي: الْمَوْقُوْفُ وَهُو كُلُّ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ مَمْلُوْكَةٍ مِلْكًا يَقْبَلُ التَّقْلَ يَحْصُلُ مِنْهَا فَائِدَةً أَوْ مَنْفَعَةً تُسْتَأْجَرُ لَهَا. اِحْتَرَزْنَا بِالْعَيْنِ عَنِ الْمَنْفَعَةِ وَ عَنِ الْوَقْفِ الْمُلْتَزَمِ فِي الدِّمَّةِ وَبِالْمُعْلُوْكَةِ عَمَّا لاَ يُمْلَكُ وَبِقَبُوْلِ التَّقْلِ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ

Nizhamuddin al-Balkhi, dkk., al-Fatawa al-Hindiyah/al-Fatawa al-'Alamkariyah, (Mesir: al-Amiriyah, 1314 H), Juz II, h. 362-363.

Muhyiddin al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th.), Jilid VI, h. 378.

وَالْمَلاَهِي وَأَرَدْنَا بِالْفَاثِدَةِ: الظَّمَرَةَ وَاللَّبَنَ وَنَحْوَهَا وَبِالْمَنْفَعَةِ السُّكْنَى وَاللَّبْسَ وَنَحْوَهُمَا وَقَوْلُنَا تُسْتَأْجَرُ لَهَا احْتِرَازُ مِنَ الطَّعَامِ وَخُوهِ

Rukun wakaf kedua adalah barang yang diwakafkan. Yaitu setiap benda tertentu yang dimiliki dengan hak milik yang bisa dipindahkan, punya faidah dan manfaat yang bisa disewakan. Dengan kata غنين (benda), kami kecualikan suatu manfaat, dan wakaf yang disanggupi dalam tanggungan. Dengan kata منازكة (tertentu), kami kecualikan wakaf salah satu dai dua budak seseorang. Dengan kata عنازكة (yang dimiliki), kami kecualikan benda yang tidak dimiliki seseorang. Dengan kata المنازكة (yang bisa dipindahkan), kami kecualikan umm al-walad (budak perempuan yang melahirkan anak dari tuannya) dan alat-alat permainan. Sedangkan yang kami maksudkan dengan kata المنازعة (faidah) adalah buah, susu dan semisalnya, dan kata عنائجة (yang bisa disewakan) tersebut mengecualikan makanan dan semisalnya.

3. Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin¹²

السَّادِسُهُ فِيْ وَقْفِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ وَجْهَانِ كَإِجَارَتِهِمَا إِنْ جَاوَزْنَاهُمَا صَحَّ الْوَقْفُ لِتُكْرَى وَيَصِحُ وَقْفُ الدَّرَاهِمَ لِيُصَاعَ مِنْهَا الْحَيْ وَيَصِحُ وَقْفُ الْحَيْرِ المَّيْسِ اللَّبْسِ. وَحَكَى الإِمَامُ أَنَّهُمْ أَلْحُقُوا الدَّرَاهِمَ لِيُصَاعَ مِنْهَا الْحَيْرُ بَوَقْفِ الْعَبْدِ الصَّغِيْرِ وَتَرَدَّدَ هُوَ فِيْهِ.

Masalah keenam, tentang wakaf dirham dan dinar terdapat dua pendapat seperti menyewakan keduanya, jika kita memperbolehkan menyewakanya maka sah wakafnya untuk disewakan, dan sah wakaf perhiasan untuk dipakai. Al-Imam al-Haramain meriwayatkan, para ulama menyamakan dirham yang dibuat perhiasan dengan wakaf budak kecil. Namun beliau sendiri ragu-ragu dalam hal tersebut.

4. Al-Mughni¹³

مَسْتَلَةٌ قَالَ (وَمَا لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ إِلاَّ بِالإِثْلاَفِ مِثْلُ الدَّهَبِ وَالْوَرَقِ وَالْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ فَوَقْفُهُ

Muhyiddin al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th.), Jilid VI, h. 380.

¹³ Ibn Qudamah, al-Mughni, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), Juz V, h. 382.

غَيْرُ جَائِنٍ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّ مَا لاَ يُمْكِنُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ كَالدَّنَانِيْرِ وَالدَّرَاهِمِ وَالْمَطْعُومِ وَالْمَشْرُوبِ وَالشَّمْعِ وَأَشْبَاهِهِ لاَ يَصِحُّ وَقْفُهُ فِيْ قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ إِلاَّ شَيْئًا يُحْكَى وَالْمَشْرُوبِ وَالشَّمْعِ وَأَشْبَاهِهِ لاَ يَصِحُّ وَقْفُهُ فِيْ قَوْلِ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ إِلاَّ شَيْئًا يُحْكَى عَنِ مَالِكٍ وَالأَوْرَاعِيِ فِي وَقْفِ الطَّعَامِ أَنَّهُ يَجُوزُ وَلَمْ يَحْكِهِ أَصْحَابُ مَالِكٍ، وَلَيْسَ بِصَحِيْحِ لِأَنَّ الْوَقْفَ تَحْبِيْسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلُ الظَّمْرَةِ، وَمَا لاَ يُنْتَقَعُ بِهِ إِلاَّ بِالْإِثْلاَفِ لاَ يَصِحُّ فِيْهِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْوَقْفَ تَحْبِيْسُ الْأَصْلِ وَتَسْبِيلُ الظَّمْرَةِ، وَمَا لاَ يُنْتَقَعُ بِهِ إِلاَّ بِالْإِثْلاَفِ لاَ يَصِحُّ فِيْهِ ذَلِكَ وَقِيلَ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ يَصِحُ وَقْفُهَا عَلَى قَوْلِ مَنْ أَجَازَ إِجَارَتَهَا وَلاَ يَصِحُ لِأَنَّ يَلْكَ وَقِيلَ فِي الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ يَصِحُ وَقْفُهَا عَلَى قَوْلِ مَنْ أَجَازَ إِجَارَتَهَا وَلاَ يَصِحُ لِأَنَّ يَلْكَ الْمَنْفَعَةَ لَيْسَتُ الْمَقْصُودَ الَّذِيْ خُلِقَتْ لَهُ الْأَثْمَانُ وَلِهَذَا لاَ تُصْمَنُ فِي الْعَصْبِ فَلَمْ يَجُولُ الْمَانُ وَلِهُمَا الْمَامُ وَلَهُ مَلَا الْمَعْمِ لِيَتَجَمَّلَ بِهِ الْوَقْفُ لَهُ كَوَقْفِ الشَّجْوِ عَلَى نَشْرِ الظِيَابِ وَالْغَنَمِ عَلَى دَوْسِ الطِيْنِ وَالشَّمْعِ لِيُتَجَمَّلَ بِهِ.

Masalah. Abu al-Qasim, yaitu Umar bin al-Husain bin Abdullah al-Khiraqi: "Barang yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya seperti emas, perak, makanan dan minuman, maka wakafnya tidak boleh." Termasuk dalam bagian itu adalah barang yang tidak dimungkinkan dimanfaatkan besertaan benda itu masih ada, semisal dinar, dirham, makanan, minuman, lilin dan semisalnya, maka tidak sah mewakafkannya menurut mayoritas fuqaha dan ulama. kecuali satu riwayat dari Imam Malik dan al-Auza'i tentang wakaf makanan, bahwa hal itu hukumnya boleh. Akan tetapi murid-murid Imam Malik tidak meriwayatkannya, dan pendapat itu tidak benar. Sebab, wakaf adalah membekukan asal dan membatasi alokasi hasilnya. Sementara itu, barang yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya itu tidak mengandung unsur seperti itu. Menurut satu pendapat, dirham dan dinar itu sah diwakafkan berdasarkan pendapat ulama yang mengesahkan penyewaannya. Dan pendapat itu tidak sah. Sebab, manfaat -yang dimaksud dalam persewaannyaitu tidak menjadi hal pokok yang darinya harga barang itu muncul. Oleh sebab itu, manfaatnya tersebut tidak ditanggung dalam kasus ghasab. Maka tidak boleh mewakafkan barang tersebut, seperti wakaf pohon untuk menjemur pakaian, wakaf kambing untuk menginjakinjak lumpur dan wakaf lilin untuk dijadikan hiasan.

434. Penyakit Antraks

A. Diskripsi Masalah

Baru-baru ini ada kasus seseorang meninggal dunia karena terserang penyakit berbahaya (antraks) dan dia seorang muslim. Menurut penelitian medis, penyakit yang menyerang orang tersebut (antraks) termasuk jenis penyakit berbahaya dan bisa menular kepada yang menyentuhnya.

B. Pertanyaan

Apakah mayit yang mengidap penyakit antraks harus dimandikan dan dirawat sebagaimana aturan syariat terhadap mayit sehat, dan bagaimana cara memandikan dan menguburnya?

C. Jawaban

Jenazah yang meninggal dunia akibat penyakit antraks tetap harus dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikubur sebagaimana aturan syariat. Sedang cara memandikannya dengan mempergunakan peralatan yang bisa mencegah penularan penyakit tersebut. Sementara untuk penguburannya tidak harus di tempat terpisah asal dianggap telah bisa mencegah akibat penularannya.

D. Dasar Pengambilan Hukum

1. Al-Mauhibah Dzi al-Fadhl14

Mahfud al-Termasi, Mauhibah Dzi al-Fadhl, (Mesir: al-Amirah al-Syarafiyah, 1362 H), Jilid I3, h. 443.

¹⁵ Mungkin yang dimaksud adalah kata: لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ (tidak dishalati), seperti redaksi dalam kitab Minhaj al-Thalibin. Lihat al-Nawawi, Minhaj al-Thalibin pada Mughni Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, (Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyah, t. th.), Juz II, h. 50. (Pen.)

(Ungkapan penulis: "Dengan syaratnya."), maksudnya tayamum. Yaitu tidak menemukan air secara nyata atau menurut syari'ah. Disyaratkan pula sucinya kafan sampai selesai dishalati. Maka bila seseorang mati sebab terkena bangunan roboh atau semisalnya, seperti jatuh di sumur atau laut yang dalam dan sulit dikeluarkan dan disucikan, maka ia tidak dishalati karena tidak syaratnya tidak terpenuhi. Ini adalah yang dikutip al-Nawawi dan al-Rafi'i dari al-Mutawalli, dan mereka berdua menetapkannya. Dalam al-Majmu' al-Nawawi berkata: "Sungguh dalam hal itu tidak terdapat khilaf." Namun sekelompok muhaqqiqin menentangnya.

Syaikh Muhammad Khatib al-Syirbini dalam kitab Mughni al-Muhtaj berkata dari mengutip sebagian ulama mutaakhkhirin: "Dan tidak ada alasan meninggalkan menyolatinya. Sebab, perkara yang mudah tidak gugur karena perkara yang sulit, dan karena hadits shahih -muttafaq 'alaih-: "Dan bila kalian aku suruh dengan suatu perkara maka laksanakanlah semampu kalian." Dan karena maksud menyolatinya adalah mendoakan dan menolong si mayit. Al-darimi dan selainya mantap atas sungguh mayit yang sulit dimandikan itu tetap dishalati. Al-Darimi berkata: "Bila tidak, maka semestinya sungguh orang yang terbakar dan menjadi abu, atau dimakan binatang buas tidak dishalati. Dan aku tidak tahu seorang ulama pun dari madzhab Syafi'i yang berpendapat demikian." Al-Adzra'i menjelaskan secara panjang lebar mengenai masalah ini. Dan hatiku lebih condong pada pendapat sebagian ulama mutaakhkhirin itu. Namun pendapat yang ku terima dari guru-guruku.

2. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj¹⁶

(وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ) لِفَقْدِ الْمَاءِ أَوْ لِغَيْرِهِ كَأَنْ احْتَرَقَ أَوْ لُدِغَ وَلَوْ غُسِلَ لَتَهَرَّى أَوْ خِيْفَ عَلَى الْغَاسِلِ وَلَمْ يُمَكِّنْهُ التَّحَفُّظُ (يُمِيمَ) وُجُوْبًا قِيَاسًا عَلَى غَسْلِ الْجُنَابَةِ وَلاَ يُغْسَلُ مُحَافَظَةً عَنْ جُثَّتِهِ لِتُدْفَنَ بِحَالِهَا، وَلَوْ وُجِدَ الْمَاءُ فِيْمَا إِذَا يُمِّمَ لِفَقْدِهِ قَبْلَ دَفْنِهِ وَجَبَ غَسْلُهُ.

(Dan jenazah yang sulit dimandikan) sebab tidak ada air atau selainnya, seperti terbakar atau terkena racun binatang dan bila dimandikan akan rontok, atau dikhawatirkan orang yang memandikannya tertulari -semisal racun dari tubuh jenazah- dan tidak mungkin menjaga diri -darinya-, maka (jenazah itu ditayamumi) secara wajib, karena diqiyaskan pada

¹⁶ Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, (Mesir: al-Tujjariyah al-Kubra, t. th.), Jilid I, h. 358.

mandi jinabah. Dan tidak boleh dimandikan karena menjaga jasadnya agar dimandikan sesuai kondisinya. Dan bila sebulum penguburan ditemukan air dalam kasus ketika jenazah ditayamumi karena tidak adaanya air, maka ia wajib dimandikan.

3. Al-Figh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah 17

وَيَقُوْمُ النَّيَمُّمُ مَقَامَ غَسْلِ الْمَيِّتِ عَنْ فَقْدِ الْمَاءِ أَوْ تَعَدُّرِ الْغَسْلِ كَأَنْ مَاتَ غَ يُقًا وَيُخْشَى أَنْ يَتَقَطَّعَ بَدَنُهُ إِذَا غُسِلَ بِدَلْكِ أَوْ يُصَبَّ الْمَاءُ عَلَيْهِ بِدُوْنِ دَلْكِ. أَمَّا إِنْ كَانَ لاَ يَنْقَطِعُ بِصُبِّ الْمَاءِ فَلاَ يُتَيَمَّمُ بَلْ يُغْسَلُ بِصُبِّ الْمَاءِ بِدُوْنِ دَلْكٍ.

Dan tayamum bisa menggantikan memandikan mayit karena tidak ada air atau karena tidak dimungkinkan dimandikan, semisal orang mati tenggelam dan dikhawatirkan tubuhnya akan rontok jika dimandikan dengan digosok atau jika dituangi air tanpa digosok. Adapun jika (tidak dikhawatirkan) akan rontok bila sekedar dituangi air, maka tidak boleh ditayamumi, namun harus dimandikan dengan cara dituangi air tanpa digosok.

4. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab 18

(فَ عُ) قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللّهُ وَالْأَصْحَابُ إِذَا تَعَذَّرَ غُسْلُ الْمَيِّتِ لِفَقْدِ الْمَاءِ أَوِ احْتَرَقَ بِحَيْثُ لَوْ غُسِّلَ لَتَهَ مَى لَمْ يُغَسَّلُ بَلْ يُيَمَّمُ وَهَذَا التَّيَمُّمُ وَاجِبُلِأَنَّهُ تَطْهِيرٌ لَا يَتَعَلَّقُ بِإِزَالَةِ جَيْثُ لَوْ غُسِّلَ لَتَهَ مَى لَمْ يُغَسِّلُ الْجَنَابَةِ وَلَوْ كَانَ خَاسَةٍ فَوَجَبَ الانْتِقَالُ فِيهِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْمَاءِ إِلَى التَّيَمُّمِ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ وَلَوْ كَانَ مَلُهُ وَقَا يَحْبُثُ لَوْ غُسِّلُ لَتَهَ مَى أَوْ خِيفَ عَلَى الْغَاسِلِ يُمِّمَ لِمَا ذَكَ نَاهُ وَذَكَ مَامُ الْحَ مَيْنِ مَلْهُ وَلَا عَلَى الْعَلَيْ وَآخَ وَخِيفَ مِنْ غُسْلِهِ إِسْرَاعُ الْبِلَى وَالْغَزَائِيُّ وَآخَ وُونَ مِنَ الْخُورِينَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِهِ قُومُ وَخِيفَ مِنْ غُسْلِهِ إِسْرَاعُ الْبِلَى وَالْغَزَائِيُّ وَآخَ وُونَ مِنَ الْحُورِيَ الْمَاهُ لِأَنَّ الْجُمِيعَ صَادُ وَنَ إِلَى الْبِلَى هَذَا تَفْصِيلُ مَذْهَبِنَا وَحَكَى الْنُورِ فِيمَنْ يُحَلِّ مَنْ غُسْلِهِ تَه مِنْ عُسْلِهِ تَه مِنْ عُسْلِهِ عَنْ التَوْرِيِّ الْمُنْذِرِ فِيمَنْ يُخَافُ مِنْ غُسْلِهِ تَه مِن عَسْلِهِ وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى غُسْلِهِ عَنْ التَوْرِيِّ وَمَاكُ وَيِهِ أَقُولُ وَمَالِكِ يُصَبُ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ يُيَمَّمُ قَالَ وَبِهِ أَقُولُ

(Sub Masalah) Penulis -Abu Ishaq al-Syairazi- dan para Ashhab berkata: "Apabila tidak dimungkinkan memandikan mayit karena tidak ada air atau karena korban kebakaran, yang jika dimandikan

Abdurrahman al-Juzairi, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid I, h. 476.

Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Jilid V, h. 137.

akan jenazah akan rontok, maka tidak boleh dimandikan, namun ditayamumi." Tayamum ini hukumnya wajib, karena berfungsi menyucikan tanpa terkait membersihkan najis. Karenanya wajib beralih pada tayamum ketika tidak ada air, seperti mandi janabat. Kalau jenazah itu mati karena sengatan binatang berbisa, yang sekira bila dimandikan akan rontok atau berbahaya bagi yang memandikannya, maka jenazah harus ditayamumi karena alasan yang telah kami sebutkan.

Al-Imam al-Haramain, al-Ghazali dan ulama lain dari Khurasan menyebutkan, jika pada jenazah ada luka yang bernanah, di mana jika dimandikan dikhawatirkan mempercepat hancurnya jenazah setelah dikuburkan, maka tetap wajib memandikannya, karena semua orang akhirnya akan hancur. Begitu perincian madzhab kita.

Ibn al-Mundzir meriwayatkan pendapat dari Imam al-Tsauri dan Imam Malik tentang jenazah yang dikhawatirkan bila dimandikan menyebabkan dagingnya rontok, dan orang-orang tidak mampu memandikannya: "Cukup dituangi air." Sedangkan menurut Imam Ahmad dan Ishaq, jenazah itu ditayamumi. Dan Ibn al-Mundzir berkata: "Dengan pendapat ini aku berpendapat."

5. Irsyad al-Syari Syarh Shahih al-Bukhari 19

(وَفِرَّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِيُّ) أَيْ كَوْرَارِكَ (مِنَ الْأَسَدِ) فَمَا مَصْدَرِيَّةً، وَاسْتُشْكِلَ مَعَ السَّابِقِ أَكْلُهُ ﷺ مَعَ مَجْدُومٍ وَقَالَ ثِقَةً بِاللهِ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ وَأُجِيْبَ بِأَنَّ الْمُرَافَ بِنَفْيِ الْعَدْوِ أَنَّ شَيْتًا لاَ يُعْدِى بِطَبْعِهِ نَفْيًا لِمَا كَانَتُ الْجُاهِلِيَّةُ تَعْتَقِدُهُ مَعَ أَنَّ الْأَمْرَاضَ تُعْدِى بِطَبْعِهَا مِنْ شَيْتًا لاَ يُعْدِى بِطَبْعِهِ نَفْيًا لِمَا كَانَتُ الْجُاهِلِيَّةُ تَعْتَقِدُهُ مَعَ أَنَّ الْأَمْرَاضَ تُعْدِى بِطَبْعِهَا مِنْ عَيْرِ إِضَافَةٍ إِلَى اللهِ 'كَمَا سَبَقَ فَأَبْطَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ اعْتِقَادَهُمْ ذَلِكَ وَأَكُلَ مَعَ الْمَجْدُومِ لِيُبَيِّنَ أَنَّ هَذِهِ لَهُمْ أَنَّ اللهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِيْ يُمْرِضُ وَيَشْفِى. وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّنُو مِنَ الْمَجْدُومِ لِيبَيِّنَ أَنَّ هَذِهِ لَهُمْ أَنَّ اللهُ تَعَالَى هُو الَّذِيْ يُمْرِضُ وَيَشْفِى. وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّنُو مِنَ الْمَجْدُومِ لِيبَيِّنَ أَنَّ هَذِهِ لَهُمْ أَنَّ اللهُ تَعَالَى هُو الَّذِيْ يُمْرِضُ وَيَشْفِى إِلَى مُسَبَّبَاتِهِمَا، فَفِيْ نَهْمِ فِي اللهُ الْعَادَةَ بِأَنَّهَا تُفْضِى إِلَى مُسَبَّبَاتِهِمَا، فَفِيْ نَهْمِيهِ إِثْبَاتُ الأَسْبَابِ وَفِي اللهُ الْعَادَة بِأَنَّهَا تُفْضِى إِلَى مُسَبَّبَاتِهِمَا، فَفِيْ نَهْمِيهِ إِثْبَاتُ الْأَسْبَابِ وَفِي فَعْلِهِ إِشَارَةً إِلَى أَنَهَا لاَ تَسْتَقِلُ، بَلِ اللهُ هُو الَّذِيْ إِنْ شَاءَ سَلَبَ قُواهَا فَلا تُوَيِّرُ شَيْاً وَإِنْ شَاءَ لَا فَاذَةً بِلَى أَنَهُ الْمَا لَا لَنَاهُ هُو اللّذِيْ إِنْ شَاءَ سَلَبَ قُواهَا فَلاَ ثُورُ اللهُ الْعَادَة وَاللّذِي إِنْ شَاءَ سَلَبَ قُواهَا فَلاَ تُورُونُ شَيْا وَلَلْ شَاءً لَا مُعْرَافًا فَلاَ تُولُومُ اللّذِي إِلَى أَنْهُ الْمَاءَ فَا اللهُ الْمُ اللهُ الْعَالَةُ وَاللّذِي إِلَى أَنْهُ الْمَاءَ اللهُ الْعَلَقُ وَاللّذِي إِنْ شَاءَ عَلَى اللّهُ الْمَاءَ الْمُؤْمِ اللهُ الْمَاءَ اللهُ الْعَلَامُ اللللهُ الْعَامِلَا الللهُ الْعَلْمُ اللّذِي إِلَى أَنْفُ اللهُ الْعَلْمُ اللّذِي إِلَيْهُ الْمُؤْمِ اللّذِي اللّهُ الْعَلْمُ اللّذِي الللهُ الْعَلْمُ اللّذِي الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْعِلَامُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْعَلْمُ الْمُؤْمِ اللّ

¹⁹ Shihabiddin Ahmad al-Qusthalani, Irsyad al-Sari bi Syarh Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Jilid V, h. 137.

²⁰ Mungkin yang benar tanpa huruf , seperti redaksi dalam Fath al-Bari. Lihat, Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari, (Beirut: 1379 H), Juz X, h. 160.

(Menjauhlah dari orang berpenyakit kusta, seperti kamu menjauh) maksudnya menjauhmu (dari singa). Huruf 🗸 adalah mashdariyah. Hadits tersebut dijanggalkan besertaan hadits yang telah lewat, yaitu Nabi Saw. makan bersama penderita kusta, dan beliau Saw. bersabda: "Karena percaya dan tawakal kepada Allah." Kejanggalan itu dijawab dengan: "Sungguh yang dimaksud dengan menafikan penularan penyakit adalah bahwa suatu penyakit tidak menular sebab wataknya. Karena menafikan keyakinan orang jahiliyah yaitu bahwa penyakitpenyakit itu bisa menular tanpa disandarkan kepada Allah, seperti keterangan yang telah lewat. Maka Nabi Saw. membatalkan keyakinan mereka dan makan bersama penderita kusta untuk menjelaskan kepada mereka bahwa Allah Swt. adalah dzat yang membuat sakit dan menyembuhkannya. Dan beliau Saw. mencegah mereka untuk mendekat penderita kusta untuk menjelaskan bahwa sebab-sebab ini yang Allah berlakukan sebagai adat bisa memunculkan musabbab (akibat)nya. Maka dalam pencegahan beliau Saw. terdapat penetapan sebab-sebab dan dalam tindakan beliau terdapat isyarat bahwa sebabsebab itu tidak bisa bereaksi sendiri. Namun Allah yang bila berkehendak maka Ia cabut kekuatan sebab-sebab itu dan bila berkehendak Ia tetapkan kekuatannya, lalu bereaksi.[]

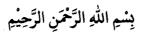
HASIL KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-XXXI Di Asrama Haji Donohudan Boyolali Solo – Jawa Tengah 29 Nopember – 01 Desember 2004 M 16 – 18 Syawal 1425 H Tentang: MASAIL Al-DINIYYAH AL-WAQI'IYYAH

435. Penyuapan dalam Penerimaan PNS
436. Masalah Hukuman Bagi Produsen dan Pemasok
Psychotropika dan Narkotika
437. Penetapan Nasab Berdasarkan Tes DNA
438. Melegalkan Lokalisasi Pelacuran

KEPUTUSAN MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA NOMOR: VI/MNU-31/XII/2004

TENTANG

BAHTSUL MASAIL AL-DINIYYAH AL-WAQI'IYYAH NAHDLATUL ULAMA



MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA

Menimbang

- a. Bahwa menjadi tugas Muktamar sebagai instansi tertinggi dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk membahas masalah-masalah keagamaan yang sedang dan atau telah dihadapi masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat agar dapat menjadi pedoman hukum bagi warga Nahdlatul Ulama dan masyarakat pada umumnya dalam menjalankan tugas hablu minallah dan hablu minannas;
- Nahdlatul Ulama sebagai Perkumpulan atau Jam'iyyah Diniyyah Islamiyyah perlu secara terus menerus memperjuangkan berlakunya faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat;
 - Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas Muktanar XXXI perlu menetapkan Hasil Bahtsul Masail Diniyyah Waqi'iyyah;

Mengingat

- Keputusan Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama Nomor 1/MNU-31/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Muktamar XXXI;
- b. Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama.

Memperhatikan:

- a. Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama tanggal 15 Syawal 1425 H/28 Nopember 2004 M;
- b. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi 1A Bidang Bahtsul Masail Diniyyah Waqi'iyyah yang disampaikan pada Sidang Pleno IX Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama pada tanggal 18 Syawal 1425 H/1 Desember 2004 M;
- Ittifak Sidang Pleno IX Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama pada tanggal 18 Syawal 1425 H/1 Desember 2004 M;

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridha Allah SWT:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA

TENTANG BAHTSUL MASAIL DINIYYAH WAQITYYAH.

Pasal 1 Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh

keputusan ini terdapat dalam naskah Hasil-hasil Bahtsul Masail Diniyyah Waqi'iyyah sebagai pedoman dalam memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat dan pedodam hukum bagi warga Nahdlatul Ulama dan masyarakat pada umumnya dalam menjalankan tugas

hablu minallah dan hablu minannas;

Pasal 2 Mengamanatkan kepada Pengurus dan warga Nahdlatul

Ulama untuk menaati segala Hasil-hasil Bahtsul Masail

Diniyyah Waqi'iyyah ini;

Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Asrama Haji Donohudan Boyolali Jawa Tengah

Pada tanggal :18 Syawal 1425 H/1 Desember 2004

MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA PIMPINAN SIDANG PLENO IX

ttd

ttd

<u>Drs. KH. A. Hafizh Utsman</u> Ketua Drs. H. Taufiq R. Abdullah Sekretaris

435. Penyuapan dalam Penerimaan PNS

A. Pertanyaan

a. Bagaimana hukum memberi dan menerima sesuatu agar diterima sebagai PNS dan semacamnya?

B. Jawaban

a. Pemberian sesuatu untuk menjadi PNS dan semacamnya adalah risywah (suap). Pada dasarnya risywah itu hukumnya haram, kecuali untuk menegakkan kebenaran atau menolak kebatilan, maka tidak haram bagi pemberi dan tetap haram bagi penerima.

C. Dasar Pengambilan Hukum

Al-Qur'an

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. al-Baqarah: 188)

Al-Sunnah

"Nabi Saw. bersabda: "Barangsiapa yang kami karyakan untuk suatu pekerjaan dan telah kami tentukan gaji untuknya, maka apapun yang ia ambil selebihnya adalah pengkhianatan." (HR. Abu Daud dari Buraidah, hadits ke 2554)

"Dari Abdullah bin 'Amr ra. ia berkata: "Rasulullah Saw. melaknat orang yang melakukan penyuapan dan yang menerima suap." (HR. Tirmidzi, hadits ke 1207, Abu Dawud, hadits ke 3109, Ibn Majah, hadits ke 2304, dan Ahmad, hadits ke 6246)

Al-Aqwal al-Ulama:

1. Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin¹

(فَرْعُ) قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الرِّشُوةَ حَرَامُ مُطْلَقاً وَالْهَدِيَّةَ جَائِزَةٌ فِيْ بَعْضِ الْأَحْوَالِ فَيُطْلَبُ الْفَرْقُ بَيْنَ حَقِيْقَتَيْهِمَا مَعَ أَنَّ الْبَاذِلَ رَاضٍ فِيْهِمَا وَالْفَرْقُ مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدِهِمَا ذَكَرَهُ ابْنُ كَيِّ أَنَّ الرِّشُوةَ هِيَ الَّتِيْ يُشْرَطُ عَلَى قَابِلِهَا الْحُصُّمُ بِغَيْرِ الْحُقِّ أَوِ الامْتِنَاعِ عَنِ الْحُصُمِ بِحَقِّ وَالْهَدِيَّةَ الْمُطْلَقَةُ وَالنَّانِي قَالَ الْغَزَالِي فِي الْإِحْيَاءِ الْمَالُ إِمَّا يُبْذَلُ لِغَرَضِ آجِلٍ فَهُو قُرْبَةً وَصَدَقَةً وَإِمَّا لِعَاجِلٍ وَهُو إِمَّا مَالُ فَهُو هِبَةً بِشَرْطِ ثَوَابٍ أَوْ لِتَوَقَّعِ ثَوَابٍ وَإِمَّا عَمَلُ فَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فَإِجَارَةً أَوْ جُعَالَةً وَإِمَّا لِلتَّقَرُّبِ عَمَلاً خُورَمًا أَوْ وَاجِبًا مُتَعَيِّنًا فَهُو رِشُوةً، وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فَإِجَارَةً أَوْ جُعَالَةً وَإِمَّا لِلتَّقَرُّبِ وَمُقَالِ لَكُونَ كَانَ مُبَاحًا فَإِجَارَةً أَوْ جُعَالَةً وَإِمَّا لِلتَّقَرُّبِ وَمُقَالِدَةً إِلَى الْمَنْدُولِ لَهُ فَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فَإِجَارَةً أَوْ جُعَالَةً وَإِمَّا لِلتَقَرَّبِ وَمُقَالِمُ اللَّوَدُدِ إِلَى الْمَنْدُولِ لَهُ فَإِنْ كَانَ مُبَاحًا فَإِنْ كَانَ مُبَاحًا وَالْمَالِ فَهُو رِشُوةً وَالْمَلُ وَالْمُ لِللَّقَوْلِ فَالْقُولُ لِللْهُ فَلَا الْمُعْلِقِ وَلَا لَكُنَ مُبَاحًا وَالْمَالِولَ لَهُ وَالْمَا لِللَّقَوْرِ فَا لَاللَّهُ فَا إِنْ كَانَ مُبَاحًا وَالْمَا لِللَّقَطَاءِ وَالْعَمَلِ فَهُ وَرَشُوةً وَمُقَالِدَا فَالْمَا لِللَّهُ وَالْمَالَ وَلَوْلَ لَلْهُ اللْمُعْلَى فَالْمَالُولُ اللْمُ الْمُ لَعْمَلُ وَلِي كُولُ وَالْمَالِ وَلَعْمَلُ فَهُ وَلَالْمَالِ وَلَوْلَ لَالْمُ لَلْهُ وَالْمُولُ لَلْ فَوْلِ الْمُؤْولِ لَلْهُ وَلَالْمَالَ فَالْمُولُ لَلْمُ الْمُولُولُ لَالْمُ الْمُؤْلُولُ لَعْمَلُ فَلُولُ اللْمُقَلِّ فَالْمُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ لَهُ وَلَولَهُ وَالْمُعُلُولُ لَا لَالْمُ الْمُؤْلُولُ فَالْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

(Sub Masalah) Telah kami jelaskan bahwa tindakan suap menyuap hukumnya haram secara mutlak. Sedangkan hadiah pada beberapa kondisi itu boleh. Karenanya dituntut membedakan antara substansi kedua hal itu besertaan kerelaan si pemberi pada keduanya. Adapun perbedaannya bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, disebutkan oleh Ibn Kaji, bahwa sungguh suap adalah bila si penerimanya disyaratkan memutuskan hukum yang tidak benar, atau mencegah keputusan hukum yang benar, sedangkan hadiah adalah pemberian bersifat mutlak. Kedua, dalam kitab Ihya 'Ulum al-Din al-Ghazali berkata: "Harta diberikan adakalanya untuk maksud ukhrawi, yaitu pemberian yang dimaksud untuk taqarrub dan sedekah. Dan adakalanya untuk tujuan duniawi yang adakalanya berupa harta, yaitu pemberian dengan syarat imbalan atau mengharap imbalan. Dan adakalanya berupa perbuatan. Jika perbuatan tersebut merupakan perbuatan haram atau perbuatan yang sifatnya wajib 'ain, maka pemberian itu adalah suap. Jika perbuatan tersebut bersifat mubah, maka pemberian itu adalah ijarah atau ju'alah. Dan adakalanya pemberian itu dimaksud untuk tujuan pendekatan atau mencari simpati dari pihak yang diberi. Dalam hal ini jika yang dimaksud sekedar pribadi orangnya, maka itu adalah hadiah, namun jika yang dimaksud agar menjadi sarana melalui kedudukan si penerima

Muhyiddin al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th.), Jilid VIII, h. 128-129.

untuk tujuan dan maksud tertentu, maka jika kedudukannya berupa keilmuan atau keturunan, maka itu adalah hadiah, akan tetapi jika kedudukannya berupa keputusan hukum atau suatu pekerjaan, maka itu adalah suap.

2. Nihayah al-Zain²

وَقَبُوْلُ الرِّشْوَةِ حَرَامٌ وَهِيَ مَا يُبْذَلُ لِلْقَاضِي لِيَحْكُمَ بِغَيْرِ الْحَقِ أَوْ لِيَمْتَنِعَ مِنَ الْحُكْمِ بِالْحُقِّ، وَإِعْطَاؤُهَا كَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَّةٍ أَمَّا لَوْ رَشَى لِيَحْكُمَ بِالْحُقِّ جَازَ الدَّفْعُ وَإِعْطَاؤُهَا كَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ عَلَى الْحُكْمِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ أُعْطِيَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ لَا مَعْوَلِ لِلْقَاضِي أَخْذُ الْأَجْرَةِ عَلَى الْحُكْمِ لِأَنَّهُ شَعْلَهُ عَنِ الْقِيَامِ بِحَقِّهِ.
لاَ، وَيَجُوزُ لِلْقَاضِي أَخْذُ الْأَجْرَةِ عَلَى الْحَكْمِ لِأَنَّهُ شَعْلَهُ عَنِ الْقِيَامِ بِحَقِّهِ.

Menerima suap hukumnya haram. Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada hakim agar ia memberikan putusan hukum yang menyalahi kebenaran atau agar ia mencegah terjadinya putusan hukum yang benar. Dan demikian pula hukumnya memberikan suap (yakni haram), karena hal tersebut sama saja membantu perbuatan maksiat. Adapun jika seseorang memberi suap dengan tujuan agar hakim memberikan putusan hukum dengan benar, maka hukum memberikannya boleh, meski hakim diharamkan secara mutlak mengambil pemberian atas putusan hukumnya. Baik yang diberikan kepadanya diambil dari bait al-mal atau bukan. Hakim boleh mengambil gaji atas keputusan hukumnya, karena hal tersebut membuatnya sibuk dari bekerja untuk memenuhi kebutuhannya.

3. Is'ad al-Rafiq Syarh Sulam al-Taufiq³

فَمَنْ أَعْطَى قَاضِيًا أَوْ حَاكِمًا رِشُوَةً أَوْ أَهْدَى إِلَيْهِ هَدِيَّةً فَإِنْ كَانَ لِيَحْكُمَ لَهُ بِبَاطِلٍ أَوْ لِيَتَوَصَّلَ بِهَا لِنَيْلِ مَا لاَيَسْتَحِقُّهُ أَوْ لِأَذِيَّةِ مُسْلِم فَسَقَ الرَّاشِي وَالْمُهْدِي بِالْإِعْطَاءِ وَالْمُوْتَشِي وَالْمُهْدَى إِلْاِعْطَاءِ وَالْمُوْتَشِي وَالْمُهْدَى إِلْاِعْطَاءِ وَالْمُوْتَشِي وَالْمُهْدَى إِلَيْهِ بِالْأَخْذِ وَالرَّائِشُ بِالسَّعْيِ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ حُصُمُ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لِيَنَالَ مَا يَسْتَحِقُهُ فَسَقَ الآخِذُ فَقَطْ وَلَمْ يَأْتُمِ الْمُعْطِي لِيَحْكُمَ لَهُ جِحَقٍ أَوْ لِتَفْعِ ظُلْمٍ أَوْ لِيَنَالَ مَا يَسْتَحِقُهُ فَسَقَ الآخِذُ فَقَطْ وَلَمْ يَأْتُمِ الْمُعْطِي لِيَحْكُمُ لَهُ جِحَقٍ أَوْ لِتَفْعِ بِأَيْ طَرِيْقٍ كَانَ

Barangsiapa memberikan suap kepada hakim, atau memberikan

614

² Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2008), h. 419.

³ Muhammad Salim Bafadhal, *Is'ad al-Rafiq Syarh Sulam al-Taufiq*, (Singapura: al-Haramain, t. th.), Juz II, h. 100.

hadiah kepadanya, maka jika dimaksudkan agar hakim memberi putusan hukum yang menguntungkannya dengan cara yang tidak benar, atau ia jadikan sarana untuk mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi haknya, atau ia maksudkan untuk menyakiti sesama muslim, maka si penyuap dan si pemberi hadiah menjadi fasiq sebab pemberiannya itu, begitu pula penerima suap atau hadiah sebab mengambil suap atau hadiah itu, dan begitu pula dengan perantaranya sebab usahanya, walaupun setelah pemberian suap tersebut tidak terjadi putusan hukum. Atau (ia memberikan suap) dimaksudkan agar hakim memberi putusan hukum yang menguntungkannya secara benar, atau dimaksudkan mencegah kezaliman atau dimaksudkan untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya, maka yang menjadi fasiq hanya yang mengambil (suapnya) saja, sedangkan yang memberi tidak berdosa karena terpaksa agar bisa mendapat haknya dengan jalan apapun.

Pertanyaan

b. Bagaimana hukumnya gaji yang proses pengangkatannya karena *risywah* (suap)?

Jawaban

- b. Masalah gaji PNS yang penerimaannya melalui *risywah* (suap), ada dua pendapat menurut Muktamirin:
 - Pendapat pertama, hukumnya haram, karena:
 - 1) Ada keterkaitan sebab dan akibat antara risywah (suap) dan gaji.
 - 2) Gaji yang diterima bukan termasuk ujrah (upah), tetapi irzaq, ihsan, atau musamahah (tunjangan/insentif), sehingga gaji yang diterima tidak terkait dengan pekerjaan yang dikerjakan, tetapi terkait dengan pengangkatan yang prosesnya melalui suap.
 - 3) Pengangkatannya dianggap tidak sah atau *batil*, sehingga gajinya juga tidak sah/batil.

Pendapat kedua, hukumnya halal, karena:

- 1) Tidak ada keterkaitan antara *risywah* (suap) dan gaji, sebagaimana tidak adanya keterkaitan antara haramnya mencuri sajadah dan sahnya shalat di atas sajadah curian itu.
- 2) Pengangkatan untuk menjadi PNS itu dianggap sah.

Dasar Pengambilan Hukum

Al-Qur'an

وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَاۤ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِن أَمْوَلِ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. al-Baqarah: 188)

Aqwal al-Ulama'

1. Al-Asybah wa al-Nazha'ir4

(خَاتِمَةً) يَنْقُضُ قَضَاءُ الْقَاضِي إِذَا خَالَفَ نَصًّا أَوْ إِجْمَاعًا أَوْ قِيَاسًا جَلِيًّا. قَالَ الْقَرَّافِيُّ: أَوْ خَالَفَ الْقَوَاعِدَ الْكُلِيَّة. قَالَ الْحُنَفِيَّةُ: أَوْ كَانَ حُكُمًا لاَ دَلِيْلَ عَلَيْهِ.

(Penutup) Putusan hukum seorang hakim bisa dibatalkan, jika bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan hadits), ijma' atau qiyas jali (jelas). Al-Qarafi berpendapat: "Atau jika menyalahi kaidah umum." Dan ulama madzhab Hanafi berpendapat: "Atau berupa hukum yang tidak berdasarkan dalil sama sekali.

2. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj⁵

وَمَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ جَامَكِيَّةٍ عَلَى ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْإِرْزَاقِ وَالْإِحْسَانِ وَالْمُسَامَحَةِ بِخِلاَفِ الْإِجَارَةِ فَإِنَّهَا مِنْ بَابِ الْمُعَاوَضَةِ.

Tradisi yang berlaku pada pemberian pemerintah kepada untuk orang yang menjadi imam shalat jamaah itu bukan termasuk sebagai ijarah (upah pekerjaan), tetapi merupakan irzaq, ihsan atau musamahah (tunjangan, insentif, atau kebijakan). Berbeda dengan ijarah yang merupakan mu'awadhah (transaksi pertukaran).

3. Al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni'6

فَلاَ يَجُوْزُ تَوْلِيَتُهُ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ بِنَلِكَ كَمَا لاَ يَجُوْزُ تَوْلِيَتُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِعَدَمِ صَلاَحِيَّتِهِ. وَيُعَيِّنُ مَا يُوَلِيْهُ الْحُلْدَانِ كَبَغْدَادَ وَنَحْوِهَا وَالْبُلْدَانِ كَبَغْدَادَ وَنَحْوِهَا

⁴ Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (Mesir: al-Tijariyah al-kubra, t. th.), h. 94-95.

Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1938), Jilid V, h. 288.

⁶ Ibn Muflih al-Hanbali, al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni', (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1980), Jilid X, h. 7.

لِيَعْلَمَ تَحَلُّ وِلاَيَتِهِ فَيَحْكُمُ فِيْهِ وَلاَ يَحْكُمُ فِي غَيْرِهِ

Karenanya tidak boleh mengangkat seseorang untuk menjabat sebagai *Qadhi* ketika tidak besertaan ketidaktahuan atas keahliannya memutuskan hukum, seperti halnya tidak boleh mengangkatnya menjadi *Qadhi* besertaan mengetahui ketidaklayakannya. Dan penguasa menentukan daerah hukumnya, semisal Kufah dan sekitarnya, atau wilayah semisal Baghdad dan sekitarnya, agar ia mengetahui wilayah kerjanya sehingga memutuskan hukum wilayah tersebut dan tidak memutuskan hukum di luar wilayahnya.

4. Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi7

إِنَّ الصَّلاَةَ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوْبَةِ صَحِيْحَةُ يَسْقُطُ بِهَا الْفَرْضُ وَلاَ ثَوَابَ فِيْهَا، قَالَ أَبُو مَنْصُوْرٍ وَرَأَيْتُ أَصْحَابَنَا بِحُرَاسَانَ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ، قَالَ وَذَكَرَ شَيْخُنَا فِي الْكَامِلِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تَصِحَّ وَيَحْصُلَ الثَّوَابُ عَلَى الْفِعْلِ فَيَكُوْنُ مُثَابًا عَلَى فِعْلِهِ عَاصِيًا الْكَامِلِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ تَصِحَّ وَيَحْصُلَ الثَّوَابُ عَلَى الْفِعْلِ فَيَكُوْنُ مُثَابًا عَلَى فِعْلِهِ عَاصِيًا بِالْمُقَامِ فِي الْمَغْصُوبِ فَإِذَا لَمْ نَمْنَعْ مِنْ صِحَّتِهَا لَمْ نَمْنَعْ مِنْ حُصُولِ الثَّوَابِ. قَالَ أَبُو بِالْمُقَامِ وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ عَلَى طَرِيْقِ مَنْ صَحَّحَهَا وَاللّهُ أَعْلَمُ

Sungguh shalat di rumah *ghasab*an itu sah yang menggugurkan kewajiban, namun tidak berpahala. Abu Manshur berkata: "Saya melihat ulama kita (madzhab Syafi'i) di Khurasan berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang berpendapat shalatnya tidak sah." Ia berkata: "Dalam kitab *al-Kamil* guru kami (Abu Nashr bin Shabah) menyebutkan, seyogyanya shalat tersebut sah dan ia berpahala atas shalat itu. Maka pelakunya mendapat pahala atas shalatnya namun bermaksiat karena bertempat di rumah *ghasab*an. Maka jika kita tidak menghalangi keabsahan shalatnya maka kita juga tidak menghalangi pahalanya." Abu Manshur: "Ini merupakan *qiyas* menurut riwayat ulama yang mengabsahkannya." *Wallahu a'lam*.

5. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj⁸

فَإِنْ بَاعَ مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ صَعَّ بَيْعُهُ وَكَذَا سَائِرُ عُقُوْدِهِ لِأَنَّ النَّهْيَ لِمَعْنَى خَارِجٍ عَنِ

Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), Jilid II, h. 58-59.

⁸ Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.), Jilid I, h. 295.

الْعَقْدِ فَلَمْ يَمْنَعِ الصِّحَّةَ كَالصَّلاَةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوْبَةِ

Jika orang yang tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli melakukan transaksi jual beli, maka transaksi jual belinya tetap sah. Begitu pula seluruh transaksi yang dilakukannya, karena larangan bertransaksi di atas karena alasan eksternal di luar transaksi, sehingga tidak menghalangi keabsahannya, seperti (hukum) shalat di dalam rumah hasil *ghasab*an.

6. I'anah al-Thalibin9

وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعَ الْأَصْلِ: فَإِنْ بَاعَ مَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ صَحَّ بَيْعُهُ وَكَذَا سَائِرُ عُقُوْدِهِ لِأَنَّ النَّهُي لِمَعْنَى خَارِجٍ عَنِ الْعَقْدِ أَيْ وَهُوَ التَّشَاعُلُ عَنْ صَلاَتِهَا فَلَمْ يَمْنَعِ الصِّحَّةَ كَالصَّلاَةِ النَّهُ اللَّهَاءُ اللَّهَاءُ اللَّهَاءُ اللَّهَاءُ اللَّهَادِ الْمَغْصُوْبَةِ.

Adapun redaksi kitab Mughni al-Muhtaj serta kitab asalnya (Minhaj al-Thalibin) yaitu: "Jika orang yang tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli melakukan transaksi jual beli, maka transaksi jual belinya tetap sah. Begitu pula seluruh transaksi yang dilakukannya, karena larangan bertransaksi di atas karena alasan eksternal di luar transaksi, yaitu menyibukkan diri dari shalat Jum'at, sehingga tidak menghalangi keabsahannya, seperti (hukum) shalat di dalam rumah hasil ghasaban.

7. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Jilid III, h. 164.

436. Hukuman Bagi Produsen dan Pemasok Psychotropika dan Narkotika

A. Pertanyaan

a. Apakah sumber hukum tentang sangsi ta'zir atas produsen dan pemasok psychotropika dan narkotika?

B. Jawaban

a. Sumber hukumnya adalah al-Qur'an dan al-Sunnah, atsar shahabat dan al-Ijma'.

C. Dasar Pengambilan Hukum

⁹ Muhammad Syaththa al-Dimyati, I'anah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997) Jilid IV, h. 188.

وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُرِ ۚ فَعِظُوهُرِ وَٱهْجُرُوهُنَ فِي ٱلْمَضَاحِعِ وَٱضْرِبُوهُنَ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۖ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۞

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur, dan pukul mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (Q.S. al-Nisa': 34)

1. I'anah al-Thalibin¹⁰

(فَصْلُ فِي التَّعْزِيْرِ) أَيْ فِي بَيَانِ مُوْجِبِهِ وَمَا يَحْصُلُ بِهِ وَالتَّعْزِيْرُ لُغَةَ التَّأْدِيْبُ وَشَرْعًا تَأْدِيْبُ عَلَى ذَنْبٍ لاَ حَدَّ فِيْهِ وَلاَ كَفَّارَةَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلاَمِهِ وَالْأَصْلُ فِيْهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَةُ (وَالَّتِي تَخَافُوْنَ نُشُوْرَهُنَّ ... الآيَة) فَأَبَاحَ الضَّرْبَ عِنْدَ الْمُخَالَفَةِ فَكَانَ فِيْهِ تَنْبِيْهُ عَلَى التَّعْزِيْرِ

(Pasal tentang ta'zir). Yakni dalam rangka menjelaskan hal-hal yang mengharuskan berlaku dan terjadinya ta'zir. Secara bahasa ta'zir bermakna memberi pendidikan etika, sedangkan menurut syara' bermakna memberi pendidikan etika atas perbuatan dosa yang tidak terdapat ketentuan had (hukuman)nya dan tidak ada ketentuan denda (kafarah)nya. Demikianlah yang disimpulkan dari ungkapan Syaikh Zainuddin al-Maliabri. Dalil hukumnya sebelum ijma' adalah firman Allah: "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur, dan pukul mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." (QS. al-Nisa' 34)

(Dalam ayat ini) Allah Swt. membolehkan memukul ketika terjadi pelanggaran. Ketentuan ini berfungsi sebagai petunjuk untuk diberlakukannya hukuman ta'zir.

Al-Sunnah

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّبِيِّ عَيْنُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُوَ فِيْ سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ فَقَالَ النَّبِيِّ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُوَ فِيْ سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ فَقَالَ

¹⁰ Muhammad Syaththa al-Dimyati, *I'anah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) Jilid IV, h. 166.

النَّبِيُّ عِينَ اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ فَقَتَلَهُ فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami, (ia berkata) Abul 'Umais telah menceritakan kepada kami, (ia) dari Iyas bin Salamah bin Al-Akwa' dari ayahnya: Ia berkata, Nabi Saw. bersabda: Seorang tokoh kaum musyrikin mendatangi Nabi Saw. ketika beliau sedang dalam suatu perjalanan, orang tersebut mendekati para sahabat dan melakukan hasutan, lalu pergi. Maka Nabi Saw. bersabda: "Carilah orang tadi dan bunuhlah." Maka iapun dibunuh dan hartanya dijadikan pampasan perang. (HR. Bukhari)

1. Tabshirah al-Hukkam fi Ushul al-Aqdhiyat wa Manahij al-Ahkam¹¹

(فَصْلُ) وَالتَّعْزِيْرُ لاَ يَخْتَصُ بِفِعْلِ مُعَيَّنِ وَلاَ قَوْلٍ مُعَيَّنِ فَقَدْ عَزَّرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْهَجْرِ، وَذَلِكَ فِي الْقَارَانِ الْكَرِيْمِ فَهُجِرُوْا خَمْسِيْنَ يَوْمًا لاَ يُصَلِّمُهُمْ وَذَلِكَ فِي الْقَرْآنِ الْكَرِيْمِ فَهُجِرُوْا خَمْسِيْنَ يَوْمًا لاَ يُصَلِّمُهُمْ أَخَدُ وَقِصَّتُهُمْ مَشْهُوْرَةً فِي الصِّحَاحِ. وَعَزَّرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالنَّفْيِ فَأَمَرَ بِإِخْرَاجِ الْمُخَنِّيْيْنَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَنَفْيِهِمْ.

(Pasal) Dan ta'zir tidak terbatas dengan tindakan dan ucapan tertentu, karena sungguh Rasulullah Saw. pernah menta'zir dengan cara mendiamkan (tidak mengajak bicara). Hal itu berlaku bagi tiga orang sahabat yang disebut Allah dalam al-Qur'an al-Karim, mereka didiamkan selama 50 hari tanpa ada seorang pun yang mengajak berbicara. Kisah mereka itu masyhur dalam hadits-hadits shahih. Rasulullah Saw. pernah menta'zir dengan cara mengasingkan, maka beliau Saw. memerintak mengeluarkan kaum waria dari Madinah dan mengasingkannya.

Atsar Shahabat

1. Al-Figh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah 12

وَقَدْ عَزَرَ كُبَّارُ أَصْحَابِهِ ﷺ مِنْ بَعْدِهِ بِالضَّرْبِ وَالسِّجْنِ وَالْقَتْلِ، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ عُمَرَ ﷺ جَمَعَ كُبَّارَ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ وَاسْتَشَارَهُمْ فِيْ عُقُوْبَةِ اللاَّثِطِ فَأَفْتَوْا بِإِعْدَامِهِ حَرْقًا، وَهَذَا مِنْ أَشَدِ مَا يُتَصَوَّرُ فِيْ بَابِ التَّعْزِيْرِ، وَثَبَتَ أَنَّ عَلِيًّا وَجَدَ رَجُلاً مَعَ

620

¹¹ Ibn Farhun al-Ya'mari, Tabshirah al-Hukkam fi Ushul al-Aqdhiyat wa Manahij al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001) Juz II, h. 219.

Abdurrahman al-Juzairi, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid V, h. 249.

امْرَأَةٍ يَسْتَمْتِعُ بِهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ فَجَلَّدَهُ مِاثَةَ سَوْطٍ

Sepeninggal Rasulullah Saw. para sahabat senior pernah menta'zir dengan cara memukul, memenjara dan menghukum mati. Dalam sebuah riwayat shahih disebutkan bahwa Umar ra. mengumpulkan tokoh ulama dari kalangan sahabat (semoga Allah melimpahkan keridhaan kepada mereka) dan bertukar pendapat dengan mereka tentang hukuman bagi orang yang melakukan sodomi, maka mereka menfatwakan agar diberikan hukuman mati dengan cara dibakar. Ini termasuk gambaran terdahsyat dalam masalah ta'zir. Dan riwayat shahih juga menyatakan bahwa Ali ra. mendapati seorang laki-laki sedang berduaan dengan seorang perempuan yang melakukan perbuatan mesum namun tidak sampai melakukan hubungan badan, maka Ali ra. memberikan hukuman cambuk sebanyak seratus kali.

2. Tabshirah al-Hukkam fi Ushul al-Aqdhiyat wa Manahij al-Ahkam¹³ وَكَذَلِكَ الصَّحَابَةُ مِنْ بَعْدِهِ وَلَا وَنَذْكُرُ بَعْضَ مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِمَّا قَالَ بِبَعْضِهِ أَصْحَابُنَا وَبَعْضُهُ خَارِجُ الْمَذْهَبِ. فَمِنْهَا أَمَرَ عُمَرَ ﴿ يَهَجْرِ صَبِيغِ الَّذِيْ كَانَ يَسْأَلُ عَنِ الذَّارِيَاتِ وَغَيْرِهَا وَيَأْمُرُ النَّاسَ بِالتَّفَقُّهِ فِي الْمُشْكِلاَتِ مِنَ الْقُرْآنِ، فَضَرَبَهُ ضَرْبًا وَجِيْعًا، وَنَفَاهُ إِلَى الْبَصْرَةِ أَوِ الْكُوْفَةِ وَأَمَرَ بِهَجْرِهِ فَكَانَ لاَ يُصَلِّمُهُ أَحَدًّ حَتَّى تَابَ وَكَتَبَ عَامِلُ الْبِلاَدِ إِلَى عُمَرَ شِه حَلَّق رَأْسَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ يُعَيِّمُ بِتَوْبِيتِهِ فَأَذِنَ لِلنَّاسِ فِيْ كَلاَمِهِ. وَمِنْهَا أَنَّ عُمَرَ شَه حَلَّق رَأْسَ عُمْرَ بْنَ حَجَّاجٍ وَنَفَاهُ مِنْ الْمَدِيْنَةِ لَمَّا شَبَّبَ النِسَاءُ بِهِ فِي الْأَشْعَارِ وَخَشِيَ الْفِتْنَةَ بِهِ فَى الْمُشْكِلِيْ النِسَاءُ بِهِ فِي الْأَشْعَارِ وَخَشِيَ الْفِتْنَة بِهِ

Demikian pula tindakan para sahabat sepeninggal Nabi Saw. Kami sebutkan sebagian keterangan yang terdapat haditsnya yang sebagiannya merupakan pendapat ulama kita (madzhab Maliki) dan sebagian lain merupakan pendapat di luar madzhab. Di antaranya adalah Umar ra. memerintahkan sanksi boikot berbicara kepada Dhabigh yang menanyakan al-Dzariyaat (angin yang menerbangkan debu) dan ayat lain yang semisalnya, serta menganjurkan orang lain mendalami ayat-ayat mutasyabbih al-Qur'an. Umar ra. menjatuhinya hukuman pukulan yang menyakitkan dan mengasingkannya ke Basrah atau Kufah, serta memerintah agar memboikot berbicara dengannya, sehingga tidak ada seorang pun yang berbicara dengannya sampai ia bertobat.

¹³ Ibn Farhun al-Ya'mari, Tabshirah al-Hukkam fi Ushul al-Aqdhiyat wa Manahij al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001) Juz II, h. 219.

Lalu penguasa daerah setempat menulis surat pada Umar ra. tentang tobatnya, lalu Umar ra. memperbolehkan orang-orang berbicara kembali dengannya. Di antaranya adalah Umar ra. pernah menggundul kepala Nashr bin Hajjaj dan mengasingkannya dari Madinah ketika ia membuat kaum wanita tergoda karena syair-syairnya dan dikhawatirkan terjadi fitnah karenanya.

Al-Ijma'

1. Al-Ijma'14

Para ulama bersepakat, bahwa sungguh bila seseorang berkata kepada orang lain: "Hai kafir!", atau "Hai Nasrani!", maka ia wajib diberi ta'zir, dan tidak ada hukuman had baginya.

2. Majmu'ah al-Fatawa¹⁵

Dan sungguh para ulama telah sepakat, bahwa hukuman ta'zir itu disyariatkan pada setiap maksiat yang tidak terdapat hukuman had dan hukuman kaffarah padanya. Maksiat ada dua macam, yaitu meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Barangsiapa tidak melaksanakan kewajiban padahal mampu melaksanakannya, maka ia adalah orang yang bermaksiat yang berhak dihukum dan dita'zir. Wallahu subhaanahu a'lam.

Pertanyaan

b. Bolehkah menjatuhkan hukuman mati kepada produsen dan pemasok psychotropika dan narkotika dalam pandangan Islam?

Jawaban

b. Hukumnya boleh, karena sudah jelas pemasok psychotropika dan narkotika menimbulkan *mafsadah* yang besar.

¹⁴ Ibn Mundzir, al-Ijma', (Qatar: Riasah al-Mahakim al-Syar'iyah wa Syuun al-Diniyah, 1987), h. 113.

¹⁵ Ibn Taimiyah, Majmu'ah al-Fatawa, (Kairo: Dar al-Hadits, 2006), Jilid XIV, Juz XXVIII, h. 351-359.

Dasar Pengambilan Hukum Al-Qur'an

إِنَّمَا جَزَّتُواْ ٱلَّذِينَ مُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُنَمَّواْ أَوْ تُنَفَّواْ مِنَ آلْأَرْضِ ۚ ذَالِكَ لَهُمْ يُصَلِّبُواْ أَوْ يُنفَواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri. Yang demikian itu suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS. Al-Maidah: 33)

Al-Sunnah

عَنْ دَيْلَمِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا بِأَرْضِ بَارِدَةِ نُعَالِجُ بِهَا عَمَلاً شَدِيدًا وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلاَدِنَا قَالَ هَلْ يُسْكِرُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاجْتَنِبُوهُ قَالَ ثُمَّ جِمْتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ هَلْ يُسْكِرُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاجْتَنِبُوهُ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَتُرُكُوهُ فَلْتُ إِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَتُرُكُوهُ فَاتُ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَاتُ إِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَتُرُكُوهُ فَاتُ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَتُرُكُوهُ فَاتُ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

"Dari Dailami Al-Himyari, ia berkata: "Aku bertanya kepada Rasulullah Saw.: "Ya Rasulallah, kami tinggal di negeri yang bersuhu udara dingin dan kami mengatasinya dengan cara kerja berat dan kami membuat minuman dari gandum ini untuk menambah kekuatan kami dalam bekerja dan mengatasi dinginnya suhu di negeri kami." Beliau Saw. menjawab: "Apakah menyebabkan mabuk?" Aku menjawab: "Ya." Beliau bersabda: "Jauhilah!" Kata Dailami: "Lalu aku mendekat tepat di hadapan beliau Saw., dan hal tersebut aku tanyakan kembali kepada beliau. Maka beliau menjawab: "Apakah memabukan?" Aku menjawab: "Ya." Sabda beliau: "Jauhilah!" Aku berkata: "Orang-orang tidak meninggalkannya." Beliau menjawab: "Jika mereka tidak meninggalkannya, maka perangilah mereka!" (HR. Ahmad, dan Abu Dawud)

Aqwal al-Ulama

1. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh¹⁶

Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, t. th.), Juz VII, h. 518.

وَمَنْ لَمْ يَنْدَفِعْ فَسَادُهُ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ بِالْقَتْلِ قُتِلَ، مِثْلُ الْمُفَرِّقِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَالدَّاعِي إِلَى الْبِدَعِ فِي الدِّيْنِ، ... وَأَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْ بِقَتْلِ رَجُلٍ تَعَمَّدَ عَلَيْهِ الْكَذِبَ، وَسَأَلَهُ دَيْلَمُ الْجِمْيَرِيِّ - فِيْمَا يَرْوِيْهِ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ - عَمَّنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنْ شُرْبِ الْحَمْرِ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ، الْجُمْرِيِّ الْمُسْنَدِ - عَمَّنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنْ شُرْبِ الْحَمْرِ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ، فَقَالَ: فَإِنْ لَمْ يَتُرُكُوهُ فَاقْتُلُوهُمْ. وَالْحُلاَصَةُ: أَنَّهُ يَجُورُ الْقَتْلُ سِيَاسَةً لِمُعْتَادِي الْإِجْرَامِ وَمُحْرِي أَمْنِ الدَّوْلَةِ وَخَوْهِمْ.

Barang siapa kejahatannya di muka bumi tidak bisa tercegah kecuali dengan hukuman mati, maka ia harus dihukum mati. Seperti pemecah belah persatuan muslimin, pengajak bid'ah agama ... dan Nabi Saw. pernah memerintah hukuman mati pada seorang lelaki yang segaja berbohong, Dailam al-Himyari pernah bertanya kepada beliau Saw. hadits riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya al-Musnad- tentang orang yang tidak mau berhenti minum arak, pada perintah beliau Saw. yang keempat, beliau Saw. bersabda: "Jika mereka tidak meninggalkannya, maka perangilah mereka!"

Kesimpulannya: Bahwa diperbolehkan menjatuhkan hukuman mati sebagai kebijakan bagi orang-orang yang biasa melakukan tindak kriminal, para pecandu minuman keras, para pengajak tindak kejahatan, pengganggu keamanan negara dan semisalnya.

437. Penetapan Nasab Berdasarkan Tes DNA

A. Pertanyaan

Apakah tes DNA bisa dimanfaatkan untuk dasar hukum dalam ilhaq al-Nasab sebagaimana al-Qiyafah?

B. Jawaban

Bisa untuk menafikan ilhaq al-Nasab, namun belum tentu bisa untuk menentukan ilhaq al-Nasab.

C. Dasar Pengambilan Hukum

Al-Sunnah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنَهَا قَالَتِ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِيْ عُلاَمٍ فَقَالَ سَعْدُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِيْ عُتْبَةَ بْنِ أَبِيْ وَقَاصٍ عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ انْظُوْ إِلَى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِيْ يَا رَسُولَ اللهِ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِيْ مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيْنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِيْ مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

"Dari Aisyah Ra. ia berkata: "Sa'ad bin Abi Waqqash dan Abd bin Zam'ah berselisih tentang seorang anak lelaki. Kata Sa'ad: "Ya Rasulallah, ini anak saudara laki-laki saya 'Utbah bin Abi Waqqash. Ia telah berpesan kepadaku bahwa bocah tersebut adalah anaknya. Lihatlah kemiripan bocah ini. Akan tetapi Abd bin Zam'ah berkata: "Bocah ini saudara laki-laki saya wahai Rasulallah, ia dilahirkan dari hubungan badan ayahku dengan budak wanitanya." Lalu Rasulullah Saw. meneliti kemiripannya, maka beliau melihat anak itu sangat mirip dengan 'Utbah, lalu beliau bersabda: "Anak ini saudaramu wahai Abd bin Zam'ah, seorang anak adalah milik orang yang berhubungan badan di tempat tidur, sedangkan bagi orang yang berzina mendapat kerugian, dan pakailah tirai darinya wahai Saudah binti Zam'ah. Sejak saat itu Saudah tidak pernah melihat anak itu lagi." (HR. Bukhari)

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ فَقَالَ أَلُمْ تَرَى أَنَّ مُجَزِّزًا فَظَرَ آنِفًا إِلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ هَذِهِ الْأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيحُ وَقَدْ رَوَى ابْنُ عُينْتَةَ هَذَا الحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةَ وَزَادَ فِيهِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ مُجَزِّزًا مَرَّ عَلَى زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ وَأُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ قَدْ غَطّيا كُوسَهُمَا وَيَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَهَكَذَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ رَبُوسَهُمَا وَيَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَهَكَذَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبُولِ الْعِلْمِ وَهَكَذَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُينَنَةَ هَذَا الْحُدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرُوةَ عَنْ عَرُواهُ الرَّعْمِ وَهَذَا الْحُدِيثِ فِي إِقَامَةٍ أَمْرِ الْقَافَةِ (رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ).

"Dari A'isyah Ra., ia berkata: "Sungguh Nabi Saw. mengunjunginya dengan keadaan suka cita, guratan kegembiraan nampak di wajah beliau. Lalu beliau bersabda: "Tidakkah kamu tadi melihat Mujazzir (seorang ahli nasab) memandang Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid, lalu berkata: "Kaki-kaki ini memiliki kesamaan antara satu dengan yang lain."

Abu Isa (Tirmidzi) berkata: "Ini merupakan hadits hasan shahih." Dan sungguh Ibn 'Uyainah meriwayatkan hadits ini dari al-Zuhri dari Urwah dari Aisyah, dengan tambahan: "Tidakkah kamu melihat Mujazzir melintas di depan Zaid bin Haritsah dan Usamah bin Zaid saat kepala mereka tertutup dan terlihat kakinya. Lalu ia berkata: "Sesungguhnya kaki-kaki ini memiliki

kesamaan antara satu dengan yang lain."

Demikianlah Sa'id bin Abdirrahman dan lebih dari seorang perawi menceritakan hadits ini kepada kami, dari Sufyan bin Uyaynah, dari al-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Dan ini merupakan hadis shahih, sebagian ulama telah menjadikan hadits ini sebagai hujjah dalam masalah qiyafah. (HR. Tirmidzi)

Aqwal al-Ulama

1. Tharaiq al-Hukm fi al-Syar'iyah al-Islamiyah¹⁷

وَقَدْ تَكُوْنُ نَتَاثِبُ التَّحْلِيْلاَتِ مُفِيْدَةٌ إِلاَّ أَنَّ الْقَطْعَ بِدِقَّتِهَا وَصِحَّتِهَا مَوْضُوعُ نَظَرٍ لِأَنَّ تَشَابُهَ فَصَائِلَ الدَّمِ بَيْنَ شَخْصٍ وَآخَرَ أَمْرٌ وَارِدٌ مَعَ إِمْكَانِيَّةِ خَطَلُ التَّحَالِيْلِ وَتَزْوِيْرِهَا، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ الْإِسْتِعَانَةَ بِهَذِهِ الْقَرِيْنَةِ فِي النَّفْي وَلَيْسَتْ فِي الْإِثْبَاتِ.

Terkadang hasil penelitian laborat bisa memberi manfaat, hanya saja detail dan kebenaran secara pasti masih menjadi bahan diskusi, dikarenakan kemiripan golongan darah antara seseorang dengan orang lain merupakan hal yang bisa saja terjadi, di samping masih terbukanya kemungkinan kesalahan hasil analisa laborat dan terjadinya pemalsuan. Oleh karena itu penggunaan sarana ini hanya untuk meniadakan hubungan garis keturunan saja, dan tidak untuk digunakan dalam menetapkan hubungan garis keturunan (nasab).

2. Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh18

فَأَقْصَى الْإِمْكَانِ فِيْ ذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَقِدًا قَبُولَ قَوْلِ الْقَائِفِ لَعَدَّهُ مِنَ الزَّجْرِ وَالْفَأْلِ وَالْحُدْسِ وَالتَّخْمِيْنِ، وَلَمَا أَبْعَدَ أَنْ يُخْطِئَ فِي مَوَاضِعَ وَإِنْ أَصَابَ فِيْ مَوَاضِعَ، فَإِذَا تَرَكَهُ وَلَمْ يَرُدَّهُ كَانَ الْكَلاَمُ عَلَى الْأَنْسَابِ بِطَرِيْقِ الْقِيَافَةِ، فَهَذَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ قَدْ يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَنَدُ الْأَنْسَابِ، فَهَذَا هُوَ الْمُمْكِنُ فِيْ ذَلِكَ.

Kemungkinan paling maksimal dalam hal tersebut adalah bahwa andaikan Rasulullah Saw. tidak meyakini informasi ahli nasab, tentu beliau menganggapnya sebagai larangan, asumsi, perkiraan, dan taksiran, dan tentu akan sering dalam tidak tepat dalam beberapa kesempatan, meski bisa tepat dalam kesempatan lain. Maka ketika beliau Saw. membiarkan dan tidak menolaknya, maka pembahasan

¹⁷ Shalih Ali Nashir, dkk, Tharaiq al-Hukm fi al-Syar'iyah al-Islamiyah, h. 350.

¹⁸ Abdul Malik al-Juwaini/Imam Haramain, al-Burhan fi Ushul al-Fiqh, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997) h. 188.

tentang nasab itu berdasarkan teori qiyafah. Maka penerimaan ahli nasab dari kajian tersebut bisa menunjukkan, bahwa qiyafah adalah dasar penentuan nasab, dan demikian yang mungkin dalam masalah tersebut.

3. Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syari'ah19

وَالْمَقْصُوْدُ أَنَّ أَهْلَ الْقِيَافَةِ كَأَهْلِ الْخِبْرَةِ وَأَهْلِ الْحَرْضِ وَالْقَاسِمِيْنَ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ اعْتِمَادُهُمْ عَلَى الْأُمُوْرِ الْمُشَاهَدَةِ الْمَرْئِيَّةِ لَهُمْ وَلَهُمْ فِيْهَا عَلاَمَاتُ يَخْتَصُّوْنَ بِمَعْرِفَتِهَا مِنَ التَّمَاتُلِ عَلَى الْأُمُوْرِ الْمُشَاهَدَةِ الْمِلاَلِ فَيَرَاهُ مِنْ وَلِكَ النَّاسُ يَجْتَمِعُوْنَ لِرُؤْيَةِ الْهِلاَلِ فَيَرَاهُ مِنْ بَيْنِهِمْ الْوَاحِدُ وَالْإِثْنَانِ فَيُحْكَمُ بِقَوْلِهِ أَوْ قَوْلِهِمَا دُوْنَ بَقِيَّةِ الْجَمْعِ.

Yang dimaksud adalah sungguh ahli qiyafah itu seperti pakar bidang tertentu, juru taksir, juru pembagi, dan semisalnya dari orangorang yang berpedoman pada perkara yang bersifat kasat mata dan bisa dilihat mereka. Dalam hal tersebut mereka memiliki tanda-tanda yang secara khusus diketahui mereka, yaitu kemiripan, perbedaan, taksiran, dan ukuran luas. Yang lebih mendalam dari hal itu adalah orang-orang yang berkumpul untuk melihat hilal, ketika satu atau dua orang di antara mereka melihatnya, maka diputuskan dengan informasi satu atau dua orang tadi, tanpa informasi dari selainnya.

4. Takmilah al-Majmu'20

عَلَى أَنَّ أَسْبَابَ الْمَعْرِفَةِ فِي رَمَنِنَا هَذَا قَدِ اتَّسَعَتْ آفَاقُهَا وَاسْتَقَرَّتْ قَوَاعِدُهَا عَلَى أَسْبَابِ أَدَقَ وَمَبَادِئَ أَضْبَطَ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ قَطْعِيَّةِ فِي أَكْثَرِ أَحْوَالِهَا، وَقَدْ يَأْخُذُ الْعِلْمُ الحَّدِيْثُ إِلْقِيَافَةِ حَيْثُ يَعْجِزُ التَّحْلِيْلُ الطِّيِّيُ، وَالْقِيَافَةُ أَحَدُ فُرُوْعِ الطِّبِ الشَّرْعِيِ أَوْهِي الْأَسَاسُ الْفَعْلِيُّ لِلطِّبِ الشَّرْعِيِ وَمَنْ قَرَأَ كُتُبَ الطِّبِ الشَّرْعِيِ الْعَرَبِيَّةِ أَوِ الْأَجْنَبِيَّةِ يَتَّضِحُ لَهُ صِحَّةُ الْفَعْلِيُ لِلطِّبِ الشَّرْعِي وَمَنْ قَرَأَ كُتُبَ الطِّبِ الشَّرْعِي الْعَرَبِيَّةِ أَو الْأَجْنَبِيَّةِ يَتَّضِحُ لَهُ صِحَّةُ هَذَا الْحُصْمِ ... وَيُلاَحَظُ أَنَّ قِيَافَةَ الدَّمِ هُنَا وَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً عَلَى أَسَاسٍ عِلْمِي إِلاَّ أَنَهَا مَذَا الْحُصْمِ ... وَيُلاَحَظُ أَنَّ قِيَافَةَ الدَّمِ هُنَا وَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً عَلَى أَسَاسٍ عِلْمِي إِلاَّ أَنَّهَا مَلَا يَتُو مُنَا وَلِا نَسْتَطِيْعُ أَنْ تَقُولُ هَذَا أَبُ لِأَنَّهُ مَنَا وَلِنْ كَانَتْ قَائِمَةً عَلَى أَسَاسٍ عِلْمِي إِلاَّ أَنَّهَا سَلَبِيَّةُ وَلَيْسَتُ إِيْجَابِيَّةً، فَهِي تَقُولُ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ أَبًا وَلاَ نَسْتَطِيْعُ أَنْ تَقُولُ هَذَا أَبُ لِأَنَّهُ فَلَى الْمَاتُ وَلاَ اللَّهُ عَلَى أَلْهُ الْعَلَمُ الْمَاتِ الْفَعْلِي فَي اللَّهُ عَلَى الْمُلَامِ الْمُدَّعِي الْمَالُ وَلَا أَنْ الْمَدُ عَلَى الْمُلَوْلِ الْفَعْلِعِ بِأَنْ فَعُلْ إِلْقَطِع بِأَنَ الْمُقَامِ الْمُوالِ الْمُدَّعِي الْمُتَالِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِي الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعَلِي الْمُحَدِّلُ الْمُعْلِقُ الْمُلِي الْمُدَعِي الْمُولِ الْمُتَالِقُ الْمُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِي الْمُولِ الْمُلْحِلُ الْمُولِ الْمُ الْمُ الْمُنَافِي الْمُلْتِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُنَافِي الْمُعَلِي الْمُؤْمِ الْ

¹⁹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syari'ah, (Kairo: Dar al-Hadits, 2000), h. 139.

²⁰ Bahkit al-Muti'i, Takmilah al-Majmu', (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid XV, h. 311-312.

هَذَا لَيْسَ أَبَاهُ وَلَكِنْ لَوْ كَانَتْ فَصِيْلَتُهُ مِنْ فَصِيْلَةِ الطِّفْلِ قَالُوْا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ أَبَاهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ أَبُوهُ غَيْرَهُ عَلَى أَنَّ أَحْسَنَ الْقِيَافَةِ التَّعَرُّفُ عَنْ طَرِيْقِ الأَطْرَافِ كَالْأَيْدِي وَالْأَرْجُلِ وَمَلاَمِحِ الْوَجْهِ

Berdasarkan pada sebab-sebab mengetahui (nasab seseorang) pada zaman kita ini telah begitu luas dan kaidah-kaidahnya berpijak pada sebab-sebab yang lebih detail dan dasar-dasar yang lebih kokoh, sekalipun pada sebagian kasus tidak bisa memberikan hasil pasti. Terkadang ilmu modern menggunakan teori qiyafah ketika penelitian medis tidak memberikan hasil. Qiyafah merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran syar'i, atau merupakan landasan nyata kedokteran syar'i. Bagi orang yang membaca buku-buku kedokteran syar'i yang berbahasa Arab atau selain Arab, maka ia akan mendapat kejelasan tentang keabsahan hukum penentuan nasab berdasar pendapat pakar qiyafah ini ...

Dan perlu perhatikan, bahwa penelitian sempel darah di sini, meski berpijak pada dasar-dasar ilmiah, akan tetapi sifatnya hanya untuk menafikan hubungan darah, bukan untuk menetapkannya. Ia hanya dapat menyatakan: "Ini bukan bapaknya.", dan tidak dapat menyatakan: "Ini bapaknya." Sebab, terkadang seorang bapak punya golongan darah (yang bersambung dengan golongan darah) anak yang diklaim sebagai anak orang lain, namun hal ini bisa dimentahkan. Maka si pendakwa berkata: "Jika golongan darah si anak adalah O, sedangkan golongan darah ayah yang didakwa (bukan sebagai bapaknya) adalah AB dan si ibu adalah B, maka para ahli medis menghukumi secara pasti bahwa orang ini bukan ayah bagi anak tersebut. Namun jika golongan darahnya sama dengan golongan darah si anak, maka para ahli medis menyatakan: "Kemungkinan dia adalah bapaknya, dan kemungkinan bapaknya adalah orang lain." berdasarkan pada qiyafah yang paling bagus, yaitu mengenali bagian-bagian anggota tubuh semisal kedua tangan, kaki, dan ciri-ciri wajah.

5. Takmilah al-Majmu'²¹

وَلَنَا أَنَّهُ يُمْكِنُ الاسْتِعَانَةُ بِالطِّبِ الشَّرْعِيِّ فِيْ تَحْلِيْلِ فَصَائِلِ دَم كُلِّ مِنَ الرَّجُلَيْنِ وَالْأُمِّ، فَإِنْ تَشَابَهَتْ فَصَائِلُ الدَّمِ عِنْدَهُمَا أَخَذَ بِالْقَافَةِ

²¹ Bahith al-Muti'i, *Takmilah al-Majmu'*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid XVII, h. 410.

Bagi kita madzhab Syafi'iyah (dalam kasus dua orang lelaki menikahi dua perempuan bersaudara, lalu tertukar dalam berhubungan badan pada masa sucinya dari haid, dan si perempuan melahirkan anak yang mungkin berasal dari dua lelaki itu, dalam penentuan nasab anak itu), sungguh bisa memakai kedokteran syar'i untuk menganalisa golongan darah dua lelaki (si suami dan si lelaki lain) tersebut dan si ibu. Jika terjadi kekaburan golongan darah bagi kedua lelaki itu, maka digunakan teori qiyafah.

6. Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'22

... فَإِنَّ الشَّرْعَ وَرَدَ بِقَبُولِ قَوْلِ الْقَائِفِ فِي النَّسَبِ فَإِنَّهُ رُوِي أَنَّ قَائِفًا مَرَّ بِأَسَامَةً وَرَيْدٍ وَهُمَا تَخْتَ قَطِيْفَةٍ وَاحِدَةٍ قَدْ غَطَى وُجُوهُهُمَا وَأَرْجُلُهُمَا بَادِيَةٌ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ يُسْبِهُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَسَمِع رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلاَمُ وَلَا الْقَائِفِ حَيْثُ لَمْ يَرُو عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَوْلَ الْقَائِفِ حَيْثُ لَمْ يَرُو عَلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قَوْلَ الْقَائِفِ حَيْثُ لَمْ يَرُو عَلَيْهِ بَلَ السَّحَامَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ رُوِي أَنَّهُ وَقَعَتْ هَذِهِ الْحَادِثَةُ فِي رَمِّي سَيِدِنَا عُمَرَ ﴿ فَهُ فَكَتَبَ إِلَى شُرَيْحِ لَبَسًا فَلُبِسَ عَلَيْهِمَا وَلُو بَيَنَا لَئِينَ لَهُمَا الْحَادِثَةُ فِي رَمِي سَيِدِنَا عُمَرَ ﴿ فَهُ فَكَتَبَ إِلَى شُرَيْحِ لَبَسُا فَلُبِسَ عَلَيْهِمَا وَلُو بَيَنَا لَئِينَ لَهُمَا الْحَادِثَةُ فِي رَمِي سَيِدِنَا عُمَرَ ﴿ فَهُ فَكَتَبَ إِلَى شُرَيْحِ لَبَسًا فَلُبِسَ عَلَيْهِمَا وَلُو بَيَنَا لَئِينَ لَهُمَا الْحَيْفِ وَكُلُ فَلِكَ بِمَحْضِرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْقُلُ أَنَّهُ أَلْفَى وَلَى الْمَالِكُونَ وَلَمْ يُنْقُلُ أَنَّهُ أَنْهُ الْمَقِولَ اللّهَ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَمْ يُنْفُلُ أَنَّهُ لَمْ يَصَدُولُ اللهَاعِي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَلَا الْقَائِفُ ذَلِكُ وَلِي الْفَائِقَ فَلَمُ الْمَامَة عَلَى الْمَعْنُونَ فِي فَسَبِ أَسَامَة ﴿ وَلَمْ الْمُعَنُونَ فِي الْمَعْنُونَ فِي فَاللّهُ وَلَا اللّهِ عَنْهُ وَلِهُ الْمَعْنُونَ فِي فَسَبِ أَسَامَة عَلَى الْمُعَنُونَ فِي فَلَى الْمَعْنُونَ فِي فَسَبِ أَسَامَة عَلَى الْمُعَنَونَ الْمَعْمُونَ فِي فَلَى اللّهُ وَلَهُ الْمَعْنُونَ فِي فَسَبِ أَسَامَة عَنْ وَلَا اللّهُ عَلْمَ الْمَالِقَ وَلَمْ فَرَحُ اللّهِ عَلْمَ فَرَالُ فَرَحُهُ فِي الْمُعَنُونَ فِي الْمُعَنُونَ فِي فَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ الْمَالِمُ وَلَالْمُ وَلَوْلُ الْمَالِقُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَلْ الْمَالِمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

(Dalam kasus budak perempuan yang dimiliki dua orang lelaki, lalu melahirkan anak dan kedua pemilik mengklaimnya sebagai anak darinya, maka menurut madzhab Hanafi anak itu adalah anak kedua

Mahmud bin Ahmad al-Kasani, Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syarai', (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1978), Jilid IV, h. 58-59.

mereka berdua dan si ibu menjadi umm al-mustauladahnya. Sedangkan menurut Menurut Imam Syafi'i, anak itu adalah hanya anak salah satu dari mereka). Karena sungguh syariat menerima pendapat seorang pakar qiyafah dalam menentukan nasab. Sebab diriwayatkan, seorang ahli qiyafah lewat di depan Usamah dan Zaid ketika keduanya berada di bawah selendang bersabut yang menutupi wajah mereka, sementara kaki mereka terlihat. Lalu ahli qiyafah itu berkata: "Kaki-kaki ini memiliki kemiripan antara satu dengan yang lain." Ketika mendengar hal itu Rasulullah Saw. bergembira sehingga terlihat keceriaan tersimpul di wajahnya. Maka Rasulullah Saw. mengakui pendapat ahli qiyafah, karena beliau tidak membantahnya, bahkan beliau tetapkan dengan memperlihatkan kegembiraannya.

Dan kita (madzhab Hanafiyah) memiliki dalil *ijma'* sahabat. Sebab diriwayatkan, bahwa peristiwa tersebut pernah terjadi di masa Khalifah Umar bin al-Khatththab Ra. Lalu beliau menulis surat pada Syuraikh yang berisi: "Mereka berdua telah membuat samar (kasus ini), maka samarkan (kasus ini) bagi mereka. Anak itu adalah anak mereka, dia mewarisi (harta) mereka dan mereka mewarisinya." Peristiwa itu dihadiri para sahabat dan tidak dikutip ada seseorang yang mengingkarinya, maka menjadi *ijma'*. Mengingat sebab hak nasab anak tersebut adalah berdasarkan hukum asal kepemilikan (atas ibunya), dan kepemilikan itu ada pada mereka berdua. Maka dengan kadar kepemilikan tersebut, bagian *nasab*nya menjadi tetap, lalu menjalar (ke keseluruhan anak tersebut) karena darurat nasab tidak bisa dibagi-bagi. Maka tetaplah nasab anak itu dari masing-masing mereka berdua secara sempurna.

Adapun kegembiran Nabi Saw. dan tidak adanya bantahan dan pengingkaran dari beliau, maka kemungkinan bukan karena beliau menerima informasi ahli qiyafah sebagai hujjah, namun karena hal lain, yaitu orang-orang kafir mencela nasab Usamah Ra. dan mereka meyakini metode qiyafah. Ketika seorang ahli qiyafah menyatakan hal tersebut, maka gembiralah Rasulullah Saw. karena nampak sudah kesalahan pendapat mereka berdasar metode yang menjadi hujjah menurut mereka. Maka kegembiraan beliau pada hakekatnya disebabkan hilangnya celaan mereka pada Usamah karena metode yang menjadi dalil hilangnya celaan menurut mereka sendiri. Dan riwayat yang bersifat kemungkinan tidak layak dijadikan hujjah.

7. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah23

الحُتَابِلَةُ قَالُوا يُشْتَرَطُ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِوَضْعِ الْحَمْلِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ ... وَالْمُرَادُ بِالْقَافَةِ مَنْ لَهُمْ خِبْرَةٌ بِشِبْهِ الْوَلَدِ بِأَبِيْهِ، هَذَا مَا قَالَهُ الْفُقَهَاءُ وَلَعَلَّهُ يَقُوْمُ مَقَامَهُ فِيْ زَمَانِنَا تَحْلِيْلُ الدَّمِ لَهُمْ خِبْرَةٌ بِشِبْهِ الْوَلَدِ بِأَبِيْهِ، هَذَا مَا قَالَهُ الْفُقَهَاءُ وَلَعَلَّهُ يَقُوْمُ مَقَامَهُ فِيْ زَمَانِنَا تَحْلِيْلُ الدَّمِ فَإِذَا أَمْكُنْ حَسَنًا وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فَإِذَا أَمْدِهِ فَإِنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِمَلاَثِ حَيْضٍ مَعْدِ فَلَى أَيْ حَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِمَلاَثِ حَيْضٍ بَعْدَ وَضْعِهِ عَلَى أَي حَالٍ.

Ulama madzhab Hanabilah berpendapat, dalam habisnya masa iddah dengan melahirkan bayi disyaratkan tiga hal: ...

Dan maksud ahli qiyafah yaitu orang yang mempunyai keahlian mengidentifikasi kemiripan anak dengan bapaknya. Ini adalah yang dikatakan para Fuqaha. Barangkali di masa kita sekarang ini tes darah bisa menggantikannya. Maka jika dimungkinkan mengetahui golongan darah anak dari golongan darah sang bapak, maka bagus. Dan jika tidak bisa diketahui kemiripannya dengan salah satu dari kedua lelaki yang bersetubuh dengan ibunya (dalam kasus seorang wanita yang menikah di masa 'iddah dan melahirkan seorang anak yang mungkin dinisbatkan pada kedua lelaki itu), atau pendapat para ahli qiyafah berbeda dalam kasus ini, maka bagaimanapun si ibu harus menjalani masa 'iddah selama masa tiga kali haid, terhitung setelah melahirkan.

438. Melegalkan Lokalisasi Pelacuran

A. Pertanyaan

Bagaimana hukumnya melegalkan lokalisasi sebagai upaya taghyir al-Munkarat atas PSK, penjudi, pemabok, gay dan sebagainya?

B. Jawaban

Hukumnya haram, karena:

- 1. Melegalkan lokalisasi tersebut bukan *taghyir al-munkarat*, bahkan membenarkan, menolong dan melestarikan kemaksiatan.
- Upaya taghyir al-munkarat justru dengan cara penutupan tempattempat maksiat dan memberikan hukuman kepada para pelakunya.

C. Dasar Pengambilan Hukum

²³ Abdurrahman al-Juzairi, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid IV, h. 461.

قُلْ تَعَالَوْا أَتَّلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنتًا وَلَا تَقْتُلُوا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَلَا تَقْرَبُوا ٱلْفَوْحِشَ وَلِاللهُمْ وَلا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَا بِٱلْحَقِ وَلا تَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَا بِٱلْحَقِ وَاللهُ وَصَلَيْحُم بِهِ لَعَلَيْمٌ تَعْقِلُونَ
وَضَلَيْمُ بِهِ لَعَلَيْمٌ تَعْقِلُونَ
وَضَلَكُم بِهِ لَعَلَيْمٌ تَعْقِلُونَ
وَصَلَيْمُ بِهِ لَعَلَيْمٌ تَعْقِلُونَ
وَصَلَيْمُ بِهِ لَعَلَيْمٌ تَعْقِلُونَ
وَصَلَيْمُ بِهِ لَعَلَيْمٌ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

"Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat buiklah terhadap kedua orang tua, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan sesuatu yang benar". Demikian tu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami." (QS. Al-An'am: 151)

"Dan janganlah kalian mendekati zina, sungguh zina adalah perbuatan keji. Dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra': 32)

"Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. al-Maidah: 2)

Al-Sunnah

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيَقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"Aku (Abu Sa'id) mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia mengubahnya dengan tangannya, lalu jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya, lalu jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu adalah iman terlemah." (HR. Muslim)

Aqwal al-Ulama

1. Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim24

﴿ وَلاَ تَقْرَبُوا الْفُوَاحِشَ أَيْ الزِنَا وَالْجُمْعُ إِمَّا لِلْمُبَالَغَةِ أَوْ بِاغْتِبَارِ تَعَدُّدِ مَنْ يَصْدُرُ عَنْهُ أَوْ لِلْمُبَالَغَةِ أَوْ بِاغْتِبَارِ تَعَدُّدِ مَنْ يَصْدُرُ عَنْهُ أَوْ لِلْفَصْدِ إِلَى النَّهْ عِنْ الْأَنْوَاعِ وَلِذَا أَبْدَلَ مِنْهَا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ ﴿ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ أَوْ لِللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى سِرًّا بِاتِّخَاذِ أَيْ مَا يُفْعَلُ مِنْهَا عَلاَنِيَةً فِي الْحُوانِيْتِ كَمَا هُو دَأْبُ أَرَافِلِهِمْ وَمَا يُفْعَلُ سِرًّا بِاتِّخَاذِ أَنْ مَا يُفْعَلُ سِرًّا بِالتِّخَاذِ اللَّهُ مِنْ الْمِنْ عَبَّاسٍ وَالطَّبَحَاكِ وَاللَّهُ مِنْ وَمِن الْمُوادِيقِ مُنْ الْمُوادِيقِ مُنْ الْمُوادِيقِ مُنْ الْمُوادِيقِ مُلْهُمَا اللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لِللَّهُ مِنْ الْمُوادُ بِهَا الْمُعَاضِي كُلُّهَا.

"Janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji.", maksudnya zina. Sedangkan pemakaian kata jama' bisa saja untuk mengungkapkan betapa kejinya perbuatan itu, atau karena begitu banyak orang yang melakukannya, atau untuk mencegah berbagai macamnya. Oleh sebab itu maka dibuat badal darinya Firman Allah: "Baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi.", yakni yang dilakukan secara terang-terangan di warung-warung sebagaimana menjadi ciri orang-orang yang bejat moralnya, ataupun dilakukan secara tersembunyi dengan menjadikannya sebagai teman, seperti kebiasaan kaum terhormat. Tafsir tersebut diriwayatkan dari Ibn Abbas, al-Dhahhaq, al-Suddi. Pendapat lain menyatakan, yang dimaksud adalah semua maksiat.

2. Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam 25

يَخْتَلِفُ وَزُنُ وَسَائِلِ الْمُخَالَفَاتِ بِاخْتِلاَفِ رَذَائِلِ الْمَقَاصِدِ وَمَفَاسِدِهَا، فَالْوَسِيْلَةُ إِلَى أَرْذَلِ الْمَقَاصِدِ أَرْذَلُ مِنْ سَائِرِ الْوَسَائِلِ. فَالتَّوَسُّلُ إِلَى الْجَهْلِ بِذَاتِ اللهِ وَصِفَاتِهِ أَرْذَلُ مِنَ التَّوَسُّلِ إِلَى الْجَهْلِ بِذَاتِ اللهِ وَصِفَاتِهِ أَرْذَلُ مِنَ التَّوَسُّلِ إِلَى الْجَهْلِ إِلَى الْقَوْسُلِ إِلَى الزِّنَا وَالتَّوَسُّلُ إِلَى الزِّنَا أَقْبَعُ إِلَى الْقَوْسُ إِلَى الْقَوْسُ إِلَى الْقَوْسُ إِلَى الزِّنَا وَالتَّوَسُّلِ إِلَى الزِّنَا وَالتَّوسُّلُ إِلَى الْقَرْبُ مِنَ التَّوسُلُ إِلَى الْقَوْسُ إِلَى الْقَوْسُ فِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ ... مِنَ التَوسُلُ إِلَى الْمَاطِلِ، وَالْإِعَانَةُ إِلَى الْقَوْلِ بِالْإِمْسَاكِ أَقْبَحُ مِنَ الدِلاَلَةِ عَلَيْهِ ... وَكُلَّمَا فَوِيَتِ الْوَسِيْلَةُ فِي الْآذَاءِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ كَانَ إِثْمُهَا أَعْظَمُ مِنْ إِثْمِ مَا نَقَصَ عَنْهَا

Bobot beberapa wasilah (perantara) tindakan yang bertentangan dengan syari'ah itu berbeda-beda sebab perbedaaan kehinaan tujuan dan bahayanya. Maka perantara tujuan yang paling hina merupakan

²⁴ Mahmud al-Alusi, Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Jilid V, h. 80-81.

²⁵ Izzuddin Ibn Abdissalam, Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, (Kairo: Dar al-Syarq, 1968), Jilid I, h. 126-127.

perantara paling hina dari pada perantara-perantara lainnya. Oleh sebab itu, perantara ketidaktahuan tentang dzat dan sifat Allah lebih hina dari pada perantara ketidaktahuan tentang hukum-hukumNya. Perantara pembunuhan lebih hina dari pada perantara perzinaan. Perantara perzinaan lebih hina dari pada perantara makan dengan jalan yang tidak benar. Menolong pembunuhan dengan mencegah makan dan minum lebih jahat dari pada menunjukkan pembunuhan ... Dan semakin kuat suatu perantara dalam mengantarkan pada suatu bahaya, maka dosanya lebih besar dari pada dosa pengantar bahaya yang lebih rendah darinya.

3. Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami²⁶

وَالتَّغْيِيْرُ لاَ يَكُوْنُ إِلاَّ فِي الْمَعَاصِي الَّتِيْ تَقْبَلُ بِطَبِيْعَتِهَا التَّفْسِيْرَ الْمَادِّى. أَمَّا مَعَاصِي اللِّسَانِ وَالْقَلْبِ فَلَيْسَ فِي الْإِسْتِطَاعَةِ تَغْيِيْرُهَا مَادِّيًا، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَعْصِيَّةٍ تَقْتَصِرُ عَلَى نَفْسِ العَاصِي وَجَوَارِحِهِ الْبَاطِنَةِ.

Dan usaha mengubah kemaksiatan hanya bisa dilakukan pada maksiat yang secara alamiah bisa ditafsirkan secara fisik. Adapun perbuatan maksiat lisan dan hati maka secara fisik tidak mampu diubah. Begitu pula setiap maksiat yang hanya ada di diri dan batin dan hati pelaku maksiat.

4. Ahkam al-Sulthaniyah²⁷

(فَصْلُ) وَأَمَّا الْمُعَامَلَاتُ الْمُنْكَرَةُ كَالزِّنَا وَالْبُيُوْعِ الْفَاسِدَةِ وَمَا مَنَعَ الشَّرْعُ مِنْهُ مَعَ تَرَاضِي الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِهِ إِذَا كَانَ مُتَّفَقًا عَلَى حَظرِهِ فَعَلَى وَالِي الْحِسْبَةِ إِنْكَارُهُ وَالْمَنْعُ مِنْهُ وَالزَّجْرُ عَلَيْهِ. وَأَمْرُهُ فِي التَّأْدِيْبِ مُخْتَلِفٌ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ وَشِدَّةِ الْحَظر.

Adapun perbuatan-perbuatan munkar seperti zina, berbagai jual beli yang rusak, dan yang dilarang syari'ah disertai persetujuan dua pelakunya, jika perbuatan itu menurut kesepakatan ulama adalah haram, maka wali al-hisbah (pihak berwajib) harus mengingkari dan melarangnya. Kebijakan hukumannya berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan tingkat bahayanya.

5. Ihya 'Ulum al-Din²⁸

²⁶ Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), Jilid I, h. 506.

²⁷ Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 25-6), h. 253.

الرُّكْنُ الرَّابِعُ نَفْسُ الاِخْتِسَابِ، وَلَهُ دَرَجَاتُ وَآدَابُ، أَمَّا الدَّرَجَاتُ فَأَوَّلُهَا التَّعَرُفُ، ثُمَّ التَّغْرِيْفُ، ثَمَّ التَّغْنِيْفُ، ثُمَّ التَّغْنِيْفُ، ثُمَّ التَّغْنِيْفُ، ثُمَّ التَّغْنِيْفُ، ثُمَّ التَّغْنِيْفُ، ثُمَّ السَّلَاجِ، ثُمَّ الاِسْتِظْهَارُ فِيْهِ التَّهْدِيْدُ بِالضَّرْبِ، ثُمَّ الاِسْتِظْهَارُ فِيْهِ التَّهْدِيْدُ بِالضَّرْبِ، ثُمَّ الاِسْتِظْهَارُ فِيْهِ بِالْأَعْوَانِ وَجَمْعِ الْجُنُوْدِ.

Rukun (hisbah/amr al-ma'ruf nahi al-Munkar) yang keempat adalah proses hisbah itu sendiri. Proses hisbah memiliki beberapa tingkatan dan etika. Pertama mencari kemunkaran, lalu memberitahukannya (pada pelakunya), mencegah, memberikan wejangan dan nasehat, mencerca dan berkata dengan kasar, merubahnya dengan kekuatan, mengancam dengan pukulan, membuktikan ancamannya dan benarbenar memukul, menghunus senjata, kemudian berupaya meraih kesuksesan dalam hisbah dengan meminta bantuan pertolongan dan bala tentara.

Ditetapkan di: Boyolali - Solo

Pada tanggal: 18 Syawal 1426 H / 1 Desember 2004 M

PIMPINAN SIDANG PLENO KOMISI BAHTSUL MASAIL DINIYYAH WAQI'IYYAH

ttd

ttd

KH. Dr. Muh Masyhuri Na'im, MA	KH. Abd. Aziz Masyhuri		
. Ketua	Ketua		
L.A	L.J		

KH. Prof. Dr. Said Aqil Al-Munawwar	KH. Arwani Faishal
Ketua	Sekretaris
Tim Perumus	
Ketua, merangkap anggota	
KH. Dr. Muh. Masyhuri Na'im, MA	(PBNU)
Ketua, merangkap anggota	
KH. Abd. Aziz Masyhuri	(PBNU)

²⁸ Abu Hamid al-Ghazali, *Inya' 'Ulum al-Din*, (Mesir: Musthafa al-Halabi, 1939), Jilid II, h. 324.

Sekretaris, merangkap anggota

KH. Arwani Faishal (PBNU)

Wk. Sekretaris, merangkap anggota

KH. Romadlon Chotib (PWNU JATIM)

Anggota

1.	KH. A. Aminuddin Ibrahim, LML		(PWNU BANTEN)
2.	KH. Ahmad Yasin Asmuni		(PWNU JATIM)
3.	KH. Farihin Muhson		(PWNU JATIM)
4.	KH. Asep Burhanuddin		(PWNU JABAR)
5.	KH. Ahmad Ishomuddin, MA	4	(PWNU LAMPUNG)
6.	KH. Soni Goloman Nasution		(PWNU SUMSEL)
7.	KH. Drs. H.M. Shoim Faishol, MA		(PWNU NTB)

8. KH. Prof. Dr. H. Sa'id Mahmud, Lc, MA. (PWNU SULSEL)

(PWNU DIY) 9. KH. Maimun Murdi, Lc.

KEPUTUSAN KOMISI BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH AL-WAQI'IYYAH MUNAS ALIM ULAMA & KONBES NU Di Asrama Haji Sukolilo Surabaya Tanggal 27 – 30 Juli 2006

439. Meresmikan Tempat Ibadah Agama Non Muslim 440. Daur Ulang Air Mutanajjis 441. Tanggungjawab Pihak Asuransi atas Sisa Kredit Rumah 442. Masa Tangguh Atas Suami yang Hilang Beritanya 443. Asas Pembuktian Terbalik

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NOMOR: 01/MUNAS/VII/2006 TENTANG BAHTSUL MASA'IL DINIYYAH WAQI'IYAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA

Menimbang: a.

- a. Bahwa menjadi tugas Muktamar sebagai instansi tertinggi dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk membahas masalah-masalah yang berkembang di masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat agar dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;
- b. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Perkumpulan atau Jam'iyyah Diniyyah Islamiyyah yang bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat dan berbagai bidang yang mengarah kepada terbentuknya khaira ummah, perlu secara terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas khidmahnya dengan berdasarkan ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat;
- Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, Musyawarah Nasional perlu menetapkan Hasil Bahtsul Masail Diniyyah Waqi'iyah;

Mengingat

- Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor 002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas Alim Ulama Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926;
- b. Keputusan Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Nomor: 137a/A.II.3/7/2006 tentang Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional Pasal 8 dan pasal 5 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama.

- Memperhatikan : a. Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama tanggal tanggal 3 Rajab 1427 H/28 Juli 2006 M;
 - Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi Waqi'iyyah yang disampaikan pada Sidang Pleno Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada tanggal 2-5 Rajab 1427 H/ 27-30 Juli 2006 M;
 - c. Ittifak Sidang Pleno Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada tanggal 2-5 Rajab 1427 H/ 27-30 Juli 2006 M;

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridha Allah Swt.:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA TENTANG BAHTSUL MASAIL DINIYYAH WAQI'IYAH;

Pasal 1 Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Hasil-Hasil Bahtsul Masail Diniyyah Waqi'iyah sebagai pedoman dalam memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat, dan mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;

Pasal 2 Mengamanatkan kepada Pengurus dan warga Nahdlatul Ulama untuk mentaati segala Hasil-Hasil Bahtsul Masail Diniyyah Waqi'iyah ini;

Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 5 Rajab 1427H/30 Juli 2006 M

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA PIMPINAN SIDANG PLENO

. ttd ttd

Drs. KH. A. Hafizh Utsman
Ketua

Drs. H. Masrur Ainun Najih
Sekretaris

439. Meresmikan Tempat Ibadah Agama Non Muslim

A. Deskripsi Masalah

Dalam kehidupan keberagamaan yang heterogen sikap tasamuh (toleran) antar umat beragama menjadi sebuah keniscayaan. Islam pun menghargai nilai-nilai toleransi terhadap pemeluk agama lain dalam koridor dan batas yang telah ditentukan.

Akan tetapi, umat Islam tetap wajib menjaga serta memelihara keutuhan iman tanpa tercemari keyakinan agama lain, terkait dengan keyakinan yang secara jelas bertentangan dengan Islam dan tergolong tindak kekufuran dan kemusyrikan.

B. Pertanyaan

Bagaimanakah hukum seorang muslim meresmikan tempat ibadah agama lain?

C. Jawaban

Meresmikan tempat ibadah agama lain pada dasarnya adalah haram. Bahkan bisa menjadi kufur bila disertai *ridha* terhadap kekufuran. Kecuali bagi seorang muslim yang terpaksa (mukrah) dalam pandangan syar'i sedangkan hatinya tetap beriman.

D. Dasar Penetapan

Al-Qur'an

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaNya." (QS. Al-Maidah: 2)

1. Ahkam al-Qur'an1

Dan Firman Allah Swt.: "Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." adalah larangan menolong orang selain kita (umat Islam) dalam berbuat maksiat kepada Allah Swt.

¹ Ahmad bin Ali al-Razi al-Jashash, Ahkam al-Qur'an, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.), Jilid II, h. 296.

2. Tafsir al-Qur'an al-Azhim²

وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُنْوَنِ ﴾ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الطَّنَاصُرِ عَلَى الْبَاطِلِ وَالشَّعَاوُنِ عَلَى الْلَآثِمِ وَالْمَحَارِمِ

Dam Firman Allah Swt: "Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." maksudnya adalah Allah melarang umat Islam dari saling bantu-membantu berbuat batil dan tolong-menolong berbuat dosa dan haram.

"Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya. Sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka." (QS. Al-Maidah: 2)

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa). Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar." (QS. Al-Nahl: 106)

Al-Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لاَ تَبْدَعُوا الْيَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بِالسَّلاَمِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقِ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ

"Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Janganlah kamu memulai salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, dan bila kamu berjumpa dengan mereka di jalan maka desaklah mereka ke tempat yang lebih sempit." (HR. Muslim)

² Ismail bin Umar/Ibn al-Katsir, Tafsir al-Qur'an al-Azhim, (Beirut: Dar al-Fikr, t th.), Illid H. h. 7.

1. Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim³

قَوْلُهُ ﷺ وَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضطَّرُوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ قَالَ أَصْحَابُنَا لَا يُتْرَكُ لِلذِيِّ صَدْرُ الطَّرِيْقِ بَلْ يُضطَّرُ إِلَى أَضْيَقِهِ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَظْرُقُونَ فَإِنْ خَلَتِ الطَّرِيقُ عَنِ الرَّحْمَةِ فَلَاحَرَجَ قَالُوا وَلْيَكُنِ التَّضْيِيقُ بِحَيْثُ لَا يَقَعُ فِي وَهْدَةٍ وَلَا يَصْدُمُهُ جِدَارٌ وَخَوْهُ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ

Sabda Rasulullah Saw.: "Dan bila kalian berjumpa dengan mereka di jalan maka desaklah mereka ke tempat yang lebih sempit." Menurut Ashhab al-Syafi'i, bila orang-orang Islam sedang lewat di jalan, maka orang-orang kafir dzimmi tidak diberi jalan di tengah, tapi dipinggir. Sedangkan bila jalannya sedang tidak penuh maka tidak apa-apa (mereka berjalan di tengah). Para Ashhab mengemukakan bahwa peminggiran tersebut sekiranya tidak menjatuhkan orang dzimmi itu ke dalam jurang, terbentur tembok atau yang semisalnya. Wallahu a'lam.

Aqwal al-Ulama

1. Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam4

الْمِثَالُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ التَّقْرِيرُ عَلَى الْمَعَاصِي كُلِّهَا مَفْسَدَةٌ لَكِنْ يَجُوزُ التَّقْرِيرُ عَلَيْهَا عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ إنْكَارِهَا بِالْيَدِ وَاللِّسَانِ

Contoh yang ketiga puluh enam: Membiarkan maksiat, semuanya adalah *mafsadah*. Namun ketika tidak mampu melawannya dengan kekuasaan maupun lisan, maka boleh membiarkannya.

2. Al-Igna'5

خَاتِمَةُ تَخْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ لَا تَجَدُ فَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُواَدُونَ مَنْ حَادِّ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ﴾ فَإِنْ قِيلَ قَدْ مَرَّ فِي بَابِ الْوَلِيْمَةِ أَنَّ مُخَالَطَةَ الْكُفَّارِ مَكْرُوهَةُ أُجِيبُ بِأَنَّ الْمُخَالَطَة تَرْجِعُ إِلَى الظَّاهِرِ وَالْمَوَدَّةَ إِلَى الْمَيْلِ الْقَلْبِيِّ فَإِنْ قِيلَ مَكْرُوهَةً أُجِيبُ بِإِمْكَانِ دَفْعِهِ بِقَطْعِ أَسْبَابِ الْمَوَدَّةِ الَّتِي الْمَوَدَّةِ الَّتِي الْمَوَدَّةِ الَّتِي يَنْشَأُ عَنْهَا مَيْلُ الْقَلْبِ كَمَا قِيلَ إِنَّ الْإِسَاءَةَ تَقْطَعُ عُرُوقَ الْمَحَبَّةِ

⁴ Izzuddin bin Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), Juz I, h. 77.

Muhyiddin al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.), Juz XIV, h. 147.

Muhammad al-Khatib al-Syirbini, al-Iqna' dan Syekh Sulaiman bin Amr Ibn Muhammad al-Bujairimi, Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Iqna', (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Jilid IV, h. 291-292.

قَوْلُهُ (تَحْرُمُ مَوَدَّةُ الْكَافِرِ) أَيْ الْمَحَبَّةُ وَالْمَيْلُ بِالْقَلْبِ وَأَمَّا الْمُخَالَطَةُ الظَّاهِرِيَّةُ فَمَكْرُوهَةً وَعِبَارَةُ شَرْحِ م ر وَتَحْرُمُ مُوَادَّتُهُمْ وَهُوَ الْمَيْلُ الْقَلْبِيُّ لَا مِنْ حَيْثُ الْكُفْرُ وَإِلَّا كَانَتْ كُفْرًا وَسَوَاءً فِي ذَلِكَ أَكَانَتْ لِأَصْلِ أَوْ فَرْعِ أَمْ غَيْرِهِمَا وَتُكْرَهُ مُخَالَطَتُهُ ظَاهِرًا وَلَوْ بِمُهَادَاةٍ فِيمَا يَظْهَرُ مَا لَمْ يُرْجَ إِسْلَامُهُ وَيُلْحَقُ بِهِ مَا لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا خَوُ رَحِمٍ أَوْ جِوَارٍ اه

Penutup. Haram mengasihi orang kafir, berdasarkan Firman Allah Swt: "Engkau (Muhammad) tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan RasulNya." Bila dikatakan: "Dalam bab al-Walimah (resepsi pernikahan) telah dijelaskan bahwa bergaul dengan orang-orang kafir adalah makruh." Maka saya jawab, bahwa maksud bergaul itu hanyalah secara lahiriah, sedangkan kasih sayang merupakan gejolak hati. Bila dikatakan lagi: "Tidak mungkin seseorang menolak gejolak hati." Maka saya jawab: "Hal itu bisa dilakukan dengan memutus sebab-sebabnya, seperti dikatakan: "Berbuat jahat itu bisa memutus tali kasih sayang."

Perkataan al-Khatib al-Syirbini: "Haram mengasihi orang kafir." Maksudnya adalah rasa suka dan gejolak hati. Sedangkan hukum pergaulan lahir saja adalah makruh. Dan redaksi dari Syarh Imam Ramli adalah: "Dan haram mengasihi mereka (orang kafir)." maksudnya adalah gejolak hati yang bukan karena kekufuran. Bila tidak, maka kufur. Baik gejolak hati itu kepada orang tua, anak, atau yang lainnya. Dan dimakruhkan bergaul dengan mereka secara lahiriah, walaupun dengan saling tukar menukar hadiah, demikian menurut kajian yang kuat, selama tidak bisa diharap keislaman mereka. Dan hukumnya disamakan pula seperti tadi, bagi dua orang yang semisal berhubungan kerabat atau tetangga.

2. Al-Bahr al-Raiq6

قَالَ الطَّرَسُوسِيُّ إِنْ قَامَ تَعْظِيمًا لِذَاتِهِ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ كَفَرَ لِأَنَّ الرِّضَا بِالْكُفْرِ كُفْرُ فَكَيْفَ يَتَعَظَّمُ الْكُفْرُ اه

Al-Tharasusi berpendapat: "Bila seseorang berdiri karena mengagungkan diri orang kafir dan kekufurannya maka ia kufur. Sebab, rela dengan kekufuran adalah kekufuran (pula), maka bagaimana bisa kekufuran menjadi (dinilai) agung?"

⁶ Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad bin Bakr, al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. th.), Juz V, h. 124.

438. Daur Ulang Air Mutanajjis

A. Deskripsi Masalah

Air merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan umat manusia. Sedangkan pasokan sumber air bersih yang layak dikonsumsi seringkali kurang mencukupi kebutuhan, terutama pada musim kering. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut ada upaya mendaur ulang air mutanajiis (yang terkena najis), untuk menjadi air bersih yang layak dikonsumsi dengan upaya rekayasa manusia, dengan proses kimiawi. Artinya atas rekayasa menusia secara kimiawi air mutanajjis berubah menjadi air bersih dengan menghilangkan ciri-ciri mutanajjis sebelumnya, yang mencakup wama, bau, dan rasa.

B. Pertanyaan

Apakah air *mutanajjis* yang telah berubah menjadi air bersih secara kimiawi dapat dihukumi *thahir muthahhir*?

C. Jawaban

Air mutanajjis yang telah berubah menjadi air bersih secara kimiawi (yang hilang perubahan warna bau dan rasanya), tersebut dapat dihukumi thahir muthahhir apabila volume hasil air yang diproses itu mencapai batas minimal dua qullah.

D. Dasar Penetapan

Al-Sunnah

عَنْ انْنِ عُمَرَ ﴿ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَمْنِ لَمْ يَخْفِلُ الْحَبَّتُ قَالَ عَبْدَهُ قَالَ مُحَدَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُلَّةُ هِيَ الْجِرَارُ وَالْقُلَّةُ الَّتِي يُسْتَقَى فِيهَا عَبْلُ الْحَبَّتُ قَالَ عَبْدَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقُلَّةُ هِيَ الْجِرَارُ وَالْقُلَّةُ الَّتِي يُسْتَقَى فِيهَا قَالَ أَبُو عِيسَى وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ قَالُوا إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَتَمْنِ لَمْ يُنَجِّسُهُ قَالُوا يَصُحُونُ خَوًا مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ (رَواهُ التَّرْمِذِيُّ) فَنَا اللهُ يَعْمَدُ وَقَالُوا يَصَحُونُ خَوًا مِنْ خَمْسِ قِرَبٍ (رَواهُ التَّرْمِذِيُّ)

"Dari Ibn Umar Ra ia berkata: "Saya mendengar Rasulullah Saw. ditanya tentang air yang ada di tanah tandus dan air yang berulangkali didatangi binatang buas dan binatang ternak. Kata Ibn Umar ra. Rasulullah Saw. menjawab: "Bila air sebanyak dua qullah, maka tidak membawa najis." Berkata Abdah: "Muhammad bin Ishaq berkata: "Satu qullah sama dengan satu tempayan, dan (ukuran) yang diambil untuk air minum." Berkata Abu Isa (Tirmidzi): "Itu pendapat al-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Mereka berpendapat: "Bila air mencapai dua qullah, maka ia tidak menjadi najis oleh apapun,

selama bau atau rasanya tidak berubah. Mereka juga menyatakan: "Satu qullah itu sekira-kira lima girbah air." (HR Tirmidzi)

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيجِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ)

"Dari Abu Umamah al-Bahily ra ia berkata: "Rasululah Saw telah bersabda: "Sesungguhnya air tidak bisa ternajisi oleh apapun, kecuali yang mempengaruhi bau, rasa dan warnanya." (HR Ibn Majah)

2. Aqwal al-Ulama:

a. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab8

قَالَ الْهُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إِذَا أَرَادَ تَطْهِيْرَ الْمَاءِ النَّجَسِ نُظِرَ فَإِنْ كَانَتْ خَاسُتُهُ بِالثَّغَيُّرِ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ قُلْتَيْنِ طَهُرَ بِأَنْ يَزُوْلَ التَّغَيُّرُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِأَنْ يُضَافَ إِلَيْهِ مَاءً آخَرُ أَوْ بِأَنْ يُوْخَذَ بَعْضُهُ لِأَنَّ النَّجَاسَةَ بِالتَّغَيُّرِ وَقَدْ زَالَ

(الشَّرُخ) إِذَا زَالُ تَعَيُّرُ الْمَاءِ التَّجَسِ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ قُلَّتْنِ نُظِرَ إِنْ زَالَ بِإِضَافَةِ مَاءِ آخَرَ إِلَيْهِ طَهُرَ بِلَا خِلَافٍ سَوَاءُ كُانَ طَاهِراً أَوْ جَساً قَلِيْلاً أَوْ كَثِيْراً وَسَوَاءُ صُبَّ الْمَاءُ عَلَيْهِ أَوْ نَبَعَ عَلَيْهِ وَإِنْ زَالَ بِنَفْسِهِ أَيْ بِأَنْ لَمْ يَحْدُثُ فِيْهِ شَيْئاً بَلْ زَالَ تَعَيَّرُهُ بِطْلُوعِ الشَّمْسِ أَوِ الرَّيْحِ أَوْ مُورُورِ الزَّمَانِ طَهُرَ أَيْضاً عَلَى الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَطَعَ الْجُنهُورُ وَحَكَى الْمُتَوَلِّي عَنْ أَبِي سَعِيْدِ مُورُورِ الزَّمَانِ طَهُرَ أَيْضاً عَلَى الْمَذْهَبِ وَبِهِ قَطَعَ الْجُنهُورُ وَحَكَى الْمُتَولِي عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْأَصْطُخْرِي أَنَّهُ لَا يَظْهُرُ لِأَنَّهُ شَيْءً جَسَّى فَلَا يَظْهُرُ بِنَفْسِهِ وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ سَبَبَ الْمُحْرِي أَنَّهُ لَا يَظْهُرُ لِأَنَّهُ شَيْءً فَيَّا إِلَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْ وَإِنْ زَالَ بِأَخْذِ بَعْضِهِ اللَّهُ لِللهُ النَّعْسُ وَالْ بَهِي مُونَ الْبَاقِي بَعْدَ الْأَخْذِ قُلْتَيْنِ فَإِنْ بَقِيّ دُوْنَهُمَا لَمْ يَظْهُرْ بِلَا طَهُرَ بِلَا خِلَافٍ وَيَتَصَوَّرُ وَوَلُولَ لَقَعْلِي بَعْدَ الْأَخْذِ فَلْتَيْنِ فَإِنْ بَقِيّ دُونَهُمَا لَمْ يَطْهُرْ بِلَا طَهُرَ بِلَا خِلَافٍ وَيُتَصَوَّرُ وَوَالُ تَعَيِّرِهِ بِأَنْ يَكُونَ الْبَاءُ وَلَا التَّعْبُرُ وَكُونَ الْمَاءُ فَلَا عَلَيْ اللَّهُ الْوَيْحُ فَإِلَا الْمُعْرِقِ فَلَا عَلَيْهِ وَلَاللهُ أَعْلَى طَهُرُولُ وَمُولِ اللّهُ الْمُؤْلِقِ لَوْلُولُ اللّهُ أَعْلَى طَاهِراً كَاللّهِ اللهُ أَعْلَى طَهُورُ لَا خَفَاءَ بِهِ وَاللّهُ أَعْلَى طَاهِراً كَالَّهُ الْمَامُ الْحَلَى الشَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقَ الْمَامِلُ الْعَلَى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقَ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَامِلُ الْمَامُ الْعَلَى عَلَى اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ اللْمَامُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلِلْمُ

⁷ Dua qullah yaitu ± 190 liter atau 58 cm³ Lihat Mushthafa Dib al-Bugha, al-Tadzhib fi Adillah Mant Ghayah wa al-Taqrib, (Darnaskus: Dar Ib Katsir, 1996) Cet. Ke-6, h. 13.

Muhyiddin al-Nawawi, al-majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1317 H), Juz I, h. 190-191.

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَإِنْ طُرِحَ فِيهْ ثُرَابٌ أَوْ جِصُّ فَزَالَ التَّغَيُّرُ فَفِيْهِ قَوْلَانِ قَالَ فِي الْأُمْ لَا يَظْهُرُ كَمَا لَا يَظْهُرُ إِذَا طُرِحَ فِيهْ كَافُورٌ أَوْ مِسْكُ فَزَالَتْ رَائِحَةُ النَّجَاسَةِ وَقَالَ فِي حَرْمَلَةَ يَظْهُرُ وَهُوَ الْأَصَحُّ لِأَنَّ التَّغَيُّرَ قَدْ زَالَ فَصَارَ كَمَا لَوْ زَالَ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَاءٍ آخَرَ وَيُفَارِقُ الْكَافُورَ وَالْمِسْكَ لِأَنَّ هُنَاكَ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الرَّائِحَةُ بَاقِيَةً وَإِنَّمَا لَمْ تَطْهُرْ لِغَلَبَةِ رَائِحَةِ الْكَافُورِ وَالْمِسْكِ

(الشَّرْخُ) هَذَانِ الْقُولَانِ مَشْهُوْرَانِ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ أَحَدَهُمَا فِي الْأُمِّ وَالْآخَرِ فِي حَرْمَلَةً وَكَذَا قَالَهُ الْمَحَامِئِي فِي الْمَجْمُوعِ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الْقَوْلَانِ نَقَلَهُمَا الْمُزَنِيُ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيْرِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَ الْمَاوَرُدِيُ هَذَانِ حَرْمَلَةُ وَنَقَلَهُمَا الْمُزَنِي فِي جَامِعِهِ الْكَبِيْرِ عَنِ الشَّافِعِي وَقَالَ صَاحِبُ الشَّامِلِ نَصَّ عَلَيْهِمَا فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةً وَقَالَ الْمَحَامِلِي فِي التَّجْرِيْدِ قَالَ الشَّافِعِي فِي عَامَّةِ كُتُبِهِ عَلَيْهِمَا فِي رِوَايَةِ حَرْمَلَةً لَا يَطْهُرُ كَذَا قَالَ فِي التَّجْرِيْدِ عَنْ حَرْمَلَةَ لَا يَطْهُرُ وَهُو يَطْهُرُ وَقُلَ الشَّامِلِ أَنَّهُمَا نَقَلَ هُو فِي الْمَجْمُوعِ وَصَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَالْجُمْهُورُ عَنْ حَرْمَلَةَ أَنَّهُ يَطْهُرُ وَهُو خَلَافُ مَا نَقَلَ هُو فِي الْمَجْمُوعِ وَصَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَالْجُمْهُورُ عَنْ حَرْمَلَةَ أَنَّهُ يَطْهُرُ وَهُو وَلَكُنْ عَنِ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّ وَصَاحِبِ الشَّامِلِ أَنَّهُمَا نَقَلَا عَنْ حَرْمَلَة أَنَّهُ يَطْهُرُ وَهُو لَكُونُ فَى الْقَوْلَيْنِ فَصَعَ نَقْلُهُ فِي التَّجْرِيْدِ عَنْ حَرْمَلَةَ وَنَقْلُ الْأَصْحِبُ ثُمَّ الْخَتَلَفَ وَلَكُنُ وَلَاللَّاسِ الْجُرْجَائِيُ وَالشَّاشِيُ وَعَيْرُهُمُ الطَّهَارَةُ وَهُو الْقَانِي وَشَيْخُهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّ وَأَبُو الْقَالِي وَالْمَالِقُ وَهُو الْقَالِي وَالْمَالِي وَالْمُعَلِي وَالْمُولِ أَنْهُولَ فِي الْقَامِي وَلَيْ الْقَالِي وَالْمَالِي وَلَيْ الطَّيْسِ وَأَبُو الْقَالِي وَلَيْ الْقَالِي وَالْقَالِي وَالْمَالِ أَنْهُولَ الْعَبَاسِ الْجُرْجَائِيُ وَالشَّاشِيُّ وَعَيْرُهُمُ الطَّهَارَةُ وَهُو الْعَبَالِ الْقَالِي الْمُعَلِي وَالْمُولِ أَلْوَالْمَالِ وَلَيْ الْقَالِمُ الْمُ الطَلِي وَالْمُهُمُ الْقَالِي وَلَيْ الْمُعْتِي وَالْمُولِ الْمُعَلِقُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْلِ وَلَهُ الْمُهُمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

Penulis (Abu Ishaq al-Syirazi) berkata: "Bila ingin mensucikan air yang terkena najis, hendaknya diperhatikan terlebih dahulu; bila *najis*nya disebabkan perubahan pada air tersebut, sedangkan volumenya lebih dari dua *qullah* maka air tersebut bisa suci, bila (i) perubahannya hilang dengan sendirinya, atau (ii) dengan cara ditambahi air baru, atau (iii) dengan dibuang sebagiannya. Karena ke*najis*annya disebabkan perubahan dan perubahan tersebut telah hilang."

Penjelasan: Bila perubahan air najis telah hilang dan airnya lebih dari dua qullah maka dipertimbangkan dahulu; (i) bila hilangnya perubahan disebabkan penambahan air baru, maka tanpa khilaf, air tersebut menjadi suci, baik air baru itu suci atau najis, sedikit atau banyak, dituangkan atau bersumber dari (tempat)nya. (ii) Bila perubahannya hilang sendiri, yakni tidak

dilakukan rekayasa apapun padanya, yaitu perubahannya hilang karena terkena sinar matahari, angin, atau lewatnya waktu, maka menurut al-Madzhab air tersebut suci, dan demikian pula menurut mayoritas ulama. Al-Mutawalli meriwayatkan pendapat Abu Said al-Ushtukhri yang menyatakan, bahwa air tersebut tidak menjadi suci. Sebab, ia sudah menjadi najis sehingga tidak bisa suci dengan sendirinya. Namun pendapat ini tidak berarti apa-apa (tidak menjadi masalah), mengingat sebab kenajisannya adalah perubahan. Bila perubahan itu hilang maka air tersebut menjadi suci kembali berdasarkan sabda Nabi Saw.: "Bila air telah mencapai dua qullah maka ia tidak najis." (iii) Bila perubahan kondisi air hilang karena dibuang sebagian, maka tanpa terdapat khilaf, air itu menjadi suci, namun dengan syarat volume sisa air setelah pembuangan sebagiannya masih mencapai dua qullah. Bila yang tersisa kurang dari dua qullah, maka tanpa terdapat khilaf, air tersebut tidak kembali suci. Hilangnya perubahan kondisi air dengan membuang sebagiannya, bisa digambarkan, sekira airnya banyak dan tidak terkena angin, kemudian saat air berkurang, angin bisa masuk dan menguranginya. Begitu pula bila terkena matahari, sehingga air tadi bisa menjadi bagus.

Kemudian bila perubahan kondisi air tadi sudah hilang dan telah kita hukumi suci, lalu air tersebut berubah lagi, maka ia tetap suci, dan perubahan (kedua) tidak mempengaruhi kesuciannya. Sebab, air tersebut adalah air suci yang berubah bukan karena *najis* yang mengenainya. Maka, air tersebut tetap suci seperti halnya air yang belum pernah terkena *najis* sama sekali. Demikian penuturan penulis kitab *al-Hawi* (al-Mawardi). Keterangan ini cukup jelas dan tidak samar lagi. Wallahu a'lam.

Penulis berkata: "Bila air itu dimasuki debu atau kapur (gamping: Jawa) sehingga perubahannya hilang, maka dalam hal ini ada dua qaul. Dalam al-Umm Imam Syafi'i berkata: "Air itu tidak bisa menjadi suci. Sebagaimana tidak bisa menjadi suci pula bila air itu diberi kapur barus atau misk kemudian bau najisnya hilang." Namun dalam Harmalah ia mengatakan: "Air itu bisa menjadi suci." Dan ini merupakan pendapat al-Ashah, sebab perubahannya sudah hilang. Seperti halnya bila perubahannya hilang sendiri atau karena ditambah air baru. (Debu atau kapur/gamping) ini berbeda dengan kapur barus dan misk, sebab bisa jadi perubahan baunya masih ada. Air yang ditambahi kapur barus dan misk tidak menjadi suci dikarenakan dominasi bau kapur barus dan misk mengalahkan perubahan baunya tadi."

Penjelasan: Kedua qaul ini masyhur. Penulis menyebutkan, bahwa salah satunya terdapat dalam al-Umm, sedangkan yang satu lagi dalam riwayat Harmalah. Demikian dikatakan pula oleh al-Mahamili dalam al-Majmu. Al-Qadhi Abu Thayyib berkata: "Kedua qaul ini dikutip oleh Harmalah dan juga oleh al-Muzani dalam al-Jami al-Kabir." Syaikh Abu Harrid dan al-Mawardi berkata: "Kedisa quul ini di kutip oleh al-Muzani dalam kitabnya, al-Jami' al-Kabir, dani al-Syafi'i." Pemulis kitab al-Syamil mengatakan: "Al-Syafi'i mengemukakan dengan jelas (nash) kedua qaul ini dalam riwayat Harmalah." Dalam al-Tajrid al-Mahmili berkata: "Dalam mayoritas kitabnya al-Syafi'i berkata: "Air itu menjadi suci:" Sementara dalam riwayat Harmalah ia berkata: "Air itu tidak menjadi suci." Begitu pula kutipan al-Mahamili dalam al-Tajridi dari Harmalah, "Air itu tidak menjadi suci." Maka kutipannya ini berbeda dengan kutipannya (sendiri) dalam al-Majmu', kutipan penulis al-Muhadzdzab, dan kutipan mayonitas ulama dari Harmalah yang menyatakan, bahwa air tersebut menjadi suci. Namun (tadi) telah kami sebutkan riwayat dari al-Qadhi Abu Thayyib dan penulis al-Syamil, bahwa mereka berdua mengutip dari Harmalah, bahwa ia mengutip dua qaul dari al-Syafi'i. Maka kutipannya dalam kitab al-Tajrid dari Harmalah tadi benar dan (benar pula) kutipan para Ashhab. Kemudian para penulis kitab fiqh berbeda pendapat tentang manakah yang lebih shahih dari dua qaul tersebut? Penulis dalam kitab al-Muhadzdzab ini, dan dalam al-Tanbih, begitu pula gurunya, al-Qadhi Abu Thayyib, Abu al-Abbas, al-Jurjani, al-Syasyi, dan yang lain, membenarkan riwayat yang menyatakan bahwa air tersebut menjadi suci. Itu adalah pendapat pilihan.

b. Hasyiyah al-Qulyubi wa 'Umairah9

(وَلَا تَنْجُسُ قُلَّتَا الْمَاءِ بِمُلَاقَاةِ خَيسٍ) لِحِدِيثِ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلُ الْحَبَثَ صَحَّحَهُ الْبُنُ حِبَّانَ وَغَيْرُهُ وَفِي رِوَالِيَّةِ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادِ صَحِيجٍ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَمْ يَحْمِلُ الْحَبَثَ أَيْ يَدْفَعُ النَّجَسَ وَلَا يَقْبَلُهُ (فَإِنْ غَيْرَهُ) أَيْ الْمَاءَ الْقُلَّتَيْنِ (فَنَجَسُ) لِحِديثِ الْبِنِ مَاجَهُ وَغَيْرِهِ الْمَاءُ لَا يُتَجِّسُهُ شَيْءً إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى الْقُلْتَيْنِ (فَنَجَسُ) لِحِديثِ الْبِنِ مَاجَهُ وَغَيْرِهِ الْمَاءُ لَا يُتَجِّسُهُ شَيْءً إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى الْقُلْتَيْنِ (فَنَجَسُ) لِحِديثِ الْبِنِ مَاجَهُ وَغَيْرِهِ الْمَاءُ لَا يُتَجِّسُهُ شَيْءً إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى الْقُلْتَيْنِ (فَنَجَسُ وَلَوْنِهِ (فَإِنْ زَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ) أَيْ مِنْ غَيْرِ انْضِمَامِ شَيْء إِلَيْهِ كَأَنْ زَالَ رَحِيهِ وَطُولِ الْمُكْثِ (أَوْ بِمَاءٍ) انْضَمَّ إِلَيْهِ (طَهُرَ) كَمَا كَانَ الرَّوَالُ سَبَبَ التَّجَاسَةِ (أَوْ بِمِسْكِ بِطُولِ الْمُكْثِ (أَوْ بِمَاءٍ) انْضَمَّ إِلَيْهِ (طَهُرَ) كَمَا كَانَ الرَّوَالُ سَبَبَ التَّجَاسَةِ (أَوْ بِمِسْكِ

648

⁹ Jalaluddin al-Mahalli, Syarah Minhaj al-Thalibin pada Hamisy al-Qulyubi dan Umairah, (Surabaya: al-Mishriyah, t. th.), Jilid I, h. 21-22.

وَزَعْفَرَانٍ) وَخَلِّ أَيْ لَمْ تُوجَدْ رَائِحَةُ النَّجَاسَةِ بِالْمِسْكِ وَلَا لَوْيُهَا بِالزَّعْفَرَانِ وَلَا طَعْمُهَا بِالْخَلَّرُ (فَلَا) يَطْهُرُ لِلشَّكِّ فِي أَنَّ التَّغَيِّرُ رَالَ أَوْ السَّتَرَ بَلْ الطَّاهِرُ الاسْتِتَارُ قَوْلُهُ (أَيْ لَمْ تُوجَدْ النَّغِيدُ فَيَ أَنَّ التَّغَيْرُ وَالَ الرِّيحُ بِالْحَلِّ أَوْ الرَّعْفَرَانِ طَهُرَ وَكَذَا الْبَقِيَّةُ وَأَنَّهُ لَا يُفْرَضُ فِي التَّقْدِيرِيِّ إِلَّا مَا يُوافِقُ صِفَةَ الْوَاقِعِ فَقَطْ الرَّعْفَرَانِ طَهُرَ وَكَذَا الْبَقِيَّةُ وَأَنَّهُ لَا يُفْرَضُ فِي التَّقْدِيرِيِّ إِلَّا مَا يُوافِقُ صِفَةَ الْوَاقِعِ فَقَطْ وَفَارَقَ الطَّاهِرَ بِغِلَظٍ أَمْرِ النَّجَاسَةِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ تَأْمُلُ مَقِيقٌ قَوْلُهُ (لِلشَّكِ إِلَى الرَّعْفَ الْوَاقِعِ مَقَطْ وَفَارَقَ الطَّاهِرَ بِغِلَظٍ أَمْرِ النَّجَاسَةِ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ تَأْمُلُ مَقِيقٌ وَعِنَّ عَمَلُ اللَّهُ فَي النَّعَلَى اللَّهُ الْفَعَلَ الْ فَعْمَرُ وَيِحُ الْمِسْكِ مَثَلًا وَإِلَّا بِأَنْ خَفِي رَحِيمُ النَّجَاسَةِ مَعًا الْمَعْتَدِ مَنَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُعْتَى الْمُعْتَمَدِ الْمُعْتَمَدِ الْمُعْتَمَدِ الْمُ الْمُعْتَمَدِ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ

(Air dua gullah tidak menjadi najis karena terkena najis), berdasar hadits: "Jika air mencapai dua qullah, maka ia tidak membawa najis." Hadits ini dishahihkan oleh Ibn Hibban dan yang lain. Dalam riwayat Abu Daud dan riwayat yang lainnya, dengan sanad shahih: "Sesungguhnya air dua gullah itu tidak menjadi najis." Itulah maksud sabda Nabi Saw. "Tidak membawa najis," Yakni menolak dan tidak menerimanya. (Jika najis tersebut membuatnya berubah) yakni membuat berubah air dua qullah itu (maka ia menjadi najis), berdasarkan hadits riwayat Ibn Majah dan selainnya: "Air tidak menjadi najis oleh sesuatu kecuali yang dapat mempengaruhi bau rasa dan warnanya." (Jika perubahan dengan sendirinya itu hilang) yakni bukan karena tercampur dengan sesuatu, semisal perubahannya hilang karena diam terlalu lama, (atau karena air lain) yang digabungkan, (maka ia menjadi suci). Sebagaimana yang hilang adalah sebab najisnya, (atau karena misk dan za'faran), dan cuka, yakni bau najis hilang lantaran misk, warna najis hilang karena za'faran dan rasa najis hilang karena cuka, (maka air itu tidak) menjadi suci. Sebab masih diragukan, apakah perubahan air itu hilang atau tertutupi? Bahkan yang zhahir adalah tertutupi.

Ungkapan al-Mahalli: "Yakni bau najis hilang ..." Memberi pengertian, bahwa salah satu sifat tidak bisa menutupi yang lainnya. Oleh sebab itu, bila bau najis hilang dengan cuka atau za'faran, maka air tersebut suci. 10 Begitu pula yang lainnya. Ungkapannya tadi juga memberi pengertian bahwa dalam najis taqdiri hanya diandaikan perkara yang sesuai dengan sifat yang ada. Air najis berbeda dengan air

أَنْ يَظَهُرُ Mungkin yang tepat adalah tidak suci. Sehingga redaksinya bukan لَمْ يَظَهُرُ tetapi عَهُرَ tetapi

yang suci dengan beratnya perkara najis. Begitu dikatakan, dan di situ ada pembahasan mendalam. Ungkapan al-Mahalli: "Sebab masih diragukan, ..." Guruku berpendapat: "Keraguan itu terjadi bila misalnya, bau misk tercium. Bila tidak, sekira baunya dan bau najis sama-sama samar, maka air tersebut suci menurut al-Mu'tamad.

441. Tanggungjawab Pihak Asuransi atas S isa Kredit Rumah

A. Deskripsi Masalah

Perusahaan asuransi yang bergerak di bidang jasa semakin banyak bermunculan, seiring dengan semakin banyaknya orang yang merasa perlu jaminan atas kemungkinan resiko yang akan menimpanya. Untuk memperoleh jaminan dari perusahaan asuransi, seseorang diharuskan membayar kepadanya sejumlah dana tertentu (premi), baik secara kredit maupun kontan.

Transaksi penjaminan asuransi terkadang juga menyertai trasnsaksi kredit Rumah Sederhana dan Sehat (RSS). Dalam transaksi penjaminan asuransi tersebut terdapat perjanjian, bahwa pihak perusahaan asuransi akan menanggung resiko untuk melunasi sisa kredit rumah manakala debitur meninggal dunia. Akan tetapi, jika debitur tidak meninggal dunia, ia tidak memperoleh sesuatu apa pun dari jumlah dana (premi) yang telah dibayarkan.

B. Pertanyaan

Apakah sah menurut hukum Islam, sistem penjaminan perusahaan asuransi untuk menanggung pembayaran sisa kredit, manakala debitur asuransi meninggal dunia?

C. Jawaban

Akad atau transaksi asuransi dei gan jaminan dalam bentuk pembayaran sisa kredit, manakala deb tur asuransi meninggal dunia, adalah haram dan tidak sah. Sebab akad atau transaksi asuransi tersebut mengandung unsur gharar (tipuan/ketidakjelasan), qimar (ketidakpastian), dan riba.

D. Dasar Penetapan

Al-Qur'an

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَّنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تَجِئرَةً عَن

تَرَاضٍ مِنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (OS. Al-Nisa': 29)

1. Ma'alim al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil¹¹

Dan firman Allah Ta'ala: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." dengan jalan haram, yaitu riba, perjudian, ghasab, mencuri, khianat, dan lainnya. Dan dalam satu versi, dengan jalan akad-akad yang fasid."

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Maidah: 90)

Al-Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَبَيْعِ الْغَرَرِ

"Dari Abu Hurairah, sungguh Rasulullah Saw. telah melarang praktik jual beli (dengan) lemparan dan jual beli yang mengandung ketidakjelasan." (HR. Ahmad) 1. Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim¹²

وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ فَهُوَ أَصْلُ عَظِيمٌ مِنْ أُصُولِ كِتَابِ الْبُيُوعِ وِلِهَذَا قَدَّمَهُ مُسْلِمُ وَيَدْخُلُ فِيهِ مَسَائِلٌ كَثِيرَةٌ غَيْرُ مُنْحَصَرَةٍ كَبَيْعِ الْآبِقِ وَالْمَعْدُومِ وَالْمَجْهُولِ وَمَا لَا يُقْدَرُ عَلَى تَسْلِيْمِهِ وَمَا لَمْ يَتِمَّ مِلْكُ الْبَاثِيعِ عَلَيْهِ وَبَيْعِ السَّمَكِ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ

¹¹ Ibn Mas'ud al-Baghawi, Ma'alim al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. th.), Cet. ke-2, Jilid I, h. 417.

Muhyiddin al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, (Beirut:: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.), Cet. ke-2, Juz X, h. 156.

وَاللَّمَنِ فِي الضَّرْعِ وَبَيْعِ الْحُمْلِ فِي الْبَطْنِ وَبَيْعِ بَعْضِ الصَّبْرَةِ مُبْهَمًا وَبَيْعِ نَوْدٍ مِنْ أَثْوَادٍ وَشَاةٍ مِنْ شِيَاه وَنَظَاثِرِ دَلِكَ وَكُلُّ هَذَا بَيْعُهُ بَاطِلُ لِأَنَّهُ غَرَرُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَقَدْ كُنْتَمَلُ بَعْضُ الْعَرْرِ بَيْعًا إِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ كَالْجَهْلِ بِأَسَاسِ الدَّارِ وَكَمَا إِذَا بَاعَ الشَّاةَ الْحَامِلُ وَالَّتِي فِي ضَرْعِهَا لَبَنُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِلْبَيْعِ لِأَنَّ الْأَسَاسَ تَابِعُ لِلطَّاهِرِ مِنَ الدَّارِ وَلِأَنَّ الْمُسَاسَ تَابِعُ لِلطَّاهِرِ مِنَ الدَّارِ وَلِأَنَّ الْخَاجَة تَدْعُو إِلَيْهِ وَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ رُؤْمِنَهُ وَكَذَا الْقَوْلُ فِي خَمْلِ الشَّاةِ وَلَبَيْهَا.

Dan pelarangan jualbeli gharar (yang mengandung ketidakjelasan) merupakan prinsip penting dari beberapa prinsip dalam kitab tentang jualbeli. Karenanya, Imam Muslim mendahulukannya (dari pada yang lainnya). Jualbeli gharar mencakup banyak kasus, seperti jualbeli budak yang melarikan diri, barang yang tidak ada, barang yang tidak diketahui, barang yang tidak bisa diserahterimakan, barang yang belum dimiliki secara sempurna oleh penjual, ikan yang masih dalam air banyak, air susu yang masih dalam tetek (belum diperah), janin yang masih di kandungan, sebagian barang tumpukan tanpa kadar yang jelas, sepotong pakaian dari beberapa pakaian, seekor kambing dari beberapa kambing, dan semisalnya. Semuanya merupakan jualbeli yang tidak sah, sebab mengandung ketidakjelasan tanpa adanya hajat (yang melegalkannya). Ada pula sebagian ketidakjelasan yang diperbolehkan dalam praktik jualbeli. Seperti ketidakielasan pondasi rumah, jualbeli kambing yang sedang hamil, dan kambing yang dalam teteknya ada air susunya, maka semuanya sah. Sebab, pondasi itu mengikuti bagian rumah yang tampak, dan sebab hajat mengharuskan begitu. Sebab, tidak mungkin melihatnya. Demikian pula pada janin dan air susu kambing.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَشْرِو أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْحَشْرِ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوْبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

"Dari Abdullah bin Umar, sungguh Nabi Allah Saw. telah melarang khamr, perjudian, permainan dadu, dan minuman keras dari jagung (produksi Etopia)." Dan beliau bersabda: "Segala (minuman) yang memabukkan adalah haram." (HR. Abu Dawud)

Aqwal al-Ulama

Takmilah al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab¹³:

¹³ Muhammad Bukhait al-Muthi'i, Takmilah al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t. th.) Jilid XIII, h. 470-471.

وَيَنْقَسِمُ التَّأْمِيْنُ مِنْ حَيْثُ الشَّكْلِ إِلَى تَوْعَنْ أَسَاسَيْنِ وَهُمَا (أَ) التَّأْمِيْنُ التَبَادُ فِي التَّعَاوُنِيُ السَّعَلُ التَّافِي لِأَنَّهُ هُو الَّذِي يَدُوْرِ حَوْلَهُ الْخَلَافُ وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ التَّأْمِيْنِ تَقُوْمُ بِهِ الشَّرِكَاتُ عَلَي أَسَاسٍ تَجَارِيٍّ وَثَقَوِّمُ الشَّرِكَةُ بِدَوْرِ الْمُؤَمِّنِ وَتَتَّفِقُ مَعَ عَمَلَاتِهَا (كُلُّ عَلَ حِدَّة) الْمُؤَمِّنِ لَهُمْ عَلَى تَعْوِيضِهِمْ وَذَلِكَ بِدَفْعِ مَبْلَغَ النَّلُمُومِّنِ وَتَتَّفِقُ مَعَ عَمَلَاتِهَا (كُلُّ عَلَى حِدَّة) الْمُؤَمِّنِ لَهُمْ عَلَى تَعْوِيضِهِمْ وَذَلِكَ بِدَفْعِ مَبْلَغَ التَّالَمِيْنِ عَنِ الْإِضْرَارِ تَلْحَقُ بِهِمْ عِنْدَ تَخْقِيْقِ خَطْرٍ مُعَيَّنٍ دُفِعَ قِسْطُ مُعَيَّنُ وَهَذَا الشَّكُلُ التَّأْمِيْنِ عَنِ الْإِضْرَارِ تَلْحَقُ بِهِمْ عِنْدَ تَخْقِيْقِ خَطْرِ مُعَيَّنٍ دُفِعَ قِسْطُ مُعَيَّنُ وَهَذَا الشَّكُلُ مِنَ التَّامِيْنِ عَلَى الْمُسْوَلِيَّةِ الْمَدْنِيَةِ وَهُولَ الْمَعْرَارِ تَلْمُعْمَلُ وَمِنْ الشَّعْلُ التَّأْمِيْنِ عَلَى الْمُسْولِيَةِ الْمَدَيْقِةِ الْمَدْنِيَةِ (التَّأْمِيْنِ الْمُسُولِيَّةِ الْمَدْفِقِ عَلَى التَّامِينِ عَلَى الْمُسُولِيَّةِ الْمَدْفِقِ عَلَى التَّامِينِ عَلَى الْمُسْولِيَةِ الْمَدْفِقِ عَلَى التَّامِينِ عَلَى الْمُسُولِيَةِ الْمَالِي التَّامِينِ عَلَى الْمُسْولِيَةِ الْمَدْفِقِ عَلَى التَّامِينِ عَلَى الْمَالِي عَلَى الْمُعْرَامُ وَقِمَارُ أَوْ شِبْهُ قِمَارٍ عَلَى الْمَلْولِ عَلَى الْمَالِقُ وَبِهِمَا لَا تَصْلُحُ الْمُعَلِيقِ وَهُ وَلِكُ الْمُعَلِيقُ وَبِهِمَا لَا تَصْلُحُ الْمُعَلِيقِ وَعَلَمُ شُرُوطِهِ الْفَاسِدَةِ الْمُعَلِيقُ وَمَرُورَةُ الْقَلِعَ وَمُهُمُ مُرُورَةً الْقَاصِدَةِ الْمُعْلِقُ مَرْوطِهِ الْفَاسِدَةِ الْمُعْرَامُ وَقِمَارُومَ وَالْوَصِيَّةِ ٢- يَعَضَمَّنُ الرِبَا ٧- مُعْظَمُ شُرُوطِهِ الْفَاسِدَةِ الْمُعْرَامُ وَالْمُومِ الْمُعْلِعُ الْمُعْمَلُومُ الْمُعْرِقِ الْمُعْمَلُومُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُؤْمِ الْمُعْلِعُ الْمُعْرَامُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْلِعُ الْمُعْرَامُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِعُ الْمُعْرَامُ الْمُؤْمِلِ الْمُعْرَامُ الْمُؤْمِلِهِ الْمُعْلَمُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلِعُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِعُ الْمُعْرَامُ الْمُؤْمِلُومُ ا

Ditinjau dari segi bentuk dasarnya asuransi dibagi menjadi dua macam: (1) al-Ta'min al-Tabadduli al-Ta'awuni (Asuransi Kolektif), (2) Al-Ta'min bi al-Qishti (Asuransi Premi). Kita batasi pembahasan pada jenis kedua saja. Sebab, inilah yang masih diperselisihkan. Asuransi jenis ini dijalankan oleh perusahan asuransi dengan berdasar asas niaga. Perusahan asuransi menentukan harga rumah yang diasuransikan dan bersepakat dengan nasabah (yang masing-masing punya ketentuan sendiri) yang dijamin untuk diberi ganti rugi. Yakni dengan membayar sejumlah harta sebagai asuransi dari musibah, ketika benar-benar terjadi musibah maka mereka akan diberi sejumlah harta tertentu. Asuransi semacam ini memiliki banyak varian, sesuai dengan resiko yang mungkin dihadapi seseorang, dan bisa diklasifikasikan menjadi tiga varian: (a) Asuransi pribadi, temasuk di dalamnya asuransi jiwa. (b) Asuransi properti. (c) Asuransi tanggungan sosial. Terkait asuransi dan berbagai variannya, pendapat para ulama terbagi menjadi tiga ... Pendapat pertama mengharamkannya dengan beberapa pertimbangan, yaitu: (1) Jaminan dalam asuransi merupakan kesanggupan pada hal yang belum pasti terjadi. (2) Menguasai harta orang lain dengan cara-cara yang tidak benar. (3) Mengandung unsur taruhan, judi atau setidaknya nmenyerupai judi. (4) Ketidakjelasan dan ketidakpastian, sehingga tidak layak dengan standar akad (yang diperbolehkan). (5) Bertentangan dengan aturan warisan dan wasiat. (6) Mengandung unsur riba. (7) Mayoritas persyaratannya fasid (rusak menurut hukum). (8) Tidak terdapat tuntutan ekonomi yang mengharuskannya.

2. Al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'asyirah14

التَّأْمِيْنُ التِّجَارِيُّ أَوْ ذُو القِسْطِ القَّابِتِ عَقْدٌ فَاسِدٌ شَرْعًا لِأَنَّهُ مُعَلَقُ عَلَى خَطْرٍ أَوِ الْحَيْمَالِ تَارَةً يَقَعُ وَتَارَةً لَا يَقَعُ فَهُوَ قِمَارُ مَعْنِيُّ وَيَشْتَمِلُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْبَابٍ تَجْعَلُهُ حَرَامًا وَهِيَ الرِّبَا (بِسَبَبِ الرِّيَادَةِ عَلَى الْأَقْسَاطِ الْمَدْفُوعَةِ بِلَا عِوَضٍ) وَالْغُرُورُ الْفَاحِشُ لِقِيَامِهِ عَلَى أَمْرٍ إِحْتِمَالِيَّ غَيْرِ ثَابِتٍ وَلاَ مُحَقِّقِ الْوُجُودِ وَالْقِمَارُ فَقَدْ يَدْفَعُ الْفُاحِشُ لِقِيَامِهِ عَلَى أَمْرٍ إِحْتِمَالِيَّ غَيْرِ ثَابِتٍ وَلاَ مُحَقِّقِ الْوُجُودِ وَالْقِمَارُ فَقَدْ يَدْفَعُ الْفُسَاطِ وَتَضِيْعُ عَلَى دَافِعِهَا الْمُسْتَأْمِنُ قِسْطًا وَاحِدًا وَيَقَعُ الْحَادِثُ وَقَدْ يَدْفَعُ جَمِيْعَ الْأَقْسَاطِ وَتَضِيْعُ عَلَى دَافِعِهَا الْمُسْتَأْمِنُ قَسْطًا وَاحِدًا وَيَقَعُ الْحَادِثُ وَقَدْ يَدْفَعُ جَمِيْعَ الْأَقْسَاطِ وَتَضِيْعُ عَلَى دَافِعِهَا وَقَدْ يَدْفَعُ جَمِيْعَ الْأَقْسَاطِ وَتَضِيْعُ عَلَى دَافِعِهَا وَقَدْ يَعْمُ اللَّهُ وَلَيْعَالَقُ وَيَقَعْمُ الْمُؤْمِّنُ وَقَدْ يَدُفْعُ وَلَا يَعْرِيْضِ النَّفْسِ لِعِمَارِ لِمَا لِيقَوْمُ الْمُؤْمِّنُ وَالْمَالِ لِفُرْصَةٍ مُحُهُولَةٍ وَيَتَضَمَّنُ أَيْضًا جَهَالَةً لِأَنَّ مَا يَدْفَعُهُ الْمُسْتَأْمِنُ مَعْ الْمُقَلِقُ وَالْمَعَ عَلَى الْمُؤْمِنُ وَالْمَالِ لِفُرْصَةٍ مُحُولُةٍ وَيَتَضَمَّنُ أَيْضًا جَهَالَةً لِأَنَّ مَا يَدْفَعُهُ الْمُسْتَأْمِنُ وَقَوْعِ الْحُاوِثِ وَلَامِحَةً وَاضِحَةً فِي مِقْدَارُهُ وَالْجَهَالَةُ وَاضِحَةً فِي مِقْدَارُهُ وَالْجَهَالَةُ وَاضِحَةً فِي مِقْدَارٍ عَوْضِ التَّأْمِيْنِ وَزَمَنِ وُقُوعِ الْحَادِثِ

Asuransi niaga atau model premi tetap merupakan transaksi fasid (gugur dalam hukum). Sebab akad ini bergantung pada spekulasi kecelakaan dan ketidakpastian, yang terkadang terjadi dan terkadang tidak. Maka transaksi ini secara subtantif sama dengan judi. Ada lima sebab yang mengharamkannya, yaitu: (1) Riba, dengan sebab adanya tambahan pembayaran premi tanpa imbal balik. (2) Gharar atau ketidakpastian yang cukup kuat, sebab akad ini berdasarkan pada spekulasi yang simpangsiur dan belum wujud. (3) Perjudian. Terkadang seorang nasabah (pemengang polis) baru membayar premi sekali dan mengalami kecelakaan sekali (sudah bisa mengajukan klaim). Terkadang ada pula yang sudah lunas membayar semua premi, namun

¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, Al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'asyirah, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), Cet. ke-6, h. 127-128.

sia-sia belaka (tidak bisa mengajukan klaim karena belum mengalami kecelakaan). Terkadang perusahaan bangkrut, sebab menanggung sejumlah klaim yang tidak sebanding dengan premi yang ia terima, yang disebabkan gharar atau ketidakjelasan (dalam akad ini). (4) Potensi kerugian besar, karena ketidakjelasan obyek akad. Selain itu, juga mengadung unsur perjudian. Sebab mempertaruhkan keselamatan jiwa dan harta sampai batas waktu yang tidak ditentukan. (5) Jahalah (ketidakjelasan), sebab jumlah nominal premi yang harus dibayar oleh nasabah tidak diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak. Begitu pula kompensasi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Bahkan jahalah atau ketidakjelasan ini tampak sekali dalam jumlah premi yang dibayar oleh nasabah dan masa terjadi terjadinya resiko.

3. Al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'asyirah 15:

وَكَانَ الا يَجَاهُ الْجُمَاعِيُ وَالْإِجْمَاعِيُ الْقَائِلُ عِلِّ التَّأْمِيْنِ التَّعَاوُّنِي وَالْإِجْمَاعِي وَاعْتِمَادُهُ مَنْهُجًا وَأَسَاسًا لِعُقُوْدِ التَّأْمِيْنِ الْمُخْتِلِفَةِ وَتَحْرِيْمُ التَّأْمِيْنِ القِجَارِيِّ مُتَمَثَلًا فِي مُؤْتَمَرِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِيْنِ التَّالِي فِي الْقَاهِرَةُ عَامَ ه ١٩٨٥ه وَمُؤْتَمَرِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ السَّابِعِ فِيهَا أَيْضًا عَامَ (١٩٩٨ه/١٩٨٥) وَتَجْمَعِ الْبُحُوثِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي الْأَزْهِرِ الشَّرِيْفِ وَجُمْعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيّ فِي الْمُولِيقِ فِي الْمُولِيقِ فِي الْمُؤْمِنِ فَي مَكَّةَ الْمُؤْمِنَةِ عَامَ (١٩٩٧ه/١٩٩٥) وَقَرَارِ التَّذُوةِ الْفِقْهِيَّةِ التَّالِيقِةِ فِي الْمُلَمَاءِ بِالْمُمْلَكَةِ الْعَرْبِي عَامَ (١٩٩٧ه/١٩٩٥م) وَقَرَارِ تَجْمَعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِي التَّوْلِي رَقْمُ الْمُعَلِيقِ التَّالِيقِ فَي عَلَمَ (١٩٩٧ه/١٩٩٥م) وَقَرَارِ تَجْمَعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِي التَّوْلِي رَقْمُ اللَّالِمِي التَّوْلِي وَقَى اللَّهُ عَلَى خَطْرِ الْمُكُونِيقِي عَامَ (١٩٩٥ه/١٩٩م) وَقَرَارِ تَجْمَعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِي التَّوْلِي رَقْمُ التَّوْلِي وَقَى اللَّهُ اللَّوْلِي وَقَرَادٍ تَجْمَعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِي التَوْلِي وَقُمُ اللَّوْلِي وَقَمْ اللَّالِمِينَ وَلَوْ مَاتَ رَبُّ الْمَالِي فِي الْمُصَارَبَةِ فَلَيْسُ لِورَتَهِ فِلْهُ اللَّامِينَ وَلَوْمُ مَاتَ رَبُّ الْمَالِ فِي الْمُصَارَبَةِ فَلَيْسُ لِورَتَهِ اللَّهُ مَنْ أَيْ الْمُؤْمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي مَنْنِ وَلَوْمُ الْمُؤْمِ وَالرَّيْحُ فِي الْمُصَارَبَةِ فِي مَنْ يَعْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ فِي الْمُعْمَالِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمَرِيْحُ فِي الْمُعْرَامِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمَوْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ و

Wahbah al-Zuhaili, Al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'asyirah, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), Cet. ke-6, h. 263-264.

Memang ada rumusan kolektif dan komparatif yang menyatakan bahwa asuransi kerjasama sosial kemasyarakatan adalah halal. Hal itu berdasarkan asas dan metode berbagai macam jenis asuransi. Kendati begitu, pengharaman asuransi niaga muncul dalam Muktamar Ulama Islam ke-2 di Kairo tahun 1385 H., Muktamar Ulama Islam ke-7, juga di Kairo tahun 1392 H. / 1972 M., Majma' al-Buhuts al-Islamiyah di Al-Azhar / Majma' al-Figh al-Islami Rabithah al-Alam al-Islami di Makkah th.1398 H./1978 M., Keputusan Majlis Haiah Kibar al-Ulama di Kerajaan Arab Saudi, th. 1397 H./1977 M., Keputusan al-Naduah al-Fighiyah ke-3 di Bait al-Tamavil, Kuwait th. 1413 H./1993 M. dan Keputusan Majma' al-Figh al-Islami al-Dauli, No. 9 (9/2) F/II. Rumusan haram itu mengingat asuransi niaga merupakan akad fasid. Sebab, asuransi niaga dibangun atas dasar spekulasi resiko yang kadang terjadi dan kadang tidak. Maka secara subtantif asuransi niaga merupakan judi. Tidak bisa dikategorikan dan disamakan pula dengan transaksi mudharabah. Sebab, dalam transaksi mudharabah pemilik modal menanggung sendiri resiko kerugiannya, yang terjadi sebaliknya pada asuransi. Dalam mudharabah, bila pemilik modal mati, maka ahli waris hanya mendapat harta yang telah dibayarkannya. Berbeda dengan asuransi, ahli waris berhak menerima sejumlah klaim nominal yang amat besar. Dalam karakteristik akad asuransi tidak terdapat kemungkinan kerugian, berbeda dengan mudhambah. Keuntungan dalam mudharabah terukur dalam prosentase yang tidak terbatas pada nominal tertentu (hal ini berbeda dengan keuntungan dalam akad asuransi). Asuransi niaga ini juga tidak bisa disamakan dengan akad kafalah atau dhaman (tanggungjawab) sebab kesalahan, merusak, atau menguasai (hak orang lain). Sebab, kafulah adalah menggabungkan tanggungjawab pada tanggungjawab lain dalam hutang yang sudah tetap dan pasti. Sedangkan hutang dalam asuransi niaga bersifat belum tetap, belum jelas dan belum pasti.

442. Masa Tangguh Atas Mafqud (Orang yang Hilang Kabarnya)

A. Deskripsi Masalah

Bencana Alam yang beruntun menimpa Indonesia menimbulkan permasalahan tersendiri. Misalnya, seseorang menjadi *mafqud* (hilang kabarnya), tidak diketahui di mana keberadaaannya, kapan akan

kembali, dan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Ketidakjelasan tersebut menimbulkan masalah dalam rumah tangga, khususnya istri yang perlu mendapat kepastian untuk menikah dengan laki-laki lain. Demikian pula bagi ahli waris dalam kepastian untuk mendapatkan warisannya. Sebab, jika istri tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain atau harta benda suaminya telah diwariskan, dikhawatirkan ternyata ia datang kembali.

B. Pertanyaan

- 1. Berapa lamakah masa tangguh atas seorang mafqud bagi istrinya untuk menikah dengan laki-laki lain? Begitu pula bagi ahli waris untuk mewarisi harta peninggalannya?
- 2. Bagaimanakah bila seseorang yang mufqud itu kemudian datang kembali setelah istrinya menikah dengan laki-laki lain? Begitu pula setelah hartanya dibagikan kepada ahli waris?

C. Jawaban

- 1. Masa tangguh bagi istri dan ahli waris atas seorang *mufqud* diperinci sebagai berikut:
 - a. Masa tangguh atas seorang *mafqud* bagi istri untuk boleh menikah dengan laki-laki lain, terdapat tiga pendapat, yaitu:
 - 1) Sampai terdapat kepastian si mafgud meninggal dunia.
 - 2) 4 tahun dan 4 bulan 10 hari (masa 'iddah wafat).
 - 3) Sesuai keputusan hakim, baik karena faskh maupun pelanggaran ta'liq thalaq.
 - b. Masa tangguh atas seorang *mafqud* bagi ahli waris untuk mewarisi harta peninggalannya, terdapat dua pendapat, yaitu:
 - 1) Sampai terdapat kepastian si mafqud meninggal dunia.
 - 2) Sampai meninggalnya mayoritas orang-orang yang seusia dengan orang yang mafqud itu.
- 2. Apabila si mafqud datang kembali, maka:
 - a. Bila istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat:
 - Istri tersebut tetap menjadi istri suami yang baru. Sebab, pernikahannya dengan si mafqud sudah terputus dengan faskh atau keputusan hakim.
 - 2) Suami mempunyai dua opsi, yaitu: (1) Menarik istrinya yang telah menikah dengan laki-laki lain. Atau (2), merelakan

istrinya menjadi istri suami yang baru dengan kompensasi *mahar mitsil* yang harus dibayar suami baru tersebut kepadanya.

b. Bila harta warisannya sudah dibagi ahli waris, maka mereka wajib mengembalikannya ataupun menggantinya, bila harta warisan yang diterimanya telah habis.

D. Dasar Penetapan

Al-Qur'an

وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَنْ أَجَلَهُ وَ ٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيَ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ۚ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿

"Janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepadaNya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." (QS. Al-Baqarah: 235)

1. Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Aayi al-Qur'an16

يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرَهُ بِقَوْلِهِ (وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ) وَلَا تُصَحِّحُوا عُقْدَةَ النِّكَاجِ
فِي عِدَّةِ الْمَرْأَةِ الْمُعْتَدَّةِ فَتُوجِبُوهَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ وَتُعَقِّدُوهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
(حَتَىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَبُ أَجَلَهُ،) يَعْنِي يَبْلُغْنَ أَجَلَ الْكِتَابِ الَّذِي بَيَّنَهُ اللهُ تَعَالَى ذَكْرَهُ
بِقَوْلِهِ (وَٱلَّذِينَ يُتَوَفِّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَبْرَبُّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرًا ﴾
بِقَوْلِهِ (وَٱلَّذِينَ يُتَوَفِّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَبْرُبُّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرًا ﴾
[البقرة ٢٣٤] فَجَعَلَ بُلُوغَ الْأَجَلِ لِلْكِتَابِ وَالْمَعْنَى لِلْمُتَنَاكِحَيْنِ أَنْ لَا يَنْكِعَ الرَّجُلُ اللهُ فِي كَتَابِهِ لِانْقِضَائِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَيَبْلُغُ الْأَجَلُ الَّذِي اللهُ فِي كِتَابِهِ لِانْقِضَائِهَا

Maksud Allah Swt. dengan firmanNya: "Janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah." adalah jangan kalian sahkan akad nikah wanita yang masih dalam masa 'iddah. Lalu kalian tetapkan wanita tersebut antara kalian dan mereka para wanita, dan kalian nikahi dia sebelum habis masa iddahnya. Firman Allah Swt.: "Sebelum habis 'iddahnya." adalah sehingga wanita itu sampai pada batas habis

658

Muhammad bin Jarir al-Thabari, Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Aayti al-Qur'an, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid II, h. 527.

masa 'iddahnya, yang telah dijelaskan Allah Swt dengan firmanNya: "Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan isteri-isteri, (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. (QS. Al-Baqarah: 234). Allah telah menyebutkan batas masa 'iddah dalam al-Qur'an. Artinya, bagi sepasang calon pengantin, si calon mempelai laki-laki tidak boleh menikahi calon mempelai perempuan yang masih dalam masa 'iddah. Lalu ia berkeinginan mengikatnya dengan tali pernikahan, kecuali ia telah menghabiskan masa 'iddahnya. Maka seketika itu pula batas waktu 'iddah yang Allah tetapkan dalam al-Qur'an telah habis.

"Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan isteri-isteri, (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari." (QS. Al-Baqarah: 234)

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki." (QS. Al-Nisa': 24)

Al-Sunnah dan al-Atsar

"Dari Ibn Umar r.a. ia berkata: "Nabi Saw. telah melarang orang menjual jualan orang lain, dan melarang orang meminang pinangan orang lain sehingga orang tersebut membatalkan pinangannya lebih dulu atau ia mengizinkannya." (HR. Ashhab al-Sittah, dan ini redaksi Bukhari)

"Dari Said bin al-Musayyab, sungguh Umar bin al-Khattab ra. berkata: "Wanita yang kehilangan suaminya, lalu ia tidak mengetahui keberadaannya, maka ia menunggu selama empat tahun, kemudian menjalani masa iddah empat bulan sepuluh hari, kemudian ia halal (menikah lagi)." (Riwayat Malik)

1. Tanwir al-Hawalik Syarh al-Mutawatha' 17

قَالَ مَالِكُ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأُوّلِ إِلَيْهَا قَالَ مَالِكُ وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا وَإِنْ أَدْرَكُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ أَحَقُ بِهَا قَالَ مَالِكُ وَأَدْرَكُتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ أَنَّهُ قَالَ يُخَيِّرُ زَوْجُهَا الْأُوّلُ إِذَا جَاءَ فِي صَدَاقِهَا أَوْ فِي امْرَأَتِهِ قَالَ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهُو غَائِبُ عَنْهَا ثُمَّ مَالِكُ وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهُو غَائِبُ عَنْهَا ثُمَّ مَالِكُ وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهُو غَائِبُ عَنْهَا ثُمَّ مَالِكُ وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهُو غَائِبُ عَنْهَا ثُمَّ وَقَدْ بَلَغَهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا فَتَرَوَّجَتُ أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا مَالِكُ وَهُو الْمَوْلُولُ النَّذِي كَانَ طَلَقُهُمَا إِلَيْهَا قَالَ مَالِكُ وَهُذَا أَوْلِ النَّذِي كَانَ طَلَّقُهَا إِلَيْهَا قَالَ مَالِكُ وَهَذَا أَوْلِ النَّذِي كَانَ طَلَقُهُمَا إِلَيْهَا قَالَ مَالِكُ وَهَذَا أَوْلِ النَّذِي كَانَ طَلَقُهُمَا إِلَيْهَا قَالَ مَالِكُ وَهَذَا أَوْلِ النَّذِي كَانَ طَلَقُهَا إِلَيْهَا قَالَ مَالِكُ وَهَذَا أَوْلِ النَّذِي كَانَ طَلَقُهُمَا إِلَيْهِا قَالَ مَالِكُ وَهُو الْمَفْقُودِ

Imam Malik berkata: "Jika ia menikah setelah selesai masa 'iddahnya, kemudian suami barunya itu melakukan hubungan badan dengannya ataupun tidak, maka tidak ada jalan bagi suami pertama untuk kembali padanya." Imam Malik berkata: "Demikianlah ketentuan masalah ini menurut kami. Namun jika suami lama menemui sang istri sebelum terjadinya pernikahan yang kedua, maka dialah yang lebih berhak terhadap istrinya." Imam Malik berkata: "Saya mendapati para ulama mengingkari riwayat yang dikatakan oleh sebagian ulama berasal dari Umar bin al-Khattab, ia berkata: "Suami pertama boleh memilih, meminta mahar yang telah diberikan kepada istrinya atau memilih istrinya." Imam Malik berkata: "Dan telah sampai kepadaku, bahwa Umar bin al-Khattab berkata tentang wanita yang mendapat talak dari suaminya yang tidak ada di tempat (sedang pergi), kemudian si suami meruju'nya, namun pernyataan ruju'nya tidak sampai ke pihak istri, sementara yang sampai kepadanya hanya talaknya saja, kemudian si wanita itu telah menikah lagi: "Sungguh bila suami kedua telah melakukan hubungan badan dengannya ataupun belum, maka tidak ada jalan bagi suami pertama yang telah menjatuhkan talak untuk kembali pada istrinya." Imam Malik berkata: "Riwayat ini yang paling aku sukai dari beberapa riwayat yang telah aku dengar tentang kasus ini dan tentang mafqud."

¹⁷ Abdurrahman al-Suyuthi, *Tanwir al-Hawalik Syarh al-Mutawatha*', (Mesir: Isa al-Halabi, t. th.), Juz II, h. 95.

Aqwal al-Ulama

1.Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin 18

(فَصْلُ) الْغَاثِبُ عَنْ زَوْجِتِهِ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ فَنِكَاحُهُ مُسْتَمِرً وَيُنْفِقُ عَلَيْهَا الْحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ فِي بَلَدِ الزَّوْجَةِ مَالُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَتَبَ إِلَى حَاكِمِ بَلَدِهِ لِيُطَالِبَهُ بِحَقِهَا وَإِنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ وَلَمْ يُوْقَفْ عَلَى حَالِهِ حَتَّى يُتَوَهَّمَ مَوْتُهُ فَقَوْلَانِ الْجَدِيْدُ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ غَيْرَهُ حَتَّى يَتَحَقَّقَ مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقُهُ ثُمَّ تَعْتَدُ وَالْقَدِيْمُ أَنَّهَا تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ عِدَّةَ الْوَفَاةِ ثُمَّ تَنْكِحُ وَمِمًا احْتَجُوا بِهِ الْمُجَدِيْدِ أَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ لَا تَعْتِقُ وَلَا يُفْسَمُ مَالُهُ وَالْأَصْلُ الْحَيَاةُ وَالتِكَاحُ

Pasal tentang suami yang pergi dari istrinya. Jika tidak terputus beritanya, maka status pernikahannnya tetap berlanjut. Dan hakim memberikan nafkah untuk si istri yang diambilkan dari harta suaminya, bila memang hartanya terdapat di daerah tempat tinggal si istri. Jika tidak ada, maka hakim menulis surat kepada hakim di tempat suami berada untuk menuntutkan hak si istri. Jika beritanya terputus, dan tidak bisa dipastikan tentang kondisinya, sehingga ia diduga mati, maka dalam hal ini ada dua pendapat; (1) Qaul Jadid al-Azhhar menyatakan, wanita tersebut tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sampai terbukti kematian atau talaknya, dan kemudian ia menjalani masa 'iddahnya. (2) Qaul Qadim menyatakan, wanita tersebut menunggu selama 4 tahun, kemudian menjalani masa 'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya (4 bulan 10 hari), kemudian sudah diperbolehkan menikah. Hujjah yang disampaikan para ulama atas qaul jadid adalah, bahwa budak wanita yang melahirkan anak seorang sayyid yang mafqud tidak merdeka dan hartanya tidak boleh dibagi. Selain itu, hukum asal dalam masalah ini adalah si suami pertama masih hidup dan pernikahan masih sah.

2. Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin 19 السَّادِسَةُ إِذَا ظَهَرَ الْمَفْقُودُ فَإِنْ قُلْنَا بِالْجَدِيْدِ فَهِيَ زَوْجُتُهُ بِكُلِّ حَالٍ فَإِنْ نَصَحَتْ لَمْ يَطَأْهَا الْمَفْقُودُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّهُ النَّاكِحُ وَإِنْ قُلْنَا بِالْقَدِيْمِ فَفِيْهِ طُرُقُ أَحَدُهَا عَنْ أَبُو

¹⁸ Muhyiddin al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, (Beirut: al-Maktab al-Islami, t. th.), Cet. ke-2, Jilid VIII, h. 400.

¹⁹ Muhyiddin al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, (Beirut: al-Maktab al-Islami, t. th.), Cet. ke-2, Jilid VIII, h. 402-403.

عَلِيّ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةً وَالطَّبَرِيُّ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ لِأَنَّا تَيَقَّنَّا الْخَطَّأَ فِي الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ فَصَارَ كَمَنْ حَكَمَ بِالْإِجْتِهَادِ ثُمَّ وَجَدَ النَّصَّ بِخِلَافِهِ وَهَذَا أَصَحُّهُمَا عِنْدَ الرَّوْيَانِيُّ الثَّانِي إِنْ قُلْنَا يَنْفُدُ الْحُكُمُ بِالْفُرْقَةِ ظَاهِرًا فَقَطْ فَالْحُكُمُ كَمَا ذَكَرْنَا وَإِنْ قُلْنَا يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَقَدِ ارْتَفَعَ نِكَاحُ الْأَوَّلِ كَالْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ فَإِنْ نَكَحَتْ فَهِيَ زَوْجَهُ الثَّانِي قَالَهُ أَبُو إِسْحَقَ وَالْقَالِثُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ أَيْضًا إِنْ ظَهَرَ وَقَدْ نَكَحَتْ لَمْ تُرَدَّ إِلَى الْمَفْقُودِ وَإِنْ لَمْ تَنْكَعْ رُدَّتْ إِلَيْهِ وَإِنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِالْفُرْقَةِ وَالرَّابِعُ لَا ثُرَدُّ إِلَى الْأَوَّلِ قَطْعًا وَالْحَامِسُ عَنِ الْكَرَابِيْسِيُّ عَنِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْمَفْقُوْدَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنَ النَّانِي وَبَيْنَ أَنْ يَتْرُكُّهَا وَيَأْخُذَ مِنْهُ مَهْرَ الْمِثْلِ وَمُسْتَنَدُهُ أَنَّ عُمَرَ ﴿ قَضَى بِهِ وَعَنْ الْقَاضِي حُسَيْنِ زِيَادَةٌ فِيْهِ وَهِيَ أَنَّهُ إِنْ فَسَّخَ غَرَمَ الثَّانِيَ مَهْرَ مِثْلِهَا وَالسَّادِسُ أَنَّ نِكَاحَ الْأَوَّلِ كَانَ ارْتَفَعَ بِلَا خِلَافٍ لَكِنْ إِذَا ظَهَرَ الْمَفْقُودُ هَلْ يُحْكُمُ بِبُطْلَانِ نِكَاحِ الثَّانِي وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا لَكِنْ لِلْمَفْقُودِ الْخِيَارُ كَمَا ذَكَرْنَا وَإِذَا قُلْنَا نِكَاحُ التَّانِي بَاطِلٌ فَهَلْ نَقُولُ وَقَعَ صَحِيحًا ثُمَّ إِذَا ظَهَرَ الْمَفْقُودُ بَطَلَ أَمْ نَقُولُ نَتَبَيَّنُ بِظُهُورِ الْمَفْقُودِ أَنَّهُ وَقَعَ بَاطِلًا وَجْهَانِ فَعَلَى الثَّانِي يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ إِنْ جَرَى دُخُولٌ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ وَعَلَى الْأَوَّلِ الْوَاجِبُ الْمُسَمَّى أَوْ نِصْفَهُ وَلَوْ ظَهَرَ الْمَفْقُودُ وَقَدْ نَصَحَتْ وَمَاتَتْ فَهَلْ يَرِثُهَا الْأَوَّلُ أَمْ الثَّانِي يَخْرُجُ عَلَى هَذِهِ الطُّرُقِ

السَّابِعَةِ إِذَا نَكَحَتْ عَلَى مُقْتَضَى الْقَدِيمِ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ كُوْنُهُ مِنَ الثَّانِي وَجَاءَ الْمَفْقُوْدُ وَلَمْ يَدَعِ الْوَلَدَ فَهُوَ لِلثَّانِي لِأَنَّ بِمُضِيِّ أَرْبَعِ سِنِيْنَ يَتَحَقَّقُ بَرَاءَهُ الرَّحْمِ مِنَ الْمَفْقُودِ

Kasus keenam dari khilaf tentang mafqud. Bila suami yang menghilang muncul, maka bila kita menggunakan qaul jadid, maka bagaimanapun si wanita tetap menjadi istrinya. Bila si wanita sudah menikah lagi, maka suami pertama (mafqud) tidak boleh bersetubuh dengannya, sampai si wanita menghabiskan masa 'iddah dari suami kedua. Bila kita menggunakan qaul qadim, maka terdapat beberapa riwayat:

 Dari Abu Ali bin Abu Hurairah dan al-Thabari, menyatakan bahwa hukumnya sama dengan seperti di atas (qaul jadid). Sebab, kita telah meyakini kesalahan dalam menghukumi mati suami pertama. Seperti halnya orang yang menghukumi berdasarkan ijtihad, lalu ia temukan

- nash yang berlawanan dengannya. Riwayat ini yang lebih shahih dari dua riwayat yang ada, demikian menurut al-Rauyani.
- 2) Bila kita menghukumi dengan terjadinya perceraian (nikah si istri dan suami pertama) secara dhahirnya saja, maka hukumnya seperti yang telah kami sebutkan (qaul jadid). Sementara bila kita menghukumi dengan terjadinya perceraian (nikah si istri dan suami pertama) secara dhahir dan batin, maka pernikahan suami pertama batal, seperti kasus faskh sebab suami tidak mampu memberi nafkah. Bila si istri sudah menikah lagi, maka ia tetap menjadi istri suami kedua. Demikian pendapat Ibn Ishaq.
- 3) Diriwayatkan pula dari Ibn Ishaq, bila suami pertama muncul, sedangkan si wanita sudah menikah lagi, maka ia tidak dikembalikan kepadanya. Namun bila belum menikah lagi, maka ia dikembalikan kepadanya, sekalipun hakim telah memutuskan perceraian antara keduanya.
- 4) Si istri tidak dikembalikan pada suami pertama, tanpa khilaf.
- 5) Dari al-Karabisi, dari Imam Syafi'i -rahimahumallah ta'ala- menyatakan, suami pertama mempunyai dua opsi, yaitu antara (i) mengambilnya dari suami kedua, atau (ii) membiarkannya tetap menjadi istri suami kedua, dan ia mengambil kompensasi mahar mitsli (dari suami kedua). Dasar hukumnya adalah riwayat tentang Umar ra. yang pernah memberi keputusan hukum demikian. Dalam riwayat al-Qadhi Husain terdapat tambahan riwayat Umar ra. tersebut, yaitu: "Bila suami pertama memfaskh pernikahan si istri dan suami kedua (lalu mengambil kembali istrinya tersebut), maka ia harus memberi kompensasi sebesar mahar mitsli kepada suami kedua."
- 6) Pernikahan suami pertama terhapus, tanpa terdapat khilaf di kalangan ulama. Tetapi bila suami pertama muncul, maka apakah pernikahan suami yang kedua dihukumi batal? Dalam kasus ini terdapat dua wajah (pendapat Ashhab Syafi'i). (i) Al-Ashhah menyatakan tidak batal, namun suami pertama memiliki dua opsi yang telah kami sebutkan tadi (dalam riwayat kelima). (ii) Bila kita menggunakan pendapat yang membatalkan akad nikah suami kedua, maka (a) apakah kita hukumi pernikahan tersebut sah secara hukum? Kemudian saat suami pertama muncul, menjadi batal? Ataukah (b) dengan kemunculannya, kita hukumi batal pernikahan kedua tersebut sejak awal? Maka dalam kasus ini terdapat dua pendapat ashhab. Maka berdasarkan pendapat kedua (b), bila dalam pemikahan kedua sudah terjadi persetubuhan antara suami kedua dan si istri, maka suami kedua wajib memberi mahar mitsli

kepada suami pertama. Bila belum, maka ia tidak harus memberi apa-apa. Sementara menurut pendapat pertama (a), maka suami pertama wajib memberi mahar musamma (yang disebutkan dalam akad) atau separonya kepada suami kedua. Dan bila suami pertama muncul, sedangkan si istri telah menikah lagi dan kemudian meninggal dunia, maka apakah yang menjadi ahli warisnya suami pertama? ataukah suami kedua? Maka kasus ini, bisa diselesaikan dengan keenam riwayat (riwayat 1 sampai riwayat 6) ini.

Kasus ketujuh dari khilaf tentang mafqud. Bila si wanita sudah menikah lagi sesuai dengan ketentuan qaul qadim, dan ia melahirkan seorang anak yang dimungkinkan dari suami kedua. Kemudian suami pertama muncul, namun ia tidak mengklaim anak tersebut sebagai anaknya, maka anak tersebut dihukumi sebagai anak suami kedua. Sebab, dengan melewati masa empat tahun, terbukti sudah bersihnya rahim istri dari air mani suami pertama.

3.Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari²⁰

قَوْلُهُ (وَقَالَ الزَّهْرِيُّ فِي الْأَسِيْرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ وَلَا يُقَسَّمُ مَالُهُ فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَتُهُ سُنَّهُ الْمَفْقُودِ) وَصَلَهُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً مِنْ طَرِيقِ الْأَوْزَاعِي قَالَ سَأَلْتُ الرُّهْرِيِّ عَنِ الْأَسِيرِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِ مَتَى تَزَوَّجَ امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَا تَزَوَّجُ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ حَيُّ وَمِنْ وَجُهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ يُوْقَفُ مَالُ الْأَسِيرِ وَامْرَأَتُهُ حَتَّى يَسْلَمَا أَوْ يَمُوتًا وَأَمَّا قَوْلُهُ (فَسُنَتُهُ الْمَفْقُودِ أَنَّهَا تَرَبُّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ سُنَةُ الْمَفْقُودِ أَنَّهَا تَرَبُّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَقَدْ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ عَنْ عُمْرَ مِنْهَا لِعَبْدِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةً بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ عَنْ عُمْرَ مِنْهَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمْرَ وَعُثْمَانَ فَضَيَا بِذَلِكَ وَأَخْرَجَ سِنِينَ وَتَبَتُ أَيْضًا عَنْ عُمْرَ مَنْهُ وَلَانُ عَمَرَ وَابْنُ عَمَرَ وَابْنُ عَمَرَ وَعُثْمَانَ فَضَيَا بِذَلِكَ وَأَخْرَجَ سِنِينَ وَتَبَتَ أَيْضًا عَنْ عُنْمَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي رِوَايَةٍ وَعَنْ جَمْعٍ مِنَ التَّابِعِينَ كَالتَّخَعِي سِنِينَ وَتَبَتَ أَيْضًا عَنْ عُمْمَانَ وَابْنِ مَسْعُودٍ فِي رِوَايَةٍ وَعَنْ جَمْعٍ مِنَ التَّابِعِينَ كَالتَّخَعِي سِنِينَ وَتَبَقُوا أَيْضًا عَنْ عُنْمَانَ وَالْنَ مَعْمَ وَيَلْنَ الصَّدَاقِ وَعَنْ جَمْعٍ مِنَ التَّابِعِينَ كَالتَّخْعِي لِلْكَامُ الْمَالُونَاقِ بَعْدَهُ مُنْ الْمَالِقُ وَعَلَى أَنْ التَّافُولُوا أَيْضًا عَنْ عُنْمَا عَلَى أَنْهُمُ الْمَالُولُ وَلَاللَّهُ وَلَوْلُولُ أَنْ الْتَأْولُولُ أَيْمُولُولُ أَلْهُ اللْمَالُولُ الْمَلْمُ مُنِي الْمَلْمُولُ اللْمَالِقُ وَعَلَى أَنْ التَأْولُولُ أَيْمُولُولُ الْمَلَولُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْمُ الْمَلَالَةُ الْمَوالِ وَالشَّعُولُ وَاللَّهُ عَلَى اللْمُؤْلِقُ وَلَاللَا الْمُؤْلُولُولُ الْمَالَعُولُ اللْمُلْمُولُ اللْمَلْمُولُولُ الْمُعَلِقُ الْمَلْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمَالُولُولُ اللْمُولِ الْمُعْمُولُ الْمُولُولُ

²⁰ Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), Jilid IX, h. 538.

الصَّدَاقَ عَرَمَهُ لَهُ النَّانِي وَلَمْ يُفَرِقُ أَكُمُّوهُمْ بَيْنَ أَحْوَالِ الْفَقْدِ إِلَّا مَا تَقَدَّمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَفَرَقَ مَالِكُ بَيْنَ مَنْ فُقِدَ فِي الْحُرْبِ فَتُوَجَّلُ الْأَجَلُ الْمَذْكُورُ وَبَيْنَ مَنْ فُقِدَ فِي الْمُسْ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ أَكُثَرَ عَيْرِ الْحُرْبِ فَلَا تُوَجَّلُ بَلْ تَنْتَظِرُ مُضِيَّ الْعُمْرِ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ أَكُثَرَ مِنْهُ وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ مَنْ عَابَ عَنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يُعْلَمْ خَبَرُهُ لَا تَأْجِيْلُ فِيهِ وَإِنَّمَا يُوَجَّلُ مَنْ عَلَى الطَّنِ أَوْ فِي الْبَحْرِ أَوْ فِي خَوْ ذَلِكَ وَجَاءَ عَنْ عَلِيّ إِذَا فَقَدَتْ الْمَوْأَةُ وَوَجَهَا لَمْ فُقِدَ فِي الْجَوْرِ أَوْ فِي خَوْ ذَلِكَ وَجَاءَ عَنْ عَلِيّ إِذَا فَقَدَتْ الْمَوْأَةُ وَوَهَ الْمَعْرِي الْمَوْرِيقِ الْبَحْرِ أَوْ فِي غَوْ ذَلِكَ وَجَاءَ عَنْ عَلِيّ إِذَا فَقَدَتْ الْمَوْأَةُ وَوَقَى مَا التَّكُونِ وَهَا لَمْ عَبْدُ الرَّوَاقِ بَلَغَنِي عَنْ عَلِي لَوْ مَوْرَقَ مَنْ الْمَوْلِ وَكَالِ التَكَانِ التَكُونِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّوَاقِ بَلَغَي الْفَلْوِ وَمَنْ عَلَى الْمَالِي وَمَنْ عَلِي لَا فَعَلَيْ إِنْ مَاتَ الْأَوْلُ مَعْنَى إِنَا المَّوْقِ وَالشَّافِعِيّ وَبَعْضُ أَنْ الْأَوْلُ حَيْ فُولُ اللَّوْلِ وَعَلَى اللَّالِي اللَّي التَّلِي المَّوْلِ وَمَنْ عَولُ السَّعْمِي لَا تَنْوَعَ وَالشَّافِعِيّ وَبَعْضُ أَصُورُ عَلْ عَلِي النَّوقِ وَالشَّافِعِيّ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ وَالْمَالِي وَلَا التَّالِي الْمُولِ وَعَلَى التَّالِ النَّولُ وَعَلَى اللَّالِي الْمَالِعَ عَلَى التَقْوِلُ الْمُولِقُولُ وَالشَّافِعِي وَبَعْضُ أَصْمَالِ الْحَدِيْثِ وَالْحَلَى المَّالِي وَلَوْ السَّعْمِي لَلْ التَّولُولُ الْمُؤْمِ وَالشَّافِعِي وَبَعْضُ أَصْوَالِ الْمُؤْمِ وَوْلُ الْمُؤْمِ وَالسَّافِعِي وَالشَّافِعِي وَبَعْضُ أَلُولُ الْمُؤْمِ اللَّولُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالشَّافِعِي وَالسَّافِعِي وَبَعْضُ أَلْمُوا وَلَوْلُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤُمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَا

Ungkapan Imam al-Bukhari: "Al-Zuhri berkata tentang seorang muslim yang menjadi tawanan perang, yang masih diketahui tempatnya: "Istrinya tidak boleh menikah lagi dan hartanya tidak boleh dibagi. Bila sudah hilang beritanya, maka baginya diterapkan hukum mafqud." Ibn Abi Syaibah meriwayatkan kisah tersebut secara muttasil (bersambung) dari al-Auza'i, ia berkata: "Aku bertanya kepada al-Zuhri tentang tawanan di daerah musuh, kapan istrinya boleh menikah lagi?" Ia menjawab: "Ia tidak boleh menikah lagi selama masih mengetahui suaminya masih hidup. Ada pula riwayat lain dari al-Zuhri yang menyatakan: "Hartanya dibekukan (tidak diwariskan) dahulu, begitu pula istrinya (tidak boleh menikah dengan orang lain) sampai keduanya selamat (dari tawanan) atau mati. Adapun ungkapan Imam al-Bukhari: "Maka baginya diterapkan hukum mafqud." sebab, pendapat al-Zuhri tentang wanita yang kehilangan kabar suaminya adalah ia harus menunggu selama empat tahun (untuk boleh menikah lagi)." Pendapat al-Zuhri tersebut diriwayatkan pula oleh Abd al-Razzaq, Sa'id bin Manshur, dan Ibn Abi Syaibah dari Umar ra. dengan sanadsanad yang shahih. Salah satunya adalah riwayat Abd al-Razaq, dari al-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyab, yang menyatakan Umar ra. dan Utsman ra. pernah memutuskan hukum demikian. Dengan sanad shahih, Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ibn Umar ra. dan Ibn Abbas ra., keduanya berkata: "Istri mafqud harus menanti empat tahun." Riwayat ini ada pula yang berasal dari Utsman ra. dan Ibn Masud ra., dan dari sekelompok tabi'in semisal al-Nakha'i, Atha', al-Zuhri, Mahkul dan al-Sya'bi.

Mayoritas tabi'in sepakat, bahwa masa tangguh dihitung sejak si istri melaporkan kasusnya kepada hakim, dan sepakat ia menjalani 'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, setelah lewatnya masa empat tahun tersebut. Mereka juga sepakat, bila wanita itu telah menikah (lagi), lalu suami pertama muncul, maka ia diberi pilihan antara istri atau menerima kompensasi maharnya. Mayoritas mereka berpendapat: "Bila ia memilih mahar, maka suami kedua yang menanggungnya." Mayoritas mereka juga tidak membedakan berbagai kondisi mafqud, kecuali riwayat Said al-Musayyab tadi.²¹

Namun Malik Ra. membedakan antara suami yang hilang dalam peperangan, maka masa tangguhnya adalah yang telah disebutkan (4 tahun, 4 bulan dan 10 hari). Sementara suami yang hilang di luar peperangan, maka tidak diberi masa tangguh. Namun si istri harus menunggu lewatnya umur yang di duga kuat suaminya tidak akan hidup melebihi umur itu. Ahmad dan Ishaq berkata; "Suami yang menghilang dari istri, lalu beritanya tidak diketahui, maka tidak ada masa tangguh bagi istrinya. Yang diberi penangguhan hanya suami yang hilang di peperangan, di lautan atau yang semisalnya." Ada pula riwayat dari Ali Ra.: "Bila istri kehilangan suami, maka ia tidak boleh menikah sampai suaminya datang atau meninggal dunia." Demikian yang diriwayatkan Abu Ubaid dalam bab nikah. Abd al-Razzaq berkata: "Telah sampai kepadaku riwayat dari Ibn Mas'ud Ra., ia sepakat dengan Ali Ra. mengenai wanita yang kehilangan suami, bahwa ia menunggu selamanya." Abu Ubaid meriwayatkan juga dengan sanad hasan, dari Ali Ra.: "Bila si wanita menikah lagi, maka statusnya tetap sebagai istri suami pertama, baik suami kedua telah melakukan persetubuhan dengannya atau belum." Said bin Manshur meriwayatkan, dari al-Sya'bi: "Bila ia nikah, lalu sampai

إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ تَرَبَّصَتِ امْرَأَتُهُ سَنَةً وَإِذَا فُقِدَ فِي غَيْرِ الصَّفِّ فَأَرْبَعَ سِنِيْنِ

²¹ Yaitu riwayat yang disebutkan Ibn hajar dalam awal bab berupa:

[&]quot;Bila ia hilang di medan pertempuran, maka istrinya menunggu setahun, dan bila hilang bukan di medan pertempuran, maka menunggu empat tahun." Lihat Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, awal bab Hukm al-Mafqud fi Ahlih wa Malih. Penerjemah.

padanya berita suami pertama masih hidup, maka ia dipisahkan dari suami kedua, dan menjalani 'iddahnya. Lalu bila suami pertama juga meninggal dunia, maka ia juga menjalani 'iddah dari suami pertama dan berhak mewarisi hartanya." Dalam riwayat al-Nakha'i disebutkan: "Wanita tersebut tidak boleh menikah lagi sampai ada kejelasan berita suaminya." Ini pendapat fuqaha Kufah, al-Syafi'i dan sebagian ahli hadits. Namun Ibn al-Mundzir memilih penangguhan, berdasarkan kesepakatan 5 orang sahabat atas hal itu. Wallahu a'lam.

4. Tuhfah al-Muhtaj²²

(وَمَنْ غَابَ) بِسَفَرٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ نِكَاحٌ حَتَّى يُتَيَقَّنَ) أَيْ يُخَجَّةٍ كَاسْتِفَاضَةٍ وَحُصْمٍ بِمَوْتِهِ (مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقُهُ) أَوْ غَوْهُمَا كَرِدَّتِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ يُظَنَّ بِحُجَّةٍ كَاسْتِفَاضَةٍ وَحُصْمٍ بِمَوْتِهِ (مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقُهُ) أَوْ غَوْهُمَا كَرِدَّتِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ بِمَا أُلِمِهِ ثُمَّ تَعْتَدُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْخِيَاةِ وَالنِّكَاحِ مَعَ ثُبُوتِهِ بِيقِينٍ فَلَمْ يَزُلْ إِلَّا بِهِ أَوْ بِمَا أُلْمِقِ بِهِ وَلِأَنَّ مَالَهُ لَا يُورَثُ وَأُمَّ وَلَذِهِ لَا تُعْتَقُ فَكَذَا زَوْجَتُهُ نَعَمْ لَوْ أَخْبَرَهَا عَدْلُ وَلَوْ عَدْلَ رِوَايَةٍ بِأَحَدِهِمَا حَلَّ لَهَا بَاطِنَا أَنْ تَنْكِحَ غَيْرَهُ وَلَا تُقَرَّعَلَى الْفَرْعَةِ بِالنِّسْبَةِ لِنَحْوِ أُخْتِهَا أَوْ خَامِسَةٍ الْعَرَا خِلَاقًا لِبَعْضِهِمْ وَيُقَاسُ بِذَلِكَ فَقْدُ الزَّوْجَةِ بِالنِّسْبَةِ لِنَحْوِ أُخْتِهَا أَوْ خَامِسَةٍ إِذَا لَمْ يُودُ طَلَاقَهَا (وَفِي الْقَدِيمِ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ) قِيلَ مِنْ حِينِ فَقْدِهِ وَالْأَصَحُ مِنْ إِنَّا لَمْ يُودُ طَلَاقَهَا (وَفِي الْقَدِيمِ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ) قِيلَ مِنْ حِينِ فَقْدِهِ وَالْأَصَحُ مِنْ إِلْقَاضِي فَلَا يُعْتَدُ بِمَا مَضَى قَبْلَهُ (ثُمَّ تَعْتَدُ لِوَفَاةٍ وَتَنْكِحُ) بَعْدَهَا اتِبَاعًا لِقَضَاءِ عُمْرَ عَلَى بِذَلِكَ وَاعْتُهِرَتْ الْأَرْبَعُ لِأَنَّهَا أَكْثُرُ مُدَّةِ الْحُمْلِ

(Suami yang menghilang) karena pergi atau sebab lain (dan terputus beritanya, maka istrinya tidak boleh menikah lagi sampai diyakini) yakni diduga kuat berdasarkan hujjah, seperti berita luas atau dinyatakan mati secara hukum (kematian atau talaknya) atau semisalnya, seperti murtadnya sebelum atau sesudah terjadi persetubuhan dengan syaratnya, kemudian si istri menjalani iddah. Sebab, hukum asalnya adalah si suami masih hidup dan pernikahan tetap sah secara yakin. Sehingga hal ini tidak bisa hilang kecuali dengan berita yang yakin pula atau yang disamakan dengannya. Juga mengingat, hartanya tidak bisa diwaris, dan budak perempuan yang melahirkan anaknya tidak dihukumi merdeka. Maka, demikian pula hukum yang berlaku bagi istrinya. Meskipun begitu, bila ada orang adil, walaupun adil dalam periwayatan, yang memberitakan

²² Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada Hawasyai al-Syarwani wa al-'Abbadi, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), Cet. ke-1, Jilid X, h. 456-457.

salah satu kematian atau talaknya), maka secara hukum batin ia boleh menikah dengan laki-laki lain dan -namun- tidak di akui secara hukum zhahir. ²³ Pendapat ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama. Dan diqiyaskan pula pada kasus tersebut, hilangnya seorang istri -untuk suami yang akan menikahi- semisal saudara perempuannya, atau akan menikahi wanita kelima bila tidak ingin mentalak istrinya yang hilang itu. ²⁴ (Dan dalam qaul qadim, ia harus menunggu selama empat tahun), menurut satu versi: empat tahun itu dihitung sejak raibnya si suami. Sementara menurut versi al-Ashhah, dihitung sejak ada keputusan dari hakim, maka waktu yang berlalu sebelumnya tidak di hitung. (Kemudian ia menjalani 'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya, lalu boleh menikah) setelahnya. Demikian karena mengikuti putusan hukum Umar r.a. dalam kasus tersebut. Penggunaan acuan empat tahun, mengingat masa tersebut merupakan batas maksimal masa kehamilan.

5. Syarh al-Mahalli bi Hamisy Hasyiyyah al-Qulyubi wa 'Umairah²⁵:

(وَلَوْ نَصَحَتْ بَعْدَ التَّرَبُّصِ وَالْعِدَّةِ فَبَانَ) الزَّوْجُ (مَيِّتًا) وَقْتَ الْحُكْمِ بِالْفُرْقَةِ (صَحَّ) النِّكَاحُ (عَلَى الْجَدِيْدِ) أَيْضًا (في الْأَصَحِّ) لِخُلُوهِ مِنَ الْمَانِعِ فِي الْوَاقِعِ وَالطَّانِي لَا يَصِحُّ لِانْتِفَاءِ الْجُرْمِ بِحُلُوهِ مِنَ الْمَانِعِ وَقْتَ عَقْدِهِ وَلَوْ بَانَ الزَّوْجُ حَيًّا بَعْدَ أَنْ يَصِحُّ لِانْتِفَاءِ الْجُرْمِ بِحُلُوهِ مِنَ الْمَانِعِ وَقْتَ عَقْدِهِ وَلَوْ بَانَ الزَّوْجُ حَيًّا بَعْدَ أَنْ نَصَحَتْ فَهُو عَلَى الْقَدِيمِ عَلَى زَوْجَتِهِ كَالْجَدِيْدِ لِتَبَيُّنِ الْحَطَلُ فِي الْحُكْمِ لَكِنْ لَا يَصَعَتْ فَهُو عَلَى الْقَدِيمِ عَلَى زَوْجَتِهِ كَالْجَدِيْدِ لِتَبَيُّنِ الْخَطَلُ فِي الْحُكْمِ لَكِنْ لَا يَعْدَلُ لِللَّانِ وَقِيلَ هِي زَوْجُهُ الطَّانِي لِارْتِفَاعِ نِكَاجِ الْأَوَّلِ بِنَاءً عَلَى نُفُوْذِ يَطُوهُمَا حَتَى تَعْتَدً لِلتَّانِي وَبَيْنَ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنَ الظَّانِي وَبَيْنَ أَنْ يَتُوكُهَا الْجَلِي وَبَيْنَ أَنْ يَتْزِعَهَا مِنَ الظَّانِي وَبَيْنَ أَنْ يَتُوكُهَا وَيَا لِنَّا لِيَقَاءً عُمَرَ عَلَى الْقَانِي وَبَيْنَ أَنْ يَتُوكُهَا وَيَا لِنَّا لِمَتَا لَا لَقَافِي وَبَيْنَ أَنْ يَتْزِعَهَا مِنَ الظَّافِي وَبَيْنَ أَنْ يَتُوكُهُ اللَّهُ الْمَتِيهَ فِي الْمَالِقَ فَهُو مِنْ لِقَضَاءِ عُمَرَ عَلَى لِللَّاكِةِ وَالْمَالِقَ فَا عَمْرَ عِنْهُ بِذَلِكَ وَوَاهُ الْبَيهِ قَيْ

(Bila istri mafqud menikah setelah ia menunggu empat tahun dan menjalani 'iddah, kemudian terbukti) kalau suaminya (mati) ketika diputuskan cerai, (maka sah) pernikahannya (berdasarkan qaul jadid) (dalam pendapat al-Ashah) karena secara nyata tidak ada hal yang mencegah keabsahannya. Sementara menurut pendapat kedua tidak sah, karena

668

²³ Sehingga bila hakim mengetahui pernikahan tersebut, maka ia harus memisahkan keduanya. Lihat al-Qulyubi, *Hasyiyah al-Qulyubi*, (Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), Juz IV, h. 52. (Pen).

²⁴ Lihat, Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz VII, h. 148. (Pen).

²⁵ Jalaluddin al-Mahalli, Syarh al-Mahalli bi Hamisy Hasyiyyata al-Qulyubi wa 'Umairah, (Surabaya: Dar Nasyr al-Mishriyah, t. th.), Jilid IV, h. 51.

ketika akad berlangsung tidak terdapat kepastian terbebasnya akad tersebut dari hal yang mencegah keabsahannya. Bila terbukti suami pertama masih hidup setelah istrinya menikah lagi, maka berdasarkan qaul qadim ia masih tetap berstatus sebagai istri suami pertama, sebagaimana pendapat qaul jadid. Sebab jelas-jelas terjadi kesalahan hukum. Namun suami pertama belum boleh bersetubuh dengannya sampai ia menjalani 'iddah dari suami kedua. Menurut versi lain, ia tetap menjadi istri suami kedua, karena status pernikahan suami pertama sudah terhapus. Hal ini berdasarkan hukum pernikahan istri dan suami kedua tersebut sah secara zhahir dan batin. Sedangkan menurut versi lain, suami pertama diberi hak pilih antara mengambil istri dari suami kedua atau membiarkannya dengan suami kedua dan mengambil mahar mitsil darinya. Hal ini didasarkan pada keputusan hukum Umar r.a. dalam kasus tersebut yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi.

443. Asas Pembuktian Terbalik

A. Deskripsi Masalah

Berbagai tindakan atau kebijakan yang terindikasi merugikan negara yang berarti korupsi sering terjadi. Isu penyusutan pendapatan negara yang tidak realistis dan pembengkakan belanja negara yang tidak obyektif sering mencuat di permukaan dan menjadi pembahasan. Sehingga, negara terus menumpuk hutang dan semakin banyak rakyat dalam kemiskinan. Sedangkan kekayaan yang dimiliki oleh sebagian para pejabat pemerintah dan para koleganya melebihi kewajaran jika diukur dari berbagai sumber pendapatan yang sah.

Kekayaan yang melebihi batas kewajaran yang dimiliki oleh mereka itu menimbulkan kecurigaan, mungkin diperolehnya dari perbuatan korupsi? Namun, kecurigaan itu tidak dapat ditindaklanjuti secara hukum karena belum ada bukti dan saksi. Karenanya, ada upaya melakukan asas pembuktian terbalik, di mana pemilik harta kekayaan yang tidak wajar itu diminta untuk membuktikan asal usul harta kekayaannya. Jika tidak berhasil membuktikannya, maka harta kekayaannya itu dijadikan barang bukti bahwa mereka memperolehnya dari korupsi.

B. Pertanyaan

Apakah hukum Islam dapat menerima asas pembuktian terbalik?

C. Jawaban

Hukum Islam dapat menerima asas pembuktian terbalik dalam

kedudukan sebagai qarinah (indikasi).

D. Dasar Penetapan

Al-Qur'an

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓا أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا هِجَهَلَةِ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَندِمِينَ ۞

"Hai orang-orang yang beriman, bila datang kepadamu orang fasiq membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang menyebabkan kamu menyesali perbuatanmu itu." (QS. Al-Hujurat: 6)

Al-Sunnah, al-Atsar dan Ijma'

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

"Dari Ibn Abbas ra., sungguh Nabi Saw. bersabda: "Andai setiap orang diberi (kebebasan) atas dakwaannya, niscaya mereka akan menuntut darah orang lain dan harta bendanya. Namun, hak sumpah (untuk menyangkalnya) diberikan kepada terdakwa." (Muttafaq 'alaih)

1. Al-Minhaj, Syarh Shahih Muslim²⁶

قَوْلُهُ ﷺ (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَكَذَا عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هَكَذَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمُ فِي صَحِيحِهِمَا مَرْفُوعًا مِنْ رِوَايَةِ بْنِ عَبَّاسَ عَنِ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمُ فِي صَحِيحِهِمَا مَرْفُوعًا مِنْ رِوَايَةِ بْنِ عَبَّاسَ عَنِ النَّبِي ﷺ وَهَكَذَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَغَيْرُهُمْ ... وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَةِيُ وَغَيْرِهِ النَّبِي ﷺ وَهَكَذَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَغَيْرُهُمْ ... وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَةِيُ وَغَيْرِهِ النَّبِي ﷺ وَهَكَذَا ذَكَرَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَغَيْرُهُمْ ... وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ الْبَيْهَةِيُ وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ أَوْ صَحِيْحٍ زِيَادَةً عَنِ بْنِ عَبَّاسَ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِيمُعَواهُمْ لَادَّعَى قَوْمُ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْبَيّنَةَ عَلَى الْمُدّعِي وَالْيَمِيْنَ عَلَى مَنْ الْهُ لِيسَانِ فِيمَا يَدَّعِيهِ بِمُجَرِّدِ دَعْوَاهُ بَلْ يَحْتَاجُ إِلَى بَيّنَةٍ أَوْ تَصْدِيقِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ الْإِنْسَانِ فِيمَا يَدَّعِيهِ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ بَلْ يَحْتَاجُ إِلَى بَيّنَةٍ أَوْ تَصْدِيقِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ الْإِنْسَانِ فِيمَا يَدَّعِيهِ بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ بَلْ يَحْتَاجُ إِلَى بَيّنَةٍ أَوْ تَصْدِيقِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ

670

²⁶ Muhyiddin al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.), Cet. ke-2, Juz XII, h. 2-3.

طُلِبَ يَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَقَدْ بَيَّنَ ﷺ الْحِكْمَةَ فِي كُوْنِهِ لَا يُعْطَى بِمُجَرَّدِ دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ أُعْطِيَ بِمُجَرَّدِهَا لَادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَاسْتُبِيْحَ وَلَا يُمْكِنُ الْمُدَّعِى عَلَيْهِ أَنْ يَصُونَ مَالَهُ وَدَمَهُ وَأَمَّا الْمُدَّعِي فَيُمْكِنُهُ صِيَانَتُهُمَا بِالْبَيِّنَةِ

Sabda Nabi Saw.: "Andaikan setiap orang diberi (kebebasan) dengan dakwaannya, niscaya mereka akan menuntut darah orang lain dan harta bendanya. Namun, hak sumpah (untuk menyangkalnya) diberikan kepada terdakwa." Dalam riwayat lain disebutkan: "Sungguh Nabi Saw. telah memutuskan hukum dengan sumpah bagi terdakwa." Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab Shahih mereka, dengan status marfu' dari riwayat Ibn Abbas, dari Nabi Saw. Hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Ashhab al-Sunan dan selainnya. ... Sementara dalam riwayat Baihaqi dan ulama lain, dengan sanad yang hasan atau shahih, terdapat tambahan redaksi dari Ibn Abbas, dari Nabi Saw: "Andaikan setiap orang diberi (kebebasan) dengan dakwaannya, niscaya mereka akan menuntut darah orang lain dan harta bendanya. Namun, bukti harus ditunjukkan oleh pendakwa dan hak sumpah diberikan bagi terdakwa yang mengingkarinya." Hadits tersebut merupakan kaidah pokok dalam kaidah hukum syari'at. Di dalamnya terdapat kaidah, tuntutan seseorang tidak dapat diterima hanya berdasarkan dakwaannya. Namun ia harus mengajukan bukti atau mendapat pengakuan dari terdakwa. Maka, bila terdakwa dituntut bersumpah (mengingkari dakwaannya), ia boleh melakukannya. Nabi juga telah menjelaskan hikmah dari tidak diterimanya tuntutan yang hanya berdasarkan dakwaan. Sebab, andaikan diterima, niscaya semua orang akan menuntut darah dan harta orang lain dan diterima. Di lain sisi, terdakwa tidak mampu melindungi harta dan jiwanya (dari tuntutan tersebut). Sementara pendakwa bisa melindunginya dengan adanya bukti.

2. Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah²⁷

وَحَكَمَ النَّبِيُ ﷺ بِمُوجِبِ اللَّوْثِ فِي الْقَسَامَةِ وَجَوَّزَ لِلْمُدَّعِينَ أَنْ يَحْلِفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا وَيَسْتَحِقُّونَ دَمَ الْقَتِيلِ فَهَذَا لَوْثُ فِي الدِّمَاءِ وَالَّذِي فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ لَوْثُ فِي الْأَمْوَالِ وَالَّذِي فِي سُوْرَةِ يُوسُفَ لَوْثُ فِي الدَّعْوَى فِي الْعِرْضِ وَخَوْهِ وَهَذَا حُكُمُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ وَالصَّحَابَةُ

²⁷ Ibn Qayyim al-Jauziyah, al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syari'iyah, (Beirut: Dar Ihya' al-Ulum, t. th.), h. 12-13.

مَعَهُ بِرَجْمِ الْمَرْأَةِ الَّتِي ظَهَرَ بِهَا الْحَبْلُ وَلَا زَوْجَ لَهَا وَلَا سَيِّدَ وَذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ فِي أَصَحّ رِوَايَتَيْهِ اعْتِمَادًا عَلَى الْقَرِيْنَةِ الظَّاهِرَةِ وَحَكَمَ عُمَرُ وَابْنُ مَسْعُوْدٍ وَلَا يُعْرَفُ لَهُمَا مُخَالِفُ بِوُجُوبِ الْحَدِّ بِرَائِحَةِ الْحَمْرِ مِنْ فِي الرَّجُلِ أَوْ قَيْئِهِ خَمْرًا اعْتِمَاذًا عَلَى الْقَرِيْنَةِ الظَّاهِرَةِ وَلَمْ تَزَلْ الْأَيْمَّةُ وَالْخُلَفَاءُ يَحْكُمُونَ بِالْقَطْعِ إِذَا وُجِدَ الْمَالُ الْمَسْرُوقُ مَعَ الْمُتَّهَمِ وَهَذِهِ الْقَرِيْنَةُ أَقْوَى مِنَ الْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَارِ فَإِنَّهُمَا خَبَرَانِ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِمَا الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ وَوُجُودُ الْمَالِ مَعَهُ نَصٌّ صَرِيحٌ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ شُبْهَةً وَهَلْ يَشُكُّ أَحَدٌ رَأَى قَتِيلًا يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ وَآخَرُ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِالسِّكِّينَ أَنَّهُ قَتَلَهُ وَلَا سِيمَا إِذَا عُرِفَ بِعَدَاوَتِهِ وَلِهَذَا جَوَّزَ جُمْهُوْرُ الْعُلَمَاءِ لِوَلِيِّ الْقَتِيلِ أَنْ يَحْلِفَ خَمْسِينَ يَمِينًا أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ قَتَلَهُ ثُمَّ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ يُقْتَلُ بِهِ وَقَالَ الشَّافِعِي يُقْضَى عَلَيْهِ بِدِيَتِهِ وَكَذَلِكَ إِذَا رَأَيْنَا رَجُلًا مَكْشُوفَ الرَّأْسِ وَلَيْسَ ذَلِكَ عَادَتُهُ وَآخَرُ هَارِبُ قُدَامَهُ بِيَدِهِ عِمَامَةً وَعَلَى رَأْسِهِ عِمَامَةً حَكَمْنَا لَهُ بِالْعُمَامَةِ الَّتِي بِيَدِ الْهَارِبِ قَطْعًا وَلَا نَحْكُمُ بِهَا لِصَاحِبِ الْيَدِ الَّتِي قَدْ قَطَعْنَا وَجَزَمْنَا بِأَنَّهَا يَدُّ ظَالِمَةُ غَاصِبَةٌ بِالْقَرِيْنَةِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي هِيَ أَقْوَى بِكَثِيْرِ مِنَ الْبَيِّنَةِ وَالاعْتِرَافِ وَهَلِ الْقَضَاءُ بِالنُّكُولِ إِلَّا رُجُوعٌ إِلَى مُجَرَّدِ الْقَرِيْنَةِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي عَلِمْنَا بِهَا ظَاهِرًا أَنَّهُ لَوْلَا صِدْقُ الْمُدَّعِي لَدَفَعَ الْمُدَّعَى دَعْوَاهُ بِالْيَمِيْنِ فَلَمَّا نَكَلَ عَنْهَا كَانَ نُكُولُهُ قَرِيْنَةً ظَاهِرَةً دَالَّةً عَلَى صِدْقِ الْمُدَّعِي فَقُدِّمَتْ عَلَى أَصْلِ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ وَكَثِيْرٌ مِنَ الْقَرَائِنِ وَالْأَمَارَاتِ أَقْرَى مِنَ النُّكُولِ وَالْحِسُّ شَاهِدٌ بِذَلِكَ فَكَيْفَ يُسَوَّعُ تَعْطِيلُ شَهَادَتِهَا وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ الزُّنَيْرَ أَنْ يُقَرِّرَ عَمَّ حُيِّيِّ بْنِ أَخْطَبَ بِالْعَذَابِ عَلَى إِخْرَاجِ الْمَالِ الَّذِي غَيَّبَهُ وَادَّعَى نَفَادَهُ فَقَالَ لَهُ الْعَهْدُ قَرِيْبٌ وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهَاتَانِ قَرِيْنَتَانِ فِي غَايَةٍ الْقُوَّةِ كَثْرَةُ الْمَالِ وَقَصْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي يُنْفِقُ كُلَّهُ فِيهَا

Nabi Saw. pernah memutuskan hukum dengan petunjuk *lauts* (tandatanda penguat) dalam kasus *qasamah*²⁸ dan memperbolehkan pendakwa melakukan sumpah lima puluh kali dan kemudian berhak atas (diyat) jiwa korban. Ini contoh *lauts* dalam kasus pembunuhan. Dalam surah al-Maidah terdapat *lauts* kasus harta, dalam surah Yusuf terdapat lauts kasus kehormatan dan semisalnya. Umar ra. dan para sahabat telah

²⁸ Qasamah adalah sumpah (pendakwa) dalam kasus pembunuhan. Lihat, Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni, Kifayah al-Akhyar, (Damaskus: Dar al-Khair, 1994) h. 470. (Pen).

menghukum rajam seorang wanita hamil tanpa memiliki suami atau sayyid (majikan pemiliknya). Begitu pendapat Malik dan Ahmad dalam riwayat yang lebih shahih dari dua riwayat mereka, dengan berdasarkan qarinah (bukti-bukti) zhahir. Tanpa ada yang menentang, Umar dan Ibn Mas'ud pernah pula mewajibkan had disebabkan bau khamr dari mulut seseorang, atau dari muntahan khamrnya, dengan berdasar qarinah zhahir. Para ulama dan khalifah selalu memutuskan hukum potong tangan bila barang curian ada di tangan tersangka. Qarinah ini dinilai lebih kuat dari pada bukti dan pengakuan tersangka. Sebab, keduanya merupakan berita yang mungkin benar dan tidak. Sementara adanya barang curian di tangan tersangka merupakan bukti kuat yang tidak samar lagi.

Apakah seseorang yang melihat korban pembunuhan dan orang di dekatnya yang memegang pisau ragu, bahwa orang itu pembunuhnya? Apalagi bila diketahui terdapat permusuhah antara keduanya. Oleh sebab itu, mayoritas ulama memperbolehkan wali korban bersumpah lima puluh kali bahwa orang itu telah membunuh korban. Selanjutnya Malik dan Ahmad berpendapat, pelaku dihukum mati. Sementara menurut al-Syafi'i, ia dihukum dengan diatnya. Begitu pula ketika kita melilhat seseorang yang terbuka kepalanya, yang mana hal itu bukan kebiasaannya, dan melihat orang lari di depannya yang membawa sorban, sementara dia sudah memakai sorban lain, maka kita pasti memutuskan bahwa sorban yang dibawa itu adalah milik orang tadi. Kita tidak bisa memutuskan, bahwa sorban itu milik orang yang membawa lari yang telah kita pastikan dia mengambilnya dengan cara zalim dan ghasab, yakni dengan garinah zhahir yang jauh lebih kuat dari pada bukti dan pengakuannya. Bukankah keputusan hukum dengan penolakan hak sumpah terdakwa hanyalah kembali pada garinah zhahirah saja? Yang mana darinya kita ketahui secara jelas, andaikan pendakwa tidak benar, niscaya terdakwa akan menolak dakwaanya dengan sumpah. Lalu ketika terdakwa menolak untuk bersumpah, maka penolakannya itu menjadi qarinah zhahirah yang menunjukkan kebenaran pendakwa. Maka garinah zhahirah didahulukan dari pada hukum asal, yakni tidak adanya tanggungjawab terdakwa. Cukup banyak pula qarinah dan tanda lain yang lebih kuat dari pada penolakan sumpah, dan kenyataan membuktikan demikian. Maka, bagaimana boleh mengabaikan kesaksian garinah dan tandatanda itu?

Contoh kasusnya adalah perintah Nabi Saw. kepada al-Zubair agar menghukum paman Huyai bin Akhtab karena membelanjakan harta Huyai tanpa sepengetahuannya dan mengaku telah menghabiskannya. Lalu Nabi Saw. bersabda: "Waktunya singkat, sedangkan hartanya lebih banyak dari (dihabiskan dalam waktu) itu." Maka dua hal ini, yaitu banyaknya uang dan singkatnya waktu untuk menghabiskannya menjadi petunjuk yang sangat kuat.

Aqwal al-Ulama'

1. Al-Bahjah fi Syarh al-Tuhfah²⁹

وَفِي أَحْكامَ ابْنِ سَهْلِ إِذَا وُجِدَ عِنْدَ الْمُتَّهَمِ بَعْضُ الْمَتَاعِ الْمَسْرُوقِ وَادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَلاَ بَيْنَةَ لَهُ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ غَيْرُ مَا بِيَدِهِ فَإِنْ كَانَ مَجْهُولَ الْحَالِ فَعَلَى السَّلْطَانِ حَبْسُهُ وَالْكَشْفُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مَعْرُوفاً بِالسَّرِقَةِ حُبِسَ حَتَّى يَمُوْتَ فِي السِّجْنِ اهوَخَوْهُ وَالْكَشْفُو عَنْ مَالِكِ عِنْدَ قَولِهِ لاِبْنِ يُونُسَ عَنْ مُطْرِفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونَ وَأَصَبَغَ وَتَقَدَّمَ مِثْلُهُ عَنْ مَالِكِ عِنْدَ قَولِهِ وَالْقُولُ لِلْغَاصِبِ وَقَوْلُهُ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ غَيْرُ مَا بِيَدِهِ إِلَحْ هَذَا إِنَّمَا يُتَمَشَّى عَلَى الْمَشْهُورِ لَا عَلَى مَا مَرَّ فِي الْغَوامِبِ وَقُولُهُ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ غَيْرُ مَا بِيَدِهِ إِلَحْ هَذَا إِنَّمَا يُتَمَشَّى عَلَى الْمَشْهُورِ لَا عَلَى مَا مَرَّ فِي الْغَوَامَةِ بِمُجَرَّدِ الدَّعَوَى وَالْقَوْلُ لِلْغَرَامَةِ بِمُجَرَّدِ الدَّعَوَى الْمَسْرُوقِ قَدْ وُجِدَ بِيدِهِ وَأَنَّ الْقَوْلُ لِلْمَسْرُوقِ مِنْهُ فِي قَدْرِهِ وَلَى السَّمْوقِ مِنْهُ فِي قَدْرِهِ وَقُولُهُ حَتَى يَمُوْتَ إِلَحْ بِمِثْلِهِ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَائِلاً يُسْجَنُ حَتَّى يَمُوتَ إِلَحْ بِمِثْلِهِ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَائِلاً يُسْجَنُ حَتَّى يَمُوتَ إِلَحْ بِمِثْلِهِ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَائِلاً يُسْجَنُ حَتَّى يَمُوتَ إِلَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ

Dalam kitab Ahkam Ibn Sahl disebutkan, bila pada tersangka ditemukan sebagian barang curian dan menurut pengakuannya barang tersebut dia beli, namun tidak terdapat buktinya, maka yang disita hanyalah barang yang ada ditangannya. Bila ia tidak dikenal, maka penguasa harus menahan dan mengintrogasinya. Bila ia dikenal suka melakukan pencurian, maka harus ditahan sampai mati di dalam penjara. Demikian keterangan Ibn Sahl. Pendapat senada diriwayatkan oleh Ibn Yunus dari Muthrif, Ibn al-Majisyun dan Ashbagh. Pendapat yang sama telah dikemukakan pula oleh Malik, dalam pendapatnya: "Yang dibenarkan adalah ucapan orang yang ghasab." Ungkapan Ibn Sahl: "Maka yang disita hanyalah barang yang ada ditangannya ..." Ini semata-mata didasarkan pada pendapat masyhur, bukan berdasarkan pada pendapat

674

²⁹ Abu al-Hasan al-Tasuli, al-Bahjah fi Syarh al-Tuhfah, (Dar Rasyad al- Haditsiyah, 1991), Jilid I, h. 282.

yang telah disebutkan dalam bab ghasab, yakni tindakan yang diambil adalah mewajibkan tersangka untuk bertanggungjawab (menanggung kerugian) dengan hanya berdasarkan pada dakwaan saja, apalagi dari kenyataan sebagian barang curian ada di tangannya. Dan yang dibenarkan adalah ucapan orang yang dicuri barangnya. Ungkapan Ibn Sahl: "Sampai mati ..." Keputusan hukum serupa telah diambil oleh Umar bin Abd Aziz, yang menyatakan: "Tersangka pencurian dipenjara sampai mati." Dalam at-Tabshirah Ibn Farhun al-Ya'miri berpendapat: "Yakni bila dia tidak mau mengakuinya."

2. Al-Dur al-Mukhtar bi Hamiy Rad al-Muhtar30

(فَاثِدَةٌ) ذَكَرَ الطَّرَسُوسِي فِي مُوَلَّفِ لَهُ إِنَّ مَصَادِرَةَ السُّلْطَانِ لِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ لَا يَجُوزُ إِلَّا لِعُمَّالِ بَيْتِ المْالِ مُسْتَدِلًا بِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ ﴿ صَادَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ اهوَذَلِكَ حِينَ السَّعْمَلَهُ عَلَى الْبَحْرَينِ ثُمَّ عَزَّلَهُ وَأَخَذَ مِنْهُ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا ثُمَّ دَعَاهُ لِلْعَمَلِ فَأَبَى رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ وَأَرَادَ بِعُمَّالِ بَيْتِ الْمَالِ خَدَمَتَهُ الَّذِيْنَ يُجِبُّونَ أَمْوَالَهُ وَمِنْ ذَلِكَ كَتَبُتُهُ إِذَا الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ وَأَرَادَ بِعُمَّالِ بَيْتِ الْمَالِ خَدَمَتَهُ الَّذِيْنَ يُجِبُّونَ أَمْوَالَهُ وَمِنْ ذَلِكَ كَتَبُتُهُ إِذَا لَمُعَلِ فَا لِمَالِ مَيْتِ الْمَالِ خَدَمَتَهُ الَّذِيْنَ يُجِبُّونَ أَمْوَالَهُ وَمِنْ ذَلِكَ كَتَبُتُهُ إِذَا لَكُومَ اللَّهُ وَمِنْ ذَلِكَ كَتَبُتُهُ إِذَا لَمَالُ اللَّهُ وَمِنْ فَلِكَ عَلَى خِيَانَتِهِمْ وَيُلْحَقُ كَتَبَةُ الْأَوْقَافُ وَنَظَائِرُهَا إِذَا تَوَاللَّهُ وَاللَّ مَنْ اللَّهُ وَلِيَاءَ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا قَطَعُوا وَتَعَاطُوا أَنْوَاعَ اللَّهُ و وَبِنَاءَ الْأَمَاكِنِ فَاللَّ وَضَعَهُ فِي بَيْتِ الْمَالُ اللَّهُ وَإِلَا وَضَعَهُ فِي بَيْتِ الْمَالُ اللَّهِ وَإِلاَ وَضَعَهُ فِي بَيْتِ الْمَالُ اللَّهُ الْمُولُولُ عَلَوْلُكُولُولُ عَلَاكُولُ الْمَالُ اللَّهُ وَإِلاَّ وَضَعَهُ فِي بَيْتِ الْمَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْرَالُ وَلَا الْمَالُ اللَّهُ الْمُعَالَولُولُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُؤْلِ وَلَا وَضَعَهُ فِي بَيْتِ الْمَالُ اللَّهُ الْعَالُولُ الْمُعْرُالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُؤْلِقُ

Al-Tharasusi menyebutkan dalam salah satu karyanya: "Penyitaan harta oleh kepala pemerintahan kepada para pemiliknya tidak diperbolehkan, kecuali para pegawai bait al-mal (kas negara). Hal ini berdasarkan tindakan Umar ra. yang pernah mencekal Abu Hurairah ra." Kisah itu terjadi ketika ia menjabat gubernur Bahrain. Kemudian Umar ra. menonaktifkannya dari jabatan tersebut, dan menyita hartanya sebesar dua belas ribu. Saat Umar ra. memintanya untuk berdinas lagi, kemudian dia menolak. (HR. Hakim dan selainnya). Yang dimaksud al-Tharasusi dengan pegawai bait al-mal adalah para penarik dana. Termasuk pula pegawai pencatatnya ketika mereka ikut-ikutan menggunakan dananya secara berlebihan. Sebab hal tersebut menjadi dalil atas korupsi mereka. Disamakan pula dalam hukum tersebut, para pencatat wakaf dan pengurusnya ketika mereka menggunakan harta wakaf secara berlebihan, mempermainkan, dan membagun berbagai gedung. Maka, hakim boleh menyita harta

³⁰ Muhammad bin Ali/Alauddin al-Hashkafi, al-Dur al-Mukhtar pada Rad al-Muhtar, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid V, h. 625.

mereka dan menurunkan dari jabatannya. Bila terbukti mereka meraupnya dari wakaf tertentu, maka harta tersebut dikembalikan kepada wakaf itu. Bila tidak, maka diserahkan ke bait al-mal.

Catatan:

Sidang mengamanahkan kepada PBNU untuk membahas sisa masalah yang belum sempat dibahas dengan mengadakan Bahtsul Masail, selambatlambatnya dua minggu setelah Munas dan Konbes NU 2006.

Ditetapkan di

: Surabaya

Pada tanggal

: 30 Juli 2006

PIMPINAN SIDANG PLENO KOMISI BAHTSUL MASAIL DINIYYAH WAQI'IYYAH

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

KH. Arwani Faishal KH. DR. M. Masyhuri Na'im, MA

Pendamping

ttd

ttd

KH. Drs. Ghozalie Masroeri

KH. A. Malik Madani, MA

ttd

KH. Ahmad Sadid Jauhari

TIM PERUMUS:

Ketua, merangkap anggota:

KH. DR. M. Masyhuri Na'im, MA (PBNU)

Sekretaris merangkap anggota:

KH. Arwani Faishal (PBNU)

Anggota:

676

KH. Drs. Ghazalie Masroeri (PBNU) KH. A. Malik Madani, MA. (PBNU) KH. A. Sadid Jauhari (PBNU)

KH. Yasin Asmuni (PWNU JATIM) KH. Muhammad Ardani (PWNU JATIM) KH. Moh Aniq Muhammadun (PWNU JATENG) KH. Busro Musthofa (PWNU JATENG)

KEPUTUSAN LANJUTAN BAHTSUL MASAIL KOMISI BAHTSUL MASAIL Al-DINIYYAH Al-WAQI'IYYAH MUNAS ALIM ULAMA

Di Gedung PBNU Jakarta Tanggal 21-22 Rajab 1427 H/ 16-16 Agustus 2006 M

444. Kuis Berhadiah 445. Sumpah Dengan Terjemah Qasam 446. Face Off (Rekontruksi Wajah) 447. Infotainment; Mengungkap Kejelekan Orang 448. Trafficking (Perdagangan Manusia)

444. Kuis Berhadiah

A. Deskripsi Masalah

Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi telah menimbulkan banyak manfaat dan banyak masalah. Di antaranya, semakin maraknya suguhan kuis berhadiah melalui media televisi, radio, media cetak dan telpon seluler, untuk dijawab dengan menggunakan fasilitas telpon, termasuk SMS (Short Message Service/Layanan Pesan Singkat).

Kuis berhadiah tersebut menjadi sarana bisnis bagi pihak penyelenggara dengan menetapkan harga pulsa melebihi tarif biasa dengan iming-iming hadiah.

B. Pertanyaan

Bagaimanakah hukum kuis berhadiah yang dijawab melalui fasilitas telpon, termasuk SMS dengan harga pulsa melebihi tarif biasa?

C. Jawaban

Hukum kuis berhadiah yang dijawab dengan telpon atau SMS dengan harga pulsa yang melebihi tarif biasa adalah haram. Sebab, terdapat unsur *maisir* (gambling/taruhan) bila penyelenggara mengambil keuntungan dari akumulasi harga pulsa tersebut. Lebih-lebih hadiahnya diambilkan dari akumulasi harga pulsa tersebut.

D. Dasar Penetapan

Al-Qur'an

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." (QS. Al-Baqarah: 219)

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. al-Maidah: 90)

678

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ۞

"Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)." (QS. Al-Maidah: 91)

Al-Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَالْكُوبَةِ وَالْغُبَيْرَاءِ وَقَالَ كُلُّ مُسْكِرِ حَرَامٌ

"Dari Abdullah bin Umar, sungguh Nabi Allah Saw. telah melarang khamr, perjudian, permainan dadu, dan minuman keras dari jagung (produksi Etopia)." Dan beliau bersabda: "Segala (minuman) yang memabukkan adalah haram." (HR. Abu Daud)

Aqwal al-Ulama

1. Lisan al-Arab31

وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ (يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ) قَالَ مُجَاهِدُ كُلُّ شَيْءٍ فِيْهِ قِمَارٌ فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ حَتَّى لَعْبُ الصِّبْيَانِ بِالجُوْزِ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ كُرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ أَنَّهُ قَالَ الشَّطْرَنْجُ مَيْسِرُ العَجَمِ شَبَّة اللَّعْبَ بِهِ بِالْمَيْسِرِ وَهُوَ الْقِدَاحُ وَنَحُو ذَلِكَ قَالَ عَطَاءً فِي الْمَيْسِرِ وَهُوَ الْقِدَاحُ وَنَحُو ذَلِكَ قَالَ عَطَاءً فِي الْمَيْسِرِ إِنَّهُ الْقِمَارُ بِالقِدَاحِ فِي كُلِّ شَيْءٍ

Tentang tafsir ayat al-Quran al-'Aziz: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamrdan judi." (Al-Baqarah: 219) Imam Mujahid berkata: "Segala sesuatu yang mengandung qimar (taruhan) adalah maisir/judi, meskipun permainan anak-anak dengan buah juz. Diriwayatkan dari Ali Kw., ia berkata: "Permainan catur seperti judi orang non Arab". Maksudnya Ali Kw. menyamakan bermain catur dengan maisir. Yaitu permainan dengan qidah (batu yang bisa digunakan untuk menyalakan api)³² dan semisalnya. Atha' berkata: "Maisir adalah permainan dengan batu api dalam wadah apapun."

³¹ Ibn Manzhur, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar al-Shadir, t. th.) Jilid V, h. 299.

³² Ibn Manzhur, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar al-Shadir, t. th.) Jilid II, h. 554. (Pen).

2. Kasyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'33

ثُرَدُّ شَهَادَةُ (مَنْ دَاوَمَ عَلَى اسْتِمَاعِ الْمُحَرَّمَاتِ ... فَتُحَرَّمُ آلَاتُ اللَّهْوِ اتَّخَاذَا وَاسْتِعْمَالًا وَصِنَاعَةٌ وَلَعِبٌ فِيهِ قِمَارٌ وَتَحَرَّرَ مِنْهُ) ذَلِكَ اللَّعِبُ أَيُّ لَعِبٍ كَانَ وَهُوَ مِنْ الْمَيْسِرِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِاجْتِنَابِهِ وَمَا خَلَا مِنَ الْقِمَارِ وَهُوَ الْعُوضُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا فَمِنْهُ مَا هُوَ مُحُرَّمٌ كَالنَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ إِلَّا أَنَّ النَّرْدَ آكَدُ لِوُرُودِ النَّصِّ فِيهِ

Tertolak pula kesaksian (seseorang yang selalu mendengarkan hal-hal haram ... Maka alat permainan itu hukumnya diharamkan, baik membuat, menggunakan, dan menjadikan pekerjaan. Begitu pula permainan yang mengandung taruhan, dan permainan tersebut sudah berulangkali ia lakukan). Apapun jenis permainannya. Permainan yang mengandung taruhan itu termasuk kategori maisir yang telah Allah Ta'ala perintahkan untuk dihindari. Maka yang selain qimar, yaitu permainan yang 'iwad-hadiah-nya diambil dari kedua belah pihak atau dari salah satunya, maka permainan tersebut ada yang haram, seperti permainan dadu dan catur. Hanya saja permainan dadu lebih kuat kadar keharamannya, karena adanya nash yang menerangkannya.

3. Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib³⁴

قَوْلُهُ (وَالْمَيْسِرُ) هُوَ لَعِبُ الْقِمَارِ وَهُوَ كُلُ لَعِبٍ تَرَدَّدَ بَيْنَ الْغَنْمِ وَالْغَرْمِ

Firman Allah Swt. yang diungkapkan oleh al-Khatib: "Dan perjudian." (Al-Maidah ayat: 90) maksudnya adalah permainan judi, yaitu setiap permainan yang mengandung spekulasi untung rugi.

4. Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh³⁵

وَأَمَّا الْقِمَارُ بِمُخْتَلِفِ أَنْوَاعِهِ وَمِنْهُ الْيَانَصِيبُ فَقَدْ حَرَّمَهُ الْإِسْلَامُ لِأَنَّهُ مَرَضٌ فَتَاكُ خَبِيثُ يُهَدِّدُ طَاقَةَ الْإِنْسَانِ الْجُسَدِيَّةِ وَالْفِكْرِيَّةِ مِنْ دُونِ فَاثِدَةٍ مَشْرُوعَةٍ وَيُعَوِّدُ الْإِنْسَانَ عَلَى الْخُمُولِ وَالْكَسُلِ لِأَنَّهُ مُحَاوَلَةً لِلتَّوصُّلِ إِلَى كَسْبٍ بِلَا جُهْدٍ وَلَا عَمَلٍ وَفَضْلاً عَنْ ذلِكَ فَإِنَّهُ لِكُمُولِ وَلَا عَمَلٍ وَفَضْلاً عَنْ ذلِكَ فَإِنَّهُ يُولِدُ بَيْنَ النَّاسِ أَحْقَاداً عَمِيْقَةَ الْجُدُورِ وَيُثِيرُ شَرَّارَاتٍ نَارِيَّةً مِنَ الْمُنَازَعَاتِ وَالاَخْتِلاَفَاتِ لَوَالْاَلْتِلَافَاتِ

³³ Manshur bin Yunus al-Bahuti, *Kasyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid VI, h. 424.

³⁴ Sulaiman al-Bujairami, *Hasyiyyah al-Bujairami 'ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Jilid II, h. 384.

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), jilid VII, h. 4981-4982).

الَّتِي لَا تَنْتَهِي ذُيُولُهَا حَتَّى وَصَفَهُ القُرْآنُ الْكَرِيمُ بِأَنَّهُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

Taruhan dengan berbagai macam variannya, termasuk yanasib (undian) maka sudah diharamkan oleh Islam. Sebab, perjudian termasuk penyakit buruk yang dapat melemahkan kekuatan fisik dan pikiran seseorang tanpa keuntungan yang dinilai baik oleh syari'at. Bahkan menjadikan orang lemah dan malas. Sebab, perjudian merupakan upaya memperoleh penghasilan tanpa bersusah payah dan bekerja. Apalagi, juga dapat menimbulkan kedengkian mendalam di antara manusia, menyulut api permusuhan dan pertikaian yang tidak berujung. Sehingga perjudian digambarkan oleh Al-Qur'an al-Karim sebagai perbuatan keji yang termasuk dari perbuatan setan."

445. Sumpah Dengan Terjemah Qasam

A. Deskripsi Masalah

Sumpah (qasam) dapat dilakukan untuk mengukuhan pernyataan atau pengakuan, di samping juga untuk mengikat suatu perjanjian termasuk yang terkait dengan pelaksanaan tugas atas jabatan yang akan diemban. Sumpah semacam ini kemudian disebut dengan sumpah jabatan.

Demikian pula saksi di Pengadilan. Ia diharuskan bersumpah sebelum memberikan kesaksiannya. Dalam kebiasaan yang berlaku di Indonesia, sumpah jabatan dan sumpah kesaksian yang dilakukan oleh pemeluk agama Islam menggunkan terjemah kalimah qasam, yakni: "Demi Allah". Secara lafdzi, terjemahan kalimah qasam itu bukan hakikat kalimah qasam, tetapi secara maknawi tentu sama dengannya.

B. Pertanyaan

Apakah sumpah dengan terjemah dari kalimah qasam itu termasuk qasam dengan segala akibat hukumnya?

C. Jawaban

Sumpah dengan terjemah dari *kalimah qasam* termasuk kategori *qasam* berikut segala akibat hukumnya. Sebagaimana mengucapkan syahadat, *li'an* dan talak dengan selain bahasa Arab.

D. Dasar Penetapan

Al-Qur'an

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak disegaja, tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." (QS. Al-Baqarah: 225)

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja." (QS. Al-Maidah: 89)

Aqwal al-Ulama

1. Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib36

(فَرْعُ يَصِحُ اللَّعَانُ بِالْعَجَمِيَّةِ وَلَوْ أَحْسَنَ الْعَرَبِيَّةَ) لِأَنَّ اللَّعَانَ يَمِينُ أَوْ شَهَادَةً وَهُمَا بِاللَّغَاتِ سَوَاءٌ (فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا الْقَاضِي وَجَبَ مُتَرْجِمَانِ) لَا أَرْبَعَةٌ وَلَوْ فِي لِعَانِ الزَّوْجِ الْمُثَبِّتِ لِلزِّنَا لِأَنَّ ذَلِكَ نَقْلُ قَوْلِ إِلَى الْقَاضِي كَسَائِرِ الْأَقْوَالِ وَإِنْ عَرَفَهَا فَلَا حَاجَةَ إِلَى مُتَرْجِمٍ

(Sub masalah. Sah *li'an* dengan bahasa *'ajam -*selain Arab-, meskipun bagi orang yang mampu berbahasa Arab). Sebab, *li'an* adalah sumpah atau kesaksian, sementara keduanya bisa dilakukan dengan berbagai bahasa. (Maka, bila *Qadhi*-hakim- tidak bisa berbahasa Arab, maka harus terdapat dua penerjemah). Tidak harus empat penerjemah, meskipun dalam kasus *li'an* seorang suami yang menuduh istrinya melakukan zina. Sebab, fungsi penerjemah hanyalah mengalihbahasakan kepada *Qadhi*, seperti halnya ucapan selainnya. Apabila *Qadhi* dapat berbahasa Arab, maka penerjemah tidak diperlukan lagi.

2. Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin³⁷

(Sah) mengucapkan *li'an* (dengan bahasa 'ajam) meskipun bagi orang yang mampu berbahasa Arab. Sebab, yang dominan dalam *li'an* adalah subtansi sumpah atau kesaksiannya, sementara keduanya bisa dilakukan dengan berbagai bahasa. Dan terjemah syahadah, li'an

682

³⁶ Zakaria al-Anshari, Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib, (Beirut: Daral-Kutub al-Islami, t.th.), Iilid III, h. 384.

³⁷ Jalaluddin al-M. halli, Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin, (Beirut Dar al-Nasyr al-Mishriyah, t th.), Juid IV, h. 35.

dan ghadab38 harus bisa dipahaminya.

3. Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj³⁹

(وَيَصِحُ) اللَّعَانُ وَالْقَذْفُ (بِالْعَجَمِيَّةِ) أَيْ مَا عَدَا الْعَرَبِيَّةَ مِنْ اللَّغَاتِ إِنْ رَاعَى تَرْجَمَةَ اللَّغْنِ وَالْغَضَبِ وَإِنْ عَرَفَ الْعَرَبِيَّةَ كَالْيَمِينِ وَالشَّهَادَةِ (وَفِيمَنْ عَرَفَ الْعَرَبِيَّةَ وَجْهُ) أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِعَانُهُ بِغَيْرِهَا لِأَنَّهَا الْوَارِدَةُ وَانْتَصَرَ لَهُ جَمْعُ وَيُسَنُّ حُضُورُ أَرْبَعَةٍ يَعْرِفُونَ تِلْكَ اللَّغَةَ وَيَجِبُ مُتَرْجِمَانِ لِقَاضٍ جَهِلَهَا

(Dan sah) mengucapkan li'an dan qadzf (dengan bahasa 'ajam), maksudnya selain bahasa Arab dari berbagai bahasa, jika orang yang mengucapkan memahami terjemah li'an dan ghadab yang diucapkannya. Meskipun dia bisa berbahasa Arab, sebagaimana dalam sumpah dan kesaksian. (Dan bagi orang yang bisa berbahasa Arab terdapat satu pendapat lain), yaitu li'annya yang diucapkan dengan selain bahasa Arab tidak sah. Sebab, li'an dengan bahasa Arab saja yang warid-berasal dari Nabi-. Segolongan ulama mendukung pendapat tersebut. Selain itu, disunahkan menghadirkan 4 orang yang memahami bahasa li'an tersebut dan diwajibkan menghadirkan dua penerjemah bagi Qadhi yang tidak memahaminya.

4. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj40

(وَيَصِحُّ) اللَّعَانُ مَعَ مَعْرِفَةِ الْعَرَبِيَّةِ (بِالْعَجَمِيَّةِ) وَهِيَ مَا عَدَا الْعَرَبِيَّةِ لِأَنَّ اللَّعَانَ يَمِينُ أَوْ شَهَادَةُ وَهُمَا بِاللَّغَاتِ سَوَاءٌ فَيُرَاعِي الْأَعْجَمِيُّ الْمُلَاعِنُ تَرْجَمَةَ الشَّهَادَةِ وَاللَّعْنِ وَالْغَضَبِ

(Dan sah) mengucapkan *li'an* dengan disertai kemampuan berbahasa Arab, (dengan bahasa '*ajam*), yaitu bahasa selain Arab. Sebab, subtansi *li'an* adalah sumpah atau kesaksiannya, sementara keduanya bisa dilakukan

Maksud Li'an di sini adalah kata yang termuat dalam tuduhan zina dari seorang suami kepada istrinya dengan lima kali sumpah dan yang terakhir dengan ucapan: "Maka laknat Allah menimpaku bila aku termasuk orang-orang yang berbohong atas tuduhan zinaku kepadanya. Sementara ghadab adalah kata yang termuat dalam pembelaan diri seorang istri dari tuduhan zina suaminya yang diucapkan sampai lima kali dan yang terakhir dengan ucapan: "Maka ghadab -murka- Allah menimpaku apabila dia termasuk orang-orang yang jujur atas tuduhan zinanya kepadaku. Lihat, Zakaria al-Anshari, Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib, (Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, t. th.), Juz III, h. 383. (Pen).

³⁹ Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), Jilid X, h. 393.

⁴⁰ Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid III, h. 479.

dengan berbagai bahasa. Dan orang 'ajam yang mengucapkan li'an harus memahami terjemah syahadah, li'an dan ghadab-yang diucapkannya-.

446. Face Off (Rekontruksi Wajah)

A. Deskripsi Masalah

Face off dalam istilah medis adalah upaya merekontruksi wajah yang rusak karena suatu musibah agar kembali seperti semula. Face off tersebut merupakan penemuan teknologi kedokteran yang dilakukan dengan sistem bedah dan bila perlu dengan mengganti bagian wajah yang rusak dengan bagian tubuh lainnya.

B. Pertanyaan

Bagaimanakah hukum *Face off* (merekontruksi wajah) agar kembali seperti semula?

C. Jawaban

Merekontruksi wajah agar kembali seperti semula hukumnya boleh.

D. Dasar Penetapan

Al-Qur'an

"Dan aku (setan) pasti akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telingatelinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barangsiapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata." (QS. Al-Nisa': 119)

Al-Sunnah

684

عَنْ عَبْدِ اللهِ لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وِالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ النَّعِيِّ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ النَّعِيِّ وَالْمُتَفَلِّةِ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ ﴿ وَمَآ اللهُ ﴿ وَمَآ مَا لَكُ مُنْ لَعِنَ النَّعِيُ ﷺ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ ﴿ وَمَآ مَا تَكُمُ اللهِ اللهِ ﴿ وَمَآ مَا مَا مَا مَا مَا مَا اللهِ فَاللهِ فَاللهِ اللهِ ﴿ وَمَآ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

"Diriwayatkan dari 'Abdullah: "Allah melaknat wanita yang menato dan wanita yang minta ditato, wanita yang mencukur alisnya, dan wanita yang meratakan gigi supaya bagus, mereka wanita-wanita yang mengubah ciptaan Allah Ta'ala. Tidaklah aku tidak melaknat orang yang telah dilaknat oleh Nabi Saw. Dalam Kitab Allah hal itu disebutkan: "Apa yang diperintahkan Rasul kepadamu maka lakukanlah, dan apa yang ia cegah, tinggalkanlah." (Muttafaq 'alaih dan ini redaksi Bukhari)

Aqwal al-Ulama

1. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari41

قَالَ الطَّبَرِيُّ لَا يَجُوزُ لِلْمَزْأَةِ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنْ خِلْقَتِهَا الَّتِي خَلَقَهَا اللهُ عَلَيْهَا بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصِ الْتِمَاسِ الْحُسْنِ لَا لِلزَّوْجِ وَلَا لِغَيْرِهِ كُمَنْ تَكُونُ مَقْرُونَةَ الْحَاجِبَيْنِ فَتُزِيلُ مَا بَيْنَهُمَا تُوَهِّمُ الْبَلَجَ أَوْ عَكْسِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهَا سِنَّ زَائِدَةً فَتَقْلَعُهَا أَوْ طَوِيلَةً فَتَقْطَعُ مِنْهَا أَوْ لِحِيْيَةً أَوْ شَارِبٌ أَوْ عَنْفَقَةً فَتُزِيلُهَا بِالنَّتْفِ وَمَنْ يَكُونُ شَعْرُهَا قَصِيرًا أَوْ حَقِيرًا فَتُطَوِّلُهُ أَوْ تُغَرِّرُهُ بِشَعْرِ غَيْرِهَا فَكُلُّ ذلِكَ دَاخِلٌ فِي النَّهْيِ وَهُوَ مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الضَّرَرُ وَالْأَذِيَّةُ كَمَنْ يَكُونُ لَهَا سِنَّ زَائِدَةٌ أَوْ طَوِيلَةٌ تُعِيقُهَا فِي الْأَكْلِ أَوْ أُصْبُعُ زَائِدَةً تُؤْذِيهَا أَوْ تُؤْلِمُهَا فَيَجُوزُ ذَلِكَ وَالرَّجُلُ فِي هذَا الْأَخِيرِ كَالْمْرَأَةِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ يُسْتَثْنَى مِنَ النِّمَاصِ مَا إِذَا نَبَتَ لِلْمَزْأَةِ لِحِيَّةٌ أَوْ شَارِبُ أَوْ عَنْفَقَةٌ فَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا إِزَالَتُهَا بَلْ يُسْتَحَبُّ قُلْتُ وَإِطْلَاقُهُ مُقَيَّدٌ بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَعِلْمِهِ وَإِلَّا فَمَتَى خَلَا عَنْ ذلِكَ مُنِعَ لِلتَّدْلِيسِ وَقَالَ بَعْضُ الْحَتَابِلَةِ إِنْ كَانَ النَّمَصُ أَشْهَرَ شِعَارًا لِلْفَوَاجِرِ امْتُنِعَ وَإِلَّا فَيَكُونُ تَنْزِيهًا وَفِي رِوَايَةٍ يَجُوزُ بِإِذْنِ الزَّوْجِ إِلَّا إِنْ وَقَعَ بِهِ تَدْلِيسٌ فَيَحْرُمُ قَالُوا وَيَجُوزُ الْحُفُّ وَالتَّحْمِيرُ وَالنَّقْشُ وَالتَّظرِيفُ إِذَا كَانَ بِإِذْنِ الزَّوْجِ لِأَنَّهُ مِنَ الزِّينَةِ وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ امْرَأَتِهِ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ وَكَانَتْ شَابَّةً يُعْجِبُهَا الْجُمَالُ فَقَالَتْ الْمَزْأَةُ تَحِفُّ جَبِينَهَا لِزَوجِهَا فَقَالَتْ أَمِيطِي عَنْكِ الْأَذَى مَا اسْتَطَعْتِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ يَجُورُ التَّزَيُّنُ بِمَا ذُكِرَ إِلَّا الْحُفَّ فَإِنَّهُ مِنْ مُحْلَةِ النَّمَاصِ

Al-Thabari berkata: "Bagi seorang wanita tidak diperbolehkan merubah sedikitpun dari asal kejadiannya yang telah diciptakan oleh Allah baginya. Baik dengan cara menambahi atau menguranginya untuk mempercantik diri. Tidak boleh hal itu dilakukannya karena suami maupun orang lain. Seperti seorang wanita yang kedua alisnya

⁴¹ Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Jilid X, h. 462.

bersambung, kemudian ia hilangkan tengah-tengahnya agar terlihat terpisah ataupun sebaliknya. Seorang wanita yang mempunyai gigi tambahan kemudian ia cabut, atau gigi yang panjang kemudian ia potong. Atau mempunyai jenggot, kumis, atau rambut di bawah bibir, kemudian ia hilangkan dengan cara mencabutnya. Begitu pula seorang wanita yang berambut pendek atau jelek, kemudian ia sambung atau ia perindah dengan rambut orang lain. Semuanya termasuk larangan merubah ciptaan Allah." Al-Thabari berkata: "Larangan tadi mengecualikan hal-hal yang membahayakan dan membuatnya sakit. Seperti seorang wanita yang mempunyai gigi tambahan atau gigi panjang yang mengganggunya ketika makan, atau memiliki jari berlebihan yang membuatnya sakit, maka ia boleh memotongnya. Dalam hal ini lakilaki sama hukumnya dengan wanita. Al-Nawawi berkata: "Larangan nimash (mencabut rambut wajah) mengecualikan wanita yang mempunyai jenggot, kumis atau rambut di bawah bibir. Maka, mencabutnya tidak diharamkan, bahkan disunahkan. Menurut hematku (Ibn Hajar al-'Asqalani), kemutlakan pendapat al-Nawawi tersebut terbatasi dengan izin suami dan sepengetahuannya. Bila tidak, maka tidak diperbolehkan, sebab akan menipu orang lain (tadlis).42 Sebagian ulama madzhab Hanbali berpendapat: "Bila mencabuti rambut wajah telah menjadi trend unggulan wanita-wanita jalang, maka tidak boleh dilakukan. Jika belum, maka makruh tanzih (lebih baik dihindari). Sementara dalam satu riwayat (madzhab Hanbali) disebutkan: "Menghilangkan rambut wajah itu diperbolehkan dengan izin suami, kecuali jika menyebabkan tadlis, maka hukumnya tetap haram." Mereka berpendapat pula: "Seorang wanita diperbolehkan melakukan huff (mengerik habis rambut yang tumbuh di wajahnya), tahmir (memerahkannya), nagsy (mewarnainya), dan tathrif (meruncingkan jari-jari) atas seizin suaminya. Sebab semuanya termasuk hiasan. Al-Thabari telah menyebutkan riwayat dari jalur Abu Ishaq, dari istrinya, bahwa ia menemui Aisyah ra. di saat masih remaja dan masih mengagumi kecantikan, kemudian ia berkata: "Ada seorang wanita mengerik habis (rambut) keningnya untuk suaminya." Kemudian Aisyah ra. merespon: "Hindarilah penyakit semampumu." Sementara Al-Nawawi berpendapat: "Berhias dengan semua yang telah disebutkan tadi boleh hukumnya kecuali huff (mengerik habis rambut yang tumbuh di wajahnya). Sebab, hal itu termasuk nimash (mencabut rambut wajah)."

⁴² Seperti seorang lelaki yang akan meminangnya. (Pen).

2. Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib43

(وَ) يَحْرُمُ (تَجْعِيدُهُ) أَيْ الشَّعْرِ (وَوَشْرُ الْأَسْنَانِ) أَيْ تَحْدِيدُهَا وَتَرْقِيقُهَا لِلتَّغْرِيرِ وَلِلتَّعَرُّضِ لِلتُّهْمَةِ فِيهِمَا وَلِلْخَبَرِ السَّابِقِ فِي الثَّانِي

(قَوْلُهُ وَوَشْرُ الْأَسْنَانِ) يُسْتَثْنَى الْوَاشِرُ لِإِزَالَةِ الشَّيْنِ كَوَشْرِ السِّنِّ الزَّاثِدَةِ وَالنَّازِلَةِ عَنْ أَخَوَاتِهَا فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ لِأَنَّهُ يُقْصَدُ بِهِ تَحْسِينُ الْهَيْئَةِ

(Dan) haram (mengkritingnya) rambut (dan menata ulang gigi), yakni meluruskan dan menipiskan, dikarenakan akan menipu dan menimbulkan salah penilaian dalam keasliannya. Dan juga karena larangan dalam hadits yang telah lewat⁴⁴ untuk kasus yang kedua.

(Ungkapan Ibn al-Muqri: "Dan menata ulang gigi."), kecuali orang yang menata ulang gigi untuk menghilangkan keburukan, seperti menata ulang gigi tambahan, dan gigi yang tumbuh jauh dari yang lainnya, maka tidak haram karena tujuannya adalah memperindah bentuknya.

3. Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab45

(وَلَوْ وَصَلَ عَظْمَهُ) بِقَيْدِ زِدْتُهُ بِقَوْلِي (لِحَاجَةٍ) إِلَى وَصْلِهِ (بِنَجَسٍ) مِنْ عَظْمِ (لَا يَصْلُحُ) لِلْوَصْلِ (غَيْرُهُ) هُوَ أُوْلَى مِنْ قَوْلِهِ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ (عُذِرَ) فِي ذَلِكَ فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَهُ قَالَ لِلْوَصْلِ (غَيْرُهُ) هُوَ أُوْلَى مِنْ قَوْلِهِ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ (عُذِرَ) فِي ذَلِكَ فَتَصِحُ صَلَاتُهُ مَعَهُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَلَا يَلْزَمُهُ نَوْعُهُ إِذَا وَجَدَ الطَّاهِرَ قَالَ السُّبْكِيُ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَغَيْرِهِ إِلَّا إِذَا لَمْ يَخَفْ مِنْ النَّزْعِ ضَرَرًا (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَخْتَجُ أَوْ وَجَدَ صَالِحًا غَيْرَهُ مِنْ غَيْرِ آذَيِّ إِذَا لَمْ يَخْتَجُ أَوْ وَجَدَ صَالِحًا غَيْرَهُ مِنْ غَيْرِ آذَيِّ إِذَا لَمْ يَخْتَجُ أَوْ وَجَدَ صَالِحًا غَيْرَهُ مِنْ غَيْرِ آذَيِّ لَوْ وَجَدَ صَالِحًا غَيْرَهُ مِنْ غَيْرِ آذَيِّ لَا يَعْدِ (ضَرَرًا يُبِيحُ (وَجَبَ مَعَ تَمَكُنِهِ مِنْ إِزَالَتِهِ (ضَرَرًا يُبِيحُ التَّامُ وَلَمْ يَمُنْ) لِحِمْلِهِ نَجِسًا تَعَدَّى بِحَمْلِهِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ إِزَالَتِهِ

(Dan andaikan seseorang menyambung tulangnya) dengan qayyid -batasan- yang saya tambahkan dengan ungkapan saya -(karena butuh) menyambungnya (dengan najis) dari tulang lain, (yang tidak bisa) disambung dengan (selainnya), ungkapan saya tadi lebih baik dari pada ungkapan al-Nawawi:"Karena tidak menemukan tulang yang

⁴³ Zakaria al-Anshari, Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib, (Beirut: Daral-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), Jilid I, h. 491.

⁴⁴ Lihat, Zakaria al-Anshari, Asna al-Mthalib Syarh Raudh al-Thalib, (Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, t. th.), Jilid I, h. 172.

⁴⁵ Zakaria al-Anshari, Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab, (Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 1418 H), Jilid I, h. 89.

suci." (maka dianggap udzur) dalam hal tersebut. Maka shalatnya dengan sambungan tulang najis tersebut hukumnya sah. Dalam kitab al-Raudhah, sebagaimana kitab asalnya, al-Nawawi berkata: "Dan ia tidak wajib mencopotnya ketika menemukan pengganti tulang yang suci." Imam al-Subki dengan mengikuti pendapat Imam Haramain dan selainnya berkata: "Kecuali bila mencopotnya itu tidak mengkhawatirkan timbulnya bahaya." (jika tidak) yaitu dengan menemukan tulang lainnya yang bisa digunakan sebagai penyambungnya dan tidak najis dari selain tulang manusia, (maka wajib) baginya (mencopotnya), meskipun sudah menyatu dengan daging, (apabila ia terhindar) sebab mencopotnya (dari bahaya sejauh yang membolehkan tayamum dan belum mati). Sebab, ia dinilai ceroboh membawa najis yang mungkin dihilangkan." 4. Al-Figh al-Islami wa Adillatuh46

يَجُوزُ نَقْلُ الْعُضُو مِنْ مَكَانٍ مِنْ جِسْمِ الْإِنْسَانِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ مِنْ جِسْمِهِ مَعَ مُرَاعَاةِ التَّأَكُّدِ مِنْ أَنَّ التَّفْعَ الْمُتَوَقَّعِ مِنْ هذِهِ الْعَمَلِيَّةِ أَرْجَحُ مِنَ الضَّرَرِ الْمُتَرَقَّبِ عَلَيْهَا وَبِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ لِإِيجَادِ عُضْوٍ مَفْقُودٍ أَوْ لِإِعَادَةِ شَكْلِهِ أَوْ وَظِيْفَتِهِ الْمَعْهُودَةِ لَهُ أَوْ لِإِعَادَةِ شَكْلِهِ أَوْ وَظِيْفَتِهِ الْمَعْهُودَةِ لَهُ أَوْ لِإِعْلَاحِ عَيْبٍ أَوْ إِزَالَةِ دَمَامَةٍ تُسَبِّبُ لِلشَّخْصِ أَذَى نَفْسِيًّا أَوْ عُضْوِيًّا

"Boleh memindah anggota badan dari satu tempat di tubuh seseorang ke tempat lain di tubuhnya, disertai pertimbangan matang, manfaat yang diharapkan dari operasi semacam ini lebih unggul dibanding bahayanya. Disyaratkan pula operasi itu dilakukan untuk membentuk anggota badan yang hilang, untuk mengembalikannya ke bentuk semula, mengembalikan fungsinya, menghilangkan cacat, atau menghilangkan bentuk jelek yang membuat seseorang mengalami tekanan jiwa atau gangguan fisik."

5. Al-Mufasshal fi Ahkam al-Mar'ah wa Bait al-Mal⁴⁷ قَدْ تُصَابُ الْمَرْأَةُ بِشَيْءٍ مِنَ التَّشْوِيهِ فِي وَجْهِهَا أَوْ بِأَجْزَاءٍ ظَاهِرَةٍ مِنْ بَدَنِهَا نَتِيجَةَ حَرْقٍ أَوْ جَرْجٍ أَوْ مَرَضٍ وَهِذَا التَّشْوِيهُ لَا يُطَاقُ احْتِمَالُهُ لِمَا يُسَبِّبُهُ مِنْ أَدَى مَعْنَوِيِّ لِلْمَرْأَةِ فَهَلْ يَجُورُ إِجْرَاءُ عَمَلِيَّاتٍ جِرَاحِيَّةٍ لِإِزَالَةٍ هَذَا التَّشْوِيهِ وَلَوْ أَدَّتْ هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ التَّصْوِيةِ وَلَوْ أَدَّتْ هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ التَّسْوِيةِ وَلَوْ أَدَّتْ هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ التَّعْرِينِ وَالتَّجْمِيلِ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْأَوَّلَ إِزَالَهُ التَّشْوِيةِ الَّذِي حَصَلَ وَحَتَّى لَوْ قَصَدَتِ

688

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, t.. th.) Jilid VIII, h. 5124.

⁴⁷ Abdul Karim Zaidan, Al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah wa Bait al-Mal, (Beirut: Muassasah al-Risalah, t. th.) Jilid III, h. 410.

الْمَرْأَةُ مِنْ إِجْرَاءٍ مِنْ هذِهِ الْعَمَلِيَّاتِ تَحْصِيلُ شَيْءٍ مِنَ التَّحْسِينِ بِإِزَالَةِ هذَا التَّشْوِيةِ فَتَبْقَى هذِهِ الْعَمَلِيَّاتُ فِي دَاثِرَةِ الْمُبَاحِ لِأَنَّ رَغْبَةَ الْمَرْأَةِ فِي تَحْسِينِ وَجْهِهَا جَاثِزَةٌ جَاءَ فِي فِقْهِ الْحُتَابِلَةِ وَلَهَا حَلْقُ وَجْهٍ وَحَفِّهِ وَتَحْسِينِهِ وَتَحْمَيرِهِ

Seorang perempuan terkadang mengalami suatu cacat di muka, atau anggota badannya yang luar, akibat luka bakar, luka robek, atau penyakit lain. Cacat ini tidak bisa dibiarkan oleh seorang perempuan karena menyebabkan tekanan batin baginya. Maka apakah ia boleh menempuh operasi untuk menghilangkannya? Operasi tersebut boleh ditempuhnya, meskipun akan mengarah pada mempercantik dan memperelok diri. Sebab, tujuan utamanya menghilangkan cacat. Bahkan, andaikata dengan operasi itu ia berniat untuk mempercantik diri dengan hilangnya cacat tersebut, maka operasi itu tetap dalam taraf diperbolehkan. Sebab kecenderungan perempuan mempercantik wajahnya diperbolehkan. Dalam fiqh madzhab Hanbali ada keterangan: "Bagi perempuan boleh mencukur (rambut) wajah, mengikisnya sampai habis, mempercantik dan memerahkannya."

447. Infotainment; Mengungkap Kejelekan Orang

A. Deskripsi Masalah

Beberapa televisi menayangkan secara rutin berbagai jenis acara infotainment, seperti Cek & Ricek, Kroscek, Gossip, Go Show, KiSS, Kabar-Kabari, dan sebagainya. Demikian pula beberapa radio tidak ketinggalan untuk menyiarkan acara yang serupa. Acara tersebut seringkali mengungkap serta membeberkan kejelekan seseorang, dan bahkan mengarah kepada penyebaran fitnah. Akan tetapi, acara-acara tersebut justru telah menarik interes banyak pemirsa dan pendengar, apalagi menyangkut kehidupan para selebriti.

B. Pertanyaan

Bagaimanakah hukum menayangkan, menyiarkan, menonton atau mendengarkan acara televisi, radio atau lainnya yang mengungkap serta membeberkan kejelekan seseorang?

C. Jawaban

Pada dasamya menayangkan, menyiarkan, menonton atau mendengarkan acara apa pun yang mengungkap serta membeberkan kejelekan seseorang adalah haram. Kecuali didasari tujuan yang dibenarkan syariat dan

hanya dengan cara itu tujuan tersebut dapat tercapai. Seperti memberantas kemungkaran, memberi peringatan, menyampaikan pengaduan/laporan, meminta pertolongan dan meminta fatwa hukum.

D. Dasar Penetapan

Al-Qur'an

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا آجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلطَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلطَّنِّ إِثْدُ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتُبُ الْخَمِّ الطَّنِ إِنْ الطَّنِ إِنْ اللَّهُ الْخَمُ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱنَّقُوا اللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴾ اللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Hujurat: 12)

1. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an48:

قوله تعالى أَحُوبُ ﴿ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا ﴾ مَثَلَ اللهَ الْغِيبَة بِأَكْلِ الْمَيْتَةِ لِأَنَّ الْمَيْتَةِ لِأَنَّ الْمَيِّةِ لَا يَعْلَمُ بِغِيبَةٍ مَنِ اغْتَابَهُ وَقَالَ الْمَيْتَةِ لِأَنَّ الْمَيِّتِ لَا يَعْلَمُ بِغِيبَةٍ مَنِ اغْتَابَهُ وَقَالَ الْمُنْ عَبَّاسَ: إِنَّمَا ضَرَبَ اللهُ هذا الْمَثَلِ لِلْغِيبَةِ لِأَنَّ أَكُلَ لَحْمَ الْمَيِّتِ حَرَامُ مُسْتَقْذَرُ وَكَذَا الْغِيبَةُ حَرَامٌ فِي الدِّينِ وَقَبِيحٌ فِي التَّفُوسِ

Tentang firman Allah Swt: "Adakah seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?" (al-Hujurat: 12). Allah mengibaratkan ghibah (mengunjing) dengan memakan mayat. Sebab, mayat tidak mengetahui tubuhnya dimakan, seperti halnya orang yang digunjing tidak mengetahui gunjingan tentang dirinya. Ibn Abbas mengatakan: "Allah membuat perumpamaan ini untuk ghibah, sebab memakan tubuh mayat hukumnya haram dan menjijikkan. Begitu pula ghibah, hukumnya dalam agama haram dan menjijikkan bagi manusia.

⁴⁸ Muhammad al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Sya'b, t. th.) Cet. ke-2, Jilid XVI, h. 334-335.

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْنَسَبُواْ فَقَدِ ٱخْتَمَلُواْ بُهْتَنَاً وَإِنْكُما مُبِينًا ﴾

"Dan orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (QS. Al-Ahzab: 58)

Al-Sunnah

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَهُ قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ تَقُولُ فَقَدْ الْمُ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ

"Dari Abu Hurairah, sungguh Rasulullah Saw. telah bersabda: "Apakah kalian mengetahui apakah hakikat ghibah itu?" Para sahabat menjawab: "Allah dan RasulNya lebih mengetahui. Beliau bersabda: "Penuturanmu tentang saudaramu dengan hal yang ia benci." Lalu ditanyakan pada beliau: "Apakah meskipun apa yang saya tuturkan itu memang kenyataan dari saudaraku?" Nabi menjawab: "(Ya.) Meskipun kenyataannya saudaramu seperti apa yang kamu ucapkan, maka kamu telah menggunjingnya. Dan jika saudaramu tidak seperti yang kau ucapkan, maka kamu telah berdusta terhadapnya." (HR. Muslim)

1. Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim⁴⁹

قُولُهُ ﷺ (الْغِيبَةُ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكُرُهُ قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ) يُقَالُ بَهَتَّهُ بِفَتْحِ الْهَاءِ مُحَقَّفَةً قُلْتُ فِيهِ الْبُهْتَانُ وَهُوَ الْبَاطِلُ وَالْغِيبَةُ ذِكْرُ الْإِنْسَانِ فِي غَيْبَتِهِ بِمَا يَكُرَهُ وَأَصْلُ الْبُهْتِ أَنْ يُقَالَ لَهُ فِيهِ الْبُهْتَانُ وَهُوَ الْبَاطِلُ وَالْغِيبَةُ ذِكْرُ الْإِنْسَانِ فِي غَيْبَتِهِ بِمَا يَكُرَهُ وَأَصْلُ الْبُهْتِ أَنْ يُقَالَ لَهُ الْبَاطِلُ فِي وَجْهِهِ وَهُمَا حَرَامَانِ لَكِنْ تُبَاحُ الْغِيبَةُ لِغَرَضٍ شَرْعِيَّ وَذِلِكَ لِسِتَّةِ أَسْبَابٍ السَّلْطَانِ وَالْقَاضِي وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ لَهُ وِلَايَةً أَوْ الْبَاطِلُ فِي وَجْهِهِ مِنْ طَالِيهِ فَيَقُولُ ظَلَمَنِي فُلَانً أَوْ فَعَلَ بِي كَذَا الطَّانِي الاسْتِغَاثَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْ الْمُعْافِهِ مِنْ طَالِيهِ فَيَقُولُ ظَلَمَنِي فُلَانً أَوْ فَعَلَ بِي كَذَا الطَّانِي الاسْتِغَاثَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ وَرَدُّ الْعَاصِي إِلَى الصَّوَابِ فَيَقُولُ لِمَنْ يَرْجُو قُدْرَتَهُ فُلَانٌ يَعْمَلُ كَذَا فَازْجُرُهُ عَنْهُ لَائُ الْمَاصِي إِلَى الصَّوَابِ فَيَقُولُ لِمَنْ يَرْجُو قُدْرَتَهُ فُلَانٌ يَعْمَلُ كَذَا فَاقَالَهُ كَالَانً الْهَافِي وَلَا الْمُؤْولُ لِمَنْ يَرْجُو قُدْرَتَهُ فُلَانٌ يَعْمَلُ كَذَا فَازْجُرُهُ عَنْهُ الْمُؤْمِنَ لَكُو لِمَا لَكُولُ لِمَالَى السَّوابِ فَيقُولُ لِمَنْ يَرْجُو قُدْرَتَهُ فُلَانٌ يَعْمَلُ كَذَا فَاذِجُرَهُ عَنْهُ الْمُنْ الْمُعْ الْمُؤْمِ لَاللَّهُ لَالَالُولُولُ لِمَنْ لَلْمُ لَاللَّهُ لَاللَّهُ لِللَّهُ وَلِهُ لَلْمُ الْمُؤْمِلُ لَكُولُ لَعَلَى الْعُنِيمِ لِللْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُعْلِيقِ اللْمُ الْمُؤْمِلُ لَلْمُ الْمُؤْمُولُ لِمَنْ يَوْمِ الْمُؤْمِلُ لَاللَّهُ لِلْمُ لَالَكُولُ لِلْمُ لَالَكُولُ لَلِي الللَّهُ لَلَالًا لَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ لَكُولُولُ لِلْمُ

⁴⁹ Muhyiddin al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.), Cet. ke-2, Juz XVI, h. 142. Lihat pula Muhyiddin al-Nawawi, Riyadh al-Shalihin, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), h. 432-433.

وَخَوْ ذَلِكَ الثَّالِثُ الاسْتِفْتَاءُ بِأَنْ يَقُولَ لِلْمُفْتِي ظَلَمَنِي فُلَانٌ أَوْ أَبِي أَوْ أَخِي أَوْ زَوْجِي بِكَذَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ وَمَا طَرِيقِي فِي الْحَلَاصِ مِنْهُ وَدَفْعِ ظُلْمِهِ عَنِّي وَنَحْوَ ذَلِكَ فَهذَا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ وَالْأَجْوَدُ أَنْ يَقُولَ فِي رَجُلٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ وَالِدٍ وَوَلَدٍ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَمَعَ ذلِكَ فَالتَّعْيِينُ جَائِزٌ لِحَدِيثِ هِنْدٍ وَقَوْلِهَا أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ شَحِيحُ الرَّابِعُ تَحْذِيرُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الشَّرِّ وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ مِنْهَا جَرْحُ الْمَجْرُوحِينَ مِنَ الرُوَاةِ وَالشُّهُودِ وَالْمُصَنِّفِينَ وَذَلِكَ جَائِزُ بِالْإِجْمَاعِ بَلْ وَاجِبٌ صَوْنًا لِلشَّرِيعَةِ وَمِنْهَا الْإِخْبَارُ بِعَيْبِهِ عِنْدَ الْمُشَاوَرَةِ فِي مُوَاصَلَتِهِ وَمِنْهَا إِذَا رَأَيْتَ مَنْ يَشْتَرِي شَيْئًا مَعِيبًا أَوْ عَبْدًا سَارِقًا أَوْ زَانِيًا أَوْ شَارِبًا أَوْ خَخْوَ ذَلِكَ تُذَكِّرُهُ لِلْمُشْتَرِي إِذَا لَمْ يَعْلَمْهُ نَصِيحَةً لَا بِقَصْدِ الْإِيذَاءَ وَالْإِفْسَادِ وَمِنْهَا إِذَا رَأَيْتَ مُتَفَقِّهًا يَتَرَدَّدُ إِلَى فَاسِقِ أَوْ مُبْتَدِع يَأْخُذُ عَنْهُ عِلْمًا وَخِفْتَ عَلَيْهِ ضَرَرَهُ فَعَلَيْكَ نَصِيحَتُهُ بِبَيَانِ حَالِهِ قَاصِدًا التَّصِيحَة وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ لَهُ وِلَايَةُ لَا يَقُومُ بِهَا عَلَى وَجْهِهَا لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ أَوْ لِفِسْقِهِ فَيَذْكُرُهُ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ وِلَايَةٌ لِيَسْتَدِلَّ بِهِ عَلَى حَالِهِ فَلَا يَغْتَرُ بِهِ وَيَلْزَمُ الاسْتِقَامَةَ الْخَامِسُ أَنْ يَكُونَ مُجَاهِرًا بِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتَهِ كَالْخَمْرِ وَمُصَادَرَةِ النَّاسِ وَجِبَايَةِ الْمُكُوسِ وَتَوَلِّي الْأُمُورِ الْبَاطِلَةِ فَيَجُوزُ ذِكْرُهُ بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ وَلَا يَجُورُ بِغَيْرِهِ إِلَّا بِسَبَبِ آخَرَ السَّادِسُ التَّعْرِيفُ فَإِذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِلَقَبِ كَالْأَعْمَشِ وَالْأَغْرَجِ وَالْأَزْرَقِ وَالْقَصِيرِ وَالْأَعْمَى وَالْأَقْطَعِ وَنَحْوِهَا جَازَ تَعْرِيفُهُ بِهِ وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِهِ تَنَقُّصًا وَلَوْ أَمْكَنَ التَّعْرِيفُ بِغَيْرِهِ كَانَ أَوْلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Tentang sabda Rasulullah Saw.: "Ghibah adalah penuturanmu tentang saudaramu dengan hal yang ia benci." Lalu ditanyakan pada beliau: "Apakah meskipun apa yang saya tuturkan itu memang kenyataan dari saudaraku?" Nabi menjawab: "(Ya.) Meskipun kenyataannya saudaramu seperti apa yang kamu ucapkan, maka kamu telah menggunjingnya. Dan jika saudaramu tidak seperti yang kau ucapkan, maka kamu telah berdusta terhadapnya." Diungkapkan dengan fathah huruf ¼ nya dan tanpa tasydid, artinya: "Saya membicarakan tentang kebatilan seseorangnya. Makna ghibah adalah menuturkan seseorang ketika tidak ada dirinya dengan hal yang tidak disukainya. Sedangkan makna asal buht adalah mengucapkan kebohongan (kebatilan) seseorang di hadapannya. Kedua-duanya sama-sama haram. Namun, terkadang ghibah diperbolehkan dengan tujuan yang dibenarkan syari'at. Tujuan yang dibenarkan syariat itu ada enam macam, yaitu:

- Mengadukan kezaliman. Maka, seseorang yang dizalimi boleh mengadu kepada penguasa, hakim dan selainnya dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau kemampuan, untuk memperoleh keadilan dari pihak yang menzaliminya. Maka ia boleh berkata: "Fulan telah menzalimiku, atau telah membuatku begini."
- 2) Meminta pertolongan untuk mencegah kemungkaran dan mengarahkan orang yang bermaksiat pada kebenaran. Maka dalam hal ini seseorang boleh berkata pada orang yang ia harap kemampuannya: "Fulan telah bertindak begini, maka cegahlah!" dan semisalnya.
- 3) Memohon fatwa. Seperti bertanya kepada Mufti: "Fulan, ayahku, saudaraku, atau suamiku, telah menzalimiku. Apakah hal itu boleh dilakukannya? Dan bagaimana jalan keluarku darinya dan cara melawan kezalimannya?" dan ucapan yang semisalnya. Hal ini boleh karena dibutuhkan. Pengaduan yang lebih baik adalah dengan berkata: "(Bagaimana) dengan seseorang, suami, orang tua, dan anak yang begini?" Meskipun begitu, menyebutkan identitas orangnya secara jelas tetap diperbolehkan berdasarkan hadits tentang Hindun dan ucapannya, "Sungguh Abu Sufyan adalah seorang suami yang kikir."
- 4) Memperingatkan orang Islam dari bahaya. Hal ini bisa terjadi dalam beberapa kasus. Di antaranya, (i) mengkritik perawi hadits, saksi, dan para penulis. Semua ini diperbolehkan berdasarkan Ijma'. Bahkan hukumnya wajib karena menjaga syari'at. (ii) Ketika anda melihat seseorang akan membeli barang yang cacat atau budak yang suka mencuri, zina, mabuk dan semisalnya, maka anda boleh menyebutkan hal itu kepada pembeli tersebut bila ia tidak mengetahuinya. Namun bukan bertujuan menyakiti orang lain dan membuat kerusakan. (iii) Bila anda lihat seorang pelajar figh seringkali menemui orang fasik atau ahli bid'ah untuk berguru kepadanya. Dan anda khawatir ia akan membahayakannya, maka anda harus menasehatinya dengan membuka kedoknya karena bertujuan memberi nasehat. (iv) Ketika ada seseorang yang memegang jabatan dan tidak menggunakannya secara profesional, karena kurang berkompeten atau kefasikannya. Kemudian ada seseorang yang mengadukannya kepada atasannya agar mengetahuinya. Sehingga ia tidak tertipu dengannya dan bisa menjalankan tugas dengan benar.
- 5) Ketika ada seseorang yang memamerkan kefasikan dan bid'ahnya, seperti meminum khamr, merampok, menarik pungutan liar dan melakukan berbagai tindak kriminal. Maka boleh menyebutkan

- tindak kriminal yang dipamerkannya, bukan yang lainnya kecuali ada sebab lain (yang memperbolehkannya.
- 6) Menyebut identitas. Ketika seseorang terkenal dengan julukan seperti si rabun, si pincang, si juling, si bunting dan semisalnya, maka boleh menyebut identitasnya dengan julukan tersebut. Namun haram menyebut julukannya karena menganggap remeh. Bila mungkin menyebut identitasnya dengan selain julukannya maka lebih utama. Wallahu A'lam.

Aqwal al-Ulama

1. Ihya 'Ulum al-Din⁵⁰

بَيَانُ الْأَعْذَارِ الْمُرَخِّصَةِ فِي الْغِيبَةِ اعْلَمْ أَنَّ الْمُرَخِّصَ فِي ذِكْرِ مَسَاوِي الْغَيْرِ هُوَ عَرَضٌ صَحِيحٌ فِي الشَّرْعِ لَا يُمْحِنُ التَّوَصُّلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِهِ فَيَدْفَعُ ذَلِكَ إِنْمَ الْغِيبَةِ وَهِيَ سِتَّةُ أَمُورِ الْأَوَّلُ الطَّلَمُ وَالْحَيَا إِلَى الطَّلْمُ مَنْ جَهَةِ الْقَاضِي فَلَهُ أَنْ يَتَظَلَّمَ إِلَى السَّلْطَانِ وَيُنْسِبُهُ إِلَى الظَّلْمِ إِلَّا يُمْكُنُهُ اسْتِيفَاءُ الْمَظْلُومُ مِنْ جِهَةِ القَاضِي فَلَهُ أَنْ يَتَظَلَّمَ إِلَى السَّلَطَانِ وَيُنْسِبُهُ إِلَى الظَّلْمِ وَقَالَ السَّينَ الْمُنْكِ مَنْ عَلَى الطَّلَاعِ إِلَى الطَّلَمِ وَقَالَ السَّينَ الْمُؤْتِ وَقَالَ السَّينَ الْمُنْكِ وَرَدِّ الْعَاصِي إِلَى مَنْهَجِ الصَّلاحِ كَمَا يَعِلُ عُقُونَتُهُ وَعِرْضُهُ النَّانِي الاَسْتِعَاتَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكِرِ وَرَدِّ الْعَاصِي إِلَى مَنْهَجِ الصَّلاحِ كَمَا يَعِلُ عُقُونَتُهُ وَعِرْضُهُ النَّانِي الاَسْتِعَاتَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكِرِ وَرَدِّ الْعَاصِي إِلَى مَنْهَجِ الصَّلاحِ كَمَا يَعِلَى عَلْمُ اللهِ الْمُنْفِي عَلَى اللهُ اللهِ الْمُعَلِّعِ السَّلامَ فَذَهَبَ عُلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ السَّلامَ فَذَهَبَ إِلَى الْمُعْلِمِ فَي اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْتِ السَّلامَ فَنَعْ اللهِ الْمُعْلَى الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ اللهُ الْمُؤْتِ وَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُؤْتِ اللهُ الْمُؤْتِ اللهُ الْمُؤْتِ اللهُ
694

⁵⁰ Abu Hamid al-Ghazali, *Inya' Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), Jilid III, h. 131-132 Lihat pula, Muhammad al-Khatib al-Syirbini, *Muhami al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), Jilid IV, h. 22 dan Muhammad bin Salim Bafadhal, *Is'ad al-Rafiq*, (Surabaya: al-Hidayah, t. th.), Juz II, h. 50.

ظَلَمَهُ أَبُوهُ أَوْ أَخُوهُ أَوْ زَوْجَتُهُ وَلَكِنِ التَّعْيِينُ مُبَاحٌ بِهِذَا الْقَدْرِ لِمَا رُوِيَ عَنْ هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي أَنَا وَوَلَدِي أَفَآخُذُ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ فَقَالَ خُذِي مَا يَحْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ فَذَكَرَتِ الشُّحَّ وَالظُّلْمَ لَهَا وَلِوَلَدِهَا وَلَمْ يَزْجُرْهَا ﷺ إِذْ كَانَ قَصْدُهَا الاسْتِفْتَاءَ الرَّابِعُ تَحْذِيرُ الْمُسْلِمِ مِنَ الشَّرِّ فَإِذَا رَأَيْتَ فَقِيهًا يَتَرَدُّدُ إِلَى مُبْتَدِعٍ أَوْ فَاسِقٍ وَخِفْتَ أَنْ تَتَعَدَّى إِلَيْهِ بِدْعَتُهُ وَفِسْقُهُ فَلَكَ أَنْ تَكْشُفَ لَهُ بِدْعَتُهُ وَفِسْقَهُ مَهْمَا كَانَ الْبَاعِثُ لَكَ الْخُوْفُ عَلَيْهِ مِنْ سِرَايَةِ الْبِدْعَةِ وَالْفِسْقِ لاَ غَيْرُهُ وَذلِكَ مَوْضِعُ الغُرُورِ إِذْ قَدْ يَكُونُ الْحُسَدُ هُوَ الْبَاعِثُ وَيَلْبِسُ الشَّيْطَانُ ذلِكَ بِإِظْهَارِ الشَّفَقَةِ عَلَى الْخَلْقِ وَكَذلِكَ مَن اشْتَرَى مَمْلُوكًا وَقَدْ عَرَفْتَ الْمَمْلُوكَ بِالسَّرِقَةِ أَوْ بِالفِسْقِ أَوْ بِعَيْبِ آخَرَ فَلَكَ أَنْ تُذْكَرَ ذلِكَ فَإِنَّ سُكُوتَكَ ضَرَرُ الْمُشْتَرِي وَفِي ذِكْرِكَ ضَرَرُ الْعَبْدِ وَالْمُشْتَرِي أَوْلَى بِمُرَاعَاةِ جَانِيهِ وَكَذلِكَ الْمُزَكِّي إِذَا سُئِلَ عَنِ الشَّاهِدِ فَلَهُ الطَّعْنُ فِيهِ إِنْ عَلِمَ مَطْعَنًا وَكَذَلِكَ الْمُسْتَشَارُ فِي التَّزْوِيجِ وَإِيدَاعِ الْأَمَانَةِ لَهُ أَنْ يَذْكُرَ مَا يَعْرِفُهُ عَلَى قَصْدِ النُّصْحِ لِلْمُسْتَشِيرِ لَا عَلَى قَصْدِ الْوَقِيعَةِ فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ يَتْرُكُ التَّزْوِيجَ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ لَا تَصْلُحُ لَكَ فَهُوَ الْوَاجِبُ وَفِيهِ الْكِفَايَةُ وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْزَجِرُ إِلَّا بِالتَّصْرِيحِ بِعَيْبٍ فَلَهُ أَنْ يُصَرِّحَ بِهِ إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَرْعَوُونَ عَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ اهْتَكُوهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ النَّاسَ اذْكُرُوهُ بِمَا فِيهِ حَتَّى يَحْذُرَهُ النَّاسُ وَكَانُوا يَقُولُونَ ثَلاثَةٌ لَا غِيبَةَ لَهُمْ الْإِمَامُ الْجَائِرُ وَالْمُبْتَدِعُ وَالْمُجَاهِرُ بِفِسْقِهِ الْخَامِسُ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ مَعْرُوفًا بِلَقَبِ يَعْرِبُ عَنْ عَيْبِهِ كَالْأَعْرَجِ وَالْأَعْمَشِ فَلَا إِثْمَ عَلَى مَنْ يَقُولُ رَوَى أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجَ وَسَلْمَانُ عَنِ الْأَعْمَشَ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ فَقَدْ فَعَلَ الْعُلَمَاءُ ذلِكَ لِطَرُورَةِ التَّعْرِيفِ وَلِأَنَّ ذلِكَ قَدْ صَارّ جِيْثُ لَا يَكْرِهُهُ صَاحِبُهُ لَوْ عَلِمَهُ بَعْدَ أَنْ قَدْ صَارَ مَشْهُورًا بِهِ نَعَمْ إِنْ وَجَدَ عَنْهُ مَعْدِلًا وَأَمْكَنَهُ التَّعْرِيفُ بِعِبَارَةِ أُخْرَى فَهُوَ أَوْلَى وَلِنلِكَ يُقَالُ لِلْأَعْمَى الْبَصِيرُ عُدُولًا عَن اسْمِ النَّقْصِ السَّادِسُ أَنْ يَكُونَ مُجَاهِرًا بَالْفِسْقِ كَالْمُتَخَنِّثِ وَصَاحِبِ الْمَاخُورِ وَالْمُجَاهِرِ بِشُرْبِ الْحَمْرِ وَمُصَادَرَةِ النَّاسِ وَكَانَ مِمَّنْ يَتَظَاهَرُ بِهِ بِحَيْثُ لَا يَسْتَنْكِفُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ لَهُ وَلَا يُكْرَهُ أَنْ يُذْكَرَ بِهِ فَإِذَا ذَكَرْتَ فِيهِ مَا يَتَظَاهَرُ بِهِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ عَنْ وَجْهِهِ فَلَا غِيبَةَ لَهُ وَقَالَ ﷺ لَيْسَ لِفَاجِرٍ حُرْمَةً وَأَرَادَ بِهِ الْمُجَاهِرَ بِفِسْقِهِ دُونَ الْمُسْتَتِرِ إِذِا الْمُسْتَتِرُ لَا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاةِ حُرْمَتِهِ وَقَالَ الصَّلْتُ بْنُ طَرِيفٍ قُلْتُ لِلْحَسَنِ الرَّجُلُ الْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ بِفِجُورِهِ ذِكْرِي لَهُ بِمَا فِيهِ غِيبَةً لَهُ قَالَ لَا وَلَا كَرَامَةَ وَقَالَ الْحُسَنُ ثَلَاثَةً لَا الْفَسْنُ الْمُعْلِنُ بِفِسْقِهِ وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ فَهُولًا الْقَلَاثَةُ يَجْمَعُهُمْ أَنَّهُمْ غِيبَةَ لَهُمْ صَاحِبُ الْهَوَى وَالْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ بِفِسْقِهِ وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ فَهُولًا الثَّلَاثَةُ يَجْمَعُهُمْ أَنَّهُمْ يَتَظَاهَرُونَ بِهِ وَرُبَّا يَتَفَاخَرُونَ بِهِ فَكَيْفَ يَحْرَهُونَ ذَلِكَ وَهُمْ يَقْصِدُونَ إِظْهَارَهُ نَعَمْ لَوْ ذَكَرَهُ يَتَظَاهَرُونَ بِهِ وَرُبَّا يَتَفَاخَرُونَ بِهِ فَكَيْفَ يَحْرَهُونَ ذَلِكَ وَهُمْ يَقْصِدُونَ إِظْهَارَهُ نَعَمْ لَوْ ذَكَرَهُ يَتَظَاهُرُونَ بِهِ وَرُبَّا يَتَفَاخَرُونَ بِهِ فَكَيْفَ يَحْرَهُونَ ذَلِكَ وَهُمْ يَقْصِدُونَ إِظْهَارَهُ نَعَمْ لَوْ ذَكَرَهُ بَعَيْرِ مَا يَتَظَاهَرُ بِهِ وَرُبَّا يَتَفَاخَرُونَ بِهِ فَكَيْفَ يَحْرَهُونَ ذَلِكَ وَهُمْ يَقْصِدُونَ إِظْهَارَهُ نَعَمْ لَوْ ذَكَرَهُ بِعَيْرِ مَا يَتَظَاهَرُ بِهِ أَثِمَ وَقَالَ عَوْفُ دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ سِيرِينَ فَتَنَاوَلْتُ عِنْدَهُ الْحَجَّاجَ فَقَالَ إِن بِعَنْ مِعْ فَي اللهُ مَحَمَّا عَدْنُ لَا يَتَقِمُ لِلْحَجَّاجِ مِمَّى اغْتَابُهُ كَمَا يَنْتَقِمُ مِنَ الْحَجَّاجِ لِمَنْ ظَلَمَهُ وَإِنَّكَ إِذَا لَاللهَ تَعَالَى غَدًا كَانَ أَصْعَرُ ذَنْبٍ أَصَبْتَهُ أَشَدً عَلَيْكَ مِنْ أَعْظَمِ ذَنْبٍ أَصَابَهُ الْحَجَّاجُ لَا كَانَ أَصْعَرُ ذَنْبٍ أَصَبْتُهُ أَشَدَ عَلَيْكَ مِنْ أَعْظَمِ ذَنْبٍ أَصَابَهُ الْحَجَّاجِ مَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَرَاقُونَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمَاسُولُ الْمُوالِقُولُ الْمُعْلَى أَنْ أَصْعَوْرُ ذَنْبٍ أَصَابَهُ الْمُعْرُونَ فَي اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْرَاقُ لَولَ الْمَالَقُولُ الْمَالَةُ الْمُولُولُولُ الْمُولُولُ الْعَلَى الْمُعْلَى أَلْ الْمُعْرَاقُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْمُ الْمُعْرُولُ الْمُولُولُولُ الْمُؤْمِ لَا الْمُعْرُولُ الْمُعْرُالُولُ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُعْرُولُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْلِقُولُهُ الْمُولِلُولُ الْمُؤْمُ لَا اللّهُ الْعُلْمُ الْمُعْرُولُولُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ لَا ال

Keterangan tentang rukhsah-rukhsah yang memperbolehkan ghibah. Ketahuilah, bahwa rukhsah yang memperbolehkan menyebut kejelekan orang lain adalah gharadh shahih fi syar'i (tujuan yang dibenarkan syari'at), yang tidak bisa diraih tanpa menyebut kejelekannya itu. Maka, hal itu menafikan dosa ghibah. Rukhsah tersebut ada enam macam, yaitu:

- 1) Mengadukan kezaliman. Oleh sebab itu, seseorang yang menyebutkan seorang qadhi (hakim) telah melakukan kezaliman, tidak adil dan telah menerima suap, maka ia adalah orang yang telah melakukan ghibah dan maksiat bila bukan seorang yang dizalimi. Sementara bagi seseorang yang dizalimi oleh seorang qadhi, ia boleh mengadukannya ke penguasa dan mengatakan kezalimannya. Sebab, ia tidak mungkin menuntut haknya tanpa menyebutkan kezaliman qadhi tersebut. Nabi Saw. bersabda: "Sungguh orang benar berhak mengajukan tuntutannya. Beliau bersabda lagi: "Penundaan orang yang mampu melunasi hutangnya adalah kezaliman." Beliau bersabda pula: "Penundaan penemu barang (orang lain dalam mengembalikan kepada pemiliknya) menghalalkannya untuk diberi sanksi dan dicela kehormatannya."
- 2) Meminta pertolongan untuk mencegah kemungkaran dan mengarahkan orang yang bermaksiat pada kebenaran. Seperti diriwayatkan, bahwa sungguh Umar ra. pernah melewati Utsman ra., atau dalam versi lain melewati Thalhah ra., kemudian ia ucapkan salam, namun tidak dijawabnya. Lalu hal itu ia adukan kepada Abu Bakar ra.. Kemudian beliau mendatanginya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan pengaduan Umar ra. tadi tidak dinilai sebagai ghibah menurut para sahabat. Begitu pula ketika sampai kabar kepada Umar ra., bahwa sungguh Abu Jandal yang berada di Syiria telah kecanduan khamr,

kemudian Umar ra. menuliskan surat kepadanya:

"Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Haa Miim. Diturunkan kitab ini (al-Quran) dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Yang mengampuni dosa dan menerima taubat lagi keras hukumanNya. Yang mempunyai karunia. Tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Hanya kepadaNya (semua makhluk)kembali ..." (QS. Al-Mu'min: 1-3)

Kemudian Abu Jandal bertaubat. Umar ra. pun tidak menilai pengaduan kasus itu kepadanya sebagai ghibah. Sebab tujuannya adalah agar ia mengingkari perbuatan Abu Jandal tadi. Kemudian nasehat Umar ra. pun bisa diterimanya, bukan nasehat dari orang lain. Hal ini diperbolehkan karena adanya tujuan yang benar. Apabila tujuannya bukan demikian, maka pengaduan tersebut hukumnya haram.

- 3) Memohon fatwa. Seperti pertanyaan seseorang kepada *Mufti*: "Ayahku, istriku, atau saudaraku telah berbuat jahat kepadaku. Maka, bagaimana jalan keluarnya?" Namun yang lebih baik adalah dengan cara *ta'ridh* (menyamarkan identitas), dengan berkata: "Apakah pendapatmu tentang seseorang yang telah dizalimi oleh ayah, istri atau saudaranya?" Meski demikian, menjelaskan identitas dengan sekedarnya (seperti tadi) hukumnya mubah. Hal ini berdasarkan riwayat dari Hindun binti 'Utbah, sungguh ia pernah berkata kepada Nabi Saw.: "Sunguh Abu Sufyan (suaminya) adalah orang yang sangat pelit. Ia tidak mencukupi nafkahku dan anakku. Apakah aku boleh mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya?" Lalu Nabi menjawab: "Ambillah harta yang mencukupi dirimu dan anakmu dengan bijaksana." Hindun telah menyebutkan kepelitan dan kezaliman Abu Sufyan kepada diri dan anaknya, dan Nabi Saw. pun tidak mencegahnya. Sebab tujuannya adalah meminta fatwa.
- 4) Memperingatkan orang Islam dari bahaya. Oleh sebab itu, bila anda lihat seorang ahli fiqh seringkali menemui seorang ahli bid'ah atau orang fasik, dan anda khawatir bid'ah dan kefasikannya akan menularinya, maka anda boleh menceritakan bid'ah dan kefasikannya kepada ahli fiqh itu, bila memang motif anda adalah kekhawatiran menularnya bid'ah dan kefasikannya. Bukan dengan motif lain. Kasus ini merupakan kasus yang rawan. Sebab, terkadang motif yang timbul adalah kedengkian dan setan membujuknya dengan kedok kasih sayang kepada sesama. Begitu pula ketika ada seseorang akan membeli budak. Sementara anda tahu budak tersebut suka mencuri, berbuat

fasik, atau aib yang lain. Maka anda boleh menyebutkan hal itu kepada pembeli tersebut. Sebab, diam anda akan membahayakan pembeli, sedangkan komentar anda akan membahayakan budak itu. Maka pembeli lebih berhak dibela. Begitu pula seorang Muzakki (seorang yang ditugaskan meneliti privasi seorang saksi), ketika ia ditanya tentang privasi seorang saksi, maka ia boleh menyebutkan kejelekannya, bila memang diketahuinya. Orang yang diminta pertimbangan tentang urusan pernikahan dan penitipan amanah, maka ia boleh memberi informasi yang diketahuinya dengan tujuan mengharapkan kebaikan orang yang meminta pertimbangannya. Tidak dengan tujuan mencelanya. Bila ia yakin orang yang meminta pertimbangannya itu akan mengurungkan nikahnya dengan hanya diomongi: "Wanita itu tidak pantas bagimu." Maka hanya itu yang harus disampaikannya dan hal itu sudah cukup. Apa bila ia yakin orang tersebut tidak akan mengurungkan niatnya kecuali dengan keterangan jelas tentang aib wanita tersebut, maka ia boleh menjelaskannya. Sebab, Rasulullah Saw. pernah bersabda: "Apakah kalian menahan diri untuk menyebutkan orang yang jahat? Bukalah kedoknya, sehingga orang-orang mengetahui. Sebutlah dia dan kejahatannya sehingga orang-orang bisa menjaga diri darinya." Para sahabat berkata: "Ada tiga orang yang tidak ada ghibah bagi mereka, yaitu kepala pemerintahan yang zalim, ahli bid'ah dan orang yang memamerkan kefasikannya."

- 5) Seseorang yang terkenal dengan suatu julukan yang berasal dari aibnya. Seperti si pincang, si rabun. Maka orang yang mengatakan: "Abu Zanad meriwayatkan dari si pincang, Sulaiman meriwayatkan dari si rabun." dan semisalnya tidaklah berdosa. Sebab, para ulama pun telah melakukannya dikarenakan tuntutan menyebut identitas seseorang. Juga dikarenakan, andaikan orang yang bersangkutan tahu, maka ia tidak mempermasalahkannya setelah sebelumnya ia memang sudah terkenal dengan julukannya itu. Meskipun begitu, bila ditemukan penggantinya, dan bisa menyebutkan identitasnya dengan ungkapan lain, maka lebih utama. Oleh sebab itu, untuk orang yang buta dijuluki orang yang bermata hati, karena menghindari nama yang kurang baik.
- 6) Seseorang yang memamerkan kefasikannya. Seperti bencong, germo, peminum khamr dan perampok. Yakni orang-orang yang memamerkan kejelekannya, yang tidak malu dan biasa saja dicela. Bila anda menyebutkan kejelekan mereka, maka tidak berdosa. Rasulullah Saw. bersabda: "Siapa saja yang menanggalkan jilbab rasa malu dari

dirinya, maka tidak ada ghibah baginya." Umar ra. juga berkata: "Orang jahat tidak memiliki kemuliaan." Maksudnya adalah orang yang memamerkan kefasikannya. Bukan orang yang menyembunyikannya, sebab ia harus dijaga kehormatanya. Al-Shalt bin Tharif berkata: "Aku bertanya pada al-Hasan: "Seorang jahat yang memamerkan kejahatannya, adakah penuturanku tentang kejahatannya termasuk ghibah?" Ia menjawab: "Tidak. Ia tidak punya harga diri." Al-Hasan berkata pula: "Tiga macam orang yang tidak ada ghibah bagi mereka, yaitu budak hawa nafsu, orang fasik yang memamerkan kefasikannya, dan pemimpin yang zalim." Maka ketiga-tiganya sama-sama memamerkan kejahatannya dan bahkan terkadang membanggakannya. Maka bagaimana mungkin mereka benci dengan kejahatannya, sementara mereka ingin memamerkannya? Meskipun begitu, apabila seseorang menyebutkan kejahatan selain yang dipamerkan mereka, maka ia berdosa. 'Auf berkata: "Saat aku menemui Ibn Sirin aku menjumpai al-Hajjaj disampingnya. Kemudian Ibn Sirin berkata: "Allah Maha Bijaksana dan Maha Adil, yang akan menghukum al-Hajjaj atas orang yang ia gunjing, sebagaimana Ia akan menghukum orang yang mengunjing al-Hajjaj. Ketika besok anda bertemu Allah, maka dosa terkecil yang anda lakukan akan menjadi lebih berat dari pada dosa terbesar yang pernah dilakukan al-Hajjaj."

2. Riyadh al-Shalihin⁵¹

Ketahuilah! Sungguh *ghibah* itu diperbolehkan dengan tujuan yang dibenarkan syari'at, yang tidak bisa dicapai melainkan dengan cara *ghibah*. Tujuan yang dibenarkan syari'at ada enam macam ... yang kedua adalah meminta pertolongan dalam mencegah kemungkaran dan mengarahkan orang maksiat pada kebenaran.

3. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj⁵²

⁵¹ Yahya al-Nawawi, Riyadh al-Shalihin. (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), Juz h. 432-433.

⁵² Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfadz al-Minhaj. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), Juz IV h. 22.

لَقَبُّ وَمُسْتَفْتٍ وَفِسْقٌ ظَاهِرٌ *وَالظُّلْمُ تَحْذِيرٌ مُزِيلُ الْمُنْكِرِ
أَيْ فَيَجُوزُ أَنْ يَذْكُرَهُ بِذَلِكَ فَقَطْ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ لِجَوَازِ ذِكْرِ غَيْرِهِ سَبَبُ آخَرُ قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْإِحْيَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُظَاهِرُ بِالْمَعْصِيَةِ عَالِمًا يُقْتَدَى بِهِ فَتَمْتَنِعُ غِيبَتُهُ لِأَنَّ النَّاسَ إِذَا اطَّلَعُوا عَلَى زَلَّتِهِ تَسَاهَلُوا فِي ارْتِكَابِ الذَّنْبِ

Dalam Zawaid al-Raudhah al-Nawawi berkata: "Ghibah diperbolehkan karena enam alasan." Dan ia sebutkan semuanya. Sementara oleh ulama lain keenam sebab itu dikumpulkan dalam seuntai syair, ia berkata:

Julukan, pencari fatwa, kefasikan yang dipamerkan,

Kezaliman, memperingatkan bahaya dan membasmi kemungkaran

Maksudnya, maka diperbolehkan menyebutkan orang lain dengan keenam sebab itu saja, kecuali terdapat sebab lain yang memperbolehkan menggunjing orang lain. Dalam *Ilnya'* al-Ghazali berkata: Kecuali yang memamerkan maksiat adalah seorang alim yang menjadi panutan, maka tidak boleh menggunjingnya. Sebab, ketika masyarakat mengetahui kesalahannya, mereka akan mudah melakukan dosa pula."

4. Subul al-Salam⁵³

⁵³ Muhammad al-Shan'ani al-Amir, Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam. (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.), Juz IV, h. 192-194.

فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ تَسْتَأْذِنُهُ عَلَيْ وَتَسْتَشِيرُهُ وَتَذْكُرُ أَنَّهُ خَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَي سُفْيَانَ وَخَطَبَهَا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَضَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ثُمَّ قَالَ جَهْمٍ فَقَالَ أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصَعْلُوكُ لَا مُحَالَ لَهُ وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَضَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ثُمَّ قَالَ انْكِيمِي أَسَامَةَ الْحُدِيثَ (الْحَامِسُ) ذِكْرُ مَنْ جَاهَرَ بِالْفِسْقِ أَوِ الْبِدْعَةِ كَالْمُكَاسِينَ وَذَوِي الْوَلَايَاتِ الْبَاطِلَةِ فَيَجُورُ ذِكْرُهُمْ بِمَا يُجَاهِرُونَ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ وَتَقَدَّمَ دَلِيلُهُ فِي حَدِيثِ أَذْكُرُوا الْفَاحِرَ (السَّادِسُ) التَّعْرِيفُ بِالشَّخْصِ بِمَا فِيهِ مِنْ الْعَيْبِ كَالْأَعْوَرِ وَالْأَعْرَجِ وَالْأَعْمَشِ وَلَا لَيْ الْمُعْرِوقُ وَيُعْمَى وَلَا أَعْرَجِ وَالْأَعْمَ فَعْ وَلَا أَيْ شَرِيفٍ فِي قَوْلِهِ

الدَّمُّ لَيْسَ بِغِيبَةٍ فِي سِتَّةٍ * مُتَظَلِّمٍ وَمُعَرِّفٍ وَمُحَدِّرٍ وَلَهُ مُنْكَرٍ وَلِمُظْهِرٍ فِسْقًا وَمُسْتَفْتٍ وَمَنْ * طَلَبَ الْإِعَانَةَ فِي إِزَالَةٍ مُنْكَرٍ

Keharaman ghibah telah menjadi hal maklum dalam agama dan disepakati para ulama. ... Allah telah memposisikan ghibah seperti halnya memakan mayat manusia, dan hadits tentang larangan ghibah yang sangat banyak cukup menunjukkan keharamannya yang besar. Ketahuilah! Sungguh para ulama telah mengecualikan enam perkara dari ghibah, yaitu:

- 1) Mengadukan kezaliman. Maka, orang yang dizalimi boleh berkata: "Fulan telah menzalimiku dan mengambil hartaku, atau dia orang yang zalim." Namun apabila ucapannya tersebut dalam rangka mengadu kepada orang yang mampu menghilangkan atau memperingan kezalimanya. Dalilnya adalah ucapan Hindun ketika mengadukan Abu Sufyan kepada Nabi Saw.: "Ia lelaki yang kikir."
- 2) Meminta pertolongan untuk membasmi kemungkaran. Yaitu dengan mengadukan kepada orang yang diduga kuat mampu membasminya. Maka si pengadu boleh berkata: "Fulan telah berbuat demikian atas orang yang tidak memamerkan maksiat."
- 3) Meminta fatwa. Yaitu seseorang berkata kepada Mufti: "Fulan telah menzalimiku dengan begini, maka bagaimana jalan keluarnya?" Dalilnya adalah ia tidak mungkin lepas dari kezaliman yang menimpanya kecuali dengan menyebutkan faktanya.
- 4) Memperingatkan muslimin dari bangga diri. Seperti mengkritik para rawi, para saksi dan orang yang ingin mengajar dan memberi fatwa tanpa keahlian yang cukup. Dalilnya adalah sabda Nabi Saw.: "Inilah anggota suku yang terburuk!" (HR. Bukhari), dan Sabda Nabi Saw.:" Mu'awiyah orangnya melarat." Yaitu saat Fahimah binti Qais meminta

izin bertemu dan musyawarah kepada beliau Saw., dan menyebutkan bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm melamarnya, kemudian beliau berkata: "Mu'awiyah orangnya melarat, tidak punya harta. Sedangkan Abu Jahm tidak pernah menurunkan tongkat dari pundaknya (ringan tangan). Menikahlah dengan Usamah (saja) ..."

- 5) Menyebut orang yang memamerkan kefasikan atau bid'ah. Seperti para penarik pungutan liar dan pejabat yang zalim. Maka diperbolehkan menyebutkan kesalahan yang dipamerkan mereka, bukan yang lainnya. Dalilnya telah disampaikan yaitu: "Sebutkanlah si penjahat ..."
- 6) Menyebut identitas orang dengan julukan dari aibnya. Seperti si mata satu, si pincang, si rabun. Namun tidak dimaksud meremehkan dan menggunjingnya.

Keenam sebab tersebut oleh Ibn Syarif telah dikumpulkan dalam syairnya:

Cercaan yang tidak termasuk ghibah ada enam macam, Pengadu kezaliman, penyebut identitas, pemberi peringatan, Bagi tukang pamer kefasikan, pencari fatwa, Dan pencari pertolongan dalam membasmi kemungkaran.

5. Siraj al-Thalibin⁵⁴

(تَنْبِيهُ) عَدَّ الْعَلَّامَةُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الزَّوَاجِرِ الْغِيبَةَ وَالسُّكُوتَ عَلَيْهَا رِضًا وَتَقْرِيرًا مِنَ الْكَبَاثِرِ قَالَ عَدُّهَا هُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ كَثِيرُونَ وَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ السُّكُوتَ عَلَيْهَا رِضًا بِهَا كَبِيرَةُ ثُمَّ رَأَيْتُ الْأَذْرَعِيَّ صَرَّحَ بِهِ نَعَمْ لَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ دَفْعُهَا فَيَلْزَمُهُ عِنْدَ الأَمْكِنِيَّةِ مُفَارَقَةُ الْمُغْتَابِ وَمَا قِيلَ أَنَّهَا صَغِيرَةٌ ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلُ

(Peringatan) Al-'Allamah Ibn Hajar dalam kitab al-Zawajir menilai ghibah dan mendiamkannya karena menyetujui dan membiarkannya sebagai dosa besar. Ia berkata: "Penilaian ghibah sebagai dosa besar adalah pendapat mayoritas ulama. Maka penilaian tersebut berkonsekuensi pada mendiamkannya karena menyetujui dinilai juga sebagai dosa besar. Kemudian saya lihat al-Adzra'i terang-terangan mengatakan hal tersebut. Namun meskipun begitu, bila seseorang tidak mampu mencegahnya, maka ketika mampu ia harus memisahkan diri dari orang yang sedang ghibah." Suatu versi pendapat yang menyatakan bahwa ghibah adalah dosa kecil merupakan pendapat yang lemah atau kekeliruan.

Muhammad Ihsan Dahlan, Siraj al-Thalibin, (Mesir: musthafa al-Halabi, 1955), Cet. ke-1, Jilid I, h. 380.

6. Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami⁵⁵

وَإِذَا كَانَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ يَقُولَ مَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ الْحُقُّ وَيُدَافِعُ بِلِسَانِهِ وَقَلَمِهِ عَنْ عَقِيدَتِهِ فَإِنَّ حُرِّيَّةَ الْقُولِ لَيْسَتْ مُطْلَقَةً بَلْ هِيَ مُقَيَّدَةً بِأَنْ لَا يَكُونَ مَا يُكْتَبُ أَوْ يُقَالُ خَارِجًا عَنْ حُدُودِ الْآدَابِ الْعَامَّةِ وَالْأَخْلَاقِ الْفَاضِلَةِ أَوْ مُخَالِفًا لِنُصُوصِ الشَّرِيعَةِ ... وَيُمْكُنُنَا بَعْدَ ذلِكَ أَنْ نَقُولَ إِنَّ الشَّرِيعَة الْإِسْلَامِيَّة تُبِيحُ لِكُلِ إِنْسَانٍ أَنْ يَقُولَ مَا وَيُمْكُنُنَا بَعْدَ ذلِكَ أَنْ نَقُولَ إِنَّ الشَّرِيعَة الْإِسْلَامِيَّة تُبِيحُ لِكُلِ إِنْسَانٍ أَنْ يَقُولَ مَا يَشُعُونُ شَتَّامًا وَلَا عَيَّابًا وَلَا قَاذِفًا وَلَا كَاذِبا وَأَنْ يَقُولَ مَا يَشَاءُ دُونَ عُدُوانٍ فَلَا يَكُونُ شَتَّامًا وَلَا عَيَّابًا وَلا قَاذِفًا وَلا كَاذِبا وَأَنْ يَدُعُو إِلَى يَشَاءُ دُونَ عُدُوانٍ فَلَا يَكُونُ شَتَّامًا وَلَا عَيَّابًا وَلا قَاذِفًا وَلا كَاذِبا وَأَنْ يَدُعُو إِلَى يَشَاءُ دُونَ عُدُوانٍ فَلا يَحْونُ شَتَّامًا وَلا عَيَّابًا وَلا قَاذِفًا وَلا كَاذِبا وَأَنْ يَدُعُو إِلَى وَلَا يَعْولَ وَلا يَعْفَلُ هِذَا وَالْمُؤْعِظَةِ الْحُسَنَةِ وَأَنْ يُعْولُ عَلَا قَادِهِ فِي أَحْسَنُ وَأَنْ لا يَعْهَرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ وَلَا يَبْدَأُ بِهِ وَأَنْ يُعْرِضَ عَنِ الْجُاهِلِينَ وَلَا جِدَالَ فِي أَنَّ مَنْ يَقَاءٍ عَلَاقَاتِهِ بِغَيْرِهِ سَلِيمَة ثُمَّ النَّاسَ عَلَى أَنْ يَسْمَعُوا قَوْلُهُ وَيَقْدِرُوا رَأَيْهُ فَضُلًا عَنْ بَقَاءٍ عَلَاقَاتِهِ بِغَيْرِهِ سَلِيمَة ثُمَّ الْقَامِةِ وَلَا إِللَّاسَ عَلَى أَنْ يَسْمَعُوا قَوْلُهُ وَيَقْدِرُوا رَأَيْهُ فَضُلًا عَنْ بَقَاءٍ عَلَاقَاتِهِ بِغَيْرِهِ سَلِيمَة ثُمَّ الْقَامِةِ وَلَا عَلَاقًاتِهِ بِغَيْرِهِ سَلِيمَة فَمَا الْعَامَةِ وَلَا عَلَاقًاتِهِ بِغَيْرِهِ سَلِيمَةً وَالْمُولُ وَلَو اللْعَامَةِ وَلِهُ وَيَقُولُ وَلَا عَلَاقًا وَاحِدَةً تَعْمَلُ لِلْمُصَلِّعَةِ الْعَامَةِ فَي الْمَالَا لَا عَلَاقًا وَالْمَالَةُ الْعَامُ الْمَلْعُولُ الْمَالَقُولُ الْمَالَقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَالَقُولُ الْمَالَعُولُ اللْمَالُولُ اللْمَالَةُ الْمَالِقُولُ اللْمُعْلِقُولُ اللْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمِلَا عَلَا اللْمَالِقُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ ال

Ketika setiap orang berhak mengatakan apa yang diyakininya sebagai kebenaran dan membelanya dengan ucapan maupun tulisan, maka kebebasan berbicara tersebut tidaklah secara mutlak. Namun, ucapan dan tulisannya terbatasi agar tidak sampai keluar dari etika dan akhlak al-karimah ataupun berseberangan dengan syari'at. ... Setelah itu bisa kita simpulkan, Syar'iat Islam memperbolehkan setiap orang untuk mengatakan kemaunnya tanpa berbuat kotor. Maka ia tidak diperbolehkan mencerca, menggunjing, menuduh zina dan berbohong. Ia harus mengajak orang lain mengikuti pendapatnya dengan hikmah, maui'dhah hasanah dan perdebatan santun. Tidak memamerkan ucapan kotor dan memulainya. Ia juga harus menghindar dari orang-orang yang bodoh. Maka tidak perlu diperdebatkan lagi, bahwa orang yang bertindak demikian akan mampu mengajak orang lain untuk mendengar dan mempertimbangkan pendapatnya. Lebih-lebih (menjaga) hubungannya dengan orang lain akan tetap terjaga. Begitu pula hubungan segolongannya akan bersatu padu dan mampu meraih kemaslahatan umum.

448. Trafficking (Perdagangan Manusia)

A. Deskripsi Masalah

Trafficking adalah proses perdagangan manusia yang unsur pokoknya

⁵⁵ Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, (Kairo: Maktabah Dar al-Turats, 2003), Jilid I, h. 29-30.

adalah eksploitasi. Seperti eksploitasi seksual, kerja paksa tanpa upah, pembunuhan untuk pengambilan organ tubuh dan lainnya. Sehingga bisa terjadi pada tenaga kerja baik dalam maupun luar negeri. Meskipun semua rekrutmen tenaga kerja tidak selalu mengalami dampak negatif *trafficking*.

Rekrutmen tenaga kerja yang mengandung unsur trafficking bisa muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- Informasi palsu tentang pekerjaan, pemalsuan dokumen resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor dan izin keluarga.
- 2. Pembiayaan yang tidak wajar, transportasi tidak resmi atau penyelundupan, perjalanan yang berbahaya, mempekerjakan tanpa upah, dan waktu menunggu di penampungan.
- 3. Kondisi (tipe) pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja dan atau kesepakatan verbal (palsu) dengan pekerja, penempatan pada majikan baru di Negara tujuan tanpa persetujuan pekerja. Atau melalui penipuan dan paksaan fisik, penyekapan paksa, penahanan tanda pengenal dan dokumen perjalanan, resiko kesehatan dan keselamatan, kurangnya perlindungan dan bantuan sosial-hukum. Tidak melibatkan kedutaan atau kurangnya pelayanan yang diberikan kedutaan.
- Aksi pemalakan dan pemerasan melalui pelayanan dengan biaya tinggi oleh petugas bandara dan imigrasi, penukaran uang, dan sebagainya.

B. Pertanyaan

- 1. Bagaimanakah pandangan hukum Islam tentang trafficking (proses perdagangan manusia) yang meliputi perekrutan, penerimaan, penampungan, pengiriman, dan penyerahan dengan menggunakan ancaman kekerasan, penyulikan, penyekapan, pemalsuan, penjeratan melalui hutang atau jasa kebaikan dan sebagainya?
- 2. Bagaimanakah hukum mencegah *trafficking* dan melindungi para korbannya bagi semua pihak?

C. Jawaban

- 1. Hukum *trafficking* yang meliputi berbagai cara biadab sebagaimana pertanyaan di atas adalah haram secara keseluruhan.
- 2. Hukum mencegah *trafficking* dan melindungi para korbannya bagi semua pihak adalah wajib.

D. Dasar Penetapan

Al-Qur'an

وَلَقَدْ كُرِّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي ٱلبَّرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُم مِنَ ٱلطَّيِبَتِ وَفَضَّلْنَهُمْ
 عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً

"Dan sungguh telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (QS. Al-Isra':70)

وَلَا تُكْرِهُواْ فَتَيَنتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصَّنَا لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَّوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ

"Dan janganlah kalian paksa budak-budak wanita kalian untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kalian hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sungguh Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu." (QS. Al-Nur: 33)

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّه ۖ إِنَّ ٱللَّه شَدِيدُ الْعَقَابِ ٢٠٠٠ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

"Dan tolong-menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh Allah amat berat siksaNya." (QS. Al-Maidah: 2)

وَمَا لَكُرْ لَا تُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أُخْرِجْنَا مِنْ هَنذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

"Mengapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau" (QS. Al-Nisa: 75)

Al-Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ قَالَ الله تَعَالَى ثَلاَثَةً أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ رَجُلُ أَعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلُ بَاعَ حُرَّاً فَأَكُلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمُ لُهُ السَّتَأْجَرَ أَجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَأَخْمَدُ)

"Dari Abu Hurairah Ra., dari Nabi Saw. ia bersabda: "Allah berfirman: "Ada tiga golongan di mana Aku menjadi musuh mereka di hari kiamat, yaitu: Seseorang yang diberi amanah dengan sumpah atas namaKu kemudian ia ingkari, seseorang yang menjual orang merdeka kemudian memakan hasil penjualannya, dan seseorang yang menyewa orang lain, lalu mempekerjakannya namun tidak ia berikan upahnya." (HR. Bukhari, Ibn Majjah dan Ahmad)

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى البرِّ وإِنَّ الْبِرَّ يَهدِي إِلَى الْجَنَّةِ وإِنَّ اللَّهِ عَنْ اللهِ صِدِّيقاً وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُحْتَبَ عِنْدَ الله الفُجُورِ وَإِنَّ الفُجُورِ وَإِنَّ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُحتَبَ عِنْدَ الله كَذَاباً (رَوَاهُ السِّتَةُ وَمَالِكُ وَأَحْمَدُ)

"Dari Ibn Mas'ud ra., dari Nabi Saw., beliau berkata: "Sungguh kejujuran itu menunjukkan pada kebaikan, dan sungguh kebaikan itu menunjukkan surga. Dan sungguh seseorang bertindak jujur sehingga ia tercatat orang yang sangat jujur di sisi Allah. Sungguh kebohongan itu menunjukkan pada kejahatan, dan sungguh kejahatan itu menunjukkan neraka. Dan sungguh seseorang berbohong sehingga ia tercatat sebagai pembohong besar di sisi Allah." (HR. Al-Sittah, Malik dan Ahmad)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ النّبِي ﷺ بِمِنَى أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَقَالَ فَإِنَّ هَذَا يَوْمُ حَرَامُ أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهْرُ حَرَامُ قَالَ فَإِنَّ قَالَ بَلَدُ حَرَامُ أَفَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهْرُ حَرَامُ قَالَ فَإِنَّ قَالَ بَلَدُ حَرَامُ أَفَتَدْرُونَ أَيُ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ شَهْرُ حَرَامُ قَالَ فَإِنَّ اللهُ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ مَا عَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلِدِكُمْ هَذَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

"Dari Ibn Umar Ra. ia berkata, ketika berada di Mina, Nabi Saw. bersabda: "Apakah kalian tahu, hari apa ini?" Para sahabat menjawab: "Allah dan RasulNya lebih mengetahui." Beliau bersabda: "Sungguh ini hari mulia. Apakah kalian tahu, daerah apakah ini?" Para sahabat menjawab: "Allah dan RasulNya lebih mengetahui." Beliau bersabda: "Sungguh ini daerah mulia.

Apakah kalian tahu, bulan apakah ini?" Para sahabat menjawab: "Allah dan RasulNya lebih mengetahui." Beliau bersabda: "Sungguh ini bulan mulia." (Kemudian) beliau bersabda: "Sungguh jiwa, harta, dan harga diri sebagian dari kalian itu kemuliaan bagi sebagian yang lain, sebagaimana kemuliaan hari kalian ini, di daerah mulia kalian ini." (HR. Bukhari dan Muslim)

Aqwal al-Ulama

1. Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdah al-Ahkam⁵⁶

أَنَّا إِذَا سَلَكُنَا هَذَا الْمَسْلَكَ فَقَدْ تَكُونُ مَفْسَدَةُ بَعْضِ الْوَسَائِلِ إِلَى بَعْضِ الْكَبَاثِرِ مُسَاوِيًا لِبَعْضِ الْكَبَاثِرِ أَوْ زَائِدًا عَلَيْهَا فَإِنَّ مَنْ أَمْسَكَ امْرَأَةً مُحْصَنَةً لِمَنْ يَرْنِي بِهَا أَوْ مُسَاوِيًا لِبَعْضِ الْكَبَاثِرِ أَوْ زَائِدًا عَلَيْهَا فَإِنَّ مَنْ أَمْسَكَ امْرَأَةً مُحْصَنَةً لِمَنْ يَرْنِي بِهَا أَوْ مُسْلِمًا مَعْصُومًا لِمَنْ يَقْتُلُهُ فَهُو كَبِيرَةً أَعْظَمُ مَفْسَدَةً مِنْ أَكْلِ مَالِ الرِّبَا أَوْ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ وَهُمَا مَنْصُوصٌ عَلَيْهِمَا وَكَذَلِكَ لَوْ دَلَّ عَلَى عَوْرَةٍ مِنْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ تُفْضِي الْيَتِيمِ وَهُمَا مَنْصُوصٌ عَلَيْهِمَا وَكَذَلِكَ لَوْ دَلَّ عَلَى عَوْرَةٍ مِنْ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ تُفْضِي إِلَى قَتْلِهِمْ وَسَبِي ذَرَارِيِّهِمْ وَأَخْذِ أَمْوَالِهِمْ كَانَ ذَلِكَ أَعْظَمَ مِنْ فِرَارِهِ مِنْ الزَّحْفِ وَالْفِرَارُ مِنْ الزَّحْفِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ دُونَ هَذِهِ

Ketika kita mengikuti metode ini (menimbang dosa dengan mengukur mafsadah-bahaya-nya pada dosa besar yang telah terdapat nashnya, untuk menentukan apakah dosa tersebut termasuk kategori dosa besar atau kecil)⁵⁷, maka terkadang mafsadah sebuah wasilah (perantara) suatu dosa besar sama dengan ekses negatif dosa besar yang lain atau lebih. Sebab, seseorang yang menyekap perempuan muhshanah (bersuami) untuk dizinainya, atau menyekap seorang muslim yang ma'shum (terjaga dari dosa; nabi) untuk diserahkan kepada orang yang hendak membunuhnya, maka kedua tindakannya itu adalah dosa besar yang mafsadahnya lebih besar dari pada memakan harta riba dan harta anak yatim. Sementara memakan harta riba dan harta anak yatim telah dinash (sebagai dosa besar). Begitu pula andaikan seseorang membuka kelemahan muslimin (kepada pihak musuh), yang mengakibatkan mereka terkalahkan, wanita dan anak-anaknya tertawan dan harta mereka terampas, maka tindakannya itu lebih besar mafsadahnya daripada melarikan diri dari barisan perang. Padahal, melarikan diri dari barisan perang dinash (sebagai dosa besar), tidak seperti

⁵⁶ Ibn Daqiq al-'Id, Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdah al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), Jilid IV, h. 171-172.

⁵⁷ Lihat Ibn Daqiq al-'Id, Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdah al-Ahkam, dalam Mas'alah Ikhtilaf al-Nas fi al-Kaba'ir. Penerjemah.

dosa membuka kelemahan muslimin ini.

2. Is'ad al-Rafiq Syarh Sulam al-Taufiq⁵⁸

وَمِنْهَا (اسْتِخْدَامُ الْحُرِّ) وَجَعْلُهُ رَقِيقًا إِذَا كَانَ (كُرْهًا) عَنْهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ثَلَاقَةً لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُمْ صَلاّةً مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَرَجُلُّ أَتَى الصَّلاةَ دِبَارًا أَيْ بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ وَرَجُلُ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ قَالَ الْحَظَائِيُّ اعْتِبَادُ الْمُحَرَّرِ إِمَّا الصَّلاةَ دِبَارًا أَيْ بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ وَرَجُلُ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ قَالَ الْحَظَائِيُّ اعْتِبَادُ الْمُحَرَّرِ إِمَّا أَنْ يُعْتَقِلُهُ بَعْدَ الْعِثْقِ أَنْ يُعْتَقِلُهُ بَعْدَ الْعِثْقِ أَنْ يُعْتَقِلُهُ بَعْدَ الْعِثْقِ فَلَى اللهِ عَمْدُ وَإِمَّا أَنْ يَعْتَقِلُهُ بَعْدَ الْعِثْقِ فَيَسْتَخْدِمَهُ كُرْهًا قَالَ ابْنُ الْجُوزِيِّ الْحُرُّ عَبْدُ اللهِ فَمَنْ جَنَى عَلَيْهِ فَخَصْمُهُ سَيِّدُهُ وَيَا الْقَالُ فِي الزَّوَاحِرِ وَعَدُّهُ مِنَ الْكَبَائِرِ صَرِيحٌ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَهُو ظَاهِرُ كُمَا فِي الْقَسْطَلَانِي قَالَ فِي الزَّوَاحِرِ وَعَدُّهُ مِنَ الْكَبَائِرِ صَرِيحٌ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَهُو ظَاهِرُ

Dan termasuk dosa besar, (mempekerjakan orang merdeka sebagai pelayan) dan menjadikannya budak. Ketika hal itu terjadi (dengan paksaan) kepadanya.

Nabi Saw. bersabda: "Tiga orang yang shalatnya tidak diterima Allah. Yaitu orang yang menguasai-memimpin- suatu kaum, sementara mereka membencinya. Orang yang melaksanakan shalat setelah habis waktunya. Dan orang yang memperbudak orang yang telah dimerdekakannya." (HR. Abu Daud)

Al-Khattabi berkata: "Sabda Nabi Saw.: "Memperbudak orang yang telah dimerdekakannya." bisa berarti memerdekakannya dan kemudian merahasiakan atau mengingkari kemerdekakanya. Dan hal ini lebih bahaya dari yang setelahnya. Atau menahan setelah memerdekakannya, kemudian mempekerjakannya sebagai pelayan secara paksa.

Ibn al-Jauzi berkata: "Orang merdeka adalah hamba Allah. Maka siapa saja yang berbuat jahat kepadanya, maka musuhnya adalah majikannya (Allah)." Seperti tercantum dalam karya al-Qasthalani.

Dalam kitab al-Zawajir Ibn hajar berkata: "Penilaian tentang perbudakan orang merdeka sebagai dosa besar begitu tegas dari hadits ini. Dan hal itu merupakan kesimpulan yang terang."

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 22 Rajab 1427 H/16 Agustus 2006

708

⁵⁸ Muhammad Salim Bafadhal, Is'ad al-Rafiq Syarh Sulam al-Taufiq, (Surabaya: al-Hidayah, t. th.), Juz VI, h. 125.

PIMPINAN SIDANG PLENO LANJUTAN KOMISI BAHTSUL MASAIL DINIYYAH WAQI'IYYAH

Ketua

Ketua

ttd

ttd

KH. DR. Masyhuri Na'im, MA

KH. Ma'ruf Amin

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

KH. DR. Maghfur Utsman

KH. Arwani Faishal

TIM PERUMUS:

Ketua, merangkap Anggota:

KH. DR. Masyhuri Na'im (PBNU)

KH. Ma'ruf Amin (PBNU)

KH. Hafizh Utsman (PBNU)

KH. DR. Maghfur Utsman (PBNU)

Sekretaris merangkap Anggota:

KH. Arwani Faishal (PBNU)

Anggota:

KH. Ahmad Sadid Jauhari (PBNU)

KH. Cholil Nafis, MA. (PBNU)

KH. Hasyim Abbas, SHI. (PBNU)

KH. Yasin Asmuni (PWNU JATIM)

KH. Muhammad Ardani (PWNU JATIM)

KH. M. Aniq Muhammadun (PWNU JATENG)

KH. Busyro Musthofa (PWNU JATENG) KH. Kholil Anwar (PWNU JABAR)

KH. Hasanuddin Imam (PWNU JABAR)

KH. Tamyiz Muharrom (PWNU YOGYAKARTA)

KH. Ahmad Ishomuddin, M.Ag. (PWNU LAMPUNG)

HASIL KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-XXXII Di Asrama Haji Sudiang Makassar Tanggal 7-11 Rabi'ul Akhir 1431 H/ 22 – 27 Maret 2010 M Tentang: MASAIL AL-DINIYYAH AL-WAQI'IYYAH

449. Transaksi Via Alat Elektronik
450. Sistem Bagi Hasil Perbankan Syariah
451. Sadap Telpon
452. Menunda Penguburan Jenazah
453. Mengumpulkan Jenazah Muslim dan
Non Muslim Dalam Satu TPU (Tempat Pemakaman Umum)
454. Pencurian Ikan di Laut
455. Batas Minimal Usia Nikah
456. Pernyataan Shighat Ta'liq Talak

KEPUTUSAN MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL ULAMA NOMOR: V/MNU-32/III/2010 TENTANG

BAHTSUL MASA'IL DINIYYAH WAQI'IYAH NAHDLATUL ULAMA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ

MUKTAMAR Ke-32 NAHDLATUL ULAMA

- Menimbang
- : a. Bahwa menjadi tugas Muktamar sebagai instansi tertinggi dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk membahas masalah-masalah yang berkembang di masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat agar dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;
 - b. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Perkumpulan atau Jam'iyyah Diniyyah Islamiyyah yang bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat dan berbagai bidang yang mengarah kepada terbentuknya Khaira Ummah, perlu secara terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas khidmahnya dengan berdasarkan ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat;
 - Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas Muktamar Ke- 32 perlu menetapkan Hasil Bahtsul Masail Diniyyah Waqi'iyyah;

Mengingat

- a. Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor 002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas Alim Ulama Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926;
- b. Keputusan Muktamar Ke-32 Nahdlatul Ulama Nomor : I/MNU-32/III/2010 tentang Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib Muktamar Ke 32 Pasal 13 ayat (3) dan pasal 5 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama.

- Memperhatikan : a. Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Muktamar Ke-32 Nahdlatul Ulama tanggal tanggal 7 R. Akhir 1431 H/23 Maret 2010 M;
 - Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi Waqi'iyyah yang disampaikan pada Sidang Pleno VII Muktamar Ke-32 Nahdlatul Ulama pada tanggal 11 R.Akhir 1431 H/27 Maret 2010 M;
 - Ittifak Sidang Pleno VII Muktamar Ke-32
 Nahdlatul Ulama pada tanggal 11 R.Akhir 1431 H/27 Maret 2010 M;

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridla Allah Swt.:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MUKTAMAR KE-32 NAHDLATUL ULAMA TENTANG BAHTSUL MASAIL DINIYYAH WAQI'IYAH;

Pasal 1 Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Hasilhasil Bahtsul Masail Diniyyah Waqiiyah sebagai pedoman dalam memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat, dan mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;

Pasal 2 Mengamanatkan kepada Pengurus dan warga Nahdlatul Ulama untuk menaati segala Hasil-hasil Bahtsul Masail Diniyyah Waqiiyah ini;

Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Asrama Haji Sudiang Makssar

Pada tanggal : 11 Rabi'ul Akhir 1431 H/27 Maret 2010 M

MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL ULAMA PIMPINAN SIDANG PLENO VII

ttd

<u>Drs. KH. Hafizh Utsman</u>
Ketua

<u>Drs. H. Taufik R. Abdullah</u>
Sekretaris

ttd

449. Transaksi Via Alat Elektronik

A. Deskripsi

Kemajuan teknologi dan informasi telah mengantarkan pada pola kehidupan umat manusia yang lebih mudah. Sehingga merubah pola sinteraksi antar anggota masyarakat. Pada era teknologi dan informasi ini, khususnya internet, seseorang dapat melakukan perubahan pola transaksi bisnis, baik berskala kecil maupun besar. Yaitu perubahan dari paradigma bisnis konvensional menjadi paradigma bisnis elektronikal. Paradigma baru tersebut dikenal dengan istilah *Electronic Commerce*, umumnya disingkat *E-Commerce*.

Kontrak elektrik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Maka jelas, kontrak elektronikal tidak hanya dilakukan melalui internet semata. Tetapi dapat juga dilakukan melalui medium facsimile, telegram, telex, dan telpon. Kontrak elektronikal yang menggunakan media informasi dan komunikasi terkadang mengabaikan rukun jualbeli (bai'), seperti sighat, ijabqabul, dan syarat pembeli dan penjual yang harus cakap hukum. Bahkan dalam hal transaksi elektronikal ini belum diketahui tingkat keamanan proses transaksi, identifikasi pihak yang berkontrak, pembayaran, dan ganti rugi akibat kerusakan. Bahkan, akad nikah pun sekarang telah ada yang menggunakan fasilitas telpon atao Cybernet, seperti yang terjadi di Arab Saudi.

B. Pertanyaan

- 1. Bagaimana hukum transaksi via elektronik, seperti media telpon, e-mail, atau Cybernet dalam akad jual beli dan akad nikah?
- 2. Sahkan pelaksanaan akad jual-beli dan akad nikah yang berada di majlis terpisah?
- 3. Bagaimana hukum melakukan transaksi dengan cara pengiriman SMS dari calon pengantin pria yang berisi tentang catatan pemberian kuasa hukum (wakalah) kepada seseorang yang hadir di majlis tersebut?

C. Jawaban

1. Hukum akad jualbeli melalui alat elektronik sah, apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat *mabi'* (barang yang diperjualbelikan) atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya. Sedangkan hukum pelaksanaan akad nikah melalui alat elektronik tidak sah, karena: (a) kedua saksi tidak melihat dan mendengar secara lang sung pelaksanaan akad; (b) saksi tidak hadir di majlis

- akad; (c) di dalam akad nikah disyaratkan lafal yang sharih (jelas). Sedangkan akad melalui alat elektronik tergolong kinayah (samar).
- Pelaksanaan akad jual-beli meskipun di majlis terpisah tetap sah. Sedangkan pelaksanaan akad nikah yang berada di majlis terpisah di majlis terpisah tidak sah.
- 3. Hukum melakukan akad/transaksi dengan cara pengiriman SMS dari calon pengantin pria berisi catatan wakalah (pemberian kuasa hukum), kepada seseorang yang hadir di majlis tersebut hukumnya sah, namun dengan syarat aman dan sesuai nafs al-amri (kenyataan).

D. Dasar pengambilan hukum

Aqwal al-Ulama

1. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj¹

(وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ) فِي غَيْرِ نَحْوِ الْفُقَاعِ كَمَا مَرَّ (بَيْعُ الْغَاثِبِ) وَهُوَ مَا لَمْ يَرَهُ الْمُتَعَاقِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا ثَمَنًا أَوْ مُثَمَّنًا وَلَوْ كَانَ حَاضِرًا فِي تَجْلِسِ الْبَيْعِ وَبَالِغًا فِي وَصْفِهِ أَوْ سَمْعِهِ بِطَرِيقِ التَّوَاتُرِ كَمَا يَأْتِي أَوْ رَآهُ فِي ضَوْءٍ إِنْ سَتَرَ الضَّوْءُ لَوْنَهُ كَوَرَقٍ أَبْيَضَ فِيمَا يَظْهَرُ

(Dan menurut qaul al-Azhhar, sungguh tidak sah) selain dalam masalah fuqa'-sari anggur yang dijual dalam kemasan rapat/tidak terlihat-² (jual beli barang ghaib), yakni barang yang tidak terlihat oleh dua orang yang bertransaksi, atau salah satunya. Baik barang tersebut berstatus sebagai alat pembayar maupun sebagai barang yang dibayari. Meskipun barang tersebut ada dalam majlis akad dan telah disebutkan kriterianya secara detail atau sudah terkenal secara luas -mutawatir-, seperti keterangan yang akan datang. Atau terlihat di bawah cahaya, jika cahaya tersebut menutupi warna aslinya, seperti kertas putih. Demikian menurut kajian yang kuat.

2. Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib³

قَالَ خ ض وَمِنْ نَظَائِرِ الْمَسْأَلَةِ رُؤْيَةُ الْمَبِيعِ مِنْ وَرَاءِ الزُّجَاجِ وَهِيَ لَا تَحْفِي لِأَنّ

Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz III, h. 415-416.

² Lihat, Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz III, h. 42.

³ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz I, h. 262.

الْمَطْلُوبَ نَفْيُ الضَّرَرِ وَهُوَ لَا يَحْصُلُ بِهَا إِذِ الشَّيْءُ مِنْ وَرَاءِ الزُّجَاجِ يُرَى غَالِبًا عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ شَرْحُ م ر

Muhammad Syaubari al-Khudhri berkata: "Termasuk padanan kasus tercegah melihat mabi'-barang yang dijual- adalah melihat mabi' dari balik kaca. Cara demikian tidak mencukupi syarat jual beli. Sebab, standarnya adalah menghindari bahaya ketidakjelasan mabi', yang tidak bisa dipenuhi dengan cara tersebut. Sebab, secara umum barang yang terlihat dari balik kaca terlihat beda dari aslinya. Demikian keterangan dari syarh al-Ramli."

3. Futuhat al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab

(قَوْلُهُ فَاعْتُبِرَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ اللَّفْظِ) أَيْ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا هُوَ عِبَارَةً عَنْهُ كَالْحُطِّ أَوْ قَائِمٍ مَقَامَهُ كَالِشَارَةِ الْأَخْرَسِ اه بَرْمَاوِيُّ

(Ungkapan Syaikh Zakaria al-Anshari: "Maka -dalam jual belidiperhitungkan ungkapan yang menunjukkan kerelaan."), atau yang bersubtansi sama dari ungkapan yang memanifestasikan kerelaan, seperti tulisan atau sesamanya, seperti isyarat orang bisu. Demikian penjelasan Barmawi.

4. Syarh al-Yaqut al-Nafis⁵

وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا لَا لِصُورِ الْأَلْفَاظِ وَعَنِ الْبَيْعِ وَ الشَّرَاءِ بِوَاسِطَةِ التَّلِيفُونِ وَالْعَبْرَةُ فِي الْمُعْتَمَدَةُ الْيَوْمِ وَعَلَيْهَا الْعَمَلُ وَالتَّلَكْسِ وَالْبَرْقِيَاتِ كُلُّ هَذِهِ الْوَسَائِلِ وَأَمْثَالِهَا مُعْتَمَدَةُ الْيَوْمِ وَعَلَيْهَا الْعَمَلُ

Yang diperhitungkan dalam akad-akad adalah subtansinya, bukan bentuk lafalnya. Dan jual beli via telpon, teleks dan telegram dan semisalnya telah menjadi alternatif utama dan dipraktikkan.

5. Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib⁶

قَوْلُهُ (وَالطَّبْطُ) أَيْ لِأَلْفَاظِ وَلِيِّ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجِ فَلَا يَكْفِي سَمَاعُ أَلْفَاظِهِمَا فِي طُلْمَةٍ لِأَنَّ الْأَصْوَاتَ تَشْتَبِهُ وَيَنْبَغِي لِلشَّاهِدَيْنِ ضَبْطُ سَاعَةِ الْعَقْدِ لِأَجْلِ لَحُوقِ الْوَلَدِ قَوْلُهُ (بَلْ إِلَى أَكْثَرَ) ... وَيُشْتَرَطُ فِي كُلِّ مِنْ الشَّاهِدَيْنِ أَيْضًا السَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالضَّبْطُ

716

⁴ Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Syarh Manhaj al-Thullab, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz III, h. 8.

⁵ Muhammad bin Ahmad al-Syatiri, Syarh al-Yaqut al-Nafis, Juz II, h. 22.

⁶ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz III, h. 396-387.

Ungkapan al-Khatib al-Syirbini (Dan hafal), maksudnya hafal ucapan wali istri dan suami. Maka tidak cukup hanya mendengar ucapan mereka dalam tempat gelap. Sebab, suara yang satu dengan yang lainnya itu mirip. Bagi dua orang saksi nikah sebaiknya juga menghapal jam akad untuk menentukan nasab anak (dari pasangan tersebut). Ungkapan al-Khatib al-Syirbini (Bahkan lebih dari enam syarat) ... Dan bagi masing-masing dari dua saksi nikah disyaratkan mampu mendengar, melihat, menghafal dan mengetahui bahasa dua orang yang berakad.

6. Hawasyai al-Syarwani wa al-'Abbadi 'ala al-Tuhfah'

(وَيَنْعَقِدُ) الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِ السَّكْرَانِ الَّذِي لَا يَدْرِي لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ النَّيَّةِ عَلَى كَلَامِ يَأْتِي فِيهِ فِي الطَّلَاقِ (بِالْكِنَايَةِ) مَعَ النَّيَّةِ ... وَالْكِتَابَةُ لَا عَلَى مَائِعٍ أَوْ هَوَاءٍ كِنَايَةُ فَيَنْعَقِدُ بِهَا مَعَ النَّيَّةِ وَلَوْ لِحَاضِرٍ فَلْيَقْبَلْ فَوْرًا عِنْدَ عِلْمِهِ وَيَمْتَدُّ خِيَارُهُمَا لِانْقِضَاءِ تَجْلِسِ قَبُولِهِ (قَوْلُهُ وَالْكِتَابَةُ إِلَخْ) وَمِثْلُهَا خَبَرُ السِّلْكِ الْمُحْدَثِ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ فَالْعَقْدُ بِهِ كِنَايَةً فِيمَا يَظْهَرُ

(Dan sah) jual beli dari selain orang yang sedang mabuk, yang tidak mengerti. Sebab ia tidak termasuk orang yang sah niatnya, seperti keterangan dalam bab Talak yang akan datang. (dengan sighat kinayah) beserta niat ... Menulis yang tidak pada zat cair dan udara termasuk kinayah. Maka jual beli dengannya disertai niat hukumnya sah. Meskipun bertransaksi dengan orang yang hadir dalam majlis akad. Maka ia harus segera menerima akad tersebut ketika mengetahuinya, dan khiyar mereka berdua berlaku sampai bubarnya majlis penerimaan -qabul- akad. (Ungkapan Ibn Hajar "dan menulis ...") Dan sama dengannya, berita via teknologi kabel -telpon- yang dikembangkan pada zaman sekarang ini. Maka akad dengannya termasuk kinayah menurut kajian yang kuat.

7. Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib⁸

وَعِبَارَةُ ع ش أَمَّا إِذَا فَهِمَهَا الْفَطِنُ دُونَ غَيْرِهِ سَاوَتْ الْكِنَايَةَ فَيَصِحُ نِكَاحُهُ بِكُلّ

⁷ Ibn Hajar al-Haitami, al-Syarwani , Tuhfah al-Muhtaj wa Hasyiyah al-Syarwani, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz IV, h. 221-222.

⁸ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz III, h. 395.

مِنْهُمَا حَيْثُ تَعَذَّرَ تَوْكِيلُهُ وَلَيْسَ لَنَا نِكَاحُ يَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ إِلَّا بِالْكِتَابَةِ وَإِشَارَةِ الْأَخْرَسِ إِذَا اخْتَصَّ بِفَهْمِهَا الْفَطِنُ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ أَمْكَنَهُ التَّوْكِيلُ بِالْكِتَابَةِ أَوْ الْأَخْرَسِ إِذَا اخْتَصَّ بِفَهْمِهَا الْفَطِنُ تَعَيَّنَ لِصِحَّةِ نِكَاحِهِ تَوْكِيلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْإِشَارَةِ الَّتِي يَخْتَصُ بِفَهْمِهَا الْفَطِنُ تَعَيَّنَ لِصِحَّةِ نِكَاحِهِ تَوْكِيلُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ كَنَايَةً أَيْضًا فَهِيَ فِي التَّوْكِيلِ وَهُو يَنْعَقِدُ بِالْكِنَايَةِ اه

Dan ungkapan Ali Sibramalisi, "Sementara bila isyarat orang buta hanya dipahami oleh orang pintar saja, bukan selainnya, maka sama dengan kinayah. Maka pernikahan orang buta tersebut sah dengan isyarat atau tulisannya, ketika udzur mewakilkannya. Bagi kita, tidak ada nikah yang sah dengan kinayah melainkan dengan tulisan dan isyarat orang buta ketika hanya orang pintar saja yang mampu memahaminya. Mafhumnya, andaikan ia mampu mewakilkan akad dengan penulisan atau isyarat yang hanya dipahami oleh orang pintar saja, maka akad nikahnya harus diwakilkan. Sebab, meskipun hal itu termasuk kinayah, namun pada hakikatnya adalah kinayah dalam mewakilkan. Sementara akad mewakilkan bisa sah dengan kinayah. Demikian penjelasan Ali Sibramalisi.

8. Sunan al-Daruquthni9

عَنْ عَاثِشَةَ قَالَتْ قَالَ ﷺ لَا بُدَّ فِي النِّكَاجِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ أَبُو الْحَصِيبِ مَجْهُولٌ وَاسْمُهُ نَافِعُ بْنُ مَيْسَرَةَ (رَوَاهُ الدَّارُقُطْنِي)

"Dari 'Aisyah, ia berkata: Nabi bersabda: "Dalam nikah harus ada empat orang, yaitu wali, calon suami, dan dua orang saksi." Abu al-Khashib tidak diketahui. Namanya adalah Nafi' bin Maisarah. (HR. Daruquthni)

- 9. Referansi Lain
 - a) Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Manhaj, Juz XI, h. 476
 - b) Al-Fawaid al-Mukhtarah li Salik Thariq al-Akhirah al-Mustafadah min Kalam al-'Allamah al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, edisi Ali bin Hasan Baharun, h. 246.
 - c) Syarh al-Yaqut al-Nafis, h. 356, karya Muhammad bin Ahmad bin Umar al-Syatiri.
 - d) Muhgni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, Juz III, h. 186.
 - e) Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib, karya Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami Juz III, h. 398.

⁹ Ali bin Umar al-Daruquthni, Sunan al-Daruquthni, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966), Jilid III, h. 224.

- f) Bahts li Ba'dh al-Nawazil al-Fiqhiyah, Juz XII, h. 1-3.
- g) Al-Majmu', Juz IX, h. 167-169.
- h) I'anah al-Thalibin, Juz III, h. 103.
- i) Hasyiyah al-Jamal, Juz XIII, h. 259.

448. Sistem Bagi Hasil Perbankan Syariah

A. Deskripsi

Indonesia telah menetapkan Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang legalitas Perbankkan Syariah. Ciri utama Perbankan Syariah adalah berdasarkan bagi hasil antara pemilik harta sebagai *shahib al-mal* atau nasabah dan pihak bank sebagai pengelola atau *mudharib*. Dengan kesepakatan *nisbah* (prosentase bagi hasil) sesuai kesepakatan para pihak. Dalam kesepakatannya, biasanya antara 70 % banding 30 %, 65 % banding 35 %, atau 60 % banding 40 %.

Ironisnya, pembagian bagi hasil itu selalu stabil dan di bawah prosentasi bunga bank konvensional. Antar satu bank dengan bank lainnya meskipun sama dalam memberikan *nisbah*-nya tetapi dalam praktiknya hasilnya berbeda. Menurut praktiknya, sistem audit, administrasi, dan penghitungannya masing-masing Perbankan Syariah berbeda.

B. Pertanyaan

- 1. Bagaimana hukum penghitungan dan pembagian keuntungan bagi hasil perbankan yang tidak diketahui oleh pihak nasabah padahal dalam akad telah disebutkan *nisbah*nya?
- 2. Bagaimana hukumnya, jika penghitungan atau audit keuangannya tidak menggunakan sistem yang Islami?

C. Jawaban

- Hukum penghitungan dan pembagian keuntungan bagi hasil perbankan berdasarkan prosentase nisbah tanpa sepengetahuan pihak nasabah tidak sah. Sedangkan akad mudharabahnya tetap sah.
- 2. Hukum penghitungan atau audit keuangan yang tidak menggunakan sistem Islami tidak sah.

D.Dasar pengambilan hukum

Aqwal al-Ulama

1. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid¹⁰ وَأَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ حِصَّتَهُ مِنْ الرِّبْحِ إِلَّا

بِحَضْرَةِ رَبِّ الْمَالِ وَأَنَّ حُضُورَ رَبِّ الْمَالِ شَرْطٌ فِي قِسْمَةِ الْمَالِ وَأَخْذِ الْعَامِلِ حِصَّتَهُ وَأَنَّهُ لَيْسَ يَكْفِي فِي ذَلِكَ أَنْ يُقْسِمَهُ بِحُضُورِ بَيِّنَةٍ وَلَا غَيْرِهَا

الْقَولُ فِي أَحْكَامِ الطَّوَارِئِ وَاخْتَلَفُوا إِذَا أَخَذَ الْمُقَارِضُ حِصَّتَهُ مِنْ غَيرِ حُضُورِ رَبِّ الْمَالِ ثُمَّ ضَاعَ الْمَالُ أَوْ بَعْضَهُ

Dan para ulama seantero kota sepakat, sungguh 'amil tidak boleh mengambil laba yang menjadi bagiannya melainkan dihadiri oleh pemilik modal dan kehadiran pemilik modal merupakan syarat pembagian harta dan pengambilan bagian laba oleh 'amil. Sungguh dalam hal tersebut tidak dicukupkan dengan mendatangkan saksi maupun selainnya.

Pendapat yang dimenangkan pada beberapa hukum kasus susulan. Para ulama berbeda pendapat saat 'amil mengambil laba yang menjadi bagiannya tanpa kehadiran pemilik modal, kemudian harta atau sebagiannya tersebut hilang.

2. Referensi Lain

- a) Muhgni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, Juz IX, h. 278-279.
- b) Al-Mughni Syarh al-Kabir, Juz V, h. 14.

451. Sadap Telpon

A. Deskripsi

Akhir-akhir ini telah marak di masyarakat komunikasi menggunakan telpon, sehingga memudahkan untuk melakukan pembicaraan antar pihak. Pada saat yang sama melalui telpon dapat mengintip pembicaraan orang lain, baik melalui rekaman maupun secara langsung disadap. Penyadapan dapat dilakukan oleh siapapun dengan mudah, mulai dari alat yang sederhana sampai dengan alat yang super canggih. Yang marak di negeri kita adalah sadap yang dilakukan oleh para penegak hukum, seperti Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) untuk sarana penegakan hukum. Penyadapan adalah mengintip dan mengintai pembicaraan orang lain melalui telpon untuk mengetahui isi pembicaraan orang lain yang dimaksud, baik dalam rangka tujuan baik maupun untuk tujuan jahat.

¹⁰ Ibn Rusydi al-Hafid, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladih, 1975), Juz II, h. 241.

B. Pertanyaan

- 1. Bagaimana hukum mengintai, mendengar, dan merekam pembicaraan orang lain melalui sadap telpon?
- 2. Sahkah saksi atas perbuatan dengan cara memutar rekaman telpon yang disadap?

C. Jawaban

- 1. Hukum mengintai, mendengar, dan merekam pembicaraan orang lain melalui sadap telpon pada dasarnya haram, karena termasuk tajassus (mencari-cari kesalahan orang). Kecuali untuk kepentingan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar dan ada ghalabah al-zhan (dugaan kuat) atas terjadinya kemaksiatan. Bahkan wajib jika tidak ada cara yang lain.
- Tidak sah sebagai bayyinah (alat bukti hukum), tetapi sah sebatas untuk bukti pendukung.

D. Dasar pengambilan hukum

Aqwal al-Ulama

1. Jami'al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an¹¹

وَقُولُهُ (وَلا تَجَسَّسُوا) يَقُولُ وَلا يَتَّتَبِعْ بَعْضُكُمْ عَوْرَةَ بَعْضِ وَلَا يَبْحَثْ عَنْ سَرَائِرِهِ يَبْتَغِي بِذلِكَ الظَّهُورَ عَلَى عُيُوبِهِ وَلَحِنِ اقْنَعُوا بِمَا ظَهَرَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِهِ وَبِهِ فَحَيدُوا وَدَمُوا لَا عَلَى مَا لَا تَعْلَمُونَهُ مِنْ سَرَائِرِهِ وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأُوبِلِ أَوْ ذَمُوا لَا عَلَى مَا لَا تَعْلَمُونَهُ مِنْ سَرَائِرِهِ وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأُوبِلِ ذَكْرُ مَنْ قَالَ ذلِكَ حَدَثَنِي عَلِيًّ قَالَ ثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ ثَنِي مُعَاوِيَةً عَنْ عَلِيًّ عَنِ ابْنِ عَبَّسَ وَلَا تَجَسَّسُوا) يَقُولُ نَهَى اللهُ الْمُؤْمِنَ أَنْ يَتَتَبِعَ عَوْرَاتِ الْمُؤْمِنِ حَدَثَنِي عَلَيْ مَوْلَ ثَنَا الْمُؤْمِنِ مَدَثَنِي الْحُارِثُ قَالَ ثَنَا الْحُسَنُ عَمَرَو قَالَ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا عِيسَى وَحَدَثَنِي الْحُارِثُ قَالَ ثَنَا الْحُسَنُ عَلَمُ مُونَ وَاللَّ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ ثَنَا عِيسَى وَحَدَثَنِي الْحُارِثُ قَالَ ثَنَا الْحُسَنُ عَلَمْ لَكُمْ وَرَعُوا مَا سَتَرَ اللهُ حَدَثَنَا بِشُرُ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ قَالَ ثَنَا سَعِيدً عَنْ قَتَادَةً قَوْلُهُ فَلَ لَئَنَا وَرَقَاءُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي غَيجٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قُولُهُ (وَلا تَجَسَّسُوا) قَالَ خُذُوا مَا طَهَرَ لَكُمْ وَدَعُوا مَا سَتَرَ اللهُ حَدَثَنَا بِشُرُ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ قَالَ ثَنَا سَعِيدً عَنْ قَتَادَةً قَوْلُهُ لَلْ ثَنَا وَيَعْ اللَّهِ اللّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيمًا مِنَ الظَّنِ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنْ مَعْ أَنْ تَتَبِعَ أَوْ تَبْتَغِيَ عَيْبَ أَخِيلًا لِعَلَى لِيَطْلُعَ عَلَى سِرَّهِ لَلْ السَّعِيدَ لِي لِنَا سَعِيدً عَلَى السَّرِهِ اللهُ عَلَى السَّرِهُ السَّعَ عَلَى اللهُ وَلَا تَعْمَلُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّعَ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّرَ وَلَا تَعَلَى عَلْمَ الْمُولُ الْمَالِقَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ
¹¹ Muhammad bin Jarir al-Thabari, Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000), Jilid XXII, h. 304.

maksudnya adalah Allah Swt. berfirman: "Janganlah sebagian dari kalian mencari-cari aib sebagian yang lain. Akan tetapi cukuplah dengan urusannya yang tampak, yang dengannya kalian puji atau kalian cela. Bukan atas rahasia-rahasianya yang tidak kalian ketahui." Dan pendapat para ahli ta'wil senada pula dengan ta'wil yang saya sampaikan. Menyebutkan ulama yang berpendapat demikian. Ali bercerita kepadaku: "Abu Shalih bercerita kepadaku, Mu'awiyah bercerita kepadaku, dari Ali, dari Ibn Abbas berkaitan dengan firman Allah Swt.: "Janganlah kalian mencari-cari aib orang lain.", ia berkata: "Allah telah melarang seorang mu'min mencari-cari kesalahan mukmin lainnya." Al-Harits bercerita kepadaku, al-Hasan bercerita kepadaku, Waraqa bercerita kepadaku, semuanya dari Ibn Abi Najih, dari Mujahid tentang firman Allah Swt.: "Janganlah kalian mencari-cari aib orang lain." ia berkata: "Ambillah aibnya yang tampak oleh kalian dan tinggalkan aib yang telah Allah tutupi." Bisyr bercerita kepadaku, ia berkata: "Yazid bercerita kepadaku, ia berkata: "Sa'id bercerita kepadaku, dari Qatadah: "Firman Allah Swt.: "Hai orangorang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari aib orang lain." Apakah kalian tahu hakikat tajassus atau tajsis? Yaitu kamu meneliti atau mencari-cari aib saudaramu supaya melihat rahasianya."

2. Tuhfah al-Muhtaj¹²

وَلَيْسَ لِأَحَدِ الْبَحْثُ وَالتَّجَسُّسُ وَاقْتِحَامُ الدُّورِ بِالظُّنُونِ نَعَمْ إِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنَّهِ وُقُوعُ مَعْصِيَةٍ وَلَوْ بِقَرِينَةٍ ظَاهِرَةٍ كَاإِخْبَارِ ثِقَةٍ جَازَ لَهُ بَلْ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّجَسُّسُ إِنْ فَاتَ تَدَارُكُهَا كَالْقَتْلِ وَالزِّنَا وَإِلَّا فَلَا

Dan tidaklah seseorang berhak melakukan penelitian, mencaricari dan menerobos rumah-rumah orang lain berdasarkan prasangka. Meski demikian, jika menurutnya diduga kuat terjadi maksiat walaupun dengan indikasi jelas, seperti informasi dari orang yang terpercaya, ia boleh bahkan wajib menelitinya bila kesempatannya segera hilang, seperti pembunuhan dan zina. Bila kesempatan itu masih panjang, maka tidak diperbolehkan.

3. Referensi Lain

722

- a) I'anah al-Thalibin, Juz IV, h. 248.
- b) Tuhfah al-Muhtaj, Juz X, h. 248.

¹² Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj wa Hasyiyah al-Syarwani*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz IV, h. 221-222.

452. Menunda Penguburan Jenazah

A. Deskripsi

Pengurusan jenazah hukumnya fardhu kifayah, dan anjuran Rasulullah Saw. dalam hal ini adalah disegerakan. Namun, kadangkala pada praktiknya muncul beberapa masalah karena berkenaan dengan kepentingan studi, penyelidikan hukum atau adat. Seperti penyelidikan terhadap pembunuhan, pelatihan medis untuk operasi bedah dan di beberapa daerah kota Bandung dengan mengakhirkan pemandian jenazah dikarenakan takut munculnya hadats dan najis berkali-kali. Program kedokteran sedang berencana melakukan pengawetan jenazah untuk kepentingan studi, di mana pihak calon jenazah telah berwasiat dan disetujui oleh keluarganya untuk menjadi bahan latihan tenaga medis. Kemudian setelah meninggal dunia, jenazahnya tersebut diawetkan dalam batas waktu tertentu untuk bahan latihan para calon dokter. Setelah digunakan untuk latihan, kemudian jenazah tersebut dirapikan kembali dan dilakukan prosesi penguburan jenazah sebagaimana mestinya menurut ajaran Islam. Dengan demikian, otomatis hal ini menimbulkan masalah tertundanya penguburan jenazah, baik karena otopsi, pengawetan jenazah atau karena ikut adat setempat.

B. Pertanyaan

- 1. Bagaimanakah hukum mengakhirkan penguburan jenazah, baik karena tujuan otopsi, studi dan mensucikan jenazah?
- 2. Bolehkan membedah jenazah setelah lama diawetkan untuk kepentingan studi?
- 3. Berapa lama batas mengakhirkan penguburan jenazah?

C. Jawaban

- 1. Mengakhirkan penguburan jenazah pada dasarnya tidak diperbolehkan kecuali; (a) untuk mensucikan jenazah berpenyakit menular yang menurut dokter harus ditangani secara khusus; (b) untuk dilakukan otopsi dalam rangka penegakan hukum; (c) untuk menunggu kedatangan wali jenazah dan atau menunggu terpenuhinya empat puluh orang yang akan menyolati dengan segera selama tidak dikhawatirkan ada perubahan pada jenazah. Adapun mengakhirkan penguburan jenazah untuk keperluan studi hanya boleh dilakukan pada jenazah kafir harbi, orang murtad dan zindiq.
- 2. Membedah jenazah setelah lama diawetkan untuk kepentingan studi dibolehkan dalam kondisi darurat atau hajat.

3. Batas mengakhirkan penguburan jenazah adalah sampai *khauf* al-taghayyur (kehawatiran perubahan kondisi jenazah) atau sampai selesainya kebutuhan di atas.

D.Dasar Pengambilan Hukum

Aqwal al-Ulama

1. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj¹³

(وَلَا تُؤَخِّرُ) الصَّلَاةُ (لِزِيَادَةِ مُصَلِّينَ) لِلْخَبَرِ الصَّحِيجِ أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ وَلَا بَأْسَ بِانْتِطَّارِ الْوَلِيِّ عَنْ قُرْبٍ مَا لَمْ يُخْشَ تَغَيُّرُ الْمَيِّتِ تَنْبِيهُ شَمِلَ كَلَامُهُ صُورَتَيْنِ إَحْدَاهُمَا إِذَا حَضَرَ الْوَلِيِّ عَنْ قُرْبٍ مَا لَمْ يُخْشَ تَغَيْرُهُمْ لِيَكُثُرُوا نَعَمْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ إِذَا كَانُوا دُونَ جَمْعُ قَلِيلٌ قَبْلَ الصَّلَاةِ لَا يُنْتَظَرُ عَيْرُهُمْ لِيَكُثُرُوا نَعَمْ قَالَ الزَّرْكِشِيُ وَغَيْرُهُ إِذَا كَانُوا دُونَ أَرْبَعِينَ فَيْكُ وَمِ لِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ مَطْلُوبٌ فِيهَا وَفِي مُسْلِمِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَهُ يُوَخِّرُ الصَّلَاةَ لِلْأَرْبَعِينَ قِيلَ وَحِكْمَتُهُ أَنَهُ لَمْ يَجْتَمِعْ أَرْبَعُونَ إِلَّا كَانَ لِلهِ فِيهِمْ وَلِي وَحُصُمُ الْمِائَةِ كَالْأَرْبَعِينَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّم

(Dan tidak tunda) pelaksanaan shalat jenazah (karena memperbanyak orang yang menyolatinya) berdasarkan hadits shahih: "Bersegeralah kalian dengan urusan jenazah." Dan boleh menanti walinya sebentar selama tidak dikhawatirkan perubahan kondisinya. Peringatan. Ungkapan al-Nawawi tersebut meliputi dua kasus. Pertama, ketika sebelum shalat jenazah telah hadir beberapa orang, maka yang belum hadir tidak perlu ditunggu. Meskipun demikian, al-Zarkasi dan ulama selainnya berpendapat: "Bila mereka belum mencapai 40 orang, maka ditunggu sebentar agar mencapai jumlah tersebut. Sebab, jumlah jamaah 40 orang ini dianjurkan dalam menyolati jenazah. Dalam kitab Shahih Muslim, terdapat riwayat dari Ibn Abbas, bahwa sungguh beliau menunda shalat jenazah karena menanti jumlah jamaah 40 orang. Disebutkan hikmahnya adalah tiada berkumpul 40 orang jamaah melainkan salah seorangnya adalah wali Allah. Dan hukum 100 orang sama dengan 40 orang, seperti kesimpulan yang diambil dari hadits tadi.

2. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh 14

وَبِنَاءً عَلَى هذِهِ الْآرَاءِ الْمُبِيحَةِ يَجُوزُ التَّشْرِيحُ عِنْدَ الظَّرُورَةِ أَوِ الْحَاجَةِ بِقَصْدِ التَّعْلِيمِ

724

¹³ Muhammad al-Khatib al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah t. th.), Jilid II, h. 51.

Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Beirut:: Dar al-Fikr, t.. th.), Juz III, h. 521-522.

لِأَغْرَاضٍ طِبِّيَّةٍ أَوْ لِمَعْرِفَةِ سَبَبِ الْوَفَاةِ وَإِثْبَاتِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمُتَّهَمِ بِالْقَتْلِ وَخَوْ ذلِكَ لِأَغْرَاضٍ جِنَائِيَّةٍ إِذَا تَوَقَّفَ عَلَيْهَا الْوُصُولُ إِلَى الْحُقِّ فِي أَمْرِ الْجِنَايَةِ لِلْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْعَدْلِ فِي الْأَحْكَامِ حَتَّى لَا يُظْلَمَ بِرَأْيٍ وَلَا يَفْلِتُ مِنَ الْعِقَابِ مُجْرِمٌ أَثِيمُ

Berdasarkan pendapat (Syafi'iyah dan Malikiyah) yang memperbolehkan (pembedahan mayit karena menelan harta) ini, maka diperbolehkan melakukan otopsi (operasi) pada tubuh mayit dalam kondisi darurat atau dibutuhkan, untuk kepentingan pendidikan kedokteran, mengetahui sebab kematian, menetapkan pidana atas tersangka kasus pembunuhan dan kepentingan pidana semisalnya. Yaitu ketika otopsi (operasi) tersebut menjadi satu-satunya jalan dalam mengungkap kasus kriminalitas berdasarkan dalil-dalil wajibnya penegakan keadilan hukum. Sehingga seseorang tidak terzalimi berdasarkan suatu asumsi (saja) dan seorang penjahat tidak bisa berkelit dari hukuman yang setimpal.

3. Kasyifah al-Saja Syarh Safinah al-Naja¹⁵

وَلَا يَجِبُ تَحْفِينُ الْحُرْبِي وَالْمُرْتَدِ وَالرِّنْدِقِ وَهُوَ الَّذِي لَا يَتَمَسَّكُ بِشَرِيعَةٍ وَيَقُولُ بِدَوَامِ الدَّهْرِ وَقِيلَ هُوَ الَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِالْأَخِرَةِ وَلَا بِوَحْدَانِيَّتِهِ الْحَالِقِ وَلَا يَجِبُ دَفْنُهُمْ بِدَوَامِ الدَّهْرِ وَقِيلَ هُوَ الَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِالْأَخِرَةِ وَلَا بِوَحْدَانِيَّتِهِ الْخَالِقِ وَلَا يَجِبُ دَفْنُهُمْ بَلْ يَجُورُ إِغْرَاءُ الْكِلَابِ عَلَيْهِمْ لَكِنِ الْأَوْلَى مُوَارَاتُهُمْ لِئَلَّا بَتَأَذَّى النَّاسَ بِرَائِحَتِهِمْ بَلْ يَجُورُ إِذَا تَحَقَّقَ الْأَذَى مِنْهُمْ

Tidak wajib mengkafani jenazah kafir harbi, murtad dan kafir zindiq, yaitu orang yang tidak berpegangan pada syariat dan mempunyai asumsi langgengnya kehidupan dunia. Menurut suatu pendapat kafir zindiq adalah orang yang tidak beriman pada akhirat dan pada keesaan Sang Pencipanya. Mereka tidak wajib dimakamkan (seperti pada umumnya), bahkan boleh melepas anjing pada jenazah mereka (agar memakannya). Namun yang lebih utama adalah menutupi mereka dengan tanah supaya bau busuk jenazah tidak mengganggu orang lain. Bahkan ketika terbukti mengganggu, maka wajib ditutupi dengan tanah.

4. Referensi Lain

a) Figh al-Nawazil, Juz II, h. 46-47.

¹⁵ Muhammad Nawawi al-Bantani, Kasyifah al-Saja, (Surabaya: al-Hidayah, t. th.), h. 96.

451. Mengumpulkan Jenazah Muslim dan Non Muslim Dalam Satu TPU (Tempat Pemakaman Umum)

A. Deskripsi

Konsekuensi logis dari semakin banyaknya populasi penduduk adalah sempitnya lahan tanah, terutama di kota-kota besar, sehingga sulit menemukan banyak lahan kosong untuk menjadi tempat pemakaman umum. Dampaknya, muncul fenomena di mana tanah yang dikhususkan untuk kuburan semakin sulit dan sempit. Hal ini mendorong beberapa pemerintah daerah/kota mengalokasikan sebidang tanah khusus untuk kuburan atau yang disebut TPU (Tempat Pemakaman Umum). Di TPU ini sering terjadi penguburun suatu jenazah di tempat jenazah lainnya yang sudah lama dikuburkan. Sehingga terjadi penumpukan jenazah baru dengan jenazah yang lama yang sudah hancur dalam satu lobang kuburan. Baik antara sesama muslim maupun antara jenazah muslim dengan non muslim di satu tempat.

B. Pertanyaan

- 1. Bagaimanakah hukum mencampurkan jenazah baru dengan yang sudah hancur dalam satu liang kubur, baik antara sesama muslim atau dengan non muslim?
- 2. Bagaimana hukum mengumpulkan kuburan jenazah muslim dengan non muslim dalam satu area Tempat Pemakaman Umum?
- 3. Apa dhawabith (batasan) berkumpul dan tidak berkumpul satu lobang?

C. Jawaban

- 1. Mencampurkan jenazah baru dengan yang sudah hancur (tulangtulangnya) dalam satu liang kubur, baik antara sesama muslim atau dengan non muslim hukumnya tafshil. (1) Jika yang dikubur sesama muslim atau yang lama non muslim sedang yang baru muslim hukumnya boleh. (2) Jika yang lama muslim dan yang baru non muslim hukumnya tidak boleh kecuali darurat. (3) Jika masih ada tulang-belulangnya, hukumnya tidak boleh kecuali penggalian tanah sudah mencapai batas layak untuk mengubur.
- 2. Mengumpulkan kuburan jenazah muslim dengan non muslim dalam satu area Tempat Pemakaman Umum tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat.
- 3. Batasan berkumpul adalah sekira ada dua jenazah atau lebih dimakamkan dalam satu liang tanpa *hajiz* (batas pemisah yang layak), seperti dinding, papan, tanah dan lain-lain.

D. Dasar Pengambilan Hukum

Aqwal al-Ulama

1. Hasyiyyah al-Bujairami 'ala al-Khatib¹⁶

(وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ) ابْتِدَاءً (فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ) بَلْ يُفْرَدُ كُلُّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ حَالَةَ الإخْتِيَارِ لِلاقِّبَاعِ فَلَوْ جُمِعَ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاشَّحَدَ الْجِنْسُ كَرَجُلَيْنِ وَامْرَأَتَيْنِ كُرِهَ عِنْدَ الْمَاوَرْدِيُّ وَحُرِّمَ عِنْدَ السَّرْخَسِيِّ وَنَقَلَهُ عَنْهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ وَعَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ وَحُرِّمَ عِنْدَ السَّرْخَسِيِّ وَنَقَلَهُ عَنْهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ وَعَقَّبَهُ بِقَوْلِهِ وَعَبَارَةُ الْأَكْثَرِينَ وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَنَازَعَ فِي التَّحْرِيمِ السَّبْكِيُّ وَسَيَأْتِي مَا يُقَوِّي وَعِبَارَةُ الْأَكْثَرِينَ وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَنَازَعَ فِي التَّحْرِيمِ السَّبْكِيُّ وَسَيَأْتِي مَا يُقَوِّي التَّحْرِيمَ (إلَّا لِجَاجَةٍ) أَيْ لِضَرُورَةٍ كَمَا فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ كَأَنْ كُثُرَ الْمَوْتَى وَعَسُرَ التَّحْرِيمَ (إلَّا لِجَاجَةٍ) أَيْ لِضَرُورَةٍ كَمَا فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ كَأَنْ كُثْرَ الْمَوْتَى وَعَسُرَ الطَّرُورَةِ وَالْأَكْثَرِ فِي قَبْرٍ بِحَسَبِ الطَّرُورَةِ وَالْأَكْثَرِ فِي قَبْرٍ بِحَسَبِ الطَّرُورَةِ وَكَذَا فِي ثَوْبٍ لِلاتِّبَاعِ فِي قَتْلَى أُحُدٍ رَوَاهُ البُخَارِيُ

(Dan tidak diperbolehkan memakamkan dua jenazah) pada pemakaman pertama kalinya (dalam satu liang kubur). Namun dalam kondisi normal masing-masing jenazah dibuatkan satu liang kubur, karena ittiba'-mengikuti sunnah-. Oleh sebab itu, andaian ada dua jenazah yang dikumpulkan dalam satu liang kubur dan mereka sejenis, seperti dua jenazah laki-laki dan dua jenazah perempuan, maka hukumnya makruh menurut al-Mawardi dan haram menurut al-Sarkhasyi. Dalam kitab al-Majmu' al-Nawawi hanya mengutip pendapat al-Sarkhasyi tersebut dan menambahkan: "Ungkapan mayoritas ulama, "Dua jenazah tidak boleh dimakamkan dalam satu liang kubur." Namun al-Subki menentang pendapat yang mengharamkannya, dan nanti akan disampaikan penguat pendapat yang mengharamkannya tersebut. (kecuali karena dibutuhkan), maksudnya dalam kondisi darurat seperti pendapat Ibn Hajar dan al-Ramli. Seperti banyaknya jenazah dan kesulitan membuat liang kubur untuk masing-masing jenazah. Maka diperbolehkan mengumpulkan dua, tiga jenazah atau lebih dalam satu liang kubur sesuai dengan kebutuhan. Begitu pula boleh mengkafaninya- dengan satu kain, karena ittiba' dalam korban perang Uhud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.

2. Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Syarh Manhaj al-Thullab 17

¹⁶ Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, Hasyayah al-Bujainami 'ala al-Khatib, (Beirut: Dar al-Fikr, f. th.), Juz II, h. 307-308.

وَلَا يَجُوزُ دَفْنُ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ حَيْثُ وُجِدَ غَيْرُهَا وَلَا عَكْسُهُ فَإِنْ اخْتَلَفُوا أُفْرِدُوا بِمَقْبَرَةٍ كَمَا مَرَّ وَيَجُوزُ جَعْلُ مَقْبَرَةِ أَهْلِ الْحُرْبِ أَوْ الذِّمَّةِ بَعْدَ انْدِرَاسِهَا مَقْبَرَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَمَسْجِدًا إِذْ مَسْجِدُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ كَذَلِكَ اه شَرْحُ م ر

Jenazah muslim tidak boleh dimakamkan dalam pemakaman non muslim bila masih ditemukan pemakaman lainnya, dan tidak boleh sebaliknya (jenazah non muslim dimakamkan dalam pemakaman muslim). Apabila jenazah muslim dan non muslim bercampur maka dimakamkan pada pemakaman sendiri-sendiri, seperti keterangan yang telah lewat. Dan diperbolehkan membuat pemakaman kafir harbi atau ahli dzimmah setelah tidak terpakai menjadi pemakaman muslimin dan masjid. Sebab masjid Nabi Saw. pun begitu. Demikian penjelasan dalam Syarh al-Ramli.

3. Hasyiyyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim18

(قَوْلُهُ قَبْرٍ وَاحِدٍ) أَيْ فِي شَقِّ وَاحِدٍ أَوْ لَخَدٍ كَذَلِكَ بَلْ يُفْرَدُ كُلُّ مَيَّتٍ بِشَقَّ أَوْ لَحَدٍ وَلَوْ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ فَالْمُرَادُ بِالْقَبْرِ هُنَا اللَّحْدُ أَوِ الشَّقُّ لَا الْقَبْرُ الْمَعْرُوفُ

(Ungkapan Ibn Qasim al-Ghazi dalam satu kubur), maksudnya adalah dalam satu syaqq atau lahd, 19 dan setiap jenazah harus disendirikan dalam satu syaqq atau lahd meskipun dalam satu lubang kuburan. Maka yang dikehendaki dengan redaksi "kubur" di sini adalah lahd atau syaqq, bukan satu lobang kubur yang biasa dikenal.

4. Mauhibah Dzi al-Fadhl20

وَلَوْ وَجَدَ عَظْمَهُ قَبْلَ كَمَالِ الْحُفْرِ طَمَّهُ وُجُوبًا مَالَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ أَوْبَعْدَهُ نَحَاهُ وَدَفَنَ الْآخَرَ فَإِنْ ضَاقَ بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْ دَفْنُهُ إِلَّا عَلَيْهِ فَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ نَحَاهُ حُرْمَةُ الدَّفْنِ هُنَا حَيْثَ لَا حَاجَةَ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ لِأَنَّ الْإِيذَاءُ أَشَدُّ

Bila penggali kubur menemukan tulang mayit sebelum sempurna penggaliannya, maka ia wajib menutupnya kembali selama tidak

¹⁷ Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudhih Syarh Manhaj al-Thullab, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz II, h. 201.

¹⁸ Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz I, h. 270.

¹⁹ Syaq adalah galian di tengah-tengah dasar kubur seperti bentuk sungai atau untuk meletakkan jenazah. Sedangkan Lahd adalah galian ke arah kiblat di dasar kubur yang cukup untuk meletakkan jenazah ke arah kiblat. Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz I, h. 265-266. (Pen.)

²⁰ Mahfud al-Termasi, Muhibah Dzi al-Fadhl, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz II, h. 465.

dibutuhkan (dan bisa menggali di tempat lain). Atau menemukan setelah penggaliannya selesai, maka ia harus menyingkirkannya dan memakamkan mayit yang lain (yang baru). Bila area makam sempit, yaitu tidak mungkin memakamkan mayit baru kecuali di atas tulang tersebut (mayit lama), maka menurut makna *zhahir* ungkapan ulama: "menyingkirkannya" adalah haram memakamkannya di situ, selama tidak ada dibutuhkan. Dan hal itu tidak jauh dari kebenaran, sebab lebih menyakitkan bagi mayit.

5. Kasyf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'21

(وَيَلْتَزِمُ تَمْيِيزَ قُبُورِهِمْ عَنْ قُبُورِنَا تَمْيِيزًا ظَاهِرًا كَالْحَيَاةِ وَأَوْلَى) وَذَلِكَ بِأَنْ لَا يَدْفِنُوا أَحَدًا مِنْهُمْ فِي مَقَابِرِهِمْ عَنْ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَظَاهِرُهُ وَجُوبًا لِنَهُمْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَظَاهِرُهُ وَجُوبًا لِئَلًا تَصِيرَ الْمُشْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ وَظَاهِرُهُ وَجُوبًا لِئَلًا تَصِيرَ الْمُقْبَرَتَانِ مَقْبَرَةً وَاحِدَةً لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ دَفْنُهُمْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَكُلَّمَا بَعُدَتْ) مَقَابِرُهُمْ (عَنْهَا كَانَ أَصْلَحَ) لِلتَّبَاعُدِ عَنْ الْمَفْسَدَة

(Dan wajib memisahkan makam ahli dzimmah - non muslim- dari makam muslim dengan pemisah yang jelas, seperti saat masih hidup. Bahkan setelah mati, pemisahan tersebut lebih utama). Yaitu ahli dzimmah tidak boleh memakamkan satu jenazah pun di pemakaman muslim. Hendaknya pemakaman mereka dijauhkan dari pemakaman muslim, dan secara zhahir hukum ini wajib, supaya pemakaman muslim dan pemakaman non muslim tidak menjadi satu. Sebab, tidak boleh memakamkan non muslim di pemakaman muslim. (Dan semakin jauh) pemakaman mereka (dari pemakaman muslim, maka semakin baik pula hal tersebut), karena menghindari mafsadah.

6. Tuhfah al-Muhtaj²²

(وَلَا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ) أَيْ لَحْدٍ أَوْ شَقَّ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ حَاجِزِ بِنَاءِ بَيْنَهُمَا أَيْ يُنْدَبُ أَنْ لَا يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِيهِ فَيُكْرَهُ إِنَّ اتَّحَدَا نَوْعًا أَوْ اخْتَلَفَا وَلَوْ اخْتِمَالًا كَخُنْثَيَيْنِ لِينْهُمَا فِيهِ فَيُكْرَهُ إِنَّ اتَّحَدَا نَوْعًا أَوْ اخْتَلَفَا وَلَوْ اخْتِمَالًا كَخُنْثَيَيْنِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةً أَوْ رَوْجِيَّةً أَوْ سَيِّدِيَّةً وَإِلَّا حَرُمَ فَالنَّفْيُ فِي كَلَامِهِ لِلْكَرَاهَةِ تَارَةً وَالْحُرْمَةِ أَخْرَى وَمَا فِي الْمَجْمُوعِ مِنْ حُرْمَتِهِ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا ضَعِيفٌ وَيَحْرُمُ أَيْضًا

²¹ Manshur bin Yunus al-Bahuti, *Kasyf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz III, h. 129.

²² Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada Hawasyai al-Syirwani wa Ibn al-Qasim al-'Abbadi, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.), Juz III, h. 173.

إِذْخَالُ مَيِّتٍ عَلَى آخَرَ وَإِنِ اتَّحَدَا قَبْلَ بِلَي جَمِيعِهِ أَيْ إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ فَإِنَّهُ لَا يَبْلَى

(Dan dua jenazah tidak dimakamkan dalam satu liang kubur), baik satu lahd maupun syaqq tanpa bangunan pemisah antara mereka berdua. Maksudnya, disunahkan tidak mengumpulkan dua jenazah dalam satu lahd maupun syaqq. Maka bila dua jenazah tersebut sejenis, atau berlainan jenis meskipun masih belum terbukti, seperti dua khuntsa -banci- ketika keduanya mempunyai hubungan mahram, suami istri atau budak majikan, maka hukumnya makruh. Bia tidak demikian maka hukumnya haram. Maka penafian dalam ungkapan al-Nawawi tadi terkadang bermakna makruh dan terkadang bermakna haram. Sementara pendapat dalam kitab al-majmu' yang mengharamkan pengumpulan antara ibu dan anaknya dalam satu liang kubur adalah pendapat yang lemah. Dan diharaman pula memasukkan jenazah pada liang kubur jenazah lain, meskipun sejenis sebelum semua jasad jenazah pertama membusuk. Kecuali tulang ekor, sebab tidak bisa membusuk.

7. Referensi Lain

- a) Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, Juz IV, h. 338.
- b) Al-Figh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Juz I, h. 847.
- c) Tuhfah al-Muhtaj, Juz III, h. 172.

454. Pencurian Ikan di Laut

A. Deskripsi Masalah

Acapkali kita mendengar banyak pencurian kekayaan laut Indonesia oleh nelayan luar negeri, misalnya ikan yang dicuri oleh nelayan asing di tempat dekat perbatasan. Bahkan nelayan kita mencuri ikan di laut negara tetangga Indonesia.

B. Pertanyaan

- 1. Apakah hal ini disebut pencurian sebagaimana definisi sariqah?
- 2. Apakah hukum batas negara menjadi hukum dalam ketentuan hak milik?
- 3. Bagaimana status hukum ikan curian tersebut?

C. Jawaban

730

- Pencurian itu tidak termasuk sariqah syar'an (pencurian menurut syariah), tetapi hukumnya haram karena melanggar kesepakatan antar negara.
- 2. Batas negara tidak dapat menjadi ketentuan hukum kepemilikan,

- tetapi dapat menjadi ketentuan hukum dalam hak kekuasaan negara.
- 3. Ikan tersebut boleh dirampas oleh negara sebagai ta'zir mal (dalam konteks kekuasaan negara).

D. Dasar Penetapan

1. Futuhat al-Wahhab bi Syarh Minhaj al-Thullab²³ (فَرْعُ) مِنْ الظَّاهِرِ سَمَكُ الْبَرِكِ وَصَيْدُ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَجَوَاهِرُهُمَا وَشَجَرُ الْأَيْكَةِ وَثِمَارُهَا فَلَا يَجُوزُ فِيهَا تَحَجُّرُ وَلَا اخْتِصَاصٌ وَلَا إِقْطَاعٌ وَلَوْ إِرْفَاقًا وَلَا أَخْدُ مَالٍ أَوْ عَوْضٍ مِمَّنْ يَأْخُذُ مِنْهَا شَيْعًا وَقَدْ عَمَّتْ الْبَلْوَى بِهَذَا فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللهِ نَعَمْ يَمْلِكُهَا تَبَعًا لِلْبُقْعَةِ إِذَا مَلَكَهَا كَمَا مَرَّ

(Sub Masalah) Termasuk yang sudah jelas adalah hukum ikan di kolam-kolam, hewan buruan darat dan laut serta kekayaan alam keduanya, pepohonan dan buah-buahan hutan, yang tidak boleh dicegah, dikuasai, diberikan kepada pihak lain oleh pemerintah, walaupun sebatas *irfaq*-memberi kewenangan memanfaatkan-, dan tidak poleh mengambil harta atau gantinya dari orang yang telah menguasainya. Dan fenomena semacam ini sudah umum terjadi, *fa la haula wa la quwwata illa billah*. Meskipun begitu, kekayaan alam yang telah disebutkan tadi bisa dimiliki dengan mengikuti kepemilikan lahan, ketika seseorang memiliki lahan tersebut seperti penjelasan yang telah lewat.

2. Faidh al-Qadir²⁴

(الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) الْجَائِزَةِ شَرْعًا أَيْ ثَابِتُونَ عَلَيْهَا وَاقِفُونَ عِنْدَهَا وَفِي التَّعْبِيرِ بِعَلَى إِشَارَةً إِلَى عُلُوِّ مَرْتَبَتِهِمْ وَفِي وَصْفِهِمْ بِالْإِسْلَامِ مَا يَقْتَضِي الْوَفَاءَ بِالشَّرْطِ وَيُحَثُّ عَلَيْهِ

(Sabda Nabi Saw. Orang-orang Islam itu menetapi janji-janji mereka) yang diperbolehkan syariat. Maksudnya mereka konsisten dengan perjanjian dan memenuhinya. Ungkapan huruf É mengisyaratkan ketinggian derajat mereka dan predikat Islam bagi mereka itu menunjukkan bahwa janji mereka harus dipenuhi dan anjuran untuk memenuhinya.

3. Tasyri' al-Jina'i al-Islami²⁵

731

²³ Sulaiman bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Syarh Minhaj al-Thullab, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz III, h. 573.

²⁴ Al-Munawi, Faidh al-Qadir, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz VI, h. 353.

وَيَدْخُلُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ كُلُّ مَا يَثْبَعُهَا مِنْ جَبَالٍ وَصَحَارِي وَأَنْهَارٍ وَبَحِيرَاتٍ وَأَرَاضٍ وَجَزَرٍ وَمَا فَوْقَ هذِهِ جَمِيعًا مِنْ طَبَقَاتِ الْجُوِّ مَهْمَا ارْتَفَعَتْ

Dan setiap gunung, padang sahara, sungai, laut, lahan, pulau dan udaranya ke atas, yang mengikuti wilayah negara Islam itu termasuk wilayah negara Islam.

4. Tasyri' al-Jina'i al-Islami26

قُلْتُ وَيُشْهَدُ لِجَوَازِ الْعُقُوبَةِ بِالْمَالِ فِي الْجُمْلَةِ حَدِيثُ التَّقَيْلِ وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَصِيدُ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ فَخُدُوا سَلَبَهُ إِلَى آخِرِ مَا قَالَهُ الشَّيْخِ مِيَارَهُ وَإِذَا كَانَ هذَا فِي الْجِنَايَاتِ الْمُقْتَضِيَّةَ لِلتَّعْزِيرِ فَمَا بَالُكَ فِي تَرْكِ الْجُمَاعَةِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

Saya berpendapat: "Dan bukti diperbolehkannya memberi sanksi harta dalam sebagian kasus adalah hadits al-Nufail, yaitu sabda Nabi Saw.: "Siapa saja yang berburu di tanah haram Madinah, maka rampaslah perlengkapannya ... sampai akhir pendapat Syaikh Miyarah. Dan ketika hal ini dalam kasus kriminal menetapkan ta'zir, maka bagaimana menurut anda dalam kasus meninggalkan jamaah?" Wallahu A'lam bi al-Shawab.

5. Bughyah al-Musytarsyidin 27

(مَسْأَلَةُ ك) يَجِبُ امْتِنَالُ أَمْرِ الْإِمَامِ فِي كُلِّ مَا لَهُ فِيهِ وِلَايَةٌ كَدَفْعِ زَكَاةِ الْمَالِ الظَّاهِرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنُ لَهُ فِيهِ وِلَايَةٌ وَهُوَ مِنَ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ أَوِ الْمَنْدُوبَةِ جَازَ الدَّفْعُ إِلَيْهِ وَالاسْتِقْلَالِ بِصَرْفِهِ فِي مَصَارِفِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورِ بِهِ مُبَاحًا أَوْ مَكْرُوهًا أَوْ حَرَامًا لَمْ يَجِبِ امْتِنَالُ أَمْرِهِ بِصَرْفِهِ فِي مَصَارِفِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورِ بِهِ مُبَاحًا أَوْ مَكْرُوهًا أَوْ حَرَامًا لَمْ يَجِبِ امْتِنَالُ أَمْرِهِ فِيهِ كَمَا قَالَهُ مِ رَوْتَرَدَّدَ فِيهِ فِي التُحْفَةِ ثُمَّ مَالَ إِلَى الْوُجُوبِ فِي كُلِّ مَا أَمَرَ بِهِ الْإِمَامُ وَلَوْ خُومِ فَلَاهُ مِلَا قَالَهُ مِ رَوْتَرَدَّدَ فِيهِ فِي التُحْفَةِ ثُمَّ مَالَ إِلَى الْوُجُوبِ فِي كُلِّ مَا أَمَرَ بِهِ الْإِمَامُ وَلَوْ خُومِ اللهُ الْوَجُوبِ فِي كُلِّ مَا أَمَرَ بِهِ الْإِمَامُ وَلَوْ فَطَاهِرًا وَبَاطِنًا وَإِلَّا فَظَاهِرًا فَقَطْ وَمَا عَدَاهُ إِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ وَجَبَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَإِلَّا فَظَاهِرًا فَقَطْ أَيْضًا وَالْعِبْرَةُ فِي الْمَنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ بِعَقِيدَةِ الْمَأْمُورِ وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ ظَاهِرًا أَنَّهُ لَكُومُ لِللهِ لَوْمُ مِن وَالْحُولُ وَمَا عَدَاهُ إِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ ظَاهِرًا أَنَّهُ لَوْمُ اللهِ الْمُؤْمُ وَى الْمُنْ مُورِ وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ طَاهِرًا أَنَّهُ لَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ وَمَا عَدَاهُ لَوْمُ الْمُ لِي الْمَثَالِ وَمَعْنَى وَلُولِكُمْ وَالْمُ اللهُ وَلَا لَكُولِهِ فَي الْمُعْرَاقِ وَالْمُؤْلِ وَلَا لَوْمُ اللهُ لَلْمُ الْمُولِ وَمَعْنَى الْمُولِ وَلَا لَولِهُ الْمُولُ وَلَا لَهُ اللهِ الْمُولِ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْتَلِقُ اللْمُ اللّهُ الْمُولِ الللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي اللللّهُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُقَالِقُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ

²⁵ Abdul Qadir al-'Audah, Tasyri' al-Jina'i al-Islami, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th.), Juz I, h. 327.

²⁶ Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, Qurrah al-'Ain, h. 96-97.

²⁷ Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, *Bughyah al-Musytarsyidin*, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 91.

وَالْمَنْدُوبُ يَجِبُ وَكَذَا الْمُبَاحُ إِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ كَتَرْكِ شُرْبِ التَّنْبَاكِ إِذَا قُلْنَا بِصَرَاهَتِهِ لِأَنَّ فِيهِ خِسَّةٌ بِذَوِي الْهَيْنَاتِ وَقَدْ وَقَعَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَمَرَ نَاثِبَهُ بِأَنْ يُنَادِيَ بِعَدَمِ شُرْبِ السَّلْطَانَ أَمَرَ نَاثِبَهُ بِأَنْ يُنَادِي بِعَدَمِ شُرْبُهُ الْآنَ شُرْبِ التَّاسِ لَهُ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْقَهَاوِي فَخَالَفُوهُ وَشَرِبُوا فَهُمُ الْعُصَاةُ وَيَحْرُمُ شُرْبُهُ الْآنَ الْمَتِثَالًا لِأَمْرِهِ وَلَوْ أَمَرَ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ ثُمَّ رَجَعَ وَلَوْ قَبْلَ التَّلَبُسِ بِهِ لَمْ يَسْقُطِ الْوُجُوبُ اهِ الْمَتِثَالًا لِأَمْرِهِ وَلَوْ أَمَرَ الْإِمَامُ بِشَيْءٍ ثُمَّ رَجَعَ وَلَوْ قَبْلَ التَّلَبُسِ بِهِ لَمْ يَسْقُطِ الْوُجُوبُ اه

(Kasus dari al-Kurdi). Wajib mematuhi perintah Imam -kepala pemerintahan- dalam setiap hal yang menjadi kewenangannya. Seperti penyerahan zakat harta zhahir. Maka bila ia tidak memiliki kewenangan, yaitu dalam hak-hak yang bersifat wajib atau sunah, maka boleh memasrahkannya kepada Imam atau mengalokasikannya sendiri kepada yang berhak. Apabila perintahnya itu mubah, makruh atau haram, maka tidak wajib mematuhinya, seperti pendapat al-Ramli. Namun dalam kitab al-Tuhfah Ibn Hajar meragukannya, kemudian ia cenderung mewajibkannya dalam setiap perintah Imam meskipun haram, namun secara lahir saja. Dan perintah yang selain haram, apabila terdapat kemaslahatan umum, maka wajib dipatuhi secara lahir dan batin. Apabila tidak maka wajib dipatuhi secara lahir saja pula. Standar wajib dan mubah tersebut berdasarkan pada keyakinan pihak yang diperintah. Sedangkan ungkapan ulama: "Secara lahir." maksudnya adalah sesorang tidak berdosa bila tidak mematuhinya. Dan maksud ulama: "Secara batin." Adalah ia berdosa bila melanggarnya. Demikian pendapat Ibn Hajar. Saya sendiri berkata: "Al-Syargawi berkata: "Kesimpulannya, sungguh wajib mematuhi perintah imam secara lahir dan batin, dari setiap perintah yang tidak haram dan makruh. Perkara yang wajib -dengan perintahnya- menjadi lebih kuat, yang sunah menjadi wajib. Begitu pula perkara mubah bila terdapat kemaslahatan, seperti menghisap rokok bila kita memakruhkannya karena mengandung kerendahan bagi orang-orang yang berkepribadian luhur. Dan penguasa sudah memerintahkan pegawainya untuk mengumumkan ketidakbolehan menghisap rokok di pasar-pasar dan kedai-kedai kopi. Kemudian banyak orang yang tidak mematuhi dan tetap menghisapnya. Maka mereka tergolong orang yang telah melakukan maksiat. Pada zaman sekarang hukum menghisap rokok adalah haram karena perintah penguasa. Apabila penguasa memerintahkan suatu perkara kemudian ia mencabutnya, meskipun belum pernah dilakukan -oleh siapa pun-, maka hukum mematuhi perintah tersebut tidak gugur. Demikian pendapat al-Syargawi.

6. Tuhfah al-Muhtaj²⁸

وَقَوْلُهُمْ يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِهِ فِي التَّسْعِيرِ إِنْ جَوَّزْنَاهُ أَيْ كَمَا هُوَ رَأْيٌ ضَعِيفُ نَعَمْ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ مَا أَمَرَ بِهِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ لَا يَجِبُ امْتِثَالُهُ إِلَّا ظَاهِرًا فَقَطْ ... فَعُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُمْ إِنْ جَوَّزْنَاهُ قَيْدٌ لِوُجُوبِ امْتِثَالِهِ ظَاهِرًا وَإِلَّا فَلَا إِلَّا إِنْ خَافَ فِتْنَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرُ

Dan ungkapan ulama: "Wajib mematuhi perintah penguasa dalam kebijakan harga barang, apabila kita memperbolehkannya, seperti versi pendapat dha'if-lemah-. Meski begitu, pendapat yang kuat menyatakan, bahwa sungguh perintah penguasa yang tidak memuat kemaslahatan publik hukumnya tidak wajib dipatuhi kecuali secara lahir saja ... Maka bisa diketahui, ungkapan ulama: "Apabila kita memperbolehkannya." merupakan ketentuan atas kewajiban mematuhi perintahnya secara lahir. Bila tidak kita perbolehkan, maka tidak wajib pula dipatuhi, kecuali bila dikhawatirkan akan memicu fitnah, seperti yang telah maklum.

7. Referensi Lain

- a) Hayiyata Qulyubi wa 'Amirah, Juz IX, h. 461.
- b) Al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siasah al-Syari'ah, karya Ibn Qayyim al-Jauziyah, h. 266-279.

455. Batas Minimal Usia Menikah

A. Deskripsi Masalah

Terjadi di beberapa daerah di Indonesia, anak lelaki kecil yang masih berumur 10 tahun dan masih duduk di bangku kelas IV SD, dikawinkan dengan anak perempuan yang masih kecil pula secara agama (syar'i), tetapi tidak didaftarkan ke kantor KUA. Perkawinan itu dilakukan untuk menggantung (mengikat) agar kelak dewasa tidak berjodoh dengan orang lain. Hal ini disebut Kawin Gantung. Perkawinan itu diselenggarakan secara sah dan mengadakan resepsi (walimah). Kedua pengantin kecil didandani sebagaimana tradisi pengantin dalam walimah.

Pelaksanaan akad nikah dalam kawin gantung itu, ada yang secara langsung dengan *ijab* dan *qabul* yang diucapkan pengantin pria kecil didampingi pengantin perempuan kecil, ada pula yang *ijab* dan *qabul*nya diwakilkan kepada pria dewasa. Setelah selesai akad nikah, kedua pengantin dilarang berkumpul hingga menginjak usia dewasa. Seperti

²⁸ Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj bi Hamisy Hawasyai al-Syarwani wa Ibn al-Qasim al-'Ubbadi, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.), Juz III, h. 173.

anak-anak lainnya, mereka juga kembali masuk sekolah seperti sebelumnya. Setelah keduanya dewasa dan memiliki kesiapan berumahtangga maka mereka dinikahkan kembali (tajdid al-nikah) dengan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Padahal dalam UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak, anak di bawah umur 16 tahun tidak boleh dikawinkan. Dan pelanggaran terhadap UU itu dikenai sanksi pidana.

B. Pertanyaan

- 1. Bagaimana hukumnya melakukan kawin gantung?
- 2. Berapa batas usia pernikahan, baik bagi pria atau wanita?
- 3. Apakah kawin gantung memiliki akibat hukum sebagimana nikah pada umumnya, seperti kewajiban nafkah, kewajiban bagi istri taat kepada suami, halalnya bersetubuh, hak waris jika salah satunya meninggal, dan sebagainya?
- 4. Bagaimana hukumnya melakukan pernikahan yang diulang (tajdid al-nikah)?

C. Jawaban

- 1. Kawin gantung hukumnya sah jika terdapat maslahah dan *ijab* qabul dilakukan oleh wali *mujbir* serta memenuhi syarat dan rukun nikah lainnya.
- 2. Menurut jumhur ulama tidak ada batasan usia pernikahan dalam Islam. Akan tetapi sebaiknya pernikahan dilakukan setelah usia baligh.
- Kawin gantung belum memiliki akibat hukum sebagaimana nikah pada umumnya, kecuali dalam hak waris dan pemberian nafkah menurut sebagian ulama. Sedangkan bersetubuh menunggu sampai kuat disetubuhi.
- 4. Hukum tajdid al-nikah adalah boleh. Akan tetapi menurut Yusuf al-Ardabili tajdid al-nikah dihukumi sebagai ikrar bi al-thalaq (pengakuan cerai), wajib membayar mahar lagi dan mengurangi 'adad al-thalaq (bilangan talak).

D. Dasar Penetapan

1. Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim²⁹

(بَابُ جَوَازِ تَزْوِيجِ الْأَبِ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ) [١٤٢٢] فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ (تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لِسِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ) وَفِي رِوَايَةٍ

²⁹ Muhyiddin al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1392 H), Juz IX, h. 206.

تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ هَذَا صَرِيحٌ فِي جَوَازِ تَزْوِيجِ الْأَبِ الصَّغِيرَةَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا لِأَنَّهُ لَا إِذْنَ لَهَا وَالْحَدُ كَالْأَبِ عِنْدَنَا أَمَّا غَيْرُ الْأَبِ وَالْحَدِّ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالتَّوْرِيِّ وَمَالِكِ وَابْنِ أَبِي لَيْلَ وَأَحْمَدَ وَأَبِي ثَورٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّافِعِيَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَالتَّوْرِيِّ وَمَالِكِ وَابْنِ أَبِي لَيْلَ وَأَحْمَدَ وَأَبِي ثَورٍ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَاعْلَمْ أَنَّ الشَّافِعِيَ وَأَصْحَابَهُ قَالُوا يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُزَوِّجَ الْأَبُ وَالْحِدُّ الْمِكْرَ حَتَّى تَبْلُغَ وَيَسْتَأْذِنَهَا لِيَلَّا يُوقِعَهَا وَاللهُ يُوقِعَهَا فَيْ اللهَ اللهَ وَهِي كَارِهَةً وَهَذَا الَّذِي قَالُوهُ لَا يُخَالِفُ حَدِيثَ عَائِشَةَ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّهُ لَا يُوجُهَا قَبْلَ الْبُلُوعِ إِذَا لَمْ تَصُنْ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةً يُخَافُ فَوْتُهَا بِالتَّأْخِيرِ كَحَدِيثِ عَائِشَةَ فَيْ يُنَا اللهُ أَعْلَمُ وَيُعْمَا وَاللهُ أَعْلَمُ وَلِيهِ فَلَا يَفُوتُهَا وَاللهُ أَعْلَمُ وَلَيْهِ وَلَذِهِ فَلَا يَهُوتُهَا وَاللهُ أَعْلَمُ اللهِ الْمُعَالَةِ وَلَا لَهُ وَلَا يَهُوتُهَا وَاللهُ أَعْلَمُ وَلَيْهَ اللهُ أَعْلَمُ الْمُورُ بِمَصْلَحَةٍ وَلَذِهِ فَلَا يَهُوتُهَا وَاللهُ أَعْلَمُ وَلَا يَهُوتُهَا وَاللهُ أَعْلَمُ وَلَا يَهُوتُهَا وَاللهُ أَعْلَمُ الْمُؤْتَى الْوَلَالِ اللهُ وَاللهُ أَعْلَمُ وَلَهُ الْمُؤْتُولُ وَاللهُ أَوْلُولُ الشَّالِ وَاللهُ الْعُولُ وَلَا لَلهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقِ وَلَهِ وَلَهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلَكُولُ السَّالُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَلَا لَهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الللْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلُولُ وَلِهُ الْمُؤْلُ وَاللّهُ الْمُؤْلُ وَاللهُ الللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَاللهُ اللّهُ الْمُؤْلُ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللّهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُ ولَا لَهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ وَالْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُؤُلُولُ اللّهُ اللْمُؤُلُولُ اللّهُ وَالْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُول

(Bab Kebolehan Ayah Menikahkan Gadis Kecil) [1422]. Dalam bab tersebut terdapat hadits Aisyah ra., ia berkata: "Rasulullah Saw. menikahiku di usia 6 tahun, dan bersetubuh denganku saat aku berusia 9 tahun. Dalam riwayat lain -disebutkan-: "Rasulullah Saw. menikahi Aisyah saat dia berusia 7 tahun." Hadits ini sangat jelas dalam menerangkan kebolehan seorang ayah menikahkan anak gadisnya yang masih kecil tanpa persetujuannya. Sebab ia belum dianggap mampu memberi persetujuan. Dan kakek sama hukumnya dengan ayah -dalam hal ini-, menurut kita ulama madzhab Syafi'iyyah. Adapun wali selain ayah dan kakek, maka mereka tidak boleh menikahkan gadis kecil tadi menurut pendapat al-Syafi'i, al-Tsauri, Malik, Ibn Abi Laila, Ahmad, Abu Tsaur, dan Abu 'Ubaid. Dan ketahuilah bahwa al-Syafi'i dan Ashhabnya berpendapat, ayah dan kakek disunahkan agar tidak menikahkannya sampai ia mencapai baligh, dan sunah meminta persetujuannya agar tidak memasukkannya dalam kekuasaan suami, sementara ia membencinya. Pendapat mereka ini tidak bertentangan dengan hadits Aisyah. Sebab, yang dikehendaki mereka adalah bahwa si ayah atau si kakek sebaiknya tidak menikahkannya, sebelum ia mencapai usia baligh saat tidak terdapat kemaslahatan nyata yang dikhawatirkan akan hilang karena menunda pernikahannya, seperti hadits Aisyah. Oleh sebab itu, disunahkan memperoleh suami tersebut, sebab seorang ayah diperintahkan untuk mengupayakan kemaslahatan bagi anaknya, maka ia tidak boleh membiarkan kemaslahatan itu lenyap.

2. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh³⁰

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, t.. th.), Juz IX, h. 171.

الصَّغَرُ أَمَّا الصَّغَرُ فَقَالَ الجُمْهُورُ مِنْهُمْ أَيْمَةُ الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ بَلِ ادَّعَى ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ تَزْوِيجِ الصَّغِيرَةِ مِنْ كُفْءٍ ... زَوَاجُ النَّبِيِّ بِعَائِشَةَ وَهِيَ صَغِيرَةً فَإِنَّهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي عَلَيْسَةَ وَهِيَ صَغِيرَةً فَإِنَّهَا قَالَتْ تَزَوَّجَنِي النَّهِ عَنْهُمَا النَّيِ وَإَنَّا ابْنَةُ يَسْعِ وَقَدْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا أَبُوهَا أَبُو بَكْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَزَوَّجَ النَّيِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا وَزَوَّجَ النَّي عَلِي اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا صَغِيرَانِ ... آثَارُ عَنِ السَّحَابَةِ زَوَّجَ (أَي عَقَدَ) عَلِيُ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْفُومَ وَهِيَ صَغِيرَةً مِنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَزَوَّجَ عُرُوةَ الصَّخِيرَةُ لِنِنَهُ الصَّغِيرَةِ لِنَا اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ الرَّبَيْرِ بِنْتَ أَخِيهِ مِنِ ابْنِ أَخِيهِ وَهُمَا صَغِيرَانِ وَوَهَّبَ رَجُلٌ بِنْتَهُ الصَّغِيرَةَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الرَّابَيْرِ وَلَوَّجَتِ امْرَأَةً بِنْتَا لَهَا صَغِيرَةً لِابْنِ اللهُ عَنْهُمَا وَزَوَّجَتِ امْرَأَةً بِنْتَا لَهَا صَغِيرَةً لِابْنِ اللهُ عَنْهُمَا وَزَوَّجَتِ امْرَأَةً بِنْتَا لَهَا صَغِيرَةً لِابْنِ اللهِ بْنِ عَلَى فَأَجَازَ ذلِكَ عَلَى رَضِيَ اللهِ ابْنُ مَسْعُودِ عَلَى الْمُعَلِقَ فَأَجَازَ ذلِكَ وَوْجُهَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ مَسْعُودِ عَلَى

Anak kecil. Adapun tentang anak kecil, maka Jumhur ulama, termasuk para Imam madzhab empat, bahkan Ibn Mundzir menilainya sebagai Ijma', boleh menikahkannya kepada suami yang sekufu' ... Pernikahan Nabi Saw. dengan Aisyah ra. itu saat dia masih kecil. Karena ia berkata: "Nabi Saw. menikahi ku, sementara aku masih gadis kecil berusia 6 tahun, dan beliau menyetubuhiku saat aku berusia 9 tahun dan -yangmenikahkan ayahnya, yaitu Abu Bakar -radhiyallah 'anhuma-. Nabi Saw. pernah pula menikahkan putri pamannya, Hamzah, dengan Ibn Abi Salamah di saat keduanya masih kecil. ... Atsar Sahabat. Ali ra. telah mengakadi anaknya, Umi Kultsum di saat masih kecil dengan 'Urwah bin al-Zubair. 'Urwah bin al-Zubair telah menikahkan putri saudara laki-lakinya dengan putra saudara laki-lakinya -yang lain- di saat keduanya masih kecil. Seorang sahabat laki-laki telah menikahkan putri kecilnya dengan Abdullah bin al-Hasan bin Ali, dan diperbolehkan oleh Ali -radhiyallah 'anhuma-. Seorang sahabat wanita pernah menikahkan putri kecilnya dengan Ibn al-Musayyab bin Nakhbah dan suaminya, Abdullah bin Mas'ud ra. memperbolehkannya.

3. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh³¹

وَكَذَلِكَ اشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ فِي تَزْوِيجِ الصَّغِيرِ وَجُودَ الْمَصْلَحَةِ وَفِي تَزْوِيجِ الْأَبِ الصَّغِيرَةَ أَوِ الْكَبِيرَةَ بِغَيْرِ إِذْنِهَا شُرُوطًا سَبْعَةً هِيَ (الْأَوَّلُ) أَلَّا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا عَدَاوَةً ظَاهِرَةً (القَانِي) أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ كُفْءِ (القَالِثُ) أَنْ يُزَوِّجَهَا بِمَهْرِ مِثْلِهَا (الرَّابِعُ) أَنْ يَكُونَ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ

³¹ Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz IX, h. 174.

(الْحَامِسُ) أَلَّا يَكُونَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا بِالْمَهْرِ (السَّادِسُ) أَلَّا يُزَوِّجَهَا بِمَنْ تَتَضَرَّرُ بِمُعَاشَرَتِهِ كَأَعْمَى وَشَيْخٍ هَرَمٍ (السَّابِعُ) أَلَّا يَكُونَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهَا الْحُجُّ فَإِنَّ الزَّوْجَ قَدْ يَمْنَعُهَا لِكُونِ الْحَجِّ عَلَى التَّرَاخِي وَلَهَا غَرَضٌ فِي تَعْجِيلِ بَرَاءَتِهَا وَيَجُوزُ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ

Dan begitu pula dalam menikahkan gadis kecil ulama Syafi'iyah menyaratkan terdapat kemaslahatan. Dalam kebolehan seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil maupun yang sudah besar tanpa sepertujuannya terdapat 7 syarat. Yaitu (1), tidak perdapat permusuhan nyata antara ayah dan putrinya tersebut, (2) menikahkan dengan suami yang sekufu', (3) menikahkan dengan mahar mitsl (mahar standar), (4) mahar berupa mata uang negara, (5) suami bukan orang yang tidak mampu membayar mahar, (6) tidak menikahkan dengan orang yang merepotkannya, seperti orang buta dan seorang kakek pikun, dan (7) putrinya tersebut belum wajib haji, karena terkadang suaminya akan mencegah naik haji, sebab kewajiban haji bersifat tarakhkhi -longgar-, sementara putrinya bermaksud segera melaksanakan kewajiban hajinya. Dan anak laki-laki kecil boleh menikah dengan perempuan lebih dari satu.

4. Syarh al-Syihab32

مَا حُكُمُ التَّجْدِيدِ النِّكَاحِ هَلْ هُوَ جَائِزُ أَمْ لَا نَعَمْ هُوَ جَائِزُ وَلَا يَنْقُصُ بِهِ عَدَدَ الطَّلَاقِ لِأَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَاقًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةً فِيهِ وَهُو ظَاهِرُ لِأَنَّهُ مِنْ مُجَرَّدٍ تَجْدِيدِ طَلَبِ الزَّوْجِ لِتَجَمُّلٍ أَوِ الاَحْتِيَاطِ 33 الاَحْتِيَاطِ 33

³² Ibn Hajar, Syarh al-Syihab, Juz VII, h. 490.

³³ Demikian yang tercatat dalam Keputusan Muktamar. Ibarah senada tercatat pula dalam Yuhfah al-Muhtaj. Lihat, Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah Muhtaj pada Hawasyai al-Syirwani wa al-'Abbadi, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.) Juz VII, h. 391, yaitu: وَيُوْخَذُ مِنْ أَنَّ الْمُمُودَ إِذَا تَكَرَّرَتُ أَعْتُرِرَ الْحَرُّرَتُ الْعَثْرِرَ الْحَرَّرَتُ الْعَثْرِرَ الْحَرَّرَتُ الْعَثْرِ الْأَوْلِ مَعَ مَا يَأْتِي أَوَائِلَ الطَّلَاقِ أَنْ قَوْلَ الرَّوْجِ لِوَلِيِّ رَوْجَهِ رَوْجَهِ لَوْجَهِ كِنَايَةً فِيهِ وَرَجْهَا فَإِللَّهُ صَرِيعٌ أَنَّ مُجَرَّدٌ مُوافَقَةِ الرَّوْجِ عَلَى صُورَةٍ عَقْدِ قَالِ مَنَ لَلَا لاَ يَكُونُ اعْتِرَافًا بِالْفِصَاءِ الْمِصْدَةِ الْأُولَى بَلْ وَلا كِنَايَةً فِيهِ وَهُو طَالِمَ وَلَا كِنَاقِيهِ مَا يَأْتِي قُبَيْلُ الْوَلِيمَةِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ كَانَ النَّانِي تَجْدِيد وَافَق عَلَيْهِ الرَّوْجُ مُكَانَ الْأَصْلُ اغْتِصَاءَ كُلُّ الْمَهْرِ وَحَكَمُنَا بِوُقُوعٍ طَلْقَةٍ لِاسْتِلْوَامِ الثَّانِي لَهَا طَاهِرًا وَمَا هُنَا فِي عَقْدَيْنِ لَيْسَ فِي فَرَدِ طَلْبَ مِنْ الزَّرْجِ لِتَجَمُّلُ أَوْ اخْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلُهُ

Dan dari ketentuan ketika akad terjadi berulang-ulang, maka yang legal adalah akad pertama, serta dari materi yang terdapat dipermulaan *Kitab Talak*, yaitu sungguh ucapan suami pada wali istrinya: "Nikahkanlah aku (padanya)!", merupakan *kinayah*

Apakah hukum memperbarui akad nikah? Apakah boleh atau tidak? Ya, hal itu boleh dan tidak mengurang bilangan talak. Sebab, kecocokan semata-mata dari suami atas bentuk akad kedua, misalnya, bukan merupakan pengakuan atas rusaknya akad nikah yang pertama, bahkan tidak termasuk kinayah -dari perusakan akad pertama-. Hal tersebut sudah jelas, sebab hanya termasuk memperbarui tuntutan kepada suami dalam rangka mencari keluwesan atau kehati-hatian.

5. Al-Anwar34

وَلَوْ عَقَدَ بِالسِّرِّ بِأَلْفٍ وَفِي الْعَلَانِيَةِ بِأَلْفَينِ وَهُمَا مُتَّفِقَانِ عَلَى بَقَاءِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ فَالْمَهْرُ أَلْفُ … وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلُ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرُ آخَرُ لِأَنَّهُ إِفْرَارُ بِالْفُرْقَةِ وَيَنْتَقِصُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ القَّالِقَةِ اه

Dan andaikan suami melakukan akad nikah sirri dengan mahar seribu, dan akad secara terang-teranan dengan mahar dua ribu, dan mereka berdua -suami dan wali mempelai wanita- sepakat atas keabsahan akad pertama, maka maharnya tetap seribu. ... Andaikan seorang suami memperbarui akad nikah istrinya, maka ia wajib membayar mahar lagi. Sebab, akad baru tersebut merupakan pengakuan cerai dan mengurangi bilangan talak. Dan dalam akad baru yang ketiga kalinya ia membutuhkan tahlil -istri sudah dinikahi orang lain, lalu ditalak dan habis masa 'iddahnya.

- 6. Referensi Lain
- 1) Hasyiyah al-Jamal 'ala Syarh al-Manhaj, Juz IV, h, 245.
- 2) Qurrah al-'Ain, h. 164.

dari rusaknya akad nikah pertama, berbeda dengan ucapannya: "Nikahkanlah dia (istrinya)!", maka ucapan itu merupakan ucapan sharih dari rusaknya akad nikah pertama, disimpulkan bahwa sekedar suami kebetulan mempraktekkan bentuk akad kedua misalnya, itu bukan merupakan pengakuan atas rusaknya 'ishmah (keabsahan akad) pertama, bahkan bukan merupakan kinayah darinya. Hal itu sangat jelas dan tidak ternafikan oleh materi yang akan disampaikan sebelum Pasal Walimah, yaitu bila si suami berkata: "Ucapan yang kedua adalah memperbarui lafal, bukan akad.", maka ucapannya itu tidak diterima. Sebab, kasus tersebut terjadi dalam dua akad yang dalam akad kedua tidak terdapat unsur upaya memperbarui akad pertama yang disetujui oleh suami. Maka hukum asalnya adalah berkonsekwansi pada semua mahar (wajib diberikan suami kepada istri), dan kita hukumi terjadi satu talak karena akad kedua menuntut si istri untuk menjadi istri secara lahiriahnya. Sementara dalam kasus tajdid al-nikah ini, yang ada hanyalah upaya suami untuk memperindah akad atau kehatihatian saja. Maka kajilah kasus itu. (Pen.)

³⁴ Yusuf al-Ardabili, al-Anwar, (Maktabah al-Tujjariyyah, t. th.), h. 88.

456. Pernyataan Shighat Ta'liq Talak

A. Deskripsi Masalah

Berdasarkan keputusan Menteri Agama RI dan tertera dalam buku nikah, bahwa bagi pelaksanaan akad nikah dilakukan pembacaan shighat ta'liq talak dan menandatanganinya. Dalam praktiknya, adakalanya penghulu dan pihak mempelai pria sepakat untuk membacanya lalu menandatanganinya setelah pelaksanaan akad nikah, dan ada pula praktiknya yang tidak membaca shighat ta'liq itu, tetapi dengan pernyataan yang ditandatangani oleh mempelai laki-laki bahwa ia telah membacanya.

B. Pertanyaan

- 1. Apakah *shighat ta'liq* talak yang tidak dibacakan, tetapi dengan pernyataan yang ditandatangani itu otomatis terjadi sesuai dengan isinya, dan dikenai sangsi jika melanggar *ta'liq*nya?
- 2. Bagaimana hukum meninggalkan membaca atau menandatangani shighat ta'liq yang merupakan perintah ulil amr?

C. Jawaban

- 1. Tidak terjadi ta'liq talak dan tidak dikenai sanksi.
- 2. Boleh meninggalkan membaca atau menandatangi shighat.

D. Dasar Penetapan

1. Kanz al-Raghibin³⁵

(وَلَوْ كَتَبَ نَاطِقٌ طَلَاقًا) كَأَنْ كَتَبَ زَوْجَتِي طَالِقٌ (وَلَمْ يَنْوِهِ فَلَغُوُ) وَتَكُونُ كِتَابَتُهُ لِيَجْرِبَةِ الْقَلَمِ أَوِ الْمِدَادِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَفِي وَجْهٍ أَنَّ الْكِتَابَةَ صَرِيحَةٌ كَالْعِبَارَةِ يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ (وَإِنْ نَوَاهُ فَالْأَظْهَرُ وُقُوعُهُ) لِأَنَّ الْكِتَابَةَ طَرِيقٌ فِي إِفْهَامِ الْمُرَادِ كَالْعِبَارَةِ وَقَدْ الطَّلَاقُ (وَإِنْ نَوَاهُ فَالْأَظْهَرُ وُقُوعُهُ) لِأَنَّ الْكِتَابَةَ طَرِيقٌ فِي إِفْهَامِ الْمُرَادِ كَالْعِبَارَةِ وَقَدْ الطَّلَاقِ ... وَلُو الْتَبَرَّذُ وَالثَّانِيَةِ وَالثَّانِي لَا يَقِعُ لِأَنَّهَا فِعُلُّ وَالْفِعْلُ لَا يَصْلُحُ كِنَايَةً عَنْ الطَّلَاقِ ... وَلُو تَلَقَظُ النَّاطِقُ بِمَا كَتَبَهُ فَيُقْبَلُ ظَاهِرًا فِي الْأَصَحِ تَلَاقَطُ النَّاطِقُ بِمَا كَتَبَهُ فَيُقْبَلُ ظَاهِرًا فِي الْأَصَحِ

(Dan andaikan seorang suami yang tidak bisu menulis talak), seperti ia menulis: "Istriku adalah wanita yang tertalak." (dan ia tidak berniat mentalaknya, maka tulisan talak tersebut tidak berdampak apapun). Penulisan talak yang dilakukannya bisa jadi karena mencoba ballpoin, tinta atau yang lainnya. Dalam satu pendapat dinyatakan, tulisan merupakan sighat sharih seperti halnya ungkapan lisan, yang

³⁵ Jalaluddin al-Mahalli, Kanz al-Raghibin pada Khasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t. th.) Juz III, h. 329.

berdampak terjadinya talak. (Dan bila dia meniati tulisannya sebagai talak, maka menurut pendapat *al-Azhhar*, terjadi talak). Sebab tulisan merupakan satu metode untuk menyampaikan kehendak seseorang seperti halnya ungkapan lisan, dan faktanya telah besertaan niat. Sementara menurut pendapat kedua tidak terjadi talak. Sebab menulis adalah pekerjaan, dan sebuah pekerjaan tidak pantas dijadikan *kinayah* talak. ... Apabila seorang suami yang tidak bisu mengucapkan tulisan talaknya, maka terjadi talak. Kecuali apabila ia bermaksud membacanya -saja-. Maka menurut pendapat *al-Ashhah* klaimnya diterima secara hukum lahir saja.

2. Bughyah al-Mustarsyidin³⁶

(مَسْأَلَةُ كَ) يَجِبُ امْتِنَالُ أَمْرِ الْإِمَامِ فِي كُلِّ مَا لَهُ فِيهِ وِلَا يَةٌ كَدَفْعِ زَكَاةِ الْمَالِ الظَّاهِرِ فَإِنْ لَمْ تَكُنُ لَهُ فِيهِ وِلَا يَةٌ وَهُو مِنَ الْحَقُوقِ الْوَاحِبَةِ أَوِ الْمَنْدُوبَةِ جَازَ الدَّفْعُ إِلَيْهِ وَالاسْتِفْلَالِ مِصَرْفِهِ فِي مَصَارِفِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورِ بِهِ مُبَاحًا أَوْ مَكْرُوهًا أَوْ حَرَامًا لَمْ يَجِبِ امْتِثَالُ أَمْرِ بِهِ فَيهِ فِي التُحْفَةِ ثُمَّ مَالَ إِلَى الْوُجُوبِ فِي كُلِّ مَا أَمَر بِهِ الْإِمَامُ وَلَوْ فَيهِ كَمّا لَكُ مَ وَتَرَدَّدَ فِيهِ فِي التُحْفَةِ ثُمَّ مَالَ إِلَى الْوُجُوبِ فِي كُلِّ مَا أَمَر بِهِ الْإِمَامُ وَلَوْ كَرَّمًا لَكِنْ عَلَاهِرًا وَمَا عَدَاهُ إِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةً عَامَّةً وَجَبَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَإِلَّا وَإِلَّا فَلَاهِرًا أَنَّهُ بَوْمَ عَلَاهِرًا أَنَّهُ بَوْمَ عَلَاهِرًا أَنَّهُ بَعْدَمِ الامْتِقَالِ وَمَعْنَى بَاطِنًا أَنَّهُ يَأْتُمُ اه قُلْتُ وَقَالَ ش ق وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجْبُ لَا يَأْتُمُ بِعَدَمِ الامْتِقَالِ وَمَعْنَى بَاطِنًا أَنَّهُ يَأْتُمُ اه قُلْتُ وَقَالَ ش ق وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَعْدَمُ الْمَامُ وَيَعْنَى قَوْلِهِمْ طَاهِرًا أَنَّهُ بَالْمَامُ وَيَعْنَى بَاطِنًا أَنَّهُ يَأْتُهُ مِ مَصْلَحَةً كَرَّفٍ شُوبِ القَابُولِ إِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةً كَرَّامِ فَيمَا أَمْرَ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ أَوْ مَكْرُوهِ فَالْوَاحِبُ بَتَأَكُدُ وَلَمْ وَلَوْ الْمُرَامِ فَيمَا أَمْرَ الْمَامُ بِنَيْنِ وَلَوْ قَالَ وَلَا اللّهُ لَمْ اللّهُ لِلْ التَّابُسِ بِهِ لَمْ يَسْفُطِ الْوَجُوبُ اهِ الْمَنْ التَّالِي لِأَمْرِهِ وَلَوْ أَمَرَ الْإِمْمَامُ بِمَنِيْءٍ وَلَوْ قَبْلَ التَّابُسِ بِهِ لَمْ يَسْفُطِ الْوُجُوبُ اهِ الْمَنْ الْمَالَةُ لِلْمُ وَلَوْ أَمْرَ الْإِمْمَامُ لِمَنْ فِي وَلَوْ قَبْلَ التَّذَةُ وَلَوْ قَبْلَ التَّالِسُ بِهِ لَمْ يَسْفُطِ الْوَجُوبُ الْمُ

(Kasus dari al-Kurdi). Wajib mematuhi perintah Imam -kepala pemerintahan- dalam setiap hal yang menjadi kewenangannya. Seperti penyerahan zakat harta *zhahir*. Maka bila ia tidak memiliki kewenangan, yaitu dalam hak-hak yang bersifat wajib atau sunah, maka boleh memasrahkannya kepada Imam atau mengalokasikannya sendiri

³⁶ Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, *Bughyah al-Musytarsyidin*, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 91.

kepada yang berhak. Apabila perintahnya itu mubah, makruh atau haram, maka tidak wajib mematuhinya, seperti pendapat al-Ramli. Namun dalam kitab al-Tuhfah Ibn Hajar meragukannya, kemudian ia cenderung mewajibkannya dalam setiap perintah Imam meskipun haram, namun secara lahir saja. Dan perintah yang selain haram, apabila terdapat kemaslahatan umum, maka wajib dipatuhi secara lahir dan batin. Apabila tidak maka wajib dipatuhi secara lahir saja pula. Standar wajib dan mubah tersebut berdasarkan pada keyakinan pihak yang diperintah. Sedangkan ungkapan ulama: "Secara lahir." maksudnya adalah sesorang tidak berdosa bila tidak mematuhinya. Dan maksud ulama: "Secara batin." Adalah ia berdosa bila melanggarnya. Demikian pendapat Ibn Hajar. Saya sendiri berkata: "Al-Syarqawi berkata: "Kesimpulannya, sungguh wajib mematuhi perintah imam secara lahir dan batin, dari setiap perintah yang tidak haram dan makruh. Perkara yang wajib -dengan perintahnya- menjadi lebih kuat, yang sunah menjadi wajib. Begitu pula perkara mubah bila terdapat kemaslahatan, seperti menghisap rokok bila kita memakruhkannya karena mengandung kerendahan bagi orang-orang yang berkepribadian luhur. Dan penguasa sudah memerintahkan pegawainya untuk mengumumkan ketidakbolehan menghisap rokok di pasar-pasar dan kedai-kedai kopi. Kemudian banyak orang yang tidak mematuhi dan tetap menghisapnya. Maka mereka tergolong orang yang telah melakukan maksiat. Pada zaman sekarang hukum menghisap rokok adalah haram karena perintah penguasa. Apabila penguasa memerintahkan suatu perkara kemudian ia mencabutnya, meskipun belum pernah dilakukan -oleh siapa pun-, maka hukum mematuhi perintah tersebut tidak gugur. Demikian pendapat al-Syarqawi.

3. Referensi Lain

a) Syarh al-Yaqut al-Nafis, karya Muhammad bin Ahmad al-Syatiri, h. 356.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal: 27 Maret 2010

PIMPINAN SIDANG

ttd

ttd

<u>Drs. KH. Saifuddin Amsir</u> Ketua

KH. Cholil Nafis, MA Sekretaris

Tim Perumus

1. Drs. KH. Hasjim Abbas, MHi

2. KH. A. Aziz Masyhuri

3. KH. Achmad Zakky Mubarok

4. KH. Aniq Muhammadun (JATENG)

5. KH. Yasin Asmuni (JATIM)

6. KH. A. Aminuddin Ibrahim (BANTEN)

7. KH. Ahmad Ishomuddin, MA (LAMPUNG)

8. KH. Hasanuddin Imam (JABAR/CIREBON)

9. KH. Abdullah Muhtar

10.Tuan Guru H. Ma'arif (NTB)

11.Drs. KH. Sanusi Gholoman Nasution (SUMATERA SELATAN)

BAHTSUL MASAIL AL-DINIYYAH AL-MAUDHU'IYYAH

745

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-29

Di Cipasung Tasikmalaya Pada Tanggal 1 Rajab 1415 H. / 4 Desember 1994 M.

(Al-Masail a -Mudhu'iyyah)

- 1. Pandangan dan Tanggung Jawab NU Terhadap Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan
- 2. Pandangan NU Mengenai Kepentingan Umum (Maslahah 'Ammah) dalam Konteks Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
 - 3. Pandangan dan Tanggung Jawab NU Terhadap Lingkungan Hidup

TIM PERUMUS KOMISI A (Masail Mudhu'iyyah)

KH. Ma'ruf Amin ... Ketua

KH. Amin Shaleh ... Wakil Ketua

KH. Yusuf Muhammad ... Sekretaris

Abdul Mun'im Saleh ... Wakil Sekretaris

Prof. DR. KH. Syech Hadi Permono, SH. MA. ... Anggota

Drs. Hasyim Abbas ... Anggota

H. Irfan Zidni, MA ... Anggota

H. Z. Ahmad Noh ... Anggota

KH. Afifuddin Muhajir ... Anggota

Drs. H. A. Malik Madani, MA. ... Anggota

H. Cholil Anwar ... Anggota

Cholis Fuad Ahmad ... Anggota

Drs. Lalu Sahimun Faisal, MA. ... Anggota

KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA Nomor: 02/MNU-29/1994

Tentang

PENGESAHAN HASIL SIDANG KOMISI AHKAM/ MASAIL DINIYAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

MUKTAMAR KE-29 NAHDLATUL ULAMA

Memperhatikan:

- a. Khutbah Iftitah Pelaksana Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
- b. Penjelasan tentang Materi Ahkam/Bahtsul Masail yang disampaikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
- c. Bahwa Perkembangan yang selalu terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seringkali mendesakkan perubahan dan pergeseran yang menyangkut tatanilai dan pandangan yang dianut. Untuk itu, dalam fungsinya sebagai pembimbing umat, Nahdlatul Ulama dituntut untuk senantiasa dapat memberikan respon yang positif dan kreatif.
- d. Bahwa Muktamar Nahdlatul Ulama sebagai lembaga aspirasi dan Jam'iyyah menyadari sepenuhnya perlunya memperhatikan segala perkembangan masyarakat, baik mengenai masalah-masalah sosial dan ekonomi serta pembinaan dan kesejahteraan umat.
- Permusyawaratan-permusyawaratan yang berlangsung dalam Muktamar NU ke-29 di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat.
- f. Kesepakatan yang telah diputuskan dalam Sidang Pleno Komisi Ahkam/Masail Diniyah Sabtu tanggal 29 Rabiul Akhir 1415 H/3 Desember 1994.

Mengingat

- a. Ittifaq peserta Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama dalam sidang pleno tanggal 1 Rajab 1415H/4 Desember 1994, atas laporan Komisi Ahkam/Masail Diniyyah,
- b. Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanggal 22 Desember 1993 Nomor 2055/BL01/XII/1993 tentang Penetapan Pesantren Cipasung, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat sebagai tempat penyelenggaraan Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama.

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama : Mengesahkan hasil-hasil Keputusan Sidang Komisi Ahkam/

Masail Diniyah seperti yang tertera dalam lampiran 1, lampiran

2, lampiran 3, dan lampiran 4;

Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

periode 1994-1999 untuk memimpin dan meng-koordinasikan usaha dan ikhtiar dalam rangka melaksanakan keputusan-

keputusan tersebut di atas.

Ditetapkan di: Cipasung, Tasikmalaya

Pada Tanggal: 2 Rajab 1415 H

5 Desember 1994 M

PIMPINAN SIDANG PLENO XXVIII

ttd

ttd

ttd

KH Ma'ruf Amin Ketua DR. H. S Agil Al-Munawwar, MA Wakil Ketua

war, MA Prof. H. Chatibul Umam Sekretaris

1. Pandangan dan Tanggung Jawab NU Terhadap Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحُمْدُ لِلهِ الَّذِيْ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ بِصِدْقِ نِيَّةٍ كَفَاهُ وَمَنْ تَوَسَّلَ إِلَيْهِ بِاتِّبَاعِ شَرِيْعَتِهِ قَرَّبَهُ وَأَدْنَاهُ وَمَنِ السَّنْصَرَهُ عَلَى أَعْدَاثِهِ وَحَسَدَتِهِ نَصَرَهُ وَتَوَلاَّهُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ حَافَظ دِيْنَهُ وَجَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ (أَمَّا بَعْدُ) فَقَالَ تَعَالَى فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جَفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِيْ الأَرْضِ

I. MUKADDIMAH

- 1. Negara Republik Indonesia terbentuk melalui proses pertumbuhan dan perjuangan panjang putra-putra bangsa yang penuh pengorbanan. Di dalam proses yang panjang itu, para ulama dan zu'ama sebagai bagian dari bangsa ini telah ikut meletakkan dasar-dasar kehidupan kebangsaan Indonesia yang bersatu, terjalin dalam pengelompokan yang berdasar kesukuan dan kedaerahan. Di masa perjuangan melawan penjajahan, Islam telah mendorong sikap dan wawasan keindonesiaan dan terus mengembangkannya dalam perjuangan kemerdekaan hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang melahirkan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu atas berkat rahmat Allah Swt.
- 2. Dalam proses yang panjang itu, Islam dan umat Islam di kawasan nusantara ini, telah memberikan peran aktifnya berupa amal-amal nyata, membentuk manusia yang beriman, berakhlak karimah, cerdas dan terampil, membangun kehidupan keluarga dan masyarakat secara baik. Lebih dari itu bahkan melawan dan menolak penjajah, kemudian mempersatukan manusia dan komunitas dalam suatu keluarga besar menjadi satu bangsa, dan pada akhirnya memproklamasikan kemerdekaan bangsa dan negara hingga kemudian mempertahankan serta mengisi kemerdekaan itu.
- Peranan aktif tersebut disumbangkan oleh Islam dan umat Islam di Indonesia dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab yang didasari semangat:
 - a. Mengemban tugas "kekhalifahan" -sebagaimana firman Allah:

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." (QS. al-Baqarah: 30)

b. Menegakkan 'adalah, sebagaimana firman Allah:

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (QS. al-Nisa': 135)

c.Memakmurkan bumi Allah, sebagaimana firman Allah:

Artinya: "Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya." (QS. Hud: 61)

d. Melaksanakan kewajiban "dakwah" dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana firman Allah:

Artinya: "Serulah (manusia) kepada jalan (agama) Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik". (QS. al-Nahl: 125)

Artinya: "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah." (QS. Ali Imran: 110)

Dengan demikian, negara Indonesia bagi umat Islam Indonesia wajib

- dipelihara dan dikembangkan. Indonesia adalah bangunan yang kita ikut membentuknya sejak awal.
- 4. Nahdlatul Ulama telah menegaskan hubungan antar agama dan negara dan memposisikan tanggung jawab sebagai umat beragama (Islam) dengan tanggung jawab sebagai warga negara (Indonesia) secara jelas dan proporsional. Konsep kembali ke khittah 1926, dan pandangan Nahdlatul Ulama tentang Pancasila serta faham tri ukhuwah secara terpadu: Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniyah dan Ukhuwah Basyariyah merupakan pedoman dasar yang dirasakan sangat gayut atau relevan bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi warga Nahdlatul Ulama.

II. UNIVERSALITAS ISLAM SEBAGAI LANDASAN PEMBENTUKAN WAWASAN KEBANGSAAN

- 1. Nahdlatul Ulama meyakini bahwa Islam adalah ajaran yang bersifat universal dan merupakan amanat Allah yang dapat dilaksanakan bagi seluruh kehidupan manusia di wilayah manapun di muka bumi.
- 2. Universalitas Islam merupakan "kekuatan bagi umat Islam" untuk membangun manusia dan masyarakat di mana saja di muka bumi ini, dalam corak perbedaan kondisi dan budaya masing-masing bangsa. Universalitas Islam mungkin saja memunculkan "penampilan yang berbeda" dalam pelaksanaan atau penerapan ajaran Islam sejalan dengan keberadaan dan adanya perbedaan adat dan ahwal ijtima'iyyah.
- 3. Kerangka pemikiran tersebut membuka sikap lapang dada dan toleransi dalam menyikapi berbagai kenyataan sosial bangsa Indonesia, yang berupa norma-norma kemasyarakatan, adat istiadat, kesadaran hukum dan sikap khas kemajemukan bangsa Indonesia merupakan perwujudan dan nilai itu sejalan dengan ikhtiar mengisi muatan Islam terhadap berbagai hal di atas. Pengemasan budaya lokal dengan muatan ajaran Islam dan pembudayaan dan pentradisian ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat sungguh menjadi sangat strategis dan besar andilnya dalam membangun dan membimbing masyarakat Indonesia.
- 4. Untuk itu, upaya menumbuhkembangkan pemahaman yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan memelihara tradisi keagamaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia merupakan langkah dan sekaligus sarana yang strategis dalam mempertemukan keyakinan keagamaan dan wawasan kebangsaan.

III. KETERLIBATAN NAHDLATUL ULAMA DALAM PEMBENTUKAN KEBANGSAAN INDONESIA

1. Keterlibatan Nahdlatul Ulama, sejak masih menjadi "kekuatan kultural"

yaitu ketika berbentuk kelompok orang yang memiliki kesamaan pemahaman dan tradisi keagamaan -sampai dengan menjadi "kekuatan struktural"- yaitu setelah berbentuk organisasi dengan segala kegiatan resminya- merupakan petunjuk yang sangat nyata dari komitmennya terhadap kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- 2. Keterlibatan yang tercermin dari wujud komitmen tersebut dapat kita lihat dalam berbagai rangkaian kegiatan:
 - a. Dalam ikut membentuk dan mengangkat harkat dan martabat manusia di kawasan nusantara ini, dan mendorongnya untuk senantiasa mengupayakan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, kehidupan yang manfaat dan maslahat di dunia dan akhirat.
 - b. Berperan aktif mempersiapkan kemerdekaan dan meletakkan dasar-dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
 - c. Ikut serta melawan dan menolak penjajahan, dengan menetapkan "Resolusi Jihad", yang kemudian melahirkan perlawanan rakyat secara frontal, dalam pertempuran "antara hidup dan mati" pada 10 November 1945.
 - d. Menegaskan kedudukan Pemerintah Republik Indonesia (dengan semua perangkatnya) dari segi syar'i, Nahdlatul Ulama mendukung serta mempertegas Keputusan Konferensi Alim Ulama di Cipanas tahun 1954 sebagai:

Artinya: Pemegang kekuasaan yang darurat dengan sebab mempunyai kekuatan.¹

Hal ini dilandasi kesadaran dan tanggung jawab NU terhadap adanya "pemegang kekuasaan (pemerintahan)" bagi kebutuhan pengaturan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

e. Ikut serta mengisi dan membangun masyarakat di wilayah Indonesia melalui kiprahnya dalam berbagai bidang kehidupan; keagamaan, politik kenegaraan, sosial-kemasyarakatan, pendidikan dan amr ma'ruf nahi munkar yang merupakan perwujudan dari sikap kritis dan tanggungjawabnya sebagai warga bangsa terhadap perjalanan hidup negerinya.

¹ Pemberian gelar وَلِيُ الْأَمْرِ الْفَرُرِيُّ بِالشَّوْكَةِ pada Ir. Soekarno sebagai Presiden Indonesia berdasarkan keputusan Konferensi Alim Ulama di Cipanas 1954, bukan hasil keputusan Muktamar NU. NU hanya menguatkan keputusan Konferensi Alim Ulama yang juga dihadiri oleh para ulama lintas golongan, lihat masalah Nomor: 277.

f. Rangkaian ikhtiar yang terus menerus untuk menghasilkan titik keseimbangan antara dua tuntutan, yakni tuntutan menjaga universalitas Islam dan tuntunan setempat dan sesaat yang lebih bersifat partikularistik, yang antara lain berupa kewajiban untuk senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan nasional bangsa Indonesia.

IV. WAWASAN KEBANGSAAN DAN KENEGARAAN DALAM PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA

- 1. Nahdlatul Ulama menyadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara -di mana sekelompok orang yang oleh karena berada di wilayah geografis tertentu dan memiliki kesamaan, kemudian mengikatkan diri dalam satu sistem dan tatanan kehidupan merupakan "realitas kehidupan" yang diyakini merupakan bagian dari kecenderungan dan kebutuhan yang fitri dan manusiawi. Kehidupan berbangsa dan bernegara adalah perwujudan universalitas Islam yang akan menjadi sarana bagi upaya memakmurkan bumi Allah dan melaksanakan amanatNya sejalan dengan tabiat atau budaya yang dimiliki bangsa dan wilayah itu.
- 2. Kehidupan berbangsa dan bernegara seyogyanya merupakan langkah menuju pengembangan tanggung jawab kekhilafahan yang lebih besar, yang menyangkut "kehidupan bersama" seluruh manusia dalam rangka melaksanakan amanat Allah, mengupayakan keadilan dan kesejahteraan manusia, lahir dan batin, di dunia dan di akhirat.
- 3. Dalam kaitan itu, kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah dibangun atas dasar prinsip ketuhanan, kedaulatan, keadilan, persamaan dan musyawarah. Dengan demikian maka pemerintah (umara') dan ulama -sebagai pengemban amanat kekhilafahan- serta rakyat adalah satu kesatuan yang secara bersama-sama bertanggung jawab dalam mewujudkan tata kehidupan bersama atas dasar prinsip-prinsip tersebut.
- 4. Umara' dan ulama dalam konteks di atas, merupakan pengemban tugas khilafah dalam arti menjadi pengemban amanat Allah dalam memelihara dan melaksanakan amanatNya dan dalam membimbing masyarakat sebagai upaya memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang hakiki. Dalam kedudukan seperti itu, pemerintah dan ulama merupakan ulil amri yang harus ditaati dan diikuti oleh segenap warga masyarakat. Sebagaimana firman Allah:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَنزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَخِرِ ۚ ذَالِكَ خَنْرً وَأَخْسَنُ تَأْوِيلاً ﴿ Artinya: "Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang Demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. al-Nisa': 59)

Ayat ini memberikan pedoman dasar kepada kita mengenai beberapa prinsip dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan sebagai berikut: *Pertama*, bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan ketaatan yang mutlak.

Kedua, bahwa ketaatan kepada ulil amri merupakan ketaatan yang bersifat tidak mutlak dan tergantung apakah perintah dan kebijaksanaannya sejalan dengan perintah Allah dan RasulNya.

Ketiga, bahwa ulil amri haruslah terdiri atas orang-orang yang mengemban amanat Allah.

Keempat, bahwa rakyat memiliki hak untuk melakukan kontrol dan memberikan koreksi terhadap *ulil amri* dengan menggunakan caracara yang baik, sebagaimana pernyataan Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq Ra. dalam khutbah pelantikannya:

يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ وُلِّيْتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ عِغَيْرِكُمْ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِيْنُوْنِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُ وَإِنْ أَسَانُتُ وَالطَّعِيْفُ فِيْكُمْ فَوِيُّ عِنْدِيْ حَتَّى آخُذَ لَهُ وَقَوِّمُ وَيْكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِيْ حَتَّى آخُذَ لَهُ حَقَّهُ وَالْقَوِيُّ ضَعِيْفُ عِنْدِيْ حَتَّى آخُذَ مِنْهُ الحُقَّ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى لاَ يَدَعُ أَحَدً مِنْهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدَعُهُ قَوْمٌ إِلاَّ ضَرَبَهُمُ اللهُ بِالذُّلِّ أَطِيْعُوْنِيْ مَا أَطَعْتُ اللهَ وَرَسُولُهُ وَلَا طَاعَة لِيْ عَلَيْكُمْ قُومُوا إِلَى صَلاَتِكُمْ رَحِمَكُمُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَلاَ طَاعَة لِيْ عَلَيْكُمْ قُومُوا إِلَى صَلاَتِكُمْ رَحِمَكُمُ اللهِ وَرَسُولُهُ

"Wahai saudara-saudara. Saya telah dipilih menjadi pemimpin, padahal saya bukanlah orang terbaik di antara kalian. Kalau saya berbuat baik (benar), maka dukunglah dan bantulah saya. Kalau saya berbuat salah, maka luruskanlah saya. Kebenaran (kejujuran) adalah amanat (yang harus dilaksanakan) dan kedustaan adalah pengkhianatan (yang harus dihindari). Orang lemah di antara kalian saya pandang sebagai orang kuat dan akan saya berikan haknya (yang belum didapatnya) dan orang kuat di antara kalian saya pandang sebagai orang lemah dan akan saya ambil "hak" dari mereka (untuk diserahkan kepada yang sebenarnya berhak), Insya Allah. Jangan ada seorang pun di antara kalian meninggalkan jihad (perjuangan) karena tidak ada kelompok yang meninggalkan jihad kecuali mereka akan tertimpa kehinaan dari Allah. Taatilah saya, selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau saya bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka

tidak ada kewajiban taat kepada saya. Demikianlah, bergegaslah melakukan shalat. Semoga Allah senantiasa merahmati kalian".²

Kelima, kekuatan penentu dalam setiap kemungkinan terjadinya perselisihan adalah ketentuan Allah dan Rasul-Nya.

Keenam, bahwa dalam rangka mewujudkan hal itu diperlukan adanya lembaga yang memiliki kebebasan dari (kemungkinan) tekanan dari rakyat dan/atau *ulil amri*, agar dapat memberikan keputusan yang adil.

V. WAWASAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG PLURALITAS BANGSA

- Nahdlatul Ulama sepenuhnya menyadari kenyataan tentang kemajemukan (pluralitas) masyarakat Indonesia dan meyakininya sebagai sunnatullah. Pluralitas masyarakat yang menyangkut kemajemukan agama, etnis, budaya dan sebagainya, adalah sebuah kenyataan dan rahmat dalam sejarah Islam itu sendiri sejak zaman Rasulullah.
- 2. Islam memberikan jaminan dan toleransinya dalam memelihara hubungan bersama dengan meletakkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kebersamaan dan kejujuran dalam memelihara kehidupan bersama, dengan tidak mengingkari adanya perbedaan dalam hal tertentu. Dalam wawasan yang demikianlah Nahdlatul Ulama meletakkan tata hubungan dan tiga bentuk ukhuwah di atas.
- 3. Untuk menempatkan diri dengan sebaik-baiknya di tengah kenyataan adanya pluralitas masyarakat tersebut, dengan memahami firman Allah:

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa." (QS. al-Hujurat: 13)

Nahdlatul Ulama menerapkan tiga macam pola keterpaduan tata hubungan dengan sesama manusia, yaitu:

 Tata hubungan antara sesama manusia yang berkait dengan keagamaan (keislaman), yang lazim disebut dengan "Ukhuwah Islamiyah". Ini

Ibn al-Atsir, al-Kamil fi al-Tarikh, Juz II, h. 224.

merupakan persaudaraan sesama muslim, yang tumbuh dan berkembang karena persamaan akidah/keimanan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tata hubungan ini menyangkut dan meliputi seluruh aspek kehidupan, baik aspek ibadah, mu'amalah, munakahat dan mu'asyarah (hubungan keseharian) yang pada akhirnya akan menciptakan dan menumbuhkan persaudaraan yang hakiki.

- b. Tata hubungan antara sesama manusia yang berkait dengan ikatan kebangsaan dan kenegaraan, yang lazim disebut dengan "Ukhuwah Wathaniyah". Tata hubungan ini menyangkut dan meliputi hal-hal yang bersifat mu'amalah (kemasyarakatan, kebangsaan/kenegaraan) di mana mereka sebagai warga negara memiliki kesamaan derajat, kesamaan tanggung jawab untuk mengupayakan kesejahteraan dalam kehidupan bersama.
- c. Tata hubungan antara manusia yang tumbuh dan berkembang atas dasar rasa kemanusiaan yang bersifat universal, yang lazim disebut dengan "Ukhuwah Basyariyah". Tata hubungan ini menyangkut dan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kesamaan martabat kemanusiaan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, adil dan damai.
- 4. Di dalam penerapannya, Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Wathaniyah merupakan hal yang harus mendapatkan perhatian secara seksama dan dengan penuh kearifan. Ia harus dipandang sebagai pola tata hubungan yang saling membutuhkan dan saling mendukung, harus diwujudkan serentak dan tidak boleh dipertentangkan satu dengan yang lain. Sikap mempertentangkan antara keduanya akan merugikan, baik bagi kehidupan umat Islam di Indonesia maupun kehidupan berbangsa.
- 5. Sikap yang sehat yang harus diterapkan dalam hubungannya dengan *Ukhuwah Islamiyah* dan *Ukhuwah Wathaniyah* tersebut adalah:
 - a. Sikap akomodatif, dalam arti kesediaan menampung berbagai kepentingan, pendapat dan aspirasi dari berbagai pihak.
 - b. Sikap selektif, dalam arti, adanya sikap cerdas dan kritis untuk memilih kepentingan yang terbaik dan yang ashlah (lebih memberi maslahat) serta anfa' (lebih memberi manfaat) dari beberapa pilihan/alternatif yang ada.
 - c. Sikap integratif, dalam arti kesediaan menyelaraskan, menyerasikan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dan aspirasi tersebut, secara benar, adil dan proporsional.
 - d. Sikap kooperatif, dalam arti kesediaan untuk hidup bersama dan bekerja sama dengan siapapun di dalam kegiatan yang bersifat

756

mu'amalah (hubungan sesama manusia), bukan yang bersifat ibadah.

6. Lebih dari itu, ukhuwah memang tidak hanya memerlukan keseragaman tetapi juga memerlukan kesediaan untuk "bersatu dalam keanekaragaman". Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, ketiga bentuk ukhuwah tersebut hendaknya dilakukan secara proporsional, seimbang dan menurut tuntunan syariat.

VI.PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG DASAR NEGARA PANCASILA

- Dalam kaitannya dengan perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Nahdlatul Ulama memandang bahwa Pancasila adalah konsep bersama yang disepakati oleh seluruh lapisan bangsa sebagai pedoman dalam hidup bernegara.
- Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pancasila, Nahdlatul Ulama telah menegaskan pandangannya yang jelas dan jernih, tercantum dalam "Deklarasi hubungan Pancasila dan Islam", hasil keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1983, sebagai berikut:
 - a. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia adalah prinsip fundamental namun bukan agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
 - b. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara menurut pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menjiwai sila-sila yang lain mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
 - c. Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah *aqidah* dan *syari'ah* meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.
 - d. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan kewajiban agamanya.
 - e. Sebagai konsekuensi dari sikap tersebut di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang mumi dan konsekuen oleh semua pihak.

VII. TANGGUNG JAWAB NAHDLATUL ULAMA TERHADAP KEHIDUPAN BERBANGSA DI MASA MENDATANG

1. Umat Islam Indonesia dan Nahdlatul Ulama, sejak semula memandang Indonesia sebagai "kawasan amal dan dakwah".* Indonesia adalah bagian dari bumi Allah, dan (karenanya) merupakan lahan dari ajaran Islam yang universal itu (*Kaffatan linnas* dan *Rahmatan lil 'alamin*).

Lihat putusan Bahtsul Masail al-Diniyyah al-Waqi'iyyah, nomor masalah 192 (Muktamar XI, tahun 1935 di Banjarmasin).

- 2. Indonesia dalam berbagai kondisinya, adalah rahmat yang sangat besar dari Allah Swt., yang wajib disyukuri seluhur-luhurnya, dengan melestarikannya, mengembangkannya dan membangunnya sepanjang zaman. Segala kekurangan dan kelemahannya diperbaiki, dan segala kebaikannya ditingkatkan dan disempurnakan untuk mencapai "Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur", negara adil dan makmur di bawah maghfirah (ampunan) Allah Swt.
- 3. Dalam menyongsong masa depan, Nahdlatul Ulama bertekad untuk selalu berperan besar dalam meningkatkan kualitas umat, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Dengan itulah umat Islam mampu memenuhi peran dan tanggung jawab sebagai mayoritas bangsa, sebagai khalifah Allah di bumi dan sekaligus sebagai hamba yang harus selalu mengabdi dan beribadah kepadaNya. Untuk itu, tugas Nahdlatul Ulama pada masa kini dan masa mendatang adalah:
 - a. Sebagai "kekuatan pembimbing spiritual dan moral umat dan bangsa ini", dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara -politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek- untuk mencapai kehidupan yang maslahat, sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, dunia dan akhirat.
 - b. Berusaha akan dan terus secara konsisten menjadi "Jam'iyah diniyah/ organisasi keagamaan" yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat Indonesia yang bertakwa kepada Allah Swt., cerdas, terampil, adil, berakhlak mulia, tenteram dan sejahtera.
 - c. Berperan aktif memeperjuangkan pemerataan sarana perikehidupan yang lebih sempurna demi mewujudkan keadilan sosial yang diridhai Allah Swt.
 - d. Menjadikan warga Nahdlatul Ulama dan seluruh warga bangsa Indonesia sebagai warga negara yang senantiasa menyadari tanggung jawabnya dalam membangun Indonesia secara utuh, menegakkan keadilan dan kebenaran, memelihara kemanusiaan dan kejujuran serta melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.
 - e. Menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat, mandiri, terbebas dari penjajahan dan penganiayaan oleh siapapun dalam bentuk apapun, sehingga nilai kebenaran, keadilan dan kemanusiaan, serta ajaran Islam yang lain, dapat dimasyarakatkan dan disatukan dengan dan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Indonesia adalah wilayah atau bagian dari bumi Allah, yang menjadi tempat kaum muslimin menghambakan dirinya kepada Allah Swt., dengan penuh ketenangan dan keleluasaan, dalam seluruh aspek kehidupan.

2. Pandangan NU Mengenai Kepentingan Umum (Maslahah 'Ammah) dalam Konteks Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَخْمُدُ يِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ الْمَبْعُوْثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنَ

I. MUKADDIMAH

1. Diturunkannya syariat di tengah kehidupan umat manusia adalah untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan (kemaslahatan) umat manusia di dunia dan di akhirat.

Artinya: "Kami mengutus Anda hanya bertujuan memberi rahmat bagi alam semesta". (QS. Al-Anbiya': 107)

Artinya: "Sungguh al-Qur'an itu benar-benar sebagai pemberi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang mukmin". (QS. Al-Naml: 77)

Oleh sebab itu, agar keamanan dan kesejahteraan (kemaslahatan) umat manusia di dunia dan di akhirat dapat terwujud maka segala ikhtiar yang dilakukan umat manusia di muka bumi harus selalu sejalan dengan tuntunan syariat.

- Untuk memenuhi tuntutan dan kepentingan manusia serta merespon berbagai dinamika kehidupan, maka setiap pengambilan keputusan harus memenuhi kriteria kepentingan umum (maslahah 'ammah) yang dibenarkan oleh syara'.
- 3. Penggunaan maslahah 'ammah sebagai tolok ukur dan pertimbangan untuk menetapkan suatu kebijaksanaan sangat diperlukan untuk menghindari kemungkinan penggunaan maslahah 'ammah tidak pada tempatnya, seperti untuk menuruti hawa nafsu, kesewenang-wenangan dan menuruti kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dengan menggunakan dalih untuk kepentingan umum. Dengan menggunakan maslahah 'ammah sebagai pertimbangan untuk menetapkan setiap kebijakan, maka setiap kebijakan yang ditetapkan tidak akan menimbulkan kerugian atau menyalahi kepentingan umat manusia secara luas.

II. Keadaan dan Masalah

1. Dalam suasana pembangunan yang berkembang sangat dinamik dewasa ini, selalu ditemukan istilah kepentingan umum. Meskipun disadari bahwa tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat luas dan dilakukan dengan sebanyak mungkin menyediakan sarana dan fasilitas untuk kepentingan umum, diakui atau tidak, ternyata dalam pelaksanaan pembangunan, batasan untuk kepentingan umum ini sering menjadi tidak jelas dan tidak sesuai dengan pengertian yang sesungguhnya. Kepentingan umum akhirnya berkembang dalam perspektif yang beragam; ada kepentingan umum menurut versi pengambil keputusan (umara), atau kepentingan umum menurut "selera" sebagian kecil kelompok masyarakat, dan kepentingan umum yang dipersepsi oleh masyarakat. Kenyataan yang demikian membawa akibat dan dampak negatif dalam pembangunan. Pemakaian alasan "untuk kepentingan umum" tanpa berpedoman pada maslahah 'ammah yang dibenarkan oleh syara' akan melahirkan bentuk penyimpangan terhadap hukum syariat dan tindakan sewenang-wenang terhadap kelompok masyarakat lemah oleh golongan masyarakat yang kuat.

Artinya: "Maka tegakkanlah hukum di antara manusia secara benar dan janganlah Anda mengikuti hawa nafsu, yang akan menjerumuskan Anda pada kesesatan, jauh dari jalan Allah." (QS. Shad: 26)

Artinya: "Maka siapa saja yang bertindak tirani dan memilih kehidupan dunia, maka neraka jahim layak untuk menjadi tempat tinggalnya." (QS. al-Nazi'at: 27-29)

Artinya: "Andaikan kebenaran mengikuti keinginan mereka, niscaya langit, bumi dan segala isinya akan binasa/rusak/hancur." (QS. al-Mu'minun: 71)

2. Kedudukan maslahah 'ammah sebagai dasar pertimbangan pengambilan kebajikan perlu diaktualisasikan sebagai landasan untuk menyikapi masalah sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Penggunaan maslahah 'ammah dirasakan sudah menjadi kebutuhan untuk memperkaya dan melengkapi landasan pembuatan keputusan dan kebijaksanaan dari berbagai kasus sosial yang berkaitan dengan dalih kepentingan

- umum -khususnya dalam pelaksanaan pembangunan yang sering terjadi selama ini-.
- 3. Untuk menghindari kemudharatan dan dampak negatif pembangunan, maka maslahah 'ammah dipandang penting dijadikan acuan untuk menyamakan persepsi tunggal terhadap wujud dan makna kepentingan umum dalam konteks pembangunan. Dengan maslahah 'ammah berarti masyarakat telah merealisasikan tujuan syariat.

III. Pengertian dan Ruang Lingkup

- Maslahah 'ammah adalah sesuatu yang mengandung nilai manfaat dilihat dari kepentingan umat manusia dan tiadanya nilai madharat yang terkandung di dalam, baik yang dihasilkan dari kegiatan jalbul manfa'ah (mendapatkan manfaat) maupun kegiatan daf'ul mafsadah (menghindari kerusakan).
- Maslahah 'ammah harus selaras dengan tujuan syariat, yaitu terpeliharanya lima hak dan jaminan dasar manusia (al-ushul al-khamsah), yang meliputi: keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa (dan kehormatan), keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan hak milik.

أَمَّا الْمَصْلَحَةُ فَهِيَ عِبَارَةً فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ وَلَسْنَا نَعْنِي بِهَا ذَلِكَ فَإِنَّ جَلْبَ الْمَنْفَعَةِ وَدَفْعَ مَضَرَّةٍ مَقَاصِدُ الْخُلْقِ وَصَلاَحُ الْحُلْقِ فِي يَخْصِيْلِ مَقَاصِدِهِمْ لَكِنَّنَا نَعْنِي بِالْمَصْلَحَةِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ فَصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْحُلْقِ خَمْسَةٌ وَهُو أَنْ يَخْفَظَ عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَمَقْلَحَةً وَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُو مَصْلَحَةً وَكُلُّ مَا يَقَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُو مَصْلَحَةً وَكُلُّ مَا يَقَضَمَّنَ خَفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُو مَصْلَحَةً وَكُلُّ مَا يَقَضَمَّنَ خَفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُو مَصْلَحَةً وَكُلُّ مَا يَقَضَمَّنَ خَفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُو مَصْلَحَةً وَكُلُّ مَا يَقَضَمَّنَ خَفْظَ هَذِهِ الْأَصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُو مَصْلَحَةً وَكُلُّ مَا يَقَوْمَ مَفْسَدَةً وَدُو فَعُهَا مَصْلَحَةً

Artinya: "Maslahah pada asalnya merupakan ungkapan tentang penarikan manfaat dan penolakan bahaya. Dan yang kami maksud dalam statemen ini bukan makna tersebut. Sebab penarikan manfaat dan penolakan bahaya adalah tujuan dan kebaikan manusia dalam merealisir tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan "maslahah" adalah proteksi (perlindungan) terhadap tujuan hukum (syara'). Tujuan hukum bagi manusia itu ada lima; yaitu memproteksi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Segala tindakan yang menjamin terlindunginya lima prinsip tujuan hukum itu disebut "maslahah". Sedangkan semua tindakan yang mengabaikan lima prinsip tujuan tersebut itu disebut kerusakan (mafsadah) dan menolak kerusakan itu juga maslahah."³

³ Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.) h. 174.

- Maslahah 'ammah harus benar-benar untuk kepentingan umum, tidak untuk kepentingan khusus (perorangan). Adapun sesuatu yang membawa manfaat dan meniadakan madharat hanya menguntungkan atau untuk kepentingan pihak-pihak tertentu bukanlah termasuk maslahah 'ammah.
- 4. Maslahah 'ammah tidak boleh mengorbankan kepentingan umum lain yang sederajat apalagi yang lebih besar.
- 5. Maslahah 'ammah harus bersifat haqiqiyah (nyata) dan tidak wahmiyah (hipotesis). Karena itu, untuk menentukan maslahah 'ammah harus dilakukan melalui kajian yang cermat atau penelitian, musyawarah dan ditetapkan secara bersama-sama.
- 6. Maslahah 'ammah tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil dengan dalih untuk kepentingan umum tetapi bertentangan dengan landasan tersebut di atas harus ditolak.

IV. Prinsip-Prinsip Kepentingan Umum (Maslahah 'Ammah) dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara

 Syariat Islam sangat memperhatikan terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, prinsip ini harus menjadi acuan bagi pembangunan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perwujudan kesejahteraan dan kemaslahatan umum mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa memandang keyakinan, golongan, warna kulit dan tidak bertentangan dengan syariat Islam (Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas). Maslahah 'ammah ini adalah kemaslahatan yang bermuara pada prinsip keadilan, kemerdekaan dan kesetaraan manusia di depan hukum.

Artinya: "Kami utus Anda (Muhammad), hanya untuk memberi rahmat bagi alam semesta". (QS. al-Anbiya': 107)

2. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, peranan warga masyarakat, warga bangsa dan lembaga keagamaan menjadi sangat menentukan dalam proses perumusan apa yang dimaksud dengan kemaslahatan umum. Dalam hubungan ini, maka prinsip syura sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an wa amruhum syura bainahum (urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka) menjadi sangat strategis.

Artinya: "... dan orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan

- mereka dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di internal mereka sendiri." (QS. Al-Syura: 38)
- 3. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang latar belakang agama masyarakatnya berbeda-beda, umat Islam seharusnya mampu mengartikulasikan prinsip-prinsip kemaslahatan yang digariskan oleh ajaran agamanya dalam bahasa sekaligus menurut argumentasi masyarakat. Dengan demikian maka prinsip-prinsip keagamaan yang pada mulanya (dianggap) bersifat terbatas bisa menjadi milik bersama, milik masyarakat, bangsa dan umat manusia.
- 4. Jika proses syura, di mana kemaslahatan umum ditentukan, harus melalui lembaga perwakilan, maka secara sungguh-sungguh harus diperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
 - a. Orang-orang yang duduk di dalamnya benar-benar menghayati aspirasi kemaslahatan umum dari segenap rakyat yang diwakilinya, terutama lapisan dhu'afa' dan mustadh'afin.
 - b. Untuk mengkondisikan komitmen moral dan politik orang-orang yang duduk dalam lembaga perwakilan seperti tersebut di atas, perlu pola rekruitmen yang memastikan mereka datang dari rakyat dan ditunjuk oleh rakyat dan bekerja/bersuara untuk kepentingan rakyat.
 - c. Secara struktural, lembaga perwakilan tempat persoalan bersama dimusyawarahkan dan diputuskan, benar-benar bebas dari pengaruh ataupun tekanan pihak manapun yang dapat mengganggu tegaknya prinsip kemaslahatan bagi rakyat banyak.
- 5. Kemaslahatan umum yang telah dituangkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan atau undang-undang oleh lembaga perwakilan rakyat (majlis istisyari) merupakan acuan yang harus dipedomani oleh pemerintah sebagai pelaksana secara jujur dan konsekuen. Prinsip tasharuful imam manutun bil maslahah harus dipahami sebagai prinsip keterikatan imam dalam setiap jenjang pemerintahan terhadap kemaslahatan yang telah disepakati bersama.

Artinya:"Tindakan penguasa terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan".

Artinya: "Dan Imam Syafi'i berkata: "Posisi penguasa terhadap rakyat, itu laksana kedudukan wali (pelindung) terhadap anak yatim".4

⁴ Abdurrahman al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.), h. 121.

- 6. Sementara itu rakyat secara keseluruhan, dari mana kemaslahatan dirujukkan dan untuk siapa kemaslahatan harus diwujudkan, wajib memberikan dukungan yang positif dan sekaligus kontrol yang kritis secara berkelanjutan terhadap lembaga perwakilan sebagai perumus (legislatif), lembaga pemerintahan sebagai pelaksana (eksekutif), maupun lembaga peradilan sebagai penegak hukum (judikatif).

3. Pandangan dan Tanggung Jawab NU Terhadap Lingkungan Hidup

I. MUKADDIMAH

- 1. Untuk memenuhi tugas-tugas kekhilafahan manusia di muka bumi, Allah Swt. telah menciptakan makhluk ciptaan yang beraneka ragam dan terhampar di muka bumi untuk dimanfaatkan oleh umat manusia. Lingkungan alam merupakan salah satu ciptaan yang secara langsung menjadi hajat kebutuhan umat manusia dalam menjalani kehidupan dan mempertahankan eksistensinya. Karena itu, kehidupan umat manusia tidak bisa dipisahkan dari kehidupan alam lingkungannya. Terdapat hubungan saling mempengaruhi antara perilaku kehidupan umat manusia dengan kondisi alam lingkungan.
- 2. Usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia tidak bisa hanya diwujudkan dengan membangun "aspek manusianya saja", melainkan juga harus diikuti dengan "membangun" alam lingkungan yang menjadi sumber penghidupan. Karena itu, pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup harus inheren dengan usaha pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup umat manusia. Kesadaran terhadap lingkungan harus menjadi bagian dari kesadaran manusia untuk memenuhi tuntutan agama. Sebagaimana firman Allah:

Artinya: "Dialah yang menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian

764

bertobatlah kepadaNya." (QS. Hud: 61)

3. Yang kini menjadi persoalan, sejalan dengan pertumbuhan umat manusia dan perkembangan pembangunan, mulai sering muncul problem lingkungan hidup. Lingkungan hidup kemudian banyak memperoleh perhatian karena sudah menyangkut kondisi pemukiman, lingkungan kerja, pencemaran udara, tanah dan air. Pencemaran menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1984 adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup atau zat energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Meningkatnya masalah yang muncul dari soal lingkungan hidup seiring dengan pesatnya industrialisasi dan pengguna produk berteknologi tinggi. Demikian juga perkembangan masyarakat di negara-negara berkembang juga sering menimbulkan masalah lingkungan hidup akibat kemiskinan yang memaksa mereka merusak lingkungan alam karena tuntutan hidup. Frekuensi, ruang lingkup dan kualitas masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup dari waktu ke waktu terus meningkat. Kondisi seperti itu telah diperingatkan oleh Allah dalam firman-Nya:

يَرْجِعُونَ ٢

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (QS. al-Rum: 41)

Al-fasad (kerusakan) yang timbul akibat ulah manusia itu dapat berupa kekeringan, kematian, banyaknya kebakaran, banjir dan tercabutnya berkah serta banyaknya bencana.

- 4. Dalam prakteknya ternyata ajaran agama dan ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup belum sepenuhnya dilaksanakan oleh tokoh-tokoh agama, meskipun ajaran dan ketentuannya cukup mampu mengatasinya. Ajaran agama dan perangkat aturan formal seakan-akan menjadi sebuah pesan moral yang tidak efektif dan tidak memiliki kekuatan untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran lingkungan.
- Lingkungan hidup dewasa ini telah menjadi pandangan hidup dan isu global dari masyarakat dunia. Bisa dipahami jika masalah lingkungan

- hidup menjadi isu dan perhatian masyarakat dunia karena dewasa ini ada gejala terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pelaksanaan pembangunan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan alam dan perilaku manusia yang tidak mendukung usaha pelestarian lingkungan hidup.
- 6. Melihat permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi umat manusia dewasa ini, dan demi kelangsungan kehidupan umat manusia di masa mendatang, maka Nahdlatul Ulama memandang perlu masalah lingkungan hidup dijadikan fokus perhatian umat manusia, terutama masyarakat Indonesia. Dalam rangka itu, perlu ada pengkajian dan pemikiran mengenai fatwa agama yang menjelaskan bagaimana implikasi hukumnya bagi umat manusia yang melakukan perusakan terhadap lingkungan hidup.

II. PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA TENTANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Lingkungan hidup merupakan karunia Allah Swt. dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Kondisi lingkungan hidup bisa memberi pengaruh terhadap kondisi kehidupan umat manusia. Kualitas lingkungan hidup juga sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan umat manusia. Karena itu, tanggungjawab menjaga dan melestarikan lingkungan hidup menyatu dengan tanggungjawab manusia sebagai makhluk Allah yang bertugas memakmurkan bumi. Lingkungan hidup diciptakan Allah sebagai karunia bagi umat manusia dan mengandung maksud baik yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah:

رَبُّنَا مَا خَلَقْتَ هَنذَا بَنطِلاً

Artinya: "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau jadikan semua (alam) ini dengan sia-sia." (QS. Ali Imran: 191)

2. Hubungan manusia dengan alam sekitarnya menurut ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan hubungan yang dibingkai dengan akidah, yakni konsep kemakhlukan yang sama-sama patuh dan tunduk kepada al-Khaliq. Dalam konsep kemakhlukan ini manusia memperoleh konsesi dari Maha Pencipta untuk memperlakukan alam semesta dengan dua macam tujuan. Pertama, al-intifa' (pendayagunaan), baik dalam arti mengkonsumsi langsung maupun dalam arti memproduksi. Kedua, al-i'tibar (mengambil pelajaran) terhadap fenomena yang terjadi dan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya, juga hubungan antara alam itu sendiri (ekosistem), baik yang berakibat konstruktif

(ishlah) maupun berakibat destruktif (ifsad). Intifa' terhadap kekayaan alam yang tersedia, banyak disampaikan ayat al-Qur'an, seperti surat al-Nahl ayat 10-11:

هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لَكُر مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۞ يُنْبِتُ لَكُر بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلنَّمَرَتِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞

Artinya: "Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit untuk Anda. Sebagian air itu menjadi minuman dan sebagian yang lain (berfungsi) sebagai penyubur pepohonan (di tempat yang subur) itulah Anda menggembala ternak. Dengan air itu Dia menumbuhkan tanaman (pertanian); Zaitun, kurma, anggur dan segala jenis buah-buahan. Sungguh yang demikian itu benar-benar menjadi pertanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berkenan berfikir". (QS. al-Nahl: 10-11)

وَتَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ مُّبَرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِمِ جَنَّىتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ﴿ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَسَ لِمَّا طَلْعٌ نَّضِيدٌ ﴾ رِّزْقًا لِلْعِبَادِ ۚ وَأَحْيَيْنَا بِمِ بَلْدَةً مُّيتًا ۚ كَذَ لِكَ ٱلْخَرُوجُ ۞

Artinya: "Dan Kami turunkan air yang diberkati (banyak manfaatnya) dari langit, lalu dengan air itu Kami tumbuhkan pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba (Kami). Dan dengan air itu Kami hidupkan tanah yang mati (kering-kerontang), seperti itulah terjadinya kebangkitan kembali (pada hari kiamat nanti)". (QS. Qaf: 9-11)

فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَىٰ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۗ أَنَّا صَبَيْنَا ٱلْمَاءَ صَبَّا ۞ ثُمَّ شَقَفْنَا ٱلأَرْضَ شَقَّا ۞ فَأَنْبَنْنَا فِيهَا حَبًا ۞ وَعِنَبًا وَفَضْبًا ۞ وَزَيْتُونَا وَنَخْلاً ۞ وَحَدَآبِقَ غُلْبًا ۞ وَفَلِكِهَةً وَأَبًا ۞ مَّنَعًا لَكُرُ وَلِأَتَعْمِكُ ۞

Artinya: "Maka hendaklah manusia itu memperhatikan (berpikir serius) makanannya. Sungguh Kami benar-benar telah menuangkan air (dari langit). Kemudian Kami belah bumi ini dengan sungguh-sungguh, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu; anggur, dan sayur-sayuran, Zaitun dan pohon kurma (menjadi) kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rerumputan, untuk kesenangan kalian dan binatang-binatang ternak kalian." (QS. 'Abasa: 24-32)

Demikian juga banyak hadis Nabi yang menganjurkan upaya

pelestarian lingkungan hidup dan memandang upaya pelestarian lingkungan hidup sebagai ibadah yang memperoleh pahala di akhirat, seperti yang diriwayatkan Imam Muslim dan Ahmad:

Artinya: "Jika kiamat telah tiba, dan di antara salah seorang di antara kalian ada tanah lapang, dan ia mampu bertindak untuk menanaminya, maka tanamilah, sebab dia akan mendapatkan pahala dengan tindakannya itu." (HR. Ahmad)

- 3. Sebagai ciptaan Allah yang mengandung tujuan dan maksud baik, maka keberadaan lingkungan hidup harus dilihat sebagai bagian dari amanah Allah yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk tujuantujuan baik dan dengan cara yang sebaik-baiknya pula. Maka atas dasar itu Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa hubungan antara kehidupan umat manusia dengan kondisi lingkungan hidup mengandung implikasi hukum dan memiliki konsekuensi hukum. Manusia dituntut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup dan sebaliknya, diharamkan merusak, menelantarkan dan memanfaatkan lingkungan hidup untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan syariat Allah.
- 4. Lingkungan hidup menurut pandangan Nahdlatul Ulama bukan saja merupakan masalah yang berdimensi muamalah, melainkan juga menjadi masalah yang memiliki dimensi teologis karena sifat dan keterkaitannya dengan tugas-tugas sebagai makhluk di muka bumi. Dari sudut pandangan ajaran agama telah banyak ajaran tentang lingkungan hidup. Ajaran agama Islam tentang prinsip keseimbangan dan hidup bersih merupakan doktrin ajaran agama yang sudah sangat dikenal dan dipelajari umat Islam. Demikian juga ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup.
- 5. Nahdlatul Ulama berpandangan, bahwa tindakan pencemaran lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai mafasid (kerusakan) yang dalam prinsip ajaran Islam harus dihindari dan ditanggulangi. Karena itu, segala ikhtiar umat manusia untuk membangun kesejahteraan manusia, harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Dengan demikian tindakan perusakan lingkungan hidup dan para pelaku perusakan lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai melanggar syariat Allah dan bertentangan dengan hukum. Sebagaimana firman Allah:

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ

Artinya: "Dan apabila ia berpaling (dari kamu, Muhammad), ia berjalan di muka bumi untuk bertindak merusak di bumi (ini) dan menghancurkan tanaman dan binatang-binatang ternak. Dan Allah tidak menyukai kebinasaan." (QS. al-Baqarah: 205)

Dan firman Allah:

Artinya: "Dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika betul kalian orang yang beriman". (QS. al-A'raf: 85)

Dalam konteks yang berbeda-beda, al-Qur'an menyatakan terjadinya al-fasad fil-ardh (kerusakan di muka bumi) karena beberapa sebab:

- a. Perbuatan fisik yang menyimpang dari kewajaran dan tanggung jawab, yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, baik karena tindakan militer (peperangan) maupun tindakan lainnya.
- b.Perbuatan maksiat, karena tindakan atau anjuran kemaksiatan kepada Allah akan selalu membawa dampak pada kerusakan di bumi.

III. LANGKAH-LANGKAH YANG HARUS DITEMPUH UNTUK MENANGGULANGI PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP

Menghadapi masalah lingkungan hidup yang telah menjadi persoalan dalam kehidupan umat manusia sehari-hari, dan berpedoman pada pandangan dasar Nahdlatul Ulama dalam melihat masalah lingkungan hidup, maka Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama memandang perlunya ditegakkan sejumlah prinsip dan sikap-sikap yang tegas dalam menyelesaikan setiap masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Prinsip dan langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masalah lingkungan hidup harus dipandang bukan lagi hanya merupakan masalah politis atau ekonomis saja, melainkan juga menjadi masalah teologis (diniyah), mengingat dampak kerusakan lingkungan hidup juga memberi ancaman terhadap kepentingan ritual agama dan kehidupan umat manusia. Karena itu, usaha pelestarian lingkungan hidup harus dipandang dan disikapi sebagai salah satu tuntutan agama yang wajib dipenuhi oleh umat manusia, baik secara individual maupun secara kolektif. Sebaliknya, setiap tindakan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai perbuatan maksiat (munkar) yang diancam dengan hukuman.

Hukum Islam sudah menyatakan bahwa hukum mencemarkan lingkungan baik udara, air dan tanah serta keseimbangan ekosistem jika membahayakan adalah haram dan termasuk perbuatan kriminal (jinayat) dan kalau terdapat kerusakan maka wajib diganti oleh pencemar.

Ungkapan "la dharara wala dhirara", maksudnya adalah secara umum tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan bagi seseorang atas sesuatu yang berada dalam kekuasaannya, baik berupa hak milik atau manfaat, dan siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan saudaranya sesama muslim.⁵

Artinya: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. (QS. al-A'raf: 56)

Artinya: "Allah Ta'ala melarang perusakan di bumi, dan yang paling berbahaya adalah perusakan setelah adanya perbaikan. Sebab, jika segala sesuatu berjalan secara benar, kemudian terjadi tindakan perusakan setelahnya, tentu hal itu paling membahayakan bagi manusia." 6

Artinya: "Dari Nabi Saw. ia bersabda: "Janganlah salah seorang di antara kamu kencing di air yang diam (tidak mengalir), kemudian mandi darinya." Perhubung pencemaran lingkungan termasuk perbuatan maksiat yang tak ditentukan besar kecilnya dan bentuk hukumnya, maka ia termasuk dalam kategori jarimah ta'zir sehingga penetapan hukumnya diserahkan kepada ulil amri dengan memperhatikan kerusakan yang ditimbulkan.

Pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya pembangunan bidang industri, perlu dijamin kelangsungannya. Namun demikian, pembangunan bidang industri harus dapat menghindari pengaruh sampingan yang

770

⁵ Abdullah bin Sulaiman, al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fawa'id al-Bahiyah pada al-Asybah wa al-Nadzair, (Indonesia: dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.), h. 114.

⁶ Ibn al-Katsir, "Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, (...: Dar Thayyibah, 1999), Juz III, h. 429.

Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1392 H), Juz, III, h. 197.

dapat merugikan umat manusia secara luas, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, atau paling tidak dapat menekan pengaruh negatif seminim mungkin. Jika muncul kebutuhan untuk kepentingan pembangunan yang menuntut dilakukannya eksploitasi alam, maka harus ada jaminan bahwa hal itu benar-benar mengandung manfaat dan *maslahah* bagi kepentingan umat manusia dan tidak mendatangkan mafsadah di kemudian hari.

- 3. Sebagai bangsa yang ingin mengejar ketertinggalan dan merebut kemajuan, pembangunan iptek merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi. Tetapi pembangunan iptek yang kita kehendaki adalah iptek yang bukan bebas nilai (value free) yang seolah-olah berada sendirian di ruang hampa. Industrialisasi dapat dipandang sebagai perwujudan dari konsesi taskhir (penguasaan) kekayaan alam seperti yang dijanjikan Allah dalam kitab suci, tetapi industrialisasi yang kita inginkan adalah yang bertanggungjawab kepada Allah yang memberi kekayaan alam dan kepada kesejahteraan serta martabat umat manusia. Isyarat dari industrialisasi seperti itu adalah dinamik tetapi efisien, produktif tetapi tidak ceroboh, kreatif tanpa keserakahan dan rasional tanpa kehilangan hati nurani.
- 4. Kegiatan dakwah Islamiah seharusnya juga diarahkan untuk mengembangkan kepedulian masyarakat terhadap masalah lingkungan hidup. Perlu dilakukan penyadaran secara terus menerus bahwa tanggung jawab penyelamatan lingkungan hidup merupakan bagian integral dari konsep kekhilafahan manusia di muka bumi secara utuh. Dalam konteks ini para ulama dan tokoh masyarakat seyogyanya menempatkan diri sebagai teladan dan panutan dalam pembangunan lingkungan hidup. Materi dakwah yang mengetengahkan pesanpesan agama, seperti pengertian dosa, maksiat, haram dan sejenisnya juga harus ditujukan kepada para perusak lingkungan. Demikian juga pengertian tentang pahala, amal jariyah, wajib dan sejenisnya, harus disampaikan bagi orang yang berikhtiar dan melakukan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- 5. Pola hidup yang boros (dalam arti yang luas) dan rakus sehingga orang harus mengurus kekayaan alam secara berlebih-lebihan dan tidak bertanggung jawab dengan dalih untuk pembangunan atau kepentingan ekonomi merupakan kenyataan hidup yang harus ditolak, baik karena alasan agama maupun pertimbangan sosial. Sebaliknya perlu ditumbuhkan kesadaran untuk mengembangkan pola hidup yang hemat dan sederhana serta berorientasi pada masa depan dan menjamin keselamatan hidup umat manusia dan alam.

- 6. Perlu dilakukan upaya sinkronisasi kegiatan pembangunan dengan usaha pengembangan lingkungan hidup. Selain itu juga perlu ada pendekatan sosial budaya kepada masyarakat melalui pendidikan, penerangan dan bimbingan yang menjelaskan tentang lingkungan hidup, manfaat lingkungan hidup serta mafsadatnya jika lingkungan hidup tidak dilestarikan.
- 7. Untuk membentuk kesadaran dan sikap hidup masyarakat yang bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup diperlukan pendekatan secara yuridis dengan menciptakan peraturan perundang-undangan dan penegakan peraturan tersebut secara tegas dan konsisten.[]

HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA TENTANG MASAIL AL-DINIYYAH AL-MAUDHU'IYYAH 16-20 Rajab 1418 H/17-20 Nopember 1997 M Di Pon Pes QOMARUL HUDA Bagu, Pringgarata Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat

- 4. Nasbul Imam dan Demokrasi
- 5. Al-Huquq al-Insaniyyah fi al-Islam (Hak Asasi Manusia dalam Islam)
 - 6. Kedudukan Wanita dalam Islam
 - 7. Reksadana

TIM PERUMUS

Ketua:

KH. Cholil Bisri

Sekretaris:

DR. H. Said Aqil Siradj, MA

Anggota-anggota:

- KH. Yusuf Muhammad LC
- 2. DR. KH. Nurhadi Iskandar Albarsany, MA
 - 3. KH. Moh. Irfan Zidny, MA
 - 4. KH. Mahfudz Thoha
 - KH. Hanif Muslich, SH
 - 6. KH. Hamdun Masturo
 - 7. Hj. Machrusah Taufiq
 - 8. Hj. Najihah Muhtarom

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M

Nomor: 002/Munas/11/1997

Tentang

NASBUL IMAM DAN DEMOKRASI

بسم الله الرَّحْن الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NU

- Memperhatikan: a. Khutbah Iftitah Pelaksana Rais Aam PBNU pada pembukaan Munas dan Konbes NU tanggal 16 Rajab 1418 H/ 17 Nopember 1997.
 - b. Pandangan umum dan pendapat para peserta Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tanggal 17 Nopember 1997.
 - c. Permusyawaratan yang berlangsung selama Munas NU tahun 1997.
 - d. Kesepakatan yang telah diputuskan dalam sidang Komisi B tentang Nasbul Imam dan Demokrasi.

Mengingat

- a. Anggaran Dasar NU Bab IX Pasal 18 ayat b dan ART NU bab XIX Pasal 51 ayat 1 s.d.7;
- b. Surat Keputusan PB NU Nomor: 167/A.II.04.e/VIII/1997 tanggal 3 Rab. Akhir 1418 H/7 Agustus 1997.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

Mengesahkan Hasil Sidang Komisi B, tentang NASBUL

IMAM dan DEMOKRASI, seperti terlampir.

Kedua

Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul serta perangkatnya di seluruh Indonesia untuk melaksanakan keputusan ini, dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan

amanat Munas.

Lombok: 19 Rajab 20 Nopember 1994 M

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M PIMPINAN SIDANG PLENO

Ketua

:

Sekretaris

ttd

ttd

KH. MA'RUF AMIN

DR. H. SAID AQIL SIRADJ, MA

4. Nasbul Imam dan Demokrasi

 Menurut pandangan Islam, pada hakikatnya kekuasaan adalah amanat Allah yang diberikan kepada seluruh manusia yang kemudian oleh manusia hanya boleh diberikan kepada pihak lain yang ahli untuk mengemban dan memikulnya.

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit dan bumi." (QS. al-Ahzab: 72)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." (QS. al-Nisa': 58)

- 2. Bahwa keahlian memegang amanat kekuasaan menyaratkan kemampuan, kejujuran, keadilan dan kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat.
- Proses pengangkatan kepemimpinan negara sebagai pengemban dan pemikul amanat kekuasaan menurut Islam dapat dilakukan dengan beberapa alternatif/cara yang disepakati oleh rakyat sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah.
- 4. Menurut wacana faham Aswaja, bahwa membangun negara/imamah adalah wajib syar'i, hal tersebut didasarkan kepada dalil seperti di bawah ini:

Dalil dari nash al-Qur'an sebagai berikut:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. al-Nisa': 58)

يَتَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُوا آللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱلأَثْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَحْرِ ۚ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Lalu jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnah)Nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. al-Nisa: 59)

Dalil dari nash hadis sebagai berikut:

"Barangsiapa yang meninggal, tanpa pernah melakukan baiat (janji loyal pada pemimpin), ia mati secara jahiliyah." (HR. Muslim)

"Apabila amanat disia-siakan, maka tunggulah masa kehancurannya. Nabi ditanya seseorang: "Bagaimana caranya menyia-nyiakan amanat itu?" Rasulullah menjawab: "Apabila suatu pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya." (HR. Bukhari)

"Jika ada tiga orang bepergian, maka hendaklah mereka memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi pemimpin." (HR. Abu Dawud)

- 5. Negara dimaksud harus dibangun di atas nilai-nilai luhur keislaman yang antara lain meliputi: al-'adalah (keadilan), al-amanah (kejujuran), al-syura (kebersamaan).
- 6. Untuk merealisasikan nilai-nilai luhur tersebut diperlukan wujudnya pemerintahan yang demokratik, bersih dan berwibawa.
- Untuk melahirkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa diperlukan adanya kesadaran dan keinginan yang kuat dari rakyat untuk bersamasama melahirkannya.
- 8. Negara yang demokratik yang merupakan perwujudan syura dalam Islam menuntut para pemimpinnya bukan saja bersedia untuk dikontrol, tetapi menyadari sepenuhnya, bahwa kontrol sosial merupakan kebutuhan kepemimpinan yang memberi kekuatan moral untuk meringankan beban dalam mewujudkan pemerintah yang adil, bersih dan berwibawa.
- 9. Mengamanatkan kepada PBNU untuk:
 - Rumusan yang substansial ini supaya dituangkan dalam rumusanrumusan yang utuh.
 - b. Terus mengupayakan pengembangan studi fiqh siyasah 'ala Ahlussunnah wal Jama'ah.

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M

Nomor: 003/Munas/11/1997

Tentang

AL-HUQUQ AL-INSANIYAH FIL ISLAM (Hak Asasi Manusia dalam Islam)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NU NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M

Memperhatikan:

- a. Khutbah Iftitah Pelaksana Rais Aam PBNU pada pembukaan Munas dan Konbes NU tanggal 16 Rajab 1418 H/17 Nopember 1997
- b. Pandangan umum dan pendapat para peserta Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tanggal 17 Nopember 1997
- c. Permusyawaratan yang berlangsung selama Munas NU tahun 1997.
- d. Kesepakatan yang telah diputuskan dalam sidang Komisi B tentang al-Huquq al-Insaniyyah fi al-Islam (Hak Asasi Manusia dalam Islam)

Mengingat

- a. Anggaran Dasar NU Bab IX Pasal 18 ayat b dan ART NU bab XIX Pasal 51 ayat 1 s.d.7;
- b. Surat Keputusan PB NU Nomor. 167/A.II.04.e/VIII/1997 tanggal 3 Rab. Akhir 1418 H/7 Agustus 1997.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

:

Mengesahkan Hasil Sidang Komisi B, tentang al-Huquq al-Insaniyyah fi al-Islam (Hak Asasi Manusia dalam Islam),

seperti terlampir.

Kedua

Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul serta perangkatnya di seluruh Indonesia untuk melaksanakan keputusan ini, dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan amanat Munas.

> Lombok: 19 Rajab 1415 H 20 Nopember 1994 M

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M

PIMPINAN SIDANG PLENO

Ketua ttd

Sekretaris ttd

KH MA'RUF AMIN

DR. H. SAID AQIL SIRADJ, MA

5. Al-Huquq al-Insaniyyah fi al-Islam (Hak Asasi Manusia Dalam Islam)

Islam merupakan ajaran yang menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi. Bahkan al-Qur'an menjamin adanya hak pemuliaan dan pengutamaan manusia. Firman Allah Swt.:

"Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan." (QS. al-Isra': 70)

Dengan demikian manusia memiliki hak al-karamah dan hak al-fadhilah. Apalagi misi Rasulullah adalah rahmatan lil alamin, di mana kemaslahatan/kesejahteraan merupakan tawaran untuk seluruh manusia dan alam semesta.

Elaborasi (pengejawantahan) misi di atas disebut sebagai ushul al-khams (lima prinsip dasar) yang melingkupi hifzh al-din, hifzh al-nafs wa al'irdh, hifzh al-aql, hifzh al-nasl dan hifzh al-mal.

Hifzh al-din: memberikan jaminan hak kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya (al-din). Sementara itu Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas (kelompok) agama yang bersifat lintas etnis, oleh karena itu Islam menjamin kebebasan beragama, dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan agama lainnya.

Hifzh al-nafs wa al-'irdh: memberikan jaminan hak atas setiap jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan, dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.

Hifzh al-'aql: adalah adanya suatu jaminan atas kebebasan berekspresi, kebebasan mimbar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan ekstasi, minuman keras dan lain-lain.

Hifzh al-nasl: Merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan), jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas.

Free sex, zinah menurut syara', homoseksual, adalah perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan hifzh al-nasl.

Hifzh al-mal: dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilikan harta benda, properti dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, oligopoli, monopsoni dan lain-lain.

Lima prinsip dasar (al-huquq al-insaniyyah) di atas sangatlah relevan dan bahkan seiring dengan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia (HAM). Di samping itu, Islam sebagai agama tauhid, datang untuk menegakkan kalimah Laa ilaaha illallaah, tiada Tuhan selain Allah. Suatu keyakinan (aqidah) yang secara transendental, dengan menisbikan tuntutan ketaatan kepada segenap kekuasaan duniawi serta segala perbudakan manusia dengan berbagai macam jenis kelamin, status sosial, warna kulit dan lain sebagainya. Keyakinan semacam ini jelas memberikan kesuburan bagi tumbuhnya penegakan HAM melalui suatu kekuasaan yang demokratis.

Oleh karena itu, MUNAS Alim Ulama merekomendasikan kepada PBNU agar rumusan-rumusan HAM yang bersifat substansial ini, menjadi sebuah konsep yang utuh untuk memperjuangkan terwujudnya al-huquq al-insaniyyah (HAM) secara aktif dan sungguh-sungguh di bumi Indonesia.[]

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M

Nomor: 004/Munas/11/1997

Tentang

KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NU NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M

Memperhatikan:

- a. Khutbah Iftitah Pelaksana Rais Aam PBNU pada pembukaan Munas dan Konbes NU tanggal 16 Rajab 1418 H/17 Nopember 1997
- Pandangan umum dan pendapat para peserta Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tanggal 17 Nopember 1997
- c. Permusyawaratan yang berlangsung selama Munas NU tahun 1997.
- d. Kesepakatan yang telah diputuskan dalam sidang Komisi A (KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM).

Mengingat

- a. Anggaran Dasar NU Bab IX Pasal 18 ayat b dan ART NU bab XIX Pasal 51 ayat 1 s.d.7;
- Surat Keputusan PB NU Nomor: 167/A.II.04.e/VIII/1997 tanggal 3 Rab. Akhir 1418 H/7 Agustus 1997.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

Mengesahkan Hasil Sidang Komisi A, tentang Kedudukan

Wanita dalam Islam, seperti terlampir.

Kedua

Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul serta perangkatnya di seluruh Indonesia untuk melaksanakan keputusan ini, dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan

amanat Munas.

Lombok: <u>19 Rajab 1415 H</u> 20 Nopember 1994 M

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M PIMPINAN SIDANG PLENO

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

KH MA'RUF AMIN

DR. H. SAID AQIL SIRADJ, MA

6. Kedudukan Wanita Dalam Islam

مَكَانَةُ الْمَزْأَةِ فِي الْإِسْلاَمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

MUQADDIMAH

Wanita dalam Islam mendapat tempat yang mulia, tidak seperti dituduhkan oleh sementara masyarakat, bahwa Islam tidak menempatkan wanita sebagai subordinat dalam tatanan kehidupan masyarakat. Kedudukan mulia kaum wanita itu ditegaskan dalam banyak hadis, di antaranya:

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"Surga berada di bawah telapak kaki Ibu." (HR. Muslim)1

"Seorang sahabat datang kepada Nabi Saw.. Kemudian bertanya: "Siapakah manusia yang paling berhak untuk dihormati?", Nabi menjawab:"Ibumu", kemudian siapa Wahai Nabi?, "Ibumu" jawab Nabi lagi, "kemudian siapa lagi Wahai Nabi?:" Ibumu" kemudian siapa Wahai Nabi? "bapakmu", jawab Nabi kemudian." (HR. Bukhari Muslim)

Islam memberikan hak wanita yang sama dengan laki-laki untuk memberikan pengabdian yang sama kepada agama, nusa, bangsa dan negara. Ini ditegaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadis antara lain sebagai berikut:

"Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab." (QS. al-Mukmin: 40)

Abdurrauf al-Munawi, Faidh al-Qadir, (Riyadh: Maktabah al-Imam al-Syafi'i, 1988), Juz I, h. 966.

"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain." (QS. Ali Imran: 195)

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik." (QS. al-Nahl: 97)

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْقَنِيِينَ وَٱلْقَنِيتِينَ وَٱلْقَنِيتِينَ وَٱلْمُتَصَدِقِينَ وَٱلْخَسْعِينَ وَٱلصَّيِمِينَ وَٱلصَّيِمِينَ وَٱلْصَّيِمِينَ وَٱلْخَسْطِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَسْفِطَتِ وَٱلْمُتَصَدِقِينَ اللهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا
وَالذَّكَ كِينَ الله كَيْمُ وَالذَّكِرَاتِ أَعَدٌ الله لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS. Al-Ahzab: 35)

"Sesungguhnya perempuan itu laksana saudara kandung laki-laki." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi)

"Manusia itu sama dan setara laksana gigi sisir." (HR. Ahmad dan Abu al-Zubair)

Ayat dan hadis di atas adalah sebuah realita pengakuan Islam terhadap hak-hak wanita secara umum dan anugerah kemuliaan dari Allah Swt. Persoalan yang muncul kemudian bahwa sekalipun Islam telah mendasari penyadaran integratif tentang wanita tidak berbeda dalam beberapa hal dengan laki-laki, pada kenyataannya prinsip-prinsip Islam tentang wanita tersebut telah mengalami distorsi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak manusia yang mencoba mengingkari kelebihan yang dianugerahkan Allah Swt. kepada wanita.

Pengaruh kultur yang masih bersifat patrilineal dan kenyataan pada tingkat perbandingan proporsional antara laki-laki dan wanita ditemukan bahwa laki-laki (karena kondisi, sosial dan budaya) memiliki kelebihan atas wanita. Yang pada gilirannya telah menafikan atau mengurangi prinsip-prinsip mulia tentang wanita yang kemudian menjadi prinsip-prinsip yang kemudian tidak diperhatikan. Oleh karena itulah maka di tengah-tengah arus perubahan yang menggejala di berbagai belahan dunia yang pada prinsipnya menuntut kembali hak-hak sebenarnya dari wanita, maka umat Islam perlu meninjau dan mengkaji ulang anggapananggapan yang merendahkan wanita karena distorsi budaya, berdasarkan prinsip-prinsip kemuliaan Islam atas wanita.

Harus diakui bahwa memang ada perbedaan fungsi laki-laki yang disebabkan oleh perbedaan kodrati/fitri. Sementara di luar itu ada peran-peran non kodrati dalam kehidupan bermasyarakat yang masing-masing (laki-laki dan perempuan) harus memikul tanggungjawab bersama dan harus dilaksanakan dengan saling mendukung satu sama lain. Sebagaimana firman Allah Swt.:

"Dan orang-orang laki-laki dan perempuan sebagian mereka (adalah) penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar..." (QS. al-Taubah: 71)

Peran domestik wanita yang hal itu merupakan kesejatian kodrat wanita seperti; sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anakanak mereka, hamil, melahirkan, menyusui, dan fungsi-lain dalam keluarga yang memang tidak mungkin digantikan oleh laki-laki, Firman Allah Swt.:

"Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki." (QS. As-Syura :49)

Dan Islam pun telah mengatur hak dan kewajiban wanita dalam hidup berkeluarga yang harus diterima dan dipatuhi oleh masing-masing (suami istri).

Akan tetapi ada peran publik wanita, di mana wanita sebagai anggota masyarakat, wanita sebagai warga negara yang mempunyai hak bernegara dan berpolitik, telah menuntut wanita harus melakukan peran sosialnya yang lebih tegas, transparan dan terlindungi.

Dalam konteks peran-peran publik menurut prinsip-prinsip Islam, wanita diperbolehkan melakukan peran-peran tersebut dengan konsekuensi bahwa ia dapat dipandang mampu dan memiliki kapasitas untuk menduduki peran sosial dan politik tersebut.

Dengan kata lain bahwa kedudukan wanita dalam proses sistem negara-bangsa telah terbuka lebar, terutama perannya dalam masyarakat majemuk ini, dengan tetap mengingat bahwa kualitas, kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas bagaimanapun, harus menjadi ukuran, sekaligus tanpa melupakan fungsi kodrati wanita sebagai sebuah keniscayaan.

Partisipasi wanita dalam sektor non kodrati merupakan wujud tanggungjawab NU dalam ikut memprakarsai transformasi kultur, kesetaraan yang pada gilirannya mampu menjadi dinamisator pembangunan nasional dalam era globalisasi dengan memberdayakan wanita Indonesia pada proporsi yang sebenarnya.[]

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA TÁHUN 1418 H/1997 M

Nomor: 005/Munas/11/1997

Tentang

REKSADANA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NU NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M

Memperhatikan:

- a. Khutbah Iftitah Pelaksana Rais Aam PBNU pada pembukaan Munas dan Konbes NU tanggal 16 Rajab 1418 H/17 Nopember 1997
- Pandangan umum dan pendapat para peserta Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama tanggal 17 Nopember 1997
- Permusyawaratan yang berlangsung selama Munas NU tahun 1997.
- Kesepakatan yang telah diputuskan dalam sidang Komisi B (REKSADANA).

Mengingat

- a. Anggaran Dasar NU Bab IX Pasal 18 ayat b dan ART NU bab XIX Pasal 51 ayat 1 s.d.7;
- Surat Keputusan PB NU Nomor: 167/A.II.04.e/VIII/1997 tanggal 3 Rab. Akhir 1418 H/7 Agustus1997.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

Mengesahkan Hasil Sidang Komisi B, tentang REKSADANA,

seperti terlampir.

Kedua

Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul serta perangkatnya di seluruh Indonesia untuk melaksanakan keputusan ini, dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan amanat Munas.

Lombok: 19 Rajab 1415 H 20 Nopember 1994 M

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA TAHUN 1418 H/1997 M PIMPINAN SIDANG PLENO

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

KH MA'RUF AMIN

DR. H. SAID AQIL SIRADJ, MA

7. Reksadana

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

I. MUKADDIMAH

Menghadapi globalisasi pada abad 21 umat Islam dihadapkan pada realitas dunia yang serba cepat dan canggih. Tak terkecuali di dalamnya masalah ekonomi dan keuangan. Produk-produk baru dikembangkan untuk menarik dana dari masyarakat. Namun bagi umat Islam, produk-produk tersebut perlu dicermati, karena dikembangkan dari jasa keuangan konvensional yang netral terhadap nilai dari ajaran agama.

Salah satu produk yang tengah dikembangkan saat ini di Indonesia adalah Reksadana, yang diluar negeri dikenal dengan "unit trust" atau "mutual fund". Reksadana adalah sebuah wahana di mana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan pengurusnya (fund manager) dana itu diinvestasikan ke portofolio efek. Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yang ingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatif kecil dan resiko yang sedikit.

Reksadana memiliki andil yang amat besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta. Di sisi lain, reksadana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material.

Namun bagi umat Islam reksadana merupakan hal yang perlu diteliti, karena masih mengandung hal-hal yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Misalnya investasi reksadana pada produk-produk yang diharamkan dalam Islam, seperti minuman keras, judi, pornografi dan jasa keuangan non syariah. Di samping itu mekanisme transaksi antara investor dengan reksadana, dan antara reksadana dengan emiten (pemilik perusahaan) harus diklasifikasikan menurut hukum Islam.

II. PANDANGAN SYARIAH TERHADAP REKSADANA

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa dalam Reksadana terdapat halhal yang bertentangan dengan syariah baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi maupun pembagian keuntungan. Namun demikian dalam reksadana konvensional tersebut terdapat pula mu'amalah yang dibolehkan dalam Islam seperti jual beli dan bagi hasil (mudharabah/qirad). Dalam hubungan ini terdapat banyak kemaslahatan seperti memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan di antara para pelakunya, meminimalkan resiko dalam pasar modal dan sebagainya.

Atas dasar pandangan di atas maka Reksadana sepanjang produkproduk yang dihasilkan tidak menggunakan cara-cara yang diharamkan oleh Islam dapat dibenarkan oleh syariah sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh Islam yaitu semua perjanjian atau transaksi yang dilakukan oleh umat Islam dibolehkan oleh syariah sepanjang tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal sebagaimana tertuang dalam hadis:

اَلصَّلْحُ جَائِزُ لِلْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَ شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَّةَ وَالتَّرْمِذِيُّ عَنْ عُمَرَوْ بْنِ عَوْفٍ)

"Perjanjian itu boleh bagi orang Islam kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang Islam itu wajib memenuhi syarat-syarat yang mereka kemukakan kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Turmudzi dari Amr bin Auf).

Berdasarkan hadis tersebut maka segala macam akad dapat disamakan dengan syarat sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Sebagaimana disebutkan dalam al-fiqh al-Islami wa Adillatuh yang berbunyi:

Dan diqiyaskan terhadap syarat-syarat yang, sah semua akad yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariah.²

Dan atas dasar hadis tersebut maka jumhur ulama sepakat bahwa pada prinsipnya setiap muamalah dibolehkan oleh syara' selama tidak bertentangan dengan syariah, sebagaimana dituangkan dalam sebuah kaidah yang berbunyi:

Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya adalah boleh, selama tidak dilarang oleh syariah atau

² Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, t. th.), Juz IV, h. 556.

III. MASALAH-MASALAH POKOK YANG BERKAITAN DENGAN REKSADANA

Di antara masalah-masalah yang perlu memperoleh perhatian antara lain:

A. Kelembagaan

Reksadana dapat ditangani oleh sebuah lembaga keuangan yang berbentuk Badan Hukum. Islam sendiri sejak lama telah mengenal Badan Hukum. Karena itu Badan Hukum tidak bebas taklif, sebab Badan Hukum tersebut pada hakikatnya merupakan gabungan dari para pemegang saham yang masing-masing terkena taklif. Badan Hukum dinyatakan oleh para ulama sebagai syakhsiyyah hukmiyyah atau syakhsiyyah i'tibariyyah, sebagaimana dijelaskan:

Bahwa fiqh Islam mengakui syakhsiyyah hukmiyah atau i'tibariyyah (badan hukum).4

وَيُقَرُّ الْفِقْهُ الْإِسْلاَمِيَّةُ مَا يُسَمَّى قَانُوْنَا الشَّخْصِيَّةَ الْإِعْتِبَارِيَّةَ أَوِ الْمَعْنَوِيَّةَ أَوِ الشَّخْصِيَّةَ الْمُجَرَّدَةَ عَنْ طَرِيْقِ الاغْتِرَافِ لِبَعْضِ الجُهاتِ الْعَامَّةِ كَالْمُوَسَّسَاتِ وَالجُمْعِيَّةِ وَالشَّرِكَاتِ الْمُجَرَّدَةَ عَنْ طَرِيْقِ الاغْتِرَافِ لِبَعْضِ الجُهاتِ الْعَامَّةِ كَالْمُوَسَّسَاتِ وَالجُمْعِيَّةِ وَالشَّرِكَاتِ وَالْمَسَاجِدِ بِوُجُوْدِ شَخْصِيَّةِ الْمَعْنِيَةُ الْأَفْرَادِ الطَّبِيْعِيِّيْنَ فِي أَهْلِيَّةِ التَّمَلُّكِ وَثُبُوتِ الْمُعَوِّقِ وَالالْتِرَامِ بِالْوَاجِبَاتِ وَافْتِرَاضِ وُجُوْدِ ذِمَّةٍ مُسْتَقِلَّةٍ بِجِهَّةِ الْعَامَّةِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْمُكَوِّنِيْنَ لَهَا فَرَادِ التَّابِعِيْنَ لَهَا عَنِ الْمُكَوِّنِيْنَ لَهَا

Fiqh Islam mengakui apa yang disebut dalam hukum positif sebagai syakhsiyyah i'tibariyyah atau syakhsiyyah mujarradah melalui pengakuan terhadap lembaga-lembaga umum seperti Yayasan, Perhimpunan, Perusahaan dan Mesjid. Dengan adanya syakhsiyyah yang menyerupai kepribadian manusia dalam hal kelayakan memiliki dan mempunyai hak dan kewajiban serta mempunyai tanggung jawab tersendiri secara umum terlepas dari tanggung jawab anggota.⁵

Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, t. th.), Juz IV, h. 555.

⁴ Musthafa Ahmad Zarqa, al-Madkhal al-fiqh al-'Am, juz III hlm. 256.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, t. th.), Juz IV, h. 368.

B. Hubungan Investor dan Lembaga

Hubungan investor dan lembaga dilakukan melalui aqad qiradh/mudharabah, tasarruf ini dibenarkan sebagaimana dijelaskan:

Seorang memberikan hartanya kepada yang lain untuk dijadikan modal dagang dengan ketentuan keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui. ... Penduduk Iraq menyebutnya dengan *mudharabah*, ... sedang penduduk Hijaz menyebutnya dengan *qiradh*.6

C. Saham Reksadana

Saham Reksadana dapat dijual belikan karena saham merupakan harta milik investor yang nilainya dapat diketahui secara jelas dan sudah menjadi kebiasaan di kalangan para pengusaha. Penjelasan hal tersebut dapat dilihat antara lain:

Jika salah seorang membeli bagian temannya dalam perkongsian, maka hukumnya boleh karena membeli milik orang lain.⁷

الْقَاعِدَةُ الْفِقْهِيَّةُ (اَلنَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالنَّابِتِ بِالنَّصِّ) كَافِيَةٌ لِفَتْحِ بَابِ التَّعَاقُدِ وَإِطْلاَقِ الْخُرِّيَةِ بِمَا لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ بِمَا يَرْفَعُ الْحُرَجَ وَالطَّيْقَ فِيْ مُعَامَلاَتِ النَّاسِ فِي وَقْتٍ اتَّسَعَتْ فِيْهِ دَائِرَاةُ الْمُعَامَلاَتِ الْمَالِيَّةِ وَتَشَعَّبَتْ وَظَهَرَتْ صُورٌ شَتَّى لأَنْوَاعِ الْمُعَامَلاَتِ، وَخَاصَةٌ فِيْ مَجَالِ الْمُقُودِ (وَمِنْهَا شِرْكَةُ الْمُسَاهَمَةِ)

Kaidah fiqh "sesuatu yang tetap berdasarkan atas kebiasaan sama yang tetap menurut nash", cukup untuk membuka pintu ta'aqud (transaksi) dan mutlak bebas bagi pihak-pihak yang berakad untuk menghindarkan kesulitan dan kesempitan dalam muamalah antar sesama manusia pada saat wilayah muamalah maliyah semakin meluas dan semakin berkembang bentuk dan macam kegiatannya, khususnya dalam hal kontrak atau akad (salah satunya adalah sarikat saham).8

⁶ Ibn Qudamah, al-Mughni, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.), Juz V, h. 15-16.

⁷ Ibn Qudamah, al-Mughni, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.), Juz V, h. 35.

⁸ Samir 'Abd al-Hamid Ridhwan, Aswaq al-Auraq al-Maliyah, h. 258.

D. Kegiatan Investasi

Dalam melakukan kegiatan investasi reksadana dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Di antara investasi yang tidak halal adalah perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang haram, lembaga keuangan ribawi dan lain-lain.

Dalam melakukan transaksi reksadana tidak dibolehkan melakukan tindakan spekulasi yang di dalamnya mengandung gharar atau ikhtisar atau tindakan spekulasi lainnya seperti najasy (penawaran palsu) seperti dalam hadis:

"Darinya (Ibn Umar), ia berkata: "Rasulullah Saw. melarang najasy (menawar sesuatu bukan untuk membeli tapi untuk menaikkan harga) - Muttafaq 'Alaih-... Dan darinya (Abu Hurairah), ia berkata: "Nabi Saw. melarang jual beli orang kota kepada orang kampung sebelum sampai ke kota dan janganlah kamu melakukan najasy..." (Muttafaq 'Alaih)⁹

Manajer investasi dapat melakukan kegiatan investasi akad *mudharabah* apabila telah memperoleh ijin dari investor pada waktu investor melakukan perjanjian investasi.

Ketahuilah bahwa 'amil dalam qiradh dilarang melakukan akad qiradh pada orang lain dengan harta/modal qiradh selama pemilik modal tidak memberi izin dari dengan izin yang sahih dan jelas.¹⁰

Jika pemilik harta mengizinkan ('amil) memberikan harta kepada orang lain untuk akad mudharabah, maka hukumnya boleh. Demikian Ahmad bin Hanbal menyebutkannya secara jelas dan saya tidak mengetahui khilafiyah dalam kasus tersebut.¹¹

Produk-produk reksadana sepertti spot, forward, swap, option, dan produk-produk lainnya yang bisa dilakukan perlu memperoleh penelitian dan pengkajian untuk menjadi bahan pertimbangan apakah produk-

⁹ Muhammad bin Isma'il al-Shan'ani, Subul al-Salam, (...: Dar al-Hadits, t. th.), Juz II, h. 24-30.

¹⁰ Abu Hasan al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz VII, h. 815.

¹¹ Ibn Qudamah, al-Mughni, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.), Juz V, h. 29.

produk tersebut dibenarkan oleh syariah atau tidak.

IV. URGENSI REKSADANA SYARIAH

Reksadana adalah tuntutan perkembangan ekonomi yang tidak dapat dihindari karena reksadana akan menghimpun dana dari umat untuk berinvestasi di reksadana dan hal ini tidak mungkin dapat dicegah. Di sisi lain umat Islam harus dapat bersaing dalam bidang ekonomi dalam rangka mempersiapkan diri menyongsong era globalisasi.

Sementara itu kegiatan reksadana yang ada sekarang masih banyak mengandung unsur-unsur yang tidak sesuai dengan syariah Islam baik yang menyangkut akad, sasaran investasi, teknis transaksi, pendapatan maupun dalam hal pembagian keuntungannya. Untuk itu perlu ditumbuhkan reksadana syariah yang kegiatannya mengikuti prinsip-prinsip syariah dalam bidang muamalah maliyah.

Adanya reksadana syariah merupakan upaya untuk memberi jalan bagi umat Islam agar tidak bermuamalah dan memakan harta dengan cara yang bathil seperti disebutkan dalam Al-Qur'an:

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan perniagaan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." (QS. al-Nisa': 29)

Di samping merupakan sesuatu kelaziman dalam kehidupan sosial bahwa sebagian orang yang memiliki harta seringkali tidak cakap untuk mengembangkannya dan sebaliknya orang yang memiliki kemampuan dalam berbisnis tidak memiliki modal sehingga antara kedua belah pihak dapat saling menunjang sebagaimana dijelaskan di dalam kitab al-Baijuri dalam kaitannya dengan qiradh yang berbunyi:

Dalil atas qiradh adalah ijma' dan kebutuhan (hajat), karena kadangkadang pemilik harta tidak cakap mengelolaannya dan ada orang yang tidak punya harta tapi pandai mengelola. Maka pihak pertama butuh memperkerjakan pengelola dan pihak kedua butuh pekerjaan.¹²

Selain itu reksadana syariah juga diharapkan dapat menjadi sarana

¹² Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz II, h. 21.

untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui investasi yang sesuai dengan syariah khususnya bagi umat Islam.

V. Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, untuk merintis berdirinya Reksadana Syariah sebagai wahana bagi warga NU untuk melakukan investasi dan untuk membantu warga yang memerlukan permodalan.[]

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL AL-DINIYYAH AL-MAUDHU'IYYAH MUKTAMAR XXX NU

DI PP. LIRBOYO KEDIRI JAWA TIMUR TANGGAL 21 s/d 27 NOPEMBER 1999

- 8. Respon Islam Terhadap Demokrasi
- 9. NU dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil
- 10. Ahlussunnah wal Jamaah dan Perkembangan Sosial-Budaya

11.Islam dan Kesetaraan Gender

- 12.Pemulihan Perekonomian Nasional Berorientasi Pada Kepentingan Rakyat
- 13. Syariat Islam Tentang Status Uang Negara, Acuan Moral untuk Menegakkan Keadilan dan Mencegah Penyalah-Gunaan Wewenang (KKN)

TIM PERUMUS

- Prof. DR. KH. Said Agil Husin Al-Munawwar, MA (PBNU), Ketua Merangkap Anggota
 - KH. Fakhruddin Masturo (Sukabumi-JABAR), Wakil Ketua Merangkap Anggota
 - Dr. KH. Muhammad Machasin, MA (Yogyakarta), Sekretaris Merangkap Anggota
- 4. Dr. KH. Hasan Manshur Nasution, MA (SUMUT), Anggota
 - 5. KH. A. Aminuddin Ibrahim LML (JABAR), Anggota 6. Drs. KH. Masdar F. Mas'udi (PBNU), Anggota
 - KH. Afifuddin Muhajir (Situbondo-JATIM), Anggota
 Drs. KH. Jazuli Nur Lc (JATIM), Anggota
- 9. KH. A. Ibnu Ubaidillah Syathori (Cirebon-JABAR), Anggota 10.Drs. KH. Lalu Mustajab (NTB), Anggota
 - 11.Drs. KH. Muhammad Rofangi Msi (Yogyakarta), Anggota 12. Dr. Hj. Zaitunah Subhan (JATIM), Anggota

KEPUTUSAN MUKTAMAR XXX NAHDLATUL ULAMA Nomor: 06/MNU-30/1999

Tentang

BAHTSUL MASAIL AL-DINIYYAH AL-MAUDHU'IYYAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

MUKTAMAR XXX NAHDLATUL ULAMA

Menimbang

- a. Bahwa Perkembangan yang selalu terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seringkali mendorong perubahan dan pergeseran yang menyangkut tata-nilai dan pandangan yang dianut Nahdlatul Ulama dalam fungsinya sebagai pembimbing umat, dituntut untuk senantiasa memberikan respon untuk senantiasa positif dan produktif.
 - Muktamar Nahdlatul Ulama mencermati sepenuhnya untuk memperhatikan segala perkembangan yang terjadi di masyarakat baik mengenai masalah-masalah agama. Sosial-ekonomi, budaya dan lainnya;
 - Permusyawaratan-permusyawaratan yang berlangsung dalam muktamar XXX Nahdlatul Ulama di Pon. Pes. Hidayatul Mubtadi'in Lirboyo, Kediri.

Memperhatikan:

- a. Amanat Presiden Republik Indonesia pada pembukaan Muktamar XXX Nahdlatul Ulama tanggal 13 Sya'ban 1420H/21 Nopember 1999.
- Khutbah Iftitah Rais Aam PB Nahdlatul Ulama pada pembukaan Muktamar XXX Nahdlatul Ulama tanggal 13 Sya'ban 1420H/21 Nopember 1999;
- Laporan hasil-hasil sidang Pleno Komisi Bahtsul Masail al-Diniyah al-Maudhu'iyyah Muktamar XXX NU tanggal 17 Sya'ban 1420H/25 Nopember 1999;

Mengingat

- Keputusan Muktamar XXX Nomor 001/MNU-30/11/1999 tentang Peraturan Tata-tertib Muktamar Muktamar XXX Nahdlatul Ulama;
 - Keputusan Muktamar XXX Nomor 003/MNU-30/11/1999 tentang Keorganisasian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama : Mengesahkan hasil-hasil Keputusan Sidang Komisi Bahtsul

Masail ad-Diniyah al-Maudhu'iyyah seperti tersebut

dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

periode 1999-2004 dan segenap perangkatnya dan jajarannya untuk memimpin dan mengkoordinasikan usaha dan ikhtiar dalam rangka pemasyarakatan dan pelaksanaan keputusan-

keputusan tersebut.

Ditetapkan di: Kediri

Pada tanggal: 17 Sya'ban 1415 H

25 Nopember 1999 M

MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA XXX PIMPINAN SIDANG PLENO X

ttd

ttd

KH M. Irfan Zidny MA
Ketua
Prof. DR. K. H. Said Agil Husain Al-Munawwar, MA
Sekretaris

8. Respon Islam Terhadap Demokrasi

- 1. Demokrasi kini merupakan salah satu sistem tatanan kenegaraan ideal yang didambakan oleh seluruh negara di dunia, terutama setelah runtuhnya Imperialisme-Kolonialisme usai Perang Dunia II. Demokrasi secara harfiah berarti pemerintahan rakyat (as-siyadah li al-ummah). Dalam istilah ilmu politik, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana penguasa harus mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada rakyat yang dilaksanakkan secara tidak langsung oleh wakilwakil yang dipilih melalui pemilihan umum yang kompetitif, bebas dan jujur. Demokrasi merupakan hasil pengalaman dan pemikiran orang Barat sejak Abad ke-15 dalam merespon kekuasaan monarci absolut, dan teokrasi yang otoriter, tiran, totaliter, dan aristokratis. Dalam prakteknya demokrasi kini diterapkan dalam bentuk kelembagaan trias politica yang memisahkan kekuasaan menjadi badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemerintahan didasarkan pada Undang undang yang disusun oleh rakyat dan dilaksanakan oleh kelompok yang diangkat oleh rakyat serta pelaksanaannya dikontrol oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Partisipasi politik rakyat diwujudkan dalam kebebasan berpendapat dan menyalurkan aspirasi termasuk kebebasan berkumpul (berserikat) dan mendirikan partai politik untuk kemudian berkompetisi secara jujur dan bebas dalam pemilihan umum.
- 2. Demokrasi merupakan tatanan yang mengatur hubungan antara negara dan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai universal yaitu persamaan, kebebasan dan pluralisme. Dilihat dari prinsip bahwa hubungan antara negara dan rakyat didasarkan atas kontrak sosial dengan rakyat yang berhak membentuk pemerintahan, maka demokrasi sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam yang memandang pemerintah sebagai amanah dan penegak keadilan. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa: 58, dan hadis Nabi:

عَنْ أَبِيْ ذَرِّ الغِفَارِيِّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ تَسْتَعْمِلْنِيْ قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّكَ ضَعِيْفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةُ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِرْيُّ وَنَدَامَةُ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي فِيْهَا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلَ فِي مُسْنَدِهِ)

"Dari Abu Dzar, berkata "Saya berkata, wahai Rasulullah mengapa tidak engkau pekerjakan aku untuk diangkat menjadi pejabat?" Dia Berkata, "lalu beliau memukul dengan tangannya pada pundakku, kemudian beliau bersabda: "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, dan jabatan itu merupakan amanat, dan pada hari kiamat merupakan kehinaan dan

penyesalan, kecuali bagi yang mengambilnya secara benar menunaikan kewajiban dalam amanat tersebut." (HR. Muslim dalam Shahihnya dan Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya).

Oleh karena itu, pemerintahan harus dilaksanakan dengan sebaikbaiknya menerapkan dasar-dasar sebagai berikut:

- a. *Al-Syura* (musyawarah): pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam urusan bersama, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. (QS. Ali Imran: 159 dan al-Syura: 38)
- b. Al-Musawa (Kesetaraan/Equality): pandangan bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi karena kesukuan, ras, agama, jenis kelamin, kedudukan, kelas sosial dan lain-lain (QS. al-Hujurat: 13)
- c. Al-'Adalah (Keadilan/Justice): menetapkan suatu keputusan baik berupa hukum, peraturan maupun kebijakan sesuai dengan hakikat kebenaran obyektif tanpa didasari pandangan dan kepentingan subyektif dan tidak bertentangan dengan al-Mabadi' al-Khamsah (QS. al-Nisa: 135 dan al-Maidah: 8)
- d. Al-Hurriyah (Kebebasan/Freedom): adanya jaminan bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara yang baik, bertanggung jawab dan al-akhlaq al-karimah (QS. al-Taubah: 105). Prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar dari praktek-praktek yang dilakukan Rasulullah Saw. dalam memimpin masyarakat seperti tertuang dalam "Piagam Madinah", serta tercermin dalam pengangkatan para al-Khulafa al-Rasyidun dan praktek kepemimpinan mereka.
- 3. Dalam urusan negara, karena tidak mungkin seluruh anggota masyarakat terlibat langsung dalam bermusyawarah, maka dibuat lembaga perwakilan sebagaimana ahl al-hall wa al-'aqdi. Lembaga perwakilan terdiri dari orang-orang yang terpilih, mempunyai watak dan sikap jujur, terpercaya, cerdas, cakap dan komunikatif sehingga benar-benar mampu menjalankan fungsi menyerap dan menyalurkan aspirasi rakyat dalam menyusun undang-undang maupun mengontrol pemerintah. Untuk terpilihnya wakil-wakil yang mereka percayai melalui pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia.
- 4. Ruang lingkup kekuasaan politik dan legislasi dari kekuasaan rakyat, lembaga perwakilan maupun pemerintah tetap harus didasarkan pada pokok-pokok ajaran agama dan mengikuti sistem penetapan hukum keagamaan yang baku; yakni:
 - a. Menyangkut ajaran, hukum dan aturan yang sudah ditetapkan secara pasti (qath'i) dalam nash al-Qur'an dan Sunnah Rasul,

kewenangan legislasi lembaga-lembaga tersebut dibatasi dengan

ketetapan nash yang ada.

b. Menyangkut hal-hal yang termuat dalam nash al-Qur'an dan Sunnah Rasul secara zhanny (interpretable) atau hal-hal baru yang berada dalam lingkup keagamaan, maka lembaga-lembaga tersebut mempunyai kewenangan legislasi sepanjang mengikuti sistem ijtihad dan metode istinbath al-ahkam yang absah dan valid.

- c. Sementara menyangkut hal-hal kenegaraan dan kemasyarakatan yang tidak terkait dengan masalah keagamaan; seperti sistem dan model pemerintahan, maka penetapan dan penerapannya tergantung pada pilihan dan kesepakatan rakyat atau wakil rakyat, namun substansinya tetap mengacu pada prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai dasar kemanusiaan.
- 5. Pemerintahan dalam suatu negara (al-Imamah) merupakan sunnatullah yang mesti terwujud secara syar'i maupun 'aqli untuk menjaga kedaulatan, mengatur tata kehidupan, melindungi hak-hak setiap warga negaranya dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pengemban mandat amanah dari rakyat harus selalu berorientasi pada kemaslahatan umum (Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuth bi al-maslahah). Kekuasaan dan kewenangan pemerintah selain mengandung amanah rakyat juga mengandung amanah ketuhanan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Swt., sehingga apapun bentuknya dan bagaimanapun keadaannya harus didasari oleh rasa tanggungjawab ketuhanan dan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan moral keagamaan.

9. NU dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil

1. Dari berbagai aktifitas diskusi, seminar dan lokakarya selama menjelang Muktamar NU ke-30 ini muncul berbagai usulan perubahan misi NU ke depan. Yaitu sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat relijius yang demokratis dan berkeadilan. Gagasan dan gerakan tersebut muncul merupakan hasil pergumulan pemikiran dan pergumulan dengan realitas politik belakangan ini, yang dinilai bahwa pengembangan demokrasi dan iqamatuh al-haq (penegakan kebenaran) sebagai tugas yang tidak bisa dihindari, karena itu segenap kajian gerakan dan perhatian diarahkan kesana.

Pengembangan demokrasi membutuhkan basis sosial yang kuat, karena itu penguatan terhadap *civil society* (masyarakat sipil), dalam arti bebas, mandiri, dan bertanggungjawab. Masyarakat sipil dirumuskan sebagai masyarakat etis yang menjunjung kesetaraan, menghargai kebebasan, terdapat saling kepercayaan (public trust), kesukarelaan, persaudaraan, keswadayaan dan kemandirian, terutama dalam berhadapan dengan negara dan kekuatan kapital. Prinsip-prinsip tersebut merupakan habitat yang sangat penting bagi tumbuhnya mentalitas dan tatanan politik yang demokratis. Walaupun demikian konsep masyarakat sipil bukanlah konsep yang utopis, sebab hakikat masyarakat sipil telah ada di Indonesia, persoalannya hanya posisi yang lemah ketika berhadapan dengan negara yang punya kekuatan kapital.

Dalam usaha pengembangan demokrasi lebih lanjut, masyarakat sipil perlu diberdayakan karena beberapa alasan:

Pertama, sebagai pengembangan visi etis dalam kehidupan masyarakat. Ini terutama berhubungan dengan masyarakat modern industrial yang individual dan materialistik, dengan adanya visi etis yang ditawarkan civil society tersebut bisa kita tumbuhkan solidaritas sosial, rasa saling percaya dan tanggungjawab sosial seseorang, sehingga bisa mencegah timbulnya despotisme dan barbarisme sosial. Karena tiadanya visi etis tersebut bisa kita lihat, selama ini penyelesaian masalah cenderung menggunakan kekerasan.

Kedua, pengembangan civil society ini penting untuk penyebaran pandangan dan sikap kesetaraan antara berbagai individu dalam masyarakat maupun antar kelompok, karena itu dalam hal ini civil society menawarkan prinsip kewarganegaraan. Dalam prinsip ini semua warga memiliki status, hak dan kewajiban yang sama, tanpa membedakan ras, ideologi, suku dan agama, hal ini bisa saja mengeliminir terjadinya konflik yang diakibatkan karena ikatan primordial.

Ketiga, pengembangan civil society ini semakin mendesak untuk menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan negara. Karena lemahnya partisipasi masyarakat selama ini adalah karena terlalu dominannya peran negara. Bahkan dengan gagasan integralitasnya dengan sengaja negara menafikan keberadaan masyarakat sipil. Upaya membentuk keseimbangan antara negara dan masyarakat sipil ini merupakan langkah penting dalam pengembangan demokrasi.

Mengingat pluralnya kenyataan masyarakat ini, maka masyarakat sipil sangat menekankan pentingnya pluralitas dalam kehidupan sosial dan politik, karena itu menolak semua primordialisme sektarianisme dan fanatisme. Dalam politik kenegaraan, dengan tegas prinsip-prinsip primordialisme baik berdasarkan etnik, kelas atau agama ditolak, dan masyarakat sipil mengetengahkan prinsip kewarganegaraan. Dalam

prinsip ini semua warga punya kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, tidak ada diskriminasi. Dengan demikian masyarakat sipil yang hakiki hanya mungkin tumbuh subur dalam habitat sosial semacam itu, karena itu dalam mengupayakan proses redemokrasi itu upaya penguatan civil society (masyarakat sipil) menjadi prioritas saat ini.

Prinsip kemasyarakatan yang disyaratkan oleh masyarakat sipil tersebut belum sepenuhnya terwujud, sebaliknya posisinya sangat lemah, sebab pada rezim orde baru seluruh kekuatan politik berada di tangan negara, semantara masyarakat tidak punya akses ke politik, sehingga tidak bisa berpartisipasi dalam mengambil kebijakan publik. Akibatnya, kebijakan publik yang ada sama sekali tidak menyentuh aspirasi mereka. Karena menolak oposisi dan kritik, dengan dalih negara dalam negara integralistik, yang bersifat kekeluargaan tidak perlu ada oposisi karena akan mengancam keselarasan negara, semua kepentingan individu dan kepentingan masyarakat telah dicakup dalam kepentingan negara. Ini merupakan wujud dari negara integralistik, yang dengan sendirinya berwatak otoriter.

- 2. Istilah madani yang diintrodusir Islam modernis sempat beredar luas, bahkan kalangan non Islam dengan gampang ikut memakai istilah ini, walaupun tentu saja mereka tidak mengerti makna yang terkandung di dalamnya, yang mendiskriminasi mereka, sebagai warga kelas kedua, istilah itu kelihatan gampang diucapkan, sebenarnya sebagai suatu istilah tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah di dalamnya penuh distorsi terhadap konsep civil society, sehingga sulit untuk direhabilitasi. Karena itu kalangan NU memakai terjemahan masyarakat sipil, suatu istilah yang dipakai dalam wacana masyarakat dan negara sejak awal 1980 an. Lebih jauh lagi distorsi terhadap praktek, yang akhirnya masyarakat dan sistem politik yang akan dihasilkan juga akan berbeda dan bertentangan dengan konsep masyarakat sipil yang semestinya. Inilah tantangan bagi pengembangan masyarakat sipil saat ini.
- 3. Apa yang diperjuangkan masyarakat sipil bukan istilah atau sekedar konsep, tetapi prinsip-prinsip yang intinya memberikan peluang yang sama pada warga masyarakat dan warga negara tanpa diskriminasi. Gerakan tersebut harus konsisten diperjuangkan, karena hanya dengan cara itu kita bisa membangun sistem sosial yang kokoh dan sistem politik yang demokratis yang menghormati hak-hak semua elemen yang tercakup sebagai warga negara. Maka dengan demikian gagasan dan gerakan bagaimanapun bagusnya yang melawan prinsip tadi harus ditolak, sebab hal itu akan meruntuhkan pondasi demokrasi yang telah diupayakan.

Penerimaan konsep tersebut memang menghendaki transformasi yang sangat mendasar dalam memahami ajaran atau doktrin agama. Karena konsep masyarakat sipil, sepenuhnya berangkat dari kemaslahatan manusia, maka setiap warga negara tanpa membedakan suku, ras, agama maupun golongan berkedudukan sama. Hal ini juga mengandaikan pandangan yang individualis terhadap sesama warga masyarakat, bukan komunalis, primordialis, manusia harus dipandang sebagai dirinya sendiri, bukan berdasarkan suku, golongan atau agamanya. Hal itu juga perlu mengubah pandangan mereka tentang politik, dakwah dan hubungan antar agama. Hal ini membutuhkan reinterpretasi terhadap ajaran agama yang selama ini ada, karena banyak yang tidak sejalan dengan prinsip ini.

10. Ahlussunnah wal Jamaah dan Perkembangan Sosial-Budaya

- Manusia merupakan makhluk yang diciptakan Allah Swt. dalam bentuk sempurna (fii ahsani taqwiim, QS. al-Thin: 4). Manusia diberi akal budi dan hati nurani untuk mengemban fungsi kekhalifahan, yaitu mengatur kehidupan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. (QS. al-Baqarah: 30-34 dan al-An'am: 165)
- 2. Sejarah kehidupan yang dibangun manusia telah menghasilkan peradaban, kebudayaan dan tradisi sebagai wujud karya dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup yang dihadapi, dalam lingkungan negara atau wilayah tertentu, suatu bangsa atau suku, membangun kebudayaan serta peradabannya sesuai dengan prinsip dan nilai serta pandangan hidup yang diperoleh dari ajaran agama atau faham yang dianut. Peradaban, kebudayaan dan tradisi selalu mengalami perubahan, berupa kemajuan dan kemunduran yang semua itu ditentukan atas dasar relevansinya dengan kehidupan dan kemanusiaan. Pertemuan antara berbagai peradaban, kebudayaan dan tradisi merupakan kenyataan dan dialektika sejarah yang mengakibatkan terjadinya saling mempengaruhi, percampuran, perbenturan atau pencaplokan sesuai dengan daya tahan dan daya serap masing-masing. Peradaban hingga sekarang, termasuk Islam yang muncul sejak awal abad ke-7 Masehi dan perkembangannya di bumi Indonesia merupakan salah satu kenyataan sejarah tersebut.
- 3. Salah satu faktor penentu berkembangnya peradaban Islam adalah faham dan golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah sebagai pemahaman keagamaan (manhaj al-fikr) dengan metode yang komprehensif, memadukan antara wahyu dan akal yang mencakup

seluruh aspek kehidupan mengandung prinsip moderasi (tawassuth), menjaga keseimbangan (tawazun), dan toleransi (tasamuh). Metode pemahaman dan pemikiran (manhaj al-fikr) ini lahir dari proses dialektika sejarah pemikiran dan gerakan yang intens. Dengan mengikuti tuntunan wahyu dan tuntutan akal secara proporsional yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan dan hukum kehidupan (sunnatullah). Ahlussunnah wal Jamaah menghindari pertentangan politik dan fanatisme kelompok yang masuk dalam pemahaman keagamaan. Dengan prinsip dan watak dasarnya itu Ahlussunnah wal Jamaah diterima dan berkembang di semua lapisan masyarakat, ikut berperan mewujudkan kehidupan yang penuh kedamaian dalam wahana kebangsaan dan kenegaraan bersama peradaban, kebudayaan dan tradisi lain.

- 4. Sebagai metode pemahaman dan pemikiran keagamaan yang fitri, Ahlussunnah wal Jamaah mengaktualisasikan diri dalam pengembangan peradaban, kebudayaan dan tradisi yang konstruktif (al-amr bi alma'ruf) serta mencegah perubahan yang destruktif (al-nahy 'an almunkar) atas dasar prinsip moralitas keagamaan dan kemanusiaan. Paradigma yang dibangun dalam sistem peradaban dan kebudayaan adalah tegaknya moralitas keagamaan dan harkat kemanusiaan (makarim al-akhlaq), tegaknya hak-hak asasi manusia yang lima (al-Mabadi' al-khamsah: hifzh al-din, hifzh al-nafs, hifzh al-'aql, hifzh al-nasl, hifzh al-mal) demi terwujudnya kemaslahatan di muka bumi.
- 5. Dengan prinsip menyebarkan rahmat kepada seluruh alam semesta (rahmatan lil 'alamin), Ahlussunnah wal Jamaah memandang realitas kehidupan secara inklusif dan substantif. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mau terjebak dalam klaim kebenaran dalam dirinya secara mutlak, juga tidak dalam kelompok-kelompok lain karena memandang suku, ras dan budaya karena perbedaan pendapat dan faham golongan serta kelompok merupakan suatu yang niscaya. Pluralitas (kemajemukan) dalam hidup merupakan rahmat yang harus dihadapi dengan sikap ta'aruf, membuka diri dan melakukan dialog secara kreatif untuk menjalin kebersamaan dan kerjasama atas dasar saling menghormati dan saling membantu. Ahlussunnah wal Jamaah memandang sikap eksklusifitas yang mengaku (mengklaim) kebenaran hanya miliknya sendiri dan memandang pihak lain salah, apalagi memaksakan pendapatnya kepada orang lain, merupakan refleksi sikap otoriter dan pada gilirannya akan mengakibatkan perpecahan, pertentangan dan konflik yang membuat kerusakan dan kesengsaraan.
- 6. Ahlussunnah wal Jamaah sebagai metode pemahaman dan pemikiran yang dirumuskan dalam wacana keagamaan dalam penjabarannya secara

praktis masih banyak terjadi khilafiyah dan mengalami distorsi, baik oleh para penganutnya maupun di kalangan orang luar. Pemahaman yang memadukan antara wahyu dan akal, teori kash, serta tekanan ajaran zuhud ('uzlah), qana'ah dan sebagainya telah disalah pahami yang kemudian diasumsikan menjadi penyebab kemunduran karena tumbuhnya sikap determinisme dan kepasrahan dalam menghadapi kehidupan keduniaan. Padahal ajaran akidah itu lebih bersifat penataan hubungan hamba dengan Tuhan, sementara pemahaman dan praktek ajaran fiqih dengan sistem bermazhab merupakan metode realistik dalam memahami dan mengamalkan hukum agama secara hati-hati. Sedangkan pendalaman dan praktek tasawuf merupakan pemenuhan tuntutan batin (intuisi) manusia untuk membentuk moralitas kesalehan secara substantif. Pemahaman yang bersifat substantif dan komprehensif demikian didasarkan pada metode ilmiah yang tidak mengabaikan peran akal, sehingga tidak bisa disamakan dengan kebatinan yang bersifat spekulatif semata. Ahlussunnah wal Jamaah mendorong manusia untuk menjadi pribadi muslim yang saleh, kreatif, dinamis dan inovatif agar mampu menjalankan fungsi kekhalifahan dengan tulus demi pengabdian kepada Allah semata. Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan manusia untuk berusaha dan berkarya membangun peradaban dan kebudayaan yang maju, memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dengan mendayagunakan potensi intelektualitas dan intuisinya secara maksimal dan bertanggung jawab, sebagai amal saleh yang menentukan nilai dirinya dihadapan Allah Swt.

7. Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengembangkan kebudayaan dan peradaban didasari sikap yang berimbang dan menjaga kesinambungan antara yang sudah ada dan mengambil hal yang baru. Budaya lama yang masih relevan terus dijaga dan dilestarikan, sementara budaya baru diterima, setelah dilakukan penyaringan dan penyesuaian (al-muhafazhah 'ala al-gadim al-shalih wa al-akhdzu bil jadid al-ashlah). Terhadap peradaban dan kebudayaan modern yang datang dari Barat, pada dasarnya Ahlussunnah wal Jamaah memandang sebagai hasil inovasi dan kreativitas manusia atas dasar rasionalisme dalam menjawab tantangan yang dihadapi dalam bentuk nilai-nilai, ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua yang ada dalam peradaban dan kebudayaan modern berupa etos kerja, kedisiplinan, orientasi ke depan, dorongan penggunaan rasio dan kreativitas serta penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih merupakan warisan kemanusiaan yang membawa manfaat untuk kesejahteraan hidup manusia. Sebagai warisan kemanusiaan yang terbuka, Ahlussunnah wal Jamaah memandang peradaban dan

kebudayaan modern dapat dimanfaatkan sepanjang tidak mengakibatkan bahaya dan tidak bertentangan dengan sendi-sendi dasar akidah dan syariat Islam.

11. Islam dan Kesetaraan Gender

Islam, pada dasarnya, adalah agama yang menekankan spirit keadilan dan keseimbangan (tawazun) dalam berbagai aspek kehidupan. Relasi gender (perbedaan laki-laki dan perempuan yang non kodrati) dalam masyarakat yang cenderung kurang adil merupakan kenyataan yang menyimpang dari spirit Islam yang menekankan pada keadilan.

Terdapat tiga bidang masalah yang menjadi halangan terciptanya "hubungan gender" yang lebih adil, yaitu bidang yang berkaitan dengan teologi (pandangan agama), kebudayaan (persepsi masyarakat), dan politik.

- 1. Di bidang teologi, terdapat penafsiran keagamaan terhadap ayat atau hadis yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan gender, sebaliknya malah bias pada laki-laki. Dalam penafsiran ini, perempuan didudukkan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Sumber dari penafsiran ini antara lain adalah kata "qawwamun" dalam surat Al-Nisa: 34, serta hadis "Lan yufliha qaumun wallaw amruhum imra'atan". Kadua ayat dan hadis itu ditafsirkan menurut referensi Islam yang menegaskan kedudukan laki-laki yang lebih tinggi dari perempuan. Dari sudut penafsiran ini pula, terdapat pemahaman mengenai dua wilayah yang terpisah antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki berada di wilayah publik atau wilayah muamalah, sementara perempuan berada di wilayah domestik atau rumah tangga.
- 2. Di bidang kebudayaan, terdapat apa yang disebut kebudayaan patriarkhi, yaitu kebudayaan yang "memapankan peran laki-laki untuk melakukan apa saja dan menentukan apa saja, disadari atau tidak". Sebaliknya kaum perempuan berada pada posisi subordinat, yakni tunduk pada laki-laki. Perempuan juga dianggap hanya layak berada di wilayah domestik, sesuai dengan pandangan perempuan sebagai teman di belakang atau di balik wilayah publik yang ditempati laki-laki.
- 3. Di bidang politik terdapat praktek-praktek politik yang mendiskriminasikan perempuan. Di setiap instansi formal, kehadiran perempuan sangat marginal. Akibat ketidakterwakilan perempuan sangat marginal. Akibat ketidakterwakilan perempuan dalam pusat-pusat "kekuasaan", maka pengambilan keputusan sering mengabaikan isu yang menjadi perhatian kaum perempuan, baik itu dalam sektor politik atau sosial. Perempuan

hanya menjadi obyek dari sistem politik yang dibangun secara sepihak oleh kaum laki-laki.

Untuk mengatasi ketiga masalah itu, diperlukan upaya terus-menerus untuk (a) menafsirkan ulang beberapa nuktah dalam pemahaman keagamaan, (b) untuk melihat kembali secara kritis paham-paham kebudayaan yang bias laki-laki (kebudayaan patriarkhi), (c) untuk merombak praktik-praktik politik yang mendiskriminasi perempuan.

Berikut ini adalah ringkasan pandangan yang muncul dalam halaqah berkaitan dengan ketiga hal itu:

1. Menafsirkan ulang beberapa nuktah dalam pemahaman keagamaan.

Karena adanya perkembangan-perkembangan dalam masyarakat yang menuntut terciptanya keadilan gender, maka penafsiran kembali paham keagamaan yang bias laki-laki merupakan keharusan yang tak bisa dielakkan. Dalam kaitan ini, beberapa hal perlu dilakukan:

- a. Menggunakan pendekatan historis, sosiologis dan antropologis untuk memahami ayat atau hadis yang berkaitan dengan soal gender. Penafsiranpenafsiran dalam khazanah fiqih yang bias laki-laki hendaknya dilihat sebagai cerminan dari kondisi sosial tertentu yang masih mendudukkan laki-laki pada posisi dominan. Ketika kondisi sosial dan kebudayaan berubah, dan tuntutan terciptanya sistem sosial dan kebudayaan berubah, dan tuntutan terciptanya sistem sosial yang adil (bebas dari diskriminasi gender) muncul, maka penafsiran atas ayat dan hadis itu juga harus mempertimbangkan penafsiran baru sesuai kaidah-kaidah yang berlaku.
- b. Sesuai dengan prinsip keadilan gender serta prinsip umum Islam mengenai keadilan, maka diskriminasi atas perempuan dalam posisi publik tidak bisa dibenarkan. Kepemimpinan perempuan merupakan hak yang dimiliki oleh perempuan, serta dengan hak yang sama juga dimiliki oleh laki-laki. Ayat tentang kedudukan laki-laki sebagai "qawwam" dalam al-Nisa': 34 hendaknya diletakkan dalam konteks hubungan domestik dalam rumah tangga, sehingga tidak bisa digunakan untuk menghalangi hak perempuan atas posisi-posisi publik.
- c. Penafsiran atas ayat dan hadis yang berhubungan dengan gender tidak hanya dianggap sebagai bagian dari "agama" itu sendiri, tetapi memerlukan ijtihad yang kedudukannya adalah relatif, dan tergantung pada perkembangan masyarakat yang terus berubah.
- d. Dibutuhkan penafsiran agama yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan gender untuk mengatasi diskriminasi atas perempuan di berbagai sektor kehidupan. Dengan kata lain, kebutuhan untuk membangun fiqh al-nisa' yang membela hak-hak

- perempuan kian mendesak, searah dengan tuntutan terciptanya sistem sosial yang adil dan demokratis.
- e. Islam sejak awal telah menunjukkan komitmen yang besar untuk memberdayakan martabat perempuan lewat pemberian wewenang tasharruf atau transaksi ekonomi. Hal ini karena Islam sadar bahwa terpuruknya martabat perempuan antara lain disebabkan oleh lemahnya kedudukan ekonominya dalam masyarakat. Pemberdayaan perempuan juga harus dimulai dari pemberdayaan ekonominya, oleh karenanya menuntut pemberian ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk masuk ke wilayah publik.
- 2. Melihat kembali secara kritis paham-paham kebudayaan yang bias laki-laki.
 - Hal-hal yang perlu dilakukan dalam kaitan ini adalah:
- a. Pandangan mengenai perempuan yang hanya layak menempati wilayah domestik, sementara laki-laki berhak atas wilayah publik, hendaknya dilihat sebagai hasil sosialisasi masyarakat yang berlangsung selama ini. Pandangan itu bukan sesuatu yang sifatnya alamiah yang bermula dari perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, tetapi dibentuk sendiri oleh masyarakat. Oleh karena itu, jika keadaannya berubah, pembagian yang tidak adil seperti itu juga bisa diubah sesuai dengan kebutuhan terciptanya hubungan gender yang lebih adil dan seimbang.
- b. Perbedaan biologis karena kelamin yang berbeda adalah perbedaan alamiah yang tetap dan sudah begitu adanya (given). Tetapi pembagian tugas antara perempuan sebagai penjaga wilayah domestik dan lakilaki sebagai penjaga wilayah publik adalah bersifat sosial yang sifatnya berubah terus menerus. Mencampuradukkan antara perbedaan tugas sosial sebagai fakta alamiah dengan perbedaan tugas sosial sebagai fakta kebudayaan harus dihindari.
- c. Pandangan tentang perempuan yang tidak layak menduduki alimamah al-'uzhma (kepemimpinan puncak: Presiden, misalnya) sebetulnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat modern. Dalam masyarakat modern, kepemimpinan bukan masalah "pribadi" (azza'amah al-syakhsiyyah), tetapi sudah merupakan sesuatu yang terlembaga (nizham). Oleh karena itu yang menjadi tantangan ke depan adalah: bagaimana membangun struktur kepemimpinan dan politik yang lebih mengedepankan aspek-aspek feminitas atau keperempuanan yang bersandar pada nilai-nilai kasih sayang, solidaritas, keseimbangan, dan kedamaian (non-violence). Di sisi lain: bagaimana membangun sistem politik yang meminimalisir ekses nilai-nilai maskulinitas atau

kelelakian yang bersandar pada kekerasan, dominasi, dan pemisahan yang ketat antara wilayah domestik dan publik.

- 3. Merombak praktik-praktik politik yang mendiskriminasikan perempuan Dalam kaitan ini, hal-hal yang harus dilakukan adalah:
- a. Membangun sistem sosial dan politik yang demokratis dan beban dari diskriminasi gender, dengan mengedepankan lima prinsip berikut:
 (a) persamaan (musawah atau equality), (b) keadilan ('adalah atau justice),
 (c) kebebasan (hurriyyah atau freedom), (d) menghindari penggunaan kekerasan (excluding the use of force), dan (e) berkemampuan (al-qudrah).
- b. Hendaknya ada semacam "tindakan pembahasan" (affermative action) atas kaum perempuan dengan memberikan peluang yang lebih banyak lagi kepada perempuan untuk menduduki posisi-posisi dalam pengambilan keputusan, seperti di DPR/MPR.
- c. Menonjolkan penggunaan kekerasan dalam menangani masalahmasalah politik mengakibatkan ekses yang kurang diperhatikan, yaitu jatuhnya perempuan sebagai korban utama dari penggunaan kekerasan itu. Oleh karena itu, penggunaan kekerasan dalam politik tanpa pertimbangan yang rasional dan tetap tidak bisa dibenarkan dalam keadaan apapun.

12. Pemulihan Perekonomian Nasional Berorientasi Pada Kepentingan Rakyat

Pemulihan Ekonomi Berorientasi Kerakyatan

Urgensi dan matra pengembangan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan mayoritas rakyat.

- 1. Terma (al-musthalah) ekonomi kerakyatan sebenarnya tidak dikenal dalam teori ekonomi. Terma ini muncul dari pemerintahan Indonesia sebagai responden terhadap krisis ekonomi (azmah iqtishadiyah) yang tengah terjadi, barangkali yang dimaksudkan terma ini merupakan gabungan dua teori antara kapitalisme dan sosialisme. Krisis ekonomi itu sendiri timbul karena sistem pemerintahan (nizhamul hukmi) yang sangat sentralistik serta akibat campur tangan yang terlalu besar dari pemerintahan orde baru ke dalam perekonomian hingga mekanisme pasar tidak dapat berfungsi secara efektif.
- 2. Prasyarat untuk pemulihan ekonomi adalah pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*). Dari pemerintahan yang seperti itu sangat dimungkinkan akan terciptanya penataan dan penguatan institusi sehingga mendorong mekanisme pasar bekerja secara sehat.

- Supaya ekonomi pasar benar-benar untuk kesejahteraan rakyat, maka harus ditunjang oleh undang-undang (UU) atau peraturan pemerintah, seperti undang-undang tentang persaingan sehat.
- 3. Ekonomi kerakyatan yang melibatkan masyarakat menengah ke bawah dengan berbagai usaha dalam skala menengah dan kecil ternyata lebih tahan terhadap goncangan resmi global (azmah iqtishad 'alamiyah) untuk itu perlu dibantu pemerintah lewat kredit bank, juga perlu diberikan Hak Guna Usaha (HGU) secara temporer kepada petani yang kurang lahan dengan memanfaatkan tanah negara untuk tanaman jangka pendek, atau usaha peternakan kecil dan industri rumah tangga dengan membayar sewa atau bagi hasil dengan pemerintah daerah. Pembangunan koperasi (hai'ah ta'awuniyyah) tetap perlu. Untuk meningkatkan daya saing industri kecil, harus terus didorong pembentukan dan pengembangannya dalam bentuk koperasi yang sehat dan mandiri yaitu koperasi yang efisien dan didasarkan prinsip-prinsip koperasi.
- 4. Berbagai strategi sinergis (khutawat mutasanidah) terhadap para pelaku ekonomi harus direncanakan secara terintegrasi (muwahhadah) baik antara pemerintah pusat dan daerah; antara pemerintah daerah dan antar departemen sektoral; dan harus terdapat sinergi (sanud) pula antar pelaku ekonomi baik dalam wewenang pemerintah (BUMN dan BUMD), swasta nasional serta domestik. Prioritas (al-aulawiyah) pemberian kredit terhadap pengusaha swasta tidak hanya didasarkan pada bank teknis saja tetapi juga harus dilihat sampai berapa jauh penyerapan tenaga kerja dan keterlibatan kegiatan usaha ke belakang maupun ke depan.

Relevansi dan Tantangan Pengembangan Ekonomi Berbasis Pertanian

Pengembangan ekonomi berbasis pertanian, yang diharapkan dapat menjadi tulang punggung ekonomi nasional ke depan.

- 1. Pengalaman krisis moneter dan ekonomi menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang masih memiliki nilai positif dalam pertumbuhan GDP walaupun nilainya kecil. Hal ini memberikan gambaran bahwa sektor pertanian memiliki ketangguhan dalam menghadapi gejolak perekonomian nasional. Untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian, perlu adanya peningkatan anggaran pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan. Selain itu juga perlu diantisipasi dengan meningkatkan dukungan modal pada usaha kecil/menengah serta pengembangan investasi di sektor agrobisnis dengan berorientasi pada permintaan pasar domestik maupun ekspor.
- Guna lebih menumbuh-kembangkan ekonomi kerakyatan, hal mendasar yang perlu mendapat perhatian adalah kecilnya kepemilikan aset petani,

- yaitu kurang dari 0,5 hektar. Untuk itu perlu adanya penataan kembali tentang pemanfaatan aset lahan melalui reformasi agraria yang dapat menjamin hak petani dalam memanfaatkan lahan yang dimiliki mencapai skala ekonomis.
- 3. Untuk mengembangkan sektor pertanian tetap menjadi fokus utama dalam orientasi kebijaksanaan pembangunan nasional maka diperlukan adanya dua prasyarat utama, yaitu:
 - a. Dilaksanakannya demokrasi di bidang ekonomi yang mendorong berjalannya mekanisme pasar secara sehat, dimana sistem subsidi pada sektor pertanian dan pangan harus diarahkan pada kelompok masyarakat tertentu, tidak memberikan subsidi secara umum.
 - b. Dikembangkannya demokrasi di bidang politik sebagai landasan kebijaksanaan yang lebih sehat. Pertumbuhan ekonomi seharusnya berbasis pada Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat diperbarui dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di tempat. SDM dari NU yang masih berbasis massa kaum petani, harus diperhatikan dan diperkuat.
- 4. Sumberdaya yang tersedia memungkinkan pesantren mengembangkan agrobisnis. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melibatkan pesantren untuk berfungsi sebagai lembaga ekonomi rakyat melalui pendekatan agrobisnis terpadu tanpa harus mendegradasi misi pesantren. Pelibatan ini harus dimulai dengan pemetaan terhadap 'keunggulan' masingmasing pesantren.

Masalah-Masalah Dasar di Balik Krisis Ekonomi Indonesia

- Krisis ekonomi di Indonesia merupakan krisis kombinasi antara sosial, ekonomi dan politik. Ketika krisis ekonomi pertama kali menerpa, saat itu pemerintah Indonesia entah disengaja atau tidak telah memperbodoh rakyat dengan mengungkapkan suatu data pendukung yang menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi Indonesia. Ternyata data itu tidak valid.
- 2. Kini upaya pemulihan ekonomi masih mengandung optimisme, karena:
 - a. Pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat lagi karena regional Asia Tenggara pulih.
 - b. Simpati dukungan luar negeri terhadap Indonesia masih tinggi.
 - c. Kekayaan alam Indonesia masih cukup besar.
 - d. Ada potensi ekspansi pajak (peningkatan pembayaran pajak) antara lain jika pajak diturunkan.
 - e. Capital outflow akan ditarik kembali, jika ada pemerintah yang kredibel.
 - f. Mobilitas sosial secara vertikal harus didasarkan pada prestasi bukan KKN.

- Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN.
- h. Berangkat dari adanya optimisme itulah, NU harus melakukan reeksposisi visinya (*i'adatin nazhar wa al-tsabat*) tentang kebijakan pembangunan ekonomi pasca orde baru.

13. Syariat Islam Tentang Status Uang Negara, Acuan Moral untuk Menegakkan Keadilan dan Mencegah Penyalah-Gunaan Wewenang (KKN)

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Kehidupan beragama pada tataran ritual dengan segala sarana dan prasarananya seperti mesjid, majlis-majlis ta'lim, madrasah dan perayaan-perayaan hari besar dan upacara keagamaan Islam, menunjukkan tingkat perkembangan yang sangat pesat. Demikian pula jamaah haji Indonesia tercatat yang terbesar di antara negara-negara Islam di dunia dibayar dengan biaya perjalanan yang relatif paling mahal.

Namun demikian, realitas sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara rata-rata menunjukkan prestasi yang secara keseluruhan sangat mengecewakan. Semarak kehidupan beragama seperti disebut di atas terbukti sama sekali tidak punya korelasi positif terhadap peningkatan kualitas akhlak dan moralitas umat dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketimpangan-sosial antar kelompok kuat yang sangat kecil jumlahnya dengan mayoritas terbesar masyarakat dari hari ke hari semakin menajam. Konflik horizontal dan kekerasan berdarah antar kelompok yang mengganas dalam tahun-tahun terakhir dengan latar belakang kesukuan, agama dan etnis, merupakan anak sah dari ketimpangan tadi.

Dalam bidang pengelolaan pembangunan dan sumberdaya juga terjadi hal yang tidak kalah buruknya. Disamping salah urus dan inefisiensi dengan tingkat rata-rata 30% di hampir semua sektor, Indonesia masih terus menduduki peringkat teratas di Asia dan ketiga di dunia dalam bidang korupsi. Runtuhnya rezim orde baru yang telah dibangun dengan biaya material, sosial maupun kemanusiaan yang sangat mahal dengan penjagaan yang ekstra ketat selama lebih 30 tahun oleh seluruh kekuatan tentara, birokrasi hanya terjadi karena rontoknya legitimasi rakyat akibat demoralisasi dalam praktek korupsi para pejabat negara yang sungguh sangat luar biasa.

Ungkapan paradoksal "korupsi telah mengakar kuat pada budaya Bangsa Indonesia" sejak lama telah tidak mampu menggugah kesadaran ironis umat dan pemimpinnya yang kesemuanya adalah orang-orang yang justru mengaku taat beragama. Uang negara yang pada hakekatnya bersumber dari keringat rakyat dan dari pengelolaan alam dan bumi Allah di mata penguasa tidak lebih dari "harta tak bertuan" atau bahkan "harta mereka sendiri" semata-mata karena mereka adalah pihak yang merasa berhak mengatasnamakan "negara".

Mengapa dirinya sebagai personifikasi kuasa negara hampir semua pejabat/penguasa merasa "berhak" mengungkapkan wewenang yang ada di tangannya untuk menjarah uang negara sebanyak yang mereka bisa. Itu semua terjadi dari hari-kehari dari semua level dan semua lini, sebagai suatu yang dianggap biasa dan tanpa perasaan dosa baik terhadap Tuhan maupun terhadap rakyatnya. Skandal Bank Bali dan kasus rekapitulasi dunia perbankan yang melibatkan uang negara ratusan triliun rupiah hanyalah contoh soal paling mutakhir tentang bagaimana korupnya penguasa Indonesia selama ini dan betapa ceroboh dan gegabah mereka terhadap uang Allah, "uang negara".

II. DASAR PEMIKIRAN

Islam sebagai al-din dan sekaligus al-daulah di samping mengatur hubungan manusia dengan Allah, Islam juga sangat berkepentingan meletakkan basis-basis etika dan moral pada hubungan manusia dengan sesama dalam lembaga politik dan kekuasaan yang bernama negara (al-daulah). Seperti diketahui masalah ketidakadilan dan kezaliman yang paling massif dan universal adalah kezaliman yang dilakukan oleh negara. Semua ikhtiar memerangi kezaliman dan menegakkan keadilan tanpa menyentuh negara adalah sia-sia. Bahwa dalam sejarah, negara selalu dipakai oleh penguasa untuk menindas rakyat itulah tantangan kemanusiaan paling besar yang dengan dalih apapun (sekularisme?) agama dan Islam tidak boleh lari dari padanya.

Sementara itu, ketika orang bicara tentang negara yang jadi pokok bahasan selalu saja berkisar pada isu-isu tentang kedaulatan, bentuk pemerintahan, proses rekruitmen pemegang kekuasaan, kekuasaan/birokrasi (yang dibiayai dengan uang negara) bagi kemaslahatan segenap rakyatnya. Rezim apapun yang hadir dalam kehidupan suatu negara, juga negara kita Indonesia, kredibilitas dan akseptabilitas di mata rakyat dan dunia internasional, akan sangat ditentukan oleh dua hal tadi yang kesemuanya berbasis atau berkaitan dengan soal "uang".

Maka wajib bagi kita semua, terutama kalangan ulamanya untuk dapat meletakkan prinsip-prinsip moral keagamaan perihal sesuatu yang sangat fundamental ini, "keuangan negara". Dari mana bersumber; siapa pemilik sesungguhnya; untuk siapa/apa harus ditasarufkan; apa tanggungjawab negara/pemerintah dalam hal ini; dan apa wewenang rakyat.

Mengacu pada ajaran Zakat, satu-satunya rukun Islam yang berdimensi sosial sekaligus kekuasaan, sebagaimana dicontohkan oleh pemerintahan Rasulullah Saw. dan *Khulafa' al-Rasyidin* R.a. di Madinah, maka mutlak diperlukan penegasan kembali prinsip-prinsip syariat (moralitas) Islam berkenaan dengan soal "uang negara" sebagai berikut:

III. PRINSIP PRINSIP SYARIAT ISLAM TENTANG KEUANGAN NEGARA:

1. Bahwa sebagai pembawa amanat Allah, amanat keadilan (al-'adalah) dan kemaslahatan segenap rakyat (mashalih al-ra'yah) negara/pemerintah berkewajiban menegakkan ketertiban umum, melindungi keamanan seluruh rakyat, dan menegakkan keadilan bagi kemaslahatan semua pihak, tanpa membedakan warna kulit, suku bangsa, golongan maupun keyakinan agamanya. Allah berfirman:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak dan apabila kalian memerintah maka memerintahlah berdasarkan dengan keadilan." (QS. al-Nisaa': 59)

Kaidah fiqih mengatakan:

"Seluruh kebijakan dan tindakan pemimpin terhadap rakyat haruslah selalu berdasar kepentingan mereka."

Acuan dasar dari kepentingan rakyat adalah hak-hak mereka yang dalam syariat Islam sekurang-kurangnya meliputi 5 (lima) hak induk:

- a. Perlindungan hidup dan keselamatan jiwa raga (hifzh al-nafs),
- b. Perlindungan hak meyakini dan menjalankan agamanya (hifzh al-din),
- c. Perlindungan keselamatan, perkembangan dan pendayagunaan akal budi (hifzh al-'aqli),
- d. Perlindungan hak atas harta benda atau kekayaan yang diperoleh secara sah (hifzh al-mal),
- e. Perlindungan hak keturunan (hifzh al-nasl).1

Perlindungan dan jaminan hak ini juga berlaku bagi non muslim yang sepakat untuk hidup bersama sebagai satu umat/bangsa, sebagai mu'ahid atau dzimmy.

Rasulullah bersabda:

¹ Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th.), h. 174.

شَيْئًا بِغَيْرِ طِيْبِ النَّفْسِ مِنْهُ فَأَنَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالبَيْهَةِيُ

"Barangsiapa yang menyakiti orang dzimmy maka sama saja dengan menyakitiku; ... Ketahuilah barangsiapa yang menzalimi orang mu'ahid, atau mengurangi hak-haknya, atau membebani suatu yang tidak mampu dipikulnya, atau mengambil suatu tanpa kerelaan hatinya (menjarah), maka saya (Nabi)lah yang akan menghadapinya nanti da hari kiamat ... (HR. Abu Dawud dan al-Baihaqi)

2. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan di atas secara khusus pemerintah harus melakukan pemberdayaan dan perlindungan hak-hak rakyat yang lemah (baik fisik, sosial, ekonomi, politik dan budaya) dari eksploitasi dan agresi kelompok kuat. Negara/Pemerintah manapun yang tidak menunjukkan komitmen pada keadilan dan perlindungan rakyat lemah, dalam pandangan Islam adalah batal, tidak legitimate.

Allah berfirman:

"Tahukah engkau siapakah (orang/negara) yang mendustakan agama? Yaitu yang tidak peduli terhadap anak yatim dan tidak secara sungguh-sungguh memecahkan persoalan makan (dan kebutuhan pokok hidup lainnya: sandang, papan, kesehatan, pendidikan) bagi orang-orang miskin." (QS. al-Ma'un: 1-3) Rasulullah bersabda:

"Allah tidak menyucikan suatu kaum yang pihak lemahnya tidak bisa memperoleh hak dari pihak kuatnya, dalam kondisi pihak yang lemah itu tidak membuat resah pihak yang kuat." (HR. al-Thabrani)

Peranan pelindung bagi yang lemah terhadap pihak yang kuat ini, ditegaskan secara jelas oleh khalifah Rasul pertama, Abu Bakar Ra. dalam pidato pelantikannya sebagai berikut:

"Dan rakyat lemah di sisiku adalah pihak yang kuat, sehingga aku mengambilkan haknya untuknya, dan rakyat yang kuat di sisiku adalah pihak yang lemah, sehingga aku mengambil hak (orang lain) darinya."²

² Ibn al-Atsir, al-Kamil fi al-Tarikh, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1987), Jilid II, h. 194-195.

3. Bahwa dalam rangka tegaknya amanat di atas (kemashlahatan umum dan pemberdayaan kelompok lemah). Allah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk, atas nama Allah, memungut uang dari mereka yang mampu sebagai sumber utama keuangan negara. (Dalam istilah syariat, pajak atas warga negara muslim disebut "zakat" dan bagi warga negara non muslim disebut "jizyah").

Allah Swt. berfirman:

"Tidak tahukah mereka bahwa yang berhak menerima tobat manusia hanyalah Allah (bukan para pendeta), demikian pula yang berhak memungut sedekahnya (bukan raja/penguasa) (QS. al-Taubah:104)

Karena Allah tidak memungut pajaknya sendiri, maka pemerintahlah yang diberi wewenang untuk itu; sekali lagi atas mandat dari Allah, bukan karena kewenangan yang melekat pada dirinya:

"Ambillah dari harta mereka yang mampu sedekah zakat untuk mensucikan mereka dan mengembangkan kehidupan mereka... (QS. al-Taubah: 103)

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk." (QS. al-Taubah: 29)

Sayyidina Ali berkata:

"Dengan bersedia membayar pajak/jizyah, maka orang non muslim memiliki hak yang sama atas harta mereka maupun jiwa mereka seperti yang dimiliki oleh orang-orang atau warga negara muslim."

Tujuan sosial dari perintah di atas dan semua kebijakan sosial ekonomi dalam Islam, seperti dikatakan oleh al-Qur'an, adalah untuk:

كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأُغْنِيَآءِ مِنكُمًّ

"Agar rezeki Allah tidak hanya berputar-putar di kalangan orang-orang kaya saja." (QS. al-Hasyr: 7)

4. Dengan demikian dalam pandangan Islam, uang negara pada hakekatnya adalah uang Allah yang diamanatkan kepada pemerintah/negara, bukan untuk penguasa melainkan untuk ditasarufkan bagi sebesar-besarnya kemaslahatan seluruh rakyat, tanpa diskriminasi apapun. Setiap rupiah dari uang pajak (juga setiap titik kekuasaan yang dibiayai dengan uang pajak) harus dipertanggungjawabkan kepada Allah (di akhirat nanti) dan dipertanggung jawabkan kepada rakyat (di dunia).

Rasulullah Saw. bersabda:

"Berikanlah hak-hak penguasa, karena sesungguhnya Allah adalah Dzat yang meminta pertanggungjawaban dari setiap perkara yang Allah jadikan mereka penguasa (pada perkara itu)." (HR. Bukhari)

Rasulullah Saw. bersabda:

"Tidak seorang manusia yang Allah jadikan penguasa rakyat kemudian ia mati pada hari kematiannya dalam keadaan mencurangi rakyatnya, kecuali Allah haramkan baginya surga." (HR. Muslim)

Perkataan Sayyidina Umar bin Khaththab Ra.:

"Sesungguhnya aku menempatkan diriku dari harta Allah pada kedudukan wali anak yatim. Jika aku memerlukan maka aku ambil sebagiannya, dan jika aku tidak memerlukannya, maka aku menjaga diri (tidak mengambilnya)."³

5. Dalam pandangan Islam, uang negara yang sebagian besar dari pajak sebagai uang Allah, haruslah ditasharufkan sejujur-jujurnya sesuai dengan petunjuk Allah, yakni bagi kemaslahatan segenap rakyat, dengan memprioritaskan kaum fakir miskin, apapun agama, warna kulit maupun sukunya.

Firman Allah Swt.:

³ Al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 121.

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسْكِينِ وَٱلْعَنمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ قُلُومُهُمْ وَفِ ٱلرِّقَابِ
 وَٱلْغَرمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَريضَةً مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ٥

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS. al-Taubah: 60) Rasulullah Saw. bersabda kepada Mu'adz bin Jabal selaku gubernur Yaman:

أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاثِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

"Beritahukan kepada rakyat, bahwa Allah mewajibkan sedekah (zakat) pada mereka yang diambil dari mereka yang mampu dan diberikan kepada mereka yang tidak mampu (fuqara' sebagai prioritas)." (HR. Muslim).

Tentang hak warga negara non-muslim untuk menerima keuntungan dari pajak (zakat) umat Islam yang dikelola negara, mengacu pada firman Allah Swt.:

"Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang (non-muslim) yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian; sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil." (QS. al-Mumtahinah: 8)

- 6. Berdasarkan prinsip di atas, warga negara muslim khususnya dan warga negara umumnya baik yang duduk di Pemerintahan maupun di Parlemen (DPR/DPRD) secara moral-keagamaan wajib mengacukan penggunaan (pentasharufan) uang negara dalam APBN/APBD bagi kepentingan ashnaf delapan di atas dengan definisi dari cakupan yang disesuaikan (dikontekstualkan) dengan kondisi dan situasai masyarakat yang terus berkembang.
- 7. Merupakan kewajiban seluruh rakyat, langsung maupun melalui wakilwakilnya, khusunya para ulama untuk melakukan kontrol sosial (amar ma'ruf dan nahi munkar) secara terus-menerus di semua tingkatan dari desa sampai pusat agar tidak satu rupiahpun dari uang negara sebagai milik Allah (dan kekuasaan yang dibiayai dengan uang itu)

diselewengkan untuk kepentingan pribadi penguasa atau disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan melawan tuntutan kemaslahatan dan keadilan bersama.

Allah Swt. berfirman:

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِى إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ۞ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِغْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞

"Telah dikutuk orang-orang kafir dari bani Israil melalui lisan Dawud dan Isa putra Maryam, disebabkan mereka selalu durhaka dan melampaui batas: Mereka satu sama lain tidak mau saling mengoreksi dan mengkritik kemungkaran yang mereka perbuat, sungguh sangat buruk yang mereka lakukan." (QS. Al-Ma'idah: 78-79)

Rasulullah Saw. bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيْمَانِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

"Barangsiapa yang melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tangan; jika tidak mampu dengan lisan; jika tidak juga mampu; dengan hati. Posisi terakhir itulah selemah-lemah iman." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam kitab *Adab al-Dunya wa al-Din*, al-Mawardi menyampaikan sabda Rasulullah Saw.:

لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ تَحْتَ يَدِ اللهِ وَفِي كَنَفِهِ مَا لَمْ يُمَارِ قُرَّاؤُهَا أُمَرَاءَهَا وَلَمْ يُزُكِ صُلَحَاؤُهَا فُرَاءَهَا وَلَمْ يُزُكِ صُلَحَاؤُهَا فُجَّارَهَا وَلَمْ يُمَارِ أَخْيَارُهَا أَشْرَارَهَا فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ رَفَعَ عَنْهُمْ يَدَهُ ثُمَّ سَلَّطَ عَلَيْهِمْ جَبَايِرَتَهُمْ فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَضَرَبَهُمْ بِالْفَاقَةِ وَالْفَقْرِ وَمَلَأَ قُلُوبَهُمْ رُعْبًا

"Umat ini senantiasa dalam kebaikan di bawah kekuasaan Allah dan perlindunganNya selama para ulamanya tidak mendebat penguasanya, yang saleh tidak menganggap baik yang keji, dan yang baik tidak mendebat yang jahat. Jika mereka telah melakukannya, maka Allah akan menarik kekuasaannya, kemudian Allah kuasakan atas mereka penguasa yang angkara murka, lalu ia akan menimpakan siksa yang buruk pada mereka, dan akan membuat mereka kelaparan dan kefakiran serta memenuhi hati mereka dengan rasa ketakutan". [1]

⁴ Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, (Dar Maktabah al-Hayah, t.th), h. 83.

HASIL KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA Di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta 25 – 28 Juli 2002/14 – 17 Rabiul Akhir 1423

TENTANG MASAIL AL-MAUDHUTYYAH AL-SIYASIYYAH

14. Hutang Negara 15. Hukuman Bagi Koruptor 16. Money Politik dan Hibah kepada Pejabat 17. Melawan Kedzaliman dengan Pengorbanan Jiwa

Tim Perumus:

1.KH. Drs.A.Hafidz Utsman (Ketua merangkap Anggota)

- 2. KH. Masdar F.Mas'ud, MA. (Sekretaris merangkap Anggota)
 - 3. KH. DR. Manarul Hidayat (Anggota)
 - 4. KH. Malik Madani (Anggota)
 - 5. KH. Mas Subadar (Anggota)
 - 6. KH. Ahmad Dairani (Anggota)
 - 7. KH. Ahmad Farihi (Anggota)

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA

TAHUN 1423 H/2002 M Nomor: 001/Munas/2002

Tentang

MASAIL AL-MAUDHU'IYYAH AL-SIYASIYYAH

بسم الله الرحمن الرجيم

Mengingat

- a. Keputusan Muktamar 30 NU tahun 1999 di Lirboyo Kediri;
- b. Surat Keputusan PBNU No. 274/A.II.03d/7/2002 tanggal 1 Dzulhijjah 1424/13 Pebruari 2002 tentang Pembentukan Panitia Munas dan Konbes:
- Tatakerja Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tahun 1985.

Memperhatikan:

- a. Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar, tanggal 14 Rabiul Akhir 1423 H/25 Juli 2002;
 - b. Laporan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar, tanggal 14 Rabiul Akhir 1423 H/25 Juli 2002;
 - c. Pandangan Umum para peserta Munas tanggal 15 Rabiul Akhir 1423 H/ 26 Juli 2002;
 - Permusyawaratan yang berlangsung pada Komisi Masail al-Maudhu'iyyah al-Siyasiyyah;
 - d. Sidang pleno pengesahan komisi-komisi hasil Munas Alim Ulama tanggal 17 Rabiul Akhir 1423/28 Juli 2002;

MEMUTUSKAN:

Pertama

Mengesahkan hasil Sidang Komisi Masail Waqi'iyyah Siyasiyah, pada Musyawarah Nasional Alim Ulama tanggal 17 Rabiul Akhir 1423 H/28 Juli 2002, seperti terlampir dalam keputusan ini;

Kedua

Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, serta perang-katnya di seluruh Indonesia untuk melaksanakan keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, serta disampaikan kepeda pihak-pihak yang terkait sesuai dengan amanat Munas;

> Jakarta: 17 Rabiul Akhir 1423 H Iuli 2003 M

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA PIMPINAN SIDANG PLENO XXVIII

ttd

ttd

KH M. Irfan Zidny, MA Ketua

Drs. KH. A. Ghozalie Masroerie Sekretaris

14. Hutang Negara

A. Deskripsi Masalah

Sampai saat ini Negara kita masih belum bisa keluar dari krisis ekonomi. Untuk menutupi anggaran, terpaksa negara terus meminjam ke sana ke mari, sehingga sampai kini hutang negara telah mencapai angka 2.100 milyar US \$. Artinya, jika hutang negara dibagi rata di antara penduduk, maka setiap kepala termasuk bayi yang baru lahir, harus menanggung beban hutang masing-masing sekitar 6-7 juta rupiah. Sementara kita tahu bahwa tidak sedikit di antara uang hutang tersebut dikorup oleh para pejabat.

Aturan main soal hutang piutang termaktub dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282, hal ini sebagai indikator betapa seriusnya urusan hutang piutang tersebut, bukan sepanjang hidup di dunia saja, tapi sampai akherat kelak.

Sebagai bahan bahasan, panitia Munas dan Konbes menyelenggarakan seminar tentang masalah tersebut.

B. Pertimbangan Hukum

- a. Pemerintah sebagai pelaksana wewenang negara adalah wakil kita, atau memegang mandat untuk mengurus keperluan rakyat dan melindungi hak-haknya, Kemaslahatan rakyat adalah acuan utama seluruh kebijakan dan kerja negara-pemerintah, sesuai kaidah fiqh "Tasarruf al-imam 'ala raiyyah manuth bi al-mashlahah".
- b. Berkaitan dengan beban hutang, Nabi Muhammad Saw., diriwayatkan, tidak berkenan menshalatkan jenazah yang masih mempunyai hutang (HR. Bukhari). Pahala ahli kubur akan ditangguhkan sampai hutangnya dilunasi. (HR. Turmudzi). Pada hari kiamat nanti hutang itu sudah dibayar dengan pahala kebaikan, jika pahalanya sudah habis sementara penagih masih antri, maka dosa piutang akan dipikul kepada yang mempunyai hutang (HR. Bukhari).
- Allah Swt. akan membebaskan semua dosa orang yang mati syahid, kecuali masalah hutang (HR. Muslim, Riyadhush Shalihin, Kitab Jihad)

C. Pertanyaan

- a. Benarkah hutang negara sebagai hutang pribadi warga?
- b. Siapakah yang bertanggungjawab untuk membayarnya?
- c. Apabila seseorang meninggal dunia sementara hutang negara belum dibayar, apakah berhak dishalati?

D. Jawaban

- a. Yang bertanggungjawab membayar adalah negara, dengan rincian sebagai berikut:
 - Terhadap hutang negara yang dipakai untuk kemashlahatan rakyat banyak, maka negara membayarnya dengan dana kas negara.
 - Terhadap hutang negara yang dikorup oleh para pejabat dan kroninya, maka negara membayarnya dengan dana yang ditarik kembali dari orang-orang yang mengkorupnya.

E. Dasar Pengambilan Hukum

1. Al-Fatawa1

وَأَمَّا دَيْنُ الْمَيِّتِ فَإِنْ كَانَ مَعْدُورًا فِي تَأْخِيْرِهِ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ أَنَّهُ يَعْصِى وَلاَ يَأْثُمُ وَإِنْ الْمَعْصِيَةِ كَانَ عَاصِيًا فِي تَأْخِيْرِهِ فَإِنَّهُ يَأْثُمُ بِذَلِكَ، وَإِنِ اسْتَدَانَهُ لِمَعْصِيَةٍ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرًا لِأَنَّهُ عَصَى مَعْصِيَتَيْنِ، وَإِنِ اقْتَرَضَ لِوَاجِبٍ أَوْ مُبَاحٍ وَلَمْ يُقْصِرْ فِي التَّأْخِيْرِ لَا عَلَيْهِ وَزْرًا لِأَنَّهُ عَصَى مَعْصِيَتَيْنِ، وَإِنِ اقْتَرَضَ لِوَاجِبٍ أَوْ مُبَاحٍ وَلَمْ يُقْصَى عَنْهُ. فَالتَّعَلُقُ إِثْمَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقُ بِدَيْنِهِ حَتَى يُقْضَى عَنْهُ. فَالتَّعَلَّقُ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَتَعَلَّقَ تَعَلَّقَ عَقَابٍ وَمُوَاخَذَةٍ، فَهَذَا لَا تَجْرِي فِيْ حَقِ النَّبِي عَلَى اللهُ لِللهُ الْمِنْ الْمُعَلِي وَمُوَاخَذَةٍ، فَهَذَا لَا تَجْرِي فِيْ حَقِ النَّبِي عَلَى اللهُ الْمُعَلِي وَمُواخَذَةٍ، فَهَذَا لَا تَجْرِي فِيْ حَقِ النَّبِي عَلَى اللهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَهَذَا مُحَالًا أَنْ يُوْجَدَ فِي حَقِ النَّبِي عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الل

Adapun hutang mayit, maka jika ia memiliki udzur dalam menunda pelunasan hutangnya sampai meninggal dunia, maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama muslimin bahwa tidak maksiat dan tidak menanggung dosa. Jika ia bermaksiat dalam menunda pelunasan hutangnya, maka ia berdosa dengan sebab penundaan tersebut. Jika ia berhutang untuk perbuatan maksiat, maka ia berdosa dengan dua maksiat, dan jika ia berhutang untuk sesuatu yang wajib atau mubah, dan ia tidak teledor dalam menunda (pembayaran) maka ia tidak berdosa. Adapun sabda Nabi Saw.: "Diri seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sampai dilunasi." Pengertian tergantung di itu dua macam. Pertama, tergantung dengan hukuman dan siksaan.

¹ Izzuddin bin Abdissalam, al-Fatawa, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986), h.104.

Yang demikian ini tidak berlaku pada seorang muslim pun, ketika ia tidak berdosa dengan hutang dan menunda pelunasannya. Yang seperti ini mustahil terjadi pada pribadi Nabi Saw., karena beliau tidak berhutang kecuali untuk ketaatan atau sesuatu yang mubah. *Kedua*, dirinya tergantung dengan hutang tersebut. Dalam arti pahala-pahala amal kebaikannya diambil untuk mengganti hutang-hutangnya dalam halhal yang mubah, sebagaimana ketika di dunia ia menjual rumah dan budaknya (untuk melunasi hutang), dan dia tidak berdosa.

Jawaban

b. Jika yang dimaksud adalah warga negara biasa, ia tetap dishalati, tetapi jika yang dimaksud adalah pejabat negara yang mengkorup uang negara, para ulama -sebagai pewaris Nabi/waratsah al-anbiyahendaknya meneladani Rasulullah Saw untuk tidak menshalati.

Dasar Pengambilan Hukum

1. Badzl al-Majhud fi Hall Abi Dawud²

(حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ عَنْ يَهِي بْنِ سَعِيْدٍ) الْقَطَّانِ (وَبِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ حَدَّنَاهُمْ) أَيْ مُسَدَّدٍ أَوْ مَنْ كَانُوا مَعَهُ فِي مَجْلِسِ التَّحْدِيْثِ (عَنْ يَهْيَ بْنِ سَعِيْدٍ) الْأَنْصَارِيّ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَهْيَ بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهْنِيِّ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ لَمْ أَقْفَ عَلَى تَسْمِيتِهِ لَكِنْ فِي رِوَايَةٍ أَحْمَدَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَشْجَعِ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ (تُوثِقَي يَوْمَ أَقِفْ عَلَى تَسْمِيتِهِ لَكِنْ فِي رِوَايَةٍ أَحْمَدَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَشْجَعِ أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ (تُوثِقَى يَوْمَ خَيْبَرَ (فَذَكُرُوا ذَلِكَ) أَيْ مَوْتَهُ وَالصَّلاَةَ عَلَيْهِ (لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ) رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ) مَنْ فَي عَزْوَةٍ حَيْبَرَ (فَذَكُرُوا ذَلِكَ) أَيْ مَوْتَهُ وَالصَّلاَةَ عَلَيْهِ (لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ) رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ) مَسُولُ اللهِ ﷺ (إِنَّ صَاحِبِكُمْ فَلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ) أَيْ يَهِ مَالٍ حَصَلَ الصَّلاَةِ فِيهِ (فَقَالَ) رَسُولُ اللهِ ﷺ (إِنَّ صَاحِبِكُمْ فَلَقُهُاءُ: إِذَا مَاتَ الْقَاسِقُ اللهِ اللهِ) أَيْ فِي مَالٍ حَصَلَ فِي الْجِهَادِ فَلاَ أُصَلِّي عَلَيْهِ، فَلِهَذَا قَالَ الْفُقَقَاءُ: إِذَا مَاتَ الْقَاسِقُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْفِسْقِ يَجُورُ وَ التَّاسَ أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ الْإِيقِةُ الَّذِيْنَ يُقْتَدَى بِهِمْ بَلْ يَأْمُونُونَ التَّاسَ أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُعْتَى الْفِسْقِ يَجُورُ وَاللّهُ فِي الْقَامُونِينَ وَالْمُونِ التَّاسَ أَنْ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَلَهُ مِنْ الْفُلُولِ وَالْقَامُونِينَ وَالْمَوْلِ اللهِ الْمَدِيْنَةِ فَاسْتُدِلَّ مِرَا مِنْ حَرَزِ يَهُودَ الْفَالِقَ الْمُولِي وَلَا مِنْ خَرَوا مِنْ خَرَوْ مَهُونَهُ الْمُؤْلِ وَمَا لَيْهُمْ وَلَمْ الْمُلْولِ عَلَى الْمُولِ اللهِ الْمَالِى اللهَ الْمُؤْلِ اللهِ الْمَالَى اللهُ الْمُؤْلِ اللهِ الْمَدِيْنَةِ فَاسُتُولَ اللهَ الْمُؤْلِ اللهِ الْمُؤْلِ اللهَ الْمُؤْلِ اللهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِ اللهَ الْمُؤْلِ اللهِ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِ اللهَا الْمُولِ اللهَا الْمُؤْلِ اللهُ الْمُؤْلِ اللهِ الْمُؤْلِ اللهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْفَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

² Ahmad al-Saharanfuri al-Hindi, Badzl al-Majhud fi Hall Abi Dawud, (Beirut: Dar a-Kutub al-Ilmiyah, t. th.) Jilid VI, Juz 12, h. 284-285.

(Musaddad telah menceritakan kepada kami dari Yahya) bin Said al-Qaththan (dan Bisyr bin al-Mufadhdhal, keduanya telah bercerita pada mereka), yaitu Musaddad atau orang-orang yang bersamanya dalam majlis penyampaian hadits, (dari Yahya bin Sa'id al-Anshari, dari Muhammad bin Yahya bin Hibbban dari Abu Amrah dari Zaid bin Khalid al-Juhani, sungguh seorang sahabat Nabi Saw.), saya belum meniliti namanya, akan tetapi dalam riwayat al-Imam Ahmad disebutkan: "Salah seorang pemberani dari sahabat Nabi Saw." (mati pada hari Khaibar), maksudnya dalam perang Khaibar. (lalu para sahabat menyampaikan hal itu), maksudnya berita kematian dan mengenai urusan menyolatinya (pada Rasulullah Saw., lalu beliau Saw. menjawab: "Shalatilah teman kalian." Maka berubahlah roman muka para sahabat) karena penolakan beliau Saw., (Lalu beliau) Rasulullah Saw. (menjelaskan: "Sesungguhnya teman kalian ini telah berbuat curang dalam perjuangan di jalan Allah) yakni terkait dengan harta yang diperoleh dari peperangan, karenanya aku tidak mau menyolatinya." Atas dasar ini para fuqaha menyatakan: "Jika seorang pendosa besar yang tetap dalam perbuatan dosanya mati, maka para ulama atau tokoh yang menjadi panutan boleh tidak menyolatinya, namun ia perintahkan orang lain menyolatinya. (Maka kami pun memeriksa barang bawaannya, lalu kami temukan suatu kharaz dari orang Yahudi yang nilainya tidak lebih dari dua dirham). Dalam kitab al-Qamus al-Fairuz Abadi berkata: "Dan kharazah dengan huruf ra' yang berharakat, bermakna intan dan yang telah terangkai. Zaid bin Khalid al-Juhani menisbatkan kharaz itu kepada kaum Yahudi karena diambil dari mereka dan tidak dimiliki orang Madinah. Maka dengan hal itu diketahui bahwa barang tersebut berasal dari ghulul (kecurangan/korupsi).

2. Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim³

Dan sungguh orang-orang terkemuka tidak boleh menyolati jenazah orang-orang fasiq, sebagai peringatan bagi yang lainnya.

Jawaban

 Mengingat beban negara yang sudah demikian beratnya dan kenyataan bahwa hutang negara banyak yang dikorup oleh para

³ Al-Nawawi, Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1392 H), Juz VII, h. 47.

pejabat dan kroninya, serta manfaatnya untuk rakyat pun tidak jelas, maka tidak dibenarkan menambah hutang baru. Kecuali jika benar-benar memaksanya (dharurat), maka kebijakan itu boleh diambil, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh syarat-syarat sebagai berikut:

- Hutang harus ditasharrufkan untuk membiayai program/ proyek yang benar-benar memenuhi hajat hidup rakyat banyak, khususnya yang lemah.
- 2) Harus ada jaminan kontrol yang benar-benar keras untuk menghindari terjadinya penyelewengan.
- 3) Harus dilakukan dengan pesetujuan rakyat, melalui lembaga yang benar-benar mewakilinya.
- 4) Tidak boleh diikuti oleh oleh persyaratan-persyaratan yang dapat merugikan atau mengurangi kedaulatan negara.

Dasar Pengambilan Hukum

1. Al-Asybah wa al-Nazha'ir4

Kebijakan kepala pemerintahan bagi rakyat harus berdasarkan kemaslahahatan.

15. Hukuman Bagi Koruptor

A. Deskripsi Masalah

Korupsi atau jelasnya pencurian uang negara dan rakyat di negara kita Indonesia baik yang dilakukan secara terang-terangan atau terselubung sejak Republik ini berdiri tetap saja berlangsung. Bahkan nilainya semakin menggelembung, berlipat ganda. Akibatnya sangat merugikan bangsa dan negara. Rakyat jadi miskin, negara hampir bangkrut. Kekayaan dan aset negara terkuras dan tergadaikan. Dari data hasil survei lembaga Internasional PERC, Indonesia adalah negara terkorup di Asia dan menempati nomor satu. Padahal, Indonesia berpenduduk mayoritas Islam.

B. Pertanyaan

a. Bagaimana definisi atau konsep syariah mengenai korupsi?

⁴ Abdurrahman al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (Mesir: Maktabah al-Tujjariyah, t. th.), h. 107. Lihat pula, Zainuddin Najim, *al-Asybah wa al- Nazha'ir*, (Makkah: Maktabah Nizar Musthafa, 1997), Jilid I, h. 163.

- b. Apakah dengan dikembalikannya uang hasil korupsi tersebut, seseorang akan terbebas dari tuntutan hukum; baik hukum negara maupun hukum syariat Islam?
- c. Untuk mencegah berlangsungnya korupsi, jenis hukuman apa yang setimpal bagi koruptor tersebut, sehingga mereka jera dan bagi yang berniat akan korupsi juga merasa takut akan akibatnya baik dari dirinya, maupun keluarganya?

C. Jawaban

a. Dalam pandangan syariat, korupsi merupakan pengkhianatan berat (ghulul) terhadap amanat rakyat. Dilihat dari cara kerja dan dampaknya, korupsi dapat dikategorikan sebagai pencurian (sarigah), dan perampokan (nahb).

D. Dasar Pengambilan Hukum

1. Is'ad al-Rafiq Syarh Matn Sulam al-Taufiq⁵

(وَ) مِنْهَا (السَّرِقَةُ) بِفَتْحِ السِّيْنِ وَكُسْرِ الرَّاءِ وَيَجُوْزُ إِسْكَانُهَا، وَهِي أَخْذُ الْمَالِ خُفْيَةً، وَهِيَ مِنَ الْكَبَائِرِ اتِقَاقًا. قَالَ فِي الزَّوَاجِرِ: وَهُو صَرِيْحُ الْأَحَادِيْثِ كَحَدِيْثِ: "لاَ يَزْنِي وَهُو مُؤْمِنُ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَفِي رِوَايَةٍ الزَّانِي حِيْنَ يَزْنِي وَهُو مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ. فَإِنْ تَابَ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَحَدِيْثِ: "لاَ يَوْنَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ. فَإِنْ تَابَ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، وَحَدِيْثِ: "لَكَنَ اللهُ السَّارِقُ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْجُبْلِ فَلاَثَةً دَرَاهِمَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اللهُ السَّارِقُ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ الْحَدِيْدِ وَالْحَبْلَ فَلاَثَةَ دَرَاهِمَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اللهُ السَّارِقُ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ الْحَدِيْدِ وَالْحَبْلَ فَلاَثَةَ دَرَاهِمَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اللهُ السَّارِقُ يَرُونَ ثَمَنَ بَيْضَةِ الْحَدِيْدِ وَالْحَبْلَ فَلاَثَةً دَرَاهِمَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اللهُ السَّارِقُ يَرُونَ ثَمَنَ بَيْضَةِ الْحَدِيْدِ وَالْحَبْلَ فَلاَثَةً دَرَاهِمَ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ اللهُ السَّارِقُ يَتُومُ لَا قَطْعَ بِهَا لِأَنَّ لَا فَوْقَ فِي كُونِهَا كَيْنَ الْمُوجِبَةِ لِلْقَطْعِ بِهَا لِأَنَ لَا كَانَتُ لاَ تَقْلُ وَالسَّامِقُ مَصْرَ مَسْجِدٍ فَإِنَّهُ يَحُرُمُ لَكِونَ لاَ قَطْعَ بِهَا لِأَنْ وَقَا فَيْ اللهُ مَنْ اللهُ وَيْ عَرَامُ لَا قَطْعَ بِهَا لِأَنْ اللهُ وَيْهَا حَقَّا لُولُ الْمَوْوِيِّ صَرَحَ بِهِ.

(Dan) di antara dosa besar adalah (sariqah -pencurian-), dengan dibaca fathah huruf sin dan kasrah huruf ra'nya. Yaitu mengambil harta -yang bukan miliknya) secara sembunyi-sembunyi. Menurut kesepakatan para ulama perbuatan pencurian termasuk dosa besar. Dalam al-Zawajir Ibn Hajar al-Haitami menyatakan: "Itu merupakan pernyataan yang sangat jelas dari beberapa hadits, semisal hadits:

⁵ Abdullah bin Husain Ba'alawi, *Is'ad al-Rafiq Syarh Matn Sullam al-Taufiq*, (Singapura: al-Haramaian, t. th.), Juz II, h. 97.

"Seorang pezina tidak melakukan perzinahan dalam kondisi ia beriman dan seorang pencuri tidak melakukan pencurian dalam kondisi ia beriman." Dalam riwayat lain dengan redaksi: "Jika ia melakukan hal tersebut maka ia telah menanggalkan hukum Islam dari dirinya. Jika ia bertobat maka Allah menerima tobatnya." Dan hadits: "Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri sebiji telur sehingga menyebabkan tangannya dipotong, dan yang mencuri seutas tali sehingga tangannya dipotong." Al-A'masy menjelaskan: "Para sahabat Nabi menilai harga telur (helm baja untuk perang) dan tali (kapal) sampai tiga dirham. Dan beberapa hadits lain yang cukup banyak. Ibn Hajar menjelaskan: "Yang jelas sungguh tidak ada perbedaan dalam hal pencurian itu merupakan dosar besar, antara pencurian yang mengakibatkan hukuman potong tangan dan yang tidak, jika yang diambil memang tidak halal baginya. Semisal ia mengambil tikar masjid, maka hukumnya haram, akan tetapi tidak mengakibatkan hukuman potong tangan, karena ia memiliki bagian hak dalam tikar masjid itu. Kemudian saya melihat al-Imam al-Harawi secara jelas menyatakan hal tersebut."

2. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an6

قَالَ الْعُلَمَاءُ وَالْغُلُولُ كَبِيْرَةً مِنَ الْكَبَائِرِ بِدَلِيْلِ هَذِهِ الْآيَةِ وَمَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةً فَلَ اللهِ عَلَيْ فِي مِدْعَمِ وَالَّذِى نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَعْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي مِدْعَمِ وَالَّذِى نَفْسِيْ بِيدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ اللّهِ عَلَيْهِ نَارًا قَالَ فَلَمَّا سَمِعَ النَّي أَخَذَ يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا قَالَ فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ ذَلِكَ جَاءَ رَجُلُ بِشِرَاكِ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ شِرَاكُ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ شِرَاكُ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ شِرَاكُ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَاللّهُ مَنْ فَاللّهِ عَلَيْهِ السَّلامُ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيدِهِ وَامْتِنَاعُهُ مِنَ السَّالَةُ مِنَ الْمُعَالِمُ وَلَا مُنْ عَلَى مَنْ عَلَ دَلِيْلُ عَلَى تَعْظِيْمِ الْغُلُولِ وَتَعْظِيْمِ الذَّنْ فِيهِ وَأَنَّهُ مِنَ الْكَبَائِرِ وَهُو مِنَ الْعُصَاصِ بِالْحُسَنَاتِ وَالسَّيْمَاتِ

Para ulama berkata: "Perbuatan khianat (korupsi) merupakan bagian dari dosa besar berdasarkan ayat ini.⁷ Dan hadits yang telah

⁷ Maksudnya Surah Ali 'Imran ayat 151, yaitu:

وَمَن يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ

⁶ Muhammad bin Abi Bakar al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), Jilid III, h. 166.

[&]quot;Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu." (Pen.)

kami sebutkan dari riwayat Abu Hurairah Ra.; "Sungguh ia akan memikul hutangnya di lehernya." Rasulullah Saw. Sungguh telah bersabda tentang Mid'am (seorang budak): "Aku bersumpah demi Dzat yang jiwaku ada dalam kekuasanNya. Sungguh selendang selimut yang ia ambil di hari peperangan Khaibar yang merupakan harta pampasan perang yang diambil oleh pegawai pembagian harta, akan menyalakan api neraka baginya." Setelah mendengar penjelasan itu lalu ada yang datang kepada Rasulullah Saw. menyerahkan satu atau dua utas tali sandal, lalu beliau Saw. bersabda: "Seutas tali dan dua utas tali sandal dari itu dari api neraka." Hadits itu diriwayatkan Imam Malik dalam kitab al-Muwaththa'. Maka sumpah Nabi Saw. dengan kaliamat: "Demi Dzat yang jiwaku ada alam kekuasanNya." dan penolakannya menyolati orang yang telah melakukan pengkhianatan (korupsi) merupakan dalil atas parahnya perbuatan tersebut, begitu besar dosanya, ia termasuk dosa besar yang terkait dengan hak-hak orang lain dan di dalamnya harus diberlakukan qishash terkait amal kebajikan dan amal jeleknya.

Jawaban

- b. Pengembalian uang hasil korupsi tidak menggugurkan hukuman. Karena tuntutan hukuman merupakan hak Allah, sementara pengembalian uang korupsi ke negara merupakan hak masyarakat (hak adami).
- c. Hukuman yang layak baginya adalah potong tangan sampai dengan hukuman mati.

Dasar Pengambilan Hukum

1. Futuhat al-Wahhab bi Taudih Syarh Manhaj al-Thullab8

Imam Malik berkata: "Jika pelaku tindak pencurian merupakan orang kaya, maka ia menanggung pengembaliannya, dan jika ia bukan orang kaya, maka tidak harus. Dan Hukuman potong tangan tetap berlaku pada semua kondisi. Bila ia mengembalikan harta curian ke tempat penyimpanan (semula), maka tidak menggugurkan hukuman potong tangan dan tanggungjawab mengembalikannya.

⁸ Muhammad bin Manshur al-Jamal, Futuhat al-Wahhab bi Taudih Syarh Manhaj al-Thullab, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) Juz V, h. 151.

2.Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh9

Dan kesimpulannya adalah sungguh boleh menghukum mati sebagai kebijakan bagi orang-orang yang sering melakukan tindakan kriminal, pecandu minuman keras, para penganjur tindak kejahatan, dan pelaku tindakan subversif yang mengancam keamanan negara dan semisalnya.

3. Referensi Lain

- a) Bughyah al-Mustarsyidin, Bab al-Shiyal.
- b) Al-Taj wa al-Iklil li Mukhtashar Khalil, Kitab al-Sariqah, karya Muhammad bin Yusuf al-'Abdari al-Mawaq, Beirut: Dar al-Fikr, Juz VI, h. 37.
- c) Al-Fatawa, karya 'Izzuddin bin Abdissalam.
- d) Syarh Fath al-Qadir, Juz V, h. 364.
- e) Al-Inshaf fi Ma'rifah al-Rajih min al-Khilaf min Madzhab Ahmad, Juz XI, h. 279.
- f) Tharh al-Tatsrib fi Syarh al-Tagrib, Juz VII, h. 264.
- g) Hasyiyah al-Jamal 'ala al-Manhaj, Juz V, h. 364.

16. Money Politik dan Hibah Kepada Pejabat

A. Deskripsi Masalah

Hasil pemeriksaan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) yang telah diumumkan kepada publik banyak pejabat negara kita di semua lembaga negara maupun perusahaan pemerintah (BUMN), yang asal kekayaannya berasal dari "hibah" untuk menghindari kesan bahwa hasil kekayaan tersebut didapat dengan cara melanggar hukum.

Sementara itu, kita juga melihat semakin maraknya praktek apa yang disebut money politics (politik uang), yakni sebuah hibah atau pemberian (berupa uang atau materi lainnya) yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain dalam rangka meraih jabatan atau tender proyek tertentu.

B. Pertanyaan

a. Bagaimana pandangan syariat Islam terhadap tindakan money politics?

⁹ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, t. th.), Juz VII, h. 518.

b. Bagaimana pandangan syariat Islam terhadap status hibah pejabat tertentu?

C. Jawaban

a. Money politics sebagai pemberian (berupa uang atau denda lainnya) untuk mempengaruhi dan atau menyelewengkan keputusan yang adil dan obyektif. Dalam pandangan syariat Islam hal itu merupakan suap (risyuah) yang dilaknat oleh Allah Swt. baik yang memberi (rasyi) ataupun yang menerima (murtasyi), maupun yang menjadi perantara (raisy).

D. Dasar Pengambilan Hukum

1. Fatawa al-Subki10

وَمُلَخَّصُ كَلاَمِ الْعُلَمَاءِ فِيْمَا يُعْطِى الْحُكَّامُ الْأَئِمَّةَ وَالْأُمْرَاءَ وَالْقُضَاةَ وَالْوُلاَةَ وَسَائِرَ مَنْ وَلَّا مَنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِيْنَ أَنَّهُ إِمَّا رِشْوَةً وَإِمَّا هَدِيَّةً. أَمَّا الرِّشُوةُ فَحَرَامُ بِالإِجْمَاعِ عَلَى مَنْ يُعْطِيهُا وَسَوَاءً كَانَ الْأَخْدُ لِتَفْسِهِ أَوْ وَكِيْلاً وَكَذَا الْمُعْطِي سَوَاءً أَكَانَ عَنْ يَأْخُدُهَا وَكَيْلاً وَكِيْلاً وَكَذَا الْمُعْطِي سَوَاءً أَكَانَ عَنْ يَأْخُدُهَا وَكِيْلاً وَكِيْلاً وَكَذَا الْمُعْطِي سَوَاءً أَكَانَ عَنْ يَغْطِيهِ أَوْ وَكِيْلاً وَكَيْلاً وَكُولِ الْمُعْلِقِ وَلَا يُعْطَى لِتَعْمِى لِتَغْمِى لِتَعْمِى لِتَعْمِى لِتَغْمِ عَلَى مَنْ يَأُولُونُ الْمُوسُولِ اللّهِ وَلَا الْمُعْلِى الْوَصُولِ الْمَالِ اللّهِ مِنْ عَلَى مَنْ يَأْخُذُهَا كَذَلِكَ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يُعْطِيهَا فَإِنْ لَمْ وَلَيْلاً وَلَا الْمُعُولِ اللّهُ وَلِي الْوَصُولِ الْمَالِي الْوَصُولِ اللّهُ وَلَا الْمُعْلَى عَلَى الْوَصُولِ اللّهُ وَلَا الْمُعْلِى عَلَى مَا يُعْطِى عَلَى الْوسُولُ اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَى مَنْ يَأْمُونُ وَلِي الْوَصُولِ الْمُعْلَى وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلِي الْمُولُولُ الْمُعْلَى عَلَى الْولُولُ وَلَا الْمُعْلَى عَلَى الْوَصُولُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ وَلَا اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ وَلَا اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ وَلَا اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ
Dan kesimpulan dari pendapat para ulama tentang harta yang diberikan para penguasa kepada para tokoh masyarakat, pejabat, hakim, penguasa pemerintahan, dan orang-orang yang mengemban tanggungjawab urusan kaum muslimin, bisa merupakan suap atau hadiah. Adapun suap hukumnya haram secara *ijma'* baik bagi yang menerima maupun yang memberi. Baik diambil untuk diri sendiri atau sebagai wakil orang lain. Demikian juga ketentuan pada yang memberi suap.

Pemberian tersebut wajib dikembalikan pada pemiliknya dan tidak boleh dimasukkan ke dalam bait al-mal, kecuali pemiliknya

¹⁰ Ali bin Abdul Kafi al-Subki, Fatawa al-Subki, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. th.), Juz I, h. 204.

tidak diketahui sehingga menjadi seperti status al-mal al-dhai'¹¹. Menurut ihtimal (kemungkinan) sebagian fuqaha mutaakhkhirin, harta tersebut diserahkan ke bait al-mal. Maksud suap yang kami sebutkan di atas adalah segala sesuatu yang diberikan dalam rangka menolak kebenaran atau menghasilkan kebatilan. Jika harta itu diberikan sebagai perantara untuk mendapatkan putusan hukum suatu hak, maka hukum haram berlaku bagi penerimanya dalam kasus begitu. Adapun orang yang tidak memberikan suap, maka jika ia tidak dapat memperoleh haknya kecuali dengan jalan memberikan suap, maka diperbolehkan menyuap. Namun jika ia mampu mendapatkan haknya tanpa memberi suap, maka tidak diperbolehkan. Demikian juga status hukum pemberian yang didasarkan pada kekuasaan atau jabatan, maka secara mutlak haram bagi penerimanya.

2. Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar12

Dan dalam kitab *al-Mishbah*, kata *risywah* (suap) -dengan dibaca *kasrah* huruf *ra'*nya- bermakna harta yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau selainnya supaya memberikan keputusan yang menguntungkannya, atau mendorongnya agar memutuskan hukum yang sesuai dengan keinginannya.

Jawaban

- b. (1) Hibah yang diterima oleh pejabat, status hukumnya adalah, karena di samping terkait dengan sumpah jabatan yang diucapkannya juga dapat mengandung makna suap (*risywah*) maupun bisa bermakna korupsi (*ghulul*).
 - (2) Dalam hal hibah atau hadiah yang diberikan oleh orang yang sebelumnya sudah biasa memberi dan jumlahnya pun tidak lebih besar dari biasanya, maka hukumnya mubah (boleh).

¹¹ Yaitu harta tersebut dipasrahkan ke bait al-mal agar dijaga bila masih diharapkan pemiliknya diketahui, dan dibelanjakan sesuai pos pembelanjaan bait al-mal bila sudah tidak diharapkan lagi diketahui pemiliknya. Demikian bila pegawai bait al-mal bisa dipercaya. Bila tidak, maka diserahkan kepada orang yang terpercaya agar dibelanjakan pada pos pembelanjaan harta bait al-mal bila si penemu harta tersebut tidak mengetahui pos pembelanjaan bait al-mal. Bila mengetahuinya maka ia belanjakan sendiri. (Pen.). Lihat, Hasyiyah al-Syirwani pada Hawasyai Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj, (Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.). Juz VI, h. 333.

¹² Ali bin Abdul Kafi al-Subki, Fatawa al-Subki, (Beirut Dar al-Fikr, 1979), Juz V, h. 362.

Dasar Pengambilan Hukum

1. Fatawa al-Subki¹³

وَأَمَّا الْهَدِيَّةُ وَهِيَ الَّتِيْ يُقْصَدُ بِهَا التَّوَدُّدُ وَاسْتِمَالَةُ الْقُلُوبِ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَمْ تُقَدَّمْ لَهُ عَادَةً قَبْلَ الْوِلاَيَةِ فَإِنْ زَادَ فَكَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَادَةً وَبْلَ الْوِلاَيَةِ فَإِنْ زَادَ فَكَمَا لَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَادَةً وَإِنْ لَمْ يَجُونُ وَإِنْ لَمْ يَجُونُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ خُصُومَةً جَازَ بِقَدْرِ مَا كَانَتْ عَلَى الْهَاضِي فِيْ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ أَكْثَرُ مِنَ عَادَتُهُ قَبْلَ الْوِلاَيَةِ وَالْأَفْضَلُ أَنْ لاَ يَقْبَلَ، وَالتَّشْدِيْدُ عَلَى الْقَاضِي فِيْ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ أَكْثَرُ مِنَ عَلَى الْقَاضِي فِيْ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ أَكْثَرُ مِنَ التَّشْدِيْدِ عَلَى عَيْرِهِ مِنْ وُلاَةِ الْأُمُورِ لِلْأَنَّهُ نَائِبٌ عَنِ الشَّرْعِ فَيَحِقُ لَهُ أَنْ يَسِيْرَ بِسِيْرَتِهِ التَّشْدِيْدِ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ وُلاَةِ الْأُمُورِ لِلْأَنَّهُ نَائِبٌ عَنِ الشَّرْعِ فَيَحِقُ لَهُ أَنْ يَسِيْرَ بِسِيْرَتِهِ

Adapun hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa cinta dan simpati, maka jika hadiah diberikan oleh orang yang tidak biasa memberi pada seseorang sebelum ia memangku suatu jabatan, maka hukumnya haram, namun jika dari orang yang sudah terbiasa memberi hadiah kepadanya sebelum ia mendapatkan jabatan, maka jika ia memberi lebih (dari biasanya), maka statusnya sama dengan jika si pemberi tidak terbiasa memberi hadiah kepadanya. Namun jika tidak lebih dari ukuran yang biasa diberikan, maka jika ia memiliki lawan sengketa, hukumnya tidak boleh, dan jika ia tidak memiliki lawan sengketa (pada suatu kasus), maka ia boleh mengambil sebatas ukuran yang biasa diterimanya sebelum menjabat, namun lebih utama tidak mengambilnya. Hukum larangan kepada seorang hakim untuk mengambil hadiah lebih kuat dari pada pejabat lain. Karena hakim adalah wakil dari syara', maka sudah seharusnya bila ia berjalan sesuai dengan hukum syara'.

2. Al-Mughni14

إِنِ ارْتَشَى الْحَاكِمُ أَوْ قَبِلَ هَدِيَّةً لَيْسَ لَهُ قَبُولُهَا فَعَلَيْهِ رَدُّهَا إِلَى أَرْبَابِهَا لِأَنَّهُ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقِّ فَأَشْبَهَ الْمَأْخُوذَ بِعَقْدٍ فَاسِدٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَأْمُرُ ابْنَ اللَّتْبِيَّةِ بِرَدِّهَا عَلَى أَرْبَابِهَا

Bila seorang hakim menerima suap atau hadiah yang tidak boleh diterimanya, maka ia wajib mengembalikannya kepada pemiliknya. Sebab, ia mengambilnya tanpa jalan yang benar, seperti barang yang diperoleh dengan akad fasid (yang rusak). Dan dimungkinkan untuk

¹³ Ali bin Abdul Kafi al-Subki, Fatawa al-Subki, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. th.), Juz I, h. 205.

¹⁴ Ibn Qudamah, al-Mughni, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.), Juz X, h. 118.

menyerahkannya ke bait al-mal, karena Nabi Saw. tidak memerintah Ibn Lutbiyah mengembalikan suap/hadiyah kepada pemiliknya.

Jawaban

c. Sedang status uang atau benda hibah/hadiah sebagaimana dimaksud dalam poin (a) di atas, diambil alih oleh negara untuk kemaslahatan rakyat.

Dasar Pengambilan Hukum

1. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an15

Termasuk ghulul (khianat/korupsi) adalah hadiah yang diterima oleh para pegawai, adapun hukumnya terkait aib yang akan dibuka kelak di akhirat, sama dengan status hukum orang yang melakukan ghulul. Abu Dawud dalam kitab Sunannya dan Muslim dalam kitab Shahihnya meriwayatkan hadits dari Abu Humaid al-Saa'idy bahwa Nabi Saw. memperkerjakan seorang lelaki dari suku al-Azdi yang disebut dengan Ibn Lutbiyah, untuk mengurus zakat. Kemudian ia

833

¹⁵ Muhammad bin Abi Bakar al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), Juz III, h. 168.

datang dengan berkata: "Ini untuk kalian, sedang ini dihadiahkan orang kepada saya." Maka Rasulullah Saw. berdiri menuju mimbar seraya mengucapkan puja dan puji ke hadirat Allah, selanjutnya bersabda: "Bagaimana amil yang kami tugaskan, dia datang seraya berkata: "Ini untuk kalian dan ini dihadiahkan orang untuk saya." Coba ia duduk saja di rumah ibunya atau ayahnya, lalu melihat, apakah ada yang akan memberi hadiah kepadanya ataukah tidak? Tidak seorangpun di antara kalian yang datang dengan mengambil sebagian harta tersebut kecuali ia akan datang pada hari kiamat kelak dengan membawanya, jika yang ia bawa berupa onta maka ia punya rugha' (suara onta), atau sapi maka ia punya khuwar (suara sapi), atau kambing maka punya tai'ar (suara kambing). Kemudian beliau mengangkat kedua tangan sehingga kami melihat kedua dasar ketiaknya, sambil bersabda: "Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan? Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan (hukum yang benar)?"

Abu Dawud meriwayatkan dari Buraidah, dari Nabi Saw. bersabda: "Barangsiapa yang kami pekerjakan pada suatu pekerjaan dan telah kami tentukan gaji untuknya, maka apapun yang ia ambil selebihnya adalah pengkhianatan." Ia juga meriwayatkan hadits dari Abu Mas'ud al-Anshari Ra., ia berkata: "Rasulullah Saw. pernah mengutusku untuk menarik zakat, lalu beliau bersabda: "Berangkatlah wahai Abu Mas'ud, dan jangan sampai nanti di hari kiamat aku bertemu kamu sedangkan seekor onta zakat yang mempunyai suara ada di punggungmu, yang telah kamu korupsi." Kata Abu Mas'ud: Kalau begitu saya tidak mau berangkat. Beliau Saw. menjawab: "Kalau begitu aku tidak memaksamu."

2. Idhah al-Ahkam li Ma Ya'khudz al-'Ummal wa al-Hukkam¹6

قَالَ مَسْرُوْقُ إِذَا أَكُلَ الْقَاضِى الْهَدِيَّةَ أَكُلَ السُّحْتَ وَإِذَا أَكُلَ الرِّشْوَةَ بَلَّغَتْ بِهِ الْكُفْرَ (أَيْ الْمَعْنَى السَّابِقِ) وَ لِأَنَّ حُدُوْنَهَا بَعْدَ الْوِلاَيَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لِأَجْلِهَا فَحَرُمَتْ كَالرِّشْوَةِ وَلَهُ الْقَبُولُ مِمَّنْ كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ الْوِلاَيَةِ وَيُسْتَحَبُ لَهُ التَّنَرُّهُ عَنْهَا وَإِنْ أَحَسَّ أَنَّهُ يُقَدِّمُهَا بَيْنَ يَدَي مِمَّنْ كَانَ يُهَادِيهِ قَبْلَ الْوِلاَيَةِ وَيُسْتَحَبُ لَهُ التَّنَرُّهُ عَنْهَا وَإِنْ أَحَسَّ أَنَّهُ يُقَدِّمُهَا بَيْنَ يَدَي خُصُومَةٍ حَرُمَتْ وَالرِّشُوةُ فِي الْحُكْمِ وَرِشُوهُ الْعَامِلِ حَرَامٌ بِلاَ خِلاَفٍ قَالَ اللهُ تَعَالَى أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ [الْمَائِدَةُ 12] وَقَالَ كَعْبُ الرِّشُوةُ لُسْفِ الْحَلِيْمَ وُتعْمِى عَيْنَ الْحَكِيْمِ وَالرَّاشِي مَلْعُونُ لَلِسُّحْتِ [الْمَائِدَةُ 12] وَقَالَ كَعْبُ الرِّشُوةُ لُسْفِ الْحَلِيْمَ وُتعْمِى عَيْنَ الْحَكِيْمِ وَالرَّاشِي مَلْعُونُ لَللسُّخِتِ [الْمَائِدَةُ 24] وَقَالَ كَعْبُ الرِّشُوةُ لُسْفِ الْحَلِيْمَ وُتعْمِى عَيْنَ الْحَكِيْمِ وَالرَّاشِي مَلْعُونُ لَللسُّخِتِ [الْمَائِدَةُ عَلَى اللهُ عَنْ السَّلَفِ وَمَتَى حَرُمَ قَبُولُ هَدِيَّةٍ لَزِمَهُ أَنْ اللَّهُ مِنْ السَّلَفِ وَمَتَى حَرُمَ قَبُولُ هَدِيَّةٍ لَزِمَهُ وَيُهِا إِلَى أَرْبَابِهَا وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ يَجْعَلُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ عَلَى أَمُونَ السَّلَفِ وَمَتَى حَرُمَ قَبُولُ هَدِيَّةٍ لَوْمَهُ وَلَا إِلَى أَرْبَابِهَا وَيُعْتَمَلُ أَنَّهُ يَجْعَلُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّهُ لِللَّا إِنْ بَنَالِهُ اللَّهُ الْمَالِ لَاللَّهُ الْمُعْونَا اللَّهُ الْمَالِ لَوْنَهُ مَا إِلَى أَوْلِهُ اللْمَاعِقُ الْمِثْونَ السَّالِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعَلِي الْمُلْمُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِ لَوْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

¹⁶ Ibn Hajar al-Haitami, Idhah al-Ahkam li Ma Ya'khudz al-'Ummal wa al-Hukkam, h. 119.

Masruq berkata: "Jika seorang hakim memakan hadiah, maka ia telah memakan barang yang diperoleh secara haram, dan jika ia memakan harta suap, maka suap itu akan mengantarkannya ke batas kekufuran (dengan makna yang telah lewat).17 Dan keberadaaan pemberian hadiah itu baru berlangsung setelah mendapat jabatan menunjukkan bahwa hadiah itu diberikan karena jabatan tersebut. Maka haram sebagaimana suap. Ia boleh menerima hadiah dari orang yang terbiasa memberinya sebelum ia menjabat, namun sunnah menghindar darinya. Jika ia merasa bahwa hadiah tersebut diberikan saat terdapat kasus (yang terkait dengan pemberi), maka hukumnya haram. Penyuapan dalam suatu hukum dan penyuapan pegawai (pemerintah) itu haram tanpa khilaf ulama. Allah Swt berfirman: "Mereka suka memakan harta yang berasal dari haram." [QS. al-Maidah: 46] Kata Ka'ab: "Suap dapat membuat orang bijak menyesal, dan membutakan mata hakim." Pelaku suap itu terlaknat, kecuali jika ia menyuap demi mencegah kezaliman dari dirinya, seperti pendapat sekelompok ulama salaf. Dan ketika haram menerima hadiah, maka wajib baginya mengembalikan pada pemiliknya. Namun mungkin menyerahkannya ke bait al-mal, sebab Nabi Saw. tidak memerintah Ibn Lutbiyah mengembalikan suap kepada pemiliknya.

17. Melawan Kezaliman dengan Pengorbanan Jiwa

A. Deskripsi Masalah

Pada masa perang kemerdekaan ada salah seorang putra Indonesia terbaik telah berhasil menghancurkan tempat penyimpanan amunisi pihak musuh dengan sengaja meledakkannya dan ia pun ikut tewas bersama para petugas penjaga tempat amunisi tersebut. Sekilas menurut pemikiran kita, bahwa tindakan demikian itu termasuk bunuh diri. Tetapi pandangan pemerintah tidak demikian. Ia dianggap salah satu pahlawan nasional dan diberi suatu penghargaan, ia adalah Mohammad Toha dari Bandung Selatan. Sekarang tindakan demikian itu lebih sering dilakukan orang terutama oleh para pejuang kemerdekaan Palestina menghadapi Agresi Israel (*la' natullahi alaihim ajma'iin*) yang dikenal dengan sebutan bom bunuh diri.

B. Pertimbangan Hukum

a. Telah kita maklumi bersama bahwa bom bunuh diri (intihar) itu

¹⁷ Mungkin makna kufur ni'mat. (Pen.)

- sebagai perbuatan yang diharamkan; karena motifnya adalah frustasi (putus asa) dalam menghadapi hidup.
- b. Menipu adalah perbuatan haram, kecuali di dalam perang. (HR. Muttafaq 'alaih)
- c. Motivasi yang mendorong seseorang melakukan bunuh diri adalah frustasi (putus asa) dalam menghadapi hidup ini. Sedangkan pengorbanan dalam rangka perjuangan melawan kezaliman adalah mati syahid (istisyhad).

C. Pertanyaan

- a. Bagaimana pandangan syariat Islam terhadap tindakan pengorbanan jiwa. Apakah tindakan pengorbanan jiwa termasuk mati konyol atau termasuk mati syahid?
- b. Dalam modus operandi (peristiwa) apa saja tindakan pengorbanan jiwa diperbolehkan oleh Islam?

D. Jawaban

T: Bagaimana pandangan syari'at Islam terhadap tindakan pengorbanan jiwa, bahkan sampai mati untuk memperjuangkan hak-hak dasar (al-dzaruriyah al-Khams) yang sah? Dan pengorbanan jiwa apa saja yang diperbolehkan oleh Islam?¹⁸

J: Bunuh diri dalam Islam adalah diharamkan oleh agama dan termasuk dosa besar, akan tetapi tindakan pengorbanan jiwa sampai mati dalam melawan kezaliman, maka dapat dibenarkan bahkan bisa merupakan syahadah, jika;

- 1) Diniatkan benar-benar hanya untuk melindungi atau memperjuangkan hak-hak dasar (al-dharuriyyat al-khams) yang sah, bukan untuk maksud mencelakakan diri (ahlak al-nafs).
- 2) Diyakini tidak tersedia cara lain yang lebih efektif dan lebih ringan resikonya.
- 3) Mengambil sasaran pihak-pihak yang diyakini menjadi otak dan pelaku kezaliman itu sendiri.

E. Dasar Pengambilan Hukum

1. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an¹⁹

¹⁸ Demikian tercatat dalam Hasil Keputusan Munas Alim Ulama NU di Pondok Gede Jakarta. Mungkin teks pertanyaan ini merupakan hasil perubahan dari teks pertanyaan sebelumnya, sebab beberapa pertimbangan tertentu. Seperti yang kadang terjadi dalam forum Bahtsul Masail. (Pen.)

¹⁹ Muhammad bin Abi Bakar al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.), Juz III, h. 140-141.

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي افْتِحَامِ الرَّجُلِ فِي الْحُرْبِ وَحَمْلِهِ عَلَى الْعَدُوِّ وَحْدَهُ. فَقَالَ الْقَاسِمُ ابْنُ مُحَمَّدٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ مِنْ عُلَمَائِنَا: لاَ بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَ الرَّجُلُ بَنُ مُحَيَّدٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ مِنْ عُلَمَائِنَا: لاَ بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ عَلَى الجَيْشِ الْعَظِيْمِ إِذَا كَانَ فِيهِ قُوَّةً، وَكَانَ لِلهِ بِنِيَّةٍ خَالِصَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ وَحْدَهُ عَلَى النَّهِ بِنِيَّةٍ خَالِصَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ قُوَّةً فَذَلِكَ مِنَ التَّهْلُكَةِ، وَقِيْلَ: إِذَا طَلَبَ الشَّهَادَةَ وَخَلَصَتْ النِّيَّةُ فَلْيَحْمِلْ، لِأَنَّ مَقْصُودَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، وَذَلِكَ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ الْبَعَاءَ مَرْضَاةِ اللهِ [الْبَقَرَةُ ٢٠٧]

وَقَالَ ابْنُ خُويْزٍ مِنْدَادٍ: فَأَمَّا أَنْ يَعْمِلَ الرَّجُلُ عَلَى مِاثَةٍ أَوْ عَلَى جُمْلَةِ الْعَسْكُو أَوْ جَمَاعَةِ اللَّصُوْصِ وَالْمُحَارِبِيْنِ وَالْحُوارِجِ فَلِذَلِكَ حَالتَانِ: إِنْ عَلِمَ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِهِ أَنَّهُ سَيَقْتُلُ وَلَكِنْ مَن حَمَلَ عَلَيْهِ وَيَنْجُو فَحَسَنُ وَكَذَلِكَ لَوْ عَلِمَ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِهِ أَنَّهُ سَيُقْتُلُ وَلَكِنْ مَن عَمَلَ عَلَيْهِ أَنَّهُ سَيُقْتُلُ وَلَكِنْ مَن عَمَلَ عَلَيْهِ وَيَنْجُو فَحَسَنُ وَكَذَلِكَ لَوْ عَلِمَ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِهِ أَنَّهُ سَيُقْتُلُ وَلَكِنْ مَن الْفِيلةِ وَقَدْ بَلَغَيْ أَنَّ عَسْكُرَ الْمُسْلِمِيْنَ مِن الْفِيلةِ وَقَدْ بَلَغَيْ أَنَّ عَسْكُرَ الْمُسْلِمِيْنَ مِن الْفِيلةِ وَقَدْ بَلَغَيْ أَنَّ عَسْكُرَ الْمُسْلِمِيْنَ مِن الْفِيلةِ وَقَدْ بَلَغَيْ أَنْ الْمُسْلِمِيْنَ مِن الْفِيلةِ وَوَلَيْهُ مِن الْفِيلِ عَلَيْ وَأَنِسَ بِهِ فَرَسُهُ حَتَّى أَلِفَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ لَمْ يَنْفِرْ فَرَسُهُ مِنَ الْفِيلِ فَصَيْرَ أَنْ أَقْتَلَ وَيُفْتُهُ وَصَيْلًا عَلَى الْفِيلُ اللَّذِيْ كَانَ يُقَدِّمُهَا فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ قَاتَلَكَ. فَقَالَ: لاَ ضَيْرَ أَنْ أَقْتَلَ وَيُفْتَحُ الْمُسْلِمِيْنَ وَكُذَلِكَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ لَمَا تَعَصَّنَتْ بَنُو حَنِيْفَة بِالْحُدِيْقَةِ، قَالَ رَجُلُ مِن الْمُسْلِمِيْنَ وَكُذَلِكَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ لَمَا عَصَّنَتْ بَنُو حَنِيْفَة بِالْحُدِيْقَةِ، قَالَ رَجُلُ مِن الْمُسْلِمِيْنَ وَكُذَلِكَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ لَمَا عَصَّنَتْ بَنُو حَنِيْفَة بِالْحُدِيْقَةِ، قَالَ رَجُلُ مِن الْمُسْلِمِيْنَ وَكُذَلِكَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ وَأَلْقُونِي إِلَيْهِمْ، فَفَعَلُوا وَقَاتَلَهُمْ وَحْدَهُ وَفَتَحَ الْبَابَ.

قُلْتُ: وَمِنْ هَذَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِي ﷺ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا؟ قَالَ ﷺ: فَلَكَ الْجَنَّةُ فَانْغَمَسَ فِي الْعَدُوِّ حَتَّى قُتِلَ. وَفِيْ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُفْرِدَ يَوْمَ أُحُدٍ فِيْ سَبْعَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا رَهِقُوهُ قَالَ: مَنْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُو رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ فَقَدِمَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَلَمْ يَرُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجِنَّةُ أَوْ هُو رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ فَقَدِمَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَلَمْ يَرُدُهُمُ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُو رَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ فَقَدِمَ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ فَلَمْ يَرُدُكُمُ مِنَ الْأَنْصَادِ فَقَاتَلَ حَتَى قُتِلَ فَلَمْ يَرُلُ كَذَلِكَ حَتَى قُتِلَ السَّبْعَةُ، فَقَالَ ﷺ: مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا هَكَذَا الرِّوَايَةُ، أَنْصَفْنَا بِسُكُونِ يَوْنَ عَنْ السَّبْعَةُ، فَقَالَ ﷺ مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا هَكَذَا الرِّوَايَةُ وَرَفْعِ الْبَاءِ، الْفَاءِ وَرَفْعِ الْبَاءِ، الْفَاءِ وَرَفْعِ الْبَاءِ، وَلَوْتِ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَرَفْعِ الْبَاءِ، وَوَجُهُهَا أَنَّهَا تَرْجِعُ لِمَنْ فَرَّعُ لَمْ مُنْ أَصْحَابِنَا، وَاللّهُ أَعْلَى الْمَدِي فِقَتْحِ الْفَاءِ وَرَفْعِ الْبَاءِ، وَرُويَ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَرَفْعِ الْبَاءِ، وَرُويَ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَرَفْعِ الْبَاءِ وَوَهُ إِنْهِ الْمِاءُ أَنْفَاءَ الْقَاعِ وَرَفْعِ الْبَاءِ وَاللّهُ الْقَاءَ وَرَفْعِ الْبَاءِ وَرَوْعَ بِفَا عَلَى اللّهُ الْقَاءِ وَرَفْعِ الْبَاءِ فَلَ الْعَلَامُ وَاللّهُ الْمُؤْمِنَا وَاللّهُ أَعْلَى الْمَالِقَ الْمَالِقُولُ الللهُ الْمُعْلَى الْمُلْكِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعَالِقُولُ الْمُؤْمُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمُ
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَنِ: لَوْ حَمِلَ رَجُلُ وَاحِدٌ عَلَى أَلْفِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُوَ وَحْدَهُ،

لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسُ إِذَا كَانَ يَطْمَعُ فِيْ نَجَاةٍ أَوْ نِكَايَةٍ فِي الْعَدُونِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَهُوَ مَكْرُونَ، لِأَنّهُ عَرَضَ لِتَفْسِهِ لِلتَّلْفِ فِيْ غَيْرِ مَنْفَعَةٍ لِلْمُسْلِمِيْنَ، فَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ تَجْرِئَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَصْنَعُوا مِثْلَ صَنِيْعِهِ فَلاَ يَبْعُدُ جَوَازُهُ، وَلِأَنَّ فِيْهِ قَصْدُهُ إِرْهَابَ الْعَدُو وَلِيَعْلَمَ صَلاَبَةَ مَنْفَعَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ عَلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ. وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ إِرْهَابَ الْعَدُو وَلِيَعْلَمَ صَلاَبَةَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَ بَعْضِ الْوُجُوهِ. وَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ إِرْهَابَ الْعَدُو وَلِيَعْلَمَ صَلاَبَةَ الْمُسْلِمِيْنَ فَلَا يَبْعُدُ جَوَازُهُ. وَإِذَا كَانَ فِيْهِ نَفْعُ لِلْمُسْلِمِيْنَ فَتَلِفَتْ نَفْسُهُ الْمُعْرِفِي اللّهِ وَتَوْهِيْنِ اللّهُ وَمِنْ أَنْفُسَهُمْ الْآيَةَ [التَّوْبَةُ ١١٤] إِلَى غَيْرِهَا مِنَ آيَةِ اللّهُ بِهَا مَنْ بَذَلَ نَفْسَهُ اللّهُ يَعْ وَالْهِ وَلَا لَقَوْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُعْرِقِيْنَ اللّهُ بِهَا مَنْ بَذَلَ لَقْسَلُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُلْوِي اللّهُ الْمُعْرِقِيْنَ اللّهُ الْمُعْرَاقِ وَلِهُ إِلْهُ اللْهُ الْهُ الْمُعْلِلْهُ اللّهِ وَالْمَلِهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلِيْلُولُولِهِ إِلَى اللّهُ الْمُعْلِقُ اللْهُ الْمُعْلِيْلِي اللّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِلُولُولِهُ إِلْهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الللّهُ الْمُعْلَمُ الللّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ الللّهُ الْمُعْلَمُ الللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِي

وَعَلَى ذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ حُكُمُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَنَّهُ مَتَى رَجَا نَفْعًا فِي التَيْنِ فَبَذَّلَ نَفْسَهُ فِيْهِ حَتَّى قُتِلَ كَانَ فِي أَعْلَى دَرَجَاتِ الشَّهَدَاءِ. قَالَ اللهُ تَعَالَى وَأُمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَأُمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ أَقْمَالُ اللهُ هَذَاءِ لَقْمَالُ اللهُ قَالَ: أَفْضَلُ الشَّهَدَاءِ فَقَدَلُهُ اللهُ وَرَجُلُ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ حَقِّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَاثِرٍ فَقَتَلَهُ.

Ulama berbeda pendapat tentang kenekatan seseorang di medan perang dan menyerang musuh sendirian. Al-Qasim bin Mukhaimarah, al-Qasim bin Muhammad dan Abdul Malik dari kalangan ulama kita (madzhab Malikiyah) berkata: "Tidak mengapa seseorang sendirian menghadapi pasukan musuh yang cukup banyak jika ia memiliki kekuatan dan niatnya ikhlas karena Allah semata. Jika ia tidak memiliki kekuatan maka termasuk bunuh diri. Dan suatu pendapat menyatakan: "(Meski ia tidak memiliki kemampuan) namun jika ia mencari kesyahidan dan niatnya ikhlas, maka silahkan melakukannya, karena yang diincar cuma salah satu dari musuh. Demikian itu ada dalam firman Allah Swt.: "Di antara manusia ada yang menjual jiwanya demi untuk mendapatkan keridhaan Allah." (QS. Al-Baqarah: 207)."

Ibn Khuwaizin Mindad berkata: "Adapun jika seseorang berani menyerang musuh yang berjumlah seratus, sejumlah tentara musuh, sekelompok pencuri, penyerang dan pemberontak, maka untuk hal ini ada dua kondisi: Jika ia mengetahui dan menduga kuat dirinya akan menewaskan musuh yang diserangnya dan ia selamat, maka hal itu

bagus. Demikian pula jika ia mengetahui dan menduga kuat ia akan mati, namun akan bisa membuat mereka kalah, kacau atau menimbulkan akibat yang menguntungkan kaum muslimin, maka hukumnya juga boleh. Telah sampai kepadaku kisah pasukan kaum saat melawan pasukan Persia (Iran), kuda-kuda kaum muslimin lari ketakutan dikarenakan gajah. Maka salah seoarang anggota pasukan bertekat membuat patung gajah dari tanah liat sehingga kudanya menjadi tenang dan terbiasa melihat gajah. Maka ketika berperang kudanya tidak takut lagi pada gajah sehingga berani menghadapi pasukan gajah menyerangnya. Lalu ia diingatkan: "Sungguh hal itu akan membuatmu terbunuh." Lalu ia menjawab; "Tidak mengapa saya terbunuh tapi kaum muslimin mendapat kemenangan." Begitu pula dalam perang Yamamah ketika Bani Hanifah bertahan di suatu kebun. Salah seorang pasukan muslimin berkata: "Letakkan aku dalam perisai, lalu lemparkan aku kepada mereka." Kemudian para pasukan lain melakukannya dan ia melawan musuh sendirian serta berhasil membuka pintu kebun tersebut."

Saya (al-Qurthubi) berkata: "Termasuk kasus serupa, diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Saw.: "Bagaimana pendapat anda jika saya terbunuh dalam peperangan di jalan Allah dalam keadaan sabar dan mencari pahala?" Beliau menjawab: "Engkau mendapat surga." Lalu laki-laki itu menceburkan diri di tengah-tengah musuh sehingga terbunuh. Dalam riwayat Shahih Muslim dari Anas bin Malik, sungguh pada hari perang Uhud Rasulullah Saw. terpojok seorang diri, dalam pasukan tujuh orang dari Anshar dan dua orang dari Quraisy. Ketika musuh mendekatinya, beliau bersabda: "Siapa yang bisa mengenyahkan mereka dariku? Dan ia mendapat surga.", atau: " "Dia menjadi sahabatku di surga." Lalu salah seorang dari sahabat Anshar itu menyerang maju sampai terbunuh. Hal tersebut terus berlangsung sehingga ketujuh orang tersebut mati. Lalu beliau Saw. bersabda: "Kami belum memberi petunjuk teknik berperang kepada para sahabat kami." Begitu riwayatnya, kata أَنْصَفْنَا dengan sukun huruf fa' dengan dibaca fathah huruf ba'nya, yang berarti: "Kami belum memberi petunjuk teknik berperang kepada para sahabat kami." Dan diriwayatkan dengan dibaca fathah huruf fa'nya dan dibaca raf' huruf ba'nya (berarti: "Para sahabat kami tidak membela kami.") Argumennya, riwayat itu kembali kepada para sahabat yang lari meninggalkan Nabi Saw. Wallahu a'lam.

Muhammad bin al-Hasan berpendapat: "Seandainya satu orang

melakukan penyerangan kepada seribu musuh dengan sendirian, maka hal itu tidak mengapa jika ia dapat mengharap keselamatan diri atau mengalahkan musuh. Namun jika tidak demikian, maka hukumnya makruh. Karena berarti ia menjerumuskan diri sendiri dalam kematian yang tidak memberi manfaat pada kaum muslimin. Jika tujuannya adalah membangkitkan keberanian kaum muslimin dalam melawan musuh sehingga mereka mau meniru tindakannya, maka hal itu tidak jauh dari kebenaran diperbolehkannya. Karena ada manfaatnya bagi kaum muslimin dari satu sisi. Adapun jika tujuannya untuk menimbulkan ketakutan pada musuh dan supaya musuh mengetahui militansi muslimin dalam membela agamanya, maka hal itu tidak jauh dari kebenaran diperbolehkannya. Ketika dalam tindakannya itu terdapat keuntungan bagi pasukan muslimin, lalu ia mati demi kemuliaan agama Allah dan menghina kekafiran, maka hal itu merupakan kedudukan mulia yang mendapat pujian dari Allah bagi para mukminin sebagaimana dalam firmanNya: "Sungguh Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman, jiwa-jiwa mereka." (QS. Al-Taubah: 111) Dan ayat-ayat lainnya yang menyebut pujian Allah kepada mereka yang rela mengorbankan jiwanya.

Hukum tersebut seharusnya berlaku pula pada hukum amr ma'ruf nahi munkar. Yaitu ketika seseorang mengharap keuntungan bagi agama, lalu ia mengorbankan diri untuk hal itu sampai mati, maka ia berada di jajaran tertinggi derajat para syuhada. Allah Swt. berfirman: "Suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah dari perbuatan mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sungguh demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan." (QS. Luqman: 17) Ikrimah meriwayatkan dari Ibn Abbas Ra., dari Nabi Saw., sungguh beliau bersabda: "Syuhada' yang paling utama adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan seseorang yang menyuarakan kebenaran kepada penguasa zalim sehingga ia membunuhnya."

2. Tafsir al-Fakhr al-Razi²⁰

وَقَالَ هَذَا الْقَتْلُ غَيْرُ مُحَدَّرِمِ وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِوُجُوهِ (الأَوَّلُ) رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ حَمِلَ عَلَى صَفِّ الْعَدَوِّ فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ فَأَلْقَى بِيَدِهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِي غَنُ أَعْلَمُ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَإِنَّمَا نَزَلَتْ فِيْنَا: صَحِبْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَنَصَرْنَاهُ وَشَهِدْنَاهُ مَعَهُ الْمُشَاهِدَ

²⁰ Muhammad bin Umar al-Fakhr al-Razi, Tafsir al-Fakhr al-Razi, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz V, h. 149.

فَلَمَّا قَوِيَ الْإِسْلاَمُ وَكُثُرَ أَهْلُهُ رَجَعْنَا إِلَى أَهَالِينَا وَأَمْوَالِينَا وَتَصَالَحْنَا، فَكَانَ التَهْلُكُهُ الْإِقَامَة فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَتَرْكِ الجُهَادِ (وَالنَّافِي) رَوَى الشَّافِي أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ذَكَرَ الجُنَّة، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ أَرَأَيْتَ يَا رَسُولُ اللهِ إِنْ فُتِلْتُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا قَالَ عَلَيْ الْجُنَّة، فَقَالَ اللهِ وَالْعَلَيْ مِنَ الْأَنْصَارِ أَلَيْقَ دِرْعًا فَانْغَمَسَ فِي الْعَدُو فَقَتَلُوهُ (وَالنَّالِثُ) رُويَ أَنْ رَجُلاً مَنَ الْأَنْصَارِ أَلْقَى دِرْعًا كَانَتُ عَلَيْه حِيْنَ ذَكْرَ النَّي عَلَيْ الْجُنَّة ثُمَّ انْغَمَسَ فِي الْعَدُو فَقَتَلُوهُ (وَالنَّالِثُ) رُويَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ تَعْلَقُ عَنْ مَنْ عَنِي مُعَاوِيَّة فَرَأَى الطَّيْرَ عَكُوفًا عَلَى مَنْ قُتِلَ مِن أَصْحَابِنَا، فَقَالَ لِينَي مُعَاوِيّة فَوْلًا حَسَنًا (وَالرَّابِعُ) رُويَ أَنَّ قَوْمًا حَاصَرُوا لِيَعْفَى مَنْ مَعْهُ سَأَتَقَدَّمُ إِلَى الْعَمُونِي وَلاَ أَتَحَلَفُ عَنْ مَشْهَدٍ فُتِلَ فِيهِ أَصْحَابِي، فَقَالَ لِينِي مُعَاوِيّة فَوْلًا حَسَنًا (وَالرَّابِعُ) رُويَ أَنَّ قَوْمًا حَاصَرُوا لِيمُنَى مَنْ مَعْهُ سَأَتَقَدَّمُ إِلَى الْعَمْوِي فَيَقُولُ وَالَا اللهُ عَمَر بْنَ الْخَتَالُ وَيْهِ فَوْلاً حَسَنًا (وَالرَّابِعُ) رُويَ أَنَّ قَوْمًا حَاصَرُوا فَقَعَلَ ذَلِكَ فَتَصَلَ فَيْ مُنْ مَعْهُ مُنْ مَنْ مُعْمَلُومُ وَيَقُولُ وَلِكُ التَّامِ مُنْ يَعْمُونُ وَيَقُولُ وَلَا اللهُ اللهُ عَمَر بْنَ الْخَتَالِ اللهُ عَلَى وَمِنَ النَّاسِ فَيْ فَيْ الْمَاعُ وَعَلَى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْوَى وَيَقُولُ وَلَكُ مُنْ الْمُعْلَى فَيْ مَنْ الْقَاءِ اللهُ مِنْ وَقَعْ فَنَحُنُ مُحْوِي النَّهُ وَلِهُ النَّهُ وَالْعَلَيْ مُ الْمَعْلُولُ اللهُ الْمُعْلَى فَيْ مَنْ الْقُولُ وَلَا الْقَالُ وَلَا لَمْ بُعَوْلُ اللّهُ وَلَا لَهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ مُنَا الْقَاءُ اللّهُ وَلَا لَمْ الْمَعْلُولُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَلَا لَقُولُولُ اللّهُ وَلَا لَمْ الْمُؤْلُولُ اللّهُ وَلَا لَهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُولُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الله

Sebagian ulama yang tidak menyetujui ayat:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

"Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan." (QS. Al-Baqarah: 195)

dita'wil dengan ketidakbolehan nekat maju berperang ketika tidak bermanfaat dan kemungkinan besar hanya membahayakan diri saja, berpendapat: "Kematian semacam ini tidak haram." Ia mengajukan beberapa argumen atas pendapatnya itu.

Pertama, diriwayatkan sungguh seorang lelaki kaum Muhajirin menyerang barisan musuh, kemudian pasukan muslimin berteriak memperingatkan dan ia tetap menjerumuskan diri pada kematian. Maka Abu Ayyub al-Anshary berkata: "Kami lebih tahu tentang ayat ini, dan ayat ini hanya turun terkait dengan kami. Kami senantiasa menemani Rasulullah Saw., membelanya dan ikut bersama beliau dalam berbagai pertempuran. Ketika Islam telah menjadi kuat dan pengikutnya bertambah banyak, kami kembali kepada keluarga dan

harta kami dan membuat perdamaian. Maka yang dimaksud binasa dalam ayat itu adalah diam diri bersama keluarga, mengurusi harta dan meninggalkan jihad."

Kedua, Imam Syafi'i meriwayatkan, sungguh Rasulullah Saw. menyebut surga, lalu seorang dari Anshar bertanya: "Bagaimanakah menurut anda wahai Rasulullah! Jika saya terbunuh dalam keadaan sabar dan mencari pahala?" Beliau Saw. menjawab: "Kamu mendapat surga." Lalu ia menceburkan diri dalam kelompok musuh, sehingga musuh membunuhnya di hadapan Rasulullah Saw.. Dan seorang dari Anshar melepas baju perang yang ia pakai setelah mendengar Nabi Saw. menyebut surga, kemudian ia menceburkan diri ke dalam barisan musuh, lalu mereka membunuhnya.

Ketiga, diriwayatkan sungguh seorang lelaki kaum Anshar tidak ikut serta dalam peperangan melawan bani Mu'awiyyah. Lalu ia melihat burung berputar-putar di atas sahabat yang terbunuh. Lalu ia berkata kepada beberapa orang yang bersamanya: "Saya akan maju menyerang musuh, sampai mereka membunuhku, dan aku tidak akan berpaling dari tempat para sahabatku terbunuh." Lalu ia melakukannya. Lalu para sahabat menceritakan hal itu kepada Nabi Saw., dan beliau Saw. menyampaikan ungkapan yang indah tentang sahabat Anshar tersebut.

Keempat, diriwayatkan sungguh sekelompok orang mengepung sebuah benteng, lalu ada seseorang nekat melawan sampai mati. Lalu ada komentar: "Ia telah menjerumuskan diri pada kebinasaan." Kemudian berita itu sampai kepada Umar bin al-Khattab Ra. yang langsung berkata: "Mereka bohong! Bukankah Allah Swt. berfirman: "Di antara manusia ada yang menjual jiwanya untuk mendapatkan ridha Allah." (QS. Al-Baqarah: 207).

Dan bagi ulama pendukung ta'wil di atas, semestinya menjawab argumen-argumen ini dan berkata: "Sungguh kami hanya mengharamkan menceburkan diri dalam barisan musuh ketika tidak bisa mengharap kekalahan musuh. Adapun jika kekalahan musuh bisa diharapkan, maka kami juga memperbolehkannya. Maka kenapa kalian katakan pengertian seperti ini ada dalam peristiwa-peristiwa tersebut?"

3. Referensi Lain

- a) Ruh al-Maani fi Tafsir al-Qur'an al-'Adzim, karya Mahmud al-Alusi, Beirut: Dar al-Fikr, Juz II, h. 77-78.
- b) *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, karya Ibn Katsir, Beirut: Dar al-Ma'rifah, Juz I, h. 235-236.[]

HASIL KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA XXXI Di Asrama Haji Donohudan Boyolali-Solo Jawa Tengah 29 Nopember – 1 Desember 2004 M/ 16 – 18 Syawal 1425 H

Tentang MASAIL AL-DINIYYAH AL-MAUDHU'IYYAH

18. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Islam dalam Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdlatul Ulama 19. Memotifasi Wakaf 20. Pendidikan di Lingkungan Nahdlatul Ulama

KEPUTUSAN MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA Nomor: V/MNU-31/2004 TENTANG

BAHTSUL MASAIL AL-DINIYYAH AL-MAUDHU'IYYAH NAHDLATUL ULAMA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA

Menimbang

- a. Bahwa menjadi tugas Muktamar sebagai instansi tertinggi dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk membahas masalah-maslah yang berkembang di masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam yang menganut faham Alussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat agar dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;
- b. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai perkumpulan atau Jam'iyyah Diniyyah Islamiyyah yang bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat dan berbagai bidang yang mengarah kepada terbentuknya Khaira Ummah, perlu secara terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas khidmahnya dengan berdasarkan faham Alussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat;
- Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas Muktamar XXXI perlu menetapkan Hasil Bahtsul Masail Diniyyah Maudhu'iyyah;

Mengingat

- Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor 002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas Alim Ulama Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang pemulihan Khitthah Nahdlatul Ulama 1926;
- b. Keputusan Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama Nomor 1/MNU-31/XI/2004 tentang Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib Muktamar XXXIc. Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama.

Memperhatikan:

- a. Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama tanggal 15 Syawal 1425 H/28 Nopember 2004;
- Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi 1 B Bidang Bahtsul Masail Diniyyah Maudhu'iyyah yang disampaikan pada Sidang Pleno IX Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama

pada tanggal 18 Syawal 1425 H/1 Desember 2004 M;

c. Ittifak Sidang Pleno IX Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama pada tanggal 18 Syawal 1425 H/1 Desember 2004 M;

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah dan ridha Allah Swt.:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN KEPUTUSAN MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL

ULAMA TENTANG BAHTSUL MASAIL DINIYYAH

MAUDHU'IYYAH

Pasal 1

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksudkan oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Hasil-hasil Bahtsul Masail Diniyyah Maudhu'iyyah sebagai pedoman dalam memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Alussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat dan mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis

dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;

Pasal 2

Mengamanatkan kepada Pengurus Besar dan warga Nahdlatul Ulama untuk menaati segala Hasil-hasil Bahtsul Masail Diniyyah

Maudhu'iyyah ini;

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Asrama Haji Donohudan Boyolali Jawa Tengah

Pada tanggal: 18 Syawal 1425 H/1 Desember 2004 M

MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA PIMPINAN SIDANG PLENO IX

ttd

ttd

Drs. KH. A. Hafizh Utsman

Ketua

Drs. H. Taufiq R. Abdullah Sekretaris

18. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Islam dalam Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdlatul Ulama

A. Penjelasan Umum

- 1. Yang dimaksud dengan "kitab" adalah kutub al-madzahib al-arba'ah, yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah Ahlussunnah wal Jama'ah.
- 2. Yang dimaksud madzhab secara qauli adalah mengikuti pendapatpendapat yang sudah "jadi" dalam lingkup salah satu al-Madzahib al-Arba'ah.
- 3. Yang dimaksud dengan bermadzhab secara manhaji adalah bermadzhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab dari al-madzahib al arba'ah.
- 4. Yang dimaksud dengan istinbath jama'i adalah mengeluarkan hukum syara' dari dalinya dengan qawaid ushuliyah secara kolektif.
- 5. Yang dimaksud dengan *qaul* dalam referensi madzhab Syafi'i adalah pendapat Imam Syafi'i.
- 6. Yang dimaksud dengan wajah adalah pendapat ulama madzhab Syafi'i.
- 7. Yang dimaksud dengan *taqrir jama'i* adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa *qaul/wajah* dalam madzhab Syafi'i.
- 8. Yang dimaksud dengan ilhaq (ilhaq al-masa'il bi nazhairiha) adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan suatu kasus dengan pendapat yang sudah "jadi").
- 9. Yang dimaksud dengan usulan masalah adalah permintaan untuk membahas suatu kasus/masalah, baik hanya berupa "judul" masalah maupun telah disertai pokok-pokok pikiran atau pola hasil pembahasan awal dengan maksud dimintakan tanggapan.
- 10. Yang dimaksud dengan pengesahan adalah pengesahan hasil suatu bahtsul masail oleh PB Syuriyah NU, Munas Alim Ulama NU atau Muktamar NU.

B. Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Islam

I. Kerangka Analisa Masalah

Dalam memecahkan dan merespon masalah, maka bahtsul masail hendaknya mempergunakan kerangka pembahasan masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Analisis Masalah (sebab mengapa terjadi kasus) ditinjau dari

berbagai faktor:

- Faktor ekonomi,
- b. Faktor politik,
- c. Faktor budaya,
- d. Faktor social,
- e. Faktor lainnya.
- Analisis Dampak, (dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh suatu kasus yang dicari hukumnya) ditinjau dari berbagai aspek antara lain:
 - a. Aspek sosial ekonomi,
 - b. Aspek sosial budaya,
 - c. Aspek sosial politik,
 - d. Aspek lainnya.
- Analisis hukum, (dampak bahtsul masail tentang suatu kasus setelah mempertimbangkan latar belakang dan dampaknya di segala bidang) di samping mempertimbangkan hukum Islam juga mempertimbangkan hukum yuridis formal.
 - a. Status hukum (al-Ahkam al-Khamsah),
 - b. Dasar dari ajaran/Ahlussunnah wal Jama'ah,
 - c. Hukum positif.

II. Prosedur Penjawaban Masalah

Keputusan bahtsul masail di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bermadzhab kepada salah satu madzhab empat yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara qauli. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

- Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dari kutub al-madzahib al-arba'ah dan di sana terdapat hanya satu pendapat dari kutub al-madzahib al-arba'ah, maka dipakailah pendapat tersebut.
- 2. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukan taqrir jama'i untuk memilih salah satu pendapat. Pemilihan itu dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. Dengan mengambil pendapat yang lebih maslahat dan/atau yang lebih kuat.
 - b. Khusus dalam madzhab Syafi'i sesuai dengan keputusan Muktamar ke I (1926 M), perbedaan pendapat disesuaikan dengan cara memilih:
 - 1. Pendapat yang disepakati oleh al-Syaikhani (al-Nawawi dan al-Rafi'i),

- 2. Pendapat yang dipegangi oleh al-Nawawi,
- 3. Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi'i,
- 4. Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama,
- 5. Pendapat ulama yang terpandai,
- 6. Pendapat ulama yang wara',
- c. Untuk madzhab selain Syafi'i berlaku ketentuan-ketentuan menurut madzhab yang bersangkutan.
- 3. Dalam kasus tidak ada pendapat yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur ilhaq al-masail bi nazhairiha secara jama'i oleh para ahlinya. Ilhaq dilakukan dengan memperhatikan mulhaq, mulhaq bih dan wajhu al-ilhaq oleh para mulhiq yang ahli.
- 4. Dalam kasus tidak mungkin dilakukan ilhaq, maka bisa dilakukan istinbath jama'i dengan prosedur bermadzhab secara manhaji oleh para ahlinya. Yaitu dengan mempraktekkan qowaid ushuliyah oleh para ahlinya.

C. Hirarki dan Sifat Keputusan Bahtsul Masail

- Seluruh keputusan bahtsul masail di lingkungan Nahdlatul Ulama yang diambil dengan prosedur yang telah disepakati dalam keputusan ini, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luarnya mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling membatalkan.
- 2. Suatu hasil keputusan bahtsul masail di lingkungan Nahdlatul Ulama dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh Pengurus Besar Syuriyah Nahdlatul Ulama tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Muktamar.
- 3. Sifat keputusan dalam bahtsul masail tingkat Munas dan Muktamar adalah:
 - a. Mengesahkan rancangan keputusan yang telah disiapkan sebelumnya dan atau
 - b. Diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang.
- 4. Mukatamar sebagai forum tertinggi di Nahdlatul Ulama, maka Muktamar dapat mengukuhkan atau menganulir hasil Munas.

D. Kerangka Analisa Tindakan

Kerangka analisa tindakan, peran dan pengawasan efektifitas hasil bahtsul masail (apa yang harus dilakukan sebagai konsekuensi dari bahtsul masail, siapa yang akan melakukan, bagaimana, kapan, dan di mana hal itu hendak dilakukan serta bagaimana cara sosialisasi mekanisme pemantapan agar semua berjalan sesuai dengan keputusan) maka perlu memperhatikan aspek-aspek berikut ini:

- 1. Aspek politik (berusaha agar hasil bahtsul masail dapat dijadikan sebagai sarana mempengaruhi kebijakan pemerintah),
- 2. Aspek budaya (berusaha membangkitkan pengertian dan kesadaran masyarakat terhadap hasil-hasil bahtsul masail melalui berbagai media massa dan forum (seperti majlis ta'lim dan sebagainya),
- 3. Aspek ekonomi (meningkatkan kesejahteraan masyarakat),
- 4. Aspek sosial (upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, lingkungan hidup dan lain sebagainya).

Catatan:

- 1. Merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk tim kecil yang mengkaji tentang kriteria kutub al-mu'tabarah dan menginventarisir kutub al-mu'tabarah serta menyusun jenjang kitab-kitab dalam madzahib al-arba'ah.
- 2. Para Muktamirin menolak untuk memberlakukan HERMENEUTIKA sebagai metode penafsiran terhadap teks agama (al-Qur'an dan al -Hadits).
- 3. Para peserta Muktamar NU ke XXXI sepakat bahwa seluruh draf tentang WAKAF dan PENDIDIKAN disetujui dan dirokemendasikan menjadi program kerja.

Tim Perumus

Ketua

: KH. Syafruddin

Sekretaris: H. M. Cholil Nafis, Lc, MA

Anggota

- : 1. Prof. Dr. KH. Said Aqil Siraj, MA
 - 2. Prof. Dr. Khotibul Umam
 - 3. Prof. Dr. Mahasin
 - 4. Prof. Dr. Nasaruddin Umar
 - 5. KH. Muhibul Aman Aly
 - 6. KH. Syarifuddin Ya'qub
 - KH. Abdul Ghafur
 - 8. Abd. Muqshid Ghazali, M.Ag.
 - Ridwan, M.Si
 - 10. Miftahur Rahim
 - 11.KH. Ghazali Masroeri
 - 12. KH. Ahmad Rozigin
 - 13. KH. Zakaria

19. Wakaf

Wakaf merupakan perbuatan ekonomi produktif yang sangat dihimbau oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Nahdlatul Ulama melalui Munas tahun 2002 M salah satu keputusannya adalah tentang bolehnya mewakafkan uang, bahkan di Indonesia telah disahkan Undangundang tentang wakaf. Namun masyarakat Indonesia khususnya kaum muslimin yang sebenarnya mempunyai potensi wakaf yang cukup besar ternyata tidak digarap dan dikelola dengan efektif dan baik, maka diusulkan hal-hal seperti berikut:

- a. Peningkatan pemahaman tentang wakaf antara lain dengan membentuk institusi wakaf,
- b. Memotifasi masyarakat, khususnya kalangan nahdliyyin untuk berwakaf, di antaranya membuat pamflet, brosur dan selebaran yang membuat orang tertarik untuk berwakaf dan disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya kaum nahdliyyin,
- c. Mempertegas status hukum atas aset wakaf milik Nahdlatul Ulama,
- d. Pembebasan pajak dan biaya administrasi terhadap harta wakaf,
- e. Pemanfaatan harta wakaf atas sekala prioritas,
- f. Pembiayaan organisasi NU melalui hasil pengelolaan harta wakaf.

20. Pendidikan di Lingkungan Nahdlatul Ulama

Persoalan pendidikan di Indonesia, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama sangat urgen dan perlu ditingkatkan guna mampu mengikuti dan bersaing dengan perkembangan dunia global. Pendidikan di kalangan nahdliyyin masih banyak ketinggalan khususnya di bidang tekhnologi, manajemen yang masih ala kadarnya, dan sumber daya manusia yang relatif rendah, maka karena hal-hal tersebut diusulkan:

- Peningkatan sumber daya manusia di antaranya dengan mengadakan pendidikan singkat dan kaderisasi melalui delegasi belajar ke perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun luar negeri,
- 2. Menyehatkan manajemen dan administrasi pengelolaan pendidikan di kalangan nahdliyyin,
- 3. Mengakrabkan dengan perkembangan tekhnologi dan informasi dalam pendidikan di kalangan nahdliyyin,
- 4. Memperjelas arah pendidikan di lingkungan pesantren, umum dan/atau diniyah. Berkaitan dengan point 4 ini ada gagasan bahwa madrasah yang berada di lingkungan pesantren dan siswanya

mondok di pesantren tersebut, maka kurikulum madrasah (umum) tersebut tanpa menyertakan pendidikan agama. Sedangkan pelajaran agama terintegrasi di dalam sistem pondok,

- 5. Mempertahankan pesantren sebagai lembaga tafaqquh fi al-din dengan tetap mengupayakan pengembangan tekhnologi dan lainnya,
- 6. Nahdlatul Ulama perlu membuka jaringan dana pendidikan Internasional mengingat APBN sangat terbatas,
- 7. Menyusun kurikulum *ahlussunnah wal jama'ah* (aswaja) untuk sekolah-sekolah di lingkungan nahdliyyin,
- 8. Menentukan sistem pendidikan di kalangan nahdliyyin, sehingga ada kesepakatan tentang model pendidikan di kalangan nahdliyyin,
- 9. Perlu ada upaya penggalangan dana melalui swadaya warga NU.

Ditetapkan di : Asrama Haji Donohudan Boyolali Jawa Tengah

Pada tanggal: 16 Syawal 1425H / 1 Desember 2004 M

MUKTAMAR XXXI NAHDLATUL ULAMA PIMPINAN SIDANG KOMISI

ttd

ttd

K.H. Syafruddin

H. M. Cholil Nafis, Lc, M.A

Ketua

Sekretaris

Tim Perumus Akhir

Ketua, merangkap Anggota

Prof. Dr. Muh. Masyhuri Na'im, MA.

(PBNU)

Wk. Ketua, merangkap Anggota

Drs. H. Masrur Ainun Najih

(PBNU)

Sekretaris, merangkap Anggota

H. M. Cholil Nafis, Lc, M.A

(PBNU)

KEPUTUSAN KOMISI BAHTSUL MASAIL AL-DINIYYAH AL- MAUDHU'TYYAH MUNAS ALIM ULAMA & KONBES NU Di Asrama Haji Sukolilo Surabaya Tanggal 27 – 30 Juli 2006

21. Fikrah al-Nahdliyyah
22. Globalisasi, Universalisme dan HAM
dalam Perspektif Nahdlatul Ulama
23. Talfiq Antara Pendapat Empat Mazhab Fiqih Islam
24. Implementasi Sistem Pengambilan
Keputusan Hukum Islam
25. Al-Kutub al-Mu'tabarah

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NOMOR: 02/MUNAS/VII/2006 TENTANG BAHTSUL MASA'IL AI-DINIYYAH AI-MAUDHUTYYAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA

Menimbang

- : a. Bahwa menjadi tugas Muktamar sebagai instansi tertinggi dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk membahas masalah-masalah yang berkembang di masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam vang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat agar dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;
 - b. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Perkumpulan atau Jam'iyyah Diniyyah Islamiyyah yang bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat dan berbagai bidang yang mengarah kepada terbentuknya khaira ummah, perlu secara terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas khidmahnya dengan berdasarkan ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat;
 - c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, Musyawarah Nasional perlu menetapkan Hasil Bahtsul Masail Diniyyah Maudhu'iyyah;

Mengingat

- : a. Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor 002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas Alim Ulama Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926;
 - b. Keputusan Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Nomor: 137a/A.II.3/7/2006 tentang Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional Pasal 8 dan pasal 5 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama.

- Memperhatikan : a. Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama tanggal tanggal 3 Rajab 1427 H/28 Juli 2006 M;
 - Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi Maudlu'iyyah yang disampaikan pada Sidang Pleno Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada tanggal 2-5 Rajab 1427 H/27-30 Juli 2006 M;
 - Ittifak Sidang Pleno Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada tanggal 2-5 Rajab 1427 H/27-30 Juli 2006 M;

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridla Allah Swt.:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA TENTANG BAHTSUL MASAIL DINIYYAH MAUDHU'IYYAH;

Pasal 1 Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Hasil-Hasil Bahtsul Masail Diniyyah Maudhu'iyyah sebagai pedoman dalam memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat, dan mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;

Pasal 2 Mengamanatkan kepada Pengurus dan warga Nahdlatul Ulama untuk mentaati segala Hasil-Hasil Bahtsul Masail Diniyyah Maudlu'iyyah ini;

Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 5 Rajab 1427H/30 Juli 2006 M

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA PIMPINAN SIDANG PLENO

ttd ttd

Drs. KH. A. Hafizh Utsman

Ketua

Drs. H. Masrur Ainun Najih

Sekretaris

21. Fikrah Nahdliyyah

A. Mukaddimah

Pembentukan Jam'iyah Nahdlatul Ulama dilatarbelakangi oleh dua faktor dominan. Pertama, adanya kekhawatiran dari sebagian umat Islam yang berbasis pesantren terhadap gerakan kaum modernis yang meminggirkan mereka. Kedua, sebagai respons ulama-ulama berbasis pesantren terhadap pertarungan ideologis yang terjadi di dunia Islam pasca penghapusan kekhilafahan Turki, munculnya gagasan Pan-Islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin al-Afghani dan gerakan kaum Wahabi di Hijaz. Gerakan kaum reformis yang mengusung isuisu pembaruan dan purifikasi membuat ulama-ulama yang berbasis pesantren melakukan konsolidasi untuk melindungi dan memelihara nilai-nilai tradisional yang telah menjadi karakteristik kehidupan mereka.

Gerakan ulama berbasis pesantren semakin kental dan nyata terlihat mulai terbentuknya organisasi pendidikan dan dakwah, seperti Nahdlatul Wathan dan Tashwirul Afkar. Puncaknya adalah munculnya Komite Hijaz. Kemudian pada tanggal 31 Januari 1926 M (16 Rajab 1344 H.) para ulama yang berbasis pesantren memutuskan untuk membentuk organisasi kemasyarakatan Islam 'ala Ahlussunnah wal Jama'ah yang bernama Nahdlotoel Oelama yang bertujuan untuk mengimbangi gerakan kaum reformis yang seringkali tidak memperhatikan tradisitradisi yang sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat.

Perjalanan waktu membawa Nahdlatul Ulama berinteraksi dengan organisasi-organiasai lain yang memiliki karakter dan cara berpikir berbeda. Akibatnya, warga NU sendiri banyak yang kehilangan identitas ke-NU-annya. Banyak orang yang secara formal masih mengatasnamakan warga Nahdliyyin, tetapi cara berpikirnya tidak lagi mencerminkan karakteristik Nahdlatul 'Ulama. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum adanya Fikrah Nahdliyyah yang seharusnya menjadi landasan bagi setiap nahdliyyin di dalam bersikap dan bertindak.

Oleh karena itu, untuk menjaga nilai-nilai historis dan tetap meneguhkan Nahdlatul Ulama pada garis-garis perjuangannya (khittah), serta menjaga konsistensi warga nahdliyin berada pada koridor yang telah ditetapkan, Nahdlatul Ulama perlu membuat Fikrah Nahdliyyah.

B. Definisi

Nahdlatul 'Ulama memiliki metode berpikir sebagai berikut: Yang dimaksud dengan Fikrah Nahdliyyah adalah kerangka berpikir yang didasarkan pada ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah, yang dijadikan landasan berpikir Nahdlatul Ulama (khittah nahdliyah) untuk menentukan arah perjuangan dalam rangka islah al-ummah (perbaikan umat).

C. Manhaj Fikrah Nahdliyyah (Metode berpikir ke-NU-an)

Dalam merespon persoalan, baik yang berkenaan dengan persoalan keagamaan maupun kemasyarakatan, Nahdlatul 'Ulama memiliki *manhaj* Ahlussunnah wal Jama'ah sébagai berikut:

- 1. Dalam bidang aqidah/teologi, Nahdlatul Ulama mengikuti *manhaj* dan pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi.
- 2. Dalam bidang fiqh/hukum Islam, Nahdlatul Ulama bermazhab secara qauli dan manhaji kepada salah satu al-Madzahib al-'Arba'ah (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali).
- Dalam bidang tasawuf, Nahdlatul Ulama mengikuti Imam al-Junaid al-Baghdadi (w. 297 H) dan Abu Hamid al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M).

D. Khashaish (Ciri-ciri) Fikrah Nahdliyyah

- 1. Fikrah tawassuthiyah (pola pikir moderat), artinya Nahdlatul Ulama senantiasa bersikap tawazun (seimbang) dan i'tidal (moderat) dalam menyikapi berbagai persoalan. Nahdlatul Ulama tidak tafrith (gegabah) atau ifrath (ekstrim).
- 2. Bersikap tawazun (seimbang) dan i'tidal (moderat) dalam menyikapi berbagai persoalan. Nahdlatul Ulama tidak tafrith (gegabah) dan ifrath (ekstrim).
- 3. Fikrah tasamuhiyyah (pola pikir toleran), artinya Nahdlatul Ulama dapat hidup berdampingan secara damai dengan pihak lain walaupun aqidah, cara pikir, dan budayanya berbeda.
- 4. Fikrah Ishlahiyyah (pola pikir reformatif), artinya Nahdlatul Ulama senantiasa mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik (al-ishlah ila ma huwa al-ashlah).
- Fikrah Tathowwuriyah (pola pikir dinamis), artinya Nahdlatul Ulama senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon berbagai persoalan.
- 6. Fikrah Manhajiyah (pola pikir metodologis), artinya Nahdlatul Ulama senantiasa menggunakan kerangka berpikir yang mengacu kepada manhaj yang telah ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama.

22. Globalisasi, Universalisme dan HAM dalam Perspektif Nahdlatul Ulama

A. Mukaddimah

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadikan dunia ini bagai negeri tanpa batas. Apa yang terjadi di belahan dunia bagian barat dapat disaksikan langsung dari dunia bagian timur. Apa yang menjadi trend di suatu tempat akan cepat merambat ke tempat lain. Inilah yang disebut globalisasi.

Globalisasi di samping membawa dampak positif juga bisa menimbulkan dampak negatif bagi umat Islam. Dampak positifnya umat Islam dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membangun *networking* yang positif dengan umat Islam sendiri atau dengan umat lainnya. Sedangkan dampak negatifnya, globalisasi melahirkan universalisasi nilai-nilai budaya dan moral dari Barat, seperti liberalisme dan isu Hak Asasi Manusia.

Bagi umat Islam, dampak negatif ini memunculkan berbagai masalah keagamaan, sebab globalisasi dan universalisme nilai yang diusung oleh Barat tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran moral dan nilai yang ada dalam prinsip-prinsip Islam.

Karena itu, Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama perlu merumuskan bagaimana Nahdlatul Ulama merespons globalisasi, Universalisme dan HAM, serta memberikan batasan antara nilainilai yang sesuai dengan ajaran Islam dan yang tidak sesuai.

B. Sikap Nahdlatul Ulama

Dalam menghadapi globalisasi dan isu-isu Hak Asasi Manusia, Nahdlatul Ulama bersikap:

1. Tidak menafikan globalisasi, dalam arti cepatnya arus informasi sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga negara-negara di dunia seakan tidak ada batas-batasnya (boundless world). Karena, hal ini merupakan kenyataan yang harus dialami oleh manusia di muka bumi ini. Sehubungan dengan ini, Nahdlatul Ulama tidak akan mengasingkan diri dari derasnya arus informasi. Justru sebaliknya, Nahdlatul Ulama akan proaktif dalam mencari informasi untuk ditelaah, dipelajari, dipilah dan dipilih mana yang bermanfaat bagi kemajuan umat dan mana yang menjerumuskan

umat ke dalam kesesatan.

- 2. Nahdlatul Ulama menyadari bahwa globalisasi, di samping membawa pengaruh positif juga membawa pengaruh negatif sebagai akibat dari derasnya arus informasi, terutama yang datang dari Barat. Karena itu, Nahdlatul Ulama perlu meningkatkan gerakan dakwah agar umat tidak terjebak oleh informasi negatif dan menyesatkan.
- 3. Untuk menyaring budaya yang datang dari luar Islam, Nahdlatul Ulama menggunakan prinsip "Al-Muhafazhah 'ala al-Qadim al-Shalih wa al-Akhdz bi al-Jadid al-Ashlah" (Melestarikan warisan budaya yang baik dan mengambil pembaruan yang lebih baik) dan prinsip "Khudz Ma Shafa wa da' Ma Kadar" (Ambillah hal baik dan tinggalkanlah hal buruk).
- 4. Nahdlatul Ulama bersifat selektif dan kritis terhadap universalisasi nilai-nilai yang dilakukan oleh Barat. Sebab, Islam memiliki konsep universalitas tersendiri yang benar-benar mengacu kepada kemaslahatan umat sebagaimana firman Allah Swt.:

"Dan tiadalah Kami mengutusmu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam." (QS. al-Anbiya':107)

- 5. Nahdlatul Ulama memandang bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki manusia yang telah diberikan oleh Allah Swt. dan tidak ada satu makhluk pun yang berhak untuk melanggar HAM seseorang. Namun demikian, dalam pandangan Nahdlatul Ulama, manusia dalam menggunakan hak dasarnya dibatasi oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.
- 6. Nahdlatul Ulama menolak upaya-upaya penta'wilan kembali nashnash syar'i yang sudah qath'i al-dilalah walaupun atas nama globalisasi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Universalisme.

23. Talfiq Antara Pendapat Empat Mazhab Fiqih Islam

A. Mukaddimah

Perkembangan zaman dan tersebarnya Islam ke berbagai daerah memunculkan persoalan-persoalan keagamaan membutuhkan jawaban yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi. Sementara itu, teksteks (nushus) syar'i terbatas, pendapat-pendapat ulama yang integrated dalam suatu persoalan pun terbatas. Sedangkan persoalan-persoalan

keagamaan selalu muncul tidak ada batasnya. Terkadang, talfiq menjadi langkah yang sulit dihindari demi tercapainya kemaslahatan dan kesesuaian hukum dengan situasi dan kondisi.

Namun demikian, sampai saat ini sungguh pun talfiq telah dipraktikkan dalam sistem bermazhab yang dianut oleh NU, tetapi belum ada ketentuan-ketentuan yang lebih rinci mengenai apa sebenarnya talfiq, batasan-batasan dibolehkannya dan dasar hukumnya. Oleh karena itu, Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama perlu merumuskan persoalan tersebut untuk menghilangkan keragu-raguan dalam menggunakan talfiq dan menghindari penyalahgunaan talfiq yang menyesatkan.

B. Definisi

Talfiq adalah menggabungkan dua pendapat atau lebih dalam satu qadhiyah (satu rangkaian masalah) sehingga melahirkan pendapat baru yang tidak ada seorang Imam pun berpendapat seperti itu. Contoh, seseorang bertaqlid kepada mazhab Syafii dalam keabsahan wudhu dengan hanya mengusap sebagian kepala. Kemudian bertaqlid pada mazhab Hanafi dalam hal ketidakbatalannya karena menyentuh kulit perempuan yang bukan mahram.

C. Ketentuan Hukum

Talfiq pada dasarnya dilarang. Talfiq dibolehkan jika ada masyaqqah (kesulitan) dan tidak dalam rangka tattabbu' al-rukhash (semata-mata mencari keringanan).

24. IMPLEMENTASI SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUKUM ISLAM

A. Mukaddimah

Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 1412 H./1992 M di Bandar Lampung tentang "Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Islam dalam Bahtsul Masail di Lingkungan Nahdlatul Ulama" yang kemudian disempurnakan dan menjadi keputusan Muktamar XXXI NU tahun 1425 H./2004 M di Boyolali, Jawa Tengah, merupakan lompatan maju fiqh Nahdlatul Ulama dalam rangka menjawab persoalan keagamaan yang terus berkembang, sementara teks rujukan (maraji') tidak sepenuhnya dapat menjawab, sehingga banyak permasalahan yang belum terjawab karena terbatasnya qaul ulama.

Penggunaan taqrir jama'i, ilhaq al-masail bi nazhairiha dan istinbath jama'i

yang ada dalam keputusan tersebut adalah upaya untuk menghindari adanya masalah yang tidak terjawab (mauquf). Sayangnya, keputusan tentang sistem taqrir jama'i, ilhaq al-masail bi nazhairiha dan istinbath jama'i belum ada petunjuk operasionalnya dalam mengimplementasikan metode penetapan hukum Islam dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama perlu merumuskan petunjuk teknisnya agar keputusan tersebut dapat dioperasionalkan.

B. Taqrir Jama'i

1. Definisi

Taqrir Jama'i adalah upaya kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa pendapat.

2. Prosedur

- a. Mengidentifikasi pendapat-pendapat ulama tentang suatu masalah yang dibahas.
- b. Memilih pendapat yang unggul dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Pendapat yang paling kuat dalilnya.
 - 2) Pendapat yang paling mashlahat (ashlah).
 - 3) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama (jumhur).
 - 4) Pendapat ulama yang paling alim.
 - 5) Pendapat ulama yang paling wara'.
- c. Memperhatikan ketentuan dari masing-masing mazhab atas pendapat yang diunggulkan di kalangan mereka dengan uraian seperti berikut:
 - 1) Mazhab Hanafi.
 - 2) Mazhab Maliki.
 - 3) Mazhab Syafi'i.
 - a) Pendapat Syaikhani (al-Nawawi dan al-Rafi'i) menjadi suatu keniscayaan yang harus diambil jika sesuai dengan konteks permasalahannya. Tetapi jika tidak sesuai dengan konteksnya, maka dapat dipakai ulama lain dalam lingkup mazhab Syafi'i yang lebih sesuai,
 - b) Untuk mengukur kepandaian seorang ulama selain Syaikhani, bisa dilakukan dengan menggunakan persaksian ulama-ulama yang hidup semasa atau sesudahnya (muridmuridnya), dan atau bisa juga dilakukan dengan melihat karya-karyanya dilihat dari segi metodologi dan pemikiran

yang tertuang di dalamnya.

4) Mazhab Hanbali.

C. Ilhaq

1. Definisi

Ilhaq adalah menyamakan hukum suatu kasus dengan kasus yang telah ada jawabannya dalam kitab (menyamakan suatu kasus dengan kasus lain yang sudah ada hukumnya dalam kitab).

2. Prosedur

- a. Memahami secara benar tentang suatu kasus (tashawwur almasalah) yang akan dimulhaqkan (mulhaq).
- Mencari padanannya yang ada di dalam kitab yang akan diilhaqi (mulhaq bih) atas dasar persamaan di antara keduanya (wajh alilhaq).
- c. Menetapkan hukum mulhaq seperti hukum mulhaq bih.

D. Istinbath Jama'i

Definisi

Yang dimaksud istinbath jama'i adalah upaya secara kolektif untuk mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya dengan menggunakan qawa'id ushuliyah.

2. Prosedur

- a. Memahami secara benar tentang suatu kasus (tashawwur almasalah) yang akan ditetapkan hukumnya.
- b. Mencari dalil yang akan dijadikan dasar penetapan hukum (istidlal).
- c. Menerapkan dalil terhadap masalah dengan *kaifiyah al-istidlal* (metode pengambilan hukum).
- d. Menetapkan hukum atas masalah yang dibahas.

25. AL-KUTUB AL-MU'TABARAH

A. Mukaddimah

Sejak bahtsul masail tahun 1984 di Situbondo, kriteria al-kutub almu'tabarah dipermasalahkan dan dibahas. Kemudian dimandatkan kepada PBNU untuk ditetapkan kriterianya, sehingga kitab-kitab yang menjadi rujukan bagi NU menjadi jelas. Pada Muktamar NU ke-31 di Boyolali, hal yang sama juga dimandatkan kembali pada PBNU. Oleh karena itu, Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama 2006 memandang perlu untuk membahas dan menetapkan kriteria

al-Kutubu al-Mu'tabarah.

B. Definisi

Yang dimaksud dengan al-kutub al-mu'tabarah adalah kitab-kitab dari al-madzhab al-arba'ah (Hanafi, Maliki, syafi'i dan Hanbali), dan kitab-kitab lain yang memenuhi kriteria fikrah nahdliyah.

C. Kriteria

Kemu'tabaran suatu kitab didasarkan atas:

- 1. Penulis (muallif)nya yang antara lain memiliki sifat-sifat sebagai berikut:
 - a. Sunni,
 - b. Wara',
 - c. 'Alim.
- 2. Isi kitab, baik pendapat(qaul)nya sendiri maupun kutipan (manqulat);
 - a. Jika pendapatnya sendiri tolok ukurnya adalah argumentasi dan *manhaj* yang digunakan.
 - b. Jika berupa kutipan maka tolok ukurnya adalah *shihhah al-naql* (validitas kutipan)nya.
- 3. Pengakuan dari komunitas madzhabnya.

D. Kitab Standar (Ummahat al-Kutub) dalam Masing-masing Madzhab Empat Adalah Sebagai Berikut:

I. Madzhab Hanafi

Para ulama madzhab Hanafi pada era-era awalnya menjelaskan peringkat kitab-kitab Hanafiyah yang dianggap *mu'tamad* menjadi tiga *thabaqat* sebagai berikut:

Pertama, masail ushul atau masail zhahir al-riwayah. Yaitu semua masalah yang diriwayatkan dari para arsitek madzhab (Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan), yang terdapat dalam enam kitab yang masyhur karya Imam Muhammad bin Hasan. Yaitu al-Jami' al-Shaghir, al-Jami' al-Kabir, al-Siyar al-Shaghir, al-Siyar al-Kabir, al-Mabsuth, dan al-Ziyadat.

Kedua, Masail al-Nawadir. Yaitu masalah-masalah yang diriwayatkan dari tiga ulama madzhab tersebut, tetapi tidak terdapat dalam enam kitab yang telah disebutkan. Namun justru terdapat dalam kitab Muhammad yang lainnya, seperti al-Kaisaniyyat, al-Haruniyyat, al-Jurjaniyyat, al-Raqiyyat dan lain-lain. Atau terdapat dalam kitab karya selain Muhammad bin Hasan, seperti kitab al-Mujarrat karya Imam

al-Hasan bin Ziyad, al- Amali karya Abu Yusuf, atau riwayat-riwayat mufradat mutafarriqah, yang dalam kajian hadits sama dengan hadits ahad. Seperti riwayat Ibn Samma'ah, al-Mualla Ibn Mansyur, Nawadir Ibn Hisyam dan Nawadir Ibn Rustum. Kitab-kitab ini disebut Nawadir, artinya kitab ini ghair zhahir al-riwayah. Disebut demikian karena kredibitilas dan akurasi riwayat dari Muhammad bin Hasan dalam kitab-kitab tersebut tidak selevel dengan kitab yang disebut pertama.

Ketiga, Masail al-Waqi'at atau Masail al-Fatawa. Yaitu masalah-masalah yang merupakan hasil istinbath ulama-ulama muta'akhirin, yang tidak terdapat riwayatnya. Mereka itu adalah para murid Abu Yusuf, dan atau murid Imam Muhammad, atau murid dari murid keduanya.

Pada perkembangan selanjutnya, kitab-kitab yang dianggap mu'tamad adalah kitab yang tidak keluar dari ketentuan kitab zhahir al-riwayah yang enam. Baik berupa ringkasan (mukhtashar), matn atau syarh. Sehingga urutan kitab-kitab mu'tamadah dalam fiqh Hanafi sebagai berikut:

- a. Kitab-kitab zhahir al-riwayah. Yaitu karya Imam Muhammad bin Hasan yang meliputi al-Jami' al-Shaghir, al-Jami' al-Kabir, al-Siyar al-Shaghir, al-Siyar al-Kabir, al-Mabsuth, dan al-Ziyadat.
- b. Kitab-kitab mukhtashar atau matn. Di antaranya adalah:
 - 1) Mukhtashar al-Thahawi, karya Abu Ja'far al-Thahawi (w. 321 H).
 - 2) Al-Kafi, karya al-Hakim Muhammad bin Muhammad (w. 334 H).
 - 3) Al-Muntaqa, juga karya al-Hakim Muhammad bin Muhammad.
 - 4) Mukhtashar al-Karkhi, karya Abu Husain al-Karkhi (w. 340 H).
 - 5) Mukhtashar al-Qaduri, karya Imam Ahmad al-Qaduri (w. 428H). Kitab inilah yang dimaksud dengan ungkapan al-Kitab dalam redaksi kitab-kitab fiqh madzhab Hanafi.
 - 6) Mandzumah al-Nasafi fi al-Khilaf, karya Najmuddin al-Nasafi (w. 537 H).
 - 7) Tuhfah al-Fuqaha', karya 'Alauddin al-Samarqandi (w. 552 H).
 - 8) Bidayah al-Mubtadi, karya al-Marghinani al-Farghani (w. 593 H).
 - 9) Al-Mukhtar, karya Abu al-Fadhl al-Mushili (w.683 H).
 - 10) Majma' al-Bahraini wa Multaq al-Nahraini, karya al-Sa'ati (w. 694 H).
 - 11) Al-Wafi, karya Abu al-Barakat Hafiduddin al-Nashafi (w. 710 H).
 - 12) Kanz al-Daga'iq (ringkasan al-Wafi), karya al-Nashafi pula.
 - 13) Al-Wiqayah, karya Taj al-Syari'ah al-Mahbubi.
 - 14) Al-Niqayah (Mukhtashar al-Niqayah), karya Shadr al-Syari'ah al-Mahbubi (w. 747 H).
- c. Kitab-kitab syarh. Di antaranya adalah:

- 1) Al-Mabsuth, karya Syams al-Aimmah al-Sarkhasi (w. 490 H). Syarh kitab al-Kafi.
- 2) Badai' al-Shanai', karya Ala'uddin al-Kasani (w. 587 H). Syarh kitab Tuhfah al-Fuqaha'.
- 3) Al-Hidayah, karya al-Marghinani, Syarh kitab Bidayah al-Mubtadi.
- 4) Al-Ikhtiyar li al-Ta'lil al-Mukhtar, karya Abu Fadhl al-Mushili. Syarh kitab al-Mukhtar.
- 5) Syarh al-Wiqayah, karya Ubaidillah bin Mas'ud bin Taj al-Syari'ah.
- 6) Tabyin al-Haqa'iq, Syarh Kanz al-Daqa'iq, karya al-Zaila'i (w. 743 H).
- 7) Fath al-Qadir, karya Ibn al-Humam (w. 861 H).
- 8) Al-Tarjih wa al-Tashih, Syarh Mukhtashar al-Qaduri, karya Qasim Ibn Qathlubugha (w. 879 H).
- 9) Al-Bahr al-Ra'iq, Syarh Kanz al-Daga'iq, karya Ibn Nujaim (w. 969 H).
- d. Al-Fatawa dan al-Waqi'at. Yaitu karya hasil istinbath para mujtahid madzhab muta'akhir atas masalah-masalah yang tidak ada jawabannya dalam zhahir al-riwayah.¹ Antara lain:
 - 1) An-Nawazil fi al-Furu', karya Abu al-Laits al-Samarqandi (w. 372 H).
 - 2) Fatawa Syams al-Aimmah al-Khulwani, karya Abdul Aziz al-Khulwani (w. 448 H / 449 H).
 - 3) Fatawa Khawahir Zadah, karya Abu Bakar Muhammad bin Husain al-Bukhari, yang lebih dikenal dengan Khawahir Zadah (w. 483 H).
 - 4) *Hawi al-Husyairi*, karya Muhammad Ibrahim bin Anusy al-Husyairi (w. 505 H).
 - 5) Al-Fatawa al-Kubra, karya al-Shadr al-Syahid (w. 536 H).
 - 6) Al-Fatawa al-Nasafiyah, karya Najmudin al-Nasafi (w. 537 H).
 - 7) Al-Fatawa al-Walwalijiyyah, karya Abdurrasyid bin Abu Hanifah bin Abdurrazak al-Walwalijiyyah (w. 540 H).
 - 8) Khulashah al-Fatawa, karya Thahir bin Ahmad bin Abdurrasyid al-Bukhari (w. 542 H).
 - 9) Al-Fatawa al-Sirajiyyah, karya Sirajuddin al-Ausyi al-Farghani (w. 575 H).
 - 10) Al-Fatawa al-Khaniyyah, karya Fakhruddin Hasan bin Mansyur al-Usjandi yang terkenal dengan sebutan Qadhi Khan (w. 592 H).
 - 11) Al-Hawi al-Qudsi, karya Jamaluddin Al-Qabisi (w. 593 H).
 - 12) Al-Muhith al-Burhani, karya Tajuddin Ibn Mazah al-Bukhari (w. 616 H).

¹ Pada prinsipnya, kitab-kitab fatawa ini tidak dianggap mu'tamad, kecuali jika merupakan kumpulan dari pendapat a'immah al-madzhab dan bukan pendapat pribadi.

- 13) Al-Dakhirah atau Dakhirat al-Fatawa atau al-Dakhirah al-Burhaniyah, itkhtishar kitab al-Muhith al-Burhani dengan pengarang yang sama.
- 14) Al-Fatawa al-Zhahiriyah, karya Zhahiruddin Muhammad bin Ahmad bin Umar (w. 619 H).
- 15) Al-Fatawa al-Hindiyyah atau Fatawa Alim Kir (Sultan India), karya lima Ulama yang dipimpin Syaikh Nidzamuddin al-Burhan Buri.

II. Madzhab Maliki

Landasan utama bagi madzhab Maliki adalah kitab al-Muwaththa' karya Imam Malik bin Anas, dan pendapat-pendapat yang disebut "samma'at" atau "riwayat" dari Imam Malik yang diriwayatkan oleh murid-muridnya. Seperti Samma'at Ibn Qasim (w. 191 H), Samma'at Ibn Wahb (w. 197 H), Samma'at Ashab (w. 204 H), Samma'at Ibn Majisyun (w. 212 H) dan Samma'at Ibn Abdil Ahkam (w. 214 H).

Kemudian berkembang karya-karya yang menjadi panutan ulama Malikiyah. Antara lain *al-Mudawwanah*² karya Sahnun (w. 240 H), *al-Wadihat* karya Abdul Malik bin Habib (w. 238 H), *al-'Utbiyyah* karya Muhammad bin Ahmad al-Utbi (w. 255 H), *al-Mawwaziyah* karya Ibn Mawwaz (w. 269 H), *al-Mukhtalathah* karya Sahnun, *al-Majmu'ah* karya Ibn 'Abdus (w. 260 H), dan *al-Mabsuth*, karya Qadhi Abu Ishaq (w.282 H). Kitab-kitab tersebut –disamping kitab-kitab di atas– disebut *ummahat al-madzhab*.

Sampai di sini, ketentuan kitab-kitab mu'tamadah pada era-era awal adalah sebagai berikut :

- 1. Pendapat Imam Malik dalam al-Muwaththa'.
- 2. Pendapat Imam Malik di al-Mudawanah.
- 3. Pendapat Ibn Qasim di al-Mudawanah.
- 4. Pendapat Ibn Qasim di selain al-Mudawwanah.
- 5. Pendapat selain Ibn Qasim di al-Mudawanah.3

² Kitab ini adalah kitab yang diriwayatkan dari Ibn Qasim.

³ Ketentuan ini direvisi oleh generasi-generasi berikutnya, sebagaimana disampaikan oleh Abu al-Hasan al-Thanji, dengan urutan sebagai berikut:

^{1.} Pendapat Imam Malik di al-Muwaththa'.

^{2.} Pendapat Imam Malik di al-Mudawanah.

^{3.} Pendapat Ibn Qasim di Al-Mudawanah.

^{4.} Pendapat selain Ibn Qasim di al-Mudawanah.

Perbedaannya terdapat pada pendapat Ibn Qasim di luar al-Mudawanah dan pendapat selain Ibn Qasim yang ada di al-Mudawanah. Menurut versi pertama, pendapat Ibn Qasim lebih diprioritaskan walaupun tidak terdapat di al-Mudawanah. Sementara menurut

- 6. Pendapat selain Ibn Qasim dari ulama madzhab yang terangkum di dalam kitab-kitab al-Ummahat wa al-Dawawin, selain yang terdapat di al-Mudawanah, yang terbagi menjadi dua kelompok:⁴
 - Pertama, kitab mu'tamad dalam fiqh nazhari, seperti:
- a. Kitab-kitab Abu Bakar al-Abhuri (w. 375 H), yaitu Syarh Mukhtashar Ibn Abdil Hakam al-Kabir dan Syarh Mukhtashar Ibn Abdil Hakam al-Shaghir,
- b. Al-Tafri', karya Ibn Jallab (w. 378 H),
- c. Kitab-kitab Ibn Abi Zaid al-Qairawani (w.386 H), yaitu al-Risalah, al-Nawadir wa al-Ziyadat dan Mukhtashar al-Mudawanah,
- d. 'Uyun al-Adillah, karya Ibn Qashshar (w.397 H),
- e. Kitab-kitab Qadhi Abdul Wahab bin Nashr (w.422 H),
- f. Al-Tahdzib, karya Baradza'i (w.438 H),
- g. Al-Jami', karya Ibn Yunus (w. 451 H),
- h. Al-Muntaga, karya Abu al-Walid al-Baji (w.474 H),
- i. Al-Tabsirah, karya al-Lakhmi (w.478 H),
- j. Kitab-kitab karya Ibn Rusyd (w. 595 H), seperti al-Bayan wa al-Tahshil, al-Muqaddimat, al-Mumahhadat, Fatawa Ibn Rusyd,
- k. Kitab-kitab karya al-Maziri, yaitu al-Ta'liqat 'ala al-Mudawanah, Syarh al-Talqin dan Fatawa,
- 1. Al-Tanbihat, karya al-Qadhi 'Iyadh,
- m. 'Akd al-Jawahir al-Tsaminah, karya Ibn Syas (w.616 H),
- n. Al-Jami' baina al-Ummahat, karya Ibn al-Hajib Utsman bin Umar bin Abu Bakr (w. 646 H) yang dikenal dengan sebutan Mukhtashar Ibn al-Hajib, dan syarh-syarhnya, seperti:
 - Al-Shihab al-Tsakib bi Syarh Mukhtashar Ibn Hajib, karya Muhammad bin Abdullah bin Rasyid al-Qafsyi (w. 736 H),
 - 2) Tanbih al-Thalib bi Fahm Kalam Ibn Hajib, karya Muhammad bin Abdussalam al-Hawari,
 - 3) Al-Tanbih, karya Salil bin Ishaq al-Jundi (w. 776 H),
- o. Mukhtashar Syaikh Khalil bin Ishaq, kitab ini adalah mukhtashar dari al-Jami' baina al-Ummahat), dan kitab-kitab syarhnya, seperti:

versi kedua, yang penting pendapat tersebut terdapat dalam kitab al-Mudawanah, meskipun bukan pendapat Ibn Qasim.

⁴ Pada era-era ini kitab-kitab madzhab Maliki terbagi menjadi dua kelompok. Kutub al-Fiqh al-Nazhari (kajian-kajian fiqh secara menyeluruh baik berbicara tentang fiqh madzhab maupun madzhab muqarin), dan Kutub al-Fiqh at-Tathbiqi (kajian seputar masalah-masalah qadha', masalah-masalah wasa'iq/perjanjian dan syurut).

- 1) Al-Munazza' al-Nabil fi Syarh Mukhtashar Khalil, karya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Marzuk (w. 843 H),
- 2) Syarh Mukhtashar Khalil, karya Muhammad bin Muhammad bin Syirath al-Gharnati (w. 848 H),
- 3) Syarh al-Mukhtashar, karya Ibrahim bin Faidah al-Zawawi (w. 857 H),
- 4) Syarh Bahran 'ala Khalil, karya Imam Bahran Ibn Abdillah al-Dumairi (w. 805 H),
- p. Al-Mukhtashar al-Fiqh Ibn 'Arafah,
- q. Kitab-kitab Ibn Naji Qasim Ibn Ishaq (w. 838 H). Antara lain *Syarh al-Mudawanah* karya Imam Sahnun,
- r. Tahrir al-Maqala fi Syarh al-Risalah Ibn Abi Zaid al-Qairawani, karya Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Qalsani (w. 863 H),
- s. Syarh-syarh al-Mawwaq 'ala Mukhtashar Khalil, karya Muhammad bin Yusuf al-Abdari al-Gharnati al-Syahil al-Mawwaq (w. 897 H),
- t. Syarh al-Mukhtashar Syaikh Halulu Ahmad bin Abdurrahman (w. 898 H),
- u. Syarh al-Risalah karya Ahmad bin Ahmad bin Muhammad (w. 899 H),
- v. Syifa' al-Ghalil fi Hill al-Muqaff al-Khalil karya Muhammad bin Ahmad al-Utsmani (w. 919 H),
- w. Hasyiyah al-Thukhaikhi 'ala al-Mukhtashar, karya Musa al-Thukhaikhi (w. 945 H),
- x. Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil, karya al-Haththab (w. 953 H),
- y. Barnamaj Syawarid Li istikhraj Masa'il al-Syamil, karya al-Qasim bin Muhammad, yang terkenal dengan Adzum (w. 1009 H),
- z. Taysir al-Malak al-Jalil li Jam'i al-Syuruh wa Hawasyi Khalil, karya Salim bin Muhammad asy-Syanhuri (w. 1015 H),
- aa. Hasyiyah Syekh Ahmad Babaa 'ala al-Mukhtashor (w. 1032 H),
- bb. Mursyid al-Mu'in 'ala Dharuri min Ulum al-Din, karya Abdul Wahib bin Ahmad bin Asyir (w. 1040 H).

Kedua, kitab-kitab mu'tamad dalam fiqh Tathbigi:

- a. Al-Watsa'iq, karya Ibn Aththar,
- b. al-Watsa'iq wa al-Syuru', karya Ibn al-Hindi,
- c. Al-Muqni' fi Ushul al-Ahkam, karya Sulaiman al-Bathlayusi,
- d. Al-I'lam bi Nawazil al-Hukam, terkenal dengan Nawazil Ibn Sahl,
- e. Al-Mutaithiyah, terkenal dengan al-Nihayah wa al-Tamam fi Ma'rifah al-Watsa'iq wa al-Ahkam, karya Abu al-Hasan Ali al-Mutaithi,
- f. Tharar Ibn 'Ad (w.609 H).

Di samping penjelasan tentang kitab mu'tamad, ternyata ulama Malikiyah menyebut pula beberapa kitab yang tidak mu'tamad dan

868

tidak boleh dijadikan pedoman, yaitu dengan kriteria:

- Hasyiyah. Kitab jenis ini haram hukumnya untuk dipakai berfatwa, sebab tidak ada jaminan keabsahan dalam penukilannya dari ulama madzhab. Tentu hal ini tidak berlaku secara mutlak. Namun hanya berlaku apabila hasyiyah itu tidak ada jelas nuqulnya. Seandainya jelas tersebut di kitab al-Ummahat, atau memang terdapat kejelasan riwayat yang shahih, maka bisa diterima.
- 2. Al-Tharar, atau al-Thaqayid, atau al-Taqyidad. Secara umum kitab jenis ini bisa dipakai sebagai petunjuk, tetapi tidak dianggap sebagai kitab yang mu'tamad (tuhda wa la tu'tamad). Karena biasanya, kitab-kitab ini berasal dari catatan para pelajar ketika mereka mengaji kepada gurunya.

Di antara kitab-kitab *al-Taqyidad* yang bisa dipakai petunjuk tapi tidak bisa dijadikan pedoman adalah:

- 1. *Al-Taqyid*, di*nisbat*kan kepada Abdurrahman al-Jazuli, merupakan penjalasan *Matn al-Risalah*.
- 2. Al-Taqyiid, dinisbatkan pada Yusuf bin Umar al-Anfashi al-Fashi, juga merupakan penjelasan Matn ar-Risalah.
- 3. *Ma infaradat bih min al-ahkam* (pendapat yang menyendiri dan berbeda dengan pendapat lain), di antaranya adalah:
 - a) Syarh Mukhtashar Khalil, karya Syaikh 'Ali al-Ajhuri.
 - b) Syarh Mukhtashar Khalil, karya murid-murid al-Ajhuri, seperti Syaikh Abdul Baqi al-Zarqani, Syaikh Ibrahim Al-Syabarkhithi, dan Muhammad al-Khurasyi. Inilah kitab-kitab yang tidak boleh dijadikan pegangan ketika pendapatnya menyendiri.

III. Madzhab Syafi'i

Ulama sepakat, bahwa pendapat yang mu'tamad adalah pendapat yang disepakati Syaikhani (al-Rafi'i dan al-Nawawi). Bila pendapat keduanya berbeda, maka pendapat Imam al-Nawawi yang harus didahulukan, baru kemudian pendapatnya Imam al-Rafi'i. Bahkan

⁵ Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj*, (Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.), Juz I, h. 39, Ibn Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra*, (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, t. th.), Juz IV, h. 324, Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, *al-Fawaid al-Madaniyah*, h. 34, Muhammad Syaththa al-Dimyati, *l'anah al-Thalibin*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) Juz I, h. 19, Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, *Bughyah al-Musytarsyidin*, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 274, Alawi al-Saqqaf, *Tarsyih al-Mustafidin*, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 5.

kesepakatan al-Nawawi dan al-Rafi'i lebih didahulukan dari pendapat Imam Syafi'i sendiri, padahal pendapat Imam Syafi'i bagi ulama madzhab ibaratnya seperti nash al-Qur'an atau nash al-Hadits.⁶ Hal ini bisa diterima, mengingat ulama yang mengerti dan mendalami madzhab, tingkatannya adalah Mujtahid Muqayyad. Orang yang sampai pada level tersebut, selalu membandingkan pendapat Imamnya dengan qaidah dan dasar-dasar yang sudah diletakannya. Sehingga tidak jarang -di saat terjadi benturan antara qail dan qaidah- dia lebih memprioritaskan keharusan qaidah, dan meninggalkan qaul tersebut dengan menta'wilnya. Dalam kondisi seperti itu, sangat tidak tepat mengatakan: "Mujtahid muqayyad tidak tahu dan tidak mengerti pendapat imamnya." Yang benar mujtahid muqayyad tersebut sangat tahu, bahkan mengkaji pendapat imamnya. Namun kemudian membelokkan dari arti zhahurnya dengan dalil-dalil. Yang demikian ini tidak bisa dikatakan: "Dia sudah keluar dari madzhab imamnya."

Kedudukan kitab-kitab al-Nawawi dan al-Rafi'i, menurut mayoritas ulama adalah kitab mu'tamad. Bahkan ulama generasi akhir (al-Muta'akhkhirun) melarang merujuk dan berpegangan pada kitab-kitab sebelum Imam al-Rafi'i dan al-Nawawi, kecuali setelah dengan cermat meneliti bahwa itu adalah pendapat madzhab.8

Kemudian, tidak jarang pendapat Imam al-Nawawi dalam satu kitab berbeda dengan pendapatnya di kitabnya yang lain, untuk itu ulama membuat satu ketentuan dalam menetapkan peringkat kitab-kitab Imam al-Nawawi dan mentarjihnya sebagai berikut:9

- 1. Al-Tahqiq. Kitab yang paling shahih menurut ulama muta'akhirin,
- 2. Al-Majmu',
- 3. Al-Tanqih,
- 4. Al-Raudhah dan Minhaj al-Thalibin,
- 5. Al-Fatawa,

870

6. Syarh Shahih Muslim,

Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, al-Fawaid al-Madaniyah, h. 20-21, menukil pendapat Ibn Hajar.
 Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, al-Fawaid al-Madaniyah, h. 22, menukil pendapat al-Ramli.

⁸ Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, (Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.), Juz I, h. 39, Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra, (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, t. th.), Juz IV, h. 324 dan Alawi al-Saqqaf, Tarsyih al-Mustafidin, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 5.

⁹ Ketentuan tersebut adalah ketentuan umum, sebab kadang-kadang dalam suatu masalah ketentuan tersebut tidak berbeda.

7. Tashih Al-Tanbih wa Nukkatihi. 10

Ketentuan tersebut berlaku bagi mereka yang kurang mendalami persoalan madzhab. Sedangkan bagi orang yang mengerti dan mendalami madzhab, maka cara mentarjih di antara pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab-kitabnya adalah mendahulukan dan mengambil pendapat al-Nawawi yang sesuai dengan pemikirannya sendiri berdasarkan dalil-dalil yang diketahuinya. Tetapi harus tidak keluar dari qaidah yang sudah disepakati ulama. Yaitu harus masih berada dalam ruang lingkup ikhtiar al-Nawawi dan al-Rafi'i', artinya hak memilih bagi orang tersebut adalah memilih di antara pendapat-pendapat hasil ijtihad al-Nawawi, tanpa melihat mana yang terdahulu dan mana yang kemudian.¹¹

Masa terus berjalan, sementara itu pendapat dan kitab-kitab Syaikhani (al-Nawawi dan al-Rafi'i) terus membayang-bayangi ijtihad generasi berikutnya di dalam menentukan pendapat madzhab. Sampai akhirnya lahirlah ulama-ulama yang sangat teliti dan hati-hati di dalam menganalisa pendapat madzhab. Seperti Zakaria al-Anshari (w. 926 H), Syihab al-Ramli (w. 973 H), al-Khatib al-Syirbini (w. 977 H), Syamsuddin al-Ramli (w. 1004 H), Ibn Hajar al-Haitami (w. 973 H), dan lain-lainnya. Mereka sangat perhatian terhadap kitab-kitab Imam al-Nawawi dan Imam al-Rafi'i, terutama kitab al-Minhaj Imam al-Nawawi.

Syaikh Zakaria al-Anshari meringkas (ikhtisar) kitab tersebut dalam karyanya, Manhaj al-Tullab. Sedangkan Ibn Hajar, al-Khatib al-Syirbini dan Samsuddin al-Ramli menganalisa atau mensyarahi kitab al-Minhaj dan menamakannya Tuhfah al-Muhtaj, Mubghni al-Muhtaj dan Nihayah al-Muhtaj. Kadang-kadang ijtihad ketiga orang tersebut berbeda dengan pendapat Imam al-Nawawi dan Imam al-Rafi'i, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa mereka keluar dari madzhab Syafi'i – seperti sudah dijelaskan di depan-.

Di depan sudah dijelaskan, bahwa bagi ulama dipersilahkan memilih antara pendapat-pendapat *Syaikhani* (al-Nawawi dan al-Rafi'i) tanpa harus terikat dengan pendapat Ibn Hajar dan al-Ramli atau yang lainnya.

¹⁰ Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, (Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.), Juz I, h. 39, Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra, (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, t. th.), Juz IV, h. 324, Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, al-Fawaid al-Madaniyah, h. 16,17,33,34 dan 39 dan Muhammad Syaththa al-Dimyati, I'anah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.) Juz IV, h. 234.

¹¹ Muhammad Ibrahim, al-Madzhab 'Inda al-Syafi'i, h. 40.

Ulama hanya membatasi pilihan pada pendapat-pendapat Imam al-Rafi'i dan al-Nawawi, mengingat mayoritas ulama tidak mengizinkan keluar dan berpaling dari pendapat dua tokoh tersebut.¹²

Adapun yang masih belum sampai pada tingkatan ulama dengan kriteria tersebut di depan -seperti umumnya orang-orang di zaman sekarang- mereka bebas memilih pendapat Ibn Hajar atau al-Ramli. Manakala pendapat keduanya berbeda, mana yang dianggap pendapat madzhab dan harus didahulukan? Menurut ulama Hadramaut, Syam, Akrad (Kurdi), Daghistan dan mayoritas ulama Yaman, adalah pendapat Ibn Hajar dalam al-Tuhfah yang dianggap mu'tamad dan harus didahulukan.13 Sedang mayoritas ulama Mesir mengatakan, bahwa pendapat al-Ramli yang paling mu'tamad, bahkan mereka berikrar tidak berfatwa kecuali dengan pendapatnya Imam al-Ramli.14 Sementara para ulama Haramain (Makkah dan Madinah), pada awalnya selalu berpegangan pada pendapat Ibn Hajar. Kemudian ketika banyak ulama Mesir yang datang, menetap, belajar dan mengajar di Haramain, mulailah tersebar pendapat Imam al-Ramli, dan keduanya menjadi kitab pedoman bagi mereka. Bahkan para ulama yang perhatian dengan pendapat keduanya langsung mengambilnya tanpa pakai filter. 15

Dalam perkembangannya, Syaikh Muhammad Sa'id Sumbul al-Makki (w. 1175 H) dan ulama yang segaris dengannya menetapkan: "Tidak diperkenankan bagi Mufti berfatwa dengan hukum yang berbeda dengan pendapat Ibn Hajar dan al-Ramli dalam al-Tuhfah dan al-Nihayah."

Tetapi Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi (w. 1194 H) membolehkan berpaling dari *al-Tuhfah* dan *al-Nihayah*, dan berpegangan pada kitab-kitab Ibn Hajar dan al-Ramli selain *al-Tuhfah* dan *al-Nihayah*. Sedangkan urutan kitab-kitab Ibn Hajar adalah sebagai berikut:

- 1. Al-Tuhfah,
- 2. Fath al-Jawad,

¹² Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, al-Fawaid al-Madaniyah, h. 16,17dan 220.

¹³ Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, al-Fawaid al-Madaniyah, h. 37, Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 274, Muhammad Syaththa al-Dimyati, l'anah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) Juz I, h.19 dan Alawi al-Saqqaf, Tarsyih al-Mustafidin, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 5.

¹⁴ Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, al-Fawaid al-Madaniyah, h. 41 dan Muhammad Syaththa al-Dimyati, I'anah al-Thalibin, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) Juz I, h.19.

¹⁵ Alawi al-Saqqaf, Tarsyih al-Mustafidin, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 5.

¹⁶ Alawi al-Saqqaf, Tarsyih al-Mustafidin, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 5.

- 3. Al-Imdad,
- 4. Al-Fatawa dan Syarh al-'Ubab.17

Manakala Ibn Hajar dan al-Ramli tidak berpendapat dalam suatu masalah, maka generasi akhir (al-Muta'akhkhirun) membuat urutan pendapat yang bisa dianggap mu'tamad dalam madzhab Syafi'i sebagai berikut:

- 1. Syaikh Zakaria al-Anshari dalam kitabnya al-Bahjah Al-Shaghir, lalu al-Manhaj dan Syarhnya, 18
- 2. Syaikh al-Khatib As-Syirbini,
- 3. Berikutnya pendapat *Ashhab al-Hawasyi* (pengarang *hasyiyah*). Ini pun dengan syarat tidak bertolak belakang dengan dasar-dasar dan *qaidah* madzhab, dan umumnya pendapat mereka sejalan dengan pendapat Imam al-Ramli.¹⁹

Adapun Ashhab al-Hawasyi, urutannya sebagai berikut:

- 1. Ali Al-Zayyadi (w. 1024H), pengarang Hasyiyah 'ala Syarh al-Manhaj,
- 2. Ahmad bin Qasim Al-'Ubbadi (w. 994 H), pengarang Hasyiyah 'ala Syarh Manhaj dan Hasyiyah 'ala al-Thuhfah,
- 3. Ahmad Syihabuddin Amirah. Pengarang Hasyiyah 'ala Kanz al-Raghibin,
- 4. Ali Sibramalisi bin Ali (w. 1087 H), pengarang Hasyiyah ala Syarh al-Minhaj,
- 5. Ali Al-Halabi (w. 1044 H),
- 6. As-Syuwairi,
- 7. Al-'Inani,

IV. Madzhab Hanbali

Kitab-kitab mu'tamad dalam madzhab Hanbali sebagaimana berikut:

- Mukhtashar al-Khiraqi, dan syarh-syarhnya. Seperti Syarh al-Khiraqi', karya Qadhi Abu Ya'la Ibn al-Farra', al-Mughni karangan Ibn Qudamah, Abdullah bin Muhammad,
- 2. Ru'us al-Masa'il, karya Abdul Khaliq bin Isa al-Hasyimi,
- 3. Al-Hidayah, karya Abu al-Khattab al-Kalwadzani,
- 4. Al-Tadzkirah, karya Abu al-Wafa' bin Aqil,
- 5. Al-Muharrar, karya Ibn Taimiyah, Majd al-Din Abu al-Barakat,
- 6. Al-Syāfi, karya Ibn Qudamah, Abdurrahman bin Muhammad,
- 7. Al-Furu', karya Ibn Muflih,

¹⁷ Syarh Muhtasar Ba Fadlal lebih mu'tamad dibanding al-Fatawa dan al-'Ubab.

¹⁸ Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, al-Fawaid al-Madaniyah, h. 222.

¹⁹ Alawi al-Saqqaf, Tarsyih al-Mustafidin, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 5.

- 8. Syarh Muntaha al-Iradat, karya Manshur bin Yunus al-Bahuti,
- 9. Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Igna', karya Manshur bin Yunus al-Bahuti,

10. Al-Raudh al-Murbi', karya Manshur ibn Yunus al-Bahuti.

Tiga kitab terakhir karangan al-Bahuti adalah kitab yang paling mu'tamad bagi ulama Hanabilah kontemporer (al-Muta'akhkhirin min al-Hanabilah).

PIMPINAN SIDANG PLENO KOMISI BAHTSUL MASAIL DINIYYAH MAUDLUIYYAH

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

ttd

KH. Ma'ruf Amin Prof. Dr. Mu'iz Kabri

HM. Cholil Nafis, MA.

Tim Perumus

Ketua

: KH. Ma'ruf Amin

Sekretaris

Wakil Ketua : Prof. Dr. Mu'iz Kabri : HM. Cholil Nafis, MA

Anggota

: KH. Afifuddin Muhajir, MA

KH. Imam Ghazali Said, MA

KH. Syafrudin

Ust. Abdul Mannan Abdul Jalil, M.E.I.

KEPUTUSAN KOMISI BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH AL- MAUDHU'IYYAH MUKTAMAR KE-32 NAHDLATUL ULAMA Di Asrama Haji Sudiang Makassar Tanggal 06-13 Rabiul Akhir 1431 H/ 22-29 Maret 2010

26. Format Penetapan Bahtsul Masail
27. Dhawabith (Ketentuan) Masjid
28. Dhawabith Ittihad al-Majlis
(Ketentuan Satu Majlis)
29. Dhawabith (Ketentuan) al-Kufr
30. Relevansi Qanun Wadh'i (Hukum Positif)
dan Hukum Syar'i
31. Khitan Perempuan

KEPUTUSAN MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL ULAMA NOMOR : IV/MNU-32/III/2010 TENTANG BAHTSUL MASA'IL DINIYYAH MAUDLU'IYYAH NAHDLATUL ULAMA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ

MUKTAMAR KE-32 NAHDLATUL ULAMA

- Menimbang: a. Bahwa menjadi tugas Muktamar sebagai instansi tertinggi dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk membahas masalah-masalah yang berkembang di masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat agar dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;
 - b. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Perkumpulan atau Jam'iyyah Diniyyah Islamiyyah yang bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat dan berbagai bidang yang mengarah kepada terbentuknya Khaira Ummah, perlu secara terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas khidmahnya dengan berdasarkan ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat;
 - Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas Muktamar Ke-32 perlu menetapkan hasil bahtsul masail Diniyyah Maudhu'iyyah;
- Mengingat: a. Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor 002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas Alim Ulama Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926;
 - Keputusan Muktamar ke 32 Nahdlatul Ulama Nomor. I/MNU-32/III/2010 tentang Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib Muktamar Ke-32 Pasal 13 ayat (3) dan pasal 5 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama;

Memperhatikan : a. Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Muktamar Ke-32 Nahdlatul Ulama tanggal tanggal 7 R. Akhir 1431 H/23 Maret 2010 M;

 Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi Maudlui'yyah yang disampaikan pada Sidang Pleno VII Muktamar Ke-32 Nahdlatul Ulama pada tanggal 11 R. Akhir 1431 H/27 Maret 2010 M;

Ittifak Sidang Pleno VII Muktamar Ke-32
 Nahdlatul Ulama pada tanggal 11 R. Akhir 1431
 H/27 Maret 2010 M;

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridlo Allah SWT:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MUKTAMAR XXXII NAHDLATUL ULAMA TENTANG BAHTSUL MASAIL DINIYYAH MAUDHUTYYAH;

Pasal 1

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Hasilhasil bahtsul masail Diniyyah Maudhu'iyyah sebagai pedoman dalam memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal jamaah menurut salah satu madzhab empat dan mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;

Pasal 2

Mengamanatkan kepada Pengurus dan warga Nahdlatul Ulama untuk menaati segala hasilhasil bahtsul masail Diniyyah Maudhu'iyyah ini;

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan;

Ditetapkan di

: Asrama Haji Sudiang Makssar

Pada tanggal

: 11 Rabi'ul Akhir 1431 H/27 Maret 2010 M.

MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL ULAMA PIMPINAN SIDANG PLENO VII

ttd

ttd

Drs. KH. Hafizh Utsman Ketua Drs. H. Taufik R. Abdullah Sekretaris

26. Format Penetapan Bahtsul Masail

A. Deskripsi Masalah

Itsbat al-ahkam dalam NU selama ini tidak dimaksudkan sebagai aktifitas menetapkan hukum yang secara langsung bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits, karena yang bisa melakukan hal ini adalah ulama yang masuk kategori mujtahid. Itsbat al-ahkam dalam konteks ini dimaksudkan sebagai penetapan hukum dengan cara mentathbiqkan (mencocokkan/menerapkan) secara tepat dan dinamis dari qaul dan 'ibarah terutama dalam kutub mu'tamadah di lingkungan madzhab Imam Syafi'i.

Dalam Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992, Ulama NU merumuskan perkembangan penting dari sistem itsbat al-ahkam. Ketika itu mulai diintrodusir ijtihad manhaji meskipun belum sepenuhnya mampu diaplikasikan dalam bahtsul masail. Dalam Munas tersebut dirumuskan prosedur dan langkah-langkah penetapan hukum.

Dalam Muktamar NU ke-31 di Donohudan Solo ada perkembangan baru, yaitu sejumlah ayat al-Quran dan al-Hadits dicantumkan dalam setiap jawaban persoalan hasil bahtsul masail. Tradisi demikian, nyaris tidak pernah dilakukan dalam bahtsul masail NU sebelumnya. Di samping itu, dalam Munas Alim Ulama di Surabaya tahun 2006, Ulama NU membuat pengelompokan kutub mu'tamadah di semua madzhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali).

B. Pertanyaan

- 1. Apakah perlu mencantumkan ayat al-Quran, al-Hadits, dan dalil-dalil syara' lainnya dalam jawaban bahtsul masail NU?
- 2. Jika memang diperlukan mencantumkan ayat al-Quran, al-Hadits dan dalil-dalil syara' lainnya, bagaimana formatnya? Apakah menggunakan urutan sesuai dengan tingkat kekuataannya, yaitu al-Quran, al-Hadits, dan dalil-dalil syara' lainnya kemudian aqwal al-ulama, ataukah aqwal al-ulama baru kemudian ayat al-Quran, al-Hadits, dan dalil-dalil syara' lainnya?
- 3. Sejauh mana muqaranah al-madzahib diperlukan dalam bahtsul masail NU dengan menggunakan kutub mu'tamadah yang telah dirumuskan dalam Munas Alim Ulama NU di Surabaya?

C. Jawaban

 Pencantuman ayat al-Quran, al-Hadits, dan dalil-dalil syara' lainnya diperlukan dalam setiap jawaban, karena pada hakikatnya setiap hukum pasti berdasarkan al-Qur'an, al-Hadits dan dalil-dalil syara' lainnya, dengan ketentuan bahwa ayat al-Qur'an, al-Hadits dan dalil-dalil syara' lainnya tersebut merupakan bagian dari pendapat Ulama yang terdapat dalam kutub mu'tamadah. Hal ini karena Ulama NU menyadari, bahwa yang mampu berijtihad langsung dari al-Qur'an, al-Hadits dan dalil-dalil syara' lainnya adalah para mujtahid, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab, di antaranya Tarsyih al-Mustafidin.

- 2. Aqwal al-ulama didahulukan, baru kemudian dilengkapi dengan ayat al-Qur'an beserta tafsirnya, al-Hadits beserta syarhnya, dan dalil-dalil syara' lainnya. Karena al-Qur'an, al-Hadits dan dalil-dalil syara' lainnya dalam pandangan Ulama NU tidak dijadikan sebagai dalil yang mandiri, tetapi merupakan bagian dari ijtihad ulama.
- 3. Muqaranah al-madzahib dalam madzhab empat diperlukan untuk memperoleh pendapat yang ansab (lebih sesuai) dengan tetap berpegang pada prinsip عَدَمُ تَتَبُعِ الرُّخَصِ (tidak ada maksud mencari kemudahan) sejalan dengan AD NU tentang prinsip bermadzhab.

27. Dhawabith (Ketentuan) Masjid

A. Deskripsi Masalah

Secara etimologi, masjid berarti tempat sujud. Selain masjid, ada istilah lain; mushalla, langgar, surau, dan sebagainya, yang digunakan untuk arti yang sama, yakni tempat untuk shalat yang identik dengan sujud. Terminologi masjid inipun di daerah tertentu memiliki banyak sebutan, misalnya masjid biasa (la tuqam fih al-jumu'ah), masjid jami' (tuqamu fih al-jumu'ah), masjid raya, masjid agung, dan sebagainya.

Meningkatnya ghirah umat Islam untuk menjalankan ibadah, melahirkan sebuah tempat yang asalnya aula, lapangan, atau tempat parkir menjadi tempat untuk shalat -bahkan juga untuk shalat jum'at—. Belum lagi banyaknya perkantoran, hotel, mall, stasiun, terminal yang mendirikan tempat ibadah yang difungsikan sebagai masjid, misalnya untuk jum'atan, i'tikaf, dan sebagainya.

Bahkan sekarang ini, dengan jumlah jama'ah yang makin banyak, jarak antara satu masjid dengan masjid lainnya terlalu dekat dan tidak memenuhi persyaratan jarak minimal antara dua masjid sebagaimana disyaratkan oleh sebagian imam madzhab.

B. Pertanyaan

1. Apa kriteria suatu tempat dapat disebut masjid, sehingga tempat

- itu memiliki kekhususan, misalnya untuk melakukan *i'tikaf*, dianjurkannya *tahiyah al-masjid*, dan larangan orang berhadats besar berdiam di dalamnya?
- 2. Apakah shalat *tahiyyah al-masjid* berlaku bagi musholla, langgar, dan surau?
- 3. Bagaimana pandangan Islam terhadap persyaratan pendirian masjid terkait dengan Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No. 9 dan 8, tahun 2006, di mana persyaratan minimal untuk mendirikan tempat ibadah harus ada 90 orang jama'ah?

C. Jawaban

- 1. Masjid adalah sebuah tanah dan atau bangunan yang diwakafkan sebagai masjid, bukan untuk yang lain seperti madrasah atau *ribath* (pesantren).
- 2. Musolla, surau atau langgar yang digunakan untuk shalat lima waktu tidak sertamerta disebut sebagai masjid sepanjang tidak diwakafkan untuk masjid. Maka konsekwensinya tidak dianjurkan shalat tahiyyah al-masjid, i'tikaf, dan tidak haram orang yang junub atau haid berdiam di dalamnya.
- 3. Peraturan tersebut dapat dibenarkan dan wajib ditaati apabila mengandung kemaslahatan, karena pemerintah memiliki kewenangan mengatur pembangunan masjid sebagaimana pemerintah juga memiliki kewenangan yang sama dalam mengatur pembangunan tempat ibadah agama lain.

D. Dasar Penetapan

Aqwal al-Ulama

1. Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib1

(فَرْعُ) لَوْ (قَالَ جَعَلْتُ هَذَا الْمَكَانَ مَسْجِدًا صَارَ) بِهِ (مَسْجِدًا وَلَوْ لَمْ يَقُلْ للهِ) وَلَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِإِشْعَارِهِ بِالْمَقْصُودِ وَاشْتِهَارِهِ فِيهِ (وَوَقَفْتُهُ لِلصَّلَاةِ كِنَايَةً) فِي وَقْفِهِ مَسْجِدًا فَلَمَّا كُونُهُ وَقْفًا بِذَلِكَ فَصَرِيحٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ (لَا) إِنْ بَنَى بِنَاءً وَلَوْ عَلَى هَيْئَةِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ (أَذِنْتُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ) فَلَا يَصِيرُ بِذَلِكَ مَسْجِدًا وَإِنْ صَلَّى فِيهِ وَنَوى جَعْلَهُ مَسْجِدًا قَالَ (أَذِنْتُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ) فَلَا يَصِيرُ بِذَلِكَ مَسْجِدًا وَإِنْ صَلَّى فِيهِ وَنَوى جَعْلَهُ مَسْجِدًا قَالَ فِي الْكِفَايَةِ تَبَعًا لِلْمَاوَرُدِيِّ إِلَّا أَنْ

¹ Zakaria al-Anshari, Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib, (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, t.th), Jilid II, h. 462-463.

يَكُونَ الْبِنَاءُ بِمَوَاتٍ فَيَصِيرُ مَسْجِدًا بِالْبِنَاءِ وَالنَّيَّةِ لِأَنَّ الْفِعْلَ مَعَ النَّيَّةِ يُغْنِي عَنْ الْقَوْلِ
أَيْ فِيمَا بَنَى فِي مَوَاتٍ قَالَ السُّبْكِيُّ الْمَوَاتُ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ مَنْ أَحْيَاهُ مَسْجِدًا وَإِنَّمَا
احْتِيجَ لِلَّفْظِ لِإِخْرَاجِ مَا كَانَ فِي مِلْكِهِ عَنْهُ وَصَارَ لِلْبِنَاءِ حُصُمُ الْمَسْجِدِ تَبَعًا قَالَ
الْإِسْنَوِيُّ وَقِيَاسُ ذَلِكَ إِجْرَاوُهُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَيْضًا مِنَ الْمَدَارِسِ وَالرُّبُطِ وَغَيْرِهِمَا
وَكُلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ يَدُلُّ لَهُ انْتَهَى وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَذِنْتُ فِي الاعْتِكَافِ فِيهِ
صَارَ بِذَلِكَ مَسْجِدًا لِأَنَّ الاعْتِكَافَ لَا يَصِحُ إلَّا فِي مَسْجِدٍ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ

(Sub Masalah) Andaikan (seseorang berkata: "Saya jadikan tempat ini sebagai masjid, maka tempat tersebut menjadi) dengan ucapannya itu (masjid, walaupun ia tidak berkata: "Karena Allah.") dan ia tidak mengucapkan shighat-shighat wakaf yang telah lewat. Sebab, ungkapannya itu telah menunjukkan tujuan -pewakafan-nya dan telah terkenal dalam pewakafan. ("Dan saya wakafkan tempat ini untuk shalat." adalah shighat kinayah) dalam pewakafan lahan itu menjadi masjid, maka -untuk keabsahannya sebagai wakaf masjid- masih membutuhkan niat menjadikan lahan tersebut sebagai masjid. Sementara untuk status pewakafannya sebagai tempat shalat, ucapannya tadi merupakan shighat sharih yang sudah tidak membutuhkan niat lagi. (Tidak) menjadi masjid pula bila ia mendirikan sebuah bangunan, meskipun berbentuk bangunan masjid. Andaikan ia berkata: ("Saya izinkan shalat di tempat itu.") maka dengan perkataan tersebut tempat yang dimaksudnya itu tidak menjadi masjid, walupun dia shalat di tempat itu dan meniatinya menjadikan masjid. Dalam kitab al-Kifayah dengan mengikuti al-Mawardi, Ibn Rif'ah berkata: "Kecuali bangunan itu ia dirikan di lahan bebas (mawat), maka lahan tersebut akan menjadi masjid dengan sebab pembangunan dan niat menjadikannya sebagai masjid, tanpa memerlukan ucapan shighat wakaf dalam bangunan di lahan bebas tersebut." Al-Subki berkata: "Lahan bebas itu tidak bisa dimiliki oleh orang yang membukanya sebagai masjid. Sementara ucapan shighat wakaf hanya dibutuhkan untuk mengeluarkan lahan dari kepemilikannya, dan lahan bebas itu akan dihukumi menjadi masjid karena mengikuti pembangunannya. Al-Isnawi berpendapat: "Qiyasnya, ketentuan tersebut juga berlaku dalam pembangunan selain masjid, yaitu madrasah, pesantren dan semisalnya. Pendapat al-Rafi'i dalam bab Ihya' al-Mawat juga menunjukkan demikian." Demikian pendapat al-Isnawi. Dan yang jelas bila seseorang berkata: "Saya izinkan i'tikaf di tempat itu." maka tempat yang dimaksud menjadi masjid. Sebab, i'tikaf hanya sah dilakukan di masjid.

2. Hawasyai al-Syirwani wa al-'Abbadi 'ala al-Tuhfah²

(قَوْلُهُ مِسْطَبَةً) أَيْ أَوْ سَمَّرَ فِيهِ دَكَّةً مِنْ خَشَبٍ أَوْ نَحْوِ سَجَّادَةٍ م رسم عَلَى حج وَمِثْلُهُ مَا لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مِلْكِهِ ع ش وَفِي الْكُرْدِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامٍ طَوِيلٍ عَنْ فَتَاوَى الشَّارِحِ وَعَنِ النِّهَايَةِ فِي الْوَقْفِ فِي عَدَم جَوَازِ وَقْفِ الْمَنْقُولِ مَسْجِدًا مَا نَصُّهُ وَالْقِيَاسُ عَلَى تَسْمِيرِ الْحَشَبِ أَنَّهُ لَوْ سَمَّرَ السَّجَّادَةَ صَحَّ وَقُفُهَا مَسْجِدًا وَهُو ظَاهِرُ ثُمَّ رَأَيْتُ الْعِنَانِيَّ فِي تَسْمِيرِ الْحَشَبِ أَنَّهُ لَوْ سَمَّرَ السَّجَّادَةَ صَحَّ وَقُفُهَا مَسْجِدًا وَهُو ظَاهِرُ ثُمَّ رَأَيْتُ الْعِنَانِيَّ فِي حَاشِيتِهِ عَلَى شَرْحِ التَّحْرِيرِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ قَالَ وَإِذَا سَمَّرَ حَصِيرًا أَوْ فَرُوةً فِي أَرْضٍ أَوْ مَسْطَبَةٍ وَوَقَفَهَا مَسْجِدًا صَحَّ ذَلِكَ وَجَرَى عَلَيْهِمَا أَحْكَامُ الْمَسَاجِدِ وَيَصِحُ الاعْتِكَافُ فِيهِمَا وَغَيْرُ ذَلِكَ اه هُ

(Ungkapan Ibn Hajar al-Haitami: "Membangun papan tempat duduk -di tempat yang disewa seseorang-.") maksudnya atau di tempat itu ia memaku suatu papan yang ditinggikan dari kayu atau sajadah. Demikian ungkapan al-Ramli yang dikutip Ibn Qasim al-'Abbadi dalam Hasyiyah 'ala Ibn Hajar. Dan begitu pula bila ia memakunya ditempat milikinya. Begitu pendapat Ali Syibramalisi. Sementara dalam kitab al-Kurdi setelah menyebutkan fatwa-fatwa dari al-Syarih -Ibn Hajar- dan dari kitab al-Nihayah, tentang tidak diperbolehkannya mewakafkan benda yang bisa dipindah (al-mangul) menjadi masjid terdapat penjelasan dengan redaksi: "Qiyas atas memaku papan kayu -dan mewakafkannya menjadi masjid- adalah bila seseorang memaku sajadah, maka sah pula- mewakafkannya -menjadi masjid-. Dan hal tersebut telah cukup jelas. Kemudian aku melihat al-'Inani dalam Hasyiyyah 'ala Syarh al-Tahrir li Syaikh al-Islam berpendapat: "Andaikan seseorang memaku tikar, atau kulit hewan di suatu tanah, atau di suatu papan dan mewakafkannya menjadi masjid, maka hukumnya sah dan hukumhukum masjid berlaku pula untuk keduanya, sah i'tikaf di dalamnya, haram bagi orang junub diam di dalamnya dan semisalnya.

3. Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj³

Al-Syarwani Hasyiyah al-Syarwani 'ala Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz III, h. 464-465.

وَمَا رَجَّحَهُ الْإِسْنَوِيُّ مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ (لَوْ بَنَى فِيهِ مَسْطَبَةً وَوَقَفَهَا مَسْجِدًا صَحَّ) كَمَا يَصِحُّ عَلَى سَطْحِهِ وَجُدْرَانِهِ ظَاهِرٌ وَإِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ بِالصِّحَّةِ وَإِنْ لَمْ يَبْنِهَا بِهِ إِذِ الْمَسْجِدُ هُوَ الْبِنَاءُ الَّذِي فِي تِلْكَ الْأَرْضِ لَا الْأَرْضُ وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ (صِحَّةُ وَقْفِ الْعُلُوِّ دُونَ السَّفْلِ) مَسْجِدًا كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْوَقْفِ السَّفْلِ) مَسْجِدًا كَمَا سَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْوَقْفِ

Pendapat yang unggulkan oleh al-Isnawi, yaitu pendapat sebagian ulama berupa: "Apabila seseorang membangun papan di lahan yang disewanya, dan mewakafkannya sebagai masjid, maka hukum wakafnya sah. Seperti sahnya wakaf bangunan di loteng maupun dindingnya." itu sudah cukup jelas, meskipun al-Zarkasyi menyatakan keabsahannya meskipun tidak membangunnya sebagai masjid. Sebab, hakikat masjid adalah bangunan yang ada di lahan tersebut, bukan lahannya. Dari sini bisa diketahui (keabsahan mewakafkan lantai atas tanpa mengikutkan lantai bawah) sebagai masjid, begitu pula sebaliknya dan ketidakabsahan mewakafkan al-manqul -benda yang bisa dipindahkan- seperti penjelasan dalam bab Wakaf nanti.

4. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari4

(أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدُّ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا)

قَوْلُهُ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا أَيْ مَوْضِعَ سُجُودٍ لَا يُخْتَصُّ السُّجُودُ مِنْهَا بِمَوْضِعٍ دُونَ غَيْرِهَ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَجَازًا عَنِ الْمَكَانِ الْمُبْنَى لِلصَّلَاةِ وَهُوَ مِنْ مَجَازِ التَّشْبِيهِ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَتِ الصَّلَاةُ فِي جَمِيعِهَا كَانَتْ كَالْمَسْجِدِ فِي ذلِكَ

Hadits ("Aku diberi lima perkara yang belum pernah diberikan kepada salah seorang nabi pun sebelumku, yaitu aku di beri pertolongan dengan kegentaran -musuh- dalam jarak sebulan, bumi dijadikan masjid dan suci mensucikan bagiku.")

Sabda Nabi Saw.: "Bumi dijadikan masjid bagiku." maksudnya adalah tempat sujud, yang mana sujud tanpa dikhususkan di suatu tempat dan bukan yang lainnya. Kata masjid dalam hadits tersebut

³ Muhammad bin Syihabuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz III, h. 216.

⁴ Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989), Juz I, h. 576.

memungkinkan dipahami sebagai majas -kiasan- dari tempat yang dibangun untuk shalat, dan termasuk majas tasybih. Sebab, ketika suatu tempat boleh digunakan untuk shalat, maka tempat itu seperti masjid dalam diperbolehkannya shalat -di semua tempatnya-.

5. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari⁵

(قَوْلُهُ بَابُ الرَّجْمِ بِالْمُصَلَّى) أَيْ عِنْدَهُ وَالْمُرَادُ الْمَكَانُ الَّذِي كَانَ يُصَلَّى عِنْدَهُ الْعِيدُ وَالْجُتَائِزُ وَهُوَ مِنْ نَاحِيَةِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ وَقَدْ وَقَعْ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَأُمِرْنَا أَنْ نُرَجِّمَهُ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ وَفَهِمَ بَعْضُهُمْ كَعِيَاضٍ مِنْ قَوْلِهِ بِالْمُصَلَّى أَنَّ الرَّجْمَ وَقَعَ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ وَفَهِمَ بَعْضُهُمْ كَعِيَاضٍ مِنْ قَوْلِهِ بِالْمُصَلَّى أَنَّ الرَّجْمَ وَقَعَ وَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ وَفَهِمَ بَعْضُهُمْ كَعِيَاضٍ مِنْ قَوْلِهِ بِالْمُصَلَّى أَنَّ الرَّجْمَ وَقَعَ وَالْمُسَلِّى لَا يَثْبُتُ لَهُ حُصْمُ الْمُسْجِدِ إِذْ لَوْ ثَبَتَ لَهُ ذَلِكَ لَا يَثْبُتُ لَهُ حُصْمُ الْمَسْجِدِ إِذْ لَوْ ثَبَتَ لَهُ السَّارِيُ أَنَّ الْمُصَلِّى لَا يَثْبُتُ لَهُ حُصْمُ الْمَسْجِدِ وَلَوْلَمْ يُوقَفْ

(Ungkapan al-Bukhari: "Bab Menghukum Rajam di Mushalla), maksudnya melaksanakan hukuman rajam di tempat shalat. Yaitu tempat pelaksanaan shalad id dan shalat jenazah, yaitu sebagian area Baqi' al-Gharqad. Dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan: "Kami diperintahkan untuk merajam seseorang, kemudian kami bawa dia ke baqi' al-gharqad." Sebagian ulama, seperti 'Iyadh, memahami ungkapan al-Bukhari "di Mushalla" dengan maksud melaksanakan rajam di dalam mushalla, dan ia berkata: "Dari teks tersebut bisa dipahami bahwa bagi mushalla tidak diberlakukan hukum masjid. Sebab kalau diberlakuan, niscaya rajam tidak boleh dilaksanakan di sana karena tidak bisa terhindar dari terkotori darah. Hal ini berbeda dengan riwayat al-Darimi yang menyatakan bahwa bagi mushalla diberlakukan hukum masjid, meskipun mushalla tersebut tidak diwakafkan.

6. Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain6

وَمِثْلُ الاعْتِكَافِ صَلَاهُ التَّحِيَّةِ فَلَوْ قَالَ أَذِنْتُ فِي صَلَاةِ التَّحِيَّةِ فِي هذَا الْمَحَلِّ صَارَ مَسْجِدًا لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ وَلَوْ بَنَى الْبُقْعَةَ عَلَى هَيْئَةِ الْمَسْجِدِ لَا يَكُونُ

⁵ Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989), Juz XII, h. 155.

⁶ Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), , h. 269.

الْبِنَاءُ كِنَايَةً وَإِنْ أَذِنَ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ إِلَا فِي مَوَاتٍ فَيَصِيرُ مَسْجِدًا بِمُجَرَّدِ الْبِنَاءِ مَعَ الْنِيَّةِ لِإِخْرَاجِ مَا كَانَ فِي مِلْكِهِ عَنْهُ وَهذَا لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ مَنْ أَذُنَ اللَّفْظَ إِنَّمَا احْتِيجَ إِلَيْهِ لِإِخْرَاجِ مَا كَانَ فِي مِلْكِهِ عَنْهُ وَهذَا لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِ مَنْ أَخْيَاهُ مَسْجِدًا فَلَمْ يَخْتَجُ لِلَّفْظِ وَصَارَ لِلْبِنَاءِ حُكْمُ الْمَسْجِدِ تَبَعًا وَيَجْرِي ذلِكَ فِي بِنَاءِ مَدْرَسَةٍ أَوْ رُبَاطٍ وَحَفْرِ بِثْرٍ وَإِحْيَاءِ مَقْبَرَةٍ فِي الْمَوَاتِ بِقَصْدِ السَّبِيلِ

Dan seperti halnya i'tikaf, shalat tahiyyah al-masjid. Maka bila seseorang berkata: "Saya izinkan shalat tahiyyah al-masjid, di tempat ini." maka tempat tersebut menjadi masjid. Sebab shalat tahiyyah al-masjid hanya sah dilaksanakan di masjid. Bila seseorang mendirikan bangunan model masjid, maka pembangunan yang dilakukannya tidak menjadi kinayah dalam pewakafan masjid, meskipun ia mengizinkannya untuk digunakan shalat, kecuali dalam lahan bebas (mawat). Maka dengan pembangunan yang dilakukan dan disertai niat menjadikan masjid akan membuat tempat tersebut menjadi masjid. Sebab pengucapan shighat waqaf hanya dibutuhkan untuk mengeluarkan sebuah lahan dari kepemilikannya. Sementara masjid di lahan bebas ini tidak termasuk kepemilikan orang yang membangunnya sebagai masjid tersebut. Maka ia tidak perlu mengucapkan shighat waqaf dan lahannya akan dihukumi sebagai masjid karena mengikutkan pada bangunannya. Hukum seperti itu juga berlaku dalam bangunan madrasah, pesantren, penggalian sumur, dan pembuatan kuburan di lahan bebas dengan tujuan menyediakannya bagi kepentikangan umum.

7. Syarh Zad al-Mustagni' 7

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللهُ (وَهُوَ لُرُومُ مَسْجِدٍ لِطَاعَةِ اللهِ تَعَالَى) الضَّمِيرُ وَهُوَ عَائِدٌ لِلاعْتِكَافِ كَأَنَّهُ يَقُولُ رَحِمَهُ اللهُ حَقِيقَةُ الاعْتِكَافُ عِنْدَنَا مَعْشَرَ الْفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ لُزُومُ الْمُسْجِدِ هذَا الْمَسْجِدُ مَفْعِلُ مِنَ السُّجُودِ وَالْمُرَادُ بِذلِكَ الْمَسْجِدُ الْمَعْهُودُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ كُلَّ مَوْضِع يُسْجَدُ عَلَيْهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ الْمُعْهُودُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ كُلَّ مَوْضِع يُسْجَدُ عَلَيْهِ لِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا فَالْمُرَادُ بِالْمَسْجِدِ هُنَا الْمَعْهُودُ الذِّهْنِي وَهُوَ الْمَسْجِدُ الْمَعْرُوفُ الَّذِي إِذَا مُطْلِقَ فِي الشَّرْعِ انْصَرَفَ إِلَيْهِ الْحُصْمُ فَلَا يَشْمُلُ الْمُصَلَّى وَالْمُصَلَّى هُو النَّذِي تُفْعَلُ فِيهِ أَيْ لَيْسَ مَعَلًا لِلاعْتِكَافِ وَدَلِيلُ بَعْضُ الصَّلَواتِ دُونَ بَعْضِهَا فَالمُصَلَّى لَا يُعْتَكُفُ فِيهِ أَيْ لَيْسَ مَعَلًا لِلاعْتِكَافِ وَدَلِيلُ

⁷ Al-Syanqithi, Sayrh Zad al-Mustaqni', Juz V, h. 91.

ذلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَأَنْتُمْ عَاكِمُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [الْبَقَرَةُ ١٨٧] فَدَلَ عَلَى أَنَّ الاغتِكَافَ يُخْتَصُّ بِالْمَسَاجِدِ وَبِنَاءٌ عَلَيْهِ قَالُوا لَوْ كَانَ الْمُعْتَكُفُ مُصَلَّى فَإِنَّهُ لَا يُعْتَكُفُ فِيهِ وَهُنَاكَ مُسْجِدٌ يُجَمَّعُ فِيهِ وَهُنَاكَ مَسْجِدٌ يُجَمَّعُ فِيهِ وَهُنَاكَ مَسْجِدٌ يُجَمَّعُ فِيهِ وَهُنَاكَ مَسْجِدٌ لَا يُجَمَّعُ فِيهِ وَالْمُسْجِدُ الَّذِي لَمَ يَعْتَكُفُ فِيهِ وَإِنَّمَا الْمَسْجِدُ الَّذِي لَا يُجَمَّعُ فِيهِ قَالْمَسْجِدُ الَّذِي لَا يُجَمَّعُ فِيهِ قَالْمَسْجِدُ الَّذِي لَا يُحَمَّعُ فِيهِ قَالْمَسْجِدُ الَّذِي لَا يُحَمَّعُ فِيهِ وَالْمُرادُ بِقَوْلِنَا يُجَمِّعُ فِيهِ وَإِنَّمَا الْمَسْجِدُ الَّذِي لَا يُجَمَّعُ فِيهِ وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا نَذَرَ اعْتِكَفَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرَ فَحِينَئِذِ يَنْصَرِفُ إِلَى مَسْجِدِ يُجَمَّعُ فِيهِ وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا نَذَرَ اعْتِكَفَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرَ أَوْ أَوْجَبَهَا عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَّ يُعْتَكُفُ فِيهِ وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا نَذَرَ اعْتِكَافَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرَ الْمُنْكُونُ مُصَلِّولًا إِلَى مَسْجِدِ يُحَمَّعُ فِيهِ وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَا بُدُّ وَأَنْ يَصُونَ اعْتِكَافُهُ لِلْعَشْرِ كَامِلَةً فِي مَسْجِدِ يُحَمَّعُ فِيهِ لِأَنَهُ لَو اعْتَكَفَ فِي مَسْجِدٍ لَا تُقَامُ فِيهِ الْجُعْمَةُ فَسَيكُونُ مُضِولًا إِلَى الْخُرُوجِ إِذَا كَانَ قَدْ نَذَرَ اعْتِكَافُ الْعَشْرِ كَامِلَةً فَيْ مَسْجِدِ لَكَعَلَّمُ وَلِهُ الْمُعْولُ اللَّهُ وَلَا كَانَ قَدْ نَذَرَ اعْتِكَافَ الْعَشْرِ كَامِلَةً أَمَّا لَكُونُ فِيهِ الْجُعْمَةُ لَكِنَا عَلَيْهُ وَلِمُ الْمُؤْمُودِ الْمَالَاقُ عَلَاكُ الْمُعْمُ لَكُونُ فِيهِ الْجُعْمُ وَيهِ وَالْمَسْجِدِ الَّذِي لَا تَصُونُ فِيهِ الْجُعْمُ لَكِي فِيهُ الْمُنَاعِلُ الْمَامِلُونُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَلَمْ يَقُولُونُ فِيهِ الْجُعْمُ لَي الْمُولُولُ أَنْ اعْتِكُافَ الْعَشْرِ كَامِلُهُ فَلِهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعْمُ الْمُؤْمُ وَلَالَمُ الْمُؤْمُ وَلَالَالُولُولُولُ اللْمُعْمُ وَلُولُولُ اللْمُعْمُ الْمُؤْمُ وَلَالْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

Musa bin Ahmad al-Hajawi -rahimahullah- berkata: ("I'tikaf adalah menetap di masjid karena taat kepada Allah Ta'ala"). Dhamir wa huwa) kembali kepada kata i'tikaf, seolah ia berkata: "Hakikat i'tikaf menurut kita para ahli fiqh dan ulama adalah menetap di masjid. Maksud masjid ini adalah kata masjid, mengikuti wazan maf'il dari mashdar al-sujud, dan makna yang dimaksud adalah masjid pada umumnya. Bukan setiap tempat sujud. Sebab Nabi Saw. telah bersabda: "Bumi dijadikan masjid dan suci mensucikan bagiku." Maka maksudnya adalah masjid yang telah diketahui secara umum, yaitu masjid yang telah dikenal, yang ketika dimutlakkan dalam syari'at maka hukumhukum masjid diberikan pada masjid tersebut. Oleh karenanya tidak mencakup mushalla, yaitu tempat yang digunakan untuk mendirikan sebagian macam shalat dan bukan sebagian yang lainnya. Maka musolla tidak bisa digunakan i'tikaf, maksudnya tidak sah digunakan sebagai tempat i'tikaf. Dalilnya adalah firman Allah: "Dan kalian

beri'tikaf di masjid-masjid." [QS. al-Baqarah: 187]. Maka ayat tersebut menunjukkan bahwa i'tikaf itu harus dilakukan di masjid-masjid. Berdasarkan hal tersebut para ulama berpendapat: "Andaikan yang ditempati i'tikaf itu adalah mushalla, maka tidak sah i'tikaf di sana, dan yang sah dii'tikafi hanyalah masjid." Kemudian masjid itu ada dua macam, yaitu masjid yujamma' fih dan masjid la yujamma' fih. Maksud ungkapan kami yujamma' fih adalah yang digunakan shalat jum'at. Maka masjid yang digunakan untuk shalat jum'at secara ijma' sah digunakan i'tikaf. Sedangkan masjid yang tidak digunakan shalat jum'at, maka -terkait dengan i'tikaf- hukumnya terperinci. Bila seseorang telah mewajibkan bagi dirinya untuk beri'tikaf selama sepuluh hari terakhir -dari suatu bulan-, maka secara otomatis ia harus melaksanakannya di masjid yang digunakan shalat jum'at. Sebabnya adalah, ketika ia bernadzar atau mewajibkan bagi dirinya untuk i'tikaf selama sepuluh hari terakhir dari suatu bulan-, maka sepuluh hari tersebut pasti terselingi oleh hari jum'at. Oleh sebab itu, i'tikafnya harus dilakukan di tempat atau masjid yang digunakan shalat jum'at. Dari sini para ulama berpendapat: "Niscaya i'tikaf seseorang yang dilakukan selama sepuluh hari -sepuluh malamgenap harus dilakukan di masjid yang digunakan shalat jum'at. Sebab, bila ia lakukan di masjid yang tidak digunakan shalat jum'at, maka ia terpaksa harus keluar darinya untuk shalat jum'at. Maka i'tikafnya batal karena keluarnya tadi, bila ia telah bernadzar i'tikaf selama sepuluh hari -sepuluh malam- penuh. Sedangkan bila i'tikafnya adalah i'tikaf tha'ah atau gurbah -sunnah-, dan tidak dimaksudkan sepuluh hari -sepuluh malam- penuh, maka sah dilakukan di masjid yang digunakan shalat jum'at maupun masjid yang tidak digunakan shalat jum'at. Namun disyaratkan terdapat jamaah di sana, sebab ia terhukumi untuk menghadiri shalat berjamaah.

8. Al-Asybah wa al-Nazhair⁸

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ هذِهِ الْقَاعِدَةُ نَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّ وَقَالَ مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنْ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنْ الْيَتِيمِ قُلْت وَأَصْلُ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ ﷺ إِنِّي

⁸ Abdurrahman al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H), h. 121.

أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ إِنِ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنْ اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ

"Tasharuf pemimpin atas rakyatnya terbatas dengan kemaslahatan. Kaidah ini telah disebutkan secara jelas oleh al-Syafi'i, ia berkata: "Posisi pemimpin atas rakyatnya adalah seperti posisi wali terhadap anak yatim. Saya (al-Suyuthi) berkata: "Dasar kaidah ini hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam kitab Sunannya, ia berkata: "Abu al-Ahwash bercerita kepadaku, dari Abu Ishaq, dari al-Barra' bin 'Azib, ia berkata: "Umar ra. berkata: "Aku posisikan diriku atas harta Allah pada posisi wali anak yatim. Bila aku membutuhkan, maka aku gunakan hartanya, ketika aku berkecukupan maka aku kembalikan. Bila aku kaya maka aku hindari -mengunakan hartanya-."

9. Bughyah al-Musytarsyidin⁹

(مَسْأَلَهُ كَ) يَجِبُ امْتِثَالُ أَمْرِ الْإِمَامِ فِي كُلِّ مَا لَهُ فِيهِ وِلَا يَةٌ كَدَفْعِ زَكَاةِ الْمَالِ الظَّاهِرِ فَإِنْ لَمْ تَصُوْفِهِ فِي مَصَارِفِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورِ بِهِ مُبَاحًا أَوْ مَكْرُوهًا أَوْ حَرَامًا لَمْ يَجِبِ امْتِثَالُ أَمْرِهِ بِصَرْفِهِ فِي مَصَارِفِهِ وَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورِ بِهِ مُبَاحًا أَوْ مَكْرُوهًا أَوْ حَرَامًا لَمْ يَجِبِ امْتِثَالُ أَمْرِهِ فِيهِ كَمَا قَالَةُ مِ رَوَتَرَدَّدَ فِيهِ فِي التُّحْفَةِ ثُمَّ مَالَ إِلَى الْوُجُوبِ فِي كُلِّ مَا أَمَرَ بِهِ الْإِمَامُ وَلَوْ فِيهِ كَمَا قَالَةُ مِ رَوَتَرَدَّدَ فِيهِ فِي التَّحْفَةِ ثُمَّ مَالَ إِلَى الْوُجُوبِ فِي كُلِّ مَا أَمَرَ بِهِ الْإِمَامُ وَلَوْ فَيهِ مَصْلَحَةً عَامَّةً وَجَبَ ظَاهِرًا وَبَاطِئًا وَإِلَّا فَلِلَّا أَنْهُ يَكُمُ اللَّهُ وَقَالَ شَ قَ وَالْحُامِلُ أَنَّهُ يَجِبُ وَكَدَا الْمُبْرَةُ فِي الْمُنْدُوبِ وَالْمُبَاحِ بِعَقِيدَةِ الْمَأْمُورِ وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ ظَاهِرًا أَنَّهُ لَكُ كُلُو فَي الْمَالُولُ وَيَا فَلْنَا وَلَا شَى وَقَالَ شَ قَ وَالْحُامِلُ أَنَّهُ يَجِبُ لَا يَعْدَمُ الْمُرَامُ وَيَهِ مَصْلَحَةً كَتَرُامٍ أَوْ مَكْرُوهِ فَالْوَاجِبُ يَتَأَكُدُ لَا اللَّهُ الْمَامِ فِيمَا أَمَرَ بِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِئًا مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامِ أَوْ مَكْرُوهِ فَالْوَاجِبُ يَتَأَكَّدُ وَلَمُ الْمُنَافِقِ وَالْمُهُولِ وَقَعْ أَنَّ السَّلْطَانَ أَمَرَ الْقِلْبِ لِأَنْ يُعْلِقِ وَالْمُولُونِ وَالْمُهُولِ وَمَعْرَامُ الْمُرَادِ النَّاسِ لَهُ فِي الْأَسْوَاقِ وَالْفَهَاوِي فَخَالَفُوهُ وَشَرِبُوا فَهُمُ الْعُصَاةُ وَيَحْرُمُ شُرْبُهُ الْآلَ السَّلْطَانَ أَمَرَ الْإِمْ وَلَوْ أَمْرَ الْإِمْامُ لِشَيْءٍ وَلَوْ قَبْلَ التَّلْبُولِ فِيهِ لَمْ يَسْفُطِ الْوُجُوبُ الْمَالِمُ لِلْمُولِ وَلَوْ أَمْرَ الْإِمَامُ لِشَيْءٍ وَلَوْ قَمْ لَالْمَالِي التَلْلِكُ لِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ وَلَوْ قَبْلَ التَلْقَلِهُ لِلْمُ الْمُعَلِّ الْوَجُوبُ المَالِمُ الْمُؤْمِلُ الْوَلُولُ الْمُؤْمِلُ الْوَلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ أَلُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ

⁹ Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, (Indonesia: al-Haramain, t. th.), h. 91.

pemerintahan- dalam setiap hal yang menjadi kewenangannya. Seperti penyerahan zakat harta zhahir. Maka bila ia tidak memiliki kewenangan, yaitu dalam hak-hak yang bersifat wajib atau sunah, maka boleh memasrahkannya kepada Imam atau mengalokasikannya sendiri kepada yang berhak. Apabila perintahnya itu mubah, makruh atau haram, maka tidak wajib mematuhinya, seperti pendapat al-Ramli. Namun dalam kitab al-Tuhfah Ibn Hajar meragukannya, kemudian ia cenderung mewajibkannya dalam setiap perintah Imam meskipun haram, namun secara lahir saja. Dan perintah yang selain haram, apabila terdapat kemaslahatan umum, maka wajib dipatuhi secara lahir dan batin. Apabila tidak maka wajib dipatuhi secara lahir saja pula. Standar wajib dan mubah tersebut berdasarkan pada keyakinan pihak yang diperintah. Sedangkan ungkapan ulama: "Secara lahir." maksudnya adalah sesorang tidak berdosa bila tidak mematuhinya. Dan maksud ulama: "Secara batin." Adalah ia berdosa bila melanggarnya. Demikian pendapat Ibn Hajar. Saya sendiri berkata: "Al-Syarqawi berkata: "Kesimpulannya, sungguh wajib mematuhi perintah imam secara lahir dan batin, dari setiap perintah yang tidak haram dan makruh. Perkara yang wajib -dengan perintahnya- menjadi lebih kuat, yang sunah menjadi wajib. Begitu pula perkara mubah bila terdapat kemaslahatan, seperti menghisap rokok bila kita memakruhkannya karena mengandung kerendahan bagi orang-orang yang berkepribadian luhur. Dan penguasa sudah memerintahkan pegawainya untuk mengumumkan ketidakbolehan menghisap rokok di pasar-pasar dan kedai-kedai kopi. Kemudian banyak orang yang tidak mematuhi dan tetap menghisapnya. Maka mereka tergolong orang yang telah melakukan maksiat. Pada zaman sekarang hukum menghisap rokok adalah haram karena perintah penguasa. Apabila penguasa memerintahkan suatu perkara kemudian ia mencabutnya, meskipun belum pernah dilakukan -oleh siapa pun-, maka hukum mematuhi perintah tersebut tidak gugur. Demikian pendapat al-Syarqawi.

28. Dhawabith Ittihad al-Majlis (Ketentuan Satu Majlis)

A. Deskripsi Masalah

Secara umum, istilah *ittihad al-majlis* berarti kesatuan tempat, dan besar sekali pengaruhnya terhadap akad/transaksi jual beli dan nikah dalam sisi *ijab kabul*.

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, konsep ittihad almajlis dalam jual beli mengalami pergeseran. Banyak terjadi akad jual beli tidak dalam satu tempat, seperti jual beli ekspor/impor dengan menggunakan media telekomunikasi modern, misalnya, via teleconference, telepon, faksimile, e-mail, layanan pesan singkat (SMS). Begitu juga dalam akad munakahah, menggunakan media seperti yang telah disebutkan.

Pada prinsipnya, setiap akad harus jelas ijab kabulnya, dan media komunikasi modern ternyata mampu memberikan jaminan kejelasan antara *ijab* dan *qabul*.

B. Pertanyaan

- 1. Bagaimana pandangan Islam tentang akad bai' dan munakahat dengan menggunakan media telekomunikasi modern, misalnya, teleconference, telepon, surat elektronik (e-mail), layanan pesan singkat (SMS) maupun faksimile?
- 2. Apa batasan (dhawabith) ittihad al-majlis, apakah satu tempat, satu waktu, atau satu session?
- 3. Kapan *muta'aqidain* (kedua pihak yang bertransaksi)dikatakan berpisah, sehingga menggugurkan hak *khiyar al-majlis*?

C. Jawaban

- 1. Akad jual beli dengan cara tersebut di atas dianggap fi hukm ittihad al-majlis sehingga akad jual belinya sah karena masing-masing muta'aqidain saling mengetahui serta mengetahui obyeknya (al-mabi') sehingga tidak terjadi gharar (ketidakjelasan), dengan begitu akan terealisasi ijab dan qabul yang taradhin (suka sama suka). Sementara untuk akad munakahat, ketentuan di atas tidak berlaku.
- 2. Ittihad al-majlis bisa bermakna ittihad al-zaman (satu waktu), ittihad al-makan (satu lokasi), dan ittihad al-haiah (satu posisi). Perbedaan tempat yang disatukan dengan media komunikasi modern, membuat dua tempat yang berjauhan itu bisa dianggap menyatu (ta'addud al-makan fi manzilah ittihad al-makan).
- 3. Ittihad al-majlis dianggap berakhir apabila:
 - a. Alat komunikasi yang menghubungkan muta'aqidain berakhir.
 - b. Berdasarkan 'urf (adat kebiasaan) akad dianggap berakhir, misalnya pembicaraan beralih ke persoalan lain.

D. Dasar Penetapan

Aqwal al-Ulama

1. Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin¹⁰

Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1405 H), Juz VII, h. 381.

فَرْعُ الْمُرَادُ بِالْمَجْلِسِ الَّذِي يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِعْطَاءُ مَجْلِسُ التَّوَاجُبِ وَهُوَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الارْتِبَاطُ بَيْنَ الْإِنْجَابِ وَالْقَبُولِ وَ لَا نَظَرَ إِلَى مَكَانِ الْعَقْدِ

Sub Masalah. Yang dimaksud dengan majlis yang disyaratkan memberi di dalamnya adalah majlis tawajub (saling menetapkan), yaitu majlis yang menghasilkan keterkaitan antara ijab dan qabul. Dan tidak ada pertimbangan atas tempat akad.

2. Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin¹¹

الرُّكْنُ الْحَامِسُ الصِّيغَةُ وَلَا بُدَّ مِنْهَا وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَخَلَّلَ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ كَلَامُّ أَجْنَبِيُّ فَإِن تَخَلَّلَ كَلَامٌ كَثِيرٌ بَطَلَ الارْتِبَاطُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ تَخَلَّلَ كَلَامٌ يَسِيرٌ لَمْ يَضُرَّ عَلَى الصَّحِيجِ

Rukun jual beli yang kelima adalah *shighat*, dan harus ada. Dan antara *ijab* dan *qabul* disyaratkan tidak terpisah pembicaraan lain. Maka bila terpisah dengan pembicaraan panjang maka keterkaitan antara keduanya batal. Sementara menurut *qaul al-Shahih*, bila terpisah pembicaraan sedikit maka tidak membatalkan keterkaitan keduanya. 3. *Badai' al-Shanai' fi Tartib al-Syarai'*¹²

(فَصْلُ) فِي الشَّرْطِ الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى مَكَانِ الْعَقْدِ وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى مَكَانِ الْعَقْدِ فَوَاحِدُ وَهُوَ الْمَجْلِسِ وَاحِدٍ فَإِنْ اخْتَلَفَ الْمَجْلِسُ لَا يَنْعَقِدُ وَأَمَّا الْمَبْلِسُ وَاحِدٍ فَإِنْ اخْتَلَفَ الْمَجْلِسُ لَا يَنْعَقِدُ وَقَى الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقَبُولِ أَوِ اشْتَغَلَ بِعَمَلٍ آخَرَ مَتَى لَوْ أَوْجَبَ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ فَقَامَ الْآخَرُ عَنْ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقَبُولِ أَوِ اشْتَغَلَ بِعَمَلٍ آخَرَ يُوجِبُ اخْتِلَافَ الْمَجْلِسِ ثُمَّ قَبِلَ لَا يَنْعَقِدُ لِأَنَّ الْقِيَاسَ أَنْ لَا يَتَأَخَّرَ أَحَدُ الشَّطْرَيْنِ عَنْ الْمَجْلِسِ الْأَقْلُ وَجُودِهِ فَوُجِدَ الثَّانِي وَلَا مَنْ وَمَانِ وُجُودِهِ فَوُجِدَ الثَّانِي وَالْأَوَّلُ مُنْعَدِمُ فَلَا يَنْتَظِمُ الرُّحُنُ إِلَّا أَنَّ اعْتِبَارَ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى انْسِدَادِ بَابِ الْبَيْعِ فَتَوَقَّفَ وَالْأَوْلُ مُنْعَدِمُ فَلَا يَنْتَظِمُ الرُّحُنُ إِلَّا أَنَّ اعْتِبَارَ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى انْسِدَادِ بَابِ الْبَيْعِ فَتَوَقَّفَ وَالْتَالِقُ وَمُودِهِ فَوْجِدَ الثَّانِي وَمُودِهِ فَوْجِدَ الثَّانِي مَا لَاسَّعْرُونِ عَلَى الْمُعْدِمُ فَلَا يَنْتَظِمُ الرُّحُنُ إِلَّا أَنَّ اعْتِبَارَ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى انْسِدَادِ بَابِ الْبَيْعِ فَتَوَقَّفَ وَمَا لِلشَّطُرُيْنِ عَلَى الْمَعْرِمُ وَعِيلَ الْمَجْلِسِ فَإِذَا اخْتَلَفَ لَا يَتَوقَّفُ وَهَذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ وَحَقُ الضَّرُورَةِ يَصِيرُ مَقْضِيًّا عِنْدَا قَعَادِ الْمَجْلِسِ فَإِذَا اخْتَلَفَ لَا يَتَوقَفُ وَهَذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ الللهُ الْفُورُ مَعَ ذَلِكَ شَرْطُ لَا يَنْعَقِدُ الرُّحْذِي بِدُونِهِ

Pasal tentang syarat jual beli yang berkaitan dengan tempat akad.

Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1405 H), Juz VII, h. 395.

Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1405 H), Juz V, h. 137.

Adapun syarat jual beli yang berkaitan dengan tempat akad adalah satu hal, yaitu ittihad al-majlis, yakni ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Oleh sebab itu, bila dilakukan dalam majlis yang berbeda maka akad jual belinya tidak sah. Sehingga andaikan salah satu pihak yang bertransaksi menetapkan (ijab) untuk menjual, kemudian calon pembeli beranjak dari majlis sebelum menerima(mengqabul)nya, atau ia sibuk dengan aktifitas lain yang mengakibatkan berbedanya majlis, kemudian baru menerimanya, maka akad jual beli tidak sah. Sebab qiyasnya adalah, dalam satu majlis salah satu dari ijab dan qabul tidak boleh terlambat dari yang lainnya. Sebab ketika yang pertama ada, yang kedua belum ada pada saat yang pertama ada. Lalu ketika yang kedua ada, yang pertama sudah tidak ada. Maka rukun jual beli tidak terpenuhi. Hanya saja bila hal itu dipertimbangkan, maka berkonsekuensi mempersempit jual beli. Oleh sebab itu salah satu dari ijab dan qabul dalam hukum bergantung pada yang lainnya, dan majlis dijadikan titik temu yang mengumpulkan dua hal tersebut besertaan dengan keterpisahan keduanya karena darurat (kebutuhan mendesak). Kondisi darurat inilah yang menjadi penentu keabsahan jual beli ketika terdapat kesatuan majlis. Oleh sebab itu, ketika berbeda tempat maka tidak terdapat ketergantungan yang satu dengan yang lainnya. Demikian menurut pendapat kami madzhab Hanafiyah. Sementara menurut Imam Syafi'i Ra. kesegeraan antara ijab dan qabul, serta kesatuan majlis menjadi syarat jual beli yang mana ia tidak akan sah tanpanya.

4. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah13

رَابِعُهَا أَنْ تَكُونَ الصِّيغَةُ مَسْمُوعَةً لِلْعَاقِدَيْنِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَسْمَعَ كُلُّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ لَفظَ الْآخَرِ إِمَّا حَقِيقَةً كَمَا إَذَا كَانَا حَاضِرَيْنِ أَوْ حُكْمًا كَالْكِتَابِ مِنَ الْغَاثِبِ لِأَنَّ قِرَاءَتَهُ قَامَتْ مَقَامَ الْخِطَابِ هُنَا

Syarat keempat dari *ijab qabul* akad nikah adalah *shighat* terdengar oleh kedua pihak yang melakukan akad. Maka masing-masing pihak yang melakukan akad harus mendengar pernyataan pihak yang lainnya. Adakalanya mendengar secara nyata, seperti ketika keduanya hadir, atau mendengar secara hukum, seperti tulisan dari pihak yang tidak menghadiri masjlis akad. Sebab membaca tulisannya tersebut dalam hal ini bisa menggantikan dialog secara langsung.

¹³ Abdurrahman al-Jazairi, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Juz IV, h. 16.

إِتِّصَالُ الْقَبُولِ بِالْإِيجَابِ بَأَنْ يَكُونَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ إِنْ كَانَ الطَّرَفَانِ حَاضِرَيْنِ مَعًا أَوْ فِي مَجْلِسٍ عُلِمَ الطَّرَفُ الْغَاثِبُ بِالْإِيجَابِ وَيَتَحَقَّقُ الاتِّصَالُ بِأَنْ يَعْلَمَ كُلُّ مِنَ الطَّرَفَيْنِ مِمَا صَدَرَ عَنِ الْآخَرِ بِأَنْ يَسْمَعَ الْإِيجَابَ وَيُفْهِمَهُ وَبِأَلَّا يَصْدُرَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى مِنَ الطَّرَفَيْنِ بِمَا صَدَرَ عَنِ الْآخَرِ بِأَنْ يَسْمَعَ الْإِيجَابَ وَيُفْهِمَهُ وَبِأَلَّا يَصْدُرَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى إِعْرَاضِهِ عَنِ الْعَقْدِ شَوَاءٌ مِنَ الْمُوجِبِ أَوْمِنَ الْقَابِلِ وَمَجْلِسُ الْعَقْدِ هُوَ الْحَالُ الَّتِي يَكُونُ إِعْرَاضِهِ عَلِي الطَّعَاقَدِ وَبِعِبَارَةُ أُخْرَى اِتِّحَادُ الْكَلَامِ فِي مَوْضُوعِ التَّعَاقُدِ وَبِعِبَارَةً أُخْرَى إِنِّكَادُ الْكَلَامِ فِي مَوْضُوعِ التَّعَاقُدِ

Pertemuan qabul dan ijab, yaitu qabul dan ijab dilakukan dalam satu majlis, bila kedua pihak yang bertransaksi sama-sama hadir dalam majlis atau dalam suatu majlis yang diketahui bahwa pihak yang tidak hadir telah menyampaikan ijab. Pertemuan qabul dan ijab benar-benar terjadi apabila masing-masing pihak mengetahui keputusan pihak lain, yakni dengan mendengar ijab dan memahaminya dan dengan mengetahui pihak tersebut tidak berpaling dari akad, baik dari pihak yang menetapkan (al-mujib) maupun dari pihak yang menerima (al-qabil).

Dan maksud majlis akad adalah kondisi saat kedua belah pihak sedang melakukan transaksi. Dengan ungkapan lain: "Kesepakatan kata di tempat akad."

6. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh¹⁵

لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ اتِّحَادِ الْمَجْلِسِ الْمَطْلُوبِ فِي كُلِّ عَقْدٍ كَمَا بَيَّنًا كُوْنُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَكَانُ أَحَدُهُمَا غَيْرَ مَكَانِ الْآخِرِ إِذَا وُجِدَ بَيْنَهُمَا وَاسِطَهُ اتِّصَالٍ كَالتَّعَاقُدِ بِالْهَاتِفِ أَوِ اللَّاسِلْكِي أَوْ بِالْمُرَاسَلَةِ (الْكِتَابَةِ) وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مِنَ اتِّحَادُ الْمَتَعَاقُدِ بِالْهَاتِفِ أَوِ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ الْمُتَعَاقِدَانِ مُشْتَغِلَيْنِ فِيهِ بِالتَّعَاقُدِ الْمَجْلِسِ التِّعَادُ الزَّمَنِ أَوِ الْوَقْتِ الَّذِي يَكُونُ الْمُتَعَاقِدَانِ مُشْتَغِلَيْنِ غَلَى التَّفَاوُضِ فِي الْمَجْلِسُ الْعَقْدِ هُوَ الْحَالُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْمُتَعَاقِدَانِ مُقْبِلَيْنِ عَلَى التَّفَاوُضِ فِي الْمَعْدِ وَعَنْ هَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْمَجْلِسَ يَجْمَعُ الْمُتَقَرِقَاتِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمَعْدِ وَعَنْ هَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْمَجْلِسَ يَجْمَعُ الْمُتَقَرِقَاتِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْمَعْلِي الْمَعْدِ فِي الْمُكَالَمَةِ الْهَاتِفِيَّةِ أَوِ اللَّاسِلْكِيَّةِ هُو زَمَنُ الاتِّصَالِ مَا دَامَ الْكَلَامُ فِي الْمُعْدِ فَإِنَّ انْتَقَلَ الْمُتَعَلِقِيَّةِ أَو اللَّاسِلْكِيَّةِ هُو زَمَنُ الاتِّصَالِ مَا دَامَ الْكَلَامُ فِي الْمُعْدِ فَإِنَّ انْتَقَلَ الْمُتَعَدِقُونِ إِلَى حَدِيْثِ آخَرَ انْتَهَى الْمَجْلِسُ

Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Juz IV, h. 106.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Juz IV, h. 106.

Yang dikehendaki dengan satu majlis dalam setiap akad seperti yang telah kami jelaskan bukanlah keberadaan kedua pihak yang bertransaksi dalam satu tempat. Sebab terkadang tempat kedua pihak itu berbeda ketika ada perantara yang menghubungkan keduanya. Seperti transaksi via telpon, sistem radio atau via surat. Maksud satu majlis adalah satu zaman atau waktu yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Maka majlis akad adalah kondisi yang di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Dari hal ini para ahli fiqh berkesimpulan: "Sungguh majlis itu mengumpulkan beberapa hal yang terpisah." Berdasarkan keterangan ini, maka majlis akad dalam perbincangan via telpon atau sistem radio adalah waktu tersambungnya kedua belah pihak selama pembicaraan masih terkait akad. Oleh sebab itu, bila pembicaraan kedua belah sudah beralih ke hal lain, maka majlis akad berakhir.

29. Dhawabith (Ketentuan) al-Kufr

A. Deskripsi Masalah

Dewasa ini aksi pengkufuran terhadap kelompok atau golongan yang berbeda penafsiran terhadap ajaran agama semakin merebak. Padahal sebagaimana kita ketahui, bahwa menuduh *kufur* orang lain berarti konsekuensinya adalah menghalalkan harta benda dan darahnya.

Oleh karenanya, mengkufurkan pada sesama muslim hanya karena faham dan penafsiran terhadap ajaran Islam, apalagi ajaran yang multi interpretasi perlu dihindari.

Berkaitan dengan istilah *kufur* ini, terdapat juga istilah *bid'ah* yang dianggap sesat dan memiliki konsekuensi seperti *kufur*, berdasarkan hadits: "kull bid'ah dhalalah wa kull dhalalah fi al-nar." Hadits ini juga dipakai sebagai dasar untuk melegitimasi tindakan orang-orang yang mengkufurkan atau membid'ahkan siapa saja yang tidak sejalan dengan pemahamannya.

B. Pertanyaan

- 1. Bagaimana pengertian kufur dan klasifikasinya?
- 2. Apa saja ukuran seseorang dikatakan kafir?
- 3. Apa saja kriteria bid'ah, dan apakah bid'ah identik dengan kufur?

C. Jawaban

 Pengertian kufur. Secara etimologi, al-kufr berarti al-satr wa al-taghthiyah (tutup). Malam disebut juga dengan kufr (yang menutupi), karena dengan kegelapannya menutupi segala sesuatu. Sedangkan menurut terminologi, kufr berarti mengingkari apa yang sudah pasti dibawa Rasulullah Saw. (inkar ma 'ulim bi al-dharurah maji' al-rasul bih). Kemudian para ulama mengklasifikasikan kufr menjadi empat macam:

- a. Kufr inkar, yaitu seseorang mengingkari dan tidak mengakui Allah sama sekali, seperti kufrnya Fir'aun.
- b. *Kufr juhud*, yaitu seseorang mengakui Allah dalam hatinya hanya saja lisannya tidak pernah menyatakan pengakuannya itu, seperti *kufr*nya Iblis.
- c. Kufr 'inad, yaitu seseorang mengakui Allah dalam hatinya dan menyatakan pengakuannya tersebut dengan lisannya hanya saja tidak mau menjadikannya sebagai suatu keyakinan, seperti kufrnya Umayah bin Abi Shalt dan Abu Thalib.
- d. *Kufr nifaq*, yaitu seseorang mengakui dengan lisannya, hanya saja hatinya tidak mau mengakuinya.
- e. Kufr ni'mah.
- 2. Ukuran seseorang dikatakan kafir adalah ingkar terhadap rukun iman, rukun Islam dan sesuatu yang diketahui secara pasti dari Rasulullah (ma'ulim bi al-dharurah maji' al-rasul bih).
- 3. Secara bahasa bid'ah adalah suatu yang baru. Sedangkan secara istilah adalah memunculkan sesuatu yang baru sepeninggal Nabi Muhammad SAW. dalam masalah agama setelah sempurna. Para ulama mengklasifikasikan bid'ah menjadi dua; pertama, mahmudah (terpuji) atau hasanah (bagus), kedua, madzmumah (tercela) atau sayyiah (jelek). Bid'ah mahmudah atau hasanah adalah sesuatu yang baru dan sesuai al-Qur'an, al-Sunnah, atsar shahabat, atau ijma' sebagai sumber syari'at Islam. Sedangkan bid'ah madzmumah atau sayyi'ah adalah sesuatu yang baru dan tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Ditinjau dari sisi hukum, bid'ah ada lima macam;

- a. Wajib, seperti merumuskan dalil-dalil 'aqli dalam bidang teologi untuk menolak pemikiran atheisme (al-mulahadah) dan semacamnya;
- b. *Mandub/sunnah*, seperti menulis karya ilmiah, membangun gedunggedung sekolah, perguruan tinggi, pesantren, dan sebagainya.
- c. *Mubah*, seperti mengembangkan resep makanan, *mushafahah* (berjabat tangan) setelah shalat dan sebagainya.
- d. *Makruh*, seperti shalat memakai pakaian yang dapat mengganggu ke*khusyu*'an shalat dan sebagainya.

e. Haram, seperti mengembangkan dan menyebarkan pemikiran yang bertentangan dengan syari'at Islam, seperti pemikiran-pemikiran faham qadariyyah, murji'ah, dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan kekufuran, tidak semua bid'ah identik dengan kekufuran. Hanya bid'ah yang bertentangan dengan dalildalil qath'i saja yang menyebabkan kekufuran.

D. Dasar Penetapan

Agwal al-Ulama

1. Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil 16

وَأَصْلُ الْكُفْرِ فِي اللَّغَةِ السَّتْرُ وَالتَّغْطِيَّةُ وَمِنْهُ سُمِيَ اللَّيْلُ كَافِرًا لِأَنَّهُ يَسْتُرُ الْأَشْيَاءَ بِظُلْمَتِهِ قَالَ الشَّاعِرُ

فِي لَيْلَةٍ كَفَرَ النُّجُومَ غِمَامُهَا

أَيْ سَتَرَهَا وَالْكُفْرُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَضْرُبٍ كُفْرُ إِنْكَارٍ وَهُوَ أَنْ لَا يَعْرِفَ اللّهَ أَصْلًا كَكُفْرِ فِرْعَوْنَ وَهُوَ وَقَوْلُهُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي وَكُفْرُ جُحُودٍ وَهُوَ أَنْ يَعْرِفَ اللّهُ بِقَلْبِهِ وَلَا يُقِرَّ بِلِسَانِهِ كَكُفْرِ إِبْلِيسَ وَكُفْرُ عِنَادٍ وَهُوَ أَنْ يَعْرِفَ اللّهُ بِقَلْبِهِ وَيُقِرُّ بِلِسَانِهِ وَلَا يُدَيِّنُ بِهِ كَكُفْرِ أُمَيَّة بْنِ أَبِي الصَّلْتِ وَأَبِي طَالِبٍ حَيْثُ يَقُولُ فِي شِعْرِلَهُ

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ ﴿ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِيْنًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارَ مَسَبَّةٍ ﴿ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا

وَكُفْرُ نِفَاقٍ وَهُوَ أَنْ يُقِرَّ بِلِسَانِهِ وَلَا يَعْتَقِدَ صِحَّةَ ذلِكَ بِقَلْبِهِ فَجَمِيعُ هذِهِ الأَنْوَاعِ كُفُرُ نِفَاقٍ وَهُوَ أَنْ مَنْ جَحَدَ اللّهَ أَوْ أَنْكَرَ وَحْدَانِيَّتِهِ أَوْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِمَّا أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ أَوْ أَنْكَرَ نُبُوَّةً مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ أَحَدًا مِنَ الرُّسُلِ فَهُوَ كَافِرٌ فَإِنْ مَاتَ عَلَى ذلِكَ فَهُوَ رَسُولِهِ أَوْ أَنْكَرُ نُبُوَّةً مُحَمَّدٍ ﷺ أَوْ أَحَدًا مِنَ الرُّسُلِ فَهُوَ كَافِرٌ فَإِنْ مَاتَ عَلَى ذلِكَ فَهُوَ يَسُولِهِ أَوْ أَنْكَا فِيهَا وَلَا يَغْفِرُ اللّهُ لَهُ

Dan asal kata kufr dalam bahasa bermakna tutup dan penutup, dari makna itu malam hari disebut pula kafir (yang menutupi), karena malam menutupi berbagai benda dengan gelapnya. Seorang penyair

Ali bin Muhammad al-Khazin, Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Juz I, h. 31-32.

berkata:

"Di suatu malam kegelapannya menutupi bintang."

Maksudnya menutupinya. Kufr itu ada empat macam: (1) Kufr inkar, yaitu tidak mengakui Allah sama sekali, seperti kufurnya Fir'aun. Yakni -dalam- ucapannya: "Aku tidak meyakini tuhan kalian selain diriku." (2) Kufr juhud, yaitu mengakui Allah dalam hati namun tidak menyatakannya dengan lisan, seperti kufurnya iblis. (3) Kufr 'inad, yaitu mengakui Allah dalam hati dan menyatakannya dengan lisan namun tidak menjadikannya sebagai agamanya. Seperti kufurnya Umayyah bin Abi Shalt dan Abu Thalib yang berkata dalam syairnya:

"Aku yakin agama Muhammad merupakan agama terbaik manusia, Andaikan tidak ada cercaan dan kehawatiran dicela, anda pasti mendapatiku mau memeluknya secara jelas."

- (4) Kufr nifaq, yaitu menyatakan keyakinan kepada Allah dengan lisan dan tidak meyakini keabsahannya di hati. Maka semua macam ini adalah kekufuran. Kesimpulannya, niscaya siapa saja yang mengingkari Allah, mengingkari keesaanNya, mengingkari ajaran yang diturunkan kepada RasulNya, mengingkari kenabian Muhammad Saw. atau mengingkari salah seorang para Rasul, maka dirinya menjadi kafir. Bila mati dalam keadaan demikian, maka ia akan kekal di neraka dan Allah tidak akan mengampuninya.
- 2. Al-Siraj al-Munir fi al-I'anah 'ala Ma'rifah Ba'd Kalam Rabbina al-Hakim al-Munir ¹⁷

وَلَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى خَاصَّة عِبَادِهِ وَخَاصَّة أَوْلِيَائِهِ بِصِفَاتِهِمُ الَّتِي أَهَّلَتْهُمْ لِلْهُدَى وَلَا تُغْنِي وَالْفَلَاجِ عَقَبَهُمْ بِذِكْرِ أَضْدَادِهِمُ الْعَتَّاةُ الْمَرَدَّةُ الَّذِينَ لَا يَنْفَعُ فِيهِمُ الْهُدَى وَلَا تُغْنِي عَنْهُمُ الآيَاتُ وَالنَذْرُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا [الْبَقَرَةُ ٦] الْكُفْرُ لُغَةً سَنْرُ التَّعْمَةِ وَأَصْلُهُ الْكَفْرُ بِالفَتْجِ وَهُو السَّنْرُ وَمِنْهُ قِيلَ لِلزَّرَاعِ وَاللَّيْلِ كَافِرٌ وَلِكِمَامِ التَّعْمَةِ وَأَصْلُهُ الْكَفْرُ وَلِكِمَامِ التَّعْمَةِ وَأَصْلُهُ الشَّرْعِ إِنْكَارُ مَا عُلِمَ بِالطَّرُورَةِ مَجِيءُ الرَّسُولِ بِهِ وَيَنْقَسِمُ إِلَى الشِّرْعِ إِنْكَارُ مَا عُلِمَ بِالطَّرُورَةِ مَجِيءُ الرَّسُولِ بِهِ وَيَنْقَسِمُ إِلَى النِّمَةِ أَقْسَامٍ كُفْرُ إِنْكَارٍ وَكُفْرُ جُحُودٍ وَكُفْرُ عِنَادٍ وَكُفْرُ نِفَاقٍ فَكُفْرُ الْإِنْكَارِ هُو أَنْ يَعْرِفَ اللهَ بِقَلْبِهِ وَلَا يُقِرَّ أَنْ يَعْرِفَ اللهَ بِقَلْبِهِ وَلَا يُقِرَّ أَنْ يَعْرِفَ اللهَ بِقَلْبِهِ وَلَا يُقِرَّ فَلَا يَعْرَفُ اللهَ بِقَلْبِهِ وَلَا يُقِرَّ الْمُؤْرِقُ اللهَ بِقَلْبِهِ وَلَا يُقِرَّ أَنْ يَعْرِفَ اللهَ إِنْكَارٍ وَكُفْرُ الْجُحُودِ هُو أَنْ يَعْرِفَ اللهَ بِقَلْبِهِ وَلَا يُقِرَ

¹⁷ Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syirbinin, Al-Siraj al-Munir fi al-I'anah 'ala Ma'rifah Ba'd Kalam Rabbina al-Hakim al- Munir, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th.), Juz I, h. 26-27.

بِلِسَانِهِ كَكُفْرِ إِبْلِيسَ وَالْيَهُودِ اللّهَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ [الْبَقَرَةُ ٨٩] وَكُفْرُ الْعِنَادِ هُوَ أَنْ يَعْرِفَ اللّهَ بِقَلْبِهِ وَيَعْتَرِفَ بِلِسَانِهِ وَلَا يُدَيِّنُ بِهِ كَكُفْرِ أَبِي طَالِبٍ حَيْثُ يَقُولُ

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ ﴿ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِيْنَا لَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حِذَارَ مَسَبَّةٍ ﴿ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا

وَأَمَّا كُفْرُ النِّفَاقِ فَهُوَ أَنْ يُقِرَّ بِاللِّسَانِ وَلَا يَعْتَقِدَ بِالْقَلْبِ وَجَمِيعُ هذِهِ الْأَقْسَامِ مَنْ لَقِيَ اللهَ تَعَالَى إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ لَلْهَ تَعَالَى إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ [النِّسَاءُ ٤٨ و ١٦٦]

Ketika Allah Ta'ala telah menyebutkan sifat khusus para hambaNya dan sifat khusus para kekasihNya dengan sifat yang menjadikan mereka memperoleh hidayah dan keberuntungan, maka setelah itu Allah menyebutkan orang-orang yang menjadi kebalikan dari mereka, orang-orang dungu yang amat durhaka, yaitu orang-orang yang tidak bisa menerima hidayah, ayat-ayat dan peringatan. Yakni dengan firman Allah Swt.: "Niscaya orang-orang yang mengingkari ..." (QS. al-Baqarah: 6) Kata kufr dalam bahasa berarti menutupi nikmat. Asalnya adalah al-kafr dengan dibaca fathah huruf kafnya, yang berarti penutup. Dari makna itu petani dan malam disebut kafir (yang menutupi) dan kelopak buah-buahan disebut kafur (berapa bagian yang menutupi). Sementara dalam syari'at kufr berarti mengingkari ajaran yang secara luas telah diketahui dibawa para Rasul. Kufr itu terbagi menjadi empat, yaitu kufr inkar, kufr juhud, kufr 'Inad, kufr nifaq. Kufr inkar adalah tidak mengenal Allah sama sekali dan tidak mengakuiNya. Kufr juhud adalah mengakui Allah di dalam hati dan tidak menyatakannya dengan lisan, seperti kufurnya iblis dan kaum Yahudi, Allah berfirman: "Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya." [QS. Al-Baqarah: 89]. Kufr 'inad adalah mengakui Allah di dalam hati, menyatakannya dengan lisan dan tidak menjadikannya sebagai agamanya, seperti kufurnya Abu Thalib dalam ucapannya:

"Aku yakin agama Muhammad merupakan agama terbaik manusia, Andaikan tidak ada cercaan dan kehawatiran dicela, anda pasti mendapatiku mau memeluknya secara jelas." Sedangkan kufr nifaq adalah menyatakan keimanan kepada Allah dengan lisan dan tidak meyakininya dalam hati. Semua macam kekufuran ini, siapa saja yang bertemu dengan Allah dengan membawa salah satunya, maka tidak akan mendapat ampunanNya. Allah Ta'ala berfirman: "Niscaya Allah tidak akan mengampuni dari penyekutuanNya." [QS. Al-Nisa': 48 dan 116].

3. Al-Iqtishad fi al-I'tiqad¹⁸

وَالَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يَمِيلَ الْمُحَصِّلُ إِلَيْهِ الاحْتِرَازُ مِنَ التَّكْفِيرِ مَا وَجَدَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَإِنَّ اسْتِبَاحَةَ الدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ مِنَ الْمُصَلِّينَ إِلَى الْقِبْلَةِ الْمُصَرِّحِينَ بِقَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ خَطَأُ وَالْخَطَأُ فِي تَرْكِ أَلْفِ كَافِرٍ أَهْوَلُ مِنَ الْخَطَلُ فِي سَفْكِ مَحْجَمَةٍ مِنْ دَمْ مُسْلِمِ رَسُولُ اللهِ خَطَأُ وَالْخَطَأُ فِي تَرْكِ أَلْفِ كَافِرٍ أَهْوَلُ مِنَ الْخَطَلُ فِي سَفْكِ مَحْجَمَةٍ مِنْ دَمْ مُسْلِم

Dan sikap yang sebaiknya dicenderungi oleh seseorang pencari kebenaran adalah menghindarkan diri dari mengkafirkan terhadap orang lain selama masih memungkinkan. Sebab, menghalalkan darah dan harta benda orang-orang yang mendirikan shalat dengan menghadap kiblat, yang jelas-jelas mengucapkan kalimat: "Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusanNya." merupakan kesalahan. Dan kesalahan membiarkan -tidak mengkafirkan- seribu orang kafir itu jauh lebih ringan dari pada kesalahan menghalalkan darah seorang muslim.

4. Fashl al-Tafriqah¹⁹

أَمَّا الْوَصِيَّةُ فَأَنْ تَصُفَّ لِسَانَكَ عَنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مَا أَمْكَنَكَ مَا دَامُوا قَائِلِينَ لآ إله إِلَّا اللهُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللهِ غَيْرَ مُنَاقِضِينَ لَهَا وَالْمُنَاقَضَةُ تَجُوِيزُهُمُ الْكَذِبَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعُذْرٍ أَوْ غَيْرٍ عُذْرٍ فَإِنَّ التَّكْفِيرَ فِيهِ خَطَرٌ وَالسُّكُوتَ لَا خَطَرَ فِيهِ

Sedangkan wasiatnya adalah hendaklah jaga lisan anda dari ahli kiblat semampunya selama mereka menyatakan "Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusanNya." tanpa merusaknya. Perusakan itu bisa terjadi dengan anggapan mereka boleh melakukan kebohongan terhadap Rasulullah Saw. disebabkan udzur maupun tidak. Sebab, pengkafiran itu sangat membahayakan. Sedangkan diam -dengan tidak mengkafirkan- itu tidak bahaya.

5. Al-Ibanah 'an Ushul al-Diyanah 20

¹⁸ Abu Hamid al-Ghazali, al-Iqtishad fi al-I'tiqad, (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2008), h. 308.

¹⁹ Abu Hamid al-Ghazali, Faishal al-Tafriqah pada Majmu'ah al-Rasa'il, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006), h. 89.

وَنُدَيِّنُ بِأَنْ لَا نُصَفِّرَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ يَرْتَكِبُهُ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ كَالزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ كَمَا دَانَتْ بِذلِكَ الْحُوَارِجُ وَزَعَمْتُ أَنَّهُمْ كَافِرُونَ وَنَقُولُ إِنَّ مَنْ عَمِلَ كَبِيرَةً مِنْ هذِهِ الْكَبَاثِرِ مِثْلَ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا مُسْتَحِلًّا لَهَا غَيْرَ مُعْتَقِدٍ لِتَحْرِيمِهَا كَانَ كَافِرًا

Dan kami beragama dengan tidak mengkafirkan ahli kiblat sebab melakukan dosa selama ia tidak menganggapnya halal. Seperti zina, mencuri dan meminum arak. Seperti halnya ajaran kaum Khawarij. Dan saya kira niscaya mereka termasuk golongan orang kafir. Saya berpendapat, sungguh orang yang melakukan dosa besar dari dosa-dosa besar ini, seperti zina, mencuri dan semisalnya dengan menghalalkannya dan tidak meyakini keharamannya, maka ia termasuk orang kafir.

6. Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi 21

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَنَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ هذَا عَامٌ مُحْصُوصٌ وَالْمُرَادُ غَالِبُ الْمِدَعِ قَالَ أَهْلُ اللَّعَةِ هِي كُلُّ شَيْءٍ عُمِلَ عَلَى غَيْرٍ مِثَالٍ سَابِقِ قَالَ الْعُلَمَاءُ الْبِدْعَةُ خَمْسَةُ الْمِدَعِ قَالَ أَهْلُ اللَّعَةِ هِي كُلُّ شَيْءٍ عُمِلَ عَلَى غَيْرٍ مِثَالٍ سَابِقِ قَالَ الْعُلَمَاءُ الْبِدْعَةُ خَمْسَةُ الْمِدَعِ قَالَ الْعُلَمَاءُ الْبِدْعَةُ خَمْسَةُ الْمِدَعِ قَالَ اللَّعَةِ هِي كُلُّ شَيْءٍ عُمِلَ عَلَى غَيْرٍ مِثَالٍ سَابِقِ قَالَ الْعُلَمَاءُ الْبِدْعَةُ خَمْسَةُ الْمُدَعِ وَمِنَ الْمُنَاعِ الْمَعْمِومِ وَكَدَةِ تَصْنِيفُ كُتُبِ الْعِلْمِ وَبِنَاءِ الْمُدَارِيسِ عَلَى الْمُلَاحَدَةِ وَالْمُبْتِعِينَ وَشِبْهِ ذَلِكَ وَمِنَ الْمَنْدُوبَةِ تَصْنِيفُ كُتُبِ الْعِلْمِ وَبِنَاءِ الْمُدَارِيسِ عَلَى الْمُلاحَدَةِ وَالْمُبْتِعِينَ وَشِبْهِ ذَلِكَ وَمِنَ الْمُنْدُوبَةِ تَصْنِيفُ كُتُبِ الْعِلْمِ وَبِنَاءِ الْمُدَارِيسِ عَلَى الْمُلَاحَدةِ وَالْمُنْتَةِ وَالْمُنْتَاعِ وَالْمَاتِ الْمُنْعِقِيقِ وَمِنَ الْمُنَاءِ وَالْمُوطَةِ فِي تَهْذِيبِ الْأَشْمَاءِ وَاللَّعَاتِ فَإِذَا مُ وَالْمَكُونُ وَالْمُوطَةِ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللَّعَاتِ فَإِذَا مُولِ وَالْمُ مُنْ وَمِنَ الْمُعْمِلِ فِي الْمَرْوطِةِ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللَّعَاتِ فَإِذَا عُرِفَ وَمِنَ الْمُنْعُ مِنَ الْمُعْمِلِ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللَّعَاتِ فَإِذَا عُرِفَ الْمُعْمِ وَعَمْ اللْمُعْمِلِ اللَّعَلِمِ الْمُعْمِلُونِ وَقَدْ أَوْضَحْتُ الْمُسْمَاءِ وَاللَّعَامِ الْمُعْمِ فِي التَّرَاوِيحِ نِعْمَتِ الْمِدْعَةُ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ كُونِ الْمُعْمِ مِنَ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِ مِنَ الْمُعْمِلِ اللْمُولِقِيقِ وَلَيْمُ وَيُثُولُ مُلْمِ الْمُعْمِ فِي التَّرَاوِيحِ يَعْمَتِ الْمُولِي وَالْمُولِقُولُ مُنْ الْمُلْعُ مِنْ الْمُعْمِ مُنَ الْمُعْمِلِ مُنْ الْمُعْمِ مُنَاعُ مِنْ الْمُعْمِ مُنَ الْمُولِمُ مُعْمِقُولُ مُنْ الْمُولِ وَالْمُولِقِيقِ الْمُولِقُولُ مُنْ الْمُعْمِى مُنْ الْمُعْمِ مُنَ الْمُعْمِولُ مُنْ الْمُعْمِولُ الْمُعْمُولُ مُعْمِقُولُ مُعْمِ الْمُولِمُ الْمُعْمِلُولُ مُعْمِلِ الْمُولِ مُعْمِولُولُولُ

(HR. Muslim)

900

²⁰ Abu Hasan al-Asy'ari, al-Ibanah 'an Ushul al-Diyanah, (Damaskus: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005), h. 17.

²¹ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1392 H), Juz VI, h. 154-156.

Sabda Nabi Saw.: "Dan setiap pembaruan adalah bid'ah." adalah dalil umum yang ditahshis -dikhususkan-. Yang dimaksud adalah mayoritas bid'ah. Para ahli bahasa menyatakan, bid'ah adalah setiap sesuatu yang diamalkan tanpa contoh yang mendahului. Para ulama berpendapat: "Bid'ah itu ada lima macam, yaitu wajibah, mandubah, muharramah, makruhah dan mubahah. Yang termasuk bid'ah wajibah adalah menyusun berbagai dalil mutakallimin untuk menolak kaum atheis (mulahhadah), para ahli bid'ah dan semisalnya. Yang termasuk bid'ah mubah adalah memperbanyak aneka makanan dan semisalnya. Sedangkan bid'ah yang haram dan makruh sudah cukup jelas. Saya sudah menjelaskan masalah ini dengan dalil-dalilnya yang luas dalam kitab Tadzhib al-Asma' wa al-Lughat. Bila penjelasan saya telah dipahami, maka bisa diketahui, bahwa hadits di atas termasuk dalil umum yang ditahshis. Begitu pula hadits-hadits lain yang berasal dari Nabi Saw. terkait hal ini-. Pendapat saya itu diperkuat oleh pernyataan Umar bin al-Khaththab Ra. terkait shalat tarawih, yaitu: "Tarawih berjamaah ini adalah bid'ah terindah." Sabda Nabi Saw.: "Dan setiap pembaruan.", dan sabda Nabi Saw.: "Semua bid'ah" itu tidak mencegah keberadaan hadits di atas sebagai dalil umum yang ditahshis. Bahkan tahshis masuk dalam dalam hadits itu dengan adanya kalimat tersebut.

7. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari²²

وَالْمُحْدَثَاتُ بِفَتْحِ الدَّالِ جَمْعُ مُحْدَثَةٍ وَالْمُرَادُ بِهَا مَا أُحْدِثَ وَلَيْسَ لَهُ أَصْلُ فِي الشَّرْعِ وَمُعَلَّى وَمُنَالِ وَيُسَمَّى فِي عُرْفِ الشَّرْعِ بِدْعَةً وَمَا كَانَ لَهُ أَصْلُ يَدُلُ عَلَيْهِ الشَّرْعُ فَلَيْسَ بِبِدْعَةٍ فَالْبِدْعَةُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ مَذْمُومَةً بِحَلَافِ اللَّغَةِ فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ أُحْدِثَ عَلَى عَيْرِ مِثَالٍ فَالْبِدْعَةُ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ مَذْمُومًا وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْمُحْدَثَةِ وَفِي الْأَمْرِ الْمُحْدَثِ يُسَمَّى بِدْعَةً سَوَاءً كَانَ مَحْمُودًا أَوْ مَذْمُومًا وَكَذَا الْقَوْلُ فِي الْمُحْدَثَةِ وَفِي الْأَمْرِ الْمُحْدَثِ اللَّهِ عَلَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ كَمَا تَقَدَّمَ الَّذِي وَرَدَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدُّ كَمَا تَقَدَّمَ اللّهِ عَلَى وَرَدَ فِي حَدِيثِ جَابِرِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ شَرْحُهُ وَمَضَى بَيَالُ ذَلِكَ قَرِيبًا فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ جَابِرِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ شَرْحُهُ وَمَضَى بَيَالُ ذَلِكَ قَرِيبًا فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ جَابِرِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ شَرْحُهُ وَمَضَى بَيَالُ ذَلِكَ قَرِيبًا فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ جَابِرِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ فَيْ عَلَى مُولِكُ اللّهِ عَلَى مَا مُعَةً وَايَّاكُمْ وَفِي عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى وَعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الل

²² Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1989), Juz XIII, h. 314-315.

الحُدِيثُ فِي الْمَعْنَى قَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَاثِشَةَ الْمُشَارِ إِلَيْهِ وَهُوَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ قَالَ الشَّافِعِيُّ الْبِدْعَةُ بَدْعَتَانِ مَحْمُودَةً وَمَدْمُومَةً فَمَا وَافْقَ السَّنَةَ فَهُو مَحْمُودٌ وَمَا خَالَفَهَا فَهُو مَدْمُومٌ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ بِمَعْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الجُنَيْدِ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَجَاءَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِي فِي مَنَاقِيهِ قَالَ الْمُحْدَثَاتُ ضَرْبَانِ مَا أُحْدِثَ يُعَالِفُ الشَّافِعِيِّ أَيْضًا مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِي فِي مَنَاقِيهِ قَالَ الْمُحْدَثَاتُ ضَرْبَانِ مَا أُحْدِثَ مِنَ الْحَيْرِ لاَ يُعَالِفُ شَيْئًا لِشَافِعِيِّ أَيْصُا مَا أَوْ إِجْمَاعًا فَهذِهِ بِدْعَةُ الضَّلالِ وَمَا أُحْدِثَ مِنَ الْحَيْرِ لاَ يُعَالِفُ شَيْئًا مَنْ ذَلِكَ فَهذِهِ مُحْدَثَةً فَعَلَيْكُمْ وَقَسَمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْبِدْعَةَ إِلَى الْأَحْكَامِ مِنْ ذَلِكَ فَهذِهِ مُحْدَثَةً غَيْرُ مَذْمُومَةٍ انْتَكَى وَقَسَمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْبِدْعَةَ إِلَى الْأَحْكَامِ الْخُمْسَةِ وَهُو وَاضِحُ وَثَبَتَ عَنِ بْنِ مَسْعُودِ أَنَّهُ قَالَ قَدْ أَصْبَحْتُمْ عَلَى الْفِطْرَةِ وَأَنَّكُمْ مُنْ وَيُعْدَى لَكُمْ وَقَلَمْ مُعُودِ أَنَّهُ فَعَلَيْكُمْ بِالْهُدَى الْأَولِ فَمِمَّا حُدِثَ تَدُوينُ الْمُسَاتِلِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُولِكَةِ عَنِ الرَّأْيِ الْمَحْضِ ثُمَّ تَدُوينُ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَعْمَالِ الْقُلُونِ الْمَسَاتِلِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُولِكَةَ عَنِ الرَّأْيِ الْمَحْضِ ثُمَّ تَدُوينُ مَا يَتَعَلَقُ بِأَعْمَالِ الْقُلُونِ

Kata al-Muhdatsat dengan dibaca fathah huruf dalnya adalah jama' dari kata muhdatsah. Yang dikehendaki dengannya adalah perkara yang diperbarui dan tidak mempunyai dasar dalam syari'at, dan dalam 'urf syara' disebut bid'ah. Setiap pembaruan yang mempunyai dalil yang ditunjukkan syara' maka tidak termasuk bid'ah. Bid'ah dalam 'urf syara' adalah tercela, berbeda dengan 'urf lughah (bahasa). Maka setiap pembaruan tanpa contoh yang mendahuluinya, terpuji maupun tercela -dalam tinjauan bahasa- disebut bid'ah. Begitu pula pembahasan kata al-muhdatsah dan pembaruan yang ada dalam hadits Aisyah: "Siapa saja yang membuat pembaruan dalam agama kami ini pada perkara yang bukan darinya, maka pembaruan itu tertolak." seperti penjelasan hadits tersebut dan keterangannya yang baru saja lewat dalam Kitab Hukum-Hukum. Dalam hadits Jabir yang telah diisyaratkan terdapat redaksi: "Dan setiap bid'ah adalah kesesatan." dalam hadits al-'Irbadh bin Sariyah terdapat redaksi: "Dan takutlah kalian pada pembaruan-pembaruan dari beberapa perkara, sebab setiap bid'ah adalah kesesatan." Hadits tersebut adalah hadits yang awal redaksinya berupa: "Rasulullah Saw. telah memberi mau'idhah yang sangat penting." Lalu al-'Irbadh menyebut isi mau'idhahnya, dan pada hadits tersebut terdapat redaksi itu. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan dishahihkan oleh Ibn Majjah, Ibn Hibban dan Hakim. Makna hadits ini sangat dekat dengan hadits Aisyah yang menjadi tema universal. Imam Syafi'i berpendapat:

"Bid'ah itu ada dua, mahmudah (terpuji) dan madzmumah (tercela). Maka bid'ah yang selaras dengan sunnah adalah bid'ah yang terpuji, dan bid'ah yang bertentangan dengannya adalah bid'ah yang tercela. Abu Nu'aim meriwayatkannya dengan subtansi yang sama dari Ibrahim bin al-Junaid, dari Imam Syafi'i. Selain itu ada pula pendapat Imam Syafi'i yang diriwayatkan Imam Baihaqi dalam kitab Manaqibnya, ia berkata: "Pembaruan-pembaruan itu ada dua macam. Pembaruan yang bertentangan dengan al-Qur'an, sunnah, atsar atau ijma', maka pembaruan ini merupakan bid'ah sesat. Sedangkan kebaikan baru yang tidak bertentangan dengan salah satu hal tersebut, maka pembaruan ini bukanlah pembaruan yang tercela. Begitu pendapat Imam Syafi'i.

Sementara sebagian ulama membagi bid'ah menjadi lima macam, dan hal ini cukup jelas. Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud, ia berkata: "Kalian telah berada dalam keadaan fithrah, dan kalian akan membuat pembaruan dan dibuatkan pembaruan. Oleh sebab itu, ketika kalian melihat suatu pembaruan maka berpeganglah pada petunjuk yang pertama." Yang termasuk pembaruan adalah kodifikasi hadits, tafsir al-Qur'an, kodifikasi permasalahan fiqhiyah yang murni muncul dari pendapat ulama dan kodifikasi ajaran yang berkaitan dengan gerak-gerik hati.

8. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari²³

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ الْعِرْبَاضِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحَدَّثَ الْمُحْدَثَ يُسَمَّى بِدْعَةٌ وَقَوْلُهَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ قَاعِدَةٌ شَرْعِيَّةٌ كُلِّيَةٌ لِمَنْطُوقِهَا وَمَفْهُومِهَا أَمَّا مَنْطُوقُهَا فَكَأَنْ يُقَالَ حُكْمُ كَذَا بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ فَلَا بِمَنْطُوقِهَا وَمَفْهُومِهَا أَمَّا مَنْطُوقُهَا فَكَأَنْ يُقَالَ حُكْمُ كَذَا بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ فَلَا يَعْفُونُ مِنَ الشَّرْعِ لِأَنَّ الشَّرْعِ لِأَنَّ الشَّرْعِ لِأَنَّ الشَّرْعَ كُلَّهُ هُدَى فَإِنْ ثَبَتَ أَنَّ الحُكْمُ الْمَذْكُورَ بِدْعَةٌ صَحَّتِ الْمُقَدِّمَتَانِ وَانْتَجَتَا الْمَطْلُوبَ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ مَا أُحْدِثَ وَلَا دَلِيلَ لَهُ مِن الشَّرْعِ بِطَرِيقٍ خَاصٍ وَلَا عَامٍّ وَقَوْلُهُ فِي آخِرِ حَدِيثِ بْنِ مَسْعُودٍ وَإِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا الشَّرْعِ بِطَرِيقٍ خَاصٍ وَلَا عَامٍ وَقَوْلُهُ فِي آخِرِ حَدِيثِ بْنِ مَسْعُودٍ وَإِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا الشَّرْعِ بِطَرِيقٍ خَاصٍ وَلَا عَامٍ وَقَوْلُهُ فِي آخِرِ حَدِيثِ بْنِ مَسْعُودٍ وَإِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا الشَّرِيعِ خَاصٍ وَلَا عَامٌ مَوْعِظَتِهِ بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ يُنَاسِبُ الْحَالَ وَقَالَ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْحِرِ الْقَوَاعِدِ الْبِدْعَةُ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ فَالُواحِبَةُ كَالاشْتِغَالِ بِالنَّحْوِ الَّذِي يُفْهَمُ بِهِ كَلَامُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِأَنَّ حِفْظَ الشَّرِيعَةِ وَاجِبٌ وَلَا يَتَأَتَى إِلَّا بِذَلِكَ فَيَكُونُ مِنْ مُقَدِّمَةِ الْوَاجِبِ

²³ Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1989), Juz XIII, h. 316.

وَكَذَا شَرْحُ الْغَرِيبِ وَتَدْوِينُ أُصُولِ الْفِقْهِ وَالتَّوَصُّلِ إِلَى تَمْيِيزِ الصَّحِيحِ وَالسَّقِيمِ وَالْمُحَرَّمَةُ مَا رَتَّبَهُ مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ مِنَ الْجَبَرِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ وَالْمُشَبِّهَةِ وَالْمُنْدُوبَةُ كُلُّ إِحْسَانٍ لَمْ يُعْهَدْ عَيْنُهُ فِي الْعَهْدِ النَّبَوِيِّ كَالاجْتِمَاعِ عَنِ التَّرَاوِيجِ وَبِنَاءِ الْمَدَارِسِ وَالرُّبَطِ إِحْسَانٍ لَمْ يُعْهَدْ عَيْنُهُ فِي الْعَهْدِ النَّبَوِيِّ كَالاجْتِمَاعِ عَنِ التَّرَاوِيجِ وَبِنَاءِ الْمَدَارِسِ وَالرُّبَطِ وَالْمُبَاحَةُ وَالْمُبَاحَةُ وَالْمُبَاحَةُ وَالْمُبَاحَةُ اللهِ وَالْمُبَاحَةُ كَاللهِ وَالْمُبَاحَةُ وَالْمُبَاحِةِ وَعَقْدِ عَجَالِسِ الْمُنَاظِرَةِ إِنْ أُرِيدَ بِذَلِكَ وَجُهُ اللهِ وَالْمُبَاحَةُ كَاللهِ وَالْمُبَاحِةُ وَعَقْدِ عَالِمُ وَالنَّهُ وَاللهُ وَالْمُبَاحِقُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُرْبِ وَمُنْ وَاللهُ أَعْلَمُ وَاللهُ أَعْلَمُ وَمَلْمِ وَمَلْحَقِ وَقَدْ يَكُونُ بَعْضُ ذَلِكَ مَكْرُوهًا أَوْ خِلَافَ الْأَوْلَى وَاللهُ أَعْلَمُ وَاللهُ أَعْلَمُ وَمُلْمَالِ وَمُنْ اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

Sedangkan sabda Nabi Saw. pada hadits al-'Irbadh berupa: "Setiap bid'ah adalah kesesatan." merupakan kaidah syari'ah universal secara tekstual (manthuq) maupun konotasi(mafhum)nya. Adapun manthuqnya, maka seolah-olah diucapkan: "Hukum hal ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Maka hal tersebut tidak termasuk dari bagian syari'ah. Sebab semua isi syari'ah adalah petunjuk. Ketika sudah tetap hukum hal tersebut memang bid'ah, maka kedua premis itu absah dan menghasilkan kesimpulan yang benar. Yang dimaksud dari sabda Nabi Saw.: "Setiap bid'ah adalah kesesatan." adalah pembaruan tanpa dalil syari'ah yang menunjukkan kebenarannya dengan cara khusus maupun umum. Sabda Nabi Saw. di akhir hadits Ibn Mas'ud: "Sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menolaknya." (QS. al-An'am: 134) adalah Nabi Saw. bermaksud mengakhiri mau'idhahnya dengan ayat al-Qur'an yang sesuai dengan temanya. Pada akhir kitab Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam Ibn Abdissalam berkata: "Bid'ah itu ada lima macam. Bid'ah wajib, seperti mempelajari ilmu nahwu yang berfungsi untuk memahami firman Allah dan sabda RasulNya. Sebab, menjaga syari'ah hukumnya wajib dan hanya bisa dilakukan dengan ilmu nahwu. Maka ilmu nahwu merupakan pengantar kewajiban menjaga syari'ah. Begitu pula menjelaskan makna-makna (al-Qur'an) yang asing, kodifikasi ushul fiqh, mencari jalan dalam membedakan perkara yang benar dan salah. Bid'ah haram adalah ajaran yang dimunculkan kelompok penentang sunnah, yaitu Qadariyah, Murji'ah, Musyabbihah. Bid'ah mandubah (sunnah) adalah setiap kebajikan yang hakikatnya belum dikenal pada zaman nabi, seperti jamaah tarawih, membangun madrasah, pesantren, mengkaji tashawuf yang terpuji dan mengadakan debat ilmiah bila yang dicari adalah ridha Allah. Bid'ah mubah seperti salaman setelah shalat Subuh dan Ashar, memperbanyak aneka makanan dan minuman, pakaian dan tempat tinggal. sebagian hal-hal tersebut ada yang makruh atau khilaf al-aula. Wallahu a'lam. 9. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari²⁴

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُو رَدٌّ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

فَإِنَّ مَعْنَاهُ مَن اخْتَرَعَ فِي الدِّين مَا لَا يَشْهَدُ لَهُ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِهِ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ قَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا الْحُدِيثُ مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَنَى بِحِفْظِهِ وَاسْتِعْمَالِهِ فِي إِبْطَالِ الْمُنْكَرَاتِ وَإِشَاعَةِ الاسْتِدْلَالِ بِهِ كَذَلِكَ وَقَالَ الطَّرَقِيُّ هذَا الْحَدِيثُ يَصْلُحُ أَنْ يُسَمَّى نِصْفَ أَدِلَّةٍ الشَّرْعِ لِأَنَّ الدَّلِيلَ يَتَرَّكُّ مِنْ مُقَدِّمَتَيْنِ وَالْمَطْلُوبُ بِالدَّلِيلِ إِمَّا إِثْبَاتُ الْحَصْمِ أَوْ نَفْيُهُ وَهذَا الْحَدِيثُ مُقَدِّمَةٌ كُبْرَى فِي إِثْبَاتِ كُلِّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَنَفْيِهِ لِأَنَّ مَنْطُوقَهُ مُقَدِّمَةٌ كُلِيَّةُ فِي كُلِّ دَلِيل نَافٍ لِحُكْمٍ مِثْلُ أَنْ يُقَالَ فِي الْوُضُوءِ بِمَاءٍ نَجَسٍ هذَا لَيْسَ مِنْ أَمْرٍ الشَّرْعِ وَكُلُّ مَا كَانَ كَذلِكَ فَهُوَ مَرْدُودٌ فَهِذَا الْعَمَلُ مَرْدُودٌ فَالْمُقَدِّمَةُ الظَّانِيَّةُ ثَابِيَّةً بِهِذَا الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا يَقَعُ النَّـزَاعُ فِي الْأُولَى وَمَفْهُومُهُ أَنَّ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا عَلَيْهِ أَمْرُ الشَّرْعِ فَهُوَ صَحِيحٌ مِثْلُ أَنْ يُقَالَ فِي الْوُضُوءِ بِالتِّيَّةِ هذَا عَلَيْهِ أَمْرُ الشَّرْعِ وَكُلُّ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَمْرُ الشَّرْعِ فَهُوَ صَحِيحٌ فَالْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَّةُ ثَابِتَةٌ بِهِذَا الْحَدِيثِ وَالْأُولَى فِيهَا النَّزَاعُ فَلَو اتَّفَقَ أَنْ يُوجَدَ حَدِيثُ يَكُونُ مُقَدِّمَةً أُولَى فِي إِثْبَاتِ كُلِّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَنَفْيِهِ لَاسْتَقَلَ الْحديثَانِ بِجَمِيعِ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ لَكِنْ هذَا الثَّانِي لَا يُوجَدُ فَإِذًا حَدِيثُ الْبَابِ نِصْفُ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَوْلُهُ رَدُّ مَعْنَاهُ مَرْدُودٌ مِنْ إِطْلَاقِ الْمَصْدَرِ عَلَى اسْمِ الْمَفْعُولِ مِثْلُ خَلْقِ وَتَخْلُوقٍ وَنَسْجٍ وَمَنْسُوجٍ وَكَأَنَّهُ قَالَ فَهُوَ بَاطِلٌ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ وَاللَّفْظُ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُهُ مَنْ عَمِلَ أَعَمُّ مِنَ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُهُ مَنْ أَحْدَثَ فَيُحْتَجُّ بِهِ فِي إِبْطَالِ جَمِيعٍ الْعُقُودِ الْمَنْهِيَّةِ وَعَدَمِ وُجُودِ ثَمَرَاتِهَا الْمُرْتَبَةِ عَلَيْهَا وَفِيهِ رَدُّ الْمُحْدَثَاتِ وَأَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي الْفَسَادَ لِأَنَّ الْمَنْهِيَاتِ كُلَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَمْرِ الدِّين فَيَجِبُ رَدُّهَا وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُغَيِّرُ مَا فِي بَاطِن الْأَمْرِ لِقَوْلِهِ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا وَالْمُرَادُ بِهِ أَمْرُ الدِّيْن وَفِيهِ أَنَّ الصُّلْحَ الْفَاسِدَ مُنْتَقِضٌ وَالْمَأْخُوذُ عَلَيْهِ مُسْتَحَقُّ الرَّدِّ

²⁴ Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1989), Juz V, h. 379-380.

"Siapa saja yang membuat pembaruan dalam agama kami ini pada perkara yang bukan darinya, maka pembaruan itu tertolak." (HR. Bukhari)

Hadits ini termasuk pokok ajaran dari pokok-pokok ajaran Islam dan satu kaidah dari kaidah-kaidahnya. Karena maknanya adalah "Siapa saja yang membuat pembaruan dalam agama pada perkara yang tidak dibenarkan oleh suatu dasar dari dasar-dasar agama maka tidak dihiraukan." Al-Nawawi berkata: "Hadits ini termasuk hadits yang semestinya dihafal, digunakan dalam membatalkan kemungkarankemungkaran dan telah masyhur dijadikan dalil untuk hal itu. Al-Tharagi berkata: "Hadits ini layak disebut sebagai setengah dalil-dalil syara'. Sebab, dalil itu terdiri dari dua muqaddimah (premis). Sedangkan kesimpulan yang dicari dengan dalil itu kadang berupa menetapkan hukum atau menafikannya, dan hadits ini merupakan premis mayor (mugaddimah kubra). Karena manthug (tekstual)nya berupa premis universal (mugaddimah kulliyah) bagi setiap dalil yang menafikan hukum. Seperti dalam kasus wudhu dengan air najis diungkapkan: "Hal ini bukan perkara syara', dan setiap hal yang bukan perkara syara' itu tertolak. Maka wudhu dengan air najis itu tertolak." Dalam kasus ini premis kedua ditetapkan dengan hadits tersebut, dan yang masih diperdebatkan hanya premis pertama. Sedangkan mafhum (konotasi)nya adalah siapa saja yang melakukan amal berdasarkan perkara agama maka amal itu shahih. Maka, premis kedua ditetapkan berdasar pada hadits ini dan premis pertama masih diperdebatkan. Andaikan kebetulan ditemukan hadits muqaddimah pertama yang menetapkan atau menafikan setiap hukum syar'i, niscaya dua hadits tersebut (dua hadits yang membentuk premis kedua dan premis pertama) sudah mencukupi dari semua dalil syara'. Namun, hadits yang kedua tidak ditemukan. Oleh sebab itu hadits bab ini disebut sebagai setengah dalil-dalil syara'." Wallahu A'lam.

Sabda Nabi Saw.: "Tertolak." maksudnya ditolak. Sabda tersebut termasuk pola menyebut masdar untuk menunjukkan makna ism maf'ul. Seperti kata khalq dan -untuk menunjukkan makna- kata makhluq, dan kata naskh -salinan- dan -untuk menunjukkan makna- kata mansukh -yang disalin-. Seolah-olah Nabi Saw. bersabda: "Maka pembaruan itu adalah kebatilan dan tidak dianggap." Sedangkan redaksi hadits kedua yaitu: "Siapa saja melakukan amal." itu lebih umum dari hadits pertama, yaitu: "Siapa saja yang membuat pembaruan." Oleh sebab itu, hadits yang kedua bisa digunakan sebagai dalil yang membatalkan semua akad (transaksi) terlarang dan tidak adanya hasil yang dicapai dari konsekuensi

akad tersebut. Pada hadits kedua itu ada penolakan terhadap pembaruan-pembaruan. Sementara larangan itu memastikan rusaknya hukum. Sebab, semua larangan itu bukan perkara agama, maka pasti tertolak. Dari sini bisa dipahami, bahwa keputusan hukum seorang hakim itu tidak bisa merubah hakikat suatu perkara, karena sabda Nabi Saw.: "Yang agama kami tidak mendasarinya." Sedangkan maksud sabda beliau itu adalah perkara agama Islam. Dalam hadits kedua tersebut -terdapat pula penjelasan- bahwa akad sulh fasid (perdamaian yang rusak) itu batal, dan kompensasi yang diambil darinya harus dikembalikan.

10. Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi²⁵

مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءً وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءً (رَوَاهُ مُسْلِمً)

قَوْلُهُ ﷺ (مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا) إِلَى آخِرِهِ فِيهِ الْحِثُ عَلَى الانْتِدَاءِ بِالْخَيْرَاتِ وَسَنِّ السُّننِ الْحُسَنَاتِ وَالتَّحْذِيرِ مِنِ اخْتِرَاعِ الْأَبَاطِيلِ وَالْمُسْتَقْبَحَاتِ وَسَبَبُ هِذَا الْكَلامِ فِي هَذَا الْحُدِيثِ أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِهِ (فَجَاءَ رَجُلُّ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كُفُّهُ تَعْجُرُ عَنْهَا هَذَا الْكَلامِ فِي هذَا الْخِصَانِ وَفِي فَتُتَابِعُ النَّاسَ) وَكَانَ الْفَضْلُ الْعَظِيمِ لِلْبَادِي بِهِذَا الْخَيْرِ وَالْفَاتِحِ لِبَابِ هِذَا الْإِحْسَانِ وَفِي هَذَا الْحُدِيثِ تَخْصِيصُ قَوْلِهِ ﷺ كُلُّ مُعْدَفَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُحْدَثَاتُ الْبَاطِلَةُ وَالْبِدَعُ الْمَدْمُومَةُ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هذَا فِي كِتَابِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَذَكَرُنَا الْمُحْدَثَاتُ الْبَاطِلَةُ وَالْبِدَعُ الْمَدْمُومَةُ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هذَا فِي كِتَابِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَذَكُرُنَا الْمُحْدَثَاتُ الْبَاطِلَةُ وَالْبِدَعُ الْمَدْمُومَةُ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هذَا فِي كِتَابِ صَلَاةٍ الْجُمُعَةِ وَذَكُرُنَا هُذَا فَلَهُ وَالْبِدَعُ أَلْمُ الْمُؤْمِنَةُ وَمَنْ مُومَةً وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هذَا فِي كِتَابِ صَلَاقً الْجُمُعَةِ وَذَكُرُنَا هُ أَنَا الْمِدَعَ خَمْسَةُ أَوْسَامٍ وَاجِبَةً وَمَنْدُوبَةً وَحُرَّمَةٌ وَمَكْرُوهَةً وَمُمْاحَةً

"Siapa saja yang membuat tradisi baik dalam Islam, maka ia memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukan tradisi baik itu setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, dan barang siapa membuat tradisi buruk dalam Islam, maka ia memperoleh dosanya dan dosa orang-orang yang melakukan tradisi buruk setelahnya tanpa mengurangi sedikit pun dosa mereka." (HR. Muslim)

Sabda Nabi Saw.: "Siapa saja yang membuat tradisi baik dalam Islam ...", dalam hadits tersebut terdapat anjuran membuat pembaruan kebaikan, melakukan tradisi baik, peringatan membuat kebatilan dan

²⁵ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1392 H), Juz VII, h. 104.

kekejian baru. Sebab dari sabda Nabi Saw. pada hadits ini adalah di permulaan hadits beliau bersabda: "Kemudian datang seorang laki-laki dengan membawa sebuah kantong yang hampir saja tangannya tidak kuat membawanya, lalu ia mencari-cari orang." Maka keutamaan besar bagi orang yang memulai kebaikan dan pelopor pintu kebajikan. Dalam hadits ini terdapat tahshis (pengkhususan) sabda Nabi Saw.: "Setiap pembaruan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan." Maksud hadits ini adalah pembaruan-pembaruan yang batil dan bid'ah tercela. Penjelasan hal ini telah disampaikan dalam Kitab tentang Shalat Jum'at. Di sana saya sebutkan, bahwa bid'ah ada lima macam, yaitu wajibah, mandubah, muharramah, makruhah dan mubahah.

10. Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi 26

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءً وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّمَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءً (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءً (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

مَنْ عَمِنْ بِهِا مِنْ بِعَدِهِ مِنْ عَيْرِ انْ يَعْطَىٰ مِنْ الْحَدِيثَ وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ (مَنْ دَعَا إِلَى الضَّلَالَةِ) هذانِ الْحَدِيثَانِ صَرِيحَانِ فِي الْحِثِ عَلَى اسْتِحْبَابِ سَنَّ الْأُمُورِ الْحَسَنَةِ وَتَحْرِيمِ سَنِّ الْأُمُورِ السَّيِّبَةِ وَأَنَّ مَنْ سَنَّ سُنَّة حَسَنَة كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِكُلِّ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَنَّ سُنَّة سَيَّتَة كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِكُلِّ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَنَّ سُنَّة سَيَّتَة كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِكُلِّ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا إِلَى مَنْ يَعْمَلُ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَنَّ سُنَّة سَيَّتَة كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِكُلِّ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا إِلَى مَنْ يَعْمَلُ بِهَا إِلَى مَنْ يَعْمَلُ بِهَا إِلَى مَنْ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا إِلَى عَلَيْهِ مِثْلُ وَإِلَى مَنْ اللّهُ مَنْ يَعْمَلُ بِهَا إِلَى مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى الْهُدَى وَالطَّلَالَةُ هُو اللّذِي الْبَعْدَةُ أَوْ إِلَى مَلَالَةٍ كَانَ وَلِيكُ فَوْلُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُورِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَسَلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْلُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُ الْعَمَلُ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَاللّهُ أَعْلَمُ الْمِالَةُ الْمَلُ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَاللّهُ أَعْلَمُ اللّهُ الْمَالُ لِلْ الْمَعْمَلُ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَاللّهُ أَعْلَمُ الْمَالُ الْمَعْمَلُ فِي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَاللّهُ أَعْلَمُ الْمَالُ فَي حَيَاتِهِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ وَاللّهُ أَعْلَمُ اللّهُ الْمَالُ الْمُعْمَلُ بِهِ الْمَلْ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُلْ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْمَالُ الْمُلُولُ الْمُعْمَلُ اللللللّهُ الْمُعْمَلُ اللللللللْمُ الْمُعْمَلِ

"Siapa saja yang membuat tradisi baik dalam Islam, maka ia memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukan tradisi baik itu setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, dan barang siapa membuat tradisi buruk dalam Islam, maka ia memperoleh dosanya dan dosa orang-orang yang melakukan tradisi buruk setelahnya tanpa mengurangi sedikit pun dosa mereka." (HR. Muslim)

²⁶ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1392 H), Juz XVI, h. 226-227.

Sabda Nabi Saw.: "Siapa saja yang membuat tradisi baik, dan siapa saja yang membuat tradisi buruk ..." Dan dalam hadits lain disebutkan: 'Siapa saja yang mengajak pada petunjuk dan siapa saja yang mengajak pada kesesatan." Kedua hadits ini cukup jelas menganjurkan kesunahan mentradisikan hal-hal baik dan keharaman mentradisikan hal-hal buruk. Siapa saja yang membuat tradisi baik maka ia memperoleh pahala sepadan dengan pahala setiap orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat, dan siapa saja yang membuat tradisi buruk ia mendapat dosa setimpal dengan dosa orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat. Siapa saja yang mengajak kepada petunjuk maka ia memperoleh pahala setimpal dengan para pengikutnya, atau mengajak kesesatan, maka ia mendapat dosa setimpal dengan para pengikutnya, baik petunjuk dan kesesatan itu dia yang pertama kali melakukan ataupun telah didahului oleh orang lain, baik hal itu merupakan pengajaran ilmu, ibadah, etika atau lainnya. Sabda Nabi Saw.: "Dan tradisi itu diamalkan setalahnya." maknanya adalah sungguh tradisinya itu diamalkan semasa hidup atau pasca kematiannya. Wallahu A'lam.

11. Kitab al-Kiyat²⁷

الْبِدْعَةُ هِيَ عَمَلُ عَمَلٍ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقٍ وَفِي الْقَامُوسِ هِيَ الْحَدَثُ فِي الدِّينِ بَعْدَ الْإِكْمَالِ

أَوْ مَا اسْتُحْدِثَ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ مِنَ الْأَهْوَاءِ وَالْأَعْمَالِ قِيْلَ هِيَ أَصْغَرُ مِنَ الْصُفْرِ

وَأَكْبَرُ مِنَ الْفِسْقِ وَفِي الْمُحِيطِ الرَّصَوِيِّ إِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ تُخَالِفُ دَلِيْلًا يُوجِبُ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ بِهِ

وَأَكْبَرُ مِنَ الْفِسْقِ وَفِي الْمُحِيطِ الرَّصَوِيِّ إِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ تُخَالِفُ دَلِيْلًا يُوجِبُ الْعَمَلَ ظَاهِرًا فَهِي ضَلَالَةً وَلَيْسَتْ بِكُفْرٍ وَقَدِ

اعْتَمَدَ عَلَيهِ عَامَّةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجُمَاعَةِ وَمُخْتَارُ جُمْهُورٍ أَهْلِ السُّنَةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّينَ

عَدَمُ إِكْفَارٍ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ وَالْمُؤَوِّلَةِ فِي غَيْرِ الطَّرُورِيَّةِ لِكُونِ التَّأُويلِ شُبْهَةً

عَدَمُ إِكْفَارٍ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ وَالْمُؤَلِّةِ فِي غَيْرِ الطَّرُورِيَّةِ لِكُونِ التَّأُويلِ شُبْهَةً

وَالْوَاجِبَةُ مِنَ الْبِدْعَةِ نَظْمُ أَدِلَةِ الْمُتَكَلِّينَ لِلرَّةً عَلَى الْمُلَاحَدةِ وَالْمُبْتِدِعِينَ وَالْمَنْدُوبَةُ مِنْهُ الْبَعْمُ فِي أَلْوَانِ الْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالْمُبَاحَةُ مِنْهَا البَسْطُ فِي أَلْوَانِ الْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالْمُبَاحَةُ مِنْهَا الْبَسْطُ فِي أَلْوَانِ الْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالْمُبَاحَةُ مِنْهَا البَسْطُ فِي أَلْوَانِ الْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَالْمُبَاحَةُ مِنْهَا البَسْطُ فِي أَلْوَانِ الْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

Bid'ah adalah melakukan amal tanpa contoh yang mendahuluinya. Dalam kitab al-Qamus disebutkan: "(Bid'ah) adalah pembaruan dalam agama setelah penyempurnaannya, atau keinginan dan amal yang baru dibuat setelah masa Nabi Saw. Dikatakan, bahwa bid'ah yaitu

²⁷ Ayub bin Musa al-Husaini al-Kafawi, *Kitab al-Kiyat*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998), h. 234.

dosa yang lebih kecil dari kekufuran dan lebih besar dari kefasikan. Dalam kitab al-Muhith al-Radhawi disebutkan: "Sungguh setiap bid'ah yang bertentangan dengan dalil yang menetapkan suatu ilmu dan pengamalannya maka bid'ah tersebut adalah kekufuran, dan setiap bid'ah yang bertentangan dengan dalil yang secara jelas menetapkan suatu amal, maka bid'ah tersebut adalah kesesatan, namun bukan merupakan kekufuran. Ahlussunnah wal Jama'ah telah berpedoman pada kesimpulan keterangan tersebut, dan pendapat yang dipilih oleh mayoritas Ahlussunnah, yakni para ahli fiqh dan ahli kalam adalah tidak mengkafirkan para ahli kiblat yang melakukan bid'ah dan para ahli ta'wil dalam keadaan bukan darurat, karena ta'wil merupakan perkara yang samar. Sedangkan yang termasuk bid'ah wajibah yaitu menyusun dalil-dalil ahli kalam untuk menentang atheisme (mulahadah) dan ahli bid'ah. Yang termasuk bid'ah mandubah yaitu menulis ilmu, membangun madrasah, pesantren, dan semisalnya. Yang termasuk bid'ah mubahah yaitu memperbanyak aneka makanan dan lain sebagainya.

30. Relevansi Qanun Wadh'i (Hukum Positif) dan Hukum Syar'i

A. Diskripsi Masalah

Sebagai orang yang beragama, tentunya kita mengakui aturan-aturan yang ditetapkan oleh *shahib al-syari'ah*. Tetapi juga sebagai manusia yang berinteraksi dengan sesama, disamping juga sebagai warga negara tentunya ada aturan-aturan yang juga mengikat kita. Aturan-aturan dibuat oleh manusia itulah yang kemudian dikenal dengan istilah hukum positif (*al-qanun al-wadh'i*).

Seperti yang terjadi di negara kita, pemerintah telah memberlakukan hukum positif (al-qanun al-wadh'i) seperti diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Th.1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Th. 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan, Undang-Undang No. 41 Th. 2004 tentang Wakaf, dan Undang-Undang No. 23 Th. 2002 tentang Perlindungan Anak, dan undang-undang lainnya.

Dalam beberapa undang-undang tersebut, terdapat berbagai ketentuan yang berbeda dan bahkan bertolak belakang dengan hukum syar'i. Misalnya, dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan hanya dianggap sah apabila dicatatkan, talak hanya dinyatakan jatuh bila

diikrarkan di depan sidang pengadilan. Demikian pula di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Kewarisan, terdapat ketentuan mengenai anak angkat memperoleh hibah sebesar seperempat dari jumlah harta warisan, dan lain-lainnya.

Menghadapi kenyataan ini, masyarakat Islam berada dalam keraguan untuk menerima dan menerapkan berbagai ketentuan dalam *qanun* wadh'i yang berbeda atau bertentangan dengan hukum syar'i.

B. Pertanyaan

- 1. Bagaimanakah hubungan antara hukum syar'i dan qanun wadh'i?
- 2. Ketentuan manakah yang harus diambil ketika terdapat perbedaan antara hukum syar'i dan qanun wadh'i?

C. Jawaban

Posisi hukum positif di hadapan hukum syar'i terdapat beberapa kemungkinan:

- Hukum positif menetapkan sesuatu yang tidak diperoleh petunjuk nash al-Qur'an secara sharih (eksplisit), bahkan kadang-kadang sengaja didiamkan oleh syari', dan itu mengimplisit (menyirat)kan kreasi mengatur al-maskut 'anh (perkara yang tidak diatur oleh syara') oleh umat Muhammad Saw., maka hukum positif seperti ini bisa diterima dan diikuti, sesuai dengan penegasan Usman bin Affan Ra.
- 2. Hukum positif menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum syar'i, maka dalam posisi ini harus ditolak.
- 3. Apabila hukum positif menetapkan dan menganjurkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum syar'i, atau hukum positif menetapkan sesuatu yang ditetapkan hukum syar'i baik dalam perkara wajib atau mandub, maka wajib ditaati, sedang bila menetapkan sesuatu yang mubah, apabila bermanfaat bagi kepentingan umum maka juga wajib ditaati, tetapi kalau tidak bermanfaat untuk umum maka tidak wajib ditaati.

D. Dasar Penetapan

Aqwal al-Ulama

1. Syarh Sunan Abi Dawud²⁸

وَقَدْ بَيَّنَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﴿ عَفَّانَ ﴿ عَظْمَ مَنْ زِلَةِ السُّلْطَانِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى وُجُودِهِ مِنَ الْحَيْرِ الْمُومِنِينَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ﴿ عَظْمَ مَنْ زِلَةِ السُّلْطَانِ مَا الْحُيْرِ اللّهَ لَيزِعَ بِالسُّلْطَانِ مَا

²⁸ Abdul Muhsin al-'Ubbad, Syarh Sunan Abi Dawud, Juz I, h. 2.

لَا يَنِيُ بِالْقُرْآنِ لِأَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَرَى الْقَوَارِعَ وَالزَّوَاجِرَ وَمَعَ ذلِكَ لَا تُحَرِّكُ سَاكِنَّا فِي قَلْبِهِ وَلَا تُوَثِّرُ عَلَيْهِ وَلَكِنَّهُ يَخَافُ مِنْ سَلْطَةِ السُّلْطَانِ وَمِنْ بَطْشِ وَقُوَّةِ السُّلْطَانِ

Amir al-Mu'minin Utsman bin 'Affan Ra. telah menjelaskan keagungan derajat penguasa pemerintah dan kebajikan yang banyak muncul darinya, kemaslahatan yang diperoleh dan mafsadah yang terhindarkan -atas jasanya-, dalam pernyataannnya: "Sungguh Allah mencegah dengan perantara pemerintahan pada larangan yang tidak tercegah al-Qur'an." Sebab, sebagian orang itu membaca al-Qur'an dan melihat peringatan dan larangannya, seraya hal itu tidak bisa menggerakkan hati dan mempengaruhinya, akan tetapi ia takut pada kekuasaan, ketegasan dan kekuatan pemerintah.

2. Al-Asybah wa al-Nazha'ir²⁹

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ هذِهِ الْقَاعِدَةُ نَصَّ عَلَيْهَا الشَّافِعِيُّ وَقَالَ مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنْ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنْ الْيَتِيمِ قُلْت وَأَصْلُ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنْ الرَّعِيَّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِيِّ مِنْ الْيَتِيمِ قُلْت وَأَصْلُ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي سُنَنِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ عَمْرُ عَلَيْ إِنِّ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا عُمَرُ اللهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ إِنِ احْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ فَإِنْ اسْتَغْفَقْتُ

Tasharuf pemimpin atas rakyatnya terbatas pada kemaslahatan. Kaidah ini telah disebutkan secara jelas oleh al-Syafi'i, dan ia berkata: "Posisi pemimpin atas rakyatnya adalah seperti posisi wali terhadap anak yatim. Saya (al-Suyuthi) berkata: "Dasar kaidah ini hadits yang diriwayatkan Sa'id bin Manshur dalam kitab *Sunan*nya, ia berkata: "Abu al-Ahwash bercerita kepadaku, dari Abu Ishaq, dari al-Barra' bin 'Azib, ia berkata: "Umar Ra. Berkata: "Aku posisikan diriku atas harta Allah pada posisi wali anak yatim. Bila aku membutuhkan, maka aku pakai hartanya, bila berkecukupan maka ku kembalikan, lalu bila aku kaya, aku hindari -mengunakan hartanya-.

3. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari³⁰

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ

²⁹ Abdurrahman al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H), h. 121.

³⁰ Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1989), Juz XIII, h. 153-154.

بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ﴿)

قُولُهُ (فِيمَا أَحَبُّ وَكُرِهَ) فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرِّ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كُرِهَ قُولُهُ (مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيةٍ) هذَا يُقَيِّدُ مَا أُطْلِقَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْمَاضِيَينِ مِنَ الْأَمْرِ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَلَوْ لِجَبَشِيِّ وَمِنَ الصَّبْرِ عَلَى مَفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ قَوْلُهُ (فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةً) أَيْ لاَ يَجِبُ ذلِكَ بَلْ يَحُرُمُ عَلَى مَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى المُعْتِينَةِ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةً) أَيْ لاَ يَجِبُ ذلِكَ بَلْ يَحُرُمُ عَلَى مَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى اللهُ وَعِنْدَهُ وَعِنْدَهُ وَعِنْدَ الْبَرَّارِ المُعْتِينَاعِ وَفِي حَدِيثِ مُعَاذِ عِنْدَ أَحْمَدَ لاَ طَاعَةً لِمَنْ لَمْ يَطْعِ اللهَ وَعِنْدَهُ وَعِنْدَ الْبَرَّارِ فِي حَدِيثِ عَمْرَانَ بْنِ حَصِيْنٍ وَالْحُصَيِّمِ ابْنِ عُمْرَو الْغِفَارِيِّ لاَ طَاعَةً فِي مَعْصِيةِ اللهِ وَسَنَدُهُ قَوِيًّ وَفِي حَدِيثِ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالطَّبْرَانِيَّ لاَ طَاعَةً لِمَنْ عَصَى وَسَنَدُهُ قَوِيً وَفِي حَدِيثِ عُبَادَةً بِي السَّمْعِ وَسَنَدُهُ وَوَيْ وَفِي حَدِيثِ عُبَادَةً بِي السَّمْعِ وَسَنَدُهُ وَوَيْ وَيَ عَلَى وَلَكَ فَرَا الْمُعْمَى فِي هَذَا الْكُلَامِ عَلَى حَدِيثِ عُبَادَةً فِي الْأَمْرِ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ إِلّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا بِمَا يُغْنِي عَنْ إِعَادَتِهِ وَهُو فِي كِتَابِ الْفِتَنِ وَمُلَحِّسُهُ وَالطَّاعَةِ إِلّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا بِمَا يُغْنِي عَنْ إِعَادَتِهِ وَهُو فِي كِتَابِ الْفِتَنِ وَمُلَحِّسُهُ وَالْكُمْ وَمُنْ عَجَزَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ مِنْ قِلْكَ فَمَنْ قَوِيَ عَلَى ذلِكَ فَلَنَ وَلَكَ فَلَنَ قَلَى الْمُولِ وَمَنْ وَلَكَ فَمَنْ قَوِي عَلَى ذلِكَ فَرَادٍ وَمُو فِي كَتَابِ الْفَتَوالِ وَمَنْ وَلَكَ فَلَى الْمُ اللْهَ وَالْمُ وَمُنْ وَالْمُؤَالِقُ وَلَى الْمُولِ الْمُؤَالِقُ وَمِنْ وَلَاكُ فَلَا الْقَوْالِ وَلَاكُ فَمَنْ قَوْقِ عَلَى اللْهُ مَنْ قَلْهُ النَّوْلُ فَي ذَلِكَ فَالْ وَلَالَ الْمُعَالَقُ وَلِلْ عَلْمَ الْمُؤْمُ وَلَوْ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ وَالْعُلْمُ اللْمُولِ الْمُؤْمُ وَمُنْ عَجَزَو وَجَبَتْ عَلْهُ وَلِلْ الْمُؤْمُ وَلَا عُلْمُ اللْمُولِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولِ الْمُ

"Mendengar dan kepatuhan itu wajib bagi seorang muslim dalam hal yang ia sukai dan ia benci selama tidak diperintah dengan kemaksiatan. Oleh sebab itu, bila ia diperintah dengan kemaksiatan maka ia tidak boleh mendengarkan dan mematuhinya." (Muttafaq 'alaih dari Abdullah ra.)

Sabda Nabi Saw.: "Selama tidak diperintah dengan kemaksiatan." Hadits ini merupakan ketentuan yang membatasi kemutlakan dua hadits yang telah lewat tentang perintah mendengar dan mematuhi pemimpin meskipun berbangsa Etopia, ketentuan dari sabar atas ketidaknyamanan yang muncul dari seorang pimpinan, dan ancaman atas pembangkangan dari jama'ah (golongan Islam).

Sabda Nabi Saw.: "Oleh sebab itu, bila ia diperintah dengan kemaksiatan maka ia tidak boleh mendengarkan dan mematuhinya." maksudnya tidak diperbolehkan, bahkan haram mendengar dan mematuhinya, bagi orang yang mampu menolaknya. Dalam hadits Mu'adz riwayat Ahmad terdapat redaksi: "Tidak ada ketaatan kepada orang yang tidak taat kepada Allah." Dalam riwayat Ahmad dan al-Bazzar dari hadits 'Imran bin Hashin dan al-Hakam bin 'Umar al-Ghifari ada redaksi: "Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah Ta'ala.", dan sanad hadits ini kuat. Dalam hadits 'Ubadah bin al-Shamit yang riwayat Ahmad

dan al-Thabrani ada redaksi: "Tidak ada ketaatan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala." Pembahasan tema ini sudah disampaikan dalam penjelasan hadits 'Ubadah tentang perintah mendengarkan dan mematuhi -perintah pimpinan-, "Melainkan kalian lihat kekufuran yang nyata." yang tidak perlu diulang lagi, yaitu yang ada dalam Kitab al-Fitan (tentang beberapa fitnah). Kesimpulannya, menurut ijma' ulama, pemimpin pemerintah akan terpecat dari jabatannya dengan sebab kekufuran. Oleh sebab itu, setiap muslim wajib mengupayakan adanya pemerintahan. Maka orang yang mampu menyelenggarakannya akan mendapat pahala, orang menghianati negara akan mendapat dosa, dan orang yang lemah wajib hijrah (migrasi) dari daerah tersebut.

4. Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain31

Ketika seorang pemimpin pemerintahan memerintah perkara wajib, maka kewajiban itu makin kuat, bila memerintahkan perkara sunnah maka menjadi wajib, dan bila memerintahkan perkara mubah, maka bila di dalamnya terdapat kemaslahatan publik, maka wajib dipatuhi. Berbeda bila ia memerintahkan perkara haram, makruh atau perkara mubah yang tidak menngandung kemaslahatan publik, -maka tidak wajib dipatuhi-.

5. Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir³²

Ketahuilah, situasi pimpinan bila memerintahkan perkara mubah atau sunnah wajib dipatuhi itu bila perintahnya merupakan kemaslahatan publik.

31. Khitan Perempuan

A. Deskripsi Masalah

Dalam riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah

914

³¹ Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 112.

³² Muhammad 'Irfah al-Dasuqi, Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th.), Juz I, h. 407.

bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Ada lima macam yang termasuk fitrah, yaitu khitan, mencukur rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, menggunting kumis, memotong kuku dan mencabut bulu ketiak."

Hadits tersebut menunjukkan bahwa Islam adalah ajaran yang komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk hal-hal yang sepele yang menjadi naluri kebiasaan manusia.

Dalam konteks khitan, ulama sepakat bahwa laki-laki dianjurkan untuk berkhitan, karena secara logika bisa dipahami, khitan merupakan bagian dari kebersihan (thaharah). Tetapi tidak demikian bagi perempuan, banyak kalangan terutama tenaga medis yang melarang khitan bagi perempuan. Sementara itu sebagian kalangan berpendapat bahwa khitan bagi perempuan harus dilakukan. Oleh karenanya, masalah khitan bagi perempuan perlu mendapatkan kejelasan secara tuntas dan menyeluruh.

B. Pertanyaan

Bagimana penjelasan khitan bagi perempuan dalam sisi:

- 1. Dalil-dalil masru'iyahnya.
- Hikmahnya.
- Hukumnya.
- 4. Teknis dan waktu pelaksanaanya.

C. Jawaban

- 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan khitan bagi perempuan adalah:
 - a. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Usamah ra.:

"Sungguh Nabi Saw. pernah bersabda: "Khitan itu hukumnya sunnah bagi para lelaki dan kemuliaan bagi para perempuan." (HR. Ahmad dari Usamah, Thabrani dalam al-Mu'jam al-Kabir dari Syaddad bin Aus dan Ibn Abbas -radhiyallah 'anhum-)

Hadits tersebut berkwalitas hasan sebagaimana dinyatakan oleh al-Suyuthi dalam al-Jami' al-Shaghir. Sementara al-Baihaqi, al-Dzahabi, ibn Hajar dan al-'Iraqi berpendapat dha'if.

b. Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah pakar hadits di antaranya Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadits Abu Hurairah Ra. dari Rasulullah Saw., beliau bersabda:

"Fithrah itu ada lima, atau lima macam yang termasuk fitrah, yaitu khitan, mencukur rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis." (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, al-Darimi, Malik dan Ahmad)

Setiap hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim atau salah satunya dijamin shahih tanpa harus diteliti.

c. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Umu 'Athiyah al-Anshariyah:

"Dari Ummu 'Athiyah al-Anshariyah, sungguh di Madinah ada seorang perempuan yang akan berkhitan. Lalu Nabi Saw. bersabda kepadanya: "Jangan engkau habiskan dalam memotongnya, sebab sungguh hal itu lebih menguntungkan perempuan dan lebih menyenangkan suami." (HR. Abu Dawud)

Al-Khathabi berkata: "Dalam riwayat lain berupa:

"-Cukuplah- mencium aromanya dan jangan engkau habiskan."

Menurut satu pendapat, dalam hadits tersebut Nabi Saw. mengibaratkan memotong sedikit dengan mencium aroma dan memotong habis dengan berlebihan memotong. Artinya, potonglah sebagian -kulit- klitoris dan jangan engkau habiskan.

Sabda Nabi Saw.: "Jangan engkau habiskan." maknanya adalah janganlah kamu -wanita- berlebihan dalam berkhitan. Kata alnahk bermakna berlebihan dalam memukul, memotong dan mencela. Sedangkan kata al-isymam bermakna memotong sedikit dalam khitan perempuan.

Hadits tersebut *dha'if* sebagaimana dikatakan Abu Dawud, tetapi memiliki dua *syahid* yaitu hadits Anas dan hadits Ummu Aiman yang diriwayatkan Abu al-Syaikh dalam Kitab Aqiqah, dan hadits al-Dhahak bin Qais ra. yang diriwayatkan al-Baihaqi -sebagaimana dikatakan al-'Adzim Abadi pengarang kitab *Aun al-Ma'bud-*.

d. Hadits yang diriwayatkan Thabrani dan Hakim dari al-Dhahak bin Qais Ra.:

"Berkhitanlah kamu perempuan dan jangan engkau potong habis. Sebab khitan itu lebih menyegarkan muka dan lebih membuat nikmat bagi suami -saat bersetubuh-. (HR. Thabran dan Hakim)

Hadits tersebut shahih menurut al-Suyuthi dalam kitab al-Jami al-Shagir.

e. Hadits Abu Hurairah Ra.:

"Rasulullah Saw. bersabda: "Ibrahim As. dikhitan pada saat berusia delapan tahun, dengan alat tukang kayu." (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad dan Hakim)

Hadits tersebut diriwayatkan Bukhari dan Muslim, sehingga dipastikan *shahih*.

Begitu pula firman Allah Swt.;

"Katakan: "Benarlah Allah." Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik." (QS. Ali Imran: 95)

Hikmah anjuran khitan bagi perempuan bisa tertangkap dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ummu 'Athiyah al-Anshariyah:

"Dari Ummu 'Athiyah al-Anshariyah, sungguh di Madinah ada seorang perempuan yang akan khitan. Lalu Nabi Saw. bersabda padanya: "Jangan kamu habiskan dalam memotongnya, sebab sungguh itu lebih menguntungkan wanita dan lebih menyenangkan suami." (HR. Abu Dawud)

Hadits tersebut memberikan pengetian dua hal. Pertama, berkhitan bagi perempuan dianjurkan, dan ini bagian dari hadits taqriri,

mengingat Rasulullah Saw. tidak melarang tradisi orang Madinah, bahkan memberikan pengarahan cara melakukan khitan.

Kedua, Rasulullah Saw. melegitimasi khitan perempuan, padahal kekhawatiran beliau akan terjadinya malpraktek, sehingga akan menyebabkan frigid tampak jelas dalam hadits tersebut. Hal ini mengindikasikan hikmah dan manfaat dalam khitan lebih penting dibanding dengan kekhawatiran terjadinya malpraktek. Hanya saja, hikmah itu tidak terungkap jelas dalam hadits tersebut. Sebagian ulama mencoba mencari hikmah khitan bagi perempuan dengan mengatakan bahwa khitan menjadi kendali nafsu dan syahwat perempuan. Di samping itu, menurut Dr. al-Bar dalam paper yang dipresentasikan dalam al-Majma' al-Fiqhi pada Rabithah al-'Alam al-Islami disebutkan, hikmah khitan bagi perempuan sebagai berikut:

- a. Mengikuti syari'ah Allah Swt. dan sunnah Nabi Saw.
- b. Thaharah.
- c. Kebersihan yang dapat mencegah infeksi saluran kencing.
- d. Menstabilkan syahwat.
- e. Menetapkan pengganti yang sesuai untuk memerangi adat yang tidak sesuai dengan syari'ah dan mendatangkan dharar.
- f. Meninggikan syi'ar ibadah, bukan adat istiadat.
- g. Memelihara aspek sosial dan kejiwaan yang timbul akibat tidak melakukan khitan.
- 3. Teknis dan waktu pelaksanaan khitan perempuan.

Khitan perempuan dilakukan dengan cara menghilangkan sebagian kecil kulit ari yang menutupi klitoris, bukan membuangnya sama sekali. Bahkan Rasulullah Saw. justru mengingatkan agar tidak berlebihan dalam memotong, sebagaimana terungkap dalam hadits Ummu 'Athiyah al-Anshariyah di atas.

Adapun waktu khitan bagi perempuan yang paling baik adalah hari ketujuh dari kelahirannya. Ulama berbeda pendapat tentang penetapan hitungan hari ketujuh. Ada yang berpendapat hari pertama kelahiran dihitung satu hari, dan ini pendapat yang kuat, sementara itu, ada yang menganggap hari pertama tidak dihitung.

4. Hukum khitan perempuan.

Ulama berbeda pendapat tentang hukum khitan bagi perempuan, ada yang mengatakan sunnah, dan ada yang mengatakan mubah. Sedangkan menurut al-Syafi'i hukumnya wajib, seperti hukum khitan bagi laki-laki sebagaimana dikemukakan Imam Nawawi.

Pendapat yang melarang khitan perempuan sebetulnya tidak memiliki dalil syar'i, kecuali hanya sekedar melihat bahwa khitan perempuan adalah menyakitkan korban (perempuan). Sementara hadits yang menjelaskan khitan perempuan (hadits Abu Dawud) tidak menunjukkan taklif disamping juga keshahihannya diragukan. Padahal ada kaidah ushul yang menyatakan bahwa 'adam al-dalil lais bi dalil (tidak adanya dalil bukan merupakansuatu dalil).

Adapun pendapat yang mengatakan sunnah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

"Dari Abu al-Malih bin Usamah, dari Ayahnya: "Sungguh Nabi Saw. bersabda: "Khitan itu hukumnya sunnah bagi para lelaki dan kemuliaan bagi para perempuan." (HR. Ahmad)

Kata sunnah yang dikehendaki disini bukan berarti lawan kata wajib. Sebab kata sunnah apabila dipakai dalam sebuah hadits, maka tidak dimaksud sebagai lawan kata wajib. Namun lebih menunjukkan persoalan membedakan antara hukum laki-laki dan perempuan. Dengan begitu, arti kata sunnah dan kata makrumah dalam hadits tersebut maksudnya adalah laki-laki lebih dianjurkan berkhitan dibanding perempuan. Sehingga bisa jadi artinya adalah laki-laki sunnah berkhitan dan perempuan mubah. Atau wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Atau laki-laki dianjurkan mengumumkan khitannya, baik dalam walimah al-khitan atau undangan, sedangkan perempuan justru yang baik dirahasiakan, tidak perlu diekspose atau disebarluaskan.

D. Dasar Penetapan

Aqwal al-Ulama

1. Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari³³

³³ Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989), Juz X, h. 417-418.

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ خِتَانُهَا قَطْعُ جِلْدَةٍ تَكُونُ فِي أَعْلَى فَرْجِهَا فَوْقَ مَدْخَلِ الذَّكر كَالنَّوَاةِ أَوْ كَعُرُفِ الدِّيكِ وَالْوَاجِبُ قَطْعُ الْجِلْدَةِ الْمُسْتَعْلِيَّةِ مِنْهُ دُونَ اسْتِعْصَالِهِ وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِي ﷺ (لَا تَنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَزْأَةِ) وَقَالَ أَنَّهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ قُلْتُ وَلَهُ شَاهِدَانِ مِنْ حَدِيثِ أَنْسٍ وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ أَيْمَنَ ثُمَّ أَبِي الشَّيْخِ فِي كِتَابِ الْعَقِيقَةِ وَآخَرَ عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ قَيْسٍ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ قَالَ النَّوَوِيُّ وَيُسَمَّى خِتَانُ الرَّجُلِ إِعْذَارًا بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ وَخِتَانُ الْمَرْأَةِ خَفْضًا بِخَاءٍ وَضَادٍ مُعْجَمَتَيْنِ وَقَالَ أَبُو شَامَةَ كَلَامُ أَهْلِ اللُّغَةِ يَقْتَضِي تَسْمِيَّةَ الْكُلُّ إِعْذَارًا وَالْحَفْضُ يَخْتَصُ بِالْأُنثَى قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَذَرَتِ الْجَارِيَةُ وَالْغُلَامُ وَأَعْذَرْتُهُمَا خَتَنْتُهُمَا وَأَخْتَنْتُهُمَا وَزْنًا وَمَعْنَى قَالَ الْجُوْهَرِيُّ وَالْأَكْثَرُ خَفَضَتِ الْجَارِيَةُ قَالَ وَتَزْعُمُ الْعَرَبُ أَنَّ الْغُلَامَ إِذَا وُلِدَ فِي الْقَمَرِ فَسَخَتْ قُلْفَتُهُ أَي اتَّسَعَتْ فَصَارَ كَالْمَخْتُونِ وَقَدِ اسْتَحَبَّ الْعُلَمَاءُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ فِيمَنْ وُلِدَ تَحْتُونًا أَنْ يَمُرَّ بِالْمُوسَى عَلَى مَوْضِعِ الْخِتَانِ مِنْ غَيْرٍ قَطْعٍ قَالَ أَبُو شَامَةَ وَغَالِبُ مَنْ يُولَدُ كَذلِكَ لَا يَكُونُ خِتَانُهُ تَامًّا بَلْ يَظْهَرُ طَرَفُ الْحُتَشَفَةِ فَإِنْ كَانَ كَذلِكَ وَجَبَ تَكْمِيلُهُ وَأَفَادَ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ الْحَاجِّ فِي الْمَدْخَلِ أَنَّهُ الْخُتُلِفَ فِي النِّسَاءِ هَلْ يُخْفَضْنَ عُمُومًا أَوْ يُفْرَقُ بَيْنَ نِسَاءِ الْمَشْرِقِ فَيُخْفَضْنَ وَنِسَاءُ الْمَغْرِبِ فَلَا يُخْفَضْنَ لِعَدَمِ الْفَصْٰلَةِ الْمَشْرُوعِ قَطْعُهَا مِنْهُنَّ جِخِلَافِ نِسَاءِ الْمَشْرِقِ قَالَ فَمَنْ قَالَ أَنَّ مَنْ وُلِدَ مَخْتُونًا اسْتُحِبَّ إِمْرَارَ الْمُوسَى عَلَى الْمَوْضِعِ امْتِتَالًا لِلْأَمْرِ قَالَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ كَذلِكَ وَمَنْ لَا فَلَا وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوبِ الْخِتَانِ دُونَ بَاقِي الْخِصَالِ الْخَمْسِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ الشَّافِعِيُّ وَجُمْهُورِ أَصْحَابِهِ وَقَالَ بِهِ مِنَ الْقُدَمَاءِ عَطَاءُ حَتَّى قَالَ لَوْ أَسْلَمَ الْكَبِيرُ لَمْ يَتِمَّ إِسْلَامُهُ حَتَّى يَغْتِنَ وَعَنْ أَحْمَدَ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ يَجِبُ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةً وَاجِبُ وَلَيْسَ بِفَرْضٍ وَعَنْهُ سُنَّةً يَأْثُمُ بِتَرْكِهِ وَفِي وَجْهِ لِلشَّافِعِيَّةِ لَا يَجِبُ فِي حَقِّ النِّسَاءِ وَهُوَ الَّذِي أَوْرِدَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي

"Fithrah itu ada lima, atau lima macam yang termasuk fitrah, yaitu khitan, mencukur rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis." (HR. Bukhari, dari Abu Hurairah)

Al-Mawardi berkata: "Mengkhitan perempuan yaitu memotong

kulit yang ada di bagian atas vagina, yaitu tempat masuknya alat kelamin pria yang berbentuk seperti biji atau seperti jengger ayam jantan. Bagian yang wajib dipotong adalah kulit yang timbul ke atas, bukan memotongnya habis. Abu Dawud telah meriwayatkan hadits Ummu 'Athiyah: "Sungguh seorang perempuan akan berkhitan di Madinah, lalu Nabi Saw. bersabda padanya: "Jangan engkau potong habis, sebab hal itu lebih baik bagi seorang perempuan." Lalu Abu Dawud berkata: "Hadits itu bukan hadits kuat." Saya (Ibn Hajar al-'Asqalani) berpendapat, hadits itu punya dua syahid (penguat) dari hadits Anas dan hadits Ummu Aiman. Lalu dari hadits Abu al-Syaikh dalam Kitab al-'Aqiqah, hadits lain dari al-Dhahak bin Qais dalam riwayat al-Baihaqi. Al-Nawawi berkata: "Khitan laki-laki disebut dengan istilah i'dzar dengan dzal yang dititik satu, sementara khitan perempuan disebut khafzh dengan kha' dan zha' yang dititik satu. Sedangkan Abu Syamah menyatakan bahwa pendapat ahli bahasa memutuskan keduanya disebut i'dzar, dan khafzh dikhususkan bagi perempuan. Abu 'Ubaidah berkata: "Perempuan dan laki-laki beri'dzar (berkhitan). Saya mengi'dzar mereka berdua, maksudnya khatantuhuma (saya mengkhitan keduanya) dan akhtantuhuma (saya mengkhitan keduanya), dalam wazan dan maknanya. Al-Jauhari berkata: "Mayoritas diucapkan khafzhat al-jariyah (seorang perempuan berkhitan.)" Ia berkata: "Orang Arab menyangka bahwa seorang anak laki-laki ketika lahir pada saat muncul bintang qamar, qulfah (kulit ujung penis)nya melebar, sehingga seperti sudah dikhitan." Ulama Syafi'iyah menghukumi orang yang lahir dalam keadaan sudah terkhitan sunnah menjalankan pisau di bagian khitan tanpa memotongnya. Abu Syamah berkata: "Mayoritas anak yang lahir dalam keadaan begitu, khitannya tidak sempurna, hanya ujung penis yang terlihat. Bila begitu, maka ia wajib menyempurnakan khitannya. Dalam kitab al-Madkhal Syaikh Abu Abdillah bin al-Hajj menyampaikan, hukum khitan perempuan masih diperselisihkan. Apakah mereka semua dikhitan atau dibedakan antara perempuan timur dikhitan dan perempuan barat tidak, sebab tidak adanya sisa bagian yang disyariatkan dipotong di vagina mereka, berbeda dengan wanita timur. Ia berkata: "Ulama yang punya pendapat seorang anak laki-laki yang lahir dalam keadaan terkhitan sunnah menjalankan pisau di tempat khitannya karena mematuhi perintah syari'ah, berpendapat begitu pula bagi seorang anak perempuan. Dan ulama yang tidak berpendapat begitu, maka tidak menghukumi sunnah menjalankan pisau di tempat khitan seorang perempuan."

Al-Syafi'i dan mayoritas Ashhabnya berpendapat atas kewajiban khitan, bukan keempat fithrah lainnya yang disebutkan dalam hadits bab ini. Dari Ahmad dan sebagian ulama Malikiyah diriwayatkan menghukumi wajib. Dari Abu Hanifah menghukumi wajib namun bukan fardhu. Diriwayatkan pula darinya, hukum khitan itu sunnah yang berdosa bila ditinggalkan. Pada satu pendapat ashhab Syafi'iyah dinyatakan bahwa khitan tidak wajib bagi perempuan. Pendapat ini disampaikan -pula- oleh penulis kitab al-Mughni.

2. Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi34

الْفِطْرَةُ خَمْسٌ الحِتَانُ وَالاسْتِحْدَادُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ ٱلأَظْفَارِ وَنَتْفُ ٱلإِبطِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)

قُولُهُ (الْفِطْرَةُ خَمْسُ) ثُمَّ فَسَرَ ﷺ الْحَنْسَ فَقَالَ الْحِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَغَمْلُ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَدِ (عَمْرُ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَيةِ وَانْتِقَاصِ وَالسَّوَاكِ وَاسْتِنْشَاقِ الْمَاءِ وَقَصَّ الْآظْفَارِ وَغَمْلِ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَاثَةِ وَانْتِقَاصِ الْمَاءِ قَالَ مَصْعَبُ وَلَمِيتِ الْعَاشِرَةُ إِلَّا أَنْ تَصُونَ الْمَصْمَصَةُ) أَمَّا قُولُهُ وَلَا الْفِطرَةُ حَمْسُ الْمَاءِ قَالَ مَصْعَبُ وَلَيْسَتْ مُنْحَمِرةً فِي الْمَاءِ قَالَ وَعَمْ الْحَوْلَةِ الْأَخْرَى (عَشْرُ مِنَ الْفِطرَةِ وَلِيلْمَ مُنْفَعِرَةً فِي الْعَفْرَةِ وَاللهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا الْفِطرَةُ وَلَيْسَتْ مُنْحَمِرةً فِي الْمَرَادِ بِهَا هُنَا فَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْحُطَّائِيُّ ذَهَبَ أَكْثُرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنْهَا السُّنَةُ وَكَذَا الْعَنْمَةِ وَاللهُ السُّنَةُ وَكَذَا الْعُلْمَاءِ وَلَيْ بَعْضِهَا خِلَافُ مَعْمَا السُّنَةُ وَكَذَا الْعُلْمَاءِ وَلِي بَعْضِهَا خِلَافُ فِي وَجُوبِهِ فَيْ اللهِ وَاللهُ اللهُ تَعَالَى كُلُوا مِنْ فَيْرَا الْعُلَمَاءِ وَلَي بَعْضِهَا خِلَافُ فِي وَجُوبِهِ اللّهُ اللهُ
³⁴ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi, (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1392 H), Juz III, h. 147-148.

أَعْلَى الْفَرْجِ وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِنَا الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْخِتَانَ جَائِزُ فِي حَالِ الصَّغَرِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَنَا وَجْهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ أَنْ يَخْتِنَ الصَّغِيرَ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَوَجْهُ أَنَّهُ يَحُرُمُ خِتَانُهُ قَبْلَ عَشْرِ سِنِينَ وَإِذَا قُلْنَا بِالصَّحِيجِ اسْتُحِبَّ أَنْ يُخْتَنَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ مِنْ وِلَادَتِهِ وَهَلْ يُحْسَبُ يَوْمَ الْوِلَادَةِ مِنَ السَّبْعِ أَمْ تَكُونُ سَبْغَةُ سِوَاهُ فِيهِ وَجْهَانِ أَظْهَرُهُمُا يُحْسَبُ

"Fitrah itu ada lima macam, yaitu khitan, mencukur rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak." (HR. Muslim, dari Abu Hurairah ra.)

Sabda Nabi Saw.: "Fitrah itu ada lima macam." kemudian beliau menjelaskannya, beliau berkata: "Yaitu khitan, mencukur rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan, memotong kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis." Dan dalam hadits lain: "Sepuluh perkara termasuk fithrah, yaitu memotong kumis, memelihara jenggot, bersiwak, menghirup air ke hidung, memotong kuku, membasuh sendi-sendi, mencabut rambut ketiak, mencukut rambut sekitar kemaluan, dan memercikkan air pada kemaluan untuk menghilangkan was-was." Mash'ab berkata: "Yang kesepuluh telah terlupakan kecuali bila maksudnya adalah berkumur." Sedangkan sabda Nabi Saw.: "Fitrah itu ada lima macam." maknanya adalah lima perkara yang termasuk fitrah, seperti dalam riwayat lain, yaitu: "Sepuluh perkara yang termasuk fitrah." Sebenarnya macam fitrah itu tidak hanya sepuluh, dan Nabi Saw. telah menyinggungnya dengan sabda beliau: "Sepeluh perkara yang termasuk fitrah." Wallahu a'lam.

Sementara makna fitrah sendiri diperselisihkan. Abu Sulaiman al-Khaththabi berkata: "Mayoritas ulama berpendapat, makna fitrah adalah sunnah. Demikian disampaikan oleh sekelompok ulama selain al-Khaththabi. Mereka berkata: "Maksudnya, fitrah itu termasuk sunnah para nabi -shalawatullah 'alaihim wa al-salam-. Menurut satu pendapat fitrah diartikan sebagai ajaran agama. Lalu mayoritas fitrah di atas menurut ulama hukumnya tidak wajib. Sebagiannya diperselisihkan hukum wajibnya, seperti khitan, berkumur dan menghirup air ke hidung. Dan bisa saja perkara wajib disebut bersama dengan perkara sunnah, seperti firman Allah Swt.: "Kalian makanlah buahnya ketika berbuah, dan berikan haknya saat hari panennya." Memberikan hak (zakat) hukumnya wajib, dan hukum memakannya tidak wajib. Wallahu a'lam.

Adapun perincian hukumnya, maka khitan wajib menurut Imam Syafi'i dan ulama banyak. Sunnah menurut Malik dan mayoritas ulama. Menurut al-Syafi'i wajib khitan itu bagi semua laki-laki dan perempuan. Kemudian yang wajib bagi laki-laki adalah memotong semua kulit yang menutup khasyafah (ujung penis) sehingga terlihat semuanya, sementara bagi wanita adalah memotong sebagian kecil kulit yang berada di vagina bagian atas. Pendapat al-Shahih dalam madzhab kita yang disetujui mayoritas ulama Syafi'iyah menyatakan, khitan itu boleh dilakukan semasa kecil, dan tidak wajib. Kita juga mempunyai satu pendapat Ashhab yang menyatakan khitan itu wajib atas wali, yakni mengkhitan anak kecilnya sebelum mencapai usia baligh. Terdapat pula pendapat Ashhab yang mengharamkan khitan sebelum mencapai usia 10 tahun. Ketika kita memutuskan dengan pendapat al-shahih, maka disunnahkan mengkhitan pada hari ketujuh dari kelahiran. Adakah hari kelahiran dihitung menjadi bagian dari tujuh hari itu? atau tanpa menghitung hari kelahiran? Dalam masalah ini ada dua pendapat Ashhab. Pendapat yang kuat adalah menghitung hari kelahiran menjadi bagian tujuh hari tersebut.

3. Khitan al-Inats 35

قَدِمَ الدُّكْتُورُ الْبَارُ إِلَى الْمَجْمَعِ الْفِقْهِيِّ بِرَابِطَةِ الْعَالَمِ الْإِسْلَامِيِّ بِمَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ بَحْثًا جَاءَ فِيهِ إِنَّ خِتَانَ الْأُنْثَى أَوْ خِفْضَهَا الَّذِي وَرَدَ فِي السُّنَّةِ لَهُ تَحَاسِنُ كَثِيرَةُ ذَكَرَهَا الْبَاحِثُونَ فِي الْمُؤْتَمَرِ الطَّبِّيَّةِ الْمُعَاصِرَةِ - الْبَاحِثُونَ فِي الْمُؤْتَمَرِ الطَّبِيِّةِ الْمُعَاصِرَةِ - هذه الْفَوَائِدُ يُمْكِنُ أَنْ تُلَخَّصَ فِي:

- ذِهَابِ الْغُلْمَةِ وَالشَّبَقِ (وَتُعْنَى شِدَّهُ الشَّهْوَةِ وَالانْشِغَالِ بِهَا وَالْإِفْرَاطِ فِيهَا) وَذِهَابُهُمَا يُعْنَى تَعْدِيلُ الشَّهْوَةِ عِنْدَ الْمَخْتُونِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- مَنْعُ الرَّوَاثِحِ الْكَرِيهَةِ النَّاتِجَةِ عَنْ تَرَاكُمِ اللَّخْنِ تَحْتَ الْقُلْفَةِ

- الْخِفَاضُ مُعَدِّلِ الْتِهَابَاتِ الْمَجَارِي الْبَوْلِيَّةِ

- الْخِفَاضُ مُعَدِّلِ الْتِهَابَاتِ الْمَجَارِي التَّنَاسُلِيَّةِ

بِهِذَا يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ إِنَّ فَوَائِدَ الْخِتَانِ الشَّرْعِيِّ هِيَ:

١. تَثْبِيتُ شَرْعِ اللهِ وَسُنَّةِ الْمُصْطَفَى ﷺ

٢. الطَّهَارَةُ

³⁵ Abdul Hafidz al-Shawi, Khitan al-Inats, (Mesir: Dar al-Kalimah, 2007), h. 55.

٣. التَّظَافَةُ الَّتِي تُؤدِّي إِلَى اخْفِفَاضٍ فِي مَعْدِلِ الْتِهَابَاتِ الْبَوْلِيَّةِ وَالتَّنَاسُلِيَّةِ
 ٤. تَحْسِينُ الْخُلُقِ حَتَّى يَكُونَ الْخُلْقُ عَلَى الْفِطْرَةِ الْحَنِيفِيَّةِ

ه. تَعْدِيلُ الشَّهْوَةِ

٦. تَثْبِيتُ الْبَدِيلِ الْمُنَاسِبِ لِمُحَارَبَةِ الْعَادَةِ غَيْرِ الشَّرْعِيَّةِ وَالضَّارَّةِ

٧. إِعْلَاءُ شَغِيرَةِ الْعِبَادَةِ لَا الْعَادَةِ

٨. مُرَاعَاةُ النَّوَاحِي الاجْتِمَاعِيَّةِ وَالتَّفْسِيَّةِ النَّاتِجَةُ عَنِ التَّخَلِّ الْمُطْلَقِ عَنِ الْخِتَانِ

Pada al-Majma' al-Fighi dalam forum Rabitah al-Alam al-Islami di Makkah al-Mukarramah, Doktor al-Bar menyampaikan makalah yang di dalamnya terdapat redaksi: "Sungguh khitan perempuan atau khafzhnya yang telah dijelaskan hadits Nabi Saw., mempunyai banyak faedah yang pernah disampaikan para pengkaji Konggres Medis Islam. -Dari syari'ah dan hasil penelitian kedokteran modern-, faedah-faedah khitan perempuan itu bisa disederhanakan sebagai berikut: (1) Mengurangi syahwat dan libido. Maksudnya kekuatan, ajakan dan gejolak syahwat akan berkurang. Berkurangnya syahwat dan libido tersebut akan membuat stabil syahwat laki-laki dan perempuan yang berkhitan. (2) Mencegah bau tidak sedap dari tumpukan kotoran di balik qulfah (kulit yang dikelupas saat khitan). (3) Menghambat serangan radang saluran kencing. (4) Menghambat serangan radang saluran sperma. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa faedah ajaran khitan meliputi: (1) Melestarikan syari'ah Allah dan sunnah Nabi Muhammad Saw. (2) Kesucian. (3) Kebersihan yang bisa menghambat serangan radang saluran kencing dan radang saluran sperma. (4) Memperbaiki budi pekerti, sehingga kesantunan fitrah manusia terjaga. (5) Menstabilkan syahwat. (6) Melestarikan -ajaran Islam- sebagai pengganti dari serangan adat istiadat yang tidak sesuai dengan syari'ah dan membahayakan. (7) Meninggikan syi'ar Ibadah, bukan adat. (8) Menjaga intregitas masyarakat dan manusia yang muncul dari tidak berlakunya khitan secara mutlak.

4. Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab36

أَمَّا خِتَانُ الْمَرْأَةِ فَاعْلَمْ أَنَّ مَدْخَلَ الذَّكَرِ هُوَ مَخْرَجُ الْحَيْضِ وَالْوَلَدِ وَالْمَنِيِّ وَفَوْقَ

³⁶ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Juz II, h. 149.

مَدْخَلِ الذَّكْرِ ثَقْبٌ مِثْلُ إِخْلِيلِ الرَّجُلِ هُوَ مَخْرَجُ الْبَوْلِ وَبَيْنَ هَذَا الثَّقْبِ وَمَدْخَل الذَّكَرِ جِلْدَةً رَقِيقَةً وَفَوْقَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ جِلْدَةً رَقِيقَةً مِثْلُ وَرَقَةٍ بَيْنَ الشَّفْرَيْنِ وَالشَّفْرَانِ تُحِيطَانِ بِالْجَمِيعِ فَتِلْكَ الْجِلْدَةُ الرَّقِيقَةُ يُقْطَعُ مِنْهَا فِي الْخِتَانِ وَهِيَ خِتَانُ الْمَرْأَة

Sedangkan khitan perempuan, maka ketahuilah, bahwa tempat masuknya penis adalah tempat keluarnya haidh, anak dan mani. Di atas (bagian vagina) yang menjadi tempat masuknya penis terdapat lubang seperti lubang alat kelamin pria yang menjadi saluran kencing perempuan. Di antara saluran kencing dan tempat masuknya penis tersebut terdapat kulit tipis. Di atas saluran kencing perempuan itu terdapat kulit tipis seperti daun yang terletak di antara dua bibir vagina. Dua bibir vagina tersebut menutupi semua bagian-bagian tersebut. Kulit tipis di atas saluran kencing itulah yang sebagiannya dipotong saat khitan. Dan itulah khitan perempuan.37

5. Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq38

وَخِتَانُ الْمَرْأَةِ مَوْضِعُ قَطْعِ جِلْدَةٍ مِنْهَا كَعُرْفِ الدِّيكِ فَوْقَ الْفَرْجِ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَدْخَلَ الذَّكرِ هُوَ مَخْرَجُ الْمَنِيِّ وَالْوَلَدِ وَالْحَيْضِ وَفَوْقَ مَدْخَلِ الذَّكْرِ مَخْرَجُ الْبَوْلِ كَإِحْلِيلِ الرَّجُلِ وَبَيْنَهُمَا جِلْدَةُ رَقِيقَةً يُقْطَعُ مِنْهَا فِي الْجِتَانِ فَحَصَلَ أَنَّ خِتَانَ الْمَرْأَةِ مُتَسَفِّلٌ تَحْتَ تَخْرَجِ الْبَرْلِ وَتَحْتَ مَخْرَجِ الْبَوْلِ مَدْخَلُ الذَّكُرِ فَإِذَا غَابَتْ الْحُشَفَةُ فِي الْفَرْجِ فَقَدْ حَاذَى خِتَانُهُ خِتَانَهَا

Khitan perempuan yaitu tempat pemotongan kulitnya yang seperti jengger ayam jantan di bagian atas vagina. Hal demikian mengingat tempat masuknya penis merupakan tempat keluarnya mani, anak dan haid. Di atas tempat masuknya penis terdapat saluran kencing seperti lubang alat kelamin pria, dan di antara keduanya terdapat kulit tipis yang sebagiannya dipotong dalam pengkhitanan. Maka dapat di simpulkan bahwa khitan perempuan itu adalah kulit tipis bagian bawah yang terletak di bawah saluran kencing. Di bawah saluran kencing terdapat tempat masuknya penis. Oleh sebab itu bila penis dimasukkan ke vagina, maka khitan laki-laki (ujung penis)

38 Zain bin Ibrahim, Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daga'iq, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. th.), Juz I, h. 61.

³⁷ Demikian khitan perempuan menurut Imam al-Nawawi. Berbeda dengan Zain bin Ibrahim atau yang terkenal dengan julukan Ibn Najim dari madzhab Hanafiyah. Dalam kitab Bahr al-Ra'iq beliau menyatakan, khitan perempuan adalah kulit tipis yang terdapat di antara saluran kencing dan tempat masuknya penis. (Pen.)

akan sejajar dengan khitan perempuan.

6. Syarh Zad al-Mustaqni'39

فَشُرِعُ هَذَا الْحِتَانِ طَهَارَةً لِلرَّجُلِ وَكَذَلِكَ تَخْفِيفًا مِنَ الشَّهُوَةِ فِي الْمَرْأَةِ فَإِنَّ الْمَرْأَةِ إِذَا ثُوكَتْ عَلَى حَالِهَا اشْتَدَّتْ شَهُوتُهَا وَلِذَلِكَ كَمَا ذَكْرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ يُوجَدُ فِي نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُوجَدُ فِي نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُوجَدُ فِي نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُوجَدُ فِي نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَجَعَلَ اللهِ فِي الْحِتَانِ مَصْلَحَةَ الدِّينِ وَالدُّنْيَا فَلِذَلِكَ يَحْصُلُ بِهِ الْعِقَّةُ وَذَلِكَ لِمَحَلِّ الْمَرْأَةِ وَالطَّهَارَةُ لِلرَّجُلِ وَلِذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا اجْتَثَتْ هذِهِ الْمِقَةُ لِلْمَرْأَةِ وَالطَّهَارَةُ لِلرَّجُلِ وَلِذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا اجْتَثَتْ هذِهِ الْمِقَةُ لِلْمَرْأَةِ وَالطَّهَارَةُ لِلرَّجُلِ وَلِذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا اجْتَثَتْ هذِهِ الْمِقَةُ لِلْمَرْأَةِ وَالطَّهَارَةُ لِلرَّجُلِ وَلِذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا اجْتَثَتْ هذِهِ الْمِعْمُ لِهِ الْعِقَةُ لِلْمَرْأَةِ وَالطَّهَارَةُ لِلرَّجُلِ وَلِذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا اجْتَثَتْ هذِهِ الْمُعَلِّةِ وَالرَّالِيةِ الْإِمْامُ ابْنُ الْقَيِّمِ الْمُنَاةُ وَلَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَوْلَ الْمَرْأَةِ وَالطَّهَارَةُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الشَّيْعِ وَالْمُونَةُ إِلَا لِمُعَلِي وَهُو حَدِيثُ مُتَكُم وَلَا اللَّهُ هِ وَلَا الللهِ اللْمُ اللهُ الل

Maka khitan ini disyari'ahkan agar menyucikan laki-laki seperti halnya agar meredam syahwat perempuan. Sebab, bila seorang perempuan dibiarkan tanpa khitan maka syahwatnya akan bergejolak. Oleh sebab itu, sebagaimana diterangkan oleh Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah -rahmatullah 'alaih-, ia berkata: "Karena syahwat yang besar, dari perempuan-perempuan non muslim sering muncul kerusakan dan keharaman yang tidak muncul dari perempuan muslimah. Hal itu disebabkan tempat khitannya -tidak dipotong-. Dalam khitan, Allah telah menciptakan kemaslahatan agama dan dunia. Oleh sebab itu, dengan khitan diperoleh 'iffah (mampu menjaga diri dari keharaman) bagi seorang perempuan dan seorang laki-laki. Selain diperoleh 'iffah bagi seorang perempuan dan diperoleh -pula- kesucian bagi seorang laki-laki. Karenanya, bila kulit khitan perempuan ini dipotong habis, maka syahwatnya akan sirna seperti pendapat para dokter dan ahli hikmah kuno dan modern. Bila dibiarkan tanpa khitan, maka syahwat perempuan akan menjadi besar. Karenanya, dalam hadits Ibn 'Athiyah

³⁹ Al-Syanqithi, Sayrh Zad al-Mustaqni', Juz I, h. 123.

seperti yang disinggung oleh Ibn Qayyim dalam kitab al-Tuhfah, ada penjelasan: "-Dalam khitan perempuan- cukuplah memotong kulit khitannya sedikit dan jangan kamu habiskan." Maksud kata: "Cukuplah memotong kulit khitannya sedikit." adalah memotong pada bagian atasnya, dan maksud kata jangan kamu habiskan." adalah memotong dari pangkalnya. Memang sanad hadits tersebut masih diperbincangan (mutakallam fi sanadih), namun keabsahan subtansinya telah diakui para ulama, yaitu seorang wanita agar tidak memotong semua kulit khitan dan menghabiskannya, sebab bisa membunuh dan menghilangkan syahwatnya. Begitu pula jangan sampai alat kelaminnya dibiarkan tanpa khitan. Oleh sebab itu, Allah berlakukan khitan bagi perempuan, sebab hikmahnya yang dapat menstabilkan syahwat.

Makassar, 26 Maret 2010

PIMPINAN SIDANG KOMISI BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH AL-MAUDHU'IYYAH

Ketua

Ketua

ttd

ttd

KH. Dr. M. Masyhuri Na'im, M.A. KH. Dr. Maghfur Usman, M.A.

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

KH. Afifuddin Muhajir

KH. Arwani Faishal

Tim Perumus

Ketua, merangkap Anggota : KH. Dr. M. Masyhuri Na'im, M.A Sekretaris, merangkap Anggota : KH. Arwani Faishal

Anggota

1. KH. Romadlon Chotib, MA. (PBNU)

KH. Muhibbul Aman Aly
 Abdul Jalil, M.E.I
 (PWNU JATIM)
 (PWNU JATENG)

KH. Imam Syuhada' (PBNU)
 Muhammad Harfin Zuhdi, MA. (PBNU)

6. Mahbub Ma'afi Ramdlan (PBNU)7. DR. H. Fuad Tohari (PBNU)

8. KH. Zainuddin Abdullah (PWNU BANTEN)

9. DR. H. Rumadi (PBNU) 10. DR. H. Faizah Ali Sibramalisi (PBNU)

11. Dra. H. Fauziah Masyhari, M.Pd.I. (PP. FATAYAT NU)[]

BAHTSUL MASAIL AL-DINIYYAH AL-QANUNIYYAH

KEPUTUSAN KOMISI BAHTSUL MASAIL AD-DINIYYAH AL- QANUNIYYAH MUNAS ALIM ULAMA & KONBES NU Di Asrama Haji Sukolilo Surabaya Tanggal 27 – 30 Juli 2006

- 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang YAYASAN
- 2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
 - 3. Ruu Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
- 4. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NOMOR: 03/MUNAS/VII/2006 TENTANG BAHTSUL MASA'IL DINIYYAH QANUNIYYAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA

Menimbang

: a.

- Bahwa menjadi tugas Muktamar sebagai instansi tertinggi dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk membahas masalahmasalah yang berkembang di masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat agar dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;
- Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Perkumpulan atau Jam'iyyah Diniyyah Islamiyyah yang bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat dan berbagai bidang yang mengarah kepada terbentuknya khaira ummah, perlu secara terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas khidmahnya dengan berdasarkan ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat;
- Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, Musyawarah Nasional perlu menetapkan Hasil Bahtsul Masail Diniyyah Qanuniyyah;

Mengingat

- Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor : a. 002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas Alim Ulama Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926;
 - Keputusan Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama Nomor: 137a/A.II.3/7/2006 tentang Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional Pasal 8 dan pasal 5 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama.

- Memperhatikan: a. Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama tanggal tanggal 3 Rajab 1427 H/28 Juli 2006 M;
 - b. Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi Qanuniyyah yang disampaikan pada Sidang Pleno Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada tanggal 2-5 Rajab 1427 H/27-30 Juli 2006 M;
 - c. Ittifak Sidang Pleno Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada tanggal 2-5 Rajab 1427 H/27-30 Juli 2006 M;

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridla Allah Swt.:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA TENTANG BAHTSUL MASAIL

DINIYYAH QANUNIYYAH;

Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh keputusan Pasal 1

ini terdapat dalam naskah hasil-hasil bahtsul masail diniyah ganuniyyah sebagai pedoman dalam memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah, menurut salah satu madzhab empat dan mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis, dan berkeadilan demi kesejahteraan

ummat.

Pasal 2 Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk

> menindaklanjuti menyampaikan rekomendasi keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama kepada DPR c.q Komisi yang membidangi proses legislasi UU dan kepada pemerintah (Menteri HUKUM dan HAM) dan pihak-

pihak yang terkait.

Ditetapkan di : Surabaya.

: 5 Rajab 1427 H/30 Juli 2006 M. Pada tanggal

MUSYAWARAH NASIONAL ALIM ULAMA NAHDLATUL ULAMA

PIMPINAN SIDANG PLENO

ttd

ttd

KH. A. Hafizh Utsman Ketua

Drs. Masrur Ainun Najih Sekretaris

1. Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Latar Belakang

- 1. Dasar pertimbangan perubahan Undang-Undang no. 16 Tahun 2010 tentang Yayasan adalah bahwa Undang-Undang tersebut belum menampung sebuah kebutuhan perkembangan hukum dalam masyarakat serta masih terdapat beberapa subtansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran.
- 2. Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2010 tentang Yayasan dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang baru kepada masyarakat mengenai Yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Permasalahan

- Pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan belum menampung beberapa kebutuhan dan perkembangan hukum serta kenyataan yang ada dalam masyarakat, antara lain ketentuan pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan undang-undang ini dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus dan Pegawas.
 - b. Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan dalam anggaran dari yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah atau honorarium dalam hal Pengurus Yayasan:
 - Bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas, dan
 - ii. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
- 2. Undang-Undang ini tidak mengatur tentang bagaimana jika lembaga pendidikan pesantren yang sudah ada sebelumnya, yang karena kebutuhan regulasi mengharuskan pesantren tersebut dalam bentuk yayasan, sehingga dibuat (kemudian) Yayasan yang membawahi

Pesantren tersebut.

3. Bagaimana jika pengurus yayasan itu dikelola secara profesional oleh orang-orang profesional tetapi orang yang bersangkutan punya afiliasi dengan Pendiri atau Dewan Pembina dari Yayasan tersebut? Permasalahan ini penting, mengingat Pesantren pada umumnya dikelola oleh Yayasan yang pengurusnya ada hubungan afiliasi baik perkawinan, atau keturunan, baik secara horisontal maupun vertikal

dengan para Pendiri Yayasan itu.

Rekomendasi

- 1. Perlu adanya peraturan pelaksanaan undang-undang tentang Yayasan yang mengatur secara khusus tentang Badan Hukum Pondok Pesantren;
- Bagi lembaga pendidikan Pondok Pesantren wakaf, maka bentuk badan hukumnya menyesuaikan dengan badan wakaf sesuai dengan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

2. Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Latar Belakang

Perubahan penting dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 adalah menyangkut kewenangan. Dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a) Perkawinan
- b) Waris
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaff) Zakat
- g) Infaq
- h) Shadaqah
- i) Ekonomi Syariah

Ekonomi syari'ah mencakup perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, gadai syari'ah, resakdana syari'ah, dana pensiun syari'ah dan dapat

berkembang lebih luas sesuai lingkup ekonomi syari'ah.

Permasalahan

Dengan adanya perluasan yurisdiksi Pengadilan Agama dalam Undang-Undang ini, sejauh manakah kesiapan dan kemampuan para Hakim Pengadilan Agama itu sendiri terhadap tugas baru tersebut, mengingat selama ini para Hakim Agama hanya mengadili sengketa yang berkaitan dengan hukum perkawinan, waris, wasiat, wakaf, infaq, shadaqah dan belum familier dengan ekonomi syariah itu sendiri.

Rekomendasi

- 1. Perlu adanya hukum materiil ekonomi syari'ah melalui kodifikasi atau kompilasi hukum Islam, yang antara memuat perihal:
 - a. Badan usaha berstandar ekonomi syari'ah harus menjamin sistem aqad (transaksi) yang bebas dari profit riba, unsur gharar (spekulasi), insentif ju'alah (iming-iming hadiah) sebagai selubung kemasan gambling (judi) dan menerapkan etika moralitas bisnis Islam;
 - b. Sebagai antisipasi terhadap bencana alam, kematian nasabah atau musibah krisis ekonomi lokal, perlu diimbangi dengan pengaturan shulhu ibra', kafalah muthawa'ah (sukarela tanpa jaminan sepihak), dhaman ijtima'i (penanggungan beban kolektif);
 - c. Menuju pola penyerapan nilai-nilai ekonomi syari'ah, perlu dilakukan studi banding pengganunan elaborasi hukum ekonomi Islam pada negara-negara Islam yang telah berpengalaman menerapkan sistem hukum ekonomi syari'ah;
- 2. Meningkatkan kualiatas sumber daya manusia (SDM) Hakim Peradilan Agama sesuai dengan perkembangan Undang-Undang Peradilan Agama termasuk di dalamnya pendidikan tinggi dengan konsentrasi ekonomi syari'ah.
- 3. PBNU melakukan kerja sama dengan Mahkamah Agung dalam pelatihan Hukum Agama, khusus menyangkut peningkatan kemampuan pengetahuan dan ketrampilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa/perkara ekonomi syari'ah.

3. RUU Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang NARKOTIKA

Latar Belakang

1. Kejahatan narkoba telah bersifat transnasional dengan menggunakan modus operasi yang tinggi dengan menggunakan teknologi canggih,

- telah banyak menelan korban di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
- 2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menaggulangi kejahatan tersebut.
- 3. Melindungi jiwa (hifz al-ruh), akal (hifz 'aql), keturunan (hifz al-nasab), harta (hifz al-mal) merupakan ruh pembinaan hukum dalam ajaran Islam.

Permasalahan

Meski narkotika dalam satu sisi merupakan obat atau bahan yang sangat bermanfaat di bidang kesehatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun pada kenyataannya narkotika lebih dikenal sebagai komoditi yang diperdagangkan secara gelap, yang menimbulkan korban-korban utamanya generasi muda yang menderita ketergantungan. Jika realitas yang ada ini dibiarkan, maka akan menimbulkan bahaya lebih besar lagi bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa serta ketahanan nasional.

Beberapa realitas yang merupakan permasalahan bangsa, yang terjadi akibat peredaran gelap narkotika adalah:

- Begitu intens dan meluasnya peredaran narkotika, yang secara disadari atau tidak dilakukan oleh generasi muda kita, peredaran itu sudah memasuki wilayah unit generasi terkecil yaitu usia anakanak di sekolah dasar.
- 2. Indonesia yang dulu hanya menjadi wilayah transit dari peredaran gelap narkotika, kini selain menjadi daerah tujuan peredaran juga telah menjadi produsen narkotika terbesar ketiga dunia.
- 3. Kejahatan narkotika ini tidak lagi dilakukan secara perorangan, melainkan telah melibatkan banyak orang, bahkan merupakan sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.

Rekomendasi

Bertitik tolak dari beberapa permasalahan di atas, dalam rangka perubahan dan pembaharuan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

 Perlu adanya peningkatan program preventive yang diatur dalam UU yang baru, dalam pengertian pengaturan yang lebih ketat dalam hal pengadaan, peredaran, penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 2. Perlu adanya peningkatan upaya *repressive* bagi pelaku tindak kejahatan dalam produksi, pengolahan, peredaran narkotika, termasuk di dalamnya peningkatan ancaman hukuman pidana baik dalam bentuk pidana minimal khusus dan maksimal khusus (hukuman mati) maupun peningkatan pidana denda;
- 3. Perlu adanya pengaturan yang memberi ruang dan apresiasi kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam rangka mencegah peredaran gelap narkotika, dan rehabilitasi korban narkotika;
- Dalam rangka koordinasi pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika diperlukan;
 - a. Badan Narkotika Nasional yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
 - b. Badan Narkotika Daerah Propinsi yang bertanggungjawab kepada Gubernur.
 - c. Badan Narkotika Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.
- 5. Perlu adaanya aturan pengawasan terhadap penyitaan dan pemusnahan narkoba dalam konteks penegakan hukum.
- 6. Pemerintah perlu mendukung upaya pengobatan atau melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika melalui pendekatan keagamaan dan tradisional yang diselenggarakan masyarakat termasuk pesantren.

4. RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang KESEHATAN

Latar belakang

- Pelayanan kesehatan merupakan hak rakyat dan Negara bertanggungjawab menyediakan fasilitas kesehatan. Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak masyarakat tersebut dengan cara ketersediaan, keterjangkauan dapat diterima masyarakat dan bermutu bagi pelayanan kesehatan masyarakat.
- 2. Perkembangan teknologi kedokteran terus berkembang pesat baik dari sisi alat maupun teknik intervensi. Berbagai konsep dan metode ilmiah modern waktu lalu sudah tidak relevan lagi dan perlu disesuaikan. Namun tetap memperhatikan lingkungan sosial, budaya dan tidak bertentangan dengan prinsip agama, budaya dan moral yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

Permasalahan

Dalam RUU tentang Kesehatan sebagai pengganti UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan terdapat beberapa hal yang kurang sejalan dengan landasan filosofis bangsa yang berketuhanan dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma agama, antara lain:

- 1. Pengguguran kandungan (aborsi) yang diatur terlalu longgar,
- 2. Ketentuan Pasal dalam UU No. 23 tahun 1992, yang mengatur secara tegas dan sudah sangat sejalan dengan ketentuan agama (syar'i) tidak dimuat lagi dan tidak diatur seperti mengenai tranfusi darah, kehamilan di luar cara alami atau bayi tabung, transplantasi organ tubuh manusia (pasal 34), dan bedah mayat (pasal 30).

Rekomendasi

- 1. Agar subtansi Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan tetap berlandaskan kepada landasan filosofi bangsa yang menghormati nilai budaya dan agama.
- 2. Ketentuan yang ada dalam UU Nomor 23 tahun 1992 yang telah mengatur dan telah diterima dan dilaksanakan selama ini menyangkut aborsi, transfusi darah, bayi tabung, transplantasi organ tubuh manusia dan bedah mayat dimasukkan secara utuh kembali dalam materi muatan RUU tentang kesehatan.

PIMPINAN SIDANG PLENO KOMISI BAHTSUL MASAIL AL-DINIYAH AL-QANUNIYYAH

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

Drs. KH. Hasyim Abbas	. M.Hi
-----------------------	--------

DR. Wahidudin Adam, SH.

TIM PERUMUS

1. Drs. KH. Hasyim Abbas, M.Hi	
--------------------------------	--

2. DR. H. Wahidudin Adam, SH

3. Drs. M. Bashori, M.Si

4. H. Abdul Fickar Hadjar, SH., MH

5. H. M. Nadjib Hassan

6. DR. Miftahul Huda, MA

(Ketua)

(Wakil Ketua)

(Sekretaris)

(Anggota)

(Anggota)

(Anggota)

HASIL KEPUTUSAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA KE-XXXII Di Asrama Haji Sudiang Makassar Tanggal 7-11 Rabi'ul Akhir 1431 H/ 22 – 27 Maret 2010 M Tentang: MASAIL AL-DINIYYAH AL-OANUNIYYAH

- 5. Qawaid al-Taqnin Nahdlatul Ulama
 6. Usulan RUU Perlindungan Kehidupan Beragama
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
- 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 9. Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat
 - 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Bidang Politik
- 11. Perlu Segeranya Peraturan Pemerintah Tentang Pornografi
- 12. PP. Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan
- 13. Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal
- 14. Tindak Lanjut Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

KEPUTUSAN MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL ULAMA NOMOR: V/MNU-32/III/2010 TENTANG BAHTSUL MASA'IL DINIYYAH QANUNIYYAH

بِسْمِ اللهِ الرَّخمنِ الرَّحِيمِ

MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL ULAMA

- Menimbang: a. Bahwa menjadi tugas Muktamar sebagai instansi tertinggi dalam organisasi Nahdlatul Ulama untuk membahas masalah-masalah yang berkembang di masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat agar dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat:
 - b. Bahwa Nahdlatul Ulama sebagai Perkumpulan atau Jam'iyyah Diniyyah Islamiyyah yang bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial, kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat dan berbagai bidang yang mengarah kepada terbentuknya Khaira Ummah, perlu secara terus menerus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas dan kuantitas khidmahnya dengan berdasarkan ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jamaah menurut salah satu madzhab empat;
 - Bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas Muktamar Ke-32 perlu menetapkan hasil bahtsul masail al-Diniyyah al-Qanuniyyah;

Mengingat

- Keputusan Muktamar XXVII Nahdlatul Ulama Nomor 002/MNU-27/1984 jo. Keputusan Munas Alim Ulama Nomor II/MAUNU/1401/4/1983 tentang Pemulihan Khittah Nahdlatul Ulama 1926;
- b. Keputusan Muktamar ke 32 Nahdlatul Ulama Nomor: I/MNU-32/III/2010 tentang Jadwal Acara dan Peraturan Tata Tertib Muktamar Ke-32 Pasal 17 ayat (a) Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama, Pasal 54 ayat (7), Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;

- Memperhatikan : a. Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada pembukaan Muktamar Ke-32 Nahdlatul Ulama tanggal tanggal 7 R. Akhir 1431 H/23 Maret 2010 M;
 - Laporan dan pembahasan Hasil Sidang Komisi Qanuniyyah yang disampaikan pada Sidang Pleno VII Muktamar Ke 32 Nahdlatul Ulama pada tanggal 11 R. Akhir 1431 H/27 Maret 2010 M;
 - Ittifak Sidang Pleno VII Muktamar Ke 32
 Nahdlatul Ulama pada tanggal 11 R. Akhir 1431
 H/27 Maret 2010 M;

Dengan senantiasa memohon taufiq, hidayah serta ridla Allah Swt.:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MUKTAMAR XXXII NAHDLATUL ULAMA TENTANG BAHTSUL MASAIL AL-DINIYYAH AL-OANUNIYYAH;

Pasal 1 Isi beserta uraian perincian sebagaimana dimaksud oleh keputusan ini terdapat dalam naskah Hasil-hasil bahtsul masail al-Diniyyah al-Qanuniyyah sebagai pedoman dalam memperjuangkan berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal jamaah menurut salah satu madzhab empat dan mewujudkan tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kesejahteraan umat;

Pasal 2 Mengamanatkan kepada Pengurus dan warga Nahdlatul Ulama untuk menaati segala hasil-hasil bahtsul masail al-Diniyyah al-Qanuniyyah ini;

Pasal 3 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Asrama Haji Sudiang Makssar

Pada tanggal : 11 Rabi'ul Akhir 1431 H/27 Maret 2010 M.

MUKTAMAR KE 32 NAHDLATUL ULAMA PIMPINAN SIDANG PLENO VII

ttd ttd

Drs. KH. Hafizh Utsman Drs. H. Taufik R. Abdullah Sekretaris

5. QAWAID AI-TAQNIN NAHDLATUL ULAMA

A. Pendahuluan

Salah satu pilar tegaknya negara hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya peraturan perundang-undangan yang memenuhi rasa keadilan dan aspirasi masyarakat.

Peraturan perundang-undangan, baik yang berlaku secara nasional maupun di tingkat daerah adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang mengikat secara umum terhadap pihak yang diatur dalam materi hukum peraturan tersebut.

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan azas keterbukaan, masyarakat berhak untuk berpartisipasi mulai dari perencanaan, persiapan, pembahasan, pelaksanaan, penyebarluasan, dan pengawasannya.

Bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, pertimbangan pembentukan peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat perubahan, penggantian maupun pembuatan peraturan pelaksanaannya adalah antara lain untuk:

- 1. Mempercepat proses reformasi.
- 2. Meningkatkan kualitas demokrasi.
- 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat khususnya otonomi daerah.
- 4. Menghormati, memajukan, dan melindungi hak asasi manusia termasuk memperhatikan prinsip kesetaraan gender.
- 5. Mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi rakyat yang berkeadilan dan agamis.

Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang harmonis dan tidak saling bertentangan baik antara jenis, hierarki secara vertikal maupun horizontal, yang disusun berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Pembuatan peraturan perundang-undangan memuat landasan filosofis yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Landasan yuridis adalah mengacu kepada sumber-sumber hukum dalam ketatanegaraan yaitu Pancasila dan UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan sosiologis yaitu realitas fakta kehidupan dan kondisi kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk dan *plural*.

Asas materi hukum yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada intinya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah harus memuat upaya untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai lapisan guna memenuhi hak-hak asasi seluruh warga negara dan memperkuat Negara kesatuan Republik Indonesia di dalam kerangka kebhinnekaan yang mencerminkan harkat persamaan dan perlakuan yang adil.

Dasar penetapan, prosedur dan asas di atas secara teoritik dapat melahirkan peraturan perundangan yang membawa kemaslahatan untuk umat Islam khususnya dan seluruh bangsa Indonesia pada umumnya. Akan tetapi dalam faktanya bisa terjadi peraturan perundangan yang tidak sejalan dengan kemaslahatan tersebut baik karena kurang adanya ketelitian dari pihak pembuat undang-undang sehingga dapat merugikan semua pihak khususnya umat Islam sebagai penduduk mayoritas di negeri ini.

Karena itu, Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, dan selalu meneguhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melakukan sikap kritis guna mengidentifikasi berbagai undang-undang ataupun rancangan undang-undang yang dipandang dapat merugikan kepentingan bangsa sejalan dengan tujuan ajaran Islam yaitu untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam (Q.S. al-Anbiya': 107).

Seluruh undang-undang dan peraturan yang ada di Indonesia hendaklah membawa kemaslahatan bagi seluruh kepentingan bangsa. NU sebagai Jam'iyah Diniyah Ijtima'iyah secara proaktif melakukan pengkajian yang menyeluruh terhadap undang-undang yang sudah ada dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahannya maupun mengusulkan pembuatan undang-undang yang baru untuk disampaikan dalam program legislasi nasional melalui Badan Legislasi Nasional Dewan Perwakilan Rakyat. Kepentingan penelaahan terhadap seluruh peraturan dan perundang-perundangan serta pengusulan peraturan dan undang-undang yang baru dimaksudkan agar kepentingan warga Nahdlatul Ulama dan umat Islam dapat tertampung dalam program penyelenggaraan

kehidupan berbangsa.

Untuk itu diperlukan kaidah-kaidah (Qawa'id al-Taqnin) menurut perspektif NU agar proses perumusan peraturan dan perundang-undangan di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan kemaslahatan umat dan cita-cita mendirikan negara Republik Indonesia yang adil makmur sejahtera lahir dan batin yang didasarkan kepada nilai-nilai ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah.

B. Maksud dan Tujuan

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi aspek: (1) preventif, yaitu hukum hendaklah tidak mendorong tingkah laku yang tidak disetujui oleh warga pendukungnya (2) kuratif, yaitu setiap undang-undang adalah hukum yang dibentuk yang dalam pelaksanaannya dapat memperbaiki ketidakseimbangan (injustice) dalam arti mewujudkan kesebandingan (justice) atau menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul (3) fasilitatif, yaitu hukum itu hendaklah dibentuk yang dapat menciptakan pengakuan, pengaturan dan perlindungan terhadap lembaga hukum.

Dari uraian di atas maka dapatlah dipahami bahwa setiap undangundang hendaklah selalu hidup dan bermanfaat untuk menjawab perkembangan tuntutan kehidupan masyarakat. Proses transformasi kehidupan masyarakat yang bergerak dari fase agraris menuju kepada kehidupan modern, memerlukan komitmen yang kuat terhadap nilainilai positif dari tradisi yang telah sejak lama berkembang dalam masyarakat namun pada saat yang sama juga bersikap responsif kepada perkembangan modern (al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdz bi al-ljadid al-ashaah).

Atas dasar itulah, Muktamar NU ke 32 menyusun *Qawaid al-Taqnin* yang dimaksudkan sebagai pedoman dan standar NU dalam mempertahankan, mengkritisi, mengawal, dan mengusulkan peraturan perundangan dengan tujuan agar peraturan perundangan di Indonesia dapat:

- 1. Meningkatkan komitmen seluruh warga NU (Nahdliyyin) terhadap keluhuran akhlak yang bersumber dari ajaran Islam *Ahlussunnah wal Jamaah*.
- 2. Menjamin kreatifitas, kemandirian dan harkat martabat bangsa.
- 3. Menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
- 4. Melindungi akar budaya bangsa yang sejalan dengan nilai-nilai

Islam Ahlussunnah wal Jamaah.

- 5. Memberikan sebesar-besar kemaslahatan kepada bangsa.
- 6. Meningkatkan taraf hidup bangsa.
- 7. Menjamin terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

C. Pendapat NU tentang Penyerapan Hukum Islam dalam Hukum Nasional

NU memandang bahwa penyerapan hukum Islam oleh masyarakat Indonesia dan dalam hukum nasional berjalan secara alami karena sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam. NU memandang bahwa penyerapan hukum Islam dalam hukum nasional akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Pola penyerapan itu tergantung kepada kemungkinan keberlakuannya yang memiliki tiga kemungkinan yaitu formal, substansial, dan esensial.

1. Formal (Rosmiyah)

Formal artinya penyerapan hukum Islam pada hukum nasional secara formal. NU memandang ada bagian-bagian hukum Islam yang harus diserap dalam hukum nasional secara formal dan hanya berlaku bagi umat Islam sebagai konsekwensi tugas negara yang memberikan pelayanan untuk memberikan kemudahan bagi umat Islam untuk menjalankan ajaran Islam seperti zakat, wakaf, peradilan agama, haji, hukum waris, wasiat, hibah, dan transaksi perbankan maupun ekonomi syari'ah pada umumnya. Dalam hal ini, NU mendorong terbitnya peraturan perundang-undangan yang secara formal mengatur persoalan tersebut guna kepentingan umat Islam dan hanya berlaku bagi umat Islam. Hal ini tidak berdimensi diskriminasi karena tidak akan mengurangi hak-hak warga negara lainnya. Penegasan ini dimaksudkan sebagai pengejawantahan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara.

2. Substansial (Dzaatiyah)

NU menyadari bahwa ajaran Islam adalah ajaran universal (rahmatan lil 'alamiin), untuk itu NU berupaya agar nilai-nilai ajaran Islam dapat dirasakan kemaslahatannya oleh seluruh umat manusia. Oleh karena itu, hukum yang diturunkan Allah Swt. adalah bertujuan untuk terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Atas dasar itu, bagian-bagian dari ajaran Islam yang berkaitan tata pergaulan secara universal, maka pada dasarnya ajaran Islam juga

bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Namun, oleh karena sistem sosial politik bangsa Indonesia belum memungkinkan berlakunya ajaran Islam secara formal, maka NU memperjuangkan nilai-nilai substansi dalam peraturan perundang-undangan seperti masalah larangan pornografi, perjudian, penyalahgunaan narkoba, korupsi, perusakan lingkungan, pelacuran dan lain sebagainya.

3. Esensial (Ruuhiyah/Jauhariyyah)

Penyerapan dan penerapan hukum Islam dapat juga terjadi secara esensial dalam arti terserapnya nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum nasional meskipun tidak dalam bentuk norma maupun sanksi yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini misalnya berkaitan dengan upaya mendekatkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang pidana yang lebih mendekati nilai ajaran Islam. Sehingga akan semakin menjauhkan pelaku tindak pidana dari berbagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

D. Qawaid al-Taqnin NU

Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa seluruh praktek penyelenggaraan negara tidak saja mempunyai dimensi kepentingan sesaat akan tetapi hendaklah memiliki pandangan yang jauh ke depan. Dalam pandangan NU kepentingan ke depan itu harus didasarkan kepada pertimbangan kepentingan pelaksanaan nilainilai ajaran Islam karena pelaksanaan ajaran Islam pada dasarnya tidak hanya penting bagi umat Islam saja akan tetapi bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan juga untuk seluruh umat manusia. NU juga menyadari kebinnekaan bangsa Indonesia dan mendukung tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu dalam penerapan syariah, NU juga menggunakan pendekatan pelaksanaan nilai ajaran Islam secara berangsur-angsur (tadriji) sejalan dengan fikrah nahdliyyah yang mempertimbangkan aspirasi dan budaya masyarakat.

Dari segi muatannya, secara umum pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus mengacu kepada kaidah:

"Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan kepada

kemaslahatan."1

Secara lebih khusus lagi, sesuai dengan dasar filosofi ajaran Islam (maqashid al-syari'ah), maka bagi NU semua peraturan perundangundangan hendaklah dapat memperkuat lima tujuan diturunkannya syari'at (al-kulliyat al-khams) yaitu:

1. Hifzh al-Din

Setiap kegiatan didasarkan untuk kepentingan pemeliharaan ajaran Islam oleh karena kehidupan itu baru bernilai apabila selalu didasarkan kepada ajaran Islam. Setiap peraturan perundang-undangan (per-UU-an) tidak boleh bertentangan dengan hakikat ajaran Islam, malah justru semua UU haruslah bertujuan memperkuat komitmen semua umat beragama terhadap ajaran agamanya. Oleh karena itu pertimbangan untuk kepentingan syari'at haruslah ditempatkan di atas segala-galanya. Semua peraturan per-UU-an hendaklah yang dapat memudahkan orang beribadah oleh karenanya tidak boleh ada yang bertentangan dengan ajaran Islam (Q.S. Ali Imran: 83). Mengingat agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia adalah Islam, maka setiap undang-undang hendaklah memberi kemudahan bagi umat Islam untuk mengamalkan ajaran agamanya, dan pada saat yang sama juga memberikan kemudahan bagi umat lainnya dalam mengamalkan ajaran agamanya. Bertolak pada pemikiran tersebut, setiap undang-undang tidak boleh bertentangan dengan semangat spritual yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.

2. Hifzh al-Nafs

Setiap pelaksanaan ajaran Islam harus selalu memelihara kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu tidak dibenarkan upaya-upaya kehidupan yang justru berakibat hilangnya keberadaan manusia. Seluruh peraturan perundang-undangan harus dapat menjaga kelangsungan kehidupan dan melindungi kehormatan umat manusia. Tidak dibenarkan adanya Undang-Undang yang merendahkan martabat manusia karena manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sempurna (Q.S. al-Tin: 4 dan al-Isra': 33).

3. Hifzh al-'Aql

Peraturan per-UU-an hendaklah memuliakan manusia sebagai makhluk Allah yang mulia yang memiliki akal sehat dengan kemampuan berfikir yang baik dan benar, terbebas dari hedonisme dan materialisme,

Abdurrahman al-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazha'ir, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H), h. 121.

jauh dari pragmatis serta menjunjung tinggi akhlak mulia, sehingga segenap kehidupan manusia menjadi aman dan bahagia. Hal ini terwujud manakala akal pikirannya positif, tidak terkotori pengaruh narkotika dan obat-obat terlarang dan mampu menyikapi semua hal secara dewasa.

"Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan." (Q.S. al-Isra':70)

4. Hifzh al-Nasl

Seluruh per-UU-an harus dapat memelihara kelangsungan berketurunan oleh karena itu tidak dibenarkan adanya upaya pembunuhan atau pemutusan keturunan atas dasar alasan apapun juga. Serta tidak dibenarkan aktifitas perusakan lingkungan hidup karena dapat mengancam eksistensi kelangsungan hidup manusia. Seluruh peraturan hendaklah bertujuan memuliakan manusia (Q.S. al-Isra': 31).

5. Hifzh al-Mal

Seluruh per-UU-an hendaklah dapat memelihara kepemilikan harta baik kepemilikan harta yang sempurna (milk al-tam) maupun kepemilikan tak sempurna (milk al-naqish) dan hak-hak kepemilikan kebendaan termasuk hak cipta maupun budaya bangsa, Islam menegaskan adanya kepemilikan perorangan dan kepemilikan syirkah namun harta yang dimiliki itu memiliki nilai ibadah dan sosial yang ditunaikan melalui zakat, infak dan shadaqah (Q.S. al-Hijr: 20).

Sesuai dengan prinsip-prinsip di atas, maka sebuah peraturan perundangan harus:

- a. Melindungi semua golongan,
- b. Berkeadilan,
- c. Sesuai dengan agama/keyakinan/kepercayaan masyarakat yang disahkan keberadaannya di Indonesia,
- d. Sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan budaya masyarakat yang tidak bertentangan dengan agama,
- e. Selalu memiliki wawasan ke depan.

E. Peran NU dalam Proses Pembentukan Hukum di Indonesia

Legislasi Nasional merupakan agenda penting dalam penyelenggaraan negara yang berdampak sangat besar terhadap kehidupan bangsa. Legislasi dapat menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan bermartabat, serta rakyatnya makmur sejahtera akan tetapi dapat juga sebaliknya. Hal itu semua tergantung bagaimana prinsip-prinsip legislasi dilakukan. Karena itu, NU sebagai bagian terbesar bangsa yang memiliki misi melakukan rekonstruksi umat (*ishlahiyah al-ummat*) sudah sepatutnya ikut terlibat aktif dalam memantau proses legislasi hukum nasional. Setelah itu maka agenda NU adalah memantau sejauh mana pelaksanaan hukum itu sejalan dengan aspirasi umat Islam.

Adapun peran yang dapat dilakukan NU dalam hal ini ada dua, yaitu:

1. Aktif, Inisiatif dan Kontributif

NU secara proaktif harus mecermati keperluan pembuatan perundangundangan yang dibutuhkan oleh umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya agar terjamin adanya kepastian hukum dalam kasus tertentu dan menghindari penafsiran-penafsiran sepihak yang dapat merugikan masyarakat. Dalam hal ini NU dapat menempuh mekanisme dengan menyusun pokok-pokok pikiran usulan rancangan undangundang yang mendukung terwujudnya tujuan hukum Islam (maqashid al-syari'ah) sebagaimana diuraikan di atas melalui upaya mendorong lahirnya regulasi sebagai turunan dari UU berupa Peraturan Pemerintah. Selain dari itu, NU juga dapat mengajukan usulan rancangan kepada pemerintah DPR tentang perlunya pembuatan undang-undang tertentu untuk menjamin kepentingan umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

2. Mengawal dan Mengkritisi Undang-undang atau RUU

NU mengambil inisiatif untuk mengawal dan mengkritisi berbagai undang-undang maupun peraturan yang berskala nasional maupun daerah guna menjamin terwujudnya tujuan hukum Islam (maqashid al-syari'ah) yang menimbulkan kontroversi di masyarakat sehingga umat Islam memperoleh ketenangan dalam mengamalkan ajaran Islam. Oleh karena itu setiap undang-undang dan peraturan yang ada di Indonesia hendaklah mendukung realisasi nilai-nilai keberagamaan dan menghindari adanya undang-undang maupun peraturan yang tidak sejalan dengan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar seluruh undang-undang dan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selalu didasarkan kepada kepentingan umum (al-mashlahah al-'ammah).

Untuk pelaksanaan dua peran di atas maka sudah selayaknya di kalangan internal NU perlu ada kelompok pemerhati perkembangan

program legislasi nasional termasuk segala turunan dari berbagai peraturan itu berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.

F. Penutup

Seraya bertawakkal kepada Allah Swt. dan mengharap ma'unah dan tauqikNya, Muktamar NU ke-32 di Makassar menyusun Tata Aturan Penetapan Perundang-undangan (Qawaid al-Taqnin) Nahdlatul Ulama semoga bermanfaat bagi terwujudnya kejayaan Islam dan umat Islam Indonesia ('izz al-islam wa al-muslimin) negeri yang adil dan makmur sejahtera lahir dan batin di dalam ampunan Allah Swt. (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur).

6. USULAN RUU PERLINDUNGAN KEHIDUPAN BERAGAMA

A. Latar Belakang

Sejalan dengan dasar Negara Pancasila dan ditegaskan lagi pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (1) ditetapkan bahwa sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini bertujuan agar setiap warga menjadi manusia yang taat terhadap ajaran agamanya dan pada saat yang sama menghargai perbedaan dengan antar sesama umat beragama. Kebebasan beragama (hurriyah al-tadayyun) sebagaimana disebutkan di atas kemudian dipertegas lagi pada Pasal 29 ayat (2) yaitu kebebasan bagi setiap warga negara untuk beribadah dan mengamalkan ajaran agama dan kepercayaannya itu. Akan tetapi sayangnya, dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak ditemukan adanya perintah UUD untuk membuat undangundang lanjutan guna merumuskan bentuk kebebasan itu untuk mewujudkan manusia Indonesia yang taat dan kepada ajaran agamanya sekaligus dapat hidup rukun dengan seluruh komponen bangsa yang majemuk dalam semangat toleransi dan kerukunan. Pada aspek pribadi setiap manusia memiliki kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengamalkan ajaran agamanya bahkan negara harus memberikan pelayanan secara optimal namun negara belum memiliki panduan dalam menjabarkan kebebasan beragama itu. Namun apabila kebebasan beragama pada tataran individu itu tidak dibatasi dengan ramburambu maka kebebasan beragama itu dapat menimbulkan anarki dan akhirnya akan melahirkan kegaduhan di dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan Undang-Undang Perlindungan Kehidupan Beragama.

Dalam ajaran Islam telah ditegaskan beberapa prinsip tentang hubungan antara umat Islam dengan lainnya antara lain:

- 1. "Sesungguhnya agama (yang benar) di sisi Allah adalah Islam." (Q.S. Ali Imran: 19)
- 2. "Dan siapa orang yang mencari-cari agama selain Islam maka tidak akan diterima amalannya dan dia di akhirat menjadi orang yang merugi." (Q.S. Ali Imran: 85)
- 3. "Tidak ada paksaan memasuki agama sesungguhnya telah jelas antara yang baik dari yang buruk, maka siapa yang mengingkari thagut dan beriman kepada Allah maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang kokoh yang tidak ada putusnya dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui." (Q.S. al-Baqarah: 256)
- 4. "Allah tidak melarang kamu terhadap orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusirmu dari negerimu, kamu berbuat kebajikan kepada mereka dan berlaku adil kepada mereka, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berlaku adil." (Q.S. al-Mumtahanah: 8)
- 5. "Bagi kamu agama kamu dan bagi saya agama saya." (Q.S. al-Kafirun: 6).

Di samping itu, fungsi *imamah* atau kenegaraan dalam pandangan politik Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana dikemukakan al-Mawardi dalam kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, adalah untuk menjaga agama (*harasah al-din*) dan mengatur dunia (*siyasah al-dunya*):

"Imamah (kepemiminan pemerintahan) ditegakkan untuk mengganti peran kenabian dalam urusan menjaga agama dan mengatur dunia."²

Oleh karena itu, dalam rangka harasah al-din, NU perlu mendorong pemerintah untuk membuat regulasi tentang perlindungan kehidupan agama di Indonesia. Kepentingan umat Islam terhadap legislasi yang berkenaan dengan tuntutan pelaksanaan ajaran Islam berbeda dengan pelaksanaan ajaran agama lainnya. Oleh karena itu adalah hal yang wajar apabila pemerintah RI memberikan perhatian yang lebih dalam pelaksanaan perundangan ajaran Islam dan hal itu tetap sejalan dengan amanat konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia karena negara ini didirikan adalah bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin warga negara Republik Indonesia.

² Ali bin Muhammad al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th.), h. 5.

B. Tujuan Pembuatan Undang-Undang

Pemerintah dipandang perlu untuk membuat undang-undang perlindungan kehidupan beragama agar setiap warga negara memiliki kebebesan sepenuhnya dalam mengamalkan ajaran agamanya dan pada saat yang sama menghormati kebebasan orang lain. Atas dasar itu, maka konsep kebebasan hendaklah dibatasi apabila telah berkenaan dengan pola hubungan antar sesama WNI. Kebebasan mutlak tidak dikenal dalam kebudayaan bangsa Indonesia.

C. Mekanisme Pengajuan RUU Perlindungan Kehidupan Beragama

RUU Perlindungan Kehidupan Beragama, selanjutnya disingkat RUU PKB, sebaiknya menjadi hak inisiatif DPR dan bukan diajukan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena pemerintah pada tahun 2004 telah mencoba mengambil prakarsa terhadap hal ini namun berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, pada saat situasi politik pasca reformasi di mana peran legislatif lebih dominan maka selayaknya inisatif pengajuan RUU tersebut berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat. Aparat pemerintah tampaknya telah mengalami trauma dengan pengalaman tahun 2004 ketika Departemen Agama baru mulai melakukan kajian dalam bentuk penyusunan naskah akademis namun telah mengalami penentangan dari berbagai pihak karena dipandang memiliki motif tertentu. Sadar akan besarnya kemungkinan reaksi terhadap RUU PKB ini baik dari kalangan internal umat Islam maupun dari umat beragama lainnya, maka NU perlu memprakarsai perbincangan tentang perlindungan kebebasan beragama yang kemudian diajukan kepada pemerintah dan DPR sebagai bahan penyusunan lebih lanjut.

D. Muatan RUU PKB

Adapun muatan yang perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Kehidupan Beragama adalah sebagai berikut:

- 1. Pengertian umum:
 - a. Pengertian agama,
 - b. Kehidupan beragama,
 - c. Pengertian kebebasan beragama,
 - Batasan kebebasan beragama,
 - Hak dan kewajiban umat beragama.
 - d. Pengertian kerukunan hidup umat beragama,
 - e. Pengertian pemurnian agama,
 - f. Pengertian pembaruan agama,

- g. Pelayanan terhadap masyarakat umat beragama;
 - Formalistik,
 - Substansial,
 - Esensial.
- 2. Tujuan kehidupan beragama,
- 3. Hubungan agama dengan negara,
- 4. Integrasi nilai dan hukum agama kepada hukum negara,
- 5. Integrasi nilai kebangsaan dalam keberagamaan,
- Peningkatan pemahaman agama,
- 7. Peningkatan penghayatan agama,
- 8. Peningkatan pelayanan bagi pengamalan ajaran agama,
- 9. Peningkatan pengamalan ajaran agama,
- 10. Peranan pemerintah dalam pemeliharaan kehidupan beragama,
- 11. Peranan umat beragama terhadap negara,
- 12. Kewajiban setiap penganut agama terhadap penganut lainnya,
- 13. Ketentuan Penetapan Hari-hari Besar Keagamaan,
- 14. Kedudukan aliran sempalan agama:
 - a. Pengembangan pemikiran,
 - b. Gerakan Keagamaan,
 - c. Penodaan/penistaan Agama.
- 15. Kode Etik Penyiaran Agama/kode etik simbol Agama,
- 16. Pendirian rumah ibadat,
- 17. Kedudukan organisasi majelis keagamaan,
- 18. Ketentuan tentang bantuan luar negeri keagamaan,
- 19. Penyumpahan terhadap pejabat pemerintahan,
- 20. Tugas dan tanggungjawab lembaga kerukunan dalam pemeliharaan keserasian sosial umat beragama,
- 21. Tugas dan tanggungjawab Pemerintahan Daerah dalam pemeliharan kehidupan beragama,
- 22. Sanksi Administratif, sanksi Perdata dan Sanksi Pidana terhadap pelanggaran undang-undang.

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum dengan konsep negara kesejahteraan. Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan untuk memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hal ini merupakan konsekuensi dari amanat konstitusi yang menentukan bahwa Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia telah dimulai dengan pengesahan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada tanggal 19 Oktober 2004. Namun dalam kurun waktu kurang dari 4 bulan sejak disahkan, tepatnya 21 Februari 2005, UU SJSN tersebut mendapatkan uji materi yang putusannya dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Agustus 2005. UU SJSN tersebut merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan sistem jaminan sosial di Indonesia, tidak secara tegas mengatur eksistensi peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan program-program jaminan sosial sebelum UU SJSN dan sampai saat ini masih terus berlaku.

Undang undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN menentukan adanya 5 (lima) jenis program jaminan sosial, yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian. Namun, jaminan kesehatan yang mendapat prioritas untuk memenuhi hak konstitusi rakyat Indonesia untuk "memperoleh pelayanan kesehatan" dan "jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat", belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terkait dengan belum dipenuhinya pendirian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang menurut UU SJSN harus dibentuk melalui undangundang tersendiri.

Masyarakat perlu berpartisipasi dalam proses penyusunan RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ini, karena RUU tersebut akan mengatur badan yang dipercaya untuk mengumpulkan, menghimpun, mengelola dan mengembangkan dana jaminan sosial milik seluruh peserta untuk pembayaran manfaat kepada peserta. Tugas, hak dan kewajiban BPJS sudah ditentukan dalam UU No. 40 tahun 2004 tentang SJSN. Menurut Pasal 5 UU SJSN Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005, BPJS harus dibentuk dengan undang-undang tersendiri, artinya harus dengan persetujuan wakil rakyat. Sampai saat ini belum ada BPJS yang memenuhi persyaratan

yang ditentukan oleh UU SJSN. Untuk mengisi kekosongan hukum, maka Persero Jamsostek, Persero Taspen, Persero ASABRI dan Persero Askes diberikan hak untuk bertindak sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan syarat disesuaikan dengan UU SJSN, paling lambat pada tanggal 19 Oktober 2009.

B. Permasalahan

- Terdapat perbedaan dasar hukum dalam pelaksanaan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional oleh Badan Penyelenggara dengan dasar hukum masing-masing badan penyelenggara lainnya, seperti Persero Jamsostek, Persero Taspen, Persero ASABRI dan Persero Askes,
- 2. Data masyarakat miskin versi BPS beda dengan versi Pemda,
- 3. Sistem pensiunan dan asuransi sosial dalam sistem jaminan sosial belum jelas,
- 4. Belum ada Lembaga Jaminan Sosial Dasar untuk golongan bawah dan sektor informal,
- 5. Law enforcement peraturan perundangan masih lemah,
- 6. Ada perbedaan dengan prinsip nirlaba dalam sistem,
- Adanya perbedaan substansi UU No. 40 tahun 2004 dengan 15 undangundang yang terkait dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan 17 Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang yang bersangkutan,
- 8. Masih lemahnya koordinasi penanganan Sistem Jaminan Sosial Nasional,

C. Usulan

- Perlu menindak lanjuti 26 pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang perlu dibuatkan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan perundang-undangan lainnya,
- 2. Perlunya kriteria miskin dan yang berhak mendapat Jaminan Sosial yang jelas,
- Perlunya aturan kerja sama antar instansi terkait data penduduk dan tingkat sosialnya,
- 4. Perlu koordinasi penanganan Sistem Jaminan Sosial Nasional dan pembentukan Badan Penyelenggara di tingkat daerah,
- 5. Perlu Pelaksanaan UU SJSN secara konsisten, harmonisasi seluruh peraturan dan perundangan terkait,
- 6. Mendorong dibuatnya Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 yo

pasal 52 ayat 2 UU SJSN dengan bentuk badan hukum wali amanat sesuai amanat UU SJSN,

7. Perlunya pekerja di sektor informal bisa mendapatkan jaminan sosial,

8. Perlunya jaminan sosial bagi orang gila/sakit jiwa yang terlantar.

8. UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

A. Pendahuluan

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan bahwa kesehatan merupakan hak azasi manusia, yang mencakup hak atas informasi, hak atas privasi, hak untuk menikmati teknologi kesehatan, hak atas pendidikan tentang kesehatan, hak atas ketersediaan makanan dan gizi, hak untuk mencapai standar hidup optimal, dan hak atas jaminan sosial. Sejalan dengan itu, pembangunan bidang kesehatan di Indonesia, sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat (3) mencakup segi kehidupan fisik maupun non fisik yang diselenggarakan secara terpadu, mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilatif yang menyeluruh dan berkesinambungan, seperti yang tertuang dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) tahun 1982. Pembangunan kesehatan ditujukan agar masyarakat mampu hidup sehat sehingga terwujud derajat kesehatan yang optimal. Hal ini berimplikasi pada perlunya mengikut sertakan masyarakat dalam upaya pembangunan kesehatan.

Indonesia mempunyai permasalahan kesehatan yang kompleks, selain beban jumlah penduduk yang besar, luasnya daerah geografis dan banyaknya jumlah pulau, beragamnya suku bangsa, serta beragamnya tradisi dan adat istiadat. Di samping itu, keterbatasan sumberdaya, kemiskinan dan masih rendahnya tingkat pendidikan perempuan, juga menambah kompleksitas masalah kesehatan. Hal ini berakibat pada masih tingginya angka kematian bayi dan angka kematian ibu, serta rendahnya tingkat Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) yang dapat menggambarkan tingkat kualitas SDM rakyat Indonesia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, diharapkan dapat menciptakan suatu tatanan hukum yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik bagi pemberi pelayanan kesehatan maupun bagi masyarakat penerima pelayanan kesehatan. Namun dalam pelaksanaannya, fokus upaya kesehatan

956

masih terkonsentrasi pada upaya pengobatan (kuratif) belum preventif. Padahal, paradigma sehat tidak saja meliputi penyembuhan penyakit, menurunkan angka kematian, atau memperpanjang umur harapan hidup, melainkan lebih luas, yaitu bahwa kesehatan mendorong penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas sejak dini sejak sebelum terjadinya pembuahan. Pada kenyataannya, kebijakan publik di bidang kesehatan belum memandang pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan utama dan investasi SDM, hal ini tampak dari kecilnya anggaran belanja bidang kesehatan yang kurang dari 5% APBN. Bandingkan dengan anggaran bidang pendidikan yang telah mencapai 20% APBN.

B. Rekomendasi

Perkembangan keadaan saat ini menuntut diberikannya perhatian terhadap UU nomor 36 tahun 2009 dalam hal:

- 1. Perlunya kepastian alokasi anggaran kesehatan Pemerintah minimal sebesar 5% dari APBN dan alokasi anggaran Pemerintah daerah Propinsi, Kabupaten/Kota minimal 10% dari APBD,
- Perlunya penyusunan dan realisasi Peraturan Pemerintah terkait Program jaminan kesehatan nasional terutama bagi kelompok masyarakat miskin, hampir miskin, kelompok lanjut usia, kelompok ibu, bayi, anak dan remaja serta kelompok penyandang cacat,
- 3. Perlunya kepastian dan jaminan hukum mengenai penghentian kehamilan (untuk janin kurang dari 6 minggu) yang bermutu, aman, bertanggungjawab yang dilakukan oleh tenaga kesehatan atas indikasi kegawatan medis dan akibat perkosaan serta pengawasan atas penyalahgunaan indikasi tersebut,
- 4. Perlunya menciptakan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan harga obat esential oleh masyarakat,
- Perlunya jaminan pelaksanaan transplantasi organ, implan obat, bedah plastik, penggunaan sel punca yang tidak bertentangan dengan norma agama dan telah terbukti keamanan dan manfaatnya serta tidak mempunyai unsur komersialisasi,
- Perlunya jaminan penggunaan bahan zat adiktif seperti tembakau, agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dan perlunya ketegasan terhadap sangsi pelanggaran Kawasan tanpa rokok,
- 7. Perlunya mendorong terbentuknya Undang-Undang Pengendalian Tembakau.

9. UNDANG-UNDANG (UU) TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

A. Pendahuluan

Salah satu kewajiban umat Islam yang menjadi salah satu rukun Islam dan mencerminkan wujud pertanggungjawaban sosial individu umat Islam adalah membayar zakat. Karena posisi yang demikian itu, maka keberhasilan pengelolaan zakat menjadi faktor dominan dalam menentukan kesejahteraan hidup umat Islam, dan akan menentukan perkembangan sektor-sektor strategis lain yang bagi umat Islam, seperti pendidikan. Pengalaman pengelolaan zakat di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat belum dilakukan sebagai suatu sistem yang baik dan efektif, serta sesuai dengan maqashid al-syari'ah. Upaya melembagakan pengelolaan zakat sebagai suatu sistem yang baik bukannya tidak pernah dilakukan, antara lain dengan dibentuknya lembaga Bazis secara strukturalnasional dan diterapkannya model-model pengelolaan zakat oleh kelompok masyarakat tertentu. Tetapi sampai saat ini hasilnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Pengalaman tentang keberhasilan pengelolaan zakat lebih bersifat kasuistik dan baru berjalan secara parsial dan belum menjadi sistem nasional.

Pelaksanaan zakat bagi umat Islam bisa dikategorikan sebagai salah satu bagian dari hukum (syari'at) Islam yang bisa diserap secara formal dalam sistem hukum nasional berupa UU yang diperuntukkan bagi khusus umat Islam. Dalam konteks ini maka kehadiran UU tentang Pengelolaan Zakat yang baik bisa dipahami dan menjadi kebutuhan mendesak umat Islam. UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaannya yang selama ini menjadi landasan yuridis dalam pengelolaan zakat di Indonesia belum mampu menciptakan sistem pengelolaan zakat yang pensyariatannya bertujuan untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana firman Allah: "Kay la yakuna duulatan bainal aghniyaa'i minkum." -Supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu- (QS. al-Hasyr: 7). Dalam kaitan ini maka program legislasi untuk melakukan perubahan terhadap UU tentang Pengelolaan Zakat yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah bersama DPR merupakan langkah strategis dan harus mendapat dukungan.

B. Usulan

Substansi yang perlu menjadi materi pengaturan dalam RUU

tentang Pengelolaan Zakat antara lain sebagai berikut:

1. Paradigma dan Asas Pengelolaan Zakat

Sesuai dengan arah pembentukan peraturan perundang-undangan, maka paradigma dan asas pengelolaan zakat yang diserap secara formal dalam hukum nasional melalui UU ini, maka harus ada jaminan bahwa melalui UU ini harus tercipta proses penyadaran di kalangan umat Islam untuk menunaikan kewajiban membayar zakat. Membayar zakat selain dipahami sebagai kewajiban yang bersifat syar'i disadari juga merupakan kewajiban sebagai warga Negara.

2. Kelembagaan Pengelolaan Zakat

Yang harus diperhatikan dalam kelembagaan pengelolaan zakat ini, adalah adanya kejelasan tentang status lembaga ini dalam tata kelola pemerintahan Negara (apakah lembaga Negara, semi Negara, atau lembaga mandiri), tugas dan kewenangannya, integritas sumber daya manusia yang akan mengisi lembaga, penerapan manajemen yang bersifat transparan dan akuntabel.

Dalam hal ini, NU mengusulkan lembaga yang berhak mengumpulkan zakat adalah lembaga yang dibentuk pemerintah, sedangkan dalam pendistribusiannya harus melibatkan organisasi sosial keagamaan Islam.

3. Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan

Selain faktor kelembagaan, kemampuan manajemen pengelolaan zakat dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan hasil zakat masih merupakan titik lemah dalam pengelolaan zakat selama ini. Kegiatan pengumpulan zakat belum berhasil menjaring semua muzakki. Pendistribusian hasil zakat juga sering menimbulkan masalah, baik ketidakmerataan, ketidakteraturan dan ketidakterbukaan. Lebih-lebih dalam hal pendayagunaan zakat. Hampir sebagian besar zakat yang berhasil dihimpun habis didistribusikan untuk hal-hal yang bersifat konsumstif.

4. Pengawasan Melekat

Beberapa kasus, lembaga berbadan hukum melakukan distribusi harta zakat secara tidak benar, seperti digunakan untuk bantuan pendirian rumah ibadah non muslim dengan alasan toleransi dan bantuan kelompok tertentu. Untuk itu perlunya pengawasan melekat terhadap lembaga-lembaga yang diberi hak untuk mengumpulkan atau menyalurkan zakat, infak, shadaqah oleh instansi yang diberi wewenang untuk itu.

5. Partisipasi Masyarakat

Sesuai dengan prinsip dan asas pembuatan peraturan perundangundangan, serta berpedoman dengan qawaid al-taqnin Nahdlatul Ulama, maka setiap norma hukum yang ditetapkan dalam suatu UU, maka implementasinya harus memberikan ruang partisipasi yang besar bagi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan proses pembentukan kelembagaan, rekrutmen sumber daya manusia, pemberian akses informasi kepada masyarakat, pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengawasan dan lain-lain.

6. Ketentuan Tentang Sanksi

Sebagai salah satu instrumen untuk membentuk dan melakukan perubahan sosial di tengah masyarakat, maka UU tentang Pengelolaan Zakat harus bisa mendorong para pihak yang keberadaannya ditetapkan dalam UU ini untuk menaati segala ketentuan. Karena itu ancaman sanksi harus diberikan secara tegas bagi pihak yang melakukan pelanggaran baik terhadap *muzakki* maupun pengelola.

10. Undang-Undang Bidang Politik UU No. 32 tahun 2004

A. Latar Belakang

Untuk mengimplementasikan amanah Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Tahun 1945 hasil amandemen, telah dilakukan perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi digulirkan, terutama reformasi bidang politik. Kekuasaan negara dibagi secara tuntas ke dalam tiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan pemerintahan, kekuasaan legislatif dan kekuasaan kehakiman, dan hubungan antara ketiga cabang kekuasaan tersebut dibangun dengan prinsip check and balances. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen tetapi dengan tetap mempertahankan bentuk NKRI, dasar Negara Pancasila dan mempertegas sistem presidensial. Lembaga-lembaga negara, baik yang lama maupun yang baru dan dibentuk berdasarkan ketentuan Konstitusi, dirumuskan eksistensinya sedemikian rupa sehingga dapat mendorong terwujudnya tujuan Konstitusi. Proses dan kegiatan demokrasi diperbarui, pemilihan umum diselenggarakan secara demokratis dan dibentuk penyelenggara pemilu yang lebih mandiri. Pengisian jabatan-jabatan publik secara umum dilakukan melalui mekanisme pemilihan. Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, dan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Sejak

reformasi Indonesia telah menyelenggarakan tiga kali pemilu legislatif dan dua kali pemilu presiden serta ratusan kali pemilu kepala daerah. Nyaris sepanjang tahun rakyat terlibat dalam kegiatan pemilu, yang secara tidak langsung mengurangi konsentrasi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Rakyat memegang penuh kedaulatan negara baik secara langsung maupun tidak langsung (vox populi vox dei/suara rakyat suara Tuhan).

Sampai di sini seakan-akan Indonesia telah berubah wajah dari negara otoriter menjadi negara tempat bersemayamnya dengan subur kehidupan demokrasi. Dunia internasional memberikan apresiasi yang besar terhadap perkembangan kehidupan demokrasi. Tetapi setelah reformasi berjalan lebih dari 10 tahun dewasa ini rakyat justru menghadapi kondisi yang dirasakan tidak wajar dan tidak semestinya. Hiruk pikuk kegiatan politik, baik yang berlangsung secara reguler seperti pilkada atau pileg/pilpres, maupun kegiatan politik insidensial yang lahir dari dinamika politik yang sangat tinggi, belum berbanding lurus dengan perbaikan kesejahteraan rakyat. Proses demokrasi yang berjalan amat cepat makin meninggalkan masyarakat yang kondisinya tertatih-tatih secara ekonomi. Akibatnya, proses demokrasi melahirkan sikap aji mumpung, pragmatisme, dan budaya politik uang sehingga biaya demokrasi menjadi semakin mahal. Hal lain yang merisaukan, adalah berubahnya kesantunan dan etika politik, terganggungnya keistigamahan para tokoh non-politik karena ikut masuk ke dalam percaturan politik praktis, dan hilangnya ruh keteladanan dalam kehidupan sosial karena faktor kehidupan politik. Banyak orang menilai, demokrasi yang berkembang di Indonesia belum sepenuhnya efektif untuk menciptakan kesejahateraan rakyat dan tatanan kehidupan yang lebih adil bahkan banyak menimbulkan praktik korupsi di manamana secara berjamaah.

Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara tujuan dan cita-cita demokrasi yang luhur dan realitas sosial politik yang dihasilkan? Banyak faktor yang bisa diidentifikasi sebagai penyebabnya. Salah satunya adalah berkaitan dengan produk perundang-undangan yang menjadi instrumen pembentukan sistem dan tatanan sosial masyarakat. Ada beberapa materi UU bidang politik yang ikut menciptakan carut-marutnya kehidupan politik, atau menyebabkan arah reformasi berjalan semakin liar. Karena itu, salah satu ikhtiar strategis yang penting untuk dilakukan adalah melakukan kajian dan perbaikan

beberapa UU bidang politik.

B. Materi UU yang Mengandung Problem

1. UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah juncto UU No.12 Tahun 2008. Salah satu point penting yang diatur dalam UU ini adalah mengenai pemilihan kepala daerah, yaitu gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota, secara langsung oleh rakyat. Di dalam pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa gubernur dan bupati/walikota dipilih secara demokratis. Hal ini berbeda dengan pemilihan presiden, yang di dalam rumusan pasal 6-A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan "Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat". Para wakil rakyat sesuai dengan kewenangannya, membuat UU 32 tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008 dan menentukan pilihan politik hukum mengenai pemilihan kepala daerah, yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini merupakan keputusan politik yang berani dana lompatan jauh dibanding periode sebelumnya.

Memang, setelah pilkada dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, rakyat menikmati hasil proses demokrasi dalam pemilu lokal, yaitu hadirnya kepala daerah yang memiliki legitimasi politik yang kuat. Tetapi pada sisi lain, muncul dampak negatif sebagaimana diuraikan di atas. Memang tidak mungkin untuk mengembalikan sistem kehidupan demokrasi ke sistem lama, yaitu kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat. Tetapi yang perlu diperhatikan, sejak digelar pilkada secara langsung oleh rakyat tahun 2005 telah muncul budaya pragmatisme dan politik uang yang mengakibatnya tersingkirnya orang-orang yang memiliki integritas kepemimpinan yang baik, tetapi tidak cukup memiliki kapital untuk maju menjadi kepala daerah.

Hubungan kepala daerah dengan wakilnya yang tidak harmonis karena kepentingan politik ke depan (keduanya akan maju dalam pilkada berikutnya) akan berdampak negatif dan rakyat menjadi korban serta terjadi eksploitasi pegawai negeri sipil (PNS) dan pemerintahan tidak efektif.

Khusus mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, telah memunculkan persoalan "perebutan legitimasi" antara gubernur dan bupati/walikota, dan mengaburkan posisi gubernur yang di dalam konstitusi dinyatakan sebagai wakil pemerintah pusat. Dalam konteks ini patut dikaji ulang. Apakah level gubernur

- tetap dipilih langsung oleh rakyat atau sebagai wakil pemerintah pusat gubernur cukup diangkat oleh presiden, atau dipilih melalui mekanisme perwakilan.
- 2. UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD. UU ini disusun dalam tekanan politik yang tinggi. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya pasal yang substansinya merupakan kompromi dari berbagai kepentingan politik, dan banyaknya pasal yang diajukan ke MK (Mahkamah Konstitusi) yang mengalami judical review dan sebagian besar dikabulkan oleh MK. Beberapa ketentuan dalam UU ini yang menimbulkan implikasi politik yang tidak sederhana, antara lain mengenai persyaratan parpol yang relatif ringan untuk bisa ikut pemilu sehingga melahirkan banyak partai peserta pemilu, ketentuan teknis penghitungan dan penetapan kursi yang tidak sederhana. Adapun mengenai sistem pemilunya sendiri sebagaimana yang diatur dalam UU ini, yaitu proporsional terbuka dengan suara terbanyak, sudah cukup ideal untuk kondisi Indonesia.
- 3. Penyelengaraan pemilu yang diikuti oleh banyak partai ternyata membengkakkan anggaran pemilu, dan memunculkan kerumitan teknis administratif yang luar biasa. Pada kenyataannya, meskipun banyak partai yang ikut penyelenggaraan pemilu, hanya ada sembilan yang bisa lolos memenuhi ketentuan Parlemen Threshold 2,5% dari suara sah secara nasional. Penetapan peroleh kursi dengan menggunakan suara terbanyak di tengah sistem multi partai melahirkan berbagai problem, seperti rumitnya teknis penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, persaingan super ketat di kalangan calon, baik antar partai maupun di internal partai, dan merebaknya politik uang. Karena itu sudah waktunya ada kemauan politik yang tegas dengan melakukan perubahan peraturan UU, untuk membatasi jumlah partai sampai pada angka yang ideal.

Ada beberapa penyebab di antaranya adalah pertentangan antara amanat konstitusi yang menegaskan sistem pemerintahan presidensiil, sedangkan UU politik menghendaki sistem multi partai. Begitu juga proses revisi UU Politik yang mendekati pelaksanaan pemilu menyebabkan lembaga penyelenggara pemilu kalang kabut dan bongkar pasang aturan mainnya, sehingga rakyat pemegang *vote* bingung dengan teknis pemilu.

C. Usulan

1. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat

perlu diperbaiki sistem dan aturan pelaksanaannya sehingga tidak makin mengembangkan perilaku negatif dalam proses demokrasi di tengah masyarakat. Perlu dilakukan revisi terhadap UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo UU No.12 Tahun 2008, atau dibuat UU tersendiri tentang pemilu kepala daerah, yang memungkinkan lahirnya persaingan yang sehat dalam proses pilkada, dan mencegah terjadinya politik uang. Khusus untuk gubernur, mengingat posisinya yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah dan untuk menyederhanakan pilkada tidak perlu lagi dipilih langsung oleh rakyat, tetapi cukup dipilih oleh presiden dari nama-nama yang diajukan oleh daerah melalui mekanisme pemilihan (election) di DPRD.

- Pemilihan wakil kepala daerah baik wagub, wabub atau wawali dipisahkan/tidak dalam satu paket dengan pemilihan kepala daerah. Calon wakil kepala daerah dipilih oleh DPRD dari 2 calon yang diajukan oleh kepala daerah terpilih.
- 3. Penghentian (*moratotium*) pemekaran wilayah, karena apa yang terjadi selama ini justru tidak sejalan dengan tujuan demokratisasi karena yang dipertaruhkan adalah terjadinya perebutan jabatan dan perselisihan antara daerah induk dengan daerah yang dimekarkan akibat perebutan batas wilayah, aset daerah dan lain sebagainya.
- 4. Sejak awal dimulai pemerintahan yang baru setiap partai politik telah mempersiapkan kadernya yang akan duduk dalam DPR maupun di lembaga eksekutif agar sejak awal telah memiliki idealisme untuk memperjuangkan kepentingan pembangunan baik yang bersikap nasional maupun daerah guna menghindari munculnya kader karbitan yang muncul secara tiba-tiba akibat dukungan kekuatan relasi dan finansial.
- 5. Untuk menyederhanakan proses demokrasi dan menghindarkan berulangkalinya penyelenggaraan pemilu, perlu direncanakan penyelenggaraan pemilu dengan memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal. Dengan demikian hanya akan ada dua kali pemilu, yaitu pemilu nasional untuk memilih presiden, anggota DPR dan DPD, dan pemilu lokal untuk memilih bupati/walikota dan anggota DPRD.
- 6. Paket UU bidang politik juga perlu direvisi untuk mewujudkan sistem pemilu yang lebih demokratis, efektif dan lebih mudah. Pembatasan jumlah partai perlu dilakukan dengan memperketat persyaratan untuk bisa ikut pemilu yang bertujuan untuk menghindari kebingungan rakyat pemilih dan efisiensi anggaran.

11. Perlu Segeranya Peraturan Pemerintah Tentang Pornografi

A. Pendahuluan

Rancangan Undang-undang Pornografi dan Pornoaksi telah disahkan DPR menjadi Undang-undang Pornografi pada tanggal 30 Oktober 2008. Dengan demikian Indonesia telah memiliki aturan formal mengenai pornografi dan pornoaksi. Diharapkan Undang-Undang ini akan dapat menyelamatkan bangsa dari kerusakan moral akibat pornografi dan pornoaksi yang sekarang ini semakin terbuka dan mudah diakses.

Namun demikian, keberadaan Undang-undang ini belum memberikan dampak positif terhadap maraknya pornografi dan pornoaksi di tengahtengah masyarakat kita, sebab untuk efektifnya pelaksanaan sebuah undang-undang diperlukan peraturan pemerintah. Sementara sampai saat ini belum ada tanda-tanda pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang pornografi dan pornoaksi.

B. Urgensi PP Pornografi

PP tentang pornografi sangat dibutuhkan di samping sebagai penjabaran yang lebih operasional terhadap isi UU Pornografi, juga untuk memperjelas definisi dan batasan pornografi sebagaimana yang terkandung dalam UU Pornografi. Sebagaimana diketahui keberatan beberapa pihak terhadap UU ini di antaranya adalah definisi pornografi yang melahirkan berbagai pemahaman. Di satu sisi UU ini menjamin kelestarian budaya bangsa, tetapi jika dilihat dari pasal-pasalnya memungkinkan tradisi atau budaya lokal masuk dalam kategori pornografi. Bahkan ada tuduhan dari beberapa pihak bahwa UU Pornografi bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait karena adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Atas dasar itu, maka PP tentang Pornografi diharapkan mengakhiri seluruh persengketaan yuridis formal dari undang-undang tersebut. Karena itu, diterbitkannya peraturan pemerintah diharapkan dapat menjembatani perlindungan terhadap moral bangsa dan tradisi budaya Indonesia yang berlandaskan bhinneka tunggal ika.

C. Usulan

- Segera diterbitkan PP-nya agar UU Pornografi bisa berjalan efektif dan manfaatnya dapat dirasakan oleh bangsa Indonesia.
- Perlunya penegasan kategori dan kriteria pornografi dan pornoaksi agar tidak menimbulkan salah tafsir dan salah paham di kalangan

masyarakat.

- 3. Kriteria pornografi dan pornoaksi:
 - a. Terbuka untuk umum tanpa batas usia,
 - b. Subyek aktornya bukan anak-anak,
 - c. Dominasi daya tarik pornografi dan pornoaksi untuk merangsang hasrat seksual (ma tasytahi anfus wa taladz al-a'yun),
 - d. Tidak terkait ritual keagamaan atau aksi spiritual keagamaan,
 - e. Tidak membawa misi utama pesan moral dan kepentingan pendidikan atau eksposisi dan konfigurasi seni berbobot tinggi, dengan kejelasan instrument yang dapat dijadikan ukuran tentang merangsang syahwat dan nilai seni.
- 4. Perlunya ketegasan dalam PP, apakah kasus yang terkait dengan pornografi termasuk delik aduan atau delik biasa/pidana.
- 5. Sanksi hukum yang jelas, tegas dan dijatuhkan pada subyek aktor atau fasilitatornya secara konsisten.
- 6. Sosialisasi tentang akibat yang ditimbulkan dan penegasan terhadap aparat yang berwenang untuk itu.
- 7. Perlunya aturan kendali dalam pengembangan Teknologi Informatika terutama hal-hal yang terkait dengan akses internet porno.
- 8. Perlunya penambahan kuantitas unsur ulama dalam LSF (Lembaga Sensor Film).
- Perlunya instansi khusus yang menangani hal-hal yang terkait dengan pornografi dan pornoaksi.

12. PP No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

A. Pendahuluan

Pendidikan diniyah dan pesantren adalah model/sistem pembelajaran yang tumbuh dan berkembang berbasis nilai, karakter, dan budaya. Di antara keutamaannya adalah transformasi ilmu pengetahuan yang bersifat substansif dan egalitarian. Sistem pendidikan di pondok pesantren terbukti telah melahirkan format keilmuan yang multi dimensi yaitu ilmu pengetahuan agama, membangun kesadaran sosial dan karakter manusia sebagai hamba Allah. Atas dasar itu, maka dalam pengaturan PP No. 55 Tahun 2007 hendaknya memuat penegasan yang lebih kongkrit bukan saja terhadap masa depan pondok pesantren, akan tetapi imbalan jasa yang patut diterima oleh pondok pesantren atas perannya dalam membina karakter bangsa yang merupakan sinergi

antara mujahadah, ijtihad dan jihad.

Kehadiran PP 55/2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan. Regulasi ini menegaskan perlunya pendidikan yang memberikan pengetahuan dan pembentukan sikap, kepribadian, keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya dan pentingnya pendidikan keagamaan dalam mempersiapkan peserta didik memiliki pengetahuan agama dan menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan agamanya.

Oleh karena itu, regulasi ini memerlukan berupa Peraturan Menteri Agama yang dapat memperjelas maksud PP ini. Regulasi yang akan dikeluarkan akan lebih baik apabila tetap memelihara karakter pesantren itu sendiri antara lain kemandirian pesantren sehingga regulasi yang akan dibuat tetap menjamin otonomi kelembagaan, pengelolaan akademik yang terkait dengan sistem pembelajarannya.

Isu pokok pada PP 55/2007 yang harus ada adalah penegasan tentang beberapa hal sebagai berikut:

- Pengertian yang disebut pendidikan keagamaan formal, disebabkan kata "formal" menimbulkan masalah karena akan berhadapan dengan realitas pesantren yang secara historis memiliki otonomi kelembagaan, dan manajemen. Akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa pondok pesantren sama sekali terlepas dari perhatian manajemen pendidikan nasional.
- 2. Pondok pesantren telah memiliki pendidikan diniyah. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pemerintah masih perlu mendirikan pendidikan diniyah formal atau jalan keluarnya dengan adanya program pemerintah mendirikan pendidikan diniyah formal yang bersifat program percontohan, akan tetapi tidak menyaingi lembaga pendidikan sejenis yang sudah ada.
- Peraturan Pemerintah diperlukan tentang peserta didik, ujian, kurikulum dan penghargaan terhadap lulusan yang dihasilkan dari pondok pesantren.

B. Isi PP No. 55 Tahun 2005

 Pasal 14–20: Pendidikan diniyah diselenggarakan pada jalur formal, non formal dan informal. Diperlukan penjelasan tentang ketiga jalur tersebut, apakah ketiga jalur tersebut harus ada atau hanya sekedar tawaran pilihan. 2. Pasal 15, 16

Pendidikan Diniyah Formil.

Perlu dipertegas posisi pemerintah.

Seharusnya diniyah formal tidak diperlukan.

3. Pasal 17, 18 dan 19

Apakah diperlukan pengaturan yang ketat tentang peserta didik, kurikulum dan ujian.

Kalau terjadi pengaturan dikhawatirkan akan terganggu kemandirian dan keberlangsungan Pendidikan Diniyah.

4. Pasal 14 & 26 tentang Pesantren:

Kurang jelas pengertian pondok pesantren.

5. Pasal 26 ayat 2:

Perlu penegasan dalam Peraturan Menteri Agama tentang hal berikut: Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah dan atau pendidikan tinggi, baik formal, non formal atau informal, standarisasi materi pokok pesantren, uji keahlian oleh satuan pendidikan yang ditunjuk oleh kementerian agama dan ujian nasional bagi yang formal.

C. Analisis

- Dalam PP/2007 tentang Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pendidikan diniyah dibagi menjadi pendidikan diniyah formal, informal, dan non formal. Pembagian tersebut perlu penjelasan karena dipahami bahwa pendidikan diniyah adalah pendidikan non formal.
- 2. Penggunaan kata"formal", seperti "pendidikan diniyah formal" dalam PP tersebut memungkinkan terjadinya formalisasi pendidikan keagamaan yang dikhawatirkan pendidikan keagamaan yang sudah mapan di lapangan mengalami reduksi atau intervensi.
- 3. Pasal (14 dan 26) tentang pesantren perlu penegasan pesantren sebagai wadah atau sebagai lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat, mandiri, mempunyai kekhasan dan keunikan tertentu yang menyiapkan ahli-ahli agama.
- 4. Regulasi yang akan dibuat tetap mempertahankan kesinambungan dan kemandirian pesantren.
- 5. Majelis taklim hendaknya berfungsi sebagai satuan pendidikan non formal.

968

D. Usulan

- Untuk membentuk pemahaman dan penjelasan tentang PP 55/ 2007 diperlukan Peraturan Menteri Agama (PMA). PMA tersebut dapat menjamin asas kepastian hukum, keadilan, keaslian, kekhasan, keunikan, kesinambungan dan kemandirian pendidikan diniyyah dan pesantren.
- PMA dan kebijakan tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan harus mempertahankan otonomi kelembagaan, otonomi pengelola, otonomi akademik yang terkait dengan sistem pemberdayaan.

3. PMA harus memuat:

- a. Definisi pesantren yaitu lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat, mandiri, mempunyai kekhasan dan keunikan tertentu yang menyiapkan peserta didik untuk menjadi ahli-ahli agama Islam (mutafaqqih fi al-din) atau menjadi seorang muslim yang memiliki keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di tengah-tengah masyarakat.
- b. Pesantren yang menyelenggarakan pengajian kitab-kitab, baik sorogan ataupun bandungan (pesantren salafiyah), dapat diakui sederajat dengan hasil pendidikan keagamaan formal setelah lulus uji keahlian keagamaan oleh Kementrian Agama.
- c. Pendidik di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat diakui menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama setelah menempuh uji keahlian oleh lembaga pendidikan keagamaan yang ditunjuk oleh Kementerian Agama.
- d. Standarisasi ilmu-ilmu yang bersumber dari agama Islam harus mengacu kepada materi-materi pokok yang menyebar di kebanyakan pesantren, seperti fiqih, tauhid, tasawuf, tafsir, hadits, dan gramatika Arab.
- 4. Perlunya sekolah-sekolah formal menganjurkan siswa-siswinya mengikuti pendidikan diniyah sebagai solusi keterbatasan jam belajar materi agama di sekolah dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia.
- 5. Penekanan fungsi pemerintah sebagai institusi yang memberikan pengakuan dan fasilitas dengan memberikan porsi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki spesifikasi khusus, bukan untuk melakukan intervensi dalam pendidikan keagamaan.

13. Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal

A. Pendahuluan

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Dalam Islam masalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik dan produk rekayasa genetik yang terjamin kehalalannya menurut syari'ah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ibadah.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada mengenai kehalalan produk terutama menyangkut bahan, produk dan proses, serta pengawasannya belum diatur secara komprehensip.

Karena itu, keberadaan undang-undang tentang jaminan Produk Halal sangat penting dan akan memberikan ketentraman batin dalam mengkonsumsi produk yang sesuai dengan tuntutan Islam.

B. Usulan

- Dalam rangka pelayanan pada masyarakat, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan produk halal dan bekerja sama dengan komponen masyarakat.
- 2. Pengawasan kehalalan produk baik produk dalam negeri maupun produk impor harus diatur secara tegas, jelas, dan efektif.
- 3. Pernyataan kehalalan suatu produk dilakukan oleh Organisasi Keagamaan (diusulkan MUI).
- Kewajiban produsen untuk menjamin produk halal diatur, dilaksanakan, dan diawasi secara efektif dalam berbagai peraturan perusahan sebagai tindak lanjut dan norma mandatory dalam undangundang.
- 5. Pelanggaran atas ketentuan undang-undang atas jaminan produk halal diberi sanksi baik bersifat administratif, ganti rugi dan atau pidana.
- 6. Selain tersedianya auditor halal yang akan melakukan audit kehalalan suatu produk undang-undang harus juga mengatur adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran pidana dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal.

14. Tindak Lanjut Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

A. Pendahuluan

970

Ibadah haji r nerupakah salah satu ibadah dalam Islam yang memerlukan

pengaturan yang komprehensip, hal ini mengingat pelaksanaan ibadah haji berada di luar negeri dan sangat jauh dari Indonesia. Ditambah lagi adanya keterkaitan antar lembaga dan kementerian yang memerlukan sinkronisasi kebijakan. Untuk memindahkan ratusan ribu jamaah baik saat keberangkatan, pelaksanaan dan kepulangan, serta mengatur pemondokan dan segala hal yang berkaitan dengan akomodasi bukanlah hal yang mudah. Juga berkaitan dengan minat umat Islam yang sangat tinggi untuk menunaikan ibadah haji perlu pengaturan yang jelas. Di sinilah diperlukannya keterlibatan pemerintah/ negara untuk mengatur pelaksanaan ibadah haji.

Dengan adanya UU No. 13 Tahun 2008 sebagai revisi atas UU No. 19 Tahun 1999 merupakan sinyal positif dari pemerintah akan perlunya keterlibatan pemerintah dalam regulasi penyelenggaraan ibadah haji. Namun demikian, keberadaan UU tersebut perlu dilihat lebih jauh apakah sudah memenuhi harapan umat Islam untuk terselenggaranya ibadah haji yang baik, biaya rasional dan acuntable.

Karena itu, dalam Muktamar NU ke-32, muktarimin memberikan sikap, catatan-catatan, dan usulan sebagai kontribusi pemikiran untuk dapat terselenggaranya pelaksanaan ibadah haji dengan baik, dalam arti jamaah haji merasa puas terlayani dan mereka dapat beribadah dengan khusyu' aman dan tenteram serta keuangan yang transparan dan acuntable.

B. Sikap Muktamirin

- 1. Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Pemerintah perlu segera menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri, mengingat ketentuan Pasal 66 menyatakan bahwa penyelesaian pelaksanaan pasal tersebut paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkannya undang-undang itu pada tanggal 28 April 2008.
- Guna untuk lebih efektifnya pengawasan penyelenggaraan ibadah haji sesuai ketetapan undang-undang perlu segera dibentuk Komite Pengawas Haji Indonesia (KPHI). Pemerintah segera mengusulkan keanggotaannya untuk diangkat oleh Presiden.
- 3. Kebijakan yang perlu diatur dalam berbagai peraturan pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji, antara lain:
 - a. Kejelasan tentang kriteria perumahan dan katering jamaah haji yang layak,

- b. Peningkatan Pelayanan Haji secara umum,
- c. Ketentuan kesempatan berhaji,
- d. Inti masalah haji karena tidak terpisahnya pelaksana dan pengawas,
- e. Transparansi dana yang dikelola oleh Departemen Agama dan harus ada laporan yang jelas kepada masyarakat.
- f. Dana abadi ummat diupayakan bisa digunakan untuk talangan setoran haji oleh jamaah.
- g. Penertiban dan pengawasan kelompok bimbingan haji oleh pemerintah.
- h. Dalam kaitan Pasal 11 ayat (2) dan (3) bila petugas Depag tidak ada yang memenuhi syarat (kemampuan di bidang manasik haji) maka Menteri Agama dapat menunjuk Petugas Haji dari Ormas Islam.
- 4. Usulan dalam teknis pelaksanaan Ibadaha Haji:
 - a. Sistem transportasi di Arab Saudi tidak menggunakan sistem *taraddudi*, tetapi sistem *tartib*.
 - b. Konsumsi selama pelaksanaan ibadah haji sejak di embarkasi sampai debarkasi dikelola oleh pemerintah.
 - c. Pemerintah harus memberikan arahan agar keikutsertaan kelompok bimbingan ibadah haji lebih fokus pada pembimbingan, kesiapan mental dan pemahaman manasik haji untuk tercapainya haji mabrur.

Makassar, 26 Maret 2010

Pimpinan Sidang Komisi

Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

Prof. Dr. H M. Ridwan Lubis

H. Ahmad Zubaidi, MA

Tim Perumus

- 1. H. Muhammad Fajrul Falakh, SH. MA.
- KH. Safruddin
- 3. Dr. H. Wahiduddin Adams, SH. MA.
- 4. Dr. dr. H. Syahrizal
- 5. Dr. H. Hilmi Muhammadiyah, MA.
- 6. Drs. H. Syaifullah Maksum
- 7. Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M. Si
- 8. KH. A. Mujib Imron, SH. MH.
- 9. Isyroqun Najah
- 10. Drs. H. Sururuddin
- 11. KH. Zezen Z. Abidin
- 12. Sahidin

972

13. Drs. H Suyitno, MA.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari, Maslak al-Atqiyaa' 'ala Hidayah al-Adzkiyaa'.
- Abdul Aziz/Izzuddin bin Abdissalam, al-Fatawa, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1986 M.
- Abdul Aziz/Izzuddin bin Abdissalam, Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.
- Abdul Aziz/Izzuddin bin Abdissalam, Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Damaskus: Dar al-Qalam, 2000 M.
- Abdul Aziz/Izzuddin bin Abdissalam, Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, Kairo: Dar al-Syarq, 1968 M.
- Abdul Hafidz al-Shawi, Khitan al-Inats, Mesir: Dar al-Kalimah, 2007 M.
- Abdul Hamid al-Syirwani dan Ibn Qasim al-'Ubbadi, Hawasyai al-Syirwani wa al-'Ubbadi, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Abdul Hamid al-Syirwani dan Ibn Qasim al-'Ubbadi, Hawasyai al-Syirwani wa al-'Ubbadi, Beirut: Dar al-Fikr, 1997 M.
- Abdul Hamid al-Syirwani dan Ibn Qasim al-'Ubbadi, Hawasyai al-Syirwani wa al-'Ubbadi, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.
- Abdul Hamid al-Syirwani dan Ibn Qasim al-'Ubbadi, Hawasyai al-Syirwani wa al-'Ubbadi, Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.
- Abdul Hamid al-Syirwani dan Ibn Qasim al-'Ubbadi, Hawasyai al-Syirwani wa al-'Ubbadi, Mesir: Dar al-Shadir, 1997 M.
- Abdul Hamid al-Syirwani, Hawasyi al-Syirwani pada Hawasyai al-Syarwani wa al-'Abbadi, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani 'ala Tuhfah al-Muhtaj, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t. th.
- Abdul Hamid al-Syirwani, Hasyiyah al-Syirwani 'ala Tuhfah al-Muhtaj, Mesir: Dar al-Shadir, t. th.
- Abdul Karim al-Mathari al-Dimyathi, Syarh al-Sittin, Singapura: al-Haramain, t. th.
- Abdul Karim Zaidan, al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah wa Bait al-Mal, Beirut: Muassasah al-Risalah, t. th.
- Abdullah Baqusyair, al-Qalaid.
- Abdullah bin Ahmad al-Maqdisi/Ibn Qudamah, al-Mughni, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994 M.
- Abdullah bin Ahmad al-Maqdisi/Ibn Qudamah, al-Mughni, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997 M.
- Abdullah bin Ahmad al-Maqdisi/Ibn Qudamah, al-Mughni, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.
- Abdullah bin Ahmad al-Maqdisi/Ibn Qudamah, al-Mughni, Mesir: Hijr, 1992 M.
- Abdullah bin Alawi al-Haddad, al-Nashaih al-Diniyah, Semarang: Toha Putera, t. th.
- Abdullah bin Alawi al-Haddad, al-Da'wah al-Tammah wa al-Tadzkirah al-'Ammah, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1933 M.

- Abdullah bin Hijazi al-Syarqawi, Hasyiyah al-Syarqawi 'ala Tuhfah al-Thullab (Syarh al-Tahrir), Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Abdullah bin Hijazi al-Syarqawi, Hasyiyah al-Syarqawi 'ala Tuhfah al-Thullab (Syarh al-Tahrir), Indonesia: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.
- Abdullah bin Hijazi al-Syarqawi, Hasyiyah al-Syarqawi 'ala Tuhfah al-Thullab (Syarh al-Tahrir), Mesir: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1332 H.
- Abdullah bin Hijazi al-Syarqawi, Hasyiyah al-Syarqawi 'ala Tuhfah al-Thullab (Syarh al-Tahrir), Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.
- Abdullah bin Hijazi al-Syarqawi, Hasyiyah al-Syarqawi 'ala Tuhfah al-Thullab (Syarh al-Tahrir), Surabaya: al-Hidayah, t. th.
- Abdullah bin Husain al-Alawi, Sulam Taufiq pada Mirqah Su'ud al-Tashdiq, Indonesia: CV. Karya Insan, t. th.
- Abdullah bin Husain al-Alawi, Sulam al-Taufiq pada Mirqah Shu'ud al-Tashdiq, Indonesia: Syirkah Nur Asia, t. th.
- Abdullah bin Sulaiman al-Jurhuzi, al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fawa'id al-Bahiyah pada al-Asybah wa al-Nadzair, Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.
- Abdullah bin Sulaiman al-Jurhuzi, al-Mawahib al-Saniyah Syarh al-Fawa'id al-Bahiyah pada al-Asybah wa al-Nadzair, Mesir: Amin Abdul Majid, 1955 M.
- Abdullah bin Umar al-Baidhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, Mesir: Mathba'ah Musthafa al-Halabi, 1939 M.
- Abdul Malik al-Juwaini/Imam Haramain, al-Burhan fi Ushul al-Fiqh, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997 M.
- Abdul Muhsin al-'Ubbad, Syarh Sunan Abi Dawud.
- Abdul Qadir Audah, al-Islam wa Audha'una al-Siyasiyyah, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1981 M.
- Abdul Qadir Audah, al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th.
- Abdul Qadir Audah, al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992 M.
- Abdul Qadir Audah, al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, Kairo: Maktabah Dar al-Turats, 2003 M.
- Abdul Wahhab al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, Indonesia: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.th.
- Abdul Wahhab al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, Mesir: Musthafa al-Halabi, t.th.
- Abdul Wahhab al-Sya'rani, al-Mizan al-Kubra, Singapura-Jeddah: al-Haramain, t. th.
- Abdul Wahhab al-Sya'rani, al-Yawaqit wa al-Jawahir, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1959 M.
- Abdurrahman al-Juzairi, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Beirut: Dar al-Fikr, 1990 M.
- Abdurrahman al-Juzairi, al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Beirut: Dar al-Fikr, 1996 M.

- Abdurrahman al-Juzairi, al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, Beirut: Dar al-Fikr, 2002 M.
- Abdurrahman al-Juzairi, al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, Beirut: Dar al-Fikr, 2004 M.
- Abdurrahman al-Sya'rani, *Hasyiyah 'ala Syarah al-Bahjah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t. th.
- Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha'ir, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazhair, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.
- Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazhair, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H.
- Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazhair, Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.
- Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazha'ir, Mesir: Maktabah Mustahafa Muhammad, t. th.
- Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, al-Jami' al-Shaghir min Hadits al-Basyir al-Nadzir.
- Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, *Tanwir al-Hawalik Syarh al-Mutawatha'*, Mesir: Isa al-Halabi, t. th.
- Abdurrahman bin Muhammad, al-Syarh al-Kabir pada al-Mughni, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1983 M.
- Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, Bandung: Syirkah Nur Asia, t. th.
- Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, *Bughyah al-Musytarsyidin*, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, Indonesia: al-Haramain, t. th.
- Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, Indonesia: Syirkah Nur Asia, t, th.
- Abdurrahman bin Muhammad Ba'lawi, Bughyah al-Musytarsyidin, Mesir: Musthafa al-Haalabi, t. th.
- Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1952 M.
- Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, Pekalongan: Syirkah Nur Asia, t. th.
- Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, Bughyah al-Mustarsyidin, Surabaya: al-Hidayah, t. th.
- Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, Ghayah Talkhish al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad pada Bughyah al-Mustarsyidin, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, Ghayah Talkhish al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad pada Bughyah al-Mustarsyidin, Indonesia: Syirkah Nur Asia, t. th.

- Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, Ghayah Talkhish al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad pada Bughyah al-Mustarsyidin, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1952 M.
- Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, Ghayah Talkhish al-Murad min Fatawa Ibn Ziyad pada Bughyah al-Mustarsyidin, Singapura-Jeddah: al-Haramain, t. th.
- Abu Bakar bin Ahmad, Thabaqat al-Syafi'iyyah, Beirut: Alam al-Kutub, t. th.
- Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni, Kifayah al-Akhyar, Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.
- Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar*, Damaskus: Dar al-Khair, t. th.
- Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni, Kifayah al-Akhyar, Damaskus: Dar al-Khair, 1994 M.
- Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni, Kifayah al-Akhyar, Indonesia: Dar al-Ilm.
- Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni, *Kifayah al-Akhyar*, Makkah: Maktabah al-Tijariyah, 1995 M.
- Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni, Kifayah al- Akhyar, Semarang: Toha Putra, t. th.
- Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni, Kifayah al-Akhyar, Surabaya: Dar al-Ilm, t.th.
- Abu Bakar bin Muhammad al-Hishni, Kifayah al-Akhyar, Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhan, t.th.
- Abu Ishaq 'Alawi al-Syirazi, al-Tanbih pada Syarh al-Tanbih al-Suyuthi, Beirut: Dar al-Fikr, 1996 M.
- Adil Ahmad Abdul Maujud dan Ali Muhammad 'Aud, *Tahqiq* pada *al-Asybah* wa al-Nazha'ir li Tajuddin al-Subki, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001 M.
- Ahmad al-Barlasi/'Umairah, Hasyiyah 'Umairah pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.
- Ahmad al-Barlasi/Umairah, Hasyiyah 'Umairah pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t. th.
- Ahmad al-Barlasi/Umairah, Hasyiyah 'Umairah pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1956 M.
- Ahmad al-Maihi al-Syaibani, Hasyiyah Syarh Sittin al-Ramli.
- Ahmad al-Saharanfuri al-Hindi, *Badzl al-Majhud fi Hall Abi Dawud*, Beirut: Dar a-Kutub al-Ilmiyah, t. th.
- Ahmad al-Syarbasyi, Yas'alunak 'an al-Din wa al-Hayah, Beirut: Dar al-Jail, t. th.
- Ahmad bin Abdul Halim/Ibn Taimiyah, Majmu'ah al-Fatawa, Kairo: Dar al-Hadits, 2006 M.
- Ahmad bin Abdurrahim/Syah Waliyullah al-Dahlawi, 'Iq al-Jid fi Ahkam al-Ijtihad wa al-Taqlid, Kairo: al-Mathba'ah al-Salafiyah, 1965 M.
- Ahmad bin Ahmad al-Qulyubi, Hasyiyah al-Qulyubi pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.
- Ahmad bin Ahmad al-Qulyubi, Hasyiyah al-Qulyubi pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, Indonesia: al-Haramain, t. th.

- Ahmad bin Ahmad al-Qulyubi, Hasyiyah al-Qulyubi pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t. th.
- Ahmad bin Ahmad al-Qulyubi, Hasyiyah al-Qulyubi pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1956 M.
- Ahmad bin Ali al-Razi/Abu Bakr al-Jashash, Ahkam al-Qur'an, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.
- Ahmad bin Ali/Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Ahmad bin Ali/Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar al-Fikr, 2000 M.
- Ahmad bin Ali/Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.
- Ahmad bin Ali/Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989 M.
- Ahmad bin Ali/Ibn Hajar al-'Asqalani, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.
- Ahmad bin Hamzah al-Ramli, Fatawa al-Ramli pada al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyah, Beirut: Dar al-Fikr, 1983 M.
- Ahmad bin Hijazi al-Fasyani, Mawahib al-Shamad fi Hall Alfazh al-Zubad, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Ahmad bin Muhammad al-Dardiri, al-Kharidah al-Bahiyah, Kairo: Dar al-Bashair, t. th.
- Ahmad bin Muhammad al-Hamawi, *Ghamz Uyun al-Bashair*, Beirut: Dar al-Kutub al-Tmiyah, 1985 M.
- Ahmad bin Muhammad al-Qusthalani, *Irsyad al-Sari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Ahmad bin Muhammad al-Qusthalani, Irsyad al-Sari bi Syarh Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar al-Fikr, 1992 M.
- Ahmad bin Muhammad al-Shawi, Hasyiyah al-Shawi 'ala Tafsir al-Jalalain, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2005 M.
- Ahmad bin Muhammad al-Shawi, Hasyiyah al-Shawi 'ala Tafsir al-Jalalain, Mesir: Isa al-Halabi, t. th.
- Ahmad bin Muhammad/Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Haditsiyah, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Ahmad bin Muhammad/Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Haditsiyah, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1970 M.
- Ahmad bin Muhammad/Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Haditsiyah, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1971 M.
- Ahmad bin Muhammad/Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra, Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H. Ahmad bin Muhammad/Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra,

Beirut: Dar al-Fikr, 1983 M.

Ahmad bin Muhammad/Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra, Beirut: Dar al-Fikr, 1984 M.

Ahmad bin Muhammad/Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra, (Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, t. th.

Ahmad bin Muhammad/Ibn Hajar al-Haitami, al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra, Mesir: al-Maktabah al-Islamiyah, t. th.

Ahmad bin Muhammad/Ibn Hajar al-Haitami, al-Minhaj al-Qawim, Indonesia: al-Haramain, t. th.

Ahmad bin Muhammad/Ibn Hajar al-Haitami, al-Minhaj al-Qawim, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1939 M.

Ahmad bin Muhammad/Ibn Hajar al-Haitami, al-Minhaj al-Qawim, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1942 M.

Ahmad bin Muhammad/Ibn Hajar al-Haitami, al-Minhaj al-Qawim pada al-Hawasyi al-Madaniyah, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1340 H.

Ahmad bin Muhammad/Ibn Hajar al-Haitami, al-Minhaj al-Qawim pada al-Hawasyi al-Madaniyah, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1366 H).

Ahmad bin Muhammad/Ibn Hajar al-Haitami, al-Minhaj al-Qawim pada al-Hawasyi al-Madaniyah, Singapura: al-Haramain, 1397 H.

Ahmad bin Muhammad/Ibn Hajar al-Haitami, al-Minhaj al-Qawim pada Mauhibah Dzi al-Fadhl, Mesir: al-Amirah al-Syarafiya, 1326 H.

Ahmad bin Muhammad/Ibn Hajar al-Haitami, al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kabair, Beirut: Dar al-Fikr, 1983 M.

Ahmad bin Muhammad/Ibn Hajar al-Haitami, al-Zawajir 'an Iqtiraf al-Kabair, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1950 M.

Ahmad bin Muhammad/Ibn Hajar al-Haitami, Fath al-Jawwad, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1971 M.

Ahmad bin Muhammad/Ibn Hajar al-Haitami, Hasyiyah 'ala al-Idhah fi al-Manasik, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Ahmad bin Muhammad/Ibn Hajar al-Haitami, Idhah al-Ahkam li Ma Ya'khudz al-'Ummal wa al-Hukkam.

Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, ...: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.

Ahmad bin Muhammad/Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada Hawasyaial-Syirwani wa al-'Abbadi, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.

Ahmad bin Muhammad/Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada Hawasyaial-Syirwani wa al-'Abbadi, Beirut: Dar al-Fikr, 1997 M.

Ahmad bin Muhammad/Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj* pada *Hawasyaial-Syirwani wa al-'Abbadi*, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, t. th.

Ahmad bin Muhammad/Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj* pada *Hawasyaial-Syirwani wa al-'Abbadi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996 M.

Ahmad bin Muhammad/Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada

- Hawasyai al-Syirwani wa al-'Abbadi, Mesir: Dar al-Shadr, t. th.
- Ahmad bin Muhammad/Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada Hawasyai al-Syirwani wa al-'Abbadi, Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.
- Ahmad bin Muhammad/Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj*, Mesir: Musthafa Muhammad, t. th.
- Ahmad bin Muhammad/Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfah al-Muhtaj pada Hawasyai al-Syirwani wa al-'Abbadi, Mesir: Musthafa Muhammad, t. th.
- Ahmad bin Qasim al-'Abbadi, *Hawasyi al-Abbadi* pada *Hawasyai al-Syarwani wa al-'Abbadi*, (Beirut: dar Ihya a-Turats al-'Arabi, t. th.
- Ahmad bin Qasim al-'Abbadi, *Hawasyi al-Abbadi* pada *Hawasyai al-Syarwani wa al-'Abbadi*, Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.
- Ahmad bin Yahya al-Harawi, al-Dur al-Nadhid.
- Ahmad Khatib al-Minagkabawi, Shulh al-Jama'atain bi Jawaz Ta'addud al-Jum'atain, Mesir: al-Mathba'ah al-Miyariyah, 1312 H.
- Ahmad Waliyullah al-Dahlawi, 'Iqd al-Jid fi Ahkam al-Ijtihad, Kairo: al-Mathba'ah al-Salafiyah, 1965 M.
- Al-Amradh al-Ijtima'iyah.
- Alauddin bin al-Authar, *Fatawa al-Imam al-Nawawi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983 M.
- Alawi al-Haddad, Misbah al-Anam wa Jala' al-Zhulam, Istanbul: Turki, Maktabah al-Haqiqah, 1996 M.
- Alawi bin Ahmad al-Saqqaf, al-Fawaid al-Makiyyah pada Majmu'ah Sab'ah Kutub Mufidah, Mesir: Musthafa al-Halabi, t. th.
- Alawi bin Ahmad al-Saqqaf, Mukhtashar al-Fawaid al-Makkiyah, Mesir: Musthafa al-Halabi, t. th.
- Alawi bin Ahmad al-Saqqaf, Tarsyih al-Mustafidin, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Alawi bin Ahmad al-Saqqaf, Tarsyih al-Mustafidin, Indonesia: al-Haramain, t. th.
- Alawi bin Ahmad al-Saqqaf, Tarsyih al-Mustafidin, Surabaya: al-Haramain, t. th.
- Al-Bakri bin Muhammad Syatha al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997 M.
- Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, I'anah al-Thalibin, Beirut: Dar al-Fikr, 2002 M.
- Al-Bakri Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin*, Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- Al-Bakri bin Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin*, Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t.th.
- Al-Bakri bin Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin*, Semarang: Maktabah Alawiyah, t. th.
- Al-Bakri bin Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin*, Semarang: Toha Putra, t.th.

- Al-Bakri bin Muhammad Syatha al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin*, Singapura: Maktabah Sulaiman Mar'i, t.th.
- Al-Bakri bin Muhammad Syatha al-Dimyati, I'anah al-Thalibin, Surabaya: al-Haramain, t. th.
- Al-Bakri bin Muhammad Syatha al-Dimyathi, Kifayah al-Atqiya' wa Minhaj al-Ashfiya', Semarang: Usaha Keluarga, t. th.
- Al-Bakri bin Muhammad Syatha al-Dirnyati, al-Wus'ah wa al-Ifadah pada Sulh al-Jama'atain bi Jawaz Ta'addud al-Jum'atain, Mesir: Mathba'ah al-Miyariyah, 1312 H.
- Al-Bashuni.
- Al-Fuyudhat al-Rabbaniyah, Himpunan Keputusan Muktamar Jam'iyah Ahli Thariqah al-Muktabarah al-Nahdhiyah.
- Al-Hufni, Hasyiyah Syaikh al-Hufni pada al-Siraj al-Munir, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1957 M.
- Al-Husain bin Mas'ud/Abu Muhammad al-Baghawi, Ma'alim al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. th.
- Al-Husain bin Mas'ud/Abu Muhammad al-Baghawi, Lubab al-Ta'wil fi Ma'alim al-Tanzil pada Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979 M.
- Al-Jawab al-Syafi.
- Ali al-Azizi, al-Siraj al-Munir, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1957 M.
- Ali al-Maliki, Qurrah al-'Ain.
- Ali al-Syibramalisi, *Hasyiyah Ali al-Syibramalisi* pada *Nihayah al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Ali al-Syibramalisi, *Hasyiyah Ali al-Syibramalisi* pada *Nihayah al-Muhtaj*, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1938 M.
- Ali Bashabrin, Itsmid al-'Ainain pada Bughyah al-Mustarsyidin, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1952 M.
- Ali bin Abdil Kafi al-Subki, Fatawa al-Subki, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. th.
- Ali bin Abdil Kafi al-Subki, Fatawa al-Subki, Beirut: Dar al-Fikr, 1979 M.
- Ali bin Abdil Malik Hisamuddin, Kanz al-'Ummal fi Sunan al-Aqwal wa al-Afal, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1989 M.
- Ali bin Abdissalam/Abu al-Hasan al-Tasuli, al-Bahjah fi Syarh al-Tuhfah, ...: Dar Rasyad al- Haditsiyah, 1991 M.
- Ali bin Abi Bakr al-Marghinani, al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi', Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, t. th.
- Ali bin Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998 M.
- Ali bin Isma'il/Abu Hasan al-Asy'ari, al-Ibanah 'an Ushul al-Diyanah, Damaskus: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005 M.
- Ali bin Muhammad al-Khazin, Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil, Beirut: Dar al-Fikr, 1979 M.
- Ali bin Muhammad al-Khazin, Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil, Beirut: Dar al-Fikr, 1989 M.

- Ali bin Muhammad al-Khazin, Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil, Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 2004 M.
- Ali bin Muhammad al-Khazin, Lubab al-Ta'wil fi Ma'ani al-Tanzil, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. th.
- Ali bin Muhammad Habib/Abu Hasan al-Mawardi, Adab al-Dunya wa al-Din, ...: Dar Maktabah al-Hayah, t.th.
- Ali bin Muhammad Habib/Abu Hasan al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1966 M.
- Ali bin Muhammad Habib/Abu Hasan al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Ali bin Muhammad Habib/Abu Hasan al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M.
- Ali bin Muhammad/Ibn al-Atsir, al-Kamil fi al-Tarikh, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1987 M.
- Ali bin Umar al-Daruquthni, Sunan al-Daruquthni, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1966 M.
- Ali Mahfudz, al-Ibda' fi Madharri al-Ibtida', Mesir: Dar al-I'tisham, t.th.
- Al-Kamtsari, Hasyiyah Kamtsari pada al-Anwar li A'mal al-Abrar, Mesir: Musthafa al-Halabi, t. th.
- Ayub bin Musa al-Husaini al-Kafawi, *Kitab al-Kiyat*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998 M.
- Bafadhal, Syarh Bafadhal pada Mauhibah Dzi al-Fadhl, Mesir: al-Amirah al-Syarafiyah, 1326 H.
- Ghanim bin Muhammad al-Baghdadi, Majma' al-Dhamanat.
- Hasan bin 'Amar al-Syaranbilali, *Maraq al-Falah Syarh Nur al-Idhah*, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1947 M.
- Hasanain Muhammad Makhluf, al-Fatawa al-Syar'iah wa al-Buhuts al-Islamiyah, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1965 M.
- Husain bin Sulaiman al-Rasyidi, Hasyiyah al-Rasyidi 'ala Fath al-Jawad, Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.
- Husain Ibrahim al-Maghribi, al-Fatawa Husain Ibrahim al-Maghribi, Bogor: Maktabah 'Arafah, t. th.
- Ibn Hajar, Syarh al-Syihab.
- Ibrahim bin Ali al-Ya'mari /Ibn Farhun, Tabshirah al-Hukkam fi Ushul al-Aqdhiyat wa Manahij al-Ahkam, Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyah, 2001 M.
- Ibrahim bin Ali/Abu Ishaq al-Syirazi, al-Muhadzdzab, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Ibrahim bin Ali/Abu Ishaq al-Syirazi, al-Muhadzdzab, Beirut: Dar al-Fikr, 1996 M.
- Ibrahim bin Ali/Abu Ishaq al-Syirazi, al-Muhadzdzab, Beirut: Dar al-Fikr, 2005 M.
- Ibrahim bin Ali/Abu Ishaq al-Syirazi, al- Muhadzdzab, Mesir: Maktabah Isa al-Halabi, t.th.
- Ibrahim bin Ali/Abu Ishaq al-Syirazi, al-Muhadzdzab pada al-Majmu', Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

- Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, Bandung: Syirkah al-Ma'arif, t. th.
- Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.
- Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 1922 M.
- Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, Mesir: Isa al-Halabi, 1922 M.
- Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, Singapura: Sulaiman Mar'i, t. th.
- Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Fath al-Qarib, Surabaya: al-Hidayah, t. th.
- Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri, Tuhfah al-Murid 'ala Jauhar al-Tauhid, Singapura: al-Haramain, t. th.
- Ibrahim bin Muhammad/Ibn Muflih, al-Mubdi' fi Syarh al-Muqni', Beirut: al-Maktab al-Islami, 1980 M.
- Ibrahim bin Musa/Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, Kairo: al-Madani, t.th.
- Ibrahim bin Musa/Abu Ishaq al-Syathibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, Kairo: al-Madani, 1969 M.
- Idris Abdul Rauf al-Marbawi, *Qamus al-Marbawi*, Mesir: Musthafa al-Halabi, t. th.
- Isma'il bin Umar/Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Isma'il bin Umar/Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-Azhim, Kairo: Dar al-Hadits, 2003 M.
- Isma'il bin Umar/Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-Azhim, ...: Dar Thayyibah, 1999 M.
- 'Iwadh, Hasyiyah 'Iwadh pada al-Iqna', Semarang: Thaha Putra, t. th.

Kazaruri, Hamisy Tafsir Baidhawi.

- Mahmud bin Abdullah al-Husaini/al-Alusi al-Kabir, Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M.
- Mahmud bin Ahmad al-Kasani, Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syarai', Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.
- Mahmud bin Ahmad al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syarai'*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1978 M.
- Majalah al-Nahdhah al-Ishlahiyah.
- Majalah Nur al-Islam.
- Manshur bin Yunus al-Bahuti, Kasyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna', Beirut: Dar al-Fikr, t. th.

- Manshur bin Yunus al-Bahuti, Kasyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna', Beirut: Dar al-Fikr, 1982 M.
- Muhammad Abdrurrahman bin Abdurrahim/Abu al-'Ala al-Mubarakfuri, Tuhfah al-Ahwadzi 'ala Syarh al-Tirmidzi, Beirut: Dar al-Kutub al-Tilmiyah, t. th.
- Muhammad Abdurrauf al-Munawi, Faidh al-Qadir, Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M.
- Muhammad Abdurrauf al-Munawi, Faidh al-Qadir, Riyadh: Maktabah al-Imam al-Syafi'i, 1988 M.
- Muhammad Ali al-Maliki, *al-Sharim al-Mubid*, Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, 1923 M.
- Muhammad Ali al-Maliki, Anwar al-Syuruq fi Ahkam al-Shunduq.
- Muhammad Ali al-Maliki, Qurrah al-'Ain bi Fatawa 'Ulama al-Haramain, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Muhammad Ali al-Maliki, Qurrah al-'Ain bi Fatawa 'Ulama al-Haramain, Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, 1937 M.
- Muhammad Ali al-Maliki, Risalah Bulugh al-Umniyah fi Fatawa al-Nawazil al-'Ashriyah pada Inarah al-Duja Syarh Tanwir al-Hija Nadzm Safinah al-Naja, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1952 M.
- Muhammad Ali al-Maliki, Syams al-Isyraq fi Hukm al-Ta'amul bi al-Arwaq, Indonesia: Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah, t. th.
- Muhammad Ali al-Maliki, Syams al-Isyraq fi Hukm al-Ta'ammul bi al-Arwaq, Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, 1921 M.
- Muhammad Ali al-Syinwani, Hasyiyah Mukhtashar Abi Jamrah/Jam' al-Nihayah, Mesir: Isa al-Halabi, t. th.
- Muhammad Ali bin Husain al-Maliki, Tahdzib al-Furuq wa al-Qawa'id al-Saniyah fi al-Asrar al-Fiqhiyah pada Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq, ...:
 'Alam al-Kutub, t. th.
- Muhammad Ali bin Muhammad/Ibn Allan al-Shiddiqi, Dalil al-Falihin, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir al-Qulub fi Mu'amalat al-'Allam al-Ghuyub, Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M.
- Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir al-Qulub fi Mu'ammalah 'Allam al-Ghuyub, Indonesia: Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyah.
- Muhammad Amin al-Kurdi, Tanwir al-Qulub fi Mu'ammalah 'Allam al-Ghuyub, Surabaya: Syirkah Bugkul Indah, t. th.
- Muhammad Amin bin Umar/Ibn Abidin, Radd al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, t. th.
- Muhammad Bakhit bin Husain al-Muthi'i, Majalah al-Hidayah al-Islamiyah, Mesir: Jumadil Ula 1352 H/Agustus 1933 M.
- Muhammad Bakhit bin Husain al-Muthi'i, Risalah Syaikh Bakhit al-Muthi'i pada al-Nahdhah al-Islamiyah.
- Muhammad Bakhit bin Husain al-Muthi'i, Risalah Syaikh Bakhit pada Majalah Nur al-Islam, Mesir: th. ke-6.

- Muhammad Bakhit bin Husain al-Muthi'i, Sulam al-Wushul Syarh Nihayah al-Sul, Mesir: Bahrul Ulum, t.th.
- Muhammad Bakhit bin Husain al-Muthi'i, Takmilah al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Muhammad Bakhit bin Husain al-Muthi'i, Takmilah al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Beirut: Dar al-Fikr, 1996 M.
- Muhammad Bakhit bin Husain al-Muthi'i, Takmilah al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t. th.
- Muhammad bin Abdullah al-Jurdani, Fath al-'Alam bi Syarh Mursyid al-Anam, Mesir: al-Amirah, 1323 H.
- Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimah pada al-Mizan al-Kubra, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimah pada al-Mizan al-Kubra, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1965 M.
- Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah, Tahqiq Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.th.
- Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimah pada al-Mizan al-Kubra, Singapura-Jeddah: al-Haramain, t. th.
- Muhammad bin Abi Bakr/Ibn Qayyim al-Jauziyah, al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah, Beirut: Dar Ihya' al-Ulum, t. th.
- Muhammad bin Abi Bakr/Ibn Qayyim al-Jauziyah, al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah, Kairo: Dar al-Hadits, 2000 M.
- Muhammad bin Ahmad al-Dasuqi, Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Muhammad bin Ahmad al-Dasuqi, Hasyiyah al-Dasuqi 'ala al-Syarh al-Kabir, Beirut: Dar al-Fikr, 1969 M.
- Muhammad bin Ahmad al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Muhammad bin Ahmad al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Mesir: al-Maktabah al-Islamiyah, t. th.
- Muhammad bin Ahmad al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1938 M.
- Muhammad bin Ahmad al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1967 M.
- Muhammad bin Ahmad al-Mahalli dan Abdurrahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, Tafsir al-Jalalain pada al-Futuhat al-Ilahiyat, Mesir: Isa al-Halabi, t. th.
- Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, Syarh al-Mahalli 'ala Jam' al-Jawami' al-Badr al-Thali' pada Hasyiyah al-'Aththar, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.
- Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, Syarh al-Mahalli/Kanz al-Raghibin pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, Syarh al-Mahalli/Kanz al-Raghibin pada

- Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M.
- Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, Syarh al-Mahalli/Kanz al-Raghibin pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, Beirut: Dar al-Fikr, 2003 M.
- Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, Syarh al-Mahalli/Kanz al-Raghibin pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.
- Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, Syarh al-Mahalli/Kanz al-Raghibin pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, Beirut: Dar al-Nasyr al-Mishriyah, t. th.
- Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, Syarh al-Mahalli/Kanz al-Raghibin pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.
- Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, Syarh al-Mahalli/Kanz al-Raghibin pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, Indonesia: al-Haramain, t. th.
- Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, Syarh al-Mahalli/Kanz al-Raghibin pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t. th.
- Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, Syarh al-Mahalli/Kanz al-Raghibin pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1956 M.
- Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, Syarh al-Mahalli/Kanz al-Raghibin pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, Surabaya: Dar Nasyr al-Mishriyah, t. th.
- Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, Syarh al-Mahalli/Kanz al-Raghibin pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, Surabaya: al-Mishriyah, t. th.
- Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, Syarh al-Mahalli/Kanz al-Raghibin pada Hasyiyata Qulyubi wa 'Umairah, Surabaya: Dar Nasyr al-Mishriyah, t. th.
- Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1967 M.
- Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Kairo: Dar al-Sya'b, t. th.
- Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, t. th.
- Muhammad bin Ahmad al-Syatiri, Syarh al-Yaqut al-Nafis.
- Muhammad bin Ahmad al-Syirbini, al-Iqna', Bandung: Syirkah al-Ma'arif, t. th.
- Muhammad bin Ahmad al-Syirbini, al-Iqna' fi Hill Alfazh Abi Syuja', Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H.
- Muhammad bin Ahmad al-Syirbini, al-Iqna' fi Hill Alfazh Abi Syuja', Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M.
- Muhammad bin Ahmad al-Syirbini, al-Iqna' fi Hill Alfazh Abi Syuja', Mesir: Mushtafa al-Halabi, 1951 M.
- Muhammad bin Ahmad al-Syirbini, al-Iqna' pada Tuhfah al-Habib (Hasyiyah Sulaiman al-Bujairimi), Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Muhammad al-Khatib al-Syirbini, al-Iqna' pada Tuhfah al-Habib, Mesir: Mathba'ah al-Taqadum al-Ilmiyah, t. th.

- Muhammad bin Ahmad al-Syirbini, al-Iqna' pada Tuhfah al-Habib, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1338 H.
- Muhammad bin Ahmad al-Syirbini, al-Siraj al-Munir fi al-I'anah 'ala Ma'rifah Ba'd Kalam Rabbina al-Hakim al-Munir, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th.
- Muhammad bin Ahmad al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, Beirut: Dar Fikr, t. th.
- Muhammad bin Ahmad al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, Beirut: Dar al-Fikr, 2003 M.
- Muhammad bin Ahmad al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.
- Muhammad bin Ahmad al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003 M.
- Muhammad bin Ahmad al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.
- Muhammad bin Ahmad al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, 1957 M.
- Muhammad bin Ahmad al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, Mesir: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1329 H.
- Muhammad bin Ahmad al-Syirbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1957 M.
- Muhammad bin Ahmad/Badruddin al-'Aini, 'Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari, Mesir: al-Muniriyah, t. th.
- Muhammad bin Ahmad/Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 2006 M.
- Muhammad bin Ahmad/Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladih, 1975 M.
- Muhammad bin Ahmad/Ulaisy, Minah al-Jalil li Mukhtashar al-Khalil, Beirut: Dar al-Fikr, 1989 M.
- Muhammad bin al-Husain/Abu Ya'la al-Farra', al-Ahkam al-Sulthaniyah, Surabaya: Ahmad Nabhan, 1974 M.
- Muhammad bin Ali/Alauddin al-Hashkafi, al-Dur al-Mukhtar pada Rad al-Muhtar, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Muhammad bin Ali/Alauddin al-Hashkafi, al-Dur al-Mukhtar pada Rad al-Muhtar, Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H.
- Muhammad bin Ali/Ibn Daqiq al-'Id, Ihkam al-Ahkam Syarh 'Umdah al-Ahkam, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Muhammad bin Ali/Syams al-Haq Abadi, 'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud, Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyah, 1415 H.
- Muhammad bin Ibrahim/Ibn Mundzir al-Naisaburi, al-Ijma', Qatar: Riasah al-Mahakim al-Syar'iyah wa Syuun al-Diniyah, 1987 M.
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i, al-Umm, Beirut: Dar al-Fikr, 1990 M.
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i, al-Umm, Mesir: Mathba'ah al-Fanniyah al-

- Muttahidah, 1961 M.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, t. th.
- Muhammad bin Isma'il al-Shan'ani/al-Amir, Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.
- Muhammad bin Isma'il al-Shan'ani/al-Amir, Subul al-Salam Syarh Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam, ...: Dar al-Hadits, t. th.
- Muhammad bin Jarir al-Thabari, Jami' al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an/ Tafsir al-Thabari, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Muhammad bin Jarir al-Thabari, Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an/ Tafsir al-Thabari, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2000 M.
- Muhammad bin Muhammad/Abu Hamid al-Ghazali, al-Iqtishad fi al-I'tiqad, Jeddah: Dar al-Minhaj, 2008 M.
- Muhammad bin Muhammad/Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.
- Muhammad bin Muhammad/Abu Hamid al-Ghazali, Faishal al-Tafriqah pada Majmu'ah al-Rasa'il, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2006 M.
- Muhammad bin Muhammad/Abu Hamid al-Ghazali, Ihya' Ulum al-Din, Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M.
- Muhammad bin Muhammad/Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Mesir: Isa al-Halabi, t.th.
- Muhammad bin Muhammad/Abu Hamid al-Ghazali, Ihya' Ulum al-Din, Mesir: Muassasah al-Halabi, 1968 M.
- Muhammad bin Muhammad/Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1939 M.
- Muhammad bin Muhammad/Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1968 M.
- Muhammad bin Muhammad/Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din* pada *Ithaf al-Sadah al-Muttaqin*, Beirut: Maktabah Dar al-Fikr, t.th.
- Muhammad bin Muhammad al-Mukhtar al-Syanqithi, Sayrh Zad al-Mustaqni'.
- Muhammad bin Muhammad al-Ru'aini/al-Haththab, Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil, Beirut: Dar al-Nasyr, 1398 H.
- Muhammad bin Muhammad al-Rua'aini/al-Haththab, Qurrah al-'Ain li Syarh Waraqat pada Lathaif al-Isyarat, Bandung: al-Ma'arif, t. th.
- Muhammad bin Muhammad/Sabth al-Maradini, Syarh al-Rahabiyah fi 'Ilm al-Faraidh, Damaskus: Dar al-Qalam, 2004 M.
- Muhammad bin Mukarram/Ibn Manzhur, Lisan al-Arab, Beirut: Dar al-Shadir, t. th.
- Muhammad bin Qasim al-Ghazi, Fath al-Qarib pada Hasyiyah al-Bajuri, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Muhammad bin Qasim al-Ghazi, Fath al-Qarib pada Hasyiyah al-Bajuri, Singapura: Sulaiman Mar'i, t. th.

- Muhammad bin Qasim al-Ghazi, Fath al-Qarib pada Hasyiyah al-Bajuri, Surabaya: al-Hidayah, t. th.
- Muhammad bin Salim Babashil, *Is'ad al-Rafiq 'ala Sulam al-Taufiq*, Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyah t. th.
- Muhammad bin Salim Babashil, *Is'ad al-Rafiq 'ala Sulam al-Taufiq*, Singapura: al-Haramain, t. th.
- Muhammad bin Salim Babashil, *Is'ad al-Rafiq 'ala Sullam al-Taufiq*, Surabaya: al-Hidayah, t. th.
- Muhammad bin Sulaiman al-Baghdadi, al-Khadiqah al-Nadiyah.
- Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, Qurrah al-'Ain.
- Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, al-Tafsir al-Munir/Murah Labid li Kasuf Ma'ani al-Qur'an al-Majid, Mesir: Isa al-Halabi, 1314 H.
- Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, al-Tafsir al-Munir/Murah Labid li Kasyf Ma'ani al-Qur'an al-Majid, Mesir: Isa al-Halabi, t. th.
- Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, al-Tsimar al-Yani'ah 'ala al-Riyadh al-Badi'ah, Indonesia: al-Haramain, 2006 M.
- Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, Fath al-Mujib fi Syarh Mukhtashar al-Khatib pada 'Umdah al-Abrar, Makkah: Musthafa al-Amirah, t. th.
- Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, Kasyifah al-Saja Syarh Safinah al-Naja, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1343 H.
- Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, *Kasyifah al-Saja*, Semarang: Toha Putra, t. th.
- Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, Kasyifah al-Saja Syarh Safinah al-Naja, Surabaya: al-Hidayah, t. th.
- Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, Kasyifah al-Saja Syarh Safinah al-Naja, Surabaya: Dar al-Ilmi, t. th.
- Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, *Maraqi al-'Ubudiyah Syarh Bidayah al-Hidayah*, Surabaya: al-Hidayah, t. th.
- Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, *Mirqah Su'ud al-Tashdiq Syarh Sulam al-Taufiq*, Bandung: Maktabah Nur Asia, t. th.
- Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, Mirqah Su'ud al-Tashdiq Syarh Sulam al-Taufiq, Indonesia: CV. Karya Insan, t. th.
- Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, Mirqah Shu'ud al-Tashdiq Syarh Sulam al-Taufiq, Indonesia: Griya Insan, t. th.
- Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, Miraqah Shu'ud al-Tashdiq Syark Sulam al-Taufiq, Kudus: Menara Kudus, t. th.
- Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, Mirqah Shu'ud al-Tashdiq Syarh Sulam al-Taufiq, Semarang: Usaha Keluarga, t. th.
- Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain, Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M.

- Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, Nihayah al-Zain Syarh Qurrah al-'Ain, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2008 M.
- Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, Qathr al-Ghaits, Indonesia: al-Haramain, 2006 M.
- Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, Riyadh al-Badi'ah.
- Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, Salalim Fudhala' Syarh Hidayah al-Adzkiya' pada Kifayah al-Atqiya' wa Minhaj al-Ashfiya', Semarang: Usaha Keluarga, t. th.
- Muhammad Ibrahim, al-Madzhab 'Inda al-Syafi'i.
- Muhammad Ihsan Dahlan, Siraj al-Thalibin, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1955 M.
- Muhammad Mahfudz bin Abdullah al-Tarmasi, Mauhibah Dzi al-Fadhl, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Muhammad Mahfudz bin Abdullah al-Tarmasi, Mauhibah Dzi al-Fadhl, Mesir: al-Amirah al-Syarafiyah, 1326 H.
- Muhammad Muhyiddin bin Mushthafa/Syaikh Zadah, Hasyiyah Tafsir al-Baidhawi, Turki: al-Maktabah al-Islamiyah, t. th.
- Muhammad Rais al-Zubairi, Fatawa Zubairi pada Qurrah al-'Ain bi Fatawa 'Ulama al-Haramain, Mesir: al-Tijariyah ak-Kubra, 1937 M.
- Muhammad Sulaiman al-Kurdi, al-Hawasyi al-Madaniyah 'ala Syarh Bafadhal, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1340 H.
- Muhammad Sulaiman al-Kurdi, al-Hawasyi al-Madaniyah 'ala Syarh Bafadhal, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1366 H.
- Muhammad Sulaiman al-Kurdi, al-Hawasyi al-Madaniyah 'ala Syarh Bafadhal, Singapura: al-Haramain, t.th.
- Muhammad Sulaiman al-Kurdi, al-Hawasyi al-Madaniyah, Surabaya: Maktabah Ahmad Nabhan, t. th.
- Muhammad Sulaiman al-Kurdi, Fatawa al-Kurdi, Bogor: Maktabah Arafah, t. th.
- Muhammad bin Muhammad Murtadha al-Zabidi, Ithaf al-Sadah al-Muttaqin, Beirut: Maktabah Dar al-Fikr, t.th.
- Muhammad bin Muhammad Murtadha al-Zabidi, *Ithaf al-Sadah al-Muttaqin*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2002 M.
- Muhammad bin Umar/Fakhruddin al-Razi, al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988 M.
- Muhammad bin Umar/Fakhruddin al-Razi, Mafatih al-Ghaib/Tafsir al-Fakhr al-Razi, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Muhammad bin Umar/Fakhruddin al-Razi, Mafatih al-Ghaib/Tafsir al-Fakhr al-Razi, Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M.
- Muhammad Yusuf Musa, al-Islam wa Hajah al-Insan Ilaih, Kuwait: Maktabah al-Falah, 1978 M.
- Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, Shahih Muslim, Beirut: Dar al-Jail, t. th.
- Musthafa Ahmad al-Zarqa, al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm, Damaskus: Alif Ba al-Adib, 1968 H.

- Musthafa Ahmad al-Zarqa, al-Madkhal al-Fiqhi al-'Amm, Damaskus: Dar al-Fikr, t. th.
- Musthafa al-Dzahabi, *Taqrir Musthafa al-Dzahabi* pada *Hasyiyah al-Syarqawi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1226 H.
- Mushthafa Dib al-Bugha, al-Tadzhib fi Adillah Mant Ghayah wa al-Taqrib, Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1996 M.
- Nizhamuddin al-Balkhi, dkk., al-Fatawa al-Hindiyah/al-Fatawa al-'Alamkariyah, Mesir: al-Amiriyah, 1314 H.
- Rahmatullah bin Khalilurrahman al-Hindi, *Izhhar al-Haq*, Maroko: al-Dar al-Baidha', t. th.
- Salim bin Samir al-Hadrami, Sulam al-Taufiq, Pekalongan: Maktabah Raja Murah, t. th.
- Samir Abdul Hamid Ridhwan, Aswaq al-Auraq al-Maliyah.
- Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sayyid Utsman al-Batawi, al-Mabahits al-Wafiyah fi Hukm al-A'thari al-Afranjiya.
- Sa'id bin Muhammad Ba'asyan, Busyra al-Karim, Singapura: Sulaiman Mar'i, t. th.
- Shalih Abdissami' al-Azhari, Jawahir al-Iklil 'ala Syarh al-'Allamah al-Khalil, Mesir: Dar al-Rasyad al-Haditsiyah, t. th.
- Shalih Ali Nashir, dkk, Tharaiq al-Hukm fi al-Syar'iyah al-Islamiyah.
- Sulaiman al-Zuhdi al-Naqsyabandi, Majmu'ah al-Rasa'il.
- Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani/Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, 1950 M.
- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, al-Tajrid li Naf al-'Abid, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, t. th.
- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, al-Tajrid li Naf al-'Abid/Hasyiyah al-Bujairimi 'ala Fath al-Wahhab, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003 M.
- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, al-Tajrid li Naf al-'Abid/Hasyiyah al-Bujairimi 'ala Fath al-Wahhab, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2005 M.
- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, al-Tajrid li Naf' al-'Abid, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1345 M.
- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, al-Tajrid li Naf' al-'Abid, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1950 M.
- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, Hasyiyah al-Bujairimi 'ala Fath al-Wahhab, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t, th.
- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib*, Mesir: al-Taqaddum al-Ilmiyah, t. th.
- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, Tuhfah al-Habib/Hasyiyah al-Bujairimi 'ala al-Khatib, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Tuhfah al-Habib/Hasyiyah al-Bujairimi 'ala al-Khatib*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M.
- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Tuhfah al-Habib 'ala al-Iqna'*, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1338 H.

- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Tuhfah al-Habib 'ala al-Iqna'*, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1951 M.
- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Tuhfah al-Habib/Hasyiyah al-Bujairimi 'ala al-Khatib*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003 M.
- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, Hasyiyah al-Bujairimi 'ala al-Khatib, Beirut: Dar al-Fikr, th.
- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, Hasyiyah al-Bujairimi 'ala Fath al-Wahhab, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t, th.
- Sulaiman bin Umar al-Jamal, Futuhat al-Wahhab/Hasyiyah al-Jamal, Beirut: Dar al-Fikr t. th.
- Sulaiman bin Umar al-Jamal, Futuhat al-Wahhab, Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabi, t. th.
- Sulaiman bin Umar al-Jamal, *Futuhat al-Wahhab*, Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th. Sulaiman bin Umar al-Jamal, *Futuhat al-Wahhab*, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1345 H. Sulaiman bin Umar al-Jamal, *Futuhat al-Wahhab*, Mesir: Musthafa Muhammad, t. th. Sulaiman bin Umar al-Jamal, *Futuhat al-Ilahiyah 'ala al-Jalalain*.
- Tajuddin bin Ali al-Subki, Thabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra, 1413 H.

Takmilah al-Majmu', Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t. th.

Taqiyuddin al-Subki, *al-'Ilm al-Mansyur fi Itsbat al-Syuhur*, Indonesia: Madrasah al-Salafiyah al-Syafi'iyah Tebuireng, 1354 H.

Thaha Jib, Majalah al-Azhar, Mesir.

Utsman bin Ali al-Zaila'i, *Tabyin Haqaiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, Pakistan: Maktabah Imdadiyah, t. th.

Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Damaskus: Dar al-Fikr, t. th.

Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989 M.

Wahbah al-Zuhaili, al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'asyirah, Damaskus: Dar al-Fikr, 2008 M.

Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Adzkar.

Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Beirut: Dar al-Fikr, t. th. Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Beirut: Dar al-

Fikr, 1317 H. Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-

Fikr, 1992 M. Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996 M.

Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Kairo: al-Ahsin, t. th. Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Kairo: al-Maktabah al-Ilmiah, 1971 M.

Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Mesir: al-Imam, t. th. Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1978 M.

- Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, Beirut: Dar al-Fikr, 2000 M.
- Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, t. th.
- Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1392 H.
- Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim, Kairo: al-Sya'b, 1390 H.
- Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Khulashah al-Ahkam, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000 M.
- Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Minhaj al-Thalibin pada Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t. th.
- Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Minhaj al-Thalibin pada Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Alfazh al-Minhaj, Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.
- Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, Beirut: al-Maktab al-Islami, t. th.
- Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1405 H.
- Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1985 M.
- Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.
- Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Riyadh al-Shalihin, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Riyadh al-Shalihin, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997 M.
- Ya'qub bin Ibrahim/Abu Yusuf, al-Kharraj, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979 M.
- Yusuf bin Ibrahim al-Ardabili, *al-Anwar li al-A'mal al-Abrar*, Mesir: Musthafa al-Halabi, t. th.
- Yusuf bin Ibrahim al-Ardabili, al-Anwar li al-A'mal al-Abrar, ...: Maktabah al-Tijariyyah, t. th.
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Fath al-Mu'in, Semarang: Pustaka Alawiyah, t. th.
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Fath al-Mu'in pada I'anah al-Thalibin, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Fath al-Mu'in pada I'anah al-Thalibin, Beirut: Dar al-Fikr, 1997 M.
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Fath al-Mu'in pada I'anah al-Thalibin, Beirut: Dar al-Fikr, 2002 M.
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Fath al-Mu'in pada I'anah al-Thalibin, Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Fath al-Mu'in pada I'anah al-Thalibin, Semarang: Toha Putra, t.th.

- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Fath al-Mu'in pada I'anah al-Thalibin, Singapura: Maktabah Sulaiman Mar'i, t.th.
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Fath al-Mu'in pada Tarsyih al-Mustafidin, Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Fath al-Mu'in pada Tarsyih al-Mustafidin, Beirut: Dar al-Fikr, 1997 M.
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Fath al-Mu'in pada Tarsyih al-Mustafidin, Beirut: Dar al-Fikr, 2002 M.
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Irsyad al-'Ibad ila Sabil al-Rasyad, Surabaya: al-Hidayah, t. th.
- Zainuddin bin Ali al-Malibari, Hidayah al-Adzkiya pada Kifayah al-Atqiya, Semarang: Usaha Keluarga, t. th.
- Zainuddin bin Ibrahim/Ibn Najim, al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t. th.
- Zainuddin bin Ibrahim/Ibn Najim, al-Asybah wa al-Nazha'ir, Makkah: Nizar Musthafa al-Baz, 1997 M.
- Zakaria bin Muhammad al-Anshari, Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib, Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, t. th.
- Zakaria bin Muhammad al-Anshari, Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib, Beirut: Dar al-Kutub al-Islami, t. th.
- Zakaria bin Muhammad al-Anshari, Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th.
- Zakaria bin Muhammad al-Anshari, Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001 M.
- Zakaria bin Muhammad al-Anshari, Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib, Indonesia: Menara Kudus, t. th.
- Zakaria bin Muhammad al-Anshari, Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib, Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, t. th.
- Zakaria bin Muhammad al-Anshari, Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib, Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, t.th.
- Zakaria bin Muhammad al-Anshari, Asna al-Mathalib Syarh Raudh al-Thalib, Kairo: al-Kutub al-Islami, t. th.
- Zakaria bin Muhammad al-Anshari, Fath al-'Alam bi Syarh al-A'lam bi Ahadits al-Ahkam.
- Zakaria bin Muhammad al-Anshari, Fath al-Wahhab, Bandung: Syirkah al-Ma'arif, t. th.
- Zakaria bin Muhammad al-Anshari, Fath al-Wahhab, Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H.
- Zakaria bin Muhammad al-Anshari, Fath al-Wahhab, Beirut: Dar al-Fikr, 2002 M.
- Zakaria bin Muhammad al-Anshari, Fath al-Wahhab, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1418 H.
- Zakaria bin Muhammad al-Anshari, Fath al-Wahhab, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1996 M.

- Zakaria bin Muhammad al-Anshari, Fath al-Wahhab, Indonesia: Dar al-Ihya' al-Kutub al-Arabiyah, t. th.
- Zakaria bin Muhammad al-Anshari, Fath al-Wahhab pada al-Tajrid li Naf al-'Abid (Hasyiyah al-Bujairimi 'ala al-Manhaj), Beirut: Dar al-Fikr, t. th.
- Zakaria bin Muhammad al-Anshari, Fath al-Wahhab pada al-Tajrid li Naf al-'Abid, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1345 H.
- Zakaria bin Muhammad al-Anshari, Fath al-Wahhab pada al-Tajrid li Naf al-'Abid, Mesir: Musthafa al-Halabi, 1950 M.
- Zakaria bin Muhammad al-Anshari, Fath al-Wahhab pada Futuhat al-Wahhab, Beirut: Dar al-Fikr t. th.
- Zakaria bin Muhammad al-Anshari, Fath al-Wahhab pada Futuhat al-Wahhab, Mesir: al-Tijariyah al-Kubra, t. th.
- Zakaria bin Muhammad al-Anshari, Fath al-Wahhab pada Futuhat al-Wahhab, Mesir: Musthafa Muhammad t. th.
- Zakaria bin Muhammad al-Anshari, Fath al-Wahhab, Surabaya: al-Hidayah, t. th. Zakaria bin Muhammad al-Anshari, Manhaj al-Thullab pada Fath al-Wahhab, Bandung: Syirkah Ma'arif, t. th.
- Zakaria bin Muhammad al-Anshari, *Tuhfah al-Thullab* pada *Hasyiyah al-Syarqawi*, Indonesia: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t. th.
- Zakaria bin Muhammad al-Anshari, *Tuhfah al-Thullab/Syarh al-Tahrir* pada *Hasyiyah al-Syarqawi*, Mesir: Dar al-Kutub al-Arabiyah al-Kubra, t. th.
- Zakaria bin Muhammad al-Anshari, Tuhfah al-Thullab bi Syarh al-Tahrir, Surabaya: al-Hidayah, t. th.
- Zakaria bin Muhammad al-Anshari, *Tuhfah al-Thullab*, Mesir: Mushtafa al-Halabi, 1340 H.[]

Pengantar Rais 'Am PBNU DR. KH. MA. Sahal Mahfudh



SOLUSI

Problematika Aktual Hukum Islam

Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes

Nahdlatul Ulama

(1926 - 2010 M)

Perpustakaan Pusat UIN Maliki Malang

